

Building National Pride Through The Development of Airport Infrastructure

Membangun Kebanggaan Bangsa
Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara

Laporan Tahunan 2016 Annual Report


Angkasa Pura | AIRPORTS

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)



Building National Pride Through The Development of Airport Infrastructure

Membangun Kebanggaan Bangsa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara

PT Angkasa Pura I (Persero) sangat menyadari perannya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada perekonomian nasional. Untuk memantapkan pencapaian visi **“Menjadi Satu dari Sepuluh Perusahaan Pengelola Bandara Terbaik di Asia,”** Perseroan melakukan perubahan paradigma bisnis, dari sekadar *infrastructure provider* menjadi *service company* yang berorientasi kepada peningkatan kualitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara dengan menggunakan model *Smart Airport*. PT Angkasa Pura I (Persero) akan meningkatkan peran bandara sebagai akselerasi penciptaan daya saing dan strategi ekonomi domestik (*Center of Regional Development*) yang mendukung pengembangan *‘catchment area’* sesuai dengan **Konsep Integrasi Tol, Laut, dan Konektivitas Udara**.

Oleh karena itu, Perseroan telah mengambil inisiatif strategik yaitu “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara.” Peningkatan kualitas layanan dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur bandara tersebut antara lain diwujudkan melalui penggantian dan penambahan peralatan keselamatan dan keamanan, aplikasi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara serta pelaksanaan pengembangan dan pembangunan bandara untuk menambah kapasitas, yaitu pengembangan Bandara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarmasin, pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang, dan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Untuk itu, Perseroan akan terus meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan dan pembangunan bandara-bandara tersebut dapat terlaksana dengan baik.

PT Angkasa Pura I (Persero) is well aware of its role as one of regional growth forces which later will affect the national economy. To stabilize the achievement of the vision **“To Become One of the Top Ten Airport Operators in Asia,”** the Company restructures the business paradigm from a mere *infrastructure provider* to a *service company* orienting towards the improvement of airport users’ safety, security and convenience by using *Smart Airport model*. PT Angkasa Pura I (Persero) will enhance the airport roles as acceleration of competitiveness creation and Center of Regional Development that support the development of *‘catchment area’* in accordance with the Concept of Highway, Sea and Air Connectivity Integration.

Because of that, the Company has made a strategic initiative that is “Acceleration of the Airport Infrastructure Development.” Improving the service quality by accelerating the airport infrastructure development can be realized through replacement and addition of safety and security tools, application of information technology to improve the service to the airport users, and implementation of airport development to increase the capacity, which is the development of Syamsuddin Noor International Airport in Banjarmasin, Ahmad Yani International Airport in Semarang and Yogyakarta International Airport in Kulon Progo. Therefore, the Company will keep improving the synergy and cooperation with the Central and Regional Government and other stakeholders, so that the development of those airports can run well.

Kesinambungan Tema

Theme Correlations



2016

Building National Pride Through The Development of Airport Infrastructure

Membangun Kebanggaan Bangsa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara

PT Angkasa Pura I (Persero) sangat menyadari perannya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada perekonomian nasional. Untuk memantapkan pencapaian visi **“Menjadi Satu dari Sepuluh Perusahaan Pengelola Bandara Terbaik di Asia,”** Perseroan melakukan perubahan paradigma bisnis, dari sekadar *infrastructure provider* menjadi *service company* yang berorientasi kepada peningkatan kualitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara dengan menggunakan model *Smart Airport*. PT Angkasa Pura I (Persero) akan meningkatkan peran bandara sebagai akselerasi penciptaan daya saing dan strategi ekonomi domestik (*Center of Regional Development*) yang mendukung pengembangan *‘catchment area’* sesuai dengan **Konsep Integrasi Tol, Laut, dan Konektivitas Udara**.

Oleh karena itu, Perseroan telah mengambil inisiatif strategik yaitu **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara.”** Peningkatan kualitas layanan dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur bandara tersebut antara lain diwujudkan melalui penggantian dan penambahan peralatan keselamatan dan keamanan, aplikasi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara serta pelaksanaan pengembangan dan pembangunan bandara untuk menambah kapasitas, yaitu pengembangan Bandara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarmasin, pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang, dan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Untuk itu, Perseroan akan terus meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan dan pembangunan bandara-bandara tersebut dapat terlaksana dengan baik.

PT Angkasa Pura I (Persero) is well aware of its role as one of regional growth forces which later will affect the national economy. To stabilize the achievement of the vision **“To Become One of the Top Ten Airport Operators in Asia,”** the Company restructures the business paradigm from a mere *infrastructure provider* to a *service company* orienting towards the improvement of airport users’ safety, security and convenience by using *Smart Airport model*. PT Angkasa Pura I (Persero) will enhance the airport roles as acceleration of competitiveness creation and Center of Regional Development that support the development of *‘catchment area’* in accordance with the Concept of Highway, Sea and Air Connectivity Integration.

Because of that, the Company has made a strategic initiative that is **“Acceleration of the Airport Infrastructure Development.”** Improving the service quality by accelerating the airport infrastructure development can be realized through replacement and addition of safety and security tools, application of information technology to improve the service to the airport users, and implementation of airport development to increase the capacity, which is the development of Syamsuddin Noor International Airport in Banjarmasin, Ahmad Yani International Airport in Semarang and Yogyakarta International Airport in Kulon Progo. Therefore, the Company will keep improving the synergy and cooperation with the Central and Regional Government and other stakeholders, so that the development of those airports can run well.

2015

Pengembangan Perusahaan Pengelola Bandar Udara Berkinerja Tinggi

Development on High Performance Airport Operator Corporation

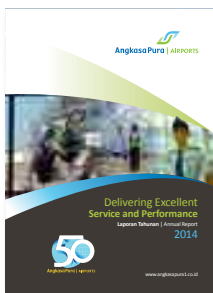


Sesuai dengan *road map* Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018, ditetapkan bahwa target utama Perseroan di 2015 adalah “Pengembangan Perusahaan Bandar Udara Berkinerja Tinggi”. Sejalan dengan hal tersebut maka Perseroan telah menerapkan *strategic action* diantaranya adalah menyempurnakan penerapan *service* dan *operation excellence*, mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi biaya, mengoptimalkan seluruh potensi sinergi secara internal dan eksternal, dan mempercepat dan memperbesar penciptaan nilai dari kemitraan strategis. Strategi-strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja Perseroan di 2015.

Perseroan mampu mendapatkan nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI) sebesar 4,27, lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 4,05 yang merupakan standar *Airport Council International* (ACI). Realisasi pelaksanaan kinerja operasional tahun 2015 dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pengguna jasa, secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar. Realisasi total pendapatan berada di atas target, sedangkan dari sisi total beban berada di bawah yang direncanakan. Dengan demikian, Perseroan telah mampu merealisasikan total laba di tahun 2015 setelah pajak berada di atas yang di targetkan.

In accordance with the road map for the Company's Long Term Plan (RJPP) from 2015 to 2018, it was determined that the main target of the Company in 2015 was “Development on High Performance Airport Corporation”. In line with it the Company has implemented the strategic actions including excelling the implementation of service and operation excellence, optimizing the effectiveness and cost efficiency, optimizing the entire potential synergies both internally and externally, and accelerating and improving the value creation of the strategic partnerships. Those strategies were proven to be able to enhance the Company's performance in 2015.

The Company was able to get the *Customer Satisfaction Index* (CSI) score of 4.27, higher than the target of 4.05 which is the standard of *Airport Council International* (ACI). In general, the realization of the operational performance in 2015 in order to meet the users' needs and satisfaction could be done smoothly. The realization of the total income was above the target, while the total cost was below the target. Thus, the Company has been able to realize that the total net profit after tax in 2015 was above the targeted profit.

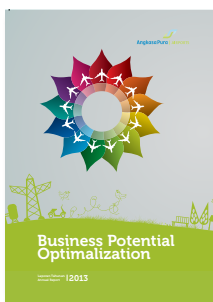


2014

Delivering Excellent Service and Performance

2014 menjadi tahun pembuktian program transformasi bisnis Perseroan, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas, penyempurnaan fasilitas, dan perbaikan pelayanan sebagai upaya mengkreasikan pengalaman baru di bandara.

The year of 2014 was a year of evidence on the Company business transformation program through capacity development, facility improvement, and service enhancement to create a new airport experience.



2013

Business Potential Optimization

Perubahan bisnis kebandarudaraan di Indonesia memberikan dampak signifikan bagi Perseroan. Peningkatan porsi pendapatan dari sektor non-aeronautika pun dilakukan.

The changes of airport business in Indonesia have made a significant impact for the Company. The increase in revenue share from non-aeronautics sector was also been optimized.



2012

Strengthening Business Pillars

Perseroan memiliki lima pilar utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan bandar udara di dunia. Lima pilar tersebut diimplementasikan melalui proses pemahaman bisnis yang baik, pembentukan anak perusahaan, pengembangan *soft competence* SDM, serta menjalin kerjasama dengan pengelola bandara terbaik di dunia.

The Company has five main pillars as the benchmark of success for airports in the world. The five pillars were implemented by following the processes of good business comprehension, establishment of new subsidiaries, enhancing the soft competence of employees, and building good relationships with the best airport operators all over the world.

Pencapaian Penting

Important Achievement



- Jumlah Aset tumbuh sebesar 41,53%.
The total of asset growth was 41.53%.
- Pendapatan Aeronautika (Kebandaraan) tumbuh sebesar 14,34%.
Aeronautics income growth was 14.34%.
- Pendapatan Non Aeronautika (Non Bandara) tumbuh sebesar 27,51%.
Non Aeronautics income was 27.51%.
- Laba Bersih tahun berjalan tumbuh 37,72%.
Operating income growth was 37.72%.
- Laba Komprehensif Tahun Berjalan tumbuh 57,43%.
Operating Comprehensive Income growth was 57.43%.
- Majalah Angkasa Pura meraih "Silver Winner The Best State-Owned Enterprise Inhouse Magazine - Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2016".
Angkasa Pura Magazine achieved "Silver Winner The Best State-Owned Enterprise Inhouse Magazine - Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2016".
- Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mendapat penghargaan "Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
I Gusti Ngurah Rai Airport in Bali achieved an appreciation of "Top 35 Public Services Innovations 2016" from Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.

- PT Angkasa Pura I (Persero) meraih Juara III *Annual Report Award (ARA) 2015* Kategori BUMN Non Keuangan *Non Listed*
 PT Angkasa Pura I (Persero) became the third winner of Annual Report Award (ARA) 2015 for Non Listed Non Financial State Own Enterprises
- *The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2016* yang diraih oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
 The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2016 yang diraih oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
- *The 3rd World Best Airport 2015* dan *The 3rd World Best Airport 2016* kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang per tahun versi *Airport Service Quality (ASQ) Award* yang diselenggarakan oleh Airport Council International (ACI) yang diraih dan dipertahankan selama dua tahun berturut-turut oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
 The 3rd World Best Airport 2015 dan The 3rd World Best Airport 2016 kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang per tahun versi Airport Service Quality (ASQ) Award yang diselenggarakan oleh Airport Council International (ACI) yang diraih dan dipertahankan selama dua tahun berturut-turut oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
- *The Most Punctual Airport 2016* (Bandara Paling Tepat Waktu di Dunia) versi OAG Punctuality League 2016 kategori bandara besar dari lembaga analisis perjalanan udara asal Inggris OAG, yang diraih oleh Bandara Juanda Surabaya;
The Most Punctual Airport 2016 (Bandara Paling Tepat Waktu di Dunia) versi OAG Punctuality League 2016 kategori bandara besar dari lembaga analisis perjalanan udara asal Inggris OAG, yang diraih oleh Bandara Juanda Surabaya;
- *The Best of The Best Airport of The Year 2016* versi Bandara Award yang diraih oleh Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan
 The Best of The Best Airport of The Year 2016 versi Bandara Award yang diraih oleh Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan
- Bandara Adi Soemarmo Surakarta mendapat Peringkat I Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016
 Adi Soemarmo Airport Surakarta was ranked number I for Healthy Airport Appreciation in National Level in 2016
- PT Angkasa Pura I (Persero) mendapatkan Top IT and TELCO 2016 untuk kategori "*Top IT Implementation on Airport Sector*"
 PT Angkasa Pura I (Persero) got the Top IT and TELCO 2016 for "Top IT Implementation on Airport Sector" category.
- Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan meraih predikat Bandara Terbaik Indonesia 2016 – versi Majalah Bandara.
 SAMS Airport in Sepinggan Balikpapan achieved a predicate as the Best Airport in Indonesia 2016 – Majalah Bandara version
- PT Angkasa Pura I (Persero) got *Corporate Social Responsibility Award 2016* Appreciation from Koran Sindo and Sindo Weekly
 PT Angkasa Pura I (Persero) got Corporate Social Responsibility Award 2016 Appreciation from Koran Sindo and Sindo Weekly
- Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta mendapat Apresiasi *Corporate Social Responsibility Award 2016* dari Koran Sindo dan Sindo Weekly.
 Adi Sutjipto Yogyakarta Airport got Corporate Social Responsibility Award 2016 Appreciation from Koran Sindo and Sindo Weekly.

Jejak Langkah

Milestones

15 November / 15 November

Pemerintah RI mengeluarkan PP No.33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran, yang ditandatangani oleh Pejabat Presiden RI Ir. Djuanda. Tugas pokoknya adalah pengelolaan dan pengusahaan Bandar Udara Kemayoran Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan keluar negeri selain penerbangan domestik.

Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No.33 of 1962 concerning the Establishment of State Corporation (PN) which was signed by Acting President of Indonesia Ir. Djuanda. The main duties of the company were to manage and operate the Kemayoran Airport which at the time was the only international airport serving inbound and outbound travel both overseas except domestic flights.

17 Mei / 17 May

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura "Kemayoran" berubah nama menjadi PN Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia.

Based on Government Regulation No. 21 of 1965 on the Amendment and Supplement to Regulation No. 33 of 1962, PN Angkasa Pura "Kemayoran" changed its name to PN Angkasa Pura with a view to further open up the possibility of managing other airports in Indonesia.

19 Mei / 19 May

Wilayah pengelolaan bandar udara komersial di Indonesia dibagi dua, seiring dengan perubahan Perum Angkasa Pura menjadi Perum Angkasa Pura I dan dibentuknya Perum Angkasa Pura II. Perum Angkasa Pura I mengelola bandara di wilayah timur Indonesia, sedangkan Perum Angkasa Pura II mengelola bandara di wilayah barat Indonesia.

The area of commercial airport management in Indonesia was divided into two areas, marked by the change of Perum Angkasa Pura into Perum Angkasa Pura I and the establishment of Perum Angkasa Pura II. Perum Angkasa Pura I manages airports in the eastern part of Indonesia, while Perum Angkasa Pura II manages airports in the western part of Indonesia.

1962 — 1964 — 1965 — 1974 — 1987

20 Februari / 20 February

Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung mulai tanggal 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Bandara Internasional Kemayoran, Jakarta dari Kementerian Perhubungan Udara. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Perseroan.

After undergoing a two-year transitional period, since 20 February 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran officially took over all the assets and operations of Kemayoran International Airport, Jakarta from the Ministry of Air Transportation. This date was then designated as the anniversary of Company.

24 Oktober / 24 October

Status badan hukum PN Angkasa Pura berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum), berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1974.

Status of Legal entity of PN Angkasa Pura transformed into a Public Company (Perum), under Regulation No.37 of 1974.

1992 — 2008 — 2011 — 2012

22 September / 22 September

Peresmian Bandara Sultan Hasanuddin oleh Presiden RI.

Official Opening of Sultan Hasanuddin Airport by the President of the Republic of Indonesia.

6 Januari / 6 January

Pembentukan beberapa Entitas Anak, yaitu Angkasa Pura Hotel, Angkasa Pura Properti dan Angkasa Pura Logistik.

Establishment of Subsidiaries, including Angkasa Pura Hotel, Angkasa Pura Properti and Angkasa Pura Logistik.

9 Februari / 9 February

Pembentukan Entitas Anak Angkasa Pura Suport.

Establishment of subsidiary, Angkasa Pura Suport.

20 Februari / 20 February

Peluncuran identitas perusahaan (*corporate identity*) berupa visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan baru. Turut pula di-launching hymne dan mars serta seragam baru perusahaan.

Launching of corporate identity in the form of new company vision, mission, and values. The Company's hymn, and march as well as new uniform were also launched.

4 Februari / 4 February

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero).

Pursuant to the Government Regulation No. 5 of 1992, the status of Angkasa Pura I was changed from a Public Company (Perum) to a Limited Liability Company (PT), whose shares are wholly owned by the State of Republic Indonesia, and bearing the name of PT Angkasa Pura I (Persero).

20 Oktober / 20 October

Peresmian Bandara Internasional Lombok (BIL) oleh Presiden RI.

Official Opening of Lombok International Airport (BIL) by the President of the Republic of Indonesia.

1 Desember / 1 December

Ground breaking proyek pembangunan Terminal 2 (T2) Bandara Juanda, Surabaya.

Ground breaking of Terminal 2 (T2) constructing project at Juanda Airport, Surabaya.

30 Desember / 30 December

Logo baru PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai salah satu identitas perusahaan (*corporate identity*) resmi diluncurkan.

The new logo of PT Angkasa Pura I (Persero) airports as one of the corporate identities was officially launched.

2 Januari / 2 January

Implementasi Tahap Pertama Proyek *Enterprise Resource Planning* (ERP).
Implementation of the First Phase of Project Enterprise Resource Planning (ERP).

4 Januari / 4 January

Pendirian *SBU Commercial* Ngurah Rai sesuai dengan Keputusan Direksi No.KEP.02/ OM.01.01/2013.
Establishment of Ngurah Rai Commercial SBU pursuant to the Decision of the Board of Directors No.KEP.02/ OM.01.01/2013.

6 Januari / 6 January

Pengalihan tugas pengelolaan kenavigasian ke Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum-LPPNPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012.
Re-assignment of navigation management to the Indonesian Air Navigation Service (Perum-LPPNPI) pursuant to the Government Regulation No. 77 of 2012.

12 September / 12 September

Pengoperasian terminal internasional baru Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
Operation of the new terminal at I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali.

2013 — 2014

14 Februari / 14 February

Pengoperasian Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya.
Operation of terminal 2 at Juanda International Airport, Surabaya.

22 Maret / 22 March

Pengoperasian Terminal Baru Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan.
Operation of the new terminal at Sepinggan International Airport, Balikpapan.

17 Juni / 17 June

Groundbreaking Proyek Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.
Groundbreaking for the development of Ahmad Yani International Airport, Semarang.

15 September / 15 September

Peresmian Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya oleh Presiden RI.
Official Opening of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport, Balikpapan and Terminal 2 at Juanda International Airport, Surabaya by the President of the Republic of Indonesia.

17 September / 17 September

Pengoperasian terminal domestik baru Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
Operation of new domestic terminal at I Gusti Ngurah Rai International Airport, Bali.

19 Desember / 19 December

Peresmian Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali oleh Menteri Perhubungan RI.
Official opening of I Gusti Ngurah Rai International Airport, Bali by the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia.

18 Mei / 18 May

Groundbreaking Proyek Pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Groundbreaking of constructing project at Syamsudin Noor International Airport, Banjarmasin.

17 Agustus / 17 August

Pengoperasian Terminal B Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

Operation of Terminal B at Adisutjipto International Airport, Yogyakarta.

13 Desember / 13 December

Pengoperasian Terminal Khusus Umroh Bandara Juanda Surabaya.

Operation of Special Terminal for Umroh at Juanda International Airport, Surabaya.

2015

2016

23 November / 23 Nopember

Penerbitan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016.

Issuance of Bonds I Angkasa Pura I Year 2016 and Sharia-compliant Bonds I Angkasa Pura I 2016.

Keunggulan Kami

Our Superiorities

1

Perusahaan Pelopor Pengelolaan Bandar Udara Secara Komersial di Indonesia

Pioneer Company in Commercial Airport Management in Indonesia





PT Angkasa Pura I (Persero) lahir sejak 20 Februari 1964 silam, dengan amanat langsung dari pendiri bangsa untuk mengelola dan mengembangkan bandar udara di Indonesia agar setara dengan bandara di negara-negara maju. Berbagai langkah inovasi yang telah Perseroan laksanakan demi mewujudkan visi sebagai pengelola bandara kelas dunia mulai menampilkan hasil yang positif dan menggembirakan. Hal itu setidaknya terlihat dari beberapa pencapaian yang telah diraih bandara-bandara yang dikelola Perseroan, antara lain:

1. *The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2015* versi *Airport Service Quality (ASQ) Award* yang diselenggarakan oleh Airport Council International (ACI) yang diraih oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali serta *The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2016* yang diraih oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;
2. *The 3rd World Best Airport 2015 dan The 3rd World Best Airport 2016* kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang per tahun versi *Airport Service Quality (ASQ) Award* yang diselenggarakan oleh Airport Council International (ACI) yang diraih dan dipertahankan selama dua tahun berturut-turut oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
3. *The Most Punctual Airport 2016* (Bandara Paling Tepat Waktu di Dunia) versi OAG Punctuality League 2016 kategori bandara besar dari lembaga analisis perjalanan udara asal Inggris OAG, yang diraih oleh Bandara Juanda Surabaya;
4. *The Best of The Best Airport of The Year 2016* versi *Bandara Award* yang diraih oleh Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Selain itu, 10 dari 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil mendapatkan penghargaan "Anugerah Pelayanan Prima 2016" dari Kementerian Perhubungan RI, 4 diantaranya meraih predikat Prima Utama, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Sam Ratulangi Manado. Juga Penghargaan "Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang diraih oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, serta Juara I Penghargaan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional 2016 dari Kementerian Kesehatan RI yang diraih oleh Bandara Adi Soemarmo Surakarta.

PT Angkasa Pura I (Persero) established in February 20, 1964 on direct mandate from the nation's founders to manage and develop Indonesian airports to equal airports of developed countries. Innovational steps the company took to manifest the vision to manage world class airport starting to shows positive and encouraging result. It is at least shown in several achievements attained by the company's managed airports, such as:

1. The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2015 of Airport Service Quality (ASQ) Award conducted by Airport Council International (ACI), achieved by I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali and The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2016 achieved by Sultan Hasanuddin Airport, Makassar;
2. The 3rd World Best Airport 2015 and The 3rd World Best Airport 2016 airport with 15-25 million passengers per year of Airport Service Quality (ASQ) Award conducted by Airport Council International (ACI) attained and upheld for two consecutive years by I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali.
3. The Most Punctual Airport 2016 of OAG Punctuality League 2016, big airport category, from a British air travel analysis organization OAG, achieved by Juanda Airport, Surabaya;
4. The Best of The Best Airport of The Year 2016 of Bandara Award achieved by Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport, Balikpapan.

In addition, 10 of 13 airports maintained by PT Angkasa Pura I (Persero) attained the "Anugerah Pelayanan Prima 2016" from Indonesian Ministry of Transportation, 4 of which predicated *Prima Utama*, I Gusti Ngurah Rai Airport Bali, Juanda Airport Surabaya, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport Balikpapan, and Sam Ratulangi Airport Manado. Also "Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016" award from the Ministry of Efficient Utilization of State Apparatus attained by I Gusti Ngurah Rai Airport Bali, as well as *Juara I Penghargaan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional 2016* from the Ministry of Health attained by Adi Soemarmo Airport, Surakarta.

2

Pengelola Bandara-Bandara Utama yang Berada di Pusat Bisnis dan Pariwisata Indonesia

Management of Main Airports on Indonesia's Central Business and Tourism



Saat ini, Perseroan mengelola bandara-bandara:

1. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali
2. Bandar Udara Juanda – Surabaya
3. Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar
4. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan
5. Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak
6. Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado
7. Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin
8. Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang
9. Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta
10. Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta
11. Bandar Udara Internasional Lombok - Lombok Tengah
12. Bandar Udara Pattimura – Ambon
13. Bandar Udara El Tari – Kupang

Bandar udara yang dikelola oleh Perseroan memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di pusat bisnis (Surabaya, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, dan Semarang) dan juga kawasan pariwisata unggulan Indonesia (Bali, Biak, Manado, Yogyakarta, Surakarta, Lombok, Ambon dan Kupang).

Currently, the company manages the following airports:

1. I Gusti Ngurah Rai Airport – Bali
2. Juanda Airport – Surabaya
3. Sultan Hasanuddin Airport – Makassar
4. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport – Balikpapan
5. Frans Kaisiepo Airport – Biak
6. Sam Ratulangi Airport – Manado
7. Syamsudin Noor Airport- Banjarmasin
8. Ahmad Yani Airport – Semarang
9. Adisutjipto Airport – Yogyakarta
10. Adi Soemarmo Airport – Surakarta
11. Lombok International Airport - Central Lombok
12. Pattimura Airport – Ambon
13. El Tari Airport – Kupang

The Company's managed airports have strategic locations, situated in central business areas (Surabaya, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, and Semarang) as well as prime tourism destinations (Bali, Biak, Manado, Yogyakarta, Surakarta, Lombok, Ambon and Kupang) of Indonesia.

3

Komitmen Yang Tinggi dalam Penerapan *Information and Communication Technology* Kelas Dunia

High Commitment in the Implementation of World Class Information and Communication Technology



PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan *world class information and communication technology* (ICT). Hal ini diwujudkan dengan perumusan strategi teknologi informasi yang meliputi *operation excellence*, *revenue safeguarding*, penguatan fondasi ERP, dan penguatan fondasi ICT. Strategi *operation excellence* merupakan strategi penguatan Teknologi Komunikasi untuk mendukung berjalannya proses bisnis perusahaan yang handal. Hal ini dilakukan dengan implementasi *Airport Operation Control System* (AOCS) di seluruh bandar udara, pengintegrasian *Human Capital Information System* (HCIS) dan implementasi *Document Management System* (DMS).

Strategi *revenue safeguarding* adalah pencapaian teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung *revenue safeguarding*. Hal ini diwujudkan dengan pemanfaatan ICT yang berhubungan dengan jasa layanan yang antara lain meliputi *Passenger service charge on Ticket System* (POTS) dan *parking system*. Strategi penguatan fondasi ERP dilakukan dengan mengintegrasikan sistem keuangan antara Entitas Anak dengan Induk untuk menghasilkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang Akurat dan Tepat Waktu, pengembangan SAP (BPC dan *Enterprise Asset Management*), dan integrasi *Legacy Application* dengan ERP Platform menggunakan *service-bus*. Untuk strategi penguatan fondasi ICT dicapai dengan standardisasi infrastruktur ICT (LAN, WAN, *Communication*, *Wifi*, dan *Server*), *ICT Governance*, dan pemenuhan kebutuhan SDM terkait sertifikasi, *training*, dan jumlah).

Komitmen Perseroan dalam mewujudkan implementasi *world class ICT* telah diakui oleh pihak eksternal. Pada tahun 2016, Perseroan mendapatkan penghargaan *Top IT Implementation on Airport Sector* dalam event *Top IT and TELCO 2016* oleh Majalah *Itech*.

PT Angkasa Pura I (Persero) holds high commitment in the implementation of world class information and communication technology (ICT). It is carried out by information technology strategy development, covering operation excellence, revenue safeguarding, strengthening ERP foundation, and strengthening ICT foundation. Operation excellence strategy is an information technology strengthening strategy to support reliable corporate business process. This is conducted through the implementation of Airport Operation Control System (AOCS) throughout the airports, integration of Human Capital Information System (HCIS) and Document Management System (DMS) implementation.

Revenue safeguarding strategy is the accomplishment of information and communication technology to support revenue safeguarding. It is carried out by ICT utilization related to services, such as Passenger service charge on Ticket System (POTS) and parking system. Strategy to strengthen ERP foundation is carried out by financial system integration between Subsidiary Entity with Parent Entity to generate Accurate and Timely Consolidation Financial Result, SAP development (BPC and Enterprise Asset Management), and Legacy Application integration with ERP Platform using new service-bus. Strategy to strengthen ICT foundation is accomplished by ICT infrastructure standardization (LAN, WAN, Communication, Wi-Fi, and Server), ICT Governance, as well as fulfillment of human capital needs related with certification, training, and amounts).

Company's commitment for the realization of world class ICT implementation has been acknowledge by external parties. In 2016, the Company received Top IT Implementation on Airport Sector award in Top IT and TELCO event by *Itech Magazine*.

4

Komitmen Yang Tinggi dalam Implementasi *Safety, Security, and Service through Compliance (3S1C)*

High Commitment in the Implementation of Safety, Security, and Service Through Compliance (3S1C)



Sebagai perusahaan pengelola kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I (Persero) sangat berkomitmen untuk menjamin diterapkannya *Safety, Security, and Service through Compliance (3S1C)*. Sasaran dari program tersebut adalah terselenggaranya pelayanan yang andal dengan mengutamakan faktor selamat, kenyamanan dan kelancaran. Program ini menitikberatkan upaya menciptakan kepatuhan pelayanan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perseroan telah menerapkan program tersebut mulai dari pintu gerbang, tempat parkir, dan tempat umum yang ada di bandara.

Implementasi 3S1C melibatkan beberapa bagian dalam manajemen Perseroan. Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian dalam implementasi 3S1C dijelaskan sebagai berikut:

Risk Management and Corporate Planning

Memastikan proses bisnis Perseroan berlangsung dengan tingkat risiko yang dapat diterima melalui proses *risk management* dan memastikan tersedianya rumusan *corporate strategic plan* melalui analisis dan kajian bisnis, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi kinerja Perseroan guna mendukung tercapainya sasaran Perseroan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

As an airport management company, PT Angkasa Pura I (Persero) is highly committed to ensure the implementation of *Safety, Security and Service through Compliance (3S1C)*. The target of the program is the implementation of reliable services that prioritized on safety, comfortability and smoothness factors. This program emphasize on the effort to create service compliance according to the respective rights and obligations. The Company enforces the program starting from the gate, parking area and public places on airport.

The implementation of 3S1C involving several portion of the Company's internal management. Rights and obligations of each of the 3S1C implementation described as follows:

Risk Management and Corporate Planning

Ensures the streamline of the Company's Business is performed with acceptable risk level through risk management process and ensures the availability of corporate strategic plan formulation through analysis and business review, monitoring and the Company's performance. It aims to support the achievement of Company's objectives pursuant to the Company's Work Plan and Budget.

Airport Planning Group

Memastikan tersedianya *airport statistics*, *airport master plan* dan *environment* melalui analisa dan kajian bisnis guna mendukung tercapainya strategi Perseroan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator.

Airport Security Group

Memastikan pelayanan bidang *airport security* yang efektif melalui peningkatan kualitas dan kehandalan sumber daya manusia guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)* seluruh bandar udara sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional.

Airport Service Group

Memastikan pelayanan bidang *airport services* yang efektif melalui peningkatan kualitas dan kehandalan sumber daya manusia guna mendukung peningkatan bidang pelayanan dan jaminan kualitas, serta tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)* seluruh bandar udara sesuai dengan standar aturan nasional dan internasional.

Airport Safety Group

Memastikan terjaganya pencapaian *safety level* dan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kegiatan *safety management system*, *occupational safety health* serta *quality management* yang efektif guna mendukung pencapaian *Customer Satisfaction Index (CSI)*.

Airport Facilities Readiness Group

Memastikan seluruh fasilitas bandar udara meliputi sisi udara (*air side*), sisi darat (*land side*), *landscape* dan *terminal building* yang dikelola Perseroan siap untuk digunakan guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)*.

Airport Equipment Readiness

Memastikan tersedianya kesiapan operasional seluruh peralatan (*equipment*) bandar udara yang dikelola Perseroan dan dukungan implementasi guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index (CSI)*

Airport planning group

Ensures the availability of airport statistics, airport master plan, and environment through analysis. It aims to support the achievement of Company's strategy in accordance with policy and regulation specified by the regulator.

Airport Security Group

Ensures the effective service in airport security field through HR quality and reliability improvement. It aims to support the achievement of Customer Satisfaction Index (CSI) of all airports in accordance with national and international standards.

Airport Service Group

Ensures effective airport services through HR quality and reliability improvement. It aims to support the services and quality assurance sector, as well as the achievement of Customer Satisfaction Index (CSI) of all airports in accordance with national and international standards.

Airport Safety Group

Ensures the sustainability of safety level and services quality achievement through effective safety management system, occupational safety and health, and quality management activities. It aims to support the achievement of Customer Satisfaction Index (CSI).

Airport Facilities Readiness Group

Ensures the readiness of all airports' facilities covering air and land side, landscape, and terminal building managed by the Company. It aims to support the achievement of Customer Satisfaction Index (CSI).

Airport Equipment Readiness

Ensures the availability of operational readiness of all airports' equipment managed by the Company. It also provides implementation support to achieve Customer Satisfaction Index (CSI).

Kilas Kinerja 2016

Performance Review 2016

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Significant Financial Data Highlights

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam % / In million Rupiah, unless stated in %)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012	Description
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION						
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4,896,215	1,746,273	1,352,260	579,829	2,471,663	Cash and cash equivalent
Investasi Jangka Pendek	295,241	216,447	370,094	329,434	306,715	Short-term investment
Piutang usaha	482,770	571,171	518,165	357,663	173,181	Trade receivables
Piutang lain-lain	12,445	128,562	71,311	910	13,049	Other receivables
Persediaan	40,617	36,359	15,103	8,466	12,454	Supplies
Uang muka dan beban dibayar di muka	63,696	23,978	16,961	10,286	10,509	Prepaid expenses
Pendapatan yang masih harus diterima	201,227	208,419	50,739	103,970	153,159	Accrued income
Pajak dibayar dimuka	82,242	150,836	236,848	354,284	53,236	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	10,249	8,076	4,681	4,437	6,787	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	6,084,701	3,090,122	2,636,162	1,749,278	3,200,752	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset Pajak Tangguhan	302	1,413	-	-	29,409	Deferred Tax Assets
Piutang Jangka Panjang	700	-	45,271	70,678	70,678	Long Term Receivables
Bagian jangka panjang dari uang muka dan beban dibayar di muka						Long-term prepaid expenses
Investasi Jangka Panjang	78,217	129,660	135,759	286,258	451,663	Long-term Investment
Properti Investasi	200,785	149,845	160,596	162,003	100,503	Investment Property
Aset Tetap	17,155,509	13,304,090	12,830,393	10,695,309	8,167,828	Fixed Assets
Aset tidak berwujud	44,244	45,373	18,595	13,558	-	Intangible Assets
Aset tidak lancar lainnya	6,358	1,835	120	575	556	Other non-current assets
Aset Lain-Lain		1,490,586	1,640,923	3,259,417	2,020,071	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	17,582,245	13,632,216	13,190,731	11,228,381	8,820,635	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	23,666,946	16,722,337	15,826,893	12,977,658	12,021,387	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITY AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						SHORT-TERM LIABILITY
Biaya yang masih harus dibayar	879,355	599,103	425,495	284,554	322,858	Accrued expenses
Utang Usaha	1,491,610	682,672	1,328,274	916,479	1,135,254	Trade Payables
Utang Non Usaha	16,626	53,771	141,257	136,163	-	Non-trade Payables
Pendapatan diterima dimuka	87,481	88,640	127,647	96,352	90,720	Accrued revenue
Utang pajak	138,441	169,635	222,045	195,356	124,302	Tax Payables
Utang Bank	749,480	590,159	47,557	13,152	1,103	Bank Payables

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam % / In million Rupiah, unless stated in %)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012	Description
Utang sewa guna usaha	3,671	2,611	2,610	-	-	Lease payable
Utang lancar lainnya	505,126	518,323	420,586	438,548	160,094	Other current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3,871,792	2,704,914	2,715,472	2,080,604	1,833,227	Total Short-term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						LONG-TERM LIABILITY
Utang Bank	4,304,115	2,474,585	2,129,193	882,993	2,385	Bank Payables
Utang jaminan	49,448	37,081	51,490	26,573	20,417	Warranties payables
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	2,991,310	-	-	-	-	Bond and Sukuk Ijarah Payables
Utang sewa guna usaha	4,617	8,651	11,262	-	-	Lease payable
Utang jangka panjang lainnya	118,188	121,216	126,287	131,345	-	Other long-term payables
Liabilitas imbalan paska kerja	329,980	346,841	240,621	319,581	592,168	Employee benefits liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	41,314	7,198	-	Deferred tax liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7,797,657	2,988,373	2,600,167	1,367,690	614,970	Total Long-term Liabilities
TOTAL LIABILITAS	11,669,449	5,693,287	5,315,639	3,448,294	2,448,197	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS	11,997,497	11,029,050	10,511,254	9,529,364	9,573,190	EQUITY
Modal Saham	6,414,412	6,414,412	3,488,245	3,488,245	3,188,245	Share Capital
Setoran Modal Lainnya :						Other Capital Deposit :
Penyertaan Modal Negara	255,097	-	2,926,166	-	-	State Capital Investment
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya (BPYBDS)	-	255,097	255,097	2,960,796	3,540,729	Government contribution pending determination in status (BPYBDS)
Pengalihan aset tetap kenavigasian:						Navigation fixed assets transfer:
Nilai buku aset tetap kenavigasian	(269,138)	(269,138)	(269,138)	(270,832)	-	Book value of navigation fixed assets
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari BPYBDS	408,393	408,393	408,393	408,394	-	Accumulated depreciation of navigation assets of BPYBDS
Penghasilan komprehensif lain:						Other comprehensive income :
Laba yang belum direalisasi atas efek	40,144	24,016	44,832	6,758	61,181	Unrealized gain on securities
Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja	(93,019)	(54,229)	44,732	34,481	-	Gains (losses) on employee benefits actuarial
Saldo laba:						Retained earnings
Dicadangkan	4,080,412	3,407,178	2,617,336	2,225,950	2,119,792	Appropriated
Laba tahun berjalan	1,158,800	841,543	994,136	674,308	662,243	Un Appropriated
Kepentingan non pengendali	2.395.	1.778	1,455	1,264	1,000	Non-controlling interest
Jumlah ekuitas	11,997,497	11,029,049	10,511,254	9,529,364	9,573,190	Total equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,666,946	16,722.337	15,826.893	12,977.658	12,021.387	TOTAL LIABILITY AND EQUITY

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam % / In million Rupiah, unless stated in %)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012	Description
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME						
PENDAPATAN OPERASIONAL						OPERATING INCOME
Aeronautika	3,612,288	3,155,237	2,781,704	2,065,469	2,324,031	Aeronautics
Non Aeronautika	2,525,984	2,094,393	1,801,832	998,437	769,505	Non-Aeronautics
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL	6,138,272	5,249,630	4,583,536	3,063,906	3,093,536	TOTAL OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL	4,488,862	3,955,670	3,318,717	2,341,289	2,325,945	OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL	1,649,409	1,293,960	1,264,819	722,617	767,591	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(14,557)	(211,217)	1,968	126,445	38,734	NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	1,508,853	1,082,742	1,266,787	849,062	806,326	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN	349,276	240,769	272,344	174,375	144,083	INCOME TAX
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1,159,577	841,973	994,443	674,688	662,243	NET INCOME OF THE CURRENT YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Laba (Rugi) belum terealisasi investasi efek	16,128	(20,816)	38,074	(54,424)	56,163	Unrealized gain (loss) on securities investment
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan paska kerja	(38,790)	(98,962)	10,251	34,481	-	Remeasurement gain (losses) on postemployment benefits liability
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,136,916	722,195	1,042,768	654,745	718,406	COMPREHENSIVE INCOME OF THE CURRENT YEAR
LABA DIATRIBUSIKAN KEPADA:						INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	1,158,800	841,543	994,136	674,308	662,243	The Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	777	430	307	379	-	Non-Controlling Interest
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:						COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	1,136,139	721,765	1,042,768	654,745	718,406	The Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	777	430	307	379	-	Non-Controlling Interest
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam rupiah penuh)	181	131	285	193	208	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full rupiah)

ARUS KAS KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS						
Arus Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2,061,396	802,663	897,790	777,910	1,145,027	Cash Flow provided (by) from operating activities
Arus Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(3,710,543)	(1,260,227)	(1,114,848)	(3,488,078)	(1,191,527)	Cash Flow provided (by) from investment activities
Arus Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	4,811,652	705,990	993,424	638,714	(205,923)	Cash Flow provided (by) from financing activity
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	3,162,504	248,425	776,366	(2,071,455)	(252,423)	Increase (decrease) of cash and cash equivalent
Pengaruh selisih kurs	(12,562)	145,587	(3,934)	179,620	27,820	Effect of foreign exchange rate
Kas dan Setara Kas pada awal periode	1,746,272	1,352,260	579,829	2,471,664	2,696,267	Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	4,896,215	1,746,273	1,352,261	579,829	2,471,664	Cash and Cash Equivalent at the end of the year

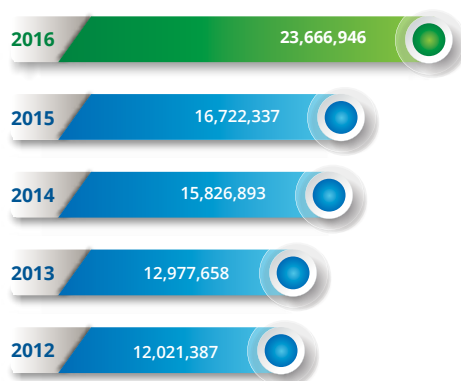
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam % / In million Rupiah, unless stated in %)

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012	Description
RASIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIOS						
RENTABILITAS						RENTABILITY
Rasio Laba Operasi	26.87%	24.65%	27.59%	23.58%	24.81%	Operating Profit Ratio
Laba Terhadap Aset	4.90%	5.04%	6.28%	5.20%	5.51%	Return on Assets
Rasio Biaya Operasi	73.13%	75.35%	72.41%	76.42%	75.19%	Operating Cost Ratio
LIKUIDITAS						LIQUIDITY
Rasio Lancar	157.15%	114.24%	97.08%	84.08%	174.60%	Current Ratio
Rasio Kas	126.46%	64.56%	49.80%	27.87%	134.83%	Cash Ratio
SOLVABILITAS						SOLVENCY
Rasio Hutang Terhadap Aset	49.31%	34.05%	33.59%	26.57%	20.37%	Liabilities to Assets Ratio
Rasio Hutang Terhadap Modal	97.27%	51.62%	50.57%	36.19%	25.57%	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Hutang Terhadap Aset Tetap	67.23%	42.32%	40.92%	31.76%	29.61%	Liabilities to Fixed Assets Ratio

Catatan untuk pembaca laporan: Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar Bahasa Inggris, sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar Bahasa Inggris dan Indonesia sesuai dengan konteksnya. / Note to the readers of this statement: The tables and graphs in this statement present numerical data in Standard English, whereas numerical presentation in the text uses Standard English and Indonesian in context.

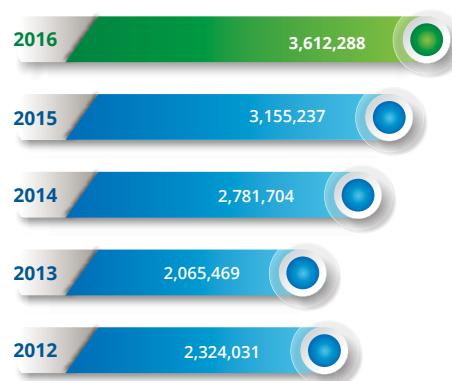
Aset

Assets



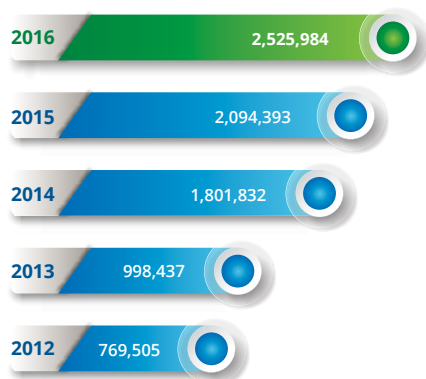
Pendapatan Aeronautika

Aeronautics Revenue



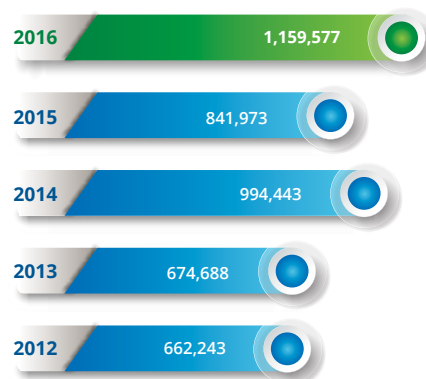
Pendapatan Non Aeronautika

Non-Aeronautics Revenue



Laba Bersih Tahun Berjalan

Net Income of The Current Year

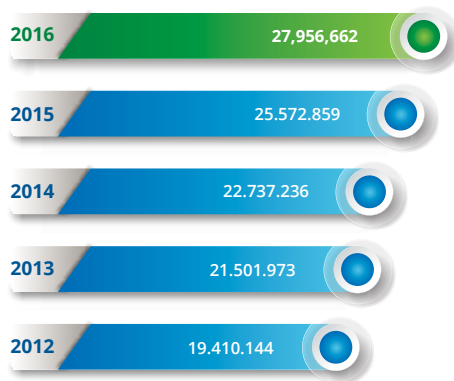


Ikhtisar Kinerja Operasional

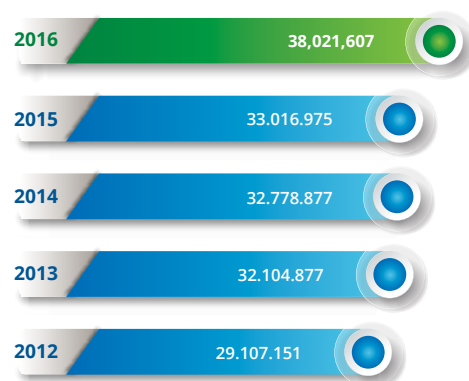
Operational Highlights

Uraian	Satuan Unit Satuan Unit	2016	2015	2014	2013	2012	Description
PRODUKSI AERONAUTIKA / AERONAUTICS PRODUCTION							
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	Ton	27,956,662	25,572,859	22,737,236	21,501,973	19,410,144	Aircraft Landing, Parking, and Hangar Services (PJP4U)
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	Pax	38,021,607	33,016,975	32,778,877	32,104,877	29,107,151	Aircraft Passenger Services (PJP2U)
Pemakaian <i>Aviobridge</i>	Ton	28,055,433	26,445,957	21,407,355	13,886,925	158,283,777	Use of <i>Aviobridge</i>
Pemakaian <i>Counter</i>	Pax	38,069,196	37,555,129	33,177,155	17,316,816	15,611,056	Counter Usage
<i>Baggage Handling System</i>	Pax	7,409,001	7,088,941	5,411,902	-	-	<i>Baggage Handling System</i>
PRODUKSI NON AERONAUTIKA / NON- AERONAUTICS PRODUCTION							
Sewa	M ² xBulan	12,191,641	6,225,618	7,611,582	7,838,598	8,295,145	Rental
Konsensi	Rp/000	7,125,459,900	5,821,685,310	5,100,595,342	3,251,194,578	2,708,338,298	Concession
Parkir Mobil	Lembar	25,970,943	22,669,408	21,693,865	22,864,848	19,910,057	Car parking
Parkir Motor	Lembar	9,540,777	7,322,029	7,509,994	7,884,631	7,388,150	Motor Parking
Peron dan <i>Waving Gallery</i>	Lembar	770,273,404	402,301	347,939	291,114	375,871	Peron and <i>Waving Gallery</i>
Pemakaian Listrik	Kwh	41,971,642	29,151,481	32,494,185	54,997,371	35,683,218	Electricity
Pemakaian Air	M ³	387,203	264,063	444,493	327,034	350,570	Water
Pemakaian Telepon	PwtxBln	20,432	16,511	20,699	23,999	25,819	Telephone
<i>Internet Services</i>	Kilobyte	861	445,466	-	-	-	<i>Internet Services</i>
Sewa Tempat Reklame	M ² xBulan	36,817	58,24	124,109	169,400	175,555	Advertising
<i>Event Promotion</i>	EA	2,193	1,265	-	-	-	<i>Event Promotion</i>
<i>Lounge</i>	Pax	690,106	716,962	1,368,587	1,063,698	918,199	<i>Lounge</i>
<i>VIP Service Fee GAT</i>	Pax	...	6,892	-	-	-	<i>VIP Service Fee GAT</i>
<i>Maintenance and Service Fee</i>	EA	44,718	4,146	-	-	-	<i>Maintenance and Service Fee</i>
<i>Warehousing</i>							<i>Warehousing</i>
Masuk	Kg	32,816,174	28,725,775	87,486,242	109,315,798	78,334,929	Incoming
Keluar	Kg	49,556,773	35,874,736	76,283,558	121,768,912	112,210,870	Outcoming

PJP4U



PJP2U



Informasi Pencatatan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan badan usaha non listed yang belum melakukan pencatatan saham.

Share Registration Information

As of December 31, 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) was a non-listed business entity.

Informasi Obligasi dan Sukuk

Obligation and Sukuk (Islamic Bonds) Information

Tabel Informasi Obligasi dan Sukuk Ijarah I /
Tabel of Obligation and Sukuk (Islamic Bonds) Information

No.	Obligasi	Jumlah (Rp juta)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga Kupon (p.a)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	Status Pembayaran
1.	Obligasi I Angkasa Pura 1 Tahun 2016 Seri A	622	5 tahun	8,10%	23 November 2016	22 November 2021	idAAA	Pembayaran bunga Obligasi ke-1 telah dilakukan Per 22 Februari 2017
2.	Obligasi I Angkasa Pura 1 Tahun 2016 Seri B	389	7 tahun	8,40%	23 November 2016	22 November 2023	idAAA	
3.	Obligasi I Angkasa Pura 1 Tahun 2016 Seri C	1,489	10 tahun	8,55%	23 November 2016	22 November 2026	idAAA	

No.	Sukuk	Jumlah (Rp juta)	Jangka Waktu	Imbalan Per Tahun	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	Status Pembayaran
1.	Sukuk Ijarah I Seri A	268	5 tahun	21,708,000	23 November 2016	22 November 2021	idAAAasy	Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke-1 telah dilakukan Per 22 Februari 2017
2.	Sukuk Ijarah I Seri B	55	7 tahun	4,620,000	23 November 2016	22 November 2023	idAAAasy	
3.	Sukuk Ijarah I Seri C	177	10 tahun	15,133,500	23 November 2016	22 November 2026	idAAAasy	

Peristiwa Penting 2016

Important Events of 2016



05
FEBRUARI
February

Peresmian Bali Logistic Park, fasilitas pergudangan dan logistik bertaraf internasional di dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, hasil sinergi dua anak perusahaan Angkasa Pura I, yaitu Angkasa Pura Properti dan Angkasa Pura Logistik di Badung (5/2).

The official opening of Bali Logistic Park, an international warehouse and logistic facility near I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali, as the result of a fruitful collaboration of two Angkasa Pura I subsidiaries, Angkasa Pura Properti and Angkasa Pura Logistik, in Badung (5/2).

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) "Sinergi BUMN Mewujudkan Seamless Logistic" antara Angkasa Pura I dengan Pos Indonesia, di Bandung (19/2).

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) entitled "Sinergi BUMN Mewujudkan Seamless Logistic" (The Synergy of State-owned Enterprises in Promoting Seamless Logistic) between Angkasa Pura I and Pos Indonesia, in Bandung (19/2).



19
FEBRUARI
February



19
APRIL
April

Bandara I Gusti Ngurah Rai meraih "The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2015" kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang/tahun. Director General Airport Council International (ACI) Angela Gittens menyerahkan penghargaan tersebut di Queensland, Australia (19/4).

I Gusti Ngurah Rai Airport received an award for "The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2015" in the category of airport with the annual traffic of 15-25 million passengers. Director General of Airport Council International (ACI), Angela Gittens, presented the award in Queensland, Australia (19/4).

Penyerahan sertifikat bandar udara oleh Dirjen Hubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo, di Gedung Grha Angkasa Pura I, Jakarta (25/4).

The presentation of airport certification by General Director for Air Transportation of Ministry of Transportation, Ghra Angkasa Pura I Building, Jakarta (25/4).



25
APRIL
April

Penandatanganan *addendum Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO) untuk pengembangan Bandara Internasional Lombok di Gedung Grha Angkasa Pura I, Jakarta (28/4).

The execution of addendum to the Memorandum of Understanding (MoU) with Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO) for the development of Lombok International Airport, in Grha Angkasa Pura I Building, Jakarta. (28/4).



28

APRIL
April

11
MEI
May



Penandatanganan berita acara pembelian aset milik Pemprov Kalsel yang terletak di kawasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor dan Dirut Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo Hardjito di Jakarta (11/5).

The execution of minutes of the purchase of South Kalimantan Provincial Government asset located in the area of Syamsudin Noor Airport, Banjarmasin. The execution was conducted by the Governor of South Kalimantan, H. Sahbirin Noor, and President Director of Angkasa Pura I, Sulistyo Wimbo Hardjito, in Jakarta (11/5).

Penandatanganan Perjanjian Kredit antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Sarana Multi Infrastruktur, Bank Mandiri, BCA, Indonesia Infrastructure Finance, dan BRI di Jakarta (18/8). Kredit sindikasi senilai Rp4 triliun ini untuk mendukung pengembangan lima bandara milik PT Angkasa Pura I (Persero).

The execution of Credit Agreement between PT Angkasa Pura I (Persero) with Sarana Multi Infrastruktur, Bank Mandiri, BCA, Indonesia Infrastructure Finance, and BRI in Jakarta (18/8). This syndicated loan, amounting Rp4 trillion, was addressed to fund the development of five PT Angkasa Pura I (Persero) airports.



18

AGUSTUS
August

2
OKTOBER
October



Penandatanganan MoU antara Angkasa Pura I dengan KAI dan Adhi Karya terkait kerja sama pengembangan kereta bandara di Bandara Adi Soemarmo Surakarta. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri BUMN RI Rini Soemarno di Bandung (2/10).

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between Angkasa Pura I with KAI (Indonesian Railways) and Adhi Karya concerning the cooperation in developing airport railway in Adi Soemarmo Airport, Surakarta. This execution was attended by Minister of State-owned Enterprise of the Republic of Indonesia, Rini Soemarno, in Bandung (2/10).

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI terkait revaluasi aset di Jakarta (4/10).

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between PT Angkasa Pura I (Persero) with Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia concerning the revaluation of assets, in Jakarta (4/10).



4
OKTOBER
October

13
OKTOBER
October



Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan International Air Transport Association (IATA) terkait kerja sama dalam bidang percepatan penerimaan pendapatan jasa kebandarudaraan di Grha PT Angkasa Pura I (Persero), Jakarta (13/10).

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between PT Angkasa Pura I (Persero) with International Air Transport Association (IATA) concerning the cooperation for the acceleration of revenue from airport services, in Grha PT Angkasa Pura I (Persero), Jakarta (13/10).

Due Diligence Meeting dan *Public Expose* Penawaran Obligasi I dan Sukuk Ijarah I PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016, di Ritz Carlton, Jakarta (17/10). Total nilai yang ditawarkan sebesar Rp3 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pengembangan lima bandara PT Angkasa Pura I (Persero).

Due Diligence Meeting and Public Expose: I Bond I and Sukuk Ijarah I Offering of Angkasa Pura of 2016 in Ritz Carlton, Jakarta (17/10). The total value offered was Rp3 trillion with most of which was invested for the development of five PT Angkasa Pura I (Persero) airports.



17
OKTOBER
October

17
OKTOBER
October



Kementerian BUMN melakukan pergantian Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), dengan mengangkat Danang S Baskoro menggantikan Sulistyio Wimbo Hardjito. Pengangkatan Danang tertuang dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-240/MBU/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

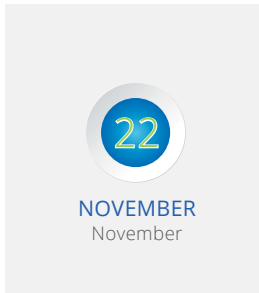
The Ministry of State-Owned Enterprise substituted the President Director of PT Angkasa Pura I (Persero), Sulistyio Wimbo Hardjito, with Danang S Baskoro. This appointment is stipulated in Decree of Minister of State-Owned Enterprise Number SK- 240/MBU/10/2016 on 17 October 2016.

Penandatanganan MoU antara Kementerian Pariwisata dengan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk bekerja sama meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, (3/11).

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Tourism with PT Angkasa Pura I (Persero) concerning the cooperation in increasing the number of foreign tourists visit in Indonesia, in Sapta Pesona Building, Jakarta (3/11).



3
NOVEMBER
November

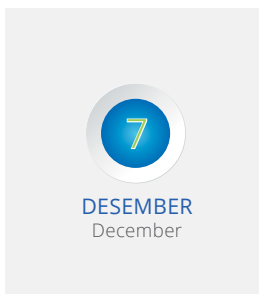
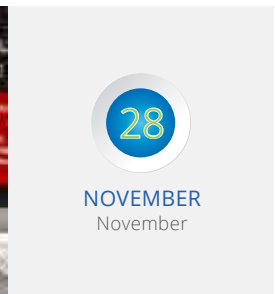


Penandatanganan MoU antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Sucofindo, Surveyor Indonesia, Virama Karya, dan Danareksa di Hotel Borobudur, Jakarta (22/11). Kerjasama ini untuk mewujudkan keunggulan operasional dan layanan perusahaan melalui sinergi BUMN.

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between PT Angkasa Pura I (Persero) with Sucofindo, Surveyor Indonesia, Virama Karya, and Danareksa in Hotel Borobudur, Jakarta (22/11). This cooperation is intended to promote the operational and corporate service excellence through the collaboration of state-owned enterprises

PT Angkasa Pura I (Persero) resmi melakukan pencatatan (*listing*) obligasi sebesar Rp2,5 triliun dan sukuk ijarah Rp500 miliar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (28/11). Aksi korporasi ini merupakan bagian dari pendanaan eksternal perseroan yang diperkirakan mencapai Rp25 triliun sampai dengan tahun 2020.

PT Angkasa Pura I (Persero) officially listed bond amounting Rp2.5 trillion and sukuk ijarah amounting Rp500 Billion in Indonesian Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia/BEI) (28/11). This corporate action was a part of corporate external funding estimated to reach Rp25 trillion in 2020

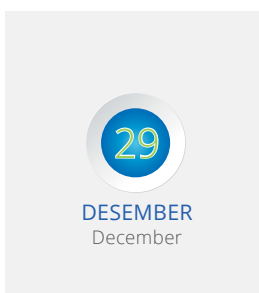
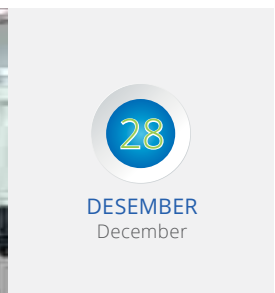


Penandatanganan MoU antara PT Angkasa Pura I dengan Jasa Raharja di Hotel Pullman, Jakarta (7/12). MoU ini mencakup kerja sama terkait pembukaan akses data penumpang yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara kepada Jasa Raharja.

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between PT Angkasa Pura I (Persero) with Jasa Raharja in Hotel Pullman, Jakarta (7/12). This MoU covers the cooperation concerning the disclosure of the flight passenger data to Jasa Raharja.

Penandatanganan MoU antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT PP, di Grha PT Angkasa Pura I (Persero), Jakarta (28/12). MoU ini mencakup rencana studi pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan atas lahan PT Angkasa Pura I (Persero) yang masih memiliki nilai tambah.

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between PT Angkasa Pura I (Persero) with PT PP, in Grha PT Angkasa Pura I (Persero), Jakarta (28/12). This MoU covers the study plan of the development, establishment, and management of PT Angkasa Pura I (Persero) land site with retaining added value.



Penandatanganan MoU PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub di Grha PT Angkasa Pura I (Persero), Jakarta (29/12). Melalui MoU ini Balai Teknik Penerbangan akan melakukan pelayanan pengujian prasarana sisi udara.

The execution of Memorandum of Understanding (MoU) between PT Angkasa Pura I (Persero) with the Aviation Engineering Office of Directorate General of Civil Aviation of Ministry of Transportation in Grha PT Angkasa Pura I (Persero), Jakarta (29/12). With this MoU, the Aviation Engineering Office will manage the testing of aviation infrastructure.

Daftar Isi

Table of Content

Arti Tema / the Meaning of Theme	1	Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Report of the Board of Commissioners	30
Kesinambungan Tema / Theme Correlations	2	Laporan Dewan Komisaris / Board of Commissioners Report	30
Pencapaian Penting / Important Achievement	4	Laporan Direksi / Board of Directors Report	40
Jejak Langkah / Milestones	6	Tanggung Jawab Laporan / Responsibility of Reporting	53
Keunggulan Kami / Our Superiorities	10		
Kilas Kinerja / Performance Review	16		
Ikhtisar Kinerja Keuangan / Financial Highlights	16		
Ikhtisar Kinerja Operasional / Operational Highlights	20		
Informasi Pencatatan Saham / Share Registration Information	21		
Informasi Obligasi dan Sukuk / Bond and Sukuk Overview	21		
Peristiwa Penting 2016 / Important Events of 2016	22		
Daftar Isi / Table of Content	26		



56

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



58	Identitas Perusahaan / Corporate Identity	79	Strategi Perusahaan / Company Strategy
58	Riwayat Singkat / Brief History	80	Profil Dewan Komisaris / Profile of the Board of Commissioners
63	Logo Perusahaan / Corporate Logo	86	Profil Direksi / Profile of the Board of Directors
64	Bidang Usaha / Line of Business	92	Profil Pejabat Eksekutif / Profile of the Executive Officers
66	Produk dan Jasa / Product and Services	100	Profil Karyawan / Profile of Human Capital
67	Segmentasi Produk / Product Segmentation	104	Pengembangan Pegawai / Employee Development
68	Peta Wilayah Operasional / Operational Areas	128	Komposisi Pemegang Saham / Composition of Shareholders
70	Inovasi Bandara / Airport Innovation	131	Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi / List of Subsidiaries Companies and/or Associated Entities
74	Struktur Organisasi Perusahaan / Organizational Structure	139	Struktur Grup Perusahaan / Corporate Group Structure
76	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan / Vision, Mission and Corporate Culture	140	Kronologis Pencatatan Saham / Chronology of Shares Listing
76	Telaah Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi / Review of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Company's Vision and Mission	140	Kronologis Pencatatan Obligasi dan Sukuk / Chronology of Obligation and Sukuk Registration
		141	Lembaga Profesi Penunjang / Professional Supporting Institutions
		142	Penghargaan dan Sertifikasi / Awards and Certifications
		150	Nama dan Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Wilayah dan Cabang / The Address of Regional and Branch Offices
		152	Akses Informasi / Information Access
		153	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit internal Audit / Education and Training of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

160



Tinjauan Industri / Industry Overview	161
Perekonomian Global / Global Economy	161
Perekonomian Indonesia / Indonesian Economy	125
Kondisi Industri Penerbangan Global / Global Aviation Industry Overview	164
Kondisi Industri Penerbangan Indonesia / Indonesian Aviation Industry Overview	167
Perkembangan Industri Kebandarudaraan di Wilayah PT Angkasa Pura I (Persero) / Aviation industrial developments at PT Angkasa Pura I (Persero) region	168
Tinjauan Operasional / Operational Review	173
Sasaran Strategis dan Strategi Perusahaan / Strategic Targets and Corporate Strategy	174
Fasilitas Alat Produksi / Production Equipment Facility	174
Strategi Pengembangan Bisnis 2016 /	176
Aspek Pemasaran / Marketing Aspect	177
Pangsa Pasar / Marketing Strategy	182
Tinjauan Segmen Operasi /	189
Prospek Usaha / Business Prospects	201
Strategi dan Pengembangan Usaha 2017 / Strategy and Business Development 2017	205
Tinjauan Keuangan / Financial Overview	210
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / Consolidated Statement of Financial Position	210
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian / Consolidated Income Statement and Other Comprehensive Income	214

Laporan Arus Kas Konsolidasian / Consolidated Statements of Cash Flows	220
Tingkat Kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) / Soundness Level of PT Angkasa Pura I (Persero)	221
Rasio Keuangan / Financial Ratios	223
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang / Capacity to Pay Debt and Collectability of Receivables	224
Kontribusi Kepada Negara / Contribution to the Nation	226
Struktur Modal / Capital Structure	227
Perjanjian dan Perikatan / Commitment and Agreement	232
Realisasi Investasi Barang Modal / Realization of Capital Expenditure	237
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2016 serta Target dan Proyeksi 2017 / 2016 Performance Target and Realization Comparison and 2017 Projection	240
Informasi Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan / Material Information After Audit Report Date	245
Kebijakan Dividen / Dividen Policy	247
Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan / Employee Stock Option	248
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum / Realization of Initial Public Offering Fund Use	248
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal / Material Information of Investment, Expansion, Divestiture or Debt and Equity Restructuring	250
Informasi Transaksi Material dengan Pihak Berelasi / Related Party Transaction Information	253
Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan / Material Transaction Information that Contain Conflict of Interest	256
Liabilitas Kontinjensi / Contingent Liabilities	256
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan / Law and Regulation Changes that Have Significant Influence	259
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan / Accounting Policy Changes and Their Impact on Financial Statement	265
Informasi Kelangsungan Usaha / Going Concern Information	266
Kinerja Anak Perusahaan / Subsidiary Performance	267

HUMAN CAPITAL

Human Capital

283



Manajemen Human Capital / Human Capital Management	285
Roadmap Human Capital / Roadmap of Human Capital	285
Organisasi Pengelola Human Capital / Human Capital Management Organization	287
Profil Ringkas Human Capital Group Head / Brief Profile of Human Capital Group Head	287
Fungsi Human Capital Group / Human Capital Group Function	288
Human Capital Management System / Human Capital Management System	288

<i>Organization Development dan Change Management / Organization Development and Change Management</i>	290	Remunerasi / Remuneration	301
<i>Corporate Expert / Corporate Expert</i>	291	Profil Karyawan / Profile of Employees	303
<i>Rekrutmen Human Capital / Recruitment of Human Capital</i>	292	Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian / Employment Composition Based on the Employment Status	304
<i>Perencanaan Kebutuhan Human Capital / Human Capital Requirements Planning</i>	292	Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi / Employment Composition Based the Organization Level	305
<i>Pengembangan Karir / Career Development</i>	293	Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan / Employment Composition Based on Education	306
<i>Human Capital Development / Human Capital Development</i>	294	Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia / Employment Composition Based on Age	307
Biaya Pengembangan Kompetensi / Cost of Competency Development	294	Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja / Employment Composition Based on Years of Service	308
Evaluasi Pengembangan Kompetensi / Evaluation of Competency Development	294	Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender / Employment Composition Based on Gender	309
<i>Internalisasi Corporate Culture / Human Capital Satisfaction Survey</i>	296	Biaya Tenaga Kerja / Labor Costs	310
<i>Human Capital Engagement /</i>	297	Tingkat Turnover Karyawan / Employees Turnover Level	311
<i>Performance Management / Performance Management</i>	298		
<i>Human Capital Reward / Human Capital Reward</i>	300		

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

313

Terobosan dan Pencapaian Penting / Significant Breakthrough and Achievement	314	Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi / Organizational Structure of Information Technology Division	317
Information Technology Master Plan / Information Technology Master Plan	315	Langkah Strategis Divisi Teknologi Informasi / HStrategic Measures of Information Technology Division	319
Perkembangan Struktur dan Sumber Daya Manusia Divisi Teknologi Informasi / Structure and Human Capital Development of Information Technology Division	316	Pengendalian Risiko Operasional yang Dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi Sepanjang Tahun 2016 / Operational Risk Control by Information Technology Division Throughout 2016	320
		Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2016 / Information Technology Division Development of 2016	320
		Biaya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi / Information Technology Infrastructure Development Expense	321

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

323



Manfaat Implementasi GCG Bagi PT Angkasa Pura I (Persero) / The Importance of Good Corporate Governance for PT Angkasa Pura I (Persero)	325	Good Corporate Governance Assessment / Good Corporate Governance Assessment	332
Tujuan Penerapan GCG / Purpose of GCG Implementation	326	Peningkatan Kualitas dan Benchmarking / Improving Quality and Benchmarking	337
Dasar Penerapan GCG / The Foundation of GCG Implementation	327	Struktur dan Mekanisme GCG / Structure and Mechanism of GCG	338
Peningkatan Kualitas GCG Secara Berkelanjutan / Sustainable Quality Improvement	329	Rapat Umum Pemegang Saham / General Meeting of Shareholders	339
Penetapan Standar Kualitas Implementasi GCG / Determination of Quality Standards GCG Implementation	330	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	362
Pelaksanaan dan Pemantauan Implementasi GCG / GCG Implementation and Monitoring	330	Direksi / Board of Directors	400
		Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris / Organs and Committees under the Board of Commissioners	443
		Organ di Bawah Direksi / Organs under the Board of Directors	464
		Akuntan Publik / Public Accountants	478
		Fungsi Manajemen Risiko / Risk Management Functions	481
		Struktur Organisasi Manajemen Risiko / Organizational Structure	481
		Dasar Penerapan Manajemen Risiko / The Basis of Risk Management Implementation	484
		Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko / Determination of Risk Management Policies and Procedures	485

Target dan Inisiatif Strategis Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2016 / Target and Strategic Initiatives of Risk Management Implementation 2016	485	Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi / Legal Issues Faced by Board of Commissioners and Directors	512
Sistem dan Penerapan Manajemen Risiko / Risk Management System and Implementation	485	Informasi Pemegang Saham Pengendali / Information of Controlling Shareholders	513
Strategi Pengelolaan Risiko / Risk Management Strategy	486	Akses Informasi dan Data Perusahaan / Information Access and Company's Data	513
Reviu Atas Sistem Manajemen Risiko/Risk Management System Review	494	Media Elektronik / Electronic Media	513
Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko / Risk Management Improvement	496	Buletin / News Letter	514
Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko / Competence Development in Risk Management	496	Press Release / Press Release	514
Sertifikasi Manajemen Risiko / Risk Management Certification	497	Code of Conduct / Code of Conduct	516
Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko / Evaluation of Risk Management System	499	Isi Code of Conduct / of Code of Conduct Contents	516
Information Technology Governance / Information Technology Governance	501	Kepatuhan Terhadap Code of Conduct / Compliance with Code of Conduct	517
Sistem Pengendalian Internal / Internal Control System	503	Penyebarluasan Code of Conduct / Socialization of Code of Conduct	517
Pengendalian Keuangan dan Operasional / Finance and Operational Control	503	Upaya Penerapan dan Penegakan Code of Conduct / Implementation Effort and Enforcement of Code of Conduct	517
Perbaikan Kualitas Audit / Improvement of Audit Quality	506	Gratifikasi / Gratification	519
Kesesuaian Pengendalian Internal dengan COSO / Concordance of Internal Control with COSO	506	Whistleblowing System (WBS) / Whistleblowing System (WBS)	520
Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal / Evaluation of the Internal Control System Effectiveness	597	Keberadaan dan Tujuan WBS / the Existence and Purpose of Whistleblowing System	521
Perkara Penting / Legal Issues	508	Jenis Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan / Type of WBS Violation	521
Perkara Hukum yang Dihadapi PT Angkasa Pura I (Persero) / Lawsuit That Faced by PT Angkasa Pura I (Persero)	512	Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran / Media and Report Submission	522
Perkara Hukum yang Dihadapi Entitas Anak / Lawsuit Faced by Subsidiaries	512	Pengelolaan Whistleblowing System / Whistleblowing System Management	523
		Perlindungan Bagi Whistleblower / Whistleblower Protection	526
		Pihak Yang Mengelola Pengaduan Whistleblowing System / Whistleblowing System Management	526
		Sosialisasi Whistleblowing System / Whistleblowing System Socialization	528
		Laporan Whistleblowing System 2016 / Whistleblowing System Report in 2016	528

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

531



Pendekatan Holistik Terintegrasi dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility / Integrated Holistic Approach in CSR Implementation	534
Corporate Social Responsibility Terkait dengan Lingkungan Hidup / Corporate Social Responsibilities Related to Environment	535
Corporate Social Responsibility Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Corporate Social Responsibility Programs Related to Labor, Occupational Health and Safety	538

Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial dan Masyarakat / Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development	549
Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab kepada Konsumen / Corporate Social Responsibility Relates to Responsibility to Consumers	569
Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Terhadap Pemasok / Corporate Social Responsibility Related to Supplier	577
Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Kreditor / Corporate Social Responsibility Related to Creditors	579
Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Terhadap Negara / Corporate Social Responsibility Related to the Responsibility to the State	580
Dasar Penerapan Program CSR / The Basis of CSR Implementation	434

REFERENSI KRITERIA ARA/POJK

ARA References

583

LAPORAN KEUANGAN

Consolidated Financial Statements

583

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report



Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2016. Pada 2016, seluruh pelayanan jasa Kebandarudaraan maupun Non Bandara mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan usaha untuk segmen operasi Kebandaraan di 2016 meningkat sebesar Rp712,02 miliar atau 14,34%, sedangkan Pendapatan usaha untuk segmen Non Bandara meningkat sebesar Rp276,13 miliar 27,51%. Peningkatan pendapatan telah berhasil meningkatkan laba operasional Perseroan. Laba operasional di 2016 mencapai Rp1,65 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp355,45 miliar atau 27,47% dari 2015 yang mencapai Rp1,29 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, pada 2016, total aset Perseroan mencapai Rp23,67 triliun. Mengalami pertumbuhan sebesar Rp6,94 triliun atau sebesar 41,53% dibandingkan 2015 yang mencapai Rp16,72 triliun.

The Board of Commissioners believe that the Board of Directors have been able to deal with the 2016 economic challenges. In 2016, the entire services both airport and non-airport have also achieved significant growth. Business income for the airport operations segment rose by Rp712.02 billion or 14.34% in 2016, while business income for the non-airport segment went up by Rp276.13 billion or 27.51%. This rise of income has increased the Corporation's operational profit. The operational profit in 2016 reached Rp1.65 trillion, escalating by Rp355.45 billion or 27.47% from the 2015 figure of Rp1.29 trillion. In conformity with this, in 2016, the Corporation's total asset amounted to Rp23.67 trillion. The figure is higher by Rp6.94 trillion or 41.53% compared to the 2015 number, which was Rp16.72 trillion.

Andrinof A. Chaniago

Komisaris Utama
President Commissioner



Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian pengarahannya kepada Direksi dengan penuh tanggung jawab. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi dan pemberian nasihat atas kebijakan Direksi terhadap kepengurusan Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Honorable stockholders and other esteemed stakeholders,

As mandated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations, the Board of Commissioners have performed the supervisory and counseling duties for the Board of Directors in a responsible manner. The Board of Commissioners answer to the stockholders with regard to our functions of supervising and counseling the Board of Directors' policies in their management of the Corporation, which should generally refer to the established work plans, as well as of ensuring compliance with all of the applicable laws and regulations.

Dewan Komisaris telah menjalankan perannya untuk senantiasa berupaya memastikan bahwa Perseroan telah dikelola sesuai kepentingan para pemangku kepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris senantiasa menjaga obyektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas, sehingga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang, yaitu Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan GCG. Tugas dan wewenang komite penunjang Dewan Komisaris telah didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat berperan secara efektif dalam membantu Dewan Komisaris.

Dalam laporan ini Dewan Komisaris melaporkan penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penerapan *good corporate governance* dan penilaian atas komite penunjang Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan atas kinerja Direksi yang telah mampu mengelola Perseroan dengan sangat baik. Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut ini.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2016. Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan atas kinerja Direksi yang telah mampu menangkap peluang-peluang usaha yang ada. Kondisi lalu lintas angkutan udara di Asia Pasifik turut memberikan peluang besar bagi industri penerbangan global. Dalam pertemuan *The Association of Asia Pacific Airlines (AAPA)* ke-59 dinyatakan bahwa 10 rute penerbangan internasional tersibuk di dunia adalah di kawasan Asia Pasifik. Meningkatnya aktivitas travel di Asia Pasifik juga berdampak pada investasi yang besar di bidang infrastruktur dan pengelolaan bandara.

Di samping itu, ekspansi dari industri penerbangan dengan biaya rendah (*low-cost carrier*) telah bertambah kuat dan akan berlanjut merangsang pertumbuhan regional. Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling aktif di dunia dalam operasional penerbangan biaya rendah dengan jarak menengah yang merupakan model bisnis dengan potensi pertumbuhan yang kuat.

The Board of Commissioners have fulfilled our role to constantly try to ensure that the Corporation is run to the best interest of the stakeholders. In relation to that, the Board of Commissioners have consistently been maintaining objectivity and independence in carrying out their duties, thus not involved in the Corporation's operational decision making, except for matters regulated and specified in the Articles of Association as well as the laws and regulations.

In performing our duties, the Board of Commissioners have been aided by two Auxiliary Committees, namely the Audit Committee and the Business Risk and GCG Committee. The duties and authorities of these auxiliary committees are defined clearly, so they can contribute effectively in assisting the Board of Commissioners.

In this report, the Board of Commissioners would like to share the assessment result of the Board of Directors' performance, the views on the corporate business prospects established by the Board of Directors and the implementation of the good corporate governance, as well as the assessment of the Board of Commissioners' auxiliary committees and the change in the Board of Commissioners' composition.

ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners would like to express an appreciation for the performance of the Board of Directors, who have managed the Corporation in a remarkable way. The Board of Commissioners' assessment of the Board of Directors' performance is based on the following considerations.

MACROECONOMIC REVIEW

The Board of Commissioners believe that the Board of Directors have been able to deal with the 2016 economic challenges. The Board of Commissioners would like to express an appreciation for the performance of the Board of Directors, who have successfully captured the available business opportunities. The air transport traffic condition in Asia Pacific also contributed to the ample opportunity for the global aviation industry. In the 59th meeting of the Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), it was stated that the world's 10 busiest international flight routes pass through the Asia Pacific region. The growing travel activities in Asia Pacific also have an impact on the considerable investment in infrastructure and airport management.

Besides, low-cost carrier industry's expansion is growing stronger and will continue to stimulate regional growth. Southeast Asia is the most active region in the world in terms of medium-distance low-cost carrier operations, which represents a business model with strong growth potential.

Keberadaan bisnis bandar udara Indonesia tidak lepas dari dinamika yang terjadi pada bisnis penerbangan baik di Indonesia maupun internasional. IATA mencatat bahwa Asia memiliki empat dari lima negara di dunia yang mengalami kenaikan total penumpang per tahun, yakni China, India, Indonesia dan Vietnam.

Sejalan dengan perkembangan industri kebandarudaraan di Indonesia, pertumbuhan industri penerbangan di wilayah bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, pergerakan lalu lintas angkutan udara untuk jumlah pesawat, penumpang, dan kargo mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015.

EVALUASI KINERJA 2016

Peluang dalam industri tersebut telah ditangkap dengan sangat baik oleh Direksi yang terlihat dari evaluasi kinerja 2016. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Kinerja Direksi sangat baik, dilihat dari capaian kinerja operasional maupun keuangan Perseroan.

Pada 2016, seluruh pelayanan jasa Kebandarudaraan maupun Non Bandara mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan usaha untuk segmen operasi Kebandaraan di 2016 meningkat sebesar Rp712,02 miliar atau 14,34%, sedangkan Pendapatan usaha untuk segmen Non Bandara meningkat sebesar Rp276,13 miliar 27,51%. Peningkatan pendapatan telah berhasil meningkatkan laba operasional Perseroan. Laba operasional di 2016 mencapai Rp1,65 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp355,45 miliar atau 27,47% dari 2015 yang mencapai Rp1,29 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, pada 2016, total aset Perseroan mencapai Rp23,67 triliun. Mengalami pertumbuhan sebesar Rp6,94 triliun atau sebesar 41,53% dibandingkan 2015 yang mencapai Rp16,72 triliun.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Tingkat kesehatan perusahaan dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 178 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.

Tingkat kesehatan Perseroan dalam tahun 2016 berada dalam klasifikasi "AA" atau "SEHAT" dengan nilai bobot 89,35 Tingkat kesehatan yang dicapai Perseroan di atas yang ditargetkan dalam RKAP tahun 2016 yaitu sebesar 89,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 85,50.

The emergence of the Indonesian airport business was inseparable from the dynamics that happened to the aviation business both in Indonesia and global. IATA notes that Asia is home to four of five countries in the world that have seen increasing total passengers per year, namely China, India, Indonesia, and Vietnam.

In line with the development of airport industry in Indonesia, the aviation industry's growth in the areas of the airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero) has also seen a boost. As a whole, the air transport traffic has increased when it comes to the number of aircraft, passengers, and cargo compared to the figures of 2015.

2016 PERFORMANCE EVALUATION

The above industry opportunity has been captured very well by the Board of Directors, as seen in the 2016 performance evaluation. The Board of Commissioners see the Board of Directors' performance as excellent, considering the Corporation's operational and financial achievements.

In 2016, the entire services both airport and non-airport have also achieved significant growth. Business income for the airport operations segment rose by Rp712.02 billion or 14.34% in 2016, while business income for the non-airport segment went up by Rp276.13 billion or 27.51%. This rise of income has increased the Corporation's operational profit. The operational profit in 2016 reached Rp1.65 trillion, escalating by Rp355.45 billion or 27.47% from the 2015 figure of Rp1.29 trillion. In conformity with this, in 2016, the Corporation's total asset amounted to Rp23.67 trillion. The figure is higher by Rp6.94 trillion or 41.53% compared to the 2015 number, which was Rp16.72 trillion.

BUSINESS HEALTH LEVEL

The business health level is calculated based on the Decree of the Indonesian Minister of State Enterprises No. KEP.100/MBU/2002 dated 4 June 2002 concerning the Assessment of State Enterprises and the Regulation of the Indonesian Minister of Transportation No. PM 178 of 2015 concerning the Standards for Airport Service User Standards.

The Corporation's health level in 2016 was classified as "AA" or "HEALTHY" with a score of 89.35. This health level is higher than what was targeted in the 2016 Corporate Work Plans and Budget (RKAP), 89.00, and an increase from the 85.50 score in 2015.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG TELAH DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha perusahaan yang telah disusun Direksi sudah baik dan realistis. *The Boeing Company* dalam *The Current Market Outlook 2015-2034* memperkirakan bahwa sembilan dari sepuluh industri utama di Asia termasuk ke dalam jenis industri yang memerlukan perjalanan udara. Boeing memperkirakan bahwa wilayah ASEAN akan membutuhkan 3.750 pesawat baru.

Pada penerbangan internasional, meskipun terjadi pelemahan perekonomian global yang mengarahkan pada penurunan pertumbuhan secara signifikan di beberapa negara, Indonesia justru mencatat *inbound arrival* yang relatif kuat jika pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia melalui kementerian pariwisata melaksanakan aktivitas pemasaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan minat wisatawan mancanegara terhadap beberapa destinasi di Indonesia. Hal ini juga ditunjang oleh kebijakan pemerintah tentang pembebasan visa yang memasuki wilayah Indonesia. Hal inilah yang mendorong pertumbuhan yang relatif baik terhadap inbound travel di Indonesia.

Kedepan, IATA memperkirakan bahwa pada kawasan Asia Pacific, pasar penerbangan akan memperoleh tambahan 1.8 miliar penumpang pertahun pada tahun 2035. IATA juga memprediksikan bahwa pada tahun 2024, total pasar penerbangan di China akan menggantikan posisi US sebagai pasar penerbangan terbesar di dunia. India akan menggantikan Inggris untuk menempati urutan ketiga dalam pasar penerbangan dunia pada tahun 2025. Diprediksikan pula bahwa Indonesia pada tahun 2025 akan memasuki 10 besar dari urutan pasar penerbangan dunia.

Melihat dari kondisi saat ini dan proyeksi positif terhadap industri penerbangan baik di dunia maupun Indonesia, kedepan keberlangsungan bisnis bandar udara di Indonesia masih menjanjikan. Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi akan mampu memanfaatkan peluang yang ada dan optimis bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi telah sesuai. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Direksi telah menyusun strategi-strategi pengembangan usaha yang tepat. Sehingga diharapkan profitabilitas dan kualitas aktiva produktif akan terus membaik.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Komisaris menyadari bahwa implementasi *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi GCG menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris.

VIEW ON COMPANY BUSINESS PROSPECTS ESTABLISHED BY BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners believe that the company business prospects established by the Board of Directors have been good and realistic. The Boeing Company in *The Current Market Outlook 2015-2034* estimate that nine of the ten major industries in Asia are the type that requires air transport. Boeing gauge that ASEAN will need 3,750 new planes.

In case of international flights, despite the global economic waning leading to significant growth reductions in some countries, Indonesia has in fact recorded a relatively strong inbound arrival in 2016. This is because the Indonesian government through the Ministry of Tourism carried out ongoing marketing activities to drive foreign tourists to several destinations in Indonesia. It was also supported by the government policy on the visa exemption to Indonesian areas. This is what pushed relatively positive growth in inbound travel to the country.

In the future, IATA calculates that in Asia Pacific, the aviation market will see an extra of 1.8 billion annual passengers by 2035. IATA also predicts that by 2024, the Chinese aviation market will displace the US as the biggest aviation market in the world. India will displace England for the third place in the global aviation market by 2025. It is also predicted that by 2025 Indonesia will enter the top 10 of the global aviation market.

Looking at the current situation and the positive projection of the aviation industry both the world and Indonesia, the future sustainability of the airport business in Indonesia remains promising. The Board of Commissioners believe the Board of Directors will be able to take advantage of emerging opportunities and are optimistic that the Board of Directors have established proper business prospects. It is based on the consideration that the Board of Directors have mapped out the right business development strategies. It is hoped that profitability and productive asset quality will continue improving.

VIEW ON IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners realize that the implementation of good corporate governance (GCG) is a key requirement for achieving sustainable Corporation performance. For this reason the implementation of GCG was the most attention by the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan baik di 2016. Pada 2016, *assessment* dilakukan secara mandiri dengan menggunakan indikator/parameter penilaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN. Capaian GCG *assessment* untuk tahun 2016 adalah sebesar 90,83 atau mencapai kategori Sangat Baik. Beberapa kelemahan pelaksanaan *good corporate governance* yang berhasil diidentifikasi dari proses *assessment* GCG selanjutnya direkomendasikan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas implementasi GCG kedepannya.

Beberapa isu kunci dalam penerapan GCG seperti manajemen risiko, penerapan *whistleblowing system*, dan *corporate social responsibility* juga menjadi perhatian Dewan Komisaris. Berikut pandangan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko, *whistleblowing system*, dan *corporate social responsibility* di PT Angkasa Pura I (Persero).

MANAJEMEN RISIKO

PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengembangkan suatu kerangka pengelolaan risiko Perseroan yang menyeluruh, *Enterprise Risk Management* (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas serta menciptakan nilai Perseroan.

Kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Perusahaan di tingkat korporasi dilaksanakan oleh *Risk Management Committee* yang terdiri atas *Board of Directors* serta didukung oleh jajaran pejabat satu tingkat di bawah Direksi sebagai anggota. Secara umum Fungsi Manajemen Risiko Kantor Pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan manajemen risiko, melakukan pemantauan profil risiko Perseroan termasuk rencana penanganannya, memberikan rekomendasi kepada *Risk Management Committee*, mengevaluasi kebijakan strategis, memantau pelaksanaan manajemen risiko, serta bersama-sama dengan pengelola risiko di lingkungan Kantor Pusat untuk melaksanakan proses Manajemen Risiko.

Pada tingkat Kantor Cabang juga terdapat fungsi Manajemen Risiko yang bersama-sama dengan Pemilik Risiko (*Risk Owner*) Kantor Cabang melaksanakan proses Manajemen Risiko dengan tahapan melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, menentukan penanganan risiko serta melakukan *monitoring* terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi.

The Board of Commissioners believe that the Board of Directors have implemented GCG satisfactorily in 2016. In 2016, assessment was carried out independently using the indicators/parameters based on the Decision of the Secretary of the Ministry of State Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State Enterprises. The GCG assessment for 2016 resulted in the score of 90.83 or Very Good in the categorization. A number of weaknesses in good corporate governance implementation identified from the GCG assessment were later recommended for follow-ups in order to strengthen the GCG implementation quality going forward.

The Board of Commissioners also examined several key issues in GCG implementation such as risk management, whistleblowing system, and corporate social responsibility. The Board of Commissioners' views on the implementation of risk management, whistleblowing system, and corporate social responsibility at PT Angkasa Pura I (Persero) are as follows.

RISK MANAGEMENT

PT Angkasa Pura I (Persero) have developed a comprehensive risk management framework for the Corporation, i.e. Enterprise Risk Management (ERM), in order to minimize the potential of loss, optimize profitability, and create corporate values.

The policies on and implementation strategies of Enterprise Risk Management at the corporate level are executed by the Risk Management Committee consisting of the Board of Directors and supported by the officials one level below the Board of Directors as members. In general, the Risk Management Function at the Headquarters is responsible for developing and following up risk management reports, reviewing the Corporation's risk profile including the handling plans, giving recommendations to the Risk Management Committee, evaluating the strategic policies, monitoring the risk management implementation, and conducting the Risk Management processes together with the risk manager at the Headquarters.

At the Branch Office level, there is also the Risk Management function that, along with the Risk Owner at the Branch Office, carries out the Risk Management processes following these steps: identification, analysis, evaluation, defining how to handle risks, and monitoring of identified risk.

Dalam upaya memastikan pelaksanaan manajemen risiko telah menjadi bagian dalam aktivitas usaha, Dewan Komisaris melalui Komite Risiko Usaha dan GCG, secara berkala melakukan Rapat dengan *Risk Management and Corporate Planning* dalam rangka melakukan pemantauan terhadap risiko di lingkungan Perseroan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) untuk meminimalisir atas risiko tersebut. Selain itu, minimum 2 (dua) kali dalam setahun, *Risk Management and Corporate Planning* melaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap hasil pemantauan risiko di lingkungan Perseroan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), PT Angkasa Pura I (Persero) telah berkomitmen untuk membangun Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perseroan dan telah dituangkan pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.192/PG.01/2016 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dapat diakses melalui *website* sehingga mempermudah pegawai maupun *stakeholder* PT Angkasa Pura I (Persero) dalam pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Sejak awal pengembangannya, Dewan Komisaris sangat peduli terhadap penerapan *whistleblowing system* (WBS). Peran Dewan Komisaris dalam pengembangan WBS adalah melakukan arahan dalam penyusunan *standard operational procedure* (SOP) dan sistem yang digunakan. Dalam penerapannya, peran Dewan Komisaris adalah sebagai Pengarah dalam Tim Pengelola *Whistleblowing System* yang memiliki peran sebagai Pengawas.

Menurut pandangan Dewan Komisaris, penerapan WBS di PT Angkasa Pura I (Persero) telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar kedepannya penerapan WBS lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hal penting lainnya yang mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dewan Komisaris berpendapat bahwa CSR akan berdampak bagi kinerja Perseroan, melalui legitimasi dari para *stakeholders*. CSR akan meningkatkan reputasi Perseroan dan selanjutnya akan terjalin hubungan yang harmonis antara Perseroan dan para pemangku kepentingan.

In the effort of making sure risk management is incorporated in business activities, the Board of Commissioners through the Business Risk and GCG Committee periodically call a meeting with the Risk Management and Corporate Planning function to review the risks in the Corporation's environment and the follow-up actions taken by the risk owner to mitigate the risks. Aside from that, at least 2 (two) times in a year, the Risk Management and Corporate Planning submit a report to the Board of Directors and the Board of Commissioners on the review results of risks in the Corporation's environment.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In implementing the Good Corporate Governance principle, PT Angkasa Pura I (Persero) is committed to build the Whistleblowing System. The Whistleblowing System serves as a facility for preventing and disclosing violations or fraudulence in the Corporation and has been specified in the Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.192/PG.01/2016 concerning the Whistleblowing System Guidelines. The Whistleblowing System can be accessed online to facilitate the employees and stakeholders of PT Angkasa Pura I (Persero) in reporting potential violations.

From its initial development, the Board of Commissioners have been very concerned about the whistleblowing system (WBS) implementation. The Board of Commissioners' role in the WBS development was providing guidance in drawing up the standard operational procedure (SOP) and the system to be used. In the implementation, the Board of Commissioners play a role as the Director in the Management Team of the Whistleblowing System, whose role is as the Supervisor.

In the Board of Commissioners' view, the WBS implementation at PT Angkasa Pura I (Persero) has been going well. However, the Board of Commissioners still provide guidance to improve the effectiveness of the WBS implementation.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Another important matter that has been a concern for the Board of Commissioners is Corporate Social Responsibility (CSR). The Board of Commissioners believe that CSR will have an impact on the Corporation's performance, through the stakeholders' legitimacy. CSR will build the Corporation's reputation and later develop a harmonious relationship between the Corporation and the stakeholders.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan CSR dengan efektif meliputi program pelestarian alam dan lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sosial masyarakat dan tanggung jawab terhadap konsumen. Sehingga, parameter keberhasilan adalah dengan mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. PT Angkasa Pura I (Persero) menganut prinsip bahwa yang mengajarkan agar suatu pihak memperlakukan pihak lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan GCG.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, internal audit, proses pelaporan keuangan. Sedangkan Komite Risiko Usaha dan GCG merupakan organ pendukung yang dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris terkait permasalahan kebijakan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan risiko (*risk management*) dan kemungkinan terjadinya risiko usaha, serta pengelolaan perusahaan yang baik (GCG).

Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2016 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hal tersebut didasarkan pada frekuensi dan efektivitas pelaksanaan rapat dan telah dilaksanakannya program kerja sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Pemegang Saham dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa komposisi dan keberagaman Dewan Komisaris saat ini sangat efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat bagi Perseroan.

The Board of Commissioners think that the Board of Directors have carried out CSR activities effectively, including nature and environment preservation programs; labor, health, and work safety; social-community development; and responsibilities to customers. Accordingly, the success parameter should be the ability to uphold moral and ethical principles, namely achieving the best results without harming other community groups. PT Angkasa Pura I (Persero) adopt the principle that one should treat others as they want to be treated. Thus, the Corporation believe a business that champion moral and ethical principles will generate the best benefits for the community.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners have auxiliary committees with duties and responsibilities to support the Board of Commissioners' performance. These committees have clear working guidelines, so their duty performances should be properly directed and effective. The committees under the Board of Commissioners are the Audit Committee and the Business Risk and GCG Committee.

The Audit Committee have the duties and responsibilities to monitor the effectiveness of the systems of internal control, risk management, internal audit, and financial reporting, while the Business Risk and GCG Committee serve as a supporting organ that aims at assisting the Board of Commissioners with matters related to the Board of Directors' policies on risk management and potential business risks, as well as good corporate governance (GCG).

The Board of Commissioners periodically undertake an assessment of our auxiliary committees. The Board of Commissioners see that during 2016 the committees have carried out their duties and responsibilities in a sufficiently effective manner. These matters are based on the frequency and effectiveness of meeting and work program executions in accordance with the Work Plan and Budget of the Committee

CHANGE IN BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Throughout 2016, there is no change in the Board of Commissioners' composition. Shareholders and The Board of Commissioners believe that the current composition and diversity of the Board of Commissioners have been very effective in carrying out the supervisory and counseling functions for the Corporation.

PENUTUP

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha di tahun 2016. Dewan Komisaris akan selalu berupaya untuk professional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat agar kinerja Perseroan bisa selalu meningkat di masa yang akan datang.

Sekali lagi, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh karyawan PT Angkasa Pura I (Persero), berkat dedikasi dan kerja keras, Perseroan mampu mencapai kinerja yang sangat baik di 2016.

CLOSING

The above report on the Board of Commissioners' supervisory duties over business performance and implementation in 2016 has herewith been brought to your attention. The Board of Commissioners will always try to be professional and independent in serving our supervisory and counseling functions to help continue improving the Corporation's performance going forward.

Once again, the Board of Commissioners would like to express our appreciation to the entire Board of Directors and all employees of PT Angkasa Pura I (Persero) for their dedication and hard work, thanks to which the Corporation managed to achieve an excellent performance in 2016.

Jakarta, April 2017

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of The Board of Commissioners
PT Angkasa Pura I (Persero)



Andrinof A. Chaniago
Komisaris Utama
Chairman, Board of Commissioners



Dari Kiri ke Kanan / From Left to Right

1. Dwi Ary Purnomo

Komisaris
Commissioner

2. Anandy Wati

Komisaris
Commissioner

3. Selby Nugraha Rahman

Komisaris
Commissioner

4. Andrinof A. Chaniago

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

5. Agus Santoso

Komisaris
Commissioner

6. Boy Syahril Qamar

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Direksi

Management Report



Secara umum, di tahun 2016 Perseroan telah mampu mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi Total Aset posisi sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai sebesar Rp23,67 triliun berada di atas yang ditargetkan yaitu sebesar Rp2,33 triliun atau 10,9% dari yang direncanakan sebesar Rp21,34 triliun. Ekuitas terealisasi sebesar Rp11,99 triliun di atas anggaran sebesar Rp391,03 miliar atau 3,4% dari yang dianggarkan sebesar Rp11,60 triliun. Perseroan juga telah mampu mencapai target laba setelah pajak. Realisasi laba setelah pajak tahun 2016 sebesar Rp1,16 triliun berada di atas anggaran sebesar Rp303,32 miliar atau 35,5% dari yang direncanakan sebesar Rp855,48 miliar.

In general, in 2016 the Company had reached the targeted goals. The realization of the Asset Total until December 31, 2016 was Rp23.67 trillion. It was Rp2.33 trillion or 10.9% higher than the targeted amount which was only Rp21.34 trillion. While the equity reached Rp11.99 trillion above the budgeted amount of Rp391.03 billion or 3.4% of the budgeted amount Rp11.60 trillion. The Company had also reached the targeted net profit after tax. The realization of net profit after tax in 2016 was Rp1.16 trillion above the budgeted amount of Rp303.32 billion or 35.5% from the targeted amount of Rp855.48 billion.

Danang S. Baskoro

Direktur Utama
President Director



Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang kami hormati.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmatNya yang tak terhingga kepada kita semua. Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan Laporan Pengelolaan Perseroan untuk Tahun buku 2016. Secara umum, pencapaian kinerja Perseroan sangat baik. Tidak hanya pada aspek keuangan namun juga aspek non keuangan.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Perekonomian global di 2016 masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. *International Monetary Fund* (IMF) mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia, dari posisi 3,2% pada publikasi April menjadi 3,1% pada rilis Juli 2016.

Kondisi perekonomian global tentu saja akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 5,02% (yoy) di tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 yang sebesar 4,79% (yoy), namun pertumbuhan ini masih dianggap belum cukup signifikan.

Our respective stakeholders and shareholders.

Thank be to God the Almighty for His unlimited bless for all of us. In this very moment, we would like to convey the Company Management Report for the Fiscal Year 2016. In general, the performance of the Company was very good, not only on the financial aspects but also on the non-financial aspects.

PERFORMANCE ACHIEVEMENT ANALYSIS

ECONOMIC MACRO REVIEW

The global finance of 2016 faced many uncertainties. International Monetary Fund (IMF) had corrected the global financial growth, from the position of 2.3% on the April publication into 3.1% on July 2016 release.

This global financial condition indeed had influenced Indonesia's economical condition. Eventhough the economic growth level of Indonesia had little improvement, which was 5.02% (YOY) on 2016 compared to the one in 2015 which was 4.79% (YOY), this growth was not so significant.

Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang belum pulih. Daya beli masyarakat masih lemah sebagai konsekuensi dari menurunnya pendapatan dan inflasi bahan makanan yang masih cukup tinggi. Meskipun secara umum inflasi cenderung menurun tetapi inflasi pada barang bergejolak (*volatile good*) masih tetap tinggi.

Pada sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami tren menguat selama tahun 2016. Namun beberapa fenomena sempat menekan rupiah untuk beberapa kesempatan. Di awal tahun, rupiah sempat berada pada posisi yang masih rentan (Rp13.900 per US\$) akibat badai krisis nilai tukar tahun 2015.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjalani pemulihan di 2016, industri penerbangan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri global yang mengalami perkembangan pada dekade saat ini.

IATA mencatat bahwa Asia memiliki empat dari lima negara di dunia yang mengalami kenaikan total penumpang per tahun, yakni China, India, Indonesia dan Vietnam. Pada dekade ini juga terdapat peralihan tren maskapai seiring dengan permintaan konsumen akan layanan penerbangan. Seiring dengan bertambahnya kalangan ekonomi kelas menengah baik di Asia maupun Indonesia, hal ini mendorong lebih banyak permintaan akan layanan *Low Cost Carrier* (LCC). Pada pasar Asia, maskapai LCC telah berhasil melakukan penetrasi sebesar 31% dari total penumpang yang diangkut di Asia, dan penetrasi dari LCC ini diprediksikan dalam waktu dekat akan mengalahkan pasar eropa dan Amerika Utara yang telah dahulu *mature*.

Bagi PT Angkasa Pura I (Persero) sendiri, kesiapan itu dicerminkan dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa Bandar Udara. Dengan mengusung *tagline* "Membangun Kebanggaan Bangsa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara," tidak hanya mengutamakan pengembangan bandar udara utama namun juga bandar udara kelas B dan C. Semangat pengembangan tersebut diwujudkan dengan percepatan Pengembangan Proyek Bandara Ahmad Yani Semarang, Pengembangan Proyek Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Baru adalah merupakan komitmen dan kesiapan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam menghadapi tantangan dan peluang industri Penerbangan di Indonesia.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi makro ekonomi dan industri penerbangan nasional, Perseroan merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk meraih setiap peluang dan potensi yang ada. Sasaran Strategi PT Angkasa Pura I (Persero) yang akan dicapai dalam periode tahun 2014-2018 ialah sebagai berikut.

- 1) Mencapai nilai CSI 4,60 (Standar ACI) pada tahun 2018.
- 2) Mencapai total pendapatan operasional Rp8,8 triliun pada tahun 2018.

The slow-growing economy during 2016 was influenced by the households consumption which was not restored yet. The purchasing power of the society was still weak due to the decrease of income and the high price of food supply. Eventhough in general the inflation was decreasing, the inflation of the volatile goods were still high.

On the other hand, the exchange rate of rupiah tend to be stronger in 2016. However, in there were some phenomena that had suppressed rupiah. At the beginning of the year, rupiah was on a susceptible position (Rp 13,900 per US\$) due to the storm of the exchange rate in 2015.

Eventhough Indonesia's economic growth got better in 2016, the airlines industry of Indonesia had a rapid growth. This was in line with the global industrial growth that had been growing on this decade.

IATA recorded that Asia had four out of five countries in the world which had the growing total of passengers for each year, which happened in China, India, Indonesia, and Vietnam. Furthermore, within this decade there was an airline company shifting trend based on the customers' demands on the airline services. The increase of the middle-class economy either in Asia or Indonesia had pushed more demands on the Low Cost Carrier (LCC) service. In Asia market, LCC airlines had penetrated around 31% from the total of passengers in Asia, and the penetration of LCC was predicted to defeat European and South American markets which were mature already.

For PT Angkasa Pura I (Persero), the readiness could be seen on the construction, the infrastructure development, and the service development given for the airport users. The *tagline* "Building National Pride through the Development of Airport Infrastructure" did not only prioritize the development of the main airports but also B class and C class airports. The spirit of the development was realized through the acceleration of the Project Developments of Ahmad Yani Semarang Airport, Project Development of Syamsudin Noor Banjarmasin Airport, and Project Development of Yogyakarta New International Airport which was the commitment and the readiness of PT Angkasa Pura I (Persero) in facing the challenges and industrial opportunity in Indonesia.

STRATEGIC POLICY

According to the national airlines industry and macro economy, the Company formulated some strategic policies to reach every opportunity and potency. The strategic goals of PT Angkasa Pura I (Persero) that was achieved in 2014 – 2018 were as the following:

- 1) Achieving the CSI score of 4.60 (ACI Standard) in 2018.
- 2) Achieving the operational income total RP 8.8 trillion in 2018.

- 3) Mencapai proporsi pendapatan non aero terhadap pendapatan operasional sebesar 57% pada tahun 2018.
- 4) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen kelas dunia (terutama pengelolaan SDM, ICT, *operation excellence*, dan *service excellence*) secara holistik sebelum akhir tahun 2018.
- 5) Menerapkan konsep *Green Corporation* dan Program CSR secara efektif.
- 6) Menjadi perusahaan yang siap untuk diprivatisasi sebelum akhir tahun 2018.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) menetapkan strategi perusahaan melalui peningkatan layanan kepada *stakeholder*. Adapun Strategi Peningkatan layanan Perusahaan kepada *stakeholder* dilakukan dengan cara:

- 1) Menyempurnakan (*excelling*) penerapan *service excellence*, *operations excellence*, *system management* dan ICT kelas dunia.
- 2) Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi biaya.
- 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sinergi secara internal dan eksternal.
- 4) Mempercepat dan memperbesar penciptaan nilai dari kemitraan strategis.

KINERJA PERSEROAN

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, Perseroan telah berhasil menangkap peluang yang ada di 2016. Hal tersebut terlihat dalam pencapaian kinerja baik operasional maupun keuangan. Pada 2016, seluruh pelayanan jasa Kebandarudaraan maupun Non Bandara mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan usaha untuk segmen operasi Kebandarudaraan di 2016 meningkat sebesar Rp712,02 miliar atau 14,34%, sedangkan Pendapatan usaha untuk segmen Non Bandara meningkat sebesar Rp276,13 miliar 27,51%. Peningkatan pendapatan telah berhasil meningkatkan laba operasional Perseroan. Laba operasional di 2016 mencapai Rp1,65 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp355,45 miliar atau 27,47% dari 2015 yang mencapai Rp1,29 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, pada 2016, total aset Perseroan mencapai Rp23,67 triliun. Mengalami pertumbuhan sebesar Rp6,94 triliun atau sebesar 41,53% dibandingkan 2015 yang mencapai Rp16,72 triliun.

Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati, Perseroan juga telah berhasil meningkatkan pengakuan pihak eksternal terhadap kinerja Perseroan. Beberapa bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) telah mendapatkan penghargaan bergengsi baik di tingkat nasional maupun internasional. Capaian tersebut antara lain adalah *The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2016* yang diraih oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, *The 3rd World Best Airport 2015* dan *The 3rd World Best Airport 2016* kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang per tahun versi Airport Service Quality (ASQ) Award yang diselenggarakan oleh Airport Council International (ACI) yang diraih dan dipertahankan selama dua tahun berturut-turut oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, *The Most Punctual Airport 2016* (Bandara Paling Tepat Waktu di Dunia) versi

- 3) Achieving the proportion of non-aero income towards the operational income 57% in 2018.
- 4) Achieving and implementing the world class management system (especially in organizing the human resources, ICT, operation excellence, and service excellence) holistically before the end of 2018.
- 5) Applying the concept of Green Corporation and CSR Programs effectively.
- 6) Being a company that was ready for the privatization in 2018.

In order to reach those strategic actions, PT Angkasa Pura I (Persero) had determined some company's strategies through the development of services to the stakeholders. The Company's Development Service Strategies to the stakeholders are:

- 1) Excelling the implementation of service and operation excellence, system management, and world class ICT.
- 2) Optimizing the cost effectivity and efficiency.
- 3) Optimizing the entire potential synergies both internally and externally.
- 4) Accelerating and improving the value creation of strategic partnership.

THE COMPANY'S PERFORMANCE

By applying those strategies, the Company was successful to grab the opportunity in 2016. This could be seen on the good operational and financial performance. In 2016, all of the services related to either the airports or not had grown significantly. The business income for airport operational segment in 2016 increased significantly for Rp712.02 billion or 14.34%, while the business income for non-airport segment increased Rp276.13 billion. The increase of the income had successfully increase the operational profit of the Company. The operational profit in 2016 reached the number of Rp1.65 trillion, experienced the increase of Rp355.45 billion or 27.47% from 2015 which had reached Rp1.29 trillion. In line with that, the total of the Company's asset reached Rp23.67 trillion. The growth was Rp6.94 trillion or 41.53% compared to in 2015 which was only Rp16.72 trillion.

Our respective stakeholders and shareholders, the Company had also been successful in increasing the acknowledgment from the external parties regarding the Company's performance. Some airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero) had achieved some prestigious rewards nationally and internationally. This achievements were The Most Improved Airport in Asia Pacific 2016 which was achieved by Sultan Hasanuddin Makassar Airport, The 3rd World Best Airport 2015 and The 3rd World Best Airport 2016 for the category of airports with 15-25 million passengers per year of Airport Service Quality (ASQ) Award version which was held by Airport Council International (ACI) achieved and defended for two consecutive years by I Gusti Ngurah Rai Bali Airport, The Most Punctual Airport 2016 of OAG Punctuality League version for the category of big airports

OAG Punctuality League 2016 kategori bandara besar dari lembaga analisis perjalanan udara asal Inggris OAG, yang diraih oleh Bandara Juanda Surabaya, *The Best of The Best Airport of The Year 2016* versi *Bandara Award* yang diraih oleh Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Adi Soemarmo mendapat Peringkat I Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016.

PENCAPAIAN TARGET 2016

Secara umum, di tahun 2016 Perseroan telah mampu mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi Total Aset posisi sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai sebesar Rp23,67 triliun berada di atas yang ditargetkan yaitu sebesar Rp2,33 triliun atau 10,9% dari yang direncanakan sebesar Rp21,34 triliun. Ekuitas terealisasi sebesar Rp11,99 triliun di atas anggaran sebesar Rp391,03 miliar atau 3,4% dari yang dianggarkan sebesar Rp11,60 triliun.

Perseroan juga telah mampu mencapai target laba setelah pajak. Realisasi laba setelah pajak tahun 2016 sebesar Rp1,16 triliun berada di atas anggaran sebesar Rp303,32 miliar atau 35,5% dari yang direncanakan sebesar Rp855,48 miliar.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam menjalankan usahanya, selama tahun 2016 Perseroan mengalami beberapa kendala yang dijadikan tantangan oleh manajemen Perseroan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai standar bandar udara kelas dunia serta tantangan untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur bandar udara.

Perseroan menyadari bahwa tantangan tersebut harus dihadapi dengan menerapkan strategi usaha yang tepat dan efektif. Perseroan telah melakukan perubahan paradigma bisnis, dari sekadar *infrastructure provider* menjadi *service company* yang berorientasi kepada peningkatan kualitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara dengan menggunakan model *Smart Airport*. PT Angkasa Pura I (Persero) akan meningkatkan peran bandara sebagai akselerasi penciptaan daya saing dan strategi ekonomi domestik (*Center of Regional Development*) yang mendukung pengembangan *'catchment area'* sesuai dengan Konsep Integrasi Tol, Laut, dan Konektivitas Udara.

PROSPEK USAHA

Prospek usaha PT Angkasa Pura I (Persero) sangat terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada umumnya dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada khususnya. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan sebesar 3,4% di 2017 dan 3,6% di 2018. Pertumbuhan negara *Emerging Market* diproyeksikan akan mencapai sebesar 4,5% pada 2017 dan 4,8% pada 2018. Untuk kawasan Asean, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% di 2017 dan 5,2% di 2018.

from the air travel analyst organization from England OAG achieved by Juanda Surabaya Airport, The Best of The Best Airport of The Year 2016 of Bandara Award version achieved by Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Airport, and Adi Soemarmo Airport achieved Rank Number I for Healthy Airport Appreciation in National Level in 2016.

GOALS ACHIEVEMENT 2016

In general, in 2016 the Company had reached the targeted goals. The realization of the Asset Total until December 31, 2016 was Rp23.67 trillion. It was Rp2.33 trillion or 10.9% higher than the targeted amount which was only Rp21.34 trillion. While the equity reached Rp11.99 trillion above the budgeted amount of Rp391.03 billion or 3.4% of the budgeted amount Rp11.60 trillion.

The Company had also reached the targeted net profit after tax. The realization of net profit after tax in 2016 was Rp1.16 trillion above the budgeted amount of Rp303.32 billion or 35.5% from the targeted amount of Rp855.48 billion.

MILESTONE

In conducting the business, during 2016 the Company had faced some milestones that were considered as challenges by the management. Some of the milestones were the challenge to improve the service quality based on the world class airport standards and the challenge to improve the airport's capacity and infrastructure.

The Company understood that those challenges should be faced by implementing the right and effective business strategy. The Company had made some changes on the business paradigm from a mere infrastructure provider to a service company orienting towards the improvement of airport users' safety, security, and convenience by using Smart Airport model. PT Angkasa Pura I (Persero) would enhance the airport role as acceleration of competitiveness creation and Center of Regional Development that supported the development of *'catchment area'* in accordance with the Concept of Highway, Sea, and Air Connectivity Integration.

BUSINESS PROSPECT

The business prospect of PT Angkasa Pura I (Persero) is very related to the projection of world economic growth in general and to Indonesia's economic growth projection in particular. It is projected that the world economic growth will be 3.4% in 2017 and 3.6% in 2018. The growth of the national Emerging Market is projected to reach 4.5% in 2017 and 4.8% in 2018. For the Asean region, it is projected to growth 4.9% in 2017 and 5.2% in 2018.

Asia mendapatkan keunggulan dalam penerbangan global dan diharapkan menjadi pasar penerbangan terkemuka di dunia. Lalu lintas udara total untuk wilayah ini diperkirakan tumbuh rata-rata 6,0 persen, dan pada 2035, lalu lintas penumpang di seluruh Asia akan merupakan 48,7 persen dari lalu lintas penumpang global. Didorong oleh pembangunan daerah yang kuat ekonomi, struktur industri yang sangat efektif, dan meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara, lebih dari 100 juta penumpang baru diproyeksikan akan memasuki pasar setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pasar penerbangan Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan cepat sekitar 14,9%. Ke depan, dengan melihat prospek pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lalu lintas kebandarudaraan global dan Indonesia, maka Perseroan optimis dapat meraih setiap peluang dan potensi yang tercipta.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Perseroan berupaya keras untuk menyempurnakan dan melaksanakan praktik *good corporate governance* (GCG), tidak hanya selaras dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan *best practices*. Bagi Perseroan, penerapan GCG merupakan sebuah keharusan yang akan mendorong kesuksesan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi Perseroan.

STRUKTUR DAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Selama 2016, organ perusahaan telah menjalankan fungsinya dengan baik. RUPS Tahunan diselenggarakan dalam waktu yang tidak melewati batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 17 Mei 2016. RUPS Tahunan telah berjalan dengan baik dan dihadiri oleh pemegang saham dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama 2016, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap kepengurusan Perseroan yang secara umum mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan senantiasa proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Asia is superior in global aviation and it is expected to be the foremost aviation market in the world. The air traffic total for this area is estimated to grow 6.0% in 2035 and the passenger traffic in the entire Asia will be 48.7% of the global passenger traffic. Supported by the strong regional development, highly effective industrial structure, and enhancing air transportation service accessibility, it is projected that there will be 100 million new passengers each year.

Within 20 years, Indonesia's aviation market is estimated to be fast growing into 14.9%. In the future, according to the prospect of economic growth and Indonesia and global airport traffic growth, the Company is optimistic that it can reach all of the existing opportunities and potencies.

IMPLEMENTATION OF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

The Company has been struggling to complete and to implement the practice of good corporate governance (GCG), not only to be in accordance with the regulation demands but also to be in accordance with the best practices. For the Company, the implementation of GCG is a must in order to reach the successful future. Therefore, the Company implement GCG in all organizational levels and degrees by working with the regulation and provision related to the implementation of GCG for Company.

STRUCTURE AND MECHANISM OF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

According to the Law of the Republic Indonesia no. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company, the company organ consists of General Meeting of Shareholders (RUPS), the Management, and Board of Commissioners. During 2016, the company organ had conducted their function well. The yearly RUPS was conducted well and was attended by the shareholders and all members of Board of Commissioners and Management.

During 2016, the Board of Commissioners had done their function, role, and responsibility according to the articles of association and the authority given by RUPS. The Board of Commissioners is responsible to the shareholders to observe the Management's policies towards the management of the Company which, in general, refers to the approved Company's Work and Budget Plan, and to ensure the obedience towards all of the applied regulations and legislation.

The Board of Commissioners should proactively observe the performance of the Management and give inputs to the Management. The form of observance done by the Board of Commissioners refers to the implementation of the recommendation given by the Board of Commissioners or by the committees to the Management.

Direksi telah menjalankan tugas dengan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Pengurusan dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selama 2016, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan terus mendorong upaya peningkatan sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur dalam setiap kegiatan di unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Perseroan memiliki Unit *Internal Audit* yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Perseroan. Unit *Internal Audit* senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai koridornya.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan meliputi pengendalian keuangan dan operasional. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana Perseroan. Pengendalian keuangan adalah tahap dimana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi.

Sedangkan pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional Perseroan menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Perseroan mengidentifikasi operasi-operasi dan aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan teridentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasaran.

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perseroan. Sistem pengendalian internal Perseroan telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO).

MANAJEMEN RISIKO

Perkembangan industri penerbangan yang pesat menyebabkan risiko yang dihadapi Perseroan pada setiap proses bisnisnya menjadi semakin kompleks. Risiko-risiko pada Perseroan, baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam pengembangan bisnis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, Perseroan

The Management have done the job by doing all actions related to the management and have been responsible for the managing of the Company. The management is done for the sake of the Company based on the aim and objective of the Company. During 2016, the Management had managed according to the applied law and Statute.

INTERNAL CONTROLLING SYSTEM

The Company has been supporting the improvement of the effective internal controlling system. The internal control has become an intergrated part of the system and procedure in all activities in the work unit, so that whenever there is a deviation, it can be detected early and the correction can be done by the related work unit. The Company has a Unit Internal Audit which role is to evaluate the fulfilment and effectivity of the intern control done by the Company's management. The Unit Internal Audit will carry out the internal observance by using a systematic approach so that the implementation of GCG principles can be done appropriately.

The Company's Internal Controlling System includes the operational and financial control. The financial control is an effort to make the investment, budget allocation, and gain work in accordance with the Company's plan. The financial control is a step where the financial plan is implemented, which is about the feedback and the adjustment process done to ensure that the plans are executed or to change the existing plans based on the feedback about the changes of the operational environment.

Meanwhile, the Operational control is the allocation process so that the operational activities can be done effectively and efficiently. The Company's operational control uses the procedures and regulations which have been determined in advance for the relatively short term. The Company identifies the operations and activities related to the important aspects of environment which are identified based on the policy, purpose, and target.

The Company will always evaluate the internal controlling system within the company. The Company's internal controlling system is already in accordance with the Internal Control Intergrated Framework which is developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO).

RISK MANAGEMENT

The vast development of aviation industry causes the risks that are faced by the Company in every business process become more complex. The risks of the Company, both on the daily operational and business development, are influenced by some internal and external factors. Therefore, the Company has developed a comprehensive

mengembangkan suatu kerangka pengelolaan risiko perusahaan yang menyeluruh, *Enterprise Risk Management* (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, menciptakan nilai Perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong standar praktik terbaik tata kelola Perusahaan, serta menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari budaya Perseroan.

Kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Perusahaan di tingkat korporasi dilaksanakan oleh *Risk Management Committee* yang terdiri atas *Board of Directors* serta didukung oleh jajaran pejabat satu tingkat di bawah Direksi sebagai anggota. Secara umum Fungsi Manajemen Risiko Kantor Pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan manajemen risiko, melakukan pemantauan profil risiko Perseroan termasuk rencana penanganannya, memberikan rekomendasi kepada *Risk Management Committee*, mengevaluasi kebijakan strategis, memantau pelaksanaan manajemen risiko, serta bersama-sama dengan pengelola risiko di lingkungan Kantor Pusat untuk melaksanakan proses Manajemen Risiko.

Pada tingkat Kantor Cabang juga terdapat fungsi Manajemen Risiko yang bersama-sama dengan Pemilik Risiko (*Risk Owner*) Kantor Cabang melaksanakan proses Manajemen Risiko dengan tahapan melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, menentukan penanganan risiko serta melakukan *monitoring* terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi.

Berdasarkan serangkaian evaluasi secara berkala di lingkungan perusahaan terkait dengan pengimplementasian Manajemen Risiko, dilakukan beberapa perbaikan serta pengembangan selama Tahun 2016 diantaranya:

1. Aspek pengelolaan risiko menjadi poin dalam *Key Performance Indicator* bagi 13 Kantor Cabang.
2. Dilakukannya penyusunan Profil Risiko pada proyek pengembangan bandar udara maupun pembangunan Bandar Udara baru.
3. Dilakukannya pendampingan oleh Tim Kantor Pusat kepada Kantor Cabang dalam rangka penyusunan Profil Risiko Tahun 2017 dan penerapan RKAP berbasis risiko di Perusahaan.
4. Terhadap seluruh usulan investasi yang akan diajukan, kajian risiko menjadi salah satu dokumen pendukung utama sebagai syarat dalam pengambilan keputusan.
5. Dilakukannya rapat penyusunan *Risk Appetite and Risk Tolerance* bersama dengan Anggota *Risk Management Committee* dan ditentukannya nilai *Risk Tolerance* yang akan digunakan pada RKAP 2017.
6. Terbitnya pedoman pengukuran maturitas manajemen risiko PT Angkasa Pura I (Persero) melalui Keputusan Direksi nomor KEP.137/PG.01/2016 tanggal 8 September 2016.
7. Penyempurnaan *risk management system* untuk mempermudah pengelola risiko dalam melakukan pemantauan secara *real time*.

risk management framework, Enterprise Risk Management (ERM), to minimize the potency of loss and to optimize the profitability, to create the Company's values, and to improve the trust of the shareholders, to boost the best practice standard of the Company's governance, and to make the risk culture as the part of the Company's culture.

The policy and the strategy of the implementation of Company Risk Management on the corporate level are done by Risk Management Committee which consists of the Board of Directors and it is supported by the officials one level below the Management as the members. In general, the Head Office Risk Management is responsible for developing and carrying out the follow up towards the risk management report, doing the risk profile observation including the handling plan, giving recommendation to the Risk Management Committee, evaluating the strategic policy, monitoring the execution of risk management, and implementing Risk Management process together with the risk organizer in the Head Office environment.

On the level of Branch Office, the Risk Management altogether with the Risk Owner of Branch Office carries out the process of Risk Management with the steps of doing identification, analyzing, evaluating, determining the risk handling, and monitoring the identified risks.

Based on the series of evaluation done periodically in the company environment related to the implementation of Risk Management, there are some corrections and development during 2016, among them are:

1. Risk management aspect becomes the point in Key Performance Indicator for 13 branches.
2. The implementation of Risk Profile compilation in the airport development project and new airport construction.
3. The accompaniment by Head Office Team to the Branch Offices in compiling the Risk Profile 2017 and implementing risk-based RKAP in the Company.
4. For the whole investment proposal that will be proposed, risk review will be one of the main supporting documents as the requirement for decision making.
5. The implementation of the Risk Appetite and Risk Tolerance Compilation Meeting altogether with the Risk Management Committee member and the determination of Risk Tolerance that will be used in RKAP 2017.
6. The publication of the manual of risk management maturity measurement PT Angkasa Pura I (Persero) through the Decree of Board of Directors number KEP.137/PG.01/2016 on September 8, 2016.
7. The completing of risk management system to facilitate the risk management in real time monitoring.

CODE OF CONDUCT

Perseroan memiliki Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.43/OM.04/2014 tentang Pedoman Prilaku (*Code of Conduct*) PT. Angkasa Pura I. Pedoman prilaku Perseroan merupakan kumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku sehingga tercapai hasil yang konsisten yang sesuai dengan Budaya Perseroan dalam mencapai Visi dan Misi. Pedoman tersebut menjadi panduan yang berlaku bagi setiap insan Perseroan pada setiap level organisasi yang diharapkan akan memberikan kejelasan tindakan yang harus dilakukan dan ditaati sesuai dengan nilai-nilai korporasi yang telah dibangun.

Code of conduct berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Seluruh insan Perseroan mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan. Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh insan Perseroan pada setiap tingkatan/jenjang organisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui program orientasi insan baru Perseroan, pembagian buku saku, *website* internal, serta melalui kegiatan dan media lainnya yang dimiliki Perseroan.

Setiap pelanggaran atas *Code of Conduct* akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penerapan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif. Proses penerapan sanksi dilakukan melalui proses yang obyektif, independen dan berjenjang. Jenis sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct* dan budaya kerja, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun *Whistleblowing System* (WBS).

Dengan implementasi *Whistleblowing System* di Perseroan, diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan salah satu sarana pelaporan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pendeteksian dini (*Early Warning System*) atas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor melalui aplikasi WBS yang telah dikembangkan.

CODE OF CONDUCT

The Company owns a Code of Conduct regulated in the Decree of Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) Number KEP.43/OM/04/2014 about PT Angkasa Pura I Code of Conduct. The Company's Code of Conduct is a collection of commitments consisting of business ethics and work ethics which are compiled to influence, form, regulate, and carry out the behavior uniformity to achieve the consistent result according to the Company Culture in the achieve Vision and Mission. The code becomes the manual for every individual in the Company in each level of organization and it is expected to explain a distinct behavior that should be done and obeyed according to the existing corporate values.

Code of Conduct is applicable for every individual in the Company, which is Board of Commissioners, Management, and all employees. All Company's individuals have the awareness that by implementing the good ethics the image of the Company will be enhanced and strengthened. The Company will always socialize the Code of Conduct to all individuals in every level of organization. The socialization can be through the orientation program for the new individuals, the distribution of pocket book, internal website, and through the activities and other medias owned by the Company.

Every violation of the Code of Conduct will be given sanction according to the applied regulation and the sanction will not be discriminative. The process of sanction given is held through an objective, independent, and gradual process. The type of sanction will be in accordance with the level of the violation.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In order to improve the effectivity of GCG implementation, Company's management commits to perform the company professionally based on the company behavior which is in accordance with Code of Conduct and work ethics, to actualize a company good governance. Therefore, the Company has build Whistleblowing System (WBS).

The Whistleblowing System in the Company is expected to be the bridge of communication and one of the reporting facilities to optimize the Early Warning System as a mean of the implementation of risk management. The reporting of suspected violation is done by the Reporter through WBS application that has been developed.



Perseroan juga memberikan perlindungan baik kepada Pelapor maupun Terlapor untuk mendorong keberanian dalam melakukan pelaporan pelanggaran. Perlindungan kepada Pelapor meliputi jaminan terhadap kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan, serta jaminan keamanan bagi Pelapor terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi. Perseroan juga memberikan perlindungan terhadap Terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti dan memberikan kesempatan pada Terlapor dalam menjelaskan atas bukti-bukti pelanggaran yang ditemui dan memberikan kesempatan pembelaan jika diperlukan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GCG *assessment* merupakan upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara efektif. *Assessment* menjadi bagian dari mekanisme *check and balances*. Dengan *assessment*, maka capaian kegiatan dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan.

PT Angkasa Pura I (Persero) secara berkala melakukan pengukuran implementasi GCG (GCG *assessment*) di Perseroan sejak tahun 2007. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai implementasi GCG di perusahaan. *Assessment* GCG di Perseroan dapat dilakukan secara mandiri oleh internal Perseroan (*self assessment*) ataupun dengan menggunakan jasa pihak independen (evaluasi eksternal).

The Company has also given good protection to the Reporter and the Reported to support the courage to report the violence. The protection towards the Reporter consists of the guarantee of Reporter's and the report's confidentiality, the guarantee of the security of the Reporter towards the harmful actions, such as expulsion or any kinds of discrimination and harmful notes in the private files. The Company also gives protection towards the Reported as long as the presumption has not been proven and gives opportunity for the Reported to explain the proves of the violation and gives opportunity to give advocacy if necessary.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GCG assessment is a systematic, reliable, and legitimate effort to collect and process the data (facts and information) to conclude the reality that can be used as the foundation of management action so that GCG implementation can be done effectively. The Assessment becomes the part of mechanism check and balances. By using the Assessment, the achievement of the activity can be discovered with certainty and the follow up action to fix the performance of an action can be determined.

PT Angkasa Pura I (Persero) has been periodically conducting the measurement of GCG implementation (GCG Assessment) in the Company since 2007. This is done to gain an objective assessment of GCG implementation in the Company. GCG Assessment in the Company can be done both independently by Company internal (Self-assessment) and by using the service of independent party (external evaluation).

Pada tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan GCG *assessment* yang dilaksanakan oleh konsultan eksternal PT Adikarya Gemilang Solusindo. Pelaksanaan GCG *assessment* tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Capaian GCG *assessment* untuk tahun 2016 adalah sebesar 90,83 atau mencapai kategori Sangat Baik. Beberapa kelemahan pelaksanaan *good corporate governance* yang berhasil diidentifikasi dari proses *assessment* GCG selanjutnya direkomendasikan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas implementasi GCG kedepannya.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2016 terjadi perubahan komposisi Direksi. Pemegang saham melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No: SK-240/MBU/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 mengangkat Bapak Danang S. Baskoro sebagai Direktur Utama menggantikan Bapak Sulistyو Wimbo Hardjito. Dengan demikian, komposisi Direksi yang baru sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Danang S. Baskoro	President Director
Novrihandi	Finance and IT Director
Mochammad Asrori	Marketing and Business Development Director
Wendo Asrul Rose	Operation Director
Polana Banguningsih Pramesti	Technical Director
Adi Nugroho	Human Capital and General Affair Director

Pemegang Saham menilai bahwa komposisi Direksi saat ini sudah cukup efektif dalam menjalankan tugas kepengurusan Perseroan.

PENUTUP

Demikian laporan tugas Direksi atas pelaksanaan usaha selama tahun 2016. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pelanggan dan mitra kerja yang telah memberikan kepercayaan kepada Perseroan. Atas dukungan yang diberikan selama ini, Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya dengan sangat baik.

Direksi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen dan kerja sama dari seluruh jajaran tim manajemen, dan seluruh karyawan yang telah menunjukkan kinerja dengan baik. Atas kerja keras dari tim manajemen dan seluruh karyawan, Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya di 2016.

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) conducted GCG Assessment held by the external consultant of PT Adikarya Gemilang Solusindo. The implementation of GCG Assessment was done according to the Regulation of the Secretary of State-Owned Enterprise Ministry Number Sk-16/S.MBU/2012 on June 6, 2012 about the Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation towards the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. The achievement of GCG assessment for 2016 was 90.83 or in the Very Good category. The weakness of the implementation of good corporate governance that has been identified from the GCG assessment is recommended to be followed-up to improve the quality of the next GCG implementation.

CHANGES OF MANAGEMENT COMPOSITION

In 2016 there was changing in Management composition. The stakeholders through the Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number SK-240/10/2016 on October 17, 2016 elected Mr. Danang S. Baskoro as the President Director succeeding Mr. Sulistyو Wimbo Hardjito. Therefore, the new composition of Management is as the following:

Stakeholders assess that the Board of Directors composition is currently effective in executing the Company's managerial activities.

ENCLOSURE

This is the end of the duty of the Management and the business implementation report during 2016. The Management gives the highest appreciation for the customers and partners that have given trust to the Company. Through the support given all this time, the Company is able to improve the performance very well.

The Management also gives the highest appreciation for the commitment and the cooperation from all management team and all employees that have performed the jobs very well. Due to the hard work of the management team and all employees, the Company can improve its performance in 2016.

Atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris sehingga dapat dicapai kinerja Perseroan dengan baik. Direksi juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham. Atas dukungan yang diberikan selama ini, Perseroan mampu menunjukkan pencapaian kinerja yang baik.

Untuk kedepannya, kami tetap berkomitmen akan selalu memberikan yang terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Direksi berharap bahwa Perseroan akan menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

The Management gives the highest appreciation to the Board of Commissioners because through the direction from the Board of Commissioners, the Company can implement good performance. The Management would also give the highest appreciation to the shareholders, because through the supports, the Company can show good performance.

For the future, we are committed to always give our best in order to improve the continuous the performance achievement. The Management hopes that the Company will be an important element and will be contributive in the economic development of Indonesia.

Jakarta, April 2017

Atas nama Direksi
On Behalf of the Board of Director
PT Angkasa Pura I (Persero)



Danang S. Baskoro
Direktur Utama
President Director



Dari Kiri ke Kanan / From Left to Right

1. Novrihandri

Direktur Keuangan dan TI
Finance and IT Director

2. Polana Banguningsih Pramesti

Direktur Teknik
Technical Director

3. Adi Nugroho

Direktur Personalia dan Umum
Human Capital and General Affair Director

4. Danang S. Baskoro

Direktur Utama
President Director

5. Wendo Asrul Rose

Direktur Operasi
Operation Director

6. Moch. Asrori

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Marketing and Business Development Director

Tanggung Jawab Laporan

Responsibility of Reporting

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016

Statement of the Board of Directors Regarding the Responsibility for the 2016 Annual Report of PT Angkasa Pura I (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2016 Annual Report of PT Angkasa Pura I (Persero) is complete and we take full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hereby, this statement is true and correct.

Jakarta, 28 April 2017
Jakarta, April 28th, 2017

Direksi / Board of Directors



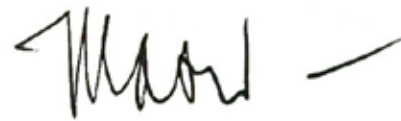
DANANG S. BASKORO

Direktur Utama
President Director



NOVRIHANDRI

Direktur Keuangan dan TI
Finance and IT Director



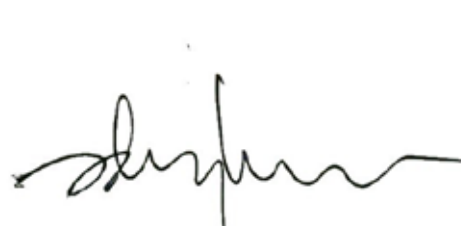
MOCHAMMAD ASRORI

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Marketing and Business Development Director



WENDO ASRUL ROSE

Direktur Operasi
Operation Director



ADI NUGROHO

Direktur Personalia dan Umum
Human Capital and General Affair Director



POLANA BANGUNINGSIH PRAMESTI

Direktur Teknik
Technical Director

Tanggung Jawab Laporan

Responsibility of Reporting

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016

Statement of the Board of Commissioners Regarding the Responsibility for the 2016 Annual Report of PT Angkasa Pura I (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2016 Annual Report of PT Angkasa Pura I (Persero) is complete and we take full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hereby, this statement is true and correct.

Jakarta, 28 April 2017
Jakarta, April 28th, 2017

Dewan Komisaris / Board of Commissioners


ANDRINOF A. CHANIAGO*

Komisaris Utama Merangkap
Komisaris Independen
President Commissioner and
Independent Commissioner


ANDI WIDJANTO**

Komisaris Utama
President Commissioner


SELBY NUGRAHA RACHMAN

Komisaris
Commissioner


ANANDY WATI

Komisaris
Commissioner


DWI ARY PURNOMO

Komisaris
Commissioner


BOY SYAHRIL QAMAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner


AGUS SANTOSO*

Komisaris
Commissioner


SUPRASETYO**

Komisaris
Commissioner

* Masa jabatan telah berakhir pada tanggal 4 April 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-65/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

** Mulai menjabat tanggal 4 April 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-65/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I





PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

PT Angkasa Pura I (Persero), yang selanjutnya disebut Perseroan, merupakan pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia. PT Angkasa Pura I (Persero) berawal dari Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran, yang dibentuk pada tanggal 20 Februari 1962 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962. Tugas pokoknya adalah mengelola dan mengusahakan Bandar Udara Kemayoran Jakarta, yang merupakan bandar udara internasional pertama di Indonesia.

PT Angkasa Pura I (Persero), known as the Company, is the pioneer in commercial airport management in Indonesia.

Initially, the Company was part of PN Angkasa Pura Kemayoran which was established on 20 February 1962 pursuant to Government Regulation Number 33 of 1962 with the main duty of managing the Jakarta Kemayoran Airport that was the first international airport in Indonesia.



Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Name	PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
Alamat Kantor Pusat Head Office	Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2 Jakarta, 10610 Telepon : 62-21 6541961 Faksimili : 62-21 6541513, 6541514 <i>Email</i> : humas@ap1.co.id <i>Website</i> : www.ap1.co.id
Bidang Usaha Line of Business	1. Pelayanan Jasa Kebandarudaraan / Airport Services 2. Pelayanan Jasa Terkait Bandara / Airport-Related Services
Status Perusahaan Company Status	Badan Usaha Milik Negara / State Owned Company
Kepemilikan Ownership	100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia / 100% owned by the State of the Republic of Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	15 November 1962 / November 15, 1962
Dasar Hukum Pendirian Legal Ground of Establishment	PP Nomor 5 tahun 1992 / Government Regulation Number 5 of 1992
Modal Dasar Authorized Capital	Rp12.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Paid-Up Capital	Rp6.414.412.000.000,-
Jumlah Karyawan Number of Employees	3.025 orang / 3.025 person
Layanan Informasi Information Service	<p>Corporate Secretary Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2 Jakarta, 10610 Telepon : 62-21 6541961 Faksimili : 62-21 6541513, 6541514 <i>Email</i> : humas@ap1.co.id <i>Website</i> : www.angkasapura1.co.id Twitter : @AP_Airports Instagram : @AP_Airports Facebook : www.facebook.com/angkasapura.airports Youtube : www.youtube.com/angkasapuraairports</p> <p>Contact Center Bandara 172 Telepon : 172 <i>Email</i> : cc172@ap1.co.id Twitter : @angkasapura172 Twitter : @angkasapura172</p>

Riwayat Singkat

Brief History



PT Angkasa Pura I (Persero), yang selanjutnya disebut Perseroan, merupakan pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia. PT Angkasa Pura I (Persero) berawal dari Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran, yang dibentuk pada tanggal 20 Februari 1962 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962. Tugas pokoknya adalah mengelola dan mengusahakan Bandar Udara Kemayoran Jakarta, yang merupakan bandar udara internasional pertama di Indonesia.

PT Angkasa Pura I (Persero), referred to as the Company, is a pioneer in commercial airport affairs business in Indonesia. PT Angkasa Pura I (Persero), originated from the State Enterprise (Perusahaan Negara/PN) Angkasa Pura Kemayoran, established on 20 February 1962 pursuant to Government Regulation Number 33 of 1962. Its main task was managing and operating Kemayoran Airport Jakarta, which was the first international airport in Indonesia.

Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Bandar Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah. Tanggal 20 Februari 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Perseroan. Dalam perkembangannya, untuk lebih memperluas cakupan kerja mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia, berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura sejak tanggal 17 Mei 1965. Perubahan ini bertujuan untuk lebih

After undergoing a two-year transitional period, since 20 February 1964, PN Angkasa Pura Kemayoran officially took over all assets and operations of Kemayoran Airport Jakarta from the Government. The date of 20 February 1964 was then designated as the date of the establishment of the Company. In its development, to further extend the work scope of managing other airports in the territory of Indonesia, pursuant to Government Regulation Number 21 of 1965, Angkasa Pura Kemayoran changed its name to State Enterprise (Perusahaan Negara/PN) Angkasa Pura since May 17, 1965. This change aimed to open more opportunities for

membuka peluang bagi PN Angkasa Pura dalam melakukan pengelolaan bandar udara lain di wilayah Indonesia. Secara bertahap, PN Angkasa Pura telah mengelola Bandar Udara Ngurah Rai – Bali, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Polonia – Medan, Juanda – Surabaya, Sepinggan – Balikpapan, dan Sultan Hasanuddin – Ujung Pandang.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1974, status badan hukum Perseroan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Secara umum, seluruh perubahan tersebut ditujukan untuk lebih memperluas cakupan kerja pengelolaan bandar udara di Indonesia. Di tahun 1985, Bandar Udara Internasional Kemayoran dinyatakan berhenti beroperasi. Seluruh kegiatan operasional dialihkan ke Bandar Udara Soekarno Hatta yang pada kala itu bernama Bandar Udara Cengkareng (CGK).

Berdasarkan PP Nomor 25 tahun 1987, Perum Angkasa Pura berubah nama sejak tanggal 19 Mei 1987 menjadi Perum Angkasa Pura I bersamaan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II yang khusus bertugas mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma.

Di tahun 1992, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor: C2-470.HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2914/1993. Hingga saat ini Perseroan tidak pernah melakukan pergantian nama dan tetap menggunakan nama PT Angkasa Pura I (Persero).

Perseroan senantiasa mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Hal ini dilakukan guna menghasikan keuntungan bagi Perseroan melalui usaha jasa kebandarudaraan dalam arti yang seluas-luasnya dan kegiatan bisnis lainnya yang relevan dengan usaha jasa kebandarudaraan, baik dilaksanakan mandiri maupun bekerja sama dengan badan lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Jasa Pelayanan Penerbangan tidak dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tanggal 16 Januari 2013 pukul 22.00 WIB (berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: HK.201/1/10/DRJU-2013; KEP.15/OM.02.03/2013; MOU.04.07.01/00/02/2013/001; 032/DU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013).

Berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn No. 02 tanggal 16 Januari 2013 yang telah disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor yang diambil dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2011 sejumlah 300.000 saham

PN Angkasa Pura in managing other airports in the territory of Indonesia. Gradually, PN Angkasa Pura has managed Ngurah Rai Airport – Bali, Halim Perdanakusuma Airport – Jakarta, Polonia Airport – Medan, Juanda Airport – Surabaya, Sepinggan Airport – Balikpapan, and Sultan Hasanuddin Airport – Ujung Pandang.

Pursuant to Government Regulation Number 37 Year 1974, the status of legal entity of the Company was then changed to Public Company (Perusahaan Umum/Perum). In general, all of these changes were intended to further broaden the work scope of airport management in Indonesia. In 1985, Kemayoran International Airport was declared to stop operating. All operations were transferred to Soekarno Hatta Airport which at that time was named Cengkareng Airport (CGK).

Pursuant to Government Regulation Number 25 of 1987, Perum Angkasa Pura changed its name since 19 May 1987 to Perum Angkasa Pura I in conjunction with the establishment of Perum Angkasa Pura II, which is specialized in managing Soekarno-Hatta Airport and Halim Perdanakusuma Airport.

In 1992, pursuant to Government Regulation Number 5 of 1992, the Public Corporation (Perum) was converted to a Limited Company (PT) which shares are fully owned by the Republic of Indonesia so that its name became PT ANGKASA PURA I (PERSERO) based on Notarial Deed by Notary Muhani Salim, SH dated 3 January 1993 and was approved by the Minister of Justice by virtue of Decree Number: C2-470.HT.01.01 of 1993 dated 24 April 1993 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 52 dated 29 June 1993 with Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number: 2914/1993. Until today, the Company has retained its name as PT Angkasa Pura I (Persero).

The Company consistently support Government's policies and programs in economic and development sectors. This is conducted to generate profits for the Company through airport services business in the broadest sense and other business activities relevant to airport affairs business, either independently or in cooperation with other entities. Pursuant to Government Regulation Number 77 of 2012 on Public Corporation of the Indonesian Aviation Navigation Service Provider (LPPNPI), Aviation Service is no longer managed by Angkasa Pura I (Persero) since 16 January 2013 at 22.00 Western Indonesia Time (in compliance with Memorandum of Understanding Number: HK.201/1/10/DRJU-2013; KEP.15/OM.02.03/2013; MOU.04.07.01/00/02/2013/001; 032/DU/II/2013 dated 12 February 2013).

Based on Notarial Deed by Nanda Fauz Iwan, SH, MKn No. 02 dated 16 January 2013 archived in the database of Legal Entities Administration System of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-02672 dated 31 January 2013, the Company agreed to increase its paid-up capital through capitalization of a portion of the Company's reserves accumulated up to 2011 of 300,000 shares with the nominal value of Rp1,000,000

dengan nilai nominal Rp1.000.000 sehingga seluruhnya seharga Rp300.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) mengalami perubahan pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat PT Angkasa Pura I (Persero) No. 5 pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas oleh Notaris Utiek R. Abdurachman, SH, MLI, MKn, mengenai peningkatan modal dasar dan penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan serta pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn no. 11 tanggal 22 September 2015 yang telah disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-AH.01.03-0972301 tanggal 22 September 2015, Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor yang semula modal awal 3.488.245 saham ditambahkan sebesar 2.926.167 saham diambil dari Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 dan kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2014 dengan nilai nominal Rp1.000.000 (rupiah penuh) sehingga seluruhnya seharga Rp6.414.412.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Setelah keluarnya akta perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana disebut di atas maka pasal 4 (empat) dalam Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut.

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar 12.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh) atau seluruhnya berjumlah Rp12.000.000.000 (Rupiah penuh).
- (2) Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 6.414.412 saham atau seluruhnya berjumlah Rp6.414.412.000.000,- (Rupiah penuh) kedalam kas Perseroan, dengan cara sebagai berikut.
 - Sebesar Rp3.488.245.000.000 (Rupiah penuh) telah disetor dengan uang tunai sebagai setoran modal lama sebagaimana dinyatakan dalam akta nomor 02 tanggal 16 Januari 2013 oleh Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHUAH.01.10.02672 tanggal 31 Januari 2013.
 - Sebesar Rp2.926.166.059.117,86 (Rupiah penuh) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementrian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari APBN TA 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014.

resulting an amount of Rp300,000,000 as a whole equity participation of the Republic of Indonesia.

The Articles of Association of PT Angkasa Pura I (Persero), was amended on 15 August 2012 as stipulated in the Minutes of Meeting and the Decision of the Shareholders that was Decided Outside the Meeting of PT Angkasa Pura I (Persero), No. 5 on the aforementioned date notarized by Notary Utiek R. Abdurachman, SH, MLI, MKn, regarding the increase of the base capital and additional capital from the Republic of Indonesia for the Company and the termination and appointment of the Members of the Board of Commissioners.

Based on Notarial Deed by Nanda Fauz Iwan, SH, MKn no. 11 dated 22 September 2015 archived in the database of Legal Entities Administration System of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia no. AHU-AH.01.03-0972301 dated 22 September 2015, the Company agreed to increase its paid-up capital with the beginning capital of 3,488,245 shares increased by 2,926,167 shares from the Capital Placement as Participation of the Republic of Indonesia, pursuant to Government Regulation Number 8 of 2014 and capitalization of a portion of the Company's reserves accumulated up to 2014 with the nominal value of Rp1,000,000 (in rupiah) resulting an amount of Rp6,414,412,000 as a whole equity participation of the Republic of Indonesia. Upon issuance of the amendment of the aforementioned base capital and paid-up capital, the article 4 (four) in the Company's Articles of Association is amended as follows:

- (1) The Base Capital of the Company is equivalent to 12,000,000 shares, each valuing Rp1,000,000 (in Rupiah) or totaling Rp12,000,000,000,000 (in Rupiah).
- (2) The capital placement from this capital fully paid by the Republic of Indonesia is 6,414,412 shares or totaling a value of Rp6,414,412,000, (in Rupiah) which is placed as cash in the Company's books through the following method:
 - The amount of Rp3,488,245,000,000 (in Rupiah) is deposited in cash as the former capital placement as stated in the Notarial Deed number 02 dated 16 January 2013 by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, who is validated by Legal Entities Administration System of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHUAH.01.10.02672 dated 31 January 2013.
 - The amount of Rp2,926,166,059,117.86 (in Rupiah) originated from the diversion of the State-Owned Asset to the Ministry of Transportation which is procured from the State Budget of 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, and 2011 as stipulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014.

Sampai dengan akhir tahun 2016, Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebanyak 13 bandara dan 1 *Strategic Business Unit* dan 5 Perusahaan Anak yang terletak di kota-kota besar wilayah tengah dan timur Indonesia, yaitu:

1. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) - Bali
2. Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (SUB) - Surabaya
3. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG) - Makassar
4. Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN) - Balikpapan
5. Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo (BIK) - Biak
6. Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi (MDC) - Manado
7. Bandar Udara Internasional Adisutjipto (JOG) - Yogyakarta
8. Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo (SOC) - Surakarta
9. Bandar Udara Syamsudin Noor (BDJ) - Banjarmasin
10. Bandar Udara Internasional Pattimura (AMQ) - Ambon
11. Bandar Udara Internasional Ahmad Yani (SRG) - Semarang
12. Bandar Udara Internasional Lombok (LOP) - Praya
13. Bandar Udara Internasional El Tari (KOE) - Kupang

By the end of 2015, PT Angkasa Pura I (Persero) operates 13 airports and 1 Strategic Business Unit and 5 Subsidiaries located in cities in the central and eastern parts of Indonesia, namely:

1. I Gusti Ngurah Rai International Airport (DPS) - Bali
2. Juanda International Airport Surabaya (SUB) - Surabaya
3. Sultan Hasanuddin International Airport (UPG) - Makassar
4. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport (BPN) - Balikpapan
5. Frans Kaisiepo International Airport (BIK) - Biak
6. Sam Ratulangi International Airport - Manado
7. Adisutjipto International Airport (JOG) - Yogyakarta
8. Adi Soemarmo International Airport (SOC) - Surakarta
9. Syamsudin Noor Airport (BDJ) - Banjarmasin
10. Pattimura International Airport (AMQ) - Ambon
11. Ahmad Yani International Airport (SRG) - Semarang
12. Lombok International Airport (LOP) - Praya
13. El Tari International Airport (KOE) - Kupang



Logo Perusahaan

Corporate Logo



Angkasa Pura | AIRPORTS

Tulisan "Angkasa Pura" tampil dengan segar berdampingan dengan kata "Airports" untuk memperjelas bisnis yang digeluti perusahaan. Warna hijau bermakna bisnis yang membumi, berakar, tumbuh dan lestari yang dipadu dengan warna biru yang melambangkan langit atau angkasa. Dua warna yang berbeda dipadu secara harmonis untuk memberi pesan tentang cita-cita yang setinggi langit dan harus dimintai dengan sinergi konsep dan kerja yang membumi, berakar, tumbuh dan lestari.

Simbol dan unsur "*give and take*" menyiratkan bahwa: suatu perolehan adalah merupakan konsekuensi logis dan memberi: yang merupakan dasar prinsip kemuliaan pelayanan dan profesionalisme dalam kebersamaan "*together stronger*".

Simbol juga menyiratkan "senyuman" yang melambangkan keramahan pelayanan yang manusiawi yang merupakan kebanggaan perusahaan.

Simbol dua unsur yang "*inter-locking*" mencerminkan *safety and security concept* yang merupakan faktor terpenting dalam *Airport Business*.

Penerapan simbol dengan sudut aerodinamis yang naik ke kanan mencerminkan tekad dan semangat transformasi yang progresif diupayakan demi kemajuan perusahaan.

The word Angkasa Pura is freshly displayed next to the word AIRPORTS to emphasize the line of business of the company. Green signifies grounded, rooted, growing and long-lasting business combined with blue which symbolizes sky or space. Two different colors are combined harmoniously to provide a message on the sky-high ideals which correspond to the synergy of grounded, rooted, growing and long-lasting concepts and works.

The symbol and the element of "give and take" implies that: take is the result of a logical consequence and give: is the basic principles of honor in serving and professionalism in the sense of "together stronger".

The symbol also implies a "smile" which symbolizes the hospitality of employees' service which is the pride of the company.

The symbol of two "inter-locking" elements reflects the safety and security concept which is the most important factor in Airport Business.

The symbols tagged at aerodynamic angle turning to slightly upper right reflects the determination and spirit of progressive transformation striving for the development of the company.

Bidang Usaha

Line of Business

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

Tujuan dan lapangan usaha dari Perseroan adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi Perseroan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas-luasnya dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Kegiatan usaha yang dijalankan adalah Jasa Pelayanan Kebandarudaraan yang meliputi:

1. **Aeronautika Non ATS (Kebandaraan)**
 - a. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara.
 - b. Penyediaan fasilitas *Counter Check-in*, Garbarata (*Aviobridge*), *Baggage Handling System*(BHS)/ *Hold Baggage Screening* (HBS)
 - c. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos.
2. **Non Aeronautika (Non Bandara)**
 - a. Penyediaan lahan untuk pembangunan, lapangan dan kawasan industri serta gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
 - b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan.
 - c. Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan.
 - d. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan.

Perseroan dapat pula mendirikan/menjalankan perusahaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut di atas baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan badan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Jasa Pelayanan Penerbangan tidak dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tanggal 16 Januari 2013 pukul 22.00 WIB (berdasarkan Nota Kesepahaman nomor HK.201/1/10/DRJU-2013; KEP.15/OM.02.03/2013; MOU.04.07.01/00/02/2013/001; 032/DU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013).

SERVICES IN COMPLIANCE WITH THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

The objective and the line of business of the Company are to implement and support the government's policies and programs in economic and development sector as well as to generate profits for the Company through airport services business in the broadest sense and other business activities relevant to airport services business.

SERVICES PROVIDED

The Company provides airport affairs services which include:

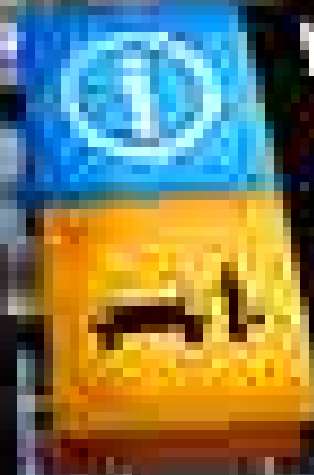
1. **Non ATS Aeronautics**
 - a. Provision, management and development of facilities for aircraft landing, take-off, parking and hangar service activities.
 - b. Provision of Counter Check-in, Garbarata (*Aviobridge*), Baggage Handling System (BHS)/ Hold Baggage Screening (HBS) facilities.
 - c. Provision, management and development of terminals for passenger, cargo, and post transportation service.
2. **Non Aeronautics**
 - a. Provision of land for construction, fields, and industrial zone as well as buildings/structures supporting air transportation.
 - b. Provision, management, and development of electronic, electrical, water and waste disposal installation facilities.
 - c. Provision of airport-related consulting, education and training services.
 - d. Other businesses supporting the achievement of the Company's objectives.

The Company may also establish/operate other companies relevant to the aforementioned business either separately or jointly with other entities provided that it does not contradict the applicable laws and regulations and in compliance with the Articles of Association.

Pursuant to Government Regulation Number 77 of 2012 Concerning the Public Company of the Indonesian Institution of Air Navigation Service Provider (LPPNPI), Air Traffic Services are no longer managed by Angkasa Pura I (Persero) since 16 January 2013 at 22.00 Western Indonesian Time (pursuant to Memorandum of Understanding number HK.201/1/10/DRJU-2013; KEP.15/OM.02.03/2013; MOU.04.07.01/00/02/2013/001; 032/DU/II/2013 dated 12 February 2013).

Check-In
Pendaftaran

Secure Gates
Pemeriksaan Keamanan



Information
Informasi

Pick-Up Zone
Zona Pengambilan

APRIL 2015

Produk dan Jasa

Products and Services

Produk jasa PT Angkasa Pura I (Persero) dapat diuraikan sebagai berikut.

1. PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara)

Produk Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara ini adalah kegiatan pelayanan jasa pendaratan yang diberikan terhadap pesawat udara yang mendarat di bandar udara. Produk Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penempatan pesawat udara di tempat terbuka di bandar udara. Produk Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara yaitu pelayanan jasa yang diberikan terhadap pesawat udara di dalam hanggar.

2. PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara)

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada setiap penumpang di terminal keberangkatan atau kedatangan bandar udara yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

3. Garbarata (Aviobridge)

Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (*Aviobridge*) adalah pelayanan jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*) yang diberikan kepada setiap badan usaha angkutan udara/perusahaan angkutan udara/operator pesawat udara pada saat keberangkatan atau kedatangan penumpang.

4. Counter Check-In

Pelayanan Jasa Pemakaian *Counter Check-In* adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara sehubungan pemakaian fasilitas bandar udara.

5. Baggage Handling System (BHS)/Hold Baggage Screening (HBS)

Pelayanan jasa yang diberikan kepada perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara sehubungan pemakaian fasilitas *Baggage Handling System* yaitu suatu sistem *conveyor* yang digunakan untuk mengangkut bagasi penumpang setelah proses pemeriksaan dan *check-in* bagi penumpang keberangkatan, selanjutnya bagasi tersebut dibawa ke area penumpukan siap angkut (*baggage make up area*) untuk diangkut ke pesawat udara, begitu juga sebaliknya bagi penumpang kedatangan dibawa ke area pengambilan bagasi (*baggage claim*). Sedangkan pelayanan jasa yang diberikan kepada perusahaan angkutan udara atau operator pesawat udara sehubungan pemakaian fasilitas *Hold Baggage Screening* yaitu suatu sistem pemeriksaan bagasi dengan mesin *x-ray* yang terintegrasi langsung dengan BHS dan secara otomatis dapat mengetahui

Service products of the Company are described as follows:

1. PJ4PU (Aircraft Landing, Parking and Hangar Service)

Aircraft Landing Service constitutes the services that are provided to aircrafts landing at the airport. Aircraft Parking Service constitutes the services that are provided to aircrafts parking in an open space at the airport. Aircraft Hangar Service constitutes the services that are provided to aircrafts stowing in the hangar.

2. PJ2PU (Aircraft Passenger Service)

Aircraft Passenger Service constitutes the services that are provided to each passenger at the departure or arrival terminals at the airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero),.

3. Garbarata (Aviobridge)

Garbarata (*Aviobridge*) Facility Service constitutes garbarata (*aviobridge*) services that are provided to any air transportation business entity/airline/ aircraft operator for their passengers embarking to and disembarking from the aircraft.

4. Check-In Counter

Facility Service of Check-In Counter constitutes the services that are provided to any airlines or aircraft operators in using check-in counter facilities at the airport.

5. Baggage Handling System (BHS)/Hold Baggage Screening (HBS)

The BHS service constitutes the services provided to any airlines or aircraft operators in using Baggage Handling System facility, which is a conveyor belt system used to transport passengers' baggage after the screening and check-in process for departing passengers. The baggage is then subsequently taken to (baggage make up area) to be carried into the aircraft, and reciprocally for arriving passengers where the baggage is taken to (baggage claim). The service provided to any airlines or aircraft operators in using Hold Baggage Screening facility includes a baggage screening system using an x-ray machine directly integrated to BHS and automatically identifies the security status of the baggage to be distributed based on the screening result, in which the baggage is sorted and carried into the aircraft for departing passengers.

status keamanan bagasi untuk disalurkan sesuai hasil pemeriksaan, pemilahan (sortir) dan tujuan bagasi untuk diangkut ke pesawat udara bagi penumpang keberangkatan.

6. **Konsesi Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara**
Konsesi adalah jasa yang diberikan atas hak penggunaan fasilitas bandar udara kepada pihak ketiga terkait kegiatan usaha yang dilakukan di bandar udara. Konsesi ini dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha di bandar udara seperti usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), *Regulated Agent* (RA), *Ground Handling*, dan *In-flight Catering*.

SEGMENTASI PRODUK

Segmentasi pasar PT Angkasa Pura I (Persero) terbagi menjadi 2 jenis, yaitu segmen produk jasa yang diberikan kepada perusahaan (Badan Usaha Angkutan Udara dan Mitra Usaha) dan segmen produk jasa yang diberikan langsung kepada konsumen (penumpang pesawat udara dan pengantar/penjemput).

6. **Concession Rights for Airport Facility Services**
The concession are the rights provided to a third party to use airport facilities for business activities conducted at the airport. This concession is applied to companies operating at the airports such as Air Freight Forwarding Services (EMPU), *Regulated Agent* (RA), *Ground Handling*, and *In-flight Catering*.

PRODUCT SEGMENTATION

The market segmentation of PT Angkasa Pura I (Persero), is divided into 2 types, namely the segment of services provided to companies (Air Transport Business Agency and Business Partner) and the segment of service provided directly to consumer (aircraft passengers and attendees).

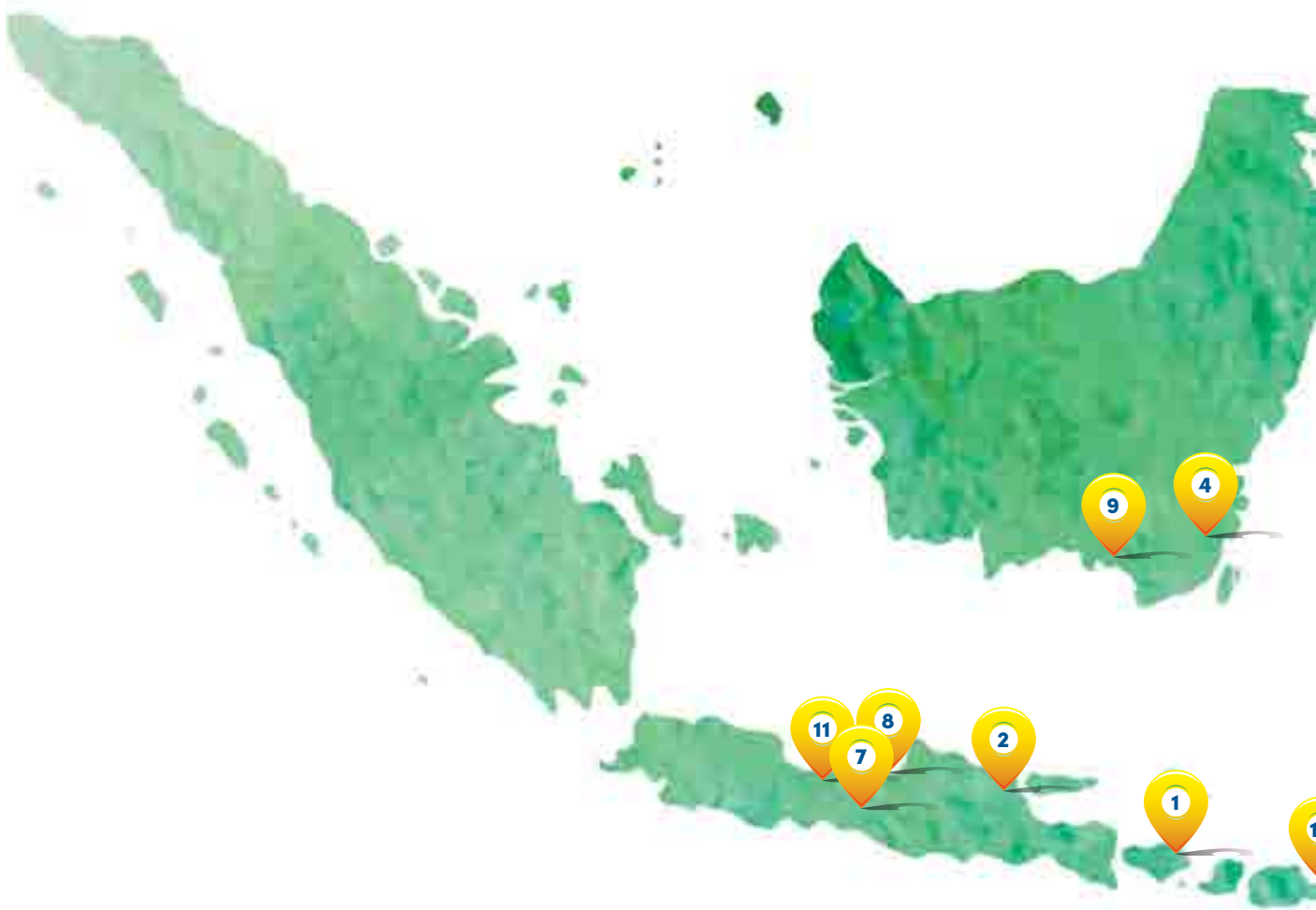


Peta Wilayah Operasional

Operational Areas

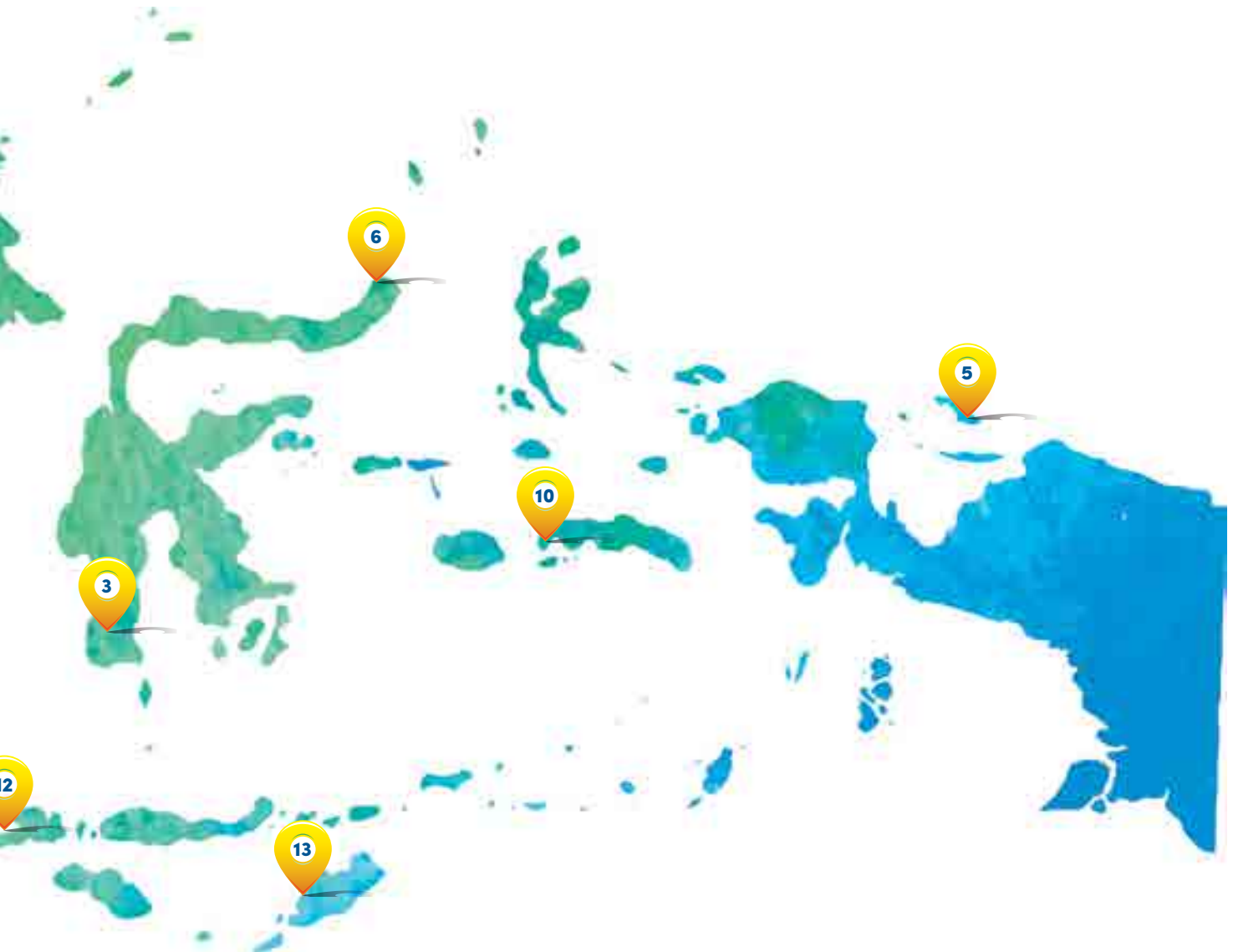
Sampai dengan akhir tahun 2016, Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebanyak 13 bandara dan 1 *Strategic Business Unit* serta 5 Perusahaan Anak yang terletak di kota-kota besar di sebagian wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, yaitu:

By the end of 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) operates 13 airports, 1 Strategic Business Unit and 5 Subsidiaries located in cities in the western, central and eastern parts of Indonesia, namely:



1. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) - Bali
2. Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (SUB) - Surabaya
3. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG) - Makassar
4. Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN) - Balikpapan
5. Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo (BIK) - Biak
6. Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi (MDC) - Manado
7. Bandar Udara Internasional Adisutjipto (JOG) - Yogyakarta
8. Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo (SOC) - Surakarta

1. I Gusti Ngurah Rai International Airport (DPS) - Bali
2. Juanda International Airport Surabaya (SUB) - Surabaya
3. Sultan Hasanuddin International Airport (UPG) - Makassar
4. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport (BPN) - Balikpapan
5. Frans Kaisiepo International Airport (BIK) - Biak
6. Sam Ratulangi International Airport - Manado
7. Adisutjipto International Airport (JOG) - Yogyakarta
8. Adi Soemarmo International Airport (SOC) - Surakarta



- 9. Bandar Udara Syamsudin Noor (BDJ) - Banjarmasin
- 10. Bandar Udara Internasional Pattimura (AMQ) - Ambon
- 11. Bandar Udara Internasional Ahmad Yani (SRG) - Semarang
- 12. Bandar Udara Internasional Lombok (LOP) - Praya
- 13. Bandar Udara Internasional El Tari (KOE) - Kupang

- 9. Syamsudin Noor Airport (BDJ) - Banjarmasin
- 10. Pattimura International Airport (AMQ) - Ambon
- 11. Ahmad Yani International Airport (SRG) - Semarang
- 12. Lombok International Airport (LOP) - Praya
- 13. El Tari International Airport (KOE) - Kupang

Inovasi Bandara

Airports Inovation



AIRPORT OPERATION CONTROL CENTRE (AOCC)

Perseroan menyediakan AOCC untuk mengefektifkan koordinasi antara perusahaan penerbangan; *ground handling*; imigrasi; kepolisian; bea dan cukai dan lainnya.

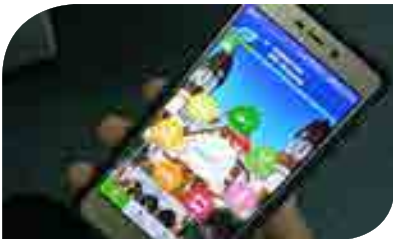
The Company provides AOCC to streamline the coordination between airlines; ground-handling; immigration, police, customs and other duties.



WEBSITE YANG LEBIH FRESH DAN INFORMATIF

Tampilan *website* yang lebih segar dan selalu *terupdate* dengan informasi jadwal Penerbangan di seluruh Bandara kelolaan Perseroan.

More attractive website design regularly updated with information on Flight schedule in all Airports managed by the Company.



MOBILE APPS

Aplikasi *mobile* berbasis Android yang dapat diunduh oleh penumpang yang berisi *Flight Info*; *Shop*; *News*; *Map*; *Accommodation*; *General Info*.

Android-based mobile application which is available to download, featuring Flight Info; Shop; News; Map; Accommodation; General Info



MOBILE CASHIER

Pembayaran Parkir kendaraan penumpang secara *Mobile*. Parking Fee Payment via Mobile.



INTERNET CORNER

Tersedianya beberapa perangkat komputer dengan akses internet di terminal untuk dapat digunakan pengguna jasa bandar udara.

Computers with the Internet access in the terminals available to be used by customers.



LAYANAN CONTACT CENTER

Membantu dan menerima saran/keluhan, termasuk menyampaikan info jadwal penerbangan; kehilangan atau kerusakan bagasi maupun info *contact center* masing-masing maskapai penerbangan.

To assist and receive suggestions/complaints, including informing flight schedules; dealing with loss or damaged baggage and providing information of contact center of each airline.



TOURISM INFORMATION

Adanya duta bandara yang membantu penumpang bila ingin mengeksplorasi lokasi Wisata domestik.
 Airport ambassadors stationed to assist passengers who want to explore domestic tourism.



BANDAR UDARA JUANDA - SURABAYA

- *Airport Icon*
- *Photo Booth*
- *Kids Zone*
- *Internet Corner*
- *Shuttle Bus*
- *Live Music*



BANDAR UDARA EL TARI – KUPANG

- *Kids Zone*
- *Photo Booth*



BANDAR UDARA SULTAN HASANUDDIN - MAKASSAR

- *Mural Art*
- *Vertical Garden*
- *Internet Corner*
- *Reading Corner*
- *Kids Zone*
- *Photo Booth*



BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI – BALI / I GUSTI NGURAH RAI AIRPORT – BALI

- *Thematic Event*
- *Kids Zone*
- *Internet Corner*
- *Charger Corner*
- *Orchard Garden*
- *Mural Art*
- *Lazy Chair*





BANDAR UDARA FRANS KAISEPO – BIAK

- *Internet Corner*
- *Welcome Dance*
- *Reading Corner*
- *Orchad Garden*
- *Photo Booth*
- *Thematic Event*



BANDAR UDARA ADISUTJIPTO – JOGJAKARTA

- *Airport Icon*
- *Photo Booth*
- *Traditional Music*
- *Thematic Event*



BANDAR UDARA LOMBOK - LOMBOK TENGAH

- *Phone Charger*
- *Photo Booth*
- *Internet Corner*



BANDAR UDARA SYAMSUDIN NOOR – BANJARMASIN

- *Photo Booth*
- *Welcome Dance*
- *Reading Corner*



BANDAR UDARA ADI SOEMARMO – SURAKARTA

- *Kids Zone*
- *Airport Icon*
- *Internet Corner*



BANDAR UDARA AHMAD YANI – SEMARANG

- *Reading Corner*
- *Charger Phone*
- *Photo Booth*



BANDAR UDARA PATTIMURA – AMBON

- *Charger Phone*
- *Photo Booth*
- *Internet Corner*



BANDAR UDARA SAMS SEPINGGAN – BALIKPAPAN

- *Photo Booth*
- *Kids Zone*
- *Baby Stroller*
- *Internet Corner*
- *Reading Corner*
- *Garden*
- *Airport Cinema*
- *Airport Mall*

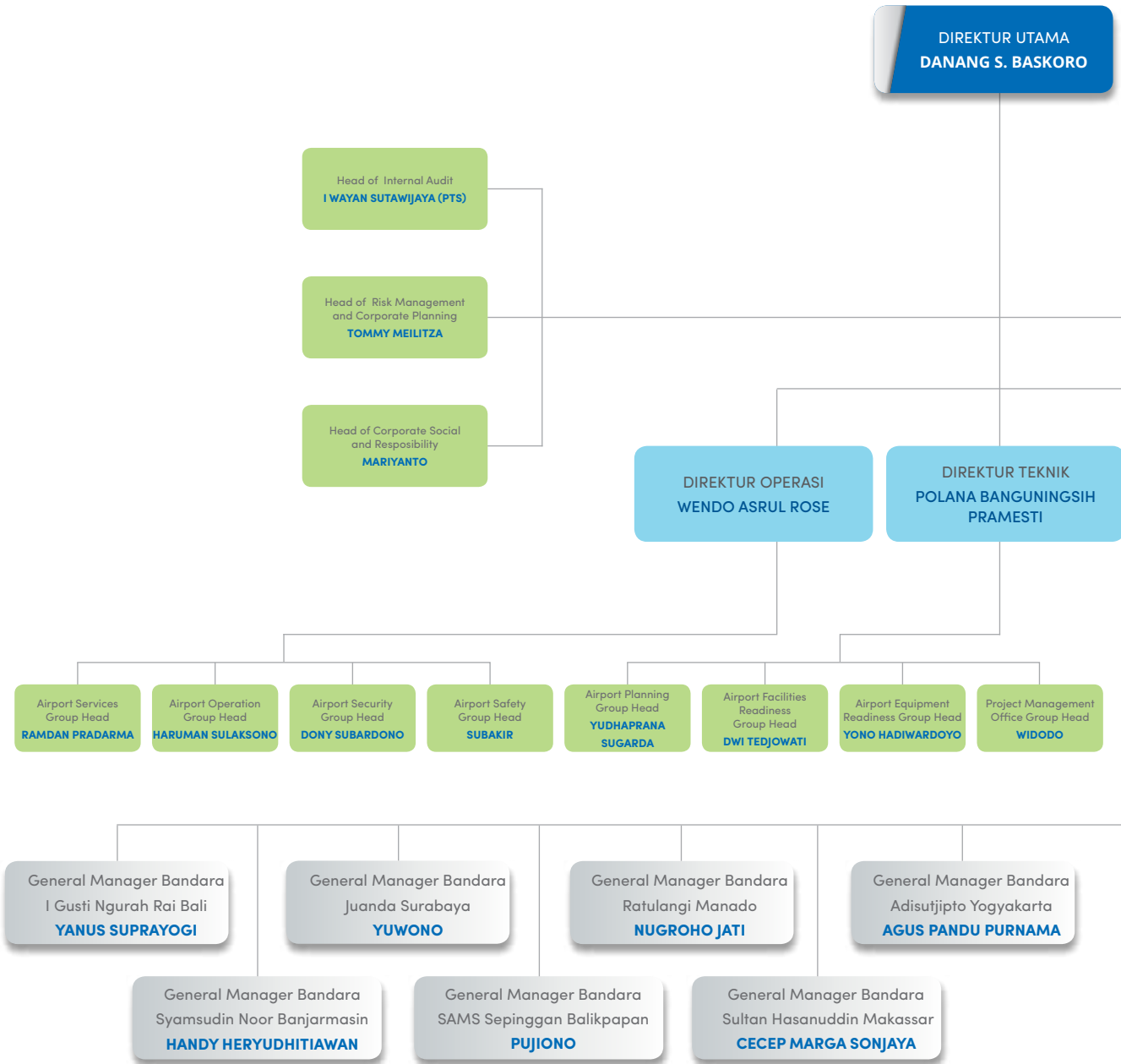


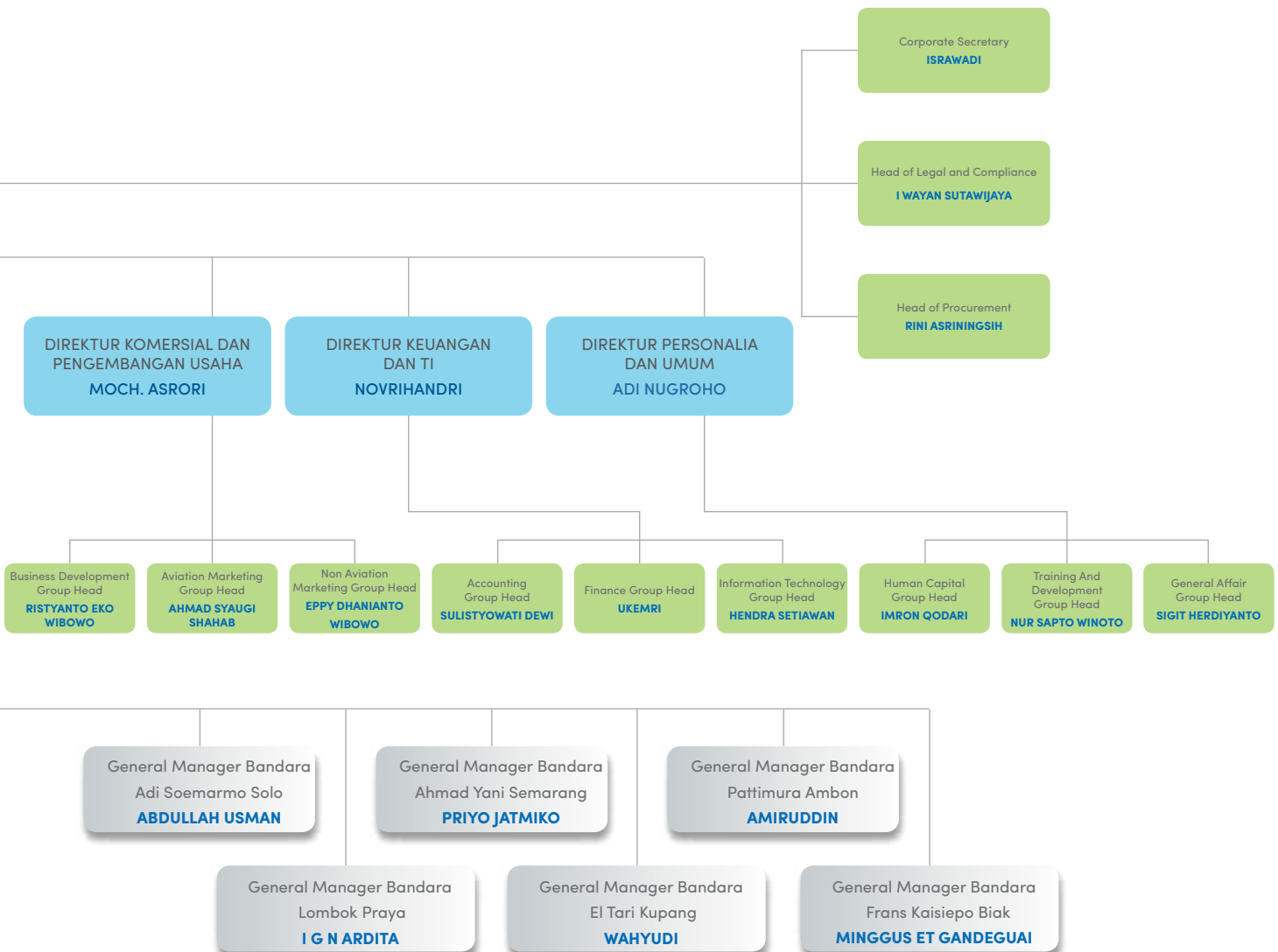
BANDAR UDARA SAM RATULANGI – MANADO

- *Internet Corner*
- *Kids Zone*
- *Reading Corner*
- *Baby Stroller*
- *Charger Phone*

Struktur Organisasi Perusahaan

Organizational Structure





Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Culture of The Company

Visi dan Misi PT Angkasa Pura I (Persero) mempunyai arti dan peranan penting dalam membantu manajemen untuk mempertajam bisnis inti (*core business*) maupun untuk mengidentifikasi apa sebenarnya kompetensi inti (*core competence*) PT Angkasa Pura I (Persero) dewasa ini dan apa yang akan dikembangkan di masa mendatang.

The Vision and Mission of PT Angkasa Pura I (Persero), are meaningful and crucial in assisting the management to improve the major business (*core business*) and to exactly identify the current major competence (*core competence*) of PT Angkasa Pura I (Persero), and formulate the future development.

VISI / VISION

Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandar udara terbaik di Asia

PT Angkasa Pura I (Persero) bertekad melakukan transformasi secara menyeluruh dan bertahap selama lima tahun yang telah dituangkan dalam *Roadmap* 2013-2017, yaitu Percepatan Pertumbuhan Bisnis (2013), Optimalisasi Potensi Bisnis Secara Penuh (2014), Perusahaan Berkinerja Tinggi (*High Performance Organization*) (2015), Perusahaan Kompetitif di Asia (2016), dan salah satu dari 10 Perusahaan Pengelola Bandara Terbaik di Asia (2017).

To become one of the top ten airport operator in Asia

PT Angkasa Pura I (Persero) is determined to run a comprehensive and gradual transformation over the next five years as incorporated in the 2013-2017 Roadmap, which includes *Accelerating Business Growth* (2013), *Fully Optimizing Business Potential* (2014), *High Performance Company* (*High Performance Organization*) (2015), the *Competitive Company in Asia* (2016), and *One of The Top 10 Airport Operator in Asia* (2017).

TELAAH VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan telaah terhadap pencapaian visi dan misi PT Angkasa Pura I (Persero). Secara periodik pencapaian visi dan misi dievaluasi dengan menggunakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memuat pencapaian target, rencana strategis dan target kinerja satu tahun ke depan.

Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi PT Angkasa Pura I (Persero) masih relevan dengan kondisi dan tujuan Perseroan. Pencapaian visi dan misi sampai dengan tahun 2016 telah sesuai dengan arah dan tahapan yang telah ditetapkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

REVIEW OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMPANY'S VISION AND MISSION

The Board of Commissioners and the Board of Directors regularly review the achievement of the vision and mission of PT Angkasa Pura I (Persero). Periodically, the achievement of the vision and mission is evaluated using the preparation mechanism of Work Plan and Corporate Budget (RKAP) which elaborates the target achievements, strategic plans and performance targets projected to one year ahead.

The Board of Commissioners and the Board of Directors consider that the vision and mission of PT Angkasa Pura I (Persero) is still relevant to the conditions and objectives of PT Angkasa Pura I (Persero). The achievement of vision and mission of the Company up to 2016 has been in accordance with the direction and stages stipulated by PT Angkasa Pura I (Persero).



MISI / MISSION

Misi adalah tujuan jangka panjang perusahaan yang menjadi landasan dirikannya perusahaan yang hendaknya mencakup produk/jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju dan upaya untuk meningkatkan kemanfaatan kepada semua pihak terkait (*stakeholders*). Adapun misi Perusahaan adalah:

1. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan;
2. Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan;
4. Meningkatkan daya saing Perusahaan melalui kreatifitas dan inovasi;
5. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup.

Visi dan Misi PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut telah ditetapkan dalam dokumen RJPP 2014-2018 dan telah disetujui oleh Direksi beserta Dewan Komisaris.

The Mission of the company is the company's long -term objectives in which the company defines the products/ services that are to be delivered, the intended target markets and the efforts to enhance the benefit to all relevant parties (stakeholders). The missions of the Company are:

1. To enhance stakeholders value;
2. To become the partner of the government and the driver of economic growth;
3. To provide excellent service for airport service business by fulfilling the security, safety, and comfort standards;
4. To strengthen the Company's competitiveness through creativity and innovation;
5. To make positive contribution to the environment.

The Vision and Mission of PT Angkasa Pura I (Persero) are incorporated in the 2014-2018 Long Term Corporate Plan (RJPP) and has been approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Untuk merealisasikan visi dan misi, Perseroan telah menyusun dan menerapkan Nilai Perusahaan (*Corporate Values*) yaitu “SATU” untuk mengingatkan dan memberikan inspirasi kepada semua insan PT Angkasa Pura I (Persero), untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk mencapai yang terbaik.

SATU merupakan singkatan dari:

To achieve the vision and mission, the Company has developed and applied the Corporate Values of the Company which is “SATU” that guides and inspires all employees of PT Angkasa Pura I (Persero), to always endeavor for their best.

SATU stands for:

1. SINERGI
Synergy

Definisi Nilai Budaya: Cara insan PT Angkasa Pura I (Persero), menghargai keragaman dan keunikan setiap elemen untuk memberi nilai tambah bagi perusahaan, pembangunan ekonomi, dan lingkungan dimanapun insan PT Angkasa Pura I (Persero), berada.

Core Value Definition: All employees of PT Angkasa Pura I (Persero), respect the diversity and uniqueness of every element of the Company as an added value for the company, for the development of the economy and for the environment, wherever the employee may be.

2. ADAPTIF
Adaptive

Definisi Nilai Budaya: Daya, semangat dan hasrat insan PT Angkasa Pura I (Persero), yang pantang menyerah, proaktif merespon perubahan dan kaya akan inovasi.

Core Value Definition: The power, spirit, and desire of the employees of PT Angkasa Pura I (Persero), to never surrender and responsive to changes and innovative.

3. TERPERCAYA
Trusted

Definisi Nilai Budaya: Karakter insan PT Angkasa Pura I (Persero), yang senantiasa selaras antara kata dengan perbuatan, jujur dalam menjalankan tugas serta kewajiban, dan dapat diandalkan.

Core Value Definition: The employees of PT Angkasa Pura I (Persero), are reliable, consistent with their words and actions and uphold integrity in performing their duties and responsibility.

4. UNGGUL
Superior

Definisi Nilai Budaya: Komitmen insan PT Angkasa Pura I (Persero), memberikan layanan prima dengan profesional dan bertanggung jawab untuk memuaskan pelanggan secara berkelanjutan.

Core Value Definition: The commitment of the employees of PT Angkasa Pura I (Persero), to deliver excellence service with professionalism and responsibility that is aimed to continuously satisfy their customers.

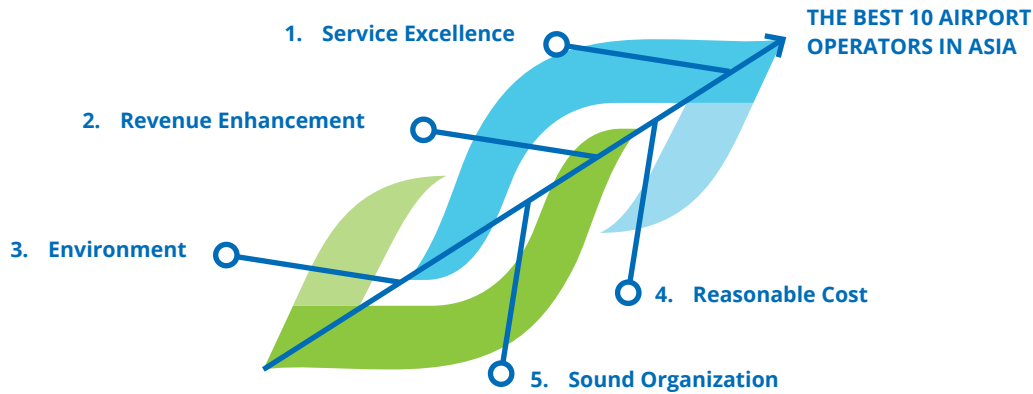
Dewan Komisaris dan Direksi telah menyetujui dan menetapkan Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan guna menghadapi dinamika bisnis jasa kebandarudaraan di dalam dan luar negeri.

The Board of Commissioners and Board of Directors have agreed upon and stipulated the Corporate Vision, Mission and Core Values in order to face the dynamics in airport service business domestically and abroad.



Strategi Perusahaan

Company Strategy



SERVICE EXCELLENCE

1. Peningkatan *Customer Satisfaction Index* (CSI)
2. Peremajaan alat-alat produksi
3. Pelaksanaan pembangunan bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan bandara Yogyakarta Kulon Progo
4. Pemenuhan jumlah SDM dan fasilitas produksi

SERVICE EXCELLENCE

1. Enhancement of Customer Satisfaction Index (CSI)
2. Rejuvenation of production tools
3. Airport development Ahmad Yani International Airport (SRG) - Semarang, Syamsudin Noor Airport (BDJ) - Banjarmasin and New Yogyakarta International Airport. Kulon Progo.
4. Fulfillment of human resource and production facilities

REVENUE ENHANCEMENT

1. Optimalisasi sistem kerjasama dengan mitra/*konsesiner*
2. Peningkatan pendapatan Aeronautika dan Non Aeronautika
3. Pembentukan anak perusahaan

REVENUE ENHANCEMENT

1. Optimization of the system of cooperation with partner/ concessionaire
2. Increased revenue Non Aeronautics and Aeronautics
3. The establishment of subsidiaries

REASONABLE COST

1. Efektifitas penggunaan anggaran
2. Menjaga keseimbangan peningkatan pendapatan terhadap peningkatan biaya

REASONABLE COST

1. The effectiveness of the use of budget
2. Maintaining the stability of the increase of revenue to the increase of costs

ENVIRONMENT

1. Penyaluran program kemitraan
2. Pemberian dana program bina lingkungan
3. Penerapan *Eco Green Airport*
4. Dampak sosial dan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal

ENVIRONMENT

1. Distribution of partnership program
2. Funding the environment development program
3. Implementation of *Eco Green Airport*
4. The impact of social and economic as well as local employment

SOUND ORGANIZATION

1. Restrukturisasi organisasi
2. *Workshop* budaya baru perusahaan
3. Pencanangan *Center For Excelent*
4. *Management training* melalui *strategic patnership*
5. Penetapan *Master Plan IT*
6. Reaktivasi *training* untuk berbagai *level*

SOUND ORGANIZATION

1. Restructure the organization
2. Workshop for the new corporate values
3. Launching of *Center For Excellent*
4. Management training through strategic partnership
5. Determination *Master Plan IT*
6. Reactivation of training for various level

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



ANDRINOF CHANIAGO

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Padang tanggal 3 November 1962, saat ini berusia 54 tahun. Menempuh pendidikan program S1 Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1990. Lulus tahun 2014 dari program S2 Pasca Sarjana Ilmu Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

Pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dari tahun 2014 sampai 2015, pendiri *Center for Indonesian Regional and Urban Studies* (CIRUS) pada tahun 1999. Selain menjabat sebagai Komisaris di misi PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif CIRUS *Surveyors Group* (CSG) sejak tahun 2008. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 29 Oktober 2015. Dasar pengangkatan pertama kali adalah SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Padang on 3 November 1962, he is 54 years old. He obtained his Bachelor of Political Science at Faculty of Social and Political Science, Universitas Indonesia in 1990. Graduated in 2014 from Master of Planning and Public Policy at Faculty of Economics, Universitas Indonesia. He is pursuing his Doctor of Philosophy at Faculty of Humanities, Universitas Indonesia.

He was appointed as the Minister of National Development Planning (PPN)/Head of Bappenas from 2014 to 2015, founder of Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) in 1999. In addition to his current position as the Commissioner at PT Angkasa Pura I (Persero), he is also the Executive Director of CIRUS Surveyors Group (CSG) since 2008. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as the Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since 29 October 2015. His first appointment was by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-210/MBU/10/2015 dated 29 October 2015.



BOY SYAH RIL QAMAR
 Komisaris Independen
 Independent Commissioner

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Cirebon pada 26 Maret 1956, saat ini berusia 60 tahun. Lulus dari Akademi TNI Angkatan Udara tahun 1980 dan kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi pada tahun 1997.

Pernah menjabat sebagai Kasum TNI AU dan Wakasau tahun 2013 dan Danseskaou di tahun 2010. Selain menjabat sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau tidak menjabat di perusahaan maupun lembaga lain. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 7 April 2014. Dasar pengangkatan pertama kali adalah SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-75/MBU/2014 tanggal 7 April 2014 dan diperbaharui dengan SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Cirebon on 26 March 1956, he is 60 years old. Graduated from Indonesian Air Force Academy in 1980 and obtained his Bachelor of Economics in 1997.

He was appointed as the Chief of General Staff of the Indonesian Air Force and the Deputy Chief of Staff of the Indonesian Air Force in 2013 and Commander of the Air Force Staff and Command College in 2010. Currently, he serves as the Commissioner at PT Angkasa Pura I (Persero) and does not hold any position in other companies or institutions. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as the Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since 7 April 2014. His first appointment was by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-75/ MBU/2014, dated 7 April 2014 and renewed with SK-210/ MBU/10/2015 dated 29 October 2015 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).


SELBY NUGRAHA RACHMAN
Komisaris
 Commissioner

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta tanggal 14 Desember 1970, saat ini berusia 46 tahun. Lulus tahun 1996 dari Program S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan.

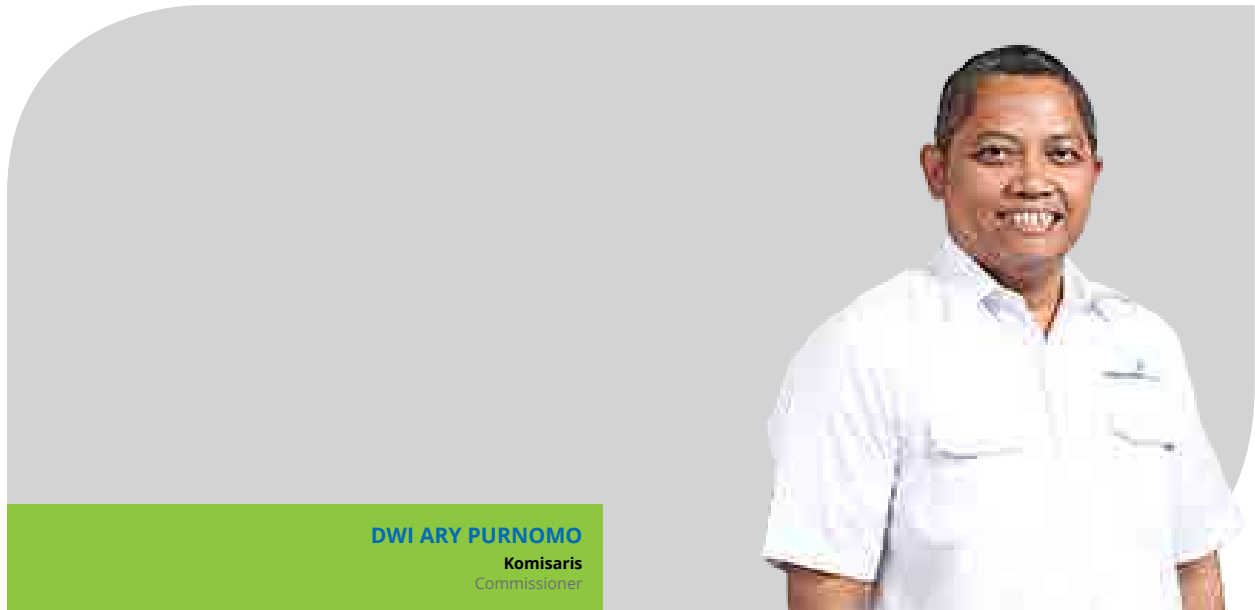
Pernah menjabat sebagai Direktur PT Execujet Indonesia sejak tahun 2011 sampai Juni 2015. Selain menjabat sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Ferco Seating System Indonesia sejak tahun 2014, Direktur Teknologi dan Informasi Experd Human Resources Consultant sejak tahun 2010, dan Direktur Decorus Contract sejak tahun 1994. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 29 Oktober 2015. Dasar pengangkatan pertama kali adalah SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 14 December 1970, he is 46 years old. In 1996, he completed his Bachelor of Economics from Universitas Katolik Parahyangan.

He was the former Director of PT Execujet Indonesia from 2011 to June 2015. In addition to his current position as the Commissioner at PT Angkasa Pura I (Persero), he is also the Director of PT Ferco Seating System Indonesia since 2014, the Director of Information and Technology at Experd Human Resources Consultant since 2010, and the Director of Decorus Contract since 1994. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as the Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since 29 October 2015. His first appointment was by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-210/MBU/10/2015 dated 29 October 2015.

**DWI ARY PURNOMO**
Komisaris
 Commissioner

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 1975 Saat ini berusia 41 tahun. Lulus tahun 2011 dari S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia.

Pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX dari tahun 2011 sampai 2014, Kepala Bidang Administrasi Kekayaan BUMN, Kementerian Negara BUMN dari tahun 2010 sampai 2013 dan Komite Audit PT Askes (Persero) dari tahun 2008 sampai 2010. Selain menjabat sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau juga menjabat sebagai Asisten Deputi Layanan Hukum di Kementerian BUMN sejak 30 Juni 2016. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 7 April 2014. Dasar pengangkatan pertama kali adalah SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-75/MBU/2014 tanggal 7 April 2014 dan diperbaharui dengan SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Angkasa Pura I (Persero).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 26 February 1975, he is 41 years old. In 2011, he obtained his Master degree from Faculty of Law, Universitas Indonesia.

He was the former member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX from 2011 to 2014, Head of State-Owned Enterprise Assets Administration Division, State Ministry of State-Owned Enterprise from 2010 to 2013 and Audit Committee at PT Askes (Persero) from 2008 to 2010. In addition to his current position as the Commissioner at PT Angkasa Pura I (Persero), has been serving as Assistant Deputy of Legal Affairs at the Ministry of SOEs since June 30, 2016. He/She has affiliate relation with the Major and Controlling Shareholders.

He was appointed as the Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since 7 April 2014. His first appointment was by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-75/MBU/2014, dated 7 April 2014 and renewed with SK-210/MBU/10/2015 dated 29 October 2015 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).



ANANDY WATI
 Komisaris
 Commissioner

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Semarang, tanggal 4 Januari 1959, saat ini ber usia 57 tahun. Lulus tahun 1983 dari Universitas Sebelas Maret di Surakarta dan memperoleh gelar Master of Public Management di Amerika Serikat tahun 1991.

Pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2013, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2010 dan Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di tahun 2009. Selain menjabat sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur anggaran di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan sejak 1 Mei 2016. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 7 April 2014. Dasar pengangkatan pertama kali adalah SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-75/MBU/2014 tanggal 7 April 2014 dan diperbaharui dengan SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Angkasa Pura I (Persero).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Semarang, 4 January 1959, she is 57 years old. In 1983, she graduated from Universitas Sebelas Maret in Surakarta and obtained her Master of Public Management in the United States in 1991.

She was the former Secretary of Directorate General of Budgeting at the Ministry of Finance 2013, the Director of Investment Management System at Directorate General of Budgeting at the Ministry of Finance in 2010 and the Director of Budget Implementation at Directorate General of Budgeting at the Ministry of Finance in 2009. In addition to her current position as the Commissioner at PT Angkasa Pura I (Persero), she is also the Director of Budgeting in Economic and Maritime Affairs at Directorate General of Budgeting at the Ministry of Finance since May 1, 2016 She has affiliated relationship with the Principle and Controlling Shareholders.

She was appointed as the Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since 7 April 2014. His first appointment was by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-75/MBU/2014, dated 7 April 2014 and renewed with SK-210/MBU/10/2015 dated 29 October 2015 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).



AGUS SANTOSO
 Komisaris
 Commissioner

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Solo tanggal 4 Agustus 1958, saat ini berusia 58 tahun. Lulus tahun 1986 S1 Program Sarjana Teknik Sipil Struktur Kontruksi dari Institut Teknologi Bandung, program S2 pasca Sarjana jurusan Teknik Sistem Transportasi dari Institut Teknologi Bandung- Leeds University, dan S3 Program Doktor Jurusan Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2011.

Beliau menjabat berbagai posisi penting di Kementerian Perhubungan diantaranya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dari tahun 2014 sampai 2015, Kepala Bandar Udara Budiarto Curug dari tahun 2009 sampai 2014 dan Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari tahun 2007 sampai 2009. Selain menjabat sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini menjabat sebagai Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sejak 20 Maret 2015. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Saat ini manjabat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 29 Oktober 2015. Dasar pengangkatan pertama kali adalah SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Solo on 4 August 1958, he is 58 years old. He obtained his Bachelor of Civil Engineering, Construction Structure from Institut Teknologi Bandung in 1986, Master of Transportation System from Institut Teknologi Bandung – Leeds University, and Doctor of Management from Universitas Negeri Jakarta in 2011.

He holds key positions in the Ministry of Transportation such as former Head of Research and Development of Civil Aviation from 2014 to 2015, Head of Budiarto Airport Curug from 2009 to 2014 and Head of Planning Division of Directorate General of Civil Aviation from 2007 to 2009. In addition to his current position as the Commissioner at PT Angkasa Pura I (Persero), he is also Director of Airport Affairs of the Directorate General of Civil Aviation since March 2015. He has affiliated relationship with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as the Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since 29 October 2015. His first appointment was by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-210/MBU/10/2015 dated 29 October 2015.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



DANANG S. BASKORO
 Direktur Utama
 President Director

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Semarang, saat ini berusia 55 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada di tahun 1989 dan gelar S2 Manajemen dari Nashville University, Tennessee, AS di tahun 1994.

Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di beberapa intitusi diantaranya sebagai Komisaris di PT Aerowisata (2001-2004), Asisten Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN (2004-2005), Komisaris PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2005-2008), Komisaris PT Mentari Nusantara Airlines (2008-2011), dan Direktur Utama PT ASDP Indoneisa Ferry (Persero) (2011-2016).

Selain menjabat sebagai Direktur Utama di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau tidak menjabat di perusahaan ataupun lembaga lain. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai *President Director* berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-240/MBU/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Semarang, he is 55 years old. He obtained his Bachelor of Economics from Faculty of Economics, Universitas Gajah Mada in 1989 and Master of Management from Nashville University, Tennessee, U.S. in 1994.

He holds key positions in several institutions such as the Commissioner of PT Aerowisata (2001-2004), Assistant Deputy of Logistics and Tourism Division at Ministry of State-Owned Enterprise (2004-2005), the Commissioner of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2005-2008), the Commissioner of PT Mentari Nusantara Airlines (2008-2011), and the President Director of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2011-2016).

Currently, he serves as the President Director at PT Angkasa Pura I (Persero) and does not hold any position in other companies or institutions. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as the President Director by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-240/MBU/10/2016 dated 17 October 2016. He has no affiliated relationship with other members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners, nor with the Shareholders.



NOVRIHANDRI
 Direktur Keuangan dan IT
 Finance and IT Director

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Padang pada tanggal 20 November 1971, saat ini berusia 45 tahun. Beliau memperoleh gelar Sjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Andalas Padang pada tahun 1996. Beliau menyelesaikan studi program pasca sarjana Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada pada tahun 2010.

Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di PT Angkasa Pura I (Persero) diantaranya Asisten Deputi Direktur Bidang Kerjasama Non Aero Wilayah I (2007-2011), Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Suport (2012), *Business Development Group Head* (2013), dan *Human Capital Support Expert* (2014). Selain menjabat sebagai Direktur Keuangan dan IT di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Angkasa Pura Logistik sejak 10 Agustus 2016. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan IT berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-222/MBU/II/2015 tanggal 9 November 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Padang on 20 November 1971, he is 45 years old. He obtained his Bachelor of Accounting from Universitas Andalas Padang in 1996. He completed his Master of Management from Universitas Gajah Mada in 2010.

He holds key positions at PT Angkasa Pura I (Persero) such as Assistant Deputy Director of Non-Aero Partnership Division of Zone I (2007-2011), Finance Director of PT Angkasa Pura Support (2012), Business Development Group Head (2013), and Human Capital Support Expert (2014). In addition to his current position as Finance and IT Director at PT Angkasa Pura I (Persero), he is also the President Commissioner at PT Angkasa Pura Logistik since 10 August 2016. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as Finance and IT Director by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-222/MBU/II/2015 dated 9 November 2015.

**MOCH. ASRORI**

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis
Marketing and Business Development Director

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Ngawi pada tanggal 7 Agustus 1965, saat ini berusia 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Sjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Terbuka pada tahun 1996.

Beliau meniti karirnya di PT Angkasa Pura I (Persero) diantaranya pernah menjabat sebagai Assisten Deputi Direktur Tarif dan Kerjasama Aero (2004), Manager Komersial dan Pengembangan Usaha (2008-2012), *Strategic Business Development* (2012-2013), dan *Aviation Marketing Group Head* (2013-2015).

Selain menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Angkasa Pura Hotel sejak 10 Agustus 2016. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

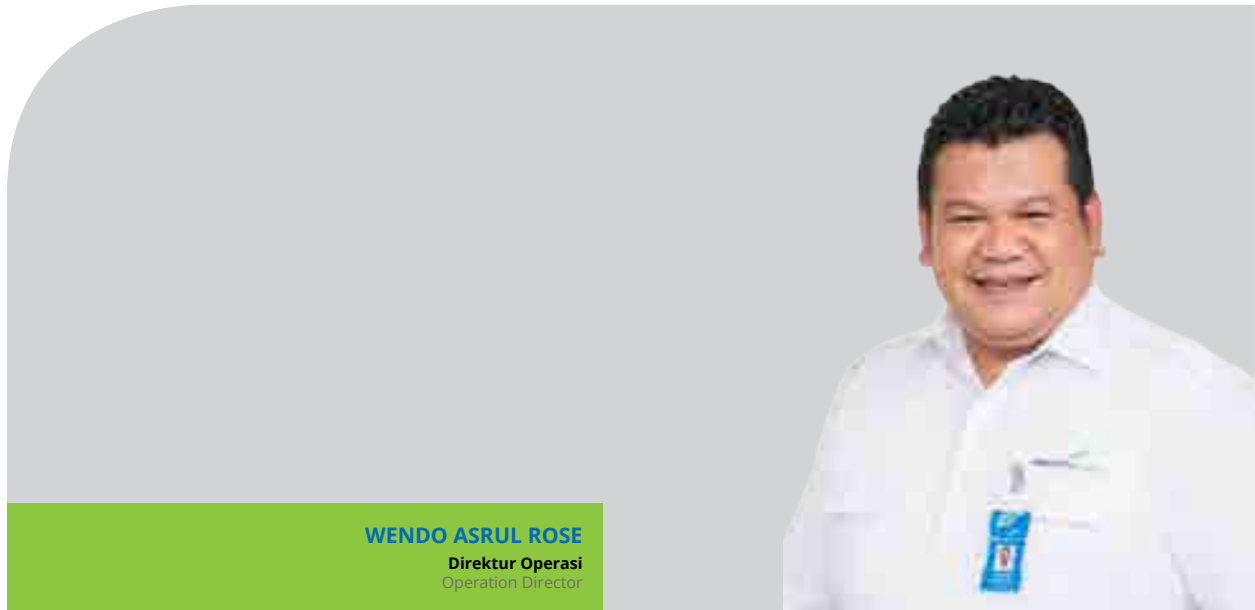
Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-222/MBU/II/2015 tanggal 9 November 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Ngawi on 7 August 1965, he is 51 years old. He obtained his Bachelor of Management, Universitas Terbuka in 1996.

He started his career in PT Angkasa Pura I (Persero), of which he was the former Assistant Deputy Director of Aero Partnership and Tariff (2004), Commercial and Business Development Manager (2008-2012), Strategic Business Development (2012-2013), and Aviation Marketing Group Head (2013-2015).

In addition to his current position as Commercial and Business Development Director at PT Angkasa Pura I (Persero), he is also the President Commissioner at PT Angkasa Pura Hotel since 10 August 2016. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as Commercial and Business Development Director by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-222/MBU/II/2015 dated 9 November 2015.



WENDO ASRUL ROSE

Direktur Operasi
Operation Director

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Padang pada tanggal 29 Desember 1970, saat ini berusia 46 tahun. Beliau memperoleh gelar Sjana Teknik dari Jurusan Teknik Mesin, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada tahun 1995.

Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di PT Angkasa Pura I (Persero), diantaranya sebagai Kepala Dinas Mekanikal dan Teknik Air (2003-2004), Asisten Deputi Direktur (2004-2009), Deputi Direktur Teknik Pengawasan (2009-2011), Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan (2011-2013), dan *General Manager* Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (2013-2015).

Selain menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Angkasa Pura Support sejak 10 Agustus 2016. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-222/MBU/II/2015 tanggal 9 November 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Padang on 29 December 1970, he is 46 years old. He obtained his Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta in 1995.

He holds key positions in PT Angkasa Pura I (Persero) such as the Head of Water Mechanical and Technical (2003-2004), Assistant Deputy Director (2004-2009), Deputy Director of Technical Supervision (2009-2011), Project Head of Sepinggan International Airport Development (2011-2013), and General Manager of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport Balikpapan (2013-2015).

In addition to his current position as Operation Director at PT Angkasa Pura I (Persero), he is also the President Commissioner at PT Angkasa Pura Support since 10 August 2016. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as the Operation Director of the Company by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-222/MBU/II/2015 dated 9 November 2015. He has no affiliated relationship with other members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners, nor with the Shareholders.



ADI NUGROHO
Direktur Personalia dan Umum
 Human Capital and General Affair Director

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1969, saat ini berusia 47 tahun. Beliau memperoleh gelar Sjana pada jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 1993, gelar Magister pada Jurusan *Marketing*, Massey University New Zealand tahun 2000, dan program Doktor pada Jurusan *Service Management*, Northern Malaysia University tahun 2007.

Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di PT Angkasa Pura I (Persero), diantaranya sebagai *Manager Komersial dan Pengembangan Usaha* (2008-2012), *Deputi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Wilayah II* (2012-2013), *Business Development Group Head* (2013) dan *Project Portfolio Analyst* (2013-2015).

Selain menjabat sebagai Direktur Personalia dan Umum di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Angkasa Pura Retail sejak 10 Agustus 2016. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-222/MBU/II/2015 tanggal 9 November 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 2 May 1969, he is 47 years old. He obtained his Bachelor of Human Resource Management, Universitas Pancasila Jakarta in 1993, Master of Marketing, Massey University New Zealand in 2000, and Doctor of Service Management, Northern Malaysia University in 2007.

He holds key positions at PT Angkasa Pura I (Persero), such as Commercial and Business Development Manager (2008-2012), Deputy Director of Commercial and Business Development of Zone II (2012-2013), Business Development Group Head (2013) and Project Portfolio Analyst (2013-2015).

In addition to his current position as Human Capital and General Affair Director at PT Angkasa Pura I (Persero), he is also the President Commissioner at PT Angkasa Pura Retail since 10 August 2016. He has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

He was appointed as Human Capital and General Affair Director by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-222/MBU/II/2015 dated 9 November 2015.

**POLANA BANGUNINGSIH PRAMESTI**
Direktur Teknik
 Technical Director

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1961, Saat ini berusia 54 Tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986 dan menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana bidang Transportasi, di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992.

Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di Kementerian Perhubungan RI, diantaranya sebagai Kasi Mutu Konstruksi Sipil Ditjen Hubud (1992-2002), Pemimpin Proyek PFBUIJ (2002), Kasi Keterpaduan Program Bandara (2002-2005), Kasubdit Program Bandara (2005-2007), Kasubdit Rancang Bangun (2007-2008) dan Kasubdit Prasarana Bandara (2008-2013).

Selain menjabat sebagai Direktur Teknik di PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Angkasa Pura Properti sejak 10 Agustus 2016 Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Menjabat sebagai Direktur Teknik berdasarkan SK Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-208/MBU/2013 tanggal 10 April 2013.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 2 November 1961, she is 54 years old. She obtained her Bachelor of Civil Engineering from Faculty of Civil and Environmental Engineering, Institut Teknologi Bandung in 1986 and completed her Master of Transportation from Institut Teknologi Bandung in 1992.

She holds key positions at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, such as Section Head of Civil Construction Quality at the Directorate General of Civil Aviation (1992-2002), Project Leader of PFBUIJ (2002), Section Head of Airport Integrated Program (2002-2005), Head of Sub-directorate of Airport Program (2005-2007), Head of Sub-directorate of Design (2007-2008) and Head of Sub-directorate of Airport Infrastructure (2008-2013).

In addition to her current position as Technical Director at PT Angkasa Pura I (Persero), she is also the President Commissioner at PT Angkasa Pura Properti since 10 August 2016. She has no affiliated relationship with members of the Board of Directors, nor with other members of the Board of Commissioners, nor with the Principle and Controlling Shareholders.

She was appointed as Technical Director by virtue of Decree of the State Minister of State-Owned Enterprise as the GMS Number: SK-208/MBU/2013 dated 10 April 2013.

Profil Pejabat Eksekutif

Profile of the Executive Officers



I WAYAN SUTAWIJAYA

Head of Legal and Compliance / Pts. Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jembrana, Bali pada 4 Maret 1967, saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang (1995) dan gelar Magister Manajemen dari STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta (2002). Menjabat sebagai *Head of Legal and Compliance* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1751/KP.07.04/2016-REPLC. Saat ini juga menjabat sebagai Pts. *Head of Internal Audit*.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jembrana, Bali on 4 March 1967, he is 49 years old. Obtained his Bachelor of Law from Universitas 17 Agustus 1945, Semarang (1995) and Master of Management from STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta (2002). He was appointed as Head of Legal and Compliance since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1751/KP.07.04/2016-REPLC.



ISRAWADI

Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Pangkalan Susu Medan pada 23 Agustus 1971, saat ini berusia 45 tahun. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu Teknik Industri/Fakultas Teknologi Industri pada Institut Teknologi Bandung, tahun 1995 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2005. Menjabat sebagai *Corporate Secretary* sejak 11 Agustus 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1259/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Pangkalan Susu Medan on 23 August 1971, he is 45 years old. Obtained his Bachelor degree from Industrial Engineering/Faculty of Industrial Technology, Institut Teknologi Bandung in 1995 and his Master of Management from Universitas Trisakti in 2005. He was appointed as Corporate Secretary since 11 August 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1259/KP.07.03/2016.



RINI ASRININGSIH
Head of Procurement

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Sleman pada 19 Oktober 1966, saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (1992) dan Gelar Magister Hukum diperoleh di Universitas Padjadjaran – Bandung pada Tahun 2011. Menjabat sebagai *Head of Procurement* sejak 11 Agustus 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1260/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Sleman on 19 October 1966, she is 50 years old. Obtained her Bachelor of Law from Universitas Gajah Mada (1992) and her Master of Law from Universitas Padjadjaran – Bandung in 2011. She was appointed as Head of Procurement since 11 August 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1260/KP.07.03/2016.



TOMMY MEELITZA
Head of Risk Management and Corporate Planning

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 17 Mei 1964, Saat ini berusia 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi Pendidikan Jurusan Psikologi dari Universitas Pasundan (1985) dan Gelar Sarjana Hukum dari Universitas I Gusti Ngurah Rai – Bali (1995). Gelar Magister Manajemen diperoleh dari Universitas Hasanuddin – Makassar pada Tahun 2007. Menjabat sebagai *Head of Risk Management and Corporate Planning* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1770/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 17 May 1964, he is 52 years old. Obtained his Bachelor of Psychology from Universitas Pasundan (1985) and Bachelor of Law from Universitas I Gusti Ngurah Rai – Bali (1995). His Master of Management was obtained from Universitas Hasanuddin – Makassar in 2007. He was appointed as Head of Risk Management & Corporate Planning since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1770/KP.07.04/2016-REPLC.



MARIYANTO

Head of Corporate Social Responsibility

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Curup pada 21 April 1962, saat ini berusia 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dari Universitas Padjajaran (1987). Menjabat sebagai *Head of Corporate Social Responsibility* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1770/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Curup on 21 April 1962, he is 54 years old. Obtained his Bachelor of International Law from Universitas Padjajaran (1987). He was appointed as Head of Corporate Social Responsibility since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1770/KP.07.04/2016-REPLC.



SULISTYOWATI DEWI

Accounting Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Magelang, 17 Januari 1969, saat ini berusia 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gajah Mada (1993) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2013). Menjabat sebagai *Accounting Group Head* sejak 13 September 2016 berdasarkan SKEP.1514/KP.07/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Magelang, 17 January 1969, she is 47 years old. Obtained her Bachelor of Accounting from Universitas Gajah Mada (1993) and Master of Management from Universitas Airlangga (2013). She was appointed as Accounting Group Head since 13 September 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1514/KP.07/2016.



UKEMRI

Finance Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Koto Lawas pada 17 Agustus 1965, saat ini berusia 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi- Akuntansi dari Universitas Andalas pada tahun 1991. Menjabat sebagai *Finance Group Head* sejak 13 September 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1514/KP.07/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Koto Lawas on 17 August 1965, now 51 years old. Obtained Bachelor Degree on Accounting from Universitas Andalas in 1991. Appointed as Finance Group Head since 13 September 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1514/KP.07/2016.



HENDRA SETIAWAN

Information Technology Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Bandung pada 22 Mei 1965, saat ini berusia 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan S2 Magister Teknik Elektro pada Institut Teknologi Bandung tahun 2003. Menjabat sebagai *Information Technology Group Head* sejak tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.76/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Bandung on 22 May 1965, he is 52 years old. Obtained his Master Degree on Electrical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 2003. He was appointed as Information Technology Group Head since 26 January 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.76/KP.07.03/2016.



AHMAD SYAUGI SHAHAB

Aviation Marketing Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Palembang pada 4 September 1976, saat ini berusia 40 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana, Jakarta (2007). Menjabat sebagai *Aviation Marketing Group Head* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1766/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Palembang on 4 September 1976, he is 40 years old. Obtained his Master Degree on Management from Universitas Mercu Buana, Jakarta (2007). He was appointed as Aviation Marketing Group Head since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1766/KP.07.04/2016-REPLC.



RISTIYANTO EKO WIBOWO

Business Development Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Kudus pada 23 Januari 1977, saat ini berusia 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mahasaraswati, Denpasar (2001). Menjabat sebagai *Business Development Group Head* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1764/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Kudus on 23 January 1977, he is 39 years old. Obtained his Bachelor of Economics from Universitas Mahasaraswati, Denpasar (2001). He was appointed as Business Development Group Head since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1764/KP.07.04/2016-REPLC.



EPPY DHANIANTO WIBOWO
Non Aviation Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 22 Oktober 1978, saat ini berusia 38 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Indonesia (2002). Menjabat sebagai *Non Aviation Marketing Group Head* sejak 23 April 2015 berdasarkan SK Direksi nomor: SKEP.701/KP.07.03/2015.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 22 October 1978, he is 38 years old. Obtained his Bachelor Degree on Management from Universitas Indonesia (2002). He was appointed as Non Aviation Marketing Group Head since 23 April 2015 by virtue of Decree of the Board of Directors number: SKEP.701/KP.07.03/2015.



YONO HADIWARDYO
Airport Equipment Readiness Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Malang pada 23 Februari 1962, saat ini berusia 54 tahun. Memperoleh gelar Ahli Madya dari Pendidikan dan Latihan Penerbangan, Curug (1994). Menjabat sebagai *Airport Equipment Readiness Group Head* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1757/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Malang on 23 February 1962, he is 54 years old. Obtained his Diploma from Pendidikan dan Latihan Penerbangan, Curug (1994). He was appointed as Airport Equipment Readiness Group Head since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1757/KP.07.04/2016-REPLC.



YUDHAPRANA SUGARDA
Airport Planning Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 23 Januari 1967, saat ini Usia 49 tahun. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu jurusan Teknik Arsitek dari Universitas Katholik Parahyangan (1991) dan gelar *Mastere Spesialise en Management Aeroportuaire* (MSMA) dari Ecole Nationale de L'Aviation Civile (ENAC), Toulouse, Perancis (1996). Menjabat sebagai *Airport Planning Group Head* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1750/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 23 January 1967, he is 49 years old. Completed his Bachelor on Architectur Engineering from Universitas Katholik Parahyangan (1991) and his Mastere Spesialise en Management Aeroportuaire (MSMA) from Ecole Nationale de L'Aviation Civile (ENAC), Toulouse, France (1996). He was appointed as Airport Planning Group Head since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1750/KP.07.04/2016-REPLC.



WIDODO

Project Management Office Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Medan pada 29 Juni 1967, saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atmajaya, Jakarta (1994). Menjabat sebagai *Project Management Office Group Head* sejak 5 Agustus 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1253/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Medan on 29 June 1967, he is 49 years old. Obtained his Bachelor on Civil Engineering from Universitas Atmajaya, Jakarta (1994). He was appointed as Project Management Office Group Head since 5 August 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1253/KP.07.03/2016.



SUBAKIR

Airport Safety Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 6 Agustus 1963, saat ini berusia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UDIKNAS, Denpasar (2002). Menjabat sebagai *Airport Safety Group Head* sejak 1 Agustus 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1178/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 6 August 1963, he is 53 years old. Obtained his Bachelor of Economics from UDIKNAS, Denpasar (2002). He was appointed as *Airport Safety Group Head* since 1 August 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1178/KP.07.03/2016.



DWI TEDJOWATI

Airport Facilities Readiness Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta pada 5 Maret 1965, saat ini berusia 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Jakarta (1990). Menjabat sebagai *Airport Facilities Readiness Group Head* sejak 5 Agustus 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1253/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Yogyakarta on 5 March 1965 she is 51 years old. Obtained her Bachelor of Civil Engineering from Universitas Indonesia, Jakarta (1990). She was appointed as Airport Facilities Readiness Group Head since 5 August 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1253/KP.07.03/2016.



DONY SUBARDONO
Airport Security Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 12 Juli 1976, saat ini berusia 40 tahun. Pernah mengecap pendidikan FAA *Aviation Security* (1997), *Senior Avsec* (2007), dan *Aviation Security Supervisor Course* (2009). Menjabat sebagai *Airport Security Group Head* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1758/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 12 July 1976, he is 40 years old. He attended the courses on FAA *Aviation Security* (1997), *Senior Avsec* (2007), and *Aviation Security Supervisor Course* (2009). He was appointed as *Airport Security Group Head* since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1758/KP.07.04/2016-REPLC.



HARUMAN SULAKSONO
Airport Operation Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Wonosobo pada 20 Juni 1963, saat ini berusia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya (2001). Menjabat sebagai *Airport Operation Group Head* sejak 9 September 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1501/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Wonosobo on 20 June 1963, he is 53 years old. Obtained his Bachelor of Economics from Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya (2001). He was appointed as *Airport Operation Group Head* since 9 September 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1501/KP.07.03/2016.



RAMDAN PRADARMA
Airport Services Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 12 Januari 1965, saat ini berusia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu jurusan Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma, Jakarta (1992) dan gelar Magister dari Universitas Indonesia (2013). Menjabat sebagai *Airport Services Group Head* sejak 9 September 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1502/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 12 January 1965, he is 51 years old. Completed his Bachelor of Information Management from Universitas Gunadarma, Jakarta (1992) and Master degree from Universitas Indonesia (2013). He was appointed as *Airport Services Group Head* since 9 September 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1502/KP.07.03/2016.



IMRON QODARI
Human Capital Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 22 November 1970, saat ini berusia 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu jurusan Manajemen dari IKOPIN, Jakarta (1994) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Mercu Buana (2003). Menjabat sebagai *Human Capital Group Head* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1772/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 22 November 1970, he is 46 years old. Completed his Bachelor of Management from IKOPIN, Jakarta (1994) and Master of Management from Universitas Mercu Buana (2003). He was appointed as Human Capital Group Head since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1772/KP.07.04/2016-REPLC.



SIGIT HERDIYANTO
General Affair Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada 10 Januari 1964, saat ini berusia 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Swadaya pada tahun 1998 dan Magister Manajemen dari STIE STIKUBANK, Semarang (2006). Menjabat sebagai *General Affair Group Head* sejak 1 November 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1775/KP.07.04/2016-REPLC.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on 10 January 1964, he is 52 years old. Obtained his Bachelor of Economics from STIE Swadaya in 1998 and Master of Management from STIE STIKUBANK, Semarang (2006). He was appointed as General Affair Group Head since 1 November 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1775/KP.07.04/2016-REPLC.



NUR SAPTO WINOTO
Training and Development Group Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Klaten pada 25 April 1968, saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada (1992) dan gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung (1995). Menjabat sebagai *Training and Development Group Head* sejak 5 Agustus 2016 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.1253/KP.07.03/2016.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Klaten on 25 April 1968, he is 48 years old. He obtained his Bachelor degree from Universitas Gadjah Mada (1992) and Master degree from Institut Teknologi Bandung (1995). He was appointed as Training and Development Group Head since 5 August 2016 by virtue of Decree of the Board of Directors No. SKEP.1253/KP.07.03/2016.

Profil Karyawan

Profile of Human Capital

Bagi Perseroan, *human capital* merupakan aset penting dalam keberlanjutan dan peningkatan kualitas bisnis. Perseroan senantiasa melakukan proses rekrutmen yang mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kompetensi kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional. Kandidat yang memenuhi standar administrasi dijangkau melalui situs Perseroan serta iklan. Komposisi pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) di tahun 2016 adalah sebagai berikut.

For the Company, human capital is regarded as an important asset in maintaining business sustainability and improving service quality. The Company consistently emphasizes the principles of openness, fairness and equality based on the required competence and qualification of the candidates and availability of local/national manpower in conducting personnel recruitment. Candidates who meet the administrative requirements are solicited through the Company's website and advertisements. The composition of the employees of PT Angkasa Pura I (Persero), in 2016 is as follows.

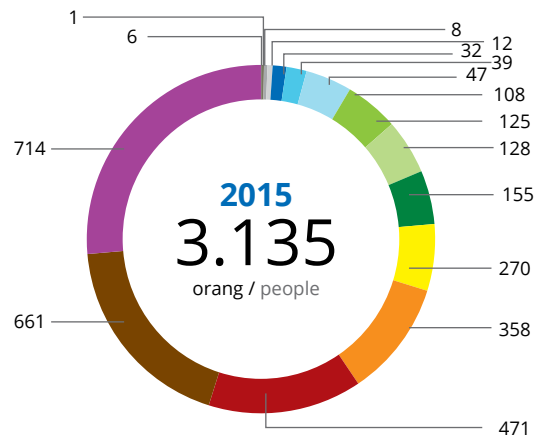
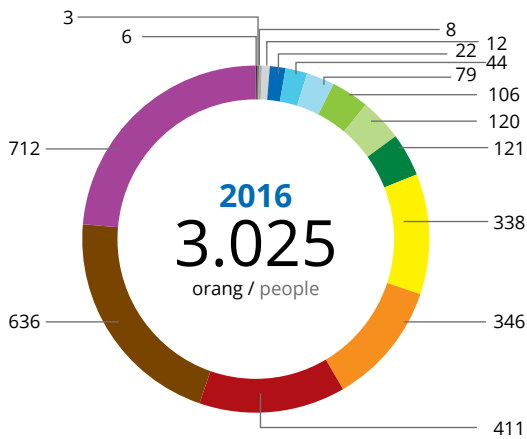
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

HUMAN RESOURCE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATION LEVEL

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi /
Table of Human Resource Composition based on Organization Level

(dalam orang / in persons)

Level Organisasi Organization Level	Tahun 2016 / Year 2016				2015				Perubahan /Change
	L	P	Total	%	L	P	Total	(%)	(%)
1	3	0	3	0.10	1	0	1	0.03	200.00
2	6	0	6	0.20	5	1	6	0.19	0.00
3	40	4	44	1.45	38	1	39	1.24	12.82
4	8	0	8	0.26	6	2	8	0.26	0.00
5	54	7	61	2.02	44	3	47	1.50	29.79
6	104	16	120	3.97	91	17	108	3.44	11.11
7	15	7	22	0.73	24	8	32	1.02	(31.25)
8	294	52	346	11.44	234	36	270	8.61	28.15
9	61	18	79	2.61	109	19	128	4.08	(38.28)
10	48	58	106	3.50	65	60	125	3.99	(15.20)
11	438	198	636	21.02	472	189	661	21.08	(3.78)
12	554	158	712	23.54	558	156	714	22.78	(0.28)
13	323	88	411	13.59	352	119	471	15.02	(12.74)
14	108	13	121	4.00	141	14	155	4.94	(21.94)
15	258	80	338	11.17	273	85	358	11.42	(5.59)
PKWT / PKWT	10	2	12	0.40	10	2	12	0.38	0.00
JUMLAH / TOTAL	2,324	701	3,025		2,423	712	3,135		(3.51)



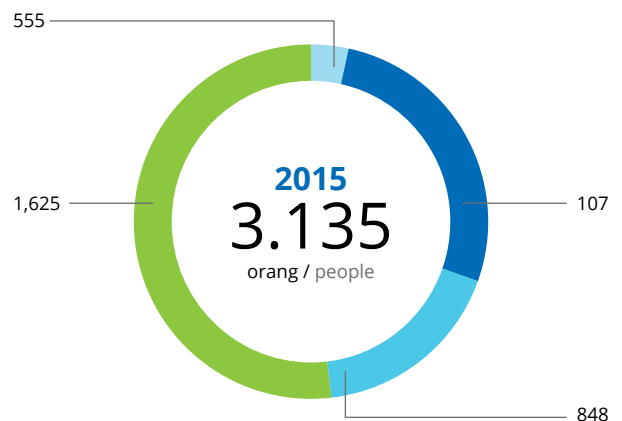
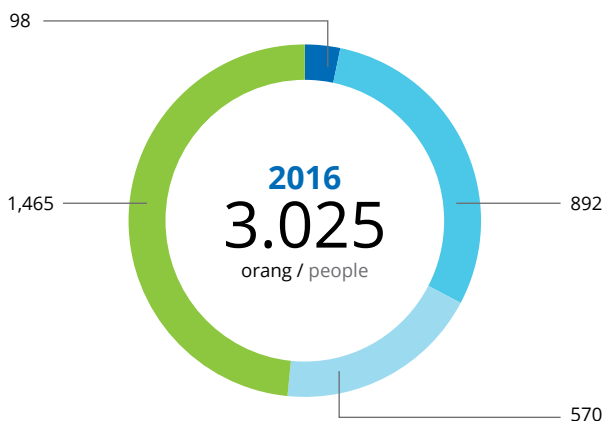
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

HUMAN RESOURCE COMPOSITION BASED ON EDUCATION LEVEL

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan /
Table of Human Resource Composition based on Educational Level

(dalam orang / in persons)

Tingkat Pendidikan Education Level	2016				2015				Perubahan / Change %
	L	P	Total	%	L	P	Total	%	
S2 / Graduate (Master)	69	29	98	3.24	80	30	107	3.41	(8.41)
Sarjana	604	288	892	29.49	585	261	848	27.05	5.19
D1 - D4	427	143	570	18.84	412	142	555	17.70	2.70
SD - SMA	1,223	242	1,465	48.43	1,346	279	1,625	51.83	(9.85)
TOTAL	2,323	702	3,025		2,423	712	3,135		(3.51)



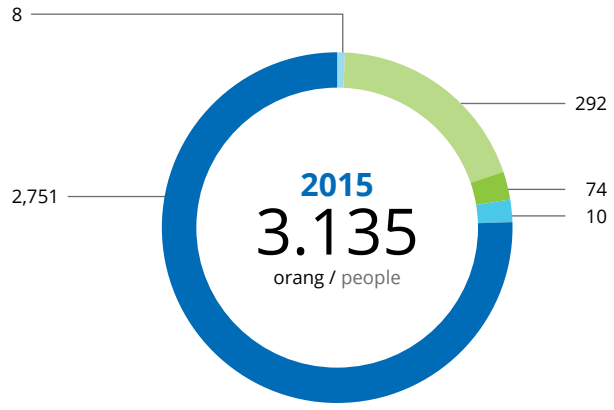
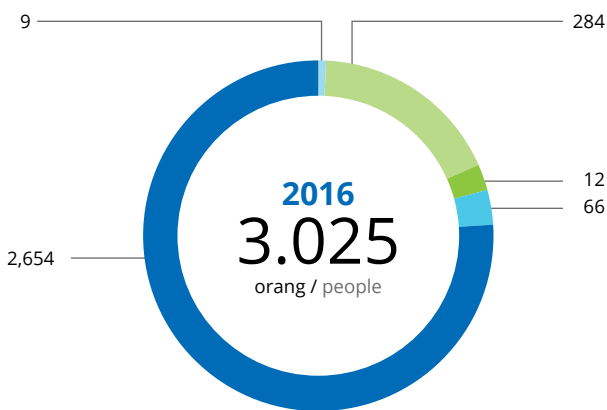
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

HUMAN RESOURCE COMPOSITION BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian /
Table of Human Resource Composition Based on Employment Status

(dalam orang/Person)

Status Kepegawaian Employee Status	2016				2015				Perubahan / Change %
	L	P	Total	%	L	P	Total	%	
Pegawai Perusahaan	2,025	629	2,654	87.74	2,126	625	2,751	87.75	(3.53)
PNS Diberbantukan	63	3	66	2.18	71	3	74	2.36	(10.81)
ABRI Ditugaskan	9	0	9	0.30	10	0	10	0.32	(10.00)
Honoror	10	2	12	0.40	6	2	8	0.26	50.00
Calon Pegawai	216	68	284	9.39	210	82	292	9.31	(2.74)
TOTAL	2,323	702	3,025		2,423	712	3,135		(3.51)



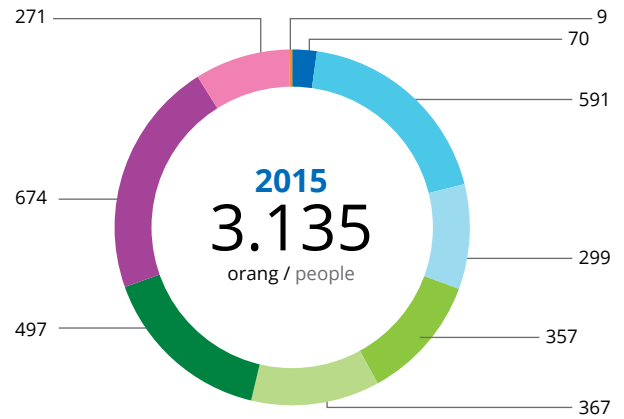
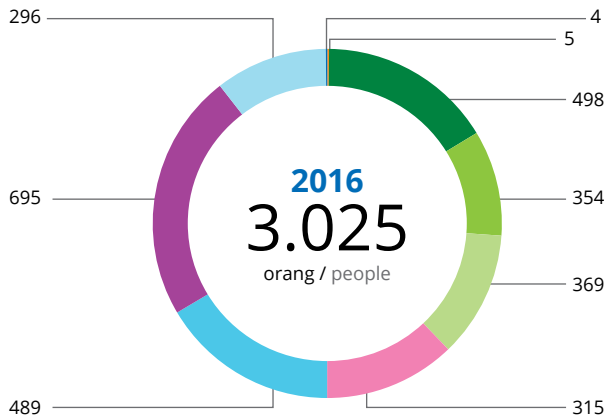
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

HUMAN RESOURCE COMPOSITION BASED ON AGE GROUP

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia /
Table of Human Resource Composition based on Age Group

(dalam orang/Person)

Kelompok Usia Age Group	2016				2015				Perubahan / Change %
	L	P	Total	%	L	P	Total	%	
>56	4	1	5	0.17	62	8	70	2.23	(92.86)
51 - 56	418	71	489	16.17	508	83	591	18.85	(17.26)
46 - 50	243	53	296	9.79	245	54	299	9.54	(1.00)
41 - 45	271	83	354	11.70	273	84	357	11.39	(0.84)
36 - 40	279	90	369	12.20	277	90	367	11.71	0.54
31 - 35	394	104	498	16.46	393	104	497	15.85	0.20
26 - 30	502	193	695	22.98	489	185	674	21.50	3.12
21 - 25	211	104	315	10.41	172	99	271	8.64	16.24
<20	0	3	4	0.13	3	6	9	0.29	(55.56)
TOTAL	2,323	702	3,025		2,423	712	3,135		(3.51)



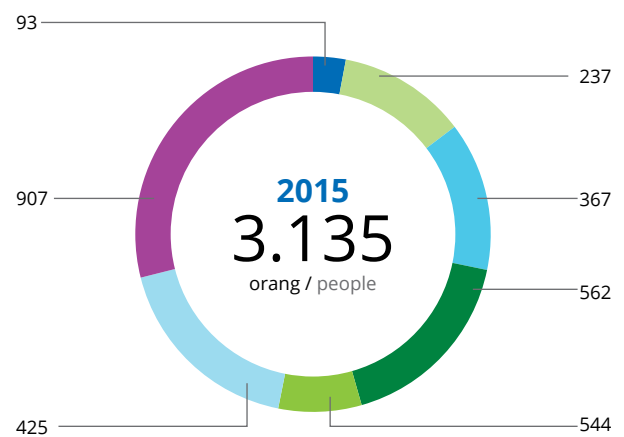
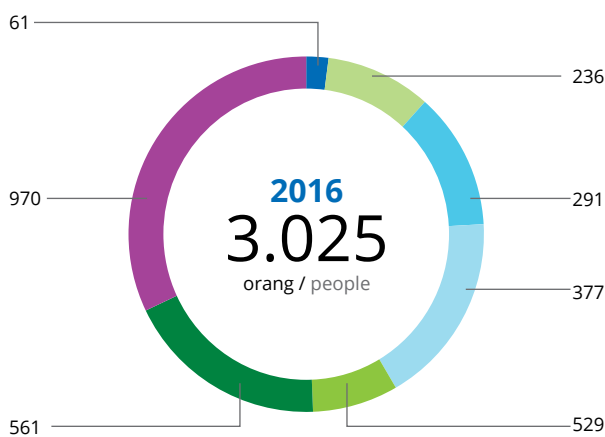
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

HUMAN RESOURCE COMPOSITION BASED ON WORKING PERIOD

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja
Table of Human Resource Composition based on Working Period

(dalam orang/Person)

Masa Kerja Working Period	2016				2015				Perubahan / Change %
	L	P	Total	%	L	P	Total	%	
>30	45	16	61	2.02	76	17	93	2.97	(34.41)
26 – 30	258	33	291	9.62	324	43	367	11.71	(20.71)
21 – 25	310	67	377	12.46	347	78	425	13.56	(11.29)
16 – 20	411	118	529	17.49	427	117	544	17.35	(2.76)
11 – 15	183	53	236	7.80	184	53	237	7.56	(0.42)
6 – 10	457	104	561	18.55	457	105	562	17.93	(0.18)
0 – 5	659	311	970	32.07	608	299	907	28.93	6.95
TOTAL	2,323	702	3,025		2,423	712	3,135		(3.51)

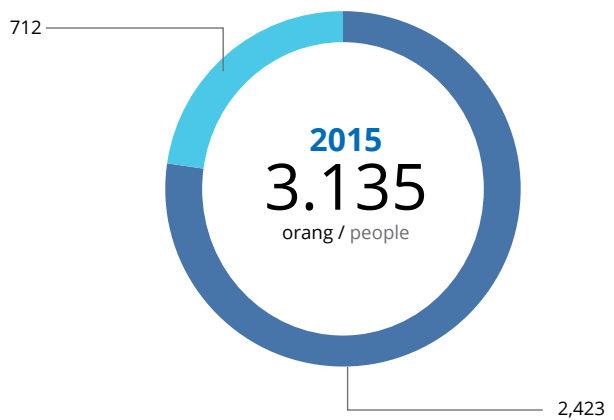
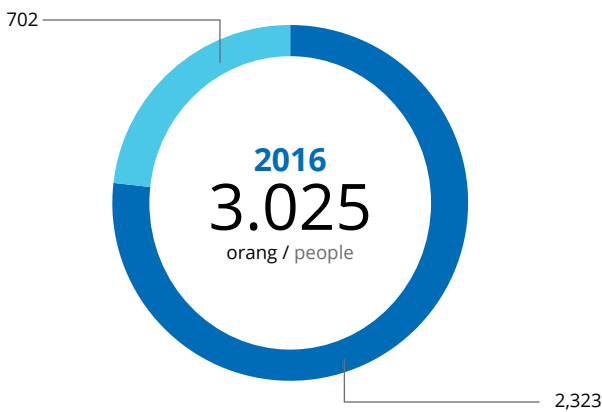


KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

HUMAN RESOURCE COMPOSITION BASED ON GENDER

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender /
Table of Human Resource Composition based on Gender
 (dalam orang/Person)

Gender	2016	%	2015	%	Perubahan / Change %
Laki- Laki	2,323	76.79	2,423	77.29	(4.13)
Perempuan	702	23.21	712	22.71	(1.40)
TOTAL	3,025		3135		(3.51)



PENGEMBANGAN PEGAWAI

Sebagai program pengembangan karyawan, PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pegawai dan pengembangan bisnis perusahaan. Seluruh pegawai dalam level organisasi memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pengembangan pegawai. Di tahun 2015, anggaran biaya diklat personil perusahaan naik 61,67% atau mencapai sekitar Rp44,77 miliar dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp27,69 miliar. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Program pelatihan yang dilaksanakan juga sangat beragam mengikuti kebutuhan unit-unit terkait di perusahaan. Selama tahun 2015, program diklat yang dilaksanakan Perseroan mencakup 218 jenis program.

EMPLOYEE DEVELOPMENT

As part of capacity development program for employees, PT Angkasa Pura I (Persero) conducted various training programs. Training programs are held based on employees' needs and business development of the company. All employees from organization level have equal opportunities to join the employee development program. In 2015, the budget for personnel training and education increased by 61.67% or amounted to Rp44.77 billion compared to the budget in 2014 which amounted to Rp27.69 billion. The number of participants joining the program in 2015 increased compared to the number of participants in 2014. The training programs consisted of a wide range of programs adjusted to the needs of relevant business units in the Company. During 2015, the training and education programs conducted by the Company covered 218 types of programs.

**Tabel Pengembangan Kompetensi bagi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan /
Table of Capacity Development for Employees based on Job Level**

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Direksi / The Board of Directors	ACI <i>Global Training - Airport Human Resources Management</i>	Mengetahui konsep dasar dalam mengembangkan organisasi kebandarudaraan dengan kinerja tinggi dan nilai-nilai budaya yang terinternalisasi / To know the basic concepts in developing an airport organization with internalized high performance and core values.	1
2	Direksi / The Board of Directors	ACI ASIA - <i>Pacific Regional Assembly, Conference and Exhibition</i>	Mengetahui perkembangan isu strategis kebandarudaraan yang meliputi safety, security, bisnis dan lingkungan dalam meningkatkan pelayanan kepada <i>stakeholder</i> / To know the development of airport strategic issues which comprise safety, security, business and environment in improving services to stakeholders.	1
3	Direksi / The Board of Directors	Seminar " <i>CEO Talk on Holding Company and Corporate Culture Summit</i> "	Direktur Utama sebagai narasumber / The President Director as the resource person	1
4	Direksi / The Board of Directors	AMPAP <i>Online Course - Airport Planning, Development and Environmental Management</i>	Tindak lanjut dan persyaratan untuk memperoleh akreditasi Global ACI-ICAO <i>International Airport Professional (IAP)</i> / As a follow-up and requirement to obtain the Global ACI ICAO International Airport Professional (IAP) accreditation.	1
5	Direksi / The Board of Directors	<i>Emerging MRO Markets in Asia Pacific</i>	Mengetahui tren yang akan muncul dari pasar MRO di Asia dan di industri penerbangan, termasuk tantangan dan peluang untuk masa depan di Asia Pasifik dan pasar global. / To know the emerging trends of MRO markets in Asia and aviation industry, including the challenges and opportunities for Asia Pacific and global markets in the future.	1
6	Direksi / The Board of Directors	ACI ASIA - <i>Pacific Small and Emerging Airports Seminar 2016</i>	Ajang mempromosikan pertukaran dan berbagi pengetahuan dan keahlian di antara bandara-bandara kecil dan berkembang di ACI Asia-Pasifik. / To promote knowledge sharing and exchange and expertise among small and developing airports in ACI Asia Pacific.	1
7	Direksi / The Board of Directors	AMPAP <i>Online Course - Airport Commercial and Financial Management</i>	Sebagai tindak lanjut dan persyaratan untuk memperoleh akreditasi Global ACI-ICAO <i>International Airport Professional (IAP)</i> yang menyatakan bahwa peserta telah mencapai standar sebagai ahli dalam bidang <i>airport management</i> . / As a follow-up and requirement to obtain the Global ACI ICAO International Airport Professional (IAP) accreditation which states that the participants have achieved the standards as experts in airport management.	1
8	Direksi / The Board of Directors	<i>Business Strategy for HR Leaders</i>	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dengan memperoleh pengetahuan tentang konsep-konsep strategis yang memungkinkan peran yang lebih proaktif dalam membentuk strategi dalam organisasi. / To enhance leadership skills through knowledge acquisition on the strategic concepts which enable more proactive roles in formulating strategies within the organization.	1

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
9	Group Head	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pejabat Kelas A / English Language Training for Class A Officials	Meningkatkan keterampilan Bahasa Inggris untuk Pejabat dan sebagai alat ukur kemampuan eksisting Bahasa Inggris pejabat / To improve English Language skills and measure existing English language abilities of Class A Officials.	13
10	Group Head/ Head of	Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II / Workshop on National Seed of Integrity (Tunas Integritas) Collaboration II	Mendapat <i>guideline</i> dan <i>best practice</i> atas pembangunan sistem integritas perusahaan. Membangun sinergi dengan tunas integritas pada perusahaan lain. Peningkatan <i>image</i> perusahaan terkait implementasi GCG di lingkungan perusahaan / To receive guideline and <i>best practice</i> on the development of corporate integrity system. To establish synergies with the seeds of integrity of other companies. To enhance company image related to the implementation of GCG in the company environment.	3
11	Group Head/ Head of	Workshop Housekeeping	Mendorong agar terciptanya manajemen sumber daya manusia secara baik dan inovatif dalam program <i>cleaning services</i> di unit <i>General affair</i> . / To encourage more improved and innovative human resource management in <i>cleaning services</i> programs under the unit of <i>General affair</i> .	37
12	Group Head/ Head of	Workshop Tunas Sistem dan Komite Integritas / Workshop on Seed, System and Committee of Integrity	Membentuk tunas, sistem dan komite integritas yang dapat menjadi kader tunas integritas di PT Angkasa Pura I (Persero) / To build the seed, system and committee of integrity who can be the activators of seeds of integrity in PT Angkasa Pura I (Persero)	11
13	Group Head/ Head of	Pelatihan <i>Enterprise Risk Management</i> (ERP) Batch I / Enterprise Risk Management (ERP) Training Batch I	Memberikan pengetahuan dalam bidang <i>risk management</i> sehingga mampu memahami dan menganalisa suatu masalah terkait dengan <i>risk management</i> / To provide knowledge on risk management in order to comprehend and analyze issues related to risk management.	48
14	General Manager	Pelatihan <i>Enterprise Risk Management</i> (ERP) Batch I, II dan III / Training <i>Enterprise Risk Management</i> (ERP) Batch I, II and III	Memberikan pengetahuan dalam bidang <i>risk management</i> sehingga mampu memahami dan menganalisa suatu masalah terkait dengan <i>risk management</i> / To provide knowledge on <i>risk management</i> in order to comprehend and analyze issues related to <i>risk management</i>	48
15	General Manager	Pelatihan Hukum Pertanahan / Agrarian Law Training	Agar mampu memahami dan melaksanakan mekanisme pengadaan tanah yang ada di Bandara / To comprehend and implement the mechanism of land acquisition at the Airport	25
16	General Manager	<i>The Power of Emphaty</i>	Agar peserta dapat mengetahui potensi dirinya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memiliki empati yang terhadap lingkungan kerjanya / To explore the participants' self-potentials to improve their services and develop empathy towards their working environment.	123
17	General Manager	Workshop Tunas Sistem dan Komite Integritas	Membentuk tunas, sistem dan komite integritas yang dapat menjadi kader tunas integritas di PT Angkasa Pura I (Persero) / To build the seed, system and committee of integrity who can be the activators of seeds of integrity in PT Angkasa Pura I (Persero)	11

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
18	<i>General Manager</i>	Pelatihan Pra Purnabakti <i>Batch XVIII</i> / Pra-Purnabakti Training Batch XVIII	Agar peserta mampu memahami <i>emotional power</i> , kiat menghadapi status purnabakti, <i>healty secret</i> , mengaplikasikan <i>entrepreneurship</i> , keluarga harmonis pasca purnabakti / To enable the participants to understand their <i>emotional power</i> , tips on dealing with retirement status, <i>healthy secret</i> , apply <i>entrepreneurship</i> , harmonious family after retirement.	25
19	<i>Department Head</i>	<i>Business Process Management</i>	Memperkaya pengetahuan dan keterampilan pegawai, terutama dari <i>Unit Quality Management</i> terkait Proses Bisnis dan kaitannya dengan Bisnis Kebandarudaraan / To improve the participants' knowledge and skills, especially for employees of Quality Management Unit in relation to Business Process and Airport Affairs Business.	25
20	<i>Department Head</i>	Diklat <i>IATA-Aviation Security Management</i> / Training and Education of <i>IATA-Aviation Security Management</i>	Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan komitmen pegawai terhadap penyelenggaraan <i>Aviation Security Management</i> yang memenuhi standar serta sebagai Pemenuhan ketentuan dari PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional / To improve the participants' knowledge, skills, expertise, and commitment towards the implementation of <i>Aviation Security Management</i> which meets the standards as well as compliance with the provision of PM 137 of 2015 on National Aviation Security Training and Education Program.	25
21	<i>Department Head</i>	Diklat Manajerial Tingkat Madya / Training and Education for Middle-Level Managerial	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang tepat sehingga mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok dari pekerjaan-pekerjaan manajerial atau struktural tingkat madya / To improve knowledge, skills, and appropriate behaviors to be able to accomplish the main tasks and functions of middle-level managerial or structural works.	25
22	<i>Department Head</i>	Membangun <i>Corporate Culture</i> dan Etika Bisnis / <i>Building Corporate Culture and Business Ethics</i>	Membentuk dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia agar mampu menjadi SDM yang handal dan cakap dan berkualitas, beretika dan memiliki inovasi dan inisiatif kerja yang tinggi serta memiliki etos kerja dengan semangat melayani, semangat juang berlandaskan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan / To build and prepare the participants to be able to become reliable, competent, and qualified human resource, developing ethics, innovation and initiative as well as work ethics with the spirit of service and tenacity which correspond to the Company's Vision, Mission, and Core Values.	30

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
23	Department Head	Pelatihan <i>Airport Safety Management System Level Basic</i> / Training on <i>Airport Safety Management System Level Basic</i>	Memberikan pengetahuan Teori dan Praktek Dasar terkait Manajemen Keselamatan Bandar Udara sesuai standar <i>International Civil Aviation Organization</i> (ICAO), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Otoritas Transportasi Bandar Udara lainnya yang diakui. / To provide Theoretical and Basic Practices knowledge related to Airport Safety Management as per <i>International Civil Aviation Organization</i> (ICAO) standards, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and other recognized Airport Transportation Authorities.	25
24	Department Head	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pejabat Kelas B dan A / English Language Training for Class A and Class B Officials	Meningkatkan keterampilan Bahasa Inggris untuk Pejabat dan sebagai alat ukur kemampuan eksisting Bahasa Inggris pejabat. / To improve English Language skills and measure existing English language abilities of Class A and Class B Officials.	27
25	Department Head	Pelatihan <i>Enterprise Risk Management (ERP) Batch I, II dan III</i> / Training on <i>Enterprise Risk Management (ERP) Batch I, II and III</i>	Memberikan pengetahuan dalam bidang <i>risk management</i> sehingga mampu memahami dan menganalisa suatu masalah terkait dengan <i>risk management</i> / To provide knowledge on risk management in order to comprehend and analyze issues related to <i>risk management</i>	48
26	Department Head	Pelatihan <i>Fixed Asset Accounting</i> / Training on <i>Fixed Asset Accounting</i>	Mampu meningkatkan dalam mengimplementasikan SOP bagi pejabat dalam melakukan kajian, analisa dan memberikan rekomendasi terkait dengan pengelolaan Aset tetap (<i>Fixed Asset</i>) pada perusahaan / To be able to improve the implementation of SOP for officers in conducting review, analysis and recommendation related to the company's <i>Asset (Fixed Asset)</i> management	29
27	Department Head	Pelatihan <i>Information Technology Service Management</i> / Training on <i>Information Technology Service Management</i>	Mampu memahami konsep dasar ITSM, menerapkan standar ITSM dan Mampu menerapkan manajemen pelayanan berbasis ISO/IEC 20000 dan ITIL / To comprehend the basic concepts of ITSM and apply the standards of ITSM and implement the ISO/IEC 20000 and ITIL-based service management	21
28	Department Head	Pelatihan Internal Auditor SMK3 (sertifikasi BNSP) / Internal Auditor SMK3 (BNSP certification) Training	Mengerti dan memahami prinsip-prinsip, elemen, dan kriteria SMK3 di perusahaan. / To comprehend the principles, elements, and criteria of SMK3 (K3 management system) in the company.	1
29	Department Head	Pelatihan <i>Mastering Cobit Fundamental : 4.1 Best Practice</i> / Training on <i>Mastering Cobit Fundamental : 4.1 Best Practice</i>	Mampu memahami Cobit dan <i>IT Governace</i> , menjelaskan kerangka kerja dan komponen Cobit, menerapkan Cobit dan aplikasi-aplikasinya dan menganalisa permasalahan terkait tata kelola IT di tempat kerja masing-masing / To understand Cobit and <i>IT Governace</i> , explain Cobit framework and components, apply Cobit and its applications and analyze issues related to IT governance in the company	28
30	Department Head	Pelatihan <i>Negotiation Skill</i> / Training on <i>Negotiation Skill</i>	Mampu melakukan komunikasi dalam negosiasi dan memulai negosiasi / To be able to communicate in negotiation and initiate negotiation	30

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
31	Department Head	Pelatihan Obligasi dan Sukuk Ijarah / Training on Bonds and Ijarah Sukuk	Mampu menjelaskan prinsip dasar pendanaan perusahaan, melakukan analisis dan evaluasi rekomendasi alternatif pendanaan yang efisien bagi perusahaan / To be able to explain the basic principles of the company funding, conduct analysis and evaluation of funding alternative recommendation efficient for the company.	34
32	Department Head	Pelatihan Penagihan Piutang Yang Efektif / Training on Effective Process of Receivables Collection	Peserta pelatihan akan mampu melaksanakan proses penagihan piutang yang efektif berdasarkan SOP dan kebijakan pengelolaan piutang usaha serta melakukan analisa terhadap sistem pengelolaan piutang usaha di PT Angkasa Pura I (Persero) / The participants is expected to be able to carry out effective process of receivables collection based on SOP and management policies of accounts receivables and to analyze the management system of accounts receivables in PT Angkasa Pura I (Persero)	27
33	Department Head	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XV (Surabaya, Semarang dan Malang) / Pra-Purnabakti Training Batch XV (Surabaya, Semarang and Malang)	Menyiapkan Mental, Emosional, Kesehatan dan Pengetahuan menghadapi Purna Tugas / To prepare the Mental, Emotional, and Health Condition and Knowledge on dealing with Retirement	75
34	Department Head	Quality Management System ISO 9001:2015	Memberikan pengetahuan terbaru kepada pegawai dari Unit Quality Management terkait Standar Mutu ISO 9001:2015 serta implementasinya di lapangan/unit kerja. / To provide the most updated knowledge to employees of Quality Management Unit related to ISO 9001:2015 Quality Standard and its implementation in the field/work unit.	25
35	Department Head	Team Work Management Training	Membentuk kesamaan pemahaman, keselarasan, komitmen dalam bekerja dan menyatukan langkah untuk mencapai tujuan bersama maka PT Angkasa Pura I (Persero) / To build a common understanding, harmony, and commitment in working and to improve integrity to achieve the objectives of PT Angkasa Pura I (Persero)	13
36	Department Head	The Power of Emphaty	Agar peserta dapat mengetahui potensi dirinya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memiliki empati yang terhadap lingkungan kerjanya sehingga lebih mudah untuk bersinergi dalam bertanggung jawab, membangun komitmen terhadap pekerjaan yang di emban dan mengaplikasikan hal – hal pokok yang dapat dimulai dari yang paling mudah / To explore the participants' self-potentials to improve their services and develop empathy towards their working environment, resulting in more responsibility and commitment to their duties and apply essential tasks beginning from the easiest ones.	124
37	Department Head	Training Risk Management	Agar insan PT Angkasa Pura I (Persero) mampu mengimplementasikan dan menerapkan Manajemen Risiko pada setiap proses Bisnis kerja / All employees of PT Angkasa Pura I (Persero) will be able to apply and implement Risk Management in each process of Business.	25

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
38	Department Head	Workshop Housekeeping	Mendorong agar terciptanya manajemen sumber daya manusia secara baik dan inovatif dalam program <i>cleaning services</i> di unit <i>General affair</i> . / To encourage more improved and innovative human resource management in <i>cleaning services</i> programs under the unit of <i>General affair</i> .	37
39	Department Head	Workshop Tunas Sistem dan Komite Integritas / Workshop on Seed, System and Committee of Integrity	Membentuk tunas, sistem dan komite integritas yang dapat menjadi kader tunas integritas di PT Angkasa Pura I (Persero) / To build the seed, system and committee of integrity who can be the activators of seeds of integrity in PT Angkasa Pura I (Persero)	11
40	Section Head	Business Process Management	Memperkaya pengetahuan dan keterampilan pegawai, terutama dari <i>Unit Quality Management</i> terkait Proses Bisnis dan kaitannya dengan Bisnis Kebandarudaraan / To improve the participants' knowledge and skills, especially for employees of <i>Quality Management Unit</i> in relation to Business Process and Airport Affairs Business.	25
41	Section Head	Diklat <i>General Instructor Course</i> / Training and Education on <i>General Instructor Course</i>	Peserta mampu menjalankan multi peran sebagai instruktur, dapat berinteraksi belajar mengajar lebih menari, efektif dan efisien, mampu menyusun garis-garis besar program pengajaran dan satuan pelajaran / Participants are able to perform multi-roles as instructors, able to conduct more attractive teaching and learning interaction, effectively and efficiently arrange the teaching learning program structures and units.	24
42	Section Head	Diklat GSN 6 : <i>Aerodrome Compliance and Auditing</i> / GSN 6 Training and Education: <i>Aerodrome Compliance and Auditing</i>	Memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada <i>Aerodrome Safety and Compliance</i> Staf untuk melakukan audit terhadap prosedur, infrastruktur, dan peralatan keselamatan, termasuk pula organisasi-organisasi lain yang beroperasi di bandara / To provide knowledge and competence to <i>Aerodrome Safety and Compliance</i> Staff to conduct audit on the procedures, infrastructures, and safety equipment, including other organizations operating at the airport.	11
43	Section Head	Diklat IATA-Aviation Security Management / Training and Education of IATA-Aviation Security Management	Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan komitmen pegawai terhadap penyelenggaraan <i>Aviation Security Management</i> yang memenuhi standar serta sebagai Pemenuhan ketentuan dari PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional / To improve the participants' knowledge, skills, expertise, and commitment towards the implementation of <i>Aviation Security Management</i> which meets the standards as well as compliance with the provision of PM 137 of 2015 on National Aviation Security Training and Education Program.	25

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
44	Section Head	Diklat KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) / Training and Education on Flight Operation Safety Area (KKOP)	Memberikan pengetahuan dasar terkait Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan bagi pegawai dari Unit <i>Airport Safety</i> / To provide basic knowledge related to Flight Operation Safety Area for employees of Unit <i>Airport Safety</i> .	30
45	Section Head	Diklat Manajerial Tingkat Muda / Training and Education for Junior Managerial	Memiliki keterampilan <i>personality</i> dan pelayanan dalam mendukung peningkatan kinerja; Memiliki pengetahuan manajemen strategik bandar udara; Memiliki keterampilan kerjasama tim dan pemecahan masalah serta Memiliki keterampilan <i>people management</i> . / To develop skills, personality and services in supporting the improved performance; To develop knowledge on airport strategic management; To develop skills on <i>people management</i> .	50
46	Section Head	Membangun <i>Corporate Culture</i> dan Etika Bisnis / Building <i>Corporate Culture</i> and Business Ethics	Membentuk dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia agar mampu menjadi SDM yang handal dan cakap dan berkualitas, beretika dan memiliki inovasi dan inisiatif kerja yang tinggi serta memiliki etos kerja dengan semangat melayani, semangat juang berlandaskan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan / To build and prepare the participants to be able to become reliable, competent, and qualified human resource, developing ethics, innovation and initiative as well as work ethics with the spirit of service and tenacity which correspond to the Company's Vision, Mission, and Core Values.	30
47	Section Head	Pelatihan <i>Airport Safety Management System Level Basic</i> / Training on <i>Airport Safety Management System Level Basic</i>	Memberikan pengetahuan Teori dan Praktek Dasar terkait Manajemen Keselamatan Bandar Udara sesuai standar International <i>Civil Aviation Organization</i> (ICAO), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Otoritas Transportasi Bandar Udara lainnya yang diakui / To provide Theoretical and Basic Practices knowledge related to Airport Safety Management as per International <i>Civil Aviation Organization</i> (ICAO) standards, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and other recognized Airport Transportation Authorities.	25
48	Section Head	Pelatihan <i>Community Development Management</i> / Training on <i>Community Development Management</i>	Mampu melaksanakan dan mengelola <i>Community Development</i> yang efektif bagi peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat sekitar dan peningkatan <i>corporate image</i> termasuk mengenal mitra dan mampu menyalurkan dana pinjaman tepat sasaran / To be able to conduct and manage effective <i>Community Development</i> for improvement of the socio-economic quality of local community and enhancement of corporate image which include the ability to closely interact with partners and distribute loans to the right targets.	26

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
49	Section Head	Pelatihan End User SAP Modul MM / Training on End User SAP Module MM	Memberikan keterampilan dan teknik menguasai SAP Modul Material Management untuk pegawai di Unit <i>General Affair</i> dan <i>Information Technology</i> yang dibutuhkan di tempat kerja dalam rangka inventarisasi perlengkapan dan peralatan kantor / To provide skills and techniques to master SAP Module Material Management for employees of <i>General Affair</i> and <i>Information Technology</i> Units as required in the company in order to compile inventory of office equipment and tools.	9
50	Section Head	Pelatihan <i>Fixed Asset Accounting</i> / Training on <i>Fixed Asset Accounting</i>	Mampu meningkatkan dalam mengimplementasikan SOP bagi pejabat dalam melakukan kajian, analisa dan memberikan rekomendasi terkait dengan pengelolaan Aset tetap (<i>Fixed Asset</i>) pada perusahaan / To be able to improve the implementation of SOP for officers in conducting review, analysis and recommendation related to the company's <i>Fixed Asset</i> management	29
51	Section Head	Pelatihan Hukum Pertanahan / Agrarian Law Training	Meningkatkan pemahaman bagi pejabat tentang Hukum Tanah dan permasalahan pengadaaan tanah yang ada di Bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) / To improve the comprehension on Agrarian Law and issues on land acquisition at the Airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero)	25
52	Section Head	Pelatihan <i>Information Technology Service Management</i> / Training on <i>Information Technology Service Management</i>	Mampu memahami konsep dasar ITSM, menerapkan standar ITSM dan Mampu menerapkan manajemen pelayanan berbasis ISO/IEC 20000 dan ITIL / To comprehend the basic concepts of ITSM and apply the standards of ITSM and implement the ISO/IEC 20000 and ITIL-based service management	21
53	Section Head	Pelatihan Internal Auditor SMK3 (sertifikasi BNSP) / Internal Auditor SMK3 (BNSP certification) Training	Memenuhi kriteria PP No. 50 Tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Mengerti dan memahami prinsip-prinsip, elemen, dan kriteria SMK3 di perusahaan dan Mampu menjadi auditor SMK3 sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan tersertifikasi oleh BNSP / To meet the criteria of Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Job Health and Safety Management System (SMK3), To comprehend the principles, elements, and criteria of SMK3 at a company and To have the qualification as SMK3 auditor as required by the agreed standards and certified by BNSP.	7
54	Section Head	Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan / Training on Journalism and Public Relations	Mampu berkomunikasi dan memahami dengan baik bagi pegawai yang memberikan peranan kepada media untuk menjelaskan cara kerja media dalam dunia kehumasan secara baik dan benar dalam rangka meningkatkan citra perusahaan / Employees working in public relations unit will be able to communicate and comprehend to explain how the media works in the realms of public relations correctly and appropriately in order to enhance the corporate image	15

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
55	Section Head	Pelatihan <i>Mastering Cobit Fundamental : 4.1 Best Practice</i> / Training on <i>Mastering Cobit Fundamental : 4.1 Best Practice</i>	Mampu memahami Cobit dan IT Governace, menjelaskan kerangka kerja dan komponen Cobit, menerapkan Cobit dan aplikasi-aplikasinya dan menganalisa permasalahan terkait tata kelola IT di tempat kerja masing-masing / To understand Cobit and IT Governance, explain Cobit framework and components, apply Cobit and its applications and analyze issues related to IT governance in the company	28
56	Section Head	Pelatihan <i>Negotiation Skill</i> / Training on <i>Negotiation Skill</i>	Mampu memahami tentang negosiasi, melakukan komunikasi dalam negosiasi dan memulai negosiasi / To understand negotiation, able to communicate in negotiation and initiate negotiation	30
57	Section Head	Pelatihan Obligasi dan Sukuk / Training on Bonds and Sukuk	Mampu menjelaskan prinsip dasar pendanaan perusahaan, melakukan analisis dan evaluasi rekomendasi alternatif pendanaan yang efisien bagi perusahaan / To be able to explain the basic principles of the company funding, conduct analysis and evaluation of funding alternative recommendation efficient for the company.	34
58	Section Head	Pelatihan Penagihan Piutang Yang Efektif / Training on Effective Process of Receivables Collection	Peserta pelatihan akan mampu melaksanakan proses penagihan piutang yang efektif berdasarkan SOP dan kebijakan pengelolaan piutang usaha serta melakukan analisa terhadap sistem pengelolaan piutang usaha di PT Angkasa Pura I (Persero) / The participants is expected to be able to carry out effective process of receivables collection based on SOP and management policies of accounts receivables and to analyze the management system of accounts receivables in PT Angkasa Pura I (Persero)	27
59	Section Head	Pelatihan Pengadaan Barang dan atau Jasa <i>Batch III</i> (Surabaya) / Training on Procurement of Goods and/or Services <i>Batch III</i> (Surabaya)	Dengan adanya sistem dan prosedur pengadaan barang dan atau jasa yang baru, diharapkan <i>team leader</i> yang mengikuti pelatihan dapat memahami permasalahan pengadaan barang dalam meningkatkan service level (kinerja/pelayanan), berupa proses penyediaannya hingga pembayaran lebih pendek/menghindari birokrasi berkepanjangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan / With the implementation of new system and procedures of procurement of goods and/or services, participating <i>team leader</i> are expected to comprehend the issues in procurement of goods in order to improve service level (performance/service), from procuring process to simpler payment method/ avoid complicated bureaucracy to enhance the company performance	30
60	Section Head	Pelatihan Pra Purnabakti <i>Batch XV</i> (Surabaya, Semarang, Makassar dan Malang) / Pra-Purnabakti Training <i>Batch XV</i> (Surabaya, Semarang, Makassar and Malang)	Menyiapkan Mental, Emosional, Kesehatan dan Pengetahuan menghadapi Purna Tugas / To prepare the Mental, Emotional, and Health Condition and Knowledge on dealing with Retirement	100

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
61	Section Head	Pelatihan <i>Quality Management System</i> ISO 9001:2015 / Training <i>Quality Management System</i> ISO 9001:2015	Memberikan pengetahuan terbaru kepada pegawai dari Unit <i>Quality Management</i> terkait Standar Mutu ISO 9001:2015 serta implementasinya di lapangan/unit kerja / To provide the most updated knowledge to employees of <i>Quality Management</i> Unit related to ISO 9001:2015 Quality Standard and its implementation in the field/work unit.	31
62	Section Head	Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan / Certification on Flight Safety Instructor	Pemenuhan ketentuan dari PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional / Fulfillment of the provision of Minister Regulation 137 of 2015 on the National Aviation Security Education and Training Program	20
63	Section Head	<i>The Power of Emphaty</i>	Agar peserta dapat mengetahui potensi dirinya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memiliki empati yang terhadap lingkungan kerjanya sehingga lebih mudah untuk bersinergi dalam bertanggung jawab, membangun komitmen terhadap pekerjaan yang di emban dan mengaplikasikan hal – hal pokok yang dapat dimulai dari yang paling mudah / To explore the participants' self-potentials to improve their services and develop empathy towards their working environment, resulting in more responsibility and commitment to their duties and apply essential tasks beginning from the easiest ones.	203
64	Section Head	<i>Training Risk Management</i>	Agar insan PT Angkasa Pura I, mampu mengimplementasikan dan menerapkan Manajemen Risiko pada setiap proses Bisnis kerja / All employees of PT Angkasa Pura I will be able to apply and implement Risk Management in each process of Business.	25
65	Section Head	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil PKP-PK (Makassar, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta) / License Renewal Test for PKP-PK Personnel (Makassar, Semarang, Surabaya and Yogyakarta)	Sebagai alat ukur kecakapan personil PKP- PK untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara pada tingkat <i>Section Head</i> . / As a measuring instrument of PKP-PK personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at the Airport at the level of <i>Section Head</i> .	80
66	Section Head	Ujian Perpanjangan/Penerbitan Ulang Lisensi/ <i>Rating</i> FSD-FSU Teknik Fasilitas Bandara / License/ <i>Rating</i> Issuance/ Renewal Test for Technical Personnel of FSD-FSU Airport Facilities	Sebagai alat ukur kecakapan personil Teknik Bandar Udara untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> Fasilitas Sisi Darat (FSD) maupun Fasilitas Sisi Udara (FSU) baik di tingkat Terampil maupun Ahli bagi pegawai di Unit Teknik Kantor Pusat yang telah menjadi <i>Section Head Unit</i> Teknik Kantor Cabang / As a measuring instrument of the Airport Technical personnel's' competence to maintain the Land Side Facilities (FSD) and Air Side Facilities (FSU) licenses/ <i>rating</i> either at Qualified or Expert level for employees at the Head Office's Technical Unit who have been appointed as Section Head at the Branch Office.	25
67	Section Head	<i>Workshop Housekeeping</i>	Mendorong program <i>cleaning services</i> diperlukan manajemen sumber daya manusia secara baik dan inovatif di unit <i>General affair</i> / To encourage <i>cleaning services</i> programs, improved and innovative human resource management is required under General affair unit.	37

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
68	<i>Section Head</i>	<i>Workshop Knowledge Management / Workshop on Knowledge Management</i>	Pengenalan konsep <i>knowledge management</i> kepada pegawai / Introduction to knowledge management concepts to employees	30
69	<i>Team Leader</i>	<i>Aviation Security Investigation Course</i>	Pemenuhan kompetensi yang akan bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi apabila terjadi pelanggaran tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi dilingkungan bandara / To develop competent employees assigned to carry out inquiry and investigation to search and collect data and information on the event of committed crime or abuse of authority, infringement of employees' disciplines within the airport environment.	22
70	<i>Team Leader</i>	<i>Diklat General Instructor Course / Training General Instructor Course</i>	Peserta mampu menjalankan multi peran sebagai instruktur, dapat berinteraksi belajar mengajar lebih menari, efektif dan efisien, mampu menyusun garis-garis besar program pengajaran dan satuan pelajaran / Participants are able to perform multi-roles as instructors, able to conduct more attractive teaching and learning interaction, effectively and efficiently arrange the teaching learning program structures and units.	24
71	<i>Team Leader</i>	<i>Diklat Human Factor for Airport Personnel Angkatan I / Training and Education on Human Factor for Airport Personnel Batch I</i>	Bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Teori Dan Prinsip Dasar <i>Human Factor</i> Serta Dapat Mencegah/Mengurangi Kekeliruan di bidang Pengendalian, Pengoperasian dan Perawatan Bagi Personel Bandar Udara / To provide Basic Theories and Principles on <i>Human Factor</i> and Prevent/Reduce Errors on Control, Operation and Maintenance conducted by Airport Personnel.	30
72	<i>Team Leader</i>	<i>Diklat IATA-Aviation Security Management / Training IATA-Aviation Security Management</i>	Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan komitmen pegawai terhadap penyelenggaraan <i>Aviation Security Management</i> yang memenuhi standar serta sebagai Pemenuhan ketentuan dari PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional / To improve the participants' knowledge, skills, expertise, and commitment towards the implementation of <i>Aviation Security Management</i> which meets the standards as well as compliance with the provision of Minister Regulation 137 of 2015 on National <i>Aviation Security Training and Education Program</i> .	25
73	<i>Team Leader</i>	<i>Diklat Maintenance Kendaraan PKP-PK / Training and Education on PKP-PK Vehicles</i>	Sebagai persyaratan pemenuhan kompetensi Personil PKP - PK yang memiliki fungsi dan tanggung jawab pemeliharaan kendaraan PKP - PK di Bandar Udara di tingkat <i>Team Leader</i> / As a requirement to competence fulfillment of PKP - PK Personnel charged with functions and responsibilities of PKP -PK vehicles maintenance at the level of <i>Team Leader</i> .	18

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
74	Team Leader	IASM dan IATA <i>Airport Slots and Coordination Course</i> / IASM and IATA <i>Airport Slots and Coordination Course</i>	Memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan koordinasi dalam proses maksimalisasi efisiensi penggunaan infrastruktur bandara (<i>airport capacity</i>) / To provide knowledge and skills in conducting coordination to maximize the efficiency of infrastructure usage (<i>airport capacity</i>)	8
75	Team Leader	Membangun <i>Corporate Culture</i> dan Etika Bisnis / Building <i>Corporate Culture</i> and Business Ethics	membentuk dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia agar mampu menjadi SDM yang handal dan cakap dan berkualitas, beretika dan memiliki inovasi dan inisiatif kerja yang tinggi serta memiliki etos kerja dengan semangat melayani, semangat juang berlandaskan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan / To build and prepare the participants to be able to become reliable, competent, and qualified human resource, developing ethics, innovation and initiative as well as work ethics with the spirit of service and tenacity which correspond to the Company's Vision, Mission, and Core Values	30
76	Team Leader	Pelatihan Pengadaan Barang dan atau Jasa <i>Batch I</i> (Jakarta) dan <i>Batch II</i> (Makassar) / Training on Procurement of Goods and/or Services <i>Batch I</i> (Jakarta) and <i>Batch II</i> (Makassar)	Diharapkan <i>team leader</i> yang mengikuti pelatihan dapat memahami permasalahan pengadaan barang dalam meningkatkan <i>service level</i> (kinerja/pelayanan), berupa proses penyediaannya hingga pembayaran lebih pendek/menghindari birokrasi bererkepanjangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan / Participating <i>team leader</i> are expected to comprehend the issues in procurement of goods in order to improve service level (performance/service), from procuring process to simpler payment method/ avoid complicated bureaucracy to enhance the company performance	72
77	Team Leader	Pelatihan Pra Purnabakti <i>Batch XV</i> / Pra-Purnabakti Training <i>Batch XV</i>	Menyiapkan Mental, Emosional, Kesehatan dan Pengetahuan menghadapi Purna Tugas / To prepare the Mental, Emotional, and Health Condition and Knowledge on dealing with Retirement	100
78	Team Leader	Pelatihan <i>Quality Management System</i> ISO 9001:2015 / Training <i>Quality Management System</i> ISO 9001:2015	Memberikan pengetahuan terbaru kepada pegawai dari <i>Unit Quality Management</i> terkait Standar Mutu ISO 9001:2015 serta implementasinya di lapangan/unit kerja To provide the most updated knowledge to employees of Quality Management Unit related to ISO 9001:2015 Quality Standard and its implementation in the field/work unit.	26
79	Team Leader	Perpanjangan dan Penerbitan Lisensi AMC, <i>Aviobridge</i> dan <i>Marshaller</i> (Bali, Surabaya,, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta dan Semarang) / Issuance and Renewal of the AMC, <i>Aviobridge</i> , and <i>Marshaller</i> Licenses (Bali, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta and Semarang)	Sebagai alat ukur kecakapan personil Bandar Udara untuk mempertahankan <i>lisensi/rating Apron Movement Controller, Aviobridge</i> dan <i>Marshaller</i> baik di tingkat Terampil maupun Ahli di Bandar Udara / As a measuring instrument of the Airport personnel's' competence to maintain the <i>Apron Movement Controller, Aviobridge</i> and <i>Marshaller</i> licenses either at Qualified or Expert level	105

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
80	<i>Team Leader</i>	Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan / Certification on Flight Safety Instructor	Pemenuhan ketentuan dari PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional / Fulfillment of the provision of Minister Regulation 137 of 2015 on the National Aviation Security Education and Training Program	20
81	<i>Team Leader</i>	<i>The Power of Emphaty</i>	agar peserta dapat mengetahui potensi dirinya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memiliki empati yang terhadap lingkungan kerjanya sehingga lebih mudah untuk bersinergi dalam bertanggung jawab, membangun komitmen terhadap pekerjaan yang di emban dan mengaplikasikan hal - hal pokok yang dapat dimulai dari yang paling mudah / To explore the participants' self-potentials to improve their services and develop empathy towards their working environment, resulting in more responsibility and commitment to their duties and apply essential tasks beginning from the easiest ones.	163
82	<i>Team Leader</i>	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil Avsec (Balikpapan dan Makassar) / License Renewal Test for Avsec Personnel (Balikpapan and Makassar)	Sebagai alat ukur kecakapan personil PKP- PK untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara pada Tingkat <i>Team Leader</i> / As a measuring instrument of Avsec personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at the Airport at the Level of Team Leader.	38
83	<i>Team Leader</i>	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil PKP-PK / License Renewal Test for PKP-PK Personnel	Sebagai alat ukur kecakapan personil PKP- PK untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara pada tingkat <i>Team Leader</i> / As a measuring instrument of PKP-PK personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at the Airport at the Level of <i>Team Leader</i> .	179
84	<i>Team Leader</i>	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil Senior Avsec (Yogyakarta dan Surakarta) / License Renewal Test for Avsec Senior Personnel (Yogyakarta and Surakarta)	Sebagai alat ukur kecakapan personil Avsec untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara / As a measuring instrument of Avsec personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at the Airport	26
85	<i>Team Leader</i>	Ujian Perpanjangan Lisensi/ <i>Rating</i> X-Ray Teknik Fasilitas Keamanan Penerbangan / X-Ray License/ <i>Rating</i> Renewal Test on Aviation Safety Facility	Sebagai alat ukur kecakapan personil Teknik Bandar Udara untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> X - Ray baik di tingkat Terampil maupun Ahli di Bandar Udara Adisutjipto - Yogyakarta / As a measuring instrument of the Airport Technical personnel's' competence to maintain the X - Ray license/ <i>rating</i> either at Qualified or Expert level at Adisutjipto Airport - Yogyakarta.	19
86	<i>Team Leader</i>	Ujian Perpanjangan/Penerbitan <i>Rating</i> ALS, CCR dan <i>Generating</i> Set and ACOS (Genset) / <i>Rating</i> Issuance/Renewal Test of ALS, CCR and <i>Generating</i> Set and ACOS (Genset)	Sebagai alat ukur kecakapan personil Teknik Bandar Udara untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> ALS, TRD, GNS, dan CCR baik di tingkat Terampil maupun Ahli di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar / As a measuring instrument of the Airport Technical personnel's' competence to maintain the ALS, TRD, GNS, and CCR licenses/ <i>rating</i> either at Qualified or Expert level at I Gusti Ngurah Rai Airport - Denpasar.	16

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
87	Team Leader	Ujian Perpanjangan/Penerbitan Rating CCR / CCR Rating Issuance/Renewal Test	Sebagai alat ukur kecakapan personil Teknik Bandar Udara untuk mempertahankan lisensi/rating CCR baik di tingkat Terampil maupun Ahli di Bandar Udara Juanda - Surabaya As a measuring instrument of the Airport Technical personnel's' competence to maintain CCR license/rating either at Qualified or Expert level at Juanda Airport - Surabaya.	15
88	Team Leader	Workshop Aviation Security Profiling Technique Enhancement	Menjelaskan aktivitas/pergerakan orang yang mencurigakan di bandara, Menjelaskan fungsi CCTV sebagai proteksi di bandara dan Memahami deteksi wajah / To recognize people's suspicious activities/movements at the airport, To explain the functions of CCTV as a protection tool at the airport and Understand face detection	15
89	Team Leader	Workshop Dangerous Goods Awareness di beberapa bandar udara (SOC, SRG, BIK dan MDC) / Workshop on Dangerous Goods Awareness at certain airports (SOC, SRG, BIK and MDC)	Mengetahui dan memahami serta lebih peduli terhadap risiko atau bahaya yang akan ditimbulkan Dangerous Goods, Mengetahui cara mengidentifikasi dan menangani pengangkutan Dangerous Goods sesuai peraturan yang berlaku, Mengetahui cara penanganan kebakaran barang - barang berbahaya (Dangerous Goods) baik yang berada di cargo maupun yang diangkut dengan pesawat udara / To comprehend and develop awareness on the risk and danger possessed by Dangerous Goods, To know how to identify and handle the transportation of Dangerous Goods in accordance with applicable regulations, To know how to extinguish fire on the goods (Dangerous Goods) either stored in a cargo or transported in an aircraft.	240
90	Team Leader	Workshop Implementasi of Screening Process for Aviation Security Services	Memahami faktor psikologis selama proses screening, Memahami hubungan/kemampuan interaksi antar personil selama proses screening, Memahami bagaimana melindungi personil pada saat melakukan proses screening / To comprehend the psychological factors during the process of screening, To comprehend inter-personnel relations/interaction during the process of screening, To comprehend how to protect personnel when conducting the process of screening	15
91	Officer	Diklat GSN 6 : Aerodrome Compliance and Auditing / GSN 6 Training and Education: Aerodrome Compliance and Auditing	Memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada Aerodrome Safety and Compliance Staff untuk melakukan audit terhadap prosedur, infrastruktur, dan peralatan keselamatan, termasuk pula organisasi-organisasi lain yang beroperasi di bandara / To provide knowledge and competence to Aerodrome Safety and Compliance Staff to conduct audit on the procedures, infrastructures, and safety equipment, including other organizations operating at the airport.	9

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
92	Officer	Membangun <i>Corporate Culture</i> dan Etika Bisnis / <i>Building Corporate Culture and Business Ethics</i>	Membentuk dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia agar mampu menjadi SDM yang handal dan cakap dan berkualitas, beretika dan memiliki inovasi dan inisiatif kerja yang tinggi serta memiliki etos kerja dengan semangat melayani, semangat juang berlandaskan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan / To build and prepare the participants to be able to become reliable, competent, and qualified human resource, developing ethics, innovation and initiative as well as work ethics with the spirit of service and tenacity which correspond to the Company's Vision, Mission, and Core Values.	30
93	Officer	<i>The Power of Emphaty</i>	Agar peserta dapat mengetahui potensi dirinya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memiliki empati yang terhadap lingkungan kerjanya sehingga lebih mudah untuk bersinergi dalam bertanggung jawab, membangun komitmen terhadap pekerjaan yang di emban dan mengaplikasikan hal - hal pokok yang dapat dimulai dari yang paling mudah / To explore the participants' self-potentials to improve their services and develop empathy towards their working environment, resulting in more responsibility and commitment to their duties and apply essential tasks beginning from the easiest ones.	124
94	Officer	<i>Workshop Knowledge Management</i>	Pengenalan konsep <i>knowledge management</i> kepada pegawai / <i>Introduction of knowledge management concepts to employees</i>	30
95	Officer	Pelatihan Internal Auditor SMK3 (sertifikasi BNSP) / Internal Auditor SMK3 (BNSP certification) Training	Memenuhi kriteria PP No. 50 Tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Mengerti dan memahami prinsip-prinsip, elemen, dan kriteria SMK3 di perusahaan dan Mampu menjadi auditor SMK3 sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan tersertifikasi oleh BNSP / To meet the criteria of Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Job Health and Safety Management System (SMK3), To comprehend the principles, elements, and criteria of SMK3 at a company and To have the qualification as SMK3 auditor as required by the agreed standards and certified by BNSP.	14
96	Officer	Workshop Dangerous Goods Awareness di beberapa bandar udara (SOC, SRG, BIK, MDC) / Workshop on Dangerous Goods Awareness in certain airports (SOC, SRG, BIK, MDC)	Mengetahui dan memahami serta lebih peduli terhadap risiko atau bahaya yang akan ditimbulkan <i>Dangerous Goods</i> , Mengetahui cara mengidentifikasi dan menangani pengangkutan <i>Dangerous Goods</i> sesuai peraturan yang berlaku, Mengetahui cara penanganan kebakaran barang - barang berbahaya (<i>Dangerous Goods</i>) baik yang berada di <i>cargo</i> maupun yang diangkut dengan pesawat udara / To comprehend and develop awareness on the risk and danger possessed by <i>Dangerous Goods</i> , To know how to identify and handle the transportation of <i>Dangerous Goods</i> in accordance with applicable regulations, To know how to extinguish fire on the goods (<i>Dangerous Goods</i>) either stored in a cargo or transported in an aircraft.	240

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
97	<i>Officer</i>	Pelatihan Penagihan Piutang Yang Efektif / Training on Effective Process of Receivables Collection	Peserta pelatihan akan mampu melaksanakan proses penagihan piutang yang efektif berdasarkan SOP dan kebijakan pengelolaan piutang usaha serta melakukan analisa terhadap sistem pengelolaan piutang usaha di PT Angkasa Pura I (Persero) / The participants is expected to be able to carry out effective process of receivables collection based on SOP and management policies of accounts receivables and to analyze the management system of accounts receivables in PT Angkasa Pura I (Persero)	27
98	<i>Officer</i>	Pelatihan Pengadaan Barang dan atau Jasa / Training on Procurement of Goods and/or Services	Meningkatkan kinerja Perusahaan dan menciptakan prosedur pengadaan barang dan jasa yang bersih bagi pegawai dan sebagai salah satu korporasi untuk mendukung program dalam menciptakan budaya anti korupsi dilingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) / To improve the Company's performance and develop clean procurement procedures for employees and as part of corporate support to create anti-corruption culture within PT Angkasa Pura I (Persero)	102
99	<i>Officer</i>	Pelatihan <i>End User</i> SAP Modul MM / Training on <i>End User</i> SAP Module MM	Memberikan keterampilan dan teknik menguasai SAP Modul <i>Material Management</i> untuk pegawai di Unit <i>General Affair</i> dan <i>Information Technology</i> yang dibutuhkan di tempat kerja dalam rangka inventarisasi perlengkapan dan peralatan kantor / To provide skills and techniques to master SAP Module <i>Material Management</i> for employees of <i>General Affair</i> and <i>Information Technology</i> Units as required in the company in order to compile inventory of office equipment and tools.	9
100	<i>Officer</i>	Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan / Training on Journalism and Public Relations	Mampu berkomunikasi dan memahami dengan baik bagi pegawai yang memberikan peranan kepada media untuk menjelaskan cara kerja media dalam dunia kehumasan secara baik dan benar dalam rangka meningkatkan citra perusahaan / Employees working in public relations unit will be able to communicate and comprehend to explain how the media works in the realms of public relations correctly and appropriately in order to enhance the corporate image	15
101	<i>Officer</i>	Pelatihan Bahasa Inggris Kelas <i>Officer</i> Tingkat <i>Intermediate</i> / English Language Training for <i>Officer</i> Class on <i>Intermediate</i> Level	Meningkatkan keterampilan Bahasa Inggris untuk pegawai dan sebagai alat ukur kemampuan eksisting Bahasa Inggris pegawai pada level menengah (<i>Intermediate</i>). / To improve English Language skills and measure existing English language abilities of employees of <i>Intermediate</i> level.	10
102	<i>Officer</i>	Pelatihan Bahasa Inggris Kelas <i>Officer</i> Tingkat <i>Elementary</i> II / English Language Training for <i>Officer</i> Class on <i>Elementary</i> II Level	Meningkatkan keterampilan Bahasa Inggris untuk pegawai dan sebagai alat ukur kemampuan eksisting Bahasa Inggris pegawai pada level menengah (<i>Elementary</i>) / To improve English Language skills and measure existing English language abilities of employees of (<i>Elementary</i>) level.	12

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
103	Officer	IASM and IATA Airport Slots and Coordination Course / IASM and IATA Airport Slots and Coordination Course	Memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan koordinasi dalam proses maksimalisasi efisiensi penggunaan infrastruktur bandara (<i>airport capacity</i>) / To provide knowledge and skills in conducting coordination to maximize the efficiency of infrastructure usage (<i>airport capacity</i>)	8
104	Officer	Diklat Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) / Training and Education on Flight Operation Safety Area (KKOP)	Memberikan pengetahuan dasar terkait Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan bagi pegawai dari Unit <i>Airport Safety</i> / To provide basic knowledge related to Flight Operation Safety Area for employees of Unit <i>Airport Safety</i> .	30
105	Officer	Key User SAP Modul FICO / Key User SAP Module FICO	Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para <i>user</i> , sebagai fasilitator antara <i>key user</i> di kantor pusat dengan <i>end user</i> terkait operasional atau dinamika bisnis baru di cabang, serta untuk melaksanakan kaderisasi <i>key user</i> berikutnya / To improve the knowledge and abilities of the users, as facilitators between key users at the head office and operational-related key users or new business dynamics at the branch office, as well as to implement the regeneration of key users.	14
106	Officer	Pelatihan <i>Negotiation Skill</i> / Training on <i>Negotiation Skill</i>	Mampu memahami tentang negosiasi; Mampu melakukan komunikasi dalam negosiasi dan memulai negosiasi / To understand negotiation; To be able to communicate in negotiation and initiate negotiation	30
107	Officer	<i>The Power of Emphaty</i> (Ambon)	Agar peserta dapat mengetahui potensi dirinya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memiliki empati yang terhadap lingkungan kerjanya sehingga lebih mudah untuk bersinergi dalam bertanggung jawab, membangun komitmen terhadap pekerjaan yang di emban dan mengaplikasikan hal – hal pokok yang dapat dimulai dari yang paling mudah / To explore the participants' self-potentials to improve their services and develop empathy towards their working environment, resulting in more responsibility and commitment to their duties and apply essential tasks beginning from the easiest ones.	40
108	Officer	<i>Workshop Implementasi of Screening Process for Aviation Security Services</i>	Memahami faktor psikologis selama proses screening, Memahami hubungan/kemampuan interaksi antar personil selama proses <i>screening</i> dan Memahami bagaimana melindungi personil pada saat melakukan proses <i>screening</i> / To comprehend psychological factors during the process of screening, To comprehend inter-personnel relations/interactions during the process of <i>screening</i> and To understand how to protect personnel when conducting the process of <i>screening</i>	15
109	Officer	<i>Workshop Aviation Security Profiling Technique Enhancement</i> / Workshop on Aviation Security Profiling Technique Enhancement	Menjelaskan aktivitas/pergerakan orang yang mencurigakan di bandara, fungsi CCTV, dan deteksi wajah / To recognize people's suspicious activities/movements at the airport, the functions of CCTV and face detection	15

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
110	Officer	Workshop Housekeeping	Mendorong program <i>cleaning services</i> diperlukan manajemen sumber daya manusia secara baik dan inovatif di unit <i>General affair</i> / To encourage cleaning services programs, improved and innovative human resource management is required under <i>General affair</i> unit.	37
111	Officer	Quality Management System ISO 9001:2015	Memberikan pengetahuan terbaru kepada pegawai dari <i>Unit Quality Management</i> terkait Standar Mutu ISO 9001:2015 serta implementasinya di lapangan/unit kerja / To provide the most updated knowledge to employees of Quality Management Unit related to ISO 9001:2015 Quality Standard and its implementation in the field/work unit.	51
112	Officer	Business Process Management	Memperkaya pengetahuan dan keterampilan pegawai, terutama dari <i>Unit Quality Management</i> terkait Proses Bisnis dan kaitannya dengan Bisnis Kebandarudaraan / To improve the participants' knowledge and skills, especially for employees of <i>Quality Management</i> Unit in relation to Business Process and Airport Affairs Business.	25
113	Officer	The Power of Emphaty (Biak)	Agar peserta dapat mengetahui potensi dirinya sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memiliki empati yang terhadap lingkungan kerjanya sehingga lebih mudah untuk bersinergi dalam bertanggung jawab, membangun komitmen terhadap pekerjaan yang diemban dan mengaplikasikan hal – hal pokok yang dapat dimulai dari yang paling mudah / To explore the participants' self-potentials to improve their services and develop empathy towards their working environment, resulting in more responsibility and commitment to their duties and apply essential tasks beginning from the easiest ones.	39
114	Officer	Pelatihan <i>Mastering Cobit Fundamental : 4.1 Best Practice</i> / Training on <i>Mastering Cobit Fundamental : 4.1 Best Practice</i>	Mampu memahami Cobit dan <i>IT Governace</i> , menjelaskan kerangka kerja dan komponen Cobit, menerapkan Cobit dan aplikasi-aplikasinya dan menganalisa permasalahan terkait tata kelola IT di tempat kerja masing-masing / To understand Cobit and <i>IT Governace</i> , explain Cobit framework and components, apply Cobit and its applications and analyze issues related to IT governance in the company	28
115	Officer	Team Work Management Training / Team Work Management Training	membentuk kesamaan pemahaman, keselarasan, komitmen dalam bekerja dan menyatukan langkah untuk mencapai tujuan bersama maka PT Angkasa Pura I (Persero) / To build a common understanding, harmony, and commitment in working and to improve integrity to achieve the objectives of PT Angkasa Pura I (Persero)	13

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
116	Officer	Diklat <i>General Instructor Course</i> / Training and Education on <i>General Instructor Course</i>	Peserta mampu menjalankan multi peran sebagai instruktur, dapat berinteraksi belajar mengajar lebih menari, efektif dan efisien, mampu menyusun garis-garis besar program pengajaran dan satuan pelajaran / Participants are able to perform multi-roles as instructors, able to conduct more attractive teaching and learning interaction, effectively and efficiently arrange the teaching learning program structures and units.	24
117	Officer	Pelatihan Hukum Pertanahan / Agrarian Law Training	Agar peserta dapat memahami tentang Hukum Tanah dan permasalahan terkait tanah, proses pengadaan tanah yang ada di Bandara Bandara yang dikelola PT AP I / Participants will be able to comprehend Agrarian Law and land-related issues, and the process of land acquisition at the Airports managed by PT AP I	25
118	Officer	Pelatihan <i>Community Development Management</i> / Training on <i>Community Development Management</i>	Mampu melaksanakan dan mengelola <i>Community Development</i> yang efektif bagi peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat sekitar dan peningkatan <i>corporate image</i> termasuk mengenal mitra dan mampu menyalurkan dana pinjaman tepat sasaran / To be able to conduct and manage effective <i>Community Development</i> for improvement of the socio-economic quality of local community and enhancement of <i>corporate image</i> which include the ability to closely interact with partners and distribute loans to the right targets	26
119	Officer	Pelatihan <i>Airport Safety Management System Level Basic</i> / Training on <i>Airport Safety Management System Level Basic</i>	Memberikan pengetahuan Teori dan Praktek Dasar terkait Manajemen Keselamatan Bandar Udara sesuai standar International <i>Civil Aviation Organization</i> (ICAO), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Otoritas Transportasi Bandar Udara lainnya yang diakui / To provide Theoretical and Basic Practices knowledge related to Airport Safety Management as per International <i>Civil Aviation Organization</i> (ICAO) standards, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and other recognized Airport Transportation Authorities.	25
120	Officer	Pelatihan Fixed Asset Accounting / Training on Fixed Asset Accounting	Peningkatan pengetahuan terkait dengan pengelolaan Aset tetap (<i>Fixed Asset</i>) pada perusahaan / To improve knowledge related to the Company's Asset (<i>Fixed Asset</i>) management	29
121	Officer	Pelatihan <i>Asset Management</i> / Training on <i>Asset Management</i>	Manajemen Aset bertujuan untuk pengelolaan aset yang efektif dan efisien dalam meminimalisasi biaya selama umur aset bersangkutan / Asset Management is designed to manage assets more effectively and efficiently in minimizing cost of the asset life cycle	33
122	Officer	Pelatihan Pra Purnabakti Batch XV / Pra-Purnabakti Training Batch XV	Menyiapkan Mental, Emosional, Kesehatan dan Pengetahuan menghadapi Purna Tugas / To prepare the Mental, Emotional, and Health Condition and Knowledge on dealing with Retirement	100

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
123	Officer	Diklat Junior PKP-PK Angkatan IV / Training and Education of PKP-PK Junior Personnel Batch IV	Sebagai persyaratan pemenuhan kompetensi Personil PKP - PK yang melalui peningkatan <i>rating</i> lisensi dari level <i>Basic</i> ke level <i>Junior</i> / As a requirement of competence fulfillment of PKP - PK Personnel who undergoes license rating upgrade from <i>Basic level</i> to <i>Junior level</i> .	20
124	Officer	Diklat <i>Human Factor for Airport Personnel</i> Angkatan I / Training and Education on <i>Human Factor for Airport Personnel</i> Batch I	Bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Teori Dan Prinsip Dasar Human Factor Serta Dapat Mencegah/Mengurangi Kekeliruan Dibidang Pengendalian, Pengoperasian Dan Perawatan Bagi Personel Bandar Udara / To provide Basic Theories and Principles on Human Factor and Prevent/Reduce Errors on Control, Operation and Maintenance conducted by Airport Personnel.	30
125	Officer	Diklat Salvage Angkatan III / Training and Education on Salvage Batch III	Sebagai persyaratan pemenuhan kompetensi Personil PKP - PK untuk mendapatkan lisensi/ <i>rating</i> Salvage / As a requirement of competence fulfillment of PKP - PK Personnel to obtain Salvage license/ <i>rating</i> .	20
126	Officer	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil PKP-PK (Manado, Makassar, Denpasar, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Yogyakarta) / License Renewal Test for PKP-PK Personnel (Manado, Makassar, Denpasar, Semarang, Surakarta, Surabaya and Yogyakarta)	Sebagai alat ukur kecakapan personil PKP-PK untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara / As a measuring instrument of PKP - PK personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at the Airport	156
127	Officer	Diklat Senior PKP-PK Angkatan III / Training and Education of PKP-PK Senior Personnel Batch III	Sebagai persyaratan pemenuhan kompetensi Personil PKP - PK yang melalui peningkatan <i>rating</i> lisensi dari level <i>Junior</i> ke level <i>Senior</i> / As a requirement of competence fulfillment of PKP - PK Personnel who undergoes license rating upgrade from <i>Junior level</i> to <i>Senior level</i> .	20
128	Officer	Ujian Perpanjangan/Penerbitan <i>Rating</i> ALS, CCR dan Generating Set dan ACOS (Genset) (Makassar) / Rating Issuance/Renewal Test of ALS, CCR and Generating Set and ACOS (Genset) (Makassar)	Sebagai alat ukur kecakapan personil Teknik Bandar Udara untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> ALS, TRD, GNS, dan CCR baik di tingkat Terampil maupun Ahli di Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar / As a measuring instrument of the Airport personnel's' competence to maintain ALS, TRD, GNS, and CCR licenses/ <i>rating</i> either at Qualified or Expert level at Sultan Hasanuddin Airport - Makassar.	16
130	Officer	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil PKP-PK / License Renewal Test for PKP-PK Personnel	Sebagai alat ukur kecakapan personil PKP- PK untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara pada Tingkat <i>Officer</i> / As a measuring instrument of PKP-PK personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at the Airport at the Level of <i>Officer</i> .	96
131	Officer	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil Avsec / License Renewal Test for Avsec Personnel	Sebagai alat ukur kecakapan personil Junior Avsec untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara / As a measuring instrument of Avsec Junior personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at the Airport	38
132	Officer	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil Junior Avsec / License Renewal Test for Avsec Junior Personnel	Sebagai alat ukur kecakapan personil Junior Avsec untuk mempertahankan lisensi/ <i>rating</i> di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar / As a measuring instrument of Avsec Junior personnel's competence to hold the license/ <i>rating</i> at I Gusti Ngurah Rai Airport - Denpasar	263

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
133	Officer	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil Senior Avsec / License Renewal Test for Avsec Senior Personnel	Sebagai alat ukur kecakapan personil Senior Avsec untuk mempertahankan lisensi/ rating di Bandar Udara / As a measuring instrument of Avsec Senior personnel's competence to hold the license/rating at the Airport	26
134	Officer	Ujian Perpanjangan Lisensi Personil Basic Avsec / License Renewal Test for Avsec Basic Personnel	Sebagai alat ukur kecakapan personil Basic Avsec untuk mempertahankan lisensi/ rating di Bandar Udara / As a measuring instrument of Avsec Basic personnel's competence to hold the license/rating at the Airport	26
135	Officer	Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan / Certification on Flight Safety Instructor	Pemenuhan ketentuan dari PM 137 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional / Fulfillment of the provision of Minister Regulation 137 of 2015 on the National Aviation Security Education and Training Program	20
136	Officer	Aviation Security Investigation Course	Pemenuhan kompetensi yang akan bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi apabila terjadi pelanggaran tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi dilingkungan bandara / To develop competent employees assigned to carry out inquiry and investigation to search and collect data and information on the event of committed crime or abuse of authority, infringement of employees' disciplines within the airport environment.	22
137	Officer	Diklat Senior Aviation Security / Training and Education on Senior Aviation Security	Peningkatan Kompetensi Personel Aviation Security Tingkat Senior/Supervisor di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 / Improvement on Competence of Aviation Security Senior/Supervisor Level Personnel at PT Angkasa Pura I (Persero) 2016	40
138	Officer	Diklat Initial Senior Aviation Security / Training and Education on Initial Senior Aviation Security	Peningkatan Kompetensi Personil Aviation Security di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 / Improvement on Competence of Aviation Security Personnel at PT. PT Angkasa Pura I (Persero) 2016	60
139	Officer	Diklat Maintenance Kendaraan PKP-PK / Training and Education on PKP-PK Vehicles Maintenance	Sebagai persyaratan pemenuhan kompetensi Personil PKP - PK yang memiliki fungsi dan tanggung jawab pemeliharaan kendaraan PKP - PK di Bandar Udara di tingkat pegawai / As a requirement to competence fulfillment of PKP - PK Personnel with functions and responsibilities of PKP - PK vehicles maintenance at the Airport.	18
140	Officer	Diklat Penjenjangan Tingkat Lanjut / Training and Education on Advanced Level Grading	Memiliki Pengetahuan Terkait Proses Bisnis Seluruh Unit di PT Angkasa Pura I (Persero) secara utuh/ To Develop Comprehensive Knowledge Related to Business Process in All Units at PT. Angkasa Pura I (Persero)	29

No.	Level Jabatan Job Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of Participants
141	<i>Officer</i>	Ujian Perpanjangan/Penerbitan Ulang Lisensi/Rating FSD-FSU Teknik Fasilitas Bandara / License/Rating Issuance/Renewal Test for Technical Personnel of FSD-FSU Airport Facilities	Sebagai alat ukur kecakapan personil Teknik Bandar Udara untuk mempertahankan lisensi/rating Fasilitas Sisi Darat (FSD) maupun Fasilitas Sisi Udara (FSU) baik di tingkat Terampil maupun Ahli di Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar / As a measuring instrument of the Airport Technical personnel's' competence to maintain the Land Side Facilities (FSD) and Air Side Facilities (FSU) licenses/rating either at Qualified or Expert level at Sultan Hasanuddin Airport - Makassar.	25
142	<i>Officer</i>	TCC Fasilitas Sisi Udara dan Fasilitas Sisi Darat / TCC of Land Side Facilities (FSD) and Air Side Facilities (FSU)	Sebagai persyaratan pemenuhan kompetensi Personil Teknik Bandar Udara yang memiliki fungsi dan tanggung jawab <i>maintenance</i> Fasilitas Sisi Darat/Udara di Bandar Udara di tingkat <i>Officer</i> / As a requirement to competence fulfillment of Airport Technical Personnel with Officer-level functions and responsibilities of maintenance Air/Land Side Facilities of at the Airport.	20
143	<i>Officer</i>	Perpanjangan dan Penerbitan Lisensi AMC, Aviobridge dan Marshaller (untuk di bandara Bali, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta dan Semarang) / Issuance and Renewal of the AMC, Aviobridge, and Marshaller Licenses (for Bali, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta and Semarang airports)	Sebagai alat ukur kecakapan personil Bandar Udara untuk mempertahankan lisensi/rating <i>Apron Movement Controller</i> , <i>Aviobridge</i> dan <i>Marshaller</i> baik di tingkat Terampil maupun Ahli di Bandar Udara / As a measuring instrument of the Airport personnel's' competence to maintain the Apron Movement Controller, Aviobridge, and Marshaller licenses/rating either Qualified or Expert level.	105
144	<i>Officer</i>	Kegiatan <i>On The Job Training</i> Calon Pegawai / <i>On The Job Training</i> of Prospective Employees	Mengenalkan lingkungan kerja kepada calon pegawai / To introduce the working environment to the prospective employees	63
145	<i>Officer</i>	Diklat Orientasi Tipe A, B dan C Tahun 2016 / Orientation Training and Education Type A, B, and C of 2016	Peserta mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dengan tepat di area kerja masing-masing / Participants will be able to correctly perform his functions and duties within PT. Angkasa Pura I (Persero) at their assigned units.	278
146	<i>Officer</i>	Pelatihan Obligasi dan Sukuk Ijarah / Training on Bonds and Ijarah Sukuk	Mampu menjelaskan prinsip dasar pendanaan perusahaan, Mampu melakukan analisis dan evaluasi rekomendasi alternatif pendanaan yang efisien bagi perusahaan; / To be able to explain the basic principles of the company funding, conduct analysis and evaluation of funding alternative recommendation efficient for the company.	34

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk melaksanakan evaluasi efektivitas atas sistem pembelajaran dan pengembangan yang telah dilakukan, Perseroan senantiasa melakukan evaluasi paska pelatihan yang dilakukan melalui *Form* Evaluasi Paska *Training*. Evaluasi dinilai dalam bentuk *Return of Training Investment* yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan *training*. Adapun hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk jenjang karir ataupun tingkat kebutuhan *training* lanjutan karyawan. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk peserta *training*, namun demikian juga pada Instruktur *Training* dan Penyelenggaranya.

Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuisisioner yang diberikan kepada peserta digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendekatan yang digunakan adalah Skala likert. Adapun unsur yang dinilai antara lain instruktur, modul, metode *training*, fasilitas, dan penyelenggara

Hasil rekapitulasi kuisisioner selama kegiatan pendidikan dan pelatihan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh *Training and Development Group* menunjukkan indeks kepuasan peserta *training* masuk ke dalam kategori Sangat Memuaskan untuk unsur infrastruktur (85,22%), modul (83,32%), metode *training* (85,00%) dan penyelenggara (80,36%), sedangkan untuk unsur fasilitas masuk kategori puas dengan indeks kepuasan sebesar 78,93% .

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Biaya pengembangan kompetensi bagi karyawan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2016 sebesar Rp33,19 miliar.

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF COMPETENCE IMPROVEMENT

In order to evaluate the effectivity of learning and improvement system that has been performed, Bank regularly conducts post-training evaluation using Post-Training Evaluation Form. Evaluation is conducted in the form of Return of Training Investment which reflects effectivity level of the training. Result of the evaluation will be used as a basis for career path or level of advanced training necessity for the employees. Participants of the evaluation comprise of not only training participants, but also its Instructures and Administrators.

Evaluation is conducted by instructing the participants to complete the questionnaires, which are the basis for evaluating the training. Likert scale approach is applied in this evaluation. Elements to be assessed in the evaluation are instructure, module, training method, facility, and administrator.

The recapitulated result of the questionnaire during the 2016 training conducted by Training and Development Group shows indexes of training participants' satisfaction which are classified into Highly Satisfying for elements of infrastructure (85.22%), module (83.32%), training method (85.00%) and administrator (80.36%), and Satisfying for facility element (78.93%).

COST OF COMPETENCE IMPROVEMENT

The cost of competence improvement for employees that has been realized throughout 2016 was Rp33.19 billion.

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH, tanggal 3 Januari 1993. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor C2-2470.HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 April 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914/1993.

Pada tahun 1998, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan dengan akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 30 tanggal 18 September 1998. Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-25829.HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 19 November 1998 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 1999 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3740/1999.

Berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn No. 02 tanggal 16 Januari 2013 yang telah disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, Perusahaan menyetujui peningkatan modal disetor yang diambil dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011 sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- sehingga seluruhnya seharga Rp300.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) mengalami perubahan yang terakhir pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di Luar Rapat PT Angkasa Pura I (Persero) No. 5 pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas oleh Notaris Utiek R. Abdurachman, SH, MLI, MKn, mengenai peningkatan modal dasar dan penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan serta pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

PT Angkasa Pura I (Persero) is a State-Owned Enterprise, and 100% of its shares are owned by the Republic of Indonesia. Perseroan (Company) was established based on Government Regulation No. 5 of 1992 on the Alteration of the Form of Perusahaan Umum (PERUM/Public Company) Angkasa Pura I into Perusahaan (Corporate) with Notarial Deed by Muhani Salim, SH, dated January 3, 1993. The deed has been approved by Ministry of Justice by the Decision No. C2-2470.HT.01.01 of 1993 dated April 24, 1993, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 52 dated June 29, 1993 with the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 2914/1993.

In 1998, Articles of Association of the Company was amended based on the decision in General Meeting of Shareholders in January 14, 1998, and has been confirmed through a Notarial Deed by Imas Fatimah, SH., No. 30 dated September 18, 1998. Amendment to the Articles of Association has been authorized by Minister of Justice of the Republic of Indonesia under the decision No. C2-25829.HT.01.04 of 1998 dated November 19, 1998 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 22, 1999 with the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3740/1999.

According to Notarial Deed by Nanda Fauz Iwan, SH, MKn No. 02 dated January 16, 2013 that has been saved in the database of Administration System of Legal Entity from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-02672 dated January 31, 2013, Perseroan approved the increase of paid-in capital which is withdrawn from the capitalization of some of the Company's reserve up to the finance year 2011, as much as 300.000 shares which each costs Rp1,000,000, making up a total of Rp300,000,000, all of which are owned by the State of Republic of Indonesia.

Articles of Association of PT Angkasa Pura I (Persero), was amended in August 15, 2012, based on the Deed of Resolutions of Meeting and Resolutions of Shareholders that are decided outside of the Meeting of PT Angkasa Pura I (Persero) No. 5 on the date as stated above by the Notary Utiek R. Abdurachman, SH, MLI, MKn, on the increase of authorized capital and addition of the capital of the Republic of Indonesia to the company's capital, in addition to the discharge and appointment of members of Board of Commissioners.

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-46777.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012. Selanjutnya atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta penetapan Komisaris Independen dinyatakan dalam akta terpisah oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn Nomor 5 tanggal 18 Desember 2012. Setelah keluarnya akta perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana disebut di atas maka pasal 4 (empat) dalam Anggaran Dasar Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut. 1. Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar 12.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- atau seluruhnya berjumlah Rp12.000.000.000.000,- . 2. Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 3.188.245 saham atau seluruhnya berjumlah Rp3.188.245.000.000,- ke dalam kas Perusahaan, dengan cara sebagai berikut. i. Sebesar Rp1.800.000.000.000,- telah disetor dengan uang tunai sebagai setoran modal lama sebagaimana dinyatakan dalam akta Nomor 02 tanggal 09 Agustus 2007 oleh Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, notaris di Jakarta. ii. Penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.388.244.029.124,- telah disetorkan ke dalam kas Perusahaan. iii. Sebesar Rp970.876,- telah disetor ke dalam kas Perusahaan yang berasal dari kapitalisasi cadangan.

Berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn No. 02 tanggal 16 Januari 2013 yang telah disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, Perusahaan menyetujui peningkatan modal disetor yang diambil dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011 sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- sehingga seluruhnya seharga Rp300.000.000,- yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.488.245.000,-.

Berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn no. 11 tanggal 22 September 2015 yang telah disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-AH.01.03-0972301 tanggal 22 September 2015, Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor yang semula modal awal 3.488.245 saham ditambahkan sebesar 2.926.167

The deed has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decision No. AHU-46777.AH.01.02 of 2012 dated September 3, 2012. Further, appointment and discharge of members of Board of Commissioners, as well as appointment of Independent Commissioners, are specified in a different deed by the Notary Nanda Fauz Iwan, SH, MKn No. 5 dated December 18, 2012. After the publication of the deed on the change of authorized capital and paid-in capital as stated above, Article 4 (four) in the Articles of Association of the Company is amended as follows. 1. The Perseroan's Authorized Capital is specified of 12,000,000, each of which costs Rp1,000,000 (full amount of Rupiah) or making a total of Rp12,000,000,000,000 (full amount of Rupiah). 2. A portion of the capital has been issued/withdrawn and fully paid-in by the State of Republic of Indonesia as much as 3,188,245 shares or a total of Rp 6,414,412,000,000,- (full amount of Rupiah) into the treasury of Perseroan, under the following method. i. A total of Rp 1,800,000,000,000 has been paid-in in cash as a deposit of authorized capital as specified in the Deed No. 02 dated August 9, 2007 by Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. ii. Addition to state capital of Rp1,388,244,029,124 has been paid-in to the treasury of the Company. iii. An amount of Rp970,876 has been paid-in to the treasury of the Company, which originates from reserve capital.

According to the Deed by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, MKn No. 02 dated January 16, 2013 that has been saved in the database of Administration System of Legal Entity from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-02672 dated January 31, 2013, Perseroan approved the increase of paid-in capital which is withdrawn from the capitalization of some of the Company's reserve up to the finance year 2011, as much as 300.000 shares which each costs Rp1,000,000, making up a total of Rp300,000,000, all of which are owned by the State of Republic of Indonesia. Hence, the capital issued and paid-in amounts to Rp3,488,245,000.

According to the Deed by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No. 11 dated September 22, 2015 that has been saved in the database of Administration System of Legal Entity from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0972301 dated September 22, 2015, Perseroan agreed to the increase of paid-incapital, from the authorized capital of 3,488,245

saham diambil dari Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 dan kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2014 dengan nilai nominal Rp1.000.000 (rupiah penuh) sehingga seluruhnya seharga Rp6.414.412.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Setelah keluarnya akta perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana disebut di atas maka pasal 4 (empat) dalam Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar 12.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh) atau seluruhnya berjumlah Rp12.000.000.000.000 (Rupiah penuh).
- (2) Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 6.414.412 saham atau seluruhnya berjumlah Rp6.414.412.000.000, (Rupiah penuh) ke dalam kas Perusahaan, dengan cara sebagai berikut:
 - a) Sebesar Rp3.488.245.000.000 (Rupiah penuh) telah disetor dengan uang tunai sebagai setoran modal lama sebagaimana dinyatakan dalam akta nomor 02 tanggal 16 Januari 2013 oleh Nanda Fauzlwan, SH., MKn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU/AH.01.10.02672 tanggal 31 Januari 2013.
 - b) Sebesar Rp2.926.166.059.117,86 (Rupiah penuh) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari APBN TA 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/199, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014.
 - c) Sebesar Rp940.882,14 (Rupiah penuh) yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiharto Adi & Rekan sebagaimana suratnya Nomor : 11/LAIAP1/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2015, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada PT Angkasa Pura I (Persero).

shares and then added by 2,926,167 shares, that is taken from the Contribution of Capital of the State of the Republic of Indonesia, based on the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 8 of 2014 and capitalization of some of Perseroan reserve until the finance year 2014 which each costs Rp1,000,000 (full amount of Rupiah), making a total of Rp6,414,412,000, all of which are owned by the State of the Republic of Indonesia. After the deed on the change of authorized capital and paid-in capital is issued as stated above, Article 4 (four) in the Articles of Association of the Perseroan is amended into the following provision.

- (1) Authorized Capital of the Perseroan is regulated of as many as 12,000,000, each of which costs Rp1,000,000 (full amount of Rupiah), or a total of Rp12,000,000,000,000 (full amount of Rupiah).
- (2) From the capital, a portion has been issued/withdrawn and fully paid-in by the State of the Republic of Indonesia as many as 6,414,412 shares, or making a total of Rp6,414,412,000,000 (full amount of Rupiah) into the treasury of Perseroan, in the following method.
 - a) As many as Rp3,488,245,000,000 (full amount of Rupiah) has been paid-in in cash as authorized capital deposit as specified in the Deed No. 02 dated January 16, 2013 by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., a notary in Jakarta, which has been authorized by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the decision No.: AHU/AH.01.10.02672 dated January 31, 2013.
 - b) As many as Rp 2,926,166,059,117,86 (full amount of Rupiah) which originates from the transfer of State-Owned Goods in Ministry of Transportation, of which the procurement is sourced from National Budget in Budget Years 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, and 2011 as regulated in the Regulation of Government of the Republic of Indonesia No. 8 of 2014.
 - c) As many as Rp940,882.14 (full amount of Rupiah) which originates from capitalization of some of the perseroan's reserve as recorded in the Financial Statement of Finance Year 2014 which has been audited by Kantor Akuntan Publik (KAP/ Public Accountant Office) Hadori Sugiharto Adi & Partners in its Statement No.: SK-208/MBU/2015 dated February 20, 2015.

SHARE OWNERSHIP BY BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Until December 31, 2015, there is no share ownership by Board of Commissioners and Directors in PT. Angkasa Pura I (Persero).

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

List of Subsidiary and/or Associate Entity

Tabel Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi /
Table of List of Subsidiary and/or Associate Entity

Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Domisili Location	Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tahun Pendirian Year of Establishment	Status Operasi Operational Status	Total Aset Total Asset (juta / million)
ENTITAS ANAK						
PT Angkasa Pura Logistik	<i>Freight Forwarding</i>	Jakarta	98,00%	2012	Beroperasi	Rp132,454
PT Angkasa Pura Hotel	Hotel	Jakarta	99,97%	2012	Beroperasi	Rp577,871
PT Angkasa Pura Properti	Properti	Jakarta	99,86%	2012	Beroperasi	Rp197,072
PT Angkasa Pura Suport	Jasa	Jakarta	99,61%	2012	Beroperasi	Rp586,597
PT Angkasa Pura Retail	<i>Trading</i>	Jakarta	97,50%	2014	Beroperasi	Rp57,138
ENTITAS ASOSIASI						
PT Gapura Angkasa	<i>Ground Handling</i>	Jakarta	10,00%	1998	Beroperasi	Rp1,763,646
PT Jasa Marga Bali Tol	Jalan Tol	Bali	8,00%	2011	Beroperasi	Rp1,938,330
YAYASAN						
Dana Pensiun PT Angkasa Pura I (Persero) (DAPENRA)	Dana Pensiun	Jakarta	100,00%	1998	Beroperasi	Rp1,030,171
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) (YAKKAP I)	Yayasan Kesejahteraan Karyawan	Jakarta	100,00%	2003	Beroperasi	Rp674,287

ENTITAS ANAK

Perseroan mendirikan 5 (lima) Entitas Anak yang membantu untuk meningkatkan pendapatan bisnis nonaeronautika serta peningkatan *Customer Satisfaction Index* (CSI).

SUBSIDIARY ENTITY

Perseroan established 5 (five) Subsidiaries to help increasing the income from nonaeronautics business and the Customer Satisfaction Index (CSI).



PT ANGKASA PURA LOGISTIK

Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Logistik adalah jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dengan modal dasar sebesar Rp80.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 80.000 lembar saham dengan nilai nominal persahamnya sebesar Rp1 juta dan pada awalnya modal di tempatkan dan disetor sebesar Rp21.000.000.000 (Rupiah penuh) kemudian sesuai RUPS tanggal 5 Oktober

PT ANGKASA PURA LOGISTIK

The business line of PT Angkasa Pura Logistik is service of transportation management (*freight forwarding*) with authorized capital as many as Rp80,000,000,000 (full amount of Rupiah) which is divided into 80,000 and costs Rp1 million each and was initially issued and paid-in of Rp21,000,000,000 (full amount of Rupiah), then based on the General Meeting of Shareholders on October 5, 2016, paid-in capital is added

2016 dilakukan penambahan modal disetor menjadi Rp25 miliar (rupiah penuh). Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini menjadi sebanyak 24.000 lembar saham, senilai Rp24.000.000.000 (Rupiah penuh) atau 98%.

Pendirian Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor 194/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan didasarkan pada akte Perdirian perusahaan nomor 01 oleh Notaris Nanda Fauz wan SH, M.Kn tanggal 6 Januari 2012. Akta tersebut telah disahkan melalui keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-03158.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10269 ("Akta Pendirian PT APL").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 21 Mei 2014, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014 ("Akta No. 18/2014").

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Logistik adalah sebagai berikut.

- Komisaris Utama : Novrihandri
- Komisaris : Perlindungan Situmorang
- Komisaris : Marsda (Purn) Bambang Agus Margono
- Komisaris : M. Basuki Mardianto
- Direktur Utama : Herry A.Y. Sikado
- Direktur : Ahmad Munir
- Keuangan dan Administrasi : Satrio Witjaksono
- Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha

into Rp 25 billion. Share ownership of PT Angkasa Pura I (Persero) in this company rises into 24,000 shares, which are equal to Rp24,000,000,000 (full amount of Rupiah) or 98%.

The establishment of the Company has been authorized by Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No. 194/DK.API/2011 dated December 15, 2011 and is based on the Deed of Company Establishment No. 01 by the Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., dated January 6, 2012. The deed has been authorized by the decision of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-03158.AH.01.01. of 2012 dated January 18, 2012, and has been publicised in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 32 dated April 19, 2013, and the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 10269 ("Deed of Establishment of PT APL").

Amendment to the Articles of Association was last made based on the Deed of Resolutions of Shareholders No. 18 dated May 21, 2014, made in the presence of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta, which has been approved by Ministry of Law and Human Rights based on the Decision No. AHU-03009.40.20.2014 dated May 21, 2014, and has been registered into List of *Perseroan* No. AHU-03009.40.20.2014 dated May 21, 2014 ("Deed No. 18/2014").

The composition of Board of Commissioners and Directors of PT Angkasa Pura Logistik is as follows.

- Head Commissioner : Novrihandri
- Commissioner : Perlindungan Situmorang
- Commissioner : Marsda (Purn) Bambang Agus Margono
- Commissioner : M. Basuki Mardianto
- President Director : Herry A.Y. Sikado
- Director of Finance and Administration : Ahmad Munir
- Director of Operation and Business Development : Satrio Witjaksono



PT ANGKASA PURA HOTEL

PT Angkasa Pura Hotel bergerak di bidang usaha penyediaan akomodasi pariwisata. PT Angkasa Pura Hotel didirikan berdasarkan akte Nomor 03 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH, MKn tanggal 6 Januari 2012. Entitas anak ini didirikan atas persetujuan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor 192/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011. Modal dasar Rp120 miliar terbagi dalam 120.000 lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1 juta

PT ANGKASA PURA HOTEL

PT Angkasa Pura Hotel operates the business line of providing tourism accommodation. PT Angkasa Pura Hotel was established based on the Deed No. 03 by the Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., dated January 6, 2012. This subsidiary entity was established based on the approval of Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero), No. 192/DK.API/2011 dated December 15, 2011. Authorized capital of Rp120 billion comprises of 120,000 shares which

dan telah disetor penuh Rp35,50miliar Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini sebanyak 35.460 saham, senilai Rp35,46 miliar atau 99,97%. Pendirian perusahaan ini telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03688. AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-726/MBU/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang persetujuan penambahan setoran modal PT Angkasa Pura I (Persero) kepada PT Angkasa Pura Hotel (Entitas Anak), Perusahaan telah meningkatkan setoran modalnya sebesar Rp84,405 miliar, sehingga total setoran modal perusahaan menjadi Rp119,865 miliar. Peningkatan setoran modal tersebut telah diaktakan berdasarkan akta No. 01 tanggal 18 Februari 2013 dari Nanda Fauz Iwan, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-12360.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013. Dengan demikian, modal dasar meningkat menjadi sebesar Rp400 miliar dan setoran modal menjadi sebesar Rp119,9 miliar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Hotel adalah sebagai berikut.

Komisaris Utama	: M. Asrori
Komisaris	: Dadun Kohar
Komisaris	: Faturhoman
Direktur Utama	: Danny Primanda Thaharsyah
Direktur Desain,	: Farid Indra Nugraha
Operasi dan	
Marketing	
Direktur Keuangan	: Kukuh
Personalia dan	
Administrasi	

cost Rp1 million for each of them, and Rp35.5 billion has been fully paid-in. Share ownership of PT Angkasa Pura I (Persero), in this company is 35,460 shares, equal to Rp35.46 billion or 99.97%. Establishment of this company has been authorized by the Decision of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.: AHU-03688. AH.01.01. of 2012 dated January 20, 2012.

Based on the Approval Letter of Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) No. S-726/MBU/2012 dated December 14, 2012 on the approval to the addition of capital deposit of PT Angkasa Pura I (Persero) to PT Angkasa Pura Hotel (Subsidiary Entity), the Company has increased its capital deposit of Rp 84.405 billion, making a total of the company's capital deposit into Rp119.865 billion. The increase of capital deposit has been recorded in the Deed No. 01 dated February 18, 2013 by Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta, which has been authorized by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision No. AHU-12360.AH.01.02. of 2013 dated March 11, 2013. Hence, the authorized capital rose into Rp400 billion and paid-in capital rose into Rp119.9 billion.

The composition of Board of Commissioners and Directors of PT Angkasa Pura Hotel is as follows.

Head Commissioner	: M. Asrori
Commissioner	: Dadun Kohar
Commissioner	: Faturhoman
President Director	: Danny Primanda Thaharsyah
Director of Design,	: Farid Indra Nugraha
Operation,	
and Marketing	
Director of Finance,	: Kukuh
Human Resource,	
and Administration	



Angkasa Pura | PROPERTY

PT ANGKASA PURA PROPERTI

PT Angkasa Pura Properti bergerak di bidang usaha pembangunan, perdagangan dan jasa khususnya *real estate*, pengembang, jasa keagenan, distribusi dan bidang konstruksi serta bidang lainnya. PT Angkasa Pura Properti didirikan berdasarkan akte nomor 02 tanggal 6 Januari 2012 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn. Entitas anak ini didirikan atas persetujuan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor 193/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011. Pendirian perusahaan ini telah disahkan melalui keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-03704.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012. Sesuai akta tersebut diatas modal dasar perusahaan Rp42.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 42.000 lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh) dan telah disetor

PT ANGKASA PURA PROPERTI

PT Angkasa Pura Properti operates the business line of construction, trade, and services, particularly real estate, developer, agency services, distribution, and other lines of business. PT. Angkasa Pura Properti was established based on the Deed No. 02 dated January 6, 2012 by the Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn. This subsidiary entity was established based on the approval of Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No. 193/DK.API/2011 dated December 15, 2011. The establishment of this company has been authorized by the Decision of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-03704. AH.01.01. of 2012 dated January 20, 2012. Based in the deed, authorized capital of the company of Rp42,000,000,000 (full amount of Rupiah) comprises of 42,000 shares which each costs Rp1,000,000 (full amount of Rupiah) and have been

penuh dengan kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini sebanyak 41.940 saham atau 99,86%

Berdasarkan keputusan Pemegang Saham yang akhirnya dibuat oleh Notaris Nita SH, No. 21 tanggal 20 April 2013 telah dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp31,5 miliar. Modal disetor yang semula Rp10,5 miliar menjadi Rp42 Miliar dengan komposisi kepemilikan saham yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp41,940 miliar dan Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (PUSKOKAPURA) sebesar Rp60.000.000 dengan nilai nominal per sahamnya sebesar Rp1.000.000.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Properti adalah sebagai berikut.

Komisaris Utama	: Polana B. Pramesti
Komisaris	: Iskandar
Komisaris	: Yusfandri Gona
Direktur Utama	: Eko Permadi
Direktur Keuangan	: Siti Chadijah Octaviana
Direktur	: Andiko Surya Widjaya
Pengembangan usaha	

fully paid-in with share ownership of PT AP1 in this company of 41,940 shares or 99.86%.

Based on the Resolutions of Shareholders, of which the Deed is composed by Notary Nita S.H., No. 21 dated April 20, 2013, the capital was added by Rp31.5 billion that is paid-in. Earlier, the paid-in capital was Rp10.5 billion and rose into Rp42 billion with the composition of share ownership which comprises of PT Angkasa Pura I (Persero), with its Rp41.940 billion and *Koperasi Karyawan Angkasa Pura I (PUSKOKAPURA/ Cooperative of Angkasa Pura Employees)* with its Rp 60 million, of which the cost of each share is Rp1,000,000.

The composition of Board of Commissioners and Directors of PT Angkasa Pura Properti is as follows.

Head Commissioner	: Polana B. Pramesti
Commissioner	: Iskandar
Commissioner	: Yusfandri Gona
President Director	: Eko Permadi
Director of Finance	: Siti Chadijah O.
Director of Business	: Andiko Surya Widjaya



Angkasa Pura | SUPPORTS

PT ANGKASA PURA SUPPORT

Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Support adalah bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, dan perdagangan dengan modal dasar sebesar Rp125 miliar terbagi dalam 125.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembamya sebesar Rp1 juta Rupiah dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp125 miliar. Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini sebanyak 123.125 saham, senilai Rp123,1 miliar atau 99,61%. Pendirian Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor 17/DK.API/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan didasarkan pada akte Perdirian Perusahaan Nomor 03 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH, MKn tanggal 9 Februari 2012. Akta tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08735.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Support adalah sebagai berikut.

Komisaris Utama	: Wendo Asrul Rose
Komisaris	: Pepen Supendi Yusuf
Komisaris	: Ruspen Saragih
Direktur Utama	: Edyana Paramitasari
Direktur Komersial dan Teknik	: Trikora Harjo
Direktur Keuangan dan Umum	: Sugiarto Panca K

PT ANGKASA PURA SUPPORT

Business lines operated by PT Angkasa Pura Support is service, construction, land transportation, workshop, printing, and trade with authorized capital of Rp125 billion and comprises of 125,000 shares, of which each share costs Rp1 million, and the capital that is issued and paid-in was Rp125 billion. Share ownership of PT Angkasa Pura I (Persero), in this company is 123,125 shares, of Rp123.1 billion or 99.61%. The establishment of the Company has been authorized by Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero), No. 17/DK.API/2012 dated January 31, 2012 and is based on the Deed of Company Establishment No. 03 by the Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., dated February 9, 2012. The deed has been authorized by the Decision of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-08735.AH.01.01 of 2012 dated January 20, 2012.

The composition of Board of Commissioners and Directors of PT Angkasa Pura Support is as follows.

Head Commissioner	: Wendo Asrul Rose
Commissioner	: Pepen Supendi Yusuf
Commissioner	: Ruspen Saragih
President Director	: Edyana Paramitasari
Director of Commercial and Technique	: Trikora Harjo
Director of Finance and General Affairs	: Sugiarto Panca K



PT ANGKASA PURA RETAIL

PT Angkasa Pura Retail didirikan berdasarkan akta notaris No. 11 Notaris Nanda Fauzlwan, SH, MKn di Jakarta Selatan, tertanggal 23 September 2014 dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26401.40.10.2014 Tahun 2014 tertanggal 24 September 2014. Modal dasar perusahaan berdasarkan pendirian adalah sebesar Rp200 juta yang terbagi atas 200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 juta. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor yaitu sebesar 50 Juta yang terbagi atas 50.000 saham masing-masing oleh pendiri yaitu PT PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp48.750.000 dengan sebanyak 48.750 saham atau kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini adalah 97,50%.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Retail adalah sebagai berikut.

Komisaris Utama	: Adi Nugroho
Komisaris	: Danny P. Thaharsyah
Direktur Utama	: Daniel Martin
Direktur Keuangan dan Administrasi	: Widya Wiedagdo

PT Angkasa Pura Retail

PT Angkasa Pura Retail was established based on the Notarial Deed No. 11 by the Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. in South Jakarta, dated September 23, 2014 and has obtained legal entity authorization by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decision No. AHU-26401.40.10.2014 of 2014 dated September 24, 2014. Authorized capital of the company based on the establishment was Rp 200 million, which consists of 200,000 shares, each of which costs Rp1 million. Rp50 million has been issued and paid-in from the authorized capital, which consists of 50,000 shares by each founder, which is PT PT Angkasa Pura I (Persero), of Rp48,750,000 or equals to 48,750 shares, or share ownership by PT Angkasa Pura I (Persero), in this company is 97.50%.

The composition of Board of Commissioners and Directors of PT Angkasa Pura Retail is as follows.

Head Commissioner	: Adi Nugroho
Commissioner	: Danny P. Thaharsyah
President Director	: Daniel Martin
Director of Finance and Administration	: Widya Wiedagdo

ENTITAS ASOSIASI



PT GAPURA ANGKASA

Penyertaan pada PT Gapura Angkasa yang bergerak dalam bidang jasa *Ground Handling* dilakukan sesuai dengan persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor S-546/MK.016/1997 tanggal 5 November 1997 dengan nilai perolehan Rp67.200.000.000 (rupiah penuh). Modal dasar PT Gapura Angkasa adalah Rp 860,16 juta terbagi atas 8.601.600 saham nominal Rp100.000 per saham. Modal dasar tersebut, sebanyak 2.150.400 saham atau senilai Rp215.040.000.000 (Rupiah penuh) merupakan modal ditempatkan dan disetor. Dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor oleh 3 (tiga) Pemegang saham yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) masing-masing sebanyak 672.000 saham (31,25%) dan PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) sebanyak 806.400 saham (37,50%). Pada tahun 2014 perseroan telah menjual sebagian saham miliknya kepada pemegang saham lainnya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 456.960 lembar saham atau 22,25% dengan harga jual sebesar Rp105.000.000 yang dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Pembelian dan Penjualan Saham PT Gapura Angkasa nomor SP.140.KU.20/2014/PD; Nomor DS/PERJ/MOU/DQ-3285/2014 tanggal 30 Juni 2014. Dengan

ASSOCIATE ENTITY PT GAPURA ANGKASA

The association of PT Gapura Angkasa which operates Ground Handling service line is performed based on the approval in the Letter of Minister of Finance No. S-546/MK.016/1997 dated November 5, 1997 with the acquisition value of Rp67,200,000,000 (full amount of Rupiah). Authorized capital of PT Gapura Angkasa is Rp 860.16 million, which includes 8,601,600 shares which costs Rp100,000 per share. The basic capital of 2,150,400 shares or equals to Rp215,040,000,000 (full amount of Rupiah) is capital that is issued and paid-in. The capital that is issued and paid-in by 3 (three) Shareholders, namely PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero), are respectively 672,000 shares (31.25%) and PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) of 806,400 shares (37.50%). In 2014, Perseroan sold some of its shares to other shareholders, namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as many as 456,960 shares or equals to 22.25% at the price of Rp105,000,000 that is stated in Memorandum of Understanding of Purchase and Sales of Share of PT Gapura Angkasa No. SP.140.KU.20/2014/PD; No. DS/PERJ/MOU/DQ-3285/2014 dated June 30, 2014. Hence, the remaining inclusion of the *perseroan* in PT Gapura

demikian sisa penyertaan perseroan di PT Gapura Angkasa adalah sebanyak 215.040 lembar saham atau sebesar 10%.

PT Gapura Angkasa didirikan pada tahun 1998 sebagai penyedia jasa *ground handling* independen yang menawarkan kompetisi yang lebih besar pada jasa *ground handling*. PT Gapura Angkasa menyediakan bagi maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia dengan alternatif pilihan dalam kualitas pelayanan, yang meliputi kargo dan pergudangan, penumpang dan penanganan bagasi, operasi penerbangan dan servis pesawat udara, serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang usaha penerbangan di wilayah kerja Perusahaan dan Angkasa Pura II. PT Gapura Angkasa adalah perusahaan patungan yang didirikan oleh tiga BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero), yang senantiasa menekankan pada kebutuhan untuk peningkatan layanan serba di bidang layanan dan kinerja, personil dan peralatan. Pendirian perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor: S-546/MK.016/1997 tanggal 5 November 1997 tentang Pendirian Perusahaan Patungan *Ground Handling* antara tiga BUMN tersebut.

Bidang usaha utama perusahaan setelah perubahan akta adalah sebagai berikut.

1. Akomodasi dan Representasi;
2. Kontrol Muatan, Komunikasi, dan Kontrol Keberangkatan;
3. Unit Perangkat Kontrol Muatan;
4. Penumpang dan Bagasi;
5. Kargo, Pergudangan, dan Surat-Menyurat;
6. Layanan Perjalanan;
7. Pelayanan Pesawat;
8. Minyak dan Bahan Bakar;
9. Pemeliharaan Pesawat;
10. Operasi Penerbangan dan Administrasi Kru;
11. Transportasi Landasan;
12. Katering dan Pelayanan;
13. Administrasi dan Pengawasan;
14. Keamanan Bandara;
15. Pergudangan dan Logistik;
16. Konsultan Penanganan Landasan;
17. Pendidikan dan Pelatihan serta Penyediaan Tenaga Ahli Penanganan Landasan.

PT Gapura Angkasa telah mengukir peran penting dalam industri bandara setempat. Sebagai perusahaan patungan antara maskapai nasional PT Garuda Indonesia dan dua otoritas bandara utama milik negara, Perseroan dan PT Angkasa Pura II (Persero), kinerja di bidang layanan, personil, dan peralatan senantiasa mengalami perkembangan.

Angkasa was 215,040 shares, or equals to 10%.

PT Gapura Angkasa was established in 1998 as an independent ground handling service provide which offers bigger competition in ground handling service . PT Gapura Angkasa provides for airlines operating in Indonesia, options of service quality which includes cargo and warehouse, passengers and baggage management, flight operation and airplane reparation, and other lines of business to support flight business in the working area of the Company and Angkasa Pura II. PT Gapura Angkasa is a joint venture established by three State-Owned Enterprises, namely PT Garuda Indonesia (*Persero*), PT Angkasa Pura I (*Persero*),, and PT Angkasa Pura II (*Persero*), which continuously emphasizes the need to improve the quality in the service, performance, personnels, and equipments. Establishment of the company has been approved by Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-546/MK.016/1997 dated November 5, 1997 on the establishment of Joint Venture of Ground Handling between the three State-Owned Enterprises.

The principal business lines of the company after amendment of the deed are as follows.

1. Accommodation and Representation;
2. Freight Control, Communication, and Departure Control;
3. Freight Control Equipment Units;
4. Passengers and Baggage;
5. Cargo, Warehouse, and Correspondence;
6. Travel Services;
7. Airplane Services;
8. Oil and Fuel;
9. Airplane Maintenance;
10. Flight Operation and Crew Administration;
11. Runway Transportation;.
12. Catering and Service;
13. Administration and Supervision;
14. Airport Security;
15. Warehouse and Logistics;
16. Runway Management Consultant;
17. Education and Training, as well as Provision of Runway Management Expert.

PT Gapura Angkasa has played important roles in local airport industry. As a joint venture between PT Garuda Indonesia and two main state-owned airport authorities, *Perseroan* and PT Angkasa Pura II (*Persero*), performance in lines of service, personnel, and equipments continually develop.

PT Jasa Marga Bali Tol



PT JASA MARGA BALI TOL

Investasi dalam saham pada PT Jasa Marga Bali Tol merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa di daerah Bali oleh beberapa perusahaan BUMN. Investasi ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN dalam surat S-549/MBU/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Sesuai akta pernyataan keputusan rapat PT Jasa Marga Bali Tol nomor: 01. tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki 59.635 lembar saham atau sebesar Rp59.635.000 dan tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp14.908.400 dengan jumlah kepemilikan sebesar 8%. Investasi saham pada PT Jasa Marga Bali Tol tersebut dicatat pada pembukuan perusahaan dengan menggunakan *equity method*

Konsesi pengelolaan jalan tol ini diberikan selama 45 (empat puluh lima) tahun. Dalam pembangunannya, jalan tol ini membutuhkan masa konstruksi selama 420 hari serta menyerap dana pembangunan sebanyak Rp2,4 triliun. Penyelesaian jalan tol relatif bersamaan dengan penyelesaian pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, dimana kedua fasilitas tersebut dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan APEC 2013.

PT JASA MARGA BALI TOL

Investment in the shares of PT Jasa Marga Bali Tol is an investment consortium of toll way construction along Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa in Bali by several State-Owned Enterprise companies. This investment is approved by State Minister of State-Owned Enterprise in Letter S-549/MBU/2011 dated October 25, 2011. Based on the deed of resolutions of meeting of PT. Jasa Marga Bali Tol No. 01 dated December 11, 2013 that is composed in the presence of Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, PT Angkasa Pura I (Persero) owns 59,635 shares or equal to Rp 59,635,000 and an addition of paid-in capital of Rp14,908,400 with the percentage of ownership of 8%. Share investment in PT Jasa Marga Bali Tol is recorded in the company ledger by employing equity method.

Concession of the toll way management is granted for 45 (fourty five) years. In its construction, this toll way requires construction period of 420 days, while consuming construction fund of Rp2.4 trillion. The finishing of toll way is relatively simultaneous with the finishing of I Gusti Ngurah Rai development, where both facilities are prepared for APEC 2013.

YAYASAN



DANA PENSIUN PT ANGKASA PURA I (PERSERO) (DAPENRA)

Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) adalah Program Pensiun Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai bentuk Imbalan Paska Kerja, sekaligus Tanggungjawab Sosial Perusahaan kepada pegawai. Program Pensiun merupakan salah satu bentuk manifestasi komitmen Perusahaan terhadap kesejahteraan pegawainya pada masa pensiun atau pasca kerja. DAPENRA didirikan pada tanggal 6 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:KEP.1156/KU.60/1998 dan disahkan operasionalnya oleh Menteri Keuangan RI

DANA PENSIUN PT ANGKASA PURA I (PERSERO), (DAPENRA) FOUNDATION

Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) is an Employee Retirement Program of PT. Angkasa Pura I (Persero) as a form of Post-Employment Rewards, as well as a Social Responsibility of the company to the employees. Retirement Program is one of the manifestations of the Company's commitment to the employees' welfare in their retirement or post-employment period. DAPENRA was established in October 6, 1998 based on the Decision of Directors of PT. Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.1156/KU.60/1998 and its implementation is authorized by Minister of Finance of the

dengan Keputusan Nomor:KEP.393/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999.

Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Novrihandri (Wakil dari Pemberi Kerja)
Anggota	:	Adi Nugroho (Wakil dari Pemberi Kerja)
Anggota	:	Udaya S. (Wakil dari Peserta Aktif)
Anggota	:	Zulkifli (Wakil dari Peserta Pensiunan)

Susunan Pengurus DAPENRA adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	M. Syarif Luturlean
Direktur Investasi	:	Safrizal
Direktur	:	Ridwan Moeis
Kepesertaan dan Keuangan		

Republic of Indonesia based on the Decision No. KEP.393/KM.17/1999 dated November 15, 1999.

The composition of Board of Supervisors of Retirement Fund of Angkasa Pura I (DAPENRA) is as follows:

Head	:	Novrihandri (Representation of Employer)
Members	:	Adi Nugroho (Representation of Employer)
Members	:	Udaya S. (Representation of Active Participants)
Members	:	Zulkifli (Representation of Retirement Participants)

The composition of DAPENRA Committee is as follows:

President Director	:	M. Syarif Luturlean
Director of Investment	:	Safrizal
Director of Participation and Finance	:	Ridwan Moeis



YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO) (YAKKAP I)

Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) (YAKKAP I) adalah Yayasan di bidang sosial dan kemanusiaan yang didirikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta Program Tunjangan Hari Tua, Program Bantuan Pemeliharaan Kesehatan, dan Program Bantuan Lainnya dengan modal dasar sebesar Rp101.117.437.230,- (seratus satu miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Pendirian Yayasan didasarkan pada akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar yang terakhir yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2006, Tambahan Berita Negara RI Nomor 550 Tahun 2006 dan Akta tersebut telah disahkan melalui keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C.883.HT.01.05.TH 2006 tanggal 5 Mei 2006 dengan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Pegawai Angkasa Pura I (YAKKAP I) tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Pembina	:	1. Adi Nugroho (DirPUM)
Pengawas	:	1. Imron Qodari (Ketua)
		2. Rusli Amrin (Anggota)
		3. Sulistyowati Dewi (Anggota)
		4. Agus Widodo (Anggota)
Pengurus	:	1. Purwanto (Ketua)
		2. Kintonon (Sekretaris)
		3. Mas'ud Efasa (Bendahara)

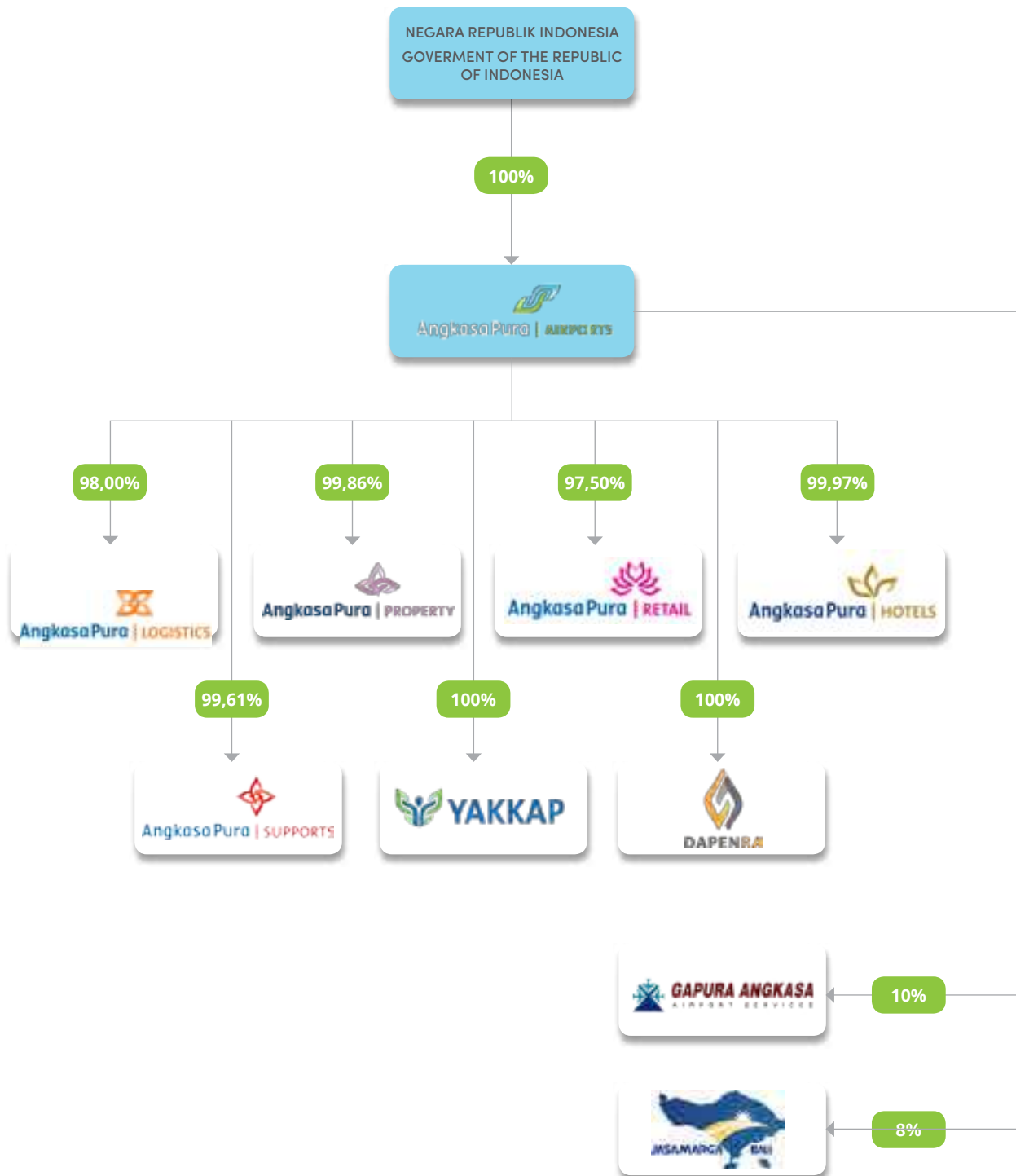
KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO) (YAKKAP I) FOUNDATION

Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) (YAKKAP I/Angkasa Pura I Employee Welfare Foundation) is a foundation operating in the social and humanity field that is established by PT. Angkasa Pura I (Persero) to improve the participants' welfare in Pension Benefit Program, Healthcare Program, and other Aid Programs with authorized capital of Rp101,117,437,230 (one hundred one billion one hundred seventeen million four hundred thirty seven and two hundred thirty rupiah). Establishment of the Foundation is based on the Deed of Establishment of Angkasa Pura I Employee Welfare Foundation with amendment to all Articles of Association that is publicised lastly in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 68 dated August 25, 2006, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 550 of 2006 and the Deed has been authorized by the Decision of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.: C.883.HT.01.05. of 2006 dated May 5, 2006 with the Composition of Custodian, Supervisor, and Caretakers of Yayasan Kesejahteraan Pegawai Angkasa Pura I (Yakkap I) in 2015 is as follows.

Custodian	:	1. Adi Nugroho (DirPUM)
Supervisors	:	1. Imron Qodari (Head)
		2. Rusli Amrin (Member)
		3. Sulistyowati Dewi (Member)
		4. Agus Widodo (Member)
Caretakers	:	1. Purwanto (Head)
		2. Kintonon (Secretary)
		3. Mas'ud EfāSa (Treasurer)

Struktur Grup Perusahaan

Group of Company Structure



Kronologis Pencatatan Saham

Chronology of Share Registration

Sampai dengan 31 Desember 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan badan usaha *non listed* yang belum melakukan pencatatan saham.

Until December 31, 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) is a non-listed enterprise which has not registered its shares yet.

Kronologis Pencatatan Obligasi dan Sukuk

Chronology of Obligation and Sukuk Registration

Pada tanggal 10 November 2016 perusahaan telah memperoleh Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran nomor S. 677/D.04/2016 tanggal 10 November 2016 dari Otoritas Jasa Keuangan untuk penawaran perdana Obligasi I PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000 dan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500.000.000. Obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 23 November 2016. Sesuai Pengumuman Pencatatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) No.Peng-P-00950/BEI.PP2/11-2016 tanggal 22 November 2016.

In November 10, 2016, the company has received an Effective Letter of Registration Statement No. S. 677/D.04/2016 dated November 10, 2016 from Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) for initial offer of Obligation I of Angkasa Pura 1 of 2016 with the principal sum of Rp2,500,000,000 and Ijarah Sukuk I of Rp500,000,000. The obligation has been registered in Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange) in November 23, 2016. It is based on the Registration Announcement of Obligation I of Angkasa Pura I of 2016 and Ijarah Sukuk I of 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) No. Peng-P-00950/BEI.PP2/11-2016 dated November 22, 2016.

Tabel Kronologis Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah I /
Chronological Table of Obligation and Ijarah

No.	Obligasi Obligation	Jumlah (Rp juta) Amount (Million Rp)	Jangka Waktu Term	Tingkat Bunga Kupon (p.a) Coupon Rate (p.a)	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
1.	Obligasi I PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 Seri A / Obligation I Angkasa Pura 1 of 2016 Series A	622	5 tahun	8,10%	23 November 2016	22 November 2021	idAAA	Pembayaran bunga Obligasi ke-1 telah dilakukan Per 22 Februari 2017 / Installment Payment of 1st Obligation has been performed per February 22, 2017
2.	Obligasi I PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 Seri B / Obligation I Angkasa Pura 1 of 2016 Series B	389	7 tahun	8,40%	23 November 2016	22 November 2023	idAAA	
3.	Obligasi I PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 Seri C / Obligation I Angkasa Pura 1 of 2016 Series C	1,489	10 tahun	8,55%	23 November 2016	22 November 2026	idAAA	

No.	Obligasi Obligation	Jumlah (Rp juta) Amount (Million Rp)	Jangka Waktu Term	Tingkat Bunga Kupon (p.a) Coupon Rate (p.a)	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
No.	Sukuk Sukuk	Jumlah (Rp juta) Amount (Million Rp)	Jangka Waktu Term	Imbalan Per Tahun Annual Reward	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
1.	Sukuk Ijarah I Seri A / Ijarah Sukuk I Series A	268	5 tahun	21,708,000	23 November 2016	22 November 2021	idAAAasy	Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke-1 telah dilakukan Per 22 Februari 2017 / Installment Payment of 1st Ijarah Reward has been performed per February 22, 2017
2.	Sukuk Ijarah I Seri B / Ijarah Sukuk I Series B	55	7 tahun	4,620,000	23 November 2016	22 November 2023	idAAAasy	
3.	Sukuk Ijarah I Seri C / Ijarah Sukuk I Series C	177	10 tahun	15,133,500	23 November 2016	22 November 2026	idAAAasy	

Lembaga Profesi Penunjang

Professionals Supporting Institutions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Kantor Cabang Surabaya
Jalan Manyar Rejo IV/4
Surabaya 60118, Indonesia
Telepon : (031) 5939787
Faksimili : (031) 5945616
Email : kaphadori@yahoo.co.id

NOTARIS NOTARY

Fathiah Helmi, S.H.,
Graha Irama, Lantai 6, Suite C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2
Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia
Telepon : (021) 5290 7304/6
Faksimili : (021) 526 1136

KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANTS

**Marsinih Martoatmodjo Iskandar
Kusdihardjo ("MMIK")**
Office 8, 15th Floor Suite H
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (021) 2933-2858, 2933-2859
Faksimili : (021) 2933-2857

WALI AMANAT WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 - 14A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720

PERUSAHAAN PEMERINGKAT RATING COMPANY

**PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo)**
Setiabudi Atrium, Lantai 8 Suite
809-810 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62,
Kuningan, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 521 0077
Faksimili : (62-21) 521 0 078

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

PENGHARGAAN / AWARDS



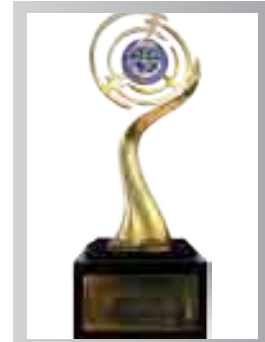
Silver Winner The Best State-Owned Enterprise Inhouse Magazine
kepada Majalah Angkasa Pura

Acara:
Indonesia *Inhouse Magazine Award* (InMA) 2016
Penyelenggara / Organizer:
Serikat Perusahaan Pers (SPS)
Tanggal:
9 Februari 2016



Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016
kepada Bandara I Gusti Ngurah Rai

Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Tanggal:
31 Maret 2016



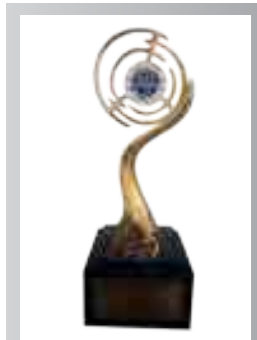
Penghargaan Prima Utama
kepada Bandara Sam Ratulangi

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di
Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016



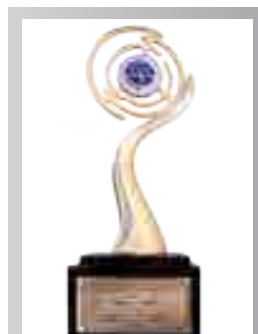
Penghargaan Prima Utama
kepada Bandara I Gusti Ngurah Rai

Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016



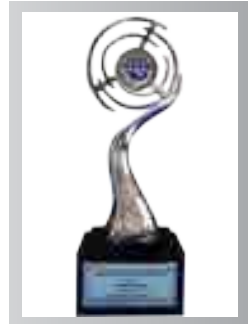
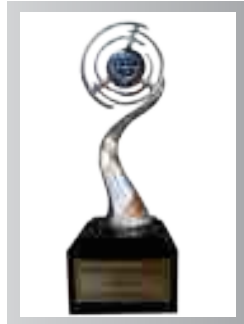
Penghargaan Prima Utama
kepada Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016



Penghargaan Prima Utama
kepada Bandara Juanda

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di
Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016

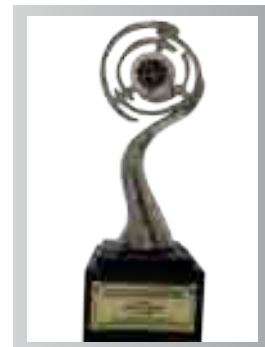
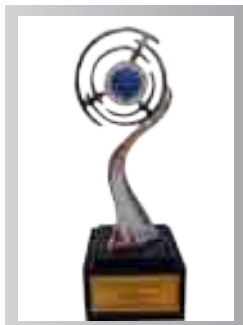


Penghargaan Prima Madya
kepada Bandara Internasional Lombok

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016

Penghargaan Prima Madya
kepada Bandara Ahmad Yani

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016

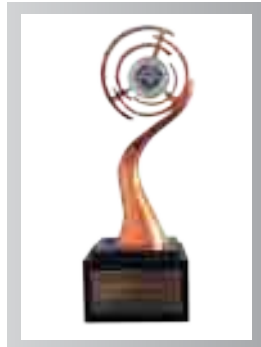


Penghargaan Prima Madya
kepada Bandara Adisutjipto

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016

Penghargaan Prima Madya
kepada Bandara Adi Soemarmo

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016



Penghargaan Prima Madya
kepada Bandara Sultan Hasanuddin

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016

Penghargaan Prima Pratama
kepada Bandara Syamsudin Noor

Acara:
Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan 2016
Penyelenggara:
Kementerian Perhubungan RI
Tanggal:
19 September 2016



Juara III Annual Report Award (ARA) 2015 - Kategori BUMN Non Keuangan *Non Listed* diberikan kepada PT Angkasa Pura I (Persero)

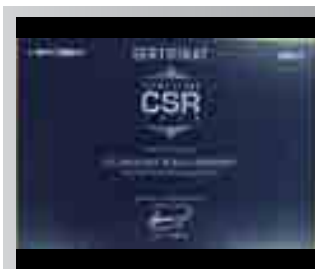
Acara:
Annual Report Award 2015
Penyelenggara:
Bank Indonesia
Tanggal:
27 September 2016

Peringkat I Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 - diberikan kepada Bandara Adi Soemarmo

Acara:
Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016
Penyelenggara:
Kementerian Kesehatan RI
Tanggal:
14 November 2016

"Top IT Implementation on Airport Sector" - diberikan kepada PT Angkasa Pura I (Persero)

Acara:
Top IT and TELCO 2016
Penyelenggara:
Majalah Itech
Tanggal:
23 November 2016



Bandara Terbaik Indonesia 2016
kepada Bandara SAMS Sepinggan

Penyelenggara:
Majalah Bandara
Tanggal:
29 November 2016

Apresiasi Corporate Social Responsibility Award 2016
kepada PT Angkasa Pura I (Persero)

Penyelenggara:
Koran Sindo dan Sindo Weekly
Tanggal:
13 Desember 2016

Apresiasi Corporate Social Responsibility Award 2016
kepada Bandara Adi Sutjipto

Penyelenggara:
Koran Sindo dan Sindo Weekly
Tanggal:
13 Desember 2016

SERTIFIKASI / CERTIFICATIONS



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional Lombok

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
30 Septemeber 2011 – 30 September 2016



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
1 Oktober 2015- 30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Adisutjipto

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
6 November 2015 – 30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Sultan Hasanuddin

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
4 Desember 2015 – 7 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Juanda

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
30 Desember 2015 – 30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Sam Ratulangi

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
18 Desember 2015 –30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
30 Desember 2015 – 30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Pattimura

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
22 Oktober 2015 –30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Syamsudin Noor

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
31 Agustus 2015 –30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Adi Soemarmo

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
5 Oktober 2015 –30 Juli 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Ahmad Yani

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
23 November 2015 –2 September 2020



Sertifikasi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara El Tari

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
**Direktorat Jendral Perhubungan
Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia**

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Sertifikat Bandar Udara

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
27 November 2015 –30 Juli 2020



ISO 14001:2004 / SNI 19 – 14001:2005

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
Sucofindo International Certification Services

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Jasa Pengelolaan Bandara
Sector Code: 31**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
18 November 2015 – 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional Ahmad Yani

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional Adisutjipto

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional Juanda

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
**Bandar Udara Internasional
Lombok Praya**

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
**Bandar Udara Internasional
Sam Ratulangi**

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
**Bandar Udara Internasional
Syamsudin Noor**

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
**Bandar Udara Internasional
SAMS Sepinggan**

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
**Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin**

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
**Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)**

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional Pattimura

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara Internasional Kaisiepo

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
United Registrar of System

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Airport Passenger Services (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara/PJP2U)

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
29 Februari 2016 - 14 September 2018



SNI ISO 9001:2008

Unit Penerima / Receiver:
Bandar Udara El Tari - Kupang

Lembaga Pemberi: / Appreciator:
Tuv Rheinland

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Provision of Airport Passenger Services

Tanggal Berlaku: / Validity Period:
18 November 2016 - 14 September 2018

Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosisasi, Kantor Wilayah dan Cabang

The Address of Subsidiaries, Associate Entity, Regional and Branch Offices

KANTOR PUSAT HEAD OFFICE

Kota Baru Bandar Kemayoran
Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat
Jakarta 10610
Tel : (021) 6541961 ext. 2116
Fax : (021) 6541514
Email : humas@angkasapura1.co.id
www.angkasapura1.co.id

PT Angkasa Pura Retail

Villa Kemayoran, Jl. Merpati 2,
Gd. Angkasa Pura Center For Excellence Lt. Dasar
Jalan Tabing No. 16, Kemayoran Blok C, No. 50
Kemayoran
website: www.angkasapuraretail.com

PT Angkasa Pura Suport

Gd. Angkasa Pura Center For Excellence Lt. Dasar
Jalan Tabing No. 16, Kemayoran Jakarta Pusat
Jakarta Pusat
Tel: (021) 65866496
Fax: (021) 6541513/14
website: www.angkasapura-supports.com

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

PT Angkasa Pura Hotel

Gd. Angkasa Pura Center For Excellence Lt. Dasar
Jalan Tabing No. 16, Kemayoran Jakarta Pusat
Tel! : (021) 65866490
Fax : (021) 65466493
Email : info@aph.co.id
website: www.aph.co.id

PT Angkasa Pura Logistic

Gd. Angkasa Pura Center For Excellence Lt. Dasar
Jalan Tabing No. 16, Kemayoran Jakarta Pusat
Tel : (021) 65866406
Fax : (021) 6541513/14
Email : admin@angkasapuralogistik.com
website: www.aplog.co

PT Angkasa Pura Properti

Gd. Angkasa Pura Center For Excellence Lt. Dasar
Jalan Tabing No. 16, Kemayoran Jakarta Pusat
Tel : (021) 65866495
Fax : (021) 6541513/14
Email : humas@aproperti.co.id
website: www.angkasapuraproperti.co

PT Angkasa Pura Retail

Villa Kemayoran, Jl. Merpati 2,
Gd. Angkasa Pura Center For Excellence Lt. Dasar
Jalan Tabing No. 16, Kemayoran Blok C, No. 50
Kemayoran
website: www.angkasapuraretail.com

ENTITAS ASOSIASI ASSOCIATE ENTITY

PT Gapura Angkasa

Gd. Dapenna Lt. 1,2 & 3
Jl. Angkasa, Blok B - 12, Kav. 8
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta - Indonesia 10610
Tel: (021) 6545410
Fax: -
Email: marketing@gapura.co.id

PT Jasa Marga Bali Tol

Kantor Operasional:
Jalan Raya Pelabuhan Benoa No. 15
Pasanggaran, Denpasar, Bali
Tel: (0361) 725326
Fax: (0361) 725326
Email: jasamargabali@perusahaan.com
website: www.jasamarga@perusahaan.com

YAYASAN Dana Pensiun PT Angkasa Pura I (Persero) (DAPENRA)

Gedung DAPENRA Lt. VI Blok B 12
Kavling No. 8 Kotabaru Bandar Kemayoran
Tel: (021) 65867867
Fax: (021) 65867868
Email: info@dapenna.co.id
website: www.dapenna.co.id

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) (YAKKAP)

Gedung DAPENRA Lt. III Blok B 12
Kavling No. 8 Kotabaru Bandar Kemayoran
Tel: (021) 6546642
website: www.yakkap.co.id

KANTOR CABANG BRANCH OFFICE

I Gusti Ngurah Rai International Airport

Gedung Wisti Sabha Lt. III
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
Badung, Bali – Indonesia 80362
Tel : (0361) 9351011
Fax : (0361) 9351032
Email : humas.dps@ap1.co.id
website: www.bali-airport.com

Sultan Hasanuddin International Airport

Jalan Raya Airport No. 1
Makassar, Sulawesi 90552
Tel : (0411) 553183
Fax : (0411) 553183
Email : humas.upg@ap1.co.id
website: www.hasanuddin-airport.com

Juanda International Airport

Jalan Ir. Haji Juanda
Surabaya 61253
Indonesia
Tel : T1 (031) 2986200 T2 (031) 2986700
Fax : (031) 8667506
Email : humas.sub@ap1.co.id
website: www.juanda-airport.com

Ahmad Yani International Airport

Jalan Puad Ahmad Yani
Semarang – Indonesia 50145
Tel : (024) 7607596
Fax : (024) 7603506
Email : humas.srg@ap1.co.id
website: www.achmadyani-airport.com

El Tari International Airport

Jalan Adi Sucipto Terminal B
Kupang – Indonesia 85361
Tel : (0380) 881668
Fax : (0380) 881263
Email : humas.koe@ap1.com
website: www.kupang-airport.com

Pattimura International Airport

Jalan Dr. Leimena – Laha
Ambon, Maluku – Indonesia 97236
Tel : (0911) 323770, 323771, 323772
Fax : (0911) 323773
Email : humas.amq@ap1.co.id
website: www.pattimura-airport.com

Adi Sumarmo International Airport

Jalan Bandara Adi Sumarmo
Surakarta – Indonesia 57108
Tel : (0271) 780715
Fax : (0271) 780715
Email : humas.soc@ap1.com
website: www.adisumarmo-airport.com

Frans Kaisiepo International Airport

Biak, Papua – Indonesia
Tel: (0981) 22555
Fax: (0981) 22106
Email: humas.bik@ap1.co.id
website: www.franskaisiepo-airport.com

Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport

Jalan Marsma. R. Iswahyudi
Balikpapan, 76115
Kalimantan Timur – Indonesia
Tel: (0542) 766886
Fax: (0542) 766832
Email: humas.bpn@ap1.co.id
website: www.sepinggan-airport.com

Adisutjipto International Airport Jalan Raya Solo KM. 9

Indonesia
Tel: (0274) 484261
Fax: (0274) 488155
Email: humas.jog@ap1.co.id
website: www.adisutjipto-airport.com

Lombok International Airport

Jalan By Pass Bil, Central Lombok
Indonesia
Tel : (0370) 6157000
Fax : (0370) 6157010
Email : humas.lombok@ap1.co.id
website: www.lombok-airport.com

Sam Ratulangi International Airport

Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia
Tel : (0431) 814320
Fax : (0431) 811595
Email : humas.mdc@ap1.co.id
website: www.samratulangi-airport.com

Syamsudin Noor International Airport

Jalan Angkasa Landasan Ulin
Banjarmasin - Indonesia 70724
Tel : 0811504640
Fax : (0511) 4705251
Email : humas.bdj@ap1.co.id
website: www.syamsudinnoor-airport.com

Akses Informasi

Information Access

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyediakan akses informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui:

Divisi *Corporate Secretary*

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2
 Jakarta, 10610
 Telp: 62-21 6541961
 Faks: 62-21 6541513, 6541514
 Email: humas@ap1.co.id
 Website: www.ap1.co.id
 Twitter: @AP_airports
 Instagram: @AP_airports
 Facebook: Angkasa Pura Airports
 Youtube: www.youtube.com/angkasapuraairports

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

PT Angkasa Pura I (Persero) telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa Informasi mengenai pemegang saham, Isi Kode Etik, Informasi mengenai RUPS, struktur grup perusahaan, analisis kinerja keuangan, laporan keuangan 5 tahun terakhir, profil Dewan Komisaris dan Direksi serta Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Selain itu, Informasi-informasi yang disajikan dalam *website* senantiasa diperbaharui secara berkala

Selain *website* Perseroan, setiap bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) telah memiliki *website* sendiri. Informasi yang tersaji di dalam *website* tersebut antara lain seperti: Informasi jadwal Kedatangan dan Keberangkatan untuk seluruh maskapai baik domestik maupun internasional, informasi mengenai denah lokasi tempat layanan bagi *customer* seperti *money changer*, ATM dan Bank, tempat untuk men-*charging*, *duty free* area, maupun tempat layanan informasi, serta berita ataupun pengumuman *terupdate* mengenai bandara.

PT Angkasa Pura I (Persero), have provided information access for shareholders in order to obtain more information through:

Corporate Secretary Division

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav. 2
 Jakarta, 10610
 Phone: 62-21 6541961
 Fax: 62-21 6541513, 6541514
 Email: humas@ap1.co.id
 Website: www.ap1.co.id
 Twitter: @AP_airports
 Instagram: @AP_airports
 Facebook: Angkasa Pura Airports
 Youtube: www.youtube.com/angkasapuraairports

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

PT Angkasa Pura I (Persero), have included in the company website several information on shareholders, Contents of Code of Conduct, information on general meeting of shareholders, structure of corporate group, analysis of finance performance, financial statement in the last 5 years, profiles of Board of Commissioners and Directors and Charter of Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit. Moreover, information presented in the website are always regularly updated.

In addition to company website, each airport that is managed by PT Angkasa Pura I (Persero) has its own website. Information presented in the website such as: Information on Departure and Arrival schedules for all domestic and international airlines, on the location of services for customers such as money changer, ATM and Bank, spots to recharge mobile phone power, duty free area, information services, and latest news or announcements about the airports.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

Education and/or Training for President Director, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2016, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

COMPETENCE IMPROVEMENT FOR BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2016, members of Board of Commissioners participated in various programs to improve their competence, in the forms of training, workshop, conference, seminar, as stated in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris /
Table of Competence Improvement for Board of Commissioners

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / Head Commissioner/ Independent Commissioner	Studi Banding dan <i>Workshop</i> / Study Tour and Workshop	Bandara Mumbai dan Bangalore - India , 30 Maret sampai dengan 5 April 2016 / Airports in Mumbai and Bangalore - India , March 30-April 5, 2016
		<i>Private Paticipation un Airport Development - Now is tahune time to take sensible and concrete steps</i> (Indonesia Aviation Research Center (IARC)	Hotel Borobudur- Jakarta, 8 Desember 2016 / Borobudur Hotel - Jakarta, December 8, 2016
		2 Tahun mewujudkan nawacita / 2-year Realization of Nine Ideals	Hotel Darmawangsa, 3 Nopember 2016
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	-
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	-	-
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	-	-
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	<i>Japan International Aerospace Exhibition 2016</i>	Jepang, 12-15 Oktober 2016 / Japan, October 12-15, 2016
		<i>Airport Security Conference</i>	London, 27-28 September 2016
		<i>Security Essen 2016</i>	Jerman, 29-30 September 2016
		2 Tahun mewujudkan nawacita / 2-year Realization of Nine Ideals	Hotel Darmawangsa, 3 Nopember 2016
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	-	-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

COMPETENCE IMPROVEMENT FOR DIRECTORS

Throughout 2016, members of Board of Commissioners participated in various programs to improve their competence, in the forms of training, workshop, conference, seminar, as stated in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi / Table of Competence Improvement for Directors

Nama Direksi / Name of Director	Jabatan / Position	Periode / Term	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan / Competence Improvement/ Training Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Time and Venue	Penyelenggara / Administrator
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director		Narasumber Live <i>Talkshow</i> Bingkai Inspirasi Kompas TV terkait Fasilitas Layanan Publik Information Source in a Live Talkshow Bingkai Inspirasi in Kompas TV regarding Public Service Facility	22 Januari 2016 Di Studio Orange Kompas TV / January 22, 2016 Orange Studio, Kompas TV	Kompas TV
			Seminar Pembahasan Infrastruktur Kadin dengan Kemen PU, tema: Pembangunan Infranstruktur Indonesia mampukan menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional / Seminar to Discuss the Infrastructure of Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia/ Indonesian Chamber of Commerce and Industry) with Ministry of Public Works, with the theme: Development of Infrastructure in Indonesia: Is it Capable to Encourage Independence of National Industry?	6 April 2016 Di Hotel Sahid / April 6, 2016 Sahid Hotel	Kadin dan Kemen PU / Kadin and Ministry of Public Works
			Seminar Pertamina <i>training consulting (CEO talk on holding company)</i> Pertamina Seminar, training, consulting (President Director Talk on Holding Company)	6 April 2016 Di Ritz Carlton Kuningan / April 6, 2016 Ritz Carlton Hotel, Kuningan	Pertamina
			2nd Annual Southeast Asia Modern Summit 2nd Annual Southeast Asia Modern Summit	7 April 2016 Di Double Tree Hilton Hotel / April 7, 2016 Double Tree Hilton Hotel	
			Pembicara dalam <i>festival</i> Jaya Dirgantara Nusantara / Speaker in Jaya Dirgantara Nusantara Festival	9 April 2016 Di Wisma Hijau Cimanggis / April 9, 2016 Wisma Hijau, Cimanggis	
			<i>Benchmarking</i> ke Bandara Kuala Namu (Medan) / Benchmarking to Kuala Namu Airport (Medan)	29 Mei 2016 Di Medan / May 29, 2016 Medan	PT Angkasa Pura I
			Pembicara dalam seminar tentang <i>Urgensi Strategis</i> Bandara Baru Yogyakarta / Speaker in the Seminar on Strategic Urgency of New Airport in Yogyakarta	1 Juni 2016 Di Gd Kaca Kompleks Kantor Pemkab. Kulon Progo / June 1, 2016 Gedung Kaca of Complex of Kulon Progo District Administration Office	Pemkab. Kulon Progo / Kulon Progo District Administration
			Pembicara dalam Seminar <i>Enhancing US-Indonesia Aviation Cooperation</i> / Speaker in the Seminar on Enhancing US-Indonesia Aviation Cooperation	2 Juni 2016 Di Kementerian Perhubungan / June 2, 2016 Ministry of Transportation	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation

Nama Direksi / Name of Director	Jabatan / Position	Periode / Term	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan / Competence Improvement/ Training Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Time and Venue	Penyelenggara / Administrator
			Seminar Sinergi BUMN: Realisasi Pembentukan <i>Holding</i> / Seminar on BUMN (Badan Usaha Milik Negara/State-Owned Enterprise) Synergy: Realization of Holding Establishment	11 Agustus 2016 The Darmawangsa Hotel / August 11, 2016 The Darmawangsa Hotel	
			Indonesia-Swedish Digital Forum	6 September 2016 Di Pullman Hotel / September 6, 2016 Pullman Hotel	
			<i>Airport Security and IT Conference</i> Airport Security & IT Conference	27 - 29 September 2016 di London / September 27-29, 2016 London	
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Director of Operational Affairs		<i>Benchmarking</i> ke Bandara Hongkong, Orlando dan Miami Benchmarking to airports in Hong Kong, Orlando, and Miami	11 - 21 Mei 2016 di Hongkong, Orlando dan Miami / May 11-21, 2016 in Hong Kong, Orlando and Miami	Angkasa Pura Support dan Indonesia Infrastruktur / Angkasa Pura Support & Indonesia Infrastructure
			<i>Benchmarking</i> ke Bandara Hang Nadim (Batam) dan Kuala Namu (Medan) / Benchmarking to Hang Nadim Airport (Batam) and Kuala Namu Airport (Medan)	28 - 29 Mei 2016 Batam dan Medan / May 28-29, 2016 Batam and Medan	PT Angkasa Pura I (Persero)
			<i>Airport Security</i>	24 September - 1 Oktober 2016 UK dan Jerman / September 14- October 1, 2016 UK and Germany	Security Essen dan Russell Publishing / Security Essen & Russell Publishing
			<i>Benchmarking</i> ke PT Pelindo I / Benchmarking to PT Pelindo I	11 - 12 Oktober 2016 / October 11-12, 2016	PT Pelindo I
			<i>Benchmarking</i> ke Batam (Pertemuan Slot Time Domestik 2016) / Benchmarking to Batam (Meeting on Domestic Time Slot 2016)	21 - 22 November 2016 di Batam / November 21-22, 2016 in Batam	DJU
Polana B. Pramesti	Direktur Teknik / Director of Technical Affairs		Seminar Aerotropolis Asia / Seminar Aerotropolis Asia	18 - 19 Mei 2016 di Singapura / May 18-19, 2016 Singapore	
			Pembicara dalam seminar <i>Enhancing US Indonesia Aviation Cooperation</i> / Speaker in the Seminar on Enhancing US-Indonesia Aviation Cooperation	2 Juni 2016 R. Mataram Gedung Karya Kemenhub / June 2, 2016 Mataram Room of Gedung Karya in Ministry of Transportation	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation
			<i>Benchmark</i> ke San Fransisco Airport (SFO) tentang Implementasi Engineered Material Arresting System (EMAS) / Benchmarking to San Fransisco Airport (SFO) on the Implementation of Engineered Material Arresting System (EMAS)	30 November 2016 San Fransisco Airport (SFA) / November 30, 2016 San Fransisco Airport (SFO)	

Nama Direksi / Name of Director	Jabatan / Position	Periode / Term	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan / Competence Improvement/ Training Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Time and Venue	Penyelenggara / Administrator
			<p>Benchmark Pengelolaan Sacramento Country Airport System (SAC) dan Visit Sacramento International Airport (SMF)</p> <p>Benchmark Pengelolaan Mather Airport</p> <p>Benchmark Pengelolaan Sacramento Executive Airport (SEA) / Benchmark on the Introduction of Sacramento Country Airport System (SAC) and Visit Sacramento International Airport (SMF)</p> <p>Benchmark on the Management of Mather Airport</p> <p>Benchmark on the Management of Sacramento Executive Airport (SEA)</p>	<p>2 Desember 2016 di Kantor SAC dan Terminal SMF</p> <p>di Mather Airport</p> <p>di Sacramento ExA / December 2, 2016 SAC Office and SMF Terminal</p> <p>Mather Airport</p> <p>Sacramento ExA</p>	
			<p>Benchmark Implementasi TREX-FOD Finder / Benchmark on the Implementation of TREX-FOD Finder</p>	<p>5 Desember 2016 Oceanside Municipal Airport / December 5, 2016 Oceanside Municipal Airport</p>	
			<p>Benchmark Implementasi EMAS di Teterboro Airport (TEB) / Benchmark on the Implementation of EMAS in Teterboro Airport (TEB)</p>	<p>7 Desember 2016 di Teterboro Airport (TEB) / December 7, 2016 Teterboro Airport (TEB)</p>	
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Director of Commercial Affairs and Business Development		<p>Bechmarking ke Bandara Hang Nadim (Batam) dan Kuala Namu (Medan) / Benchmarking to Hang Nadim Airport (Batam) and Kuala Namu Airport (Medan)</p>	<p>28 - 29 Mei 2016 Batam dan Medan / May 28-29, 2016 Batam and Medan</p>	PT Angkasa Pura I (Persero)
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Director of Finance and Information Technology		<p>Bechmarking ke Bandara Hang Nadim (Batam) dan Kuala Namu (Medan) / Benchmarking to Hang Nadim Airport (Batam) and Kuala Namu Airport (Medan)</p>	<p>28 - 29 Mei 2016 Batam dan Medan / May 28-29, 2016 Batam and Medan</p>	PT Angkasa Pura I (Persero)
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / Director of Human Resource and General Affairs		<p>Bechmarking ke Bandara Hang Nadim (Batam) dan Kuala Namu (Medan) / Benchmarking to Hang Nadim Airport (Batam) and Kuala Namu Airport (Medan)</p>	<p>28 - 29 Mei 2016 Batam dan Medan / May 28-29, 2016 Batam and Medan</p>	PT Angkasa Pura I (Persero)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komite Audit memiliki kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar untuk mengembangkan kompetensi. Pada tahun 2016, Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengikuti program pengembangan kompetensi melalui penugasan Perseroan sebanyak 1 kali selama 2 hari. Kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti tersebut yaitu mengikuti Seminar Nasional Internal Audit *"Tahune Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value"* di Hotel Tahune Stone, Legian Bali, tanggal 27 sampai dengan 28 April 2016.

COMPETENCE IMPROVEMENT FOR AUDIT COMMITTEE

In order to support performing their duties, Audit Committee had the opportunity to participate in various trainings and seminars to improve their competence. In 2016, Members of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero) participated in competence improvement program through assignment by the Company for 1 time and 2 days long. The competence improvement activity is a National Seminar on Internal Audit, entitled *Tahune Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value* in Tahune Stone Hotel, Legian Bali, in April 27-28, 2016.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE RISIKO USAHA DAN GCG

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komite Risiko Usaha dan GCG memiliki kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar untuk mengembangkan kompetensi. Pada tahun 2016, pengembangan kompetensi anggota Komite Risiko Usaha dan GCG dilakukan melalui diskusi internal.

COMPETENCE IMPROVEMENT FOR BUSINESS RISK AND GCG COMMITTEE

In order to support performing their duties, Business Risk and GCG Committee had the opportunity to participate in various trainings and seminars to improve their competence. In 2016, competence improvement for members of the committee was conducted in the form of internal discussion.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program peningkatan kompetensi sebagai berikut.

COMPETENCE IMPROVEMENT FOR CORPORATE SECRETARY

In 2016, Corporate Secretary joined competence improvement program as follows.

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan / Table of Competence Improvement for Corporate Secretary

Materi Pelatihan Training Material	Pelaksana Implementor	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
Bimbingan teknis tim pengawas kearsipan / Technical guidance from archives supervisor team	ANRI	13 Oktober 2016 / October 13, 2016
Workshop governance, risk and compliance / Governance, risk, and compliance workshop	JSM Management Consultant / Jsm Management Consultant	15-16 Desember 2016 / December 15-16, 2016
Workshop Indonesia air traffic management and airport infrastructure and security reverse trade mission / Workshop on Indonesia air traffic management and airport infrastructure and security reverse trade mission	US Trade And Development Agency / US Trade and Development Agency	24 Februari 2017 - 10 Maret 2017 / February 24 - March 10, 2017
Workshop future ready airport / Workshop on future-ready airport	GVK	20-21 Februari 2017 / February 20-21, 2017

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT INTERNAL AUDIT

Pada tahun 2016, Unit Internal Audit telah mengikuti program peningkatan kompetensi sebagai berikut.

COMPETENCE IMPROVEMENT FOR INTERNAL AUDIT UNIT

In 2016, Internal Audit Unit joined competence improvement program as follows.

**Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit /
Table of Competence Improvement for Internal Audit Unit**

Materi Pelatihan Training Material	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Dasar Pelaksanaan Implementation Basis	Tempat Pelaksanaan Implementation Venue	Peserta Participants
Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Level I of Internal Audit	5 - 16 September 2016 / September 5-16, 2016	PRINT.HD.332/DL.04/2016 tanggal 5 Sept 2016 / PRINT.HD.332/DL.04/2016 dated September 5, 2016	YPIA JKT	1. Jarot Handoko 2. I Made Adi Susilayasa
Audit Intern Tingkat Dasar II / Basic Level II of Internal Audit	19 - 30 September 2016 / September 19-30, 2016	PRINT.HD.331/DL.04/2016 tanggal 5 Sept 2016 / PRINT.HD.332/DL.04/2016 dated September 5, 2016	YPIA JKT	1. Jarot Handoko 2. I Made Adi Susilayasa
Audit Intern Tingkat Lanjutan I / Advanced Level I of Internal Audit	28 November - 09 Desember 2016 / November 28 - December 29, 2016	PRINT.DP.513/DL.04/2016 tanggal 2 DES 2016 / PRINT.DP.513/DL.04/2016 dated December 2, 2016	YPIA JKT	Jarot Handoko
Audit Intern Tingkat Lanjutan II / Advanced Level II of Internal Audit	15 - 26 Februari 2016 / February 15-26, 2016	PRINT.HD.36/DL.07/2016 tanggal 1 Januari 2016 / PRINT.HD.36/DL.07/2016 dated January 1, 2016	YPIA JKT	Toni Alam
Audit Intern Tingkat Dasar I dan Dasar II / Basic Level I and II of Internal Audit	03 - 14 Oktober 2016, 17-28 Oktober 2016 / October 3-14, 2016, October 17-28, 2016	PRINT.HD.378/DL.04/2016 tanggal 22 Sept 2016 / PRINT.HD.378/DL.04/2016 dated September 22, 2016	YPIA JKT	Tuti Wianti
Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Level I of Internal Audit	03 - 14 Oktober 2016 / October 3-14, 2016	PRINT.DP.392/DL.04/2016 tanggal 4 Okt 2016 / PRINT.DP.392/DL.04/2016 dated October 4, 2016	YPIA JKT	Junius F. Walenta
Audit Intern Tingkat Dasar II / Basic Level II of Internal Audit	17-28 Oktober 2016 / October 17-28, 2016	PRINT.DP.393/DL.04/2016 tanggal 4 Okt 2016 / PRINT.DP.393/DL.04/2016 dated October 4, 2016	YPIA JKT	Junius F. Walenta
Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Level I of Internal Audit	31 Oktober - 11 November 2016 / October 31-November 11, 2016	PRINT.DP.441/DL.04/2016 tanggal 25 Okt 2016 / PRINT.DP.441/DL.04/2016 dated October 25, 2016	YPIA JKT	Yan C. Daulima
Audit Intern Tingkat Dasar II / Basic Level II of Internal Audit	14 - 25 November 2016 / November 14 - 25, 2016	PRINT.DP.442/DL.04/2016 tanggal 25 Okt 2016 / PRINT.DP.442/DL.04/2016 dated October 25, 2016	YPIA JKT	Yan C. Daulima
Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Level I of Internal Audit	31 Oktober - 11 November 2016 / October 31-November 11, 2016	PRINT.HD.458/DL.07/2016 tanggal 31 Okt 2016 / PRINT.HD.458/DL.07/2016 dated October 31, 2016	YPIA JKT	1. Yaka Sulistya W. 2. Taufik Ismail
<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>			Cikopo	Tavip Wibowo
Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) / National Seminar on Internal Audit (Seminar Nasional Internal Audit/SNIA)	27 - 27 April 2016	1. PRINT.HD.126/DL.07/2016 tanggal 29 MARET 2016 2. PRINT.HD.158/DL.07/2016 tanggal 12 APRIL 2016 3. PRINT.HD.173/DL.07/2016 tanggal 20 APR 2016 / 1. PRINT.HD.126/DL.07/2016 dated March 29, 2016 2. PRINT.HD.158/DL.07/2016 dated April 12, 2016 3. PRINT.HD.173/DL.07/2016 dated April 20, 2016	Bali	1. Eko Permadi 2. Tavip Wibowo 3. Siti Chadijah O. 4. Toni Alam 5. Tris Gunarso 6. Rini Asriningsih 7. Suriganata 8. Azmieti K. Sinta 9. Restu Suryaningsih 10. Erni Suharlina 11. I Nyoman Sudarta 12. Adi Hartojo 13. Sulistyaningsih 14. Hendry Don Charles S. 15. Dyah Dwisupi O. 16. Jon Hendri 17. Wiewit Juwariah 18. Haryono Hendro Kumoro

Materi Pelatihan Training Material	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Dasar Pelaksanaan Implementation Basis	Tempat Pelaksanaan Implementation Venue	Peserta Participants
Forum Kepala Satuan Pengawas Intern (FKSPI) / Forum of Unit Head of Internal Supervisor (Forum Kepala Satuan Pengawas)	10-13 Mei 2016 / May 10-13, 2016	PRINT.HD.138/DL.07/2016 tanggal 31 Maret 2016 / PRINT.HD.138/DL.07/2016 dated March 31, 2016	Bandung	1. Tavip Wibowo 2. Tris Gunarso 3. Rini Asriningsih
Focus Group Discussion (FGD)	7-8 Juni 2016 / June 7-8, 2016	PD.06/LB.03.13/2016-B tanggal 6 Juni 2016 / PD.06/LB.03.13/2016-B dated June 6, 2016		1. Tavip Wibowo 2. Siti Chadijah O. 3. Toni Alam 4. Tris Gunarso
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) / Criteria of Superior Performance Assessment (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul/KPKU)	9 Juni 2016 (Opening) November 2016 (closing) / June 9, 2016 (Opening) November 2016 (closing)	1. PCP.390/TU.03.05/2016-B tanggal 7 Juni 2016 2. PCP.793/TU.03.05/2016-B tanggal 4 November 2016 / 1. PCP.390/TU.03.05/2016-B dated June 7, 2016 2. PCP.793/TU.03.05/2016-B dated November 4, 2016	Jakarta	Tavip Wibowo
Refreshing Risk Based Budgeting dan Rencana Pelaksanaan Risk Assesment Profil Risiko Kantor Pusat Tahun 2017 / Refreshing Risk Based Budgeting and Implementation Plan of Risk Assessment Head Office in 2017	10 Mei 2016 / May 10, 2016	PRM.144/PG.01/2016-B tanggal 28 April 2016 PRM.144/PG.01/2016-B dated April 28, 2016	GSG, AP.I	Tavip Wibowo
Pengujian Diklat Manajerial Tingkat Muda Angkatan XIV Tahun 2016 / Examiner of Junior Level Managerial Training, Class XIV, in 2016	07 Juni 2016 / June 07, 2016	HTD.1010/DL.04.01/2016-B tanggal 2 Juni 2016 / HTD.1010/DL.04.01/2016-B dated June 2, 2016	CFE, AP.I	Eko Permadi
Aerodrome Compliance and Auditing	18 - 22 Januari 2016 / January 18-22, 2016	PRIN.HD.05/DL.07/2016 tanggal Januari 2016 / PRIN.HD.05/DL.07/2016 dated January 2016	Surabaya	Suriganata
Project Risk Management Course	15 - 17 Februari 2016 / February 15-17, 2016	PRIN.HD.40/DL.04/2016 tanggal Februari 2016 / PRIN.HD.40/DL.04/2016 dated February 2016	Bandung	Adi Hartojo



2

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussions and Analysis

Perseroan mampu menangkap peluang yang ada di industri penerbangan. Pada 2015 Perseroan mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik. Produksi PJP4U pada 2015 mencapai 25.572.859 ton, mengalami pertumbuhan 2.835.623 ton atau sebesar 12,47% dari 2014 yang mencapai 22.737.236 ton. Baik produksi domestik maupun produksi internasional mengalami pertumbuhan yang positif. Produksi PJP2U mengalami pertumbuhan sebesar 238.098 pax atau sebesar 0,73%, dari 32.778.877 pax di 2014 menjadi 33.016.975 pax di 2015.

The company is able to capture opportunities in the aviation industry. In 2015, the company was able to produce a very good performance. The production of PJ4U in 2015 reached 25,572,859 tons, growth 2,835,623 tons or 12.47% of 2014 reached 22,737,236 tons. Both of the production of domestic and international production, experience positive growth. PJP2U a growth of 238,098 pax or by 0.73%, from 32,778,877pax in 2014 to 33,016,975 in 2015 pax.



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Sejalan dengan perkembangan industri kebandarudaraan di Indonesia, pertumbuhan industri PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai penyedia, pengelola, dan pengusaha jasa kebandarudaraan di kawasan tengah dan timur Indonesia juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, pergerakan lalu lintas angkutan udara untuk jumlah pesawat, penumpang, dan kargo mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada 2016, pendapatan usaha untuk segmen operasi kebandarudaraan meningkat sebesar Rp712,02 miliar atau 14.34%, sedangkan pendapatan usaha untuk segmen Non Bandara meningkat sebesar Rp276,13 miliar atau 27.51%. Peningkatan pendapatan usaha telah berdampak pada peningkatan laba bersih Perseroan. Laba bersih tahun berjalan di 2016 mencapai Rp1,16 triliun, meningkat sebesar Rp317,67 miliar atau sebesar 37,72% dari 2015 yang mencapai Rp841,97 miliar. Keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan laba bersih juga diiringi dengan pertumbuhan aset yang cukup signifikan. Pada 2016, total aset Perseroan mencapai Rp23,67 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar Rp6,94 triliun atau sebesar 41,53% dibandingkan 2015 yang mencapai Rp16,72 triliun.

In line with the development of airport industry in Indonesia, the growth of PT Angkasa Pura I (Persero) as a provider, manager and employer of airport service in Indonesia's central and eastern regions also increased. Overall, air freight traffic for aircrafts, passengers and cargo also increased compared to the one in 2015. In 2016, Operating income for the Airport operating segment increased by Rp 712,02 billion or 14.34%, while Operating income for Non-Airport segment increased by Rp 276,13 billion or 27.51%. The increase in operating income has resulted in an increase in the Company's net revenue. Net revenue for the current year in 2016 reached Rp 1,16 trillion, an increase of Rp 317,67 billion or 37.72% from 2015 which reached Rp 841,97 billion. In 2016, the total assets of the Company reached Rp 23,67 trillion. The Company's success in improving its net profit was also accompanied by significant asset growth. In 2016, total assets of the Company reached Rp 23,67 trillion, experiencing growth of Rp 6,94 trillion or 41.53% compared to 2015 which reached Rp 16,72 trillion.

Tinjauan Industri

Industry Overview

PEREKONOMIAN GLOBAL

Perekonomian global di 2016 masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa yang berdampak signifikan pada ekonomi dunia dan tidak sejalan dengan hasil pemilu Amerika Serikat yang dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi pasar. Pasar keuangan global bereaksi negatif terhadap hasil pemilu tersebut. Di samping itu, ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate* (FRR) dan perekonomian China yang belum sepenuhnya pulih juga menyebabkan perekonomian global masih dalam kondisi tidak pasti.

International Monetary Fund (IMF) mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia, dari posisi 3,2% pada publikasi April menjadi 3,1% pada rilis Juli 2016. Koreksi pertumbuhan ke bawah tersebut, salah satunya dipengaruhi keputusan Inggris untuk ke luar dari Uni Eropa. IMF juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju menjadi 1,8% dari posisi 1,9%, karena memiliki integrasi yang tinggi dengan ekonomi Inggris. Bank Dunia bahkan lebih pesimis terhadap kondisi global dengan memproyeksi pertumbuhan dunia 2016 hanya akan berkisar 2,4%. Sementara itu, perekonomian negara maju diperkirakan hanya tumbuh 1,7%.

Secara umum, perkembangan sektor keuangan global mengalami fluktuasi sepanjang 2016. Salah satu indikator perkembangan sektor keuangan suatu negara adalah perkembangan bursa sahamnya. Jika melihat kinerja sejumlah bursa saham sepanjang tahun 2016 (*year to date*), maka terdapat beberapa bursa saham yang mengalami koreksi dan juga ada yang menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2016, bursa saham yang mengalami koreksi adalah bursa saham Nikkei, Shanghai, dan Euronext. Koreksi yang terjadi di negara-negara tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

Pada kasus Nikkei, koreksi terjadi akibat sejumlah faktor seperti perlambatan ekonomi yang terus melanda Jepang serta gempa di Kumamoto yang membuat sejumlah pabrik otomotif dan elektronik menghentikan produksinya. Sedangkan pada bursa saham Shanghai, koreksi disebabkan oleh kinerja domestik yang masih belum membaik. Kondisi ini diperparah dengan keputusan *Moody's* yang menurunkan *outlook rating* China pada bulan Maret 2016 dari stabil menjadi negatif.

Pada saat yang bersamaan, sejumlah bursa saham menunjukkan kinerja positif. Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu bursa dengan kinerja paling baik sepanjang tahun 2016 dimana secara *year to date* mengalami peningkatan sebesar 18,9%. Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah bursa saham lainnya seperti *Dow Jones* dan *SandP*

GLOBAL ECONOMY

The global economy in 2016 was still faced with various uncertainties. Some of the factors, among others, are the decision of the UK to exit from the European Union. This situation had a significant impact on the world economy and not in line with the results of the United States election which was considered not in line with market expectations. Global financial markets reacted negatively to the outcome of the election. In addition, the uncertainty of the Fed Fund Rate (FRR) and the Chinese economy that had not fully recovered also caused the global economy to remain uncertain.

The International Monetary Fund (IMF) corrected the world's economic growth, from 3.2% in the April publication to 3.1% in the July 2016 release. Correction of under development was influenced by the UK's decision to get out of EU. IMF also corrected the growth the economy of developed countries to 1.8% from 1.9%, due to their high integration with UK economy. The World Bank was even more pessimistic about global condition by projecting 2016 world growth will only be around 2.4%. Meanwhile, the economy of developed countries was estimated to grow only 1.7%.

In general, the development of the global financial sector had fluctuated throughout 2016. One indicator of the development of the financial sector of a country is the development of its stock market. Observing the performance of a number of stock exchanges throughout 2016 (*year to date*), there were some stock exchanges experiencing a correction but there were also stock exchanges showing a positive performance. Throughout the year of 2016, the stocks that experienced a correction were Nikkei, Shanghai and Euronext. Corrections in these countries were caused by a number of factors.

In the Nikkei case, the correction was due to a number of factors such as the continuing economic slowdown in Japan and the earthquake in Kumamoto which left some automotive and electronic factories halting their production. While in the Shanghai stock exchange, the correction caused by the domestic performance that had not been improved. This condition was exacerbated by *Moody's* decision to lower China's rating outlook in March 2016 from stable to negative.

At the same time, a number of stock exchanges showed positive performance. Indonesia Stock Exchange (BEI) became one of the best performing bourses throughout the year 2016 increased by 18.9%. The same condition also occurred in other stock exchanges such as *Dow Jones* and *SandP 500* which also increased. The UK stock market

500 yang juga mengalami peningkatan. Bursa saham Inggris yang awalnya dikhawatirkan mengalami koreksi akibat referendum yang secara mengejutkan memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa ternyata hanya memberikan dampak sesaat dan kinerja tahun berjalan menunjukkan kinerja yang positif.

Indikator lainnya dalam menilai perkembangan sektor keuangan global adalah perkembangan nilai tukar dari sejumlah mata uang negara-negara di dunia terhadap US Dollar. Sama halnya dengan perkembangan bursa saham, perkembangan nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh faktor global maupun faktor domestik. Sejumlah mata uang sempat mengalami fluktuasi yang dalam ketika Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa.

Ketidakpastian ekonomi Inggris dan Uni Eropa membuat sejumlah investor memutuskan untuk memindahkan asetnya dari mata uang GBP menjadi USD dan Yen. Hal ini membuat USD dan Yen mengalami penguatan pada beberapa waktu setelah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Di saat yang bersamaan, GBP mengalami depresiasi di mana nilai tukarnya terhadap USD mengalami depresiasi yang sangat tajam dan mencapai level 1,3225 atau paling rendah dalam 31 tahun terakhir.

Selain faktor Brexit, nilai tukar mata uang negara-negara di dunia juga dipengaruhi oleh rencana *The Fed* untuk menaikkan suku bunga *Fed Fund Rate*. Hal ini membuat sejumlah mata uang mengalami depresiasi sepanjang tahun 2016. Hanya beberapa mata uang saja yang mengalami apresiasi (*ytd*) seperti Peso Filipina, Yuan Cina, dan Dollar Australia. Sedangkan sejumlah mata uang seperti Lira Brasil, Yen Jepang, dan Poundsterling mengalami depresiasi yang sangat dalam, lebih dari 10% dibandingkan awal tahun 2016. (Disarikan dari: Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017, Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia, INDEF)

KONDISI INDUSTRI PENERBANGAN GLOBAL

Kondisi lalu lintas angkutan udara di Asia Pasifik turut memberikan peluang besar bagi industri penerbangan global. Dalam pertemuan *The Association of Asia Pacific Airlines* (AAPA) ke-59 dinyatakan bahwa 10 rute penerbangan internasional tersibuk di dunia adalah di kawasan Asia Pasifik. Meningkatnya aktivitas travel di Asia Pasifik juga berdampak pada investasi yang besar di bidang infrastruktur dan pengelolaan bandara.

Hingga saat ini Bandara Changi dianggap sebagai bandara hub utama di Asia Pasifik. Dilihat dari sisi kesiapan infrastruktur bandara, Changi International Airport-Singapura, memiliki layanan *Air Traffic Controller* (ATC) yang mampu melayani lalu lintas udara di kawasan Asia Tenggara.

Forecast jangka panjang dalam *The Current Market Outlook 2015-2034*, *The Boeing Company* menggabungkan efek dari kekuatan pasar pada pengembangan industri penerbangan. Pada tahun sebelumnya, aktivitas pasar di negara berkembang telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun saat ini, Boeing memiliki pandangan berbeda dari

which was initially predicted to suffer a correction due to the referendum which surprisingly result of it showing that UK decided to choose out of the EU, it turned out that the referendum only gave a momentary impact and the performance of the current year showed a positive performance.

Another indicator in assessing the development of the global financial sector is the development of exchange rates from a number of currencies of countries in the world against the US Dollar. Similar to the development of the stock market, the development of currency exchange rates is also influenced by both global and domestic factors. A number of currencies had experienced a deep fluctuation when the British decided to get out of the European Union.

The uncertainty of the UK and EU economies had led some investors to decide moving their assets from GBP to USD and Yen. This caused the USD and Yen strengthening at some time after the British decision out of the European Union. At the same time, GBP was depreciating where its exchange rate against the USD had a very sharp depreciation and reached the level of 1,3225 or the lowest in last 31 years.

In addition to the Brexit factor, the exchange rate value of countries in the world is also affected by the Fed's plan to raise interest rates in the Fed Fund Rate. This caused some currencies depreciated throughout 2016. Only a few currencies were appreciated like Philippine Peso, Yuan Chinese, and Australian Dollar. While several currencies such as Brazilian Lira, Japanese Yen, and Pound Sterling experienced a very deep depreciation more than 10% compared to early 2016.

(Excerpted from: Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017, Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia, INDEF)

CONDITION OF GLOBAL FLIGHT INDUSTRY

Condition of air transport in Asia Pacific also provided a great opportunity for the global aviation industry. The 59th International Air Transport Association (AAPA) meeting stated that 10 of the world's busiest international flight routes are in the Asia Pacific region. The increasing of travel activities in Asia Pacific also impacts the substantial investment in infrastructure and airport management.

Up to now, the Changi Airport is considered as the main hub airport in Asia Pacific. In terms of airport infrastructure readiness, Changi International Airport Singapore has an Air Traffic Controller (ATC) service that has capability of serving air traffics in Southeast Asia.

By considering the long-term forecast of the Current Market Outlook of 2015-2034, The Boeing Company combines the effects of market forces on the development of aviation industry. In the previous year, market activity in developing countries had driven an economic growth. However, currently Boeing has a different view from the previous

tren sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) dunia akan diantisipasi tumbuh 3,1% per tahun selama 20 tahun ke depan. Selama periode yang sama, lalu lintas penumpang diperkirakan akan meningkat sebesar 4,9% dan lalu lintas kargo udara menjadi 4,7% selama 20 tahun ke depan. Boeing meramalkan adanya kebutuhan pesawat sebanyak 38.050 yang setara dengan lebih dari 5,6 miliar dolar.

Asia akan diperkirakan menjadi pasar terbesar di dunia bagi Boeing dengan pertumbuhan setiap tahun sekitar 6,1%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah PDB yang diperkirakan akan tumbuh hingga 4,3% per tahun selama 20 tahun ke depan. *The Boeing Company* dalam *The Current Market Outlook 2015-2034* memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mencapai rata-rata lebih dari 5% per tahun selama 10 tahun terakhir dan perkiraan tersebut akan terus berkembang pada tingkat yang sedikit lebih rendah dari 4,6% sampai 2034. Sembilan dari sepuluh industri utama di Asia termasuk ke dalam jenis industri yang memerlukan perjalanan udara.

Adaptasi dari ASEAN *Single Aviation Market* sangat mendukung efisiensi dan pertumbuhan industri penerbangan. Boeing memperkirakan bahwa wilayah ASEAN akan membutuhkan 3.750 pesawat baru, senilai 550 miliar dolar, dengan lebih dari tiga perempat pesawat berjenis lorong tunggal. Ekspansi dari industri penerbangan dengan biaya rendah (*low-cost carrier*) telah bertambah kuat dan akan berlanjut merangsang pertumbuhan regional. Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling aktif di dunia dalam operasional penerbangan biaya rendah dengan jarak menengah yang merupakan model bisnis dengan potensi pertumbuhan yang kuat.

(Sumber : *The Current Market Outlook 2015-2034, The Boeing Company*)

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di tahun 2016 mengalami peningkatan, namun tidak signifikan. Perekonomian Indonesia di tahun 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,79%. Peningkatan yang kurang signifikan ini disebabkan oleh tren perlambatan pada sektor *tradable* yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kurang berkualitas. Kinerja sektor eksternal Indonesia juga masih terus mengalami tren perlambatan dan penurunan kualitas. Permintaan impor barang jadi mengalami kenaikan yang signifikan sementara permintaan impor bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan dalam proses produksi terus menurun yang menggambarkan rendahnya daya serap dan produktivitas industri.

Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang belum pulih. Daya beli masyarakat masih lemah sebagai konsekuensi dari menurunnya pendapatan dan inflasi bahan makanan yang masih cukup tinggi. Memang, inflasi umum cenderung menurun tetapi inflasi pada barang bergejolak (*volatile food*) masih tetap tinggi. Pasalnya rata-rata porsi pengeluaran komoditas pangan mencapai sekitar 70% dari total pengeluaran. Wajar jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak bergerak, bahkan cenderung stagnan.

trend. The world's Gross Domestic Product (GDP) will be anticipated to grow 3.1% annually over the next 20 years. During the same period, passenger traffic is expected to increase by 4.9% and air cargo traffic is expected to increase by 4.7% over the next 20 years. Boeing predicted the need for aircrafts as many as 38,050 aircrafts which is equivalent to more than 5.6 billion dollars.

Asia is estimated to be the largest market in the world for Boeing with annual growth around 6.1%. One of the factors that influence that growth is GDP which is expected to grow 4.3% per year over the next 20 years. The Boeing Company in *The Current Market Outlook 2015-2034* estimated that the economic growth in Southeast Asia on average was more than 5% per year for the last 10 years and the forecast will continue to grow at a slightly lower rate of 4.6% until the year of 2034. Nine of the ten major industries in Asia fall into the type of industry that requires air travel.

The adaptation of the ASEAN Single Aviation Market strongly supports the efficiency and growth of the aviation industry. Boeing estimated that the ASEAN region will need 3,750 new aircrafts with worth 550 billion dollars which consisting more than three quarter of single-aisle aircrafts. The expansion of the low-cost carrier industry has grown stronger and will continue to stimulate regional growth. Southeast Asia is the most active region in the world for low-cost and medium-haul operations as a business model with strong growth potential.

(Source: *The Current Market Outlook 2015-2034, The Boeing Company*)

INDONESIAN ECONOMY

Indonesia's economic growth in 2016 had increased but it was not significant. The Indonesian economy in 2016 grew at 5.02% which it was higher than the achievement in 2015 at 4.79%. The less significant increase was due to the slowing trend in the tradable sector which showed that Indonesia's economic growth was still lacking in quality. The performance of Indonesia's external sector also continued to experience a trend of slowing and declining quality. Demand for imports of finished goods had increased significantly while demand for imports of raw materials and auxiliary materials needed in the production process continued to decline reflecting the low level of absorption power and industrial productivity.

The slowing economic growth in 2016 was affected by household consumptions that had not yet fully recovered. Public purchasing power was still weak as a consequence of declining revenue and high inflation of foodstuffs. Although, inflation in general tended to decline but inflation in volatile foods remained high. Because the average portion of food commodity expenditure reached about 70% of total expenditure. Thus, the growth of household consumption did not move, even tended to stagnate.

Menuju penghujung tahun, pergerakan inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara umum inflasi Januari-Oktober 2016 berada pada level 2,11% (*year to date/yttd*). Namun, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (2,16%), inflasi umum tahun ini cenderung lebih rendah. Tiga kali deflasi dan stagnasi perkembangan daya beli merupakan faktor penyumbang inflasi umum sepanjang tahun 2016. *Trend* inflasi umum yang cenderung melandai sepanjang tahun 2016 membuat otoritas moneter yakin bahwa inflasi akhir tahun ini akan berada di batas bawah target. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan disagregasinya, kondisi inflasi barang bergejolak (*volatile food*) masih tinggi dan rentan. Hingga Oktober 2016, tercatat inflasi *volatile* berada pada level 7,54% (*yoy*). Bahkan pada Maret dan April, komponen inflasi ini melejit hingga hampir 9,60% (*yoy*).

Secara umum, nilai tukar rupiah mengalami tren menguat selama tahun 2016. Namun beberapa fenomena sempat menekan rupiah untuk beberapa kesempatan. Di awal tahun, rupiah sempat berada di posisi yang masih rentan Rp13.900/USD akibat badai krisis nilai tukar tahun 2015. Seperti yang diprediksi oleh beberapa kalangan, rupiah berpotensi kembali melemah seiring dengan berbagai ketidakpastian kondisi global. Penguatan rupiah pada bulan Februari-April disebabkan oleh beberapa *moment*, seperti: Pertama, masuknya kembali sejumlah besar investasi asing dan testimoni dari Janet Yellen yang pada saat itu sempat ragu untuk menaikkan tingkat FFR. Kedua, risiko pasar global yang cukup rentan yang akhirnya mendorong dana-dana mulai mengalir kembali ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Ketiga, pemotongan suku bunga acuan BI ke 7% ternyata cukup mampu menjadi daya tarik untuk pasar saham dan obligasi di mata investor asing. Keempat, hasil rilis BPS menunjukkan penguatan indikator ekonomi nasional.

Pada kisaran Mei-Juni, rupiah kembali terdepresiasi oleh US dolar hingga menjadi Rp13.600/USD. Permintaan dollar Amerika Serikat yang cukup tinggi dari dalam negeri diprediksi menjadi faktor yang membuat mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS. Pergerakan rupiah pada periode ini sejalan dengan sejumlah mata uang di kawasan regional Asia. Tercatat baht Thailand, dolar Singapura dan ringgit Malaysia juga ikut melemah. Selain itu, hasil notulensi FOMC pada pertengahan Juni yang berisi The Fed akan membuka peluang kenaikan suku bunga juga menjadi pemicu melemahnya rupiah.

Selanjutnya hingga Oktober, rupiah terus menguat hingga 13.100 namun kondisi berbalik pada awal November. Terpilihnya Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat telah menjadi shock tersendiri bagi rupiah. Tercatat hingga 11 November, rupiah jatuh hingga 13.300. Namun diprediksi kondisi ini hanya akan bersifat sementara.

Sementara itu, kondisi rupiah terhadap mata uang lainnya (Yuan dan Euro) nampak bergerak stabil hingga penghujung 2016. Dari titik Januari ke Oktober, Rupiah terapresiasi sebesar 5,15 persen terhadap Euro dan terapresiasi pula sebesar 8,82 persen terhadap Yuan. Kondisi Eropa yang

Toward the end of the year, the inflationary movement showed an increasing trend. In general, inflation from January to October 2016 was at 2.11% (*year to date/yttd*) level. However, when compared to the same period in the previous year (2.16%), general inflation of that year tended to be lower. Three times of deflation and stagnation in the development of purchasing power were the contributing factors of general inflation throughout the year of 2016. The general inflation trend that tended to slip through in 2016 made the monetary authorities to believe that the inflation at the end of this year will be at the lower limit of the target. However, when viewed on the basis of its disaggregation, volatile foods inflation remained high and vulnerable. As of October 2016, volatile inflation was at 7.54% (*yoy*). Even in March and April, this inflation component soared to nearly 9.60% (*yoy*).

In general, the rupiah exchange rate experienced a strong trend during the year 2016. But some phenomena may press the rupiah for several occasions. At the beginning of the year, the rupiah was still in a vulnerable position, Rp13.900/USD due to storm of the crisis of the exchange rate in 2015. As predicted by some circles, the rupiah potentially would weaken again in line with various uncertainties global conditions. The strengthening of the rupiah in February-April was caused by several events, such as: First, the re-entry of a large number of foreign investments and testimony from Janet Yellen who at that time was hesitant to raise the level of FFR. Second, the risk of a fragile global market of which it ultimately drove funds to flow back into emerging markets including Indonesia. Thirdly, the BI rate cut to 7% turned out to be quite attractive for stock and bond markets in the eyes of foreign investors. Fourth, the results of the Central Bureau of Statistics showed the strengthening of national economic indicators.

In the range of May-June, the rupiah again depreciated by US dollar to become Rp13.600/USD. Demand for US dollar that was quite high from within the country had been predicted to be a factor that made the rupiah weakened against the US dollar. The movement of rupiah in this period was in line with a number of currencies in the Asian region. It was noted that Thailand bath, Singapore dollar and Malaysian ringgit were also weakened. In addition, the FOMC minutes of mid-June reading containing the Fed that would open up the possibility of an increase in interest rates also triggered the weakening of the rupiah.

Up to October, the rupiah continued to strengthen to 13,100 but this condition was reversed in early November. Donald Trump who was elected in the United States election had become a shock for rupiah. Recorded until November 11, the rupiah fell to 13,300. But, it was predicted that this condition would only be temporary.

Meanwhile, the rupiah against other currencies (Yuan and Euro) appeared to be stable until the end of 2016. From January to October, the rupiah appreciated by 5.15 percent against the Euro and appreciated by 8.82 percent against the Yuan. The unstable European condition has its

belum stabil menjadi momentum tersendiri bagi rupiah sehingga kondisinya terapresiasi. Di sisi lain, kondisi China yang belum terlalu stabil dan potensi devaluasi yuan telah membuat rupiah semakin menguat terhadap mata uang China.

Terkait perkembangan fiskal, realisasi penerimaan dalam negeri hingga September 2016 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Per September 2016, realisasi penerimaan dalam negeri mencapai Rp1.080 triliun atau 60,6% dibandingkan target yang sudah ditetapkan dalam APBNP 2016. Dari sisi persentase, realisasi tersebut berada di atas realisasi tahun 2015 sebesar 56,3%. Jika melihat secara lebih detail, realisasi sejumlah komponen penerimaan dalam negeri pada tahun 2016 menunjukkan persentase yang lebih baik dibandingkan tahun 2015. Hanya komponen cukai dan Pajak Penghasilan (PPH) Migas yang dari sisi persentase realisasinya tidak sebaik tahun lalu. Menurunnya realisasi PPH Migas sudah diperkirakan karena harga komoditas minyak dan gas di pasar global belum kembali ke posisi di tahun 2015.

(Disarikan dari: Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017, Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia, INDEF)

KONDISI INDUSTRI PENERBANGAN INDONESIA

Keberadaan bisnis bandar udara Indonesia tidak lepas dari dinamika yang terjadi pada bisnis penerbangan baik di Indonesia maupun internasional. IATA mencatat bahwa Asia memiliki empat dari lima negara di dunia yang mengalami kenaikan total penumpang per tahun, yakni China, India, Indonesia dan Vietnam. Pada dekade ini juga terdapat peralihan tren maskapai seiring dengan permintaan konsumen akan layanan penerbangan. Seiring dengan bertambahnya kalangan ekonomi kelas menengah baik di Asia maupun Indonesia, hal ini mendorong lebih banyak permintaan akan layanan *Low Cost Carrier* (LCC). Pada pasar Asia, maskapai LCC telah berhasil melakukan penetrasi sebesar 31% dari total penumpang yang diangkut di Asia, dan penetrasi dari LCC ini diprediksikan dalam waktu dekat akan mengalahkan pasar eropa dan Amerika Utara yang telah dahulu mature¹.

Dilihat dari jenis penerbangannya, kegiatan penerbangan dikategorikan menjadi 2, yaitu penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Pada penerbangan domestik, seiring dengan menurunnya harga minyak dunia, hal ini juga berimbas kepada avtur yang merupakan bahan bakar dari pesawat udara dan penyumbang 45-50% dari total komponen biaya penyelenggaraan layanan transportasi udara. Dengan adanya hal tersebut, hal ini dapat mengurangi beban operasional dan usaha layanan angkutan udara menjadi efisien².

Pada penerbangan internasional, meskipun terjadi pelemahan perekonomian global yang mengarahkan pada penurunan pertumbuhan secara signifikan di beberapa negara, Indonesia justru mencatat *inbound arrival* yang relatif kuat jika pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan

own momentum for the rupiah so that it was appreciated. On the other hand, China's unstable condition and Yuan's devaluation potentially had made the rupiah stayed stronger against the Chinese currency.

Regarding fiscal developments, the realization of domestic revenues up to September 2016 showed an improvement compared to the previous year. As of September 2016, the realization of domestic revenues reached Rp1.080 trillion or 60.6% compared to the target set in the 2016 of APBNP (the Fixed National Budget). In terms of percentage, the realization was above the realization in 2015 by 56.3%. Observing in more detail, the realization of some components of domestic revenues in 2016 showed a better percentage compared to 2015. Only the excise component and Income Tax (PPH) of Oil and Gas which in terms of percentage, the realization was not as good as the previous year. The decline in the realization of Oil and Gas income Tax was already predicted as oil and gas commodity prices in the global market had not returned to the position in 2015.

(Excerpted from: Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017, Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia, INDEF)

CONDITION OF THE AVIATION INDUSTRY IN INDONESIA

The existence of Indonesia's airport business cannot be separated from the dynamics that occur in aviation businesses both in Indonesia and worldwide. IATA notes that Asia has four out of five countries in the world that experienced an increase in total passengers per year, namely China, India, Indonesia and Vietnam. In this decade there is also a shift in airline trends along with consumer demand for aviation services. Along with the growing middle class economy both in Asia and Indonesia, this trend is driving more demand for Low Cost Carrier (LCC) services. In the Asian market, LCC airlines have successfully penetrated 31% of the total passengers transported in Asia, and the penetration of the LCC is predicted in the near future will beat European and North American markets that have been mature¹.

Viewed from the type of flight, flight activities are categorized into 2 parts, namely domestic flight and international flight. On domestic flights, along with the decline in world oil prices, this also affects the aviation fuel from aircraft and contribute 45-50% of the total cost component of air transport services. Given this condition, it can reduce the operational costs and air transport services effort to be efficient².

On international flights, despite the global economic slowdown that leads to significant growth declines in some countries, Indonesia has recorded a relatively strong inbound arrival in 2016. This is because the Indonesian government through the tourism ministry conducts

pemerintah Indonesia melalui kementerian pariwisata melaksanakan aktivitas pemasaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan minat wisatawan mancanegara terhadap beberapa destinasi di Indonesia. Hal ini juga ditunjang oleh kebijakan pemerintah tentang pembebasan visa yang memasuki wilayah Indonesia³. Hal inilah yang mendorong pertumbuhan yang relatif baik terhadap *inbound travel* di Indonesia.

Kedepan, IATA memperkirakan bahwa pada kawasan Asia Pacific, pasar penerbangan akan memperoleh tambahan 1.8 miliar penumpang pertahun pada tahun 2035⁴. IATA juga memprediksikan bahwa pada tahun 2024, total pasar penerbangan di China akan menggantikan posisi US sebagai pasar penerbangan terbesar di dunia India akan menggantikan Inggris untuk menempati urutan ketiga dalam pasar penerbangan dunia pada tahun 2025. Dan diprediksikan pula Indonesia pada tahun 2025 akan memasuki 10 besar dari urutan pasar penerbangan dunia.

Melihat dari kondisi saat ini dan proyeksi positif terhadap industri penerbangan baik di dunia maupun Indonesia, kedepan keberlangsungan bisnis bandar udara di Indonesia masih menjanjikan.

Sumber:

- 1) <http://www.routesonline.com/events/conference/43/strategy-summit/#mainContent>
- 2) <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160114192642-85-104427/pertamina-pangkas-lagi-harga-avtur-di-seluruh-bandara/>
- 3) Euromonitor Airline Industry in Indonesia, 2015
- 4) <http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-10-18-02.aspx>

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEBANDARUDARAAN DI WILAYAH PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Sejalan dengan perkembangan industri kebandarudaraan di Indonesia, pertumbuhan industri PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai penyedia, pengelola, dan pengusaha jasa kebandarudaraan di kawasan tengah dan timur Indonesia juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, pergerakan lalu lintas angkutan udara untuk jumlah pesawat, penumpang, dan kargo mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015.

**Tabel Pergerakan Pesawat, Penumpang dan Kargo /
Table of The Aircrafts, Passengers and Cargos Movement**

Uraian Items	Unit Unit	2016	2015	Perubahan changes
Pesawat / Aircrafts	MV	764,531	698,118	9.51%
Penumpang / Passengers	Pax	84,755,960	73,935,940	14.63%
Kargo / Cargos	Kg	362,457,236	324,839,503	11.58%

sustainable marketing activities to increase tourist interest overseas to several destinations in Indonesia. This is also supported by the government's policy on visa exemption entering the territory of Indonesia³. It drives relatively good growth of inbound travel in Indonesia.

In the future, IATA estimates that in the Asia Pacific region, the aviation market will gain an additional 1.8 billion passengers per year by 2035. IATA also predicts that by the year of 2024, the total aviation market in China will replace the US position as the largest flight industry in the world. Meanwhile, India will replace UK as the third rank in the aviation market of the world in 2025. It is predicted also in 2025 that Indonesia will enter the top 10 of the world flight market.

Judging from the current condition and positive projection of aviation industry both in the world and Indonesia, the continuity of airport business in Indonesia in the future is still promising.

Source:

1. <http://www.routesonline.com/events/conference/43/strategy-summit/#mainContent>
2. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160114192642-85-104427/pertamina-pangkas-Again-price-avtur-in-whole-airport/>
3. Euromonitor Airline Industry in Indonesia, 2015
4. <http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-10-18-02.aspx>

THE DEVELOPMENT OF AIRPORT INDUSTRY IN PT ANGKASA PURA I (PERSERO) AREA

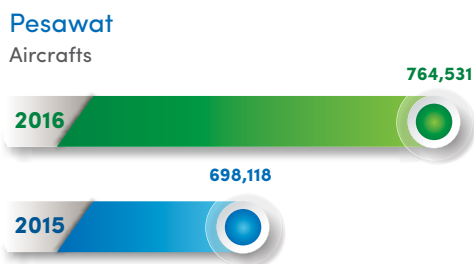
Along with the development of airports industry in Indonesia, the development of industry in PT Angkasa Pura I (Persero) as a provider, operator and airport service company in western and eastern area of Indonesia is also increasing. Overall, the air freight traffic numbers for aircrafts, passengers and cargos were growing compared to those in 2015.

PERGERAKAN PESAWAT

Pergerakan pesawat domestik rata-rata tiap bulannya adalah 52 ribu pergerakan atau rata - rata 1.707 movements/hari, pergerakan pesawat internasional rata-rata tiap bulannya adalah 7 ribu pergerakan atau 220 pergerakan/hari dan pergerakan pesawat lokal/militer rata-rata tiap bulannya adalah 5 ribu *pergerakan* atau 162 movement/hari, sehingga pergerakan pesawat keseluruhan (domestik + internasional + Lokal) 2.089 pergerakan/hari.

Jumlah pergerakan pesawat domestik tahun 2016 terealisasi sebanyak 624.811 pesawat atau terjadi kenaikan 10,81% dari tahun sebelumnya sebanyak 563.838 pesawat, jumlah pergerakan pesawat internasional tahun 2016 terealisasi sebanyak 80.373 pesawat atau terjadi kenaikan 8,03% dari tahun sebelumnya sebesar 74.402 pesawat dan pergerakan pesawat lokal/militer tahun 2016 terealisasi sebanyak 59.347 pesawat atau terjadi penurunan sebanyak 0,89% dari tahun sebelumnya sebesar 59.878 pesawat.

Realisasi trafik pesawat tahun 2016 dengan pembanding tahun sebelumnya terlihat dalam tabel berikut ini:



Secara total, bandara dengan jumlah pergerakan pesawat tertinggi yakni Bandar Udara Internasional Juanda – Surabaya dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 148.596 pergerakan, kemudian disusul oleh Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 139.106 pergerakan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi peningkatan trafik pesawat yaitu:

- Penambahan rute baru domestik antara lain oleh maskapai Lion Air (8 rute penerbangan baru), Batik Air (2 rute penerbangan baru), Citilink (1 rute penerbangan baru), Garuda Indonesia (2 rute penerbangan baru); Nam Air (5 rute penerbangan baru), Wings Air (5 rute penerbangan baru), Sriwijaya Air (1 rute penerbangan baru) dan Kalstar (1 rute penerbangan baru)
- penambahan rute baru internasional oleh maskapai Garuda Indonesia (1 rute penerbangan baru; SOC-BTJ-JED-BTJ-SOC), Lot Polish Air (1 rute penerbangan baru; WAW-DPS-WAW), dan Saudia Airlines untuk penerbangan umroh (UPG-MED-UPG, 2 kali seminggu)

AIRCRAFTS' MOVEMENTS

There were averagely 52,000 domestic aircrafts movements every month or averagely 1,707 movements a day. While international aircrafts movements averagely reached 7,000 movements per month or 220 movements per day. Whereas local and military aircrafts reached averagely 5000 movements per months or 162 movements a day. As a result, all aircrafts movements (domestic + international + local) reached 2,089 movements/day.

The realization of domestic aircrafts movements' numbers in 2016 were 624,811 aircrafts, which was 10.81% higher compared to the year 2015 that had 563,838 aircrafts. While the realization of international aircrafts movements' numbers in 2016 were 80,737 aircrafts. The number of aircrafts increased 8.03%, compared to the number of aircrafts in 2015 which was 74,402 aircrafts. On the other hand, the realization of local/military aircrafts movements' numbers in 2016 were 59,347 aircrafts. Different with the two other categories, local/military aircrafts movements' numbers in 2016 was 0.89% lower compared to the year 2015 which had 59,878 aircrafts.

The realization of air traffic in 2016 and the comparison with the previous year is displayed in this following table:

Based on the table, airport with the biggest number of aircrafts movements was Juanda International Airport – Surabaya with 148,596 movements. Followed by I Gusti Ngurah Rai International Airport with 139,106 movements. Factor that influenced the growth of aircrafts traffic were:

- The addition of new domestic routes by several airlines like Lion Air (8 new flight routes), Batik Air (2 new flight routes), Citilink (1 new flight route), Garuda Indonesia (2 new flight routes); Nam Air (5 new flight routes), Wings Air (5 new flight routes), Sriwijaya Air (1 new flight route) and Kalstar (1 new flight route).
- The addition of new international routes by several airlines like Garuda Indonesia (1 new flight route; SOC-BTJ-JED-BTJ-SOC), Lot Polish Air (1 new flight route; WAW-DPS-WAW), and Saudia Airlines for 'umroh' flight (UPG-MED-UPG, 2 times a week).

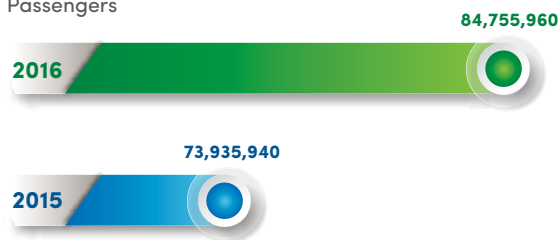
- peningkatan frekuensi penerbangan beberapa maskapai antara lain oleh Maskapai Citilink, Lion Air, Batik Air dan Sriwijaya Air

PERGERAKAN PENUMPANG

Sedangkan pergerakan penumpang domestik rata-rata tiap bulannya adalah 5,6 juta pax atau rata-rata 182 ribu pax/hari, penumpang internasional rata-rata tiap bulannya adalah 1,09 juta pax atau rata-rata 36 ribu pax/hari dan penumpang transit rata-rata tiap bulannya adalah 415 ribu pax atau rata-rata 13 ribu pax/hari, sehingga jumlah keseluruhan 231 ribu pax/hari. Jumlah penumpang domestik pada tahun 2016 terealisasi sebanyak 66.716.934 pax atau terjadi kenaikan 14,23% dari tahun sebelumnya sebesar 58.405.364 pax. Sedangkan jumlah penumpang internasional tahun 2016 terealisasi 13.062.097 pax atau terjadi kenaikan 15,7% dari tahun sebelumnya sebanyak 11.289.160 pax dan jumlah penumpang transit terealisasi 4.976.929 atau terjadi kenaikan 17,34% dari tahun sebelumnya sebanyak 4.241.416.

Penumpang

Passengers



Secara total, Jumlah pergerakan penumpang tertinggi terjadi pada Bandar Udara I Internasional Gusti Ngurah Rai – Bali yakni sebanyak 20.001.275 penumpang, kemudian disusul oleh Bandar Udara Juanda – Surabaya dengan jumlah penumpang sebanyak 19.486.330 penumpang. Adapun hal-hal yang mempengaruhi peningkatan trafik penumpang yaitu:

- penambahan rute baru, antara lain oleh Maskapai Lion Air dengan rute SOC-LOP-SOC (*daily*); SOC-UPG-SOC (*daily*); SOC-BDJ-SOC (*daily*); SOC-PNK-SOC (*daily*); SOC-PKY-SOC (*daily*); SOC-DPS-KOE (*daily*); KOE-LOP-KOE (*daily*); dan SOC-TRK-SOC (*daily*)
- penambahan rute baru, antara lain maskapai Lion Air dengan rute LOP-SOC-LOP (*daily*), LOP-KOE-LOP (*daily*).
- penambahan frekuensi penerbangan beberapa maskapai di Bandara Lombok-Praya antara lain oleh Maskapai Citilink dengan rute penerbangan LOP-CGK-LOP (dua kali sehari); LOP-HLP-LOP (tiga kali sehari); LOP-SUB-LOP (tiga kali sehari) dan maskapai Lion Air dengan rute penerbangan LOP-SUB-LOP (empat kali sehari).

- The increasing flight frequencies by several airlines like Citilink, Lion Air, Batik Air and Sriwijaya Air.

PASSENGERS' MOVEMENTS

The domestic passengers' movements were averagely 5.6 million pax per month or 182 thousands pax/day. While international passengers' movements averagely reached 1.09 million pax per month or 36 thousands pax per day. Whereas transit passengers averagely reached 415 thousands pax per month or averagely 13 thousands pax a day. Therefore, the total number of passengers were 231 thousands per day. The realization number of domestic passengers in 2016 were 66.716.934 pax or increasing 14.23% from the previous year which was 58,405,364 pax. While the realization number of international passengers in 2016 were 13,062,097 pax or increasing 15.7% from the previous year which was 11,289,160 pax. Whereas the realization number of transit passengers in 2016 were 4,976,929 pax or increasing 17.34% from the previous year which was 4,241,416 pax.

In total, the biggest number of passengers' movements was in I Gusti Ngurah Rai International Airport – Bali which were 20,001,275 passengers. Followed by Juanda International Airport - Surabaya which were 19,486,330 passengers. The growth of passengers' traffic were influenced by:

- The addition of new routes by Lion Air which were SOC-LOP-SOC (*daily*); SOC-UPG-SOC (*daily*); SOC-BDJ-SOC (*daily*); SOC-PNK-SOC (*daily*); SOC-PKY-SOC (*daily*); SOC-DPS-KOE (*daily*); KOE-LOP-KOE (*daily*); and SOC-TRK-SOC (*daily*)
- The addition of new routes by Lion Air which were LOP-SOC-LOP (*daily*), LOP-KOE-LOP (*daily*).
- The increasing flight frequencies by several airlines in Lombok-Praya Airport, like Citilink Airlines on these routes: LOP-CGK-LOP (2 times a day); LOP-HLP-LOP (3 times a day); LOP-SUB-LOP (3 times a day) and Lion Air on LOP-SUB-LOP route (4 times a day).

PERGERAKAN KARGO

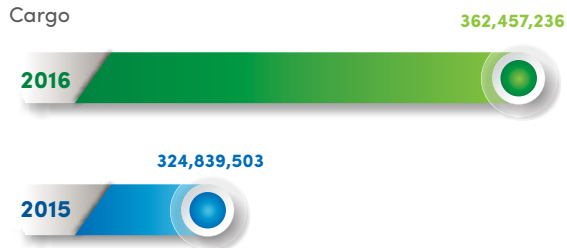
Pergerakan kargo domestik rata-rata tiap bulannya adalah 25,76 juta kg atau 845 ribu kg/hari, pergerakan kargo internasional rata-rata tiap bulannya adalah 4,4 juta kg atau 145 ribu kg/hari, sehingga jumlah keseluruhan 990 ribu kg/hari.

Jumlah kargo domestik tahun 2016 terealisasi 309.175.330 Kg atau terjadi kenaikan 9,88% dari tahun sebelumnya sebesar 281.375.026 Kg. Sedangkan jumlah kargo internasional pada Desember 2016 terealisasi 53.281.906 Kg atau terjadi kenaikan 22,59% dari tahun sebelumnya sebesar 43.464.477 Kg.

Adapun realisasi trafik pergerakan kargo sampai tahun 2016 dengan pembandingan tahun sebelumnya terlihat pada tabel di bawah ini:

Kargo

Cargo



Pergerakan tertinggi jumlah kargo terjadi pada Bandar Udara Internasional Juanda – Surabaya yakni sebanyak 96.280.587kg, kemudian disusul oleh Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar dengan jumlah pergerakan kargo sebanyak 57.897.859kg.

CARGO MOVEMENT

The monthly average domestic cargo movements are 25.76 million kg or 845 thousand kg/day, while The monthly average international cargo movements are 4.4 million kg/day or 145 thousand kg/day, therefore the overall cargo movements are 990 thousand kg/day.

The total realization of domestic cargo in 2016 was 309,175,330 kg or an increase by 9.88% compared to the previous year's of 281,375,026 kg, while the total realization of international cargo in 2016 was 53,281,906 kg or an increase by 22.59% compared to the previous year's of 43,464,477 kg.

The realization of Cargo Movement until 2016 compared to the previous year's can be seen in the following table:

The biggest cargo movements occurred in Juanda International Airport – Surabaya, which were 96,280,587 kgs. Followed by Sultan Hassanudin Airport – Makassar which reached 57,897,859 kgs movements.



Tinjauan Operasional

Operational Review

PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan. Bidang jasa yang disediakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) meliputi jasa aeronautika (Kebandaraan), non aeronautika (Non Bandara) dan pelayanan jasa terkait bandara. Sejak tahun 2013, jasa aeronautika yang disediakan oleh Perusahaan hanya di bidang non *Air Traffic Services* (ATS). Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Perusahaan sangat berkomitmen untuk mengembangkan usaha di bidang jasa non aeronautika dengan konsep *airport city* yaitu Perubahan orientasi dan proses bisnis dengan titik berat sektor non aeronautika dan kepuasan pelanggan.

Perseroan berkantor pusat di Jakarta dan sampai dengan 31 Desember 2016, Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebanyak 13 sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 907 tahun 2014 tentang PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai Badan Usaha Bandar Udara. Perseroan telah mendirikan 1 *Strategic Business Unit* serta 5 Perusahaan Anak dengan kegiatan di kota-kota besar wilayah tengah dan timur Indonesia, yaitu:

- 1) Bandara I Gusti Ngurah Rai (DPS) – Bali
- 2) Bandara Juanda Surabaya (SUB) – Surabaya
- 3) Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) – Makassar
- 4) Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN) – Balikpapan
- 5) Bandara Frans Kaisiepo (BIK) – Biak
- 6) Bandara Sam Ratulangi – Manado
- 7) Bandara Adisutjipto (JOG) – Yogyakarta
- 8) Bandara Adi Soemarmo (SOC) – Surakarta
- 9) Bandara Syamuddin Noor (BDJ) – Banjarmasin
- 10) Bandara Pattimura (AMQ) – Ambon
- 11) Bandara Ahmad Yani (SRG) – Semarang
- 12) Bandara Lombok (LOP) – Praya
- 13) Bandara El Tari (KOE) - Kupang
- 14) *Strategic Business Unit* Komersial – Bali
- 15) PT Angkasa Pura Logistic
- 16) PT Angkasa Pura Property
- 17) PT Angkasa Pura Suport
- 18) PT Angkasa Pura Hotel
- 19) PT Angkasa Pura Retail

Secara konsolidasi, segmen operasi PT Angkasa Pura I (Persero) mencakup segmen kebandaraan dan non bandara. Segmen operasi adalah Informasi segmen usaha yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional difokuskan pada aktivitas bisnis perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan kategori jenis usaha perusahaan yang dibedakan dalam kelompok usaha utama dan di luar kelompok usaha utama. Penjelasan segmen operasi PT Angkasa Pura Persero I (Persero) ialah sebagai berikut:

PT Angkasa Pura I (Persero) is an airport service company that provides aeronautics services, non-aeronautics services and services related to Airports. Since 2013, aeronautics services that is provided by this Company only serve non Air Traffic Services (ATS). Therefore, since then, the Company is very committed to develop the business in non-aeronautics services with the airport city concept. Airport city concept offers orientation Changes and business process that is focused on non-aeronautics services and customers' satisfaction.

The headquarter of PT Angkasa Pura I (Persero) is in Jakarta and up to 31 December 2016, based on the Ministry of Transportation's Regulation number: KP 907 of 2014 about PT. Angkasa Pura I (Persero) as an Airport Management Company. The company has established a Strategic Business Unit and also 5 Subsidiary Companies which operate in big cities around western and eastern area of Indonesia, they are:

- 1) I Gusti Ngurah Rai Airport (DPS) – Bali
- 2) Juanda Surabaya Airport (SUB) – Surabaya
- 3) Sultan Hasanuddin Airport (UPG) – Makassar
- 4) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport (BPN) – Balikpapan
- 5) Frans Kaisiepo Airport (BIK) – Biak
- 6) Sam Ratulangi Airport – Manado
- 7) Adisucipto Airport (JOG) – Yogyakarta
- 8) Adisoemarno Airport (SOC) – Surakarta
- 9) Syamuddin Noor Airport (BDJ) – Banjarmasin
- 10) Pattimura Airport (AMQ) – Ambon
- 11) Ahmad Yani Airport (SRG) – Semarang
- 12) Lombok Airport (LOP) – Praya
- 13) El Tari Airport (KOE) - Kupang
- 14) Strategic Unit Business – Bali
- 15) PT Angkasa Pura Logistic
- 16) PT Angkasa Pura Property
- 17) PT Angkasa Pura Suport
- 18) PT Angkasa Pura Hotel
- 19) PT Angkasa Pura Retail

As a consolidation, the operating segment of PT Angkasa Pura I (Persero) covers airport segment and non-airport segment. Operating segment is business segment which is reported to the operational decision maker, that is focused on company's business activities and classified based on business categories whether inside the main business or outside the main business. The explanation of PT Angkasa Pura Persero I (Persero)'s operating segment is as follows:

1. Segmen Kebandaraan (Aeronautika)

Penjelasan tentang produksi/kinerja operasional segmen operasi kebandaraan disajikan dalam bagian produksi/kinerja operasional Aeronautika pada bagian analisis dan pembahasan manajemen dalam laporan tahunan ini.

2. Segmen Non Bandara (Non Aeronautika)

Penjelasan tentang produksi/kinerja operasional segmen operasi non bandara disajikan dalam bagian produksi/kinerja operasional Non Aeronautika pada bagian analisis dan pembahasan manajemen dalam laporan tahunan ini.

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Sasaran Strategi PT Angkasa Pura I (Persero) yang akan dicapai dalam periode tahun 2014-2018 ialah sebagai berikut.

- 1) Mencapai nilai CSI 4,60 (Standar ACI) pada tahun 2018.
- 2) Mencapai total pendapatan operasional Rp8,8 triliun pada tahun 2018.
- 3) Mencapai proporsi pendapatan non aero terhadap pendapatan operasional sebesar 57% pada tahun 2018.
- 4) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen kelas dunia (terutama pengelolaan SDM, ICT, *operation excellence*, dan *service excellence*) secara holistik sebelum akhir tahun 2018.
- 5) Menerapkan konsep *Green Corporation* dan Program CSR secara efektif.
- 6) Menjadi perusahaan yang siap untuk diprivatisasi sebelum akhir tahun 2018.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) menetapkan strategi perusahaan melalui peningkatan layanan kepada *stakeholder*. Adapun strategi peningkatan layanan Perusahaan kepada *stakeholder* dilakukan dengan cara:

- 1) Menyempurnakan (*excelling*) penerapan *service excellence*, *operations excellence*, *system management* dan ICT kelas dunia.
- 2) Mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi biaya.
- 3) Mengoptimalkan seluruh potensi sinergi secara internal dan eksternal.
- 4) Mempercepat dan memperbesar penciptaan nilai dari kemitraan strategis.

FASILITAS ALAT PRODUKSI

Dalam melakukan produksi pelayanan jasa, PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki fasilitas alat produksi yang meliputi landasan pacu, *apron*, *aviobridge*, terminal penumpang, gudang kargo, dan tempat parkir kendaraan di seluruh bandara yang dikelola Perseroan. Beberapa fasilitas produksi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Airport Segment (Aeronautics)

The explanation of operational production/performance of airport operating segment is presented in Aeronautics operational production/performance in analysis and management discussion chapter in this annual report.

2. Non-Airport Segment (Non Aeronautics)

The explanation of operational production/performance of non-airport operating segment is presented in Non-Aeronautics operational production/performance in analysis and management discussion chapter in this annual report.

STRATEGIC OBJECTIVES AND COMPANY PLANS

The Strategic Objectives of PT Angkasa Pura I (Persero) that will be achieved during 2014 – 2018 are:

- 1) Reaching CSI grade 4,60 (ACI Standard) in 2018.
- 2) Reaching operational income total Rp8,8 trillion in 2018.
- 3) Reaching income proportion in non-aeronautics segment as big as 57% in 2018.
- 4) Developing and implementing world class management system (especially human resource management, ICT, operation excellence, and service excellence) holistically before the end of 2018.
- 5) Implementing Green Corporation concept and CSR program effectively.
- 6) Being ready to become privatized company before the end of 2018.

To reach those strategic targets, PT Angkasa Pura I (Persero) establish company strategies by improving the service excellence to the stakeholders. The strategies are:

- 1) Excelling the practice of service excellence, operations excellence, system management and world class ICT.
- 2) Optimizing the cost effectiveness and cost efficiency.
- 3) Optimizing all the potential synergy both internally and externally.
- 4) Accelerating and enlarging value creating and strategic joint business.

AIRPORT PRODUCTION FACILITY

In the service production operational, PT Angkasa Pura I (Persero) has several production facilities, such as runways, apron, aviobridge, terminals, cargo, and parking areas in all airports managed by the company. Some of the production facilities are described as follows:

Tabel Data Alat Produksi Utama Tahun 2016 / Table of Main Production Facilities in 2016

Bandara Airports	Terminal / Terminal						
	Runway	Apron	Aviobridge	Internasional International	Domestik Domestic	VIP	Kargo Cargo
	MXM	Parking stand (M ²)	(unit)	Luas (M ²) dan Kapasitas (pax/ tahun) Area (M2) and Capacity (pax/year)	Luas (M ²) dan Kapasitas (pax/ tahun) Area (M2) and Capacity (pax/year)	Luas (M ²) dan Kapasitas (pax/ tahun) Area (M2) and Capacity (pax/year)	(Kg)
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (DPS)	3,000 x 45	62,509	30	Luas / Area: 121,785 Kapasitas / Capacity: 14,327,647 pax/ tahun	Luas / Area: 67,883 Kapasitas / Capacity 9,697,571 pax/tahun	Luas / Area: 4,404 Kapasitas / Capacity: -	56,753,681
Bandara Juanda Surabaya (SUB)	3,000 x 45	101,736	25	Luas / Area: 20,415 Kapasitas / Capacity: 3,500,000 pax/ tahun	Luas / Area: 24,678 Kapasitas / Capacity: 9,500,000 pax/tahun	-	94,208,504
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG)	2,500 x 45 3,100 x 45	103,317	6	Luas / Area: 3,815,32 Kapasitas / Capacity 564,620 pax/tahun	Luas / Area: 47,189,59 Kapasitas / Capacity 7,000,000 pax/tahun	Luas / Area: 3500 Kapasitas / Capacity: 250 pax/tahun	59,156,624
Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan (BPN)	2,500 x 45	103,755	11	Luas / Area: 3,800 Kapasitas / Capacity 99,023 pax/tahun	Luas / Area: 3,800 Kapasitas / Capacity 7,628,594 pax/tahun	-	43,201,416
Bandara Frans Kaisiepo Biak (BIK)	3,570 x 45	2,377,2	-	Luas / Area: 1,949,25 Kapasitas / Capacity -	Luas / Area: 1,431,9 Kapasitas / Capacity 150,000 pax/tahun	Luas / Area: 375 Kapasitas / Capacity 9500 pax/tahun	1,389,079
Bandara Sam Ratulangi Manado (MDC)	2,650 x 45	15,274	4	Luas / Area: 3,465,77 Kapasitas / Capacity 21,826 pax/tahun	Luas / Area: 13,358,23 Kapasitas / Capacity 961,407 pax/tahun	Luas / Area: 533 Kapasitas / Capacity -	13,828,518
Bandara Adisutjipto Yogyakarta (JOG)	2,200 x 45	22,144	-	Luas / Area: 3,465,77 Kapasitas / Capacity 463,010 pax/tahun	Luas / Area: 13,358,23 Kapasitas / Capacity 6,261,774 pax/tahun	Luas / Area: 533 Kapasitas / Capacity -	20,727,632
Bandara Adi Soemarmo (SOC)	2,600 x 45	29,000	3	Luas / Area: 3,517 Kapasitas / Capacity 124,398 pax/tahun	Luas / Area: 9,438 Kapasitas / Capacity 1,386,871 pax/tahun:	-	6,649,999
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (BDJ)	2,500 x 45	9,150	-	-	Luas / Area: 6,641 Kapasitas: 1,300,000 pax/tahun	-	23,116,448

Bandara Airports	Terminal / Terminal						
	Runway	Apron	Aviobridge	Internasional International	Domestik Domestic	VIP	Kargo Cargo
	MXM	Parking stand (M ²)	(unit)	Luas (M ²) dan Kapasitas (pax/ tahun) Area (M2) and Capacity (pax/year)	Luas (M ²) dan Kapasitas (pax/ tahun) Area (M2) and Capacity (pax/year)	Luas (M ²) dan Kapasitas (pax/ tahun) Area (M2) and Capacity (pax/year)	(Kg)
Bandara Ahmad Yani Semarang (SRG)	2,560 x 45	12,020	-	Luas / Area: 801 Kapasitas / Capacity 116,073 Pax/tahun	Luas / Area: 5,907 Kapasitas / Capacity 2,890,512 pax/tahun	Luas / Area: 458 Kapasitas / Capacity 40 pax/tahun	17,014,762
Bandara Lombok Praya (LOP)	2,750 x 45	38,803	2	Luas / Area: 8,501 Kapasitas / Capacity 54,138 pax/tahun	Luas / Area: 21,396 Kapasitas / Capacity 1,701,913 pax/tahun	-	12,870,703
Bandara Pattimura Ambon (AMQ)	2,500 x 45	12,320	2	Luas / Area: 1,200 Kapasitas: 100,000 pax/tahun	Luas / Area: 7,393 Kapasitas: 700,000 pax/tahun	Luas / Area: 670 Kapasitas: -	5,915,857
Bandara El Tari Kupang (KOE)	2,500 x 45	7,723	-	Luas / Area: 1,200 Kapasitas: 1,310,734 pax/tahun	Luas / Area: 7,393 Kapasitas / Capacity: 700,000 pax/tahun	Luas / Area: 670 Kapasitas / Capacity -	7,572,238

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS 2016

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran strategis tahun 2016, perusahaan perlu menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman serta mengoptimalkan peluang yang ada.

Untuk itu, perusahaan perlu menetapkan *Strategic Action* tahun 2016 sebagai acuan dalam penyusunan strategi, program atau inisiatif di setiap direktorat maupun unit kerja, antara lain:

1. Menjadi perusahaan berkinerja tinggi
2. Mencapai nilai perusahaan (*company value*) yang optimal
3. Menjadi *benchmark* bagi perusahaan lain di Indonesia

Untuk itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2016 (RKAP 2016), perusahaan menerapkan strategi dengan kebijakan sebagai berikut.

1. Program berorientasi pada sasaran
2. Δ Pendapatan > Δ Biaya
3. *Service Improvement and Revenue Enhancement*
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya perusahaan meliputi SDM, sistem dan organisasi serta fasilitas
5. Investasi secara selektif dan prudent yang diarahkan pada pemanfaatan dana jangka pendek secara optimal, peningkatan produktivitas kerja, efisiensi biaya dan citra perusahaan
6. Bandara yang masih rugi diarahkan untuk mengurangi kerugian:

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY 2016

In order to achieve its vision, mission, and strategic goals in 2016, the company has to use its authority to not only overcome weaknesses and threats but also optimize available opportunities.

Therefore, the company needs to determine Strategic Action 2016 as the reference in formulating the strategy, program, or initiative in every directory or working unit, such as:

1. Becoming a high performance company
2. Achieving optimal company value
3. Becoming a benchmark for other companies in Indonesia.

As a result, in the preparation of Corporate Budget Work Plan 2016 (CBWP 2016), the company implemented the strategy with the following policies:

1. The program is aim-oriented
2. Δ Income > Δ Cost
3. Service Improvement & Revenue Enhancement
4. Enhancing efficiency and effectivity company's resources, including human resources, system, organization, and facilities.
5. Selective and prudent investment which is aimed to optimally utilize short-term fund and to increase work productivity, cost efficiency as well as company's image.
6. The airports that experienced loss are directed to reduce the daily loss:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan Sertifikat Bandar Udara (Standar Pelayanan Minimum) b. Investasi sesuai Kebutuhan <p>7. Peningkatan peran anak perusahaan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan dan pendapatan non aero</p> <p>8. Penerapan kerjasama melalui <i>strategic partnership</i> dalam pengelolaan bandara di bidang investasi, komersial, <i>training and management</i> (antara lain: I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sepinggan Balikpapan, Sultan Hasanuddin Makassar, Sam Ratulangi Manado, Ahmad Yani Semarang, Syamsudin Noor Banjarmasin dan Bandara Internasional Lombok)</p> <p>9. Rencana pengambil alihan bandara yang dikelola Direktorat Perhubungan Udara dan Pemerintah Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Maintaining Airports Certification (Minimum Service Standard) b. Attempt to match investment with needs. <p>7. Increasing the role of branch companies in order to accelerate service quality improvement and non-aero income.</p> <p>8. Cooperating through strategic partnership of airports management in investment, commercial, training, and management fields (for example: I Gusti Ngurah Rai in Bali, Juanda in Surabaya, Sepinggan in Balikpapan, Sultan Hasanuddin in Makassar, Sam Ratulangi in Manado, Ahmad Yani in Semarang, Syamsudin Noor in Banjarmasin, and Lombok International Airport.</p> <p>9. Make a plan to take over the airports managed by Director General of Air Communication and Local Government.</p> |
|--|---|

ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero). Strategi pemasaran yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero).

STRATEGI PEMASARAN

Aktivitas pemasaran PT Angkasa Pura I (Persero) dikelola oleh Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha melalui beberapa kegiatan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Strategi pemasaran dibedakan untuk tiap-tiap aspek yaitu *product*, *price* dan *promotion*. Untuk meningkatkan kinerja produk dan berbagai jenis layanan yang disediakan oleh Perseroan di tahun 2016 agar dapat diketahui oleh masyarakat, dilakukan strategi pemasaran produk dan layanannya sebagai berikut.

PRODUCT

PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan Badan Usaha Bandar Udara yang mengelola 13 bandara di Indonesia bagian tengah dan timur. Salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia tengah dan cukup terkenal di kancah internasional adalah Bali. Di samping Bali, terdapat destinasi lain yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang menarik untuk didatangi oleh wisatawan mancanegara. Namun dalam perkembangannya, beberapa destinasi wisata di Indonesia Tengah dan Timur masih memerlukan pengembangan, terutama dalam hal infrastruktur penunjang pariwisata di daerah.

(Sumber: Republik.co.id, 2016)

Guna menyokong visi menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) bandara terbaik di Asia, Perseroan melakukan perencanaan sejumlah pengembangan di beberapa bandara diantaranya Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, pengoperasian terminal B pada Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan pembangunan pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani-Semarang. Adapun

MARKETING ASPECT

The explanation of marketing aspect includes marketing strategy and target market for the products and services provided by PT Angkasa Pura I (Persero). The successful marketing strategy will encourage improvement of the target market for the products and services provided by PT Angkasa Pura I (Persero).

MARKETING STRATEGY

The marketing activities of PT Angkasa Pura I (Persero) is managed by Commercial and Business Development Division through several activities, both nationally and internationally. The marketing strategy is differentiated for every aspect, which are the product, price and promotion. In order to increase the products and other services' performance provided by the company in 2016, so society will acknowledge them, the marketing strategies of the products and services had been conducted as follows:

PRODUCT

PT. Angkasa Pura I (Persero) is an Airport Business Entity that manages 13 airports in the center and east parts of Indonesia. One of the tourism destinations in the center part of Indonesia which is quite well-known in International scene is Bali. Besides, there are other destinations that have natural and cultural capital which are interesting to visit by foreign tourists. However, in the development, some of tourism destinations in the center and east part of Indonesia need to be developed, especially for their supporting infrastructures.

(Source: Republik.co.id, 2016)

To support the vision of becoming Top 10 best airports in Asia, the Company has planned several developments at several airports i.e. Syamsudin Noor International Port of Banjarmasin, the operation of terminal B at Adisutjipto International Airport of Yogyakarta and development of Ahmad Yani International Airport of Semarang. Terminal B at Adisutjipto International Airport of Yogyakarta will be

terminal B Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dioperasikan sembari menunggu realisasi pembangunan bandara baru New Yogyakarta Internasional Airport di Kulonprogo.

PROMOTION

Di dalam 3A's *Tourism*, terdapat 3 komponen utama bisnis yang mendukung keberlangsungan dalam industri travel dan wisata yang meliputi *Attraction*, *Ammenities* dan *Accessibilites*. Dalam bidang *accessibilites*, bandara sebagai pintu gerbang destinasi di suatu daerah memegang peranan penting dalam hal mengkomunikasikan peluang bisnis dan usaha serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang berperan dalam industri travel dan wisata. Menyadari kondisi tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) berinisiatif untuk melakukan kegiatan *Collaborative Destination Development*, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mengajak partisipasi dari para pemangku kepentingan yang berperan dalam industri travel dan wisata, agar gairah mengembangkan destinasi wisata di daerah dapat meningkat dan kordinasi antar pemangku kepentingan dapat terjalin dengan baik.

Strategi pemasaran yang dijalankan oleh perseroaan dilakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, yakni diantaranya sebagai berikut:

EVENT NASIONAL

- a. *Collaborative Destination Development*
Collaborative Destination Development (CDD) merupakan kegiatan yang dilakukan Perseroan dengan mengangkat tema keunggulan serta potensi terkait pariwisata dan bisnis. Acara ini dilaksanakan bersama-sama dengan para *stakeholders* atau pemangku kepentingan dengan tujuan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, *airlines* dan *stakeholders* pariwisata untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan bisnis yang nantinya secara langsung dapat memberikan dampak pada pendapatan Perseroan. Acara CDD ini dikemas dengan konsep FGD (*Forum Group Discussion*).
- b. *Gathering* bersama regulator dan Mitra Kerja
Perseroan secara aktif dan periodik melakukan *gathering* dengan pihak pemerintah, *airlines* dan mitra usaha dan mitra kerja untuk dapat menyamakan visi dan misi serta menyalurkan program yang dituju oleh Perseroan.
- c. Melakukan *joint marketing* dengan pihak *airlines*, pemerintah provinsi dan daerah serta *stakeholder* pelaku bisnis pariwisata.

Pada tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyelenggarakan kegiatan *Collaborative Destination Development* di beberapa kota di Indonesia, yaitu di Kota Semarang, Ambon, Kupang, Manado, dan Banjarmasin.

soon operated while waiting for the construction of the New Yogyakarta International Airport in Kulonprogo.

PROMOTION

In the 3A's of *Tourism*, there are three main business components that support the continuity of travel and tourism industries which are *Attraction*, *Amenities*, and *Accessibilities*. In the accessibility point, airports as the main gate to the destination in an area, has important role in communicating any business opportunity and coordinating with the authorities who has played their role in travel and tourism industry. Realizing this condition, PT Angkasa Pura I (Persero) initiated the *Collaborative Destination Development*, an event aims to invite the participations of the travel and tourism industry, thus the enthusiasm to develop local tourism destination will increase and the coordination between the authorities can work well.

The marketing strategies conducted by the company had been implemented well both national and international are explained as follows:

NATIONAL EVENTS

- a. *Collaborative Destination Development*
CDD is an activity held by the company which its theme promotes the special quality and potential related to tourism and business. This event is conducted together with the stakeholders or the authorities in order to build cooperation with the Local Governments, Airlines, and tourism stakeholders. This event is expected to increase the tourism and business growth which in the future can have direct positive impact toward the Company's revenue. The CDD event was held using FGD (*Forum Group Discussion*) concept.
- b. *Gathering* with the regulators and work partners.
The company actively and regularly holds a gathering with the government, airlines, business partners and work partners in order to coordinate the vision and mission as well as the programs intended by the company.
- c. Conducting *joint marketing* with the airlines, provincial and local governments, and the stakeholders, as the tourism businessmen.

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) had conducted *Collaborative Destination Developments* events in several cities in Indonesia; those are in Semarang, Ambon, Kupang, Manado, and Banjarmasin.

**Tabel Kegiatan Collaborative Destination Development di Tahun 2016 /
The table of Collaborative Destination Development Activity in 2016**

No.	Tanggal Date	Kota City	Tema Theme
1.	17 Januari 2016	Kupang	<i>Regional Business and Leisure at East Nusa Tenggara</i>
	24 Januari 2016, 13 Februari 2016, dan 19 Maret 2016	Lombok, Kupang, dan Manado	<i>Airport Running Series 2015-2016</i>
9.	12-26 Mei 2016 (Audisi), 30-2 Juni 2016 (Pembekalan), dan 3 Juni 2016 (Inagurasi)	13 Cabang Bandara PT Angkasa Pura I (Persero)	Program Duta Bandara / Program Duta Bandara
3.	20 Juli 2016	Ambon	<i>Natural and Heritage Tourism Destination at Moluccas</i>
4.	19-20 Agustus 2016	Probolinggo	Pesta Merdeka di Puncak Jazz Raya / Pesta Merdeka di Puncak Jazz Raya
5.	30 Juli 2016, 10 September 2016, dan 22 Oktober 2016	Banyuwangi	<i>Ijen Summer Jazz</i>
6.	12-20 November 2016	Nusa Dua	<i>Bring the World To Bali</i>
7.	24 November 2016	Manado	<i>Sinergy Stakeholder for 1 Million Foreign Tourist Arrival To North Sulawesi</i>
8.	7 Desember 2016	Semarang	<i>Religious, Nature and Heritage Tourism Destination at Central Java</i>
9.	14 Desember 2016	Banjarmasin	<i>Draws Closer Religious Tourism at Jewel of Borneo</i>

EVENT INTERNASIONAL

Pada tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) berkesempatan untuk hadir dalam kegiatan Asia Routes di Manila, Filipina dan World Routes di Chengdu China. World Routes dan Asia Routes merupakan *event* internasional yang diselenggarakan oleh UBM Internasional, dimana dalam kegiatan tersebut merupakan forum pertemuan untuk membahas tentang peluang pengembangan rute baik di tingkat regional Asia maupun di tingkat internasional. Dalam kegiatan forum Routes tersebut, dihadirkan para senior *decision maker* dan para *stakeholder* yang berperan dalam industri transportasi udara, yang meliputi Bandara, Penerbangan dan Pemerintah. Dalam kegiatan Asia dan *World Routes* ini, PT Angkasa Pura I (Persero) bertemu dengan beberapa *airlines* internasional yang beroperasi di Asia maupun Internasional, untuk mempromosikan bandara-bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sekaligus memperkenalkan dan memberikan peluang pengembangan rute ke beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia tengah dan timur.

Di samping kegiatan Asia Routes dan World Routes, pada tahun 2016 PT. Angkasa Pura I (Persero) juga berkesempatan hadir dalam kegiatan Cargo Fact Asia 2016, yaitu sebuah forum bertaraf internasional yang menghadirkan para pelaku bisnis di bidang kargo udara untuk membahas tren, *key issue* serta peluang dari industri kargo terutama kargo udara yang berada di lingkup Asia. Kegiatan Cargo Fact Asia dikemas dalam bentuk Seminar dengan pembicara-pembicara yang ahli dalam bidang Kargo.

INTERNATIONAL EVENTS

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) got the opportunity to attend the Asia Routes event in Manila, Philippine and the World Routes in Chengdu, China. The World Routes and Asia Routes are international events held by UBM International. These events are meeting forum to discuss the opportunity to expand the routes in both Asia and International. The decision maker experts and the stakeholders who contribute in air transportation industry which includes Airport, Airlines and Authorities/ Government, were invited and presented during these events. PT Angkasa Pura I (Persero) met several international airlines, operating on both Asia and International, in order to promote the airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero) and introduce and offer route expansion opportunities to several tourism destination in the center and east Indonesia.

Besides the Asia Routes and the World Routes, in 2016 PT. Angkasa Pura I (Persero) had got the chance to attend the Cargo Fact Asia 2016. It is an international forum who invited the businessmen in air cargo to discuss about the trend, key issues, and opportunities of air cargo industry in Asia. The Cargo Fact Asia was conducted in a Seminar form, and the speakers are the experts in cargo.

**Tabel Kegiatan Internasional yang diikuti oleh PT Angkasa Pura I (Persero) /
The Table of International Events attended by PT Angkasa Pura I (Persero)**

No.	Tanggal Date	Venue Venue	Kegiatan Activity
1.	6 Maret 2016	SMX Convention Centre, Manila	<i>Routes Asia 2016</i>
2.	19-20 April 2016	Hongkong	<i>Cargo Fact 2016</i>
3.	24-27 September 2016	Chengdu, China	<i>World Routes 2016</i>

PRICE

Bisnis penerbangan (*airlines*) merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi, hal ini dikarenakan dalam bisnis *airlines* sangat sensitif terhadap dinamika perekonomian di tingkat nasional maupun internasional. Risiko tersebut bertambah, ketika *airlines* sedang melakukan pembukaan rute baru menuju salah satu destinasi baru. Sebagai salah satu mitra utama dalam bisnis bandara, PT Angkasa Pura I (Persero) menyadari bahwa perusahaan perlu memberikan sebuah insentif yang diberikan kepada *airlines* sebagai dukungan kepada *airlines* yang melakukan pembukaan rute baru. Dengan adanya insentif tersebut, diharapkan dapat mengembangkan konektivitas udara dari dan ke bandara PT Angkasa Pura I (Persero). Adapun insentif rute baru yang diberikan kepada Airlines dalam bentuk potongan harga (*discount*) dari total biaya Pelayanan Jasa Pendaratan untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri selama 6 (enam) bulan sebesar 100% untuk Bandara Pattimura Ambon, Bandara Frans Kaisiepo Biak, dan Bandara El Tari Kupang sedangkan potongan harga (*discount*) sebesar 50% untuk:

1. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
2. Bandara Juanda Surabaya
3. Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan
4. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
5. Bandara Adisutjipto Yogyakarta
6. Bandara Adi Soemarmo Surakarta
7. Bandara Lombok Praya
8. Bandara Sam Ratulangi Manado
9. Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
10. Bandara Ahmad Yani Semarang

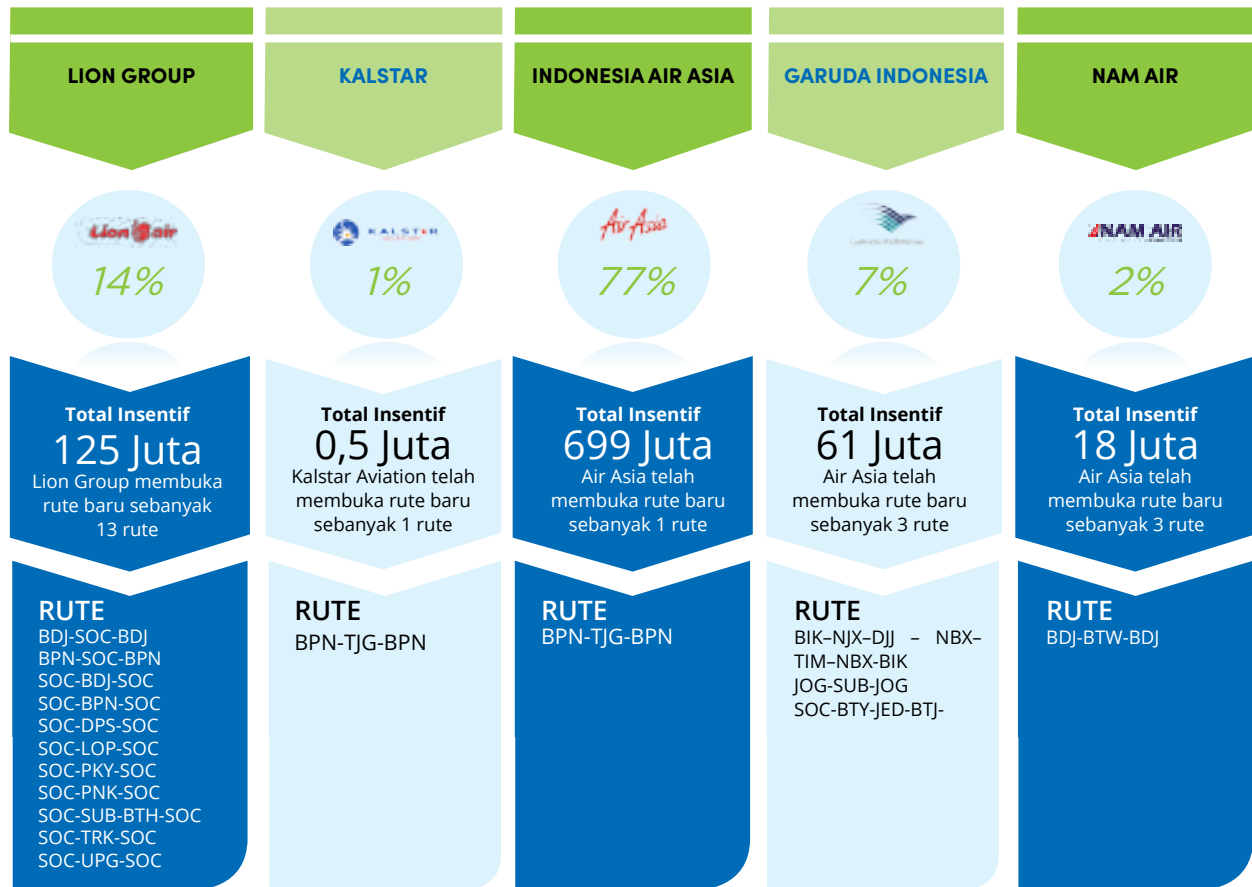
Pada tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan insentif kepada *Airlines* yang membuka rute baru sebesar Rp905.348.369,-. Detail terkait dengan pemberian insentif rute baru adalah sebagai berikut:

PRICE

Aviation business is a high-risk business as this business is so sensitive toward economic dynamics both nationally and internationally. The risk is increasing when the airline is expanding a new route to a new destination. As one of the main partners in airport business, PT. Angkasa Pura I (Persero) realizes that the company has to contribute an incentive for the airline to show the company's support toward the airline which expands the new route. By providing the incentive, it is expected to develop air connectivity both from and to the airports of PT. Angkasa Pura I (Persero). The new route incentive for the airlines can be given in the form of discount for the total of Landing Service Fee in domestic flight and international flight for 6 (six) months. 100% discount was given to the Pattimura Ambon Airports, Frans Kaisiepo Biak Airports, and El Tari Kupang Airports, while 50% discount was given to the:

1. I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali
2. Juanda Airport, Surabaya
3. SAMS Sepinggan Airport, Balikpapan
4. Sultan Hasanuddin Airport, Makassar
5. Adisutjipto Airport, Yogyakarta
6. Adi Soemarmo Airport, Surakarta
7. Lombok Airport, Praya
8. Sam Ratulangi Airport, Manado
9. Syamsudin Noor Airport, Banjarmasin
10. Ahmad Yani Airport, Semarang

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) presented incentives amounting Rp905,348,369,- to the Airlines opening new flight routes. The incentives are detailed as follows.



Selain 5 (lima) *Airlines* di atas, PT Angkasa Pura I (Persero) juga telah memberikan insentif kepada Batik Air dan Wings Air yang membuka rute baru di tahun 2016. Batik Air membuka rute baru BDG-CGK-BDJ dengan pemberian insentif sebesar Rp1.688.733. Di sisi lain, Wings Air telah membuka rute yaitu rute BDJ-BTW-BDJ dengan pemberian insentif sebesar Rp2.856.508.

Penentuan harga merupakan salah satu aspek yang penting di dalam pemasaran, mengingat bahwa harga merupakan refleksi hasil (*return*) yang diterima perusahaan atas layanan yang telah diberikan kepada pelanggannya. Dalam implementasinya, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2014, bahwa penetapan tarif atas layanan jasa kebandarudaraan yang meliputi PJP4U, PJP2U, *Aviobridge*, *Counter*, serta PJKP2U perlu mendapatkan rekomendasi dahulu dari Menteri Perhubungan Indonesia. Adapun di tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan penyesuaian tarif atas layanan penumpang dan kargo di beberapa Bandara yang dioperasikan. Penyesuaian tarif PJP2U yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan bagian dari upaya dari perusahaan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus meningkatkan fasilitas penumpang di bandara.

Besides those 5 (five) *Airlines*, PT Angkasa Pura I (Persero) had also provided incentive to Batik Air and Wings Air that opened new routes in 2016. Batik Air expanded new route of BDG-CGK-BDJ and got incentive of Rp 1,688,733. On the other hand, Wings Air had expanded new route of BDJ-BTW-BDJ and got incentive of Rp 2,856,508.

Determining the price is one of the important aspects in marketing, moreover price is the reflection of return earned by the company for its service to the customers. In line with the Minister of Transportation regulation Number PM. 46 of 2014 regarding to the fare setting for the airport services which includes PJP4U, PJP2U, *Aviobridge*, *Counter*, and PJKP2U, the implementation of fare determination needs to get prior recommendation from the Indonesian Minister of Transportation. In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) had implemented fare adjustment for the customer and cargo services in several airports. The PJP2U fare adjustment conducted by PT Angkasa Pura I (Persero) was a part of its attempt to enhance the service and increase the passengers facilities in the airports.

Tabel Penyesuaian tarif di tahun 2016 / The table of fare Adjustment in 2016

No.	Effective Date	Bandara	Tarif Baru New Fare	
			Domestik Domestic	Internasional International
Tarif PJP2U				
1.	1 November 2016 / 1 November 2016	Juanda - Surabaya	Rp90,000,-	Rp210,000,-
2.	1 November 2016 / 1 November 2016	Adi Soemarmo – Solo	Rp50,000,-	Rp125,000,-
3.	1 Oktober 2016 / 1 Oktober 2016	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan	Rp100,000,-	Rp225,000,-

PANGSA PASAR

Pengelolaan kebandarudaraan di Indonesia ditentukan melalui penunjukkan berdasarkan wilayah operasional, yang diatur melalui PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987. Berdasarkan PP tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero), diberi tugas untuk mengelola bandar udara di bagian tengah dan timur Indonesia sedangkan PT Angkasa Pura II (Persero) diberi tugas untuk mengelola bandar udara yang berada di wilayah barat Indonesia. Sedangkan, untuk bandara-bandara yang tidak dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) maupun PT Angkasa Pura II (Persero) berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan.

Dunia penerbangan modern ini menjadi sangat penting ketika masyarakat lebih mengutamakan efektivitas dalam beraktivitas, namun mengesampingkan soal status biaya yang akan mereka keluarkan untuk menggunakan jasa penerbangan dalam aktivitas mereka. Kenyamanan dan singkatnya waktu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia menggunakan moda transportasi udara saat ini. Melihat kondisi jaman yang semakin berkembang, serta kemajuan teknologi nampak opsi menggunakan transportasi udara menjadi sangat ideal.

Daya tarik industri kebandarudaraan di Indonesia dinilai masih cukup tinggi, hal ini dikarenakan terbatasnya perusahaan yang mengelola bandara di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengelola bandara di Indonesia, maka PT Angkasa Pura I (Persero) akan memiliki persaingan secara tidak langsung dengan pihak swasta yang akan menjadi rekan Pemerintah dalam mengelola bandara dan perusahaan perlu mengantisipasi persaingan yang segera muncul di masa yang akan datang akibat deregulasi yang diterapkan oleh Pemerintah.

Berikut merupakan *positioning* PT Angkasa Pura I (Persero) jika dilihat dari proporsi pendapatan yang terbagi berdasar kelompok *region* (wilayah), *airport size* (ukuran bandara), *ownership model* (model kepemilikan), dan *selected economic groupings* (pengelompokan ekonomi).

TARGET MARKET

The airports management in Indonesia is determined by appointment based on the operational region, which is regulated by Government Regulation No. 25 of 1987 Dated on 19 May 1987. Based on that Government Regulation, PT Angkasa Pura I (Persero) was assigned a responsibility to manage the airports in the center and east parts of Indonesia, while PT Angkasa Pura II (Persero) was assigned to manage the airports in the west part of Indonesia. Meanwhile, the airports which are managed by neither PT Angkasa Pura I (Persero) nor Angkasa Pura II are under the management of the Technical Implementation Unit of Minister of Transportation.

Modern air transportation has become so important since effectiveness becomes a priority, yet cost is ignored. Comfort and time are two main concerns for Indonesian people in using air transport nowadays. For this developing situation and technological advances, air transport is an ideal choice.

The attractiveness of the airport industry in Indonesia, is still considered high enough because the limited number of companies managing the airports in all around Indonesia. However, as the enactment of Law No. 1 of 2009 about Flights which provides an opportunity for the private sector to manage the airports in Indonesia, so PT Angkasa Pura I (Persero) will have indirect competition with the private sectors that will be the government's partner in managing the airports. Therefore, Angkasa Pura needs to anticipate the future competition as the result from the deregulation defined by the government.

The following table shows the positioning PT Angkasa Pura I (Persero) seen from the revenue proportion which is divided based on the region, airport size, ownership model, and selected economic groupings.

**Distribusi Pendapatan (% dari total Pendapatan Bandara) /
Revenue Distribution (% from the total of airports revenue)**

	Pendapatan Aeronautika	Pendapatan Non-aeronautika	Pendapatan Non-operasional	
Wilayah	Africa	69.5%	26.8%	3.7%
	Asia-Pacific	49.9%	48.2%	1.9%
	Europe	59.0%	38.4%	2.6%
	Latin America-Caribbean	59.4%	38.2%	2.4%
	Middle East	50.4%	48.1%	1.5%
	North America	54.4%	35.7%	9.9%
	World	55.5%	40.4%	4.1%
	PT Angkasa Pura I (Persero)	59.7%	40.3%	2.3%
Ukuran Bandara (Penumpang)	<1m	53.5%	26.7%	19.8%
	1-5m	57.7%	32.9%	9.4%
	5-15m	57.4%	35.7%	6.9%
	15-25m	55.3%	40.8%	3.9%
	25-40m	57.9%	40.3%	1.8%
	>40m	51.3%	45.6%	3.1%
	PT Angkasa Pura I (Persero)	59.7%	40.3%	2.3%
Model Kepemilikan	Public ownership (100%)	52.4%	41.9%	5.7%
	Public-private partnership (PPP)	62.1%	35.7%	2.2%
	Private ownership (100%)	58.0%	39.2%	2.7%
	PT Angkasa Pura I (Persero)	59.7%	40.3%	2.3%
Prospek Pasar Terpilih	Negara Maju	54.3%	41.0%	4.7%
	Major advanced economies (G7)	55.0%	38.7%	6.3%
	Euro area	59.4%	37.8%	2.8%
	European Union	59.4%	37.8%	2.8%
	Negara Ekonomi Berkembang	58.8%	38.9%	2.3%
	Emerging and developing Asia	58.9%	39.4%	1.7%
	ASEAN-5 ³	62.5%	35.3%	2.3%
	Sub-Saharan Africa	72.6%	25.9%	1.5%
	Pasar Modal			
	BRICS ⁴	57.9%	40.6%	1.5%
	Next 11 ⁵	51.3%	46.2%	2.6%
	MINT ⁶	59.2%	38.6%	2.2%
	Emerging aviation markets	56.9%	41.3%	1.8%
	Major exporters of manufactured goods	54.6%	40.6%	4.8%
PT Angkasa Pura I (Persero)	59.7%	40.3%	2.3%	

Sumber:

¹ 2015 ACI Airport Economics Report & Key Performance Indicator

² Aeronautical revenue includes ground handling charges

³ Non-aeronautical revenue includes ground handling concessions revenue

⁴ ASEAN-5 (5 countries) (IMF) - Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam.

⁵ BRICS (5 countries) - Brazil, China (People's Republic of China), India, Russian Federation, South Africa.

⁶ Next 11 (11 countries) (Goldman Sachs) - Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran (Islamic Republic of Iran), Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, Korea (Rep of Korea), Turkey, Vietnam.

⁷ MINT (4 countries) (Fidelity Investments) - Indonesia, Mexico, Nigeria, Turkey.

Berdasar tabel di atas, dilihat dari proporsi pendapatannya posisi PT Angkasa Pura I (Persero) ada pada sebaran pendapatan sebesar 59.7% untuk pendapatan Aeronautika, sebesar 40.3% untuk pendapatan Non Aeronautika dan 2.3% untuk pendapatan Non Operasi.

Based on the table above, as seen from the revenue proportion, the PT Angkasa Pura I (Persero) position in the revenue distribution was 59.7% for the Aeronautics revenue, 40.3% for the Non-Aeronautics revenue, and 2.3 % for the Non Operational revenue.

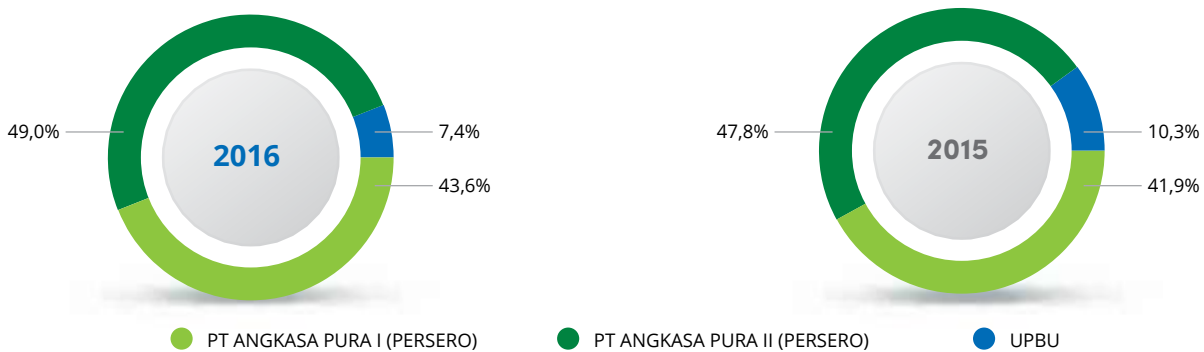
Komposisi penumpang angkutan udara dan lalu lintas pesawat di Indonesia berdasarkan pengelola bandar udara tergambar melalui diagram di bawah ini.

The compositions of air transportation passengers and the air traffic in Indonesia based on the airport manager are illustrated in the diagrams below .

Tabel Pangsa Pasar / The table of Target Market

Keterangan	2016	2015	Pertumbuhan
Berdasarkan Pegerakan Penumpang	43.6%	41.9%	1.7%
Berdasarkan Lalu Lintas Pesawat	42.6%	41.3%	1.3%

Pangsa Pasar Tahun 2016 Berdasarkan Pergerakan Penumpang
Target Market in 2016 Based on the passenger movement



Pada 2016, pangsa pasar PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan total penumpang angkutan udara mencapai sebesar 43,6% lebih tinggi 1,7% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 41,9%. PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola bandara di wilayah barat Indonesia yang memperoleh pangsa pasar sebesar 49,0%, lebih tinggi 1,2% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 47,8%. Di sisi lain, Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Perhubungan (UPT) yang sekarang disebut dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) memiliki pangsa pasar sebesar 7,4%, menurun sebesar 2,9% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 10,3%.

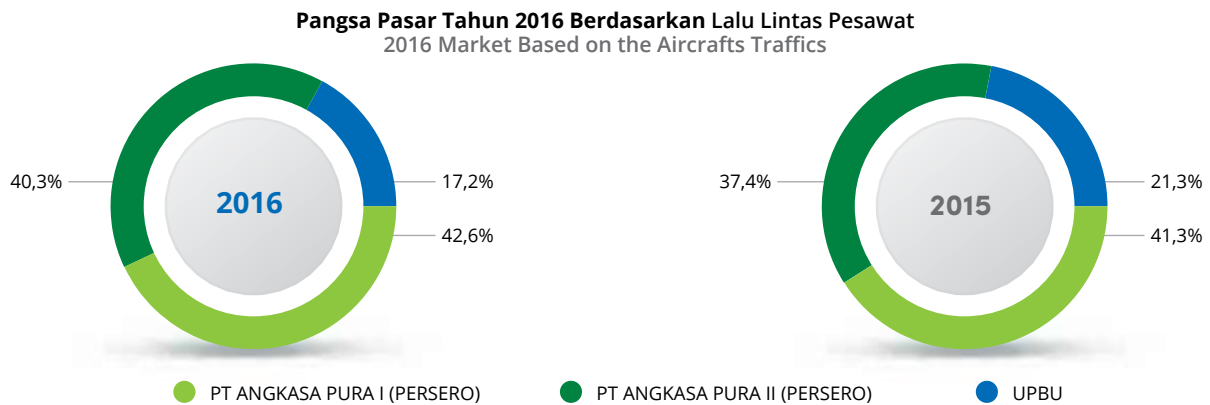
In 2016, the market share of PT Angkasa Pura I (Persero) based on total flight passengers is at 43.6%, 1.7% higher than 2015 at 41.9%. PT Angkasa Pura II (Persero), that manages airports in western Indonesian area covers the market share of 49.0%, 1.2% higher than 2015 at 47.8%. On the other side, Technical Implementation of Ministry of Transportation, now Airport Operator Unit, has the market share of 7.4%, declining 2.9% from 2015 at 10.3%.

Sumber: Statistik Lalu Lintas Udara 2015-2016, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).

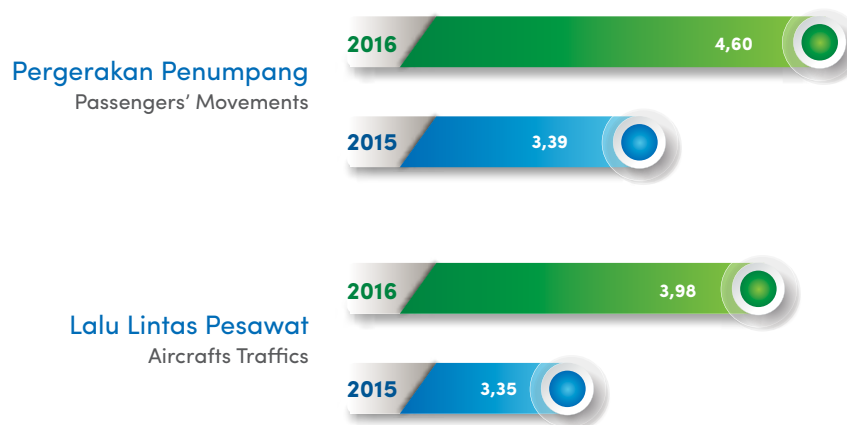
Source: 2015-2016 Air Traffic Statistics, PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero).

Jika dilihat berdasarkan lalu lintas pesawat, ditahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki pangsa pasar sebesar 42,6% lebih tinggi 1,3% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 41,3%. Dan untuk pangsa pasar PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar 40,3% lebih tinggi 2,9% bila dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 37,4%. Di sisi lain, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) memiliki pangsa pasar sebesar 17,2% di tahun 2016, menurun sebesar 4,2% dibandingkan 2015 yang sebesar 21,3%. Rincian terkait pangsa pasar berdasarkan lalu lintas pesawat dapat dilihat pada diagram berikut.

Based on the plane traffic, the 2016 market share of PT Angkasa Pura I (Persero) is at 42.6%, 1.3% higher than 2015 at 41.3%. In the same year, PT Angkasa Pura II (Persero) covers the market share of 40.3%, 2.9% higher than 2015 at 37.4%. On the other side, the Airport Operator Unit has the market share of 17.2%, decreasing 4.2% from 2015 at 21.3%. The following diagram exposes the market share details based on the plane traffic.



Grafik Pangsa Pasar



Selanjutnya untuk mencapai visi PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandara terbaik di Asia, maka PT Angkasa Pura I (Persero) perlu melakukan transformasi model bisnis untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang optimal dengan nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI) dari 3,92 di 2014 menjadi 4,60 di 2018 dan meningkatkan pendapatan non aeronautika dari 43% di 2014 menjadi 57% di 2018. Target tersebut sesuai dengan pencapaian rata-rata bandara terbaik di Asia.

Selama tahun 2016, rata-rata skor CSI yang berhasil dicapai PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar 3,98, atau tumbuh sebesar 0,13 poin atau 3,3% dibandingkan dengan tahun 2015 dengan rata-rata skor CSI 3,85. Pengukuran ini telah dilakukan di 13 (tiga belas) Bandara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan detail tanggal pelaksanaan *survey* dan nilai skor sebagai berikut:

1. Bandara Pattimura Ambon (AMQ) (16-19 Februari 2016) dengan skor sebesar 3,93
2. Bandara Juanda Surabaya (SUB) (16-19 Februari 2016) dengan skor sebesar 4,01
3. Bandara Adi Soemarmo Solo (SOC) (23-26 Februari 2016) dengan skor sebesar 3,86

In order to achieve its mission as one of the best ten finest airport organizer company in Asia, PT Angkasa Pura I (Persero) needs to transform the business model to achieve an optimal Customer Satisfaction Index level (CSI). This level can be reached by improving the CSI from 3.92 in 2014 to 4.60 in 2018 and increasing non aeronautics revenue form 43% in 2014 to 57% in 2018. Those targets are in accordance with the average accomplishment of the best airports in Asia.

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) attained average CSI score of 3.98, 0.13 point or 3.3% higher compared to what they had achieved in 2015 with the average CSI score of 3.85. This detailed assessment, including the survey date and score, was done in 13 (thirteen) PT Angkasa Pura I (Persero), as listed in the following details:

1. Pattimura Airport in Ambon (AMQ) (February 16-19, 2016) scored 3.93
2. Juanda Airport in Surabaya (SUB) (February 16-19, 2016) scored 4.01
3. Adi Soemarmo Airport in Solo (SOC) (February 23-26, 2016) scored 3.86

4. Bandara Lombok Praya (LOP) (23-26 Februari 2016) dengan skor sebesar 3,73
5. Bandara Sam Ratulangi Manado (MDC) (01-04 Maret 2016) dengan skor sebesar 4,19
6. Bandara Adisutjipto Yogyakarta (JOG) (15-19 Maret 2016) dengan skor sebesar 3,64
7. Bandara Frans Kaisiepo Biak (BIK) (29 Maret - 01 April 2016) dengan skor sebesar 3,79
8. Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (BDJ) (05-08 April 2016) dengan skor sebesar 4,1
9. Bandara El Tari Kupang (KOE) (12-15 April 2016) dengan skor sebesar 3,87
10. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (BPN) (19-22 April 2016) dengan skor sebesar 4,07
11. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (DPS) (26-29 April 2016) dengan skor sebesar 4,26
12. Bandara Ahmad Yani Semarang (SRG) (10-13 Mei 2016) dengan skor sebesar 4,08
13. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) (17-20 Mei 2016) dengan skor sebesar 4,12

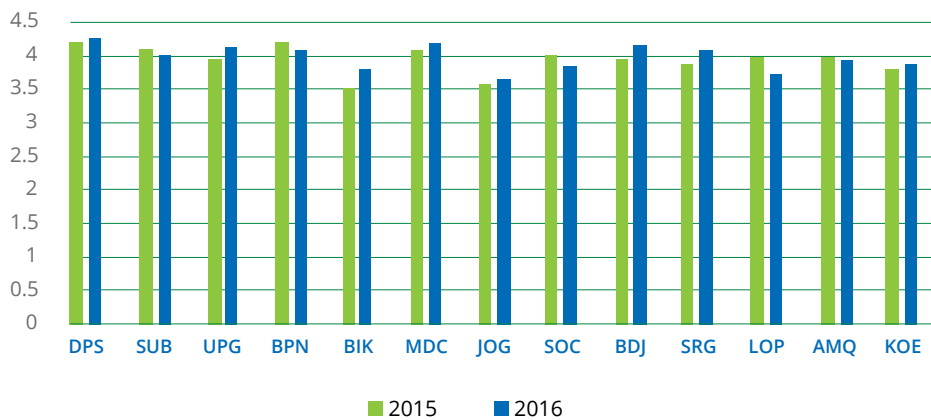
Sumber: Hasil Survei Customer Satisfaction Index (CSI) INACA di PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2016.

4. Lombok Praya Airport in Lombok (LOP) (February 23-26, 2016) scored 3.73
5. Sam Ratulangi Airport in Manado (MDC) (March 01-04, 2016) scored 4.19
6. Adisutjipto Airport in Yogyakarta (JOG) (March 15-19, 2016) scored 3.64
7. Frans Kaisiepo Airport in Biak (BIK) (March 29 - April 2016) scored 3.79
8. Syamsudin Noor Airport in Banjarmasin (BDJ) (April 15-08, 2016) scored 4.1
9. El Tari Airport in Kupang (KOE) (April 12-15, 2015) scored 3.87
10. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport in Sepinggan, Balikpapan (BPN) (April 19-22, 2016) scored 4.07
11. I Gusti Ngurah Rai Airport in Bali (DPS) (April 26-29, 2016) scored 4.26
12. Ahmad Yani Airport in Semarang (SRG) (May 10-14, 2016) scored 4.08
13. Sultan Hasanuddin Airport in Makassar (UPG) (May 17-20, 2016) scored 4.12

Source: PT Angkasa Pura I (Persero) Customer Satisfaction Index (CSI) Survey conducted by INACA in 2016

Hasil Customer Satisfaction Index Tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero)

The PT Angkasa Pura I (Persero) Customer Satisfaction Index Result in 2016



INTERPRETASI CSI / CSI INTERPRETATION

4,20 – 5,00 = SANGAT PUAS / VERY SATISFIED

3,40 – 4,19 = PUAS / SATISFIED

2,60 – 3,39 = CUKUP / NEUTRAL

1,80 – 2,59 = TIDAK PUAS / DISSATISFIED

1,00 – 1,79 = SANGAT TIDAK PUAS / VERY DISSATISFIED

BANDAR UDARA Airport	DPS	SUB	UPG	BPN	BIK	MDC	JOG	SOC	BDJ	SRG	LOP	AMQ	KOE	RERATA Average
CSI 2012	-	-	-	3.59	3.13	4.21	3.53	3.47	3.35	4.01	3.96	3.93	3.65	3.68
CSI 2013	3.85	3.95	3.78	3.52	3.62	3.84	3.67	3.58	3.93	4.04	3.97	3.78	3.68	3.79
CSI 2014	4.20	4.11	3.96	4.21	3.71	3.98	3.44	3.87	3.93	3.83	3.99	3.95	3.70	3.92
CSI 2015*	4.20	4.11	3.96	4.21	3.51	4.08	3.56	4.00	3.95	3.88	3.99	3.98	3.81	3.85
CSI 2016 (TERKINI)	4.26	4.01	4.12	4.07	3.79	4.19	3.64	3.86	4.15	4.08	3.73	3.93	3.87	3.98

* Diagram Batang DPS, SUB, UPG, BPN, LOP Menggunakan data Tahun 2014 dan 2016 / * Bar Chart of DPS, SUB, UPG, BPN, LOP by the Data of 2014 and 2016

Peningkatan CSI dari tahun ke tahun ini menunjukkan konsistensi PT Angkasa Pura I (Persero) untuk terus melakukan usaha-usaha peningkatan pelayanan yang berarti untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan agar mampu mencapai skor yang telah ditargetkan sebesar 4,60 di tahun 2018. Dalam pengusahaan bisnis di bandar udara, *services* merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus bagi PT Angkasa Pura I (Persero), karena *services* merupakan salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya pendapatan.

The increasing number of CSI from year to year indicates that PT Angkasa Pura I (Persero) is consistent to keep improving the services and continually improving customer satisfaction. Therefore, the targeted score of 4.60 can be achieved in 2018. In the airport business, Angkasa Pura has given a special attention to services for it is one of the factor that foster the increase of the revenue.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ACI *Airport Service Quality* (ASQ) tentang penyediaan layanan pelanggan terkait hubungan antara variabel kepuasan pelanggan terhadap pertumbuhan pendapatan Non Aeronautika, menunjukkan bahwa:

Based on the research that has been conducted by ACI *Airport Service Quality* (ASQ) about preparing customer services, there are relations between customer satisfaction variable to the increase of Non Aeronautics revenue. The relations are:

- Kenaikan 1% jumlah penumpang akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Non Aeronautika sebesar 0,7% hingga 1%
- Kenaikan 1% luas area komersial akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Non Aeronautika sebesar 0,2%
- Kenaikan 1% kepuasan pelanggan (secara rata-rata) akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Non Aeronautika sebesar 1,5%

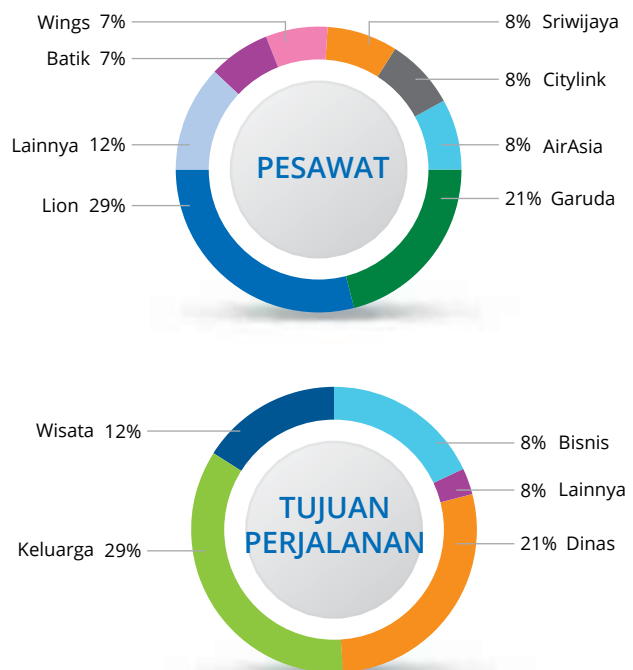
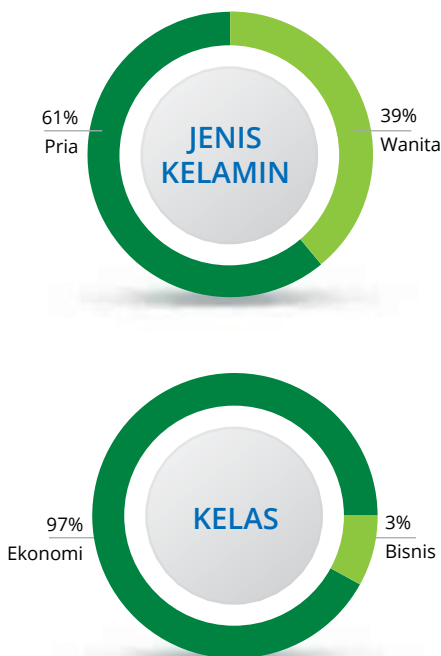
- The 1% increase of total passenger will affect the growth of Non Aeronautics revenue about 0.7% to 1 %
- The 1% increase of commercial area will affect the growth of Non Aeronautics revenue about 0.2%
- The 1% increase of customer satisfaction (in average) will affect the growth of Non Aeronautics revenue about 1.5%

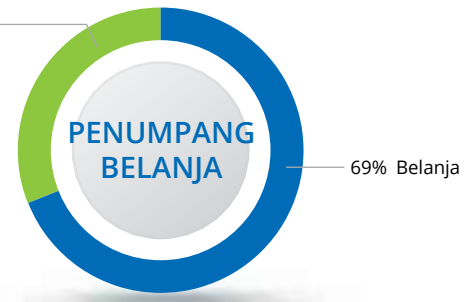
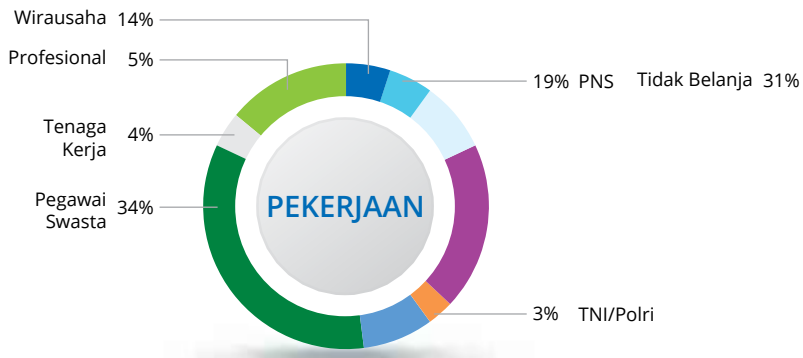
Sumber: ACI ASQ Research Report (2016): Does Passenger Satisfaction Increase Airport Non Aeronautical Revenue

Source: ACI ASQ Research Report (2016): Does Passenger Satisfaction Increase Airport Non Aeronautical Revenue

Profil dan Demografi Pelanggan

Customer Profile and Demography



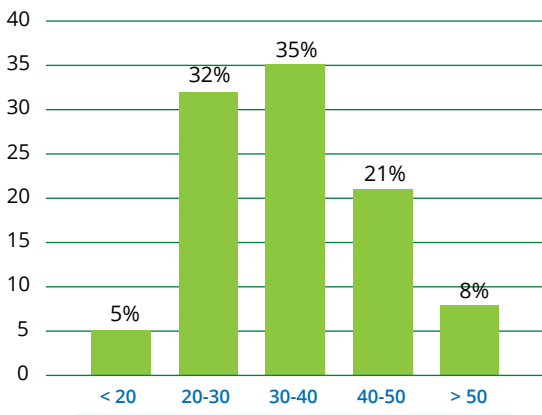


Sumber: Hasil Survei *Customer Satisfaction Index* (CSI) INACA di PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2016

Source: PT Angkasa Pura I (Persero) *Customer Satisfaction Index* (CSI) Survey conducted by INACA in 2016

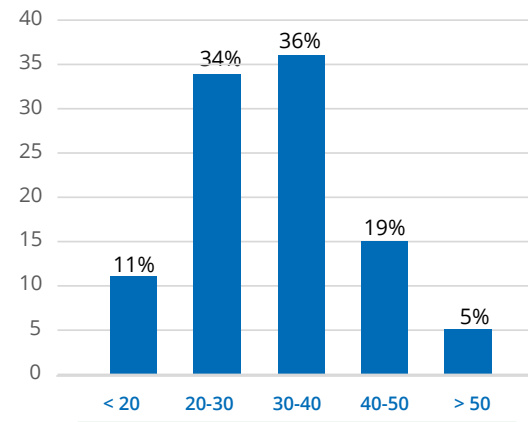
Usia (tahun)

Age (Year)



Penghasilan (juta)

Income (Million)



Jika dilihat dari presentase pengguna maskapai, segmentasi pangsa pasar pelanggan PT Angkasa Pura I (Persero) didominasi oleh penumpang Lion (29%) dan Garuda (21%) yang merupakan penumpang kelas ekonomi (91%), dengan proporsi penumpang pria sebanyak 61% dan wanita sebanyak 39%. Adapun tujuan perjalanan sebanyak 35% untuk keperluan keluarga dan 28% untuk perjalanan dinas.

The percentage of the company customer shows that the market segmentation PT Angkasa Pura I (Persero) was dominated by economy class customers of Lion's (29%) and Garuda (21%). The proportion of the customers were male (61%) and female (39%). Then, the purpose of travelling were divided into three purposes, which were: 35% for family matters and 28% for official duty.

Rata-rata usia penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara berada di kisaran usia 30-40 tahun (35%) dengan rata-rata jumlah penghasilan sekitar 5-10 juta rupiah (36%), yang didominasi oleh penumpang yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 34%, PNS 19% dan wiraswasta 14%, sehingga sebanyak 69% penumpang PT Angkasa Pura I (Persero) yang melakukan kegiatan belanja di bandara.

The average age of the passenger who were travelling by aircrafts were between 30-40 years (35%). Their average salary were 5-10 million rupiah and dominated by private employee with the number of 34%, civil servant 19% and entrepreneur 14%. This condition generated 69% passenger of PT Angkasa Pura I (Persero) spent their time to shop in the airport.

Informasi profil dan demografi pelanggan (penumpang) menjadi penting untuk diketahui karena merupakan pengguna utama bandar udara. Pemahaman yang baik terhadap profil dan perilaku penumpang akan membantu PT Angkasa Pura I (Persero) dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan yang lebih efektif pada segmen yang dilayani, sehingga dapat mendorong tumbuhnya pendapatan.

The information about passenger profile and demography are important to be identified since they are the main customer of the airport. A good understanding toward the passenger profile and attitude will help PT Angkasa Pura I (Persero) to improve their services in the designated segmented to be more effective, which result in the growth of the revenue.

TINJAUAN SEGMENT OPERASI

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyajikan segmen operasi berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai "Segmen Operasi". Informasi segmen usaha yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional difokuskan pada aktivitas bisnis Perseroan yang diklasifikasikan berdasarkan kategori jenis usaha perusahaan yang dibedakan dalam kelompok usaha utama dan diluar kelompok usaha utama.

PENJELASAN DAN KINERJA OPERASIONAL SEGMENT OPERASI

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, segmen operasi Perseroan adalah Aeronautika (Kebandaraan) dan Non Aeronautika (Non Bandara). Penjelasan dan kinerja operasional tiap-tiap segmen disajikan sebagai berikut.

AERONAUTIKA (KEBANDARAAN)

Segmen usaha aeronautika meliputi penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara, serta penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos. Pada 2016, seluruh pelayanan jasa Aeronautika yang meliputi Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara (PJP2U), *extend and advance*, pemakaian aviobridge, pemakaian *counter*, *Baggage Handling System* mengalami pertumbuhan.

Tabel Kinerja Pelayanan Jasa Aeronautika / Aeronautics Service Performance Table

Uraian / Description	Satuan	2016	2015	Pertumbuhan / Development	
1	2	3	4	5=3-4	6=(3-4)/4
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) / Aircraft Landing, Parking, and Hangar Services (PJP4U)	Ton	27,956,662	25,572,858	2,383,804	9.32%
Domestik / Domestic	Ton	22,356,656	20,306,738	2,049,918	10.09%
Internasional / International	Ton	5,600,006	5,266,120	333,886	6.34%
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) / Aircraft Passenger Services (PJP2U)	Pax	38,021,607	33,016,975	5,004,632	15.16%
Domestik / Domestic	Pax	31,309,941	27,271,899	4,038,042	14.81%
Internasional / International	Pax	6,711,666	5,745,076	966,590	16.82%
<i>Extend and Advance</i>	Hr	20,766	28,389	(7,623)	(26.85%)
Domestik / Domestic	Hr	19,560	27,778	(8,218)	(29.58%)
Internasional / International	Hr	1,206	611	595	97.38%
Pemakaian Aviobridge	Ton	28,055,433	26,445,957	1,609,476	6.09%

OPERATING SEGMENT PREVIEW

PT Angkasa Pura I (Persero) has presented operating segment based on PSAK 5 (2009 revision). The business segment information that had been reported to the operational decision maker was focused on the business activity of the company, which was classified based on the type of the company business. The classification was divided into the main business group and outside the main business group.

THE EXPLANATION AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF OPERATING SEGMENT

Each operating segment of production performance in the airport segment has been known as Aeronautics and Non Aeronautics segment. The explanation of each segment is described as follows.

AERONAUTICS

Aeronautics business segment covers supply, facility development for aircraft landing, departing, parking, and hangar services, including the development of the airport terminals for transportation, cargo and post services. In 2016, all of Aeronautics services that covered Aircraft Landing, Parking, and Hangar Services (PJP4U), Aircraft Passenger Services (PJP2U), extended and advanced, use of aviobridge, counter usage and baggage handling system were growth.

Uraian / Description	Satuan	2016	2015	Pertumbuhan / Development	
1	2	3	4	5=3-4	6=(3-4)/4
Domestik / Domestic	Ton	19,591,543	18,459,482	1,132,061	6.13%
Internasional / International	Ton	8,463,890	7,986,475	477,415	5.98%
Pemakaian Counter	Pax	38,069,196	37,555,129	514,067	1.37%
Domestik / Domestic	Pax	31,433,195	31,903,449	(470,254)	(1.47%)
Internasional / International	Pax	6,636,001	5,651,680	984,321	17.42%
Baggage Handling System	Pax	7,409,001	7,088,941	320,060	4.51%
Domestik / Domestic	Pax	2,200,277	2,755,232	(554,955)	(20.14%)
Internasional / International	Pax	5,208,724	4,333,709	875,015	20.19%

PELAYANAN JASA PENDARATAN, PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN PESAWAT UDARA (PJP4U)

Produksi PJP4U pada 2016 mencapai 27.956.662 ton, mengalami pertumbuhan 2.383.804 ton atau sebesar 9,32% dari 2015 yang mencapai 25.572.858 ton. Baik produksi domestik maupun produksi internasional mengalami pertumbuhan yang meningkat. Produksi PJP4U domestik mengalami peningkatan sebesar 2.049.918 ton atau 10,09%. Peningkatan ini berkorelasi dengan realisasi pertumbuhan trafik pesawat domestik di tahun 2016 dan penambahan/pembukaan rute baru oleh *airline* di beberapa cabang selama tahun 2016 sehingga berdampak pada peningkatan produksi di beberapa bandara diantaranya di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Juanda – Surabaya.

Sedangkan produksi PJP4U internasional mengalami peningkatan sebesar 333.886 ton atau 6,34% dari 5.266.120 ton di 2015 menjadi 5.600.006 ton di 2016. Pertumbuhan tersebut berkorelasi dengan realisasi pertumbuhan trafik pesawat internasional di tahun 2016 dan pelaksanaan program *Collaborative Destination Development* (CDD) bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan *airline* di beberapa cabang selama tahun 2016 sehingga berdampak pada peningkatan produksi di bandara Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali, Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar, dan Bandara Adisucipto – Yogyakarta.

PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)

Produksi PJP2U mengalami peningkatan sebesar 5.004.632 pax atau sebesar 15,16%, dari 33.016.975 pax di 2015 menjadi 38.021.607 pax di 2016. Produksi PJP2U domestik mengalami peningkatan sebesar 4.038.042 pax atau 14,81% dari 27.271.899 pax menjadi 31.309.941 pax di 2016. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan produksi PJP4U. Di sisi lain, peningkatan ini khususnya disebabkan oleh penambahan rute baru dan perubahan tipe pesawat dari *narrow body* ke *wide body* dan *Collaborative Destination Development* sehingga berdampak pada peningkatan produksi di beberapa bandara yaitu Bandara Juanda – Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar, dan Bandara Pattimura – Ambon.

AIRCRAFT LANDING, PARKING, AND HANGAR SERVICES (PJP4U)

In 2016, PJP4U production reached 27,956,662 tons, which was 2,383,804 tons more or 9.32% of 2015 production that had reached 25,572,858 tons. Both of domestic and international production increased significantly. The domestic PJP4U production increased by 2,049,918 tons or 10.09%. This increase correlated to the growth realization of domestic airlines traffic and adding/opening of new routes by airlines in several branches in 2016. Thus, this condition increased the production of several airports, some of them were I Gusti Ngurah Rai Airport and Juanda Airport – Surabaya.

On the other hand, the international PJP4U production reached 5,600,006 tons, which increased in the amount of 333,886 tons or 6.34% of 5,266,120 tons in 2015. This increase correlated to the growth realization international airlines traffic in 2016 and the implementation of Collaborative Destination Development (CDD) program that cooperated with the Regional Government and airline in some braches in 2016. Therefore, this condition increased the production of I Gusti Ngurah Rai Airport – Bali, Sultan Hasanuddin Airport – Makassar and Adisucipto Airport – Yogyakarta.

AIRCRAFT PASSENGER SERVICES (PJP2U)

The PJP2U production increased by 5,004,632 pax or 15.16%, from 33,016,975 pax in 2015 to 38,021,607 pax in 2016. The domestic PJP2U production increased in the amount of 4,038,042 pax or 14.81% from 27,271,899 pax to 31,309,941 pax in 2016. It was in line with the increase of PJP4U production. On the other hand, this increase was specifically caused by the adding of the new routes, shifting of narrow body aircraft into wide body aircraft and CDD which lead into the increase of several airport production, such as Juanda Airport – Surabaya, Sultan Hassanudin – Makassar and Pattimura Airport – Ambon.

Di sisi lain, produksi PJP2U Internasional mengalami peningkatan sebesar 966.590 pax atau 16,82% dari 5.745.076 pax menjadi 6.711.666 pax di 2016. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan produksi PJP4U. Di sisi lain, peningkatan ini khususnya disebabkan oleh penambahan/pembukaan rute baru di bandara Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali, Bandara Sam Ratulangi – Manado, dan Bandara Lombok.

EXTEND AND ADVANCE

Setiap Perusahaan Angkutan Udara atau Operator Pesawat Udara yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu jam operasi Bandar Udara dikenakan biaya tambahan atas jasa penggunaan Bandar Udara di luar Jam operasi. Permohonan perpanjangan waktu jam operasi (*extend/advance*) harus diajukan secara tertulis kepada General Manager dengan tembusan *Airport Duty Manager* Bandar Udara yang bersangkutan. Pengajuan oleh Perusahaan Angkutan Udara atau *airlines* 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam operasi bandara yang bersangkutan.

Perpanjangan waktu jam operasi (*extend and advance*) mengalami penurunan sebesar 7.623 jam atau sebesar 26,85% dari 28.389 jam di 2015 menjadi 20.766 jam di 2016. Penurunan ini diakibatkan oleh perpanjangan waktu jam operasi domestik yang menurun sebesar 8.218 jam atau 29,58% dari 27.778 jam menjadi 19.560 jam di 2016. Di sisi lain, perpanjangan waktu jam operasi internasional mengalami peningkatan sebesar 595 jam atau 97,38% dari 611 jam menjadi 1.206 jam di 2016.

PEMAKAIAN AVIOBRIDGE

Pemakaian *aviobridge* mencapai 28.055.433 ton, mengalami peningkatan 1.609.476 ton atau sebesar 6,09% dibandingkan 2015 yang mencapai 26.445.957 ton. Pemakaian *aviobridge* domestik maupun internasional mengalami peningkatan masing-masing sebesar 6,13% dan 5,98%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pemakaian *aviobridge* sehingga mempengaruhi produksi *aviobridge*.

PEMAKAIAN COUNTER

Pemakaian *counter* mengalami peningkatan 514.067 pax atau sebesar 1,37% dari 37.555.129 pax di 2015 menjadi 38.069.196 pax di 2016. Pemakaian *counter* domestik mengalami penurunan sebesar 470.254 pax atau 1,47%. Sedangkan, pemakaian *counter* Internasional mengalami peningkatan sebesar 984.321 pax atau 17,42%. Peningkatan ini sejalan dengan angka pemakaian *counter* tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi PJP2U luar negeri.

BAGGAGE HANDLING SYSTEM

Fasilitas *Baggage Handling System (BHS)* adalah suatu sistem *conveyor* yang digunakan untuk mengangkut bagasi penumpang setelah proses pemeriksaan dan *check-in* bagi

In addition, the international PJP2U production increased by 966,590 pax or 16.82%, from 5,745,076 pax to 6.711.666 pax in 2016. It was in line with the increase of PJP4U production. On the other hand, this increase was specifically caused by the adding/opening of the new routes in I Gusti Ngurah Rai Airport – Bali, Sam Ratulangi Airport – Manado and Lombok International airport.

EXTENDED AND ADVANCED

Every Air Freight Company or Aircraft Operator that requests operational hour extension of the airport is charged with additional charges for the usage of the airport outside the operational hour. The extended/advanced operational hour request must be written and submitted to the General Manager with a copy to Airport Duty Manager who is in charge on the airport. The air freight or airlines should submit the request 2 (two) hours before the operational hours of the airport over.

The extended and advanced operational hours decreased by 7,623 hours or 26.85%, from 28,389 hours in 2015 to 20,766 hours in 2016. This situation was caused by the decreasing of domestic extended and advanced operational hours in the amount of 8,218 hours or 29.58%, from 27,778 hours to 19,560 hours in 2016. Besides, the international extended and advanced operational hours increased by 595 hours or 97.38%, from 611 hours to 1,206 hours in 2016.

USE OF AVIOBRIDGE

The use of *aviobridge* reached 28,055,433 tons, increased in the amount of 1,609,476 tons or 6.09% higher compared to 2015 that reached 26,445,957 tons. Both of domestic and international use of *aviobridge* increased by 6.13% and 5.98%. This condition was caused by the increasing of *aviobridge* used that affected *aviobridge* production.

COUNTER USAGE

The counter usage increased by 514,067 pax or 1.37% from 37,555,129 pax in 2015 to 38,069,196 pax in 2016. The domestic counter usage decreased in the amount of 470,254 pax or 1.47%. On the other hand, the international counter usage increased by 984,321 pax or 17.42%. This increase was in line with the increase of international PJP2U production.

BAGGAGE HANDLING SYSTEM

Baggage Handling System (BHS) facility is a conveyor system that is used to carry passengers' baggage after the inspection process and passenger departure check-in and vice versa,

penumpang keberangkatan, begitu juga sebaliknya bagi penumpang kedatangan dibawa ke area pengambilan bagasi (*baggage claim*). Fasilitas BHS tersebut terintegrasi langsung dengan *Hold Baggage Screening* yaitu suatu sistem pemeriksaan bagasi dengan mesin *x-ray* sehingga secara otomatis dapat mengetahui status keamanan bagasi untuk disalurkan sesuai hasil pemeriksaan, pemilahan/sortir dan tujuan bagasi untuk diangkut ke pesawat udara bagi penumpang keberangkatan.

Pemakaian *baggage handling system* mencapai 7.409.001 ton, mengalami peningkatan 320.060 ton atau 4,51% dibandingkan 2015 yang mencapai 7.088.941 ton. Pemakaian *baggage handling system* domestik mengalami penurunan sebesar 554.955 ton atau 20,14% yang disebabkan karena adanya elemen jasa *Baggage Handling System* yang dimasukkan (*include*) di dalam penyesuaian tarif PJP2U di beberapa bandara. Sedangkan pemakaian *baggage handling system* internasional mengalami peningkatan sebesar 875.015 ton atau 20,19%.

NON AERONAUTIKA (NON BANDARA)

Segmen usaha non aeronautika meliputi beberapa usaha, yaitu penyediaan lahan untuk pembangunan, lapangan dan kawasan industri, serta gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara; penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan; penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan.

Pada 2016, pelayanan jasa non aeronautika tersebut menunjukkan kinerja yang bervariasi. Produksi Non Aeronautika secara umum mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan tumbuhnya jumlah penumpang di tahun 2016 sehingga berdampak pada peningkatan omzet penjualan *tenant*, serta adanya penyesuaian minimal omzet bruto di tahun 2016. Adapun realisasi produksi non aeronautika tahun 2015 seperti tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel Produksi Non Aeronautika / Non-aeronautics Production Table

Uraian Description	Satuan Unit	2016	2015	Pertumbuhan Development	
		3	4	5=3-4	6=(3-4)/4
Sewa / Rent	M2xBulan	12,191,641	6,225,618	5,966,023	95.83%
Sewa Ruang / Room Lease	M2xBulan	1,501,454	1,333,762	167,692	12.57%
Sewa Tanah / Land Lease	M2xBulan	8,870,982	4,874,190	3,996,792	82.00%
Sewa Tempat / Place Lease	M2xBulan	244,082	5,284	238,798	4519.27%
Sewa Tempat Antena / Antenna Area Lease	M2xBulan	24,531	9,056	15,475	170.88%
Sewa Cold Storage / Cold Storage Lease	M2xBulan	0	0	0	0
Sewa Gedung / Building Lease	M2xBulan	0	3,327	(3,327)	(100.00%)
Penyerahan Penggunaan Tanah / Land Use Handover	M2xBulan	1,550,592	0	1,550,592	0

when the arriving passengers are directed to the baggage claim area. This facility is integrated with the Hold Baggage Screening, which is a baggage screening system that is equipped with x-ray machine to automatically detect the baggage security status and distribute them based on the inspection result, screen/sort the baggage in accordance to their destination and carry them to the passengers aircraft that are going to depart.

The baggage handling system usage reached 7,409,001 tons, increased by 320,060 tons or 4.51% higher compared to its usage in 2015 that reached 7,088,941 tons. The domestic baggage handling system decreased by 554,955 tons or 20.14%. It was caused by the PJP2U rate adjustment that affected a couple of baggage handling system service elements in several airports. On the other hand, the international baggage handling system increased in the amount of 875,015 tons or/and 20.19%.

NON AERONAUTICS

Non-aeronautics business segment covers some businesses areas, they are the land provision to build field and industrial area, also buildings which are related to the efficiency of air freight; provision of business and electronic facilities development, navigation, electricity, water and waste disposal installation; provision of consultation service, education and training which are related to airport and any other business which may support the company goals,

In 2016, this non-aeronautics service showed varied performance. Generally, the non-aeronautics production increased, in line with the growth of passenger numbers in 2016. This condition impacted on the increase in tenants' sales turnover and the adjustment of minimal gross turnover in 2016. The non-aeronautics product realization in 2015 is described in the following table.

Uraian Description	Satuan Unit	2016	2015	Pertumbuhan Development	
1	2	3	4	5=3-4	6=(3-4)/4
Penyerahan Penggunaan Bangunan / Building Use Handover	M2xBulan	0	0	0	0
Konsensi / Concession	Rp/000	7,125,459,900	5,821,685,310	1,303,774,590	22.40%
Parkir Mobil / Car Parking	Lembar	25,970,943	22,669,408	3,301,535	14.56%
Parkir Motor / Motorcycle Parking	Lembar	9,540,777	7,322,029	2,218,748	30.30%
Peron dan Waving Gallery / Platform and Waving Gallery	Lembar	770,185,000	255,266	301618,60%	301,618.60%
Pas Bandara / Airport Pass	Lembar	88,404	147,035	(39,88%)	(39.88%)
Pemakaian Listrik / Electricity Consumption	Kwh	41,971,642	29,151,481	12,820,161	43.98%
Pemakaian Air / Water Consumption	M3	387,203	264,063	123,140	46.63%
Pemakaian Telepon / Phone Use	PwtxBln	20,432	16,511	3,921	23.75%
Internet Services	Kilobyte	861	445,466	(444,605)	(99.81%)
Sewa Tempat Reklame / Billboard Location Area	M2xBulan	36,816	58,240	(21,424)	(36.79%)
Event and Promotion	EA	2,193	1,265	928	73.36%
Lounge	Pax	690,106	716,962	(26,856)	(3.75%)
Maintenance and Service Fee	EA	44,718	4,146	40,572	978.58%
Warehousing	Kg	82,372,947	64,600,511	17,772,436	27.51%
Jasa Gudang Cargo Out Domestik / Domestic Warehouse Cargo Out Domestic Service	Kg	18,911,768	3,806,585	15,105,183	396.82%
Jasa Gudang Cargo Out Internasional / International Warehouse Cargo Out Service	Kg	30,645,005	32,068,151	(1,423,146)	(4.44%)
Jasa Gudang Cargo Inc Domestik / International Inc Warehouse Cargo Service	Kg	18,658,359	7,293,550	11,364,809	155.82%
Jasa Gudang Cargo Inc Internasional / International Inc Cargo Warehouse Service	Kg	14,157,815	21,432,225	(7,274,410)	(33.94%)

SEWA-SEWA

Secara umum, jasa/layanan berupa sewa-sewa mengalami peningkatan 5.966.023 m² atau sebesar 95,83% dari 6.225.618 m² di 2015 menjadi 12.191.641 m² di 2016. Peningkatan ini berasal dari sewa tanah yang sebesar 3.996.792 m² atau 82,00%.

Peningkatan sewa tanah ini disebabkan oleh adanya pembayaran sewa tanah dari Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 dari Kantor Cabang bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali, bandara Sultan Hasanuddin - Makassar, Bandara SAMS - Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi - Manado, Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin, Bandara El

LEASES

In general, services in term of leases increased as much 5,966,023m² or 95.83% of 6,225,618m² in 2015 into 12,191,641m² in 2016. This increasing is gained from 3,996,792m² or 82.00% land lease.

The increasing land lease was caused by the payment of land lease from AirNav Indonesia (LPPNI) since 2013 to 2015. This increasing land lease with total of 21,2 m² was earned from the branch offices of I Gusti Ngurah Rai Airport-Bali, Sultan Hasanuddin Airport-Makassar, SAMS Airport-Balikpapan, Sam Ratulangi Airport-Manado, Syamsudin Noor Airport-Banjarmasin, Eltari Airport-Kupang and Franskaisiepo

tari - Kupang, Bandara Franskaijebo - Biak sebesar Rp21,2 m² dan juga karena adanya pembayaran sewa tanah tahun 2015 di bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali yakni PT Aerofood Indonesia, PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Angkasa Pura Support.

KONSESI

Konsesi adalah jasa yang diberikan atas hak penggunaan fasilitas Bandar Udara kepada pihak ketiga terkait kegiatan usaha yang dilakukan di Bandar Udara. Konsesi ini dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha di Bandar Udara seperti usaha *Food and Beverage, Retail, Services* dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), *Regulated Agent (RA), Ground Handling, dan In-flight Catering*.

Realisasi produksi konsesi selama 2016 tercatat sebesar Rp7,13 miliar, meningkat sebesar 22,40% atau Rp1,30 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,82 miliar. Peningkatan ini berasal dari Bandara Adisutjipto, Bandara Internasional Lombok, dan Bandara Adi Soemarmo. Peningkatan konsesi pada Bandara Adisutjipto disebabkan oleh beberapa konsesi, seperti konsesi *service Catering*, karena terdapat peningkatan produksi *inflight catering* dengan PT Aerofood Indonesia, dengan adanya penambahan *extra flight*. Selain itu, konsesi *service* dan *line maintenance* karena adanya kenaikan MOB serta penyesuaian MGRS/pax terdapat tagihan konsesi *line maintenance* dari Garuda Indonesia *Maintenance Facility* yang sebelumnya tidak dianggarkan. Sedangkan peningkatan Bandara Lombok dan Bandara Adi Soemarmo disebabkan oleh adanya kenaikan MOB serta penyesuaian MGRS/pax.

PARKIR, PERON DAN WAVING GALLERY, PAS BANDARA DAN SEWA TEMPAT REKLAME

Selama 2016, jasa/layanan parkir, sewa tempat reklame serta peron dan *waving gallery*, menunjukkan kinerja yang bervariasi dengan penjelasan sebagai berikut.

PARKIR MOBIL DAN MOTOR

Jasa/layanan parkir kendaraan baik mobil dan motor mengalami pertumbuhan yang berbeda. Jasa/layanan parkir mobil mengalami peningkatan sebesar 14,56%, sedangkan parkir motor mengalami peningkatan sebesar 30,30%. Peningkatan ini disebabkan oleh hal ini berkorelasi dengan peningkatan jumlah penumpang.

PERON DAN WAVING GALLERY

Pemakaian peron dan *waving gallery* mengalami peningkatan sebesar 301.618,60%. Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya pengguna jasa *waving gallery*.

Airport-Biak. In addition, the lease was also earned from the land lease payment in 2015 from I Gusti Ngurah Rai Airport-Bali, they are PT Aerofood Indonesia, PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Angkasa Pura Support.

CONCESSION

The definition of concession is a service given based on the right of Airport facility use to the third party with regard to business activities which is conducted in an airport. Concession is imposed to any companies in airport, such as Food and Beverage, Retail, Services and Aircraft Flight Expedition Business License (EMPU), Regulated Agent (RA), Ground Handling, and In-flight Catering.

In the realization of production concession throughout 2016, it is noted that the amount of it reached Rp7.13 Billion, in which it increased in the amount of 22.40% or Rp1.30 Billion compared with the previous year, Rp5.82 Billion. This increase was obtained from Adisutjipto Airport, Lombok International Airport and Adi Sumarmo Airport. The increasing concession of Adisutjipto Airport was caused by several concessions, such as catering service concession, since there was an increasing inflight catering production with PT. Aerofood Indonesia which was caused by extra flight. Besides that, service concession and Line Maintenance was caused by the increasing MOB and the adjustment for MGRS/pax that includes line maintenance line concession invoice from Garuda Indonesia Maintenance Facility which were not included in the budget before. Furthermore, the increasing of Lombok International Airport and Adi Soemarmo Airport were caused by the increasing MOB and the adjustment of MGRS/pax.

PARKING, PLATFORM AND WAVING GALLERY, AND BILLBOARD LOCATION LEASE

In 2016, the parking service, billboard location lease and platform and waving gallery revealed in Adisutjipto Airport, the increasing MOB as much as 4-8% in Lombok International Airport, turnover realization was above the MOB in Adi Sumarmo Airport along with the adjustment of MGRS/pax. The decreased working performance will be discussed in the following explanation.

CARS AND MOTORCYCLES PARKING

The growth of cars and motorcycles parking service was different. The car parking service increased in the amount of 14.56%, while the motorcycle parking service increased as much as 30.30%. This increasing number was caused by this condition with the correlation of increasing number of passengers.

PLATFORM AND WAVING GALLERY

The use of platform and waving gallery decreased in the amount of 301618.60%. This condition was caused by the increasing users of waving gallery service.

PAS BANDARA

Pas bandara mengalami penurunan sebesar 39,88%. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan mitra usaha sebagai dampak penerapan PM.129 yang berakibat berkurangnya permintaan Pas Karyawan mitra usaha.

SEWA TEMPAT REKLAME

Selama tahun 2016, sewa tempat reklame mengalami penurunan sebesar 36,79%. Hal ini disebabkan oleh tidak terealisasinya penjualan titik reklame di beberapa Bandara yaitu Bandara Ahmad Yani, Bandara Lombok, dan Bandara Adisutjipto.

Penurunan produksi sewa tempat reklame pada Ahmad Yani disebabkan oleh tidak tercapainya 12.791 m²xBln dari RKAP tahun 2016 dikarenakan terdapat kekosongan pada titik reklame *outdoor* karena mitra usaha tidak memperpanjang kontrak reklame *outdoor*. Hal tersebut yang disebabkan karena harga reklame *outdoor* (daerah parkir) di bandara jauh lebih tinggi daripada harga reklame *outdoor* pada jalur akses masuk bandara yang dikelola oleh pihak lain, karena jalur akses masuk bandara bukan merupakan kewenangan pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero).

Pada Bandara Lombok, penurunan sewa tempat reklame pada tidak tercapai 1.298 m²xBln dari RKAP tahun 2016 dikarenakan mundurnya mitra usaha CV Anugerah Media Abadi.

Di sisi lain, penurunan sewa tempat reklame pada Bandara Bandara Adi Sutjipto tidak tercapai 872 m²xBln dari RKAP tahun 2016 dikarenakan disebabkan oleh tidak terealisasi MPI dan dan PT. Gagas Adhi Kreasi dan kurangnya minat calon mitra untuk sewa reklame dengan masa jasa 6 bulan.

PEMAKAIAN SARANA NON AERONAUTIKA LAINNYA

Pemakaian sarana non aeronautika lainnya pada PT Angkasa Pura (Persero) berupa pemakaian telepon, listrik, air, dan *internet service*. Sarana-sarana tersebut menunjukkan kinerja yang bervariasi dengan kecenderungan mengalami penurunan yang dijelaskan sebagai berikut.

LISTRIK

Selama tahun 2016, pemakaian listrik PT Angkasa Pura (Persero) mengalami peningkatan sebesar 43,98% atau sebesar 12.820.161Kwh. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Pembayaran Listrik:

- PT. Aerofood Indonesia masa Juli sampai dengan Desember 2015.
- PT. LPPNPI masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2015.
- PT. But Emirate masa Juli 2015 sampai dengan Desember 2015.

AIRPORT PASS

Airport PASS decreased in the amount of 39.88%. This decreasing number was caused by this matter with the correlation of the increasing passenger numbers.

BILLBOARD LOCATION LEASE

Throughout 2016, the lease of billboard location decreased in the amount of 36.79%. This condition was caused by the unsold billboard location points in some airports, they are Ahmad Yani Airport, Lombok Airport and Adisutjipto Airport.

The decreasing production of billboard location lease in Ahmad Yani was caused by the unreached target of 12,791 m²xMonth from Company's Budget Plan (RKAP) in 2016. This condition happened because of the vacant outdoor billboard points in which the partner clients did not extend the outdoor billboard contract. The reason of not extending the contract was because the price of outdoor billboard (parking area) of the airport was much higher than the price of outdoor billboard in the airport's entrance access, which were managed by other parties. The access point of airport entrance was not a part of PT. Angkasa Pura I (Persero) authority.

In Lombok Airport, the decreasing billboard location lease revenue was shown from the unreached target, 1,298 m²xMonth from Company's Budget Plan, because of the withdrawal of a business partner, CV.Anugerah Media Abadi.

On the other hand, the decrease of billboard location lease in Adi Sutjipto Airport caused the unreached target of 872 m²xMonth from Company's Budget Plan in 2016. This situation was caused by the MPI and PT. Gagas Adhi Kreasi that cannot be accomplished, and the less interest of potential partners to lease the billboard for 6 months period.

THE USE OF OTHER NON AERONAUTICA MEANS

The section will give explanation of non-service means use. Those means shows the performance and its variation with the tendency of decline experiences as it will be explained later. Other aeronautics in PT Angkasa Pura I (Persero) is the use of telephone, electricity, water and internet.

ELECTRICITY

In 2016, the use of electricity in PT Angkasa Pura I (Persero) increased in the amount of 43,98% or 12,820,161Kwh. This increase was caused by the electricity payment of:

- PT. Aerofood Indonesia in the period of July to December 2015.
- PT. LPPNPI in the period of January 2014 to December 2015.
- PT. But Emirate in the period of July 2015 to December 2015.

AIR

Pemakaian air mengalami peningkatan sebesar 46,63% atau sebesar 123.140 m³. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak dari peningkatan pendapatan Sewa Ruang.

TELEPON

Pemakaian telepon mengalami peningkatan sebesar 23,75% atau 3.921 *line*. Penurunan tersebut dikarenakan mundurnya *layout* lantai 2 bandara Sultan Hasanuddin berkorelasi terhadap 51 *line* telepon yang sudah di anggarkan tahun 2016.

INTERNET SERVICE

Pemakaian *internet service* merupakan jasa/layanan yang baru dikenakan di tahun 2016. Pemakaian *internet service* selama tahun 2016 tercatat sebanyak 444.605 *kilobyte*.

LOUNGE

Pemakaian *lounge* atau yang biasa disebut ruang tunggu mengalami penurunan sebesar 3,75% atau sebanyak 26.856 penumpang dari 716.962 penumpang di 2015 menjadi 690.106 penumpang di 2016. Hal ini disebabkan oleh:

- Terdapat pendapatan *Lounge* tahun 2015 tercatat di pendapatan tahun 2016 sebanyak Rp± 3,75 miliar dan adanya peningkatan pengguna CIP *Lounge*.
- Terdapat perubahan pola kerjasama pengelolaan CIP *Lounge* di bandara Syamsudin Noor dan Adisutjipto periode kerjasama tahun 2016, yang semula sewa ruang dan konsesi menjadi *revenue sharing*, dimana kerjasama dengan perbankan langsung dengan PT Angkasa Pura (Persero) (sama dengan pola kerjasama *Lounge* di Bandara Juanda - Surabaya).
- Tertagihnya Singosari Boga Indah dari bulan Maret 2015 di Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali.
- Terdapat penyesuaian tarif yang dikenakan kepada Mitra Usaha Perbankan dan Non Perbankan atas penggunaan pelayanan CIP *Lounge* di Bandara Syamsudin Noor, Bandara Adisutjipto dan Bandara Juanda.

WAREHOUSING

Produksi *warehousing* atau pergudangan mengalami penurunan baik dari kargo masuk maupun kargo keluar. Peningkatan produksi pergudangan di tahun 2016 tercatat sebesar 27,51% atau 17.772.436 kg dari 64.600.511 kg di 2015 menjadi 82.372.947 kg di 2016. Adapun uraian terkait produksi *warehousing* dijabarkan sebagai berikut. Hal ini disebabkan adanya realisasi produksi jasa gudang Domestik di Bandara Juanda yang tidak dianggarkan didalam RKAP tahun 2016.

- Outgoing*
Produksi Pergudangan *outgoing* domestik mengalami peningkatan sebesar 396,82% atau sebanyak 15.105.183 kg. Sedangkan produksi pergudangan internasional mengalami penurunan sebesar 4,44% atau sebanyak 1.423.146 kg.

WATER

The use of water has increased as much as 46.63% or 123,140 m³. This increasing use occurred because of the impact of increasing of income from room lease.

TELEPHONE

The use of telephone has increased in the amount of 23.75% or 3,921 line. The decrease number was caused by the delayed of second floor re-layout of Sultan Hasanuddin Airport. This condition correlated with 51 phone lines which have been proposed in 2016.

INTERNET SERVICE

Internet service was a new service implemented in 2016. It was noted that the use of internet service during 2016 was 444,605 kilobyte.

LOUNGE

The use of lounge has decreased as much as 3.75% or 26,856 passengers, from 716,962 passengers in 2015 into 690,106 passengers in 2016. The causes of this condition are:

- Increasing revenue of Lounge in 2015 that is noted in the revenue of 2016, in the amount of Rp± 3,75 Billion and the increase users of CIP Lounge.
- There is a change in cooperation system of CIP Lounge in Syamsudin Noor Airport and Adisutjipto Airport in the cooperation period of year 2016. The first agreement was the room lease and concession became a revenue sharing, in which the direct cooperation with bank and PT. Angkasa Pura I (the same with the cooperation system of Juanda Airport-Surabaya Lounge).
- The invoice of Singosari Boga Indah from March 2015 in I Gusti Ngurah-Rai Airport.
- Fare adjusment applied to Banking and Non-banking Partner of the use of CIP Lounge service in Syamsudin Noor Airport, Adisutjipto Airport and Juanda Airport.

WAREHOUSING

The warehousing production has decreased in both incoming and outgoing cargo. It is noted that the increasing production of warehouse in 2016 was 27.51% or 17,772,436 kilos of 64,600,511 kilos in 2015 into 82,372,947 kilos in 2016. More explanation on the warehouse production will be shown in the following table. This condition was caused by the realization of domestic warehouse production service in Juanda Airport which was not included in the Company's Budget Plan in 2016.

- Outgoing*
Domestic outgoing warehousing production increased 396.82% or 15,105,183 kilos. Meanwhile, the international warehousing production decreased in the amount of 4.44% or 1,423,146 kilos.

b) *Incoming*

Produksi Pergudangan *incoming* domestik mengalami peningkatan sebesar 155,82% atau sebanyak 11.364.809 kg. Sedangkan produksi pergudangan internasional mengalami penurunan sebesar 33,94% atau sebanyak 7.274.410 kg.

b) *Incoming*

Domestic incoming warehousing production increased 155.82% or 11,364,809 kilos. However, the international warehousing production decreased as much as 33.94% or 7,274,410 kilos.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT

Penjelasan terkait dengan pendapatan dan profitabilitas segmen dalam bagian ini mencakup pembahasan segmen operasi.

Pendapatan dan profitabilitas segmen operasi disajikan dalam tabel berikut.

INCOME AND PROFITABILITY SEGMENT

The explanation related to income and segment profitability in this chapter will cover the discussion of operational segment.

Income and operational segment profitability is presented in this following table.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi tahun 2016 /
The Table of Operating Segment' Income and Profitability in 2016**

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

2016					
Uraian Description	Kebandaraan Airport	Non bandara Non-airport	Jumlah Total	Eliminasi Elimination	Konsolidasian Consolidated
PENDAPATAN USAHA / REVENUES					
Pihak Ketiga / Third Party	5,587,746,192	550,525,707	6,138,271,899	0	6,138,271,899
Pihak Berelasi / Related Party	88,232,699	729,217,632	817,450,331	(817,450,331)	0
Jumlah Pendapatan / Total Income	5,675,978,891	1,279,743,339	6,955,722,230	(817,450,331)	6,138,271,899
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES					
Pihak Ketiga / Third Party	3,800,288,366	688,573,717	4,488,862,083	0	4,488,862,083
Pihak Berelasi / Related Party	715,667,710	91,561,561	807,229,270	(807,229,270)	0
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	4,515,956,076	780,135,278	5,296,091,353	(807,229,270)	4,488,862,083
LABA USAHA / OPERATING PROFIT	1,160,022,815	499,608,061	1,659,630,877	(10,221,061)	1,649,409,816
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA / NON OPERATING (EXPENSES) INCOME					
Pendapatan keuangan / Financial Revenues	0	127,876,694	127,876,694	(20,602,643)	107,274,051
Penghasilan Lain-Lain / Other Income	0	84,307,602	84,307,602	(252,070)	84,055,532
Beban keuangan / Finance Charge	0	231,712,795	231,712,795	0	231,712,795
Beban Lain-Lain / Other Charge	0	97,733,611	97,733,611	(1,204,650)	96,528,961
Laba (Rugi) asosiasi / Profit (Loss) association	0	(3,644,886)	(3,644,886)	0	(3,644,886)
Laba sebelum pajak / Profit before the tax	1,160,022,815	378,701,065	1,538,723,880	(29,871,124)	1,508,852,756
Pajak penghasilan / Income tax	(323,112,096)	(26,163,506)	(349,275,602)	0	(349,275,602)
Laba setelah pajak / Net income after tax	836,910,719	352,537,559	1,189,448,278	(29,871,124)	1,159,577,154
Laba diatribusikan / Attributable Profit:					

2016					
Uraian Description	Kebandaraan Airport	Non bandara Non-airport	Jumlah Total	Eliminasi Elimination	Konsolidasian Consolidated
Pemilik entitas induk / The Owner of Consolidated Financial	836,910,719	351,760,547	1,188,671,266	(29,871,124)	1,158,800,142
Kepentingan non pengendali / Non-Controlling Interests	0	777,012	777,012	0	777,012
	836,910,719	352,537,559	1,189,448,278	(29,871,124)	1,159,577,154
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION					
Aset segmen / Segmental Asset	22,738,340,079	1,549,882,518	24,288,222,597	(709,951,600)	23,578,270,997
Investasi asosiasi / Association Investment	572,512,807	1,250,000	573,762,807	(485,087,850)	88,674,957
	23,310,852,886	1,551,132,518	24,861,985,404	(1,195,039,450)	23,666,945,954
Liabilitas segmen / Liabilities segment	11,432,817,858	936,745,243	12,369,563,101	(700,114,007)	11,669,449,094

Selama 2016, pendapatan usaha untuk segmen operasi Kebandaraan tercatat Rp5.675,98 miliar lebih tinggi dibandingkan segmen operasi Non Bandara yang tercatat sebesar Rp1,28 triliun. Laba bersih setelah pajak yang berhasil dibukukan oleh segmen operasi Kebandaraan tercatat sebesar Rp836,91 miliar, sedangkan segmen operasi Non Bandara sebesar Rp352,54 miliar.

It was noted that the revenue for airport operational segment in 2016 reached Rp 5,675,98 Billion which was higher than non-airport operational segment. Rp 1,279,74 Billion. The net profit after tax which has been noted in bookkeeping by airport operational segment was in the amount of Rp 352,54 Billion.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi tahun 2015 /
Table of Operating Segment' Income and Profitability in 2015**

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

2015					
Uraian Description	Kebandaraan Airport	Non bandara Non-airport	Jumlah Total	Eliminasi Elimination	Konsolidasian Consolidated
PENDAPATAN USAHA / REVENUES					
Pihak Ketiga / Third Party	4,856,436,061	393,193,695	5,249,629,756	0	5,249,629,756
Pihak Berelasi / Related Party	107,526,781	610,417,301	717,944,082	(717,944,082)	0
Jumlah Pendapatan / Total Income	4,963,962,842	1,003,610,996	5,967,573,838	(717,944,082)	5,249,629,756
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES					
Pihak Ketiga / Third Party	3,342,563,754	613,106,138	3,955,669,892	0	3,955,669,892
Pihak Berelasi / Related Party	647,896,144	75,612,963	723,509,107	(723,509,107)	0
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	3,990,459,898	688,719,101	4,679,178,999	(723,509,107)	3,955,669,892
LABA USAHA / OPERATING PROFIT	973,502,944	314,891,895	1,288,394,839	5,565,025	1,293,959,864
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA / Non-Operating (Expenses) Income					
Pendapatan keuangan / Financial Revenues	0	90,059,739	90,059,739	(9,396,834)	80,662,905

2015								
Uraian Description	Kebandaraan Airport		Non bandara Non-airport		Jumlah Total	Eliminasi Elimination	Konsolidasian Consolidated	
Penghasilan Lain-Lain / Other Income	0		235,095,457		235,095,457	(16,745,962)	218,349,495	
Beban keuangan / Finance Charge	0		236,108,522		236,108,522	(8,557,225)	227,551,297	
Beban Lain-Lain / Other Charge	0		291,331,350		291,331,350	(2,622,955)	288,708,396	
Laba (Rugi) asosiasi / Profit (Loss) Association	6,029,905		0		6,029,905	0	6,029,905	
Laba sebelum pajak / Profit before the tax	979,532,849		112,607,219		1,092,140,068	(9,397,590)	1,082,742,478	
Pajak penghasilan / Income tax	(245,953,459)		5,183,611		(240,769,848)	0	(240,769,848)	
Laba setelah pajak / Net income after tax	733,579,390		117,790,830		851,370,220	(9,397,590)	841,972,630	
Laba diatribusikan / Attributable Profit:								
Pemilik entitas induk / The Owner of Consolidated Financial	733,579,390		117,790,830		851,370,221	(9,397,590)	841,542,507	
Kepentingan non pengendali / Non-controlling Interests	0		430,123		430,123	0	430,123	
	733,579,390		118,220,953		851,800,344	(9,397,590)	841,972,630	

LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Aset segmen / Segmental Asset	15,886,424,236	1,098,624,861	16,985,049,097	(355,032,277)	16,630,016,820
Investasi asosiasi / Association Investment	572,237,692	1,250,000	573,487,692	(481,167,850)	92,319,842
	16,458,661,928	1,099,874,861	17,558,536,789	(836,200,127)	16,722,336,662
Liabilitas segmen / Liabilities Segment	5,487,900,960	556,288,534	6,044,189,494	(350,902,058)	5,693,287,436

Selama 2015, pendapatan usaha untuk segmen operasi Kebandaraan tercatat Rp4,96 triliun lebih tinggi dibandingkan segmen operasi Non Bandara yang tercatat sebesar Rp1,00 triliun. Laba bersih setelah pajak yang berhasil dibukukan oleh segmen operasi Kebandaraan tercatat sebesar Rp733,58 miliar, sedangkan segmen operasi Non Bandara sebesar Rp118,22 miliar.

In 2015, it was noted that revenues for airport operational segment was in the amount of Rp 4,963,96 Billion, which was higher than non-airport operational segment, Rp 1,003,61 Billion. The airport segment has noted the net revenue after tax in the amount of Rp 733,58 Billion, while non-airport operational segment was in the amount of Rp 118,22 Billion.

Tabel Pertumbuhan Segmen / Segment Development Table

Pertumbuhan / Growth										
Uraian Description	Kebandaraan Airport		Non bandara Non-airport		Jumlah Total		Eliminasi Elimination		Konsolidasian Consolidated	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
PENDAPATAN USAHA / REVENUES										
Pihak Ketiga / Third Party	731,310,131	15.06%	157,332,012	40.01%	888,642,143	16.93%	0	-	888,642,143	16.93%
Pihak Berelasi / Related Party	(19,294,082)	(17.94%)	118,800,331	19.46%	99,506,249	13.86%	(99,506,249)	13.86%	0	-

Pertumbuhan / Growth										
Uraian Description	Kebandaraan Airport		Non bandara Non-airport		Jumlah Total		Eliminasi Elimination		Konsolidasian Consolidated	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jumlah Pendapatan / Total Income	712,016,049	14.34%	276,132,343	27.51%	988,148,392	16.56%	(99,506,249)	13.86%	888,642,143	16.93%
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES										
Pihak Ketiga / Third Party	457,724,612	13.69%	75,467,579	12.31%	533,192,191	13.48%	0	-	533,192,191	13.48%
Pihak Berelasi / Related Party	67,771,566	10.46%	15,948,598	21.09%	83,720,163	11.57%	(83,720,163)	11.57%	0	-
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	525,496,178	13.17%	91,416,177	13.27%	616,912,354	13.18%	(83,720,163)	11.57%	533,192,191	13.48%
LABA USAHA / OPERATING PROFIT	186,519,871	19.16%	184,716,166	58.66%	371,236,038	28.81%	(15,786,086)	(283.67%)	355,449,952	27.47%
Pendapatan (Beban) Non Usaha / Non-Operating (Expenses) Income										
Pendapatan keuangan / Financial Income	0	-	37,816,955	41.99%	37,816,955	41.99%	(11,205,809)	119.25%	26,611,146	32.99%
Penghasilan Lain-Lain / Other Income	0	-	(150,787,855)	(64.14%)	(150,787,855)	(64.14%)	16,493,892	(98.49%)	(134,293,963)	(61.50%)
Beban keuangan / Finance Charge	0	-	(4,395,727)	(1.86%)	(4,395,727)	(1.86%)	8,557,225	(100.00%)	4,161,498	1.83%
Beban Lain-Lain / Other Charge	0	-	(193,597,739)	(66.45%)	(193,597,739)	(66.45%)	1,418,305	(54.07%)	(192,179,435)	(66.57%)
Laba (Rugi) asosiasi / Loss (Profit) association	(6,029,905)	(100.00%)	(3,644,886)	-	(9,674,791)	(160.45%)	0	-	(9,674,791)	(160.45%)
Laba sebelum pajak / Profit before the tax	180,489,966	18.43%	266,093,846	236.30%	446,583,812	40.89%	(20,473,534)	217.86%	426,110,278	39.35%
Pajak penghasilan / Income tax	(77,158,637)	31.37%	(31,347,117)	(604.74%)	(108,505,754)	45.07%	0	-	(108,505,754)	45.07%
Laba setelah pajak / Net income after tax	103,331,329	14.09%	234,746,729	199.29%	338,078,058	39.71%	(20,473,534)	217.86%	317,604,524	37.72%
Laba distribusikan / Attributable Profit:										

Pertumbuhan / Growth										
Uraian Description	Kebandaraan Airport		Non bandara Non-airport		Jumlah Total		Eliminasi Elimination		Konsolidasian Consolidated	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pemilik entitas induk / The owner of consolidated financial	103,331,329	14.09%	233,969,717	198.63%	337,301,045	39.62%	(20,473,534)	217.86%	317,257,635	37.70%
Kepentingan non pengendali / Kepentingan Non-controlling Interests	0	-	346,889	80.65%	346,889	80.65%	0	-	346,889	80.65%
	103,331,329	14.09%	234,316,606	198.20%	337,647,934	39.64%	(20,473,534)	217.86%	317,604,524	37.72%
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION										
Aset segmen / Asset segment	6,851,915,843	43.13%	451,257,657	41.07%	7,303,173,500	43.00%	(354,919,323)	99.97%	6,948,254,177	41.78%
Investasi asosiasi / Investment association	275,115	0.05%	0	0.00%	275,115	0.05%	(3,920,000)	0.81%	(3,644,885)	(3.95%)
	6,852,190,958	41.63%	451,257,657	41.03%	7,303,448,615	41.59%	(358,839,323)	42.91%	6,944,609,292	41.53%
Liabilitas segmen / Segment Liabilities	5,944,916,898	108.33%	380,456,709	68.39%	6,325,373,607	104.65%	(349,211,949)	99.52%	5,976,161,658	104.97%

Pada 2016, Pendapatan usaha untuk segmen operasi Kebandaraan meningkat sebesar Rp712,02 miliar atau 14,34%, sedangkan Pendapatan usaha untuk segmen Non Bandara meningkat sebesar Rp276,13 miliar 27,51%. Laba bersih setelah pajak Kebandaraan mengalami peningkatan sebesar Rp103,3 miliar atau 14,09% meskipun untuk laba bersih setelah pajak Non Bandara mengalami peningkatan sebesar Rp234,75 miliar 198,20%.

PROSPEK USAHA

PERSPEKTIF GLOBAL

PEREKONOMIAN GLOBAL

Prospek usaha PT Angkasa Pura I (Persero) sangat terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada umumnya dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada khususnya. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan sebesar 3,4% di 2017 dan 3,6% di 2018. Pertumbuhan negara *Emerging Market* diproyeksikan akan mencapai sebesar 4,5% pada 2017 dan 4,8% pada 2018. Untuk kawasan Asean diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% di 2017 dan 5,2% di 2018. Rincian terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diuraikan dalam tabel berikut.

In 2016, the revenues of airport operating segment increased as much as Rp 712,02 Billion or 14.34%. Besides that, the revenues of non-airport segment increased in the amount of Rp 276,13 Billion or 27.51%. The net profit after airport tax increased into Rp 234,75 Billion or 198.20%.

BUSINESS PROSPECT

GLOBAL PERSPECTIVE

GLOBAL ECONOMY

The business prospect of PT Angkasa Pura I (Persero) is closely related to the projection of the world economic growth in general and the projection of Indonesian economic growth in particular. The world economic growth is projected to reach 4.5% in 2017 and 4.8% in 2018. In the Asean-5 areas, it is projected that there will be a growth in the number of 4.9% in 2017 and 5.2% in 2018. The detailed information related to the projection of world economic growth will be explained in this table.

	Estimates		Projections	
	2015	2016	2017	2018
World Output	3.2	3.1	3.4	3.6
Advanced Economies	2.1	1.6	1.9	2.0
United States	2.6	1.6	2.3	2.5
Japan	1.2	0.9	0.8	0.5
United Kingdom	2.2	2.0	1.5	1.4
Emerging Market and Developing Economies	4.1	4.1	4.5	4.8
China	6.9	6.7	6.5	6.0
India	7.6	6.6	7.2	7.7
ASEAN	4.8	4.8	4.9	5.2

Sumber : IMF, World Economic Outlook Update, Januari 2017

INDUSTRI PENERBANGAN GLOBAL

Dengan pasar negara berkembang terus tumbuh dan model bisnis baru berkembang, basis pelanggan untuk penerbangan menjadi semakin beragam. Pada tahun 1995, penerbangan di Eropa atau Amerika Utara menguasai 64% dari seluruh lalu lintas penerbangan global. Pada 2035, persentase penerbangan di Eropa atau Amerika Utara akan menyusut menjadi 37%, dengan penerbangan di Asia Pasifik dan Timur Tengah menjadi lebih menonjol dalam penerbangan global.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tingkat 4,1% per tahun, melampaui rata-rata global sebesar 2,9% serta didorong oleh China dan India sebagai mesin utama pertumbuhan, pangsa wilayah Asia dari GDP dunia diproyeksikan naik dari 31% saat ini menjadi 39% pada 2035. Tingkat pertumbuhan yang signifikan di pasar berkembang diperkirakan akan berlanjut. Akibatnya, penerbangan, kapasitas bandara, dan lalu lintas penumpang diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang kuat dalam 20 tahun ke depan. Permintaan di penerbangan komersial juga datang dari ekspansi berkelanjutan dari kelas menengah di Asia, dengan sektor yang lebih besar dari populasi mencapai tingkat pendapatan yang membuat terbang lebih terjangkau. Meskipun kehadiran geopolitik fluktuasi konflik dan mata uang, penerbangan Asia diperkirakan akan semakin meningkat.

Asia mendapatkan keunggulan dalam penerbangan global dan diharapkan menjadi pasar penerbangan terkemuka di dunia. Lalu lintas udara total untuk wilayah ini diperkirakan tumbuh rata-rata 6,0%, dan pada 2035, lalu lintas penumpang di seluruh Asia akan merupakan 48,7% dari lalu lintas penumpang global. Didorong oleh pembangunan daerah yang kuat ekonomi, struktur industri yang sangat efektif, dan meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara, lebih dari 100 juta penumpang baru diproyeksikan untuk memasuki pasar setiap tahunnya.

(Sumber: *The Current Market Outlook 2016-2035, The Boeing Company*)

GLOBAL AVIATION INDUSTRY

Based on the fact that market country keeps growing and new business model is developing, the customer base for a flight gets more variation. In 1995, European or North American flight dominated 64% from all global flight. While in 2035, the flight percentage of Europe or North America will decrease into 37% with Asia Pacific and the Middle East that become more dominate in global flight.

The strong economic growth in the level of 4.1 percent per year has exceeded the global average that is 2.9 percent. This condition is supported by China and India as the main engine of Asian area growth from world GDP which is projected to rise from 31 percent at present, into 38 percent in 2035. The significant growth rate in developing market is predicted to continue. For that reason, flight, airport capacity and passenger traffic are predicted to encounter strong growth rate in the next 20 years. The demand of commercial flight also derived from sustainable expansion from Asian middle class, in which the sector that is higher than the population reaches income level that enables a flight becomes more affordable.

The privilege of Asia in global flight is expected to be the leading aviation market in the world. Total air traffic of this area is predicted to grow approximately 6.0% and in 2035. Here, the passenger traffic in all around Asia will be 48.7% from the global passenger traffic. This condition is supported by a strong area development, economic, an effective industrial structure, and improvement of the accessibility of air transport services. There are more than 100 million new passengers are projected to enter the market every year.

(Source: *The Current Market Outlook 2016-2035. The Boeing Company*)

PERSPEKTIF NASIONAL

PEREKONOMIAN NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai 5,5-5,9% pada tahun 2017.

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi global baik di AS dan Uni Eropa mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,5-5,0% terutama ekspor produk nonmigas. Membaiknya iklim investasi dan peluang pasar domestik yang luas mendorong investasi tumbuh 6,0-6,6%. Tingkat inflasi yang stabil di kisaran 4,0% akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,4-5,5%. Konsumsi pemerintah tumbuh 6,7% yang didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

Dari sisi penawaran, industri pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh 4,2-4,3%. Industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh antara 6,2-6,5%.

Sasaran dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 yang diperkirakan sebesar 5,8% perlu didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Pada tahun 2017 tingkat inflasi diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran 4,0% seiring dengan masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia. Sementara itu dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan Tiongkok dan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp13.700 – Rp14.200 per USD.

(Sumber: Lampiran Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017)

PERKEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif mempromosikan 10 destinasi pariwisata sebagai “Bali Baru” sebagai penggerak sektor pariwisata. 10 destinasi pariwisata tersebut diharapkan mampu mendatangkan wisatawan manca negara (wisman) sebanyak 8,5 juta orang di tahun 2019 dengan membawa devisa sebesar 8,5 miliar USD. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan investasi di 10 destinasi tersebut senilai 21 miliar USD, Daftar 10 destinasi beserta performa area pariwisata adalah sebagai berikut.

NATIONAL PERSPECTIVE

NATIONAL ECONOMY

It is predicted that the economic growth in Indonesia may reach 5.5-5.9% in 2017.

From the demand view, global economic recovery in the USA and Uni-Europe promote export growth until it reached 4.5-5.0%, particularly non-oil and gas product export. The recovery of wide investment climate and domestic market opportunities has encouraged the investment to grow 6.0-6.6%. The stable inflation rate with a range of 4.0 percent will increase society's consumption, so that by the end it will promote society's consumption to grow 5.4-5.5%. Government's consumption grows 6.7% because it is supported by budget absorption which is equal and qualified with a more efficient development program.

Besides that, from the offer view, agriculture industry in extensive context is predicted to grow 4.2-4.3%. Then, the processing industry is predicted to grow between 6.2-6.5%.

The target of Indonesian economic growth in 2017, which is predicted at 5.8%, needs support from a restrained inflation rate and stable exchange rate. In 2017, the inflation rate is predicted to be under control in the range of 4.0%, along with the continuation in the trending issue of the world oil prices fall. The exchange rate of Indonesian Rupiah is predicted in the range of Rp 13,700 – Rp 14,200 per USD, with a consideration of China's financial market condition and the development of world oil prices.

(Source: Attachment of Presidential Regulation No. 45 Year 2016 about Government Work Plan Year 2017)

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL TOURISM

Through the Ministry of Tourism and Creative Industry, Indonesian government promotes 10 tourism destinations which are known as “New Bali” to move the tourism sector. These 10 tourism destination is expected to bring in international tourists, with the number of 8.5 million people in 2019 so that they will bring foreign exchange in the amount of USD 8.5 billion. In order to reach this plan, there is a need for investment in these 10 destinations, in the amount of USD 21 Billion. The list of 10 destinations along with the performance of tourism area is described in the following table.

NO	DESTINASI DESTINATION	PERFORMANSI PERFORMANCE				PROYEKSI 2019 PROJECTION 2019		
		JUMLAH TOTAL	WISMAN FOREIGN TOURIST	PERTUMBUHAN KUNJUNGAN VISIT DEVELOPMENT	DEVISA WISMAN FOREIGN TOURIST EXCHANGE	INVESTASI Investment	WISMAN FOREIGN TOURIST	DEVISA FOREIGN EXCHANGE
		2012	2013	%	USD	(Juta USD) (Million USD)	(orang) (person)	(juta USD) (Million USD)
1	BOROBUDUR	193,982	227,337	17.19	27,337,000	1,520	2,000,000	2,000
2	MANDALIKA	121,482	125,307	3.15	125,307,000	3,600	1,000,000	1,000
3	LABUAN BAJO	41,972	54,147	29.01	54,147,000	1,200	500,000	500
4	BROMO-TENGGER-SEMERU	34,466	33,387	(3.13)	33,387,000	1,200	1,000,000	1,000
5	KEPULAUAN SERIBU	4,627	16,384	254.1	16,384,000	1,020	500,000	500
6	TOBA	15,464	1,068	(30.94)	10,680,000	1,000	1,000,000	1,000
7	WAKATOBI	2,179	3,315	52.13	3,315,000	1,400	500,000	500
8	TANJUNG LESUNG	8,336	1,739	(79.14)	1,739,000	5,600	1,000,000	1,000
9	MOROTAI	618	500	(19.09)	500,000	3,600	500,000	500
10	TANJUNG KELAYANG	975	451	(53.74)	451,000	1,660	500,000	500

Sumber : Kementerian Pariwisata, 2016

Source: The Ministry of Tourism, 2016

Jasa pelayanan transportasi terutama transportasi udara dari 6 dari 10 destinasi baru tersebut akan melalui bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero). 6 dari 10 destinasi tersebut adalah Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Morotai. Potensi penambahan penumpang dari 6 destinasi tersebut adalah sekitar 5,5 juta penumpang.

INDUSTRI PENERBANGAN NASIONAL

Di sisi lain, industri penerbangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pasar penerbangan Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan cepat sekitar 14,9%. Hal tersebut mengacu pada prediksi *International Air Transport Association (IATA)* yang menyebutkan industri penerbangan global saat ini telah mempekerjakan 58 juta orang dengan nilai ekonomi mencapai US\$2,4 triliun. IATA memperkirakan jumlah penumpang udara di Indonesia tahun 2034 akan naik menembus angka 270 juta penumpang domestik maupun internasional.

Industri penerbangan Indonesia mendapatkan beberapa tantangan dalam menghadapi kebijakan ASEAN *Open Sky* sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan ASEAN *Economic Community*. Terbukanya wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN menimbulkan dampak bagi perusahaan penerbangan serta perusahaan pengelola bandar udara. Maskapai penerbangan dari negara lain yang

Transportation services, especially air transportation from those 6 of 10 new destinations will pass through airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero). Six of ten destinations are Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi and Morotai. The potential of passengers' growth from those 6 destinations are more or less 5.5 million passengers.

NATIONAL FLIGHT INDUSTRY

In contrast, Indonesian flight industry experienced a significant development during the past 10 years. Twenty years from now, Indonesian flight market is predicted to grow rapidly about 14.9%. This condition refers to the prediction of *International Air Transport Association (IATA)* that states how the present global flight industry has employed 58 million people with economic value that reached US\$2.4 Billion. The prediction of IATA revealed that the number of Indonesia flight passengers in 2034 would go up to reach 270 domestic and international passengers.

Indonesian flight industries face some challenges in encountering the ASEAN *Open Sky* policy as one of the steps to actualize ASEAN *Economic Community*. The open sky among the ASEAN countries impacts the airline corporations and the airport management corporations as well. Any airline from ASEAN countries may operate in Indonesian sky area. This condition requires the airport to get ready

menjadi anggota ASEAN dapat beroperasi di wilayah udara Indonesia. Hal tersebut menuntut kesiapan bandar udara untuk meningkatkan standar keamanan dan keselamatan penerbangan melalui penyesuaian *safety standard and regulatory capability* serta *aviation security measure* dengan ICAO Standard untuk kedepannya.

Indonesia memiliki potensi peningkatan lalu lintas angkutan udara dilihat dari kenaikan volume angkutan udara dalam 20-30 tahun belakangan ini. Hal ini didorong oleh kemajuan *e-commerce*, perkembangan *global supply chain*, dan upaya untuk menurunkan biaya inventaris yang mahal serta memperpendek *order cycle time*. Walaupun volume barang yang diangkut melalui angkutan udara masih relatif kecil, namun nilai barang yang diangkut terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Lebih lanjut potensi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah, Indonesia dilewati oleh 2 jalur penerbangan Internasional (*Major Air Traffic Flow*) yang memberikan peluang dalam pengembangan pangsa pasar transportasi udara ke depan khususnya terkait dengan *ASEAN Open Sky*.

(Sumber: Ringkasan Statistik Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015)

Ke depan, dengan melihat prospek pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lalu lintas kebandarudaraan global dan Indonesia, maka PT Angkasa Pura I (Persero) optimis dapat meraih setiap peluang dan potensi yang tercipta. Hal ini diwujudkan melalui strategi dan pengembangan usaha yang akan diuraikan sebagai berikut.

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN USAHA 2017

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai salah satu pengelola kebandarudaraan di Indonesia memiliki visi dan misi untuk dapat mengangkat citra Indonesia di mata dunia dengan menjadi salah satu pengelola bandara kelas dunia. Hal ini juga meliputi upaya perubahan pola komersil yang baru dan dinamis. Sejak 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengubah Paradigma Perusahaan yang semula sebagai penyedia infrastruktur berubah menjadi penyedia jasa dengan orientasi kepada kualitas layanan dengan konsep *Airport City*.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi, perusahaan telah menetapkan Sasaran Strategi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam RJPP 2014-2018 yaitu sebagai berikut.

1. Mencapai nilai CSI 4,60 (standar ACI) pada tahun 2018;
2. Mencapai total pendapatan operasional 8,86 triliun rupiah pada tahun 2018;
3. Mencapai proporsi pendapatan non aeronautika terhadap total pendapatan operasional sebesar 45,5% pada tahun 2018;
4. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen kelas dunia (terutama pengelolaan SDM, ICT, *operations excellence*, dan *service excellence*) secara *holistic* sebelum akhir 2018;

for improving the security and safety flight standard by adjusting safety standard & regulatory capability, along with aviation security measure using ICAO Standard in the future.

The potency of Indonesia to extend air traffic is seen from the increasing volume of air transportation in the last 20 -3- years. This condition is supported by the advancement of e-commerce, global supply chain development, and the attempt to reduce expensive inventory costs, as well as shorten the order of cycle time. Even though it is still relatively rare to transport goods through air transportation, the value of the transported goods keeps increasing from year to year. The goods are transported both domestic and international area. Furthermore, the potential that Indonesia has is the condition in which it is passed by two international flight routes (*Major Air Traffic Flow*) which give an opportunity to expand air transportation market in the future, especially with regard to the *ASEAN Open Sky*.

(Source: Statistical Summary PT Angkasa Pura I (Persero) Air Transportation Traffic Movement Year 2015)

In the future, seeing the prospects of economic and traffic growth in global and Indonesian airports, PT Angkasa Pura I (Persero) are optimist to achieve all chances and potentials created. This plan will be done through strategies and business development, as it is explained in the following part.

STRATEGY AND BUSINESS DEVELOPMENT 2017

PT Angkasa Pura I (Persero) as one of the airport operator in Indonesia has the vision and mission to improve Indonesia's global image by becoming a world class airport operator. This also includes the changing on the commercial pattern into the new and dynamic one. Since 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) has been changing the Company Paradigm from the infrastructure supplier into the service supplier with the orientation of the service quality as *Airport City* concept.

In order to realize this Vision and Mission, the company has established the Long Term Strategic Goals as written in RJPP 2014-2018 in the following:

1. Achieving the CSI point of 4.60 (ACI standard) by the year 2018;
2. Achieving the operational total income of 8.86 trillion rupiah by the year 2018;
3. Achieving the proportion of non-aeronautics income towards the operational total income of 45.5% by the year 2018;
4. Developing and implementing the world class management system (especially on the management of human resources, ICT, operations and service excellence) holistically before the end of 2018;

5. Menerapkan konsep *Green Corporation* dan Program CSR secara efektif sebelum akhir 2018;
6. Menyiapkan unit bisnis (bandara) untuk siap diprivatisasi sebelum akhir 2018.

Selain itu, untuk merealisasikan sasaran strategis tersebut, Perseroan telah menetapkan 4 (empat) *Winning Strategies* untuk merealisasikan visi "Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandar udara terbaik di Asia," yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) *Service Excellence*
- 2) *Revenue Enhancement*
- 3) *Cost and Risk Management*
- 4) *Socioeconomically Responsible Green Corporation*

Selain keempat *winning strategies* tersebut, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2017 (RKAP 2017), Perseroan juga menerapkan strategi dengan kebijakan sebagai berikut.

1. Program berorientasi pada sasaran.
2. Total Pendapatan lebih besar dibandingkan total Biaya.
3. *Service Improvement and Revenue Enhancement*.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya perusahaan meliputi SDM, sistem dan organisasi serta fasilitas.
5. Investasi secara selektif dan *prudent* yang diarahkan pada untuk peningkatan kapasitas dan citra bandara.
6. Bandara yang masih rugi diarahkan untuk mengurangi kerugian:
 - a. Mempertahankan Sertifikat Bandar Udara (Standar Pelayanan Minimum)
 - b. Investasi sesuai Kebutuhan
 - c. Optimalisasi aset bandara
 - d. Efisiensi biaya
7. Peningkatan peran anak perusahaan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan dan pendapatan korporasi.
8. Penerapan kerjasama melalui *strategic partnership* dalam pengelolaan bandara di bidang investasi, komersial, *training and management*.
9. Rencana kerjasama dengan Badan Layanan Umum (BLU) maupun pengambilalihan bandara Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) yang dikelola Direktorat Jenderal Hubungan Udara.

Strategi Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha untuk mencapai target pendapatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- 1) Penerapan Pola Komersialisasi Baru
Pola komersialisasi baru merupakan produk kerjasama operasi antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan GVK yang membentuk *Strategic Business Unit* (SBU) di Ngurah Rai Internasional Airport. Pola komersialisasi baru mengubah strategi penataan area komersial, pemilihan mitra konsesional dan operasi komersial di bandara. Penerapan pola komersialisasi baru mencakup kerjasama pengelolaan *Food and Beverage, Retail* dan *Service* serta bertambah pada kerjasama pengelolaan periklanan.

5. Applying the concept of Green Corporation and CSR Programs effectively before the end of 2018;
6. Preparing the business units (the airports) to be ready for privatization before the end of 2018.

Furthermore, in order to realize those strategic goals, the company has established 4 (four) *Winning Strategies* to realize the vision of "To Become One of the Top Ten Airport Operators in Asia", which are mentioned below:

- 1) *Service Excellence*
- 2) *Revenue Enhancement*
- 3) *Cost and Risk Management*
- 4) *Socioeconomically Responsible Green Corporation*

Besides, based on the Company Budget Work Plan 2017 (RKAP 2017), the company has also established the strategies with the following policies:

1. Goal-oriented programs.
2. The total income is bigger than the Expense.
3. Service Improvement & Revenue Enhancement.
4. The efficiency and effectiveness improvement of the company's resources, including human resource, system and organization, and facilities.
5. The selective and prudent investments which are aimed for the development and improvement of the airport's capacity and image.
6. The airports which are still lossy are guided to decrease the loss:
 - a. Maintain the Airport Certification (the Minimum Service Standard)
 - b. Investment based on the needs
 - c. Optimization of the airports' asset
 - d. Cost efficiency
7. The improvement of the subsidiaries in order to accelerate the increase of the service quality and the corporate's income.
8. The application of cooperation through the strategic partnership in organizing the investment, commercial, training, and management of the airports.
9. The cooperation planning with Public Service Agency (BLU) and the overtaking of the Aviation Service Unit (UPBU) organized by Directorate General of Civil Aviation.

The strategies of the Director of Commercial and Business Development to achieve the income target in 2017 are as followed:

- 1) The Application of New Commercialization Frame
The new commercialization frame is a product of the cooperative operation between PT Angkasa Pura I (Persero) and GVK that forms the Strategic Business Unit (SBU) in Ngurah Rai International Airport. The frame changes the strategy of commercial area structuring, the selection of concessionaire partner and commercial operation in the airport. The application of the new commercialization frame includes the cooperation of Food & Beverage management, Retail and Service management, and the improvement of the advertisement management cooperation.

Penerapan pola komersialisasi baru telah dilaksanakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Terminal B Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan Lantai 2 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Fokus utama di tahun 2017 adalah:

- a) mempertahankan pola komersialisasi baru sekaligus meningkatkannya dengan improvisasi dan perbaikan secara kontinyu;
- b) mempersiapkan penerapan pola komersialisasi baru di bandara baru (Yogyakarta, Semarang dan Banjarmasin) maupun di bandara eksisting.

2) Penyesuaian Tarif

Tarif Jasa Aeronautika

Penyesuaian tarif merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh perusahaan seiring dengan peningkatan layanan kepada pengguna jasa. Penyesuaian tarif yang akan dilakukan di tahun 2017 adalah penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) dan tarif parkir.

Penyesuaian tarif yang berlaku di tahun 2017 adalah tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang dilakukan di tahun 2016 untuk hampir seluruh bandara PT Angkasa Pura I (Persero). Tarif *Baggage Handling System* (BHS) dan *Hold Baggage Screening* (HBS) sudah termasuk di dalam tarif PJP2U.

Tarif Jasa Non Aeronautika

Penyesuaian tarif yang direncanakan di tahun 2017 adalah penyesuaian tarif parkir di 3 bandara yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Penyesuaian tarif yang dilaksanakan di tahun 2017 adalah di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

3) Pengembangan dan Kerjasama Bandara

Pengembangan Bandara

PT Angkasa Pura I (Persero) telah merencanakan pengembangan bandara baru yaitu bandara di Kulon Progo – Yogyakarta yang direncanakan beroperasi di tahun 2019. Selain bandara baru, PT Angkasa Pura I (Persero) juga merencanakan pembangunan terminal baru di Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang direncanakan beroperasi di tahun 2018.

Selain 3 lokasi tersebut, atas pemenuhan kebutuhan dari bandara-bandara yang *overcapacity* juga direncanakan akan dilakukan pengembangan peningkatan kapasitas terminal yaitu Terminal A Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Pattimura Ambon dan Bandara El Tari Kupang.

The application of the new commercialization frame has been conducted in Ngurah Rai International Airport, Terminal 2 of Juanda International Airport, SAMS Sepinggan International Airport, Terminal B of Adisutjipto International Airport, and the 2nd Floor of Sultan Hasanuddin International Airport. The main focus in 2017 is:

- a) to maintain and to develop the commercialization frame by improvisation and continued repairment;
- b) to prepare the application of the new commercialization frame in the new airports (Yogyakarta, Semarang, and Banjarmasin) and the existing airports.

2) Tariff Adjustment

Aeronautics Service Tariff

Tariff adjustment is a routine activity held by the company in order to improve the service for the costumers. The tariff adjustment in 2017 was the adjustment of Landing, Parking, and Hangar Services of the Airplane (PJP4U) and parking tariff.

The tariff adjustment applied in 2017 is for the Aircraft Passengers Service (PJP2U) held in 2016 to almost all airports of Angkasa Pura. The tariff of Baggage Handling System (BHS) and Hold Baggage Screening (HBS) have been included in PJP2U tariff.

Non-aeronautics Service Tariff

The tariff adjustment planned in 2017 is for 3 airports, which are Ngurah Rai International Airport, Juanda International Airport, and Syamsudin Noor Airport. The adjustment held in 2017 is at SAMS Sepinggan International Airport and Adisutjipto International Airport.

3) Airport Development and Cooperation

Airport Development

PT Angkasa Pura I (Persero) has planned to develop a new airport which is Kulon Progo – Yogyakarta airport that is planned to operate in 2019. Besides, PT Angkasa Pura I (Persero) has also planned to build a new terminal in Ahmad Yani International Airport – Semarang and Syamsudin Noor Airport – Banjarmasin that is planned to operate in 2018.

In addition to those 3 locations, PT Angkasa Pura I (Persero) has also planned to increase the terminal maximum capacity in Terminal A of Adisutjipto International Airport – Yogyakarta, Terminal 1 of Juanda International Airport – Surabaya, Sam Ratulangi International Airport – Manado, Pattimura International Airport – Ambon and El Tari International Airport – Kupang in order to fulfill the needs of the overcapacity airports.

Kerjasama Bandara

Kerjasama pengelolaan bandara dengan mitra internasional eksisting adalah dengan GVK di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan rencana ke depan kerjasama pengelolaan bandara PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Lombok Praya

Selain dengan mitra internasional, PT Angkasa Pura I (Persero) juga akan melakukan kerjasama strategis dengan Badan Layanan Umum (BLU) bandara-bandara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hubungan Udara seperti Bandara Sentani.

- 4) **Turisme sebagai Penggerak Pertumbuhan**
PT Angkasa Pura I (Persero) menyadari pentingnya peningkatan trafik melalui turisme. PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan kegiatan *Collaborative Destination Development* (CDD) di seluruh bandara PT Angkasa Pura I (Persero) dan *AP1 Golf Tourmanent* di Makassar, Bali, Yogyakarta dan Surabaya untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan di bandara tentang pentingnya pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah bandara tersebut.

PT Angkasa Pura I (Persero) juga mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pariwisata melalui *event Airport Running Series* di Lombok, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.

PT Angkasa Pura I (Persero) beserta anak perusahaan memberikan *sponsorship* untuk kegiatan-kegiatan yang membantu peningkatan pariwisata di daerah seperti yang telah dilakukan di tahun 2016 yaitu Jazz Gunung Indonesia di Gunung Bromo, Gunung Ijen dan Nusa Dua untuk meningkatkan citra perusahaan dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan trafik melalui kegiatan pariwisata.

Dari sisi fasilitas di PT Angkasa Pura I (Persero), peningkatan penumpang melalui pariwisata juga diusahakan dengan meningkatkan pelayanan dengan membuat bandara menjadi *tourist friendly airport* berupa pembuatan *Tourist Information Center* di area kedatangan dan *tourist promotional area* seperti *selfie booth* ataupun *cultural exhibition center*.

Airport Cooperation

The cooperation of the airport operators with the existing international partners is held with GVK in Ngurah Rai International Airport and, in the future, the cooperation is expected to be held in Sultan Hasanuddin International Airport – Makassar, Sam Ratulangi International Airport – Manado, and Lombok International Airport - Mataram.

Besides the international partner, PT Angkasa Pura I (Persero) will also hold a strategic cooperation with Public Service Agency (BLU) of the airports managed by Director General of Civil Aviation such as Sentani Airport.

- 4) **Tourism as the Development Booster**
PT Angkasa Pura I (Persero) understands the importance of the increasing traffic through tourism. PT Angkasa Pura I (Persero) has held an activity called Collaborative Destination Development (CDD) in all airports of PT Angkasa Pura I (Persero) and AP1 Golf Tourmanent at Makassar, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya in order to raise the awareness of the airports' stakeholders about the importance of tourism for economic growth of the area where the airport is located.

PT Angkasa Pura I (Persero) has also held some events to increase the tourism through Airport Running Series event in Lombok, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

PT Angkasa Pura I (Persero) and its subsidiaries have given sponsorships in the events that can improve the tourism in the area such as those held in 2016; Jazz Gunung Indonesia at Bromo Mountain, Ijen Mountain, and Nusa Dua; to improve the company's image and also to boost the traffic through the tourism events.

Regarding the facility of PT Angkasa Pura I (Persero), the struggle to boost the tourism is done by making the airports into tourist friendly airports. This is done by providing Tourist Information Center in the arrival area and tourist promotional area, such as selfie booth and cultural exhibition center.

5) Optimalisasi Aset

Pada tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. bersinergi dalam pengembangan dan pengelolaan lahan milik PT Angkasa Pura I (Persero). Para pihak sepakat untuk membentuk tim bersama dalam rangka melaksanakan studi untuk perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengelolaan atas lahan dan kawasan komersial Bandara yang dimiliki PT Angkasa Pura I (Persero).

Atas sinergi tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) merencanakan mengoptimalisasikan aset-aset yang kurang produktif seperti lahan *Sunset Road* di Bali dan eks-bandara Selaparang di Lombok.

6) Anak Perusahaan sebagai *Business Engine*

Anak perusahaan ditugaskan untuk mengoptimalisasikan pendapatan dan peningkatan kualitas layanan melalui pengambilalihan kegiatan usaha seperti parkir oleh PT Angkasa Pura Support, *commercial management* oleh PT Angkasa Pura Retail dan *airlines lounge* oleh PT Angkasa Pura Hotel. Anak perusahaan juga didorong untuk ekspansi bisnis di luar lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk meningkatkan profitabilitas anak perusahaan yang akan berdampak pada profitabilitas PT Angkasa Pura I (Persero) secara konsolidasi.

5) Asset Optimization

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. synergized in developing and managing the land owned by PT Angkasa Pura I (Persero). Each party agreed to form a collective team to hold a study on planning, developing, and managing the land and the airport's commercial area of PT Angkasa Pura I (Persero).

Through the synergy, PT Angkasa Pura I (Persero) planned to optimize the less productive assets, such as the *Sunset Road* in Bali and former airport of Selaparang in Lombok.

6) Subsidiaries as the Business Engine

Subsidiaries are assigned to optimize the income and the service quality by overtaking some business activities, such as the parking by PT Angkasa Pura Support, commercial management by PT Angkasa Pura Retail, and airlines lounge by PT Angkasa Pura Hotel. Subsidiaries are also supported for business expansion outside the area of PT Angkasa Pura I (Persero) for the sake of increasing the subsidiaries' profitability which might impact the profitability of PT Angkasa Pura I (Persero) on the consolidated basis.



Tinjauan Keuangan

Financial Review

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang disajikan dalam buku Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan Konsolidasian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review that will be explained in this part refers to the Consolidation Financial Report for the years ended in December 31, 2016 and 2015 that is provided on this Yearly Report. The Consolidation Financial Report has been audited by Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi and Associates and has received a proper opinion, in all of the materials, the consolidation financial position of PT Angkasa Pura I (Persero) and its subsidiaries on December 31, 2015 and 2014, and the company result, equity changes, and consolidation cash flow for the years ended on those dates based on the Financial Accounting Standard in Indonesia.

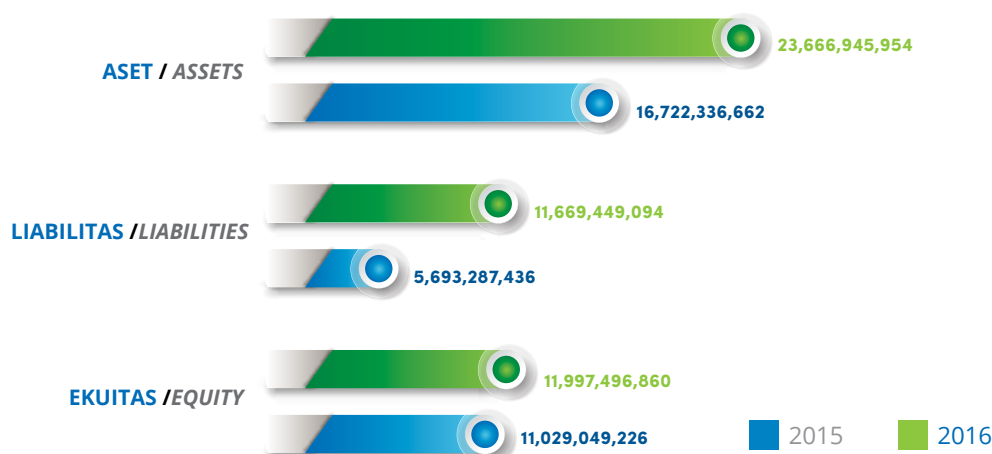
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATION FINANCIAL POSITION REPORT

Tabel Posisi Keuangan Konsolidasian / Consolidation Financial Position Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2016	2015	Pertumbuhan Growth	
			4=2-3	5=4/3
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Aset / Asset	23,666,945,954	16,722,336,662	6,944,609,292	41.53%
Aset Lancar / Current Asset	6,084,701,307	3,090,121,088	2,994,580,219	96.91%
Aset Tidak Lancar / Long-term Asset	17,582,244,647	13,632,215,574	3,950,029,073	28.98%
Liabilitas / Liability	11,669,449,094	5,693,287,436	5,976,161,658	104.97%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liability	3,871,791,651	2,704,914,028	1,166,877,623	43.14%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-current Liability	7,797,657,443	2,988,373,408	4,809,284,035	160.93%
Ekuitas / Equity	11,997,496,860	11,029,049,226	968,447,634	8.78%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total of Liability and Equity	23,666,945,954	16,722,336,662	6,944,609,292	41.53%



ASET

Pada 2016, total aset Perseroan mencapai Rp23,67 triliun. Mengalami pertumbuhan sebesar Rp6,94 triliun atau sebesar 41,53% dibandingkan 2015 yang mencapai Rp16,72 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan aset lancar dan aset tidak lancar.

ASET LANCAR

Pada 2016, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan Rp2,99 triliun atau sebesar 96,91% dari Rp3,09 triliun di 2015 menjadi Rp6,08 triliun di 2016. Peningkatan aset lancar terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, persediaan, uang muka dan biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Peningkatan aset lancar yang utama disebabkan oleh kas dan setara kas yang meningkat sebesar Rp3,15 triliun atau sebesar 180,38% dari Rp1,75 triliun di tahun 2015 menjadi Rp4,90 triliun di 2016. Peningkatan ini didominasi oleh peningkatan deposito, baik deposito dalam mata uang Rupiah yang mencakup pihak berelasi ataupun pihak ketiga dan juga deposito dalam mata uang asing.

Tabel Aset Lancar / Current Asset Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
			4=2-3	5=4/3
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Kas dan Setara kas / Cash and Equivalent Cash	4,896,214,996	1,746,272,845	3,149,942,151	180.38%
Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment	295,240,648	216,446,783	78,793,865	36.40%
Piutang Usaha / Trade Receivables	482,770,249	571,170,786	(88,400,537)	(15.48%)
Piutang Lain-lain / Other Receivables	12,444,652	128,562,450	(116,117,798)	(90.32%)
Persediaan / Inventories	40,616,584	36,359,021	4,257,563	11.71%
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka / Advances and Prepaid Expenses	63,696,013	23,977,802	39,718,211	165.65%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima / Accrued Revenue	201,226,696	208,419,621	(7,192,925)	(3.45%)
Pajak Dibayar Dimuka / Advance Tax	82,242,218	150,835,561	(68,593,343)	(45.48%)
Aset Lancar Lainnya / Other Current Asset	10,249,251	8,076,219	2,173,032	26.91%
Jumlah Aset Lancar / Current Asset Total	6,084,701,307	3,090,121,088	2,994,580,219	96.91%

ASET TIDAK LANCAR

Perseroan membukukan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp17,58 triliun pada 2016, meningkat sebesar Rp3,95 triliun atau 28,98% bila dibandingkan dengan 2015 yang tercatat sebesar Rp13,63 triliun. Pertumbuhan aset tidak lancar terutama berasal dari pertumbuhan aset tetap. Aset tetap mengalami pertumbuhan Rp3,85 triliun yang mencakup adanya penambahan aset tetap tanah sebesar Rp130,65 miliar, Bangunan (Lapangan) sebesar Rp264,60 miliar,

ASSET

In 2016, the Company's total asset reached Rp 23.67 trillion. The growth reached Rp 6.94 trillion or 41.53% compared to the total in 2015 that reached Rp 16.72 trillion. The growth came from the growth of the current asset and the long-term asset.

CURRENT ASSET

In 2016, the Company's current asset reached the growth of Rp 2.99 trillion or 96.91% from Rp 3.09 trillion in 2015 into Rp 6.08 trillion in 2016. The increase of the current asset came from the increase of the cash and cash equivalent, short-term investment, inventory, advances and prepaid expenses, and other current assets. The growth of the current assets was mainly caused by the increase of cash and cash equivalent into Rp 3.15 trillion or 180.38% from Rp 1.75 trillion in 2015 into Rp 4.90 trillion in 2016. The increase was dominated by the increase of deposit both in Rupiah that included the related parties and the third party and the deposit in foreign currency.

LONG TERM ASSET

The Company recorded that the total amount of Long Term Asset was Rp 17.58 trillion in 2016, increasing Rp 3.95 trillion or 28.98% compared to the one in 2015 which was Rp 13.63 trillion. The growth of the long term asset was mainly received from the growth of the fixed asset. The fixed asset grew Rp 3.85 trillion including the growth of the fixed asset of land Rp 130.65 billion. The building (Field) with the amount of Rp 264.60 billion, buildings with the amount of

gedung-gedung sebesar Rp62,40 miliar, kendaraan sebesar Rp23,02 miliar, instalasi sebesar Rp37,44 miliar, peralatan sebesar Rp279,49 miliar, dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp4,13 triliun. Seiring dengan penambahan aset tetap tersebut, maka terjadi pengurangan dalam alat perhubungan udara, peralatan, dan aset dalam penyelesaian yang terklasifikasi menjadi aset tetap di 2015.

Rp 62.40 billion, vehicles with the amount of Rp 23.02 billion, installation with the amount of Rp 37.44 billion, tools with the amount of Rp 279.49 billion, and adjustment asset with the amount of Rp 4.13 trillion. In line with the increasing fixed asset, there was decreasing aviation tools, equipments, and asset under construction which were classified as fixed assets in 2015.

Tabel Aset Tidak Lancar / Long Term Asset Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
Aset pajak tangguhan / Deferred Tax Asset	302,019	1,412,424	(1,110,405)	(78.62%)
Piutang jangka panjang / Long Term Receivables	699,887	0	699,887	100.00%
Bagian jangka panjang dari uang muka dan beban dibayar di muka / Long term part of advances and prepaid expenses	78,216,838	0	78,216,838	100.00%
Investasi Jangka Panjang / Long Term Investment	96,129,584	129,659,365	(33,529,781)	(25.86%)
Properti Investasi / Investment Property	200,785,384	149,844,910	50,940,474	34.00%
Aset tetap / Fixed Asset	17,155,508,872	13,304,090,222	3,851,418,650	28.95%
Aset tidak berwujud / Intangible Asset	44,244,282	45,373,282	(1,129,000)	(2.49%)
Aset tidak lancar lainnya / Other Long Term Asset	6,357,781	1,835,371	4,522,410	246.40%
Jumlah Aset Tidak Lancar / Long Term Asset Total	17,582,244,647	13,632,215,574	3,950,029,073	28.98%

LIABILITAS

Liabilitas Perseroan di 2016 mencapai Rp11,67 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp5,98 triliun atau 104,97% dari tahun 2015 yang sebesar Rp5,69 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang masing-masing meningkat sebesar 43,14% dan 160,93%.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada 2016, Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tercatat sebesar Rp3,87 triliun, meningkat sebesar Rp1,17 triliun atau 43,14% dibandingkan 2015 yang sebesar Rp2,70 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang usaha yang sebesar Rp808,94 miliar atau 167,48% dari Rp682,67 miliar di 2015 menjadi Rp1,49 triliun di 2016 yang khususnya berasal dari utang usaha pihak ketiga.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek / Short Term Liability Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
Beban yang Masih Harus Dibayar / Accrued Expenses	879,355,299	599,102,599	280,252,700	46.78%
Utang Usaha / Trade Payables	1,491,610,360	682,672,329	808,938,031	118.50%
Utang Non Usaha / Non-Trade Payables	16,626,370	53,771,084	(37,144,714)	(69.08%)
Pendapatan Diterima Dimuka / Advance Income	87,481,015	88,640,117	(1,159,102)	(1.31%)

LIABILITY

The Company's liability in 2016 was Rp 11.67 trillion, increased about Rp 5.98 trillion or 104.97% from 2015 which was Rp 5.69 trillion. The increasing amount was due to the growth of the short term and long term liabilities in which each of them increased about 43.14% and 160.93%.

SHORT TERM LIABILITY

In 2016, the Company's Short Term Liability recorded as Rp 3.87 trillion, increased about Rp 1.17 trillion or 43.14% from 2015 which was Rp 2.70 trillion. The increasing amount was due to the increase of trade payables which was Rp 808.94 billion or 167.48% from Rp 682.67 billion in 2015 into Rp 1.49 trillion in 2016 especially from the third party trade payables.

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Pajak / Tax Payables	138,440,567	169,635,162	(31,194,595)	(18.39%)
Bagian Bank dari Utang Bank Jatuh Tempo / Bank Part of Due Date of Bank Loan	753,151,831	592,769,437	160,382,394	27.06%
Utang lancar lainnya / Other Current Payables	505,126,209	518,323,300	(13,197,091)	(2.55%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Short Term Liability Total	3,871,791,651	2,704,914,028	1,166,877,623	43.14%

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada 2016, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tercatat sebesar Rp7,80 triliun, meningkat sebesar Rp4,81 triliun atau 160,93% dibandingkan 2015 yang sebesar Rp2,98 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya Utang obligasi dan sukuk ijarah yang sebesar Rp2,99 triliun. Selain itu, peningkatan liabilitas jangka panjang juga disebabkan oleh utang bank jangka panjang yang berasal dari utang jangka panjang pada PT Bank Mandiri Tbk yang mencapai Rp1,62 triliun di 2016.

LONG TERM LIABILITY

In 2016, the Long Term Liability of the Company recorded as Rp 7.80 trillion, increased about Rp 4.81 trillion or 160.93% from 2015 which was Rp 2.98 trillion. The increasing was due to the increase of bond payable and sukuk ijarah (Islamic bond) in the amount of Rp 2.99 trillion. Besides, the increase of the long term liability was also caused by the long term bank payable which was from the long term payable of PT Bank Mandiri Tbk that reached Rp 1.62 trillion in 2016.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang / Long Term Liability Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Bank / Bank Payable	4,304,115,030	2,474,584,667	1,829,530,363	73.93%
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah / Bond and Islamic Bond	2,991,309,839	0	2,991,309,839	100.00%
Utang jangka panjang lainnya / Other long term payables	172,253,010	166,947,710	5,305,300	3.18%
Liabilitas Imbalan Paska Kerja / Post Employment Benefit Liability Liabilitas Imbalan Paska Kerja	329,979,564	346,841,031	(16,861,467)	(4.86%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Long Term Liability Total	7,797,657,443	2,988,373,408	4,809,284,035	160.93%

EKUITAS

Pada 2016, ekuitas Perseroan mencapai Rp11,99 triliun, mengalami peningkatan Rp968,45 miliar atau sebesar 8,78% dibandingkan 2015 yang mencapai Rp10.495,88 miliar. Pertumbuhan ekuitas terutama berasal dari penyertaan modal negara yang mencapai Rp255,10 miliar.

EQUITY

In 2016, the Company's equity reached Rp 11.99 trillion, increased about Rp 968.45 billion or 8.78% from 2015 which was Rp 10,495.88 billion. The growth of the equity was mainly caused by the state capital equity which was Rp 255.10 billion.

Tabel Ekuitas / Equity Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Modal Saham / Capital Stock Saham	6,414,412,000	6,414,412,000	0	0.00%
Setoran Modal Lainnya / Other Capital deposits:				
Penyertaan Modal Negara / State Capital Equity	255,096,706	0	255,096,706	100.00%
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) / Undefined Status Government Assistance (BPYBDS)	0	255,096,706	(255,096,706)	(100.00%)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pengalihan aset tetap kenavigasian / Transfer of Fixed Asset Navigation				
Nilai buku aset tetap kenavigasian / Book Value of Fixed Asset Navigation	(269,138,292)	(269,138,292)	0	0.00%
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari BPYBDS / Accumulation of Fixed Asset Navigation Reduction from BPYBDS	408,393,524	408,393,524	0	0.00%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Incomes				
Laba Yang Belum Direalisasi Atas Efek / Unrealized Gain upon Effect	40,144,097	24,015,711	16,128,386	67.16%
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Imbalan Paska Kerja / Actual Gain (Loss) of Post Employment Benefit	(93,018,794)	(54,229,193)	(38,789,601)	71.53%
Saldo Laba / Gain Balance				
Dicadangkan / Reserved	4,080,412,385	3,407,178,379	673,234,006	19.76%
Laba tahun berjalan / Gain of the Current Year	1,158,800,143	841,542,506	317,257,637	37.70%
Jumlah ekuitas yang diatribusikan ke entitas induk / Equity total attributed to the main entity	11,995,101,769	11,027,271,341	967,830,428	8.78%
Kepentingan non pengendali / Non controller Interest	2,395,091	1,777,885	617,206	34.72%
Jumlah Ekuitas / Equity Total	11,997,496,860	11,029,049,226	968,447,634	8.78%

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

REPORT OF GAIN (LOSS) AND CONSOLIDATION OTHER COMPREHENSIF INCOME

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian / Gain Loss and Consolidation Other Comprehensive Income Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pendapatan Operasional / Operational Income	6,138,271,899	5,249,629,757	888,642,142	16.93%
Beban Operasional / Operational Charge	4,488,862,083	3,955,669,892	533,192,191	13.48%
Laba Operasional / Operational Gain	1,649,409,816	1,293,959,865	355,449,951	27.47%
Pendapatan dan (Beban) Non Operasional / Non-operational Income and Charge	(140,557,060)	(211,217,387)	70,660,327	(33.45%)
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan Badan / Gain before the estimated Company Income Tax	1,508,852,756	1,082,742,478	426,110,278	39.35%
Total Pajak Penghasilan / Income Tax Total	349,275,602	240,769,848	108,505,754	45.07%
Laba Bersih Tahun Berjalan / Nett Gain of the Current Year	1,159,577,154	841,972,630	317,604,524	37.72%
Jumlah Laba Komprehensif Lain / Other Comprehensive Gain Amount	(22,661,215)	(119,777,536)	97,116,321	(81.08%)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Gain of the Current Year	1,136,915,939	722,195,094	414,720,845	57.43%
Laba Diatribusikan Kepada / Gain Attributed to:				
Pemilik Entitas Induk / Main Entity Owner	1,158,800,143	841,542,506	317,257,637	37.70%
Keperentingan Non Pengendali / Non-Controller Interest	777,011	430,124	346,887	80.65%
Laba Komprehensif Diatribusikan Kepada / Comprehensive Gain Attributed to:				
Pemilik Entitas Induk / Main Entity Owner	1,136,138,928	721,764,970	414,373,958	57.41%
Keperentingan Non Pengendali / Non-Controller Interest	777,011	430,124	346,887	80.65%
Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah Penuh) / Nett Gain per basic per share (in Full Rupiah)	181	131	50	38.17%



PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp888,64 miliar atau 35,09%, dari Rp5,25 triliun di 2015 menjadi Rp6,14 triliun di 2016. Kenaikan ini berasal dari kenaikan pendapatan aeronautika dan pendapatan non aeronautika.

OPERATIONAL INCOME

The Company's operational income increased about Rp 888.64 billion or 35.09%, from Rp 5.25 trillion in 2015 into Rp 6.14 trillion in 2016. The increase came from the increase of aeronautics income and non-aeronautics income.

Tabel Pendapatan Operasioanal / Operational Income Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
Pendapatan Aeronautika / Aeronautics Income	3,612,288,026	3,155,236,901	457,051,125	14.49%
Pendapatan Non Aeronatika / Non-Aeronautics Income	2,525,983,873	2,094,392,856	431,591,017	20.61%
Jumlah Pendapatan Operasional / Operational Income Total	6,138,271,899	5,249,629,757	888,642,142	16.93%

PENDAPATAN AERONAUTIKA

Pendapatan aeronautika Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp457,05 miliar atau meningkat 14,49%, dari Rp3,16 triliun di 2015 menjadi Rp3,61 triliun di 2016. Peningkatan pendapatan Aeronautika didominasi oleh tingginya kenaikan pendapatan pada bidang Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Kenaikan PJP2U di tahun 2016 mencapai Rp393,71 miliar atau 16,55% dari Rp2,38 triliun di 2015 menjadi Rp2,77 triliun di 2016.

AERONAUTICS INCOME

The Company's aeronautics income increased about Rp 457.05 billion or increase about 14.49%, from Rp 3.16 trillion in 2015 into Rp 3.61 trillion in 2016. The increase of the Aeronautics income was dominated by the high income of the Aircraft Passenger Service (PJP2U) sector. The increase of PJP2U in 2016 reached Rp 393.71 billion or 16.55% from Rp 2.38 trillion in 2015 into Rp2.77 trillion in 2016.

Tabel Pendapatan Aeronautika / Aeronautics Income Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
PJP4U (Pelayanan Jasa dan Pendaratan dan Penyimpanan Pesawat Udara / PJP4U (Landing, Parking, and Hangar Services of the Airplane)	525,538,196	472,049,655	53,488,541	11.33%
PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara) / PJP2U (Aircraft Passenger Service)	2,772,510,513	2,378,795,901	393,714,612	16.55%
Pemakaian <i>Aviobridge</i> / <i>The use of Aviobridge</i>	133,823,660	128,150,565	5,673,095	4.43%
Pemakaian <i>Counter</i> / <i>The use of Counter</i>	105,762,864	104,664,080	1,098,784	1.05%
Pemakaian <i>Baggage Handling System</i> (BHS/HBS) / <i>The use of Baggage Handling System</i> (BHS/HBS)	74,652,793	71,576,700	3,076,093	4.30%
Jumlah Pendapatan Aeronautika / Aeronautics Income Total	3,612,288,026	3,155,236,901	457,051,125	14.49%

PENDAPATAN NON AERONAUTIKA

Pendapatan non aeronautika mengalami peningkatan sebesar Rp431,59 miliar atau 20,61% dari Rp2,09 triliun di 2015 menjadi Rp2,53 triliun di 2016. Pertumbuhan pendapatan non aeronautika khususnya berasal dari pendapatan sewa yang tumbuh Rp154,76 miliar atau 36,28% dan pendapatan konsesi yang tumbuh Rp157,24 atau 16,08%.

NON-AERONAUTICS INCOME

The non-aeronautics income increased about Rp 431.59 billion or 20.61% from Rp 2.09 trillion in 2015 into Rp 2.53 trillion in 2016. The growth of the non-aeronautics income mainly came from rent income which grew Rp 154.76 million or 36.28% and consession income which grew Rp 157.24 or 16.08%.

Tabel Pendapatan Non Aeronautika / Non-Aeronautics Income Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
Pemakaian telepon, listrik, air, parkir, anjungan dan kartu pas / Telephone, electricity, water, parking, platform, pass card usage	250,018,395	240,179,078	9,839,317	4.10%
Sewa - sewa / Rents	581,302,274	426,539,152	154,763,122	36.28%
Pemakaian ruang tunggu / Waiting room usage	96,726,698	71,930,334	24,796,364	34.47%
Konsesi / Consession	1,134,882,845	977,646,173	157,236,672	16.08%
Event dan Promosi / Event and Promotion	27,670,233	37,618,240	(9,948,007)	(26.44%)
Pergudangan <i>Warehousing</i> / Warehousing	302,899,398	279,287,184	23,612,214	8.45%
Jasa pemeliharaan dan Perbaikan / Maintenance and Construction	84,476,395	40,633,479	43,842,916	107.90%
Jasa lain / Other Services	48,007,635	20,559,216	27,448,419	133.51%
Jumlah Pendapatan Non Aeronautika / Non-Aeronautics Income Total	2,525,983,873	2,094,392,856	431,591,017	20.61%

BEBAN OPERASIONAL

Beban operasional mengalami peningkatan sebesar Rp533,19 miliar atau 13,48% dari Rp3,96 triliun di 2015 menjadi Rp4,49 triliun di 2016. Pertumbuhan beban operasional terutama berasal dari beban langsung lainnya, beban pelayanan penumpang, beban pegawai, dan beban umum dan administrasi. Beban langsung lainnya merupakan komponen beban operasional yang menyumbang kenaikan paling tinggi yaitu sebesar Rp187,23 miliar atau 36,41% dari Rp3,96 triliun di 2015 menjadi Rp4,49 triliun di 2016.

OPERATIONAL CHARGES

The operational charges increased about Rp 533.19 billion or 13.48% from Rp 3.96 trillion in 2015 into Rp 4.49 trillion in 2016. The growth of the operational charges came from the other direct charges, passengers service charge, employment charge, and administrative and general charges. Other direct charges was the operational charge component that contributed the highest increase which was Rp 187.23 billion or 36.41% from Rp 3.96 trillion in 2015 into Rp 4.49 trillion in 2016.

Tabel Beban Operasional / Operational Charge Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
Beban pegawai / Employment Charge	1,078,993,793	975,800,888	103,192,905	10.58%
Pemeliharaan / Maintenance	258,006,427	212,197,551	45,808,876	21.59%
Beban pemakaian persediaan / Inventory Usage Charge	40,408,579	38,980,094	1,428,485	3.66%
Utilitas / Utility	316,507,854	308,568,469	7,939,385	2.57%
Sewa / Rent	44,935,860	38,041,705	6,894,155	18.12%
Umum dan administrasi / General and Administration	688,573,717	613,106,138	75,467,579	12.31%
Pajak / Tax	206,259,651	208,864,164	(2,604,513)	(1.25%)
Asuransi / Insurance	15,986,366	15,700,895	285,471	1.82%
<i>Low value asset</i>	15,378,917	8,748,491	6,630,426	75.79%
Penyusutan dan amortisasi / Reduction and amortization	759,217,418	707,014,950	52,202,468	7.38%
Imbalan paska kerja / Post Employment Benefit	78,894,173	200,087,789	(121,193,616)	(60.57%)
Beban pelayanan penumpang / Passenger service charges	284,170,517	114,263,813	169,906,704	148.70%
Beban langsung lainnya / Other direct charges	701,528,811	514,294,945	187,233,866	36.41%
Jumlah beban operasional / Operational Charge Total	4,488,862,083	3,955,669,892	533,192,191	13.48%

LABA OPERASIONAL

Laba operasional di 2016 mencapai Rp1,65 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp355,45 miliar atau 27,47% dari 2015 yang mencapai Rp1,29 triliun. Hal ini disebabkan peningkatan pendapatan operasional yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban operasional yang dihasilkan oleh Perseroan.

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Jumlah pendapatan (beban) non operasional mengalami penurunan sebesar Rp70,66 miliar atau sebesar 33,45% dari total pendapatan (beban) non operasional yang sebesar Rp211,22 miliar di 2015 menjadi pendapatan (beban) non operasional sebesar Rp140,56 miliar di 2016 yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan keuangan sebesar Rp28,76 miliar.

OPERATIONAL GAIN

The operational gain in 2016 was Rp 1.65 trillion, increased about Rp 355.45 billion or 27.47% from 2015 which reached Rp 1.29 trillion. This was caused by the increase of the operational gain which was higher than the increase of the operational charge by the Company.

NON-OPERATIONAL INCOME (CHARGE)

The total of non-operational income (charge) decreased about Rp70.66 billion or 33.45% from the total of non-operational income (charge) which was (-) Rp211.22 billion in 2015 into the non-operational income (charge) of Rp140.56 billion in 2016 which was caused by the increase of the financial income Rp28.76 billion.

Tabel Pendapatan dan (Beban) Non Operasional / Non-Operational Income and (Charge) Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
			4=2-3	5=4/3
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pendapatan Non Operasional / Non-operational Income	194,155,669	314,708,036	(120,552,367)	(38.31%)
Beban Non Operasional / Non-operational Charge	(334,712,729)	(525,925,423)	(191,212,694)	(36.36%)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional / Jumlah income (charge) non operasional	(140,557,060)	(211,217,387)	70,660,327	(33.45%)

LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

Laba sebelum taksiran pajak penghasilan di 2016 mencapai Rp1,51 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp426,11 miliar atau 39,35% dari 2015 yang sebesar Rp1,08 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan pendapatan operasional lebih besar dibandingkan dengan kenaikan beban operasional.

GAIN BEFORE INCOME TAX ESTIMATION

Gain before the income tax estimation in 2016 reached Rp 1.51 trillion, increased about Rp 426.11 billion or 39.35% from 2015 which was Rp 1.08 trillion. The increase was caused by the increase of the operational income which was higher than the increase of the operational charge.

PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan mengalami peningkatan Rp108,51 miliar atau sebesar 45,07% dari Rp240,77 miliar di 2015 menjadi Rp349,28 miliar di 2016. Peningkatan pajak penghasilan disebabkan oleh meningkatnya pajak tangguhan yang sebesar Rp43,84 miliar atau 102,60% yang mencakup pajak tangguhan perusahaan maupun entitas anak.

INCOME TAX

The income tax increased about Rp 108.51 billion or 45.07% from Rp 240.77 billion in 2015 into Rp 349.28 billion in 2016. The increase of the income tax was caused by the increase of the accrued tax Rp 43.84 billion or 102.60% that included the company and the subsidiaries accrued tax.

Tabel Pajak Penghasilan / Income Tax Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
			4=2-3	5=4/3
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pajak Kini / Current Tax	348,165,197	283,496,037	64,669,160	22.81%
Pajak Tangguhan / Accrued Tax	1,110,405	(42,726,189)	43,836,594	(102.60%)
Jumlah / Jumlah	349,275,602	240,769,848	108,505,754	45.07%

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Laba bersih tahun berjalan di 2016 mencapai Rp1,16 triliun, meningkat sebesar Rp317,67 miliar atau sebesar 37,72% dari 2015 yang mencapai Rp841,97 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba operasional dan laba sebelum taksiran pajak penghasilan. Adapun laba tahun berjalan tersebut terdiri dari:

- Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang mencapai Rp1,16 triliun, meningkat Rp317,26 miliar atau 37,70% dari Rp841,54 miliar di 2015; dan
- Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali yang mencapai Rp777,01 juta, meningkat Rp346,89 juta atau 80,65% dari 430,12 juta di 2015.

CURRENT YEAR NETT GAIN

The nett gain of the current year in 2016 reached Rp 1.16 trillion, increased about Rp 317.67 million or 37.72% from 2015 which reached Rp 841.97 million. The increase was in line with the increase of the operational gain and the gain before the income tax estimation. The gain of the current year consisted of:

- Nett gain of the current year attributed to the owner of the main entity reaching Rp 1.16 trillion, increased Rp 317.26 million or 37.70% from Rp 841.54 million in 2015; and
- Nett gain of the current year attributed to the non-controller interest reaching Rp 777.01 million, increased about Rp 346.89 million or 80.65% from 430.12 million in 2015.

Tabel Laba Bersih Tahun Berjalan / Nett Gain of the Current Year Table
(in Thousand Rupiah)

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
			4=2-3	5=4/3
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1,158,800,143	841,542,506	317,257,637	37.70%
Laba tahun berjalan yang diatribusikan Kepentingan Non Pengendali / Laba tahun berjalan yang diatribusikan Kepentingan Non Pengendali	777,011	430,124	346,887	80.65%
Jumlah /Jumlah	1,159,577,154	841,972,630	317,604,524	37.72%

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF LAIN

Laba komprehensif lain meningkat Rp97,12 miliar atau sebesar 81,08%. Kerugian komprehensif di tahun 2015 yang sebesar Rp119,78 miliar, mengalami penurunan kerugian menjadi Rp22,66 miliar di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh laba yang belum teralisasi investasi efek.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan Rp414,72 miliar atau sebesar 57,43% dari Rp722,20 miliar di 2015 menjadi Rp1,14 triliun di 2016. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba tahun berjalan. Adapun penghasilan komprehensif tahun berjalan tersebut terdiri dari:

- Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang mencapai Rp1,14 triliun, meningkat Rp414,37 miliar atau 57,41% dari Rp721,77 miliar di 2015; dan
- Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali yang mencapai Rp777,01 miliar, meningkat Rp346,89 miliar atau 80,65% dari Rp430,12 miliar di 2015.

OTHER COMPREHENSIVE GAIN TOTAL

Other comprehensive gain increased Rp 97.12 billion or 81.08%. The comprehensive loss in 2015 which was Rp 119.78 billion, experienced the decrease of loss into Rp 22.66 billion in 2016. The decrease was caused by the unrealized gain upon effect.

COMPREHENSIVE GAIN OF THE CURRENT YEAR

The comprehensive gain of the current year increased Rp 414.72 billion or 57.43% from Rp 722.20 billion in 2015 into Rp 1.14 trillion in 2016. The increase was in line with the increase of the gain of the current year. The comprehensive income of the current year consisted of:

- The comprehensive income of the current year attributed to the owner of the main entity that reached Rp 1.14 trillion, increased Rp 414.37 billion or 57.41% from Rp 721.77 billion in 2015; and
- The comprehensive income of the current year attributed to the non-controller interest reached Rp 777.01 billion, increased Rp 346.89 billion or 80.65% from Rp 430.12 billion in 2015.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Gain of the Current Year Table

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
Laba Komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Comprehensive Gain of the current year attributed to the Owner of the Main Entity	1,136,138,928	721,764,970	414,373,958	57.41%
Laba Komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan Kepentingan Non Pengendali / Comprehensive Gain of the current year attributed to the Non-Controller Interest	777,011	430,124	346,887	80.65%
Jumlah / Total	1,136,915,939	722,195,094	414,720,845	57.43%

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar di 2016 mencapai Rp181 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp50 atau 38,17% dari 2015 yang mencapai Rp131 ribu. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih yang dialami oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

NETT GAIN PER BASIC STOCK

The nett gain per basic stock in 2016 reached Rp 181 thousand, increased about Rp 50 or 38.17% from 2015 which was Rp 131 thousand. This was caused by the increase of nett gain experienced by PT Angkasa Pura I (Persero).

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATION CASH FLOW REPORT
Tabel Arus Kas Konsolidasian / Consolidation Cash Flow Report

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

1	2016	2015	Pertumbuhan / Growth	
	2	3	4=2-3	5=4/3
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi / Cash flow from (for) Operation Activity	2,061,235,947	802,662,503	1,258,573,444	156.80%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi / Cash flow from (for) Investment Activity	(3,710,543,120)	(1,260,226,622)	(2,450,316,498)	194.43%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan / Cash flow from (for) Finance Activity	4,811,811,627	705,989,513	4,105,822,114	581.57%
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas / Increase (Decrease) of Cash and Equivalent Cash	3,162,504,454	248,425,394	2,914,079,060	1173.02%
Pengaruh Selisih Kurs / Influence of Currency difference	(12,562,303)	145,587,328	(158,149,631)	(108.63%)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Equivalent Cash of Beginning Year	1,746,272,845	1,352,260,123	394,012,722	29.14%
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Equivalent Cash of End of Year	4,896,214,996	1,746,272,845	3,149,942,151	180.38%

Kas dan setara kas akhir tahun 2016 mencapai Rp4,90 triliun, mengalami peningkatan Rp3,15 triliun atau sebesar 180,38% dari kas dan setara kas akhir tahun 2015 yang mencapai Rp1,75 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan yang berasal dari penerbitan emisi obligasi dan sukuk ijarah.

Cash and equivalent cash of the end of 2016 reached Rp 4.90 trillion, increased about Rp 3.15 trillion or 180.38% of the cash and equivalent cash of end of year in 2015 that reached Rp 1.75 trillion. The increase was caused by the increase of cash flow from the finance activity that came from the publication of the bond emission and Islamic bond.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
CASH FLOW FROM OPERATION ACTIVITY

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan Rp1,26 triliun atau 156,80% dari Rp802,66 triliun di 2015 menjadi Rp2,06 triliun di 2016. Peningkatan kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan penjualan tunai dan penerimaan penjualan kredit.

Nett cash received from the operation activity increased Rp 1.26 trillion or 156.80% from Rp 802.66 trillion in 2015 into Rp 2.06 trillion in 2016. The increase of the cash from the operation activities came from the reception of cash sale and the reception of credit sale.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan Rp2,45 triliun atau sebesar 194,43% dari Rp1,26 triliun di 2015 menjadi Rp3,71 triliun di 2016. Peningkatan arus kas dari aktivitas investasi disebabkan oleh penambahan aset tetap.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan Rp4,11 triliun atau 581,57% dari Rp705,99 miliar di 2015 menjadi Rp4,81 triliun di 2016. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh penerbitan emisi obligasi dan sukuk ijarah serta pencairan pinjaman bank jangka panjang.

TINGKAT KESEHATAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Penilaian tingkat kesehatan Perseroan dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 178 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara. Berdasarkan surat keputusan tersebut penilaian tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi:

1. SEHAT

- AAA Apabila total skor $TS > 95$
- AA Apabila total skor $80 < TS > 95$
- A Apabila total skor $65 < TS > 80$

2. KURANG SEHAT

- BBB Apabila total skor $50 < TS > 65$
- BB Apabila total skor $40 < TS > 50$
- B Apabila total skor $30 < TS > 40$

3. TIDAK SEHAT

- CCC Apabila total skor $20 < TS > 30$
- CC Apabila total skor $10 < TS > 20$
- C Apabila total skor $TS < 10$

Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku 2016 meliputi penilaian sebagai berikut.

- A. Aspek Keuangan
- B. Aspek Operasional
- C. Aspek Administrasi

Perhitungan tingkat kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2016 diuraikan pada tabel sebagai berikut.

CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITY

Nett cash that was used for investment activity decreased Rp 2.45 trillion or 194.43% from Rp 1.26 trillion in 2015 into Rp 3.71 trillion in 2016. The increase of the cash flow from the investment activities was caused by the increasing of the fixed asset.

CASH FLOW FROM THE FINANCE ACTIVITY

Nett cash gained from the finance activity increased from Rp 4.11 trillion or 581.57% from Rp 705.99 billion in 2015 into Rp 4.81 trillion in 2016. The increase of the cash flow from the finance activities was caused by the publication of bond emission and Islamic bond and the liquefaction of long term bank loan.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) LEVEL OF HEALTH

Perseroan level of health assessment is based on the Decree of State-Owned Business Number KEP.100/MBU/2002 4 June 2002 about the assessment on state-owned business and Rule from Minister of Transportation Number PM 178 2016 about the standard of air transport service. According to the decree, the level of health assessment by BUMN is categorized as:

1. HEALTHY

- AAA If the score $TS > 95$
- AA If the score $80 < TS > 95$
- A If the score $65 < TS > 80$

2. LESS HEALTHY

- BBB If the score $50 < TS > 65$
- BB If the score $40 < TS > 50$
- B If the score $30 < TS > 40$

- in Thousand Rupiah CCC If the score $20 < TS > 30$
- CC If the score $10 < TS > 20$
- C If the score $TS < 10$

The state-owned business (BUMN) level of health is based on the company annual performance and as for the assessment in 2016, the criteria is as follows:

- A. Financial Aspect
- B. Operational Aspect
- C. Administration Aspect

PT Angkasa Pura I (Persero) Level of Health in 2016 is described in the following table.

**Tabel Tingkat Kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 /
Table PT Angkasa Pura I (Persero) Level of Health in 2016**

(dalam Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah)

NO	INDIKATOR INDICATOR	BOBOT QUALITY	SATUAN UNIT	REAL TAHUN 2015 (AUDITED) REALIZATION IN 2015 (AUDITED)		TARGET TAHUN 2016 TARGET IN 2016		REAL TAHUN 2016 (AUDITED) REALIZATION IN 2016 (AUDITED)	
				NILAI VALUE	SKOR SCORE	NILAI VALUE	SKOR SCORE	NILAI VALUE	SKOR SCORE
A. ASPEK KEUANGAN / ASPEK KEUANGAN									
1	Imbalan kepada pemegang saham (ROE) / Shareholders rewards (ROE)	15	%	9.58	10.50	12.12	12.00	20.66	15.00
2	Imbalan Investasi (ROI) / Return of Investment (ROI)	10	%	13.18	8.00	12.79	7.00	13.66	8.00
3	Rasio Kas / Cash Ratio	3	%	72.63	3.00	75.63	3.00	134.08	3.00
4	Ratio Lancar / Current Ratio	4	%	114.35	2.50	148.66	3.00	157.15	3.00
5	Collection Period / Collection Period	4	Hari / Day	40	4.00	27	4.00	29	4.00
6	Perputaran Persediaan / Inventory Turnover	4	Hari / Day	3	4.00	2	4.00	2	4.00
7	Perputaran Total Asset / Total Asset Turnover	4	%	36.35	1.00	33.93	1.00	34.35	1.00
8	Ratio Modal Sendiri / Owned Capital Ratio	6	%	65.43	4.50	53.80	5.00	50.69	5.00
JUMLAH / TOTAL		50			37.50		39.00		43.00
B. ASPEK OPERASIONAL / OPERATIONAL ASPECT									
1	Customer Satisfaction Index (CSI)	15	Skala Likert (1-5)	4.27	15.00	4.33	15.00	4.67	15.00
2	Tingkat Pelayanan / Service rate								
	Pemeriksaan Security di Terminal / Security Check in The Terminal	5	%	100.00	5.00	90.00	5.00	100.00	5.00
	Fasilitas Umum / Public Facility								
	Kebersihan Toilet / Toilet Hygiene								
	Bandara DPS / DPS Airport	0.75	Bintang	****	0.75	****	0.75	***	0.60
	Bandara SUB,UPG,BPN,MDC / SUP,UPG,BPN,MDC Airport	0.75		***	0.75	***	0.75	***	0.75
	Bandara BIK,JOG,SOC,SRG,LOP,KOE / BIK,JOG,SOC,SRG,LOP,KOE Airport	1.00		**	1.00	**	1.00	***	1.00
Bandara BDJ, AMQ / BDJ, AMQ Airport		**					**		
Tingkat Kesejukan Ruangan / Room Coolness Level	2.5	%	95.00	2.50	90.00	2.50	96.25	2.50	
3	Pengembangan Fasilitas dan Investasi / Facility Development and Investment								

NO	INDIKATOR INDICATOR	BOBOT QUALITY	SATUAN UNIT	REAL TAHUN 2015 (AUDITED) REALIZATION IN 2015 (AUDITED)		TARGET TAHUN 2016 TARGET IN 2016		REAL TAHUN 2016 (AUDITED) REALIZATION IN 2016 (AUDITED)	
				NILAI VALUE	SKOR SCORE	NILAI VALUE	SKOR SCORE	NILAI VALUE	SKOR SCORE
	Pencapaian Tingkat daya serap program / Achieved program absorption rate m	5	%	71.74	4.00	100.00	5.00	70.78	2.50
	Pencapaian fisik investasi dari program yang telah komitmen / Physical investment from the committed program	5	%	44.10	4.00	75.00	5.00	69.21	4.00
JUMLAH / TOTAL		35			33.00		35.00		31.35

C. ASPEK ADMINISTRASI / ADMINISTRATIO ASPECT

1	Laporan Perhitungan tahunan 2015 / Annual Calculation Report 2015	6	waktu	28/02/2015	3.00	28/02/2016	6.00	28/02/2016	6.00
2	Laporan Periodik / Periodic Report	3	waktu	Maks. Tgl 31	3.00	Maks. Tgl 31	3.00	Maks. Tgl 31	3.00
3	Kinerja PUKK / PUKK Performance								
	Efektivitas penyaluran dana / The Effectiveness of Fund Drafting	3	%	96.28	3.00	96.04	3.00	92.50	3.00
	Tingkat kolektibilitas penyaluran / b. Level of distribution collectibility	3	%	87.87	3.00	71.00	3.00	88.83	3.00
JUMLAH / TOTAL		15			15.00		15.00		15.00
TOTAL A + B + C		100			85.50		89.00		89.35

SKOR TARGET TARGET SCORE		SKOR TARGET TARGET SCORE		SKOR REALISASI REALIZED SCORE	
85.50		89.00		89.35	
AA (SEHAT) / (HEALTHY)	80 < TS ≤ 95	AA (SEHAT) / (HEALTHY)	80 < TS ≤ 95	AA (SEHAT) / (HEALTHY)	80 < TS ≤ 95

Berdasarkan klasifikasi bobot di atas kesehatan Perseroan dalam tahun 2016 berada dalam klasifikasi "AA" dengan nilai bobot 89,35 di atas yang ditargetkan dalam RKAP tahun 2016 sebesar 89,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 85,50.

According to the classification of quality mentioned above, Perseroan level of health in 2016 was classified as "AA" with the quality value of 89,35 which was targeted in RKAP of 2016 for 89,00. This number has increased for 85,50 compared to the achievement in 2015.

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

Tabel Rasio Keuangan / Table of Financial Ratio

No.	URAIAN / Description	2016	2015
1	RENTABILITAS / RENTABILITY		
	Rasio Laba Operasi / Operation Profit Ratio	26.87%	24.65%
	Laba Terhadap Aset / Profit on Asset	4.90%	5.04%
	Rasio Operasi / Operation Ratio	73.13%	75.35%

No.	URAIAN / Description	2016	2015
2	LIKUIDITAS / LIQUIDITY		
	Rasio Lancar / Current Ratio	157.15%	114.24%
	Rasio Kas / Cash Ratio	134.08%	72.63%
3	SOLVABILITAS / SOLVABILITY		
	Rasio Hutang Terhadap Aset / Debt On Asset Ratio	49.31%	34.05%
	Rasio Hutang Terhadap Modal / Debt on Capital Ratio	97.27%	51.62%
	Rasio Hutang Terhadap Aset Tetap / Debt on Current Asset Ratio	66.37%	41.76%

- a. Perkembangan kondisi rentabilitas Perseroan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk rasio laba operasi tahun 2016 sebesar 26,87% mengalami peningkatan sebesar 2,22% dibandingkan dengan kondisi rentabilitas tahun 2015. Sedangkan untuk laba terhadap aset mengalami penurunan sebesar 0,14% dan rasio operasi mengalami penurunan sebesar 2,22% bila dibandingkan dengan tahun 2015.
- b. Perkembangan kondisi likuiditas Perseroan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan baik rasio lancar maupun rasio kas. Untuk rasio lancar tahun 2016 sebesar 157,15% mengalami peningkatan sebesar 42,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping itu, tingkat rasio kas mengalami peningkatan sebesar 61,45% dibandingkan dengan tahun 2015.
- c. Perkembangan kondisi solvabilitas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan. Untuk rasio hutang terhadap aset di tahun 2016 sebesar 49,31% mengalami peningkatan sebesar 15,26%, untuk rasio hutang terhadap modal di tahun 2016 sebesar 97,27% mengalami peningkatan sebesar 45,64%, dan untuk rasio hutang terhadap aset tetap di tahun 2016 sebesar 66,37% mengalami peningkatan sebesar 24,61%. Walaupun adanya kenaikan tersebut namun secara keseluruhan Perseroan masih mampu untuk memenuhi kewajibanya dengan aset yang dimiliki.
- a. The progress of Perseroan rentability condition from 2015 to 2016 has been in quite up and down. The operating profit ratio in 2016 was 26.87% and increased for 2,22% compared to the rentability condition in 2015. Meanwhile, the profit on asset has decreased for 0.14% and the operating ratio has increased for 2.2% compared to the number in 2015.
- b. Perseroan liquidity growth from 2015 to 2016 has been increased in term of current ratio and cash ratio. The current ratio in 2016 was 157.15% which has been increased for 42.80% from the previous year. Moreover, the cash ratio has been increased for 61.45% from 2015.
- c. The solvency increased from 2015 to 2016. In 2016, the debt ratio on asset was 49.31% and increased for 15.26%. As for the debt on capital ratio in the same year, the 97.27% ratio increased for 45.64%. Meanwhile, the debt on current asset ratio in 2016 was 66.37% and increased 224.61%. Even so, Perseroan is entirely capable to fulfill its responsibility towards its asset.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Pengukuran kemampuan membayar utang dilakukan dengan mengukur rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi seluruh kewajiban. Pengukuran rasio likuiditas terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Berdasarkan hasil pengukuran, kemampuan Perseroan

LIQUIDITY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

ABILITY TO PAY

The ability to pay is known by measuring the liquidity and solvency ratio. The liquidity ratio is used to measure the long term ability to pay while the solvency is to measure the fulfill all of the responsibility. The measurement of liquidity ratio comes from cash and current ratio. Based on the measurement result, Perseroan ability to pay short-term debt has increased compared to 2015. This is due the current asset that was bigger than the short-term liability.

dalam melunasi kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan dibandingkan 2015. Hal ini disebabkan peningkatan aset lancar yang lebih besar dari peningkatan liabilitas jangka pendek. Dengan demikian, kemampuan aset lancar Perseroan dalam menjamin liabilitas jangka pendek masih relatif baik.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (RASIO LIKUIDITAS)

Kondisi likuiditas Perseroan mengalami kenaikan baik rasio lancar maupun rasio kas. Pada tahun 2016 tingkat rasio lancar dan rasio kas mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015 masing-masing sebesar 42,8% dan 61,5%. Dengan demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek Perseroan sangat baik.

Rincian terkait tabel rasio likuiditas diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Rasio Likuiditas / Table of Liquidity Ratio

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth
Rasio Lancar / Current Ratio	157.2%	114.4%	42.8%
Rasio Kas / Cash Ratio	134.1%	72.6%	61.5%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (RASIO SOLVABILITAS)

Kondisi solvabilitas Perseroan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan (peningkatan Rasio Utang Terhadap Aset, Rasio Utang Terhadap Modal, dan Rasio Utang Terhadap Aset Tetap). Bila dibandingkan dengan tingkat solvabilitas tahun 2015 berarti terdapat penurunan masing-masing sebesar 15,3% untuk rasio utang terhadap aset, 45,7% untuk rasio utang terhadap modal, dan sebesar 24,6% untuk rasio utang terhadap aset tetap. Walaupun adanya penurunan, namun secara keseluruhan Perseroan masih mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki.

Rincian terkait tabel rasio solvabilitas diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Rasio Solvabilitas / Table of Solvency Ratio

Uraian / Description	2016	2015	Pertumbuhan / Growth
Rasio Utang Terhadap Aset / Debt on Asset Ratio	49.3%	34.0%	15.3%
Rasio Utang Terhadap Modal / Debt in Capital Ratio	97.3%	51.6%	45.7%
Rasio Utang Terhadap Aset Tetap / Debt On Current Asset Ratio	66.4%	41.8%	24.6%

Therefore, the company current asset in assuring the short-term liability is relatively good.

THE ABILITY TO PAY SHORT TERM DEBT (LIQUIDITY RATIO)

Perseroan liquidity condition is increasing in term of current ratio and cash ratio. In 2016, the current ratio and cash ratios have increased for 42,8% and 61,5% compared to the ratios in 2015. Therefore, Perseroan ability to pay short-term debt is very good.

The detail regarding the liquidity ratio is in the following table.

THE ABILITY TO PAY LONG-TERM DEBT (SOLVENCY RATIO)

Perseroan solvency condition in 2015 to 2016 was decreasing (the debt on asset ratio, debt on capital ratio, and debt on current asset ratio). By comparing the solvency ratio in 2015, we can see that debt on asset ratio decreased for 15,3%, debt on capital ratio decreased for 45,7%, and debt on current asset decreased for 24,6%. Even so, Perseroan still holds its capability to fulfill its responsibility with its owned asset.

The detail regarding the solvency ratio is described in the following table.

PERINGKAT OBLIGASI

Kemampuan membayar utang juga bisa dilihat berdasarkan peringkat obligasi. Obligasi I Angkasa Pura I saat ini mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan Obligasi dan "AAAsy" untuk penerbitan Sukuk Ijarah dari PT Peringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga/cicilan imbalan.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Untuk mengetahui periode waktu perputaran piutang PT Angkasa Pura I (Persero), dilakukan pengukuran tingkat kolektibilitas piutang. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat kolektibilitas Perseroan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kolektibilitas piutang di tahun 2016 mencapai 29 hari, mengalami percepatan 11 hari dibandingkan kolektibilitas tahun 2015 yaitu sebanyak 40 hari. Percepatan kolektibilitas piutang dicapai melalui beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai berikut.

- *Daily Monitoring Collection*, yaitu setiap Cabang memonitor realisasi penagihan harian dibandingkan target penagihan yang telah ditetapkan
- Pelaksanaan Listrik Pra Bayar di Cabang sebagai fungsi *control* pembayaran kewajiban *customer*
- Evaluasi kinerja pembayaran sebagai upaya perpanjangan perjanjian sewa dengan *customer*
- Upaya penagihan yang intensif dengan penerapan sanksi bagi *customer* yang tidak memenuhi kewajiban
- *Auto Debet* sebagai *monitoring* pembayaran dari *customer*. Dengan sistem ini *customer* harus menyediakan dana pada rekening yang akan didebet pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Kontribusi kepada negara diwujudkan dengan kepatuhan Perusahaan dalam pembayaran pajak. PT Angkasa Pura I (Persero) dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, dimana hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAYARAN PAJAK

Total Pembayaran Pajak periode Januari sampai dengan Desember 2016, sebagai berikut.

BOND RATING

The ability to pay debts can also be seen on the basis of bond rating. Bonds I Angkasa Pura I is currently rated "AAA" for the issuance of bonds and "AAAsy" for the issuance of Sukuk Ijarah of PT Securities Rating Indonesia (PEFINDO). The rating indicates likelihood of timely payment of total principal and interest/installment reward.

RECEIVABLE COLLECTIBILITY RATE

In order to calculate the receivable cycle of PT Angkasa Pura I (Persero), the receivable collectibility rate must be measured. Based on the measurement result, Perseroan receivable collectibility has been increased compared to the previous year. In 2016, the receivable collectibility rate was reached in 29 days while in 2015 it was reached in 40 days. This rate has been accelerated for 11 days in 2016. The acceleration was caused by the development of new organization in PT Angkasa Pura I (Persero) in 2016 and the monitoring toward the tenants in the branch.

- *Daily Monitoring Collection*, i.e. the Branch monitors the realization of daily collection compared to the collection specified
- Implementation Pre-Paid Electricity at the Branch as the payment control of customer liability.
- Payment performance evaluation as the extension of lease agreement with customer
- Intensive Collection effort by imposing sanction for non-compliance customer.
- Auto Debit as a means to monitor payment from customer. By applying this system, the customer must provide fund on the debited account on the maturity date.

CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

The company contribute to the country by paying tax. PT Angkasa Pura I (Persero) within its operational work has been applying a good corporate governance transparently and accountably. Especially in managing its taxation right and responsibility, whereas the taxation right and responsibility is in accordance to the regulation.

TAX PAYMENT

Tax payment total from January to December 2016 is as follows.

Tabel Pembayaran Pajak / Table of Tax Payment

(dalam Ribuan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian Pajak / Tax Description	2016
PPh Pasal 21 / Article 21 of Income Tax	116,760
PPh Pasal 23 / Article 23 of Income Tax	15,677
PPh Pasal 4 Ayat 2 / Article 4 Version 2 of Income Tax	85,726
PPh Badan / Corporate Income Tax	318,134
Pajak Pertambahan Nilai / Value-added Tax	386,974
SWPD3D/BNN dan Lain-lain / SWPD3D/BNN and others	52,495
Pajak Bumi dan Bangunan / Property Taxn	72,971
Jumlah / Total	1,048,737

KETIDAKPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK

Pada periode 2016, tidak terdapat ketidak patuhan Perusahaan dalam hal kewajiban membayar pajak (NIHIL).

STRUKTUR MODAL

KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perseroan memiliki kebijakan menggunakan ekuitas sebagai sumber modalnya. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap Utang. Sampai dengan 2016, struktur Modal PT Angkasa Pura I (Persero) masih didominasi oleh ekuitas.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2016 yang dimiliki oleh Perseroan adalah 49,31% berasal dari Liabilitas dan 50,69% berupa Ekuitas, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2015. Komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas di tahun 2015 sebesar 34,05% mengalami peningkatan sebesar 15,26%. Sedangkan komposisi Ekuitas di tahun 2015 sebesar 65,95%, menurun 15,26%.

Rincian Terkait struktur modal diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Struktur Modal / Table of Capital Structure

(dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan dalam persen / in thousand Rupiah, except if it is stated in percentage)

Uraian / Liability	2016	Presentase Total Modal / Percentage of Capital Total	2015	Presentase Total Modal / Percentage of Capital Total
Liabilitas / Liabilitas	11,669,449,094	49.31%	5,693,287,436	34.05%
Liabilitas Jangka Pendek / Short-Term Liability	3,871,791,651	16.36%	2,704,914,028	16.18%

NON-COMPLIANCE IN PAYING TAXES

In 2016, the company showed no disobedience in tax payment.

CAPITAL STRUCTURE

MANAGEMENT POLICY AND MANAGEMENT POLICY

Company own the policy to use the equity as the capital source In order to reduce the dependency on debt. Until 2016, the capital structure PT Angkasa Pura I (Persero) is dominated by the equity.

DETAIL OF CAPITAL STRUCTURE

The composition of capital structure in 2016 owned by Perseroan comes from Liability of 49,31% and 50,69% comes from equity. This composition has shifted compared to the number in 2015. The capital structure originates from Liability of 2015 is 34,05% and increased for 15,26%. Meanwhile, the equity composition in 2015 for 65,95% decreased for 15,26%.

The detail on capital structure is described in the following table.

Uraian / Liability	2016	Presentase Total Modal / Percentage of Capital Total	2015	Presentase Total Modal / Percentage of Capital Total
Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liability	7,797,657,443	32.95%	2,988,373,408	17.87%
Ekuitas / Equity	11,997,496,860	50.69%	11,029,049,226	65.95%
Total Modal / Total Capital	23,666,945,954	100.00%	16,722,336,662	100.00%

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

ENTITAS INDUK

a. Perjanjian Kredit Sindikasi

Pada tanggal 18 Agustus 2016 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang terdiri dari:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- PT Bank Central Asia Tbk.
- PT Indonesia Infrastructure Finance
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian kredit tersebut dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi nomor 12 tanggal 18 Agustus 2016 dihadapan Notaris Julius Purnawan, SH. MSI. Notaris di Jakarta.

Pinjaman ini ditujukan untuk:

- 1) Untuk pengembangan bandar udara yang dikelola dan dalam wilayah kerja:
 - bandar udara New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo.
 - bandar udara Syamsudin Noor, Banjarmasin
 - bandar udara Ahmad Yani, Semarang.
 - bandar udara Sultan Hasanuddin, Makassar
 - bandar udara Juanda, Surabaya
- 2) Investasi rutin
- 3) Membiayai setiap biaya yang timbul untuk persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi dan dokumen lainnya yang wajib dibuat.

Pihak pembiayaan tidak terikat untuk memantau atau memeriksa penggunaan jumlah yang dipinjam.

Jumlah komitmen Rp4.000.000.000

MATERIAL BOND FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

PARENTS ENTITY

a. Syndicated Credit Agreement

On 18 August 2016, the company has signed the syndicated credit agreement with the Bank and Non-Bank Financial Institution. They were:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- PT Bank Central Asia Tbk.
- PT Indonesia Infrastructure Finance
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The agreement was stated in Syndicated Credit Agreement Certificate number 12, 18 August 2016 in the presence of Notary Julius Purnawan, SH. MSi. Notary in Jakarta.

The loan is aimed to :

- 1) Airports development managed within the working region:
 - New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo.
 - Syamsuddin Noor Airport, Banjarmasin
 - Ahmad Yani Airport, Semarang.
 - Sultan Hasanuddin Airport, Makassar
 - Juanda Airport, Surabaya
- 2) Routine Investment
- 3) Funding every budget for the transactional document and other compulsory document Cooperation, provision and signing.

The unbound funding is to monitor or check the use of the borrowed money.

Total commitment of Rp4.000.000.000

Yang terinci / Detailed:	Plafond / Plafond	Saldo / Balance
PT Sarana Multi Infrastruktur (persero)	1,350,000,000	834,326,042
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,000,000,000	618,019,290
PT Bank Central Asia Tbk.	800,000,000	494,415,432
PT Indonesia Infrastructure Finance	500,000,000	309,009,645
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	350,000,000	216,306,751
Total Komitmen / Commitment Total	4,000,000,000	2,472,077,160

Jumlah pencairan fasilitas ini minimal adalah Rp50.000.000 atau apabila lebih kecil merupakan sisa komitmen.

Jangka waktu pinjaman:

- 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Juni 2031 (15 tahun)
- Masa tenggang 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- Pelunasan dilakukan setelah masa tenggang dengan cara angsuran, debitur tidak boleh melakukan pinjaman kembali setiap bagian pinjaman yang telah dilunasi.

Tingkat bunga:

- Marjin dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Marjin sebesar 2,25% per tahun dan LPS adalah besaran tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS yang berlaku pada tanggal penetapan suku bunga.

b. Sindikasi Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI

Perseroan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri sesuai Perjanjian Transaksi Khusus Nomor CRO.KP/233/PTK/13, Akta Nomor 1341 tanggal 26 Juli 2013 Notaris Julius Pumawan, SH. MSi. sebesar Rp4.400.000.000,-. Pihak PT Angkasa Pura I (Persero) sesuai dengan Surat AP Nomor AP.I.4757/KU.24/2013/PD-B tanggal 23 Juli 2013 meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pengalihan sebagian porsi pembiayaan (*sell down*) atas Fasilitas Kredit kepada BNI dan BRI.

Berdasarkan Akta Nomor 370 dan 371 Notaris Julius Pumawan, SH. MSi. tanggal 18 September 2013 Bank Mandiri, BNI, BRI dan Perseroan telah menandatangani Akta Pengalihan Porsi Pembiayaan, dimana berdasarkan akta tersebut Bank Mandiri mengalihkan sebagian porsi pembiayaannya kepada BNI senilai Rp1.000.000.000 dan BRI senilai Rp1.000.000.000.

Sehubungan dengan apa yang sudah diuraikan diatas Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Perseroan sepakat dan setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Bersama berdasarkan Akta No.372 Notaris Julius Purnawan, SH. MSi. dan addendum I (pertama) dari perjanjian No.372, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Limit kredit Rp4.400.000.000

Sifat dan tujuan

Fasilitas kredit bersifat *Non Revolving* dan digunakan sebagai *corporate financing* untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek pengembangan bandara dan/atau investasi

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas terhitung 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Bank

The facility minimum disbursement is Rp50.000.000 or if smaller than the remaining commitments.

Loan Period :

- 23 August until 23 June 2031 (15 years)
- The grace period is 5 years after the agreement signing.
- The repayment is after the grace period and conducted by using installment. The debtor must not make any loan for every repayment.

Interest rate :

- The margin and LPS (Underwriter Institution) margin is 2.25% per year and LPS is the amount of interest rate set by the LPS and becomes effective once the interest rate is determined.

b. The Syndication of Bank Mandiri, Bank BNI, and Bank BRI

Perseroan has been facilitated with credit from Bank Mandiri after the Special Transaction Agreement Number CRO.KP/233/PTK/13, Certificate Number 1341 26 July 2013 Notary Julius Pumawan, SH. MSi. for 4.400.000.000,-. PT Angkasa Pura I according to the Letter of AP Number AP.I.4757/KU.24/2013/PD-B 23 July 2013 requested Bank Mandiri to redirect some purchase portion (*sell down*) over the credited facility to BNI and BRI.

According to Certificate Number 370 and 371 Notary Pumawan, SH. MSi. 18 September 2013, Bank Mandiri, BNI, BRI and AP I have signed the Certificate of Finance Portion Redirection. According to the certificate, Bank Mandiri redirected some portion of its funding to BNI for Rp1.000.000.000 and BRI for Rp1.000.000.000.

Therefore, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, and AP I have agreed to make a Funding Agreement based on the Certificate Number 372 Notary Julius Purnawan, SH. MSi. and addendum I (first) from the agreement number 372, the term and condition are as follow:

Credit limit Rp4.400.000.000

Characteristic and purpose

The credit facility is non-revolving and used as the corporate financing to fund and/ or refund the airport development project and/ or investment

Period

The facility is effective for 7 (seven) years after Bank Mandiri Credit Agreement signing on 26 July 2013

Mandiri yaitu tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 termasuk masa *grace period* dan masa Penarikan Kredit selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan kredit tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 25 Januari 2016.

Tingkat Bunga

Bunga dihitung hari demi hari secara efektif 1 (satu) tahun sama dengan 360 hari berdasarkan *Deposit Insurance Rate* dalam Rupiah untuk *commercial bank* yang ditetapkan 2 (dua) hari Kerja sebelum periode suku bunga bulan berikutnya dan Lembaga Penjamin Simpanan ditambah margin sebesar 2,45%.

Provisi dan *Withdrawal Fee*

Bank membebani provisi kredit sebesar 0,25% yang diperhitungkan dari limit kredit yang dibayar pada saat pengaktifan perjanjian. Selain itu Perusahaan juga diwajibkan membayar *Withdrawal fee* sebesar 0,25% dari penarikan kredit yang dibayar pada setiap penarikan kredit.

Agunan Kredit

Fasilitas kredit dijamin dengan seluruh aset/harta kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada.

Hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura 1 (Persero):

Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan perjanjian tersebut belum dinyatakan lunas maka Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga, kecuali dalam transaksi usaha Perseroan sehari-hari.
- 2) Memperoleh kredit/pinjaman baru dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya kecuali pinjaman dari pemegang saham yang menjadi pinjaman subordinasi, hutang usaha dalam kaitannya dengan operasional proyek atau kegiatan usaha sehari-hari, pinjaman dalam bentuk obligasi atau bentuk surat hutang lainnya dimana pinjaman tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian atau seluruh fasilitas kredit, dan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya dalam rangka pembayaran fasilitas kredit apabila terdapat penyesuaian suku bunga
- 3) Menjaminkan harta kekayaan/aset yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga.
- 4) Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit.
- 5) Memberikan kredit kepada pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau untuk kegiatan usaha yang normal termasuk kepada anak perusahaan.

to 25 July 2020 including the grace period and credit withdrawal period for 2 (two) years and 6 (six) months since the signing date on 26 July 2013 to 25 January 2016.

Interest Rate

The interest is calculated day by day effectively for 1 (one) year which equals to 360 days . It is based on the deposit insurance rate in Rupiah for Commercial Bank which is set 2 (two) days before the next interest rate and the underwriter is added with margin of 2,45%.

Provision and *Withdrawal Fee*

The bank burdens the credit provision for 0,25% and is calculated from the credit limit paid when the agreement becomes effective. Moreover, the company is responsible to pay the withdrawal fee of 0,25% for each credit withdrawal.

Credit Collateral

The credit facility is guaranteed with Perseroan entire asset, in the form of existed or to be existed moving or not moving goods.

Thing that are not conducted by PT Angkasa Pura 1 (Persero) :

Based on the agreement, Perseroan must pay all of unsettled debts. By then, Perseroan is not allowed to do the following things :

- 1) Becoming the guarantor for the third party, except in daily Perseroan transaction.
- 2) Receiving credit / new loan from another third party or financial institution except receiving credit from the shareholders which turns out to be a subordinated loan, accounts payable in relation with the project operational or daily business activity, loan in the form of obligation or bonds in which the loan is used entirely for the entire or partial credited facility payment, and loan from financial institution or third party in paying the credited facility if there is an interest rate adjustment
- 3) Pledging the existing asset or asset in the future to the third party.
- 4) Redirecting or handing over, partially or entirely on the right and responsibility related to the credited facility.
- 5) Providing credit to any party including but not limited to the shareholders except to the employee and / or normal business activity including to the subsidiary company.

Hal-hal yang wajib dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero):

Menjaga rasio keuangan debitur, *current ratio* minimal 100%, *debt service coverage* minimal 100%, *debt to equity ratio* (DER) maksimal 300%.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Pembayaran pokok utang bank jangka panjang masing-masing sebesar Rp540.377.024 dan Rp57.211.711.

Manajemen menyatakan bahwa dalam periode laporan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anaknya tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas utang bank yang telah jatuh tempo yang dimilikinya.

ENTITAS ANAK

PT Angkasa Pura Suport telah mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Mandiri Syariah yang digunakan untuk modal kerja usaha tenaga kerja *outsourcing* dengan limit pembiayaan sebesar Rp9.000.000, pinjaman dijamin dengan 18 units X ray baggage, 50 units Walkthrough merk Heimann Smith tahun 2012 - 2013 dan 4 unit mobil sedan merk Toyota dan Camry tahun 2012 - 2013. Jangka waktu kredit 12 bulan dengan tingkat bunga 12% per tahun, biaya administrasi per bulan Rp90.000.

Pada September 2013 PT Angkasa Pura Suport juga mendapatkan Kredit Investasi dari Bank Syariah Mandiri untuk Investasi kendaraan yang akan disewakan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) dengan limit pembiayaan sebesar Rp15.000.000. Selain dijamin dengan aset diatas fasilitas pinjaman ini juga dijamin dengan 24 unit kendaraan sedan toyota Altis, mobil Toyota Fortuner, Toyota Alphard, Toyota Innova, 4 unit Traktor Mower, dan satu (1) unit truk Toyota Hino. Jangka waktu pembiayaan 48 bulan, total margin untuk 48 bulan sebesar Rp5.662.177.

Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang diberikan kepada PT Angkasa Pura Suport (entitas anak) dari PT Bank Central Asia Tbk., berdasarkan perjanjian No.1182516401-PK-001-013 tanggal 28 Desember 2012 dengan plafon sebesar Rp3.600.000. Fasilitas tersebut berjangka waktu 36 bulan dengan tingkat 4,15% flat per tahun dan dijamin dengan aset entitas anak yang berupa kendaraan bermotor.

PT Angkasa Pura Suport juga mendapat fasilitas pinjaman dari Bank BNI berupa Kredit Modal Kerja Transaksional maksimum sebesar Rp40.000.000, *Term Loan* maksimum sebesar Rp100.000, Garansi Bank maksimum sebesar Rp15.000.000 dan *Forex Line* maksimum sebesar USD4,000,000 yang diikat Akta No.27 tanggal 11 Desember 2014 dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH, dan telah diperpanjang dengan posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Syarat lain adalah menjaga *Current Ratio* 100%, *Debt Equity Ratio* 2,5 X dan *Debt Service Covered Ratio* 100%.

PT Angkasa Pura I (Persero) obligatory:

Maintaining the debtor financial, the minimum current ratio of 100%, minimum debt service coverage of 100%, maximum debt to equity ratio (DER) of 300%.

On 31 December 2016 and 2015. The payment of long-term bank principal debt each for Rp540.377.024 and Rp57.211.711.

The management stated that within the reporting period until the consolidated financial report date, the company and its subsidiary entity had never been in overdue to pay the debt.

SUBSIDIARY ENTITY

PT Angkasa Pura support has earned the business capital credit from Bank Mandiri Syariah which was used to pay the outsourced employee. The credit limit is Rp 9.000.000 and the loan is guaranteed with 18 units of x-ray baggage, 50 units of Heimann Smith walkthrough from 2012 to 2013 and 4 unit of Toyota and Camry seande from 2012 to 2013. The credit period is 12 months, the interest rate is 12% per year and the monthly administration fee is Rp 90.000.

In September 2013, PT Angkasa Pura Support also has earned a credit investment from Bank Mandiri Syariah for the vehicle investement that will be rented to PT Angkasa Pura I (Persero). The credit limit was Rp 15,000,000. Moreover, the loan was also guaranteed with 24 units of Toyota Altis seande, Toyota Fortuner, Toyota Alphard, Toyota Innova, 4 units of mower tractor, and 10 units of Toyota Hino truck. The payment period was 48 months and the margin total for 48 months was Rp5.662.177.

Motorized Vehicle Credited Facility (KKB) given to PT Angkasa Pura Suport (subsidiary entity) comes from PT Bank Central Asia Tbk., is based in the agreement Number. 1182516401-PK-001-013 28 December 2012 with the plafond of Rp3.600.000. The facility period is 26 months with 4,15% flat rate per year and is guaranteed with the subsidiary entity asset in the form of motorized vehicle.

PT Angkasa Pura Support is also obtains the loan facility from Bank BNI in the form of Transactional Working Capital Credit with the maximum amount of Rp40.000.000, the maximum term loan of Rp 100.000, maximum bank insurance of Rp15.000.000 and maximum Forex Line of USD4,000,000 which are tied by the Certificate Number 27 11 December 2014 in the presence of Notaris Muchlis Patahna, SH, and has been extended until 31 December 2016. The other requirements are to maintain the 100% ratio, 2,5 X Debt Equity and 1000% Debt Service Covered Ratio.

PERJANJIAN DAN PERIKATAN

1. Perjanjian Konsesi No. HK.201/2/8/DRJU.kum.2015 dan No/SP.333/HK.06.03/2015/DU tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan atas pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

Perjanjian ini mengatur pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan atas pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

- Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara.
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos Fasilitas elektronik, listrik, air, dan instalasi limbah buangan
- Lahan untuk bangunan, lapangan, dan *industry* serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Besaran konsesi adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun sebagai Penerimaan Bukan Pajak dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. Nilai konsesi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada DJPU setiap 1 tahun sekali setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik paling lambat pada bulan April tahun berikutnya. Apabila ada kelebihan atau kekurangan pembayaran besaran nilai konsesi, maka akan diperhitungkan pada pembayaran besaran nilai konsesi di tahun berikutnya.

Jangka waktu konsesi 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) tahun.

Perseroan diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra atau menugaskan Badan Usaha atau anak perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan suatu bagian atau bagian-bagian kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Bandara Ahmad Yani Pada tanggal 17 Juni 2014 Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor PKS/21/VI/2014 dan Nomor SP.I.111/HK.09.01/2014/PD tentang Kerja Sama Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik TNI AD di Bandara

AGREEMENT AND ATTACHEMENT

1. Concession Agreement Number. HK.201/2/8/DRJU.kum.2015 and No/ SP.333/HK.06.03/2015/DU15 December 2015 about the Airport Service, made under the signature by and between Air Transportation General Directorate (DJPU) and Perseroan.

This agreement regulated the concession grant to perform the airport service on the flight service, passengers, goods, and post that consist of provision and/or development:

- The facility for landing, take-off, maneuver, parking, and airplane keeping.
- The terminal facility for passenger transport service, cargo, and electronic, electrical, water facility post, and waste facility
- The land for building, yard, and industry or the building related to the smoothness of aerial transportation.

The concession is 2,5% (two point 5 percent) from the airport service income per year as a Non-Tax Income and will be evaluated for every 5 (five) years. The concession value will be paid by Perseroan to DJPU once per year after audited by Public Accountant Office at least in April of the following year. If the concession value is overpaid or underpaid, than the value will be calculated in the following year.

The concession period is 2 (two) since 15 December 2015 and can be extended for 30 (thirty) years.

Perseroan is granted with the right to cooperate with another party and/or partner up to assign the business entity or subsidiary with the competence to conduct the airport service, without reducing Perseroan responsibility and obligation in this agreement.

2. The agreement of land utilization Cooperation of the land owned by TNI in Ahmad Yani Airport on 17 June 2014. Perseroan has signed the agreement Number PKS/21/VI/2014 and Number SP.I.111/HK.09.01/2014/PD about the Cooperation to utilize some part of land owned by TNI in Ahmad Yani International Airport, Semarang. This agreement aims to implement the development of

International Ahmad Yani Semarang. Perjanjian kerja sama ini mempunyai maksud dan tujuan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara International Ahmad Yani Semarang untuk penerbangan sipil dan penerbangan militer dengan prinsip prinsip korporasi.

Ruang lingkup kerjasama adalah:

- a. Pemanfaatan tanah milik TNI AD seluas 885.500 meter persegi yang akan digunakan pengembangan bandar udara seluas 676.089 m² dan 208.411 m² untuk resapan;
- b. Pembayaran kontribusi kepada negara oleh Perseroan adalah berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
- c. Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh Perseroan ke TNI AD setelah perjanjian berakhir.

Besaran kontribusi tetap per tahun sebesar 0,6% dari nilai wajar tanah yang menjadi obyek kerjasama atau $0,6\% \times \text{Rp}219.471.288 = \text{Rp}1.316.828$, kenaikan nilai tanah setiap tahun sebesar 4,14%. Pembagian keuntungan sebesar 12,29 % dari *net cash flow operating* dan *investing* (dari laporan yang diaudit) per tahun dengan asumsi nilai investasi sebesar Rp1.566.431.500.

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatangani akad.

Pada akhir masa kontrak tanah beserta bangunan dan fasilitas yang ada di atasnya menjadi milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

3. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (AL) di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.

Pada tanggal 13 Februari 2014 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor: PKS/8/II/2014 dan Nomor: SP.51/HK.09.01/2014/PD tentang Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Fasilitas Milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya untuk kepentingan penerbangan sipil maupun penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

- a. Objek Permasalahan adanya perbedaan persepsi antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atas Luas Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama di area jalan dekat hanggar merpati dan lahan apron A.10 sampai dengan A.14, pemanfaatan secara bersama-sama landasan pacu Lanudal Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya beserta fasilitas yang tersedia untuk operasional penerbangan sipil dan militer.

Ahmad Yani Airport infrastructure for civil and military flight with Cooperation principal.

The agreement includes

- a. the land owned by TNI of 885.500 square meters that will be utilized to construct the 676.089 m² airport and 208.411 m² absorption area;
- b. The contribution payment to the country is conducted by AP1 in the form of current contribution and profit sharing.
- c. The asset obtained from the Cooperation will be handed over by AP1 to TNI after the agreement overs.

The amount of contribution per year is 0,6% from the land fair value as the Cooperation object or $0,6\% \times \text{Rp}219.471.288 = \text{Rp}1.316.828$, the land value is increasing for 4,14% every year. The income share is 12,29% from the operating and investing net cash flow (from the audited report) per year with assumed investment value of Rp1.566.431.500.

The period of the utilization agreement is 30 (thirty years) since the signing.

By the end of the agreement, the land including the building and facility will become TNI property which will be included in the news of goods handover.

3. Cooperation agreement of Indonesian Naval Force land utilization in Juanda International Airport, Surabaya.

On 13 February 2014, a utilization Cooperation was signed: Number PKS/8/II/2014 and Number : SP.51/HK.09.01/2014/PD This agreement aims to execute the means development and infrastructure of Juanda International Airport in order to satisfy the interest of civil flight and Indonesian Naval Force.

- a. The problems object is the different of perception between PT Angkasa Pura I (Persero) and Indonesian Navy (TNI AL) over the agreement object (the land size) in the area close to Merpati's hangar and apron field A.10 with A.14, the utilization of Juanda International Airport including the facility available for the civil and military flight.

- b. Objek perjanjian kerja sama ini adalah tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 3.143.352 m² yang digunakan sebagai berikut:
- Landasan pacu dan tanah di sebelah utara Landasan pacu.
 - Landasan Pacu Lanudal Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya seluas 135.000 m².
 - Bidang tanah sebagai *taxi way*, *wind shock*, *drainase* dan fasilitas lain seluas 1.021.129 m².
 - Tanah di sebelah selatan landasan pacu seluas 1.987.223 m².
 - Tanah rumput kali Turen disebelah selatan landasan pacu seluas 1.585.129 m².
 - Luas tanah untuk bangunan terminal seluas 27.272 m².
 - Bangunan Apron seluas 101.213 m² dari apron barat sampai dengan sisi utara tower.
 - *Taxi way*, *alarm area* dan *fillet* seluas 189.701 m².
 - Lahan parkir mobil, taman dan pelataran seluas 43.618 m².
 - Rumah pompa di Banjar Kemuning seluas 130 m²
 - Bidang tanah dan bangunan Inner Marker seluas 40.000 m² di Sedati, Sidoarjo.
- c. Pembayaran kontribusi kepada Kas Umum Negara oleh Perseroan adalah berupa kontribusi tetap dan keuntungan atas pemanfaatan tanah yang besarnya akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil perhitungan tim penilai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak dioperasikan Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Atas pembagian keuntungan hasil pengelolaan Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya selambat- lambatnnya tanggal 15 setiap bulannya.
- d. Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) ke Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut setelah perjanjian berakhir dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- e. Telah dilakukan Pengukuran Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama oleh Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Timur dengan didampingi Perseroan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tanggal 4-5 November 2015. Dengan hasil sebagai berikut:
- Para pihak sepakat bahwa batas-batas aset milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dimanfaatkan Perseroan yang akan dilakukan pengukuran oleh Tim BPN Kantor Wilayah Jawa Timur adalah mengikuti batas-batas patok yang ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
 - Apabila hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN tersebut berbeda dengan hasil kesepakatan luas tanah dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang telah dimohonkan oleh
- b. The agreement object is the land owned by Indonesia Naval Force of 3.143.352 m². The land utilization is as follows:
- The runway and land in the north of the runway.
 - The runway of Juanda International Airport - Surabaya is 135.000 m².
 - The and as taxi way, wind shock, drainage, and other facility is 1.021.129 m².
 - The land next to the runway is 1.987.223 m².
 - Kali Turen grassland in the southern of runway of 1.585.129 m²
 - The land for terminal building of 27.272 m².
 - Apron building of 101.213 m² from the west apron to the north tower
 - Taxi way, alarm area and fillet of 189.701 m².
 - Car parking area, garden and the yard of 43.618 m².
 - Pump house in Banjar Kemuning of 130 m²
 - The land and inner marker building of 40.000 m² in Sedati, Sidoarjo.
- c. Perseroan contribution to the country treasury is in the form of current contribution and the income from the land utilization which amount is determined by the result shown by the assessment team from the The Ministry of Finance since Terminal 2 Juanda International Airport went operationnal. The income share from Terminal 2 management is given at least on 15th days of each month.
- d. The assets obtained from the Cooperation will be handed over by PT. Angkasa Pura I (Persero) to TNI AL by the end of the agreement and the utilization Cooperation period is 30 (thirty) years since the signing.
- e. The measurement of Cooperation agreement object is conducted by the team from National Land Agency (BPN) East Java Branch and accompanied by Perseroan and TNI AL on 4 to 5 November 2015. The results were as follow:
- All parties have agreed that the limit of the asset owned by TNI AL utilized by Perseroan will be measured by East Java BPN Team. The measurement includes the border shown by TNI AL.
 - If the measurement result differs from what stated in the agreement proposed by Perseroan to BPN, then there will be an Cooperation Agreement Addendum

Perseroan kepada BPN, maka akan dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama.

- Terhadap aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang telah digunakan oleh Perseroan dan tidak termasuk dalam objek Perjanjian Kerja Sama berdasarkan hasil pengukuran tersebut, akan dimohonkan oleh Perseroan sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan.
- f. Berdasarkan Pokok-Pokok Hasil Pembahasan Ekspose Pengukuran Lahan Objek.

Perjanjian Kerja Sama oleh Tim BPN Kantor Wilayah Jawa Timur dengan dihadiri oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tanggal 17 November 2015. Dengan hasil sebagai berikut:

- Luas lahan berdasarkan data-data permohonan pengukuran yang diserahkan kepada BPN adalah 3.143.352 m² sedangkan luas lahan berdasarkan hasil pengukuran pada tanggal 4-5 November 2015 adalah 3.188.252 m², sehingga terdapat selisih kelebihan luas lahan sebesar 44.900 m². Terhadap kelebihan tersebut akan dikeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) untuk tambahan biaya pengukuran.
- Bahwa lahan apron A.10 sampai dengan A.14 berdasarkan patok yang ditunjuk oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tidak termasuk dalam Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama
- Bahwa terhadap hasil pengukuran di Jalan Akses Merpati perlu dilakukan revisi karena adanya kesalahan dalam penunjukkan batas ukur yang seharusnya berdasarkan patok tetapi digunakan batas pagar.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut meminta agar dilakukan pengukuran per bidang pada Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Nomor: SP.51/HK.09.01/2014/PD dan Nomor: PKS/8/II/2014. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut akan membuat patok-patok batas per bidang dengan melibatkan Perseroan.
- Terhadap hasil pengukuran BPN tanggal 4-5 November 2015 dan permintaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut agar dilakukan pengukuran per bidang akan dibuat Addendum Perjanjian Kerja Sama yang pada prinsipnya mengatur dan mengubah Lampiran Perjanjian Kerja Sama untuk disesuaikan dengan hasil pengukuran dan luas objek per bidang pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama untuk disesuaikan setelah adanya pengukuran selanjutnya oleh BPN. Pada tanggal 17 Desember 2015, dilakukan pengukuran ulang di Jalan Akses Merpati karena adanya kesalahan dalam penunjukkan batas ukur yang seharusnya berdasarkan patok, tetapi digunakan batas pagar pada pengukuran tanggal 4-5 November 2015

- Over the land asset owned by TNI AL which has been used by Perseroan and excluded from the agreement. Based on the measurement result, Perseroan will propose additional Cooperation agreement

- f. Based on the main discussion result regarding the expose of objected land measurement.

The Cooperation agreement with East Java BPS Office Team was attended by PT. Angkasa Pura I (Persero) and Indonesian Navy on 17 November 2015. The results were as follows:

- The land size based on the data from measurement proposal handed to BPN is 3.143.352 m² while the land size based on the measurement conducted on 4 to 4 November 2015 is 3.188.252 m². This shows 44.900 m². The gap between two measurement results. The gap will be taken care with the Deposit Warrant (SPS) for additional measurement cost.
- According to the border shown by TNI AL, Apron A.10 into A.14 are not included into the Cooperation object
- The access road to merpati hangar must be revised due the error in setting the measurement limit which supposedly based on the border set by the stakes, not fence.
- TNI AL requested for a per field-measurement on the land as the agreement object as mentioned in article 3 of the Cooperation agreement number: SP.51/HK.09.01/2014/PD and Number: PKS/8/II/2014. TNI AL will be setting up the border stakes by involving Perseroan.
- Based on BPN measurement result on 4 to 5 November 2015 and the request by TNI AL, the Cooperation agreement addendum about the per field- measurement will be made. The addendum is basically arranges and alters the Cooperation agreement attachment to be adjusted by the object per field-measurement result on article 3 of the agreement. It is also to be adjusted after the measurement conducted by BPN. On 17 December 2015, the re-measurement of merpati access road was conducted due the mistake in measuring the border limit since the border itself must be based on the stakes border, not the fence border measure on 4 to 5 November 2015

- Saat ini masih menunggu ekspose dari BPN terhadap pengukuran ulang tersebut.
- g. Berdasarkan hasil pengukuran ulang pada tanggal 17 Desember 2015 dan permohonan pengukuran Apron A10 sampai dengan A14, maka dilaksanakan ekspose pada tanggal 26 Januari 2016 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - Hasil pengukuran objek Perjanjian Kerjasama menjadi seluas 3.159.334 m²
 - Luas tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebelah utara Hanggar Merpati yang tidak dikerjasamakan dengan PT Angkasa Pura I (Persero) seluas 32.228 m².
 - Luas Apron A10-A14 yang tidak dikerjasamakan dengan PT Angkasa Pura I (Persero) seluas 35.882 m².
 - PT Angkasa Pura I (Persero) akan mengajukan permohonan Perjanjian Kerjasama (secara terpisah) kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atas tanah sebelah utara Hanggar Merpati dan Apron A10 sampai dengan A14
 - Terhadap Objek Perjanjian Kerjasama tahun 2014 akan dilakukan perubahan (Addendum) dengan mengacu pada hasil rapat pengukuran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan hasil pengukuran per bidang terhadap Objek Perjanjian Kerjasama tersebut

4. Perjanjian dengan Pihak Berelasi

- a. Perjanjian Kerjasama No.SP/96.HK.06.03/2012/DU: No.APP.001/PKS/2012/DU tanggal 19 September 2012 tentang Bangun Guna Serah ("BOT") atas Tanah Seluas 12.000 m² di Sunset Road, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Angkasa Pura Properti ("PT APP")

Perjanjian ini meliputi pemanfaatan dan pengembangan tanah melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan untuk memperoleh keuntungan Komersial (profit) dan manfaat (benefit) bersama. Ruang lingkup perjanjian mencakup kegiatan dan/atau tindakan meliputi penyerahan tanah oleh Perseroan kepada PT Angkasa Pura Properti, sementara PT Angkasa Pura Properti meliputi kegiatan perijinan, perencanaan pembangunan dan pendanaan.

Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.827/Desa Kuta seluas 12.000 m² sebagaimana Gambar Situasi No.538/1998 tanggal 12 Agustus 1998, terletak di Jalan Sunset Road, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini secara keseluruhannya adalah selama-lamanya 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan. Kompensasi yang akan diterima Perseroan adalah sebesar Rp39.168.000.

- b. Perjanjian Kerjasama No.SP.187/KB.03.02/2014/PD - No.APP.001/PKS/2014/DU tanggal 4 Agustus 2014 tentang Bangun Guna Serah ("BOT") atas Tanah

- Currently waiting for the expose from BPN towards the re-measurement.
- g. Based on the re-measurement report on 17 December 2015 and the measurement request on apron A.10 until A14, the exposing was conducted on 26 January 2016 and the essences of the activity are as follow:
 - The result of the agreement object measurement becomes 3.159.334 m²
 - The size of the land owned by TNI AL in the north of merpati hangar which is not under the Cooperation with PT Angkasa Pura I (Persero) of 32.228 m².
 - The apron A10-A14 which was not under the Cooperation with PT Angkasa Pura I (Persero) of 35.882 m².
 - PT Angkasa Pura I (Persero) will propose the Cooperation agreement (partially) to Indonesian Navy (TNI AL) for the land in the north of Merpati Hangar and Apron A10 to A14
 - The Cooperation agreement object in 2014 will be made addendum by referring to the meeting result about the measurement by East Java BPN Regional Office and the per-field measurement on the agreement object

4. Agreement with the related party

- a. Cooperation Agreement No.SP/96.HK.06.03/2012/DU : Number. APP.001/PKS/2012/DU 19 September 2012 about the Build Operate and Transfer (BOT) over the 12.000 m² land in Sunset Road, made under the signature by and between Perseroan with PT Angkasa Pura Property ("PT APP")

This agreement includes the land use and development through the construction and management to obtain commercial profit and mutual benefit. The scope of the agreement includes the activity and/or the act of land hand over by Perseroan to PT APP. APP includes the permit, planning and funding.

The land based on the building rights certificate number. 827/Desa Kuta seluas 12.000 m² as shown in the figure number 538/1998 12 August 1998, located at Jalan Sunset Road, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. The agreement period was 32 (thirty two) years with 6 (six) months of Cooperation. The compensation that will be received by Perseroan is Rp39.168.000.

- b. Cooperation Agreement No.SP.187/KB.03.02/ 2014/PD - Number. APP.001/PKS/2014/DU 4 August 2014 about the BOT over the 16.3852 land and the BOT

Seluas 16.386 m² sertifikat Hak Guna Bangunan No. 856/ Kelurahan Kuta seluas 17.200 m² sebagaimana Gambar Situasi No.537/1998 tanggal 12 Agustus 1998 di Sunset Road untuk Pembangunan Villatel dan Area Komersial, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Angkasa Pura Properti.

Perjanjian ini meliputi pemanfaatan dan pengembangan tanah melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan untuk memperoleh keuntungan Komersial (profit) dan manfaat (benefit) bersama. Ruang lingkup perjanjian mencakup kegiatan dan/atau tindakan penyerahan tanah oleh Perseroan kepada PT Angkasa Pura Properti, sementara PT Angkasa Pura Properti meliputi kegiatan perijinan perencanaan pembangunan, pendanaan, pembangunan, pemasaran dan pengelolaan.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini secara keseluruhannya adalah selama-lamanya 32 (tiga puluh) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan sejak tanggal 4 Agustus 2014. Kompensasi yang akan diterima Perseroan adalah sebesar Rp54.000.000

5. Perjanjian Kerjasama Operasi Kuliner.

Kerjasama Operasi Kuliner tersebut dilakukan oleh PT Angkasa Pura Hotel (anak perusahaan) pada tanggal 25 Oktober 2013 atas antara anak perusahaan dengan PT Cardig Aero Services Tbk (CAS) untuk memberikan pelayanan jasa boga penerbangan kepada Perusahaan penerbangan dan entitas lainnya di Bandar Udara Ngurah Rai Bali dengan nama usaha "Kulinair". Perjanjian dilakukan untuk jangka waktu selama 2 tahun sejak dipenuhinya kondisi prasyarat oleh masing-masing pihak. Perusahaan menyediakan hak pengusaha dan lokasi sedangkan PT Cardig Aero Services menyediakan modal kerja hingga sebesar Rp3.600.000. Entitas kerjasama operasi Kulinair telah beroperasi secara komersil sejak bulan November 2013 dengan komposisi kepemilikan dalam KSO adalah sebesar 40% untuk Perusahaan dan 60% untuk CAS.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

JENIS, TUJUAN, DAN NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Guna mendukung kelancaran kegiatan operasional, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa Tanah, Bangunan (Lapangan), Gedung-gedung, Alat perhubungan Udara, Kendaraan, Instalasi, Peralatan, dan Aset dalam penyelesaian. Pada tahun 2016 jumlah investasi barang modal sebesar Rp4.928,25 miliar.

certificate Number. 856/ Kelurahan Kuta of 17.200 m² as shown by the figure number. 537/1998 tanggal 12 August 1998 in Sunset Road for the construction of villatel and commercial area, made under the signature by and between Perseroan and PT APP

This agreement includes the land use and development through the construction and management to obtain commercial profit and mutual benefit. Scope of the agreement includes the activity and/or the land hand over by Perseroan to PT APP, while PT APP includes the permit of construction planning, funding, construction, marketing and management.

The Cooperation agreement period is 32 (thirty two) years with 6 (six) months Cooperation since 4 August 2014. The compensation that will be received by Perseroan is Rp54.000.000

5. Kuliner Operation Cooperation Agreement

The culinary operation is conducted by PT Angkasa Pura Hotel (subsidiary) on 25 October 2013 between the subsidiary with PT Cardig Aero Services Tbk (CAS) to provide the culinary service to the flight company and another entity in I Gusti Ngurah Rai Airport under the name of "Kulinair". This agreement is effective for 2 years after the preconditions have been fulfilled by both parties. The company provides the entrepreneurial right and location while PT Cardig Aero Service provides the working capital for Rp. 3.600.000. Kulinair cooperation entity has been operating commercially since November 2013. The ownership composition in KSO is 40% for the company and 60% for CAS.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

TYPE, PURPOSE, AND CAPITAL GOODS INVESTMENT VALUE

In order to support its operational activity, PT Angkasa Pura I (Persero) has been investing its capital goods in the form of land, field, building, aerial transport, installation, tool, and asset in completion. In 2016, the capital goods investment was Rp4.928,25 billion.

**Tabel Penambahan Investasi Barang Modal dalam Bentuk Aset Tetap Tahun 2016 /
Table of Additional Capital Goods Investment In The Form of Current Asset in 2016**

(dalam Ribuan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian	Tahun 2016	Description
Tanah	130,654,135	Land
Bangunan (Lapangan)	264,598,820	Building (Field)
Gedung-gedung	62,397,239	Buildings
Alat perhubungan Udara	0	Aerial transportation tool
Kendaraan	23,022,752	Vehicle
Instalasi	37,442,569	Installation
Peralatan	279,489,094	Tools
Aset dalam penyelesaian	4,130,645,834	Asset in completion
Jumlah	4,928,250,442	Total

Selain melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap, PT Angkasa Pura I (Persero) juga telah merealisasikan beberapa program investasi di tahun 2016. Adapun beberapa program investasi yang telah terealisasi fisik 100% pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- Program Investasi Pendukung Keselamatan Penerbangan/Keamanan
 - 1) Program Pembuatan dan Pemasangan Tetrapod di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (*Multi Years 2015-2016*) sebesar Rp14,2 miliar.
 - 2) Program Penambahan Camera CCTV dan Infra Red CCTV Perimeter di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (*Single Year 2016*) sebesar Rp4,2 miliar.
 - 3) Program Penambahan CCTV di Terminal 2 Beserta Jaringan Instalasinya di Bandara Juanda Surabaya (*Single Year 2016*) sebesar Rp4,7 miliar.
 - 4) Program Pemasangan Sistem Subdrain Taxiway di Bandara Juanda Surabaya (*Multi Years 2015-2016*) sebesar Rp5,6 miliar.
 - 5) Program Perbaikan Konstruksi Taxiway Echo dan Shoulder 03-21 di Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar (*Multi Years 2015-2016*) sebesar Rp15,3 miliar
 - 6) Program Perbaikan Shoulder Runway 03-21 Tahap II di Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar (*Single Year 2016*) sebesar Rp6,9 miliar.
 - 7) Program Pembuatan Gedung PKP-PK dan Fasilitas Penunjang di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian - Balikpapan (*Multi Years z 2015-2016*) sebesar Rp21,2 miliar
 - 8) Program Pengadaan dan Pemasangan Pagar Perimeter sisi Utara dan sisi Selatan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian - Balikpapan (*Single Year 2016*) sebesar Rp6,4 miliar.
 - 9) Program Pengadaan dan Pemasangan Approach Light 30 Bar di Bandara Adi Soemarmo -Surakarta (*Multi Years 2015-2016*) sebesar Rp6,3 miliar.
 - 10) Program Pembuatan Pagar Wisemesh Double Fencing Pengadaan Perimeter (Tahap II) di Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin (*Single Year 2016*) sebesar Rp6,3 miliar.

Aside from investing the capital goods in the form of current asset, PT Angkasa Pura I (Persero) has realized several investment program in 2016. The investment program which has been physically realized for 100% in 2016 is as follows:

- Flight Safety Support Investment Program
 - 1) Tetrapod Installation Program in I Gusti Ngurah Rai Program - Denpasar (Multi Years 2015-2016) for Rp 14,2 billion.
 - 2) CCTV and Infra-Red CCTV Perimeter Installation Program in Bandara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar (Single Year 2016) for Rp 4,2 billion.
 - 3) CCTV and CCTV network installation program in Terminal 2 in Juanda Airport (Single Year 2016) for Rp 4,7 billion.
 - 4) Installation of Subdrain Taxiway System Program in Juanda Airport - Surabaya (Multi Years 2015-2016) for Rp 5,6 billion.
 - 5) Echo Taxiway Construction Reparation Program and Shoulder 03-21 in Sultan Hasanuddin Airport - Makassar (Multi Years 2015-2016) for Rp 15,3 billion
 - 6) Shoulder Runway Reparation Program 03-21 Phase II in Sultan Hasanuddin Airport - Makassar (Single Year 2016) for Rp 6,9 billion.
 - 7) PKP-PK Building & Supporting Facility Construction Program in Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Airport - Balikpapan (Multi Years 2015-2016) for Rp 21,2 billion
 - 8) Provision , Northern and Southern Perimeter Fence Installation Program in Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Airport - Balikpapan (Single Year 2016) for Rp 6,4 billion.
 - 9) 30 Light Bar Approach Light Provision and Installation Program in Adi Soemarmo Airport - Surakarta (Multi Years 2015-2016) for Rp 6,3 billion.
 - 10) Wisemesh Double Fencing Perimeter Provision and Construction Program (Phase II) in Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin (Single Year 2016) for Rp 6,3 billion.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 11) Program Pembuatan <i>Turning Area</i>, Peningkatan PCN <i>Displace Runway 31</i> dan <i>Tapering Paved Shoulder Runway 13</i> di Bandara Ahmad Yani - Semarang (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp6,8 miliar. 12) Program Pengadaan dan Pemasangan Baru Panel Tegangan Menengah di Bandara Pattimura - Ambon (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp17,3 miliar. 13) Program Perataan Lahan ILS/Glide Path di Bandara El-Tari - Kupang (<i>Single Year 2016</i>) sebesar Rp6,6 miliar. <ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Program Penyempurnaan Fasilitas Ruang Tunggu (<i>Boarding Lounge</i>) Terminal Domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp66,2 miliar. 2) Program Pengadaan Tangga Fixed Bridge di Gedung Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp5,3 miliar. 3) Program Pembangunan Ruang UMKM di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp3,7 miliar. 4) Program Pembuatan Jalan Penghubung T1 ke T2 di Bandara Juanda - Surabaya (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp23,9 miliar. 5) Program Peningkatan Kapasitas Backbone Jaringan Data Bandara di Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar (<i>Single Year 2016</i>) sebesar Rp5,3 miliar. 6) Pelebaran dan Overlay Jalan Masuk Bandara Baru di Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp16,1 miliar. 7) Program Overlay Jalan Masuk dan Parkir Terminal di Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan (<i>Carry Over 2015</i>) sebesar Rp8,11 Miliar. 8) Program Pengadaan dan Pemasangan SQFL 30 Bar pada Runway 36 di Bandara Sam Ratulangi - Manado (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp4,59 miliar. 9) Program Penggantian Lantai Terminal Ruang Check-in Kedatangan Domestik dan Internasional di Bandara Sam Ratulangi - Manado (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp3,03 miliar. 10) Program Penggantian dan Pemasangan Sequence Flashing Light di Bandara Adisutjipto - Yogyakarta (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp3,45 miliar. 11) Program Pembuatan Service Road dari Gedung PK sampai Apron termasuk Jasa Perencanaan dan Pengawasannya di Bandara Adisumarmo - Surakarta (<i>Multi Years 2016</i>) sebesar Rp2,34 miliar. 12) Program Relokasi Tenant, Galeri ATM dan SCP-2 di Bandara Ahmad Yani - Semarang (<i>Multi Years 2016</i>) sebesar Rp3,6 miliar. • Program Peningkatan Pendapatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Program Pembangunan 23 unit fasilitas komersial di area promade di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (<i>Multi Years 2015-2016</i>) sebesar Rp2,3 Miliar. 2) Program Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Point of System System (POSS) Empu Cargo di Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan - Balikpapan (<i>Single Year 2016</i>) sebesar Rp346,66 Juta. | <ul style="list-style-type: none"> 11) Turning Area Construction and PDC Displace Runway 31 Upgrade and Tapering Paved Shoulder Runway 12 Construction Program in Ahmad Yani Airport - Semarang (Multi Years 2015-2016) for Rp 6,8 billion. 12) New Middling Voltage Panel Provision & Installation Program in Pattimura Airport - Ambon (Multi Years 2015-2016) for Rp 17,3 billion. 13) ILS Land/ Glide Path Flattening Program in El-Tari - Kupang Airport (Single Year 2016) for Rp 6,6 billion. <ul style="list-style-type: none"> • Service Program <ul style="list-style-type: none"> 1) Boarding Lounge Facility Renovation Program in Domestic Terminal of I Gusti Ngurah Rai International airport - Denpasar (Multi Years 2015-2016) for Rp 66,2 billion. 2) Fixed Bridge Ladder Provision Program in Airport Terminal Building of I Gusti Ngurah Rai - Denpasar (Multi Years 2015-2016) for Rp 5,3 billion. 3) UMKM Space Construction Program in I Gusti Ngurah Rai Airport - Denpasar (Multi Years 2015-2016) for Ro 3,7 billion. 4) T1 to T2 Connecting Road Construction Program in Juanda Airport - Surabaya (Multi Years 2015-2016) for Rp 23,9 billion. 5) Airport Data Network Backbone Capacity Enhancement Program in Sultan Hasanuddin Airport - Makassar (Single Year 2016) for Rp 5,4 billion. 6) Entrance Road Widening and Overlay in Sultan Hasanuddin airport - Makassar (Multi Years 2015-2016) for Rp 16,1 billion. 7) Entrance Road and Terminal Parking Area Overlay Program in Sultan Aji Muhammad Sepinggan Airport (Carry Over 2015) for Rp 8,11 billion. 8) 30 SQFL Bar Provision and Installation Program in Runway 36 of Sam Ratulangi Airport - Manado (Multi Years 2015-2016) for Rp 4,59 billion. 9) Check-in Room Floor Reparation Program in Domestic and International Arrival of Sam Ratulangi Airport - Manado (Multi Years 2015-2016) for Rp 3,03 billion. 10) Sequence Flashing Light Replacement and Installation Program in Adisutjipto Airport - Yogyakarta (Multi Years 2015-2016) for Rp 3,45 billion. 11) PK Building to Apron Service Road Construction Program (Including Its Planning and Supervision Service) in Adisoemarmo Airport - Surakarta (single year 2016) for Rp 2,34 billion. 12) Tenant, ATM Gallery and SCP-2 Relocation Program in Ahmad Yani Airport - Semarang (Single Year 2016) for Rp 3,6 billion. • Income Upgrade Program <ul style="list-style-type: none"> 1) 23 commercial facility unit construction program in pomade are of I Gusti Ngurah Rai Airport - Denpasar (Multi Years 2015-2106) for Rp 2,3 billion. 2) Point of System System (POSS) provision and installation program in Empu Cargo of Sultan Aji Muhammad Sepinggan Aiport (Single Year 2016) for Rp346,66 million. |
|---|--|

- 3) Program Implementasi Point of Sales System Tahap II di Bandara Sam Ratulangi Manado (*Single Years 2016*) sebesar Rp256,08 Juta.
- 4) Program Pengadaan dan Pemasangan KWH Meter Prabayar di Bandara Sam Ratulangi Manado (*Single Years 2016*) sebesar Rp256,08 Juta
- 5) Program Implementasi Point of Sales System di Bandara El Tari – Kupang (*Single Years 2016*) sebesar Rp609,50 Juta.
- 6) Program Pemasangan Instalasi Meterang Listrik Pra Bayar di Seluruh Tenant Bandara El Tari Kupang (*Single Year 2016*) sebesar Rp307,05 Juta
- 7) Program Pengadaan Car Parking System Beserta Kelengkapannya di SBU Commercial Ngurah Rai (*Multi Years 2015-2016*) sebesar Rp7,1 miliar.

- 3) Point of Sales Implementation Program Phase II in Sam Ratulangi Airport (*Single Years 2016*) for Rp 256,08 million.
- 4) KWH Prepaid Metering Installation and Provision Program in Sam Ratulangi airport (*Single Years 2016*) for Rp 256,08 million.
- 5) Point of Sales System Implementation Program in El Tari Airport - Kupang (*Single Years 2016*) for Rp 609,50 million.
- 6) Prepaid Electricity Metering Installation Program in All El Tari Airport Tenant (*Single Year 2016*) for Rp 307,05 million
- 7) Car Parking System and Its Accessory Provision Program in I Gusti Ngurah Rai Commercial SBU (*Multi Years 2015-2016*) for Rp 7,1 billion.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2016 SERTA TARGET/PROYEKSI 2017

PENCAPAIAN TARGET 2016

Kinerja PT Angkasa Pura I (Persero) pada 2016 menunjukkan pencapaian yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Dari sisi produksi, realisasi produksi tahun 2016 secara umum produksi aeronautika dan produksi non aeronautika berada di atas RKAP 2016, hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

- Peningkatan trafik pesawat 28,43%, penumpang 35,95% dan kargo 34,67% tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.
- Pelaksanaan program *Colaborative Destination Development* (CDD) bekerjasama dengan pemda setempat dan *airline* di beberapa cabang selama tahun 2016.
- Pembukaan rute baru dari beberapa maskapai antara lain Lion (1 rute), Batik air (2 rute), Citilink (1 rute), Garuda (3 rute), Nam Air (5 rute), Wings Air (5 rute), Sriwijaya Air (1 rute), Kalstar (1 rute), Lot Polish Air (1 rute) Saudi Airlines (1 rute).
- Penambahan frekuensi dari beberapa maskapai antara lain Citilink, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya. - Beberapa kontrak sewa sudah diaktifasi dan ditagihkan.

COMPARISON OF PERFORMANCE TARGET AND REALIZATION OF 2016 AND TARGET/ PROJECTION OF 2017

ACHIEVEMENT TARGET OF 2016

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) performance showed a good accomplishment. This can be seen from the following targets:

In term of production, the production realization in 2016 was mostly in aeronautical and non-aeronautical production. This realization is above the RKAP of 2016 and was also affected by :

- In 2016, th airplane traffic increased for 28,43%, the number passengers increased for 35,95% and the cargo increased for 34,67% compared to the achievement in 2015.
- The Collaborative Destination Development (CDD) was executed by cooperating with the local government and airline in several branch during 2016.
- The airline new route were Lion (1 route), Batik air (2 route), Citilink (1 route), Garuda (3 route), Nam Air (5 route), Wings Air (5 route), Sriwijaya Air (1 route), Kalstar (1 route), Lot Polish Air (1 route), and Saudi Airlines (1 route).
- There were also some additional flight frequency, they were Citilink, Lion Air, Batik Air, and Sriwijaya. - Some of the rent contracts have been activated and billed.

Tabel Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Jasa Aeronautika / Accomplishment Table of Aeronautical Service Performance Target

Uraian / Description	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization in 2016	RKAP 2016	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	5=3/4
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) / Landing Service, Airplane Placement and Keeping	Ton	27,956,662	24,635,671	113.48%
Domestik / Domestic	Ton	22,356,656	19,369,551	115.42%
Internasional / International	Ton	5,600,006	5,266,120	106.34%
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) / Airplane Passengers Service (PJP2U)	Pax	38,021,607	33,773,394	112.58%

Uraian / Description	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization in 2016	RKAP 2016	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	5=3/4
Domestik / Domestic	Pax	31.309.941	27,438,715	114.11%
Internasional / International	Pax	6,711,666	6,334,679	105.95%
Extend and Advance	Hr	20,766	9,338	222.38%
Domestik / Domestic	Hr	19,560	9,338	209.47%
Internasional / International	Hr	1.206	0	n/a
Pemakaian Aviobridge	Ton	28,055,433	24,948,355	112.45%
Domestik / Domestic	Ton	19,591,543	17,260,556	113.50%
Internasional / International	Ton	8,463,890	7,687,799	110.10%
Pemakaian Counter	Pax	38,069,196	33,701,931	112.96%
Domestik / Domestic	Pax	31,433,195	27,439,474	114.55%
Internasional / International	Pax	6,636,001	6,262,457	105.96%
Baggage Handling System	Pax	7,409,001	7,793,067	95.07%
Domestik / Domestic	Pax	2,200,277	2,840,445	77.46%
Internasional / International	Pax	5,208,724	4,952,622	105.17%

Tabel Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Jasa Non-Aeronautika / Achievement Table of Non-Aeronautical Service Performance

Uraian / Description	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization in 2016	RKAP 2016	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	5=3/4
Sewa / Rent	M2xBulan	12,191,641	5,951,719	204.84%
Sewa Ruang / Room Rent	M2xBulan	1,501,454	1,470,583	102.10%
Sewa Tanah / Land Rent	M2xBulan	8,870,982	2,460,229	360.58%
Sewa Tempat / Space Rent	M2xBulan	244,082	448,599	54.41%
Sewa Tempat Antena / Antenna Spot Rent	M2xBulan	24,531	21,716	112.96%
Sewa Cold Storage / Cold Storage Rent	M2xBulan	0	0	n/a
Sewa Gedung / Building Rent	M2xBulan	0	0	n/a
Penyerahan Penggunaan Tanah / Land Utilization Handover	M2xBulan	1,550,592	1,550,592	100.00%
Penyerahan Penggunaan Bangunan / Building Utilization Handover	M2xBulan	0	0	n/a
Konsensi / Concession	RP/000	7,125,459,900	6,718,709,463	106.05%
Parkir Mobil / Car Park	Lembar	25,970,943	23,303,046	111.45%
Parkir Motor / Motorcycle Park	Lembar	9,540,777	9,329,493	102.26%
Peron and Waving Gallery	Lembar	770,273,404	436,956	176,281.69%
Pemakaian Listrik / Electricity Utilization	Kwh	41,971,642	34,747,650	120.79%
Pemakaian Air / Water Utilization	M3	387,203	329,425	117.54%
Pemakaian Telepon / Phone Utilization	PwtxBln	20,432	24,134	84.66%
Internet Services	Kilobyte	861	12,336	6.98%
Sewa Tempat Reklame / Advertisement Spot Rent	M2xBulan	36,817	97,649	37.70%
Event Promotion	EA	2,193	182	1204.95%

Uraian / Description	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization in 2016	RKAP 2016	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	5=3/4
Lounge	Pax	690,106	206,626	333.99%
Maintenance & Service Fee	EA	44,718	1,392	3212.50%
Warehousing	Kg	82,372,947	78,832,277	104.49%
Jasa Gudang <i>Cargo Out</i> Domestik / Domestic Cargo Out Warehouse Service	Kg	18,911,768	7,635,990	247.67%
Jasa Gudang <i>Cargo Out</i> Internasional / International Cargo Out Warehouse Service	Kg	30,645,005	34,189,128	89.63%
Jasa Gudang <i>Cargo Inc</i> Domestik / Domestic Cargo Inc Warehouse Service	Kg	18,658,359	16,373,947	113.95%
Jasa Gudang <i>Cargo Inc</i> Internasional / International Cargo Inc Warehouse Service	Kg	14,157,815	20,633,212	68.62%

Dari sisi kinerja keuangan yang mencakup posisi keuangan dan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain.

Secara umum realisasi Total Aset posisi sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai sebesar Rp23,67 triliun berada di atas anggaran sebesar Rp2,33 triliun atau 10,9% dari yang direncanakan sebesar Rp21,34 triliun, hal ini antara lain disebabkan:

1. Aset lancar terealisasi sebesar Rp6,08 triliun di atas anggaran sebesar Rp3,32 triliun atau sebesar 120,4% dari yang dianggarkan sebesar Rp2,76 triliun, hal ini antara lain adanya peningkatan saldo akhir kas dan setara kas pada akhir tahun 2016 sebesar Rp4,90 triliun, yang disebabkan adanya penerimaan dana dari obligasi sebesar Rp3 triliun pada bulan desember 2016 yang belum digunakan untuk pembayaran investasi.
2. Aset tidak lancar terealisasi sebesar Rp17,58 triliun dibawah anggaran sebesar Rp995,85 miliar atau 5,4% dari yang dianggarkan sebesar Rp18,58 miliar. Hal ini antara lain disebabkan rendahnya daya serap investasi dampak dari gagal lelang dan mundurnya beberapa proyek seperti bandara Ahmad Yani - Semarang dan proyek Banjarmasin pada tahun 2016.

Sedangkan dari sisi liabilitas dan Ekuitas :

1. Utang jangka pendek terealisasi sebesar Rp3,87 di atas anggaran sebesar Rp2,01 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp1,86 miliar, hal ini antara lain disebabkan adanya pinjaman bank jangka panjang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp644 miliar, beban yang masih harus dibayar sebesar Rp879,36 miliar.
2. Utang jangka panjang terealisasi sebesar Rp7,80 triliun di bawah anggaran sebesar Rp86 juta atau 1,1% dari yang dianggarkan sebesar Rp7,88 triliun, hal ini antara lain berkorelasi dengan penarikan pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan investasi tahun 2016 baik investasi rutin maupun investasi pengembangan proyek.
3. Ekuitas terealisasi sebesar Rp11,99 triliun di atas anggaran sebesar Rp391,03 miliar atau 3,4% dari yang dianggarkan sebesar Rp11,60 triliun, hal ini antara lain disebabkan realisasi Laba setelah pajak berada diatas RKAP sebesar Rp303,32 miliar atau 35,5%.

In term of financial performance that includes the financial position and profit (loss) and other comprehensive income.

Generally, the total of asset until 31 December 2016 reached Rp.23,67 trillion which is bigger than the planned budget of Rp. 21,34 trillion or 10,9%. This is caused by:

1. The realized current asset of Rp.6,08 trillion which is 120,4% higher than the Rp.2,76 trillion budget. This is due the increasing final cash balance and cash equivalent by the end of 2016 for Rp.4,90 trillion. The increasing final cash balance and cash equivalent is also caused by the income from the obligation fund of Rp. 3 trillion in December 2016 which has not been used for investment payment.
2. The realized non-current asset of Rp. 17,58 trillion is managed under the Rp.995,85 billion budget r 5,4% of the Rp.18,58 billion budget. This is due the low investment absorption as the impact of failed auction and the late construction project such as Ahmad Yani Airport project and Banjarmasin protect in 2016.

Meanwhile, from the liability and equity side:

1. The short-term debt has been realized for Rp.3,87 and higher than the Rp. 2,01 trillion budget. This is caused by the overdue long-term debt of Rp. 644 billion and the burden that must be paid for Rp.879,36 billion.
2. The realized long-term debt of Rp. 7,80 trillion is 1,1% lower than the r Rp.7,88 budget. This corresponds to the loan withdrawal adjusted with the investment needs in 2016, including routine investment or project development investment.
3. The realized equity of Rp.11,99 trillion is 3,4% higher than the Rp. 11,60 trillion budget. This is caused by the profit realization after the tax is above RKAP for 35,5% or Rp.303,32 billion.

Secara umum realisasi laba (rugi) *Audited* setelah pajak tahun 2016 sebesar Rp1,16 triliun berada di atas anggaran sebesar Rp303,32 miliar atau 35,5% dari yang direncanakan sebesar Rp855,48 miliar.

Generally, the profit (loss) realization after tax in 2016 was Rp. 1,16 trillion and 35,5% higher than the Rp.Rp.855,48 billion budget.

Tabel Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perusahaan Tahun 2016 / Achievement Table of Company Financial Performance Target in 2016

(dalam Ribuan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	Realisasi 2016 Realization in 2016	RKAP 2016	Pencapaian Achievement
1	2	3	4=2/3
Aset / Asset	23,666,946	21,338,990	110.91%
Aset Lancar / Current Asset	6,084,701	2,760,894	220.39%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Asset	17,582,245	18,578,096	94.64%
Liabilitas / Liability	11,669,449	9,740,957	119.80%
Liabilitas Jangka Pendek / Short-Term Liability	3,871,792	1,857,248	208.47%
Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liability	7,797,657	7,883,709	98.91%
Ekuitas / Equity	11,669,449	9,740,957	119.80%
Pendapatan Operasional / Operational Income	6,138,271,900	5,892,829,023	104.17%
Beban Operasional / operational Burden	4,488,862,083	4,391,235,018	102.22%
Laba Operasional / Operational Profit	1,649,409,817	1,501,594,005	109.84%
Pendapatan dan (Beban) Non Operasional / Non Operational Income and Burden	(140,557,060)	(346,531)	40,561.18%
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan / Profit Before Income Tax Estimation	1,508,852,758	1,155,063,182	130.63%
Pajak Penghasilan / Income Tax	349,275,602	297,976,000	117.22%
Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Profit	1,159,577,155	857,087,182	135.29%

PROYEKSI 2017

Sesuai arahan dari pemegang saham melalui surat Nomor: S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut.

Penyusunan RKAP 2016 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa asumsi dasar makro dan mikro ekonomi sebagai berikut.

Makro ekonomi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.
2. Tingkat inflasi sebesar 4%.
3. Suku Bunga, Surat Pembendarahan Negara (SPN) sebesar 5,3%
4. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp13.300/USD.

Mikro ekonomi:

1. Pertumbuhan pendapatan operasi terhadap prognosa 2016 sebesar 25,9%.
2. Margin laba operasi terhadap pendapatan operasi sebesar 4%.
3. Kenaikan biaya Pegawai sebesar Rp174 milyar
4. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp13.300/USD.
5. Dividen Pay-out sebesar Rp182 milyar

2017 PROJECTION

According to the shareholders instruction through the letter number: S-513/MBU/08/2016 30 August 2016 regarding the shareholders / capital owners aspiration to formalize the Working and Budget Plan of 2017. The plan is formalized by considering the following assumptions.

RKAP 2016 was formalized by considering these following economic macro and micro basic assumptions.

Macro economy:

1. Economic growth of 5,3%
2. Inflation rate of 4%
3. Interest Rate, State Treasury Letter (SPN) of 5,3%
4. Rupiah Exchange Rate On US Dollar of Rp. 13.300/USD.

Micro economy:

1. Operating income growth on prognosa in 2016 of 25,9%
2. Operating profit margin on operating income of 4%
3. Employee salary raise of Rp. 174 billion
4. Rupiah exchange rate on US Dollar of Rp. 13.300/USD.
5. Dividend Pay-Out of Rp. 182 billion

6. Pembebanan premi THT/JHT 2017 sebesar Rp66 milyar
7. Capital Expenditure sebesar Rp8,4 Triliun

6. THT/JHT premium charging in 2017 of 66 billion
7. Capital Expenditure of Rp. 8,4 Trillion

Tabel Proyeksi Kinerja Pelayanan Jasa Aeronautika / Table of Aeronautical Service Performance Projection

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization in 2016	Proyeksi 2017 Projection of 2017
1	2	3	4=2/3
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) / Landing Service, Airplane Placement and Keeping	Ton	27,956,662	26,665,504
Domestik / Domestic	Ton	22,356,656	21,518,266
Internasional / International	Ton	5,600,006	5,147,238
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) / Airplane Passengers Service (PJP2U)	Pax	38,021,607	40,103,968
Domestik / Domestic	Pax	31,309,941	33,318,511
Internasional / International	Pax	6,711,666	6,785,457
Extend and Advance	Hr	20,766	49,906
Domestik / Domestic	Hr	19,560	10,089
Internasional / International	Hr	1,206	39,817
Pemakaian Aviobridge / Aviobridge Usage	Ton	28,055,433	29,706,548
Domestik / Domestic	Ton	19,591,543	20,765,674
Internasional / International	Ton	8,463,890	8,940,874
Pemakaian Counter / Counter Usage	Pax	38,069,196	40.045.069
Domestik / Domestic	Pax	31,433,195	33,317,431
Internasional / International	Pax	6,636,001	6,727,638
Baggage Handling System	Pax	7,409,001	0
Domestik / Domestic	Pax	2,200,277	0
Internasional / International	Pax	5,208,724	0

Tabel Proyeksi Kinerja Pelayanan Jasa Non-Aeronautika / Table of Non-Aeronautical Service Performance

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization of 2016	Proyeksi 2017 Projection of 2017
1	2	3	4=2/3
Sewa / Rent	M2xBulan	12,191,641	9,795,569
Sewa Ruang / Room Rent	M2xBulan	1,501,454	1,589,059
Sewa Tanah / Land Rent	M2xBulan	8,870,982	6,470,828
Sewa Tempat / Space Rent	M2xBulan	244,082	161,925
Sewa Tempat Antena/ Antenna Spot Rent	M2xBulan	24,531	22,129
Sewa Cold Storage / Cold Storage Rent	M2xBulan	0	36
Sewa Gedung / Building Rent	M2xBulan	0	0
Penyerahan Penggunaan Tanah / Land Utilization Handover	M2xBulan	1,550,592	1,551,592
Penyerahan Penggunaan Bangunan / Submission of Building Use	M2xBulan	0	0
Konsensi / Concession	RP/000	7,125,459,900	9,667,206,010
Parkir Mobil / Car Park	Lembar	25,970,943	25,083,741
Parkir Motor / Motorcycle Park	Lembar	9,540,777	9,241,228
Peron dan Waving Gallery / Platform and Waving Gallery	Lembar	770,273,404	0

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization of 2016	Proyeksi 2017 Projection of 2017
1	2	3	4=2/3
Pemakaian Listrik / Electricity Utilization	Kwh	41,971,642	39,885,802
Pemakaian Air / Water Usage	M3	387,203	393,953
Pemakaian Telepon / Phone Usage	PwtxBln	20,432	21,066
Internet Services	Kilobyte	861	1,255
Sewa Tempat Reklame / Advertisement Spot Rent	M2xBulan	36,817	66,792
Event Promotion	EA	2,193	508
Lounge	Pax	690,106	829,343
VIP Service Fee GAT	Pax		0
Maintenance & Service Fee	EA	44,718	81,230
Warehousing	Kg	82,372,947	39,770,796
Jasa Gudang <i>Cargo Out</i> Domestik / Domestic Cargo Out Warehouse Service	Kg	18,911,768	3,966,996
Jasa Gudang <i>Cargo Out</i> Internasional / International Cargo Out Warehouse Service	Kg	30,645,005	22,590,171
Jasa Gudang <i>Cargo Inc</i> Domestik / Domestic Cargo Inc Warehouse Service	Kg	18,658,359	8,252,316
Jasa Gudang <i>Cargo Inc</i> Internasional / International Cargo Inc Warehouse Service	Kg	14,157,815	4,961,313

**Tabel Proyeksi Kinerja Keuangan Perusahaan Tahun 2015 /
Projection Table of Company Finance performance in 2015**

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2016 Realization of 2016	Proyeksi 2017 Projection of 2017	Description
1	2	3	
Aset	23,666,945,954	26,594,801	Aset
Aset Lancar	6,084,701,307	3,049,754	Current Asset
Aset Tidak Lancar	17,582,244,647	23,545,047	Non-current Asset
Liabilitas	11,669,449,094	13,511,594	Liability
Liabilitas Jangka Pendek	3,871,791,651	2,388,199	Short-Term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	7,797,657,443	11,123,395	Long-Term Liability
Ekuitas	11,997,496,860	13,083,207	Equity
Pendapatan Operasional	6,138,271,899	7,616,461	Operational Income
Beban Operasional	4,488,862,083	5,725,076	operational Burden
Laba Operasional	1,649,409,816	1,891,385	Operational Profit
Pendapatan dan (Beban) Non Operasional	(140,557,060)	(312,145)	Non Operational Income and Burden
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	1,508,852,756	1,579,239	Pre-Income Tax Estimation
Pajak Penghasilan	349,275,602	412,363	Income Tax
Laba Bersih Tahun Berjalan	1,159,577,154	1,173,376	Current Year Net Profit

INFORMASI MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada transaksi setelah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan yang perlu diungkapkan.

MATERIAL INFORMATION AFTER ACCOUNTANT REPORT

No transaction after the balance sheet date with significant impact towards the financial report that needs to be disclosed.



KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan secara rutin melakukan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 bulan setelah RUPS dalam Rapat Pertanggungjawaban Manajemen tahun berjalan. Kebijakan pembagian dividen yang diterapkan Perseroan adalah dengan mempertimbangkan ekspansi usaha. Laba disisihkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha Perseroan.

Pada 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan pembayaran dividen untuk periode tahun buku 2015 sebesar Rp168.308.501.200 berdasarkan Berita Acara RUPS No.19 Tanggal 17 Mei 2016. Pada 2015, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan pembayaran dividen untuk periode tahun buku 2014 sebesar Rp185.720.304.000 berdasarkan Risalah RUPS Nomor: AP.I.2608/TU.03.04/2014. Sedangkan, pada 2014 dilakukan pembayaran dividen untuk periode tahun buku 2013 sebesar Rp257.915.821.000 berdasarkan Risalah RUPS Nomor: AP.I.1348/KU.01.04/2014.

Jumlah Dividen kas per saham untuk tahun buku 2015 sebesar Rp26,24, sedangkan jumlah Dividen kas per saham untuk tahun buku 2014 sebesar Rp63,47 dan untuk tahun buku 2013 adalah sebesar Rp73,94. *Dividen Payout Ratio* untuk tahun buku 2014 sebesar 18,68% sedangkan untuk tahun buku 2013 sebesar 38,25%.

DIVIDEND POLICY

Perseroan routinely pay the dividend every year according to what decided in Shareholders General Meeting (RUPS). The dividend is paid at least one month after RUPS during the current year Management Accountability Meeting. The dividend share applied by Perseroan is by considering the working expansion. The profit is taken according to Perseroan working development.

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) paid the dividend for the 2015 fiscal year for Rp168.308.501.200 and is based on the treatise of RUPS Number: No.19 Date 17 Mei 2016. In 2015, PT Angkasa Pura I (Persero) has paid the dividend for fiscal years 2014 for Rp185.720.304.000 based on the treatise of RUPS Number: AP.I.2608/TU.03.04/2014. Meanwhile, the dividend was paid in 2015 for fiscal year 2013 for Rp257.915.821.000 based on the treatise of RUPS Number: AP.I.1348/KU.01.04/2014.

The amount of cash dividend per stock for fiscal year 2015 was Rp 63,47, while the cash dividend per stock for fiscal year 2014 was Rp63,47 and for fiscal year 2013 was Rp73,94. Dividend Payout Ratio for fiscal year 2014 was 18,68% and for fiscal year 2013 was 38,25%.

Tahun Buku Fiscal Year	Pembagian Dividen (Dalam Juta Rupiah) Dividend Share (In Million Rupiah)	Laba Usaha operating Profit	Dividen per Lembar Saham Dividend per Share	Dividen Payout Ratio	Dasar Pembagian Dividen Dividend Share Basis
2015	168,309	841,542	Rp26.24	20.00%	Berita Acara RUPS No.19 Tanggal 17 Mei 2016 / News of RUPS No.19 May 17, 2016
2014	185,720	994,136	Rp63.47	18.68%	Risalah RUPS no. AP.I.2608/TU.03.04/2014 / RUPS Treatise no. AP.I.2608/TU.03.04/2014
2013	257,916	674,308	Rp73.94	38.25%	Risalah RUPS no. AP.I.1348/KU.01.04/2014 / RUPS Treatise no. AP.I.1348/KU.01.04/2014

Adapun rincian penggunaan saldo laba untuk tahun 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut.

The detail of profit use in 2016 and 2015 is described as follows.

Uraian	2016	2015	Description
Saldo awal	3,407,178,379	2,617,335,809	Early Deposit
Penambahan Cadangan	673,234,006	742,881,216	Reserve addition
Pengurangan	0	(941)	Reduction
Penyesuaian	0	46,962,295	Adjustment
Saldo akhir	4,080,412,385	3,407,178,379	Final Balance
Laba tahun berjalan			Current Year Profit
Laba bersih tahun lalu	841,542,506	994,135,846	Last Year Net Profit
Pembagian dividen	(168,308,500)	(185,720,304)	- Dividend Share
Penyaluran ke PKBL	0	(18,572,030)	- Dividend Payout
Cadangan	(673,234,006)	(742,881,216)	- Back up
Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 (revisi 2013)	0	(46,962,296)	- Adjustment on PSAK 24 application (2013 revision)
Laba bersih tahun berjalan	1,158,800,143	841,542,506	Current Year Net Profit
Jumlah	1,158,800,143	841,542,506	Total

Pengurangan laba yang dialokasikan untuk dividen dan cadangan perusahaan tahun 2016 berasal dari kinerja perusahaan tahun 2015 ditentukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. MK. no.5 tanggal 17 Mei 2016. Perubahan (pengurangan) cadangan tahun 2015 adalah alokasi saldo laba menjadi tambahan modal disetor.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan badan usaha *non listed* sehingga PT Angkasa Pura I (Persero) tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I tahun 2016 per 31 Desember 2016 sebagai berikut.

The reduced profit allocated for the dividend and company reserve in 2016 came from the company performance in 2015 and was determined by the result of Annual Shareholders General Meeting stated in the Notary Certificate Nanda Fauz Iwan, SH. MK. number 5 17 May 2016. The reduction in 2015 was the profit balance allocated as the additional paid-up capital.

MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAMS

PT Angkasa Pura I (Persero) is a non listed company, that means PT Angkasa Pura I (Persero) does not have employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP).

REALIZATION OF APPLICATION OF FUNDS FROM PUBLIC OFFERING

In accordance with the POJK No. 30 / POJK.04 / 2015 on the Report on the Realization of the Use of Funds of the Public Offering, the Company has reported the Actual Use of Funds on the Offering of Bond I Angkasa Pura I in 2016 and Angkasa Pura I Sukuk ijarah I Tahun 2016 as of December 31, 2016 as following.

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1.	Penawaran Umum (Obligasi & Sukuk Ijarah)	10 November 2016	3,000,000,000,000	8,423,394,900	2,991,576,605,100
	Biaya Jasa Penjaminan (<i>Underwriting fee</i>)			300,000,000	
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (<i>Management fee</i>)			900,000,000	
	Biaya Penjualan (<i>Selling fee</i>)			300,000,000	
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal				
	Akuntan Publik			1,749,632,500	
	Konsultan Hukum			758,762,400	
	Notaris			165,000,000	
	Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal				
	Wali Amanat			100,000,000	
	Lembaga Peningkat Efek Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, & OJK)			1,100,000,000	
				1,500,000,000	
	Biaya lain-lain (Percetakan, <i>public expose</i> , dll)			1,550,000,000	



Rencana Penggunaan Dana			Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Pendanaan 5 Proyek Pengembangan Bandara	Pendanaan Investasi Rutin	Total	Pendanaan 5 Proyek Pengembangan Bandara	Pendanaan Investasi Rutin	Total	
2,250,000,000,000	750,000,000,000	3,000,000,000,000	474,000,000,000		474,000,000,000	2,571,576,605,100

Sisa dana sebesar Rp2.517.210.214.292,- ditempatkan sebagai berikut.

Rp2.517.210.214.292,- balances are invested as follows.

No.	Nama Bank Bank Name	Nomor Rekening Account Number	Jenis Penempatan Investment Type	Jumlah Amount
1	Bank Tabungan Negara	000-140-13000-13279	Giro / Giro	Rp 1,251,840,619,021
			Deposito / Deposit	Rp 300,000,000,000
2	Bank Mandiri	119-00-95035828	Deposito / Deposit	Rp 100,000,000,000
3	Bank Rakyat Indonesia	0206-01-002327-30-7	Deposito / Deposit	Rp 100,000,000,000
4	Bank Bukopin	102-1109017	Deposito / Deposit	Rp 195,000,000,000
5	Bank Mega	01-035-00-11-00429-0	Deposito / Deposit	Rp 105,000,000,000
6	Bank Muamalat	30-100-700-58	Deposito / Deposit	Rp 120,000,000,000
7	BTPN	-	Deposito / Deposit	Rp 25,000,000,000
8	BPD Jabar	0011-573-568-001	Deposito / Deposit	Rp 195,000,000,000
9	Sinar Mas Syariah	9924252698	Giro / Deposit	Rp 20,043,690,813
			Deposito / Deposit	Rp 30,000,000,000
10	BRI Syariah	103-2330-556	Giro / Giro	Rp 75,325,904,458
Jumlah / Total				Rp2,517,210,214,292,-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia Syariah are affiliated companies to Perseroan, both direct and indirect, through stock ownership by Republic of Indonesia, according to "Affiliation" definition in Capital Market Regulations.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

MATERIAL INFORMATION OF INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, OR RESTRUCTURISATION OF LIABILITIES AND CAPITAL

INVESTASI

INVESTMENT

OBLIGASI DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO

HELD TO MATURITY OBLIGATION

Pembelian Obligasi setelah tahun 2004, Nilai Perolehan Obligasi dikelompokkan "Dimiliki Hingga Jatuh Tempo" sedangkan pembelian obligasi dalam tahun 2003 dan tahun 2004 pencatatan obligasi disesuaikan dari kelompok tersedia untuk dijual menjadi kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Obligasi yang diperoleh setelah tahun 2004 dicatat berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan amortisasi diskonto atau premium sedangkan obligasi yang diperoleh pada tahun 2003 dan 2004 dicatat berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2004 dikurangi dengan amortisasi diskonto atau premium.

Obligations that are bought after 2004, Obligation Acquisition Values are categorized as "Held To Maturity", while obligations that are bought in 2003 and 2004 are recorded according to available categories to be sold to held to maturity category. Obligations that are obtained after 2004 are recorded based on acquisition values minus discounted or premium amortization, while obligations that are obtained in 2003 and 2004 are recorded based on December 31, 2004 market values minus discounted or premium amortization.

RDPT BUMN FUND III

RDPT BUMN FUND III

RDPT BUMN FUND III diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2014 dan merupakan underlying MTN Perum Damri yang digunakan sebagai modal kerja dalam bentuk pembelian kendaraan dan tanah. Jangka waktu reksadana adalah 48 bulan dengan imbal hasil 10% p.a. nett. Pengembalian pokok berdasarkan *Partial Payment* sesuai dengan jadwal amortisasi MTN, yaitu pada tanggal yang ditentukan pada

RDPT BUMN FUND III is published on February 25, 2014 as an underlying MTN Perum Damri that is used as working capital in form of vehicles and land purchasing. Mutual funds time period is 48 months with 10% p.a. net yield. Initial payment is based on Partial Payment according to MTN amortization schedules on consecutive MTN agreement stated dates with 30% proportion in 15th month, 30% poroportion in 24th

perjanjian MTN berturut-turut dengan proporsi 30% pada bulan ke 15, pada bulan ke 24 proporsi sebesar 30%, pada bulan ke 36 proporsi 20% dan pada bulan ke 48 proporsi 20%. Metode valuasi aset adalah *Hold to Maturity* (HTM).

PENYERTAAN PADA PT GAPURA ANGKASA (PERUSAHAAN ASOSIASI)

Penyertaan pada PT Gapura Angkasa yang bergerak dalam bidang jasa *Ground Handling* dilakukan sesuai dengan persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor S546/MK.016/1997 tanggal 5 November 1997 dengan nilai perolehan Rp67.200.000.000 (Rupiah penuh). Modal dasar PT Gapura Angkasa adalah Rp860.160.000.000 (Rupiah penuh) terbagi atas 8.601.600 saham nominal Rp100.000 (Rupiah penuh) per saham. Modal dasar tersebut, sebanyak 2.150.400 saham atau senilai Rp215.040.000.000 (Rupiah penuh) merupakan modal ditempatkan dan disetor. Dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor oleh 3 (tiga) Pemegang saham yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) masing-masing sebanyak 672.000 saham (31,25%) dan PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) sebanyak 806.400 saham (37,50%).

Pada tahun 2014 perseroan telah menjual sebagian saham miliknya kepada pemegang saham lainnya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 456.960 lembar saham atau 22,25% dengan harga jual sebesar Rp105.000.000 yang dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Pembelian dan Penjualan Saham PT Gapura Angkasa nomor SP.140. KU.20/2014/PD; Nomor DS/PERJ/MOU/DQ-3285/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Dengan demikian sisa penyertaan perseroan di PT Gapura Angkasa adalah sebanyak 215.040 lembar saham atau sebesar 10% Perubahan penyertaan dalam saham pada PT Gapura Angkasa adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2016 December 31, 2016	31 Desember 2015 December 31, 2015	
Saldo awal tahun	39,997,101	26,603,765	Beginning year balance
Dividen			Dividend
Perubahan ekuitas entitas asosiasi	(98,535)	8,013,746	Change in association entity equity
Bagian Laba (Rugi) Bersih	2,962,494	5,379,590	Net Profit (Loss) Margin
	42,861,060	39,997,101	

Perusahaan menempatkan Dewan Komisaris diasosiasi, dan oleh karenanya investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Perubahan ekuitas pada entitas asosiasi sebesar Rp13.787.257 adalah penyesuaian ekuitas yang disebabkan penerapan PSAK 24 (Revisi 2010 dan 2013) atas perhitungan kewajiban imbalan paska kerja.

Ikhtisar laporan keuangan entitas PT Gapura Angkasa adalah sebagai berikut:

month, 20% proportion in 36th month and 20% proportion in 48th month. Asset valuation method is *Hold to Maturity* (HTM)

INCLUSION OF PT GAPURA ANGKASA (ASSOCIATED COMPANY)

Inclusion of PT Gapura Angkasa, a Ground Handling service company, is performed according to approval of Letter of Ministry of Finance Number S546/MK.016/1997, dated November 5, 1997 with Rp67,200,000,000 (full Rupiah) acquisition value. PT Gapura Angkasa authorized capital is Rp860,160,000,000 (full Rupiah), divided to 8,601,600 units of stock with Rp100,000 (full Rupiah) nominal per unit. And from this authorized capital, 2,150,400 units of stock or equal to Rp215,040,000,000 (full Rupiah) is issued and paid up capital. The Issued and Paid Up Capital is obtained from 3 (three) Shareholders, which are PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero), with each 672,000 units of stock (31.25%) and PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) with 806,400 units of stock (37.50%).

In 2014, company had sold some of its stocks to another shareholder, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 456,960 units of stock or 22.25% with selling price Rp105,000,000 that is stated in Memorandum of Understanding of PT Gapura Angkasa Stocks Purchasing and Selling number SP.140. KU.20/2014/PD; Number DS/PERJ/MOU/DQ-3285/2014, dated June 30, 2014.

Therefore, company inclusion balance of PT Gapura Angkasa is 215,040 units of stocks or 10%. Stocks inclusion change of PT Gapura Angkasa is as follows.

Company assigns Board of Commissioners in association, that's why the investment is recorded using equity method.

Change in equity to association entity at the amount of Rp13,787,257 is a equity adjustment that is caused by PSAK 24 application (2010 and 2013 Revision) to post employment benefit liabilities calculation.

Financial statement summary of PT Gapura Angkasa entity is as follows :

	31-12-2016	31-12-2015	
Total aset	1,775,713,577	1,004,767,371	Total assets
Total Liabilitas	1,390,394,818	604,796,060	Total Liabilities
Total Ekuitas	385,318,759	399,971,311	Total Equity
Laba bersih	28,260,874	58,795,896	Net profit

PENYERTAAN SAHAM PADA PT JASA MARGA BALI TOL

Investasi dalam saham pada PT Jasa Marga Bali Tol merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa di daerah Bali oleh beberapa perusahaan BUMN. Investasi ini telah mendapat persetujuan dan Menteri Negara BUMN dalam surat nomor S - 549/MBU/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Investasi pada PT Jasa Marga Bali Tol pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

STOCK INCLUSION OF PT JASA MARGA BALI TOL

Investment on stocks of PT Jasa Marga Bali Tol is a investment consortium of Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa highway construction in Bali area by several SOE companies. This investment has been approved by Ministry of SOE in letter number nomor S - 549/MBU/2011, dated October 25, 2011. Investment on PT PT Jasa Marga Bali Tol on December 31, 2016 and 2015 are as follows.

	31 Desember 2016 / December 31, 2016	31 Desember 2015 / December 31, 2015	
Nilai perolehan awal	38,000,000	38,000,000	Beginning acquisition value
Bagian Laba Bersih awal	13,980,803	21,344,231	Beginning Net Profit Margin
Bagian Rugi tahun berjalan	(6,508,846)	(7,363,429)	Current year Loss Margin
Jumlah	45,471,957	51,980,802	Total

Ikhtisar laporan keuangan entitas PT Jasa Marga Bali Tol adalah sebagai berikut:

Financial statement summary of PT Jasa Marga Bali Tol entity is as follows:

	31 Desember 2016 / December 31, 2016	31 Desember 2015 / December 31, 2015	
Total aset	1,938,330,437	1,984,827,710	Total assets
Total Liabilitas	1,364,713,443	1,335,067,679	Total Liabilities
Total Ekuitas	(649,682,351)	741,775,670	Total Equity
Laba bersih	(76,065,357)	(92,015,639)	Net profit

Perusahaan menempatkan Dewan Komisaris diasosiasi, dan oleh karenanya investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Company assigns Board of Commissioners in association, that's why the investment is recorded using equity method.

KERJASAMA OPERASI PADA RED AND WHITE

Penyertaan atas kerjasama operasi antara Anak Perusahaan PT Angkasa Pura Retail dengan PT Wonderful Mulia Jaya untuk menjalankan kerjasama berupa Toko Red dan White yang terletak di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali sebesar Rp341.938 dengan pembagian keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang berlaku dengan tanggal 3 November 2017 dan dapat diperpanjang.

OPERATION COLLABORATION OF RED AND WHITE

Inclusion of operation collaboration between Subsidiary of PT Angkasa Pura Retail and PT Wonderful Mulia Jaya to perform collaboration in form of Red & White Store, located in I Gusti Ngurah Rai Airport, Denpasar, Bali, with Rp341.938 value and 50% profit sharing from profit that is valid until November 3, 2017 and can be extended.

EKSPANSI

Kegiatan ekspansi PT Angkasa Pura I (Persero) selama tahun 2016 merupakan kelanjutan kegiatan ekspansi tahun sebelumnya. Kegiatan ekspansi di tahun 2016 mencakup program pengembangan 3 (tiga) Bandara yaitu Bandara

EXPANSION

Kegiatan ekspansi PT Angkasa Pura I (Persero) expansion activities during 2016 are previous year expansion activities continuity. Expansion activities in 2016 involve 3 (three) Airports development programs, which are Syamsuddin

Syamsudin Noor - Banjarmasin, Bandara Ahmad Yani – Semarang, dan Bandara Yogyakarta Baru.

Dalam rangka pengembangan bandar udara tersebut, Direksi menerbitkan keputusan untuk membentuk organisasi dan tata kerja sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KeP.176/oM.01.01/2014 tanggal 15 Desember 2014 telah dibentuk organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin.
- 2) Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KeP.107/oM.01.01/2014 tanggal 26 Agustus 2014 telah dibentuk organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang.
- 3) Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KeP.182/oM.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas perubahan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KeP.108/oM.01.01/2014 tanggal 26 Agustus 2014 telah dibentuk organisasi dan Tata Kerja Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

DIVESTASI

Selama tahun 2016, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan divestasi perusahaan.

AKUISISI

Selama tahun 2016, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan akuisisi perusahaan

RESTRUKTURISASI UTANG DAN/ATAU RESTRUKTURISASI MODAL

Pada 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) tidak melakukan restrukturisasi utang maupun modal, sehingga tidak terdapat informasi yang bersifat material mengenai restrukturisasi utang maupun modal.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL DENGAN PIHAK BERELASI

KEBIJAKAN MEKANISME REVIU ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki kebijakan mengenai persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi. Secara umum persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sebagai mana dilakukan dengan pihak ketiga. Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran atas pemenuhan peraturan dan ketentuan yang terkait.

KEWAJARAN TRANSAKSI

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2015) mengenai

Noor Airport – Banjarmasin, Ahmad Yani Airport – Semarang, and New Yogyakarta Airport.

In order to develop those airports, Director issues decrees to form organization and working procedures as follows.

- 1) According to PT Angkasa Pura I (Persero) Director Decree number: KeP.176/oM.01.01/2014, dated December 15, 2014, Syamsudin Noor – Banjarmasin Airport Development Project organization and Working Procedures have been formed.
- 2) According to PT Angkasa Pura I (Persero) Director Decree number: KeP.107/oM.01.01/2014, dated August 26, 2014, Ahmad Yani – Semarang Airport Development Project organization and Working Procedures have been formed.
- 3) According to PT Angkasa Pura I (Persero) Director Decree number: KeP.182/oM.01.01/2014, dated December 30, 2014, modification of PT Angkasa Pura I (Persero) Director Decree number: KeP.108/oM.01.01/2014, dated August 26, 2014, Yogyakarta International Airport Building Preparation Project organization and Working Procedures have been formed.

DIVESTMENT

During 2016, Perseroan did not have any information or activities related to company divestment.

ACQUISITION

During 2016, Perseroan did not have any information or activities related to company acquisition.

DEBT RESTRUCTURING AND/OR CAPITAL RESTRUCTURING

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) did not perform debt or capital restructuring, therefore there is no material information about debt nor capital restructuring.

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION WITH RELATED PARTIES

REVIEW MECHANISM POLICY TO TRANSACTIONS AND RELATED REGULATIONS AND STIPULATIONS FULFILLMENT

PT Angkasa Pura I (Persero) has a policy regarding terms and conditions of transactions with related parties. In general terms the terms and conditions of transactions with related parties are performed as to which is done with a third party. During 2016 there is no violation of compliance with the relevant rules and regulations.

REASONABLE TRANSACTIONS

Company and subsidiary perform transactions with few parties that have special relationship, according to PSAK No.7 (2015 Revision) about "Related Parties Disclosure".

“Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”. Definisi pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut.

- Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
- Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; Atau
- Personil manajemen kunci entitas pelapor

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a ; atau
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas)
- Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Nama dan Sifat Hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut.

Definition of related parties are as follows:

Person or closest family member have relation with informer entity if the person.

- Have control or joint control to informer entity
- Have significant influence to informer entity; Or
- Informer entity key management personnel

An entity relates with informer entity if it meets one of this following:

- Entity and informer entity is a member of the same business group (means parent entity, subsidiary entity, and next subsidiary entity related to other entity);
- One entity is an association entity or joint venture from other entity (or association entity or joint venture that is a member of a business group, that the other entity is its member);
- Those two entities are joint venture from the same third party;
- One entity is a joint venture from third entity and the other entity is association entity from third entity;
- The entity is a post employment benefit program for employment benefit from one of informer entity or entity related to informer entity. If informer entity is entity that performs the program, then sponsoring entity also related with informer entity;
- Entity that is controlled or joint controlled by a person that is identified in point a; or
- Person that is identified in point (1) (a) has significant influence on entity or entity key management personnel (or parent entity of entity)
- Entity, or member of a group which entity is a part of the group, provides key management personnel services informer entity or parent entity of informer entity.

All significant transactions with parties that have special relationship, both performed with normal procedures and conditions as performed with third party or not, are disclosed in financial statement notification.

NAME AND CHARACTER OF RELATED RELATIONSHIP

Name and Character of related parties are as follows.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI RELATED RELATIONSHIP CHARACTER	
1. Pemegang saham / Shareholder	Pemerintah Republik Indonesia
2. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah / Government related Entities	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	- PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk.
	- PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
	- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
	- Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)
	- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
	- Indonesia Infrastructure Finance
	- Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya / Other State Owned Enterprises (SOE)
- Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya / Other Regional Owned Enterprises (ROE)	
3. Entitas Anak / Subsidiary Entities	- PT Angkasa Pura Support
	- PT Angkasa Pura Hotel
	- PT Angkasa Pura Logistik
	- PT Angkasa Pura Property
	- PT Angkasa Pura Retail
4. Entitas Asosiasi / Association Entities	- PT Jasa Marga Bali penyertaan saham / Stock inclusion PT Jasa Marga Bali
	- PT Gapura Angkasa penyertaan saham / Stock inclusion PT Gapura Angkasa
5. Entitas Imbalan Paska Kerja / Post Employment Benefit Entity	Dana Pensiun Angkasa Pura / Angkasa Pura Pension Fund
6. Personil, Manajemen Kunci / Personnel, key management	- Dewan Direksi / Board of Directors
	- Komisaris / Commissioner

REALISASI TRANSAKSI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (Pemerintah, Entitas Pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut :

TRANSACTIONS REALIZATION

In its business activities, Company and subsidiary entity perform certain transactions with related parties. Detailed significant accounts with related parties (Government, Government Entities or otherwise stated) are as follows:

Tabel Transaksi dengan Pihak Berelasi / Transactions with Related Parties Table

(dalam Ribuan Rupiah/ in Thousand Rupiahs)

Uraian / Description	2016	2015
Aset / Asset		
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	3,331,716,401	1,143,713,805
Investasi dalam efek jangka pendek / Short term effect investment	0	0
Piutang usaha / Account receivables	92,438,942	115,373,935
Piutang lain lain / Other receivables	2,399,784	118,518,984
Piutang jangka panjang / Long term receivables	699,888	0
Investasi jangka panjang / Long term investment	96,129,584	129,659,365
Jumlah / Total	3,523,384,599	1,507,266,089
Persentase dari total aset / Total assets percentage	14.89%	9,01%
Liabilitas / Liabilities		
Utang Bank dan Pinjaman Sindikasi / Bank Debts and Syndicated Loans	5,175,809,647	3,536,494,340
Utang lancar lain lain / Other current account payable	163,570,953	186,712,573
Ekuitas / Equity		
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya / Yet undetermined status of Government Assistance Settlement	-	255,096,706
Jumlah / Total	5,339,380,600	5,339,380,600
Persentase dari total liabilitas dan Ekuitas / Total liabilities and equity percentage	22.56%	23.79%

IMBALAN KERJA MANAJEMEN KUNCI

Manajemen kunci Perseroan adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ringkasan jumlah imbalan kerja manajemen kunci tersebut adalah sebagai berikut.

KEY MANAGEMENT EMPLOYMENT BENEFIT

Company key management is Board of Directors and Board of Commissioners. Key management employment benefit amount summary is as follows.

Uraian / Description	2016	2015
Imbalan kerja jangka Pendek / Short term employment benefit	32,520,000	30,679,129
Imbalan kerja jangka Panjang / Long term employment benefit	2,727,450	2,459,619
Jumlah / Total	2,459,619	33,138,748

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016, Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION THAT CONTAINS CONFLICT OF INTEREST

During 2016, Perseroan did not perform any material transaction that contains conflict of interest.

LIABILITAS KONTINJENSI

- Gugatan dari PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) atas tidak dilaksanakannya Pembayaran sesuai dengan Standing Instruction.**

Pada tanggal 5 Desember 2013, PT Bank BNI Syariah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan

CONTINGENT LIABILITY

- PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) lawsuit to PT. Angkasa Pura I (Persero) for missed Payment according to Standing Instruction.**

On December 5, 2013, PT Bank BNI Syariah took civil action at Central Jakarta District Court related to missed

Negeri Jakarta Pusat terkait tidak dilaksanakannya *Standing Instruction* oleh PT Angkasa Pura I (Persero) ("Perusahaan") mengenai pembayaran termin V sampai termin X ke rekening PT Bank BNI Syariah untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Lombok berdasarkan Perjanjian Pemborongan No. 03/SPP/PL.10/2008/ DU tanggal 5 Maret 2008 antar PT Angkasa Pura I dengan PT Slipi Raya Utama. *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh PT. Slipi Raya Utama, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan BNI Syariah berisi bahwa seluruh pembayaran termin ditransfer oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada PT. Slipi Raya Utama melalui rekening BNI Syariah atas nama PT. Slipi Raya Utama, pembayaran tidak dapat dialihkan dan *Standing Instruction* tidak dapat dibatalkan kecuali persetujuan tertulis dari BNI Syariah.

Berdasarkan permohonan pembayaran setiap Termin dari PT. Slipi Raya Utama dan Surat Pernyataan tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan pembayaran Termin V sampai Termin X dengan total sebesar Rp85.334.938 melalui rekening yang ditunjuk oleh PT. Slipi Raya Utama (rekening tidak sesuai dengan *Standing Instruction*).

Dalam pelaksanaannya, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan Termin Pembayaran I sampai Termin IV dengan total sebesar Rp44.743.693 melalui rekening BNI Syariah sesuai dengan permohonan pembayaran dari PT. Slipi Raya Utama. Pada tanggal 23 September 2009 PT. Slipi Raya Utama membuat Surat Pernyataan sehubungan perubahan pembayaran dari BNI Syariah dialihkan ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan syarat apabila ada pihak yang berkeberatan maka PT. Slipi Raya Utama akan bertanggung jawab sepenuhnya. Pemenuhan pembayaran termin V sampai X telah dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai surat permohonan pembayaran tanggal 23 September 2009 PT Slipi Raya Utama untuk dibayarkan ke rekening Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri.

Pembayaran oleh PT Angkasa Pura I (Persero) yang tidak melalui rekening BNI Syariah inilah yang dijadikan dasar oleh BNI Syariah dalam menggugat PT Angkasa Pura I (Persero). PT Angkasa Pura I (Persero) dianggap wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Termin V sampai Termin X sesuai dengan *Standing Instruction*. Bahwa perkara BNI Syariah (sebagai Penggugat) dengan PT Angkasa Pura I (Persero) (sebagai Tergugat) dan PT. Slipi Raya Utama (sebagai Turut Tergugat) ini telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Putusan: 315/PDT/2015/PT.DKI.jo.No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Adapun amar putusan adalah sebagai berikut.

- Menyatakan *Standing Instruction* merupakan kesepakatan yang mengikat antara BNI Syariah, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Slipi Raya Utama dan sah menurut hukum Menyatakan PT Angkasa

Standing Instruction by PT Angkasa Pura 1 (Persero) ("Company") about termin V until termin X payments to PT Bank BNI Syariah account for Passengers Terminal and Supporting Facilities Construction Jobs at Lombok International Airport based on Outsourcing Agreement No. 03/SPP/PL.10/2008/DU, dated March 5, 2008 between PT Angkasa Pura 1 and PT Slipi Raya Utama. Standing Instruction that is signed by PT. Slipi Raya Utama, PT. Angkasa Pura I (Persero) and BNI Syariah stated that all termin payments are transferred by PT. Angkasa Pura I (Persero) to PT. Slipi Raya Utama through BNI Syariah account on behalf of PT. Slipi Raya Utama, payments cannot be diverted and Standing Instruction cannot be cancelled unless there is a written approval from BNI Syariah.

Based on each Termin payment from PT. Slipi Raya Utama and the Statement Letter, PT. Angkasa Pura I (Persero) had performed Termin V until Termin X payments with total amount Rp85,334,938 through account that had been appointed by PT. Slipi Raya Utama (account did not match to Standing Instruction).

In implementation, PT. Angkasa Pura I (Persero) had performed Termin I until Termin IV Payments with total amount Rp. 44,743,693 through BNI Syariah account according to payment request from PT. Slipi Raya Utama. On September 23, 2009, PT. Slipi Raya Utama made Statement Letter related to payment change from BNI Syariah is diverted to Bank Syariah Mandiri account, with a term that if there is an objecting party, then PT Slipi Raya Utama will completely responsible. Termin V until X payments fulfillment have been performed by Company according to payment request letter, dated September 23, 2009 from PT Slipi Raya Utama to be paid to Bank Mandiri and Bank Syariah Mandiri accounts.

Payment by PT. Angkasa Pura I (Persero) that were not through BNI Syariah account became a base for BNI Syariah to sue PT. Angkasa Pura I (Persero). PT. Angkasa Pura I (Persero) is considered default, because did not perform Termin V until Termin X payments responsibilities according to Standing Instruction. That this BNI Syariah case (as Plaintiff) with PT. Angkasa Pura I (Persero) (as Defendant) and PT. Slipi Raya Utama (as Co Defendant) had obtained judgement from District Court and High Court with Judgement Number: 315/PDT/2015/PT.DKI.jo.No.556/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST. The judicial verdict is as follows.

- Stated that Standing Instruction is a void agreement between BNI Syariah, PT. Angkasa Pura I (Persero) and PT. Slipi Raya Utama and valid according to law.

Pura I (Persero) wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran Termin V sampai Termin X sesuai dengan *Standing Instruction*

- Menghukum PT Angkasa Pura I (Persero) untuk melaksanakan prestasi sebesar Rp2.491.889.841,- (rupiah penuh).

Pada tanggal 13 Januari 2016, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.315/PDT/2015/PT.DKI tanggal 21 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas.

Pada tanggal 6 Februari 2016, Perseroan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sampai saat sekarang kasasi ini masih dalam proses dan Perseroan sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung

PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan pencadangan pada tahun 2015 terhadap potensi biaya sebesar Rp85.334.938.562,- (rupiah penuh) dan Rp2.491.889.841,- (rupiah penuh).

- Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 13/PDT.G/2016/PN/BJB tanggal 22 Februari 2016 antara Juri Kartono,SH., Wahyu Sabruddin, S.IP, SG, MH., Bastiar, SH., Sumanto,SH,MH., Gusti Karyani Sari,SH., Zalmianto Agung Saputra, SH, MH., Danny Widodo, SH., melawan Walikota Kota Banjarbaru (Tergugat I), Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru (Tergugat II), PT Angkasa Pura I (Persero) cq. PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Tergugat III), PT Sucofindo Appraisal Utama cq. KJPP Immanuel Johnny dan Rekan (Tergugat IV) atas kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya. Perkara ini masih dalam proses peradilan tingkat I di Pengadilan Negeri Banjarbaru
- Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat.**

Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No. 231/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2016 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh dan antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan.

Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kecuali perkara dengan Bank BNI Syariah, Perusahaan tidak membentuk cadangan dari kemungkinan kerugian akibat putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan pemohon karena masih dalam proses pengadilan dan adanya keyakinan manajemen akan memenangkan perkara tersebut. Jumlah gugatan tersebut menurut

- Stated that PT. Angkasa Pura I (Persero) is default because did not perform Termin V until Termin X payments according to *Standing Instruction*

- Punished PT. Angkasa Pura I (Persero) to perform payment with the amount of Rp2,491,889,841,- (full rupiahs).

On January 13, 2016, Company received Jakarta High Court Judgement Notification Letter No.315/PDT/2015/PT.DKI, dated September 21, 2015, that confirmed Central Jakarta District Court Judgement above.

On February 6, 2016, Company had filed cassation to Supreme Court of Republic of Indonesia and until now this cassation is still in progress and Company is waiting for Supreme Court judgement.

PT. Angkasa Pura I (Persero) have performed backup in 2015 to cost potential with the amount of Rp85.334.938.562,- (full rupiahs) and Rp2.491.889.841,- (full rupiahs).

- Civil action case in Banjarbaru District Court No. 13/PDT.G/2016/PN/BJB, dated February 22, 2016, between Juri Kartono,SH., Wahyu Sabruddin, S.IP, SG, MH., Bastiar, SH., Sumanto,SH,MH., Gusti Karyani Sari,SH., Zalmianto Agung Saputra, SH, MH., Danny Widodo, SH., against Banjarbaru City Mayor (Defendant I), Banjarbaru City Land Procurement Committee (Defendant II), PT Angkasa Pura I (Persero) cq. PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Defendant III), PT Sucofindo Appraisal Utama cq. KJPP Immanuel Johnny Dan Rekan (Defendant IV) for land and building attached to it ownership. This case is still in Banjarbaru District Court level I judicial process.
- Industrial Relations Disputes Case between Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M as Plaintiff and Perseroan as Defendant.**

Industrial Relations Disputes Case No. 231/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST, dated August 26, 2016, in Industrial Relations Court at Central Jakarta District Court by and between Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M as Plaintiff and Perseroan as Defendant related to industrial relations disputes that is caused by layoff by company.

This case is in investigation process in Industrial Relations Court at Central Jakarta District Court.

Unless case against BNI Syariah Bank, Company do not form backup from loss potential that is caused by Court judgements that grant applicant lawsuits, because they are still in judicial process and confidence that management will win in those cases. The lawsuit amounts are not disturbing operational and that's why

pendapat manajemen tidak mengganggu operasional dan oleh karenanya apabila terdapat kerugian akan dibebankan langsung pada saat putusan pengadilan.

if there is loss then it will be posted directly when court judgement comes.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Selama tahun 2016 Perseroan tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan baru. Namun demikian sehubungan dengan adanya Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) pada Tahun 2016, terdapat sejumlah peraturan baru yang telah diterbitkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus dipenuhi oleh PT Angkasa Pura I (Persero), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kewajiban PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk membayar pungutan yang dikenakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pungutan Otoritas Jasa Keuangan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.

Jenis pungutan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- a. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelaahan atas rencana aksi korporasi, wajib dibayar sebelum proses pengajuan dan/atau penyampaian rencana aksi korporasi.
- b. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian, wajib dibayar paling lambat setiap tanggal 15 Juni pada tahun berjalan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik

Kewajiban Emiten untuk memiliki Situs Web yang merupakan kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten paling kurang meliputi:

LEGISLATION CHANGES THAT HAVE SIGNIFICANT INFLUENCE TO COMPANY

In 2016, the Company was not significantly affected by the changes in the new legislation. However, in connection with the Public Offering of Bonds and Sukuk by PT Angkasa Pura I (Persero) in 2016, there are a number of new regulations issued by Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) to be met by PT Angkasa Pura I (Persero), as described below:

1. Republic of Indonesia Government Regulation Number 11 in 2014 about Charge by Financial Service Authority

PT Angkasa Pura I (Persero) has responsibility as a Party that performs activities in financial service sector to pay charges that is charged by Financial Service Authority.

Financial Service Authority charges are used to finance operational, administrative, asset procurement and other supporting activities.

Applicable charge type at Financial Service Authority involves:

- a. Permit, approval, registration, validation and review costs for corporate action plan, must be paid before corporate action plan registration and/or presentation process.
- b. Annual cost in order to management, controlling, investigation and research, have to be paid no later than every June 15 at current year.

2. Financial Service Authority Regulation Number 08/POJK.04/2015 about issuer or Public Company Websites

Issuer has responsibility to have a website that is a group of web pages that contain information or data that can be accessed through an internet network system.

Informations that must be available at Issuer Websites are at least contain:

- a. informasi umum Emiten;
- b. informasi bagi pemodal atau investor;
- c. informasi tata kelola perusahaan; dan
- d. informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman

Emiten yang memenuhi kondisi tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman, yaitu:

- a. tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang;
- b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) kondisi sebagai berikut:
 - 1) sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) mendapatkan pembatasan kegiatan usahanya dari pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 3) mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha;
 - 4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat melakukan korespondensi dengan Emiten selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 5) tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 6) telah efektifnya penghapusan pencatatan efek Emiten di Bursa Efek.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Peraturan ini berisi tentang kewajiban Emiten yaitu untuk:

- a. Menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Hasil Penawaran Umum yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota Direksi kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan apabila telah dilakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
- b. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu apabila akan dilakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham.

- a. Issuer general information;
- b. information for capitalist or investor;
- c. company management; and
- d. corporate social responsibilities information.

3. Financial Service Authority Regulations Number 29/POJK.04/2015 about Issuer or Public Company that are Excluded from Reporting and Announcement Responsibilities

Issuer that fulfill certain conditions can be excluded from reporting and announcement responsibilities, which are:

- a. all business permits are not applicable by authorities;
- b. stated bankrupt based on court judgement that has permanent legal force; or
- c. fulfill at least 3 (three) from 6 (six) following conditions:
 - 1) do not fully operated for at least the last 3 (three) years;
 - 2) get business activities limitation from authorities that causes business continuity is disturbed for at least the last 3 (three) years;
 - 3) get all business activities freezing;
 - 4) Financial Service Authority (OJK) cannot perform correspondence with Issuer for at least the last 3 (three) years;
 - 5) do not have Director member, Board of Commissioners member, and main shareholder that can be contacted for at least the last 3 (three) years; and
 - 6) Issuer security recording deletion in Stock Exchange has been activated.

4. Financial Service Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 about Use of Public Offering Fund Realization Report

This regulation contains Issuer responsibilities to:

- a. Delivers Use of Fund Realization Report (LRPD) from Public Offering that is signed by at least 1 (one) Director member to Trustee with a copy to Financial Service Authority until all funds from Public Offering have been realized if debt and/or Sukuk Security Public Offering has been performed.
- b. Delivers change of use of fund from Public Offering plan and reason together with General Meeting of Shareholders agenda announcement to Financial Service Authority and get approval from General Meeting of Shareholders first if use of fund from stock Public Offering change will be performed.

- c. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukukserta memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk apabila akan dilakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk.
- d. Menempatkan dana dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana ditempatkan, mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh dan mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana ditempatkan apabila penempatan dana hasil penawaran umum belum direalisasikan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan ini berisi hal-hal terkait dengan informasi dan fakta material yang wajib dimuat dalam laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat yang dilakukan oleh anggota Direksi atau Sekretaris Perusahaan.

Penyampaian laporan dan pengumuman dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya informasi atau fakta material.

Pengumuman informasi atau fakta material bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

- Situs *web* Emiten, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
- Situs *web* Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik

Kewajiban Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli.

Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya.

- c. Delivers change of use of fund from and/or Sukuk Security Public Offering plan and reason to Financial Service Authority no later than 14 (fourteen) days before General Meeting of debt and/or Sukuk Security Shareholders is held and get approval from General Meeting of debt and/or Sukuk Security Shareholders if use of fund from debt and/or Sukuk Security Public Offering will be performed.

- d. Place fund into safe and liquid financial instrument, disclose form and place where fund will be placed, disclose interest rate or yield that is obtained and disclose if there is affiliated relation and affiliated relation character between Issuer and Party where fund is placed if placement of public offering fund has not been realized yet.

5. Financial Service Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 about Information Openness or Material Fact by Issuer or Public Company

This regulation contains things that related to information and material fact that must be mentioned in report to Financial Service Authority and announcement to public that is performed by Director member or Company Secretary.

Report delivery and announcement are performed as soon as possible no later than the end of the second working days after information or material fact is gained.

Information of material fact announcement to Issuer that its stock is recorded in Stock Exchange is at least through:

- Issuer websites, in Indonesian and foreign languages, with stipulation that the foreign language that is used is at least English; and
- Stock Exchange website or 1 (one) Indonesian daily newspaper with national distribution.

6. The Indonesian Regulatory Authority of the Indonesian Capital Market (BAPEPAM) and Financial Institution (LK) Decree Number KEP-134/BL/2006 about Annual Report Delivery Responsibility for Issuer or Public Company

Issuer responsibility that its registration statement has been effective to deliver annual report to Financial Service Authority no later than 4 (four) months after fiscal year end, with the amount of 4 (four) copies and at least 1 (sone) copy in original form.

Issuer that only issues Debt Security, then annual report delivery responsibility is applicable until Issuer has completed all of responsibilities that related to Debt Security that has been issued.

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik

Kewajiban Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif untuk menyampaikan Laporan Keuangan Berkala (Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan) kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*).

Dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan wajib:

7. The Indonesian Regulatory Authority of the Indonesian Capital Market (BAPEPAM) and Financial Institution (LK) Decree Number KEP-346/BL/2011 about Periodic Annual Financial Statement Delivery for Issuer or Public Company

Issuer responsibility that its registration statement has been effective to deliver Periodic Financial Statement (Annual Financial Statement and Mid Year Financial Statement) to Financial Service Authority, at least 2 (dua) copies, 1 (one) of them is in original form, and is accompanied with soft copy report.

In Annual Financial Statement and Mid Year Financial Statement must:

Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Statement	Laporan Keuangan Tengah Tahunan Mid Year Financial Statement
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. / Comparison with previous year same period is provided. 2. Disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. / Accompanied with Accountant Report in order to financial statement audit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan (neraca) per akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) per akhir tahun buku sebelumnya. / Comparison with previous year same period is provided, except for balance sheet per mid year end period is compared with balance sheet per previous fiscal year end.
<ol style="list-style-type: none"> 3. Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 4. Disampaikan Bursa secara berkala dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 5. Diumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. 3. Deliver to Financial Service Authority and announced to public no later than end of third months after annual financial statement date. 4. Delivered by Stock Exchange periodically in form of Audited Financial Statement, no later than end of third months after annual financial statement date. 5. Announced in at least 1 (one) Indonesian daily newspaper with national distribution. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan; b. Paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan c. Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. 3. Diumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. 2. Deliver to Financial Service Authority and announced to public in this following period: <ol style="list-style-type: none"> a. No later than end of first month after mid year financial statement date, if not accompanied with Accountant report; b. No later than end of second months after mid year financial statement date, if accompanied with Accountant report in order to limited review; and c. No later than end of third months after mid year financial statement date, if accompanied with Accountant report in order to financial statement audit. 3. Announced in at least 1 (one) Indonesian daily newspaper with national distribution.

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor KEP-712/BL/2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang atau Sukuk

- a. Kewajiban Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah:
 - a. memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tersebut dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

8. The Indonesian Regulatory Authority of the Indonesian Capital Market (BAPEPAM) and Financial Institution (LK) Decree Number KEP-712/BL/2012 about Debt or Sukuk Security Rating

- a. Issuer responsibilities that issues Security with Debt and/ or Sukuk Characters are:
 - a. gain Debt and/or Sukuk Security Rating for every Debt and/or Sukuk Security Classification from Security Rating Company;

- b. memuat Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan tanggal penerbitan peringkat tersebut dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Prospektus.
- b. mention Debt and/or Sukuk Security Rating and rating issued date in Trustee and Prospectus Contract.
- b. Informasi Peringkat Efek paling sedikit memuat:
- 1) keunggulan atau kelebihan Emiten dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - 2) kelemahan-kelemahan Emiten dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - 3) simbol Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mencerminkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - 4) masa berlaku Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu satu tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan; dan
 - 5) Prospek (*outlook*).
- b. Security Rating Information is at least mentioning:
- 1) Issuer and Debt and/or Sukuk Security strengths or advantages and their relation with Issuer capability to fulfill responsibility on Debt and/or Sukuk Security;
 - 2) Issuer and Debt and/or Sukuk Security weaknesses and their relation with risk that is faced by Debt and/or Sukuk Security shareholders;
 - 3) Debt and/or Sukuk Security Rating symbols that reflect information as mentioned in point a and point b;
 - 4) Debt and/or Sukuk Security Rating validity period is one year after the rating is issued; and
 - 5) Prospect (*outlook*).
- c. Jenis Pemeringkatan, yaitu:
- 1) Pemeringkatan Tahunan.
Wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan kewajiban terkait.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material Penting.
Wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta masyarakat di paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian atau *website* Bursa Efek paling lama akhir hari kerja kedua setelah diterimanya peringkat baru tersebut.
 - 3) Pemeringkatan Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan wajib memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - 4) Pemeringkatan Ulang.
 - 1) Wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - 2) Apabila hasil pemeringkatan berbeda dari peringkat sebelumnya wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau *website* Bursa Efek paling lama akhir hari kerja kedua setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- c. Ranking Types, as follows:
- 1) Annual Ranking.
Must deliver to Financial Service Authority no later than 10 (ten) working days after last rating validity period ends until Issuer has completed related liabilities.
 - 2) Ranking Because of Important Material Fact.
Must deliver to Financial Service Authorities and public at least 1 (one) daily newspaper or Stock Exchange website no later than end of second working days after new rating is received.
 - 3) Ranking in Sustainable Public Offering.
Issuer that issues Debt and/or Sukuk Security through Sustainable Public Offering must gain Debt and/or Sukuk Security Rating that contains planned Sustainable Public Offering overall value.
 - 4) Reranking.
 - 1) Must deliver reranking result to Financial Service Authority no later than end of second working days after referred rating is received.
 - 2) If reranking result is different from previous rating, it must be announced in 1 (one) daily newspaper or Stock Exchange website no later than end of second working days after referred rating is received.
9. **Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi**
- a. Dalam hal Bursa meminta penjelasan kepada Perusahaan Tercatat (Emiten) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat (Emiten) untuk menyampaikan laporan berdasarkan
9. **PT Bursa Efek Jakarta Director Decree Number KEP-306/BEJ/07-2004 about Information Delivery Liability**
- a. In terms of Stock Exchange requests explanation to Listed Company (Issuer) about issues that are related to Listed Company (Issuer) liability to deliver report based on this Regulation, then Listed Company

- Peraturan ini, maka Perusahaan Tercatat (Emiten) wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya.
- b. Laporan berkala wajib disampaikan oleh Perusahaan Tercatat (Emiten) kepada Bursa bersamaan dengan penyampaian informasi tersebut kepada publik.
 - c. Perusahaan Tercatat (Emiten) wajib menyampaikan daftar nama pejabat yang berwenang menyampaikan laporan kepada Bursa berikut *specimen* tanda tangan pejabat tersebut dan setiap perubahannya.
 - d. Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan yang lengkap yang terdiri dari komponen-komponen Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
 - e. Laporan Keuangan Tahunan:
 - a. Setiap penyampaian Laporan Keuangan kepada Bursa wajib melampirkan surat pernyataan manajemen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
 - b. Harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.
 - f. Laporan Keuangan Interim:
 - 1) Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan triwulan I, Laporan Keuangan tengah tahunan dan Laporan Keuangan triwulan III.
 - 2) Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, adalah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.
 - 3) Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik, adalah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.
 - 4) Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Interim yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.
 - 5) Wajib disampaikan kepada Bursa secara berkala.
 - g. Laporan Tahunan:
 - 1) Perusahaan Tercatat (Emiten) wajib menyampaikan ke Bursa Laporan Tahunan (*Annual Report*) sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan.
- (Issuer) must give written respond to everything that Stock Exchange requests, no later than 3 (three) Exchange Days after explanation request from Stock Exchange both delivered by fax or other delivery media is received.
- b. Periodic report must be delivered by Listed Company (Issuer) to Stock exchange together with information delivery to public.
 - c. Listed Company (Issuer) must deliver authority officials list name that deliver report to Stock Exchange with those officials signatures specimen and detail change.
 - d. Financial statement is complete Financial Statement that consists of Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement, and Notification of Financial Statement components that their composition and presentation according to Bapepam Regulation Number VIII.G.7 about Financial Statement Presentation.
 - e. Annual Financial Statement:
 - a. Every Financial Statement delivery to Stock Exchange must attach management statement letter as arranged in Bapepam Regulation Number VIII.G.11 about Director Responsibility on Financial Statement.
 - b. Must be delivered in form of Audited Financial Statement, no later than end of third months after Annual Financial Statement date.
 - f. Interim Financial Statement:
 - 1) Interim Financial Statement is quarter I Financial Statement, mid year Financial Statement and quarter III Financial Statement.
 - 2) Limited Review by Public Accountant of Interim Financial Statement delivery time period is no later than 2 (two) months after referred Interim Financial Statement date.
 - 3) Non audited by Public Accountant of Interim Financial Statement delivery time period is no later than 1 (one) month after referred Interim Financial Statement date.
 - 4) Audited by Public Accountant of Interim Financial Statement delivery time period is no later than 3 (three) months after referred Interim Financial Statement date.
 - 5) Must be delivered to Sotck Exchange periodically.
 - g. Annual Report:
 - 1) Listed Company (Issuer) must deliver Annual Report to Stock Exchange according to Bapepam Regulation Number: VIII.G.2 about Annual Report.

- 2) Dalam hal Perusahaan Tercatat (Emiten) telah menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir maka Perusahaan Tercatat (Emiten) tersebut tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Auditan.

Terhadap peraturan-peraturan tersebut, Perseroan telah mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan dilakukan untuk mematuhi PSAK yang berlaku. PT Angkasa Pura I (Persero) telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2016 yang dianggap relevan yaitu sebagai berikut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar dan penyesuaian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

STANDAR:

PSAK 110 (revisi 2015) : Akuntansi Sukuk

PENYESUAIAN:

- PSAK 5 : Segmen Operasi
- PSAK 7 : Pengungkapan Pihak Pihak Berelasi
- PSAK 13 : Properti Investasi
- PSAK 22 : Kombinasi Bisnis
- PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53 : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar

AMANDEMEN STANDAR DAN INTERPRETASI:

- PSAK 4 : Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri.
- PSAK 15 : Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi Penerapan Pengecualian Konsolidasi.
- PSAK 16 : Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.
- PSAK 19 : Aset Tak Berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.

- 2) In terms of Listed Company (Issuer) has delivered Annual Report in 3 (three) months time period after company fiscal year ends, then Listed Company (Issuer) does not have a liability to deliver Audited Annual Financial Statement.

Against these regulations, the Company has Comply with and enforce these rules.

ACCOUNTING POLICY CHANGE AND ITS IMPACT TO FINANCIAL STATEMENT

ACCOUNTING POLICY CHANGE REASON

Accounting policy change and disclosure are performed to obey the applicable PSAK. PT Angkasa Pura I (Persero) has applied the following accounting standard on January 1, 2016, that are considered relevant, as follows.

ACCOUNTING POLICY CHANGE

Standard and adjustment that are applied effectively on or after January 1, 2016 with early action is allowed, which is:

STANDARD:

PSAK 110 (2015 revision) : Sukuk Accounting

ADJUSTMENT:

- PSAK 5 : Operation Segment
- PSAK 7 : Related Parties Disclosure
- PSAK 13 : Property Investment
- PSAK 22 : Business Combination
- PSAK 25 : Accounting Policy, Changes in Accounting Estimates and Errors
- PSAK 53 : Stock Based Payment
- PSAK 68 : Fair Value Measurement

AMENDMENTS TO STANDARDS AND INTERPRETATIONS:

- PSAK 4 : Separate Financial Statement about Equity Method in Separate Financial Statement.
- PSAK 15 : Investment of Association and Joint Venture Entities about Consolidation Exception Application for Investment Entities.
- PSAK 16 : Fixed Assets about Accepted Method Clarification for Depreciation and Amortization.
- PSAK 19 : Intangible Assets about Accepted Method Clarification for Depreciation and Amortization.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 24 : Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. - PSAK 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. - PSAK 66 : Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama. - PSAK 67 : Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. - ISAK 30 : "Pungutan" yang merupakan Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 57: Provisi, Liabilitas, Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. - ISAK 31 : Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. | <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 24 : Employment Benefit about Defined Benefit Plan: Worker Contribution. - PSAK 65 : Consolidated Financial Statement about Investment Entity: Consolidation Exception Application. - PSAK 66 : Joint Arrangement about Accounting for Acquisition of Interest in Joint Operation. - PSAK 67 : Interest Disclosure in Other Entity about Investment Entity: Consolidation Exception Application. - ISAK 30 : "Charges" as Interpretation of PSAK 57 Scope: Provision, Liability, Contingent, and Contingent Assets. - ISAK 31 : Interpretation of PSAK 13 Scope: Property Investment. |
|---|---|

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan. Amandemen standar dan interpretasi sudah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan.

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Perseroan telah menganalisis penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL – HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Perseroan tidak sedang menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

Standards and interpretations have been issued but are not applied yet. Amendments to standards and interpretations have been issued and applicable effectively to period that is started on or after January 1, 2017, with early action is allowed, as follows:

- PSAK 1 : Financial Statement Presentation about Disclosure Initiative.

ACCOUNTING POLICY CHANGE IMPACT TO FINANCIAL STATEMENT

Perseroan has analyzed accounting standard application above and the application does not have any significant influence to financial statement.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

THINGS THAT HAVE SIGNIFICANT INFLUENCE TO BUSINESS CONTINUITY

Perseroan does not face anything that has significant influence to business continuity.

MANAGEMENT ASSESSMENT TO THINGS THAT HAVE SIGNIFICANT INFLUENCE TO BUSINESS CONTINUITY

Company management have performed assessment to Company capability to continue its business continuity and believe that Company has resource to continue its business in the future. Besides, Company management do not find any material uncertainty possibility that can create significant doubt to Company capability to continue its business.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut.

- Kinerja Keuangan
- Likuiditas
- Solvabilitas
- Masalah Internal
- Perkara Hukum

KINERJA ANAK PERUSAHAAN

PT ANGKASA PURA SUPORT

PROFIL

Angkasa Pura Suport didirikan untuk mendukung induk meningkatkan *quality service* dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang

Adapun Visi dan Misi Angkasa Pura Suport dijabarkan sebagai berikut.

VISI:

Menjadi perusahaan pendukung berstandar internasional yang bergerak dalam industri kebandarudaraan dan infrastruktur lainnya.

MISI:

1. Mendukung visi induk perusahaan
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas, peralatan, dan pelayanan untuk industri penerbangan
3. Memberikan kontribusi, manfaat finansial bagi pemegang saham

Bidang usaha yang dijalankan Angkasa Pura Suport terdiri dari:

1. *Services*
2. *Equipment*
3. *Information Communication Technology (ICT)*

Adapun pengurus PT Angkasa Pura Suport diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Kepengurusan Angkasa Pura Suport / Angkasa Pura Suport Management Table

NO	NAMA / Name	JABATAN / Position	STATUS / Status
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS			
1.	Wendo Asrul Rose	Komisaris Utama/ Executive Commissioner	2016-2020
2.	Pepen Supendi Yusuf	Komisaris / Commissioner	2016-2020
3.	Ruspen Saragih	Komisaris / Commissioner	2016-2020
4.	Nelson Bagus	Komisaris / Commissioner	2016-2020
DIREKSI / DIRECTORS			

ASSUMPTIONS THAT ARE USED BY MANAGEMENT WHEN PERFORMING ASSESSMENT

Factors that are considered by management when performing assessment to business continuity are as follows.

- Financial Performance
- Liquidity
- Solvency
- Intern Problem
- Legal Case

SUBSIDIARY PERFORMANCE

PT. ANGKASA PURA SUPORT

PROFILE

Angkasa Pura Suport was established to support reposition and restructuring steps and PT Angkasa Pura I (Persero) non-aeronautical revenues improvement through Airport City concept.

Angkasa Pura Suport Vision and Mission are described as follows.

VISION:

As international standard supporting company in airport industry and other infrastructures.

MISSION:

1. Supports the vision of the parent company
2. Providing quality services, equipment, and services for the aviation industry
3. Giving contribution, or financial benefits to shareholders

Angkasa Pura Suport business activities consist of:

1. *Services*
2. *Equipment*
3. *Information Communication Technology (ICT)*

PT Angkasa Pura Suport management are described in the following table.

NO	NAMA / Name	JABATAN / Position	STATUS / Status
1	Edyana Paramitasari	Direktur Utama / Executive Director	2016-2020
2	Trikora Harjo	Direktur Komersial & Teknik / Finance & Administration Director	2016-2020
3	Sugiarto Panca K.	Direktur Keuangan & Umum / Operational & Business Development Director	2016-2020

Adapun komposisi kepemilikan saham PT Angkasa Pura Suport digambarkan dalam tabel berikut.

PT Angkasa Pura Suport stock ownership compositions are described in the following table.

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham / Stock Ownership Compositions Table

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS	PENYERTAAN MODAL SHARES SUBSCRIPTION	LEMBAR SAHAM STOCK UNIT	PROSENTASE PERCENTAGE
PT Angkasa Pura I (Persero)	Rp 123.125.000.000,-	123.125	99,61 %
Pusat Koperasi Karyawan API / API Employee Cooperation Centre	Rp 480.000.000,-	480	0,39 %

KINERJA

Pada tahun 2016, kinerja PT Angkasa Pura Suport menunjukkan hasil yang bervariasi. Laporan Posisi Keuangan PT Angkasa Pura Suport menunjukkan kinerja yang baik. Aset meningkat Rp204,477 miliar atau sebesar 54,73%, Liabilitas meningkat Rp144,464 miliar atau sebesar 78,10%, dan begitu pula dengan ekuitas yang meningkat Rp 63,013 miliar atau 32,46%.

Sedangkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Angkasa Pura Suport menunjukan pertumbuhan pada laba setelah pajak sebesar Rp31,44 miliar atau meningkat sebesar 76,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan laba bersih yang mencapai Rp44,40 miliar atau 93,18% dan laba operasional yang mencapai Rp45,52 miliar atau 76,62%. Adapun rincian terkait kinerja keuangan PT Angkasa Pura Suport diuraikan pada tabel berikut.

PERFORMANCE

In 2016, PT Angkasa Pura Suport performance showed vary results. PT Angkasa Pura Suport Statement of Financial Position showed good performance. Assets increased/ decreased Rp204,477 billion or 54.73%, Liabilities increased/ decreased Rp144,464 billion or 78.10%, and so is equity, increased/decreased Rp63,013 billion or 32.46%.

Meanwhile PT Angkasa Pura Suport income statement and other comprehensive incomes showed growth on income after tax with the amount of Rp31.44 billion or increased 76.72% compared to previous year. This is parallel with net profit improvement with the amount of Rp44.40 billion or 93.18% and operating income with the amount of Rp45.52 miliar or 76.62%. Details related to PT Angkasa Pura Suport financial performance are described in the following table.

Tabel Kinerja Keuangan Utama PT Angkasa Pura Suport / PT Angkasa Pura Suport Main Financial Performance Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiahs)

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan Growth		Description
			4= (2-3)	5= (4/3)	
1	2	3	4= (2-3)	5= (4/3)	
Aset	586,597	379,113	204,477	54.73%	Assets
Liabilitas	329,446	184,976	144,464	78.10%	Liabilities
Ekuitas	257,150	194,137	63,013	32.46%	Equity
Pendapatan Operasional	734,818	607,229	127,589	21.01%	Operational Income
Beban Operasional	629,881	547,815	82,066	14.98%	Operational Expense
Laba Operasional	104,936	59,414	45,522	76.62%	Operational Earning
Pendapatan Non Operasional	2,581	3,846	-1,265	-32.89%	Non Operational Income
Beban Non Operasional	15,473	15,612	-139	-0.89%	Non Operational Expense
Laba Non Operasional	-12,892	-11,766	-1,126	9.57%	Non Operational Earning

Uraian 1	2016	2015	Pertumbuhan Growth		Description
	2	3	4= (2-3)	5= (4/3)	
Total Pendapatan	737,399	611,075	126,324	20.67%	Total Income
Total Beban	645,354	563,427	81,927	14.54%	Total Expense
Laba Bersih	92,045	47,648	44,397	93.18%	Net Income
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	19,629	6,671	12,958	194.24%	Income Tax Estimation
Laba (Rugi) Setelah Pajak	72,415	40,977	31,438	76.72%	Income Tax Estimation

Berdasarkan rasio keuangan, Angkasa Pura Suport menunjukkan hasil pengukuran kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang bervariasi dibandingkan 2015. *Current ratio* mengalami peningkatan sebesar 9,43% dari 168,63% di tahun 2015 menjadi 178,06% di tahun 2016. Sedangkan untuk *cash ratio* dan *test acid ratio* mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,17% dan 11,69%. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan penerimaan Kas atas Piutang akibat terlambatnya addendum, tidak terealisasinya setoran modal yang dianggarkan terealisasi Mei 2016.

Selain itu, untuk *return on asset* dan *return on equity* Angkasa Pura Suport mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. *Return on asset* mengalami peningkatan/ sebanyak 14,21% dari 10,8% di tahun 2015 menjadi 12,34% di tahun 2016 sedangkan peningkatan *return on equity* mencapai 33,42% dari 21,11% di tahun 2015 menjadi 28,16% di tahun 2016. Hal ini sejalan dengan peningkatan laba yang diperoleh oleh PT Angkasa Pura Suport.

Based on financial ratio, Angkasa Pura Suport showed vary measurement to pay off short term liabilities, compared with 2015. Current ratio increased by 9.43% from 168.63% in 2015 to 178.06% in 2016. Meanwhile, cash ratio and test acid ratio decreased compared to previous year, respectively by 3.17% and 11.6%. This was due to the delay in Cash Return on receivable due to the delay in addendum and capital injection planned in May 2016 failed to realized.

In addition, for return on asset and return on equity, Angkasa Pura Suport had increased/decreased compared to previous year. Return on asset increased by 14.21% from 10.81% in 2015 to 12.34% in 2016, when return on equity improvement increased by 33.42% from 21.11% in 2015 to 28.16% in 2016. This is in line with profit improvement acquired by PT. Angkasa Pura Suport.

Tabel Rasio Keuangan Utama PT. Angkasa Pura Suports / PT. Angkasa Pura Suport Main Financial Ratio Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

Uraian / Description 1	2016 2	2015 3
Cash Ratio	15.04%	15.53%
Current Ratio	178.06%	168.63%
Tes Acid Ratio	139.09%	157.50%
Return On Asset	12.35%	10.81%
Return On Equity	28.16%	21.11%

PT ANGKASA PURA LOGISTIK

PROFIL

PT Angkasa Pura Logistik merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) yang menjalankan usaha jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*).

Adapun Visi dan Misi PT Angkasa Pura Logistik dijabarkan sebagai berikut.

VISI:

Menjadi perusahaan jasa logistik nasional terpadu dan terpercaya di Indonesia.

PT ANGKASA PURA LOGISTIK

PROFILE

Angkasa Pura Logistik is PT Angkasa Pura I (Persero) subsidiary with freight forwarding service business activities.

Angkasa Pura Logistik Vision and Mission are described as follows.

VISION:

Become integrated and trusted National logistic services company in Indonesia.

MISI:

1. Menyediakan jasa logistik terpadu yang solutif, profesional dan inovatif untuk kepuasan konsumen.
2. Meningkatkan kapabilitas, membangun kapasitas dan kesejahteraan karyawan.
3. Mengembangkan sinergi dengan mitra usaha
4. Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memberi kontribusi yang positif kepada masyarakat dan lingkungan.

Beberapa produk/jasa yang disediakan PT Angkasa Pura Logistik diuraikan sebagai berikut.

1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi termasuk pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang/kargo, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi dan lainnya yang berhubungan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai diterimanya oleh yang berhak menerimanya.
2. Menjalankan pemeriksaan keamanan dan keselamatan kargo dan pos yang diangkut pesawat udara.
3. Selaku Agen Penjualan Umum (*General Sales Agent*) Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Adapun pengurus PT Angkasa Pura Logistik diuraikan pada tabel sebagai berikut.

MISSION:

1. Provide professionally integrated and innovative logistic services to meet customer satisfaction.
2. Improve capability, build employee capacity and welfare.
3. Develop business synergy between partners.
4. Maximize value for shareholders and other stakeholders.
5. Give positive contribution to public and environment.

Some products/services that are provided by Angkasa Pura Logistik are described as follows.

1. Run business in freight forwarding services that arrange all needed activities for items deliveries and reception through land, sea and air transportation that consist of reception, storage, sorting, including item/cargo quality and quantity check, packaging, measurement, weighing, document completion arrangement, issuing transport document, transportation cost calculation, insurance claim and others that are related to delivering those items to the rightfully receiver.
2. Perform cargo and spot security and safety check that are transported by plane.
3. As Foreign Air Transportation Company General Sales Agent.

Angkasa Pura Logistik management are described in the following table.

Tabel Kepengurusan PT Angkasa Pura Logistik / PT Angkasa Pura Logistik Management Table

NO	NAMA / Name	JABATAN / Position	STATUS / Periode
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS			
1	Novrihandri	Komisaris Utama / Executive Commissioner	2016-2020
2	Parlindungan Situmorang	Komisaris / Commissioner	2016-2020
3	Marsda (Purn) Bambang Agus Margono	Komisaris / Commissioner	2016-2020
4	M. Basuki Mardianto	Komisaris / Commissioner	2016-2020
DIREKSI / DIRECTOR			
1	Herry A.Y. Sikado	Direktur Utama / Executive Director	2016-2020
2	Ahmad Munir	<i>Finance and Administration Director</i> / Finance & Administration Director	2016-2020
3	Satrio Witjaksono	<i>Operation and Business Development Director</i> / Operational & Business Development Director	2016-2020

Adapun komposisi kepemilikan saham PT Angkasa Pura Logistik digambarkan dalam tabel berikut.

Angkasa Pura Logistik stock ownership compositions are described in the following table.

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham / Stock Ownership Compositions Table

PEMEMANG SAHAM / SHAREHOLDERS	PENYERTAAN MODAL / SHARES SUBSCRIPTION (Rp)	LEMBAR SAHAM / STOCK UNIT	PROSENTASE / PERCENTAGE
PT Angkasa Pura I (Persero)	24.500.000.000,-	24.500	98,00 %
Pusat Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) / API Employee Cooperation Centre	500.000.000,-	5.000	2,00 %

KINERJA

Secara umum, kinerja PT Angkasa Pura Logistik menunjukkan kinerja yang baik. Aset meningkat Rp34,777 miliar atau sebesar 35.61%, liabilitas meningkat Rp17,807 miliar atau sebesar 40.40%, dan ekuitas meningkat Rp16,970 miliar atau 31.67%.

Pada tahun 2016, realisasi Laba Rugi dan Komprehensif lain PT Angkasa Pura Logistik menunjukkan pertumbuhan pada laba setelah pajak yang meningkat sebesar Rp11,36 miliar atau 84,78% dari Rp13,39 miliar di tahun 2015 menjadi Rp24,75 miliar di tahun 2016. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba operasional sebesar Rp16,37 miliar atau 100,02% dari Rp16,36 miliar di tahun 2015 menjadi Rp32,73 miliar di tahun 2016. Secara singkat kinerja keuangan utama PT Angkasa Pura Logistik dapat dilihat pada tabel berikut.

PERFORMANCE

Generally, PT Angkasa Pura Logistik performance showed good performance. Assets increased/decreased Rp34,777 billion or 35.61%, liabilities increased/decreased Rp17,807 billion or 40.40%, and equity increased Rp16,970 billion or 31.67%.

In 2016, PT Angkasa Pura Logistik Income and other Comprehensive realization showed income after tax growth increased Rp11.36 billion or 84.79% from Rp13.39 miliar in 2015 to Rp24.75 billion in 2016. This improvement is parallel with operational income with the amount of Rp16.3 billion or 100.02% from Rp16.36 billion in 2015 to Rp32.73 billion in 2016. In summary, PT Angkasa Pura Logistik main financial performance can be seen in this following table.

Tabel Kinerja Keuangan Utama PT Angkasa Pura Logistik / Angkasa Pura Logistik Main Financial Performance Table

(dalam ribuan Rupiah / in Thousand Rupiahs)

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan Growth		Description
1	2	3	4= (2-3)	5= (4/3)	
Aset	132,450	97,673	34,777	35.61 %	Assets
Liabilitas	61,880	44,073	17,807	40.40 %	Liabilities
Ekuitas	70,570	53,600	16,970	31.67 %	Equity
Pendapatan Operasional	266,481	237,607	28,874	12.15%	Operational Income
Beban Operasional	233,753	221,244	12,509	5.65%	Operational Expense
Laba Operasional	32,727	16,362	16,365	100.02%	Operational Earning
Pendapatan Non Operasional	4,338	4,173	165	3.95%	Non Operational Income
Beban Non Operasional	2,009	1,932	77	3.99%	Non Operational Expense
Laba Non Operasional	2,329	2,241	88	3.93%	Non Operational Earning
Total Pendapatan	270,819	241,780	29,039	12.01%	Total Income
Total Beban	235,763	223,176	12,587	5.64%	Total Expense
Laba Bersih	35,056	18,604	16,452	88.43%	Net Profit
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	10,304	5,208	5,096	97.85%	Income Tax Estimation
Laba (Rugi) Setelah Pajak	24,752	13,395	11,357	84,79%	Income (Loss) AfterTax

Rasio keuangan Angkasa Pura Logistik yang mencakup *cash ratio*, *current ratio*, dan *test acid ratio* menunjukkan peningkatan dan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. *Cash ratio* mengalami peningkatan sebesar 6,21%. Sedangkan *current ratio*, dan *test acid ratio* masing-masing mengalami penurunan 5,82% dan 6,23%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan PT Angkasa Pura Logistik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, *return on asset* dan *return on equity* PT Angkasa Pura Logistik juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan *return on asset* sebesar 36,32% dari 13,71% di tahun 2015 menjadi 18,69% di tahun 2016 sedangkan peningkatan *return on equity* sebesar 40,34% dari 24,99% di tahun 2015 menjadi 35,07% di tahun 2016. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba yang diperoleh oleh PT Angkasa Pura Logistik. Rincian terkait rasio keuangan PT Angkasa Pura Logistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Angkasa Pura Logistik financial ratio that consists of cash ratio, current ratio, and test acid ratio showed increasing/ decreasing compared with previous year. Increasing for each ratio was 5.64%, -3.47%, and 3.47%. This showed that there was increasing/decreasing for kemampuan PT. Angkasa Pura Logistik capability to pay off its short term liabilities. Besides, PT. Angkasa Pura Logistik return on asset and return on equity also had increasing/ decreasing compared to previous year. Return on asset improvement with the amount of 36.32% from 13.71% in 2015 to 18.69% in 2016, meanwhile return on equity improvement with the amount of 40.34% from 24.99% in 2015 to 35.07% in 2016. This increasing/ decreasing is parallel with profit increasing/ decreasing that was obtained by PT. Angkasa Pura Logistik. Detail related to Angkasa Pura Logistik financial ratio can be seen in the following table.

Tabel Rasio Keuangan Utama PT Angkasa Pura Logistik / Angkasa Pura Logistik Main Financial Ratio Table

Uraian / Description	2016	2015
1	2	3
Cash Ratio	116.28%	110.07%
Current Ratio	169.28%	175.10%
Tes Acid Ratio	167.77%	174.00%
Return on Asset	18.69%	13.71%
Return on Equity	35.07%	24.99%

PT ANGKASA PURA PROPERTI

PROFIL

PT Angkasa Pura Properti merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) yang bergerak di bidang usaha pengembangan, jasa konstruksi dan jasa konsultan perencanaan.

Angkasa Pura Properti memiliki visi dan misi yang diuraikan sebagai berikut.

VISI

Menjadi pengembang properti terpercaya untuk kawasan bandara dan sekitar di Indonesia. Secara Khusus PT Angkasa Pura Properti merupakan *Airport City Developer*.

MISI :

1. Mengembangkan lahan-lahan yang dimiliki Perusahaan Induk sesuai potensi dan tren pasar dengan memperhatikan aspek lingkungan dan pelayanan kepada konsumen.
2. Memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.
3. Melakukan sinergi yang profesional dengan rekan bisnis.
4. Membangun SDM yang berkompeten serta memiliki integritas, kreatifitas, dan nilai-nilai positif.
5. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

PT. ANGKASA PURA PROPERTI

PROFILE

Angkasa Pura Properti is PT Angkasa Pura I (Persero) subsidiary with construction, trading and services business activities.

Angkasa Pura Properti have vision and mission that are described as follows.

VISION

Become trusted property development company for airport area and its surrounding in Indonesia.

MISSION :

1. Provide property products in airport area and its surrounding that are innovative and have value added to customer.
2. Improve sustainable employee quality and welfare.
3. Maximize value added to shareholders.
4. Develop synergy relationship with partner, affiliated company, and other agencies.
5. Give positive contribution to environment, public and other stakeholders.

6. Mengembangkan jasa properti dan industri pendukung lainnya.

6. Develop property services and supporting others industries.

Beberapa produk/jasa yang PT Angkasa Pura Properti sebagai berikut.

Some of Angkasa Pura Properti products/ services are as follows.

1. Menjalankan usaha-usaha pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga dan lainnya.
2. Bidang Perdagangan antara lain: Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan Perusahaan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan properti, ekspor-impor dan lainnya.
3. Bidang Jasa antara lain: konsultasi bidang teknik *engineering*, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, konsultasi bidang studi perencanaan, jasa agen properti dan lainnya.

1. Performing construction activities, act as developer, general contractor, construction of buildings, bridges, airport, seaport, and others.
2. Trading, such as: Distributor, agent and as representative of companies, trading that related to real estate and property business, export-import, and others..
3. Services, such as: tehcnical engineering consultation, management and rental services of building, office, amusement park and bonded zone, planning study consultation, property agent services and others.

Adapun kepengurusan PT Angkasa Pura Properti diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Angkasa Pura Properti management are deccribed in the following table.

Tabel Kepengurusan PT Angkasa Pura Properti / Angkasa Pura Properti Management Table

NO	NAMA / Name	JABATAN / Position	STATUS / Periode
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS			
1	Polana B. Pramesti	Komisaris Utama / Executive Commissioner	2016-2020
2	Iskandar	Komisaris / Commissioner	2016-2020
3	Yusfrandi Gona	Komisaris / Commissioner	2016-2020
DIREKSI / DIRECTOR			
1	Eko Permadi	Direktur Utama	2016-2020
2	Siti Chadijah Octaviana	Direktur Keuangan & Administrasi / Finance Director	2016-2020
3	Andiko Surya Widjaya	Direktur Operasional & Pengembangan Usaha / Business Development Director	2016-2020

Adapun komposisi kepemilikan saham Angkasa Pura Properti digambarkan dalam tabel berikut.

Angkasa Pura Properti stock ownership compositions are described as follows.

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham / Stock Ownership Compositions Table

PEMEMANG SAHAM / SHAREHOLDERS	PENYERTAAN MODAL / SHARES SUBSCRIPTION (Rp)	LEMBAR SAHAM / STOCK UNIT	PROSENTASE / PERCENTAGE
PT Angkasa Pura I (Persero)	167.940.000.000,-	167.940	99,96 %
Pusat Koperasi Karyawan API / API Employee Cooperation Centre	60.000.000,-	60	0,04 %

KINERJA

Pada tahun 2016, kinerja PT Angkasa Pura Properti menunjukkan hasil yang baik. Laporan Posisi Keuangan PT Angkasa Pura Properti menunjukkan penurunan aset sebesar Rp12,356 miliar atau 5,90%, penurunan liabilitas sebesar Rp13,562 miliar atau 30,26%, dan peningkatan ekuitas sebesar Rp1,747 miliar atau 0,74%.

PERFORMANCE

In 2016, PT Angkasa Pura Properti performance showed good performance. Laporan Posisi Keuangan PT Angkasa Pura Properti Financial Position Statement showed assets increasing/decreasing with the amount of Rp12,356 billion or 5.90%, increasing/decreasing liabilities Rp13,562 billion or 30.26%, and increasing/decreasing equity Rp1,747billion or 0.74%.

Dari sisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, realisasi laba (Rugi) setelah pajak PT Angkasa Pura Properti mengalami penurunan sebesar Rp4,22 miliar atau 77,90% dari Rp5,42 miliar di 2015 menjadi Rp1,20 miliar di 2016. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh pendapatan developer belum terealisasi, beberapa realisasi proyek di-carry over.

Adapun rincian terkait kinerja keuangan PT Angkasa Pura Properti diuraikan pada tabel berikut.

From income statement and other comprehensive incomes sides, PT Angkasa Pura Properti income (Loss) after tax realization decreased Rp4.22 billion or 77.90% from Rp5.42 billion in 2015 to Rp1.20 billion in 2016. This decreasing was caused by un-generated developer's revenue Details related to PT Angkasa Pura Properti financial performance are described in the following table.

The details related to the financial performance of PT Angkasa Pura Properties are described in the following table.

**Tabel Kinerja Keuangan Utama PT Angkasa Pura Properti /
Angkasa Pura Properti Main Financial Performance Table**

(dalam juta Rupiah / in Thousand Rupiahs)

Uraian 1	2016 2	2015 3	Pertumbuhan Growth		Description
			4= (2-3)	5= (4/3)	
Aset	197,070	209,426	(12,356)	(5.90%)	Assets
Liabilitas	31,260	44,822	(13,562)	(30.26%)	Liabilities
Ekuitas	165,810	164,063	1,747	0.74%	Equity
Pendapatan Operasional	63,950	70,518	(6,568)	(9.31%)	Operational Income
Beban Operasional	70,126	68,262	1,864	2.73%	Operational Expense
Laba Operasional	(6,175)	2,256	(8,431)	(373.71%)	Operational Earning
Pendapatan Non Operasional	4,127	2,815	1,312	46.61%	Non Operational Income
Beban Non Operasional	875	485	390	80.41%	Non Operational Expense
Laba Non Operasional	3,252	2,330	922	39.57%	Non Operational Earning
Total Pendapatan	68,078	73,333	(5,255)	(7.17%)	Total Income
Total Beban	71,001	68,747	2,254	3.28%	Total Expense
Laba Bersih	(2,923)	4,586	(7,509)	(163.74%)	Net Profit
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	(4,120)	(830)	(3,290)	396.39%	Income Tax Estimation
Laba (Rugi) Setelah Pajak	1,197	5,416	(4,219)	(77.90%)	Income (Loss) After Tax

Rasio keuangan PT Angkasa Pura Properti di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. *Cash ratio* menurun sebesar (28,22%) dari 204,76% di tahun 2015 menjadi 146,97% di tahun 2016. *Current ratio* meningkat sebesar 28,09% dari 312,11% di tahun 2015 menjadi 169,02% di tahun 2016 dan *test acid ratio* meningkat sebesar 28,09% dari 312,11% di 2015 menjadi 399,77% di 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan PT Angkasa Pura Properti dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan *Return on asset* dan *return on equity* PT Angkasa Pura Properti tercatat masing-masing sebesar 0,61% dan 0,72%.

PT Angkasa Pura Properti financial ratio in 2016 showed good result. Cash ratio, current ratio, and test acid ratio were increasing/decreasing compared to previous year. Cash ratio increased (28.22%) from 204.76% in 2015 to 146.97% in 2016. Current ratio increased/decreased 28.09% from 312.11% in 2015 to 169.02% in 2016 and test acid ratio increased/decreased 28.09% from 312.11% in 2015 to 399.77% in 2016. This showed that there was increasing/ decreasing for Angkasa Pura Properti capability to pay off its short term liabilities. Meanwhile Angkasa Pura Properti Return on asset and return on equity were recorded each 0.61% and 0.72%.

Tabel Rasio Keuangan Utama PT Angkasa Pura Properti
Tabel Rasio Keuangan Utama PT Angkasa Pura Properti

Uraian / Description	2016	2015
1	2	3
Cash Ratio	146.97%	204.76%
Current Ratio	399.77%	312.11 %
Tes Acid Ratio	399.77 %	312.11%
Return on Asset	0.18%	2.59 %
Return on Equity	0.72%	3.29 %

PT ANGKASA PURA HOTEL

PROFIL

PT Angkasa Pura Hotel merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) yang menjalankan usaha perhotelan, jasa catering penerbangan, *lounge* dan jasa terkait hospitality.

PT Angkasa Pura Hotel memiliki visi dan misi yang diuraikan sebagai berikut.

VISI

Menjadi penyedia jasa akomodasi dan jasa boga terintegrasi berbasis bandara yang terbaik di Indonesia

MISI

1. Memberikan layanan akomodasi dan jasa boga terintegrasi untuk kepuasan konsumen.
2. Meningkatkan profesionalisme dan membentuk karakter *hospitality* karyawan
3. Memaksimalkan nilai pemegang saham dan mendukung peningkatan layanan bandara.
4. Mengoptimalkan sinergi dengan mitra usaha, perusahaan afiliasi dan pemerintah.
5. Memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan turut berperan dalam pengembangan green airport.

Beberapa produk/jasa yang disediakan Angkasa Pura Hotel yaitu perusahaan melaksanakan kegiatan perhotelan dengan menyelenggarakan penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan ruangan/tempat konvensi, kongres dan pameran, termasuk pelayanan makan dan minum, pelayanan cucian dan kegiatan lain yang terkait dengan usaha perhotelan. PT Angkasa Pura Hotel juga bergerak di bidang pelayanan jasa catering penerbangan (*inflight catering services*) yang dibentuk sejak 25 Oktober 2013.

Adapun pengurus PT Angkasa Pura Hotel diuraikan pada tabel sebagai berikut:

PT ANGKASA PURA HOTEL

PROFILE

Angkasa Pura Hotel is PT Angkasa Pura I (Persero) subsidiary with tourism accommodation provision business.

Angkasa Pura Hotel has vision and mission that are described as follows.

VISION:

Become best Airport base accommodation services provider and Food and Beverage operator in Indonesia.

MISSION:

1. Provide integrated accommodation and Food and Beverage services for customer satisfaction
2. Improve staff professionalism and develop hospitality character
3. Maximize shareholders value and support airport service improvement
4. Optimize synergy with business partner, affiliated company and government
5. Give positive contribution to public and develop green airport concept

Some products/services that are provided by Angkasa Pura Hotel are company perform hospitality business with arrange room for stay, convention, congress and exhibition room/place provision, including food and beverage services, laundry services and other activities related to hospitality business. Angkasa Pura Hotel also has subsidiary named Kulinair that was established since October 25, 2013. Kulinair business activities are inflight catering services.

Angkasa Pura Hotel management are described in the following table.

Tabel Kepengurusan PT Angkasa Pura Hotel / Angkasa Pura Hotel Management Table

NO	NAMA / Name	JABATAN / Position	Periode
DEWAN KOMISARIS			
1	M. Asrori	Komisaris Utama / Executive Commissioner	2016-2020
2	Dadun Kohar	Komisaris / Commissioner	2016-2020
3	Faturohman	Komisaris / Commissioner	2016-2020
DIREKSI / DIRECTOR			
1	Danny P. Thaharsyah	Direktur Utama / Executive Director	2016-2020
2	Farid Indra Nugraha	Direktur Desain, Operasi, dan Marketing / Design, Operation, and Marketing Director	2016-2020
3	Kukuh	Direktur Keuangan, Personalia, dan administrasi / Finance, Human Resource, and administration Director	2016-2020

Adapun komposisi kepemilikan saham PT Angkasa Pura Hotel digambarkan dalam tabel berikut.

Angkasa Pura Hotel stock ownership compositions are described in the following table.

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham / Stock Ownership Compositions Table

PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS	PENYERTAAN MODAL / SHARES SUBSCRIPTION (Rp)	LEMBAR SAHAM / STOCK UNIT	PROSENTASE / PERCENTAGE
PT Angkasa Pura I (Persero)	399,960,000,000,-	399,960	99.99%
Pusat Koperasi Karyawan API / API Employee Cooperation Centre	40,000,000,-	40	0.01%

KINERJA

Pada tahun 2016, kinerja PT Angkasa Pura Hotel menunjukkan hasil yang Baik. Pada Laporan Posisi Keuangan PT Angkasa Pura Hotel tercatat peningkatan aset sebesar Rp183.433 miliar atau 46,50%, peningkatan liabilitas sebesar Rp182.421 miliar atau 59,68%, dan peningkatan ekuitas sebesar Rp 1.013 miliar atau 1,13%.

Realisasi laba (rugi) setelah pajak PT Angkasa Pura Hotel mengalami penurunan sebesar Rp2,45 miliar atau 70,76%. Penurunan ini berasal dari beban pajak tangguhan tidak sebesar tahun 2015, realisasi pendapatan Lounge mengalami deviasi negatif, realisasi pendapatan Hotel tidak tercapai sebesar 16%.

Rincian terkait kinerja keuangan PT Angkasa Pura Hotel disajikan pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Keuangan Utama PT Angkasa Pura Hotel PT Angkasa Pura Hotel Main Financial Performance Table

(dalam juta Rupiah / in Thousand Rupiahs)

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan Growth		Description
			4= (2-3)	5= (4/3)	
1	2	3			
Aset	577,871	394,438	183,433	46.50 %	Assets
Liabilitas	487,184	304,763	182,421	59.86 %	Liabilities

PERFORMANCE

In 2016, PT. Angkasa Pura Hotel performance showed good result. In Angkasa Pura Hotel Financial Position Statement are recorded assets increasing/decreasing Rp183,433 billion or 46.50%, liabilities increasing/decreasing Rp182,421 billion or 59.68%, and equity increasing/decreasing Rp1,013 billion or 1.13%.

Angkasa Pura Hotel Income (loss) after tax realization decreased Rp2.45 billion or 70.76%. This came from decreased deferred tax expense compared to 2015's Details related to Angkasa Pura Hotel financial performance are served in the following table.

Details regarding the financial performance of PT Angkasa Pura Hotel is presented in the following table

Uraian 1	2016	2015	Pertumbuhan Growth		Description
	2	3	4= (2-3)	5= (4/3)	
Ekuitas	90,687	89,674	1,013	1.13 %	Equity
Pendapatan Operasional	159,194	70,211	88,983	126.74%	Operational Income
Beban Operasional	158,802	79,849	78,953	98.88%	Operational Expense
Laba Operasional	392	(9,638)	10,030	(104.07%)	Operational Earning
Pendapatan Non Operasional	996	3,385	(2,389)	(70.58%)	Non Operational Income
Beban Non Operasional	231	1,643	(1,412)	(85.94%)	Non Operational Expense
Laba Non Operasional	765	1,742	(977)	(56.08%)	Non Operational Earning
Total Pendapatan	160,191	73,596	86,595	117.66%	Total Income
Total Beban	159,033	81,492	77,541	95.15%	Total Expense
Laba Bersih	1,158	(7,896)	9,054	(114.67%)	Net Profit
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	145	(11,361)	11,506	(101.28%)	Income Tax Estimation
Laba (Rugi) Setelah Pajak	1,013	3,465	(2,452)	(70.76%)	Income (Loss) After Tax

Berdasarkan rasio keuangan yaitu *cash ratio*, *current ratio*, dan *test acid ratio*, hasil pengukuran kemampuan PT Angkasa Pura Hotel dalam melunasi kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. *Cash ratio* meningkat sebesar 13,15% dari 16,22% di tahun 2015 menjadi 14,09% di tahun 2016. *Current ratio* meningkat sebesar 22,76% dari 28,68% di tahun 2015 menjadi 35,21% di tahun 2016 dan *test acid ratio* meningkat sebesar 24,46% dari 27,67% di 2015 menjadi 34,44% di 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan PT Angkasa Pura Hotel dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan untuk *Return on asset* dan *return on equity* PT Angkasa Pura Hotel tercatat masing-masing sebesar 0,20% dan 1,12%.

Based on financial ratio, which are cash ratio, current ratio, and test acid ratio, Angkasa Pura Hotel capability measurement result to pay off short term liabilities was increasing/decreasing compared to 2015. Cash ratio increased/decreased 13.15% from 16.22% in 2015 to 14.09% in 2016. Current ratio increased/decreased 22.76% from 26.61% in 2014 to 28.72% in 2015 and test acid ratio increased 24.46% from 27.67% in 2015 to 34.44% in 2016. This showed that there is Angkasa Pura Hotel capability increasing/decreasing to pay off its short term liabilities. Meanwhile for Angkasa Pura Hotel Return on asset and return on equity are recorded each 0.20% and 1.12%.

Tabel Rasio Keuangan Utama PT Angkasa Pura Properti / Angkasa Pura Hotel Main Financial Ratio

Uraian / Description 1	2016 2	2015 3
Cash Ratio	14.09%	16.25%
Current Ratio	35.21%	28.72%
Tes Acid Ratio	27.67%	27.71%
Return on Asset	0.18 %	0.87%
Return on Equity	1.12%	3.86 %

PT ANGKASA PURA RETAIL

PROFIL

PT Angkasa Pura Retail merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) yang bergerak dalam bidang travel ritel (*duty paid and duty free*), *food and beverage*, *marketing communication service*, dan *commercial marketing*.

PT ANGKASA PURA RETAIL

PROFILE

Angkasa Pura Retail is PT Angkasa Pura I (Persero) subsidiary with retail (*duty paid and duty free*), *food and beverage*, *marketing communication service*, and *commercial marketing business activities*.

PT Angkasa Pura Retail memiliki visi dan misi yang diuraikan sebagai berikut.

VISI:

Menjadi *travel retailer* Indonesia terbesar yang memberikan kualitas tertinggi untuk *partner* kerja dan pelanggan.

MISI:

1. Menjadikan tingkat kepuasan pelanggan sebagai benchmark untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik.
2. Mengelola 15% area komersial dalam bandara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan berbagai macam diversifikasi usaha.
3. Memiliki *brand* mandiri dalam waktu 2 (dua) tahun.
4. Memberikan *value added* setinggi-tingginya kepada *stakeholder* baik dari segi pendapatan dan kualitas pelayanan.
5. Menjadi perusahaan *travel retail* bertaraf internasional dan mendapatkan pengakuan secara regional.

Bidang usaha yang dijalankan PT Angkasa Pura Retail adalah sebagai berikut.

1. Perdagangan *Retail*
2. Perdagangan *Food and Beverage*
3. *Service* dan Sewa-sewa

Adapun pengurus PT Angkasa Pura Retail diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Angkasa Pura Retail has vision and mission that are described as follows.

VISION:

Become biggest Indonesia travel retailer that gives high quality for working partner and customer.

MISSION:

1. Make customer satisfaction level as benchmark to keep performing the best services.
2. Manage 15% area komersial PT Angkasa Pura I (Persero) commercial area with vary business diversification.
3. Have an independent brand in the next 2 (two) years.
4. Give maximal value added to stakeholder both from income and service quality sides.
5. Become international travel retail company and get regional recognition.

Angkasa Pura Retail business activities are as follows.

1. Retail Trading
2. Food and Beverage Trading
3. Service and Rental

Angkasa Pura Retail management are described in the following table.

Tabel Kepengurusan PT Angkasa Pura Retail / PT Angkasa Pura Retail Management Table

NO	NAMA / Name	JABATAN / Position	STATUS / Status
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS			
1	Adi Nugroho	Komisaris Utama / Executive Commissioner	2016-2020
2	Danny P. Thaharsyah	Komisaris / Commissioner	2016-2020
DIREKSI / DIRECTOR			
1	Daniel Martin	Pt. Direktur Utama / Acting Executive Director	2016-2020
2	Widya Wiedagdo	Direktur / Finance & Admininstration Director	2016-2020

Adapun komposisi kepemilikan saham PT Angkasa Pura Retail digambarkan dalam tabel berikut.

Angkasa Pura Retail stock ownership compositions are described in the following table.

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham / Stock Ownership Compositions Table

PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS	PENYERTAAN MODAL / SHARES SUBSCRIPTION (Rp)	LEMBAR SAHAM / STOCK UNIT	PROSENTASE / PERCENTAGE
PT Angkasa Pura I (Persero)	48.750.000.000,-	48.750	97,50 %
PT Angkasa Pura Hotel	1.250.000.000,-	1.250	2,5 %

KINERJA

Secara umum, kinerja PT Angkasa Pura Retail menunjukkan hasil yang bervariasi. Laporan Posisi

PERFORMANCE

Generally, Angkasa Pura Retail performance showed vary result. Angkasa Pura Retail Financial Position Statement

Keuangan PT Angkasa Pura Retail menunjukkan kinerja yang kurang baik. Aset menurun sebesar Rp825 juta atau 1,42%, liabilitas meningkat sebesar Rp7.051 miliar, sedangkan ekuitas menurun sebesar Rp7.875 miliar atau 20,89%.

Pada tahun 2016, realisasi Laba Rugi dan Komprehensif lain PT Angkasa Pura Retail menunjukkan pertumbuhan pada rugi setelah pajak yang menurun sebesar Rp3,04 miliar atau 27,83% dari kondisi merugi sebesar Rp10,91 miliar di tahun 2015 menjadi rugi sebesar Rp7,88 miliar di tahun 2016. Penurunan kerugian ini disebabkan antara lain oleh, efisiensi biaya, perbaikan manajemen. Secara singkat kinerja keuangan utama PT Angkasa Pura Retail dapat dilihat pada tabel berikut.

showed good performance. Assets decreased by Rp825 million or by 1.42% liabilities increased Rp7.051 billion, meanwhile equity decreased Rp7.875 billion or by 20.89%

In 2016, PT. Angkasa Pura Logistik Income and other Comprehensive realization showed growth to loss after tax that was decreased Rp3.04 billion or 27.83% from loss Rp10.91 miliar condition in 2015 to loss Rp7.88 billion in 2016. This loss decreasing was caused by cost efficiency and management improvement In summary, PT. Angkasa Pura Logistik main financial performance can be seen in this following table.

**Tabel Kinerja Keuangan Utama PT Angkasa Pura Retail /
Angkasa Pura Retail Main Financial Performance Table**

(dalam juta Rupiah / in Thousand Rupiahs)

Uraian 1	2016 2	2015 3	Pertumbuhan Growth		Description
			4= (2-3)	5= (4/3)	
Aset	57,137	57,962	(825)	(1.42%)	Assets
Liabilitas	27,305	20,254	7,051	34.81%	Liabilities
Ekuitas	29,832	37,708	(7,876)	(20.98%)	Equity
Pendapatan Operasional	55,300	18,046	37,254	206.44%	Operational Income
Beban Operasional	68,273	37,036	31,237	84.34%	Operational Expense
Laba Operasional	(12,973)	(18,990)	6,017	(31.69%)	Operational Earning
Pendapatan Non Operasional	4,168	4,080	88	2.16%	Non Operational Income
Beban Non Operasional	1,268	876	392	44.75%	Non Operational Expense
Laba Non Operasional	2,900	3,204	(304)	(9.49%)	Non Operational Earning
Total Pendapatan	59,468	22,126	37,342	168.77%	Total Income
Total Beban	69,540	37,911	31,629	83.43%	Total Expense
Laba Bersih	(10,073)	(15,785)	5,712	(36.19%)	Net Profit
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	(2,197)	(4,872)	2,675	(54.91%)	Income Tax Estimation
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(7,876)	(10,913)	(3,037)	(27.83%)	Income (Loss) After Tax

Secara umum, rasio keuangan PT Angkasa Pura Retail menunjukkan hasil pengukuran kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Rasio keuangan yang berupa *cash ratio*, *current ratio*, dan *test acid ratio* mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek yang lebih besar dari peningkatan aset lancar. Meski demikian, perusahaan masih memiliki kemampuan aset lancar dalam menjamin liabilitas jangka pendek.

Generally, Angkasa Pura Retail financial ratio showed company capability measurement result to pay off short term liabilities that was decreasing/increasing compared to 2015. Financial ratio which is cash ratio, current ratio, and test acid ratio were decreasing/increasing compared to previous year. This was because of short term liabilities increasing/decreasing were bigger than current assets increasing/decreasing. Even though, company still has current assets capability to guarantee short term liabilities.

Sedangkan untuk *return on asset* dan *return on equity* masing-masing mengalami penurunan sebesar 13,78% dan 26,40%. Hal ini disebabkan oleh kondisi PT Angkasa Pura Retail yang mengalami kerugian di tahun 2016.

Meanwhile, for *return on asset* and *return on equity* were recorded each respectively at 13,78% and 26,04%. This was because of Angkasa Pura Retail condition that perform loss/profit in 2016.

Tabel Rasio Keuangan Utama PT Angkasa Pura Properti / Angkasa Pura Retail Main Financial Ratio

Uraian / Description	2016	2015
1	2	3
<i>Cash Ratio</i>	31.72 %	112.42 %
<i>Current Ratio</i>	124.78%	226.32%
<i>Tes Acid Ratio</i>	91.21 %	168.40%
<i>Return On Asset</i>	(13.78 %)	(18.83%)
<i>Return On Equity</i>	(26.40%)	(28.94%)







3

HUMAN CAPITAL

PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengembangkan *Human Capital Perseroan* dengan model pendekatan *Human Capital Management System (HCMS)* sejak tahun 2014. Saat ini Perseroan telah mempersiapkan implementasi *Road Map* pengelolaan *Human Capital* tahun 2017-2021 yaitu menciptakan *World Class Airport Officer (WCAO)*. Hal tersebut didasari keinginan Perseroan untuk mampu menciptakan sumber daya manusia berkelas dunia yang dapat bersaing dalam persaingan global.

PT Angkasa Pura I (Persero) has developed the Company's Human Capital using Human Capital Management System approach model (HCMS). The theme of improvement human capital quality in 2015 is Sustainable High Performance Human Capital as maintaining and improving the performance of Human Capital Management System to be effective in order to produce sustainable/continuous high performance human capital



Human Capital

Human Capital



PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengembangkan *Human Capital Perseroan* dengan model pendekatan *Human Capital Management System (HCMS)* sejak tahun 2014. Saat ini Perseroan telah mempersiapkan implementasi *Road Map* pengelolaan *Human Capital* tahun 2017-2021 yaitu menciptakan *World Class Airport Officer (WCAO)*. Hal tersebut didasari keinginan Perseroan untuk mampu menciptakan sumber daya manusia berkelas dunia yang dapat bersaing dalam persaingan global.

PT Angkasa Pura I (Persero) has been developing a Human Capital Perseroan by using the Human Capital Management System (HCMS) approach since 2014. Perseroan is currently preparing the Road Map implementation to organize the Human Capital for 2017-2021 by creating the World Class Airport Officer (WCAO). This idea is based on the Perseroan desire to create a world class human resource in order to compete in global scale.

Manajemen *Human Capital*

Human Capital Management

Perseroan memiliki kebijakan perlakuan yang sama bagi seluruh pegawai. Perseroan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan kompetensi, pengembangan karir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender* dan kondisi fisik sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan.

Hasil Survei Kepuasan Pegawai pada tahun 2016 mencapai skor 4,19 yang menunjukkan bahwa pegawai telah "Puas" dengan pengelolaan *Human Capital*, meskipun pada beberapa aspek masih ada yang harus diperbaiki. Survei kepuasan pegawai dilaksanakan di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga independensi.

Perseroan senantiasa merujuk pada hasil yang dapat diukur melalui *Key Performance Indicator* (KPI) dalam membentuk pola manajemen kinerja. Dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi *human capital*, perlu segera dibangun, ditenahi dan dipelihara sistem *database* kepegawaian; sistem dan prosedur kerja, pola karir yang mendorong motivasi pegawai untuk bekerja; sistem kepegawaian dan remunerasi yang *fair* dan transparan; sistem dan mekanisme pendidikan dan latihan yang menunjang dan memacu kemampuan teknis dan manajerial *human capital* sehingga tercipta iklim kerja yang semakin kondusif.

Perseroan's policy works equally to all of the employee. Perseroan provides an equal chance for every employee to enhance their competence, career and work professionally without seeing the employee's gender, racial and religious identity. That is as long as each employee meets the required physical condition, ability, and skill.

The Employee Satisfaction Result on 2016 reached 4,19 which translates that all of the employee are satisfied with the Human Capital management. However, there is still some aspect that needs to be improved. The survey itself is organized in the Central Office and the entire Branch Offices by working with a third party in order to ensure and maintain the survey independence.

Perseroan is always referring to the result measured by the Key Performance Indicator (KPI) in creating the performance management pattern. In enhancing the capability and competence of the human capital, the employment database needs to be build and maintained immediately. The database will be taking care of the work system and procedure, career pattern to motivate the employee; promotional system and transparent remuneration; the training system and mechanism to support and boost the employee technical skill, and a well human capital management to create a conducive work environment.

Roadmap *Human Capital*

Human Capital Roadmap

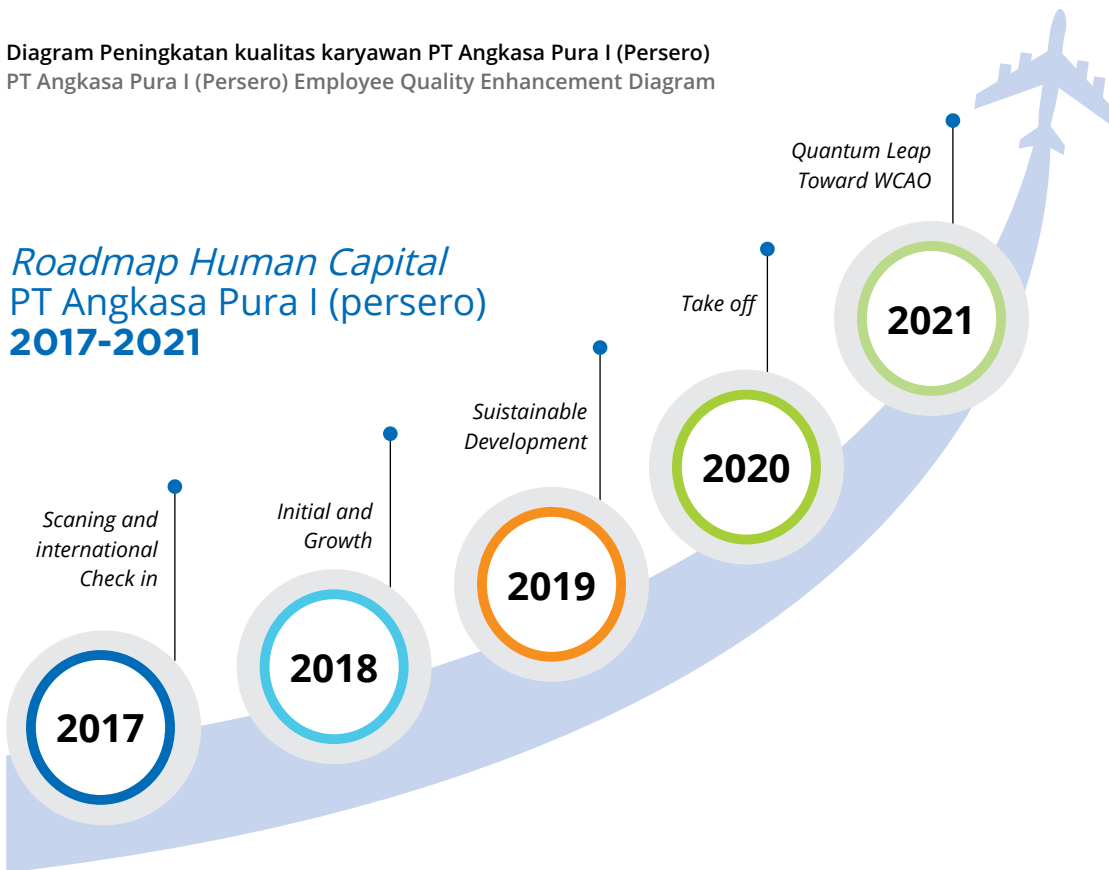
PT Angkasa Pura I (Persero) telah berhasil melaksanakan implementasi *road map* pengelolaan *human capital* tahun 2011 – 2015 dengan capaian target di tahun 2015 adalah terciptanya *Sustainable High Performance Human Capital*.

Upaya pengelolaan *human capital* adalah menjaga dan meningkatkan kinerja *Human Capital Management System* yang efektif untuk menghasilkan pegawai berkinerja tinggi secara berkelanjutan/terus menerus. Pada tahun 2016 Perseroan melakukan perumusan *Road Map* Pengelolaan *Human Capital* kedepan dan melakukan persiapan-persiapan untuk implementasinya. Rumusan *Road Map* Pengelolaan *Human Capital* 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

PT Angkasa Pura I (Persero) has managed to implement the human capital management roadmap for 2011 to 2015 by creating a Sustainable High Performance Human Capital in 2015.

The human capital management is to maintain and boost the effective Human Capital Management System performance in order to continuously increase the employee performance. In 2016, Perseroan has formalized the Human Capital Management Roadmap for the future and its implementation. The formula of Human Capital Management Roadmap for 2017-2021 is as follows:

Diagram Peningkatan kualitas karyawan PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero) Employee Quality Enhancement Diagram



Tema dan rencana peningkatan kualitas *Human Capital* setiap tahunnya dijabarkan sebagai berikut:

- 2017: Scanning and Internal Check-in**
Menyusun program re-evaluasi terhadap penerapan dan sistem manajemen *Human Capital* PT Angkasa Pura I
- 2018: Initial and Growth**
Menyusun program pengembangan kompetensi untuk menciptakan *Word Class Airport Officer (WCAO)*
- 2019: Sustainable Development**
Menyusun program penguatan kompetensi *Word Class Airport Officer (WCAO)*
- 2020: Take off**
Menyusun program percepatan dalam proses pencapaian kompetensi *Word Class Airport Officer (WCAO)*
- 2021: Quantum Leap toward World Class Airport (WCAO)**
Menyusun program penguatan *Word Class Airport Officer (WCAO)*

The annual theme and plan of the *Human Capital* enhancement is described as follows:

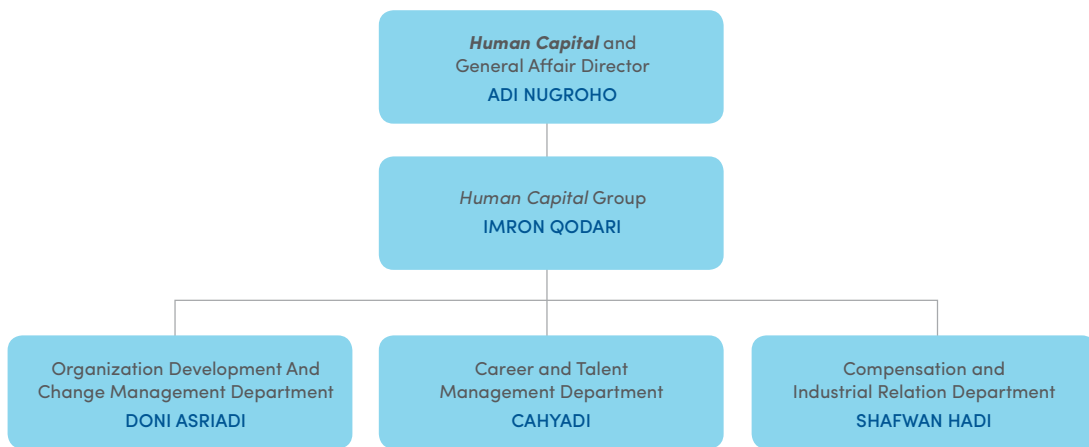
- 2017 : **Scanning and Internal Check-in**
Formalizing the re-evaluation program towards the application and management system of PT Angkasa Pura I *Human Capital*
- 2018 : **Initial and Growth**
Creating the competence enhancement program to achieve the *World Class Airport Office (WCAO)* title.
- 2019 : **Sustainable Development**
Creating the *World Class Airport Office (WCAO)* competence enhancement program
- 2020 : **Take Off**
Creating the acceleration program in achieving the *World Class Airport Officer (WCAO)* title.
- 2021 : **Quantum Leap toward World Class Airport (WCAO)**
Creating the *World Class Airport Officer* enhancement program (WCAO)

Organisasi Pengelola *Human Capital*

Human Capital Management Organization

Pengelolaan *human capital* PT Angkasa Pura I (Persero) dijalankan oleh *human capital Group* yang dipimpin oleh Imron Qodari sebagai *Human Capital Group Head* dan berada di bawah tanggung jawab *Human Capital and General Affair Director*. Tanggung jawab utama *Human Capital Group* adalah melakukan kegiatan pengelolaan *human capital* di PT Angkasa Pura I (Persero).

The management of PT Angkasa Pura I (Persero) human capital is ran by the Human Capital Group led by Imron Qodari as the head of the institution which is also under the supervision of Human Capital and General Affair Director. The main responsibility of Human Capital Group is to run the human capital management activity in PT Angkasa Pura I (Persero).



Profil Ringkas *Human Capital Group Head*

Brief Profile of Human Capital Group Head

Adapun profil ringkas *Human Capital Group Head*, Imron Qodari, dapat dilihat pada Profil Pejabat Eksekutif.

The brief profile of Human Capital Group Head, Imron Qodari, is in the following Executive Official Profile.

Fungsi *Human Capital Group*

Human Capital Management Function

Human Capital Group terdiri dari:

- a. **Organization Development and Change Management Department**
Departemen yang bertanggung jawab memastikan tercapainya efektivitas organisasi dan terciptanya Budaya Perseroan yang solid melalui pengelolaan kegiatan *Organization Development, Performance Management and Change Management* yang efektif guna mendukung tercapainya kepuasan pegawai atas pelayanan *human capital*.
- b. **Career and Talent Management Department**
Departemen yang bertanggung jawab memastikan terimplementasinya kebijakan *Career and Talent Management* melalui pengelolaan kegiatan *Career and Talent Management, Recruitment, Individual Assesment and Human Capital Information System (HCIS) Administration* yang efektif guna mendukung tercapainya kepuasan pegawai atas pelayanan *Human Capital*.
- c. **Compensation and Industrial Relation Department**
Departemen yang bertanggung jawab memastikan tercapainya indeks kepuasan karyawan terhadap aspek kompensasi dan hubungan industrial melalui pengelolaan kegiatan *Compensation And Benefit, Industrial Relation, Corporate Doctor, Paramedic* dan Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP) yang efektif guna mendukung tercapainya kepuasan karyawan atas pelayanan *human capital*.

Human Capital Group consists of:

- a. **Organization Development and Change Management Department**
This department responsibility is to ensure the organization effectiveness and to create a solid Perseroan environment through the Organization Development activity, the effective Performance Management and Change Management in order to achieve the employee satisfaction towards the human capital service.
- b. **Career and Talent Management Department**
This department responsibility is to ensure the implementation of Career and Talent Management policy through the management of Career and Talent Management activity, Recruitment, the effective Individual Assessment and Human Capital Information System (HCIS) Administration in order to achieve the employee satisfaction towards the human capital service.
- c. **Compensation and Industrial Relation Department**
This department responsibility is to ensure the achieved employee satisfaction towards the compensation aspect and industrial relation towards the management of Compensation and Benefit activity, Industrial Relation, Corporate Doctor, Paramedic, and the effective Coaching Committee and Employee Discipline Violation Check (P4DP) in order to achieve the employee satisfaction towards the human capital service.

Human Capital Management System

Human Capital Management System

PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan pengembangan *Human Capital Management System* (HCMS). Hal ini bertujuan untuk memilih kualitas sumber daya manusia yang terbaik, mendapatkan sumber daya manusia yang tepat dan di posisi yang tepat, memastikan karyawan berkembang dan mendapatkan penghargaan dari *performancenya*.

Komponen yang terdapat dalam HCMS yaitu *Organization Management, Distinct Job Profile (DJP), Competency Management, Performance Management, Reward Management, Talent Management, and Learning Management*.

PT Angkasa Pura I (Persero) has developed the Human Capital Management System (HCMS). HCMS is created to assess the human resource with the best quality, to assign the human resource into the correct position, to ensure the enhancement of each employee, including the reward of their performance.

The components of HCMS are Organization Management, Distinct Job Profile (DJP), Competency Management, Performance Management, Reward Management, Talent Management, and Learning Management.

Konsep Human Capital Management System / Human Capital Management System Concep



Distinct Job Profile

Dokumen yang menyediakan informasi yang komprehensif dan relevan tentang jabatan (*job*) di dalam organisasi, sebagai hasil dari proses analisis jabatan.

Distinct Job Profile

The document that provides a comprehensive and relevant information regarding the job within the organization, which is the result of the job analysis process.

Organization Management

Proses perencanaan, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya dalam suatu entitas untuk mencapai sasaran bersama secara efektif dan efisien sesuai dengan misi, visi dan strategi.

Organization Management

The planning process, coordination and resource control within an entity to reach the mutual target effectively and efficiently based on the mission, vision, and strategy.

Performance Management

Merupakan sub sistem penting didalam HCMS yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, mengorganisasikan, mendorong dan mengevaluasi kinerja karyawannya.

Performance Management

An important sub-system within the HCMS used by the organization to plan, organize, boost and evaluate the employee performance.

Competency Management

Proses pengelolaan kompetensi untuk pengembangan *human capital* yang bertujuan untuk membantu manajemen mengeksekusi strategi pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Management Competence

A management competence to develop the human capital in order to aid the management in executing the competence-based human resource management strategy.

Talent Management

Merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi para karyawan Perseroan yang memiliki kapabilitas untuk menjadi *future leaders/senior managers* yang didasarkan pada 2 elemen kunci, yakni aspek kompetensi dan aspek kinerja (*performance*).

Talent Management

It is a process to identify the employees capability to become the future leaders/senior managers and is based on 2 key elements, the competence and performance aspect.

Untuk mencapai sasaran dan target dalam pengembangan *human capital*, manajemen memandang perlu menetapkan beberapa kebijakan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pengembangan *human capital*. Kebijakan tersebut meliputi:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pengembangan personal dan karir berdasarkan kompetensi dan kinerja;
- c. Penilaian kinerja secara terukur dan terkait antara KPI individu, unit kerja dan korporat;
- d. Otomatisasi fungsi-fungsi administrasi personal;
- e. *Reward* berdasarkan kinerja;
- f. Pemberhentian karyawan (pensiun normal, MPP, atas permintaan/tidak atas permintaan sendiri);
- g. Harmonisasi hubungan industrial;
- h. Revitalisasi Budaya Perusahaan dan penyempurnaan organisasi;
- i. Penerapan *role model* kepemimpinan.

In order to reach the target in developing the human capital, the management considers it necessary to apply several policy in the implementation of human capital development. The policy includes:

- a. Competence-based recruitment and selection;
- b. Competence and performance-based career placement;
- c. The performance is measured and related to the individual KPI, work unit and corporate;
- d. The automation of personnel administration functions;
- e. Performance-based reward;
- f. Employee termination (normal retirement, MPP, by request/not);
- g. Harmonizing the industrial relation;
- h. Revitalizing the corporate environment and perfecting the organization;
- i. Applying the role model of leadership.

Organization Development dan Change Management

Organization Development and Change Management

Perseroan senantiasa menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan bisnis. Dari sisi organisasi, penyesuaian dengan dinamika bisnis ini dilakukan dengan penyesuaian Struktur Organisasi dan *Distinct Job Profile* (DJP). Implementasi perubahan-perubahan struktur dilakukan sebagai penyesuaian untuk mendukung tujuan Perseroan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah perubahan yang terukur dan terkendali.

Pada tahun 2016 Perseroan telah melakukan penyesuaian Struktur Organisasi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.82/OM.01.01/2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero). Perubahan Struktur Organisasi yang dilakukan antara lain dengan adanya pembentukan unit kerja baru, yaitu *Airport Operations Group* dibawah Direktur Operasi, *Airport Planning Group* dibawah Direktur Teknik serta penggabungan Unit *Risk Management and Compliance* dan *Unit Corporate Planning and Performance* dibawah Direktur Utama menjadi Unit *Risk Management and Corporate Planning*.

Selain itu *Human Capital Group* selalu mendukung terimplementasinya nilai-nilai budaya perusahaan secara menyeluruh kepada karyawan Perseroan, untuk terciptanya budaya kerja yang baik dan kompetitif untuk mendukung tercapainya tujuan Perseroan.

Perseroan is always adjusting itself with the dynamically developing business. In term of organization, the adjustment is implemented by synchronizing the Organization Structure and the Distinct Job Profile (DJP). The implementation of structural change is conducted as a synchronization to support Perseroan's goals. However, the change itself must be reasonable and controlled.

In 2016, the organization structural change has been applied into PT Angkasa Pura I (Persero) Directors Decision Number: KEP.82/OM.01.01/2016, 11 July 2016 about The Organization and Work Procedure in PT Angkasa Pura I Central Office (Persero). The organization structure is changed because of the creation of new work unit, they are *Airport Operations Group* under the supervision of Operation Director, *Airport Planning Group* under the supervision of Technical Director, the merging of *Risk Management and Compliance* and *Unit Corporate Planning and Performance* as *Risk Management and Corporate Planning Unit* under the supervision of President Director.

Moreover, In order to create a good and competitive work culture and to achieve Perseroan goal, *Human Capital Group* also support the implementation of corporate culture and value to Perseroan employee.

Corporate Expert

Corporate Expert

Untuk menyempurnakan pengelolaan *human capital* di PT Angkasa Pura I (Persero), telah dikembangkan *Corporate Expert* sejak tahun 2014. *Corporate Expert* merupakan salah satu bentuk dari jabatan fungsional. Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang karyawan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok Perseroan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.122/OM.01.01/2014 tentang Jabatan Fungsional PT. Angkasa Pura I (Persero).

Jabatan fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas Perseroan. Susunan jabatan fungsional dan kriteria kelasnya terdiri atas:

Nama Jabatan Position's Name	Kelas Jabatan Class of Position	Jumlah Pejabat Numbers of Officials
<i>Corporate Expert Level I</i>	1 - 2	0
<i>Corporate Expert Level II</i>	3 - 4	3
<i>Corporate Expert Level III</i>	5 - 6	4
<i>Corporate Expert Level IV</i>	7 - 8	26
<i>Corporate Doctor</i>	6	1
Auditor	7 - 8	9
P4DP Analyst	7	1

Jabatan Fungsional merupakan bagian dari pola karir dan penempatannya menjadi kewenangan Direksi Perseroan, dengan persyaratan:

1. Kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1);
2. Tidak sedang dijatuhi/menjalani hukuman disiplin;
3. Pernah menduduki jabatan struktural; atau
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus *assesment* bagi karyawan yang belum pernah menduduki jabatan struktural.

In order to perfect the human capital management in PT Angkasa Pura I (Persero), a Corporate Expert has been developed since 2014. Corporate Expert is one of the functional position. Functional position is a position which appoint the duty, responsibility, authority and right of the employee unlisted from the organization. The appointment is to assign the employee in order to run Perseroan main duty which is based on a certain independent set of skill. The duty and responsibility of the appointed employee is regulated within the Directors Decision Number: KEP.122/OM.01.01/2014 about PT Angkasa Pura I (Persero) Functional Position.

Functional position consists of the combination between the science applied to the job and authority to run Perseroan duty. Functional position and its class criteria are as follows:

Functional Position is a part of career development and granted by Perseroan Directors, the requirements are:

1. Professional qualification with minimum education level of bachelor degree (S1);
2. Not a convict/serving a sentence;
3. Was in a structural position; or
Achieved a good score during the assessment for employee without any experience with structural position.

Rekrutmen *Human Capital*

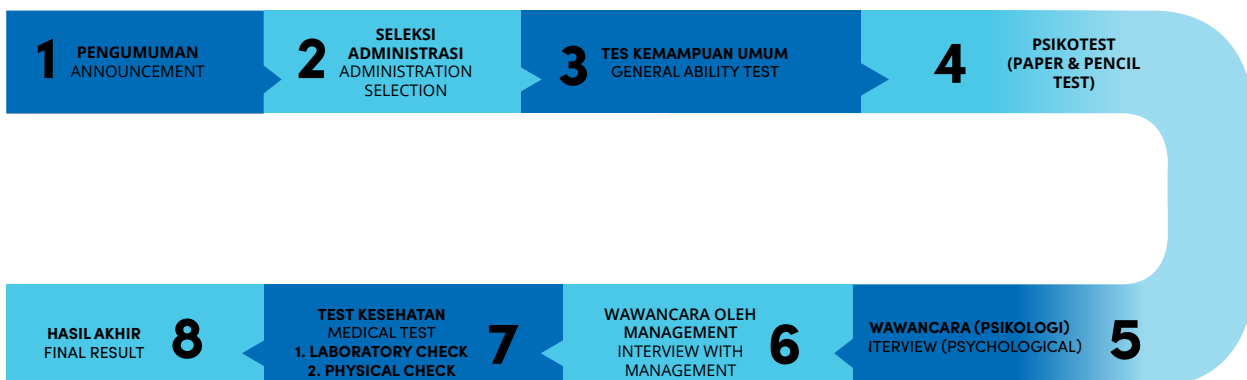
Human Capital Recruitment

Dalam rangka memenuhi standar formasi jabatan seiring dengan pertumbuhan Perseroan, pada 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi guna mengisi formasi karyawan. Proses rekrutmen karyawan yang dilakukan terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman melalui *website*, media cetak nasional dan papan pengumuman di kantor cabang;
- b. Seleksi administrasi;
- c. Tes kemampuan umum;
- d. Psikotest (*paper and pencil test*);
- e. Wawancara psikolog;
- f. Wawancara oleh manajemen;
- g. Tes Kesehatan yang meliputi cek laboratorium dan cek fisik;
- h. Pengumuman hasil akhir.

As Perseroan grows, PT Angkasa Pura I (Persero) has recruited and selected new employees in order to fill the structure formation. The recruitment process is conducted independently with the step described as follows:

- a. Online and printed (through national newspaper and branch office announcement board);
- b. Administration Test;
- c. General skill test;
- d. Psycho test (paper and pencil test);
- e. Psychological interview;
- f. Management interview;
- g. Health test that includes laboratory and physical check;
- h. Final Result Announcement.



Di tahun 2016, telah dilakukan rekrutmen karyawan dengan hasil 68 orang yang terdiri dari 23 orang karyawan administrasi, 12 orang karyawan *Fire Fighting* dan 33 orang karyawan operasional.

68 people have been recruited in 2016. 23 of them are administration employee, 12 are the fire fighter, and the rest 33 are the operational employee.

Perencanaan Kebutuhan *Human Capital*

The Planning Of Human Capital Necessity

Perencanaan kebutuhan karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) selalu disesuaikan dengan kebutuhan riil dari setiap unit kerja untuk tiap tahunnya. Sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, untuk tahun 2017 *Human Capital Group* menetapkan kebutuhan karyawan sebesar 3.666 karyawan.

The position necessity of PT Angkasa Pura I (Persero) is adjusted according to the annual need of each work unit. As mentioned within Perseroan Working and Budgeting Plan, Human Capital Group has stated that the Human Capital Group needs for 2017 is 3.666 employees.

Tabel Rencana Kebutuhan karyawan di tahun 2017 / Table of Needed Employee Planning in 2017

Uraian / Description	Pegawai Organik (Orang) / Organic Employee (Person)	Pegawai Outsourcing (Orang) / Employees Outsourcing (Person)
Kantor Pusat / Central Office	500	156
Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali / I Gusti Ngurah Rai Airport – Bali	647	1,077
Bandara Juanda – Surabaya / Bandara Juanda Airport – Surabaya	480	963
Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar / Sultan Hasanuddin Airport – Makassar	313	623
Bandara Sepinggan - Balikpapan / Spinggan Airport - Balikpapan	325	780
Bandara Frans Kaisiepo – Biak / Frans service Kaisiepo - Biak	88	96
Bandara Sam Ratulangi – Manado / Airports Sam Ratulangi - Manado	160	246
Bandara Adisutjipto – Yogyakarta / Adisutjipto Airport - Yogyakarta	213	321
Bandara Adisumarmo – Solo / Adisumarmo Airport - Solo	120	206
Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin / Syamsudin Noor Airport - Banjarmasin	147	197
Bandara Achmad Yani – Semarang / Achmad Yani Airport - Semarang	172	170
Bandara Internasional Lombok – Lombok Tengah / Lombok International Airport - Central Lombok	195	202
Bandara Pattimura – Ambon / Pattimura Airport - Ambon	110	166
Bandara El Tari – Kupang / El Tari Airport - Kupang	104	93
SBU Komersial Bali / Bali Commercial SBU	33	306
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor / Syamsudin Noor International Airport Development Project	22	0
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Achmad Yani / Achmad Yani International Airport Development Project	22	0
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Adisutjipto / Adisutjipto International Airport Development Project	15	0
Jumlah Karyawan / Employee Number	3,666	5,602

Pengembangan Karir

Career Development

Seperti dalam pelaksanaan rekrutmen, seluruh *Human Capital* Perseroan, berkesempatan untuk memperoleh jabatan dan karir tertinggi berdasarkan kompetensi dan *skill* yang dimiliki. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan karir hingga jabatan tertinggi berdasarkan kemampuannya. Perseroan mengatur persamaan hak karyawan, antara lain dalam hal sistem remunerasi, hak pelatihan dan pengembangan karir. Pengembangan karir yang dilakukan Perseroan, berbasis kompetensi dan diterapkan dengan melaksanakan asesmen kompetensi karyawan.

As within the recruitment process, all of the Perseroan Human Capital have the chance to be promoted according to their competence and skill. Each employee has an equal chance to be promoted according to his/her competence. Perseroan treats the employee right equally, including the remuneration, training and career development. The career development itself is executed by assessing the employee competence.

PT Angkasa Pura I (Persero) juga telah melakukan pengembangan karir berdasarkan kebutuhan operasional Perseroan dengan merealisasikan program penataan dan optimalisasi *Human Capital* berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan formasi *Human Capital*.

PT Angkasa Pura I (Persero) has also conducted a career development based on Perseroan operational need by realizing the arrangement program and optimizing the Human Capital based on the workload analysis to determine the Human Capital formation.

Human Capital Development

Human Capital Development

PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan, sebagai implementasi program pengembangan karyawan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan pengembangan bisnis Perseroan. Seluruh karyawan dalam *level* organisasi memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pengembangan karyawan. Program pelatihan yang dilaksanakan juga sangat beragam mengikuti kebutuhan unit-unit terkait di Perseroan. Selama tahun 2016, program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Perseroan mencakup 146 jenis program dengan total peserta sebanyak 5.949 peserta di berbagai level jabatan, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 3.523 peserta.

PT Angkasa Pura I (Persero) has conducted various trainings as the implementation of employee development program. The training is conducted according to the employment need and Perseroan business development. All of the employee within the organization level have the equal chance to be involved in the development program. The training program is also varied and based on each Perseroan unit needs. In 2016, the training program included 146 different programs and followed by 5,949 employee from different position. This number has increased from 3,523 employee in 2015.

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan dapat dilihat pada bagian Profil di Laporan Tahunan ini.

Table of Employee Competence Development by Position Level can be observed in the Profile section in this Annual Report

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Di tahun 2016, realisasi biaya pelatihan karyawan Perseroan sebesar Rp33,19 miliar.

COMPETENCE DEVELOPMENT COST

In 2016, the training program cost Perseroan for Rp33,19 billion.

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk melaksanakan evaluasi efektifitas atas sistem pembelajaran dan pengembangan yang telah dilakukan, Perseroan senantiasa melakukan evaluasi paska pelatihan yang dilakukan melalui *Form Evaluasi Pasca Training*. Evaluasi dinilai dalam bentuk *Return of Training Investment* yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan *training*. Adapun hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk jenjang karir ataupun tingkat kebutuhan *training* lanjutan karyawan. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk peserta *training*, namun demikian juga pada Instruktur *Training* dan Penyelenggaranya.

COMPETENCE DEVELOPMENT EVALUATION

In order to evaluate the effectiveness of the learning and development system, Perseroan is always evaluating the result through the Post-Training Evaluation Form. The evaluation is assessed through the Return of Training which reflects the effectiveness of the training. Later, the evaluation result will be used as a basis to assess the career path or the necessity for the next training. However, the evaluation does not only apply to the participants, but also to the training instructor and organizer.

Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuisioner yang diberikan kepada peserta digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendekatan yang digunakan adalah Skala Likert. Adapun komponen dan unsur yang menjadi penilaian dapat dilihat pada tabel berikut.

The evaluation is conducted by filling the questionnaire distributed to the participants as an evaluation tool. Then, the Likert scale approach will be used to evaluate the training organization. The evaluation component can be seen in the following table.

A. INSTRUKTUR / INSTRUCTURE :	
1.	Kesesuaian kompetensi Instruktur dengan materi yang disampaikan / The instructor competence must be suitable with the training material
2.	Kemampuan menjelaskan dalam penyampaian materi / The ability to explain the material
3.	Kemampuan dalam menciptakan suasana aktif dan komunikatif / The ability to create an active and conducive training condition
4.	Kemampuan dalam menjawab pertanyaan peserta / The ability to answer the participant's question
5.	Kejelasan suara dan intonasi dalam penyampaian materi / The voice clarity when explaining the training material
B. MODUL / MODULE :	
1.	Materi <i>training</i> sesuai dengan kebutuhan pekerjaan / The training material must be with the working needs
2.	Materi <i>training</i> mudah dipahami dan menarik bagi peserta / The training material must be interesting and easy to understand
3.	Materi <i>training</i> disusun secara sistematis / Training material must be systematically compiled
4.	Materi <i>training</i> dapat diterapkan dan mendukung pencapaian kinerja / The training material must be applicable for the employee performance
5.	Materi <i>training</i> yang diberikan telah disesuaikan dengan kondisi terkini / The training must be relevant to the current condition
C. METODE TRAINING / TRAINING METHOD :	
1.	Metode <i>training</i> sesuai dengan materi / The training method must be suitable with the material
2.	Terdapat simulasi pemecahan masalah / There must be a problem solving situation
3.	Evaluasi kemampuan dan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah <i>training</i> / There must be a skill and knowledge evaluation for the participants after the training
D. FASILITAS / FACILITY	
1.	Kenyamanan dan kebersihan ruang <i>training</i> / The training facility must be clean and comfortable
2.	Fasilitas pendukung kelancaran kegiatan <i>training</i> seperti alat tulis, <i>block note</i> , materi <i>hard copy</i> , dan lainnya. / The training facility must be completed with stationery
3.	Fasilitas alat bantu kegiatan <i>training</i> seperti laptop, <i>infocus</i> , <i>sound system</i> , dan lainnya. / The training facility must be completed with laptop, infocus, sound system, etc
4.	Ruang penunjang seperti ruang ibadah dan toilet / Musholla and toilet must be available
5.	Penataan ruangan dan peralatan / The training facility must be arranged properly
6.	Kenyamanan dan Kebersihan <i>Dormitory</i> / The training facility must be completed with a clean dormitory
7.	Makan dan <i>snack</i> yang disajikan / Clean and proper snack must be available
8.	Pelayanan <i>Laundry</i> / The training facility must be completed with a laundry
9.	Pelayanan petugas <i>front office</i> , pramusaji, PIC / A front desk office and a waiter/waitress must be stationed in the facility, PIC
E. PENYELENGGARA / ORGANIZER :	
1.	Program <i>Training</i> sesuai dengan visi dan misi perusahaan / The training must be organized according to the company's vision and mission
2.	Waktu <i>Training</i> yang disediakan memadai / The training session must be adequate
3.	Peserta merasakan manfaat <i>Training</i> / The participants must feel the impact of the training
4.	Reputasi penyelenggara/perusahaan (untuk <i>Public Training</i>) / The organizer reputation (for Public Training)

Hasil rekap kuesioner selama kegiatan pendidikan dan pelatihan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh *Training and Development Group* tercantum dalam indeks kepuasan peserta sebagai berikut:

The questionnaire recap of the training conducted by Training and Development Group in 2016 is included in the following participants satisfaction index:

Unsur Penilaian / Assessment Element	Indeks Kepuasan / Satisfaction Index	Skala Likert / Likert Scale	Kategori / Category
Instruktur / Instructure	85.22 %	5	Sangat Memuaskan / Very Satisfying
Modul / Modul	83.32 %	5	Sangat Memuaskan / Very Satisfying
Metode <i>Training</i> / Training Module	85.00%	5	Sangat Memuaskan / Very Satisfying
Fasilitas / Facility	78.93 %	4	Puas / Satisfying
Penyelenggara / Organizer	80.36 %	5	Sangat Memuaskan / Very Satisfying

Internalisasi Corporate Culture

Corporate Culture Internalization

Human Capital Group selalu mendukung terimplementasinya nilai-nilai budaya perusahaan secara menyeluruh kepada karyawan Perseroan, untuk terciptanya budaya kerja yang baik dan kompetitif guna mendukung tercapainya tujuan Perseroan.

Budaya kerja PT Angkasa Pura I (Persero) adalah

SATU: Sinergi
Adaptif
Terpercaya
Unggul

A. Sinergi

Merupakan cara perusahaan menghargai keragaman dan keunikan setiap elemen untuk memberi nilai tambah bagi Perusahaan, Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan dimana pun berada, dengan perilaku.

- Intensif dalam menjalin koordinasi antar individu, unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan lingkungan;
- Saling menghargai dalam memberikan saran, kritik dan pendapat yang membangun;
- Saling memberi semangat dengan antusias untuk menghasilkan kinerja unggul.

B. Adaptif

Merupakan nilai perusahaan untuk menciptakan pegawai yang memiliki daya, semangat dan hasrat yang pantang menyerah, proaktif merespon perubahan dan kaya akan inovatif, dengan perilaku.

- Aktif meningkatkan kompetensi (ketrampilan dan pengetahuan) melalui pembelajaran dan berbagi pengetahuan baik secara kolektif maupun individual;
- Proaktif dalam menghadapi perubahan internal maupun eksternal;
- Pantang menyerah dengan mengembangkan cara-cara baru yang inovatif untuk penyelesaian tugas dengan sempurna.

C. Terpercaya

Menciptakan karakter pegawai yang senantiasa selaras antara kata dengan perbuatan, jujur dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta dapat diandalkan, dengan perilaku.

- Jujur dalam memegang nilai-nilai kebenaran yang hakiki;
- Selaras antara kata dan perbuatan;
- Disiplin dalam penyelesaian pekerjaan;
- Bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai tanpa menyalahkan pihak lain.

Human Capital Group is always supporting the implementation of corporate value and culture to Perseroan employee, In order to create a good and competitive working culture and to achieve Perseroan goal.

PT Angkasa Pura I (Persero) work cultures are

SATU: Sinergi (Synergy)
Adaptif (Adaptive)
Terpercaya (Trusted)
Unggul (Excellent)

A. Sinergi

It is the company's way to appreciate the diversity and peculiarity of every element that adds more value to the company, economic development and anything else.

- Through an intensive inter-individual coordination, the work unit and stakeholders will become an additional for the company and environment;
- Respecting each other when making suggestion, critic and constructive opinion;
- Enthusiastically encouraging each other to achieve an excellent performance.

B. Adaptif

It is the company's value in creating a proactive and exciting employees which proactively respond to the situation with innovative solution.

- This character will increase the competence (skill and knowledge) through collective and individual learning process;
- Being proactive in dealing with internal and external change;
- Always striving to develop new innovative ways to complete the job perfectly.

C. Terpercaya

Creating employees with the value of honesty and openness in doing job,

- this character upholds the true value of honesty;
- Deeds that go well with word;
- Being discipline at work;
- Being responsible with the work result without blaming someone else.

D. Unggul

Komitmen pegawai memberikan layanan prima dengan profesional dan bertanggung jawab untuk memuaskan pelanggan secara berkelanjutan, dengan perilaku.

- Bersikap dan bertindak yang terbaik untuk melayani kebutuhan pelanggan internal dan eksternal;
- Cepat dan tepat dalam memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan;
- Ahli dan mampu dalam menyelesaikan tugas serta memberikan solusi yang berkualitas melebihi harapan pelanggan (baik pelanggan internal maupun eksternal).

D. Unggul

It is a commitment to provide a good service professionally and responsibly in order to continuously satisfy the customer.

- Behaving and acting appropriately to serve the internal or external customer;
- Being quick and accurate in providing solution towards the customer need and in accordance to the service standard;
- Being skillful and capable in completing the task and providing solution to exceed the customer expectation (internally or externally).

Human Capital Engagement

Human Capital Engagement

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan bahwa karyawannya, terutama mereka yang memiliki kompetensi dan kinerja tinggi, memiliki keterikatan yang tinggi terhadap perusahaan. Untuk mengetahui *level of engagement* dari karyawan, Perseroan telah melaksanakan survei Kepuasan Karyawan pada tahun 2016. Pada survei tersebut dilakukan penilaian terhadap 10 dimensi yang diukur, yaitu:

- Peran Karyawan;
- Penghargaan, Sanksi dan Keamanan Kerja;
- Lingkungan Kerja;
- Penilaian Kinerja;
- Pendidikan dan Pelatihan;
- Manajemen, Komunikasi dan Perencanaan;
- Rekrutmen dan Pola Karir;
- Penghasilan, Jaminan Kesehatan, THT dan Pensiun;
- Keterikatan Tenaga Kerja;
- Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan.

Survei dilakukan dengan membandingkan tingkat harapan (*importance*) karyawan dan kenyataan (*performance*) berdasarkan penilaian dari karyawan. Dari 10 dimensi yang dinilai berdasarkan hasil *survei*, secara *overall* rata-rata harapan karyawan berada pada angka 4,61 sedangkan kenyataan (*performance*) yang ada berada pada angka 4,19 sehingga terdapat *gap* antara harapan dan *performance* yaitu sebesar 0,42. Berikut ini adalah hasil survei kepuasan karyawan secara keseluruhan (*overall*):

It is Perseroan effort to ensure that its employee, especially those with high competence and performance, are very attached to the company. In order to figure the level of engagement, Perseroan has conducted an employee satisfaction survey in 2016. The survey itself was conducted to measure 10 dimension, they are:

- Employee Role;
- Reward, Punishment and Work Safety;
- Work Environment;
- Work Assessment;
- Education and Training;
- Management, Communication and Planning;
- Recruitment and Career Pattern;
- Salary, Health Insurance, THT and retirement;
- Work Force Attachment;
- Company Vision, Mission, and Value.

The survey aims to compare the employee importance rate and the performance rate according the employee assessment. From the 10 assessed dimension, the overall importance rate is 4,61 while the performance rate is 4,19. These numbers show the gap between the importance and performance rate for 0,42. The following table is the overall survey result towards the employee satisfaction:

Tabel Indeks Kepuasan Karyawan Tahun 2016 / Table of Employee Satisfaction in 2016

Unsur Penilaian / Dimension	Harapan / Importance	Kenyataan / Performance	Beda / Gap
Peran Pegawai / Employee Role	4.58	4.26	0.32
Penghargaan, sanksi dan keamanan kerja / Reward, Punishment and Work Safety	4.59	4.13	0.47
Lingkungan Kerja / Work Environment	4.61	4.14	0.46

Unsur Penilaian / Dimension	Harapan / Importance	Kenyataan / Performance	Beda / Gap
Penilaian Kerja / Performance Assessment	4.57	4.16	0.41
Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training	4.63	4.12	0.51
Manajemen, Komunikasi dan Perencanaan / Management, Communication and Planning	4.61	4.24	0.37
Rekrutmen dan Pola Karir / Recruitment and Career Pattern	4.57	4.02	0.55
Penghasilan, Jaminan Kesehatan THT, dan Peniun / Income, Ear-Nose-Throat Health Insurance, and Pension	4.69	4.19	0.50
Keterikatan Tenaga Kerja / Income, THT Health Insurance, and Pension	4.60	4.19	0.41
Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan / Employment Attachment	4.68	4.48	0.20
Penyelenggara / Company Vision, Mission, and Value	4.61	4.19	0.42

Indeks kepuasan pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) pada tahun 2016, secara keseluruhan bernilai 4,19 yang masuk dalam kategori “puas”.

Jika dilihat berdasarkan dimensi, maka dapat diketahui bahwa dimensi visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan merupakan dimensi yang memiliki indeks kepuasan paling tinggi dibandingkan dengan sembilan dimensi yang lainnya yaitu dengan skor sebesar 4,48 (sangat puas). Selanjutnya dimensi dengan tingkat skor kepuasan yang tinggi berada pada peran pegawai (4,26), dan dimensi manajemen, komunikasi, dan perencanaan (4,24).

PT Angkasa Pura I (Persero) overall employee satisfaction rate in 2016 is 4,19 which is included as “satisfied” category.

By considering the dimension, the dimension of company vision, mission, and value is the one with the highest satisfaction index with the score of 4,48 (very satisfied) compared to the other 9 dimension. The other dimension with high satisfaction rate are the employee role (4,26) and management, communication, and planning (4,24).

Performance Management

Performance Management

Perseroan menerapkan *Performance Management System* (PMS) berdasarkan Keputusan Direksi No.KEP70/OM.02.05/2013 tanggal 1 Juli 2013. *Performance Management System* (PMS) adalah sistem pengelolaan kinerja individu dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya memastikan agar unit kerja dan individu dapat bekerjasama secara optimal dalam pencapaian target Perseroan melalui perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi kinerja karyawan.

Performance Management System (PMS) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau per semester. Dalam setiap siklus terdapat 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan kinerja (*Planning*); Tahapan untuk membuat kesepakatan antara pejabat penilai dengan karyawan yang dinilai dalam menetapkan sasaran kinerja individu yang merupakan penjabaran/turunan (*cascading*) dari rencana kinerja Perseroan, rencana kinerja unit kerja (*achievement goal*) dan rencana pengembangan diri karyawan. Perseroan telah menetapkan strategi jangka panjang ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), kemudian pelaksanaannya dijabarkan dalam program-program

Perseroan applies the *Performance Management System* (PMS) according to Directors Decision Number. KEP 70/OM.02.02/2013 1 July 2013. *Performance Management System* (PMS) is a system to manage the individual performance within a certain length of time to ensure the optimum cooperation from the work unit and individuals in achieving Perseroan targets, organizing, and employee performance evaluation.

Performance Management System (PMS) is conducted one per six month. Each cycle consists of three activity, they are:

- a. *Planning*; It is a phase to make an arrangement between the assessing officials with the assessed employee in setting the targeted individual performance. The targeted individual performance is the cascading of the Perseroan performance plan,, work unit performance goal and employee self-development. Perseroan has also established a long term target into the Company Long Term Plan (RJPP). The plan execution is described in the company work program (RKAP) and implemented

kerja perusahaan (RKAP) serta diimplementasikan dalam Kontrak Manajemen di setiap direktorat.

- b. **Monitoring dan Konseling (*Tracking and Coaching*)**
Proses pemantauan dan pencatatan atas perkembangan pencapaian kinerja dari proses *planning*, yang berlangsung secara terus menerus selama satu siklus sehingga terpantau dan menjamin tersedianya dokumen pendukung pencapaian kinerja. Hal ini berguna bagi atasan dalam melakukan pembinaan kepada bawahannya untuk mencapai sasaran kinerja baik unit kerja maupun individu yang telah disepakati pada tahap perencanaan.
- c. **Evaluation (*Evaluation*)**
Tahapan penilaian individu dalam 1 (satu) siklus dengan cara membandingkan pencapaian sasaran kinerja individu dengan rencana kinerja individu yang telah disepakati pada saat perencanaan dalam satu siklus. Penilaian dilakukan oleh atasan, rekan kerja dan bawahan (untuk pejabat).

Komponen dan bobot dalam sistem manajemen kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

Komponen Component		Bobot Quality
Goal (<i>Target</i>)	<i>Achievement Goal</i> (Pencapaian Hasil Kinerja)	50%
	<i>Learning Goal</i> (Kompetensi Teknis)	20%
Perilaku (<i>Behaviour</i>)	<i>Behavioral Competency</i> (Kompetensi Perilaku)	15%
	<i>Corporate Value Commitment</i> (Nilai Perusahaan)	10%

Achievement Goal adalah target pencapaian hasil kerja yang merupakan penjabaran dari *Key Performance Indicator* (KPI) korporat dan unit kerja yang memuat perencanaan kinerja yang akan diukur dan kriteria *rating* yang akan digunakan untuk melakukan penilaian kinerja. Sistem penilaian untuk komponen *Achievement Goal* adalah *single rater* yaitu penilaian berasal dari atasan langsung.

Learning Goal adalah target pencapaian pengembangan kompetensi teknis karyawan. Sistem penilaian untuk komponen *Learning Goal* adalah *single rater* yaitu penilaian berasal dari atasan langsung dengan memperhatikan hasil *assessment* terakhir.

Behavioral Goal adalah target pencapaian pengembangan kompetensi perilaku karyawan. Sistem penilaian untuk komponen *Learning Goal* adalah *multi rater* yaitu penilaian berasal dari atasan langsung, rekan kerja 1 level dan bawahan (khusus pejabat struktural) dengan memperhatikan hasil *assessment* terakhir.

Pencapaian target *learning goal* dan *behavioral goal* diukur dari usaha perbaikan yang dilakukan oleh karyawan yang dinilai. Sumber kebutuhan pengembangan kompetensi teknis dan perilaku dapat berasal dari hasil *assessment* kompetensi yaitu dari *gap* atau selisih antara level kompetensi teknis yang

in the Management Contract in each direktorat.

- b. **Tracking and Coaching**
It is a supervision and recording process over the achieved performance of the planning process. This phase run continuously for a cycle to ensure and supervise the document to support the work performance. This phase is very useful for the superiors to train their subordinates to achieve the work unit or individual targeted performance which has been agreed during the planning phase.
- c. **Evaluation**
It is phase of individual assessment within a cycle by comparing the achieved individual work performance with the individual performance plan agreed during the planning within a cycle. The assessment is conducted by the superiors, colleagues and subordinates (for officials).

The component and quality of the employee performance management system is as follows:

Achievement Goal is the achieved work result described from the corporate *Key Performance Indicator* (KPI) and work unit. It contains the performance planning that will be measured and the rating criteria that will be used for the performance assessment. The assessment system for the achievement goal component is the single rater which comes directly from the superiors.

Learning Goal is a target of employee technical competence development. A component for learning goal is the single rater which is an assessment that comes directly from the superiors by observing the final assessment.

Behavioral Goal is a target to develop the employee behavioral competence. Learning Goal component from the assessment system is the multi rater. It is an assessment that comes directly from the superior, level 1 colleague, and subordinates (structural official only) by observing the final assessment.

Learning goal and behavioral goal is measured from the correctional effort conducted by the assessed employee. The source of technical and behavioral competence development needs comes from the competence assessment. It is the gap between the technical competence required within

dipersyaratkan dalam model kompetensi suatu pemangku jabatan dengan level kompetensi teknis yang dimiliki oleh karyawan yang dinilai, atau bersumber dari laporan permasalahan unit kerja, visi, misi, nilai-nilai dan strategi Perseroan, implementasi sistem, *job description*, penilaian kinerja, dan catatan karyawan.

Corporate Value Commitment adalah tingkat komitmen karyawan dalam menjalankan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Perseroan yaitu Sinergi, Adaptif, Terpercaya dan Unggul (SATU). Sistem penilaian untuk komponen *Corporate Value Commitment* adalah *multi rater* yaitu penilaian berasal dari atasan langsung, rekan kerja 1 level dan bawahan (khusus pejabat struktural) dengan memperhatikan hasil *assessment* terakhir.

the competence model of a stake holder and the technical competence level possessed by the assessed employee, or comes from the report of work unit, vision, mission, value and Perseroan strategy, system implementation, job description, performance evaluation, and employee record.

Corporate Value Commitment is the employee commitment rate in behaving accordingly with the Perseroan values. The values are Synergy, Adaptive, Trusted and Excellent (ONE). The assessment system for Corporate Value Commitment is multi rater which is an assessment that comes directly from the superiors, level 1 colleague, and subordinates (structural official only) by observing the final assessment.



Human Capital Reward

Human Capital Reward

Reward diberikan kepada pegawai berdasar kepada kinerja masing – masing karyawan dan kinerja kantor cabang. Indikator kinerja masing – masing karyawan disebut dengan *Performance Index* (PI) yang diperoleh dari hasil pelaksanaan *Performance Management System* serta pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) kantor cabang.

Reward is given according to the each employee's performance and branch office performance. Each employee performance indicator is called as Performance Index (PI) which is obtained from the Performance Management System and also the Key Performance Indicator (KPI) of the branch office.

REMUNERASI

PT Angkasa Pura I (Persero) memberikan paket remunerasi yang kompetitif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pemberian remunerasi yang kompetitif adalah untuk mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang dan tercapainya tujuan Perseroan. Remunerasi karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu kesejahteraan karyawan di masa aktif dan masa pensiun.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI MASA AKTIF

Selama masa aktif bekerja, *human capital* PT Angkasa Pura I (Persero) menerima beberapa jenis kesejahteraan sebagai berikut.

REMUNERATION

RPT Angkasa Pura I (Persero) grants a competitive remuneration package and us based on the regulation. The competitive remuneration is to maintain the employee for a long term and to achieve Perseroan goal. PT Angkasa Pura I (Persero) employee remuneration is basically divided into two types: active employee welfare and retired employee welfare.

EMPLOYEE'S WELFARE DURING THE TERM OF SERVICE

During active work period, the human capital of PT Angkasa Pura I (Persero) receives several kind of the following welfare.

Jenis Kesejahteraan Types of Welfare	Komposisi Composition	
Penghasilan Bulanan Monthly take-home pay	Gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan perusahaan, tunjangan pangan, insentif prestasi, tunjangan kemahalan, tunjangan transport, tunjangan jabatan, tunjangan mobilitas.	Basic salary, wife/husband allowance, child allowance, company allowance, meal allowance, achievement incentive, overpriced benefits, transport benefits, position benefits, mobility benefits.
Penghasilan Tahunan Annual Income	Bantuan sewa rumah, tunjangan cuti tahunan, tunjangan pendidikan anak sekolah, tunjangan hari raya, bonus, seragam dinas.	Home rental financial aid, annual leave benefits, child education benefits, religious holiday benefits, bonus, work uniform.
Pemeliharaan Kesehatan Health Insurance	Jaminan pemeliharaan kesehatan secara mandiri dari PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk rawat jalan, rawat inap, serta pelayanan khusus yang meliputi: alat bantu baca, pengobatan dan perawatan gigi, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak, prothesa mata, serta dimulainya keikutsertaan karyawan pada program BPJS Kesehatan.	Independent health insurance from PT. Angkasa Pura I (persero) for outpatient, inpatient, and special treatment that includes: reading aid, dental care and medication, hearing aid, prosthesis of limb members, eye prosthesis, and employees membership in BPJS health program.
Penghasilan Sesuai Kondisi dan Waktu Tertentu Conditional and Temporary Income	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan perumahan, diberikan kepada karyawan yang berhenti karena pensiun dan karyawan yang telah bekerja secara terus menerus di perusahaan selama 20 tahun; Penghargaan pengabdian bagi karyawan yang telah bekerja secara terus menerus di Perseroan selama 25 tahun dan yang mengakhiri masa tugas atau diberhentikan dengan hormat karena batas usia pensiun; Bantuan uang makan, diberikan untuk setiap hari yang dibayarkan menurut daftar hadir karyawan; Bantuan untuk menunaikan ibadah keagamaan, diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal 10 tahun yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan Perseroan; Tunjangan pelaksana tugas sementara, diberikan untuk pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sementara (PTS) dalam jabatan struktural atau fungsional sekurang-kurangnya 10 hari kerja secara terus menerus; Tunjangan PPh 21, diberikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; Sumbangan kelahiran, diberikan bagi persalinan ke-1 dan ke-2 Sumbangan kematian dan bencana alam; Bantuan kepada karyawan yang mengalami musibah, diberikan untuk karyawan yang mengalami musibah karena istri/suami, orang tua, mertua, anak atau karyawan yang bersangkutan meninggal dunia; 	<ul style="list-style-type: none"> Housing benefits which is given to the retired employees and employees who have been working continuously for 20 years; Dedication award for the employees who have been working in Perseroan for 25 years and then retired or dismissed with respect due the age limit; Meal allowance is given daily and paid according to each employee attendance list; Allowance for religious activity which is given for the employee who have been working at least for 10 years and met the requirements set by Perseroan; Temporary duty allowance is given to the employee appointed as the temporary duty executor (PTS) within a structural or functional position for at least 10 working days; PPh 21 allowance is given according to the effective taxation regulation; Birth allowance is given for the first and second labor Death and nature disaster allowance; It is given to the employee who suffer a nature disaster or having the family member passed away (children/husband/wife/parents/parents in law);

Jenis Kesejahteraan Types of Welfare	Komposisi Composition
	<ul style="list-style-type: none"> Insentif kehadiran di hari raya, diberikan kepada karyawan yang bekerja pada saat hari raya keagamaan karyawan yang bersangkutan; Insentif pendidikan dan pelatihan; Tunjangan telepon genggam, diberikan kepada pejabat struktural sebagai uang pengganti pesawat telepon genggam yang besarnya diatur berdasarkan jabatan; Tunjangan pulsa telepon genggam, diberikan kepada pejabat struktural yang besarnya diatur berdasarkan jabatan. selain kepada pejabat struktural, tunjangan pulsa telepon genggam juga diberikan kepada protokoler perusahaan; Tunjangan pulsa rumah, diberikan kepada pejabat struktural sebagai uang pengganti pulsa telepon rumah yang besarnya diatur berdasarkan jabatan; Tunjangan lisensi dan <i>rating</i>, diberikan kepada karyawan teknik dan operasional yang memiliki lisensi yang masih berlaku dan masa aktif bekerja sesuai dengan lisensi yang dimiliki; serta Premi lembur karyawan, diberikan kepada karyawan yang melaksanakan lembur yang besarnya diatur berdasarkan kelas per jam.
	<ul style="list-style-type: none"> Religious holiday incentive is given to the employee who work during each religious holiday; Education and training incentive; Cellphone benefits is given to the structural officials as a reimbursement of phone bills which number is regulated according to the position; Cellphone benefits is given to the structural officials as a reimbursement of phone bills which number is regulated according to the position. Moreover, it can also be given to the company protocol; Home phone benefits is given to the structural officials as a reimbursement of home phone bill which number is regulated according to the position; License and rating benefits is given to the technical and operational employee who own effective license. However, the years of service must corresponds to the license itself; Overtime bonus is given to the employee who work overtime. The number is regulated according to the employee class and length of the overtime.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI MASA PENSIUN

Setelah memasuki masa pensiun, *human capital* PT Angkasa Pura I (Persero) menerima beberapa jenis kesejahteraan sebagai berikut.

EMPLOYEE RETIREMENT WELFARE

After entering the retirement age, PT Angkasa Pura I (Persero) human capital will receive these followings welfare.

Jenis Kesejahteraan Types of Welfare	Keterangan Explanation
Manfaat Pensiun Retirement Benefits	<ul style="list-style-type: none"> Bagi karyawan yang masuk sebelum 1 Januari 2011, Perseroan memberikan manfaat pensiun melalui DAPENRA (Dana Pensiun Angkasa Pura I) dengan Program yang bernama Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP); Bagi karyawan yang masuk setelah 1 Januari 2011, Perseroan memberikan manfaat pensiun melalui DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) BNI dengan program yang bernama Program Pensiun luran Pasti. Perseroan memberikan manfaat jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan.
Manfaat Tunjangan Hari Tua Pension Benefit	Diberikan oleh Perseroan saat karyawan memasuki usia pensiun yang pengelolannya dilaksanakan oleh YAKKAP I (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I) sesuai masa kerja karyawan, gaji pokok, dan jumlah keluarga sebagaimana yang tercantum pada SK Pensiun. It is a benefit provided by Perseroan when the employee almost enters the retirement age. It will be organized by YAHHAP (Angkasa Pura I Employee Welfare Foundation) and based on the employee basic salary, and the number of family member as listed in the Retirement Decree.
Pemeliharaan Kesehatan Pensiun Retirement Health Insurance	Diberikan kepada Pensiunan beserta keluarga yang tercantum pada SK dan dikelola oleh YAKKAP I, berupa BPJS Kesehatan dan pemberian tambahan biaya rawat inap per orang per tahun sesuai dengan ketentuan perusahaan. It is provided to the retired and the family listed in the Retirement Decree and is organized by YAKKAP I. The insurance includes BPJS Kesehatan and additional fund for hospitalization cost according to the company policy
Manfaat Jaminan Hari Tua Old Age Security benefits	Dikelola oleh PT BPJS Ketenagakerjaan, yang berupa: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). It is organized by PT BPJS Ketenagakerjaan and provided in the form of Pension Insurance (JHT).

INDUSTRIAL RELATION

1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Merupakan wujud Perseroan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, guna mendukung suasana kerja yang kondusif dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimuat hak – hak, serta kewajiban yang harus dipenuhi Direksi, Serikat karyawan, serta Pegawai. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku saat ini ialah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2014 – 2016 yang telah disahkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Nomor: KEP.148/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2014 tanggal 11 September 2014.

2) Kebebasan Berserikat

Di lingkungan kerja Perseroan, terdapat 2 serikat pegawai yaitu Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP) dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA) yang menjadi mitra kerja Perseroan. Serikat pegawai senantiasa menunjukkan peran positif dalam penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan. Para pihak saling berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja.

Di tahun 2010, Perseroan telah menandatangani Pakta Normalisasi antara manajemen Perseroan dengan Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP) dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA) yang ditunjukan untuk meningkatkan harmonisasi hubungan seluruh karyawan dengan Perseroan. Pakta Normalisasi tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja RI dan telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.157/PHIJSK-PKKAD/PKB/XI/2010.

Profil Karyawan

Employee Profile

Bagi Perseroan, *human capital* merupakan aset penting dalam keberlanjutan bisnis dan peningkatan kualitas bisnis. Perseroan senantiasa melakukan proses rekrutmen yang mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional. Kandidat yang memenuhi standar administrasi dijangar melalui situs Perseroan serta iklan.

Di tahun 2016, Perseroan memiliki jumlah *human capital* sebanyak 3.025 karyawan mengalami penurunan sebesar 3,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.135 karyawan.

INDUSTRIAL RELATION

1) Cooperation Agreement (PKB)

It is Perseroan concrete act in creating a harmonic industrial relation in order to create a conducive work environment and to increase the work efficiency and productivity. PKB includes the rights, responsibility of the Boards of Director, Employee Association, and the employee itself. Collective Agreement currently effective is 2014-2016 Collective Agreement ratified by Director General of Industrial Relation Development and Social Security of Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number KEP.148/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2014 on 11 September 2014.

2) Freedom of Association

There are two labor association within the work environment, they are Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP) and Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA) which have also become the partner of Perseroan. Labor Association is always showing its role positively in solving the employment problem. Each party always communicate and consult to each other regarding the employment issue in order to increase the productivity rate and employment welfare.

In 2010, Perseroan has signed Normalization Pact between Perseroan Management, SP and AKA. This pact aims to strengthen the harmony between the employees and Perseroan. The pact has been registered to the Ministry of Labor and in accordance to the Decree by General Director of Industrial Relation Coaching and Labor Social Insurance Number KEP.157/PHIJSK-PKKAD/PKB/XI/2010.

For Perseroan, human capital is the most important asset for its business sustainability and quality. Perseroan is always run its recruitment process according to the value of openness, liability and equality. The process is also based on the required competence fulfilled by each candidate and the local/national labor availability. The candidate that met the administration standard is gathered through online and printed advertisements.

In 2016, Perseroan owns the human capital for 3,025 employees which has been increased for 3,51% compared to the number of employee in the previous year that is 3.135 employees.

**Tabel Perbandingan Jumlah Karyawan Tahun 2015 dan 2016 /
Table of Employee Number Comparison of 2015 and 2016**

(dalam orang / in person)

Uraian Description	Tahun / Year	
	2016	2015
KANTOR PUSAT / CENTRAL OFFICE	432	468
Bandara Ngurah Rai - Bali / Ngurah Rai Airport - Bali	561	586
Bandara Juanda - Surabaya / Juanda Airport - Surabaya	354	383
Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar / Sultan Hasanuddin Airport - Makassar	222	242
Bandara Sepinggan - Balikpapan / Sepinggan Airport - Balikpapan	254	274
Bandara Frans Kaisiepo - Biak / Frans Kaisiepo Airport - Biak	88	86
Bandara Sam Ratulangi - Manado / Sam Ratulangi Airport - Manado	138	139
Bandara Adisutjipto - Yogyakarta / Adisutjipto Airport - Yogyakarta	163	163
Bandara Adisumarmo - Solo / Adisumarmo Airport - Solo	112	113
Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin / Syamsudin Noor Airport - Banjarmasin	128	122
Bandara Ahmad Yani - Semarang / Ahmad Yani Airport - Semarang	135	134
Bandara Lombok - Praya / Lombok Airport - Praya	176	175
Bandara Pattimura - Ambon / Pattimura Airport - Ambon	97	99
Bandara El Tari - Kupang / El Tari Airport - Kupang	95	94
SBU Komersial Bali / Bali Commercial SBU	32	24
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani / Airport Development Project Syamsudin Noor International	14	15
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Adisucipto / Development Project of Adisucipto International Airport	9	9
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor / Development Project of International Airport Syamsudin Noor	15	9
TOTAL	3,025	3,135

Sebagai bagian integral struktur organisasi, *Human Capital* wajib memiliki komposisi yang proporsional dan sejalan dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Pada tahun 2016, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 3.025 orang, mengalami penurunan sebesar 3,51% atau sebanyak 110 orang dibandingkan dengan jumlah karyawan di 2015 yang mencapai 3.135 orang.

Uraian tentang profil karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) di tahun 2016 adalah sebagai berikut.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Untuk mendukung pertumbuhan PT Angkasa Pura I (Persero) yang berkelanjutan, saat ini Perseroan berusaha mengoptimalkan pendayagunaan *human capital* yang ada. Komposisi karyawan berdasarkan Status Kepegawaian di dominasi oleh karyawan dengan status Pegawai Perusahaan yang mencapai 2.654 orang atau sebesar 87,74%

As the part of organization structure, the Human Capital have to be proportionally composed and used according to Perseroan business needs. In 2016, the number of employee has been decreased for 3,51% out of 3.025 people. This number is lower than the number of employee in 2015 that was 3.135 people.

The description of PT Angkasa Pura I (Persero) employee profile in 2016 is as follows.

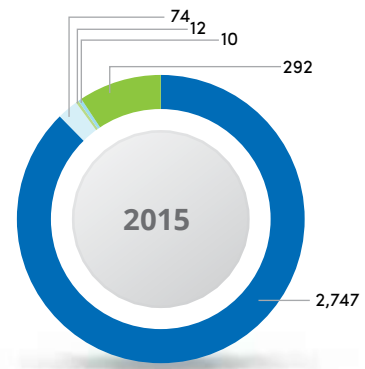
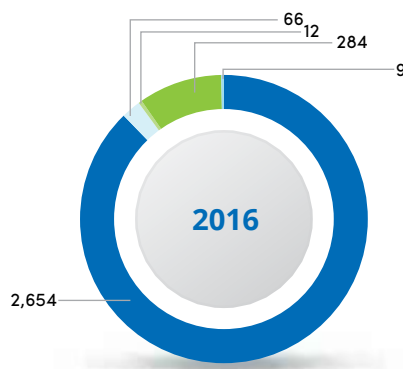
EMPLOYMENT COMPOSITION BASED ON THE EMPLOYMENT STATUS

In order to support its sustainable growth, PT Angkasa Pura I (Persero) is optimizing the current human capital. The employment composition which is based on the employment status is dominated by the employee entitled as corporate employee for 2.654 people or 87,74%

**Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian /
Tabel Perbandingan Jumlah Karyawan Tahun 2015 dan 2016**

(dalam orang / in person)

Status Kepegawaian Employment Status	Tahun 2016 / Year 2016		Tahun 2015 / Year 2015		Perubahan / Change	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pegawai Perusahaan / Employee	2,654	87.74	2,747	87,62	(97)	(3.53)
PNS Diperbantukan / Seconded Civil Servants	66	2.18	74	2,36	(8)	(10.81)
ABRI Ditugaskan / Assigned ABRI	9	0.30	10	0,32	(1)	(10.00)
Honorer / Honorary	12	0.40	12	0,38	4	50.00
Calon Pegawai / Prospective Employees	284	9.39	292	9,31	(8)	(2.74)
JUMLAH / TOTAL	3,025	100.00	3,135	100.00	(110)	(3.51)



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Komposisi karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2016 dilihat dari *level* organisasi di dominasi oleh karyawan pada *level* 12, yaitu sebanyak 23,54% dan diikuti dengan karyawan pada *level* 11 sebanyak 21,02%, karyawan pada *level* 13 sebanyak 13,59%, karyawan *level* 8 sebanyak 11,44% dan karyawan pada *level* 15 sebanyak 11,17%. Sedangkan jumlah karyawan pada *level* organisasi lainnya masing-masing berjumlah kurang dari 5%.

EMPLOYMENT COMPOSITION BASED THE ORGANIZATION LEVEL

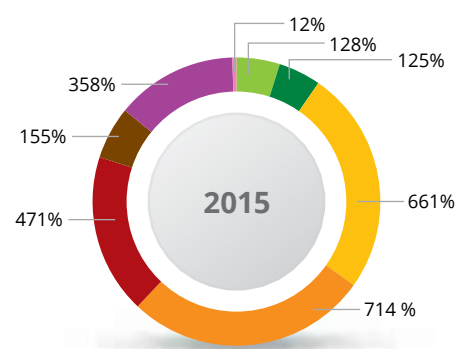
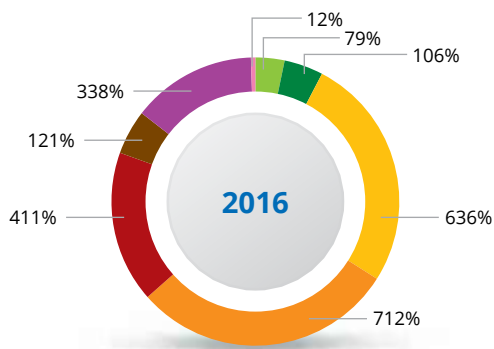
in 2016, the employment composition of PT Angkasa pura I (Persero) in term of organizational level is dominated by the employee from level 12 for 23,54%. This number is followed by level 11 employee for 21,02%, level 13 employee for 13,59%, level 8 employee for 11,44% and level 15 employee for 11,17%. Meanwhile, the number of employee in other organizations has decreased for less than 5%.

**Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi /
Table of Employee Composition by Employee Status**

(dalam orang / in person)

Level Organisasi Organization Level	Tahun 2016 / Year 2016		Tahun 2015 / Year 2015		Perubahan / Change	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
1	3	0.10	1	0,03	2	200.00
2	6	0.20	6	0,19	0	0.00
3	44	1.45	39	1,24	5	12.82
4	8	0.26	8	0,26	0	0.00
5	61	2.02	47	1,50	14	29.79
6	120	3.97	108	3,44	12	11.11
7	22	0.73	32	1,02	(10)	(31.25)
8	346	11.44	270	8,61	76	28.15

Level Organisasi Organization Level	Tahun 2016 / Year 2016		Tahun 2015 / Year 2015		Perubahan / Change	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
9	79	2.61	128	4,08	(49)	(38.28)
10	106	3.50	125	3,99	(19)	(15.20)
11	636	21.02	661	21,08	(25)	(3.78)
12	712	23.54	714	22,78	(2)	(0.28)
13	411	13.59	471	15,02	(60)	(12.74)
14	121	4.00	155	4,94	(34)	(21.94)
15	338	11.17	358	11,42	(20)	(5.59)
PKWT / Contract-based Workers	12	0.40	12	0,38	0	0.00
JUMLAH / TOTAL	3,025	100.00	3,135	100,00	(110)	(3.51)



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN

Berdasarkan Jenjang Pendidikan, komposisi karyawan Perseroan pada 2016 didominasi oleh lulusan SD-SLTA sebesar 48,43%, diikuti oleh lulusan Strata 1 sebesar 29,49%, kemudian lulusan D1-D4 sebesar 18,84%, dan Strata 2 sebesar 3,24%. Pada 2016, jumlah karyawan dengan jenjang pendidikan SD-SLTA menurun sebesar 9,85%, dari 1.625 orang di 2015 menjadi 1.465 orang di 2016. Sedangkan untuk karyawan dengan jenjang pendidikan Diploma 1 hingga Diploma 4 mengalami peningkatan sebesar 2,70%. Jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan Strata 2 di tahun 2016 menurun sebesar 8,41% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk karyawan dengan tingkat pendidikan sarjana, meningkat sebesar 5,19%.

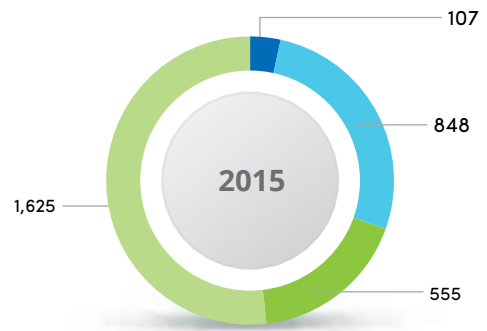
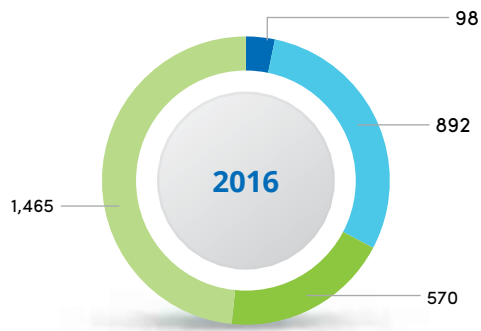
EMPLOYMENT COMPOSITION BASED ON EDUCATION

According to the education level, Perseroan employment composition in 2016 was dominated by primary school graduate for 48,43%. The number is followed by bachelor degree graduate (S1) for 29,49%, D1-D4 for 18,84% and master degree graduate for 3,24%. In 2016, the number of primary school graduate has decreased for 9,85% , from 1.625 people in 2015 into 1.465 people in 2016. As for the employee with D1 to D4 degree, the number has been increased for 2,70%. The number of employee with master degree (S2) in 2016 was decreased for 8,41% compared to the previous year. Meanwhile, the number of employee with bachelor degree (S1) has been increased for 5,19%.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan /
Table of Employee Composition by Employee Status

(dalam orang / in person)

Tingkat Pendidikan Education Level	Tahun 2016 / Year 2016		Tahun 2015 / Year 2015		Perubahan / Change	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
S2 / Post-Graduate (Magister)	98	3.24	107	3.41	(9)	(8.41)
Sarjana / Undergraduate (Bachelor)	892	29.49	848	27.05	44	5.19
D1 - D4 / Associate's Degree	570	18.84	555	17.70	15	2.70
SD - SMA / Elementary - High School	1,465	48.43	1,625	51.83	(160)	(9.85)
JUMLAH / TOTAL	3,025	100.00	3,135	100.00	(110)	(3.51)



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Komposisi karyawan Perseroan tahun 2016 dilihat dari segi usia, didominasi oleh para karyawan dengan usia produktif yaitu 26-30 tahun yaitu sebanyak 22,88% kemudian diikuti oleh kelompok usia 31-35 tahun yaitu sebanyak 16,10%. Sedangkan para karyawan yang akan segera memasuki usia pensiun, yaitu usia di atas 56 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 0,17% akan menjadi *role model* atau contoh dalam melakukan transfer *knowledge* mereka ke generasi selanjutnya.

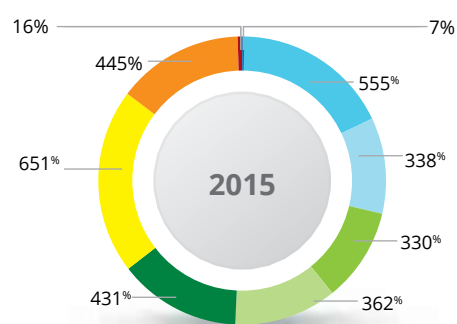
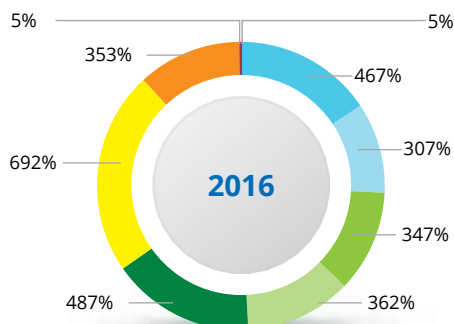
EMPLOYMENT COMPOSITION BASED ON AGE

The employment composition in 2016 in term of age was dominated by those in their productive age from 26 to 30 years old (22,88%). The number is followed by 31 to 35 years old employee for 16,10%. On the other hand, the number of employees who are entering the retirement age (56 years old and above) was only 0,17% (5 people). However, they will be the role model for knowledge transfer for the ext generation.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia /
Table of Employee Composition by Employee Status

(dalam orang / in person)

Kelompok Usia Age	Tahun 2016 / Year 2016		Tahun 2015 / Year 2015		Perubahan / Change	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
>56	5	0.17	7	0.22	(2)	(28.57)
51 - 56	467	15.44	555	17.70	(88)	(15.86)
46 - 50	307	10.15	338	10.78	(31)	(9.17)
41 - 45	347	11.47	330	10.53	17	5.15
36 - 40	362	11.97	362	11.55	0	0.00
31 - 35	487	16.10	431	13.75	56	12.99
26 - 30	692	22.88	651	20.77	41	6.30
21 - 25	353	11.67	445	14.19	(92)	(20.67)
<20	5	0.17	16	0.51	(11)	(68.75)
Jumlah / Total	3,025	100.00	3,135	100.00	(110)	(3.51)



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Jika dilihat berdasarkan lamanya masa kerja, komposisi karyawan Perseroan tahun 2016 didominasi oleh kelompok masa kerja 0-5 tahun sebesar 34,05%, diikuti kelompok masa kerja 16-20 tahun sebesar 17,59% dan kelompok masa kerja 6-10 tahun sebesar 16,73%. Jumlah karyawan dengan masa kerja di atas 30 tahun menurun dibanding tahun 2015, yaitu dari 310 orang di tahun 2015 menjadi 61 orang di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah karyawan yang memasuki usia pensiun/mengajukan pensiun di tahun 2016.

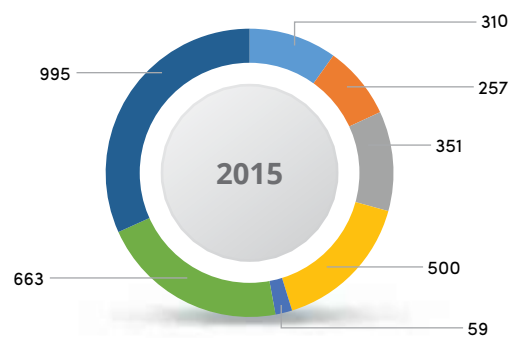
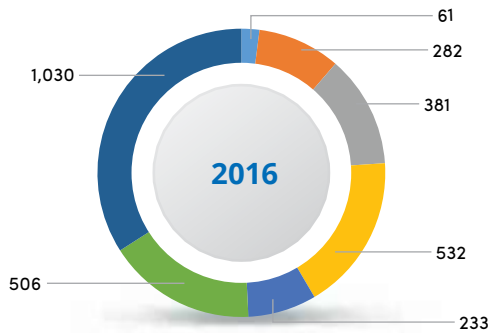
EMPLOYMENT COMPOSITION BASED ON YEARS OF SERVICE

In term of years of service, the employment composition in 2016 was dominated by 0 to 5 years group for 34,05%. This number is followed by 16 to 20 years group for 17,59% and 6 to 10 years group for 16,73%. In summary, the number of employee who have been working for more than 30 years in 2016 was lower than the number in 2015 (310 people in 2015 and 61 people in 2016). This is due the significant number of employee who applied for retirement in 2016.

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja /
Table of Employee Composition by Employee Status

(dalam orang / in person)

Masa Kerja (Tahun) Working Years of Work (Years)	Tahun 2016 / Year 2016		Tahun 2015 / Year 2015		Perubahan / Change	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
>30	61	2.02	310	9.89	(249)	(80.32)
26 - 30	282	9.32	257	8.20	25	9.73
21 - 25	381	12.60	351	11.20	30	8.55
16 - 20	532	17.59	500	15.95	32	6.40
11 - 15	233	7.70	59	1.88	174	294.92
6 - 10	506	16.73	663	21.15	(157)	(23.68)
0 - 5	1,030	34.05	995	31.74	35	3.52
Jumlah / Total	3,025	100.00	3,135	100.00	(110)	(3.51)



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

PT Angkasa Pura I (Persero) memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam proses penerimaan karyawan, namun berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di perusahaan maka lebih banyak karyawan laki-laki yang bergabung dengan perusahaan. Komposisi karyawan berdasarkan *gender* pada tahun 2016 di dominasi oleh karyawan laki-laki, yaitu sebanyak 2.323 orang atau sebesar 76,79%, sedangkan jumlah karyawan perempuan sebanyak 702 orang atau sebesar 23,21%.

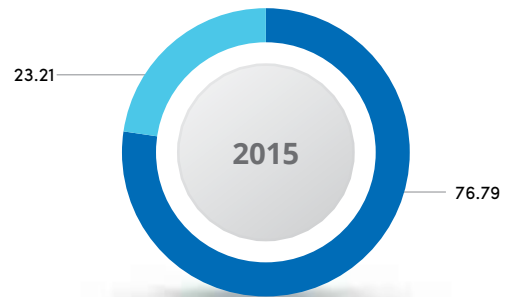
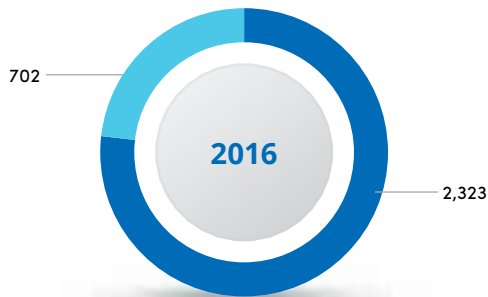
EMPLOYMENT COMPOSITION BASED ON GENDER

PT Angkasa Pura I (Persero) provides equal opportunity for both male and female during the recruitment. However, considering the type of work required by the company, the large number of male employees is inevitable. In 2016, the employment composition based on gender was dominated by male employees for 2.323 people (76,79%) and female employees for 702 people (23,21%).

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender / Table of Employee Composition by Employee Status

(dalam orang / in person)

Gender	Tahun 2016 / Year 2016		Tahun 2015 / Year 2015		Perubahan / Change	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-Laki / Male	2,323	76.79	2,424	77,32	(101)	(4,17)
Perempuan / Female	702	23.21	711	22,68	(9)	(1,27)
Jumlah / Total	3,025	100.00	3,135	100,00	(110)	(3,51)





Biaya Tenaga Kerja

Labor Cost

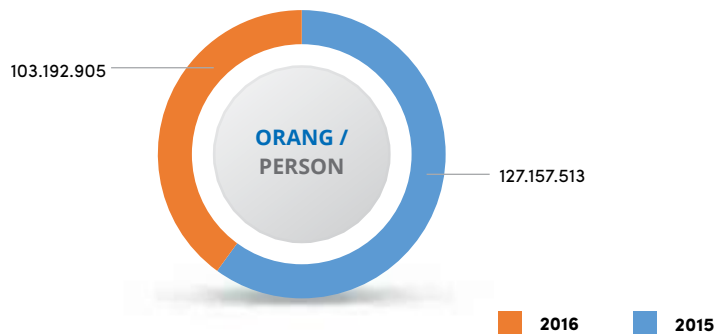
Pada tahun 2016 Perseroan mengeluarkan Biaya Tenaga Kerja sebesar Rp1.078 miliar, meningkat sebesar 10,58% atau sebesar Rp103 miliar jika dibandingkan dengan Biaya Tenaga Kerja tahun 2015 yang sebesar Rp975,8 miliar.

In 2016, Perseroan spent Rp1.078 billion for labor cost. This number has increased for 10,85% or Rp103 billion compared to the cost spent in 2015 (Rp975,8 billion).

Tabel Biaya Tenaga Kerja /
Table of Labor Cost

(dalam ribuan / in thousand)

Tahun / Year	Biaya Tenaga Kerja / Labor Cost	Pertumbuhan / Growth	
		Jumlah / Number	Persentase / Percentage
2016	1,078,993,793	103,192,905	10.58%
2015	975,800,888	127,157,513	14.98%
2014	848,643,375	-	-



Tingkat *Turnover* Karyawan

Employee Turnover Rate

Tingkat *turnover* karyawan di PT Angkasa Pura I (Persero) dapat disebabkan oleh beberapa alasan antara lain: pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lain-lain. Pada tahun 2016, tingkat *turnover* karyawan di Perseroan mencapai 4,85%, menurun dibandingkan tingkat *turnover* karyawan tahun 2015 sebesar 5,74%. Besarnya tingkat *turnover* karyawan khususnya disebabkan oleh banyaknya jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun.

The turnover rate of PT Angkasa Pura I (Persero) employee is based on several factors: retirement, death, resignation, and others. In 2016, the turnover rate in Perseroan reach 4,85%. This rate has decreased compared to the rate in 2015 that is 5,74%. The scale of employee turnover rate is mostly caused by the employee who almost reach their retirement period.

Tabel Tingkat *Turnover* Karyawan / Table of Employee Turnover Rate

Keterangan / Explanation	2016	2015
Pensiun / Retired	160	136
<i>Resign</i>	11	6
Meninggal / Passed Away	2	3
Lain-lain / Other	3	7
Jumlah Karyawan Keluar / The Number of Employees Quit	176	152
Jumlah Karyawan / Total Employee	3,025	3,135
TINGKAT <i>TURNOVER</i> / <i>TURNOVER RATE</i>	4.85%	5.74%



4

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung berjalannya proses bisnis Perseroan yang handal telah menjadi komitmen Perseroan.

Perseroan telah melakukan pembenahan fondasi ICT berupa pembenahan tata kelola dan infrastruktur untuk menjamin kualitas dan ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada stakeholder perseroan.

Perseroan telah mampu meningkatkan maturitas ICT berdasarkan standard COBIT dari 1,79 pada tahun 2015 menjadi 3,26 di tahun 2016. Pada tahun 2016, ICT PT Angkasa Pura I (Persero) meraih penghargaan TOP IT Implementation on Airport Sector 2016 pada ajang TOP IT & TELCO AWARD 2016.

The utilization of Information Technology for reliable business is one of the Company's commitments. The Company has carried out the improvement of ICT foundation by improving governance and infrastructure to ensure the quality and availability of IT-based services for the stakeholders. The Company has increased ICT maturity based on COBIT standards from 1.79 in 2015 to 3.26 in 2016. The ICT of PT Angkasa Pura I (Persero) was awarded with TOP IT Implementation on Airport Sector 2016 in TOP IT & TELCO AWARD 2016.



Terobosan dan Pencapaian Penting

Significant Breakthrough and Achievement

Terbentuknya struktur organisasi ICT yang baru pada tahun 2016, dengan menggabungkan fungsi IT dan fungsi elektronika bandara sehingga organisasi ICT dapat mengikuti secara dinamis perkembangan kebutuhan bisnis perusahaan.

The establishment of a new ICT organization structure in 2016 by combining IT and airport electronic functions in order to make the ICT be able to dynamically follow the development of company business.

01

Dilakukan pembenahan fondasi ICT berupa pembenahan tatakelola dan infrastruktur untuk menjamin kualitas dan ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada stakeholder perusahaan.

The improvement of ICT foundation was done in the form of governance and infrastructure to ensure the quality and availability of services based information technology to the company stakeholders.

02

Tercapainya peningkatan maturitas ICT berdasarkan standard COBIT dari 1,79 pada tahun 2015 menjadi 3,25 di tahun 2016. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN yaitu sebesar 3,00 yang ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2018.

The achievement of ICT maturity improvement was based on the COBIT standard from 1.79 in 2015 to 3.25 in 2016. This achievement exceeded the target determined by the Ministry of State-Owned Enterprises that was 3.00 targeted to be achieved in 2018.

03

Tersedianya *dashboard* manajemen yang berfungsi untuk menunjang pengambilan keputusan-keputusan strategis perusahaan dengan lebih akurat.

The availability of management dashboard functions to support strategic decision making of the company more accurately.

04

Pada tahun 2016 ICT PT Angkasa Pura I (Persero) meraih penghargaan TOP IT Implementation on Airport Sector 2016 pada ajang TOP IT & TELCO AWARD 2016.

In 2016, the ICT of PT Angkasa Pura I (Persero) achieved the appreciation of TOP IT Implementation on Airport Sector 2016 at the event of TOP IT & TELCO AWARD 2016.

05

Information Technology Master Plan

Information Technology Master Plan

Service Excellence

- **Lingkup: Airport Service Community**
/ **Scope: Airport Service Community**
- Obyektif / Objectives:
- Interkoneksi bisnis / Business Interconnection
- Interkoneksi proses / Process interconnection
- Pertukaran data / Data exchange
Untuk meningkatkan mutu pelayanan penerbangan & jasa kebandaraan secara terpadu / To improve the quality of aviation and airport services holistically



Operational Excellence

- **Lingkup: AP I**
/ **Scope: AP I**
- Obyektif / Objective:
- Integrasi proses, data, orang dan organisasi di dalam AP I / Integration of process, data, people and organization in AP I

Business Excellence

- **Lingkup: Airport centric Economy** / **Scope: Airport-centric Economy**
- Obyektif / Objectives:
- Aktualisasi potensi ekonomi wilayah setempat / Actualization of economic potentials in local regions
- Pertukaran informasi / Exchange of information
- Interkoneksi bisnis / Business interconnection
Untuk meningkatkan trafik penumpang, kargo & fasilitas bandara, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah / To improve passenger traffic, cargo and airport facilities and to accelerate regional economic growth

VISI

Menjadi pengelola dan penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi internal berstandar internasional.

VISION

To Become the Manager and Provider of World-Class Internal Information and Communication Technology Services.

MISI

Menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang prima dan tepat kepada stakeholder dengan tujuan:

1. Meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan;
2. Meningkatkan kinerja perusahaan;
3. Meningkatkan kemampuan pelayanan perusahaan;
4. Menciptakan jasa nilai tambah.

MISSION

To provide excellent and accurate information and communication technology to the stakeholders aiming at:

1. Improving value and competitiveness of the company;
2. Improving the performance of the company;
3. Improving the services capability of the company;
4. Creating value-added services.

Perkembangan Struktur dan Sumber Daya Manusia Divisi Teknologi Informasi

Structure Development and Human Resources of Information Technology Division

Dalam rangka mendukung kebutuhan bisnis, meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi (TI) yang baik, responsif terhadap setiap masalah operasional dan selalu berperan aktif dalam menghasilkan layanan Teknologi Informasi, dengan melakukan penambahan pegawai yang sesuai dengan kompetensi Teknologi Informasi. Jumlah Pegawai Divisi TI saat ini adalah sejumlah 167 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

To support business needs, to improve a good IT governance, to be responsive towards every operational issue and to be able to always active in producing IT services are done by adding the employees based on IT competency. The number of IT Division Employees now is 167 employees with the composition as follows:

No.	Lokasi / Location	Group Head	Department Head	Section Head	Staff
1	Kantor Pusat / Head Office	1	5		26
2	Solo			1	5
3	Yogyakarta		1	2	7
4	Semarang		1	2	6
5	Kupang			1	4
6	Biak			1	3
7	Denpasar		1	2	19
8	Lombok Praya		1	2	6
9	Surabaya		1	2	11
10	Ambon			1	10
11	Menado		1	2	7
12	Balikpapan		1	2	11
13	Ujung Pandang		1	2	10
14	Banjarmasin		1	2	5
TOTAL		1	14	22	130

I. KANTOR PUSAT

- Information Technology Group Head, yang mengepalai:
 - i. ICT Planning and Governance Department Head;
 - ii. Business Application Department Head;
 - iii. Enterprise Application Department Head;
 - iv. Airport Technology and Network Department Head;
 - v. ICT Services Department Head.

II. KANTOR CABANG KELAS A dan B

- Information and Communication Technology Department Head, yang mengepalai:
 - i. Application Operation and Support Section Head;
 - ii. Airport Technology and Network Operation Support Section Head.

I. HEAD OFFICE

- *Information Technology Group Head*, heading:
 - i. ICT Planning and Governance Department Head;
 - ii. Business Application Department Head;
 - iii. Enterprise Application Department Head;
 - iv. Airport Technology and Network Department Head;
 - v. ICT Services Department Head.

II. BRANCH OFFICES CLASS A and B

- *Information and Communication Technology Department Head*, heading:
 - i. Application Operation and Support Section Head;
 - ii. Airport Technology and Network Operation Support Section Head.

III. KANTOR CABANG KELAS C

- Information and Communication Technology Section Head, yang mengepalai:
 - i. Application Operation and Support Team;
 - ii. Airport Technology and Network Operation Support Team.

III. BRANCH OFFICES CLASS C

- *Information and Communication Technology Section Head, heading:*
 - i. Application Operation and Support Team;
 - ii. Airport Technology and Network Operation Support Team.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Organisasi ICT Kantor Pusat dibedakan dengan struktur dengan struktur organisasi di Kantor Cabang, dengan fungsi Perencanaan dan Pengembangan ICT hanya berada di Kantor Pusat.

Sementara Kantor Cabang lebih fokus kepada pelaksanaan operasional dan pelayanan ICT di Bandara.

Tujuan dari pembagian fungsi organisasi tersebut di atas adalah agar terbentuknya standard sistem, teknologi dan proses bisnis di lingkungan ICT PT Angkasa Pura I (Persero). Disamping itu tersedianya layanan ICT di Kantor Cabang dapat lebih terjaga

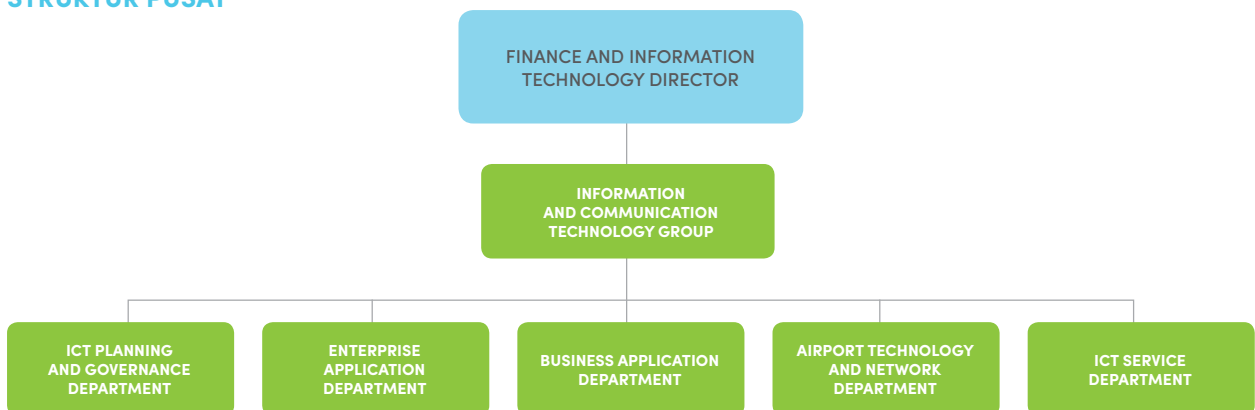
ORGANIZATION STRUCTURE OF INFORMATION TECHNOLOGY

The organization of the Head Office ICT is differentiated with the organization structure in Branch Offices with the function of ICT Planning and Development which is only in the Head Office.

At the meantime, the Branch Offices are more focused on the implementation of ICT operations and services in the airports.

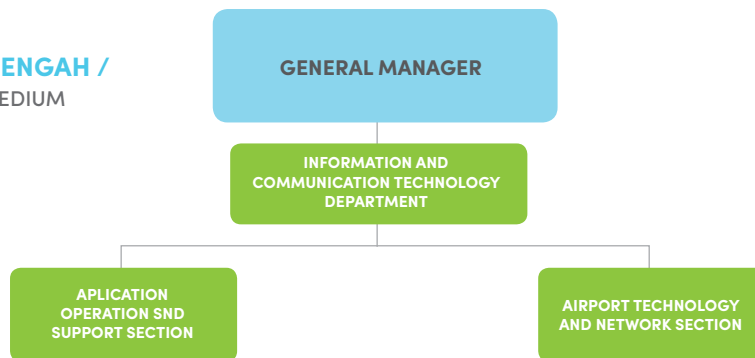
The objective of the division of organization function above is to establish system standard, technology and business process in the field of ICT of Angkasa Pura Aiports. Besides, the availability of ICT services in Branch Offices can be managed better.

STRUKTUR PUSAT

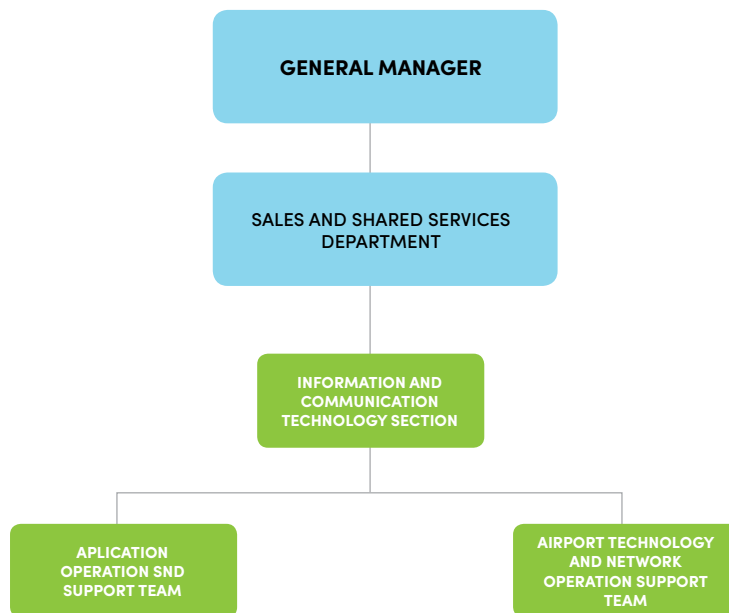




**BANDARA BESAR
DAN BANDARA MENENGAH /**
LARGE AIRPORTS AND MEDIUM
AIRPORTS



BANDARA KECIL /
SMALL AIRPORTS



Langkah Strategis Divisi Teknologi Informasi

Strategic Steps of Information Technology Division

NO	SASARAN STRATEGIS / STRATEGIC TARGET	PROGRAM STRATEGIS / STRATEGIC PROGRAM
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Mendukung Berjalannya Proses Bisnis Perusahaan Yang Handal / Utilization of Information Communication Technology to Support the Implementation of Excellent Company Business Process	1. Program peningkatan operasional bandara dengan memanfaatkan ICT 2. Program peningkatan kemampuan/ fungsionalitas sistem penunjang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) 3. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi. 4. Pemanfaatan platform ERP yang dimiliki untuk menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. 5. Pengembangan website corporate dan website bandara yang bersifat customer centric. / 1. Airport operational improvement program by utilizing ICT 2. Ability/ functionality improvement program of human resources (SDM) management supporting system 3. Enhancement of Information Technology Infrastructure. 4. Utilization of ERP platform owned to support the management and decision making. 5. Development of customer centric corporate and airport websites.
2	Pencapaian Teknologi Informasi Komunikasi untuk Mendukung Revenue Safeguarding Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi yg berhubungan dengan customer/jasa layanan / The achievement of Information Communication Technology to Support the Revenue of Information Communication Technology Utilization Safeguarding which is related to customer/services.	Integrasi antar sistem revenue generator / Integration between generator revenue system
3	Mengintegrasikan Sistem Keuangan Antara Anak Perusahaan dengan Induk PT. Angkasa Pura I untuk menghasilkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang Akurat dan Tepat Waktu Standarisasi infrastruktur seluruh cabang dan standarisasi layanan di semua cabang / Integrating Financial System between Subsidiaries and the Holding Company of PT. Angkasa Pura I to produce Financial Consolidation which is Accurate and Timely on Infrastructure Standardization of all branch offices and services standardization in all branch offices.	Integrasi sistem keuangan anak perusahaan dengan induk secara elektronik / Integration of Subsidiaries financial system with the holding company electronically.
4	Penggunaan Green Technology Dalam Pemanfaatan Teknologi dengan Menerapkan Konsep Kerja Paperless dan Perbaikan Email System / The use of Green Technology in the Utilization of technology by Implementing Paperless Working Concept and Improvement of Email System	Penggunaan Document Management System dalam administrasi dokumen perkantoran / The use of Document Management System in administrating official documents

Pengendalian Risiko Operasional yang Dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi Sepanjang Tahun 2016

Operational Risk Control Done by Information Technology Division Throughout 2016

Dalam rangka pengamanan sistem dan informasi yang bersifat *enterprise* telah dilakukan pengendalian resiko operasional dengan cara mengimplementasikan *hot backup* terhadap sistem *enterprise*, dengan metode yang digunakan adalah menempatkan sistem *enterprise* yang identik di dua tempat yang berbeda.

Telah disusunnya prosedur mutu (SOP) dan kebijakan ICT yang baru menyesuaikan dengan metodologi COBIT dan ITIL.

In order to secure the enterprise system and information, operational risk control was done by implementing hot backup towards enterprise system with a method of placing identical enterprise systems in two different places.

The new quality Procedure (SOP) and ICT policy in accordance with the methodology of COBIT and ITIL have been developed.

Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2016

The 2016 Information Technology Development

Pengembangan Teknologi Informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholder, antara lain:

1. Peningkatan kualitas informasi keuangan untuk pengambilan keputusan Management melalui Implementasi *SAP Report Enhancement* dan *Dashboard* dari *Modul Material Management (MM-SAP)* dan *Plant Maintenance (PM-SAP)*.
2. Optimalisasi operasional dan pencatatan transaksi pendapatan aero melalui implementasi Sistem Operasi dan Komersil (SIOPSKOM) di 12 Kantor Cabang dengan DPS sebagai Pilot Project.
3. Peningkatan keamanan pada operasional Bandara melalui Pengadaan *Explosive Trace Detector* di 6 Bandara dan Pengadaan CCTV di Area Perimeter dan Apron Bandara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar.
4. Penyusunan *Design and Build Implementasi Airport Operation Control Center (AOCC)* di 13 Bandara.
5. Implementasi *Human Capital Information System (HCIS)* baru.
6. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi di Kantor Pusat.
7. Pengembangan *website corporate* dan *website bandara* yang bersifat *customer centric*.
8. Penyempurnaan POTS dan Rekonsiliasi secara Otomatis dengan CUCS.
9. Implementasi Modul SAP BPC – *Consolidation*.
10. Implementasi *Document Management System (DMS)*.

Information Technology Development done in 2016 in order to improve the service quality to all stakeholders, included:

1. Improving financial information quality for Management decision making through the SAP Implementation of Report Enhancement and Dashboard from Module Material Management (MM-SAP) and Plant Maintenance (PM-SAP).
2. Optimizing the operations and recordings of aero revenue transactions through the Implementation of Operation System and Commercial (SIOPSKOM) in 12 Branch Offices with DPS as the Pilot Project.
3. Security Improvement in Airport operations through the Provision of Explosive Trace Detector in 6 Airports and the provision of CCTV in Perimeter and Apron Area of I Gusti Ngurah Rai Airport- Denpasar.
4. Development of Design and Build Implementation of Airport Operation Control Center (AOCC) in 13 airports.
5. Implementation of the new Human Capital Information System (HCIS).
6. Enhancement of Information Technology Infrastructure in Head Office.
7. Development of customer centric corporate and airport websites.
8. Improvement of POTS and Reconciliation automatically by using CUCS.
9. SAP BPC Module Implementation-Consolidation.
10. Document Management System (DMS) Implementation.



Biaya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Development Cost of Information Technology Infrastructure

Dalam rangka peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi untuk menunjang bisnis perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi selama tahun 2016 adalah sekitar Rp148 Milyar.

In order to improve service improvement based information technology to support company business, the cost spent for the Development of Information Technology Infrastructure throughout 2016 was around IDR148 Billion.



5

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Efektivitas implementasi *good corporate governance* (GCG) tercermin dari *governance outcome* yang telah terjadi. PT Angkasa Pura I (Persero) telah merasakan manfaat dari implementasi GCG dengan dicapainya kinerja keuangan dan operasional yang sangat bagus di 2016. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan laba yang cukup signifikan. Laba Bersih tahun berjalan tumbuh 37,72% dan Laba Komprehensif tahun berjalan tumbuh 57,42%. Di samping itu, hasil dari implementasi GCG juga terlihat dari kepercayaan pihak eksternal kepada Perseroan. Beberapa bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) telah mendapatkan penghargaan bergengsi baik di tingkat nasional maupun internasional.

The effectiveness of good corporate governance (GCG) is reflected from the incurred governance outcome. PT Angkasa Pura I (Persero) has benefited from the implementation of GCG with the achievement of excellent financial and operational performance in 2016. This is indicated by a significant increase of income. The Current Year Net Income increases by 37.72% and the Current Year Comprehensive Income increases by 57.42%. Moreover, the result of GCG implementation is reflected from the trust of the external parties to the Company. Several airports under the management of PT Angkasa Pura I (Persero) have been presented with prestigious national and international awards



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Komitmen PT Angkasa Pura I (Persero) dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) telah menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan dan diakui oleh pihak eksternal.

- Jumlah Aset tumbuh sebesar 41,53%.
- Pendapatan Aeronautika tumbuh sebesar 14,49%.
- Pendapatan Non Aeronautika tumbuh sebesar 20,61%.
- Laba Bersih tahun berjalan tumbuh 37,72%.
- Laba Komprehensif Tahun Berjalan tumbuh 57,42%
- PT Angkasa Pura I (Persero) meraih Juara III *Annual Report Award* (ARA) 2015 Kategori BUMN Non Keuangan *Non Listed*.
- *The Most Improved Airport in Asia-Pacific* 2016 yang diraih oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
- *The 3rd World Best Airport 2015* dan *The 3rd World Best Airport 2016* kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang per tahun versi *Airport Service Quality (ASQ) Award* yang diselenggarakan oleh Airport Council International (ACI) yang diraih dan dipertahankan selama dua tahun berturut-turut oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
- *The Most Punctual Airport 2016* (Bandara Paling Tepat Waktu di Dunia) versi OAG Punctuality League 2016 kategori bandara besar dari lembaga analisis perjalanan udara asal Inggris OAG, yang diraih oleh Bandara Juanda Surabaya.
- *The Best of The Best Airport of The Year 2016* versi *Bandara Award* yang diraih oleh Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.
- Bandara Adi Soemarmo mendapat Peringkat I Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016.
- PT Angkasa Pura I (Persero) mendapatkan *Top IT and TELCO 2016* untuk kategori "*Top IT Implementation on Airport Sector*"
- Bandara SAMS Sepinggan meraih predikat Bandara Terbaik Indonesia 2016 – versi Majalah Bandara.
- PT Angkasa Pura I (Persero) mendapat Apresiasi *Corporate Social Responsibility Award 2016* dari Koran Sindo dan Sindo Weekly.
- Bandara Adi Sutjipto mendapat Apresiasi *Corporate Social Responsibility Award 2016* dari Koran Sindo dan Sindo Weekly.

The commitment of PT Angkasa Pura I (Persero) in implementing GCG has delivered a very satisfying and acknowledged performance by external parties.

- Total Assets increases by 41.53%.
- Aeronautics Revenue increases by 14.49%.
- Non-Aeronautics Revenue increases by 20.61%.
- Current Year Net Income increases by 37.72%.
- Current Year Comprehensive Income increases by 57.42%.
- PT Angkasa Pura I (Persero) earned the third place of 2015 Annual Report Award (ARA) for the Category of Non-listed Financial State-owned Enterprise.
- The Most Improved Airport in Asia-Pacific 2016 title is awarded to Sultan Hasanuddin Airport, Makassar.
- *The 3rd World Best Airport 2015 and The 3rd World Best Airport 2016 for the category of airport with annual traffic of 15-25 million passengers from Airport Service Quality (ASQ) Award held by Airport Council International (ACI)* were earned and maintained for two consecutive years by I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali.
- The Most Punctual Airport 2016 title from OAG Punctuality League 2016 for the category of large airport assessed by United Kingdom-based air travel analyst agency, OAG, was earned by Juanda Airport, Surabaya;
- The Best of The Best Airport of The Year 2016 title from Bandara Award was earned by Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport, Balikpapan.
- Adi Soemarmo Airport earned the first place of 2016 National Healthy Sea Port and Airport Award.
- PT Angkasa Pura I (Persero) earned Top IT and TELCO 2016 award for the category of Top IT Implementation on Airport Sector.
- SAMS Airport, Sepinggan, was awarded with the title of 2016 Indonesian Best Airport from Majalah Bandara.
- PT Angkasa Pura I (Persero) was given appreciation of Corporate Social Responsibility Award 2016 from Sindo and Sindo Weekly newspaper.
- Adi Sutjipto Airport was given appreciation of Corporate Social Responsibility Award 2016 from Sindo and Sindo Weekly newspaper.

Manfaat Implementasi *Good Corporate Governance* Bagi PT Angkasa Pura I (Persero)

The Benefits Of Good Corporate Governance For PT Angkasa Pura I (Persero)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya guna dapat bersaing dalam persaingan global. Dengan adanya GCG Perseroan dapat membangun kondisi Perseroan yang tangguh dan *sustainable*.

GCG bagi PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan sebuah kebutuhan. Perseroan sangat merasakan manfaat dari implementasi GCG. Dengan menerapkan GCG maka keselarasan tujuan Perseroan dengan tujuan para *stakeholders*nya akan terjalin dengan baik. Dengan adanya keselarasan tujuan maka akan tercipta iklim bisnis yang kondusif dan selanjutnya akan mendorong peningkatan kinerja.

Dalam rangka mematuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional dan pada akhirnya dapat membuat BUMN dapat bersaing secara global. PT Angkasa Pura I (Persero) selalu menjalankan prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan juga Kewajaran. Pada penerapannya, Perseroan telah membuat komitmen yang telah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan untuk menerapkan GCG guna menjamin dicapainya pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Tuntutan atas terwujudnya lalu lintas udara yang aman dan lancar di sebagian wilayah udara Republik Indonesia melalui penyelenggaraan kebandarudaraan yang mampu menjadi bandar udara tujuan dan transit pilihan bagi maskapai penerbangan domestik dan internasional yang semakin meningkat. Hal tersebut membuat PT Angkasa Pura I (Persero) harus memberikan pelayanan di bidang pelayanan kebandarudaraan yang aman, teratur, nyaman, ramah, efisien, cepat, dan efektif di semua bandar udara yang dikelola Perseroan.

PT Angkasa Pura I (Persero) menyadari bahwa penyelenggaraan kinerja operasi kebandarudaraan yang baik akan membawa pada peningkatan kinerja keuangan bagi Pemegang Saham secara berkesinambungan serta peningkatan citra Perseroan di mata masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip GCG sudah menjadi kewajiban bagi manajemen Perseroan dalam meningkatkan kinerja jangka panjang.

Currently, the implementation of GCG is necessary for every company in its business to compete globally. By implementing GCG, a corporate can build a strong and sustainable condition.

For PT Angkasa Pura I (Persero), GCG is a need. The Company greatly benefits from the implementation of GCG. With the implementation of GCG, the objectives of the Company can be aligned with the objectives of the stakeholders. With the alignment of such interest, a healthy business climate will develop and will further boost performance.

In order to comply with the Regulation of Minister of State-owned Enterprise Number: PER — 01 /MBU/2011 concerning Good Corporate Governance, and its amendment stated in the Regulation of State Minister of State-owned Enterprise Number: PER-09/MBU/2012 on 6 July 2012 which aims to optimize the company value, promote a professional state-owned enterprise management, and ultimately promote state-owned enterprise to be able to compete globally. PT Angkasa Pura I (Persero) always operates with the principles of GCG that include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. In its execution, The Company has made an approved commitment by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees to implement GCG for the sustainable growth of the Company.

There is an increased demand of safe and smooth air traffic in most of the airspace of the Republic of Indonesia through the airport operation with the capability of providing preferred destination and transit airports for domestic and international Indonesian airlines. PT Angkasa Pura I (Persero) then feels obliged to provide safe, systematic, comfortable, friendly, efficient, fast, and effective airport services in all airports managed by the Company.

PT Angkasa Pura I (Persero) is aware that the implementation of good performance of airport operation will lead to sustainable improvement of financial performance for the Shareholders as well as the improvement of the Company's public image. Therefore, the management of the Company based on the principles of GCG has become a responsibility for the Company management in improving its performance in a long-term basis.

Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan GCG tersebut, Perseroan telah merasakan manfaatnya antara lain melalui adanya peningkatan kepercayaan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya, antara lain karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat dan lainnya sehingga tercipta pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

The Company has benefited from its commitment to and compliance with GCG implementation, such as the increased trust of the the Shareholders and other stakeholders, including employees, customers, suppliers, public, and others for sustainable long-term growth.

Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

The Purpose of Good Corporate Governance Implementation

Penerapan GCG di PT Angkasa Pura I (Persero) ditujukan untuk:

1. Memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian pengelola perusahaan;
3. Mendorong agar pengelola Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

The implementation of GCG by PT Angkasa Pura I (Persero) is intended to:

1. Maximize the Value of the Company by improving the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness so that the company has a strong national and international competitiveness;
2. Promote the management of the Company in a professional, transparent, and efficient manner, as well as empower the function and independence of the company management;
3. Encourage the management of the Company to make decisions and perform actions based on high moral and compliance with the applicable regulations of law and the awareness of the Company social responsibility towards the stakeholders as well as the preservation of the Company's environment;
4. Increase the company's contribution to the national economy;
5. Increase the national investment climate.



Dasar Penerapan *Good Corporate Governance*

The Foundation of Good Corporate Governance Implementation

Penerapan GCG di PT Angkasa Pura I (Persero) mengacu kepada beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG).

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan implementasi GCG, Perseroan juga melakukan penelaahan terhadap praktik-praktik bisnis terbaik yang meliputi antara lain:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *Stated Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD); dan
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman tersebut ke dalam kebijakan internal Perseroan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh *human capital* Perseroan. Komitmen terhadap penerapan GCG tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

The implementation of GCG in PT Angkasa Pura I (Persero) refers to several applicable regulations as follows:

1. Law Number 19 of 2003 on State-owned Enterprises;
2. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
3. Regulation of Indonesian Government Number 45 of 2001 on the amendment of the Government Regulation Number 12 of 1998 on Limited Liability Company (Persero);
4. Regulation of Minister of State-owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 on 1 August 2011 on The Implementation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprise, and its amendment stated in the Regulation of State Minister of State-owned Enterprise Number: PER-09/M-MBU/2012 on 6 July 2012;
5. Decree of Secretary of the Ministry of State-owned Enterprise Number: SK-16/S.MBU/2012 on 6 June 2012 on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprise;
6. Regulation of Financial Service Authority No.8/POJK.04/2015 on the Website of Issuer or Public Company.
7. Regulation of Financial Service Authority No.31/POJK.04/2015 on the Transparency of Information or Material Facts of Issuer or Public Company
8. Indonesian GCG Guidelines developed by the National Committee of Governance Policy (Komite Nasional Kebijakan *Governance*/KNKKG).

Additionally, to further streamline of the implementation of GCG, the Company also conducted a review of best business practices that include, among others:

1. The principles of Corporate Governance for Stated Owned Enterprise developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD); and
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*

The internalization of various regulations and guidelines into the internal policy of the Company is the commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors and the entire of the Company's *human capital*. Such commitment to the implementation of GCG is shown as follows.



Komitmen PT Angkasa Pura I (Persero) dalam menerapkan GCG ditunjukkan dari Visi, Misi dan Nilai Budaya Perseroan. Visi Perseroan untuk menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandar udara terbaik di Asia diwujudkan dalam Misi Perseroan dengan didasarkan pada nilai Budaya Perseroan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang pada asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*.

The commitment of PT Angkasa Pura I (Persero) in implementing GCG is reflected from the Vision, Mission, and the Value of the Company Culture. The Company's vision to become one of the ten best airport management company in Asia is realized in the Company's mission, based on the value of the Company Culture. In achieving the Vision and accomplishing the Mission, the Company constantly adheres to the principles of GCG, which are transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Berdasarkan asas-asas GCG, Perseroan mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

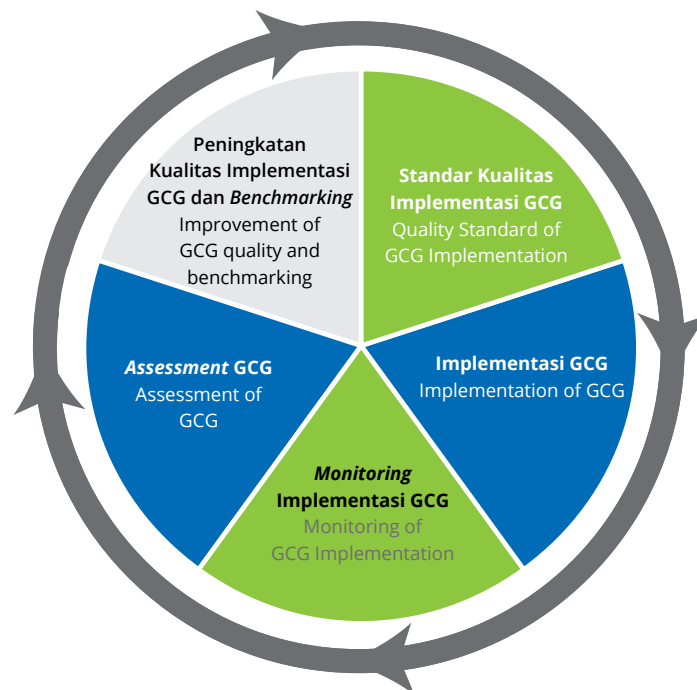
Based on those principles, the Company has developed a corporate governance structure that includes the main organs and supporting organs in order to perform GCG mechanisms in accordance with applicable regulations of law and the existing best practices. By performing its business activities based on the principles of GCG, it is expected that a long-term business sustainability is achieved.

Peningkatan Kualitas *Good Corporate Governance* Secara Berkelanjutan

Continuous Quality Improvement of Good Corporate Governance

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di PT Angkasa Pura I (Persero) berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *human capital* pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut.

In principle, GCG is well-implemented by PT Angkasa Pura I (Persero) by the Board of Commissioners, Board of Directors, and the entire human capital in any activity with the aim to serve the interests of the Company, shareholders, and stakeholders. The implementation mechanism of GCG is described in the following cycle.



PENETAPAN STANDAR KUALITAS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Perseroan. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Standar implementasi juga dimaksudkan untuk memacu Perseroan untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari *stakeholders*, hasil *assessment* dan *benchmarking*.

Standar implementasi GCG di Perusahaan khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Standar penerapan GCG tersebut meliputi:

1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
4. Aspek Direksi
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.

PELAKSANAAN DAN PEMONITORAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan dan pemantauan implementasi GCG memerlukan pembentukan dan penguatan GCG melalui organ Perseroan dan *infrastructure*. Organ Perseroan dapat didefinisikan sebagai suatu cara bagaimana aktivitas organisasi Perseroan dibagi, diorganisir dan dikoordinasikan. Melalui pembentukan dan penguatan Organ Perseroan, maka peran dan fungsi masing-masing organ akan menjadi jelas dan tegas. Sedangkan, *infrastructure* adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan aktivitas usaha. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan, maka Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi GCG.

Monitoring dari pelaksanaan implementasi GCG dilakukan oleh *Corporate Administration Department* yang berada di bawah *Corporate Secretary*. Adapun Program kerja yang dilakukan oleh *Corporate Administration Department* dalam *monitoring* pelaksanaan implementasi GCG di PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai berikut.

DETERMINATION OF QUALITY STANDARDS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

GCG implementation standards are required as a model of reference in order to achieve the Vision and accomplish the Mission. The reference model includes the criteria that will be achieved from the various aspects related to the implementation of GCG. The standards of implementation are also intended to improve the quality of GCG implementation by the company. Such standards are formulated based on the relevant regulations, input from the stakeholders, and the result of assessment and benchmarking.

Standard implementation of GCG in company particularly refers to the Regulation of Minister of State-owned Enterprise Number: PER-09/MBU/2012 on 6 July 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprises, and Decree of Secretary of the Ministry of State-owned Enterprise Number: SK-16/S.MBU/2012 on 6 June 2012 on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprise. The standards of GCG implementation cover:

1. Aspect of Commitment to The Continuous Implementation of Good Corporate Government
2. Aspect of Shareholders and General Meeting of Shareholders/Capital Owners
3. Aspect of Board of Commissioners/Supervisory Board
4. Aspect of Board of Directors
5. Aspect of Disclosure of Information and Transparency
6. Other aspects such as the reporting on the Company sustainability and ability as a benchmark in its field.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION AND MONITORING

GCG implementation and its implementation requires the establishment and strengthening of GCG through the Company organs and infrastructure. Company organ is defined as a means in distributing, organizing, and coordinating company activities. By establishing and strengthening company organs, the role and function of each organ will be clear and firm. Whereas, infrastructure is a set of Company rules and policies in conducting business activities. To ensure that the established standards are implemented, met, evaluated, and improved, the company conducts monitoring and evaluation of GCG implementation

GCG implementation monitoring is conducted by the Corporate Administration Department under the Corporate Secretary. As for the work programs carried out by the Corporate Administration Department in monitoring GCG implementation in Angkasa Pura Airports are as follows.

1. Melakukan *assessment* GCG.
2. Memantau dan menganalisis setiap kebijakan terbaru maupun *best practice* terkait penerapan GCG.
3. Melakukan *review document* GCG yang sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan.
4. Melakukan survei BUMN Bersih sesuai SE.05/MBU/2013 tentang *roadmap* menuju BUMN Bersih, untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG secara administrasi maupun substantif serta mewujudkan BUMN yang tangguh, profesional, unggul dan bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi).
5. *Monitoring* atas Laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) sesuai KEP.90/OM.07/2014 tentang pedoman pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan PT PT Angkasa Pura I (Persero) I dalam mendukung program KPK mewujudkan transparansi penyelenggara Negara, aplikasi dalam penerapan GCG, serta mendukung kegiatan BUMN Bersih dari kementerian Negara BUMN.
6. Melakukan pendampingan dan pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi baru ke unit kerja pusat dan kantor Cabang.

Selain itu, *monitoring* dari pelaksanaan implementasi GCG dilakukan oleh Komite Risiko Usaha dan GCG. Program kerja yang dilakukan Komite Risiko Usaha dan GCG terkait dengan pemantauan pelaksanaan GCG, yaitu:

1. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh eksternal konsultan.
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi berdasarkan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan pelanggaran etika dan pelanggaran praktik GCG yang terjadi di Perseroan.
3. Mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan terhadap pedoman-pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.
4. Memberikan nasehat, masukan, dan rekomendasi kepada Direksi mengenai standar-standar praktik terbaik penerapan GCG di Perseroan.
5. Membantu tugas Direksi dalam pembinaan dan pengawasan efektivitas penerapan praktik GCG di Perseroan sebagai upaya meningkatkan nilai Pemegang Saham, termasuk sosialisasi dan internalisasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan GCG oleh Organ Utama dan Organ Pendukung serta memberikan masukan penyempurnaan serta upaya-upaya pemantapannya.
7. Menyusun mekanisme *reward and punishment* secara konsisten terkait penerapan praktik GCG di Perseroan.

1. Conducting GCG assesment
2. Monitoring and analyzing every new policy or best practice related to GCG implementation.
3. Reviewing document of GCG in accordance with the Company's business development.
4. Conducting survey of Clean State-owned Enterprise in accordance with SE.05/MBU/2013 on the road map towards Clean State-owned Enterprise, to improve the quality of GCG implementation administratively and substantially, as well as promote a strong, professional, excellent, and dignified State-owned Enterprise (free of all any form of fraud and corruption).
5. Monitoring the reports on State Officials Wealth Report (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN) in accordance with KEP.90/OM.07/2014 on state officials wealth report reporting guidelines in PT Angkasa PuraAirports I (Persero) in favor of the Commission program to promotethe transparency of State administrators, the execution of GCG implementation, and the activities of Clean State-owned Enterprise of State ministry of State-owned Enterprise.
6. Providing assistance and the introduction of a new Board of Commissioners and Board of Directors to the head work unit and branch offices.

In addition, the monitoring of GCG implementation is conducted by the Committee of Business Risk and GCG. The work programs of the Committee associated with the monitoring of GCG implementation are:

1. Evaluate policies on GCG and Ethical Standards as well as the follow-up actions on the assessments result conducted by external consultants
2. Conduct investigation and verification based on the findings in the field related to violations on ethics and GCG practices in the Company
3. Evaluate and improve the guidelines associated with GCG implementation at least once every 1 (one) year or adjusted to the needs of the Company.
4. Provide advices, inputs, and recommendations to the Board of Directors concerning best practice standards of GCG implementation in the Company.
5. Assist the Board of Directors in performing its duties in coaching and monitoring the effectiveness of the practice of GCG implementation in the Company as an effort to increase the value of Shareholders, including dissemination and internalization.
6. Evaluate the effectiveness of GCG implementation by Main Organ and Supporting Organ, and provide inputs on improvement and required supporting actions.
7. Establish a reward-and-punishment mechanism consistently related to the GCG implementation practices in the Company.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GCG *Assessment* merupakan upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara efektif. *Assessment* menjadi bagian dari mekanisme *check and balances*. Dengan *assessment*, maka capaian kegiatan dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan.

PT Angkasa Pura I (Persero) secara berkala melakukan pengukuran implementasi GCG (*GCG assessment*) di Perseroan sejak tahun 2007. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai implementasi GCG di perusahaan. *Assessment* GCG di Perseroan dapat dilakukan secara mandiri oleh internal Perseroan (*self assessment*) ataupun dengan menggunakan jasa pihak independen (evaluasi eksternal).

Adapun pencapaian hasil GCG *assessment* PT Angkasa Pura I (Persero) dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GCG *Assessment* is a systematic effort to collect and process reliable and valid data (facts and information) to conclude a finding as a basis for management measures in order to conduct effective GCG implementation. *Assessment* is a part of check-and-balance mechanism. With the assessment, the outcome of an activity can be measured accurately and further measure to improve the performance of an activity can be determined.

PT Angkasa Pura I (Persero) constantly conducts GCG assessment since 2007. This is performed to obtain objective assessment of GCG implementation in the company. GCG *Assessment* in the Company can be carried out internally (*self-assessment*), or externally by employing the service of an independent party.

As for the achievement of GCG assessment results of PT Angkasa Pura I (Persero) within the last 5 (five) years is as follows.

Tabel Assessment GCG / Table of GCG Assessment Result

Tahun Pelaksanaan Assessment GCG Year of GCG Assessment implementation	Skor Assessment GCG GCG assessment score	Kategori Category	Pelaksana Assessor
2016	90,83	Sangat Baik / Very Good	PT Adikarya Gemilang Solusindo Consultant
2015	90,46	Sangat Baik / Very Good	PT Bumi Pertiwi Mandiri Consultant
2014	84,05	Baik / Good	<i>Self assessment</i> dengan didampingi Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan / Self assessment accompanied by Accounting and Finance Development Centre
2013	74,24	Cukup Baik / Fairly Good	BPKP DKI Jakarta
2012*	Review dokumen GCG GCG Document Review	Memperbaiki Skor / Improving Score	Pihak Internal dan BPKP DKI Jakarta / The Internal Parties and BPKP DKI Jakarta

**Review* hasil *assessment* GCG tahun sebelumnya (berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011) dengan melakukan penyempurnaan dokumen terkait GCG dengan bantuan BPKP DKI Jakarta. / * *Review* of GCG assessment result of the previous year (in compliance with the Regulation of Minister of State-owned Enterprise Number: PER-01/MBU/2011) by making improvements on GCG-related documents with the assistance of BPKP DKI Jakarta.

Pada tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan GCG *assessment* yang dilaksanakan oleh konsultan eksternal PT Adikarya Gemilang Solusindo. Pelaksanaan GCG *assessment* tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) conducted GCG assessment carried out by external consultant, PT Adikarya Gemilang Solusindo. The GCG assessment is implemented in compliance with Decree of Secretary of the Ministry of State-owned Enterprise Number: SK-16/S.MBU/2012 on 6 June 2012 on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprise. The indicators used in the GCG assessment include:

1. Commitment to the continuous implementation of good corporate government;
2. Shareholders and general meeting of shareholders/capital owners;

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; serta
6. Aspek lainnya.

3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Disclosure of Information and transparency; and
6. Other aspects.

Hasil GCG *assessment* PT Angkasa Pura I (Persero) pada 2016 sebagai berikut.

The result of 2016 GCG *assessment* of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows.

Tabel Hasil Assessment GCG / Table of GCG Assessment Result

No.	Kriteria Criteria	Bobot Value	Skor Score	Capaian Achievement
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment to The Continuous Implementation of Good Corporate Government	7%	5,49	75,44%
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and General Meeting of Shareholders/Capital Owners	9%	8,81	97,91%
3.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	35%	32,85	93,86%
4.	Direksi / Board of Directors	9%	8,06	89,55%
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information disclosure and Transparency	5%	1,88	37,50%
Skor Keseluruhan / Overall Score		100,00	90,83	90,83 %
Kualitas Penerapan GCG / GCG implementation quality		SANGAT BAIK / VERY GOOD		

REKOMENDASI HASIL GCG ASSESSMENT DAN TINDAK LANJUTNYA

Beberapa kelemahan pelaksanaan *good corporate governance* yang berhasil diidentifikasi dari proses *assessment* GCG selanjutnya direkomendasikan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas implementasi GCG kedepannya.

Beberapa kelemahan yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan perbaikan adalah sebagai berikut:

RECOMMENDATION OF GCG ASSESSMENT RESULT AND THE FOLLOW-UP ACTION

Several weaknesses of GCG implementation identified from GCG *assessment* are recommended to be followed up in order to improve the quality of GCG implementation in the future.

The weaknesses on which are recommended to conduct corrective measures are as follows:

REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP ACTION
Perseroan agar memuat kebijakan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, Benturan Kepentingan, IT <i>Governance</i> , Kebijakan Informasi, HSE, dan Pengukuran terhadap penerapan GCG <i>Code</i> , <i>Code of Corporate Governance</i> . / The company shall cover the policy on the Board of Commissioners, the Board of Directors, Conflict of Interest, IT Governance, Information Policy, HSE, and Measurement on the implementation of GCG Code, Code of Corporate Governance.	Perseroan merencanakan untuk memutakhirkan pedoman terkait GCG <i>Code</i> . / The Company plans to update the guidelines related to the GCG Code.
Perseroan agar membuat secara khusus kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku. / The company shall specifically make additional policy and guideline that provide further details on issues stated in the Code of Conduct.	Perseroan merencanakan untuk memutakhirkan pedoman perilaku. / The Company plans to update the guidelines related to the code of conduct.
Perseroan agar membuat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. / The company shall make policy/regulation on the penalties to the State Official who has not presented LHKPN in accordance with the applicable regulation of law.	Perseroan merencanakan untuk memutakhirkan pedoman terkait peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. / The company plans to make policy/regulation on the penalties to the State Official who has not presented LHKPN in accordance with the applicable regulation of law.

REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP ACTION
<p>Perseroan agar membuat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada <i>stakeholder</i> eksternal Perseroan. / The company shall make dissemination on Gratuity Control to the external stakeholders of the Company.</p>	<p>Pada tahun 2016 belum dilakukan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada <i>stakeholder</i> eksternal Perseroan. Akan tetapi ditahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) telah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan <i>Workshop</i> Kolaborasi Tunas Integritas Nasional di Lombok dengan tema Akselerasi Pembangunan Budaya Integritas yang dihadiri oleh ± 120 KLOP (Kementerian, Lembaga, Organisasi Lainnya dan Pemerintah Daerah). / Dissemination on Gratuity Control to the external stakeholders of the Company has not been conducted in 2016. However, PT Angkasa Pura I (Persero) became a host of a National Integrity Successor Collaboration Workshop in Lombok with the theme of Acceleration on Integrity Culture Development attended by ± KLOP (Kementerian, Lembaga, Organisasi Lainnya dan Pemerintah Daerah/Ministry, Agency, Other organization, and Local Governments) in 2016.</p>
<p>Perseroan agar segera mensahkan kebijakan <i>whistleblowing system</i> yang telah dibuat. / The Company shall ratify the policy on whistleblowing system that has been made.</p>	<p>PT Angkasa Pura I (Persero) telah berkomitmen untuk membangun Sistem pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>). Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) telah dituangkan pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.192/PG.01/2016 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>). PT Angkasa Pura I (Persero) has committed to build Whistleblowing System. The Whistleblowing System has been stipulated in Decree of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) Number: KEP.192/PG.01/2016 on the Guideline of Whistleblowing System.</p>
<p>Perseroan agar mengembangkan sarana/media Perseroan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>Whistleblowing System</i>. / The Company shall develop sufficient facility/media to support the implementation of Whistleblowing System policy.</p>	<p>Pada tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengembangkan aplikasi pelaporan pelanggaran berbasis <i>website</i> yang dapat digunakan pihak internal maupun eksternal Perseroan sebagai media untuk melaporkan pelanggaran, aplikasi ini dapat diakses melalui alamat http://wbs.ap1.co.id/. Pada tahun 2017 direncanakan akan dilakukan sosialisasi aplikasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) baik ke internal maupun <i>stakeholder</i> eksternal PT Angkasa Pura I (Persero). / In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) has developed a website-based application for reporting violation that can be utilized by internal or external parties of the Company as a media to report violation. This application can be accessed from http://wbs.ap1.co.id/. It is planned that the dissemination of the Whistleblowing System application will be conducted in 2017 for both internal or external stakeholders of PT Angkasa Pura I (Persero)..</p>
<p>RUPS/Pemilik Modal agar melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris. / General Meeting of Shareholders/Capital Owner shall conduct assessment on the candidates of Board of Commissioners member.</p>	<p>Telah di bahas dalam RUPS. / Already discussed in General Meeting of Shareholders</p>
<p>Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal agar tepat waktu dalam pengesahan/persetujuan rancangan RKAP. / General Meeting of Shareholders/Capital Owner shall ratify/approve the draft of Work Plan and Budget in a timely manner.</p>	<p>Telah di bahas dalam RUPS. / Already discussed in General Meeting of Shareholders</p>
<p>RUPS/Pemilik Modal agar tepat waktu dalam Persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal. / General Meeting of Shareholders/Capital Owner shall ratify/approve the proposed corporate actions that require approval from General Meeting of Shareholders/Capital Owner in a timely manner.</p>	<p>Telah di bahas dalam RUPS. / Already discussed in General Meeting of Shareholders</p>
<p>Dewan Komisaris agar mengikuti pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris yang telah dibuat, serta membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani oleh Dewan Komisaris. / The Board of Commissioners shall participate in the training for its members according to the work plan of Board of Commissioners that has been made, and provide training report afterward.</p>	<p>Program Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris telah terealisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Kerja Dewan Komisaris tahun 2016. / Competence Development and Improvement for the Board of Commissioners members has been realized according to the 2016 Work Plan and Budget of Board of Commissioners.</p>
<p>Dewan Komisaris agar menyusun pedoman yang mengatur mengenai pengambilan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain). / The Board of Commissioners shall draft a guideline that regulates the decision making by Board of Commissioner outside the meeting (by circular and others).</p>	<p>Perseroan merencanakan untuk memutakhirkan <i>board manual</i> Dewan Komisaris. / The Company plans to update the board manual for Board of Commissioners</p>

REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP ACTION
<p>Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. /</p> <p>The Board of Commissioners shall draft policy/guideline related to the form of either regular or incidental information, the time of presentation, and the mechanism of submission of such information by the Board of Directors</p>	<p>Perseroan merencanakan untuk memutakhirkan <i>board manual</i> Dewan Komisaris. /</p> <p>The Company plans to update the board manual of Board of Commissioners</p>
<p>Dewan Komisaris agar menyusun mekanisme khusus untuk merespon/ menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari <i>stakeholder</i> dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. / The Board of Commissioners shall draft specific mechanism to respond/follow up any suggestion, issue, or complaint from the stakeholders and present the required solution to the Board of Directors.</p>	<p>Perseroan merencanakan untuk memutakhirkan <i>board manual</i> Dewan Komisaris. /</p> <p>The Company plans to update the board manual for Board of Commissioners</p>
<p>Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja secara khusus mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perseroan dan pelaksanaannya serta agar dilakukan telaah secara khusus terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi di Perseroan.</p> <p>The Board of Commissioners shall specifically draft work plan concerning the supervision and provision of advices on the Company' information and technology system policy and its implementation, and specifically conduct study on such policy and its implementation.</p>	<p>Pembahasan implementasi sistem teknologi informasi telah masuk dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016. /</p> <p>The discussion on the implementation of information and technology system has been incorporated in 2016 Board of Commissioners Work Plan.</p>
<p>Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja secara khusus mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dewan Komisaris juga agar melakukan telaah secara khusus terhadap kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya. /</p> <p>The Board of Commissioners shall specifically draft work plan concerning the supervision and provision of advices on the human capital policy and its implementation. The Board of Commissioners shall also specifically study the policy on career development and its implementation.</p>	<p>Pembahasan Implementasi dan evaluasi pengelolaan SDM telah masuk dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016. /</p> <p>The discussion on the implementation and evaluation of human capital management has been incorporated in Board of Commissioners' Work Plan of 2016.</p>
<p>Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja secara khusus mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, serta agar melakukan pembahasan secara khusus terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. /</p> <p>The Board of Commissioners shall specifically draft work plan concerning the supervision and provision of advices on procurement policy and implementation, and conduct specific discussion on such policy and its implementation.</p>	<p>Pengawasan dan pemantauan serta <i>monitoring</i> atas aspek yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa telah masuk dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016. /</p> <p>The supervision and monitoring on the aspects relating to the Procurement of Goods and Services has been incorporated in Board of Commissioners' Work Plan of 2016.</p>
<p>Komisaris Utama agar menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I sampai dengan Triwulan III setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi. /</p> <p>The President of Commissioners shall execute the First to Third Trimester Management Reports after evaluated/discussed by the Board of Commissioners and Board of Directors.</p>	<p>Untuk Laporan Manajemen Triwulanan I sampai dengan Triwulan III (Laporan Manajemen Tahunan 2017) akan ditandatangani oleh Komisaris Utama. /</p> <p>The First to Third Trimester Management Reports (Annual Management Report of 2017) will be executed by the President Commissioner.</p>
<p>Dewan Komisaris agar memberikan tanggapan terhadap usulan Direksi paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. / The Board of Commissioners shall provide response to the proposal of Board of Commissioners no later than 14 days after the complete proposal or document is received by the Board of Commissioners.</p>	<p>Dewan Komisaris akan menanggapi usulan Direksi paling lambat 14 hari kerja, sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. /</p> <p>The Board of Commissioners will respond to the proposal of Board of Commissioners no later than 14 working days, after the complete proposal or document is received by the Board of Commissioners.</p>
<p>Dewan Komisaris agar memasukkan rencana kerja terkait pengusulan remunerasi Direksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. / The Board of Commissioners shall incorporate the work plan related to the recommendation of the remuneration for the Board of Directors in Work Plan and Budget of Board of Commissioners.</p>	<p>Pembahasan remunerasi Direksi telah masuk dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016. /</p> <p>The discussion on the remuneration for the Board of Directors has been incorporated in 2016 Board of Commissioners Work Plan.</p>
<p>Dewan Komisaris agar memberikan penjelasan alasan ketidakhadiran pada rapat Dewan Komisaris dalam surat kuasa Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat. /</p> <p>The Board of Commissioners shall clarify the reason of absence in the meeting of Board of Commissioners in the power of attorney of Board of Commissioners and stated in the Minutes of Meeting.</p>	<p>Untuk tahun 2017, untuk ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam rapat Internal akan dibuat alasan ketidakhadiran (Seperti Dinas Luar/Cuti/Sakit/dan lain-lain). /</p> <p>For 2017, the reason of absence of Board of Commissioners in the internal meeting will be stated (Such as Official Travel/On Leave/Sick Leave/and others)</p>

REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP ACTION
<p>Direksi agar melakukan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program <i>training</i>/pengembangan kompetensi untuk seluruh anggota Direksi dan menyusun laporan tentang hasil pelatihan. / The Board of Directors shall determine the Work Plan and Budget and competence training/development for all Board of Directors members and provide training report afterward.</p>	<p><i>Corporate Secretary</i> telah mengajukan RKA untuk program <i>training</i>/pengembangan kompetensi Direksi untuk tahun 2017. / The Corporate Secretary has proposed Work Plan and Budget for competence training/development for all Board of Directors members for 2017.</p>
<p>Mekanisme pengambilan keputusan Direksi atas tindakan Perseroan (<i>corporate action</i>) agar mengatur tentang standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan dan ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ ditandatangani. / The mechanism of decision making by the Board of Directors on corporate actions shall regulate the immediacy standard of decision making and the immediacy provision to communicate the decision to the related organization level under the Board of Directors no later than 7 (seven) days after the ratification/execution of such decision.</p>	<p>Akan dimasukkan dalam <i>review</i> dokumen GCG (<i>review board manual</i>) tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Direksi. / This matter will be included in the review of GCG documents (Board Manual Review) on the Mechanism of Decision Making by The Board of Directors.</p>
<p>Penyampaian RKAP dari Direksi kepada Dewan Komisaris agar dilaksanakan tepat waktu dari jadwal yang ditentukan. / The submission of the Company's Work Plan and Budget from the Board of Directors to the Board of Commissioners shall be conducted in timely manner according to the schedule.</p>	<p>Penyampaian RKAP telah dilakukan sesuai jadwal. / The Company's Work Plan and Budget has been submitted on schedule.</p>
<p>Direksi agar melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris. / The Board of Directors shall report the implementation of information technology system to the Board of Commissioners.</p>	<p>Laporan Mingguan telah disampaikan ke Direktur terkait. / Weekly Report has been submitted to the associated Director.</p>
<p>Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) agar dipublikasikan/dapat diakses pemasok/calon pemasok di <i>website</i> Perseroan. / The Guideline of Procurement of Goods/Services in the Environment of PT Angkasa Pura I (Persero) shall be published/made accessible for the supplier/potential supplier in the Company's website.</p>	<p>Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) telah dipublikasikan di <i>website</i> resmi PT Angkasa Pura I (Persero) melalui tautan https://eproc.angkasapura1.co.id/ The Guideline of Procurement of Goods/Services in the Environment of PT Angkasa Pura I (Persero) has been published in the official website of PT Angkasa Pura I (Persero) https://eproc.angkasapura1.co.id/</p>
<p>Direksi agar meningkatkan kinerja Perseroan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya. / The Board of Directors shall improve the performance of the Company (based on the established Key Performance Indicator/KPI) in the future.</p>	<p>Direksi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan sesuai KPI yang ditetapkan. / The Board of Directors always puts an effort to improve the performance of the Company based on the established KPI.</p>
<p>Direksi agar meningkatkan upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan. / The Board of Directors shall consistently and continuously increase the value of the Shareholders.</p>	<p>Direksi akan selalu berupaya untuk meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham. / The Board of Directors will always put its best effort increase the value of the Shareholders.</p>
<p>Direksi agar menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perseroan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus. / The Board of Directors shall submit the report of Shareholding Directors of the Company and of the other companies to the Company (Company Secretary) to be listed in the Special List.</p>	<p>Akan dibuat daftar khusus Kepemilikan Saham Direksi pada Perseroan dan perusahaan lainnya./ A Special List enlisting the Member of Board of Directors as the Shareholder of the Company and the other company will be made.</p>
<p>Direksi agar menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan belum disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris tepat waktu dan Laporan Manajemen Triwulanan agar ditandatangani oleh Dewan Komisaris. / The Board of Directors shall submit Trimester and Annual Management Reports that have not been submitted to the Shareholders and Board of Commissioners in a timely manner so that the the Board of Commissioners may execute the Trimester Management Report.</p>	<p>Penyampaian Laporan Manajemen sudah dilakukan secara tepat waktu ke dalam PORTAL BUMN. / The Management Reports have been submitted into PORTAL BUMN in a timely manner.</p>
<p>Sekretaris Perusahaan agar membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus. / The Company Secretary shall make, maintain, and store the Special List.</p>	<p>Setelah daftar Kepemilikan Saham Direksi dibuat akan di simpan di Sekretaris Perusahaan. / After the list of Shareholding Directors is made, it will be stored by the Company Secretary.</p>
<p>Direksi agar secara khusus mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan melalui capaian kinerja Unit Sekretaris Perusahaan (KPI Sekretaris Perusahaan) secara berkala. / The Board of Directors shall specifically evaluate the function quality of company secretary through the performance achievement of the Company Secretary Unit (Company Secretary KPI) on a regular basis.</p>	<p>Direksi selalu mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan melalui capaian KPI secara berkala. / The Board of Directors always performs the quality of company secretary function through the KPI achievement on a regular basis.</p>

REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP ACTION
<p>Direksi agar mengupayakan RUPS untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan tepat waktu (paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan). / The Board of Directors shall make various efforts for the General Meeting of Shareholder on the ratification/approval of Company's Work Plan and Budget to be conducted in a timely manner (no later than the end of year, before the fiscal year begins)</p>	<p>RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2016 dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015. / General Meeting of Shareholders on the ratification of 2016 Company's Work Plan and Budget is conducted on 31 December 2015.</p>
<p>Perseroan agar mempublikasi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik (GCG Code), Board Manual, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perseroan dalam website Perseroan. / The Company shall publish GCG Implementation (GCG Code) Guideline, Board Manual, and Company Gratuity Control Program in the Company's website</p>	<p>Telah dipublikasikan di website Perseroan. / Published in the Company's website.</p>
<p>Perseroan sebaiknya mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam penghargaan di bidang laporan CSR (Sustainability Reporting Award). / The Company shall consider participating in CSR Report Award (Sustainability Reporting Award).</p>	<p>Untuk pelaporan tiap bulan sudah dilakukan, selanjutnya akan diusulkan untuk berpartisipasi dalam penghargaan di bidang CSR (Sustainability Reporting Award). / The Company has participated for monthly report, participating in CSR Report Award (Sustainability Reporting Award) will be proposed further.</p>
<p>Perseroan agar memiliki bidang/area di Perseroan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi yang menjadi best practices atau tujuan benchmark bagi perusahaan lain. / The Company shall have fields/areas, such as products, processes, supporting functions, organizational performance, or strategy, that work as best practices or for benchmarking model for other companies.</p>	<p>Seluruh Unit Kerja di Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai visi dan misi Perusahaan agar menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain. / All Work Units in the Company always make their best effort to improve the performance and service according to the Company's visions and missions for benchmarking model for other companies.</p>

PENINGKATAN KUALITAS DAN BENCHMARKING

Hasil dari evaluasi internal maupun eksternal serta ditambah dengan masukan dari seluruh *stakeholders* digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan kualitas implementasi GCG. Ada dua macam peningkatan kualitas yaitu peningkatan kualitas untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan peningkatan kualitas dalam konteks peningkatan standar kualitas yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Perseroan melakukan peningkatan kualitas implementasi GCG dengan menindaklanjuti hasil *self assessment*, temuan audit dan rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal. Adapun bentuk tindak lanjut tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan antara Direksi, Divisi Kepatuhan dan Divisi serta Komite terkait yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

Selanjutnya akan segera dilakukan tindakan koreksi yang dituangkan dalam program kerja. Pelaksanaan program kerja senantiasa dipantau kesesuaiannya sehingga akan meningkatkan kualitas implementasi GCG. Di samping itu, Perseroan juga melakukan *benchmarking* dalam rangka peningkatan kualitas GCG dengan mengikuti perkembangan *best practices* yang ada.

QUALITY IMPROVEMENT AND BENCHMARKING

The results of internal and external evaluation coupled with the advices of all stakeholders are used as consideration in improving the quality of GCG implementation. Two kinds of quality improvement are quality improvement to achieve the specified quality standards and quality improvement in the context of improving the achieved quality standards through benchmarking.

The Company improves the quality of GCG implementation by following up the results of self-assessment, audit findings, and recommendations from both internal and external auditors. As for the follow-up actions are determined from the monthly meeting that involves the Board of Directors, Division of Compliance, and related Divisions and Committees.

Furthermore, corrective actions are contained in the work program and conducted. The compliance of the work program implementation is constantly monitored to improve the quality of GCG implementation. Moreover, the Company also conducts benchmarking in order to improve GCG quality by following the development of the existing best practices.

Struktur dan Mekanisme Good Corporate Governance

Structure and Mechanism of Good Corporate Governance

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

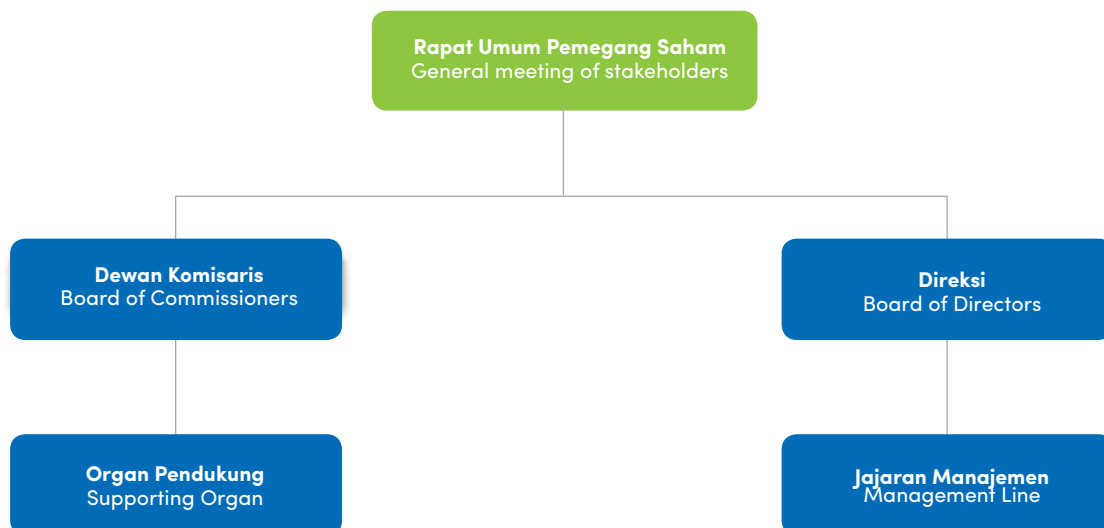
Dalam melaksanakan kepengurusan PT Angkasa Pura I (Persero), Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan GCG.

Struktur organ Perseroan PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebagai berikut.

In accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (Company Law), Company Organs consist of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Management system adheres to two-tier system; Board of Commissioners and Board of Directors, each of which has clearly defined authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in the articles of association and regulations of law. However, both hold responsibilities to maintain the business sustainability of the Company in a long-term basis. Therefore, Board of Commissioners and Board of Directors shall have common perception about vision, mission, and values of the Company.

In carrying out the management of PT Angkasa Pura I (Persero), the Board of Directors is supported by an effective management structure. In carrying out supervisory function, the Board of Commissioners is supported by the supporting organs such as the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, Business Risk Committee, and GCG.

The structure of the Company organs of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows.



Dalam pelaksanaannya, PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur GCG. Tujuan membangun infrastruktur GCG antara lain sebagai berikut.

- Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
- Menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan.
- Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Perseroan dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Infrastruktur GCG yang telah dimiliki oleh PT Angkasa Pura I (Persero) antara lain adalah:

1. Pedoman *Corporate Governance (Code of Corporate Governance)*;
2. Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*);
3. *Board Manual*;
4. Piagam Komite Audit;
5. Piagam *Internal Audit*;
6. Perjanjian Kerja Bersama 2014-2016;
7. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
8. Pedoman *Whistleblowing system*;
9. Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
10. Kebijakan-kebijakan Perseroan Lainnya dan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Pedoman dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Perseroan, serta telah menjadi landasan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi penerapannya secara kontinyu.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan

In the implementation, PT Angkasa Pura I (Persero) has several policies/guidelines in carrying out the functions and duties called GCG infrastructure. The purposes of constructing GCG infrastructure are as follows.

- Complementing the supporting policies in GCG implementation.
- Serving as a guideline for the Company in carrying out daily activities in accordance with the expected culture (*corporate culture*).
- Serving as a written commitment for all organs and organization levels of the Company in order to improve the discipline and responsibility of the Company organs to protect the interests of the stakeholders in accordance with their respective responsibilities.

GCG infrastructure owned by PT Angkasa Pura I (Persero) are among others:

1. Code of Corporate Governance;
2. Code of Conduct;
3. *Board Manual*;
4. Audit Committee Charter;
5. Internal Audit Charter;
6. Collective Labour Agreement 2014-2016;
7. Gratuity Control Guideline;
8. Whistleblowing system Guideline;
9. State Officials Wealth Report (LHKPN) Guideline;
10. Other Company Policy and Standard Operating Procedures (SOP).

Such guidelines and policies have been disseminated to the entire Board of Commissioners, Board of Directors, and the Company's human capital, and has been the basis of the Company's operational activities. The Company constantly monitors and evaluates the implementation continuously.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company Organ with the authority that is not granted to the Board of Directors nor Board of Commissioners within the limit specified in the Law and/or Articles of Association. GMS has the authority to appoint and dismiss the Board of Commissioners and Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, ratify the amendment of Articles of Association, approve the Annual Report, establish the allocations of profit, appoint a public

publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan RUPS telah melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan pemanggilan RUPS. Namun jika hal tersebut belum tersedia pada saat pemanggilan RUPS, maka bahan informasi tersebut akan disampaikan pada saat RUPS diselenggarakan.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Perseroan setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan Perseroan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP), sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

REFERENSI PERATURAN

RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. Penyelenggaraan RUPS di Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 telah diselenggarakan PT Angkasa Pura I (Persero) pada:

Hari, tanggal : Kamis, 31 Desember 2015
 Waktu : 10.00 WIB sampai selesai
 Tempat : Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat Lt. 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

Agenda RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2016.
2. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2016.

accountant, as well as determine the amount and type of compensation and facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors.

The implementation of GMS shall go through the process of announcement and calling for GMS according to applicable regulations. The required information related to the implementation of the GMS is submitted along with the calling for GMS. However, if such information is not yet available at the calling for GMS, the information will be submitted at the time of the GMS is convened.

GMS consists of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). AGMS is convened every year, which includes AGMS on the Company's Annual Report and AGMS on the Work Plan and Budget, whereas EGMS can be held at any time based on the needs for the benefit of the Company. The implementation of GMS shall go through the process of calling for GMS according to applicable regulations.

REFERENCE OF REGULATION

GMS has the authority that is not granted to the Board of Directors nor Board of Commissioners within the limit specified in the Law and/or Articles of Association. The implementation of GMS in a company refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

IMPLEMENTATION OF 2016 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

EXECUTION OF GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

2016 GMS on The Company's Work Plan and Budget was convened by PT Angkasa Pura I (Persero) on:

Time, date : Thursday, 31 December 2015
 Time : 10.00 WIB until finished Place Office of the Ministry of State-owned Enterprise Meeting Room Fl. 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta

AGENDA OF 2016 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

The agendas of the GMS are as follows:

1. The Approval/Ratification of The Company's Work Plan and Budget and Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget of 2016
2. The Establishment of Operational Aspect Indicator for the Corporate Health Level Measurement of 2016.

- | | |
|---|--|
| <p>3. Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016.</p> <p>4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan Persetujuan Realokasi Anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi Tahun 2016 untuk perubahan dan/atau penambahan program/kegiatan investasi.</p> <p>5. Persetujuan pemberian <i>Shareholder Loan</i> kepada anak perusahaan.</p> | <p>3. The Approval and Ratification of Key Performance Indicators of Board of Directors and Board of Commissioners of 2016</p> <p>4. The Authorization of the Board of Commissioners to Approve Budget Reallocation between investment programs/activities with the maximum value of 10% (ten percent) of total investment value of 2016 for the change and/or addition of the investment program/activity</p> <p>5. The Approval of Shareholder Loan provision to the subsidiaries.</p> |
|---|--|

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

RUPS RKAP (RUPS Tahunan) 2016 dihadiri oleh Komisaris Utama dan beberapa anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

ATTENDANCE RECAPITULATION OF 2016 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

2016 AGMS on The Company's Work Plan and Budget was attended by President Commissioner and several members of Board of Commissioners, including Chairman and members of Committees under the Board of Commissioners, and President Director and all members of Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Present
1.	Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner	Hadir / Present
2.	Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Tidak Hadir / Absent
3.	Selby Nugraha Rachman	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
4.	Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	Tidak Hadir / Absent
5.	Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
6.	Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Tidak Hadir / Absent
7.	Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	Tidak Hadir / Absent
8.	Novrihandri	Direktur / Company Director	Hadir / Present
9.	Mochammad Asrori	Direktur / Company Director	Hadir / Present
10.	Wendo Asrul Rose	Direktur / Company Director	Hadir / Present
11.	Polana Banguningsih Pramesti	Direktur / Company Director	Hadir / Present
12.	Adi Nugroho	Direktur / Company Director	Hadir / Present

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

Agenda Pertama

- Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - Laba Bersih Perseroan Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp855.482.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta Rupiah);
 - Laporan Posisi Keuangan per 31-12-2016 diproyeksikan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp21.338.989.000.000,- (dua puluh satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);

THE DECISIONS OF 2016 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

First Agenda

- Ratify 2016 Work Plan and Budget of PT Angkasa Pura I (Persero), with the following points:
 - The target of Company's Net Income for 2016 is Rp855,482,000,000,- (eight hundred fifty-five billion four hundred and eighty-two million Rupiah);
 - The Statement of Financial Position per 31-12-2016 is projected to be closed with Total Assets amounting Rp21,338,989,000,000,- (twenty-one trillion three hundred thirty-eight billion nine hundred and eighty-nine million Rupiah);

- c. Total Belanja Modal sebesar Rp.6.280.254.000.000,- (enam triliun dua ratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta Rupiah);
- d. Jumlah Sumber Daya Manusia diproyeksikan sebanyak 8.863 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga) orang.
- e. Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan sebesar 89 (delapan puluh sembilan) atau Sehat "AA".
2. Mengesahkan RKA-PKBL (Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tahun 2016 (dua ribu enam belas) PT Angkasa Pura I (Persero), dengan pokok-pokok:
- a. Program kemitraan:
- Total Dana Tersedia sebesar Rp28.498.000.000,- (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).
 - Total Penyaluran Dana sebesar Rp27.370.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).
 - Sisa Dana sebesar 1.128.000.000 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah).
- b. Program Bina Lingkungan:
- Total Dana Tersedia sebesar Rp25.696.000.000,- (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
 - Total Penyaluran Dana sebesar Rp21.147.000.000,- (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta Rupiah).
 - Sisa Dana sebesar Rp4.549.000.000,- (empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta Rupiah).
- c. The Amount of Total Capital Expenditure is Rp6,280,254,000,000,- (six trillion two hundred eighty billion two hundred and fifty-four million Rupiah);
- d. The Numbers of Human Capital is projected at 8,863 (eight thousand eight hundred and sixty-three) personnels.
- e. The Corporate Health Level Score is 89 (eighty-nine) or "AA" Healthy.
2. Ratify The Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget of 2016 (two thousand sixteen) of PT Angkasa Pura I (Persero), with the following points:
- a. Partnership Program
- The Total Amount of Available Fund is Rp28,498,000,000,- (twenty-eight billion four hundred and ninety-eight million Rupiah).
 - The Total Amount of Fund Distribution is Rp27,370,000,000,- (twenty-seven billion three hundred and seventy million Rupiah).
 - The amount of Fund Remainder is Rp1,128,000,000 (one billion one hundred and twenty-eight million Rupiah).
- b. Community Development Program:
- The Total Amount of Available Fund is Rp25,696,000,000,- (twenty-five billion six hundred and ninety-six million Rupiah).
 - The Total Amount of Fund Distribution is Rp21,147,000,000,- (twenty-one billion one hundred and forty-seven million Rupiah).
 - Fund Remainder is Rp4,549,000,000 (four billion five hundred and forty-nine million Rupiah).

Agenda Kedua

Penetapan target aspek operasional tahun 2016

Second Agenda

The establishment of 2016 operational aspect target

No	INDIKATOR INDICATOR	TARGET TAHUN 2016 2016 TARGET			
		BOBOT WEIGHT	SATUAN UNIT	NILAI VALUE	TARGET TARGET
ASPEK OPERASIONAL / OPERATIONAL ASPECT					
1	Customer Satisfaction Index (CSI)	15	Skala Likert (1-5)	4.33	15.00
2	Tingkat Pelayanan / Service				
	Pemeriksaan Security di Terminal / Security Inspection at Terminal	5	%	90.00	5.00
	Fasilitas Umum / Public Facility				
	Kebersihan Toilet/ Toilet Hygiene				

No	INDIKATOR INDICATOR	TARGET TAHUN 2016 2016 TARGET			
		BOBOT WEIGHT	SATUAN UNIT	NILAI VALUE	TARGET TARGET
	Bandara I Gusti Ngurah Rai / I Gusti Ngurah Rai Airport	0.75	Bintang	****	0.75
	Bandara Juanda, Sultan Hasanuddin, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Sam Ratulangi / Juanda Airport, Sultan Hasanuddin Airport, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport, Sam Ratulangi Airport	0.75		***	0.75
	Bandara Frans Kaisiepo, Adisutjipto, Adi Soemarmo, Udara Syamsudin Noor, Ahmad Yani, Internasional Lombok, Pattimura, El Tari / Frans Kaisiepo Airport, Adisutjipto Airport, Adi Soemarmo Airport, Syamsudin Noor Airport, Ahmad Yani Airport, Internasional Lombok International Airport, Pattimura Airport, El Tari Airport	1.00		**	1.00
	Tingkat Kesejukan Ruangan / Room coolness level	2.5	%	90.00	2.50
3	Pengembangan Fasilitas dan Investasi / Development of Facility and Investment				
	Pencapaian Tingkat daya serap program / Achievement of Absorptive Capacity of the Program	5	%	100.00	5.00
	Pencapaian fisik investasi dari program yang telah komitmen / Physical Achievement of the investment of committed program	5	%	75.00	5.00

Agenda Ketiga

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2016 akan diputuskan kemudian secara tersendiri.

Agenda Keempat

Menyetujui Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan realokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi tahun 2016 untuk perubahan dan/atau penambahan program/kegiatan investasi.

Agenda Kelima

Menurut pasal 11 ayat 8 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, *Shareholder Loan* cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris, sehingga tidak perlu mendapat Persetujuan dari rapat ini.

ARAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016 DAN TINDAK LANJUTNYA

Arahan RUPS RKAP tahun 2016 dan tindak lanjutnya yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Third Agenda

Establish Management Contract of 2016 between Proxies/ Representatives of Shareholders with the Board of Directors and Board of Commissioners, and 2016 Key Performance Indicators of Board of Commissioners will be determined separately.

Fourth Agenda

Approve the Authorization of the Board of Commissioners to Approve Budget Reallocation between investment programs/activities with the maximum value of 10% (ten percent) of total investment value of 2016 for the change and/or addition of the investment program/activity

Fifth Agenda

In accordance with article 11 clause 8 letter C of the Company's Articles of Association, Shareholder loan is only mandated to be reported to the Board of Commissioners, therefore approval from the meeting is not required

THE DIRECTIVES OF 2016 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET AND THE FOLLOW-UP ACTIONS

The directives of 2016 GMS on the company's work plan and budget conducted and the follow-up actions conducted until the end of 2016 are as follows.

No	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow-up Action
1	<p>Buku RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), RKA-PKBL (Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), RKA (rencana Kerja Anggaran) Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan komisaris. / The Board of Commissioners' book of Company's Work Plan and Budget, Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget, Work Plan and Budget, and Key Performance Indicators of 2016 (two thousand sixteen) that have been approved and ratified by GMS become the guideline for Board of Directors in carrying out work program and performance target in 2016 (two thousand sixteen) and serve as means of monitoring and supervisory for Board of Commissioners.</p>	<p>RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI dijadikan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja oleh PT Angkasa Pura I (Persero) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. / Company's Work Plan and Budget, Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget, Work Plan and Budget, and Key Performance Indicators of The Board of Commissioners serve as guidelines for Board of Directors in carrying out work program and performance target by PT Angkasa Pura I (Persero) serve as means of monitoring and supervisory for Board of Commissioners.</p>
2	<p>Dalam melaksanakan pencapaian target-target RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tahun 2016 (dua ribu enam belas), diminta perhatian Direksi antara lain hal-hal sebagai berikut: Meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan dari <i>sector non</i> aeronautika dengan memperkuat kesiapan sumber daya internal dan kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik.</p> <p>Setiap pelaksanaan investasi harus didukung dengan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan perusahaan/skala prioritas serta mempunyai daya ungkit dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional, produksi dan kinerja perusahaan.</p> <p>Pengelolaan kas dan piutang perusahaan agar dilakukan secara <i>cash flow</i>/likuiditas perusahaan dalam mendanai kegiatan-kegiatan operasional maupun kegiatan rutin baik di kantor pusat maupun cabang-cabang.</p> <p>Mengendalikan beban operasional dan beban usaha serta menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kelancaran kegiatan operasional dengan melaksanakan <i>cost reduction program</i> di semua lini sampai ke unit yang terendah. /</p> <p>In carrying out the target achievement of Company's Work Plan and Budget of 2016 (two thousand sixteen), the Board of Directors shall concern on the followings:</p> <p>Increase the contribution of company's income from non-aeronautics sector by strengthening the readiness of internal resource and the quality of Human Capital, and provide a better service.</p> <p>Every implementation of investment shall be facilitated with a meticulous planning according to the needs of the company/priority scale and leverage in order to support the smooth operational activity, production, and company's performance.</p> <p>Cash and receivables management of the company shall be carried out on a cash flow basis/corporate liquidity in financing operational or routine activities in the head office or branch offices</p> <p>Manage operating expenses and avoid expenses that are not related directly with the smoothness of operational activity by carrying out cost reduction programs in all company lines to the lowest level.</p>	<p>Pencapaian (realisasi) pada tahun 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Non Aera sebesar Rp. 2,5 Triliun. • Daya Serap Program Investasi sebesar 70,78% dan Daya Serap Fisik sebesar 69,21%. • Beban Operasi sebesar Rp. 4.49 Triliun. <p>Achievement (realization) in 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The amount of Non-Aeronautics Income is Rp 2.5 Trillion. • Absorptive Capacity of the Investment Program is at 70.78% and Physical Absorptive Capacity is at 69.21%. • The amount of Operating Expense is Rp 4.49 Trillion.
3	<p>Dalam rangka pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Direksi diminta untuk mengikuti arahan dalam Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2016 PT Angkasa Pura I Nomor: RIS-72/D7.MBU.4/12/2015 tanggal 08-12-2015. /</p> <p>In carrying out Partnership and Community Development Program, the Board of Directors shall follow directions stated in the Minutes of Meeting of 2016 Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget Discussion of PT Angkasa Pura I Number: RIS-72/D7.MBU.4/12/2015 on 08-12-2015.</p>	<p>Ditetapkan Target PKBL yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kolektabilitas sebesar 71% • Penyaluran Dana PKBL sebesar 100% <p>The target of Partnership and Community Development Program is established as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The collectability is at 71% • The distribution of Partnership and Community Development Program Fund is at 100%

No	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow-up Action
4	<p>Dalam rangka mendukung <i>Roadmap</i> Kementerian Badan Usaha Milik Negara Sektor Konektivitas, Direksi diminta untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung penguatan bisnis dan daya saing BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sektor Konektivitas; • Meningkatkan sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan negara. / <p>In order to support the Roadmap of Ministry of State-owned Enterprise in the Connectivity Sector, the Board of Directors shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support business and competitiveness strengthening of State-owned Enterprises in the Connectivity Sector; • Increase the synergy with State-owned Enterprises to gain optimal benefits for the company and the state. 	<p>Menjalin kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pembangunan stasiun kereta api di Bandara Adi Soemarmo di Surakarta. / Cooperate with PT Kereta Api Indonesia (Persero) in establishing train station in Adi Soemarmo Airport in Surakarta</p>
5	<p>Penyusunan indikator pencapaian kinerja (KPI) serta implementasi pola <i>reward and punishment</i> agar diterapkan secara konsisten pada semua level manajemen di seluruh Divisi. Target semua bandara dan SBU serta anak perusahaan harus mampu menjadi <i>profit center</i> dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan perusahaan. / The determination of KPI and implementation of reward and punishment system shall be carried out consistently in all management levels of the entire Divisions. The target of all airports and SBU and the subsidiaries shall be the profit center and provide optimal contribution for the growth of the company.</p>	<p>Telah diterapkan sistem penilaian kinerja karyawan yaitu PMS (<i>Performance Management System</i>) / PMS (Performance Management System) as the Employee performance assessment system has been implemented</p>
6	<p>Dalam rangka implementasi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Konvergensi <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS), Direksi diminta untuk melakukan langkah yang diperlukan guna penerapan standar akuntansi sesuai <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS) secara menyeluruh. / In order to implement the convergence of PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/Statements of Financial Accounting Standards) to International Financial Reporting Standards (IFRS), the Board of Directors shall take necessary measure to implement accounting standard in compliance with IFRS comprehensively.</p>	<p>Telah diterapkan PSAK konvergensi <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS) / The convergence of PSAK to IFRS has been implemented</p>
7	<p>Direksi diminta untuk mengembangkan Teknologi Informasi (TI) secara terarah dan terukur dalam rangka mendukung strategi bisnis Badan Usaha Milik Negara sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah dan pendek yang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan atas pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2013 tanggal 18-02-2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. /</p> <p>Board of Directors shall develop Information Technology in an oriented and measured manner in order to support the business strategy of State-owned Enterprise in line with the long, medium, and short-term objectives of the State-owned Enterprise. The implementation of the utilization and development of Information Technology shall refer to Regulation of Minister of State-owned Enterprise Number: PER-02/MBU/2013 on 18-02-2013 on the Preparation Guideline of Information Technology Management of State-owned Enterprise.</p>	<p>Penyempurnaan dan Integrasi SAP; <i>Contact Center</i>, Aplikasi Android; Implementasi Siopskom; Tata Kelola IT dengan <i>maturity</i> level 3,25 dari target 3,00./ The Improvement and Integration of SAP; <i>Contact Center</i>, Android Application; Implementation of Siopskom; IT Management with maturity level of 3.25 above the target 3.00.</p>
8	<p>Diminta kepada Direksi agar mengevaluasi bandara-bandara yang merugi dan mengupayakan program strategis dalam meningkatkan kinerja bandara-bandara khususnya dalam bidang kepariwisataan melalui pemasaran destinasi tujuan wisata di bandara-bandara. / The Board of Directors shall evaluate adverse airports and work on strategic programs to increase the performance of the airports mainly in tourism sector by promoting tourist destinations in the airports.</p>	<p>Telah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Review</i> struktur organisasi • Efisiensi beban • Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan <p>The followings have been implemented:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review on Organization Structure • Efficiency on Expense • Cooperate with Local Government to increase income by

No	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow-up Action
9	<p>Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara secara lebih efektif dan efisien, Badan Usaha Milik Negara diminta untuk melakukan penyampaian data, laporan dan dokumen kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara elektronik secara tepat waktu dan konsisten serta memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-18/MBU/10/2014. / For more effective and efficient State-owned Enterprises supervision and coaching, State-owned Enterprises shall submit data, reports, and documents to the Ministry of State-owned Enterprise electronically in a consistent and timely manner, and perform all their duties and other responsibilities in compliance with Regulation of Minister of State-owned Enterprise Number: PER-18/MBU/10/2014.</p>	<p>Penyampaian Laporan Triwulan dan Tahunan beserta kelengkapannya dilakukan secara elektronik melalui sistem PORTAL BUMN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Pemegang Saham dengan memperhatikan perubahan data informasi yang terjadi. / The submission of Trimester and Annual Reports with all additional components has been conducted electronically through PORTAL BUMN system in a timely manner and in accordance with the provisions of the Shareholders by considering the change of information data that occurs.</p>
10	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindak lanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 sebagaimana disampaikan dalam suratnya Nomor: 80/DK.API/2015 tanggal 29-12-2015 melaksanakan tanggapan Dewan Komisaris serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. / The Board of Directors shall consider and take follow-up actions on suggestions and recommendations from the Board of Commissioners in the implementation of 2016 Company's Work Plan and Budget as mentioned in the letter Number: 80/DK.API/2015 on 29-12-2015 concerning the implementation of the response of Board of Commissioners and the directives of GMS, which becomes an integral part of this Decree.</p>	<p>Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris serta Arahan RUPS ditindaklanjuti oleh Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja RKAP Tahun 2016. / Suggestions and Recommendations from the Board of Commissioners and the directives of GMS have been followed up by the Board of the Directors in performing work plan and performance target of 2016 company's work plan and budget.</p>
11	<p>Agar anak perusahaan dapat dipersiapkan untuk dapat di <i>Initial Public Offering</i> (IPO) kan, sehingga dapat dijadikan <i>financial engineering</i> bagi perusahaan induk. / Subsidiaries shall be prepared for Initial Public Offering (IPO) to function as financial engineering for the parent company.</p>	<p>Telah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses implementasi IPO • Perbaikan kualitas pelayanan • Penetrasi <i>market</i> luar <p>The followings have been implemented:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The process of IPO implementation • Service Quality Improvement • Offshore market penetration
12	<p>Direksi agar segera mengusulkan rencana Investasi/penambahan/ setoran modal Perusahaan Anak paling lambat bulan Januari tahun 2016 dilengkapi dengan kajian dan data dukung lengkap. / The Boards of Directors shall propose capital Investment/ Increase/Injection plan for subsidiaries no later than January 2016 complemented with required supporting study and data.</p>	<p>Penambahan modal perusahaan anak telah tertampung dalam RKAP Tahun 2016. / Capital increase for subsidiaries has been included in 2016 Work Plan and Budget of the Company</p>

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAPORAN TAHUNAN 2016 UNTUK TAHUN BUKU 2015

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Penyelenggaraan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 telah diselenggarakan PT Angkasa Pura I (Persero) pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Mei 2016
 Waktu : 15.40 WIB sampai selesai
 Tempat : Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat Lt. 6, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

IMPLEMENTATION OF 2016 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR OF 2015

EXECUTION OF 2016 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR OF 2015

The 2016 AGMS for the fiscal year of 2015 was convened by PT Angkasa Pura I (Persero) on:

Time, date : Tuesday, 17 May 2016
 Time : 15:40 WIB until finished
 Place : Office of the Ministry of State-owned Enterprise Meeting Room Fl. 6, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta

AGENDA RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Adapun agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2015, sebagai berikut.

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2016, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2015.
5. Penetapan penyesuaian pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

AGENDA OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2015

As for the agendas of AGMS for the fiscal year of 2015 are as follows.

1. The Approval of 2015 Annual Report including Report on Supervisory Function of Board of Commissioners and Ratification of the Company's 2015 Annual Report.
2. Approval and Ratification of 2015 Partnership and Community Development Program of the Company.
3. Determination of The Allocation of Net Income of The Company for The Fiscal Year of 2015
4. Determination of Salary/Honorarium along with facility and other allowance for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company of 2016, and Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for their performance in the fiscal year of 2015.
5. Determination of delegation of authority adjustment to the Board of Directors and Board of Commissioners.
6. The appointment of Public Accountant Firm that conducts audit on the Company's Financial Statement and the Implementation of 2016 Partnership and Community Development Program.

ATTENDANCE RECAPITULATION OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2015

2015 AGMS for the fiscal year of 2015 was attended by President Commissioner and all members of Board of Commissioners, including Chairman and members of Committees under the Board of Commissioners, and President Director and all members of Board of Directors

**Tabel Kehadiran Pada RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 /
Table of Attendance of AGMS for The Fiscal Year of 2015**

No.	Nama Name	Jabatan Position	Attendance
1.	Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner	Hadir / Present
2.	Selby Nugraha Rachman	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
3.	Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
4.	Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
5.	Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
6.	Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director of the Company	Hadir / Present
7.	Polana Banguningsih Pramesti	Direktur / Company Director	Hadir / Present
8.	Mochammad Asrori	Direktur / Company Director	Hadir / Present
9.	Novrihandri	Direktur / Company Director	Hadir / Present
10.	Adi Nugroho	Direktur / Company Director	Hadir / Present

KEPUTUSAN RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan keputusan sebagai berikut.

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk penyajian kembali (*restatement*) Tahun Buku 2013 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material sesuai laporannya Nomor: 11/LAI-API/SBY I/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - a) Laba Bersih Perseroan Tahun 2015 sebesar Rp841.542.506.000,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus enam ribu Rupiah).
 - b) Laporan Posisi Keuangan per 31-12-2015 ditutup dengan Total Aset sebesar Rp16.722.336.622.000,00 (enam belas triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu Rupiah).
 - c) Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan sebesar 85,50 (delapan puluh lima koma lima nol) atau Sehat "AA".
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai laporannya Nomor: 11D/LAI-PKBL/API/Sby1/II/16 tanggal 22-02-2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.
3. Menyetujui Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp841.542.506.000,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus enam ribu Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp 168.308.501.200,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus Rupiah) ditetapkan sebagai deviden tunai.

DECISIONS OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2015

PT Angkasa Pura I (Persero) has convened AGMS with the following decisions.

1. Approved 2015 Annual Report including Report on Supervisory Function of Board of Commissioners and ratify 2015 Annual Report including the restatement of 2013 and 2014 Annual Report that have been audited by Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners with an opinion that the financial statements present fairly in all material respects in accordance with the report Number: 11/LAI-API/SBY I/II/2016 on 22 February 2016, and fully released and discharged (*volledig acquit et de charge*) the Board of Directors and Board of Commissioners from their managerial and supervisory function during the fiscal year ending on 31-12-2015, to the extent that their acts did not constitute criminal offenses and such acts were reflected in the Company reports, with the following points:
 - a) The amount of Company's Net Income of 2015 is Rp841,542,506,000.00 (eight hundred forty-one billion five hundred forty-two million five hundred and six thousand Rupiah).
 - b) The Statement of Financial Position per 31-12-2015 is closed with Total Asset amounting Rp16,722,336,622,000.00 (sixteen trillion seven hundred twenty-two three hundred thirty-six million six hundred and twenty-two thousand Rupiah).
 - c) The Corporate Health Level Score is 85.50 (eighty-five point five zero) or "AA" Healthy.
2. Approved and ratified Annual Report of 2015 Partnership and Community Development Program including the Financial Statement of Partnership and Community Development Program that has been audited by Public Accountant Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners in accordance with the report Number: 11D/LAI-PKBL/API/Sby1/II/16 tanggal 22-02-2016 with reasonable opinion in all material respects, and fully released and discharged (*volledig acquit et de charge*) the Board of Directors and Board of Commissioners from their managerial and supervisory function of Partnership and Community Development Program during the fiscal year of 2015, to the extent that their acts did not constitute criminal offenses and such acts were reflected in such report.
3. Approved and agreed the allocation of Company's Net Income of 2015 amounting Rp841,542,506,000.00 (eight hundred forty-one billion five hundred forty-two million five hundred and six thousand Rupiah).
 - a. 20% (twenty percent) of which or equal to Rp168,308,501,200.00 (one hundred sixty-eight billion three hundred eight million five hundred one thousand and two hundred Rupiah) is stated as cash dividend.

- b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp673.234.004.800,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ribu delapan ratus Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.
Besaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2016 dihitung ekuivalen 3% (tiga persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan tahun 2016 serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya.
4. Menyetujui penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2016, serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2015 akan ditetapkan secara tersendiri, karena masih menunggu kajian Independen yang sedang berlangsung.
5. Keputusan Rapat untuk Agenda V Keputusannya adalah DITUNDA.
6. Menyetujui:
- Menetapkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).
 - Dalam hal KAP yang ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, maka Dewan Komisaris dapat mengusulkan KAP pengganti kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk ditetapkan.
- b. 80% (eighty percent) of which or equal to Rp673,234,004,800.00 (six hundred seventy three billion two hundred thirty-four million four thousand and eight hundred Rupiah) is stated as reserves.
The amount of Partnership and 2016 Community Development Program is equivalent to 3% (three percent) of 2015 Net Income, the source of fund of which is from 2016 Company's cost assignment and the remaining balance of Community Development Program fund from previous years.
4. Approved the determination of Salary/Honorarium along with facility and other allowance for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2016, and Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for their performance in the fiscal year of 2015 will be determined separately, due to the ongoing independent study.
5. The decision of the meeting for the fifth agenda is ADJOURNED
6. Approved:
- The appointment of Public Accountant firm of Hadori Sugiarto Adi & Partner as the auditor for Financial Statement of the Company and the Implementation Report of Partnership and Community Development Program of the fiscal year of 2016 (two thousand sixteen).
 - In the event of the appointed Public Accountant Firm is unable to continue or perform its duties due to any reasons, the Board of Commissioners may propose substitute Public Accountant Firm to Minister of State-owned Enterprise as the part of General Meeting of Shareholders to be determined.

ARAHAN RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN TINDAKLANJUTNYA

Adapun arahan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan tindak lanjutnya sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut.

DIRECTIVES OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2015 AND THE FOLLOW-UP ACTIONS

As for directives AGMS for the fiscal year of 2015 and the follow-up actions conducted until the end of 2016 are as follows.

No	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow-up Action
1.	Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, catatan, saran dan rekomendasi baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. / Follow up and completely resolve any findings, notes, suggestions, and recommendation from either external auditor (Audit Board of the Republic of Indonesia and/or Public Accountant Firm) or internal Auditor (Internal Control System) of 2015 and previous years. The follow-up actions on the findings/suggestions from the auditor shall be comprehensively discussed with the Board of Commissioners and reported to the Shareholders in a written form.	Temuan, catatan, saran dan rekomendasi auditor eksternal atau internal telah ditindak lanjuti kemudian dilaporkan kepada Pemegang Saham setelah dibahas terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris / Any findings, notes, suggestions, and recommendation from external or internal auditor have been followed up and discussed with the Board of Commissioners prior to being reported to the Shareholders

No	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow-up Action
2.	Mengupayakan efisiensi biaya perusahaan khususnya terhadap biaya-biaya operasional yang tidak berkaitan langsung peningkatan layanan, keamanan dan pemeliharaan. / Work on cost efficiency of the company mainly in operating expenses that are not directly related to the improvement of service, security, and maintenance.	Efisiensi biaya terhadap biaya yang tidak berkaitan langsung dengan dengan peningkatan layanan, keamanan dan pemeliharaan guna meningkatkan laba perusahaan. / Cost efficiency of the company in operating expenses that are not directly related to the improvement of service, security, and maintenance in order to increase company income.
3.	Terhadap bandara yang merugi agar lebih dioptimalkan dari segi pendapatan <i>non-aero</i> , sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Perseroan dan lebih menjamin <i>going concern</i> Perseroan ke depan. / Adverse airports shall be optimized by increasing non-aeronautics income to provide contribution for the Company and ensure the sustainability of the Company in the future.	Telah dilakukan program bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan. / Cooperation with Local Government has been conducted to increase income.
4.	Menyampaikan laporan secara tepat waktu melalui portal Kementerian BUMN dan senantiasa memperbaharui data informasi di portal tersebut yang terdiri dari portal <i>Financial Information System</i> , Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik serta melaporkannya kepada unit pengelola portal. / Submit the report in a timely manner through the portal of Ministry of State-owned Enterprise and constantly update information data in such portal that consists of Financial Information System portal, Assets portal, Human Capital portal, Partnership and Community Development Program portal, and public portal, and report the submission to the portal administration unit.	Penyampaian Laporan Triwulan dan Tahunan beserta kelengkapannya dilakukan secara elektronik melalui sistem PORTAL BUMN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan pemegang saham dengan memperhatikan perubahan data informasi yang terjadi. / The submission of Trimester and Annual Reports with all additional components has been conducted electronically through PORTAL BUMN system in a timely manner and in accordance with the provisions of the Shareholders by considering the change of information data that occurs.
5.	Menyampaikan data, laporan dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik secara tepat waktu dan konsisten serta memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-18/MBU/10/2014. / Submit data, reports, and documents to the Ministry of State-owned Enterprise electronically in a consistent and timely manner, and perform all duties and other responsibilities in compliance with Regulation of Minister of State-owned Enterprise Number: PER-18/MBU/10/2014.	Penyampaian Laporan Triwulan dan Tahunan beserta kelengkapannya dilakukan secara elektronik melalui sistem PORTAL BUMN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Pemegang Saham / The submission of Trimester and Annual Reports with all additional components has been conducted electronically through PORTAL BUMN system in a timely manner and in accordance with the provisions of the Shareholders.
6.	Memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Nomor: 20/DK.AP.II/2016 tanggal 09-05-2016 (sembilan Mei dua ribu enam belas). / Consider the suggestions and opinions from the Board of Commissioners as stated in the letter Number: 20/DK.AP.II/2016 on 09-05-2016 (the ninth of May two thousand sixteen).	Saran dan pendapat Dewan Komisaris telah dilakukan oleh Direksi PT Angkasa Pura I (Persero). / The suggestions and opinions from the Board of Commissioners have been followed up by the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero).
7.	Buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2015, Laporan PKBL, tanggapan Dewan Komisaris dan Laporan Auditor Independen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini. / The Annual Report of fiscal year of 2015, Partnership and Community Development Program Report, Response of the Board of Commissioners, and Independent Auditor Report are integral parts of the Minutes of this Meeting.	Buku Laporan Tahunan Tahun buku 2015, Laporan PKBL dan Tanggapan Dewan Komisaris serta Laporan Auditor disahkan melalui RUPS Pertanggungjawaban RKAP Tahun 2015 pada 17 Mei 2016. / The Annual Report of fiscal year of 2015, Partnership and Community Development Program Report, Response of the Board of Commissioners, and Independent Auditor Report are ratified in GMS on Accountability Report of the Company's Work Plan and Budget of 2015 on 17 May 2016.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015

Sesuai dengan surat undangan Direksi Nomor: AP.I.318/KU.01/2015/PD-B tanggal 14 Januari 2015, telah diselenggarakan RUPS PT Angkasa Pura I (Persero) pada:
 Hari, tanggal : Jumat, 16 Januari 2015
 Waktu : 08.30 WIB sampai selesai

IMPLEMENTATION OF 2015 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

EXECUTION OF 2015 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

In accordance with the invitation letter of the Board of Directors Number: AP.I.318/KU.01/2015/PD-B on 14 January 2015, GMS of PT Angkasa Pura I (Persero) was convened on:
 Time, date : Friday, 16 January 2015
 Time : 08.30 WIB until finished

Tempat : Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat Lt. 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

Place : Office of the Ministry of State-owned Enterprise Meeting Room Fl. 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyelenggarakan RUPS Tahunan 2015 dengan agenda sebagai berikut.

1. Persetujuan/pengehasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2015.
2. Pengehasan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015.
3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon anggaran investasi tahun 2015.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015

RUPS RKAP (Tahunan) 2015 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

Tabel Kehadiran Pada RUPS RKAP Tahun 2015 / Table of Attendance of 2015 AGMS

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Hadir / Presence
1	Suratto Siswodihardjo	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner	√
2	H. Hakamuddin Djamal	Komisaris / Commissioner	√
3	Hermanto Dwiatmoko	Komisaris / Commissioner	√
4	Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	√
5	Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	√
6	Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	√
7	Tommy Soetomo	Direktur Utama / President Director	√
8	Gunawan Agus Subrata	Direksi / Director	√
9	Robert Daniel Waloni	Direksi / Director	√
10	Yushan Sayuti	Direksi / Director	√
11	Polana Banguningsih Pramesti	Direksi / Director	√

AGENDA OF 2015 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

PT Angkasa Pura I (Persero) has convened 2015 AGMS with the following decisions.

1. The Approval/Ratification of The Company's Work Plan and Budget and Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget of 2015
2. The establishment of 2015 Key Performance Indicators of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).
3. The establishment of Operational Aspect Indicator for the Corporate Health Level Measurement of 2015.
4. The authorization of the Board of Commissioners to approve any actions that cause the change of investment budget allocation with maximum value of 10% from the limit of 2015 investment budget.

ATTENDANCE RECAPITULATION OF 2015 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

2015 AGMS on The Company's Work Plan and Budget (AGMS) was attended by President Commissioner and all members of Board of Commissioners, including Chairman and members of Committees under the Board of Commissioners, and President Director and all members of Board of Directors.

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015

Pada tanggal 16 Januari 2015, PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan keputusan sebagai berikut.

- Menyetujui/mengesahkan RKAP Tahun 2015 dan RKA PKBL tahun 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut.
 - Proyeksi Laba-Rugi
Perhitungan laba bersih setelah pajak diproyeksikan sebesar Rp692.104 juta
 - Proyeksi Posisi Keuangan
Posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015 diproyeksikan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp18.337.261 juta.
 - Investasi dianggarkan sebesar Rp4.066.215 juta.
 - Program kemitraan dan bina lingkungan
Saldo akhir Program kemitraan sebesar Rp827 juta dan saldo akhir Program Bina Lingkungan sebesar Rp 1.979 juta.
 - Rencana Dewan Komisaris
Rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris termasuk *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2015 yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015. RUPS menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2015.
- Menetapkan/mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang disusun sesuai dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2015 antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menetapkan indikator aspek operasional yang digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2015, sebagai berikut.

No.	Indikator	Bobot
1.	<i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI)	15
2.	Tingkat pelayanan Terminal Pemeriksaan <i>security</i> di terminal Fasilitas umum Service at Terminal - Security Inspection at Terminal - Public Facility	10 5 5
3.	Pengembangan fasilitas dan investasi Fisik / Program - Physical - Program	10 5 5
	Total	35

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan realokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi tahun 2015 tanpa melakukan perubahan dan/atau penambahan program/kegiatan investasi.

DECISIONS OF 2015 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET

On 16 January 2015, PT Angkasa Pura I (Persero) has convened AGMS with the following decisions.

- Approved/ratified 2015 Company's Work Plan and budget and Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget with the points as follows.
 - Income Projection
Net income after tax is projected at Rp692,104 million
 - Projection of Financial Position
Consolidated financial position per 31 December 2015 is projected to be closed with Total Assets amounting Rp18,337,261 million.
 - Investment is budgeted at Rp4,066,215 million.
 - Partnership and community development program
Closing balance of Partnership Program is Rp827 million and closing balance of Community Development Program is Rp1,979 million.
 - Plans of The Board of Commissioners
Work Plan and Budget of the Board of Commissioners includes the determination of Key Performance Indicators of the Board of Commissioners as a part of 2015 Company's Work Plan and Budget. GMS determines 2015 Key Performance Indicators of the Board of Commissioners.
- Established/Ratified Key Performance Indicator prepared in accordance with Criteria for Performance Excellence (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul/KPKU) and contained in the Management Contract of 2015 between the Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners.
- Established Operational Aspect Indicator for 2015 Corporate Health Level Measurement of PT Angkasa Pura I (Persero) as follows.

- Delegated the authority to the Board of Commissioners to Approve Budget Reallocation between investment programs/activities with the maximum value of 10% (ten percent) of total investment value of 2015 without any change and/or addition of the investment program/activity.

ARAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2015 DAN REALISASINYA

Pada RUPS RKAP Tahun 2015, Pemegang Saham memberikan arahan yang menjadi perhatian bagi para Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun arahan RUPS RKAP Tahun 2015 dan realisasinya sebagai berikut.

DIRECTIVES OF 2015 GMS ON THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET AND THE REALIZATIONS

In 2015 GMS on the company's work plan and budget, the Shareholders provides directives for the Board of Commissioners and Board of Directors to concern. As for directives 2015 GMS on the company's work plan and budget and the realization are as follows.

**Tabel Arahan RUPS RKAP Tahun 2015 dan Realisasinya /
Table Tutorial GMS CBP 2015 and Realization**

Arahan RUPS Directive of GMS	Realisasi Realization
<p>Terhadap usulan persetujuan Kontrak Kerjasama pekerjaan <i>Solar Farm Project</i> sebesar 3-5 megawatt dengan investasi senilai Rp100 miliar untuk mendukung <i>Green Airport</i> di Bali yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura Support dengan <i>Partner</i> yang kompeten dengan konsekuensi akan menyewa lokasi-lokasi tersebut (atap dan lahan parkir) selama 25 tahun, Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan. / Regarding to the proposed approval of Cooperation Agreement on 3-5 megawatt Solar Farm Project with the investment value of Rp100 billion to support Green Airport in Bali conducted by PT AP Support together with the competent partners and the consequence of leasing the area (roofs and parking lot) for 25 years, the Board of Directors shall submit proposal separately complemented with necessary supporting data and documents in accordance with the applicable regulations of law.</p>	<p>Belum ada tindak lanjut dari PT Angkasa Pura Support, dikarenakan berdasarkan evaluasi bisnis energi independen, <i>Independent Power Producer (IPP)</i> kurang <i>feasible</i>. / No follow-up action is carried out by PT Angkasa Pura Support as independent energy business evaluation concludes that Independent Power Producer (IPP) is not feasible enough.</p>
<p>Terhadap usulan persetujuan pengalihan hutang PT Angkasa Pura Hotel kepada PT Angkasa Pura I sebesar Rp143,5 miliar dan bunganya menjadi penambahan setoran modal, sebagai bagian dari pendanaan pembangunan hotel di Bandara Ngurah Rai Bali Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan. / Regarding to the proposed approval of transfer of debts of PT Angkasa Pura Hotel to PT Angkasa Pura I amounting Rp143.5 billion and the interest of which becomes additional capital deposit, the Board of Directors shall submit proposal separately complemented with necessary supporting data and documents in accordance with the applicable regulations of law, as a part of hotel construction funding in the area of Ngurah Rai Airport, Bali.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepada Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: AP.I.6576/KU.01.03/2016/PD-B tanggal 2 Desember 2016; • Surat Kepada Kementerian BUMN Nomor: AP.I.6577/KU.01.03/2016/PD-B tanggal 2 Desember 2016. / <p>This has been followed up with the followings:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letter to the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) Number: AP.I.6576/KU.01.03/2016/PD-B on 2 December 2016; - Letter to the Ministry of State-owned Enterprise Number: AP.I.6577/KU.01.03/2016/PD-B on 2 December 2016.
<p>Terhadap usulan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp136,5 miliar kepada PT Angkasa Pura Hotel, sebagai bagian dari pendanaan pembangunan Hotel di Bandara Ngurah Rai Bali dan memperkuat struktur permodalan untuk pinjaman. Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan. / Regarding to the proposed approval of paid-in capital addition amounting Rp136.5 billion to PT Angkasa Pura Hotel, as a part of hotel construction funding in the area of Ngurah Rai Airport, Bali, and strengthening capital structure for loan. The Board of Directors shall submit proposal separately complemented with necessary supporting data and documents in accordance with the applicable regulations of law.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepada Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: AP.I.6576/KU.01.03/2016/PD-B tanggal 2 Desember 2016; • Surat Kepada Kementerian BUMN Nomor: AP.I.6577/KU.01.03/2016/PD-B tanggal 2 Desember 2016. / <p>This has been followed up with the followings:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letter to the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) Number: AP.I.6576/KU.01.03/2016/PD-B on 2 December 2016; - Letter to the Ministry of State-owned Enterprise Number: AP.I.6577/KU.01.03/2016/PD-B on 2 December 2016.
<p>Terhadap usulan pendayagunaan aset tetap berupa bangunan dan peralatan <i>in-flight kitchen</i> di Bandara Ngurah Rai Bali oleh Angkasa Pura Hotel dalam rangka pemindahtanganan dengan bentuk penyertaan modal. Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan. / Concerning the proposal of fixed assets utilization including building and in-flight kitchen equipments in the event of transfer of assets in the form of capital investment. The Board of Directors shall submit proposal separately complemented with necessary supporting data and documents in accordance with the applicable regulations of law.</p>	<p>Masih dalam proses appraisal oleh PT Angkasa Pura Hotel. / PT Angkasa Pura Hotel is still conducting appraisal process.</p>

Arahan RUPS Directive of GMS	Realisasi Realization
<p>Terhadap usulan persetujuan perubahan izin prinsip Menteri BUMN, atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat nomor S-464/MBU/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Persetujuan Kerjasama Pembangunan dan Pengusahaan Hotel di Bandara Ngurah Rai Bali dengan PT Angkasa Pura Hotel, yang semula kerjasama BOT selama 20 tahun menjadi kerja sama usaha (KSU) selama 30 tahun. Surat nomor S-231/MBU/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Persetujuan kerjasama pembangunan dan pengoperasian Airport Hotel di Bandara Juanda-Surabaya dan St Hasanuddin-Maros dengan PT Angkasa Pura Hotel, yang semula kerjasama BOT selama 15 tahun menjadi kerjasama (KSU) selama 30 tahun. <p>Atas kedua usulan ini, Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan.</p> <p>Regarding to the proposed approval of changes of the principle permit Minister of State-owned Enterprise on:</p> <ol style="list-style-type: none"> Letter No. S-464/MBU/2013 on 16 July 2013 concerning the Cooperation Agreement on Hotel Development and Business in Ngurah Rai Airport, Bali, with PT Angkasa Pura Hotel, the agreement type of which was originally Build-Operate-Transfer (BOT) for 20 years changed to business cooperation for 30 years. Letter No. S-231/MBU/2013 on 16 July 2013 concerning the Cooperation Agreement on Hotel Development and Operation in Juanda Airport, Bali, with PT Angkasa Pura Hotel, which type of agreement was originally Build-Operate-Transfer (BOT) for 15 years changed to business cooperation for 30 years. <p>As for those proposals, the Board of Directors shall submit proposal separately complemented with necessary supporting data and documents in accordance with the applicable regulations of law.</p>	<p>Masih dalam proses evaluasi pelepasan Hak / The evaluation of waiver is still in process.</p>
<p>Terhadap usulan persetujuan jangka waktu kerjasama pengoperasian Terminal Kargo dan <i>regulated Agent</i> dalam jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik. Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan. / Regarding to proposed approval of the cooperation period of the operational of Cargo Terminal and regulated Agent within a minimum period of 10 (ten) years between PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura Logistics. The Board of Directors shall submit proposal separately complemented with necessary supporting data and documents in accordance with the applicable regulations of law.</p>	<p>Dalam pengelolaan terminal kargo, yang boleh Kerjasama dengan PT Angkasa Pura Logistik adalah jasa terkaitnya saja, karena untuk jasa kebandarudaraan mutlak dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Dikarenakan PT Angkasa Pura I (Persero) masih kekurangan Sumber Daya Manusia dan alat-alat operasional terminal kargo, maka untuk jasa kebandarudraannya akan dilakukan juga oleh pihak PT Angkasa Pura Logistik dengan menggunakan ornamen PT Angkasa Pura I (Persero) dan dilakukan kerjasama KSO. Dalam masa kerjasama selama 5 tahun, itu adalah kewenangan dari Direksi sedangkan selebihnya adalah kewenangan Komisaris. Dalam kerjasama <i>Regulated Agent</i>, yang boleh bekerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) adalah <i>Regulated Agent</i> yang harus sudah memiliki sertifikasi dari Pehubungan. / In managing cargo terminal, PT Angkasa Pura I (Persero) may only establish cooperation for the related services with PT Angkasa Pura Logistics. Airport service is absolutely conducted by PT Angkasa Pura I (Persero). Due to the lack of human capital and operational equipments of cargo terminal by PT Angkasa Pura I (Persero), airport service will also conducted by PT Angkasa Pura Logistics with the ornament of AP I under the joint operation. The Board of Directors exclusively holds such authority during the period of cooperation of 5 years, whereas for the rest are the authority of the Board of Commissioners. PT Angkasa Pura I (Persero) may only cooperate with the regulated agent certified by Ministry of Transportation.</p>
<p>RKAP yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2015, dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan RKAP dengan selalu berpegang pada prinsip disiplin anggaran dan melaporkannya secara berkala kepada Pemegang Saham. / The ratified Company's Work Plan and Budget serves as a guideline for the Board of Directors in conducting business activity in 2015, and the Board of Commissioners is required to conduct the evaluation and supervision of the implementation of the Company's Work Plan and Budget by always adhering to the principle of budgetary discipline and reporting periodically to the Shareholders.</p>	<p>RKAP dijadikan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja oleh PT Angkasa Pura I (Persero) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris untuk dilaporkan secara Triwulan, Semester dan Tahunan kepada Pemegang Saham / Company's Work Plan and Budget serves as a guideline for the Board of Directors in conducting work plan and achieve target of performance by PT Angkasa Pura I (Persero) as well as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners to be reported quarterly, half-yearly, and annually to the Shareholders.</p>

Arahan RUPS Directive of GMS	Realisasi Realization
<p>RKAP agar dirinci di dalam Rencana Kegiatan Operasional (RKO) bulanan untuk dijadikan pedoman pengaman target RKAP serta disosialisasikan kepada seluruh jajaran Perusahaan. Target-target di bidang produksi dan pendapatan merupakan target minimal, sedangkan biaya adalah target maksimal Perusahaan. / Company's Work Plan and Budget shall be specified in monthly Operational Activity Plan to serve as a guideline of Company's Work Plan and Budget target security and disseminated to the whole company lines. Production and income are the minimum targets, whereas costs are the maximum target of the company.</p>	<p>Telah disusun RKAP bulanan yang berisikan <i>breakdown</i> dari program kerja dan target kinerja setiap bulan selama tahun berjalan. / Monthly Company's Work Plan and Budget that includes breakdown of the work plan and monthly performance target for the current year has been established.</p>
<p>Direksi agar mengupayakan yang terbaik (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target RKAP dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, Direksi diminta memiliki rencana serta langkah (<i>contingency plan</i>) sehingga apabila terjadi perubahan asumsi dan kondisi bisnis, target RKAP tetap dapat tercapai. / The Board of Directors shall work on their best efforts in achieving the target of Company's Work Plan and Budget by referring to the principles of GCG and professionalism and to the provisions of regulations of law. Related to such matter, the Board of Directors shall set a plan and contingency plan so as there is a change in the assumption and business condition, the targets of Company's Work Plan and Budget may still be achieved.</p>	<p>Pencapaian target RKAP PT Angkasa Pura I (Persero) dilakukan dengan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme serta peraturan yang berlaku. / The achievement of targets of Company's Work Plan and Budget is always conducted by referring to the principles of GCG and professionalism and the applicable regulations of law.</p>
<p>Direksi agar selalu berupaya untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kepuasan pelanggan, antara lain melalui perbaikan fasilitas umum (toilet, musholla, dan lain-lain), serta perbaikan kualitas terminal penumpang. / The Board of Directors shall make the best effort to increase safety and satisfaction aspects of the customers, such as improving public facilities (toilet, praying room, and others) and the quality of passenger terminal.</p>	<p>Peningkatan keamanan dan pelayanan selalu diberikan kepada seluruh pelanggan diseluruh bandara PT Angkasa Pura I (Persero). / Security and service improvement is always provided to all passengers in all airports of PT Angkasa Pura I (Persero).</p>
<p>Direksi agar meningkatkan <i>monitoring</i> dan pembinaan terhadap kinerja anak Perusahaan. Anak Perusahaan tersebut pada dasarnya harus meningkatkan nilai BUMN serta kegiatan bisnisnya menunjang kinerja induk dan tidak menjadi beban induk. / The Board of Directors shall improve monitoring and coaching for the performance of subsidiary companies. The subsidiary companies basically shall increase the value of the State-owned Enterprise and support, and not encumbering instead, the performance of the parent entity.</p>	<p>Dibentuknya <i>Unit Subsidiary</i> di Direktorat Komersial sebagai wakil PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai pembina perusahaan anak. / Subsidiary Unit in the Directorate of Commercial is established as the representative of PT Angkasa Pura (coach) for the subsidiary companies.</p>
<p>Direksi agar meningkatkan penerapan Teknologi Informasi pada seluruh kegiatan dan unit kerja perusahaan, antara lain melalui optimalisasi sistem ERP (<i>Enterprise Resource Planning</i>) untuk kegiatan produksi dan pelaporan keuangan, serta penerapan <i>e-procurement</i> untuk kegiatan pengadaan barang/jasa. / The Board of Directors shall promote the implementation of information technology to all company activities and work unit, among others is by optimizing ERP (Enterprise Resource Planning) system for production activity and financial statement reporting, and implementing e-procurement for goods/services procurement.</p>	<p>Telah dilakukan pengembangan SAP yang telah diimplementasikan sebelumnya dan penerapan <i>E-Procurement</i> pada PT Angkasa Pura I (Persero). / SAP Development has been previously implemented and e-procurement has been applied by PT Angkasa Pura I (Persero).</p>
<p>Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUMN secara lebih efektif dan efisien, BUMN diminta untuk melakukan penyampaian data, laporan dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik, tepat waktu dan konsisten serta memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014. / For more effective and efficient State-owned Enterprises supervision and coaching, State-owned Enterprises shall submit data, reports, and documents to the Ministry of State-owned Enterprise electronically in a consistent and timely manner, and perform all their duties and other responsibilities in compliance with Regulation of Minister of State-owned Enterprise Number PER-18/MBU/10/2014 on 16 October 2014.</p>	<p>Penyampaian Laporan Triwulan dan Tahunan beserta kelengkapannya dilakukan secara elektronik melalui sistem PORTAL BUMN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan pemegang saham. / The submission of Trimester and Annual Reports with all additional components has been conducted electronically through PORTAL BUMN system in a timely manner and in accordance with the provisions of the Shareholders.</p>
<p>Untuk dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan melalui implementasi teknologi informasi yang efektif dan efisien agar pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi BUMN dilakukan berdasarkan tata kelola TI sebagai bagian dari <i>Enterprise Governance</i> dengan memperhatikan Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2013 dan melaporkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pelaksanaan <i>master plan</i> TI secara berkala dalam Laporan Manajemen BUMN. / In order to improve company's performance and competitiveness through the effective and efficient implementation of information technology, the utilization and development of Information Technology of the State-owned Enterprise shall be conducted based on IT governance as a part of Enterprise Governance by referring to the Preparation Guideline of Information Technology Management of State-owned Enterprise in accordance with the regulation of Minister of State-owned Enterprise Number: PER-02/MBU/2013, and regularly reported the result of monitoring and evaluation on the implementation of IT master plan in the State-owned Enterprise management report.</p>	<p>Penyempurnaan dan Integrasi SAP; Implementasi Siopskom; Tata Kelola IT Perusahaan. / SAP Improvement and Integration; Implementation of Siopskom; Company IT Governance.</p>

Arahan RUPS Directive of GMS	Realisasi Realization
<p>Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara, Direksi minta untuk; 1) menyelesaikan kewajiban terhadap hubungan kerjasama penggunaan lahan/bangunan milik instansi lain, 2) mengutamakan pelayanan penumpang dan barang yang seimbang dengan penyediaan fasilitas komersial yang bersinggungan dengan pelayanan, dan 3) melakukan pengelilaan keamanan bagi penumpang dan barang sesuai standar keamanan yang ditetapkan, 4) serta mengelola parkir dan kendaraan umum yang menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang di area bandar udara. / In order to provide optimum service to the consumers of air transport services, the Board of Directors shall; 1) settle their obligation in the cooperation agreement related to the use of land/building in possession of the other institutions, 2) prioritize the service for passengers and goods that equals to the commercial facility provision related to the service, 3) provide security management for passengers and goods according to the established security standard, and 4) manage parking and public transportation to ensure the passengers' security and comfort in the airport area.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan kewajiban terhadap hubungan kerja sama penggunaan lahan/bangunan milik instansi lain. Serta telah mengimplementasikan PM 129, KP 205 terkait pelayanan penumpang dan fasilitas komersial yang bersinggungan dengan pelayanan. 2. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI tahun 2016, 13 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) telah memenuhi tingkat kepatuhan 100% terhadap pelaksanaan regulasi dan standar keamanan yang berlaku. / 1. PT Angkasa Pura I (Persero) has settled their obligation in the cooperation agreement related to the use of land/building in possession of the other institutions 2. PT Angkasa Pura I (Persero) has implemented PM 129, KP 205 concerning the service for passengers and commercial facility related to the service. 3. Based on the audit by Directorate of Flight Safety of Directorate General of Air Transport of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia in 2016, 13 airports under the management of PT Angkasa Pura I (Persero) have 100% complied to the applicable regulation and safety standard.
<p>Direksi agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemenuhan kewajiban perpajakan dan ketentuan ketenagakerjaan termasuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja <i>outsourcing</i> di perusahaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. / The Board of Directors shall put a great concern on the fulfillment of tax obligation and the employment provision including resolving the issue of outsourcing in the company in accordance to the applicable regulations of law.</p>	<p>Seluruh kewajiban perpajakan telah dilaporkan dan terkait tenaga kerja <i>outsourcing</i> telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. / All tax obligations have been reported and outsourcing employment has been carried out in accordance to the applicable regulations of law.</p>
<p>Direksi agar mengupayakan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari. / The Board of Directors shall follow up and completely resolve any findings, notes, and suggestions/recommendations from Public Accountant Firm and Audit Board of the Republic of Indonesia, including the findings and recommendations that are still being resolved in progress. The progress of the follow-up actions related to the findings shall be discussed with the Board of Commissioners and reported to Minister of State-owned Enterprise on a regular basis.</p>	<p>Laporan Keuangan Tahun Buku Tahun 2014 telah disampaikan kepada Pemegang Saham pada bulan Februari 2015. / The findings, notes, and suggestions/recommendations from Public Accountant Firm and Audit Board of the Republic of Indonesia have been followed up and discussed with the Board of Commissioners prior to being reported to the shareholders.</p>
<p>Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan, catatan dan saran/rekomendasi KAP dan BPK-RI, termasuk temuan dan rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti. <i>Progress</i> tindak lanjut atas temuan tersebut agar dibahas bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Menteri BUMN secara berkala. / As the follow-up action toward the approved Management Contract in which there is Key Performance Indicator (KPI), the KPI shall be prepared hierarchically for every level of management and subsidiaries.</p>	<p>Temuan, catatan dan saran/rekomendasi KAP & BPK-RI telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan disampaikan kepada Pemegang Saham setelah melalui pembahasan dengan Dewan Komisaris. / KPI has been approved and stated in the management contract for every level of management and subsidiary.</p>
<p>Sebagai tindak lanjut Kontrak Manajemen yang di dalamnya terdapat <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) dan telah disepakati, agar disusun KPI secara berjenjang untuk setiap level manajemen dan anak perusahaan. / Suggestions and directives from the Board of Commissioners stated in the event of GMS and through the letter Number: 104/DK.API/2014 on 1 December 2014 shall be given full attention and followed up by the Board of Directors.</p>	<p>KPI telah disepakati dan dicantumkan dalam kontrak manajemen untuk setiap level manajemen dan anak perusahaan. / Suggestions and directives from the Board of Commissioners have been followed up by the Board of Directors.</p>
<p>Saran dan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan pada saat RUPS dan melalui surat Nomor: 104/DK.API/2014 tanggal 1 Desember 2014, agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Direksi. / Saran dan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan pada saat RUPS dan melalui surat Nomor: 104/DK.API/2014 tanggal 1 Desember 2014, agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Direksi.</p>	<p>Saran dan Arahan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi. / Saran dan Arahan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi.</p>

Arahan RUPS Directive of GMS	Realisasi Realization
<p>Buku RKAP, RKA PKBL, dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS. / The Company's Work Plan and Budget, Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget, and Key Performance Indicator stated in the Management Contract are integral to the Minutes of GMS.</p>	<p>Buku RKAP, RKA PKBL, dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) telah disahkan melalui RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2015 pada Januari 2015. / The Company's Work Plan and Budget, Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget, and Key Performance Indicator have been ratified in the 2015 GMS on Ratification of The Company's Work Plan and Budget on January 2015.</p>
<p>Dalam hal terjadi penyimpangan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP tahun 2015, Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan revisi paling lambat akhir Triwulan II tahun 2015. / In the event of significant irregularities occur on the assumptions used in the preparation of 2015 Company's Work Plan and Budget, Board of Directors and Board of Commissioner may call for revision no later than the end of the second trimester of 2015.</p>	<p>Revisi pada RKAP investasi diajukan pada triwulan II Tahun 2015. / Revision on Company's Work Plan and Budget was proposed in the end of the second trimester of 2015.</p>
<p>Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi agar menyampaikan laporan berkala (Triwulan I sampai dengan IV) secara tepat waktu sesuai batasan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-05/MBU/2007 tentang PKBL sebagaimana telah direvisi, terakhir kali melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 2. Membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada desa-desa tertinggal dengan penyaluran pinjaman Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan terhadap desa-desa yang mempunyai keunggulan/potensi untuk dikembangkan dalam bentuk Desa Binaan. Dengan demikian, dampak yang diterima oleh masyarakat lebih efektif dan terukur. 3. Melakukan sinergi antar BUMN Pembina PKBL dan berkoordinasi dengan BUMN wilayah sehingga penyaluran lebih fokus dan terarah, dalam rangka pelaksanaan pembentukan Desa/Kota Binaan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. 4. Penyaluran dana Program Bina Lingkungan, agar difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat suatu wilayah tertentu. Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan sarana prasarana umum, bantuan kebutuhan pokok/dasar masyarakat yang dapat berdampak langsung bagi pengentasan kemiskinan. 5. Direksi diminta untuk menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai dasar internal pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam SOP tersebut agar diakomodir pula mengenai prosedur tanggap darurat penanganan bencana yang menggunakan dana Program Bina Lingkungan. 6. Untuk pendanaan Program kemitraan dan Bina Lingkungan yang bersumber dari pembebanan biaya Perusahaan agar dicatat secara terpisah dari kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebelumnya dan dimasukkan dalam rekening tersendiri. / <p>Regarding to the partnership between State-owned Enterprise and small businesses and community development program, the followings are essential to consider.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors shall submit periodical reports (Trimester I to IV) in a timely manner in accordance with the time frame specified in the Regulation of State Minister of State-owned Enterprise number: PER-05/MBU/2007 concerning partnership and community development program as revised in the Regulation of State Minister of State-owned Enterprise Number: PER-08/MBU/2013 on the fourth amendment PER-05/MBU/2007 concerning the partnership between State-owned Enterprise and small businesses and community development program. 2. Assist government programs in alleviating poverty in underdevelopment villages by providing loans through the partnership and community development program for the eminent/potential villages to develop in the form of Developmental Village. Thus, the received impact by the community is more effective and measurable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan triwulanan telah disampaikan melalui PORTAL PKBL BUMN secara tepat waktu sesuai peraturan pemegang saham. • Telah dibentuk desa binaan di Yogyakarta dan Manado. • Sinergi BUMN belum dapat terealisasi. • Telah dilakukan kegiatan berupa pemberian bantuan kebutuhan pokok/dasar, pembangunan sarana prasarana umum diantaranya di Ambon dan Manado. • Telah ditetapkan KEP.22/KU.13/2015 tentang Pedoman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. • Telah dilakukan pencatatan secara terpisah terkait biaya perusahaan. / • Trimester reports have been submitted through PORTAL PKBL BUMN in a timely manner according to the regulation of the stakeholders. • Developmental Villages have been established in Yogyakarta and Manado. • Synergy of State-owned Enterprises have not yet realized. • The distribution of basic needs and the construction of public infrastructure have been carried out, among other places are Ambon and Manado. • KEP.22/KU.13/2015 on the Guideline of Partnership and Community Development has been established. • Separate record related to the company's cost assignment shall be has been carried out.

Arahan RUPS Directive of GMS	Realisasi Realization
<ol style="list-style-type: none"> 3. Create synergy between coach State-owned Enterprises of partnership and community development program and maintain coordination with the regional State-owned Enterprises so that the distribution of loans is more focused and oriented, thus the establishment of the Developmental Village/ City is more effective and accurate. 4. The distribution of Community Development Program shall be focused on the activities that may improve the social and economy condition of a community of a particular region. Such activities may include the development of public infrastructure and distribution of basic needs that has direct impact on poverty alleviation. 5. The Board of Directors shall prepare Standard Operational Procedures (SOP) as the internal basis of partnership and community development program implementation. The SOP shall accommodate the procedure of emergency response for disaster management that use the partnership and community development program fund. 6. The partnership and community development program financing sourced from the company's cost assignment shall be documented separately from the previous partnership and community development program and placed to a separate account. 	

PELAKSANAAN RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015 UNTUK TAHUN BUKU 2014

PENYELENGGARAAN RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

Sesuai dengan surat undangan Direksi Nomor: AP.I.2567/KU.16/2015/PD-B tanggal 11 Mei 2015, telah diselenggarakan RUPS PT Angkasa Pura I (Persero) pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2015
 Waktu : 10.30 WIB sampai selesai
 Tempat : Kantor Kementerian BUMN Ruang Rapat Lt. 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

AGENDA RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

Adapun agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, sebagai berikut.

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Penetapan tantiem Tahun Buku 2015, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015.
4. Penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk Tahun 2015.

IMPLEMENTATION OF 2015 AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2014

EXECUTION OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2014

In accordance with the invitation letter of the Board of Directors Number: AP.I.2567/KU.16/2015/PD-B on 11 May 2015, GMS of PT Angkasa Pura I (Persero) was convened on:

Time, date : Tuesday, 12 May 2015
 Time : 10.30 WIB until finished
 Place : Office of the Ministry of State-owned Enterprise Meeting Room Fl. 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta

AGENDA OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2014

As for the agendas of AGMS for the fiscal year of 2014 are as follows.

1. Approval of the Annual Report for the Fiscal Year 2014 of the Company's Activities and Implementation of Supervisory Function by the Board of Commissioners, Ratification of the Company's Financial Statement for the Fiscal Year Ending on 31 December 2014, and Approval of the Annual Report of Partnership Program and Community Development for the fiscal year 2014
2. Determination of the allocation of net income of the Company for the financial year ending on 31 December 2014.
3. Determination of tantiem for the fiscal year of 2015, Salary, Honorarium, and Allowance and other facilities for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2015.
4. Reappointment of Public Accountant Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partner for 2015.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

ATTENDANCE RECAPITULATION OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2014

2015 AGMS was attended by President Commissioner and all members of Board of Commissioners, including Chairman and members of Committees under the Board of Commissioners, and President Director and all members of Board of Directors

Tabel Kehadiran Pada RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 / Table of Attendance of AGMS for The Fiscal Year of 2014

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Hadir / Present
1	Suratto Siswodihardjo	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner	√
2	Hermanto Dwiatmoko	Komisaris / Commissioner	√
3	Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	√
4	Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	√
5	Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	√
6	Tommy Soetomo	Direktur Utama / President Director	√
7	Gunawan Agus Subrata	Direktur / Director	√
8	Robert Daniel Waloni	Direktur / Director	√
9	Yushan Sayuti	Direktur / Director	√
10	Polana Banguningsih Pramesti	Direktur / Director	√

KEPUTUSAN RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

Pada tanggal 12 Mei 2015, PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 dengan keputusan sebagai berikut.

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014.
- b. Mengesahkan laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 11/LAI-API/SBY 1/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

DECISIONS OF AGMS FOR THE FISCAL YEAR OF 2014

On 12 May 2015, PT Angkasa Pura I (Persero) has convened AGMS with the following decisions.

1. a. Approved the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the state of the course of the Company for the fiscal year of 2014 including implementation report of the supervisory function of Board of Commissioners during the Fiscal Year of 2014.
- b. Ratified the financial statement of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2014 audited by Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partnersas contained in the report Number 11/LAI-API/SBY 1/II/2015 on 20 February 2015 with the reasonable opinion in all material respects, as well as fully release and discharge (*volledig acquit et de charge*) the Board of Directors and Board of Commissioners from their managerial and supervisory functions that have been implemented during the fiscal year of 2014, to the extent that their acts did not constitute criminal offenses and such acts were reflected in the Annual Report and Financial Statement of the Company, with the points as follows.

1) Laporan Posisi Keuangan

1) The Statement of Financial Position

Ribuan Rupiah / in Thousand Rupiah

Uraian	31 Desember 2014	Description
ASET / ASSET		
Aset lancar	2.636.161.302	Operating Revenue
Aset Tidak lancar		Operating Expense
- Piutang Jangka Panjang	45.270.604	- Operating Profit (Loss)
- Investasi Jangka Panjang	135.758.230	- Non-Operating Income
- Aset Pajak Tangguhan	3.933.286	- Non-Operating Expense
- Properti Investasi-Bersih	160.595.003	- Profit before Income Tax
- Aset Tetap-Bersih	11.208.184.825.	- Income Tax
- Aset Dalam Penyelesaian	1.622.207.733	- Non-Controlling Interest
- Aset Tidak Lancar Lainnya	18.715.060	- Current Year Net Income of Parent Entity
JUMLAH	15.830.826.042	TOTAL
LIABILITAS / LIABILITIES		
Liabilitas Jangka Pendek	2.841.758.681	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	2.588.292.605	Long-term Liability
EKUITAS / EQUITY		
- Modal Saham	3.488.245.000	- Share Capital
- Cadangan Lainnya	2.617.123.262	- Other Reserves
- Penyertaan Modal Negara	2.926.166.059	- State Capital Investment
- BPYBDS / <i>Government Contribution Pending</i>	255.096.706	- Determination in Status (BPYBDS)
- Nilai Buku Aset Tetap Kenavigasian	139.255.232	- Book Value of Fixed Assets on Navigation
- L/R yang belum direalisasikan atas efek	44.831.597	- Unrealized loss or profit on securities
- saldo laba belum Ditetapkan Penggunaannya	928.601.520	- Retained earnings with unspecified use
- Kepentingan Non Pengendali	1.455.379	- Non-Controlling Interest
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	15.830.826.042	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

2) Laporan Laba Rugi Komprehensif

2) Comprehensive Income Statement

Ribu Rupiah / in Thousand Rupiah

Uraian	31 Desember 2014	Description
Pendapatan Operasional	4.583.535.770	Operating Revenue
Beban Operasional	3.406.096.055	Operating Expense
Laba (Rugi) Operasional	1.177.439.715	Operating Profit (Loss)
Pendapatan Non Operasional	256.032.223	Non-Operating Income
Beban Non Operasional	254.064.075	Non-Operating Expense
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.179.407.863	Profit before Income Tax
Pajak Penghasilan	250.499.347	Income Tax
Kepentingan Non Pengendali	306.996	Non-Controlling Interest
Laba Bersih Tahun Berjalan Entitas Induk	928.601.520	Current Year Net Income of Parent Entity

c. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:

c. Ratified the annual report of partnership and community development program of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2014 audited by Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners as stated in the report Number: 11D/LAI-

11D/LAI-PKBL/API/SBY 1/II/15 tanggal 20 Februari 2015, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dijalankan selama Tahun Buku 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut.

PKBL/API/SBY 1/II/15 on 20 February 2015 with the reasonable opinion in all material respects, as well as fully release and discharge (*volledig acquit et de charge*) the Board of Directors and Board of Commissioners from their managerial and supervisory functions of artnership and community development program that have been implemented during the fiscal year of 2014, to the extent that their acts did not constitute criminal offenses and such acts were reflected in in the Annual Report of the Company, with the points as follows.

Uraian	31 Desember 2014	Uraian
Total aktiva/Pasiva	Rp 45.485.649.179	Total Assets/Liabilities
Pendapatan	Rp 15.628.653.995	Income
Jumlah beban	Rp 23.017.758.160	Total expense
Piutang Pinjaman Mitra Binaan Bersih	Rp 33.010.662.497	Partnership Program Net Receivable
Penyaluran pinjaman kemitraan	Rp 21.077.000.000	Distribution of Partnership Loan
Dana Pembinaan Kemitraan/hibah	Rp 2.722.048.827	Partnership Fund/Grants
Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana	94.60%	Effectiveness of Fund Distribution
Tingkat Kolektibilitas Pinjaman	84.24%	Collectability
Penyaluran Bina Lingkungan – Dana Laba BL BUMN Pembina	Rp 1.783.504.652	Distribution of Community Development - Fund from Net Income of Community Development's Coach State-owned Enterprise
Penyaluran Bina Lingkungan- Dana BL Pembina	Rp 14.034.803.684	Distribution of Community Development - Fund from Community Development's Coach State-owned Enterprise

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp928.601.520.000,00 dengan alokasi untuk:
 - Sebesar 20% dari laba bersih atau sejumlah Rp185.720.304.000,00 dibagikan sebagai dividen.
 - Sebesar 80% dari laba bersih atau sejumlah Rp742.881.216.000,00 untuk cadangan. RUPS memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai ketentuan dan peraturan perundangan.
 - Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 akan ditetapkan dalam keputusan sendiri.
 - Menyetujui pendapatan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuanga PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.
- Approved the use of net profit attributable to the parententity of Rp928.601.520.000,00 with the following allocations:
 - 20% of which or equal to Rp185,720,304,000.00 is distributed as dividends.
 - 80% of which or equal to Rp742,881,216,000.00 is distributed as reserves
AGM authorized the Board of Directors to implementthe payment of dividends in accordance with the provisions and regulations of law.
 - Tantiem for the fiscal year of 2014, Salary, Honorarium, and Allowance and other facilities for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2015 will be determined separately.
 - Reappointed Public Accounting Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners to audit the financial statement of PT Angkasa Pura I (Persero) for the fiscal year ending on 31 December 2015 and Financial Report of Partnership and Community Development Program of PT Angkasa Pura I (Persero) for the fiscal year ending on 31 December 2015.

ARAHAN RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 DAN REALISASINYA

Adapun arahan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 dan realisasinya adalah sebagai berikut.

DIRECTION OF ANNUAL REPORT GMS FOR FISCAL YEAR 2014 AND REALIZATION

The direction of Annual Report GMS Fiscal Year 2014 and the realization are as follows.

**Tabel Arahan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 dan Realisasinya /
Table Tutorial GMS 2014 and Realization**

Arahan RUPS GMS Direction	Realisasi Realization
<p>Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, catatan, saran dan rekomendasi baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. / Follow up and completely resolved findings, notes, suggestions and recommendations from internal auditor (BPK RI and/or KAP) as well as internal auditor (SPI) year 2014 and the previous years. Follow up resolved findings/suggestions from auditor in order to be comprehensively discussed with Board of Commissioners and submitted as written report to Shareholders.</p>	<p>Temuan, catatan, saran dan rekomendasi auditor eksternal atau internal telah ditindak lanjuti kemudian dilaporkan kepada pemegang saham setelah dibahas terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris / Findings, notes, suggestions and recommendation from external or internal auditor are followed up and reported to Shareholders after they're discussed with the Board of Commissioners.</p>
<p>Mengupayakan efisiensi biaya Perusahaan khususnya terhadap biaya-biaya operasional yang tidak berkaitan langsung peningkatan layanan, keamanan dan pemeliharaan. / Undertake the Company's cost efficiency especially for operational costs which is not directly related to service improvements, security and maintenance.</p>	<p>Efisiensi biaya terhadap biaya yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan layanan, keamanan dan pemeliharaan guna meningkatkan laba perusahaan / Undertake cost efficiency for indirect cost related to service improvements, security and maintenance to raise the company's profit.</p>
<p>Menyampaikan laporan secara tepat waktu melalui portal kementerian BUMN dan senantiasa memperbaharui data informasi di portal tersebut yang terdiri dari portal <i>Financial Information System</i>, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL dan Portal Publik serta melaporkannya kepada unit pengelola portal. / Report submitted in timely manner through Ministry of State-Owned Enterprises portal and constantly update the information on the portal, consist of Financial Information System portal, Assets portal, Human Capital portal, PKBL portal and Public portal as well as submitting the report to portal management unit.</p>	<p>Penyampaian Laporan Triwulan dan Tahunan beserta kelengkapannya dilakukan secara elektronik melalui sistem PORTAL BUMN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan pemegang saham dengan memperhatikan perubahan data informasi yang terjadi. / Completed Quarterly Report and Annual Report are delivered electronically through State-Owned Enterprises Portal System in timely manner and in accordance with the provision from Shareholders with regard to information change.</p>
<p>Menyampaikan data, laporan dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik secara tepat waktu dan konsisten serta memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014. / Submit the data, report and documents to Ministry of State-Owned Enterprises in timely manner and consistent as well as comply with other duties and responsibilities according to Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-18/MBU/10/2014.</p>	<p>Penyampaian Laporan Triwulan dan Tahunan beserta kelengkapannya dilakukan secara elektronik melalui sistem PORTAL BUMN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan pemegang saham / Complete Quarterly Report is delivered electronically through State-Owned Enterprises Portal System in timely manner and in accordance with the provision from Shareholders.</p>

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan pemegang saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a Company's Organ with the duty of general and/or specific supervision according to Articles of Association, provide guidance to the Board of Directors, and ensure the implementation of GCG practice. Board of Commissioners is responsible to the Shareholders in supervising the policy of Board of Directors concerning general operation of the Company that refers to the business plan approved by the Board of Commissioners and Shareholders, as well as ensuring compliance with all rules and applicable regulations.

Every member of Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, capability and commitment to take the time to perform his/her duties. Thus, the role of Board of Commissioners is very strategic. Therefore, Board of Commissioners composition must enable effective, precise and fast decision making process. In addition, Board of Commissioners also required to be able to act independently, in the sense of no conflict of interest may interfere with their

mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

REFERENSI PERATURAN

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan seluruh perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 serta Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab Perseroan yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, tugas pokok Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
6. Menetapkan kebijakan/mekanisme mengenai pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP.

ability to perform their tasks independently and critically, both in their internal relation and affiliation with the Board of Directors.

REGULATION REFERENCE

Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company requires all companies under the Indonesian law to have Board of Commissioners with the duty of supervising management policy, internal management process, as well as supervising and providing advice/suggestion to Board of Directors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners has clear functions, duties, and responsibilities accordance in with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011 as well as Articles of Association and authorization given by GMS, as stipulated in the Working Procedure of the Board of Directors and Board of Commissioners. Board of Commissioners is responsible for the Company is responsible and authorized to supervise the Board of Directors on the Company's management and advises the Board of Directors, as well as ensures compliance with all regulations and legislation in force.

Generally, the principal task of the Board of Commissioners include the following.

1. Comply with the Articles of Association and legislation as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness.
2. With a good faith, prudence and responsible in carrying out monitoring and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
3. Supervise the policy of the Company management and the Company's business conducted by the Board of Directors including the supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget as well as the Company's Articles of Association and the General Meeting of Shareholders, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and provide advice to the Board of Directors.
4. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.
5. Examine and review annual report prepared by the Board of Directors and sign it.
6. Establish policy/mechanism regarding the approval/feedback/opinion on the RJPP and RKAP drafts.

7. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
8. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris untuk memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.
9. Menyusun rencana untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan Direksi menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP, dan memasukannya kedalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
10. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
11. Menetapkan kebijakan yang mengatur tentang pembahasan gejala menurunnya kinerja perusahaan, pemberian saran kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan, dan pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
12. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan, serta melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan.
13. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
14. Menetapkan kebijakan/pedoman yang mengatur Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.
15. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga serta memasukan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
16. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
17. Menetapkan kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
18. Menyusun rencana penelaahan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan memasukan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
19. Memantau dan memastikan efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perseroan.
7. Provide opinion to and advice the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget regarding the rationality of the Board of Commissioners' approval of the RJPP and RKAP.
8. Determine the Board of Commissioners policy to monitor Board of Directors' compliance in implementing the company management regarding RKAP and/or RJPP.
9. Prepare a plan to evaluate the compliance of the Board of Directors in running the company's management in accordance with RKAP and/or RJPP, and attached it into the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
10. Supervise the implementation of the Work Plan and Annual Budget of the Company and present the assessment results and opinion to the GMS.
11. Determine the policy governing the discussion of symptoms of the declining performance of the company, provide advice to the Board of Directors to fix the problems that lead to the company's declining performance, and report it to the GMS in case the symptoms of the declining performance of the company emerge.
12. Follow the development of the Company's activities, provide opinion and advice to the GMS on each matter of importance to the Company management, as well as report it immediately to the GMS in case the symptoms of the declining performance of the Company emerge.
13. Providing advice and suggestion to the GMS concerning every matter of importance for the management of the Company's management.
14. Determine policies/guidelines governing the Commissioner to conduct supervision over the Company's compliance with legislations, Articles of Association, as well as the agreements and commitments made by the company with third parties.
15. Develop Board of Commissioners work plan that addresses the Board of Commissioners compliance to legislations, Articles of Association, and agreements and commitments made by the company with third parties as well as attach it into the Annual Work Plan of the Board of Commissioners.
16. Carry out other obligations in order to conduct monitoring and providing advice, as long as does not contradict the legislations, Articles of Association, and/ or GMS Resolution.
17. Establish policy and guidelines to monitor the implementation Good Corporate Governance principles.
18. Develop review plan for Good Corporate Governance principles and incorporate it into the Annual Work Plan of Board of Commissioners.
19. Monitor and ensure the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance practices in the Company.

20. Menetapkan kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang memadai, dan menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya.
21. Menetapkan secara tertulis kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dan melaporkan penilaian kinerja tersebut dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- A. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
- B. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
- D. Wewenang Dewan Komisaris
- E. Hak Dewan Komisaris
- F. Etika Jabatan
- G. Rapat Dewan Komisaris
- H. Komite-komite Dewan Komisaris
- I. Sekretaris Dewan Komisaris

Beberapa pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

20. Determine policy regarding work plans and adequate annual budgets for the Board of Commissioners and prepare work plan for the next period of Board of Commissioners.
21. Determine a written policy regarding assessment and evaluation of the Board of Commissioners performance, evaluate the achievement of the Board of Commissioners and stated it on the minutes of Board of Commissioners Meeting and deliver the performance assessment in the Report on the Implementation of Board of Commissioners Supervision.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In details, Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners is set in the Board Manual, among others, contains instructions on Working Procedure of the Board of Commissioners represented as phase of activity in a structured, systematic, easy to understand and can be run consistently. With Board Manual, it is expected to achieve high working standard in line with GCG principles.

The content of the Board of Commissioners working guidelines set in the Board Manual that regulates the following matters.

- A. Requirement and Composition of the Board of Commissioners
- B. Responsibility of the Board of Commissioners
- C. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
- D. Authorization of the Board of Commissioners
- E. Rights of the Board of Commissioners
- F. Ethics
- G. Meeting of the Board of Commissioners
- H. Committees Under the Board of Commissioners
- I. Secretary to the Board of Commissioners

Some basic working guidelines of the Board of Commissioners regulated in the Board Manual are described as follows.

AUTHORIZATION OF BOARD OF COMMISSIONERS

In conducting their duties, Board of Commissioners authorized to:

1. Study books, letters, and other documents, examine cash for verification purposes and other securities, and examine the Company's assets;
2. Entering the grounds, buildings, and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials on all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all of the policies and actions that have been and will be taken by Board of Directors;
5. Request Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; 7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu; 10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. | <ol style="list-style-type: none"> 6. Appoint and dismiss Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary; 7. Suspend member of the Board of Directors in accordance with the provisions of Articles of Association; 8. Establish committees other than Audit Committee, if deemed necessary, by taking the state of the Company into account; 9. Employ expert service for particular matter and in a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary; 10. Take care of the management of the Company if certain circumstances arise for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association; 11. Attend Board of Directors Meeting and provide insights on the matter discussed; 12. Carry out other monitoring authority as long as does not contrary to the legislation, Articles of Association, and/or GMS. |
|---|---|

HAK DEWAN KOMISARIS

Adapun hak-hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu, terukur dan lengkap.
2. Para Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan kepada Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. dan Direksi dan/atau pejabat lainnya wajib memberikan penjelasan.
3. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, atau membentuk komite-komite sesuai kebutuhan dan kemampuan Perseroan.
4. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mendapatkan fasilitas dari Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
7. Menerima Tantiem yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan atau mengalami peningkatan kinerja.

ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi,

RIGHTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The rights of Board of Commissioners are as follows.

1. Have access to the Company's information in timely manner, measurable and comprehensive.
2. Members of the Board of Commissioners reserves the right to request for clarification to the Board of Directors and/or other officials on all issues related to the management of the Company and the Board of Directors and/or other officials are required to provide an explanation.
3. Call for expert assistance in performing their duties for a certain period of time at the expense of the Company, or forming committees according to the needs and capacities of the Company.
4. To assist in the implementation of their duties, the Board may appoint the Secretary to the Board of Commissioners at the expense of the Company.
5. Receive honorarium and benefits/facilities including compensation for post-service allowance that the types and amount are determined by GMS according to the applicable regulations.
6. Receive facilities from the Company that are determined by the GMS
7. Receive Tantiem as determined by GMS if the Company reaches the level of profit or increased in performance.

ETHICS OF BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out their duties and functions, the Board of Commissioners shall always underlie themselves with ethics. Ethics of the Board of Commissioners are as follows.

1. Members of the Board of Commissioners is prohibited from having conflict of interest and take personal advantage of the decision-making process and/or

- dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut.
 4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 - c. Melampirkan Pakta Integritas dalam usulan Direksi yang harus mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang saham.
 - d. Memperbaharui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala/pada setiap awal tahun.
- implementation of the Company's activities, other than the legitimate income.
2. Members of the Board of Commissioners shall report his/her or their relative's share ownership of the Company and other Company's to the Company Secretary, including any amendments thereto.
 3. Members of the Board of Commissioners shall make disclosure in the event of conflict of interest, and Member of the Board of Commissioners in question should not be involved in the decision making process of the Board of Commissioners relating thereto.
 4. In carrying out their duties and functions, each member of the Board of Commissioners should:
 - a. Comply with the Articles of Association and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
 - b. With a good faith, prudence and responsibility in carrying out monitoring and advising the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
 - c. Attach Integrity Pact in the Board of Directors suggestions which must obtain recommendation from the Board of Commissioners and the approval of Shareholders.
 - d. Renewing statement of no conflict of interest on a regular basis/at the beginning of each year.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Berdasarkan *Board Manual*, kriteria anggota Dewan Komisaris meliputi:

- a. Kriteria formal, yaitu:
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain;
 - Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon/anggota Kepala Daerah/Wakil

CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBER

All members of the Board of Commissioners met the determined criteria. Based on the Board Manual, criteria for members of the Board of Commissioners include:

- a. Formal criteria, consist of:
 - Legally competent;
 - Never been declared bankrupt, never been appointed as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who found responsible for causing a company to go bankrupt, and have never been convicted of a crime that state loss in the period of 5 (five) years prior to his/her appointment;
 - Have no a familial relationship or relationship by marriage up to the third degree, either from vertically or horizontally or relationship by marriage (or son-in-law) with another members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors;
 - Hold no concurrent position as member of the Board of Directors on State-Owned Enterprises, Local Government-Owned Enterprises, Private Enterprises, and other positions in accordance with the provisions of the legislation, official of political party and/or candidate/member of

- Kepala Daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dalam rangka menjalankan fungsinya;
- b. Kriteria material, yaitu:
- Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji, serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
 - Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan.

the legislature and/or candidate/member of the Regional Head/Vice Regional Head, as well as other position which may cause conflict of interest;

- Committed to provide sufficient time in order to perform his/her functions;
- b. Material criteria, consist of:
- Have integrity, never been involved directly or indirectly in the manipulation and deviant practices, treasonous, as well as other actions that may cause loss for the company he/she working on or previously working on;
 - Understand the Company management issues related to one of management functions;
 - Have adequate knowledge in the Company's line of business;

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut.

FIT AND PROPER TEST BOARD OF COMMISSIONERS

All members of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) have met the criteria and qualifications required by fit and proper test pursuant to the Company Law, Articles of Association, the regulations related to corporate governance, as well as the regulations and other concerned provisions, including the provision of Independent Commissioner. All members of the Board of Commissioners has adequate integrity, competence and reputation. This is proven by passing the fit and proper test described as follows.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan / Table of Fit and Proper Test

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Assessor	Hasil Results
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner / Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Lulus / Passed
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Lulus / Passed
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Lulus / Passed
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Lulus / Passed
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Lulus / Passed
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Lulus / Passed

DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan akta persetujuan rapat RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

APPOINTMENT BASIS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBER

Members of the Board of Commissioners are appointed by deed approval of GMS. The appointment basis of each member of Board of Commissioners is as follows.

Tabel Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris / Table of Basis of Appointment of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner / Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 / Decree of the Minister of State Owned Enterprise Number SK-210/MBU/10/2015 dated October 29, 2015
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 / Decree of the Minister of State Owned Enterprise Number SK-210/MBU/10/2015 dated October 29, 2015
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-75/MBU/2014 tanggal 7 April 2014 / Decree of the Minister of State Owned Enterprise Number SK-75/MBU/2014 dated April 7, 2014
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-75/MBU/2014 tanggal 7 April 2014 / Decree of the Minister of State Owned Enterprise Number SK-75/MBU/2014 dated April 7, 2014
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 / Decree of the Minister of State Owned Enterprise Number SK-210/MBU/10/2015 dated October 29, 2015
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 / Decree of the Minister of State Owned Enterprise Number SK-210/MBU/10/2015 dated October 29, 2015

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris pada PT Angkasa Pura I (Persero) diatur dalam *Board Manual* Perseroan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan peraturan tersebut, anggota Dewan Komisaris antara lain harus memenuhi persyaratan materiil sebagai berikut.

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki:

- Integritas;
- Dedikasi;
- Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; serta
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

DIVERSED COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS POLICY

Diversity policy on the composition of Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) regulated in the Board Manual of the Company in accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprise No. PER-02/MBU/02/2015 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOEs. Under the regulation, the Board of Commissioners, among others, must meet the requirements as follows.

Member of the Board of Commissioners should have:

- Integrity;
- Dedication;
- Understand Company management issues related to one of management function;
- Adequate knowledge in the field of Persero/Perum in which the concerned nominated; and
- Provide sufficient time to perform his/her duties.

Perseroan juga senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman dalam usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian.

The Company also strives to keep the diversity of the Board of Commissioners' composition in age, gender, education, work experience and expertise.

Pada periode 2016, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan penilaian kemampuan dan kepatutan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

In the period of 2016, the composition diversity of Board of Commissioners is reflected in various education, working experience, age and gender as shown in the following table.

**Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris /
Table of Composition Diversity of the Board of Commissioners**

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman kerja Working Experience	Keahlian Expertise
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	55 tahun / 55 years old	Laki-laki / Male	S1 Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1983. Lulus tahun 2014 dari program S2 Pasca Sarjana Ilmu Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Dan melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. / Bachelor degree in Political Science, Faculty of Sociopolitics Sciences of University in 1983. Graduated in 2014 from graduate program of Planning and Public Policy, Faculty of Economics at the University of Indonesia. And continue on doctorate degree in Philosophy, Faculty of Humanities, University of Indonesia.	Pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas dari tahun 2014 sampai 2015, pendiri <i>Center for Indonesian Regional and Urban Studies</i> (CIRUS) pada tahun 1999, dan dari tahun 2008 hingga saat ini menjadi Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group (CSG). / He served as Minister of National Development Planning (PPN) /Head of Bappenas from 2014 to 2015, founder of the Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) in 1999, and the Executive Director of CIRUS Surveyors Group (CSG) from 2008 until now.	Ilmu Sosial dan Politik / Sociopolitics Science
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	61 tahun / 61 years old	Laki-laki / Male	Lulusan Akademi TNI Angkatan Udara dan pendidikan Sarjana Ekonomi / Air Force Academy graduate and held Bachelor of Economics.	Menjabat sebagai Komandan SESKOAU tahun 2010, IRJENAU tahun 2011, WAKASAU tahun 2013 dan Kasum TNI tahun 2013 sampai dengan 1 April 2014. / Served as Commander of the Air Force Staff and Command School on 2010, Air Force Inspector General in 2011, Air Force Deputy Chief of Staff in 2013 and Indonesian Armed Forces Chief of the General Staff from 2013 until April 1, 2014.	Ekonomi, <i>Human Capital</i> dan Hukum / Economics, Human Capital and Law

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman kerja Working Experience	Keahlian Expertise
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	59 tahun / 59 years old	Perempuan / Female	<i>Master of Public Management</i> di Amerika Serikat / <i>Master of Public Management</i> in United States	Pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2013, Direktur Sistem Manajemen Investasi tahun 2010 dan Direktur Pelaksanaan Anggaran di tahun 2009. / Served as Secretary to Directorate General Budget of Ministry of Finance in 2013, Director of Investment Management System in 2010 and Director of Budget Implementation in 2009.	Bidang Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	42 tahun / 42 years old	Laki-laki / Male	Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia. / Graduate Program in Faculty of Economics Law, University of Indonesia.	Pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX dari tahun 2011 sampai 2014, Kepala Bidang Administrasi Kekayaan BUMN, Kementerian Negara BUMN dari tahun 2010 sampai 2013 dan Komite Audit PT Askes (Persero) dari tahun 2008 sampai 2010. / Served as a member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX from 2011 to 2014, Head of SOE Property Administration, Ministry of State Enterprises from 2010 to 2013, and Audit Committee of PT Askes (Persero) from 2008 to 2010.	Bidang Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi. / Accounting, Financial and Information Technology
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	47 tahun / 47 years old	Laki-laki / Male	S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan dan Pasca Sarjana Jurusan Hukum Universitas Indonesia / Bachelor of Economics, Parahyangan Catholic University and graduate program of Faculty of Law, University of Indonesia	Pernah menjabat sebagai Direktur PT Execujet Indonesia tahun 2011-Juni 2015. Saat ini masih menjabat sebagai Direktur PT Ferco Seating System Indonesia sejak tahun 2014, Direktur Teknologi dan Informasi <i>Experd Human Resources Consultant</i> sejak tahun 2010, dan Direktur Decorus Contract sejak tahun 1994. / Served as Director of PT Execujet Indonesia from 2011 until June 2015. Currently serve as Director of PT Ferco Seating System Indonesia since 2014, Director of Information and Technology of Experd Human Resources Consultant since 2010, and Director of Decorus Contract since 1994.	Teknik Kebandarudaraan / Airport Technical Affair

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman kerja Working Experience	Keahlian Expertise
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	59 tahun / 59 years old	Laki-laki / Male	S1 Program Sarjana Teknik Sipil Struktur Kontruksi dari Institut Teknologi Bandung, program S2 pasca Sarjana jurusan Teknik System Transportasi dari Institut Teknologi Bandung- Leeds University, dan S3 Program Doktor Jurusan Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2011. / Bachelor of Civil Engineering in Construction Structures of Bandung Institute of Technology, graduate program of Transportation System Engineering of Bandung Institute of Technology-Leeds University, and doctorate program of Management Department of Jakarta State University in 2011.	Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 29 Oktober 2015. Beliau menjabat berbagai posisi penting di Kementerian Perhubungan diantaranya saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Pernah pernah menduduki jabatan Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari tahun 2015 sampai dengan 2016, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dari tahun 2014 sampai 2015, Kepala Bandar Udara Budiarto Curug dari tahun 2009 sampai 2014 dan Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari tahun 2007 sampai 2009. / Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) since 29 October 2015. He held various key positions in the Ministry of Transportation, among others, he currently serves as Head of Transportation Research and Development Body. Currently serves as Director of Airport of the Directorate of Airport Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) since 2015 until 2016, served as Head of Air Transportation Research and Development Agency from 2014 to 2015, Chief of Budiarto Curug Airport from 2009 to 2014 and Head of Planning Directorate General of Air Transportation from 2007 to 2009	Bidang Operasional bandara / Airport Operational



JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 komposisi Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) harus memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan.

Per 31 Desember 2016 Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Adapun komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

NUMBER AND COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

According to Law No. 19 year 2003 on State-Owned Enterprise and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011, the composition of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura (Persero) should allow effective, precise, and fast decision making as well as able to act independently with no conflict of interest.

As of December 31, 2016, the Board of Commissioners has 6 (six) members, consist of 1 (one) President Commissioner who concurrently acts as Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and four (4) Commissioners. The composition of the Board of Commissioners per December 31, 2016 is as follows.

Tabel Komposisi Dewan Komisaris / Table of the Composition of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Tanggal Efektif Effective Date
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner	Indonesia	29 Oktober 2015 / October 29, 2015	29 Oktober 2015 / October 29, 2015
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Indonesia	7 April 2014 / April 7, 2014	7 April 2014 / April 7, 2014
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Indonesia	7 April 2014 / April 7, 2014	7 April 2014 / April 7, 2014
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Indonesia	7 April 2014 / April 7, 2014	7 April 2014 / April 7, 2014
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	Indonesia	29 Oktober 2015 / October 29, 2015	29 Oktober 2015 / October 29, 2015
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	Indonesia	29 Oktober 2015 / October 29, 2015	29 Oktober 2015 / October 29, 2015

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Affiliation criteria among the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders includes:

- Affiliation between Board of Director member with fellow member of Board of Director.
- Affiliation between Board of Director member with Board of Commissioners member.
- Affiliation between Board of Directors member with Principle and/or Controlling Shareholders.
- Affiliation between Board of Commissioners member with fellow member of Board of Commissioners; and
- Affiliation between Board of Commissioners member with Principle and/or Controlling Shareholders.

Affiliation among the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders is shown in the following table:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris / Table of Affiliate Relations Board of Commissioners

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris / Financial, Family and Stewardship Relationship of Commissioner															
Nama Komisaris Commissioner Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Kepengurusan Stewardship Relationships	
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner / Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individual.

Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai berikut.

**Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris /
Table of Job Descriptions of the Supervisory Function of Board of Commissioners**

Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Bidang Tugas Segment of Duty	
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner / Independent Commissioner	Melakukan fungsi koordinasi atas fungsi pengawasan dan penasehatan oleh semua bidang yang ada pada Dewan Komisaris terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan maupun usaha Perusahaan.	Performs coordination function on supervisory and advisory functions to the entire existing fields of the Board of Commissioners regarding the policy and the course of management of the Company or the Company's business.

JOB DESCRIPTIONS OF THE SUPERVISORY FUNCTION OF BOARD OF COMMISSIONERS

To make the role of the Board of Commissioners effective, the distribution of tasks among members of the Board considers the division of tasks of the Board of Directors. The division of tasks among the members of the Board of Commissioners is intended to allow the implementation of each member of the Board of Commissioners' duties can run smoothly, effectively and efficiently, in accordance with each responsibilities and authorities so that the role of Board of Commissioners member is clear, as collective or individual.

The division of functions, duties and responsibilities of Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows.

Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Bidang Tugas Segment of Duty	
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Membidangi pengawasan dan pemberian nasehat segala aspek yang berkaitan dengan bidang SDM dan Umum, Hukum, Organisasi, Remunerasi, dan Nominasi serta pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan <i>Human Capital</i> dan <i>General Affair Director</i> .	Supervisory and advisory functions on all aspects related to Human Capital and General Affairs, Legal, Organizational, Remuneration and Nomination as well as the procurement of goods and services. In performing his duty, the Commissioner coordinates with Human Capital and General Affairs Director.
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Bidang komersial dan pengembangan usaha, serta merangkap Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG.	Commercial and business development, concurrently serves as Head of Business Risk and GCG Committee.
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Membidangi pengawasan dan pemberian nasehat segala aspek yang berkaitan dengan bidang akuntansi, keuangan, dan teknologi informasi dan PKBL merangkap Ketua Komite Audit. Dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan <i>Finance Director</i> dan <i>IT Director</i> .	Supervisory and advisory functions on all aspects related to accounting, financial, and information technology and PKBL, as well as concurrently serves as Head of Audit Committee. In performing his duty, the Commissioner coordinates with Finance Director and IT Director.
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	Membidangi pengawasan dan pemberian nasehat segala aspek yang berkaitan dengan bidang teknik kebandarudaraan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut berkoordinasi dengan <i>Technical Director</i> .	Supervisory and advisory functions on all aspects related to airport technical affair. Technical Director.
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	Membidangi pengawasan dan pemberian nasehat segala aspek yang berkaitan dengan bidang operasional bandara. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut berkoordinasi dengan <i>Operation Director</i> .	Supervisory and advisory functions on all aspects related to airport operational affair. In performing his duty, the Commissioner coordinates with Operation Director.

Uraian tentang tugas masing-masing Dewan Komisaris sebagai berikut.

- Bidang *Human Capital* dan Umum, Hukum, Organisasi, Remunerasi dan Nominasi
 - Bertanggung jawab terhadap segala aspek yang berkaitan dengan pengawasan sistem dan prosedur penyiapan *human capital*;
 - Memantau dan mengawasi kebijakan dan implementasi strategi dan kebijakan Direktur bidang *human capital/personalia* dan umum, mulai dari sistem rekrutmen, penegakan disiplin, sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai, organisasi perusahaan dan aspek hukum, serta legalitas lainnya;
 - Melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan harmonisasi hubungan antar pegawai dengan kegiatan pertemuan dengan Direksi dan pejabat kunci secara periodik (bulanan) dalam rangka identifikasi pegawai-pegawai dengan kinerja bagus dan kurang bagus, terjadinya diharmonisasi hubungan antar pegawai, serta rapat internal Dewan Komisaris untuk memecahkan permasalahan yang ada.
- Bidang Teknik
 - Bertanggung jawab terhadap segala aspek teknis termasuk *master plan* dan sistem operasional kebandarudaraan;
 - Memantau dan mengawasi kebijakan Direktur Teknis terkait airport *facilities readiness* dan *airport equipment readiness*;

The description of duties of each of the Board of Commissioners is as follows.

- Human Capital and General Affairs, Legal, Organizational, Remuneration and Nomination
 - Responsible for all aspects related to monitoring systems and procedures on human capital training;
 - Monitor and supervise the implementation of policies and strategies from Director of Human Capital/Personnel and General Affair, from recruitment system, disciplinary enforcement, remuneration and incentive systems, employee training, the company's organizational and legal aspects, as well as other legality;
 - Monitor employee performance and maintain harmonious relationship among employees through periodic (monthly) meeting with the Board of Directors and key officials in order to identify employees with good and less good performance, keep harmonious relationship among employees, as well as the Board of Commissioners internal meeting to solve existing problems.
- Technical
 - Responsible for all technical aspects including master plan and airport operation system;
 - Monitor and supervise Technical Director policies related to airport facilities readiness and airport equipment readiness;

- Bertanggung jawab terhadap aspek teknis yang berhubungan dengan mutu pelayanan dan fasilitas keselamatan penerbangan;
- Melakukan pengawasan terhadap usaha peningkatan CSI, pengembangan *customer loyalty programme* dan penerapan konsep *eco airport* dengan kegiatan pertemuan dan kunjungan secara periodik untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktur Teknik dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan penumpang dan mitra usaha, serta melakukan penilaian dan *reward* bandara terbaik;
- Melakukan pengawasan terhadap utilitas alat produksi sesuai dengan standar dan kesinambungan dengan kegiatan observasi secara periodik ke bandara untuk melihat optimalisasi pemanfaatan alat produksi tersebut.

3. Bidang Operasi

- Bertanggung jawab terhadap segala aspek operasi termasuk *master plan* dan sistem operasional kebandarudaraan;
- Memantau dan mengawasi kebijakan Direktur Operasi terkait *airport operation, safety environment, dan aviation security* (penambahan/pengembangan);
- Bertanggung jawab terhadap aspek operasi bandara yang berhubungan mutu pelayanan dan fasilitas keselamatan penerbangan;
- Melakukan pengawasan terhadap usaha peningkatan CSI, pengembangan *customer loyalty programme* dan penerapan konsep *eco airport* dengan kegiatan pertemuan dan kunjungan secara periodik untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada penumpang dan mitra usaha serta melakukan penilaian dan *reward* bandara terbaik;
- Melakukan pengawasan terhadap standar operasional prosedur dan kesinambungan dengan kegiatan observasi secara periodik ke bandara untuk melihat optimalisasi kegiatan operasional bandara.

4. Bidang Komersial dan Pengembangan Usaha GCG

- Bertanggung jawab terhadap aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemasaran dan pengembangan usaha, perencanaan strategis Perusahaan, serta pemantauan maupun evaluasi atas penerapan GCG terhadap peningkatan nilai atau skor GCG;
- Memantau dan mengawasi kebijakan peningkatan pendapatan non aeronautika;
- Memantau dan mengawasi penetapan dan implementasi kebijakan di bidang pemasaran dan pengembangan usaha untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi berdasarkan RJPP dan RKAP;
- Memantau dan mengawasi kebijakan dan proses bisnis agar berlangsung melalui proses manajemen risiko;

- Responsible for technical aspects related to quality of service and flight safety facilities;

- Supervise CSI improvement efforts, customer loyalty program development and implementation of eco airport concept through periodic meetings and visits to monitor efforts that have been made by Technical Director in order to improve services provided for passengers and business partners, as well as to assess and reward the best airports;

- Monitor production tools utility according to standards along with periodic airport observation activities to observe production tools utility optimization.

3. Operational

- Responsible for all technical aspects including master plan and airport operation system;

- Monitor and supervise Operation Director policies related to airport operations, safety environment and aviation security (addition/development);

- Responsible for technical aspects related to quality of service and flight safety facilities;

- Supervise CSI improvement efforts, customer loyalty program development and implementation of eco airport concept through periodic meetings and visits to improve services provided for passengers and business partners, as well as to assess and reward the best airports;

- Monitor production tools utility according to standards along with periodic airport observation activities to observe production tools utility optimization.

4. Commercial and GCG Business Development

- Responsible for aspects related to marketing systems and procedures and business development, strategic planning of the Company, as well as monitoring and evaluation of the GCG implementation to increase GCG value or score;

- Monitor and supervise non-aeronautical revenue growth policy;

- Monitor and supervise the establishment and implementation of policies on marketing and business development to support Vision and Mission based on RJPP and RKAP;

- Monitor and supervise policies and business processes to go through risk management process;

- Melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap pengendalian risiko;
 - Mengawasi kebijakan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip GCG;
 - Mengkoordinir kegiatan Komite Risiko Usaha dan GCG sebagai Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG;
 - Mengevaluasi pencapaian KPI Perusahaan.
5. Bidang Akuntansi, Pengadaan Barang dan Jasa, Keuangan dan Teknologi Informasi
- Melakukan pengawasan terhadap program PKBL dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dengan kegiatan kunjungan ke bandara secara periodik untuk memastikan bahwa penyaluran dana PKBL telah memenuhi asas tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran, serta pengembalian pinjaman tidak macet;
 - Melakukan evaluasi KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
 - Melakukan pengawasan dan memantau serta melakukan monitoring atas segala aspek yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;
 - Mengkoordinir kegiatan Komite Audit sebagai Ketua Komite Audit;
 - Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur bidang akuntansi keuangan dan penyempurnaan implementasi ERP-SAP dengan kegiatan pertemuan secara periodik dalam rangka inventarisasi permasalahan dalam implementasi ERP-SAP dan solusi pemecahannya, serta observasi secara periodik untuk memastikan implementasi ERP-SAP telah valid;
 - Bertanggung jawab terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem prosedur pembuatan rencana kerja dan anggaran (RJPP dan RKAP), termasuk anggaran eksploitasi, investasi, pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan;
 - Memantau dan mengawasi penetapan dan implementasi kebijakan dan strategi bidang keuangan dan teknologi informasi.
- Supervise and advise risk control;
 - Monitor the Company's policy to comply with GCG principles;
 - Coordinate Business Risk and GCG Committee activities as Head of Business Risk and GCG Committee ;
 - Evaluate the Company's KPI achievement.
5. Accounting, Procurement, Finance and Information Technology
- Supervise the PKBL program and report it to Shareholders through periodic airport visit to ensure PKBL fund allocation meets the principle of right amount, on time and on target, as well as the loan repayment is not stalled;
 - Evaluate public accounting firm (KAP) that will audit the Company's financial statement;
 - Supervise and monitor as well as oversee all aspects related to the procurement of goods and services;
 - Coordinate Audit Committee activities as Head of Audit Committee;
 - Supervise the system and procedures for financial accounting and ERP-SAP implementation improvements with periodic meetings in order to make issues inventory of the ERP-SAP implementation and the solutions, as well as periodic observation to validate the implementation of ERP-SAP;
 - Responsible for all aspects related to the preparation procedure of Work Plan and Budget (RJPP and RKAP), including exploitation budget, investment, procurement of goods and service, accountability and financial reporting;
 - Monitor and supervise determination and implementation of policies and strategies in finance and information technology.

KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah 6 (enam) orang, yang 2 (dua) orang diantaranya atau sama dengan 33% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Members of Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) have fulfilled the amount, composition, criteria and independence in accordance with the Regulation of the Minister of State Enterprises No. Per-01/MBU/2011, at least 20% (twenty percent) of the Board of Commissioners member shall be independent commissioner. Currently, the number of the Board of Commissioners member is six (6) members, two (2) of whom or equal to 33% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. Thus, the composition complies with the rules set by the Ministry of SOEs on Independent Commissioner.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai Kriteria Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011, Peraturan Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Masing-masing Komisaris Independen Perseroan, yaitu Sdr Andrinof Chaniago dan Sdr Boy Syahril Qamar telah membuat Surat Pernyataan independen dengan redaksional, sebagaimana di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN (LETTER OF UNDERTAKING) KOMISARIS INDEPENDEN PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Dalam rangka pengangkatan kami sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (persero) PT Angkasa Pura I, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak maupun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam surat pernyataan ini sebagai berikut.

1. Kami sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris Independen yang diberikan oleh pemegang saham dan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Komisaris independen menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Komisaris Independen, tidak akan memanfaatkan posisi kami pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu.
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian kami sebagai Komisaris independen, sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Demikian pernyataan dan kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya, atas kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONER

According to the criteria based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011, Regulation of the Company's Independent Commissioner has met the stipulated criteria, which is have no financial, management, share ownership and/or familial relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or with the concerned SOE, which may affect his/her ability to act independently.

STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONER

Each Independent Commissioner, Mr. Andrinof Chaniago and Mr. Boy Syahril Qamar, has submitted Statement of Independence with redactional as follows:

LETTER OF UNDERTAKING INDEPENDENT COMMISSIONER PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

As of our appointment as the Company's Independent Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero), we, the undersigned as below:

Name :
Identity :
Permanent Address :

With full awareness as a human being who is responsible, with free will that is free from influence or pressure from any parties, hereby declare our readiness and willingness to be bound by the points stated as follows.

1. We are able to carry out our duties and mandate as Independent Commissioner given by shareholders and the state in accordance with legislations and the Company's articles of association.
2. During our tenure as Independent Commissioner, we hereby declare that we are in no position to have conflict of interest with the Company's goals.
3. During our tenure as Independent Commissioner, we will not take advantage of our position, either directly or indirectly for personal, family and relatives advantages, moreover certain group's advantage.
4. Will receive the decision regarding our dismissal as Independent Commissioner, at any time and will not sue or file a legal process regarding the dismissal.

Hereby this statement and willingness are made truthfully on full awareness as responsible individuals.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Selain menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero), beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan pada Perseroan atau instansi lainnya dalam lingkup yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait. Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CONCURRENT POSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Beside serving as the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero), several members of Board of Commissioners also holds positions in the Company or other institutions within the scope of permissible according to regulation and other related provisions. Board of Commissioners has revealed concurrent position he/she held. Board of Commissioners concurrent position shown in the table below.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris / Table of Dual Position Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position on Other Company / Institution	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Company / Institution
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner	Direktur Eksekutif / Executive Director	CIRUS Surveyors Group (CSG)
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	-
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Direktur anggaran di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman / Budget Director of Economics and Maritime Department	Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan / Directorate General of Budget of the Ministry of Finance
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Asisten Deputi Layanan Hukum / Assistant Deputy of Legal Affairs	Kementerian BUMN / Ministry of SOEs
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	1. Direktur / Director 2. Direktur Teknologi dan Informasi / Information and Technology Director 3. Direktur / Director	1. PT Ferco Seating System Indonesia. 2. <i>Experd Human Resources Consultant</i> 3. <i>Decorus Contract</i>
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara / Airport Director of Directorate General of Air Transportation	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportations

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Perseroan dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Perseroan dan atau pihak terkait dengan Perseroan, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Perseroan dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Perseroan.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In case of conflict of interest emerges, member of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officials are prohibited from conducting an act that may cause loss of the Company or reduce the Company's profit and shall disclose the conflict of interest on each decision he/she took. The conflict of interest in question, among others, are the Company's economic interest with economic interest of personal, Board of Commissioners member, Board of Directors member or other parties related to the Company, provide preferential treatment to certain parties outside the applicable procedures and regulations. In case a decision must be made, the Company's economic interest should be prioritized and avoid any loss or reduction in profit of the Company.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

PT Angkasa Pura I (Persero) menyelenggarakan Daftar Khusus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga di Perseroan dan perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut.

STOCK OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PT Angkasa Pura I (Persero) provides Special Register for all members of the Board of Commissioners as a form of commitment to avoid any activity that potentially cause conflict of interest. The Special Register contains information of the Board of Commissioners and their family's share ownership on the Company and other companies. Details of Share Ownership of the Board of Commissioners is presented in the following table.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris / Table Shareholdings Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham (dalam lembar) Shares ownership (in sheets)	
		PT Angkasa Pura I (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero)	Perusahaan Lain Other Company
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None

REKOMENDASI/PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 18 (delapan belas) kali dan rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali;
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Komite Audit serta Komite Risiko Usaha dan GCG;
3. Dewan Komisaris telah mengikuti RUPS sebanyak 2 (dua) kali;
4. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan atas Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2015, dan RKAP Tahun Buku 2016, serta perkara penting lainnya yang memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris;
5. Dewan Komisaris telah mengikuti program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan dan *monitoring* ke bandara yang menjadi tanggung jawab Perusahaan;
7. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap program penilaian bandara terbaik tahun 2015;
8. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengembangan usaha Perusahaan, serta permasalahan strategis yang dihadapi;

RECOMMENDATIONS/IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2016, the Board of Commissioners carried out their duties and responsibilities as follows.

1. The Board of Commissioners conducted internal meeting for 18 (eighteen) times and coordination meeting with Board of Directors for 12 (twelve) times;
2. The Board of Commissioners conducted meeting of Audit Committee and Business Risk and GCG Committee;
3. The Board of Commissioners attended GMS for 2 (two) times;
4. The Board of Commissioners provided response to the Company's Annual Report for Fiscal Year 2015, RKAP Fiscal Year 2016, as well as other important matters that require feedback/approval from the Board of Commissioners;
5. The Board of Commissioners attended competence development programs for the Board of Commissioners;
6. The Board of Commissioners conducted visits and monitoring to airports that are the responsibility of the Company;
7. The Board of Commissioners conducted supervision and monitoring of the best airport assessment program of 2015;
8. The Board of Commissioners conducted supervision and monitoring to the Company's business development and strategic issues faced;

9. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan internal kontrol dan GCG di Perusahaan.

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Adapun keputusan yang telah di keluarkan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2016, yaitu:

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.01/DK.AP.I/2016 Tentang Pemberhentian Anggota Komite Risiko Usaha Dan *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.02/DK.AP.I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit Perusahaan (Persero) PT Angkasa Pura I.
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.03/DK.AP.I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* (Persero) PT Angkasa Pura I.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.04/DK.AP.I/2016 Tentang Pengangkatan Kembali *Staff* Sekretariat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.05/DK.AP.I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.06/DK.AP.I/2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I atas nama Ganesha Dian Farisi dan Wawan Zulmawan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 serta SK-16/S.MBU/2012 Rapat Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berupa rapat internal Dewan Komisaris, maupun Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Rapat Internal Dewan Komisaris selama 2016 dilaksanakan sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Sedangkan, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama 2016 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun Daftar Kehadiran Rapat Internal Dewan dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai berikut.

9. The Board of Commissioners conducted supervision and monitoring to the implementation of internal controls and GCG.

BOARD OF COMMISSIONERS DECISION

Decisions of the Board of Commissioners made in 2016 are as follows.

1. Decree of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.01/DK.AP.I/2016 on Dismissal of Business Risk and Good Corporate Governance Committee.
2. Decree of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.02/DK.AP.I/2016 on Dismissal and Appointment of Head and Vice Head of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero).
3. Decree of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.03/DK.AP.I/2016 on Dismissal and Appointment of Head and Vice Head of Business Risk and Good Corporate Governance Committee of PT Angkasa Pura I (Persero).
4. Decree of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.04/DK.AP.I/2016 on Reappointment of Secretary to the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).
5. Decree of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No: KEP.05/DK.AP.I/2016 on Dismissal and Appointment of Secretary to the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).
6. Decree of the Board of Commissioners No: KEP.06/DK.AP.I/2016 on Appointment of Business Risk and GCG Committee members of PT Angkasa Pura I (Persero) in the name of Ganesha Dian Farisi and Wawan Zulmawan.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Refers to the Articles of Association, Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011 and SK-16/S. MBU/2012, Meeting of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) is conducted at least once a month. Meetings of the Board of Commissioners may be either internal meeting of the Board of Commissioners or inviting the Board of Directors for joint meeting.

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

Board of Commissioners Internal Meeting in 2016 conducted 19 (nineteen) times. While Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting in 2016 conducted 12 times. Attendance of the Board Internal Meeting as well as Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris / Table of Board of Commissioners Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Meeting of Board of Commissioners			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors		
		Kehadiran Attendance			Kehadiran Attendance		
		Jumlah Rapat Total meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage	Jumlah Rapat Total meeting	Jumlah Kehadiran Total attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	18	17	94.44%	12	8	66.67%
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	18	16	88.89%	12	9	75%
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	18	13	72.22%	12	7	58.33%
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	18	13	72.22%	12	9	75%
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	18	15	83.33%	12	9	75%
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	18	10	55.66%	12	8	66.67%

**AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DEWAN
KOMISARIS****RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS**

Sepanjang tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

**AGENDA, DATE AND PARTICIPANT OF BOARD OF
COMMISSIONERS MEETING****BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING**

In 2016, the agenda, date, and participant of Board of Commissioners Internal Meeting are as follows.

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris / Table of Board of Commissioners Internal Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Meeting Agenda	Peserta Meeting Participant	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation
1.	15 Januari 2016 / January 15, 2016	1. Pembahasan usulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan 2. Progress proyek pengembangan 3 (tiga) Bandara (Semarang, Banjarmasin, Yogyakarta) 3. Lain-lain 1. Discussion on Board of Directors Candidate proposal for Subsidiary Company 2. Progress on 3 (three) airports development projects (Semarang, Banjarmasin, Yogyakarta) 3. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Agus Santoso	Hadir / Present	
2.	27 Januari 2016 / January 27, 2016	1. Persiapan rapat dengan Direksi di Bali 2. Pembahasan usulan penghapusbukuan Piutang Macet Konsesional 3. Lain-lain 1. Preparation of meeting with Board of Directors in Bali 2. Discussion on write-off Bad Debt Concessionaire proposal 3. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Meeting Agenda	Peserta Meeting Participant	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation
3.	12 Februari 2016 / February 12, 2016	1. Hasil penilaian bandara tahun 2015 2. Lain-lain 1. Airport assessment result in 2015 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Tidak hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
4.	26 Februari 2016 / February 26, 2016	1. Pembahasan surat Direksi tentang permohonan persetujuan/tanggapan atas tindak lanjut kerjasama pemanfaatan pemberian kontribusi tetap dan rencana pembelian aset Pemerintahan Provinsi NTB. 2. Lain-lain 1. Discussion on Board of Directors Letter on the request for approval/feedback regarding the cooperation follow up on permanent contribution utilization and NTB Provincial Government asset purchase plan. 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Tidak hadir / Absent	Rapat di luar Kota / Out of town official duty
			Agus Santoso	Hadir / Present	
5.	26 April 2016 / April 26, 2016	1. Pembahasan Realokasi Anggaran Investasi tahun 2016 2. Lain-lain 1. Discussion on Investment Budget Reallocation of 2016 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Tidak hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Agus Santoso	Hadir / Present	
6.	16 Mei 2016 / May 16, 2016	1. Pembahasan Izin Prinsip Pembangunan Infrastruktur Air Bersih di Bali 2. Permohonan rekomendasi pembayaran konsesi Kementerian Perhubungan 3. Seleksi calon anggota Komite Risiko Usaha dan GCG 4. Lain-lain 1. Discussion on License of Clean Water Infrastructure Development Principle in Bali 2. Request on concession payments recommendations of Ministry of Transportation 3. Selection of Business Risk and GCG Committee candidates 4. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Meeting Agenda	Peserta Meeting Participant	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation
7.	25 Mei 2016 / May 25, 2016	1. Pembahasan pelimpahan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I 2. Tanggapan BOD atas rencana realokasi Investasi tahun 2016 3. Pembahasan usulan tentang rencana pendanaan Eksternal PT Angkasa Pura I (Persero) 4. Lain-lain 1. Discussion on the delegation of authority of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I 2. Board of Directors response on investment budget reallocation of 2016 3. Discussion on PT Angkasa Pura I external financing plan proposal 4. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	
8.	30 Juni 2016 / June 30, 2016	1. Usulan penghapusan eks rumah dinas Direksi 2. Usulan penghapusan aset tetap yang terkena proyek pengembangan Bandar Udara 3. Lain-lain 1. Proposal of elimination of the former official residence of Board of Directors 2. Proposal of fixed assets disposal affected by the airport development project. 3. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Tidak Hadir / Absent	Rapat di Luar Kota / Out of Town Meeting
			Agus Santoso	Hadir / Present	
9.	1 Agustus 2016 / August 1, 2016	1. Pembahasan revisi anggaran investasi untuk pembebasan lahan New Yogyakarta Internasional Airport 2. Usulan Penghapusan eks rumah dinas Direksi dan Usulan Penghapusan aset tetap yang terkena proyek pengembangan Bandar udara 3. Pengajuan struktur organisasi kantor pusat PT Angkasa Pura I (Persero) 4. Evaluasi kinerja semester I tahun 2016 5. Lain-lain 1. Discussion on investment budget revision for New Yogyakarta Internasional Airport land acquisition 2. Proposal of elimination of the former official residence of Board of Directors and disposal of fixed assets affected by the airport development project. 3. Proposal of organizational structure of PT Angkasa Pura I head office 4. Performance evaluation on semester I year 2016 5. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Meeting Agenda	Peserta Meeting Participant	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation
10.	16 Agustus 2016 / August 16, 2016	1. Pembahasan Rencana Pinjaman dan FS Bandara Kulonprogo 2. Lain-lain 1. Discussion on Loan Plan and Feasibility Study of Kulonprogo Airport 2. Others	Andrinof Chaniago	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	
11.	18 Agustus 2016 / August 18, 2016	1. Pembahasan <i>Feasibility Study</i> Bandara Kulonprogo 2. Lain-lain 1. Discussion on Feasibility Study of Kulonprogo Airport 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Agus Santoso	Hadir / Present	
12.	30 Agustus 2016 / August 30, 2016	1. Pembahasan pemanfaatan lahan PT Angkasa Pura I di Bandara Ngurah Rai - Bali untuk Gas Insulated Swichgear (GIS) PT PLN 2. Lain-lain 1. Discussion on PT Angkasa Pura I land utilization on Ngurah Rai Airport - Bali for Gas Insulated Swichgear (GIS) of PT PLN 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Tidak Hadir / Absent	Rapat di Luar Kota / Out of Town Meeting
			Agus Santoso	Hadir / Present	
13.	7 Oktober 2016 / October 7, 2016	1. Pembahasan pemanfaatan lahan PT Angkasa Pura I di Bandara Ngurah Rai - Bali untuk Gas Insulated Swichgear (GIS) PT PLN 2. Lain-lain 1. Discussion on PT Angkasa Pura I land utilization on Ngurah Rai Airport - Bali for Gas Insulated Swichgear (GIS) of PT PLN 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	
14.	25 Oktober 2016 / October 25, 2016	1. Pembahasan usulan RKAP tahun 2017 PT Angkasa Pura I (Persero) dan Lain-lain 1. Discussion on PT Angkasa Pura I land utilization on Ngurah Rai Airport - Bali for Gas Insulated Swichgear (GIS) of PT PLN 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty

No.	Tanggal Date	Agenda Meeting Agenda	Peserta Meeting Participant	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation
15.	7 November 2016 / November 7, 2016	1. Presentasi calon <i>Head of Internal Audit</i> PT Angkasa Pura I 2. Pembahasan usulan kenaikan manfaat pensiun pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) 3. Lain-lain 1. Presentation of candidate of the Head of Internal Audit PT Angkasa Pura I (Persero) 2. Discussion on raise in employee retirement benefits proposal for Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) PT Angkasa Pura I 3. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Agus Santoso	Hadir / Present	
16.	23 November 2016 / November 23, 2016	1. Permohonan tanggapan pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Daerah 2. Lain-lain 1. Request of response for the cooperation implementation with local government 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	
17.	1 Desember 2016 / December 1, 2016	1. Wawancara dan presentasi calon Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG 2. Lain-lain 1. Interview and presentation of candidates for Business Risk and GCG Committee member 1. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present	
18.	28 Desember 2016 / December 28, 2016	Permasalahan internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Issue	Andrinof Chaniago	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Selby Nugraha Rahman	Hadir / Present	
				Hadir / Present	

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2016, the agenda, date, and participant of Board of Commissioners and Board of Director Joint Meeting are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris / Table of Board of Commissioners Joint Meeting

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participant		Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation	Peserta Rapat Participant		Alasan Ketidakhadiran Attendance
			Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Attendance		Direksi Dewan Komisaris	Kehadiran Attendance	
1.	29 Januari 2016 / January 29, 2016	1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Anak Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) yang merugi 2. Progress Proyek Pembangunan 3 (tiga) Bandara (Semarang, Banjarmasin dan Jogja Baru) / 1. Discussion on subsidiary companies of PT Angkasa Pura I performance evaluation that incur loss 2. Progress on 3 (three) airports development projects (Semarang, Banjarmasin, Jogja Baru)	Andrinof Chaniago	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir / Present	
2.	14 Maret 2016	Pembahasan Laporan Manajemen Audited 2015 dan Pembahasan surat-surat masuk Direksi. / Discussion on Audit Management Report 2015 and Board of Directors incoming letters	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present		Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir	
3.	29 Maret 2016	1. Evaluasi kinerja anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) yang merugi. 2. Progress proyek pembangunan 3 (tiga) bandara (Semarang, Banjarmasin, Yogyakarta-Baru). 3. Lain-lain 1. Performance evaluation of the subsidiary companies of PT Angkasa Pura I that incur loss. 2. Progress on 3 (three) airports development projects (Semarang, Banjarmasin, Yogyakarta-Baru) 3. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present		Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Agus Santoso	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir / Present	

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participant		Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation	Peserta Rapat Participant		Alasan Ketidakhadiran Attendance
			Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Attendance		Direksi Dewan Komisaris	Kehadiran Attendance	
4.	26 April 2016 / April 26, 2016	1. Pembahasan relokasi anggaran Investasi tahun 2016. 2. Lain-lain / 1. Discussion on Investment Budget Reallocation of 2016 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty
			Anandy Wati	Hadir / Present		Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir / Present	
5.	17 Mei 2016 / May 17, 2016	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Manajemen tahun 2015 Discussion on Management Accountability Report 2015	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present		Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Tidak Hadir / Absent	Rapat Diluar Kota / Out of town official duty	Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir / Present	
6.	30 Mei 2016	Pembahasan Realokasi Investasi Tahun 2016 / Discussion on Investment Budget Reallocation of 2016	Andrinof Chaniago	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Tidak Hadir / Absent	Rapat di luar Kota / Out of Town Meeting	Adi Nugroho	Hadir / Present	
7.	7 Juni 2016	1. Pembahasan Rencana Penerbitan Obligasi 2. Lain-lain 1. Discussion on Bond Issuance Plan 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participant	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation	Peserta Rapat Participant	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Attendance
			Dewan Komisaris Board of Commissioners			Direksi Dewan Komisaris		
			Agus Santoso	Tidak Hadir / Absent	Rapat di luar Kota / Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Adi Nugroho	Hadir / Present	
8.	15 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan sewa lahan dan konsesi dengan Kementerian Perhubungan Permasalahan Lahan Surabaya antara TNI AL dengan PT Angkasa Pura I (Persero) Feasibility study proyek jogya baru Rencana penerbitan obligasi Usulan Komisaris dan Direksi anak perusahaan Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Explanation of land lease and concessions with Ministry of Transportation Land Issue in Surabaya between the Navy and AP I Feasibility Study of New Jogja Project Discussion on Bond Issuance Plan Proposal from the Board of Commissioners and Board of Director of subsidiaries Others 	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present		Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir / Present	
9.	2 Agustus 2016	<p>Pembahasan <i>New Yogyakarta International Airport</i> /</p> <p>Discussion on New Yogyakarta International Airport</p>	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir / Absent	Rapat di luar Kota Out of Town Meeting	Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota Out of town official duty	Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota Out of town official duty	Adi Nugroho	Hadir / Present	

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participant		Alasan Ketidakhadiran Absence Explanation	Peserta Rapat Participant		Alasan Ketidakhadiran Attendance
			Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Attendance		Direksi Dewan Komisaris	Kehadiran Attendance	
10.	16 Agustus 2016	Pembahasan rencana pinjaman dan <i>Feasibility Study</i> Bandara Kulon Progo / Discussion on loan plan and Feasibility Study of Kulon Progo Airport	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present		Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir / Absent	Rapat di luar Kota / Out of Town Meeting	Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Adi Nugroho	Hadir / Present	
11.	20 September 2016	1. Pembahasan laporan manajemen semester I dan kinerja sampai dengan bulan Agustus 2016 2. Lain-lain / 1. Discussion on management report semester I and the Company's performance until August 2016. 2. Others	Andrinof Chaniago	Tidak Hadir / Absent	Cuti (Ibadah Haji) / Time off (Hajj)	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Hadir / Present		Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir / Present	
12.	25 Oktober 2016	1. Pembahasan usulan RKAP tahun 2017 PT Angkasa Pura I (Persero) 2. Lain-lain / 1. Discussion on PT Angkasa Pura I (Persero) RKAP proposal for 2017 2. Others	Andrinof Chaniago	Hadir / Present		Danang S. Baskoro	Hadir / Present	
			Boy Syahril Qamar	Hadir / Present		Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Anandy Wati	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Novrihandri	Hadir / Present	
			Dwi Ary Purnomo	Tidak Hadir / Absent	Dinas Luar Kota / Out of town official duty	Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Agus Santoso	Hadir / Present		Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Selby Nugraha Rachman	Hadir / Present		Adi Nugroho	Hadir / Present	

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016, program pengembangan kompetensi untuk Dewan Komisaris sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk *sharing session* secara *inhouse training* dengan mengundang pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya. Di samping itu, pengembangan kompetensi dilakukan dalam bentuk mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Kegiatan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2016 sebagai berikut.

COMPETENCE DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2016, the Board of Commissioners competence development mostly conducted in the form of inhouse training inviting specialized expert speakers. In addition, the competence development conducted through participation on seminar by external party.

The competence development of Board of Commissioner during 2016 are as follows.

**Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris /
Table of Competence Development of the Board of Commissioners**

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Andrinof Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	Studi Banding dan <i>Workshop</i> / Comparative Study and Workshop	Bandara Mumbai dan Bangalore - India , 30 Maret sampai dengan 5 April 2016 / Bandara Mumbai dan Bangalore - India , 30 Maret sampai dengan 5 April 2016
		<i>Private Participation un Airport Development - Now is tahune time to take sensible and concrete steps (Indonesia Aviation Research Center/IARC)</i>	Hotel Borobudur- Jakarta, 8 Desember 2016 / Hotel Borobudur- Jakarta, 8 Desember 2016
		2 Tahun mewujudkan nawacita / 2 Years of Nawa Cita realization	Hotel Darmawangsa, 3 Nopember 2016 / Hotel Darmawangsa, 3 Nopember 2016
Boy Syahril Qamar	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-	-
Anandy Wati	Komisaris / Comisioner	-	-
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	-	-
Selby Nugraha Rahman	Komisaris / Commissioner	<i>Japan International Aerospace Exhibition 2016</i>	Jepang, 12-15 Oktober 2016 / Japan, October 12-15, 2016
		<i>Airport Security Conference</i>	London, 27-28 September 2016 / London, September 27-28, 2016
		<i>Security Essen 2016</i>	Jerman, 29-30 September 2016 / Germany, September 29-30, 2016
		2 Tahun mewujudkan nawacita / 2 Years of Nawa Cita realization	Hotel Darmawangsa, 3 Nopember 2016 / Darmawangsa Hotel, November 3, 2016
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	-	-

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS BARU

Program Orientasi Dewan Komisaris Baru PT Angkasa Pura I (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 serta SK-16/S.MBU/2012 yang dituangkan dalam *Board Manual*. Program orientasi dimaksudkan agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi program orientasi setidaknya memuat:

1. Prinsip-prinsip GCG
2. Gambaran umum perusahaan
3. Kewenangan yang didelegasikan
4. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONER

Orientation program for new member of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) refers to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011 and SK-16/S.MBU/2012 as stated on the Board Manual. Orientation program is intended to give the new Board of Commissioners member from different background and experience insight and understanding to the Company's activities and condition. The responsibility for conducting the introduction program held by Corporate Secretary or whoever is carrying out the functions as Corporate Secretary.

The material of the orientation program at least contains:

1. GCG principles
2. Company overview
3. Delegated authority
4. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Prosedur program orientasi yang diselenggarakan yaitu:

1. Sekretaris Perusahaan menyiapkan bahan-bahan yang akan diserahkan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk, sebagai bagian dari program pengenalan sebagai anggota Dewan Komisaris. Bahan-bahan yang akan diserahkan meliputi:
 - a. Laporan Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh Perseroan
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, serta gambaran tentang risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Anggaran Dasar.
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan program pengenalan seperti:
 - a. Jadwal pertemuan dengan Direksi Perseroan
 - b. Materi Presentasi oleh Dewan Komisaris Utama
 - c. Materi Presentasi oleh Direktur Utama
3. Sekretaris Dewan Komisaris memberitahukan kepada Dewan Komisaris bahwa program pengenalan siap untuk dilaksanakan.
4. Sekretaris Perusahaan menyiapkan dan menyampaikan undangan yang dilengkapi dengan bahan-bahan program pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk.
5. Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk mempelajari bahan-bahan yang diterima.
6. Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan program pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk berupa:
 - a. Presentasi oleh Komisaris Utama
 - b. Presentasi oleh Direktur Utama
 - c. Perkenalan dengan Pejabat-pejabat Perseroan
 - d. Presentasi ringkas dari Pejabat Perseroan sesuai bidang tugasnya
7. Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Pejabat Perseroan untuk mendapatkan penjelasan.
8. Sekretaris Dewan Komisaris mengatur kunjungan ke unit kerja/kantor cabang/proyek Perseroan.

Selama tahun 2016, tidak terdapat Dewan Komisaris Baru.

The procedures of the orientation is as follows:

1. The Corporate Secretary prepares the materials which then delivered to the newly appointed Board of Commissioners member as part of the Board of Commissioners orientation program. The materials include:
 - a. Report on the Implementation of good corporate governance by the Company
 - b. Corporate Overview related to objective, characteristic, and scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term work plan, competitive position, as well as general summary on risk and other strategic issues.
 - c. Notes related to delegated authority, internal and external audit, internal controlling system and policy, including Audit Committee.
 - d. Notes on duties and responsibilities as Board of Commissioners and Board of Directors as well as Articles of Association.
2. Secretary to the Board of Commissioners and Corporate Secretary prepare the necessary matters to conduct the orientation program, such as:
 - a. Meeting schedule with the Board of Directors
 - b. Presentation material for the President Commissioner
 - c. Presentation material for the President Director
3. Secretary to the Board of Commissioners informs the Board of Commissioners that the orientation program is set up.
4. Secretary to the Board of Commissioners prepares and delivers the invitation completed with orientation program materials for the newly appointed Board of Commissioners member.
5. The newly appointed Board of Commissioners member study the materials received.
6. Board of Commissioners and Board of Directors execute the orientation programs for the newly appointed Board of Commissioners member in the form of:
 - a. Presentation by the President Commissioner
 - b. Presentation by the President Director
 - c. Introduction to the Corporate Officials
 - d. Short Presentation by the Corporate Officials according to his/her field of work
7. The newly appointed Board of Commissioners member may state written question to the Corporate Officials requesting explanation.
8. Secretary to the Board of Commissioners arranges visit to the Company's work unit/branch office/project.

Throughout 2016, there was no new member of the Board of Commissioners

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2016 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui kontrak manajemen.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2016 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui kontrak manajemen.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui KPI dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun KPI Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) adalah sebagai berikut.

1. Keuangan dan pasar
2. Fokus pelanggan
3. Efektivitas produk dan proses
4. Fokus tenaga kerja
5. Kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan Penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2016 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pencapaian KPI Dewan Komisaris tahun 2016 telah melebihi yang ditargetkan yang disajikan sebagai berikut.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is committed to conducts continuous improvement to enhance their performance achievement. To support this, performance assessment of the Board of Commissioners is conducted through Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners in 2016 which was approved by Shareholders through management contract.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ACCORDING TO KPI

Performance Assessment of the Board of Commissioners through Key Performance Indicator (KPI) in 2016 is approved by Shareholders through management contract.

PROCEDURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT IMPLEMENTATION

Performance Assessment of the Board of Commissioners through KPI conducted by Shareholders through Annual General Meeting of Shareholders mechanism.

CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

KPI based Criteria for Superior Performance Assessment (KPKU) is as follows.

1. Financial and market
2. Customer focus
3. Product and process effectivity
4. Labour focus
5. Leadership, governance and social responsibility

PARTY WHO PERFORMS THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

Party who perform the Performance Assessment of the Board of Commissioners is Shareholders at GMS based on the obligations set in the applicable legislation and the Articles of Association as well as the mandate of Shareholders. Board of Commissioners will be accountable for their performance for 2016 period in GMS held in 2016.

RESULT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Commissioners' KPI achievement in 2016 exceeds the target set and presented below.

Key Performance Indicator	Skor Capaian Score Achieved		Key Performance Indicator
	Bobot Weighting	Skor Score	
Keuangan dan Pasar	24,00	26,89	Financial and market
Fokus Pelanggan	22,00	22,60	Customer focus
Efektivitas Produk dan Proses	20,00	19,13	Product and process effectivity
Fokus Tenaga Kerja	17,00	19,13	Labour focus
Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan	17,00	17,29	Leadership, governance and social responsibility
Bobot	100	103,54	Weighting

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN GCG ASSESSMENT

Selain penilaian Dewan Komisaris berdasarkan KPI, Dewan Komisaris senantiasa berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui GCG *assessment*. Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan GCG *assessment* terkait Kinerja Dewan Komisaris adalah, sebagai berikut.

1. Direksi menugaskan tim *assessment* GCG dalam melaksanakan *Self Assessment*.
2. Tim *Assessment* mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan *Assessment* GCG.
3. Tim *Assessment* memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan *Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris;
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;
4. Pemberian arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS BASED ON GCG ASSESSMENT

In addition to the KPI based Performance Assessment of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is committed to continuously improve their performance achievement. To support this, performance assessment of the Board of Commissioners is conducted through GCG *assessment*. Performance Assessment of the Board of Commissioners through *assessment* conducted in 2016 is as follows.

ASSESSMENT PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

GCG *Assessment* Procedures related to the Board of Commissioners performance is as follows.

1. Board of Directors assigns GCG *assessment* team to conduct *Self Assessment*.
2. *Assessment* Team coordinates all related work units including coordinates with the Board of Commissioners in order to conduct GCG *Assessment*.
3. *Assessment* Team gives composite score, including positive and negative factors that will be presented to the Board of Directors and then requested for the Board of Commissioners approval.
4. GCG *Assessment* implementation is conducted annually.

CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT

The criteria of the Board of Commissioners' *assessment* includes:

1. Board of Commissioners training/study program execution;
2. Division of duties and necessary factors determination to support the implementation of the Board of Commissioners duties;
3. Grant approval for RJPP and RKAP draft submitted by the Board of Director;
4. Provide directions to the Board of Directors for the implementation of the Company's plan and policy;
5. Monitor the Board of Directors for the implementation of the Company's plan and policy;
6. Monitor the execution of the subsidiaries/joint ventures management policy;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi; 8. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris; 9. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 10. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut; 11. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris; 12. Terdapatnya Komite Dewan Komisaris yang efektif. | <ol style="list-style-type: none"> 7. Role on the nomination of the Board of Directors members, Board of Directors performance assessment (individually and collegially) and tantiem/incentive suggestion for the Board of Directors performance; 8. Execution of conflict of interest potential related to Board of Commissioners; 9. Monitor the implementation of Good Corporate Governance principles; 10. Board of Commissioners meeting organization and the meeting's attendance rate; 11. The existence of Secretary to the Board of Commissioners who support secretarial duties of the Board of Commissioners; 12. The existence of effective Board of Commissioners Committee. |
|---|---|

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris terdiri dari tim *assessment* dari PT Adikarya Gemilang Solusindo.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pada 2016, hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris mencapai skor 32,85 dengan capaian 93,86% dan predikat Sangat Baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan GCG.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, internal audit, proses pelaporan keuangan, sedangkan Komite Risiko Usaha dan GCG merupakan organ pendukung yang dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris terkait permasalahan kebijakan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan risiko (*risk management*) dan kemungkinan terjadinya risiko usaha, serta pengelolaan perusahaan yang baik (GCG).

Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2016 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

PARTY WHO PERFORMS THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

Party who perform the Performance Assessment of the Board of Commissioners consists of assessment team from PT Adikarya Gemilang Solusindo.

RESULT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

In 2016, the results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners scored 32.85 with the achievement of 93.86% and Very Good predicate.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners has supporting committees which has specific duties and responsibilities to support Board of Commissioners performance. The Committees has well-defined guidelines so that their duties' implementation are directed and effective. The Committees under the Board of Commissioners are Audit Committee and Business Risk and GCG Committee.

Audit Committee has the duty and responsibility to monitor internal controlling system effectivity, risk management, internal audit, financial reporting process, while Business Risk and GCG Committee is a supporting organ intended to help the Board of Commissioners with issues on the Board of Directors policy related to risk management and business risk potential, as well as good corporate governance.

Board of Commissioners conducts periodic assessment on the Committees' performance effectivity. In 2016, the Board of Commissioners evaluates the Committees and the result is they have carried out their duties and responsibilities pretty effectively.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris didasarkan pada Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

STRUKTUR PENETAPAN REMUNERASI

Adapun struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Struktur Penetapan Remunerasi / Table Structure Determination of Remuneration

No.	Jenis Penghasilan Type of income	Keputusan Decision	Keterangan Information
1	Honorarium Honorarium	Rp 44.775.000,00/bulan (45% dari Dirut) Rp 44,775,000.00/month (45% of the President Director)	a. Komisaris Utama: 100% b. Komisaris: 90% dari Komisaris Utama a. President Commissioner 100% b. Commissioner 90% of the President Commissioner
2	Tunjangan / Allowances		
	Tunjangan Hari Raya / Religious Holiday Allowance	Diberikan sebesar 1 (satu) bulan Honorarium / Given as 1 (one) month honorarium	
	Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	Diberikan Sebesar 20% dari Honorarium / Given as 20% of honorarium	
	Asuransi Purna Jabatan / Pension Insurance	Premi Asuransi paling banyak 25% dari Honorarium / Insurance premium amount max. 25% from honorarium	
3	Fasilitas / Facilities		
	Fasilitas Kesehatan / Health Facility	Asuransi Kesehatan / Health Insurance	Sesuai PER-04/MBU/2014 / According to PER-04/MBU/2014
	Fasilitas Bantuan Hukum / Law Assistance Facility	Untuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan / To finance lawyer service/legal advisor, covering examination as witness, suspect and accused on judicial agency.	Sesuai PER-04/MBU/2014 / According to PER-04/MBU/2014

REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners receives a number of remuneration and other facilities. Remuneration policy and other facilities provided for Board of Commissioners are based on Shareholders Decision which refers to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprise No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for the Income Determination of Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of State Owned Enterprises.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The Company determines the remuneration for the Board of Commissioners according to the provisions on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises. According to the regulation, the amount of the Board of Commissioners income is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

REMUNERATION DETERMINATION STRUCTURE

The remuneration determination structure of the Board of Commissioners is as follows.

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Information
4	Tantiem/Insentif Kinerja / Tantiem/Performance Incentive		
	Tantiem/Insentif Kinerja / Tantiem/Performance Incentive	Memberikan tantiem sebesar Rp 16.000 juta untuk Direksi dan Dewan Komisaris / Memberikan tantiem sebesar Rp 16.000 juta untuk Direksi dan Dewan Komisaris	Komisaris Utama: 45% dari tantiem Direktur Utama Komisaris: 40,5% dari tantiem Direktur Utama. Dibagikan secara proposional sesuai masa kerja aktif yang bersangkutan. Pajak atas tantiem ditanggung pribadi bukan perusahaan. / President Commissioner 45% of President Director tantiem Commissioner: 40.5% of President Director tantiem. Shared proportionally based on individual time of service. Tax on tantiem is imposed on personally not the Company.
	Long Term Incentive	Tidak diberikan / Unavailable	

Pada tahun 2016, secara lebih rinci remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang telah terealisasi dapat disampaikan, sebagai berikut.

In 2016, remuneration realization for each member of the Board of Commissioners in details is presented as follows.

**Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris /
Table of Remuneration Structure of the Board of Commissioners**

Nama Name	Jabatan Position	Honor Honorarium	Tunjangan Allowances	Tantiem Tantiem	Total per Tahun Total per Year
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Adrinof Chaniago	Komisaris Utama / President Commissioner	615,600,000	359,100,000	170,402,615	1,145,102,615
Boy Syahrir Qamar	Komisaris / Commissioner	554,040,000	323,190,000	767,569,059	1,644,799,059
Anandy Wati	Komisaris / Commissioner	554,040,000	323,190,000	767,569,059	1,644,799,059
Dwi Ary Purnomo	Komisaris / Commissioner	554,040,000	323,190,000	767,569,059	1,644,799,059
Selby Nugraha Rachman	Komisaris / Commissioner	554,040,000	323,190,000	151,613,912	1,028,843,912
Agus Santoso	Komisaris / Commissioner	554,040,000	323,190,000	151,613,912	1,028,843,912
TOTAL / TOTAL		3,385,800,000	1,975,050,000	2,776,337,616	8,137,187,616

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

**Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris /
Table Group Total Remuneration of Commissioners**

Jumlah Remunerasi Remuneration Amount	Jumlah Komisaris Amount of Commissioners
Di atas Rp2 Milyar / Above Rp2 Billion	-
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar / Above Rp1 Billion - Rp2 Billion	6
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar / Above Rp500 million - Rp1 Billion	-
Rp500 juta ke bawah / Less than Rp500 million	-

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Alasan dan tata cara pemberhentian Dewan Komisaris di PT Angkasa Pura I (Persero) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan peraturan tersebut, alasan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sewaktu-waktu, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:
 - Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - Memasuki masa usia pensiun dan Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, tata cara pemberhentian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris untuk melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, Deputi Teknis bersama dengan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Komisaris kepada Menteri guna mendapatkan penetapan.
3. Penyampaian usulan pemberhentian, disertai dengan:
 - penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa

RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISMS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dismissal principle and mechanism of the Board of Commissioners PT Angkasa Pura I (Persero) are implemented based on Regulation of the Minister of State Owned Enterprise No. PER-02/MBU/02/2015 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOEs. Based on the Regulation, the rationality of the Board of Commissioners member dismissal is as follows.

1. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by the Minister Decree or the GMS with stating the cause.
2. Dismissal at any time could happen if the concerned member of the Board of Commissioners:
 - Unable to carry out his/her duties well;
 - Violate Articles of Association and/or regulations;
 - Engage in an action that may harm State Owned Enterprise and/or country;
 - Perform action that violate the ethics and/or propriety that should be honored as the member of the Board of Commissioners and the Board of Supervisors of SOEs;
 - Declared guilty under the court decision with final and binding force; or
 - Resign.
3. In addition to the dismissal rationality of the Board of Commissioners member, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the Minister or the GMS based on other cause which is deemed appropriate by the Minister or the GMS for the interests and objectives of SOEs, for example, but not limited to:
 - In the framework of corporate restructuring;
 - Entering the retirement age and State Civil Apparatus, for the Board of Commissioners member as an assignment from the Ministry of Technical or other Government Agencies.

Based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprise Number PER-02/MBU/02/2015 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Board of Supervisors of SOEs, the dismissal procedure for the Board of Commissioners is as follows.

1. Technical Deputy coordinates with Secretary to conduct evaluation regarding the concerned members of the Board of Commissioners who shall be dismissed.
2. Based on the evaluation, Technical Deputy and Secretary submit a proposal of the Board of Commissioners member dismissal to the Minister in order to obtain a conclusion.
3. Dismissal proposal is delivered along with:
 - Rationality on the dismissal;
 - Draft of the Decree of the Minister or decree of the entire Shareholder circularly regarding the dismissal, or the authorization letter to attend and make a decision on the GMS regarding the dismissal, or authorization letter to call/accept

- untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
4. Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis dan Sekretaris.
 5. Dalam proses pemberhentian, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis, Sekretaris dan/atau Deputi.
 6. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
 7. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
 8. Menteri dapat pula menugaskan Sekretaris dan/atau Deputi berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
 9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan di luar forum RUPS, maka Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
 11. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan oleh Menteri/pejabat yang memberitahukan.
 12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada angka 10 dianggap telah terpenuhi.
 13. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan Menteri/pejabat yang memberitahukan.
 14. Apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
 15. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam forum RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 16. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan berkoordinasi dengan pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
- self defense in case the dismissal is carried out outside the GMS.
4. The Minister may dismiss member of the Board of Commissioners based on the evaluation conducted by the Minister himself other than those proposed by Technical Deputy and Secretary.
 5. In the process of dismissal, the Minister may call for Technical Deputy, Secretary and/or Deputy consideration.
 6. Dismissal Plan of member of the Board of Commissioners before the end of his tenure, shall be notified in advance to the concerned members of the Board of Commissioners orally or in writing by the Minister.
 7. In the event that the Minister does not communicate this matter, the Minister authorizes the Technical Deputy to communicate the matter.
 8. The Minister may also assign the Secretary and/or Deputy by special power of attorney to do the notification.
 9. Determination of dismissal regarding the reasons referred taken after the concerned is given the opportunity to defend his/her self.
 10. In the event that a notification is made outside the GMS forum, then self-defense as referred to point 9 is submitted in writing to the GMS for the Company or the Minister for Public Housing no later than 14 (fourteen) days from the concerned member of the Board of Commissioners.
 11. Self-defense may be given immediately upon notification by the Ministers/informing official.
 12. In the case of the concerned members of the Board of Commissioners has conducted self-defense or stated his/her objection or no objection to the dismissal at the time of the notification, then the provisions of 14 (fourteen) days as stated in point 10 deemed to have been met.
 13. In the event of notifications and self-defense conducted verbally, it is done face to face evidenced by minutes or report signed by the concerned members of the Board of Commissioners and the Ministers/informing officials.
 14. If the concerned members of the Board of Commissioners are not willing to sign the minutes or the report, then the rationality shall be stated in the minutes or the report.
 15. In the event that the notification is made in the GMS, then the self defense is made in the GMS in accordance with the provisions of Article 119 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company.
 16. All legal documents related to the notification and self-defense process are prepared by Technical Deputy in coordination with Echelon II officials who is responsible for legal affair, and then all of the related documents are submitted to the Deputy to get administered.

- | | |
|---|--|
| <p>17. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan Keputusan Menteri.</p> <p>18. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.</p> <p>19. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputy Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.</p> <p>20. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan apabila Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputy Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.</p> <p>21. Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Deputy dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.</p> <p>22. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.</p> <p>23. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan.</p> <p>24. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh Pemegang Saham secara sirkuler.</p> | <p>17. Determination of the dismissal of the Board of Commissioners member conducted by Ministerial Decree.</p> <p>18. Determination of the dismissal of the Board of Commissioners member may be conducted through the Minister Decree as GMS, GMS Resolution, and the decision of all Shareholders circularly.</p> <p>19. With regard to the dismissal determination of the Board of Commissioners members conducted with the Minister Decree or the decision of all Shareholders circularly, Technical Deputy and Secretary process the Minister Decree draft or resolution of the Shareholders circularly.</p> <p>20. With regards to the dismissal determination of the Board of Commissioners member conducted in the GMS physically, and if the Minister himself could not attend the GMS, then the Minister authorizes the Technical Deputy to attend and make the decisions in the GMS.</p> <p>21. The Minister may also authorize the Deputy and/or the Secretary to attend and make the decisions in the GMS.</p> <p>22. During the process of dismissal, the concerned member of the Board of Commissioners shall continue to perform his/her duties properly.</p> <p>23. Dismissal of the Board of Commissioners member can be processed simultaneously with the appointment process of the Board of Commissioners members on the SOE concerned.</p> <p>24. Dismissal of the Board of Commissioners member shall consider effective as of the date specified in the Decree of the Minister/GMS/all Shareholders circularly.</p> |
|---|--|

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perseroan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

REFERENSI PERATURAN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan RUPS. Secara umum, Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk:

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is a Company's Organ that authorized and is fully responsible for the Company management for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company as well as representing the Company, both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association. Board of Directors is in charge of and collectively responsible for the Company management in order to produce added value and ensure business sustainability.

REGULATION REFERENCE

According to Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company, Board of Directors is authorize and fully responsible for the Company as well as representing the Company, both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors is responsible to the Board of Commissioners and the GMS. Generally, Board of Directors is in charge of and responsible for:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan; 2. Memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS; 3. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan hubungan baik dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan; 4. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 5. Mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan; 6. Menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan; 7. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas; 9. Menyusun daftar calon manajemen satu tingkat di bawah Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, jika diperlukan; 10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan; - Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi strategi dan rencana kerja Perusahaan; - Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi dan pembukuan, serta keterbukaan dan kerahasiaan informasi; - Melaksanakan etika berusaha dan budaya anti korupsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Every member of the Board of Directors shall carry out their duties with good faith and prudence for the interest and the business of the Company. 2. Ensure that all of the Company's activities is carried out in accordance with the applicable rules and regulations, Articles of Association and GMS Resolution. 3. Organize, implement and evaluate good affiliation management with Shareholders and Stakeholders; 4. Perform actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company; 5. Represent the Company, both in and out of court; 6. Implement GCG consistently and sustainably; 7. Organize and keep Special Register in accordance with the provision of regulations; 8. Personally responsible for errors and negligence in performing their duties; 9. Compile a list of candidates one level below the Directors and submit it to the Board of Commissioners, if required; 10. Carry out other duties of which include: <ul style="list-style-type: none"> - Organize, implement and evaluate relationships with Shareholders and Stakeholders; - Organize, implement and evaluate the Company's strategies and action plans; - Organize, implement and evaluate the risk management, internal control systems, accounting and bookkeeping system, as well as disclosure and confidentiality of information; - Implement business ethics and anti-corruption culture. |
|--|---|

BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- A. Persyaratan dan Komposisi Direksi
- B. Tanggung Jawab Direksi
- C. Tugas dan Kewajiban Direksi
- D. Wewenang Direksi

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Working Guidelines and Code of Conduct of Board of Directors are regulated in Working Procedure of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual), among others, consists of working Procedure of the Board of Commissioners describing activity steps in a structured, systematic, easy to understand manner and consistently implementable, as a benchmark for the Board of Directors in carrying out each of their duties to achieve the Company's vision and mission. With Board Manual, it is expected to achieve high working standard in line with GCG principles.

Contents of Working Guidelines regulated in the Board Manual, among others, stipulated matters as follows.

- A. Board of Directors Requirements and Composition
- B. Board of Directors Responsibilities
- C. Board of Directors Duties and Obligations
- D. Board of Directors Authorities

- E. Hak-hak Direksi
- F. Independensi Direksi
- G. Etika Jabatan
- H. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan Oleh Direksi
- I. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi Perseroan
- J. Pembagian Tugas Direksi
- K. Rapat Direksi
- L. Hubungan Dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
- M. Sekretaris Perusahaan
- N. Satuan Pengawas Intern
- O. Tim Direksi/Penggunaan Saran Profesional

Beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam atau di luar pengadilan;
3. Menetapkan pedoman pengadaan barang/jasa oleh Perusahaan yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang/jasa tersebut;
4. Menetapkan ketentuan-ketentuan dan melakukan pengaturan tentang kepegawaian Perusahaan;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menetapkan target kinerja dan pedoman/sistem penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi yang ditetapkan secara obyektif dan transparan;
7. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS;
10. Kewenangan lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

HAK-HAK DIREKSI

Adapun hak-hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
2. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.

- E. Board of Directors Rights
- F. Board of Directors Independence
- G. Work Ethics
- H. Determination of the Company's Management Policy by the Board of Directors
- I. Delegation of Authority Among the Board of Directors member
- J. Board of Directors Division of Duties
- K. Board of Directors Meeting
- L. Affiliation of Subsidiary Company and Joint Venture
- M. Corporate Secretary
- N. Internal Supervisory Unit
- O. Board of Directors Team/Utilization of Professional Advisory Expert

Several basic working guidelines of Board of Director regulated in the Board Manual are described as follows.

BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES

In conducting their duties, Board of Directors authorized to:

1. Determine the Company's management policy;
2. Arrange the handover of Board of Directors authority to one or several members of the Board of Directors or to one or several officials to make decision on behalf of the Board of Directors or represent the Company in or out of court;
3. Determine guidelines for the Company's goods/services procurement that are beneficial to the Company, either the price or the quality of goods/services;
4. Establish provisions and arrange the Company's employment;
5. Appoint and dismiss the Company employees based on the employment regulations of the Company and applicable regulations;
6. Establish performance targets and guidelines/performance appraisal system for units and positions within the organization that are defined objectively and transparently;
7. Conduct analysis and evaluation of performance achievement for position/unit under the Board of Directors and the Company hierarchy;
8. Appoint and dismiss Corporate Secretary;
9. Perform any measures and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties, and represent the Company in and out of court on all matters and events, with restrictions set forth in the legislations, Articles of Association, and Shareholders Resolution;
10. Other authority with the approval of the Board of Commissioners and/or GMS.

BOARD OF DIRECTORS RIGHTS

The rights of Board of Directors are as follows.

1. Represent the Company in and out of court.
2. Determine the Company management policy;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. 8. Menerima gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Set the employment provisions of the Company, including salary determination, pension or retirement insurance and other income of the employees of the Company pursuant to the legislation in force, with the provisions of the determination of salary, pension or retirement insurance and other income of the employees that exceed the obligated and stipulated on the legislations, must be approved in advance by the GMS. 4. Appoint and dismiss the Company employees based on the employment regulations of the Company and applicable regulations; 5. Arrange the handover of Board of Directors' authority to one or several members of the Board of Directors or to one or several officials to make decision on behalf of the Board of Directors or represent the Company in or out of court; 6. Arrange the handover of Board of Directors authority to one or several officials as personal or group or to other party to represent the Company in or out of court; 7. Perform any measures and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other party with the company, as well as represent the Company in and out of court on all matters and events, with restrictions set forth in the legislations, Articles of Association, and/or Shareholders Resolution; 8. Receive remuneration and other allowance/facilities, including post-service allowance of which the type and amount are determined by GMS. |
|---|--|

ETIKA JABATAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan berikut.

1. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah;
2. Anggota Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain.

KRITERIA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Berdasarkan *Board Manual*, kriteria anggota Direksi meliputi:

- a. Kriteria formal, yaitu:
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit

BOARD OF DIRECTORS ETHICS

In carrying out their duties and functions, the Board of Directors shall always underlie themselves with ethics regarding their position as follows.

1. Members of the Board of Directors are prohibited from having conflict of interest and gain personal advantage, either directly or indirectly from the decision-making process and activities of the Company, other than the legitimate income;
2. Members of the Board of Directors shall complete Special Register contains his/her and his/her family's share ownership in other companies.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

All members of the Board of Directors met the determined criteria. Based on the Board Manual, criteria for members of the Board of Directors include:

- a. Formal criteria, consist of:
 - Legally competent;
 - Never been declared bankrupt by the Court;
 - Never been appointed as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who found responsible for causing a company to go

dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;

- Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain;
- Tidak memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kriteria material, yaitu:

- Memiliki integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan berperilaku baik, yaitu tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji, serta perbuatan lain yang dapat dikategorikan memberikan keuntungan pribadi dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat;
- Memiliki kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai di bidang usaha Perusahaan, memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, serta memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
- Memiliki psikologis yang baik, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensia dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi Perusahaan.

bankrupt, and have never been convicted of a crime that state loss in the period of 5 (five) years prior to his/her appointment;

- Have no familial affiliation by blood or marriage to the third degree, either horizontally or vertically or in-laws with the other member of Board of Directors or Board of Commissioners;
- Hold no concurrent position as member of the Board of Directors on State-Owned Enterprises, Local Government-Owned Enterprises, Private Enterprises, and other positions as officials on central and/or local government agency/institution, as well as other position that has may cause direct or indirect conflict of interest with the Company and/or oppose the applicable regulations;

b. Material criteria, consist of:

- Have integrity and moral, well-behave, never been involved in manipulation and deviant practices, treasonous, as well as other actions categorized as gain personal benefit and violation of regulation related to good corporate governance principles;
- Have technical/specialized competence, possess adequate knowledge, experience and expertise on the Company's field of work, competency on strategic management in order to expand the Company, understand managerial issues related to one of management function, as well as dedication and provide sufficient time to perform his/her duties.
- Have well psychological condition, possess adequate level of intelligence and emotional state to perform his/her duties as the member of the Board of Directors.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut.

FIT AND PROPER TEST OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) have met the criteria and qualifications required under the fit and proper test (*fit and proper test*) pursuant to the Company Law, Articles of Association, the regulations related to corporate governance. All members of the Board of Directors have adequate integrity, competence, and reputation. This is evidenced by obtaining the approval of passed fit and proper test as follows.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi / Table of Fit and Proper Test of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Pelaksana Executor	Hasil Result
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016	Kementerian BUMN / SOEs Ministry	Lulus / Pass
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	Kementerian BUMN / SOEs Ministry	Lulus / Pass
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	Kementerian BUMN / SOEs Ministry	Lulus / Pass
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Kementerian BUMN / SOEs Ministry	Lulus / Pass
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Kementerian BUMN / SOEs Ministry	Lulus / Pass
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Kementerian BUMN / SOEs Ministry	Lulus / Pass
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Kementerian BUMN / SOEs Ministry	Lulus / Pass

DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat berdasarkan akta persetujuan rapat RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Direksi adalah sebagai berikut.

APPOINTMENT BASIS FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Members of the board of Directors are appointed by deed approval of the GMS meeting. Basis of appointment of each member of the Board of Directors is as follows.

Tabel Dasar Pengangkatan Direksi / Table of Appointment Basis of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-98/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 / Ministerial decree of State-Owned Enterprises No: SK-98/MBU/06/2015 dated 22 June 2015
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-240/MBU/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 / Ministerial decree of State Owned Enterprises No: SK-240/MBU/10/2016 dated 17 October 2016
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-208/MBU/2013 tanggal 10 April 2013 / Ministerial Decree of State-Owned Enterprises No: SK-208/MBU/10/2013 dated 10 April 2013
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-22/MBU/11/2015 tanggal 09 November 2015 / Ministerial Decree of State-Owned Enterprises No: SK-22/MBU/11/2015 dated 9 November 2015
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-22/MBU/11/2015 tanggal 09 November 2015 / Ministerial Decree of State-Owned Enterprises No: SK-22/MBU/11/2015 dated 9 November 2015
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-22/MBU/11/2015 tanggal 09 November 2015 / Ministerial Decree of State-Owned Enterprises No: SK-22/MBU/11/2015 dated 9 November 2015

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-22/MBU/11/2015 tanggal 09 November 2015 / Ministerial Decree of State-Owned Enterprises No: SK-22/MBU/11/2015 dated 9 November 2015

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Direksi pada PT Angkasa Pura I (Persero) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Berdasarkan peraturan tersebut, anggota Direksi harus memenuhi persyaratan materiil sebagai berikut.

- a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
- b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki :
 - Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN.
- c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, dalam pengurusan BUMN/ perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai BUMN/ perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik).
- d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
 - Memformulasikan dan mengartikulasikan Visi Perusahaan;
 - Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan;

DIVERSITY COMPOSITION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Diversity policy on the composition of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) is done based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-01/MBU/2012 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of SOEs. Under the regulation, members of the Board of Directors must meet the requirements of the material as follows.

- a. Experience, in the sense that the person concerned has track record showing efficacy in maintenance, of state/ company/ institution where he was working before the nomination.
- b. Expertise, in the sense that the person concerned has:
 - Adequate knowledge in the field of State-Owned Enterprises concerned;
 - Understanding of Management and corporate governance;
 - Ability to formulate and implement strategic policies for the development of SOEs.
- c. Integrity, in the sense that the person concerned has never been involved in:
 - deeds engineering and abusive practices in the management of state/company/ institution where the person concerned was working before the nomination (dishonest);
 - the act of breach of contract which can be categorized as not fulfilling commitments agreed by state/company/ institution where the person concerned was working before the nomination (misbehaving);
 - acts that can give the person concerned an advantage against the law to private candidates for the members of the Board of Directors, employees of state/ company/ institution where the person concerned was working, or a certain group before the nomination (misbehaving);
 - Acts that can be categorized as a violation towards the provisions related to the principles of sound management of the company (bad behavior).
- d. Leadership, in the sense that the person concerned has abilities to:
 - formulate and articulate the Company's vision;
 - direct the officials and employees of the Company to be able to do something to realize the objectives of the Company.

- Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan;
 - e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan.
- generate spirit (to give new energy) and provide motivation towards officials and employees of the company to be able to realize the objectives of the Company;
 - e. Have a strong will (enthusiastic) and high dedication to promote and develop the SOEs concerned.

Pada periode 2016, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

In the 2016 period, the diversity of the composition of the Board of Directors that is reflected in education, work experience, age, and gender can be seen in the table below:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi / Table of Diversity Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Periode Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 - 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 - 17 October 2016	61 tahun / 61 years old	Laki-Laki / Male	<i>Master of Business Administration (MBA) dari Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Telkom / Master of Business Administration (MBA) from the School of Business Management Telkom</i>	Direktur Marketing Satelindo (2002-2003), Komisaris Utama PT SMT Indonesia (2007), Direktur Corporate Services PT Indosat (2005-2007), Direktur Komersial PT KAI (Persero) (2009-2014), dan Direktur Utama PT PELNI (Persero) (2014-2015). / Director of Marketing Satelindo (2002-2003), Commissioner of PT SMT Indonesia (2007), Director of Corporate Services PT Indosat (2005-2007), Commercial Director of PT KAI (Persero) (2009-2014), and President Director of PT PELNI (Persero) (2014-2015).	<i>Business Administration</i>
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - nowsekarang	56 tahun / 56 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun dan S2 Manajemen dari Nashville University, Tennessee, AS. / Bachelor of Economics from Accounting Department of Faculty of Economics at University of Gadjah Mada (UGM) and Master of Management from Nashville University, Tennessee, USA.	Komisaris PT Aerowisata (2001-2004), Asisten Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN (2004-2005), Komisaris PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2005-2008), Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2008-2011), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2011-2016). / Commissioner of PT Aerowisata (2001-2004), Assistant of Logistics and Tourism Deputy of Ministry of SOE (2004-2005), Commissioner of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2005-2008), Commissioner of PT Merpati Nusantara Airlines (2008-2011), and President Director of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2011-2016).	Ekonomi dan Manajemen / Economics and Management

Nama Name	Jabatan Position	Periode Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	55 tahun / 55 years old	Perempuan / Female	Sarjana Teknik dari Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung serta Program Pasca Sarjana bidang Transportasi, Institut Teknologi Bandung / Bachelor of Engineering from Civil Engineering Department, Faculty of Civil Engineering and Planning, Bandung Institute of Technology and Graduate Program in Transportation, Bandung Institute of Technology	Kasi Mutu Konstruksi Sipil Ditjen Hubud (1992-2002), Pemimpin Proyek PFBUI (2002), Kasi Keterpaduan Program Bandara (2002-2005), Kasubdit Program Bandara (2005-2007), dan Kasubdit Prasarana Bandara (2008). / Head of Civil Construction Quality DGAC (1992-2002), Project Leader PFBUI (2002), Head of Integrated Airport Program (2002-2005), Head Sub Directorate of Airport Program (2005-2007), and Head of Sub Directorate of Airport Infrastructure (2008).	Bidang teknik / Technical Department
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 - sekarang / 9 November 2015 - now	48 tahun / 48 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana pada jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Pancasila Jakarta, Magister pada Jurusan Marketing, Massey University New Zealand dan program Doktor pada Jurusan Service Management, Nortahunern Malaysia University / Bachelor Majoring in Human Resources Management, University of Pancasila Jakarta, Graduate Program of Marketing Department at Massey University New Zealand and Doctoral Program in Service Management Department, Nortahunern Malaysia University	Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di PT Angkasa Pura I (Persero), diantaranya sebagai <i>Manager</i> Komersial dan Pengembangan Usaha (2008-2012), Deputi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Wilayah II (2012-2013), <i>Business Development Group Head</i> (2013) dan <i>Project Portfolio Analyst</i> (2013-2015). / He has held various key positions in PT Angkasa Pura I (Persero), such as the Manager of Commercial and Business Development (2008-2012), Deputy Director of Commercial and Development of Region II (2012-2013), Business Development Group Head (2013) and Project Portfolio Analyst (2013-2015).	Human capital

Nama Name	Jabatan Position	Periode Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	47 tahun / 47 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana Teknik dari Jurusan Teknik Mesin, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta / Bachelor of Engineering from Mechanical Engineering Department, The National Institute of Science and Technology Jakarta	Beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di PT Angkasa Pura I (Persero), diantaranya sebagai Kepala Dinas Mekanikal dan Teknik Air (2003-2004), Asisten Deputi Direktur (2004-2009), Deputi Direktur Teknik Pengawasan (2009-2011), Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan (2011-2013), dan <i>General Manager</i> Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (2013-2015). / He has held various key positions in PT Angkasa Pura I (Persero), including Head of Department of Mechanical and Water Engineering (2003-2004), Assistant of Deputy Director (2004-2009), Deputy Director of Technical Supervision (2009-2011), Project Development Manager of Sepinggan International Airport (2011-2013), and General Manager of Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport Sepinggan, Balikpapan (2013-2015).	Teknik mesin dan operasional kebandarudaraan / Mechanical Engineering and Airport Operational
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	52 tahun / 52 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Terbuka / Bachelor of Economics in Economic Management Department, The Open University	Asisten Deputi Direktur Tarif dan Kerjasama Aero (2004), Manager Komersial dan Pengembangan Usaha (2008-2012), Strategic Business Development (2012-2013), dan Aviation Marketing Group Head (2013-2015). / Assistant of Deputy Director of Rates and Aero Cooperation (2004), Manager of Commercial and Business Development (2008-2012), Strategic Business Development (2012-2013), and the Aviation Marketing Group Head (2013-2015).	<i>Marketing dan business development</i>

Nama Name	Jabatan Position	Periode Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 - sekarang / 9 November 2015 - now	46 tahun / 46 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Andalas Padang serta studi Program Pasca Sarjana di Universitas Gajah Mada / Bachelor of Economics from Accounting Department, University of Andalas Padang and Graduate Program at University of Gajah Mada	Asisten Deputi Direktur Bidang Kerjasama Non Aero Wilayah I (2007-2011), Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Support (2012), <i>Business Development Group Head</i> (2013), dan <i>Human Capital Support Expert</i> (2014). / Assistant of Deputy Director of Non Aero Cooperation Region I (2007-2011), Finance Director of PT Angkasa Pura Support (2012), Business Development Group Head (2013), and Human Capital Support Expert (2014).	Akuntansi, <i>finance</i> dan teknologi informasi / Accounting, Finance, and Information Technology

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada periode 2016, jumlah dan komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

PERIODE 1 JANUARI 2016 – 17 OKTOBER 2016

Pada periode 1 Januari 2016 – 17 Oktober 2016, Direksi berjumlah 6 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur.

Komposisi Direksi per 1 Januari 2016 – 17 Oktober 2016 sebagai berikut.

Tabel Komposisi Direksi / Table of Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Tanggal Efektif Effective Date
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	Jakarta	22 Juni 2015 / 22 June 2015	22 Juni 2015 / 22 June 2015
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	Jakarta	10 April 2013 / 10 April 2013	10 April 2013 / 10 April 2013
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015 – now	9 November 2015 / 9 November 2015 – now
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015	9 November 2015 / 9 November 2015 – now
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015	9 November 2015 / 9 November 2015 – now
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015	9 November 2015 / 9 November 2015

NUMBER AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the 2016 period, the number and composition of Company Board of Directors experienced changes as the following explanation.

PERIOD OF 1 JANUARY 2016- 17 OCTOBER 2016

In the period from 1 January 2016- 17 October 2016, the number of Board of Directors was of 6 (six) people consisting of 1 (one) President Director and 6 (six) Directors.

The Composition of Directors per 1 January 2016 -17 October 2016 is as follows.

PERIODE 17 OKTOBER 2016 – 31 DESEMBER 2016

Pada tanggal 17 Oktober 2016, Pemegang Saham mengangkat Bapak Danang S. Baskoro sebagai Direktur Utama menggantikan Bapak Sulistyio Wimbo Hardjito. Sehingga periode 17 Oktober 2016 – 31 Desember 2016, Direksi berjumlah 6 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur.

Komposisi Direksi periode 17 Oktober 2016-31 Desember 2016 sebagai berikut.

PERIOD OF 17 JANUARY 2016- 31 OCTOBER 2016

In the period of 23 March 2016- 31 December 2016, the number of board of Directors was of 6 (six) people consisting of 1 (one) President Director and 6 (six) Directors.

The composition of the Board of Directors in the period from 17 October 2016-31 December 2016 is as follows.

Tabel Komposisi Direksi / Table of Composition of the Board of Directors

Nama / Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Tanggal Efektif Effective Date
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	Jakarta	17 Oktober 2016 / 17 October 2016	17 Oktober 2016 / 17 October 2016
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	Jakarta	10 April 2013 / 10 April 2013	10 April 2013 / 10 April 2013
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015 - now	9 November 2015 / 9 November 2015 - now
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015 - now	9 November 2015 / 9 November 2015 - now
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015 - now	9 November 2015 / 9 November 2015 - now
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	Jakarta	9 November 2015 / 9 November 2015 - now	9 November 2015 / 9 November 2015 - now

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan lain kecuali dalam lingkup yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam lingkup yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait.

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATE RELATIONS

Directors always acts independently, in the sense that there is no conflict of interest that can interfere their ability to perform their duties independently and critically, both in the relation with each other and the relation with the Board of Commissioners.

Directors do not have financial, management, Share ownership and/or family relationships with the members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with other companies, in order to be able to carry out duties and responsibilities independently.

Directors do not hold dual position as President Directors or other Directors at the SOEs, Regional and Private Enterprises or other positions related to the the management of the Company, as well as structural position and other functional positions at institutions/agencies of the central government and local government, as well as other positions in accordance with the provisions of the Articles of Association and other legislation in force.

Keterangan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Description of affiliation between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Main Shareholders and/or controllers, include:

- The affiliation among members of the Board of Directors.
- The affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
- The affiliation between members of the board of Directors and the Main Shareholders and/or controllers.
- The affiliation among members of the Board of Commissioners.
- The affiliation between members of the board of Commissioners and the Main Shareholders and/or controllers.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi / Table of Affiliate Relations of Board of Directors

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris / Finance, Family and Management Relations of the Board of Directors																
Nama Komisaris Name	Jabatan Position	Periode Period	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with						Hubungan Keluarga dengan Family Relation with						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relation with other Companies	
			Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Shareholder Controllers		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Shareholder Controllers		Ya Yes	Tidak No
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 17 October 2016 - now		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now		✓		✓		✓		✓		✓			✓	

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties, the Board of Directors is divided based on the division of duties as follows.

Tabel Pembagian Bidang Tugas Direksi / Table of Division of Duties of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Bidang Tugas Division of Duty
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016	Melakukan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur dalam merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan;
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan bisnis Perusahaan, menyiapkan dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan, menyiapkan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan, serta menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup; Menyiapkan kebijakan umum satuan pengendalian internal, memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh <i>Internal Audit</i> , memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan Perusahaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS. / Coordinating the activities and execution of all Directors duties in planning, developing, and establishing the Company's general policy based on principles of efficiency, effectiveness and in line with the vision, mission, and objectives of the Company; Directing, developing and determining Company's Management Strategy as a whole, controlling and evaluating all Company's Business activities, preparing and delivering the Long Term Plan which was signed together with the Board of Commissioners to authority for approval, preparing Work Plan and Company Budget which is an annual details from the Company's Long Term Plan, and delivering the Annual Report to to obtain approval within 6 months after the Company's fiscal year closed; Setting up a common policy of internal control unit, paying attention and taking steps needed for everything that is stated in every report of investigation results prepared by Internal Audit, leading activities that are strategic in the Company development and performing other duties assigned by the .
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	Direksi yang membidangi keuangan dan teknologi informasi dengan tugas serta tanggung jawab: Merumuskan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Perusahaan di bidang akuntansi, perbendaharaan, anggaran dan program kemitraan dan bina lingkungan, perpajakan, pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan; Merencanakan, mencari dan memastikan penyediaan dana pengembangan Perusahaan sesuai dengan rencana strategis Perusahaan, menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan memastikan ketersediaan informasi yang terkait dengan keuangan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. / The Board of Directors is in charge of Finance and Information Technology with the following duties and responsibilities: Formulating policies, carrying out development, implementing, and controlling Company's activities in the areas of accounting, treasury, budget and partnership and community development program, taxation, management of funds in accordance with the provisions and policies of the Company; Planning, locating and ensuring that the provisions of funds for Company development is in accordance with the Company's strategic plan, developing the Company's Long Term Plan, and ensuring the availability of information related to Finance to be submitted to the Board of Commissioners.

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Bidang Tugas Division of Duty
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Direksi yang membidangi Komersial dan Pengembangan Usaha dengan tugas serta tanggung jawab: Merumuskan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Perusahaan di bidang bisnis aviasi dan tarif, pemasaran, kegiatan komersial dan pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan; Menyusun perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang berkaitan dengan pengembangan bisnis Perusahaan. / Board of Directors is responsible for Commercial and Business Development with duties and responsibilities: Formulating policies, carrying out development, implementing, and controlling Company's activities in aviation business and tariff, marketing, commercial and business development activities in accordance with the provisions and policies of the Company; Developing the long-term and short-term plans regarding the Company's business development.
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Direksi yang membidangi operasional dengan tugas serta tanggung jawab: Merumuskan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bisnis Perusahaan di bidang operasi pelayanan lalu lintas penerbangan, serta pelayanan operasi kebandarudaraan. / Board of Directors is in charge of operations with duties and responsibilities: Formulating policies, carrying out development, implementing, and controlling Company's business activities in the area of air traffic service operations, as well as the airport operation services.
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Direksi yang membidangi teknik dengan tugas serta tanggung jawab: Merencanakan sarana dan prasarana, teknik pengawasan dan jaminan kualitas, serta sarana dan prasarana lainnya pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan; Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek yang berkaitan dengan ketersediaan dan kehandalan fasilitas dan peningkatan pelayanan. / Board of Directors responsible for Engineering has duties and responsibilities: Planning facilities and infrastructure, supervision technique and quality assurance, as well as other facilities in accordance with the provisions and Policies of the Company. Developing long-term and short-term plans regarding the availability and reliability of facilities and service improvement.
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Direksi yang membidangi personalia dan umum dengan tugas serta tanggung jawab: Merumuskan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Perusahaan di bidang administrasi personalia, perencanaan dan pengembangan <i>human capital</i> dan organisasi, tata kerja dan umum sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan; Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek yang berkaitan dengan <i>human capital</i> dan umum. / Board of Directors is responsible for General and Personnel with duties and responsibilities: Formulating policies, carrying out development, implementing, and controlling Company's activities in the area of personnel administration, planning and development of human capital and organization, management and general affairs in accordance with the provisions and policies of the Company; Developing the long-term and short-term plans regarding the human capital and general affairs.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Selain menjabat sebagai Direksi PT Angkasa Pura I (Persero), beberapa anggota Direksi juga merangkap jabatan pada perusahaan atau instansi lainnya dalam lingkup yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait, antara lain Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Rangkap jabatan anggota Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai berikut.

DIRECTORS DUAL POSITION

Besides serving as Directors of PT Angkasa Pura I (Persero), some members of the board of Directors also hold dual positions in other companies or institutions within the permissible scope in accordance with the Regulations and other related provisions, among others, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-01/MBU/2012 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of SOEs. Dual position of the members of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi / Table of Dual Position of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in other companies/institutions	Perusahaan/ Instansi Lain / Other companies/ institutions
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016	Tidak Ada / None	Tidak Ada / None
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	Tidak Ada / None	Tidak Ada / None
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	Komisaris Utama / President Commissioner Komisaris Utama / President Commissioner	PT Angkasa Pura Retail PT Angkasa Pura Properti
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Komisaris Utama / President Commissioner	PT Angkasa Pura Retail
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Komisaris Utama / President Commissioner	PT Angkasa Pura Support
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Komisaris Utama / President Commissioner	PT Angkasa Pura Hotel
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Komisaris Utama / President Commissioner	PT Angkasa Pura Logistik

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Perseroan dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Perseroan dan atau pihak terkait dengan Perseroan, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Perseroan dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Perseroan.

MANAGEMENT OF THE CONFLICTS OF INTEREST

If conflicts of interest occur, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Company's Executive Officials are prohibited from doing actions that may harm the Company or may decrease the Company's profit and the conflicts of interest must be considered in the decisions. The conflicts of interest include the difference between Company's economic interests and the economic interests of personal owners, members of the board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Company's Executive Officials and or other parties associated with the Company, and provisions of special treatment towards certain parties beyond applicable procedures and provisions. If a decision must be made, it must prioritize the Company's economic interest and avoid losses or decreases in Company's profit.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di PT Angkasa Pura I (Persero) maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Direksi sebagai berikut.

SHARE OWNERSHIP OF DIRECTORS

Directors have no shares, either in PT Angkasa Pura I (Persero) or in other companies. Share Ownership of the Directors is as follows.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi / Table of Share Ownership of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Kepemilikan Saham Direksi Pada Share Ownership Directors in	
			PT Angkasa Pura I (Persero) PT Angkasa Pura (Persero)	Perusahaan Lain Other companies
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016	Nihil / None	Nihil / None
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	Nihil / None	Nihil / None
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	Nihil / None	Nihil / None
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Nihil / None	Nihil / None
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operation Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Nihil / None	Nihil / None
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Nihil / None	Nihil / None
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	Nihil / None	Nihil / None

RAPAT DIREKSI

Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan rapat rutin internal Direksi setiap minggu, yaitu setiap hari Selasa dan mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) setiap satu bulan sekali dengan para *General Manager*, *Group Head* dan Direksi anak Perusahaan. Selain itu, Direksi juga menghadiri rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2016, terdapat 36 (tiga puluh enam) kali rapat internal Direksi, 6 (enam) kali Rapat Pimpinan dan 11 (sebelas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Tingkat kehadiran Direksi dalam rapat tersebut sebagai berikut. Adapun tabel kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat disajikan pada tabel berikut.

MEETING OF DIRECTORS

Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) hold an internal regular meeting of the Board of Directors every week, that is every Tuesday and hold a leadership meeting (Rapim) once in a month with General Managers, Group Heads, and Board of Directors of subsidiaries. In addition, Directors also attend the Board of Commissioners meeting inviting the Board of Directors.

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF DIRECTORS MEETING

Throughout 2016, there were 36 (thirty six) times of internal meetings of Directors, 6 (six) times of Leadership Meetings and 11 (eleven) times of Joint Meetings of the Board of Commissioners inviting the Board of Directors. The rate of attendance of Directors in those meeting is as follows. The table of attendance of each member of the Board of Directors in the meetings is presented in the following table.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi /
Table of Frequency and Attendance of Directors Meeting

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Rapat Internal Direksi Internal Directors Meeting			Rapat Pimpinan (Rapim)			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
				Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Meeting Attendance rate	Persentasi Kehadiran / Percentage of Attendance	Jumlah Rapat Total Director Meeting	Jumlah Kehadiran Meeting Attendance rate	Persentasi Kehadiran / Percentage of Attendance	Jumlah Rapat Total Director Meeting	Jumlah Kehadiran Meeting Attendance rate	Persentasi Kehadiran / Percentage of Attendance
1.	Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016	28	28	100%	5	5	100%	11	11	100%
2.	Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	8	8	100%	1	1	100%	1	1	100%
3	Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 – sekarang / 10 April 2013 - now	36	34	94,44%	6	6	100%	12	11	91,67%
4.	Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 - sekarang / 9 November 2015 - now	36	35	97,22%	6	6	100%	12	12	100%
5.	Wendo Astrul Rose	Direktur Operasi / Operation Director	9 November 2015 - sekarang / 9 November 2015 - now	36	36	100%	6	6	100%	12	11	91,67%
6.	Mochammad Astori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 - sekarang / 9 November 2015 - now	36	36	100%	6	6	100%	12	12	100%
7.	Novrihandiri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 - sekarang / 9 November 2015 - now	36	36	100%	6	6	100%	12	12	100%

**AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI
RAPAT INTERNAL DIREKSI**

Sepanjang tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut.

**AGENDAS, DATES AND PARTICIPANTS OF
DIRECTORS MEETING**

Throughout 2016, the agendas, dates and participants of Internal Directors Meetings are as follows.

**Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi /
Table of Agendas, Dates and Participants of Directors Meeting**

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
1.	12 Januari 2016 / 12 January 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan Tanah untuk kegiatan komersial 2. Terkait struktur organisasi 3. <i>Extention</i> Terminal Semarang 4. Rapat Pimpinan bulan Januari 2016 dan Agenda Hari Ulang Tahun Angkasa Pura I (Persero) ke 52 tahun 2016 5. Terkait CSP dan Permintaan Penambahan Modal Dasar Anak 6. Laporan TD (Proyek NYIA, Proyek Semarang, Rencana Pengembangan Bandara Lombok) 7. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan <i>Re-Lay Out Sub</i> dan Upg b. <i>Tim Salvage</i> c. CCTV dan Radar FOD d. Pengoperasian Terminal Temporary Bdj e. Harga sewa peralatan (<i>walktahnrough metwal detector</i>) dari APS f. <i>Deposit Remover</i> g. <i>ID Card</i> Pegawai h. Permasalahan Lahan i. HBS dan BHS Bali 	Sulistyو Wimbo Hardjito Polana B. Pramesti Novrihandri Wendo Asrul Rose Mochammad Asrori Adi Nugroho	Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
2.	19 Januari 2016 / 19 January 2016	1. Penyelesaian Stuktur Organisasi	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
		2. Persiapan Hari Ulang Tahun Angkasa Pura I (Persero) ke 52 Tahun 2016			
		3. Laporan MD	Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
		a. Perjanjian Kerjasama dengan TNI AL (Permasalahan Parkir, Ruang Usaha dan Kompensasi)			
		b. Centralize SCP VS Starbucks	Novrihandri	Hadir / Present	
		4. Strategi Pembangunan dan Skenario Pendanaan			
		5. Laporan OD	Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
		a. Permasalahan Pas Bandara di Kupang			
		b. Evaluasi Kebutuhan Pembersihan Rubber Deposit	Mochammad Asrori	Hadir / Present	
		6. CCTV untuk Run Way			
		7. Evaluasi Rencana Penerapan Kembali SCPI	Adi Nugroho	Hadir / Present	
		8. Laporan TD			
a. Terkait dengan Pengembangan Bandara Lombok					
b. Pemindahan Perkantoran di Bandara Semarang					
c. Pertemuan dengan Airnav					
9. Laporan HD					
a. Pemasalahan Lahan Lombok					
b. Program Karakter Building					
10. Laporan FD (Proses Audit)					
11. Lain-Lain					
a. Jadwal Rapat BOC-BOD					
b. Peresmian Airport Training					
c. Perawatan Fasilitas Terminal dan Fasilitas Toilet Kantor					
12. Evaluasi Rapat Direksi Tanggal 12 Januari 2016					
1. Organization Structure Resolution					
2. Preparation for the 52nd AP I Anniversary 2016					
3. MD Reports					
a. Cooperation Agreement with Navy (Parking issue, Business unit, and compensation)					
b. Centralize SCP VS Starbucks					
4. Development Plan and Budgeting Plan					
5. OD reports					
a. Airport Pass Issue in Kupang					
b. Evaluation on the Need for Rubber Deposit Removal					
6. CCTV untuk Run Way					
7. Evaluation on re-implementation of SCPI					
8. TD reports					
a. Related to Lombok Airport Development					
b. Office Shifting in Semarang Airport					
c. Meeting with Airnav					
9. HD Reports					
a. Lombok Land Issue					
b. Character Building Program					
10. FD Reports (Audit Process)					
11. Others					
a. BOC-BOD Meeting Schedule					
b. Official opening of Airport Training					
c. Maintenance of Terminal and Office Toilets Facilities					
12. Evaluation on Directors Meeting on 12 January 2016					

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description			
3.	26 Januari 2016 / 26 January 2016	Struktur Organisasi, Promosi dan Mutasi Pegawai / Organization Structure, Promotion and Movement of Employees	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present				
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present				
			Novrihandri	Hadir / Present				
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present				
			Mochammad Asrori	Hadir / Present				
			Adi Nugroho	Hadir / Present				
4.	11 Februari 2016 / 11 February 2016	1. Informasi dan Arahan PD 2. Presentasi FD terkait <i>Financial Projection Report</i> (Bahan Presentasi terlampir) 3. Presentasi HCGH tentang Struktur Organisasi 4. Presentasi Ibu Dian Purwaningrum (<i>Corporate Communication</i> Indosat) 1. PD Information and Referral 2. FD Presentation related to Financial Projection Report (Presentation Material Enclosed) 3. HCGH Presentation on Organization Structure 4. Presentation of Mrs. Dian Purwaningrum (Corporate Communication Indosat)	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present				
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present				
			Novrihandri	Hadir / Present				
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present				
			Mochammad Asrori	Hadir / Present				
			Adi Nugroho	Hadir / Present				
			5.	16 Februari 2016 / 16 February 2016	Informasi dan Arahan PD 1. Rapat Pimpinan di Semarang tanggal 2 sampai dengan 6 Maret 2016 2. Pemilihan Putri Bandara 3. KSP Bandara Semarang 4. Rapat BOC dan BOD 5. GVK (Surat dari GVK Perihal Pematangan Gaji) 6. <i>Tahunree Letters Code</i> 7. Optimalisasi Kelan Bay Bali 8. <i>SPBU Aviation</i> PD Information and Referral 1. Leadership Meeting in Semarang on 2 - 6 March 2016 2. Selection of Miss Airport 3. Semarang Airport KSP 4. BOC and BOD Meeting 5. GVK (Letter form GVK regarding Payroll Deduction) 6. Tahunree Letters Code 7. Optimizing Kelan Bay Bali 8. Aviation SPBU	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
						Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
Novrihandri	Hadir / v							
Wendo Asrul Rose	Hadir / Present							
Mochammad Asrori	Hadir / Present							
Adi Nugroho	Hadir / Present							
6.	1 Maret 2016 / 1 March 2016	1. Permasalahan Hukum antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan BNI Syariah 2. Bahan Rapat antara BOD dengan BOC dan Pemegang Saham 3. <i>Progress SAP</i> 4. <i>Review Investasi</i> 5. RJPB 6. SDM (Yang <i>Prohere</i>) 7. Evaluasi terhadap anak Perusahaan 8. Terkait pembahasan Pengembangan di Bali 9. Tanggapan Dewan Komisaris terkait RKAP 2016 dan CSR 10. Terkait Hasil <i>Workshop</i> dengan Dirjen 1. Legal Issue between PT Angkasa Pura I (Persero) and BNI Syariah 2. Meeting Material between BOD and BOC and Shareholders 3. SAP Progress 4. Investment Review 5. RJPB 6. Human Resources (which are <i>Prohere</i>) 7. Evaluation on Subsidiaries 8. Discussion on Development in Bali 9. Response of the Board of Commissioners related to RKAP 2016 and CSR 10. Workshop Results with Director General				Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
						Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present				
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present				
			Mochammad Asrori	Hadir / Present				
			Adi Nugroho	Tidak Hadir / Not Present	Melaksanakan Perjalanan Dinas / Doing Official Travel			

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
7.	8 Maret 2016 / 8 March 2016	1. Arahan dan Informasi PD <ol style="list-style-type: none"> Vicon Teknis Program CSR Tidak Langsung Calon GH Optimalisasi Lahan Non Operasional untuk Penghijauan Status Tanah Rawasari 2. Laporan TD <ol style="list-style-type: none"> Putri Bandara MoU antara AP I dengan Krakatau Steel 3. Laporan FD (Materi Persiapan RUPS) 4. Laporan Terkait AOCC 5. Laporan Rencana Kegiatan Latihan PKD 6. Tunjangan Uang Perumahan untuk Pegawai 7. Permasalahan Kontrak Kerja 8. Laporan Proyek 9. Paparan Proyek Bandara A. Yani Semarang 10. Paparan Proyek Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin 11. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Rapat BOD dengan BOC MoU antara AP I dengan Jatco Peringatan Hari Kartini 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
8.	15 Maret 2016 / 15 March 2016	1. <i>Review</i> Hasil Rapat Direksi Tanggal 8 Maret 2016 2. Paparan Tentang Informasi via <i>Website Progress</i> Proyek Semarang 3. Laporan FD 4. Penyampaian Kontrak Anak Perusahaan Yang Tertunda 5. Laporan TD Terkait Renovasi Terminal Eksisting Semarang 6. Laporan HD Terkait Lelang <i>Chiller</i> Menggunakan Freon Lama 7. Laporan MD Terkait Kenaikan PSC 8. Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> Review on the Results of Directors Meeting on 8 March 2016 Exposure on Information via Website Progress of Semarang Project FD Reports Submission of Suspended Contract of Subsidiaries TD Report related to Renovation of Semarang Existing Terminal HD Report related to Chiller Auction Using Old Freon MD Report Related to PSC Increase Others 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
9.	22 Maret 2016 / 22 March 2016	1. Arahan PD 2. Arahan OD 3. Audit Terhadap Anak Perusahaan 4. Laporan FD terkait Materi Rapat dengan Komisaris dan Persiapan RUPS 1. PD Referral 2. Pd Referral 3. PD Referral 4. PD Referral	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
10.	28 Maret 2016 / 28 March 2016	1. Informasi dan Arahan PD 2. Laporan HD terkait <i>Weekend Improvement Program</i> 3. Laporan OD 4. Laporan MD 5. Laporan TD 6. Laporan FD 7. Lain-lain 1. PD Information and Referral 2. HD Report related to Week Endimprovement Program 3. OD report 4. MD Report 5. TD report 6. FD Report 7. Others 5. Laporan TD 6. Laporan FD 7. Lain-lain	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
11.	5 April 2016 / 5 April 2016	1. Arahan PD dan <i>Review</i> Rapat Direksi tanggal 28 Maret 2016 2. Laporan OD 3. Laporan MD (<i>Branch Manager Development Program</i> , Komisaris Gapura, CSI) 4. Laporan HD 5. Laporan FD (Stuktur Organisasi, Kontrak Manajemen) 6. Lain-lain (Rapat Pimpinan Bulan April 2016, Diklat bagi Protokol) 1. PD Referral and Review on the Meeting of Directors on 28 March 2016 2. OD report 3. MD Reports (Branch Manager Development Program, Commissioner of Gapura, CSI) 4. HD Report 5. FD Reports (Organization Structure, Management Contract) 6. Others (Meeting of Directors in April 2016, Training for Protocol)	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
12.	12 April 2016 / 12 April 2016	1. Laporan AORES 2. Program <i>Benchmark</i> keluar Negeri 3. Bandara SAMS Sepinggan sebagai <i>Smart Airport</i> 4. Laporan HD (MoU dengan Haneda <i>Airport</i> , Aset Manajemen) 5. Laporan FD (Penerbitan Obligasi, Pelatihan dari Kulon Progo, <i>Ceremonial Smart Airport</i> , SAP dan e-Post) 6. Lain-Lain (Rapat Direksi di Biak , Program Rapat Dinas.) 1. AORES Report 2. Benchmark Program oriented abroad 3. SAMS Airport Sepinggan as a Smart Airport 4. HD Reports (MoU with Haneda Airport, Management of Assets) 5. FD Reports (Issuance of Bonds, Training from Kulon Progo, Ceremonial Smart Airport, SAP, and e-Post). 6. Others (Meeting of Directors in Biak, Official Meeting Program.)6. Lain-Lain (Rapat Direksi di Biak , Program Rapat Dinas.)	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Tidak Hadir / Not Present	Melaksanakan Perjalanan Dinas / Doing Official Travel
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
13.	19 April 2016 / 19 April 2016	1. Informasi dan Arahan PD a. <i>Progress AOCC</i> b. <i>Penagihan Landing Fee</i> c. <i>Benchmark ke Bangkok</i> d. <i>MoU dengan Haneda Airport</i> e. <i>Pemanfaatan Bandara Adi Sucipto Yogya setelah Bandara NYIA beroperasi</i> f. <i>Lahan untuk ILS Rencana Penerbitan Obligasi</i> g. <i>Rapat Direksi di Biak</i> h. <i>RUPS</i> i. <i>Program Antarmoda</i> j. <i>Fasilitas Telekomunikasi</i> 2. <i>Laporan OD (jadwal Diklat bagi Pegawai Operasional dan Pembuatan Program Aplikasi)</i> 3. <i>Laporan TD (Appraisal Jogya, Flow untuk Semarang, MoU dengan KAI, CSR Yogya)</i> 4. <i>Laporan MD (Branding Joglo semar, Re-Lay Out Surabaya, Optimalisasi Lahan Yakkap)</i> 5. <i>Presentasi Arsitektur Infrastruktur net-working IT</i> 6. <i>Lain-lain</i> 1. <i>PD Information and Referral</i> a. <i>AOCC Progress</i> b. <i>Landing Free Collection</i> c. <i>Benchmark to Bangkok</i> d. <i>MoU with Haneda Airport</i> e. <i>The Utilization of Adi Sucipto Yogya Airport after NYIA operates</i> f. <i>Land for ILS Bonds Issuance Plan</i> g. <i>Meeting of Directors in Biak</i> h. <i>GMS</i> i. <i>Antarmoda Program</i> j. <i>Telecommunication Facilities</i> 2. <i>OD Reports (Training Schedule for Operational Employees and Creation of Application Program)</i> 3. <i>TD Reports (Appraisal Jogya, Flow for Semarang, MoU with KAI, CSR, Yogya)</i> 4. <i>MD Reports (Branding Joglo Semar, Re-Lay Out Surabaya, Optimizing Yakkap Land)</i> 5. <i>Architecture Infrastructure Presentation of Net-working IT</i> 6. <i>Others</i>	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
14.	1 Mei 2016 / 1 May 2016	1. Informasi dan Arahan PD <ul style="list-style-type: none"> a. Persoalan Surabaya terkait Apron dan <i>Birdstrike</i> b. Hasil <i>Assessment</i> terhadap Calon Direksi Anak Perusahaan c. SDM ADVEC Bali d. <i>Progress</i> PPB Srg 2. Laporan HD <ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai LPPNPI b. Jadwal Bertemu Pak Hamra c. Harmonisasi antara Induk dan Anak d. Bantuan uang transport bagi Pegawai yang ditugaskan di Bandara ABK e. Struktur Gaji 3. Laporan OD <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan Umroh b. Isu <i>Disable Pax</i> 4. Laporan MD <ul style="list-style-type: none"> a. Proses seleksi UPG b. Tindak Lanjut Kerjasama dengan Haneda 5. Laporan TD <ul style="list-style-type: none"> a. Status Bandara Kupang b. Pemanfaatan <i>Asset DJU</i> c. Program ACA (<i>Airport Carbon Accreditation</i>) d. <i>Review Master Plan</i> Selatan Bali 6. Lain-lain (Persiapan Pemilihan Putri Bandara) <ul style="list-style-type: none"> 1. PD Information and Referral <ul style="list-style-type: none"> a. Surabaya Issue related to Apron and <i>Birdstrike</i> b. Assessment Result on Candidates of Board of Directors of Subsidiaries c. ADVEC Bali Human Resources d. PPB Srg Progress 2. HD Reports <ul style="list-style-type: none"> a. LPPNPI Employees b. Schedule for Meeting with Mr. Hamra c. Harmonization between Holding Company and Subsidiaries d. Transportation Allowance for Employees assigned in ABK Airport e. Salary Structure 3. OD reports <ul style="list-style-type: none"> a. Umroh Preparation b. <i>Disable Pax</i> Issue 4. MD Reports <ul style="list-style-type: none"> a. UPG Selection Process b. Follow-up Agreement with Haneda 5. TD reports <ul style="list-style-type: none"> a. Status for Kupang Airport b. Utilization of <i>DJU Asset</i> c. ACA (<i>Airport Carbon Accreditation</i>) Program d. Review on Master Plan of South Bali 6. Others (Preparation for Selection of Miss Airport) 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
15.	10 Mei 2016 / 10 May 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan Arahan PD <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi Hasil Rapat dengan RI 1 b. Penyelesaian GAT Bali c. Progress Surat ke Meneg Perihal BOC dan BOD anak Perusahaan 2. Laporan OD <ol style="list-style-type: none"> a. Sanctuary (Kawasan Konservasi Burung) b. Strategi Pemetongan Rumput c. Standarisasi R/W Inspeksi 3. Laporan TD (Presentasi Perbaikan R/W) 4. Laporan MD <ol style="list-style-type: none"> a. Umroh Solo b. Proses Lelang Tenan di Makasar c. Hasil Rapat di Bali d. Landing Fee ABK 5. Laporan FD <ol style="list-style-type: none"> a. Kontribusi Tetap DJU b. HBS-BHS 6. Lain-Lain (Pembentukan Anak Perusahaan Yakkap) <ol style="list-style-type: none"> 1. PD Information and Referral <ol style="list-style-type: none"> a. Information on the Result of the Meeting with the President of Indonesia b. Resolution of GAT Bali c. Progress of the Letter for the Minister Regarding BOC and BOD of Subsidiaries 2. OD reports <ol style="list-style-type: none"> a. Secretary (Bird Conservation Area) b. Grass Cutting Strategy c. Standardization of Inspection R/W 3. TD Report (Presentation of R/W Improvement) 4. MD Reports <ol style="list-style-type: none"> a. Solo Umroh b. Tenan Auction Process in Makassar c. Meeting Results in Bali d. ABK Landing Fee 5. FD Reports <ol style="list-style-type: none"> a. DJU Fixed Contribution b. HBS-BHS 6. Others (Establishment of Yakkap Subsidiaries) 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
16.	17 Mei 2016 / 17 May 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan RUPS 2. Optimalisasi Asset Bandara 3. Pengecekan R/W 4. Duta Bandara <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on GMS Preparation 2. Optimizing Airport Assets 3. R/W Checking 4. Airport Ambassador 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose		
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
17.	30 Mei 2016 / 30 May 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Rapat Direksi tanggal 23 Mei 2016 2. Arahan PD 3. Paparan Konsep Tantiem dan Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan 4. Paparan Tentang Risk Management 5. Paparan Implementasi AOCC 6. Paparan Rencana Implementasi Modul Plan Maintenance <ol style="list-style-type: none"> 1. Review on the Results of Directors Meeting on 23 May 2016 2. PD Referral 3. Exposure on Tantiem and Performance Incentive of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Subsidiaries 4. Exposure on Risk Management 5. Exposure on AOCC Implementation 6. Exposure on Modul Implementation Plan of Plan Maintenance 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Tidak Hadir / Not Present	Melaksanakan Perjalanan Dinas / Doing Official Travel
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
18.	7 Juni 2016 / 7 June 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Risalah Rapat tanggal 30 Mei 2016 2. Arahan PD <ol style="list-style-type: none"> a. SLA Pelayanan Taxi Bandara b. Sewa Lahan c. R/W Inspeksi d. Program <i>Training</i> dari IATA e. Kaderisasi GM 3. Laporan TD (Hasil Rapat terkait Insentif Pajak) 4. Laporan MD terkait SBU Bali <ol style="list-style-type: none"> a. Staf Teknik untuk SBU b. Museum Penerbangan 5. Laporan OD terkait Persiapan Posko Lebaran 6. Laporan FD <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Rapat <i>Financial Projection</i> b. Evaluasi Restitusi di kantor cabang Lombok dan Kupang c. Pengangkatan BOD dan BOC Anak Perusahaan 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
19.	27 Juni 2016 / 27 June 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan Arahan PD <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Terkait Konsesi b. Struktur Organisasi Baru c. Kriteria Status Pegawai PKWT dan OS 2. Laporan Posko OD dari Balikpapan 3. Laporan Posko MD dari Makassar 4. Laporan FD 5. Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> 1. PD Information and Referral <ol style="list-style-type: none"> a. Meeting related to Concession b. New Organization Structure c. Criteria of PKWT and OS Employees Status 2. OD Post Report from Balikpapan 3. OD Post Report from Makassar 4. FD Report 5. Others 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
20.	19 Juli 2016 / 19 July 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan PD 2. Laporan FD 3. Laporan MD 4. Laporan TD 5. Laporan OD <ol style="list-style-type: none"> 1. PD Referral 2. FD Report 3. MD Report 4. TD report 5. OD report 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
21.	26 Juli 2016 / 26 July 2016	1. Arahan PD terkait Pembentukan Pokja Hukum dan Keamanan 2. Laporan FD (Pemenangan Konsorsium dan SO IT) 3. Laporan TD (Pembaharuan Dokumen dalam Proses Pelelangan) 4. Laporan MD (Rencana Pembuatan Museum Bandara Kemayoran) 5. Laporan HD (Rencana Pembangunan Rumah Sakit di Surabaya) 1. PD Referral related to the Establishment of Law and Security POKJA 2. FD Report (the Winning of Consortium and SO IT) 3. TD Report (Document Updating in Auction Process) 4. MD Report (Plan of Kemayoran Airport Museum Development) 5. HD Report (Plan of Hospital Development in Surabaya)	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
22.	2 Agustus 2016 / 2 Agustus 2016	1. Perkenalan dengan Personil Gugus Tugas atas nama. Bpk. AMB Ahwil Lutan 2. Arahan PD a. Pembina Kokapura b. Kondisi Bangunan GAT c. Pengalihan Kegiatan GAT dari EJ ke PT Angkasa Pura I (Persero) d. Proyek Strategis PT Angkasa Pura I (Persero) 3. Paparan <i>Pra Legal Opinion</i> oleh Tim Jamdatun (terkait Permasalahan antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan GVK) 4. Laporan TD a. Pemanfaatan Eks Bangunan Terminal Banjarmasin) b. Terminal di Yogya akan digunakan sebagai GAT (<i>General Aviation Terminal</i>) 5. Laporan FD 6. Lain-Lain 1. Introduction with the Personnels of Gugus Tuna on Behalf of Mr. AMB Ahwil Lutan 2. PD Referral a. Kokapura Founder b. GAT Building Condition c. Transfer of GAT Activities from EJ to PT Angkasa Pura I (Persero) d. Strategic Project of PT Angkasa Pura I (Persero) 3. Exposure on Pra Legal Opinion by Jamdatun Team (related to the Issue between PT Angkasa Pura I (Persero) and GVK) 4. TD report a. Utilization of the Previous Building of Banjarmasin Terminal b. Terminal in Yogya will be used as GAT (General Aviation Terminal) 5. FD Report 6. Others	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mohammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
23.	30 Agustus 2016 / 30 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan Arahan PD 2. Evaluasi Rapat Direksi <ol style="list-style-type: none"> a. GAT b. Terminal Cargo Surabaya c. Kokapurake APH 3. Presentasi PCP terkait RJPB 4. Laporan OD <ol style="list-style-type: none"> a. Penugasan APR b. Proyek NYIA 5. Laporan MD <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi Baru b. Tanggapan Dewan Komisaris terkait Usulan Nama Direksi Anak Perusahaan c. JATCO d. Uang Muka Kontrak Untuk Anak Perusahaan 6. Penyelundupan <i>Baby Lobster</i> 7. Lain-Lain (Staf Penghubung) <ol style="list-style-type: none"> 1. PD Information and Referral 2. Evaluation on Directors Meeting <ol style="list-style-type: none"> a. GAT b. Surabaya Terminal Cargo c. Kokapurake APH 3. Presentation of PCP related to RJPB 4. OD reports <ol style="list-style-type: none"> a. APR Assignment b. NYIA Project 5. MD Reports <ol style="list-style-type: none"> a. New Organization Structure b. Response of the Board of Commissioners related to the Directors Name Proposal of Subsidiaries c. JATCO d. Contract Down Payment for Subsidiaries 6. Baby Lobster Smuggling 7. Others (Liaison Staff) 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
24.	6 September 2016 / 6 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Bahan Rapat dengan Dewan Komisaris 2. Pengisian Formasi SDM 3. Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the Material of the Meeting with the Board of Commissioners 2. Human Resources Fulfillment 3. Others 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
25.	13 September 2016 / 13 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> Rapat Direksi sebelumnya 2. Arahan DU 3. Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Permasalahan Strategis b. Kenaikan Penumpang dan Kenaikan PSC 4. Penandatanganan wali amanat 5. Hasil Rapat di Hotel Mulia tentang Desa Wisata INCHEON 6. HAKAYA 7. HAKAYA 8. Angkasa Pura Properti 9. Surat Dirjen terkait Penambahan Slot di Surabaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Review on the Previous Directors Meeting 2. DU Referral 3. Others <ol style="list-style-type: none"> a. Determination of Strategic Issues b. Passengers and PSC Increases 4. Signing of Trustees 5. Meeting Results in Hotel Mulia about Tourist Village 6. INCHEON 7. HAKAYA 8. Angkasa Pura Properti 9. Director General Decree related to Slot Addition in Surabaya 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
26.	4 Oktober 2016 / 4 October 2016	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan SDEM PT Angkasa Pura I (Persero) Pengelolaan Perwara Remunerasi Pegawai Usulan RKAP tahun 2017 Program Strategis Kantor Cabang Program Eksploitasi Program Investasi 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
27.	11 Oktober 2016 / 11 October 2016	<ol style="list-style-type: none"> Review Rapat Sebelumnya Pemanfaatan Asset Lahan TNI di JOG dan SOC Permasalahan Umum di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Investor Relation Permasalahan dari Direktorat Operasi Permasalahan dari Direktorat Marketing Permasalahan dari Direktorat Teknik Permasalahan dari Direktorat PUM 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
28.	17 Oktober 2016 / 17 October 2016	<ol style="list-style-type: none"> Review Rapat Sebelumnya Kondisi Runway Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali DPPU pada Bandara Baru Kerjasama Internship dengan Australia Tindak lanjut atas pegawai yang memakai narkoba Rencana Spin Off UPG PJP2U Internship ke ICAO dan ACI 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present	
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
29.	25 Oktober 2016 / 25 October 2016	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi Kinerja sampai dengan September 2016 Hal-Hal yang perlu menjadi perhatian 	Danang S. Baskoro	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
30.	1 November 2016 / 1 November 2016 - now	<ol style="list-style-type: none"> Paparan oleh Tim Obligasi Paparan TD Terkait Rencana Pengembangan Proyek di PT Angkasa Pura I (Persero) 	Danang S. Baskoro	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description	
31.	8 November 2016 / 8 November 2016 – now	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi Usulan RKAP Tahun 2017 2. Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta – Kulonprogo <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan <i>Airport City</i> b. Pelatihan Terhadap Penduduk yang terkena Relokasi c. Pekerjaan Konstruksi Proyek NYIA d. MOU dengan Pemda Kulonprogo Terkait Relokasi Rumah Penduduk e. Keterangan Palsu f. Struktur Organisasi dan Penempatan Personil TNI di Proyek NYIA g. Pengurusan Aset di Bandara-Bandara 3. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Penyerahan dan Pengelolaan 3 Bandara dari Kementerian Perhubungan b. Penambahan <i>Slot Time</i> untuk Penerbangan Internasional c. Perpanjangan SK Tim Slot Manajemen d. Pengisian Jabatan Direksi Anak Perusahaan e. Konsep Bisnis Pengembangan Usaha Angkasa Pura Retail f. Perubahan SK Tim 	Danang S. Baskoro	Hadir / Present		
			Mochammad Asrori	Hadir / Present		
			Novrihandri	Hadir / Present		
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present		
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present		
			Adi Nugroho	Hadir / Present		
			1. 2017 CBP Proposal Presentation			
			2. Development of the New Airport of Yogyakarta-Kulon Progo <ol style="list-style-type: none"> a. Development of Airport City b. Training for the Inhabitants being Relocated c. NYIA Construction Project Work d. MoU with Local Government of Kulon Progo related to the Relocation of Inhabitant Houses e. False Statement f. Organization Structure and Placement of Army Personnels in NYIA Project g. Assets Management in the Airports 			
			3. Others <ol style="list-style-type: none"> a. Plan of Submission and Management of 3 Airports from Ministry of Transportation b. Addition of Time Slot for International Flights c. Extension of the Decree of Management Slot Team d. Fulfillment of Directors Position for Subsidiaries e. Business Concept of Business Development of Angkasa Pura Retail f. Changes of Team Decree 			
			32.	15 November 2016 / 15 November 2016 – now	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi oleh <i>Head of Procurement</i> 2. Presentasi terkait RKAP 2017 <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation by Head of Procurement 2. Presentation Related to the 2017 CBP 	Danang S. Baskoro
Mochammad Asrori	Hadir / Present					
Novrihandri	Hadir / Present					
Wendo Asrul Rose	Hadir / Present					
Wendo Asrul Rose	Hadir / Present					
Adi Nugroho	Hadir / Present					
33.	22 November 2016 / 22 November 2016 – now	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pembangunan dan Pengusahaan Hotel Transit di Bandara SAMS Sepinggan –BPN 2. Realisasi RKA sampai dengan Oktober 2016 dan Usulan RKA Tahun 2017 <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation on Development and Maintenance of Transit Hotel in SAMS Airport Sepinggan 2. Realization of RKA until October 2016 and the 2017 RKA Proposal 	Danang S. Baskoro	Hadir / Present		
			Mochammad Asrori	Hadir / Present		
			Novrihandri	Hadir / Present		
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present		
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present		
			Adi Nugroho	Hadir / Present		

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance	Keterangan Description
34.	5 sampai dengan. 6 Desember 2016 / 5 until 6 December 2016	<ol style="list-style-type: none"> Proses Hukum Terkait Pembebasan Lahan Proyek NYIA dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Perubahan Supevisi untuk Para <i>Head Of</i> yang dibidangi oleh Direksi Perjanjian Kerjasama GVK pada SBU Bali 	Danang S. Baskoro	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
35.	15 - 16 Desember 2016 / 15 - 16 December 2016	<ol style="list-style-type: none"> Pengisian Formasi Jabatan Rencana Peruntukan Bandara Selaparang Profil Bandara Sentani Penyelesaian Hotel Hakaya Balikpapan GVK (<i>Management Fee, Offshore Marketing</i> dan Pembayaran gaji Tim Senior) DAPENDRA Presentasi Usulan RKAP APP 	Danang S. Baskoro	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	
36.	28 Desember 2016 / 28 December 2016	<ol style="list-style-type: none"> Arahan dan Informasi DU (Presentasi Kepada Menteri BUMN) Laporan Kejadian Wings Air di Bandara Ahmad Yani Semarang Presentasi Realisasi RKA Tahun 2016 Lain-Lain 	Danang S. Baskoro	Hadir / Present	
			Mochammad Asrori	Hadir / Present	
			Novrihandri	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present	
			Adi Nugroho	Hadir / Present	

RAPAT PIMPINAN

Sepanjang tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Pimpinan adalah sebagai berikut.

LEADERSHIP MEETING

Throughout 2016, the agendas, dates and participants of Leadership Meetings are as follows.

Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapim / Table of Agendas, Dates and Participants of Directors Meeting

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance
1.	20 Januari 2016 / 20 January 2016	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi <i>General Manager</i> dan Pimpinan Proyek Arahan Direksi 	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present
			Novrihandri	Hadir / Present
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present
			Mochammad Asrori	Hadir / Present
			Adi Nugroho	Hadir / Present

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Kehadiran Attendance
2.	3 Maret 2016 / 3 March 2016	1. Presentasi <i>General Manager</i> 2. Arahan Direksi 1. Presentation of General Manager 2. Referral of the Board of Directors	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present
			Novrihandri	Hadir / Present
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present
			Mochammad Asrori	Hadir / Present
			Adi Nugroho	Hadir / Present
3.	25 sampai dengan. 26 April 2016 / 25 until 26 April 2016	1. Presentasi <i>General Manager</i> , Pimpinan Proyek dan Anak Perusahaan 2. Arahan Menhub dan Direksi 1. Presentation of General Manager, Project Leader and Subsidiaries 2. Referral of the Minister of Transportation and the Board of Directors	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present
			Novrihandri	Hadir / Present
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present
			Mochammad Asrori	Hadir / Present
			Adi Nugroho	Hadir / Present
4.	25 Juli 2016 / 25 July 2016	1. Paparan Arahan Direksi dan GH 2. Pembahasan Program Kerja Tahun 2017 1. Exposure of the Board of Directors Referral and GH 2. Discussion on the 2017 Work Plan	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present
			Novrihandri	Hadir / Present
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present
			Mochammad Asrori	Hadir / Present
			Adi Nugroho	Hadir / Present
5.	14 September 2016 / 14 September 2016	1. Paparan <i>General Manager</i> dan Pimpinan Proyek 2. Arahan DU terkait ATM (Amati Tiru Modifikasi) 1. Exposure of General Manager and Project Leader 2. DU Referral related to ATM (<i>Amati Tiru Modifikasi</i>)	Sulistyo Wimbo Hardjito	Hadir / Present
			Polana B. Pramesti	Hadir / Present
			Novrihandri	Hadir / Present
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present
			Mochammad Asrori	Hadir / Present
			Adi Nugroho	Hadir / Present
6.	28 - 29 November 2016 / 28 - 29 November 2016	Laporan Kinerja sampai dengan. Bulan Oktober 2016 1. Paparan <i>General Manager</i> dan Anak Perusahaan 2. Arahan BOD Performance Report until. October 2016 1. Exposure of General Manager and Subsidiaries 2. BOD Referral	Danang S. Baskoro	Hadir / Present
			Mochammad Asrori	Hadir / Present
			Novrihandri	Hadir / Present
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present
			Wendo Asrul Rose	Hadir / Present
			Adi Nugroho	Hadir / Present

Agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dijabarkan pada bagian agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

Agendas, dates, and participants of Join Meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners have been described in the section of agendas, dates and participants of Joint Meeting between the board of Directors and the Board of Commissioners in this annual report.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program pengenalan dimaksudkan agar Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal dan memahami Perseroan.

Program Pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan yang materinya meliputi:

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

Orientation program is intended for the Directors who come from various background to be able to know and understand the Company.

The orientation program includes the following things.

1. The Corporate Secretary is responsible to conduct the orientation program in which the materials include:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> oleh Perseroan b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, tingkat risiko dan berbagai masalah strategis lainnya. c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang anggota Direksi. <p>2. Sekretaris Perusahaan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan program pengenalan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jadwal pertemuan dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Perseroan b. Materi Presentasi oleh Komisaris Utama c. Materi Presentasi oleh Direktur Utama <p>3. Sekretaris Perusahaan memberitahukan Direktur Utama atau penggantinya bahwa program pengenalan siap untuk dilaksanakan.</p> <p>4. Sekretaris Perusahaan menyiapkan dan menyampaikan undangan yang dilengkapi dengan bahan-bahan program pengenalan Anggota Direksi yang baru.</p> <p>5. Anggota Direksi yang baru ditunjuk mempelajari bahan-bahan yang diterima.</p> <p>6. Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti program pengenalan Anggota Direksi yang baru ditunjuk berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Presentasi oleh Komisaris Utama b. Presentasi oleh Direktur Utama c. Perkenalan dengan Pejabat-pejabat Perseroan d. Presentasi ringkas dari Pejabat Perseroan mengenai bidang yang menjadi kewenangan masing-masing <p>7. Bila masih terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Anggota Direksi yang baru ditunjuk, maka pertanyaan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak-pihak yang terkait.</p> <p>8. Apabila diperlukan, Sekretaris Perusahaan mengatur kunjungan Direksi ke unit kerja/kantor cabang/proyek Perseroan.</p> <p>9. Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan daftar hadir atas pelaksanaan program pengenalan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Implementation of good corporate governance by the company. b. Description of the Company related to its objectives, nature, scope of activities, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risk level and other strategic matters. c. Description related to delegated authority, internal and external audits, system and policy of internal control including Audit Committee. d. Description of duties and responsibilities of the board of Directors and the working relationships with the Board of Commissioners as well as things that are not allowed to be done by the members of the Board of Directors. <p>2. The Corporate Secretary prepares things needed for conducting the orientation program as:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meeting Schedule with the Board of Commissioners and Company Officials b. Presentation Material by the President Commissioner c. Presentation Material by the President Director <p>3. The Corporate Secretary informs the President Director or his substitute that the orientation program is ready to be implemented.</p> <p>4. The Corporate Secretary prepares and sends an invitation that comes with the materials for the Orientation Program for the Board of Directors.</p> <p>5. Members of the Board of Directors newly appointed study the materials received.</p> <p>6. The Board of Commissioners and the Board of Directors follow the orientation program of the members of the board of Directors newly appointed including:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Presentation by the President Commissioner b. Presentation by the President Director c. Settling with officials of the company d. A brief presentation from the official of the Company regarding the fields of authorities of each <p>7. If there are things needed to be asked by newly appointed members of the Board of Directors, the questions can be submitted either written or orally towards the parties concerned.</p> <p>8. If necessary, the Corporate Secretary arranges a visit of the Board of Directors to units/ branch offices/ projects of the Company.</p> <p>9. The Corporate Secretary documents the attendance of the orientation program implementation.</p> |
|---|--|

Pada tahun 2016, terdapat Direksi baru pada PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu diangkatnya Danang S. Baskoro sebagai Direktur Utama. Program Pengenalan Direksi dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2016.

In 2016, Danang S. Baskoro was appointed as the President Director at PT Angkasa Pura I (Persero). The Introduction Program of Board of Directors was carried out on 31 October 2016.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pelatihan Direksi / Table of Directors Training

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Development Material Competency/ Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place Implementation
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 – 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 – 17 October 2016	1. Narasumber <i>Live Talkshow</i> Bingkai Inspirasi Kompas TV terkait Fasilitas Layanan Publik / Speaker of Live Talkshow <i>Bingkai Inspirasi</i> Kompas TV related to Public Service Facilities	22 Januari 2016 Di Studio Orange Kompas TV / 22 January 2016 In <i>Studio Orange</i> Kompas TV
			2. Seminar Pembahasan Infrastruktur Kadin dengan Kemen PU, tema : Pembangunan Infranstruktur Indonesia mampukan menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional / Seminar on the Infrastructure Discussion between the Head and the Ministry of Public Work, with a theme of: Development of Indonesia Infrastructure Enabling to be the Force of National Industry Autonomy	6 April 2016 Di Hotel Sahid / 6 April 2016 In Sahid Hotel
			3. Seminar Pertamina <i>training consulting (CEO talk on holding company)</i> / Seminar on Pertamina training consulting (CEO talk on holding company)	6 April 2016 Di Ritz Carlton Kuningan / 6 April 2016 In Ritz Carlton Kuningan
			4. <i>2nd annual Southeast Asia Modern Summit</i> / 2nd annual Souttahuneast Asia Modern Summit	7 April 2016 Di Double Tree Hilton Hotel / 7 April 2016 At Double Tree Hilton Hotel
			5. Pembicara dalam festival Jaya Dirgantara Nusantara / Speaker at Jaya Dirgantara Nusantara Festival	9 April 2016 Di Wisma Hijau Cimanggis / 9 April 2016 In Wisma Hijau Cimanggis
			6. <i>Benchmarking</i> ke Bandara Kuala Namu (Medan) / Benchmarking to Kuala Namu Airport (Medan)	29 Mei 2016 Di Medan / 29 May 2016 In Medan
			7. Pembicara dalam seminar tentang Urgensi Strategis Bandara Baru Yogyakarta / Speaker at seminar on Strategic Urgency of Yogyakarta New Airport	1 Juni 2016 Di Gd Kaca Kompleks Kantor Pemkab. Kulon Progo / 1 June 2016 At <i>Gd Kaca</i> at Office Complex of Kulon Progo Regency
			8. Pembicara dalam Seminar <i>Enhancing US-Indonesia Aviation Cooperation</i> / Speaker at seminar on <i>Enhancing US-Indonesia Aviation Cooperation</i>	2 Juni 2016 Di Kementerian Perhubungan / 2 June 2016 At the Ministry of Transportation
			9. Seminar Sinergi BUMN: Realisasi Pembentukan <i> Holding</i> / Seminar on the Synergy of Ministry of State-Owned Enterprises: Realization of Holding Establishment	11 Agustus 2016 Tahune Daramawangsa Hotel / 6 September 2016 In Pullman Hotel

DIRECTORS COMPETENCE DEVELOPMENT

Throughout 2016, members of the board of Directors of the company have participated in various programs of competence development in the forms of trainings, workshops, conferences, seminars, as presented in the following table.

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Development Material Competency/ Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place Implementation
			10. Indonesia-Swedish Digital Forum / Indonesia-Swedish Digital Forum	6 September 2016 Di Pullman Hotel / 6 September 2016 Di Pullman Hotel
			11. <i>Airport Security and IT Conference</i>	27 sampai dengan 29 September 2016 Di London / 27 until 29 September 2016 In London
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	-	-
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	1. Seminar Aerotropolis Asia / Seminar on Aerotropolis Asia	18 sampai dengan 19 Mei 2016 Di Singapura / 18 until 19 May 2016 In Singapore
			2. Pembicara dalam seminar <i>Enhancing US Indonesia Aviation Cooperation</i> / Speaker at seminar on <i>Enhancing US-Indonesia Aviation Cooperation</i>	2 Juni 2016 R. Mataram Gedung Karya Kemenhub / 2 June 2016 R. Mataram Gedung Karya of the Ministry of Transportation
			3. <i>Benchmark ke San Fransisco Airport (SFO) tentang Implementasi Engineered Material Arresting System (EMAS)</i> / <i>Benchmark to San Fransisco Airport (SFO) on Implementation of Engineered Material Arresting System (EMAS)</i>	30 November 2016 San Fransisco Airport (SFA) / 30 November 2016 - now San Fransisco Airport (SFA)
			4. <i>Benchmark Pengelolaan Sacramento Country Airport System (SAC) dan Visit Sacramento International Airport (SMF)</i> / <i>Benchmark of Sacramento Country Airport System (SAC) Management and Visit Sacramento International Airport (SMF)</i> <i>Benchmark Pengelolaan Matahuner Airport</i> / <i>Benchmark of Matahuner Airport Management</i> <i>Benchmark Pengelolaan Sacramento Executive Airport (SEA)</i> / <i>Benchmark of Sacramento Executive Airport (SEA) Management</i>	2 Desember 2016 Di Kantor SAC dan Terminal SMF / 2 December 2016 In SAC Office and SMF Terminal Di Matahuner Airport / In Matahuner Airport Di Sacramento ExA / In Sacramento ExA
			5. <i>Benchmark Implementasi TREX-FOD Finder</i> / <i>Implementation Benchmark of TREX-FOD Finder</i>	5 Desember 2016 Oceanside Municipal Airport / 5 December 2016 Oceanside Municipal Airport
			6. <i>Benchmark Implementasi EMAS di Teterboro Airport (TEB)</i> / <i>Benchmark of EMAS in Teterboro Airport (TEB) Implementation</i>	7 Desember 2016 di Teterboro Airport (TEB) / 7 December 2016 In Teterboro Airport (TEB)
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 - sekarang / 9 November 2015 - now	1. <i>Delivering Of Your Organization's Technical Content</i>	27-29 September 2016 di Singapura / 27-29 September 2016 in Singapore
			2. <i>Small and Emerging Airports Seminar 2016</i>	24 - 26 Oktober 2016 di Cambodia / 24 - 26 October 2016 in Cambodia
			3. <i>Leading For Results</i>	28 November -2 Desember 2016 di Singapura / 28 Novemeber-2 December 2016 in Singapore

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Development Material Competency/ Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place Implementation
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	1. <i>Benchmarking</i> ke Bandara HKG, Orlando dan Miami / <i>Benchmarking</i> to HKG Airoport, Orlando and Miami	11 sampai dengan.21 Mei 2016 di Hongkong, Orlando dan Miami / 11 until 21 May 2016 in Hongkong, Orlando and Miami
			2. <i>Benchmarking</i> ke Bandara Hang Nadim (Batam) dan Kuala Namu (Medan) / <i>Benchmarking</i> to Hang Nadim (Batam)Airport and Kuala Namu (Medan)	28 sampai dengan. 29 Mei 2016 Batam dan Medan / 28 until 29 May 2016 Batam and Medan
			3. <i>Airport Security</i>	24 Septemebr sampai dengan. 1 Oktober 2016 UK dan Jerman / 24 September until. 1 October 2016 UK and Germany
			4. <i>Benchmarking</i> ke PT Pelindo I / <i>Benchmarking</i> to PT Pelindo I	11 sampai dengan. 12 Oktober 2016 / 11 until 12 October 2016
			5. <i>Benchmarking</i> ke Batam (Pertemuan <i>Slot Time</i> Domestik 2016) / <i>Benchmarking</i> to Batam (Meeting of 2016 Domestic Time Slot)	21 sampai dengan. 22 November 2016 di Batam / 21 until. 22 November 2016 in Batam
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	<i>Benchmarking</i> ke Bandara Hang Nadim (Batam) dan Kuala Namu (Medan) / <i>Benchmarking</i> to Hang Nadim (Batam)Airport and Kuala Namu (Medan)	28 sampai dengan. 29 Mei 2016 Batam dan Medan / 28 until 29 May 2016 Batam and Medan
			AMPAP I/ AMPAP I	Februari 2016 / February 2016
			Sidang ICAO / ICAO Session	23 September 2016 / 23 September 2016
			IMA (Indonesia Marketing Association) / IMA (Indonesia Marketing Association)	12 Oktober 2016 / 12 October 2016
			<i>Benchmark</i> Fastrack / Fastrack <i>Benchmark</i>	16 Desember 2016 / 16 December 2016
			IMA (Indonesia Marketing Association) / IMA (Indonesia Marketing Association)	17 Februari 2017 / 17 February 2017
			<i>Benchmark</i> PJP2U / PJP2U <i>Benchmark</i>	1 April 2017 / 1 April 2017
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	<i>Benchmarking</i> ke Bandara Hang Nadim (Batam) dan Kuala Namu (Medan) / <i>Benchmarking</i> to Hang Nadim (Batam)Airport and Kuala Namu (Medan)	28 sampai dengan. 29 Mei 2016 Batam dan Medan / 28 until 29 May 2016 Batam and Medan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 2016

Selama tahun 2016, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut.

1. Penyusunan perencanaan Perusahaan, antara lain RKAP 2017 dan revisi RKAP 2016, serta RJPP dan RJPB 2014-2018;
2. Pemenuhan target kinerja Perusahaan berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi;

THE 2016 PERFORMANCE OF DIRECTORS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Throughout 2016, the Board of Directors has performed its duties and responsibilities as follows.

1. Development of the Company's Plan, such as 2017 CBP and revision of 2016 CBP and 2014-2018 RJPB;
2. Fulfillment of Company Performance target based on Financial, operational and administrative aspects;

3. Pengembangan usaha Perusahaan, antara lain melalui pengembangan beberapa bandara di wilayah Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta;
4. Pengelolaan aset dan keuangan Perusahaan, termasuk penghapusan aset tetap tidak produktif dan serah terima aset kenavigasian terkait dibentuknya Perum LPPNPI;
5. Pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan, khususnya melalui kinerja PJP4U, PJP, PJP2U, *counter* dan garbarata, baik domestik maupun internasional;
6. Penyelenggaraan rapat Direksi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal, termasuk menindaklanjuti temuan *Internal Audit* dan auditor eksternal;
8. Penyelesaian permasalahan Perusahaan, khususnya permasalahan hukum yang sedang dihadapi Perusahaan;
9. Pengawasan kinerja dan permasalahan Anak Perusahaan; serta
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan perusahaan

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi tahun 2016 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui kontrak manajemen dan *assessment*.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KEY PERFORMANCE INDICATOR

Penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2016 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi melalui KPI dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria penilaian kinerja Direksi meliputi:

1. Keuangan dan Pasar
2. Fokus Pelanggan
3. Efektivitas Produk dan Proses
4. Fokus Tenaga Kerja
5. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

3. Development of Company Business, through development of some Airports in Banjarmasin, Semarang and Yogyakarta areas.
4. Management of Company Assets and Finance, including non productive fixed asset removal and handover of navigation asset related to the establishment of Perum LPPNPI;
5. Implementation of Company operations, particularly through the performance of PJP4U, PJP, PJP2U, counter and jet bridge, both domestically and internationally;
6. Implementation of Directors meeting , attending meetings of the Board of Commissioners and General Meeting of the Stakeholders;
7. Supervision and Improvement on internal business process, including follow-up on the findings of the internal and external audits;
8. Resolution of Company issues, particularly legal issues which are being faced by the Company;
9. Supervision on the performance and issues of the Subsidiaries; and
10. Implementation of other tasks related to the Company management

ASSESSMENT OF THE DIRECTORS PERFORMANCE

The Board of Directors commits to always improve its performance achievement. To support that, assessment of the performance of the Board of Commissioners has been conducted through the 2016 Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners which has been approved by the Stakeholders through management contract and assessment.

ASSESSMENT OF THE DIRECTORS PERFORMANCE BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATOR

Assessment of the performance of the Board of Directors was through 2016 *Key Performance Indicator* (KPI) which has been approved by the Stakeholders through management contract.

IMPLEMENTATION PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Assessment of the performance of the board of Directors through KPI was done by the stakeholders through mechanism of Annual General Meeting of the Stakeholders.

CRITERIA OF THE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Criteria of the Assessment of the Board of Directors include:

1. Finance and Marketing
2. Customer Focus
3. Effectiveness of Product and Process
4. Employees Focus
5. Leadership, Governance and Social Responsibilities

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pihak yang melakukan Penilaian kinerja Direksi adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Direksi akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2016 dalam RUPS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Key Performance Indicator	Skor Capaian	
	Bobot	Skor
Keuangan dan Pasar	24,00	26,89
Fokus Pelanggan	22,00	22,60
Efektivitas Produk dan Proses	20,00	19,13
Fokus Tenaga Kerja	17,00	19,13
Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat	17,00	17,29
Skor	100	103,54

PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN GCG ASSESSMENT

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui GCG *assessment*. Penilaian kinerja Direksi melalui GCG *Assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan GCG *Assessment* terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut.

1. Direksi menugaskan tim GCG *assessment* dalam melaksanakan *Self Assessment*.
2. Tim *Assessment* mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan GCG *Assessment*.
3. Tim *Assessment* memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan GCG *Assessment* ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

PARTIES CARRYING OUT THE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Parties carrying out the assessment of the Board of Directors are the Stakeholders in based on the obligations stated in applicable regulations and Articles of Association as well as mandates of the Stakeholders. The Board of Directors will be responsible for its performance in the 2016 period in GMS.

RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS ASSESSMENT

KPI Achievement of the Board of Directors in 2016 is as follows.

Table of Results of the Board of Directors Assessment

Key Performance Indicator	Achievement Score	
	Value	Score
Finance and Marketing	24.00	26.89
Customer Focus	22.00	22.60
Effectiveness of Product and Process	20.00	19.13
Employees Focus	17.00	19.13
Leadership, Governance and Social Responsibilities	17.00	17.29
Score	100	103.54

ASSESSMENT THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE BASED ON GCG ASSESSMENT

The Board of Directors commits to always improve its performance achievement. To support that, assessment of the Board of Directors performance is done through GCG assessment. Assessment of the performance of the Board of Directors through GCG Assessment that has been conducted in 2016 is as follows.

IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

Implementation Procedure of GCG Assessment related to the Performance of the Board of Directors is as follows.

1. The Board of Directors assigned GCG assessment team to do Self Assessment.
2. The Assessment Team organized all associated units including coordinating with the Board of Commissioners to implement the GCG Assessment.
3. The Assessment team gave a composite value including the positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and later to be requested an approval of the Board of Commissioners.
4. Implementation of GCG Assessment is done periodically every year.

ASSESSMENT CRITERIA OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

Criteria used for the assessment of the Board of Directors performance involve:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi; 2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas; 3. Penyusunan perencanaan perusahaan; 4. Pemenuhan target kinerja perusahaan; 5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan; 6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar; 7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan; 8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi; 9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu; 10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris; 11. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif; 12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif; 13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementation of Directors training/learning program; 2. Clear divisions of duties/ functions, authorities and responsibilities of the Board of Directors; 3. Development of Company planning; 4. Fulfillment of Company performance target; 5. Implementation of operational and financial control over the implementation of Company plan and policy; 6. Implementation of Company management in accordance with applicable regulations and Articles of Association; 7. Implementation of value-added relationships for the Company and the Stakeholders; 8. Monitoring and Managing the conflicts of interest potential among the members of the Board of Directors and Management under the Board of Directors; 9. Implementation of information and communication transparency , and submission of information towards the Board of Commissioners and the Shareholders in a timely manner; 10. Implementation of the Board of Directors meeting and attendance at the Board of Commissioners meetings; 11. Implementation of qualified and effective internal supervision; 12. Implementation of qualified and effective function of Corporate Secretary 13. Implementation of annual GMS and other GMS in accordance with applicable regulations. |
|---|---|

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi terdiri dari tim *assessment* dari PT Adikarya Gemilang Solusindo.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pada 2016, hasil penilaian kinerja Direksi mencapai skor 33,52 dengan capaian 95,76% dan predikat Sangat Baik.

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Direksi ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PARTIES CARRYING OUT THE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Parties carrying out the assessment of the Board of Directors performance consisted of an assessment team from PT Adikarya Gemilang Solusindo.

RESULT OF THE ASSESSMET OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

In 2016, the result of assessment of the Board of Directors performance reached the score of 33.52 with the achievement of 95.76% and Very Good predicate.

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

Directors remuneration is determined in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/06/2016 dated 20 June 2016 on Changes towards the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on Guideline for Revenue Determination of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Board of Trustees of the State-Owned Enterprises.

POLICY OF REMUNERATION DETERMINATION

The Company determines remuneration for the Board of Directors referring to the provision of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises. In accordance with the Minister Regulation, the amount of the revenue of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI**REMUNERATION STRUCTURE OF DIRECTORS**

Adapun struktur penetapan remunerasi Direksi sebagai berikut.

The remuneration structure of the board of Directors is as follows.

Tabel Struktur Penetapan Remunerasi / Table of Remuneration Determination Structure

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas Type of Remuneration/ Facilities	Keterangan Description
1.	Gaji / Salary	Direktur Utama sebesar 100% / President Director is 100%
		Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama / Director is 90% of the President Director Salary
2.	Tunjangan / Allowance	
	Hari Raya Keagamaan / Religious Holiday Allowance	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap tahun. / Members of the Board of Directors are given the Religious Holiday Allowance 1 (one) time of the salary every year.
	Perumahan / Housing	Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebesar 40% dari gaji dengan ketentuan maksimal sebesar Rp 27.500.000. / Members of the Board of Directors are given the housing allowance amounting to 40% of salary with the maximum provision of Rp 27.500.000.
	Asuransi Purna Jabatan / Allowance for Completing Duty Period	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan selama menjabat • Premi yang ditanggung perusahaan adalah maksimal 25% dari gaji dalam 1 tahun • Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. • Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. • Given during the tenure • Premium paid by the Company was a maximum of 25% of the salary in 1 year • The choice of the program for the allowance for completing duty period was determined by each member of the Board of Directors organized with the unit managing facilities and allowances of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. • Premium Payment, dues, or other relevant terms for insurance for completing duty period have already included premium for Accident and Death Insurance.
3.	Fasilitas / Facilities	
	Kendaraan / Vehicles	<ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari Perseroan. b. Fasilitas kendaraan termasuk dengan biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. c. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh Menteri. d. Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat. <ol style="list-style-type: none"> a. Members of the Board of Directors only reserve rights for 1(one) vehicle facility from the Company. b. Vehicle facilities include maintenance and operational cost given by considering the financial condition of the Company. c. Specification and Standard of Vehicle are determined by the Minister. d. Members of the board of Directors which are no longer serving are required to return the official vehicles to the Company no longer than 30 (thirty) days after the tenure ends.
	Kesehatan / Health	<ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya obat. b. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. c. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rawat jalan dan obat, 2) Rawat inap dan obat, 3) <i>Medical check up</i> dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri. d. Apabila Dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas Type of Remuneration/ Facilities	Keterangan Description
		<p>a. Health facilities are given in the form of health insurance or reimbursement of medicine cost.</p> <p>b. Health facilities are given to the members of the Board of Directors, as well as their husbands/wives and a maximum of 3 (three) children who are under 25 (twenty five) years old with the condition that if the children under 25 (twenty five) years old have got married or worked, those do not reserve the rights to get the health facilities.</p> <p>c. Health facilities given are in the form of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Out-patient and Medicine, 2). In-patient and Medicine, 3). Medical Check up with the condition of 1 (one) time every year and conducted in the country (domestic). <p>d. If the Doctor who treats gives the referral to have treatment abroad, the health facilities are given fully or half by considering the Company's capability.</p>
	Bantuan Hukum / Law Assistance	<p>a. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>b. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa dilembaga peradilan.</p> <p>c. Jasa kantor pengacara atau konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya adalah untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.</p> <p>d. Penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan Perseroan.</p> <p>a. Law assistance facilities for members of the board of Directors are given for actions for and on behalf of the positions as members of the Board of Directors with the intentions and objectives as well as business activities of the Company.</p> <p>b. Law assistance facilities are given in the form of financing the services of attorney office/ law consultant including the investigation process as witnesses, suspects, and defendants.</p> <p>c. Services of attorney office or law consultant that can be charged are for 1 (one) attorney office/ law consultant for 1 (one) particular case.</p> <p>d. The appointment of attorney office/ law consultant is done by the Company in accordance with the Company's provision.</p>
	Fasilitas Perumahan / Housing Facilities	Dalam hal Perseroan menyediakan rumah jabatan Direksi maka yang bersangkutan wajib mempergunakan rumah tersebut sebagai fasilitas perumahan dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. / Related to the Company providing official houses for the Board of Directors, the members concerned are required to use the houses for the housing facilities and the housing allowance is not given.

Pada tahun 2016, secara lebih rinci remunerasi masing-masing anggota Direksi yang telah terealisasi dapat disampaikan, sebagai berikut.

In 2016, in details the remuneration of each member of the Board of Directors which has been realized can be presented as follows.

Tabel Struktur Remunerasi Direksi / Table of Remuneration Structure of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Honor Honorarium	Tunjangan Allowance	Tantiem 2015 2015 Tantiem	Total per Tahun Total per Year
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sulistyo Wimbo Hardjito	Direktur Utama / President Director	22 Juni 2015 - 17 Oktober 2016 / 22 June 2015 - 17 October 2016	1,140,000,000	701,500,000	918,813,328	2,760,313,328
Danang S. Baskoro	Direktur Utama / President Director	17 Oktober 2016 - sekarang / 17 October 2016 - now	342,000,000	168,000,000	-	510,000,000
Polana Banguningsih	Direktur Teknik / Technical Director	10 April 2013 - sekarang / 10 April 2013 - now	1,231,200,000	767,900,000	1,583,486,799	3,582,586,799

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Honor Honorarium	Tunjangan Allowance	Tantiem 2015 2015 Tantiem	Total per Tahun Total per Year
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Adi Nugroho	Direktur Personalia dan Umum / General and Personnel Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	1,231,200,000	767,900,000	224,327,296	2,223,427,296
Wendo Asrul Rose	Direktur Operasi / Operational Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	1,231,200,000	767,900,000	224,327,296	2,223,427,296
Mochammad Asrori	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	1,231,200,000	767,900,000	224,327,296	2,223,427,296
Novrihandri	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi / Finance and IT Director	9 November 2015 – sekarang / 9 November 2015 – now	1,231,200,000	767,900,000	224,327,296	2,223,427,296

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Milyar	6
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar	1
Rp500 juta ke bawah	-

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Alasan dan tata cara pengunduran diri dan pemberhentian Direksi di PT Angkasa Pura I (Persero) diatur dalam *Board Manual* Direksi, sebagai berikut.

- Masa jabatan anggota Direksi 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Jabatan anggota Direksi akan berakhir, jika:
 - Masa jabatan berakhir
 - Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Meninggal dunia
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

Remuneration in one year is categorized in range of income rate as follows.

Table of Categories of Board of Directors Remuneration Amount

Amount of Remuneration	Number of the Board of Directors
Above Rp 2 Billion	6
Above Rp 1 Billion- Rp2 Billion	-
Above Rp 500 Million- Rp1 Billion	1
Under Rp500 Million	-

MECHANISM OF RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The grounds and procedures for resignation and dismissal of the Board of Directors in PT Angkasa Pura I (Persero) are regulated in the Company's Board Manual, as follows.

- The term of office of the members of the board of Directors is 5 (five) years without prejudice to the rights of to dismiss at any time.
- After the term expires, members of the Board of Directors can be appointed by for 1 (one) term.
- Position of members of the Board of Directors will end, if:
 - The term of office ends
 - Resigns in accordance with applicable provisions
 - No longer meets the requirements of the legislation in force.
 - Deceases
 - Is dismissed by the

4. RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.
5. Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
7. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada anggota Direksi tersebut untuk membela diri.
8. Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal dan anggota Direksi yang diberhentikan kembali menjalankan tugas dengan kuasa dan kewenangan yang sama.
9. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan berlaku sejak tanggal disetujui permohonan pengunduran dirinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham; namun jika tidak ada keputusan dari RUPS maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang, yaitu Komite Audit serta Komite Risiko Usaha dan GCG. Dewan Komisaris tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, namun memiliki fungsi yang melaksanakan tugas di bidang nominasi dan remunerasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan

4. can dismiss the position of a member of the Board of Directors at any time before his term of office ends by stating the reasons for his dismissal.
5. The Board of Commissioners reserves the rights to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if they act contrary to the Articles of Association or neglect their obligations or there are compelling reasons for the company.
6. Suspension should be notified in writing to the person concerned and the reasons which lead to such actions.
7. Within 30 (days) after the temporary dismissal, the Board of Commissioners is obliged to call a General Meeting of Shareholders which will decide whether the members of the Board of Directors concerned will be dismissed or returned to their positions by first providing an opportunity for the members of the Board of Directors for self-defense.
8. If the GMS is not held within 30 (thirty) days, then the temporary dismissal is canceled and members of the Board of Directors dismissed returns to perform the duties with the same power and authority.
9. The members of the board of Directors reserve the rights to resign from their positions by giving a written notification of their intentions to the Company with a copy to the Shareholders, the Board of Commissioners and other members of the board of Directors in 30 (thirty) days at the latest before the date of their resignation and is valid from the date of their resignation approved by general Meeting of Shareholders, but if there is no decision of the , the members of the Board of Directors dismiss on the requested date or by the lapse of 30 (thirty) days since the date of their resignation proposals accepted without requiring the approval of .
10. The members of the Board of Directors who resign are required to render accountability for actions that the accountabilities have not been received yet by the .

ORGAN AND COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and the Supporting Committee, that are the Audit Committee and Business Risk Committee as well as GCG. The Board of Commissioners do not have a Nomination and Remuneration Committee, but it has a function that carries out the tasks in the field of nomination and remuneration. Organ and Committee under the Board of Commissioners are described as follows.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the implementation of the tasks, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners. The Secretary of the board of

oleh Dewan Komisaris sehingga Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam melaporkan pelaksanaan tugasnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris, yaitu:

- Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;
- Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk maupun surat keluar, serta risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
- Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
- Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
- Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk kepentingan Dewan Komisaris;
- Sebagai penghubung (*liason officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
- Melaksanakan tugas lain Dewan Komisaris.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP. 14/DK.AP.I/2013 tanggal 25 Nopember 2013, Sekretaris Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dijabat oleh Faturohman.



Warga Negara Indonesia, umur 38 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1976. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2001. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Kertas Kraft Aceh (2002-2007), Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara V (2008-2012), dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Kaltim (2012). Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan sejak 2013 sampai dengan 1 November 2016.

Indonesian citizen, 38 years old, was born in Jakarta on 26 June 1976. He earned a Bachelor of Economics from University of Indonesia, Jakarta in 2001. He served as the Secretary of the Board of Commissioners of PT Kertas Kraft Aceh (2002-2007), the Secretary of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara V (2008-2012), and the Secretary of the Board of Commissioners of PT Pupuk Kaltim (2012). He served as the Secretary of the Board of Directors of the company since 2013 until 1 November 2016.

Commissioners is appointed and dismissed by the Board of commissioners, so that the Secretary of the Board of Commissioners is responsible directly to the Board of Commissioners in reporting the performance of his duties.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

The Secretary of the board of Commissioners carries out administrative and secretarial duties related to all activities of the Board of Commissioners, namely:

- Preparing meetings, including the meeting materials of the Board of Commissioners
- Preparing the Minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the Articles of Association of the Company;
- Administrating the documents of the Board of Commissioners, both incoming and outgoing mails, as well as the minutes of meeting and other documents;
- Developing work plan draft and budget of the Board of Commissioners;
- Developing the drafts of the Board of Commissioners reports;
- Ensuring that the Board of Commissioners complies with the legislation and implements the GCG principles;
- Providing information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
- Coordinating the members of the committee if necessary, in order to facilitate the duties of the Board of commissioners;
- Collecting technical data derived from the Committees of the Board of Commissioners and Board of Commissioners experts for the benefit of the Board of Commissioners;
- As a liaison officer between the board of Commissioners and other parties;
- Carrying out other duties of the board of Commissioners.

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

Based on the Decree of the Board of Commissioners No: KEP. 14/DK.AP.I/2013 dated 25 November 2013, Secretary of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) was chaired by Faturohman.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP. 05/DK.AP.I/2016 tanggal 1 November 2016, Sekretaris Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dijabat oleh M. Rosyid Ariansyah.

Based on the Decree of the Board of Commissioners No: KEP. 05/DK.AP.I/2016 dated 1 November 2013, Secretary of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) was chaired by M. Rosyid Ariansyah.



Warga Negara Indonesia, umur 34 tahun, lahir di Klaten pada tanggal 2 Januari 1982. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2007. Pernah menjabat sebagai kasubbag tata kelola administrasi dan keuangan Kementerian BUMN dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Reasuransi Internasional Indonesia. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan sejak tanggal 1 November 2016.

Indonesian citizen, 34 years old, was born in Klaten on 2 January 1982. He earned a Bachelor of Economics from University of Indonesia, Jakarta in 2007. He served as Head of administrative and financial governance of the Ministry of State-Owned Enterprises and the Secretary of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Internasional Indonesia. He served as the Secretary of the board of Directors of the Company since 1 November 2016.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Adapun pengembangan kompetensi yang telah di ikuti Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2016, yaitu:

COMPETENCE DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS SECRETARY

The development of competency which has been followed by the Secretary of the Board of Commissioners in 2016, such as:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris / Table of Competence Development of the Board of Commissioners Secretary

Nama Name	Materi Pelatihan Training Material	Waktu dan tempat Time and Place
Faturohman	Study banding pengelolaan bandara Ke London / Comparative study of Airport management to London	20 Juli – 2 Agustus 2016 / 20 July - 2 August 2016

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016

Adapun pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut.

1. Mempersiapkan 18 rapat internal dan materi rapat internal Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen-dokumen Dewan Komisaris, antara lain surat masuk maupun surat keluar, serta risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun program rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris tahun 2016.
5. Menyusun laporan-laporan Dewan Komisaris tahun 2016.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip GCG.
7. Menjadwalkan kerja Dewan Komisaris ke cabang-cabang Perusahaan.
8. Menyiapkan, mengendalikan, mengkoordinir dan melaporkan kegiatan para Komite.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY IN 2016

Implementation of duties of the Board of Commissioners Secretary in 2016 is as follows.

1. Preparing 18 internal meetings and the materials for the internal meetings of the Board of Commissioners.
2. Preparing the minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the Articles of Association of the Company.
3. Administrating the documents of the Board of Commissioners, both incoming and outgoing mails, as well as the minutes of meeting and other documents.
4. Developing the 2016 work plan draft and budget of the Board of Commissioners;
5. Developing the 2016 Board of Directors Reports.
6. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the legislation and implements the GCG principles.
7. Scheduling the work of the Board of Commissioners to branch offices of the Company.
8. Preparing, controlling, coordinating and reporting the activities of the Committees.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) terdiri dari seorang Ketua berasal dari salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota, berasal dari luar Perusahaan yang tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan saham dan/atau kaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Dasar pembentukan Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero), antara lain:

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit pada BUMN;
- Peraturan Bapepam Nomor: IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris. Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam bentuk Bab sebagai berikut.

Bagian I Pendahuluan

Memuat penjelasan tentang latar belakang, visi dan misi, serta maksud dan tujuan.

Bagian II Pembentukan dan Keanggotaan Komite Audit

Memuat penjelasan tentang pengertian, struktur Komite Audit, keanggotaan, pembentukan dan pengangkatan anggota, persyaratan keanggotaan, serta masa tugas anggota Komite Audit.

Bagian III Fungsi, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Memuat penjelasan tentang fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a councilor of the Board of Commissioners that functions to assist the Board of Commissioners to perform its duties, that are supervising the board of Directors in performing the management of the Company and advising the Board of Directors. Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero) consists of a Chairman coming from one of the Board of Commissioners members that comes from outside the Company and does not have relations with management, share ownership and/or other business activities of the company. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

BASIS OF AUDIT COMMITTEE FORMATION

Basis for Audit Committee formation of PT Angkasa Pura I (Persero), includes:

- Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises;
- Ministerial Decree of State Owned Enterprises No: PER-05/MBU/2006 on Audit Committee of State-Owned Enterprises;
- Bapepam Rule No: IX.I.5 on Formation and Guideline of Performance of Audit Committee;
- Ministerial Decree of State-Owned Enterprises No: PER-09/MBU/2012 on Implementation of Good Governance in State-Owned Enterprises;
- Ministerial Decree of State-Owned Enterprises No: PER-12/MBU/2012 on Supporting Organ of the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

In performing the duties and responsibilities, the Audit Committee is based on the Charter of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero) which has been approved by the Board of Commissioners. The charter contains provisions that must be complied in formation and implementation of Audit Committee activities in order to work independently, objectively, autonomously, transparently, and accountably. The charter is organized in a Chapter as follows.

Section I Introduction

Contains a description on the background of vision, mission, as well as purposes and objectives.

Section II Formation and Membership of Audit Committee

Contains a description on definition, Audit Committee Structure, membership, formation and appointment of members, membership requirements, and term of office of the Audit Committee members.

Section III Functions, Duties, Authorities and Responsibilities

Contains a description of the functions, duties, authorities, and responsibilities.

Bagian IV Lingkup Pekerjaan

Memuat penjelasan tentang laporan keuangan, pengendalian internal, ketaatan pada peraturan, serta tugas khusus dari Komisaris.

Bagian V Kode Etik dan Mekanisme Rapat

Memuat penjelasan tentang kode etik, rapat Komite Audit, serta pendanaan.

Bagian VI Penutup**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

Komite Audit bertugas untuk:

1. Membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan *internal auditor*;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit maupun eksternal auditor;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.

Tanggung jawab Komite Audit yaitu:

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Komisaris disampaikan dalam laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit, serta dalam laporan pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Adapun wewenang Komite Audit sebagai berikut.

1. Komite Audit berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Komite Audit wajib bekerja sama dengan *Internal Audit*.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

Section IV Scope of Work

Contains a description on financial report, internal control, compliance with regulations, and special duties from the Commissioners.

Section V Code of Ethics and Meeting Mechanism

Contains a description on code of ethics, Audit Committee meeting and funding.

Section VI Closing**DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE**

The Audit Committee has duties to:

1. assist the Commissioner in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of external and internal auditors duties
2. assess the implementation of activities and the results of the audit done by the Internal Audit and external auditor;
3. provide recommendations on improvement of management control system and its implementation;
4. ensure that there is a satisfying review procedure towards all information issued by the Company;
5. Identify matters requiring the attention of the Commissioner and other duties of the Commissioner.

Responsibilities of the Audit Committee are:

1. Audit Committee is responsible to the Commissioner.
2. accountability of the Audit Committee to Commissioner is submitted in quarterly and annual reports of the Audit Committee implementation, as well as the reports of the implementation of special duties of the Audit Committee.
3. the Audit Committee is responsible to maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company.

AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

The Authorities of the Audit Committee are as follows.

1. The Audit Committee is authorized to obtain full and free information about employees, funds, and other Company's resources related to the implementation of the duties.
2. In performing the authorities, the Audit Committee is required to cooperate with the Internal Audit.
3. If necessary, with a written approval of the Commissioner, the Audit Committee can request an assistance from experts and/or consultants to assist the Audit Committee.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Per 31 Desember 2016, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut.

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF AUDIT COMMITTEE

Per 31 December 2016, the structure and membership of Audit Committee are as follows.

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Audit / Table of Structure and Membership of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Keterangan Description	Keahlian Expertise
Boy Syahril Qamar	Ketua / Chairman	Oktober 2016 – sekarang / October 2016 – now	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Ekonomi, Human Capital dan Hukum / Economics, <i>Human Capital</i> and Law
Dwi Ary Purnomo	Wakil Ketua / Vice-Chairman	8 April 2014 – sekarang / 8 April 2014 - now	Komisaris / Commissioner	Bidang Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi. / Accounting, Finance, and Information Technology Fields
Syaiful	Anggota / Member	15 September 2015 – Sekarang / 15 September 2015 - now	Pihak Independen / Independent Party	Akuntansi / Accounting
Agus Waluyo	Anggota / Member	28 Oktober 2015 – Sekarang / 28 October 2015 - now	Pihak Independen / Independent Party	Akuntansi / Accounting

PROFIL KOMITE AUDIT

Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah seorang anggota Dewan Komisaris dan memiliki 3 (tiga) orang anggota Komite, yang masing-masing memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian di bidang audit. Hal ini dapat dilihat dari profil Komite Audit sebagai berikut.

PROFILE OF AUDIT COMMITTEE

Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero) is headed by a Chairman coming from one of the members of the Board of Commissioners and has 3 (three) members of committee in which each has educational qualification and expertise in the field of auditing. It can be seen from the profile of the Audit Committee as follows.



Boy Syahril Qamar
Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris
His profile can be seen in profile of the Board of Commissioners section



Dwi Ary Purnomo
Wakil Ketua Komite Audit / Vice-Chairman of Audit Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris
His profile can be seen in profile of the Board of Commissioners section



Syaiful
Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun, lahir di Pariaman, pada tanggal 15 Agustus 1958. Menyelesaikan pendidikan profesi D-3 dengan gelar Ajun Akuntan, tahun 1981 dan D-4 dengan gelar Akuntan, tahun 1989 pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta. Mengawali karir sebagai auditor pada Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sejak 1981 sampai dengan tahun 2000. Pada periode 2001-2003 bekerja pada Kantor Akuntan Publik Dani Sudarsono dan Rekan. Sejak tahun 2002 menjadi konsultan bidang Akuntansi dan Keuangan pada beberapa instansi Pemerintah, terutama yang menerapkan PPK-BLU, termasuk Rumah Sakit. Pernah menjadi Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko pada berbagai BUMN, meliputi PTPN VII, Lampung, PTPN XI, Surabaya, Perum Jamkrindo, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sejak September 2015 diangkat sebagai Anggota Komite Audit pada PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.05/DK.AP.II/2015.

Indonesian citizen, 59 years old, was born in Pariaman on 15 August 1958. He completed D-3 Profession with a title of Accountant Assistant in 1981 and D-4 with an Accountant degree in 1989 in State college of Accountancy, Jakarta. He began his career as auditor in Financial Supervisory Agency (BPKP) since 1981 until 2000. In the period from 2001-2003, he worked at the Office of Public Accountant of Dani Sudarsono and Partners. Since 2012, he became a consultant in Accounting and Finance in some government institutions, especially those applying PPK-BLU, including Hospitals. He served as a Member of Audit Committee and Risk Management Committee in some State-Owned Enterprises, involving PTPN VII, Lampung, PTPN XI, Surabaya, Perum Jamkrindo, and PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Since September 2015, he was appointed as a Member of Audit Committee at Pt Angkasa Pura I (Persero) based on the Decree of the Board of Commissioners No: KEP.05/DK.AP.II/2015..



Agus Waluyo
Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun, lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1973. Memperoleh gelar Diploma III Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta pada tahun 1994 dan Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta pada tahun 2009. Mengawali karir tahun 1994 di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel (1994-1997), BPKP Perwakilan DI.Yogyakarta (1999-2011) dan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2011-2015). Terakhir diperbantukan sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kementerian BUMN (2015 sampai sekarang). Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.08/DK.AP.II/2015.

Indonesian citizen, 44 years old, was born in Cilacap, Central Java on 23 August 1973. He earned a Diploma Degree of Accounting at State College of Accountancy, Jakarta in 1994 and a Bachelor of Economics at School of Economics Widya Wiwaha, Yogyakarta in 2009. He began his career in 1994 at the Financial Supervisory Agency (BPKP) as an Auditor at BPKP Representative of South Sumatera Province, BPKP Representative of DIY (1998-2011), and BPKP Representative of NTT Province (2011-2015). Lastly, he is seconded as Junior Auditor at Inspectorate of the Ministry of State-Owned Enterprises (2015- now). He served as a member of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero) since 28 October 2015 based on the Decree of the Board of Commissioners No: KEP.08/DK.AP.II/2015.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE'S EDUCATION AND WORK EXPERIENCES QUALIFICATIONS

Education and work experience qualification of Audit Committee Head and Member during the year 2016 are as follow.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit / Audit Committee's Education and Work Experiences Qualifications Table

Nama Name	Periode Period	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experiences
Boy Syahril Qamar	Oktober 2016 - sekarang / October 2016 - present	Lulusan Akademi TNI Angkatan Udara dan pendidikan Sarjana Ekonomi. / Indonesian Armed Forces-Naval Forces Academy and Bachelor of Economics Graduate	Menjabat sebagai Komandan SESKOAU tahun 2010, IRJENAU tahun 2011, WAKASAU tahun 2013 dan Kasum TNI tahun 2013 sampai dengan 1 April 2014. / Serving as Air Force Staff and Command School Commander in 2010. Air Force Inspector General in 2011, Air Force Deputy Chief of Staff in 2013 and Armed Forces Chief of Staff from 2013 to 1 April 2014.

Nama Name	Periode Period	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experiences
Dwi Ary Purnomo	8 April 2014 – sekarang / 8 April 2014 - present	Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia. / Economic Law Post-Graduate Program, Indonesia University.	Pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX dari tahun 2011 sampai 2014, Kepala Bidang Administrasi Kekayaan BUMN, Kementerian Negara BUMN dari tahun 2010 sampai 2013 dan Komite Audit PT Askes (Persero) dari tahun 2008 sampai 2010. / Served as Board of Commissioners member of PT Perkebunan Nusantara IX from 2011 to 2014, SOE's Head of Wealth Administration, SOE's State Ministry from 2010 to 2013 and Audit Committee of PT Askes (Persero) from 2008 to 2010.
Syaiful	15 September 2015 – Sekarang / 15 September 2015 - Present	Pendidikan profesi D-3 dengan gelar Ajun Akuntan, dan D-4 dengan gelar Akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Diploma of professional education titled Junior Accountant, and Diploma titled Accountant in Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.	Mengawali karir sebagai auditor pada Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sejak 1981 sampai dengan tahun 2000. Pada periode 2001-2003 bekerja pada Kantor Akuntan Publik Dani Sudarsono dan Rekan. Kemudian sejak tahun 2002 menjadi konsultan bidang Akuntansi dan Keuangan pada beberapa instansi Pemerintah, terutama yang menerapkan PPK-BLU, termasuk Rumah Sakit, serta menjadi Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko pada berbagai BUMN, meliputi PTPN VII Lampung, PTPN XI Surabaya, Perum Jamkrindo, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Started his career as an auditor at Finance and Development Supervision Agency (FDSA) since 1981 to 2000. On the period of 2001-2003 work at Public Accountant Firm of Dani Sudarsono and Co. Then since 2002 serves as Accounting and Finance consultant on several Governmental institution, especially one which apply CMO PSA, including Hospitals, also serves as Audit Committee Member: and Risk Management Committee on several SOE, including PTPN VII Lampung, PTPN XI Surabaya, Perum Jamkrindo, and PT Adhi-Karya (Persero) Tbk.
Agus Waluyo	28 Oktober 2015 – Sekarang / 28 October 2015 - Present	Gelar Diploma III Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta dan Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. Accountant Diploma in Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta and Economic Bachelor in Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.	Mengawali karir tahun 1994 di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, kemudian pada BPKP Perwakilan DIY (1999-2011) dan BPKP Perwakilan NTT (2011-2015). Terakhir diperbantukan sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kementerian BUMN (per 1 Mei 2015 sampai sekarang). Started his career in 1994 on Finance and Development Supervision Agency (FDSA) as an Auditor on FDSA Representative Sumatra Selatan Province, then on FDSA Yogyakarta Special Region Representative (1999-2011) and FDSA Representative NTT (2011-2015). And finally as Young Auditor on SOE Ministry Inspectorate helper (per 1 May 2015 until present).

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit menjalankan peran secara obyektif berdasarkan pertimbangan keahliannya secara profesional. Dalam rangka menjaga obyektifitas tersebut, Komite Audit harus berasal dari pihak yang independen, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan/keterkaitan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemegang Saham dan Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) maupun dengan Perseroan.

Independensi Komite Audit ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE

Audit Committee carrying out their roles objectively based on their professional expertise consideration. In order to safeguard the objectivity, the Audit Committee must come from an independent party, that is the party which does not have relations/connections which will trigger negative effect or conflict of interest either with Shareholders and Managerial (Board of Commissioners and Board of Directors) or with Limited Liability Company.

Audit Committee Independence is shown in the following criteria

Tabel Independensi Komite Audit / Audit Committee Independence Table

Aspek Independensi Independence Aspect	Boy Syahril Qamar	Dwi Ary Purnomo	Syaiful	Agus Waluyo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Have no financial relations with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Have no managerial relations in the Company, Subsidiaries, or affiliates	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan / Have no shareholding relations in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit / Have no familial relations with Board of Commissioners, Board of Directors, and/ or fellow Audit Committee member	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Not serves as party's administrators, officials and government	√	√	√	√

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komite Audit memiliki kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar untuk mengembangkan kompetensi. Pada tahun 2016, Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengikuti program pengembangan kompetensi melalui penugasan Perseroan sebanyak 1 kali selama 2 hari. Kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti tersebut yaitu mengikuti Seminar Nasional Internal Audit "*Tahune Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value*" di Hotel Tahune Stone, Legian Bali, tanggal 27 sampai dengan 28 April 2016.

RAPAT KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mengadakan pertemuan secara berkala, baik rapat internal maupun bersama dengan *Internal Audit* untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja dan pelaksanaannya, perkembangan Perseroan, pengendalian internal, tindak lanjut temuan hasil audit, dan sebagainya, dalam rangka memperoleh informasi yang cukup dan relevan, sebagai bahan untuk memberi masukan tentang hal-hal yang harus mendapat perhatian Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 19 Kali selama tahun 2016.

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

To support task execution, Audit Committee has a chance to attend and participate on various training and seminar to develop their competence. On 2016, Audit Committee Member PT Angkasa Pura I (Persero) has attend competency development program through Company assignment 1 time for 2 days. The competency development activities which they participated in was attending the National Seminar of Internal Audit "*Tahune Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value*" at Hotel Tahune Stone, Legian Bali, 27th to 28th April 2016.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

In performing its duties, the Audit Committee holds regular meetings, both internal and internal meetings with Internal Audit to discuss matters relating to the work plan and its implementation, the Company's development, internal control, follow-up audit findings, etc. in order to obtain sufficient and relevant information, as a material to provide input on matters which should receive the attention of the Board of Commissioners in the implementation of supervisory duties and advise the Board of Directors.

FREQUENCY AND MEETINGS ATTENDANCE RATE OF AUDIT COMMITTEE

In accordance with the Audit Committee Charter, Audit Committee held 19 meetings on 2016.

**Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit /
Frequency and Meetings Attendance Rate of Audit Committee Table**

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode / Period	Jumlah dan Frekuensi (%) Kehadiran Rapat Komite Audit Frequency and Meetings Attendance Rate of Audit Committee		
			Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Amount of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate
Boy Syahril Qamar	Ketua / Head	Oktober 2016 - sekarang / October 2016 - present	4	4	100
Dwi Ary Purnomo	Wakil Ketua / Vice Chairman	8 April 2014 – Oktober 2016 / 8 April 2014 - October 2016	19	19	100
Syaiful	Anggota / Member	15 September 2015 – Sekarang / 15 September 2015 - Present	19	19	100
Agus Waluyo	Anggota / Member	28 Oktober 2015 – Sekarang / 28 October 2015 - Present	19	19	100

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Adapun agenda rapat Komite Audit sebagai berikut.

THE AUDIT COMMITTEE'S MEETINGS

The Audit Committee's meetings agenda are as follow.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit / Audit Committee's Meetings Agenda Table

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Komite Audit Audit Committee's Name
1	14-1-2016	Evaluasi atas <i>Feasibility Study</i> 3 Bandara / Evaluation of 3 Airports Feasibility Study	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
2	27-1-2016	Evaluasi atas PT Angkasa Pura Hotel / Evaluation of Angkasa Pura Hotel	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
3	28-1-2016	Evaluasi atas PT Angkasa Pura Retail / Evaluation of Angkasa Pura Retail	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
4	2-2-2016	Evaluasi permohonan hapus buku piutang / Evaluation on the write-off proposal for account receivable ledger	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
5	12-2-2016	Konsinyering Audit Laporan Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) / PT Angkasa Pura I (Persero) Financial Statements Audit Consignment	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
6	19-2-2016	Evaluasi divestasi dan kontribusi tetap NTB / Evaluation of NTB's divestment and fixed contribution	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
7	2-3-2016	Evaluasi surat Direksi permohonan persetujuan PKS 5 tahun / Evaluation of Director's letter approval request PKS 5 years	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
8	4-4-2016	Evaluasi usulan Struktur Organisasi Baru PT Angkasa Pura I (Persero) / Evaluation of New Organizational Structure PT Angkasa Pura I (Persero) proposal	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
9	19-4-2016	Usulan Realokasi Investasi / Proposed Investment Reallocation	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
10	16-5-2016	Tanggapan Surat Konsesi / Concession Letter Response	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
11	23-6-2016	<i>Draft Pedoman Whistle Blower System</i> / Whistle Blower System Guidelines Draft	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Komite Audit Audit Committee's Name
12	22-7-2016	Evaluasi Komite Audit Semester 1 / Evaluation of Audit Committee Semester 1	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
13	1-8-2016	Evaluasi Laporan Manajemen Semester 1-2016 / Evaluation of Management Report Semester 1-2016	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
14	24-8-2016	Usulan Persetujuan GIS Bali / Proposed Approval of GIS Bali	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
15	8-9-2016	Tanggapan Dewan Komisaris atas Perubahan Investasi / Board of Commissioners Response of Investment Amendment	Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
16	23-10-2016	Penyusunan Tanggapan terhadap RKAP 2017 / Response Preparations of Company's Work Plan and Budget (CWPB) 2017	Boy Syahril Qamar Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
17	7-11-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Paparan Calon Kepala SPI, Sdr. Tommy Meilitza, QIA. / Presentation of Head of Internal Control Unit Candidate, Mr. Tommy Meilitza, QIA. - Pembahasan Usulan Penambahan Manfaat Pensiun / Discussion on the Proposal of Additional Pension Benefits - Pembahasan Usulan Revisi RKAP Tahun 2016 (Penambahan Biaya pembebasan Tanah Proyek NYIA) / Discussion on the Proposal of Company's Work Plan and Budget Year 2016 (Additional Budget to free Project Land NYIA) - Paparan Surat-Surat Masuk ke Dewan Komisaris yang tidak memerlukan tanggapan Dewan Komisaris / Presentation of Letters to Board of Commissioners which do not need Board of Commissioners' Response - Paparan sekilas LM Triwulan III Tahun 2016 / Brief Presentation on LM Third Trimester 2016 	Boy Syahril Qamar Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
18	6-12-2016	Usulan Agenda RUPS dan Tanggapan atas masukan Dewan Komisaris RKAP / Proposed General Meeting of Shareholders (GMS) Agenda and Response on CWPB input from Board of Commissioners.	Boy Syahril Qamar Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo
19	15-12-2016	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada PT Angkasa Pura I (Persero) / Monitoring Follow-Up on Indonesia Finance Auditor Agency Findings on PT Angkasa Pura I (Persero)	Boy Syahril Qamar Dwi Ary Purnomo Syaiful Agus Waluyo

LAPORAN PELAKSANAAN (REALISASI) KEGIATAN KOMITE AUDIT

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas antara lain:

- Program penilaian pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan SPI
Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:
 - 1) Evaluasi pelaksanaan dan hasil audit, melalui pengamatan pelaksanaan audit lapangan, dilakukan secara *sampling*.
 - 2) *Monitoring* tindak lanjut temuan audit, melalui rapat-rapat rutin yang dilaksanakan secara triwulanan.
- Program penilaian pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan auditor eksternal
Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - 1) Melakukan proses penunjukan KAP.
Telah dilakukan penunjukan ulang kepada KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan 2015, kegiatan yang akan dilakukan meliputi

IMPLEMENTATION REPORT (REALIZATION) AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES

During 2016, Audit Committee have implemented tasks among others:

- Assessment program of activities implementation and audit result conducted by Internal Control Unit
Implemented activities are as follow:
 - 1) Evaluating the implementation and audit result, through observation of field audit, done by sampling.
 - 2) Monitoring audit result follow-up, through regular meetings held every quarterly.
- Assessment program of activities implementation and audit result conducted by external auditor
The activities are as follow:
 - 1) Process of appointing Public Accounting Firm (PAF).
Reappointment to Public Accounting Firm which audited financial statements in 2015, the

- | | |
|--|--|
| <p>memperoleh kesepakatan tentang lingkup, metodologi dan biaya audit.</p> <p>2) Evaluasi perencanaan audit, dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kick off/entry meeting</i>, yaitu tentang perencanaan interim audit, - Rapat <i>monitoring progress audit</i>, yang dilakukan sekaligus dalam rangka menetapkan perencanaan audit lanjutan. <p>3) Evaluasi pelaksanaan dan hasil audit, telah dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat <i>monitoring progress audit</i>, - Rapat pembahasan draft laporan hasil audit, dan - <i>Exit meeting</i> dalam rangka penyelesaian pelaksanaan audit. | <p>implemented activities including achieving deal on audit scope, methodology and budget.</p> <p>2) Evaluation on audit planning, implemented by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kick of/entry meeting, about interim audit planning, - Monitoring progress audit meeting, which has been undertaken at the same time in order to establish an advance audit planning. <p>3) Evaluation of audit planning and result, has been implemented by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring progress audit meeting, - Meeting to discuss the draft of audit result report, and - Exit meeting in order to finish the audit. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Program pemberian rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya Kegiatan yang telah dilakukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pengembangan Bandara, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Proyek Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, - Proyek Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, - Proyek Bandara New Yogyakarta 2) Evaluasi Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 3) Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset <p>Kegiatan ini dilakukan melalui; penelitian terhadap dokumen dan observasi/ peninjauan lapangan.</p> | <p>Internal system improvement recommendation program and its implementation
Implemented activities are as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluation of Airport Development Project Implementation, including: <ul style="list-style-type: none"> - Ahmad Yani International Airport Project, Semarang, - Syamsudin Noor Airport Project, Banjarmasin, - New Yogyakarta Airport Project 2) Evaluation of Goods and Services Procurement Process 3) Evaluation of Asset Utilization Optimization <p>This activity has done by; research on the documents and field observation/ inspection.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Program penilaian prosedur evaluasi terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan. 2) Evaluasi Laporan Manajemen Lainnya. <p>Kegiatan ini telah dilakukan melalui; penelitian tentang hubungan logis antar data dalam laporan dan konfirmasi kepada manajemen/penanggung jawab kebenaran data.</p> • Program identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
Dilakukan sesuai arahan dari Dewan Komisaris atau berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi dari internal dan eksternal PT Angkasa Pura I (Persero), termasuk media massa (cetak dan elektronik). • Program penyusunan rencana kerja dan anggaran Komite Audit
Telah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAP PT Angkasa Pura I (Persero). • Program rapat internal, minimal sekali dalam satu bulan | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation of evaluation procedures for any information issued by the Company <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluation of Quarterly and Annual Management Report 2) Evaluation of Other Management Report. <p>This activity has been implemented by; research on logic relation between data in the report and confirmation to the management/coordinator of data accuracy.</p> • Identification program of matters that require the attention of the Board of Commissioners
Implemented according to the direction of the Board of Commissioners or based on information obtained from various sources, including from internal and external of PT Angkasa Pura I (Persero), including mass media (printed and electronic). • Preparation program of Audit Committee's work plan and budget
Implemented simultaneously with the preparation of PT Angkasa Pura I (Persero)'s Company's Work Plan and Budget • Internal meeting program, at least once a month |

Selama tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Komite Audit sebanyak 19 kali, baik internal maupun mengundang kehadiran SPI atau para Kepala (*Group Head/Head*) di lingkungan AP-1. Uraian selengkapnya disajikan pada Point J.

- Program penyusunan laporan triwulanan dan tahunan Telah dibuat setelah suatu triwulan atau tahun berakhir.
- Program penyusunan laporan setiap pelaksanaan tugas Telah dilaksanakan segera setelah selesainya setiap penugasan.
- Program pengembangan Profesi Selamat Tahun 2016 Komite Audit telah mengikuti seminar Nasional Internal Audit di Kuta, Bali.

During 2016 there have been 19 Audit Committee Meetings, either internally or by inviting the Internal Control Unit or the Head (*Group Head/Head*) AP-1 environment. Full details are presented on Point J.

- Quarterly and annual report preparation program Made after one quarterly or year ended.
- Report preparation after task implementation program Have been implemented directly after every task is completed.
- Profession development program During 2016 Audit Committee has attended National Internal Audit seminar in Kuta, Bali.

KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite Risiko Usaha dan GCG merupakan organ pendukung yang dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris terkait permasalahan kebijakan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan risiko (*risk management*) dan kemungkinan terjadinya risiko usaha, serta pengelolaan perusahaan yang baik (GCG). Komite Risiko Usaha dan GCG diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Komite Risiko Usaha dan GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan dilaporkan kepada RUPS.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite Risiko Usaha dan GCG dibentuk berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.

PIAGAM KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Risiko Usaha dan GCG berpedoman pada Piagam Komite Risiko Usaha dan *Good Corporate Governance* (GCG). Piagam tersebut merupakan pedoman agar Komite Risiko Usaha dan GCG dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muatan dari Piagam Komite Risiko Usaha dan GCG tersebut sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, visi dan misi, serta maksud dan tujuan.

BUSINESS RISK COMMITTEE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Business Risk Committee and GCG are supporting organ which intended to help Board of Commissioners related to Board of Directors' policy which related to risk management. (*risk management*) and the possibility of business risk, also good company management (GCG). Business Risk Committee and GCG are chaired by a member of the Board of Commissioners. Business Risk Committee and GCG are appointed and dismissed by the Board of Commissioners by reporting to the GMS.

BASIS OF ESTABLISHMENT OF BUSINESS RISK COMMITTEE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Business Risk Committee and GCG are established based on:

- Law Number 19 of 2003 on SOE;
- Ministry Regulation of SOE Number: PER-09 / MBU / 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE;
- Ministry Regulation of SOE Number: PER-12/MBU/2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners.

BUSINESS RISK COMMITTEE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

In conducting its business and responsibilities, Business Risk Committee and GCG follow the guideline of Business Risk Committee and Good Corporate Governance (GCG) Charter. The charter is a guideline for the Business Risk Committee and GCG to perform their duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, competent, independently, and accountably, and in accordance with applicable law and regulations. The content of Business Risk Committee and GCG Charter are as follow.

Chapter I Introduction

Contains background, vision and mission, and also intentions and purposes.

Bab II Pembentukan, Organisasi dan Masa Kerja
Memuat tentang pembentukan dan organisasi.

Bab III Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan
Memuat tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik kerahasiaan, serta pertanggungjawaban.

Bab IV Rapat, Pelaporan, dan Anggaran
Memuat rapat Komite, pelaporan, serta anggaran.

Bab V Penutup

Beberapa pokok pedoman kerja Komite Risiko Usaha dan GCG yang diatur dalam Piagam Komite Risiko Usaha dan GCG dijabarkan sebagai berikut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO USAHA DAN GCG

TUGAS POKOK BERKAITAN RISIKO USAHA

Tugas pokok Komite Risiko Usaha dan GCG yang berkaitan dengan risiko usaha, yaitu:

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang dilakukan oleh Unit *Risk Management and Compliance*, melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas *progress* dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh *Risk Management and Compliance Group*;
2. Melakukan *review* atas penilaian risiko oleh *Risk Management and Compliance Group* terhadap rencana investasi Perusahaan yang material;
3. Melakukan pengawasan atas kegiatan *Risk Management and Compliance group* dalam memantau pelaksanaan mitigasi resiko oleh unit-unit kerja terkait;
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Risiko Usaha oleh *Risk Management and Compliance Group*;
5. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKAP dan *review* tahunan atas RJPP yang diajukan oleh Direksi;
6. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan, melalui proses:
 - Diskusi bersama dengan manajemen;
 - *Review* atas *draft* dari laporan yang akan dipublikasikan;
7. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan, sesuai kebutuhan.
8. Dalam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan, maka tugas Komite Risiko Usaha dan GCG adalah:
 - Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
 - Melakukan *monitoring* pekerjaan konsultan melalui *Risk Management and Compliance Group*.

Chapter II Establishment, Organization and Working Period

Contains establishment and organization.

Chapter III Duties, Responsibilities and Authorities

Contains duties and responsibilities, authority and working mechanisms, privacy codes of ethics, and accountability.

Chapter IV Meetings, Reporting, and Budget

Contains Committee meetings, reporting, and budget.

Chapter V Closing

Several points of the Business Risk Committee and GCG's work guidance set forth in the Charter of the Business Risk Committee and GCG are described as follows.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BUSINESS RISK COMMITTEE AND I

MAIN DUTIES RELATED TO BUSINESS RISK

Main duties of Business Risk Committee and GCG which related to business risk, are:

1. Reviewing and providing recommendation on the effectiveness of the Company's risk management implementation done by the Risk Management and Compliance Unit, through regular meetings or other means to discuss progress from the duties and responsibilities stages implemented by Risk Management and Compliance Group;
2. Reviewing on the risk assessment by Risk Management and Compliance Group toward Company's material investment plan;
3. Monitoring the activities of Risk Management and Compliance group in monitoring the implementation of risk mitigation by related work units;
4. Monitoring the implementation of Business Risk Committee recommendation by Risk Management and Compliance Group;
5. Analyzing and evaluating the proposed CWPB and review the annual Company's Long Term Plan proposed by the Board of Directors;
6. Reviewing the risk information and Company's risk management in the reports which are going to be published, through the following process:
 - Discuss with the management;
 - Reviewing the draft from the reports which are going to be published;
7. Discussing the important risks to the units within the Company, as needed.
8. If the Board of Directors feel the need to use independent risk management consultant to review the risk management process which has been applied in the Company, then the task of Business Risk Committee and GCG are:
 - Providing input on the consultant's criteria and competency;
 - Monitoring of the consultant's works through Risk Management and Compliance Group.

TUGAS POKOK BERKAITAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Adapun tugas Komite Risiko Usaha dan GCG berkaitan dengan GCG, sebagai berikut.

1. Memastikan kelengkapan dan validitas dari *Corporate Governance Policy* (CGP), *Management Policy* (MP) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan kegiatan Perseroan;
2. Memastikan manajemen melaksanakan kegiatan usaha mengikuti ketentuan dalam CGP, MP dan SOP;
3. Memastikan pengawasan telah dilakukan terhadap penerapan CGP, MP dan SOP;
4. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh eksternal konsultan;
5. Melakukan penyelidikan dan verifikasi berdasarkan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan pelanggaran etika dan pelanggaran praktik GCG yang terjadi di Perseroan;
6. Mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan terhadap pedoman-pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan;
7. Memberikan nasehat, masukan, dan rekomendasi kepada Direksi mengenai standar-standar praktik terbaik penerapan GCG di Perseroan;
8. Membantu Direksi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan secara berkesinambungan penerapan Etika Kerja dan Bisnis serta praktik GCG di seluruh wilayah kerja Perseroan;
9. Membantu tugas Direksi dalam pembinaan dan pengawasan efektifitas penerapan praktik GCG di Perusahaan sebagai upaya meningkatkan nilai Pemegang Saham, termasuk sosialisasi dan internalisasi;
10. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan GCG oleh Organ Utama dan Organ Pendukung serta memberikan masukan penyempurnaan serta upaya-upaya pemantapannya;
11. Menyusun mekanisme *reward and punishment* secara konsisten terkait penerapan praktik GCG di Perseroan.

PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS

Komite Risiko Usaha dan GCG juga mempunyai pelaksanaan tugas khusus. Adapun pelaksanaan tugas khusus Komite Risiko Usaha dan GCG adalah:

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Risiko Usaha dan GCG oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang antara lain menerangkan:
 - Nama anggota Komite Risiko Usaha dan GCG yang diberi tugas;
 - Sifat dan lingkup pekerjaan;
 - Tujuan dan sasaran pekerjaan;

MAIN DUTIES RELATED TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The duties of Business Risk Committee and GCG which related to GCG, are as follow.

1. Ensuring the completeness and validity of the Corporate Governance Policy (CGP), Management Policy (MP) and Standard Operating Procedure (SOP) in accordance with the Company's activity;
2. Ensuring the management conduct business activities in accordance with the conditions in the CGP, MP, and SOP;
3. Ensuring that monitoring has been made on the application of CGP, MP and SOP;
4. Evaluating the policies about GCG and Ethics Standards as well as follow-up on the result of assessment conducted by external consultant;
5. Investigating and verifying based on the result found in the field related to GCG's ethics violation and practice violation happen in the Company;
6. Evaluating and improving the guidelines related to the GCG application at least 1 (once) a year or as needed by the Company;
7. Providing advice, inputs and recommendations to the Board of Directors on standards for best practice of GCG implementation in the Company;
8. Assisting the Board of Directors in planning, implementing, evaluating and continuously developing the implementation of Work Ethics and Business and GCG practices throughout the Company's work areas;
9. Assisting the Board of Directors' duties in fostering and supervising the effectiveness of GCG practices in the Company as an effort to increase shareholder value, including socialization and internalization;
10. Evaluating the effectiveness of GCG implementation by Main Organs and Supporting Organs and provide inputs for improvement and stabilization efforts;
11. Arranging a reward and punishment mechanism consistently in relation with the GCG practice application in the Company.

SPECIAL DUTIES IMPLEMENTATIONS

Business Risk Committee and GCG also have special duties implementations. Special duties implementations of the Business Risk Committee and GCG are:

1. The granting of special duties to the Business Risk Committee and GCG by the Board of Commissioners is conducted by written order which explain among other things:
 - The names of Business Risk Committee and GCG's members who are assigned;
 - Nature and scope of work;
 - Goals and objectives of work;

- Waktu penugasan; serta
 - Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari suatu hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 3. Komite Risiko Usaha dan GCG harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Risiko Usaha dan GCG dan anggota Dewan Komisaris.

- Assignment time; and
 - Administrative matters which related to the special duties concerned.
2. Specific duties may include but are not limited to examining allegations of errors in decisions of meetings of the Board of Directors or any irregularities in the execution of a result of the Board of Directors' resolutions in relation to their duties and responsibilities.
 3. The Business Risk Committee and GCG must submit a report on the performance of specific tasks with a maximum level of confidentiality limited to members of the Business Risk Committee and GCG and members of the Board of Commissioners.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE RISIKO USAHA DAN GCG

Per 31 Desember 2016, struktur dan keanggotaan Komite Risiko Usaha dan GCG sebagai berikut.

BUSINESS RISK COMMITTEE AND GCG STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Per 31 December 2016, Business Risk Committee structure and membership are as follow.

**Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Risiko Usaha dan GCG/
Business Risk Committee and GCG Structure and Membership Table**

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Keterangan Description	Keahlian Skill
Anandy Wati	Ketua Komite / Head of Committee	08 April 2014 - 30 Agustus 2016 / 08 April 2014 -30 August 2016	Komisaris / Commissioner	Bidang komersial dan pengembangan usaha / Commercial field and business development
	Wakil Ketua Komite Vice Chairman of the Committee	30 Agustus 2016 - Sekarang 30 August 2016 - Present		
Andrinof Chaniago	Ketua Komite Head of Committee	30 Agustus 2016 - 06 April 2017 / 30 August 2016 - 06 April 2017	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner	Ilmu Sosial dan Politik / Social and Political Science
Joko Subagyo	Anggota / Member	25 Februari 2015 - 25 Februari 2016 / 25 February 2015 - 25 February 2016	Pihak Independen / Independent Party	Hukum / Law
Amnu Fuady	Anggota / Member	1 April 2015 - April 2016 / 1 April 2015 - April 2016	Pihak Independen / Independent Party	Ekonomi / Economics
Ganesha Dian Farisi	Anggota / Member	27 Desember 2016 - Sekarang / 27 December 2016 - Present	Pihak Independen / Independent Party	Ekonomi / Economics
Wawan Zulmawan	Anggota / Member	27 Desember 2016 - Sekarang / 27 December 2016 - Present	Pihak Independen / Independent Party	Hukum / Law

PROFIL KOMITE RISIKO USAHA DAN GCG

Komite Risiko Usaha dan GCG PT Angkasa Pura I (Persero) diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan memiliki 2 (dua) orang anggota Komite. Masing-masing anggota Komite Risiko Usaha dan GCG memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian yang sesuai.

BUSINESS RISK COMMITTEE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE PROFILE

Business Risk Committee and GCG of PT Angkasa Pura I (Persero) are chaired by a Board of Commissioners member and have 2 (two) Committee members. Each of Business Risk Committee and GCG member has proper education and skill qualification.

Berikut profil Komite Risiko Usaha dan GCG per 31 Desember 2016.

The following are the Business Risk Committee and GCG profile per 31 December 2016.



Andrinof Chaniago

Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG / Head of Committee of Business Risk and GCG

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris
His profile can be seen on the Board of Commissioners Profile



Anandy Wati

Wakil Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG / Vice Chairman of Business Risk Committee and GCG

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris
Her profile can be seen on the Board of Commissioners Profile



Ganesha Dian Farisi

Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG / Member of Business Risk Committee and GCG

Warga Negara Indonesia, umur 27 tahun, lahir tanggal 3 Desember 1989. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 dan *Master Degree in Business Administration* pada IPMI International Business School tahun 2015. Mengawali karir di KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia sebagai *Production Data Analyst* (2012), *Coordinator of Branches Development* (2014), *Coordinator of Technical Supports* (November 2016 – sekarang). Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tanggal 27 Desember 2016.

Indonesian, 27 years old, born on December 3, 1989. Obtained a Bachelor of Economics degree at the Faculty of Economics and Business Padjadjaran University in 2012 and Master Degree in Business Administration at IPMI International Business School in 2015.

He started his career at KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia as Production Data Analyst (2012), Coordinator of Branches Development (2014), Coordinator of Technical Supports (November 2016 - present). Served as a member of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero) since December 27, 2016.



Wawan Zulmawan

Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG / Member of Business Risk Committee and GCG

Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun, lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat tanggal 23 Januari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada tahun 1994 dan *Master Business of Administration* dari Jakarta Institute Management tahun 1997, Magister *Management* dari STIE IPWI tahun 1998, *Master of Business Law* dari Universitas Indonesia tahun 2007, dan saat ini sedang menjalani *Doctoral Program* pada Universitas Pelita Harapan. Beliau pernah menjabat sebagai *Head of Corporate Division* pada Triweka Rinanti & Partners (2008-2013), *Head of Legal & Corporate Secretary* pada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (2013-2014), *Expert Staff* pada PT Angkasa Pura 2 (Persero) (2014), Direktur Utama PT Banten Global Development (2014-2015), Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (2014-2015), Direktur Utama PD Pandeglang Berkah Maju (2015-2016), *Business & Legal Advisor* pada Gapuraprima Group (2016), dan *Business & Legal Advisor* pada Hutomo & Partners (2014 – sekarang). Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tanggal 27 Desember 2016.

Indonesian, 45 years old, born in Lubuk Alung, West Sumatra, January 23, 1971. Obtained his Bachelor of Law from Andalas University in 1994 and Master of Business Administration from Jakarta Institute Management in 1997, Master of Management from STIE IPWI in 1998, Master of Business Law from University of Indonesia in 2007, and is currently undergoing Doctoral Program at Pelita Harapan University. He served as Head of Corporate Division at Triweka Rinanti & Partners (2008-2013), Head of Legal & Corporate Secretary at PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (2013-2014), Expert Staff at PT Angkasa Pura 2 (Persero) (2014), President Director of PT Banten Global Development (2014-2015), Board of Commissioners of PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (2014-2015), President Director of PD Pandeglang Berkah Maju (2015-2016), Business & Legal Advisor at Gapuraprima Group (2016), And Business & Legal Advisors at Hutomo & Partners (2014 - present). Served as a member of Audit Committee of PT Angkasa Pura I (Persero) since December 27, 2016.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE RISIKO USAHA DAN GCG

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Risiko Usaha dan GCG selama tahun 2016 adalah sebagai berikut.

EDUCATIONS AND WORK EXPERIENCES QUALIFICATION OF BUSINESS RISK COMMITTEE AND GCG

Educations and work experiences qualification of Audit Committee Head and Members during the year 2016 are as follow.

**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja/
Education and Work Experiences Qualifications Table**

Nama Name	Periode Period	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experiences
Anandy Wati	20 April 2014 – Sekarang 20 April 2014 – Present	<i>Master of Public Management</i> , Carnegie Mellon University, USA <i>Master of Public Management</i> , Carnegie Mellon University, USA	Mengawali karir tahun 1983 di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pernah menduduki, sebagai Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPBN, Direktur berbagai jabatan strategis di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan, yaitu sebagai Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Bangka Belitung Sistem Manajemen Investasi DJPBN, sebagai Sekretaris Ditjen Anggaran dan saat ini menjabat sebagai Direktur PNBPN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan Pangkat Pembina Utama Madya Gol. IV/D. / He began his career in 1983 at the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance, served as, Director of Budget Implementation of DJPBN, Director of various strategic positions at Directorate General of Budget and Directorate General of Treasury, as Head of Regional Office of DJPBN of Bangka Belitung Province Investment Management System DJPBN, as Secretary of General Secretary of Budget and now served as Director of PNBPN, Directorate of Budgetary Journal of the Ministry of Finance with the as Middleclass Administrator IV/D.
Joko Subagyo	25 Februari 2013 – Sekarang / 25 February 2013 – Present	Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia dan Master Manajemen dari Universitas Mercu Buana. Bachelor of Law from Islamic University of Indonesia and Master of Management from Mercu Buana University.	Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan OTL Perusahaan (1993-2008) dan Pengawas Bidang PUM Satuan Pengawas Internal (SPI) Perusahaan (2008-2012). / Has served as Head of Corporate Regulatory and OTL Section (1993-2008) and Supervisory Division of PUM of Internal Control Unit (SPI) of the Company (2008-2012).
Amnu Fuadiy	1 April 2015 - Sekarang 1 April 2015 - Present	<i>Master of Art</i> di bidang Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional dari Kyung Hee University, Soutahun Korea. / <i>Master of Art</i> in International Economics Cooperation and Trade from Kyung Hee University, Soutahun Korea.x	Mengawali karir tahun 1997 di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, aktif di berbagai Kerjasama Kajian dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Keuangan Internasional, saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Data dan Dukungan Teknis, Direktorat PNBPN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan Pangkat Pembina Tk. I Gol IV/B. / Started his career in 1997 at the Directorate General of Budget Ministry of Finance, active in various Cooperation Studies with Universities and International Financial Institutions, currently serves as Head of Sub Directorate of Data and Technical Support, Directorate of PNBPN, Directorate of Budgetary Ministry of Finance as Middleclass Administrator IV/B.
Ganesha Dian Farisi	27 Desember 2016 – Sekarang 27 December 2016 – Present	Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 dan <i>Master Degree in Business Administration</i> pada IPMI International Business School tahun 2015. / Obtained a Bachelor of Economics degree at the Faculty of Economics and Business Padjadjaran University in 2012 and Master Degree in Business Administration at IPMI International Business School in 2015	Mengawali karir di KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia sebagai <i>Production Data Analyst</i> (2012), <i>Coordinator of Branches Development</i> (2014), <i>Coordinator of Technical Supports</i> (November 2016 – sekarang). / He started his career at KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia as Production Data Analyst (2012), Coordinator of Branches Development (2014), Coordinator of Technical Supports (November 2016 - present).

Nama Name	Periode Period	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experiences
Wawan Zulmawan	27 Desember 2016 – Sekarang 27 December 2016 – Present	Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada tahun 1994 dan <i>Master Business of Administration</i> dari Jakarta Institute Management tahun 1997, <i>Magister Management</i> dari STIE IPWI tahun 1998, <i>Master of Business Law</i> dari Universitas Indonesia tahun 2007, dan saat ini sedang menjalani <i>Doctoral Program</i> pada Universitas Pelita Harapan. / Obtained his Bachelor of Law from Andalas University in 1994 and Master of Business Administration from Jakarta Institute Management in 1997, Master of Management from STIE IPWI in 1998, Master of Business Law from University of Indonesia in 2007, and is currently undergoing Doctoral Program at Pelita Harapan University.	Beliau pernah menjabat sebagai <i>Head of Corporate Division</i> at Triweka Rinanti & Partners (2008-2013), <i>Head of Legal & Corporate Secretary</i> at PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (2013-2014), <i>Expert Staff</i> at PT Angkasa Pura 2 (Persero) (2014), <i>Direktur Utama</i> of PT Banten Global Development (2014-2015), <i>Commissioner of</i> PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (2014-2015), <i>Direktur Utama</i> of PD Pandeglang Berkah Maju (2015-2016), <i>Business and Legal Advisor</i> at Gapuraprima Group (2016), dan <i>Business and Legal Advisor</i> at Hutomo and Partners (2014 – sekarang). / He served as Head of Corporate Division at Triweka Rinanti & Partners (2008-2013), Head of Legal & Corporate Secretary at PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (2013-2014), Expert Staff at PT Angkasa Pura 2 (Persero) (2014), President Director of PT Banten Global Development (2014-2015), Commissioner of PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (2014-2015), President Director of PD Pandeglang Berkah Maju (2015-2016), Business & Legal Advisor at Gapuraprima Group (2016), and Business & Legal Advisors at Hutomo & Partners (2014 - present).

INDEPENDENSI KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite Risiko Usaha dan GCG menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Komite Risiko Usaha dan GCG tidak memiliki kaitan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Risiko Usaha dan GCG tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan. Ketua Komite Risiko Usaha dan GCG tidak dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada Komite lain, demikian pula anggotanya tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota pada Komite lain.

Independensi Komite Risiko Usaha dan GCG sebagai berikut.

BUSINESS RISK COMMITTEE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDEPENDENCY

The Business Risk Committee and GCG play a professional and independent role, and do not accept/intervene from/to other parties. Business Risk Committee and GCG have no relations with the Shareholders, Board of Commissioners, or Board of Directors. Business Risk Committee and GCG have no personal interest/connection which will trigger negative effect or conflict of interest with the Company. Head of Business Risk Committee and GCG cannot concurrently serves as the head of other Committee, nor shall its members be concurrently serves as member of other Committee.

Business Risk Committee and GCG independence are as follow.

Tabel Independensi Komite Risiko Usaha dan GCG / Business Risk Committee and GCG Independence Table

Aspek Independensi Independence Aspect	Anandy Wati	Joko Subagyo	Amnu Fuadiy	Ganesha Dian Farisi	Wawan Zulmawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Have no financial relations with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Have no managerial relations in the Company, Subsidiaries, or affiliates	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan / Have no shareholding relations in the Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit / Have no familial relations with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee member	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Not serves as party's administrators, officials and government	√	√	√	√	√

RAPAT DAN LAPORAN PELAKSANAAN (REALISASI) KEGIATAN KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pertemuan Komite Risiko Usaha dan GCG dilakukan bersamaan dengan rapat internal Dewan Komisaris. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Evaluasi Penerapan *Risk Management*
2. Telaahan atas Laporan *Compliance Departement*
3. Evaluasi hasil *Self Assessment* GCG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komite Risiko Usaha dan GCG memiliki kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar untuk mengembangkan kompetensi. Pada tahun 2016, pengembangan kompetensi anggota Komite Risiko Usaha dan GCG dilakukan melalui diskusi internal.

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

PT Angkasa Pura I (Persero) tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun, Dewan Komisaris secara kolegal memiliki fungsi terkait nominasi dan remunerasi. Berdasarkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*), fungsi nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut.

TUGAS DALAM NOMINASI DIREKSI

Tugas Dewan Komisaris terkait nominasi Direksi, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi;
2. Melakukan telaah dan/atau penilaian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan oleh Direksi sebelum disampaikan ke Pemegang Saham;
3. Mengusulkan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS.

TUGAS DALAM REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi;
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas pengusulan remunerasi Direksi;
3. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris;

MEETINGS AND IMPLEMENTATION REPORT (REALIZATION) OF BUSINESS RISK COMMITTEE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE ACTIVITY

The meeting of Business Risk Committee and GCG is conducted simultaneously with the internal meeting of Board of Commissioners. Matters discussed in the meeting among other are:

1. Evaluation of Risk Management Implementation
2. Review of Compliance Department Report
3. Evaluation of GCG Self Assessment result

BUSINESS RISK COMMITTEE AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMPETENCE DEVELOPMENT

To support task execution, Business Risk Committee and GCG have a chance to attend and participate on various trainings and seminars to develop their competence. In 2016, the competency development of Business Risk Committee and GCG members was conducted through internal discussions.

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTIONS

PT Angkasa Pura I (Persero) has not Nomination and Remuneration Committee. However, the Board of Commissioners has collegial functions related to nomination and remuneration. Based on the Board Manual Working Manual, the nomination and remuneration functions of the Board of Commissioners are described as follows.

DUTIES ON THE BOARD OF DIRECTORS NOMINATION

Board of Commissioners duties related to the Board of Directors Nomination, are:

1. Establishing selection policies and criteria for the Board of Directors candidate;
2. Reviewing and/or assessing/examining candidates of Board of Directors who are proposed by the Board of Directors before being submitted to the Shareholders;
3. Proposing the candidates of the new Board of Directors to GMS.

DUTIES ON BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

Board of Commissioners' duties regarding the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration, are:

1. Establishing Board of Commissioners' policies on the proposal Board of Directors remuneration;
2. Preparing the Board of Commissioners' plan to review on the proposal of Board of Directors' remuneration;
3. Board of Commissioners may propose fees and post-employment allowances system of the Board of Commissioners to the GMS;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem pemberian uang jasa dan tunjangan bagi Dewan Komisaris, serta rincian uang jasa dan tunjangan purna jabatan yang diterima oleh Dewan Komisaris yang sedang menjabat; 5. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas, dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi; 6. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas, dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi, serta rincian gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima oleh Direksi yang sedang menjabat; 7. Dewan Komisaris dapat merekomendasikan kepada RUPS mengenai sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Giving full details on the fees and allowances system of the Board of Commissioners to the GMS, also the details of fees and post-employment allowances received by the Board of Commissioners in office; 5. Board of Commissioners may propose salaries, facilities, and or allowances system of the Board of Directors to the GMS; 6. Giving full details on salaries, facilities, and/or allowances system of the Board of Directors, also the details of salaries, facilities, and/or allowances received by the Board of Directors in office to the GMS; 7. Board of Commissioners may recommend compensation system and other benefits of reduction of employees to the GMS. |
|--|--|

PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi nominasi. Hasil dari pelaksanaan tugas tersebut adalah terpilihnya Bapak Danang S. Baskoro sebagai Direktur Utama yang Baru. Sedangkan, fungsi remunerasi dilaksanakan dengan aktif melakukan telaah dan memberikan tanggapan atas usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun bersangkutan sebelum diajukan ke RUPS untuk persetujuan.

IMPLEMENTATION OF NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTIONS

During 2016, Board of Commissioners have implemented nomination function with the new President Director, Mr. Danang S. Baskoro. Meanwhile, the remuneration function have been implemented actively by reviewing and giving response to the proposed remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors in the relevant year before being submitted to the GMS for approval.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN yang mengatur sebagai berikut.

1. Persyaratan Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan materiil, serta persyaratan lain yang ditetapkan.
2. Persiapan UKK dan Evaluasi
 - Penyusunan daftar anggota Direksi yang habis masa jabatannya;
 - Penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - Pembentukan tim untuk melakukan UKK dan evaluasi.
3. Proses UKK dan Evaluasi
 - UKK dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional;
 - Hasil UKK dievaluasi oleh tim dan disampaikan kepada Menteri untuk mendapat keputusan.
4. Pengangkatan anggota Direksi
 - Menteri dapat melakukan wawancara terhadap hasil UKK dan evaluasi yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional;
 - Menteri mengangkat calon anggota Direksi terpilih berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS.

POLICIES OF BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION

Policies of Board of Directors succession of PT Angkasa Pura I (Persero) was implemented based on Ministry Regulation of SOE Number: PER-01 / MBU / 2012 concerning Requirements and Procedure for Appointment and Dismissal of SOE's Board of Directors member which organized as follows.

1. The Requirements of Board of Directors member candidates shall comply with the formal and material requirements, also other specified requirements.
2. Fit and Proper Test (FPT) and Evaluation Preparation
 - Preparing the list of Board of Directors members who have finished their office;
 - Selection of the candidates of Board of Directors members;
 - Forming a team to do FPT and evaluation.
3. FPT and Evaluation Process
 - FPT was implemented by a team and/or professional institution;
 - FPT result was evaluated by the team and submitted to the Ministry for approval.
4. The Appointment of Members of the Board of Directors
 - The ministry may conduct an interview to the FPT result and evaluation performed by the team and/or professional institution;
 - The Ministry appointed the chosen candidates of Board of Directors' Member based on Ministry Decree/GMS.

ORGAN DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh *Corporate Secretary* dan organ pendukung lainnya. Uraian mengenai organ di bawah Direksi sebagai berikut.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di Perseroan. *Corporate Secretary* berfungsi dalam komunikasi internal dan eksternal, hubungan investor, serta kesekretariatan pimpinan Perseroan. *Corporate Secretary* berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary memiliki tugas pokok untuk:

1. Memastikan tercapainya peningkatan citra Perusahaan melalui pengelolaan komunikasi Perusahaan dengan pihak internal dan eksternal;
2. Mengadministrasikan dokumen Perusahaan;
3. Membina hubungan antar lembaga;
4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum korporasi;
5. Menjamin ketersediaan informasi kepada *stakeholders*.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sampai dengan 10 Agustus 2016 jabatan Sekretaris Perusahaan di pegang oleh Bapak Farid Indra Nugraha berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP.206/KP.07.03/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Profil *Corporate Secretary* sebagai berikut.



Farid Indra Nugraha

Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Maret 1970. Memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Perdata dari Sekolah Tinggi Hukum (STAHUN), Bandung pada tahun 1993 dan Master Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2004. Pernah menjabat sebagai Manajer Personalia dan Umum Bandara Juanda, Surabaya (2000-2008) dan Kepala Biro Hukum Perusahaan (2008-2013). Menjabat sebagai *Corporate Secretary* Perseroan sejak 2013. / Indonesian, 45 years old, born in Balikpapan, March 12, 1970. Obtained his degree in Civil Law from the Sekolah Tinggi Hukum (STAHUN), Bandung in 1993 and Master of Law Science from Airlangga University, Surabaya in 2004. He served as Personnel and General Manager of Juanda Airport, Surabaya (2000-2008) and Head of Corporate Law Bureau (2008-2013). Serving as the Corporate Secretary since 2013.

ORGANS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties, the Board of Directors is assisted by Corporate Secretary and other supporting organs. The description of organs under the Board of Directors are as follows.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is a supporting organ of Board of Directors which have crucial roles in ensuring the implementation of transparency aspects in the Company. Corporate Secretary function in the internal and external communication, investor relation, also Company leader's secretarial. Corporate Secretary is under the President Director and responsible directly to the President Director.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary has main duties to:

1. Ensuring the achievement of enhancement of company image through management of Company communications with internal and external parties;
2. Administrating Company's documents;
3. Maintaining relations among institutions;
4. Resolving issues which related to the corporate law;
5. Ensuring the information availability to the stakeholders.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Mr. Farid Indra Nugraha served as Corporate Secretary until 10 August 2016 pursuant to Decree of Board of Director Number: SKEP/KP.07.03/2013 on 19 February 2013.

Corporate Secretary Profile is as follow.

Sejak tanggal 11 Agustus 2016 hingga saat ini, Sekretaris dijabat oleh Bapak Israwadi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP. 1259/KP.07.03/2016.

Since 11 August 2016 to present, Mr. Israwadi holds the position of Corporate Secretary pursuant to Decree of Board of Directors Number: SKEP. 1259/KP.07.03/2016.

Profil *Corporate Secretary* sebagai berikut.

Corporate Secretary Profile is as follow.

Israwadi



Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Pangkalan Susu Medan pada 23 Agustus 1971, saat ini berusia 45 tahun. Menyelesaikan pendidikan strata satu pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 1993 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2005. Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Sekretaris Perusahaan Bidang Sekretariat Direksi Perseroan, Staf Khusus Muda Direksi Perseroan, serta Jabatan diperbantukan pada PT Angkasa Pura Support. / Indonesian, domiciled in Jakarta. Born in Pangkalan Susu Medan on August 23, 1971, now 45 years old. Completed his undergraduate education at Sekolah Tinggi Hukum Bandung in 1993 and obtained his Master of Management from Trisakti University in 2005. He served as Assistant Corporate Secretary for the Secretariat of the Board of Directors of the Company, the Junior Special Staff of the Board of Directors of the Company, and the position assigned to PT Angkasa Pura Support.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada 2016, *Corporate Secretary* telah mengikuti program pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pengembangan kompetensi yang diikuti *Corporate Secretary* sebagai berikut.

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In 2016, Corporate Secretary has participated in competency development program to support the implementation of its duties. Competency development which the Corporate Secretary participated in is as follow.

Materi Pelatihan Training Materials	Pelaksana Executor	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation
Bimbingan teknis tim pengawas kearsipan / Technical guidance of archiving control team	ANRI	13 Oktober 2016 / October 13, 2016
<i>Workshop governance, risk and compliance</i> / Workshop governance, risk and compliance	<i>JSM Management Consultant</i>	15-16 Desember 2016 / 15-16 December 2016
<i>Workshop Indonesia Air Traffic Management and Airport Infrastructure and Security Reverse Trade Mission</i> / Workshop Indonesia air traffic management and airport infrastructure and security reverse trade mission	<i>US Trade And Development Agency</i>	24 Februari 2017 - 10 Maret 2017 / 24 February 2017 - 10 March 2017
<i>Workshop future ready airport</i> / Workshop future ready airport	Gvk	20-21 Februari 2017 / 20-21 February 2017

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

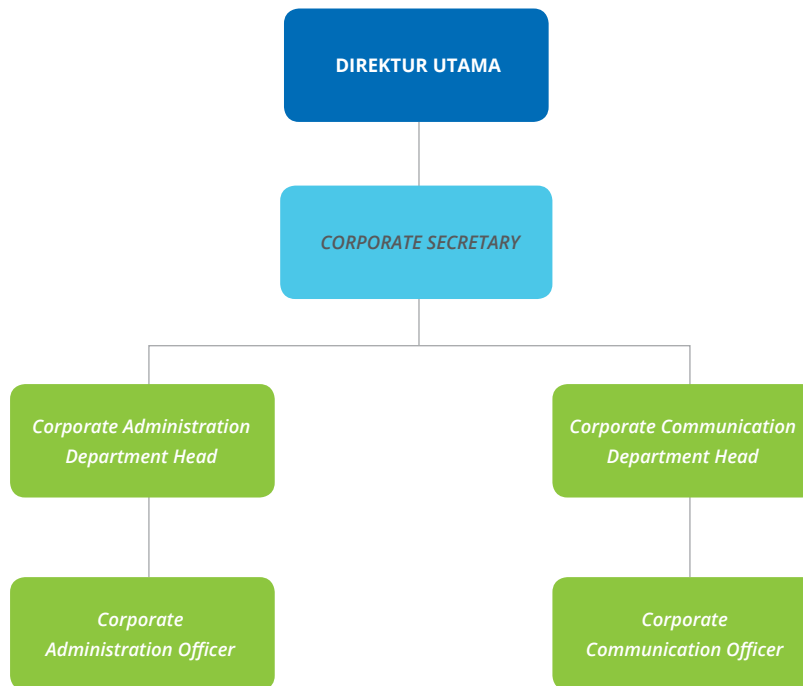
Corporate Secretary berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. *Corporate Secretary* memiliki 2 departemen yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu *Corporate Administration Department* dan *Corporate Communication Department*.

CORPORATE SECRETARY STRUCTURE

Corporate Secretary is under the President Director and responsible directly to the President Director. Corporate Secretary has 2 departments which function to support its duties implementation, which are Corporate Administration Department and Corporate Communication Department.

Struktur *Corporate Secretary* PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai berikut.

Corporate Secretary Structure of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follow.



PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2016

Selama tahun 2016, *Corporate Secretary* telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Pelaksanaan *assessment* PT Angkasa Pura I (Persero) dengan mengikutsertakan juga pelaksanaan GCG di Bandara yaitu dilakukan dengan *sampling assessment* pada 7 bandara.
2. Mengumpulkan dan melaporkan ke KPK hasil pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
3. Melakukan alih media serta penataan arsip vital Perseroan.
4. Pembuatan *Annual Report* 2015.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi Internal Perusahaan (antar unit/ antar cabang).
6. Meningkatkan citra positif perusahaan, meningkatkan efektivitas komunikasi, keterbukaan informasi dan transparansi, menumbuhkan kepercayaan masyarakat/*stakeholder*.
7. Meningkatkan dan memperkuat hubungan dengan Media.
8. Meningkatkan dan memperkuat hubungan dengan mitra kerja/mitra usaha dan komunitas.

CORPORATE SECRETARY DUTIES IMPLEMENTATION IN 2016

During 2016, *Corporate Secretary* have implemented duties among others:

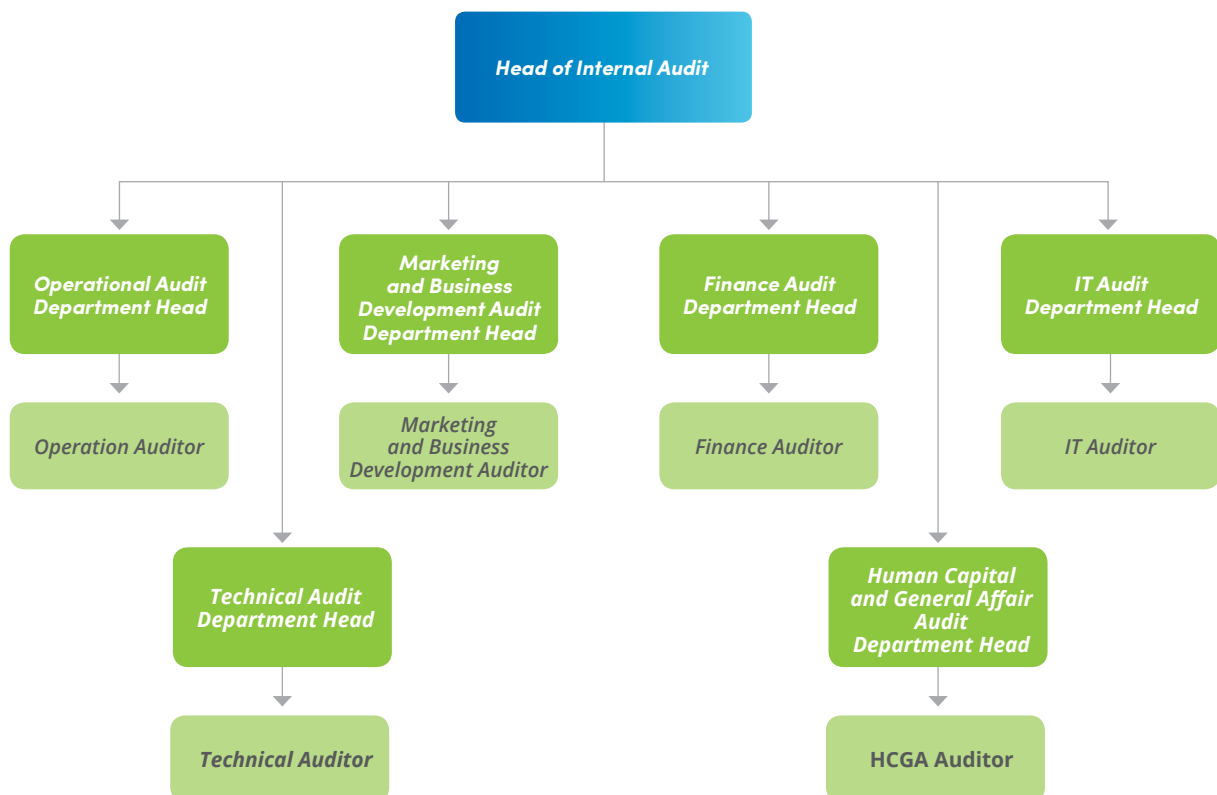
1. Implementing PT Angkasa Pura I (Persero) assessment by involving GCG implementation at the airport is conducted by sampling assessment at 7 airports.
2. Collecting and reporting to Corruption Eradication Commission the result of filling State Asset Management Report (LHKPN).
3. Performing the media changing as well as the organization of the Company's vital archives.
4. Preparing the Annual Report 2015
5. Improving the communication and coordination of Company Internal (inter-unit/ inter-branch).
6. Improving the company's positive image, improving the effectiveness of communication, disclosure and transparency of information, foster the trust of community / stakeholder.
7. Improving and strengthening relationships with Media.
8. Improving and strengthening relationships with partners/partners and communities.

UNIT INTERNAL AUDIT

Unit *Internal Audit* adalah bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki Unit *Internal Audit* yang berfungsi untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG di Perseroan. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.59/OM.01.01/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat, kedudukan Unit *Internal Audit* berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. Unit *Internal Audit* dipimpin oleh seorang *Head of Internal Audit* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. *Head of Internal Audit* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, Unit *Internal Audit* bersinergi dengan Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan GCG.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT INTERNAL AUDIT



INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit is part of internal control, which aims to help management realize its objectives/objectives through examination of adequacy and implementation of internal control processes, risk management and company governance.

PT Angkasa Pura I (Persero) has an Internal Audit Unit that serves to assist the President Director in conducting the oversight function on the effectiveness of the internal control system and the implementation of GCG in the Company. Based on the Decree of Board of Director PT Angkasa Pura I (Persero) Number: KEP.59/OM.01.01/2013 on the Organization and Working Procedures of the Head Office, the position of the Internal Audit Unit is directly under the President Director. The Internal Audit Unit is chaired by a Head of Internal Audit who is appointed and dismissed by the President Director upon the approval of the Board of Commissioners. Head of Internal Audit is responsible directly to the President Director. In performing its duties, the Internal Audit Unit synergized with the Audit Committee and the Business Risk Committee and GCG.

INTERNAL AUDIT UNIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

PROFIL KEPALA UNIT *INTERNAL AUDIT*

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE



I Wayan Sutawijaya

Pelaksana Tugas Kepala Unit Internal Audit / Head Officer of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jembrana, Bali pada 4 Maret 1967, saat ini berusia 49 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang (1995) dan gelar Magister Manajemen dari STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta (2002). / Indonesian, domiciled in Jakarta. Born in Jembrana, Bali on 04 March 1967, now is 49 years old. Obtained his law degree from the University of 17 August 1945, Semarang (1995) and Master of Management degree from STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta (2002).

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KETUA UNIT *INTERNAL AUDIT*

THE PARTY WHO APPOINTED AND DISMISSED THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Ketua Unit *Internal Audit* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by President Director by the approval of Board of Commissioners.

KOMPOSISI PERSONIL UNIT *INTERNAL AUDIT*

COMPOSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL

Per 31 Desember 2016, jumlah pegawai Unit *Internal Audit* adalah 20 orang, dengan rincian, sebagai berikut.

As of December 31, 2016, the number of Internal Audit Unit employees is 20 persons, with details, as follows.

Tabel Komposisi Personil Unit *Internal Audit* / Table Composition of Personnel Unit of Internal Audit

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	I Wayan Sutawijaya	Pelaksana Tugas <i>Head of Internal Audit</i>
2	Tavip Wibowo	<i>Operation Audit Departement Head</i>
3	Yaka Sulistya Wijanarka	<i>Technical Audit Departement Head</i>
4	Jarot Handoko	<i>Marketing and Business Development Audit Departement Head</i>
5	Junius F. Walenta	<i>Finance Audit Departement Head</i>
6	Tris Gunarso	<i>Human Capital and General Affair Audit Departement Head</i>
7	Yan C. Daulima	<i>IT Audit Departement Head</i>
8	I Made Adi Susilayasa	<i>Auditor</i>
9	Restu Suryaningsih	<i>Auditor</i>
10	Sulistyaningsih	<i>Auditor</i>
11	Hendri Don Charles S	<i>Auditor</i>
12	Dyah Dwisupi O	<i>Auditor</i>
13	Jon Hendri	<i>Auditor</i>
14	Tuti Wianti	<i>Auditor</i>
15	Taufik Ismail	<i>Auditor</i>
16	Azmieti Kurnia Sinta	<i>Auditor</i>

SERTIFIKASI PROFESI UNIT *INTERNAL AUDIT*

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS OF INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, Unit *Internal Audit* Perseroan didukung tenaga audit profesional yang sebagian telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut.

To ensure the implementation of qualified audit duties, Internal Audit Unit Company is supported by audit professionals, some who are certified nationally or internationally as follow.

Tabel Sertifikasi Profesi Unit *Internal Audit* / Table of Professional Certifications of Internal Audit Unit

No.	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Informations
1.	Tavip Wibowo	<i>Operation Audit Departement Head</i>	Sertifikasi QIA & CRP / Qualified Internal Audit and Certified Risk Professional Certification
2.	Yaka Sulistya Wijanarka	<i>Technical Audit Departement Head</i>	Audit Internal Dasar I / Basic Internal Audit I
3.	Jarot Handoko	<i>Marketing and Business Development Audit Departement Head</i>	Audit Internal Dasar II / Basic Internal Audit II
4.	Junius F. Walenta	<i>Finance Audit Departement Head</i>	Audit Internal Dasar II / Basic Internal Audit II
5.	Tris Gunarso	<i>Human Capital and General Affair Audit Departement Head</i>	Audit Internal Dasar II / Basic Internal Audit II
6.	Yan C. Daulima	<i>IT Audit Departement Head</i>	Audit Internal Dasar II / Basic Internal Audit II
7.	I Made Adi Susilayasa	<i>Auditor</i>	Audit Internal Dasar I / Basic Internal Audit I
8.	Restu Suryaningsih	<i>Auditor</i>	Sertifikasi QIA / Qualified Internal Auditor Certification
9.	Sulistyaningsih	<i>Auditor</i>	Sertifikasi QIA / Qualified Internal Auditor Certification
10.	Hendri Don Charles S	<i>Auditor</i>	Sertifikasi QIA / Qualified Internal Auditor Certification
11.	Dyah Dwisupi O	<i>Auditor</i>	Sertifikasi QIA / Qualified Internal Auditor Certification
12.	Jon Hendri	<i>Auditor</i>	Sertifikasi QIA / Qualified Internal Auditor Certification
13.	Tuti Wianti	<i>Auditor</i>	Audit Internal Dasar II / Basic Internal Audit II
14.	Taufik Ismail	<i>Auditor</i>	Audit Internal Dasar I / Basic Internal Audit I
15.	Azmieti Kurnia Sinta	<i>Auditor</i>	Sertifikasi QIA / Qualified Internal Auditor Certification

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT *INTERNAL AUDIT*

Tugas dan tanggung jawab Unit *Internal Audit* meliputi:

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Tahunan *Internal Audit*;
2. Menyusun program audit untuk menjamin mutu kegiatan *Internal Audit*;
3. Melaksanakan pengumpulan informasi dan pemeriksaan berbasis risiko, pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan, penilaian, penyajian, saran perbaikan, serta kegiatan *assurance* dan konsultasi untuk efisiensi dan efektivitas unit kerja sesuai dengan bidang tanggung jawabnya, yaitu: *operation, technical, marketing and business development, finance and information technology, human capital and general affair, corporate secretary, risk management and compliance, project management office, procurement, corporate planning and performance*;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit including:

1. Preparing The Work Plan and Budget and also Annual Internal Audit Work Plan;
2. Preparing the audit program to ensure the quality of Internal Audit activities;
3. Collecting the information and checks based on risk, supervising the compliance with rules and regulations, doing the assessment, presentation, improvement suggestions, and assurance and consultation activities for the efficiency and effectiveness of the work units in accordance with their areas of responsibility: *operation, technical, marketing and business development, finance and information technology, human capital and general affair, corporate secretary, risk management and compliance, project management office, procurement, corporate planning and performance*;

4. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern, penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dalam proses bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, serta prinsip GCG;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan perbaikan terhadap penyelenggaraan perusahaan serta melaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
6. Bertindak sebagai *counterpart* dengan pihak eksternal auditor dan Komite Audit dalam kegiatan pemeriksaan di Perusahaan;
7. Melakukan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan Direktur Utama;
8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja atas saran-saran perbaikan yang telah diberikan kepada Direktur Utama;
9. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme internal auditor dalam *Internal Audit* dengan sertifikasi.

PEDOMAN INTERNAL AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit *Internal Audit* PT Angkasa Pura I (Persero) telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Piagam *Internal Audit (Internal Audit Charter)* yang disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada Januari 2014. Selain sebagai pedoman kerja, *Internal Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi Internal Audit. Oleh karena itu, Piagam *Internal Audit* disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan.

Isi dari *Internal Audit Charter* :

- A. Pendahuluan: berisi latar belakang serta visi dan misi *Internal Audit*.
- B. Internal Audit: berisi pengertian, struktur dan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, akuntabilitas serta standar profesi dan kode etik.
- C. Pola Hubungan: berisi hubungan internal auditor dengan *auditee*, eksternal auditor, serta dengan Komite Audit dan Komite Risiko Usaha dan GCG.
- D. Peningkatan Kualitas Internal Auditor
- E. Jaminan Mutu
- F. Penutup

STANDAR PROFESI UNIT INTERNAL AUDIT

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, *Internal Auditor* mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethanic* dari Tahune Institute of Internal Auditors.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In conducting its duties, the Internal Audit Unit of PT Angkasa Pura I (Persero) has been completed with a Working Manual called Internal Audit Charter approved and authenticated by the Board of Commissioners in January 2014. In addition to working guidelines, the Internal Audit Charter also plays a role in strengthening roles and responsibilities and the basis for the existence and implementation of monitoring duties for Internal Audit. Therefore, the Internal Audit Charter is disseminated to be known by all employees and other related parties so as to establish mutual understanding and good cooperation in realizing the Vision, Mission and Purpose of the Company.

Content of the Internal Audit Charter

- A. Introduction: contains background and also vision and mission of the Internal Audit.
- B. Internal Audit: contains meaning, structure and position, function, duties and responsibilities, authority, scope, accountability and also professional standard and code of ethics.
- C. Relationship Patterns: contains the relationship of internal auditor with the *auditee*, external auditor, and also with the Audit Committee and Business Risk Committee and GCG.
- D. Internal Auditor Quality Improvement
- E. Quality Assurance
- F. Closing

PROFESSIONAL STANDARDS OF INTERNAL AUDIT UNIT

In conducting its duties, Internal Auditor refers to the Internal Audit Professional Standards (IAPS) from the Consortium of the Internal Audit Professional Organization and Code of Ethanic from Tahune Institute of Internal Auditors.

KODE ETIK UNIT *INTERNAL AUDIT*

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi *Code of Conduct* yang berlaku secara umum, Unit *Internal Audit* juga memiliki Kode Etik Auditor. Kode Etik Auditor Perseroan sebagai berikut.

PRINSIP

Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut.

- a. Integritas
Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.
- b. Objektivitas
Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
- c. Kerahasiaan
Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
- d. Kompetensi
Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

ATURAN PERILAKU

1. Integritas
Auditor internal:
 - Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggungjawab.
 - Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
 - Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
 - Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.
2. Objektivitas
Auditor internal:
 - Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
 - Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.

CODE OF ETHICS OF INTERNAL AUDIT UNIT

In conducting its functions and duties, beside complying with applicable the Code of Conduct in general, Internal Audit Unit also has Auditor Code of Ethics. Company Auditor Code of Ethics are as follow:

PRINCIPLES

Internal auditor is expected to apply and enforce the following principles.

- a. Integrity
Internal auditor's integrity shape the beliefs and thus become the basis of internal auditor's judgment.
- b. Objectivity
Internal auditor shows the professional objectivity on the highest level in obtaining, evaluating and communicating the information on the tested activity or process Internal auditor conducting a balanced assessment on all relevant matters and not inappropriately affected by personal interests or other party in giving judgment.
- c. Confidentiality
Internal auditor respects the value and ownership of the information it receives and does not disclose the information without legitimate authorization, unless required by law or profession.
- d. Competency
Internal auditor applies the knowledge, skill and experience needed to provide internal audit services.

CODE OF CONDUCT

1. Integrity
Internal Auditor:
 - Must conduct its work honestly, carefully and responsibly.
 - Must comply with the law and make disclosure as required by law or profession.
 - Should not involved in illegal activities, or conduct activities consciously which may discredit the profession of internal or organizational auditing.
 - Must respect and support the legitimate and ethical objectives of the organization.
2. Objectivity
Internal Auditor:
 - Should not participate in any activity or relationship which may, or reasonably be suspected, interfere with a fair internal auditor's judgment. Included in this case is any activity or relationship which results in a conflict of interest with the organization.
 - Should not accept anything which may, or is reasonably suspected, interfere with professional judgment.

- Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.
3. Kerahasiaan
Auditor internal:
- Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
 - Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Kompetensi
Auditor internal:
- Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
 - Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
 - Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

- Must disclose all material facts which is known, for, if not disclosed, may distort the activity report which is being reviewed.

3. Confidentiality
Internal Auditor:
- Must be careful in using and maintaining the information obtained during conducting their duties.
 - Should not use the information for personal gain, or in any way, which is against the law or harms the legitimate and ethical objectives of the organization.
4. Competency
Internal Auditor:
- Only involved in the services provision which require knowledge, skills and experience possessed.
 - Must provide internal audit services in accordance with International Standards of Professional Practice of Internal Auditing (Standard).
 - Must improve the skills, effectiveness and quality of services constantly in a sustainable manner.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT INTERNAL AUDIT 2016

PROGRAM KERJA UNIT INTERNAL AUDIT

Adapun program kerja Unit Internal Audit tahun 2016, yaitu:

1. Pelaksanaan Audit Operasional pada Kantor Cabang Bandara dan Anak Perusahaan berbasis risiko.
2. Pelaksanaan Audit terhadap *Assessment* Risiko dan mendorong kepada unit kerja sebagai *Risk Owner* untuk segera menindaklanjuti mitigasi risiko, serta memberikan masukan saran perbaikannya atas *Assessment* Risiko yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan Audit Khusus, sesuai Penugasan Manajemen atau apabila dipandang penting.
4. Pemantauan dan membantu audit untuk menindaklanjuti temuan-temuan internal dan eksternal.
5. Pendampingan Audit Eksternal.
6. Memberikan Jasa Konsultansi kepada Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang terhadap Kegiatan Usaha, Operasional maupun Administrasi Perusahaan yang Mempunyai risiko tinggi dan membantu memberikan masukan terhadap bisnis proses dan *Standard Operating Procedure*.
7. Peningkatan Kompetensi Auditor dengan mengikuti pelatihan, seminar dan *workshop*.
8. Melaksanakan *Workshop* Pengendalian Internal pada tingkat *Group Head* sampai dengan *Section Head*.
9. Melakukan penilaian terhadap pengendalian internal kepada seluruh Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.

BRIEF REPORT OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IMPLEMENTATION 2016

WORK PROGRAM OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. Operational Audit implementation at Airport Branches and risk-based Subsidiaries.
2. Audit implementation on Risk Assessment and encourage the work unit as Risk Owner to immediately follow up on risk mitigation, and also to provide suggestion for improvement on Risk Assessment that has been made.
3. Special Audit implementation, fit to the Assignment of Management or if deemed important.
4. Monitoring and assisting the audit to follow up on internal and external findings.
5. External Audit Assistance.
6. Providing Consultancy Services to Head Office Unit and Branch Offices to Business, Operational and Administration Activities of Companies with high risk and assist in providing input to business process and Standard Operating Procedure.
7. Improving Auditor Competency by participating in training, seminars and workshops.
8. Implement Internal Control Workshop at Group Head level up to Section Head.
9. Assess internal controls on all Branch Offices and Subsidiaries.

METODE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas, Internal Auditor menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan perencanaan
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab *Internal Audit* maka perlu disusun perencanaan kegiatan yang konsisten dari peran *Internal Audit* dengan berlandaskan program dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan dalam RKAP 2015 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
 - Rencana strategis Perusahaan
 - Profil risiko Perseroan
 - Evaluasi rencana dan pelaksanaan audit tahun sebelumnya
 - Masukan kepada Direktur Utama dan Komite Audit
2. Pembuatan rencana kerja
Rencana kerja disusun dalam sebuah tabel yang memuat urutan objek audit yang akan diaudit dalam tahun berjalan serta pekerjaan *non* rutin yang akan dilaksanakan dalam tahun tersebut. Kemudian dilakukan pengalokasian waktu pelaksanaan dan personil pelaksana dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada dalam perencanaan di atas.
3. Objektif Audit
Objektif audit adalah upaya mendapatkan gambaran situasi dan kondisi yang sebenarnya dari objek audit yang terkait dengan:
 - Kepatuhan pada standar dan ketentuan yang berlaku
 - Risiko Perseroan
 - Efektivitas fungsi-fungsi kerja Perseroan
 - Kebutuhan khusus Direksi
 - *Issue* dari pihak ketiga (*whistleblower*)
 - *Monitoring* tindak lanjut hasil
 - Dukungan terhadap pencapaian sasaran perusahaan peninjauan terhadap upaya objek audit dalam rangka mendukung pencapaian sasaran perusahaan
 - Perbaikan berkesinambungan
 - *Fraud* atas Penyimpangan lainnya yang terjadi
4. Area Audit (*Audit Universe*)
Area audit ditentukan berdasarkan analisa terhadap objektif audit, dengan melakukan:
 - Pengkajian terhadap hasil identifikasi risiko objektif audit.
 - Penerjemahan terhadap permintaan khusus dari Direksi dan pada *Group Head*.
 - Pengkajian terhadap informasi dari *whistleblower*.
 - Penetapan proses bisnis yang utama/kritikal pada objek audit.
 - Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil audit sebelumnya serta hasil audit eksternal auditor.

Tahapan kegiatan dalam melaksanakan audit sesuai konsep yang berlaku umum sebagai berikut.

1. Perencanaan audit
2. Melakukan survei pendahuluan (*desk audit*)

AUDIT METHOD

In conducting the duties, the Internal Auditor uses the approach:

1. Planning approach
In order to conduct Internal Audit duties and responsibilities, it is necessary to formulate a consistent plan of action from the role of Internal Audit based on the company's programs and objectives set forth in the Company's Work Plan and Budget 2015 which considering the following matters.
 - Company Strategic Plan
 - Company risk profile
 - Evaluation on the previous year's audit plan and execution
 - Input to President Director and Audit Committee
2. Work plan preparation
The work plan is formulated in a table containing the sequence of audit objects to be audited in the current year and non-routine work to be conducted within the year. Then the allocation of implementation time and implementing personnel by considering the existing aspects in the planning above.
3. Audit Objective
Objective audit is a mean to get a picture of the actual situation and conditions of the audit object which related to:
 - Compliance to the applicable standards and conditions
 - Company Risk
 - Effectiveness of the Company's work functions
 - Board of Directors' special needs
 - Issue from a third party (*whistle blower*)
 - Result follow up monitoring
 - Support on the achievement of corporate objectives review of the audit object's efforts in order to support the achievement of corporate goals
 - Continuous improvement
 - Fraud on other occurred Irregularities
4. Audit Area (*Audit Universe*)
Audit area is determined based on the analysis to the audit objective, by:
 - Assessment of audit objective risk identification results.
 - Translation to special requests from the Board of Directors and to the Group Head
 - Assessment on the information from the *whistle blower*
 - Determination of the main/critical business process on the audit object
 - Evaluation of previous audit results follow up and external auditor audit results

Activities stages in conducting the audit in accordance with the concept generally accepted as follows.

1. Audit planning
2. Conducting a preliminary survey (*desk audit*)

3. Membuat audit program
4. Pelaksanaan audit
5. Membuat kertas kerja dan laporan
6. *Monitoring* tindak lanjut

3. Creating audit program
4. Audit implementation
5. Creating paperwork and reports
6. Follow up monitoring

PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan Audit yang telah dilakukan oleh Unit *Internal Audit* PT Angkasa Pura I (Persero), sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Audit Operasional pada Kantor Cabang Bandara dan Anak Perusahaan berbasis risiko.

PT Angkasa Pura Retail (Kantor Pusat) / PT APR (Head Office)	20 Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016 / 20 January 2016 to 10 February 2016	
PT Angkasa Pura Retail (Cabang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara Juanda Surabaya) / PT PT APR (Branch BPN and SUB)	01 sampai dengan 04 Februari 2016 / 01 to 04 February 2016	PRIN.DP.14/PG.01/2016
Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta / Adi Sutjipto YOG	14 sampai dengan 23 Maret 2016 / 14 to 23 March 2016	PRIN.PD.90/PG.01/2016
Bandara Ahmad Yani Semarang / Ahmad Yani SRG	14 sampai dengan 23 Maret 2016 / 14 to 23 March 2016	PRIN.PD.90/PG.01/2016
Bandara Pattimura Ambon / Pattimura AMQ	30 Maret sampai dengan 08 April 2016 / 30 March to 08 April 2016	PRIN.PD.118/PG.01/2016
Bandara Adi Soemarmo Surakarta / Adi Soemarmo SOC	30 Maret sampai dengan 08 April 2016 / 30 March to 08 April 2016	PRIN.PD.119/PG.01/2016
SBU Commercial Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali / SBU Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali	18 sampai dengan 29 April 2016 / 18 to 29 April 2016	PRIN.PD.161/PG.01/2016
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali / I Gusti Ngurah Rai DPS	18 sampai dengan 29 April 2016 / 18 to 29 April 2016	PRIN.PD.160/PG.01/2016
Bandara El Tari Kupang / El Tari KOE	17 sampai dengan 27 Mei 2016 / 17 to 27 May 2016	PRIN.PD.203/PG.01/2016
Bandara Internasional Lombok Praya / International Airport of Lombok - LOP	16 sampai dengan 26 Mei 2016 / 16 to 26 May 2016	PRIN.PD.202/PG.01/2016
<i>Safety</i> Audit Bandara Sam Ratulangi Manado / <i>Safety</i> Audit Sam Ratulangi Airport MDC	20 sampai dengan 24 Juni 2016 / 20 to 24 June 2016	PRIN.PD.216/PG.01/2016
Pemeriksaan Operasional pada YAKKAP I / Operational inspection on YAKKAP I	20 Juni sampai dengan 22 Juli 2016 / 20 June o 22 July 2016	PRIN.PD.240/PG.01/2016
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin / Syamsudin Noor Airport, Banjarmasin	31 Agustus sampai dengan 10 September 2016 / 31 August to 10 September 2016	PRIN.PD.325/PG.01/2016
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar / Sultan Hasanuddin Airport Makassar	13 sampai dengan 24 September 2016 / 13 to 24 September 2016	PRIN.PD.336/PG.01/2016
Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan / SAMS Sepinggan Airport Balikpapan	26 September sampai dengan 07 Oktober 2016 / 26 September to 07 October 2016	PRIN.PD.357/PG.01/2016
Bandara Juanda Surabaya / Juanda Airport Surabaya	23 Oktober sampai dengan 05 November 2016 / 23 October to 05 November 2016	PRIN.PD.387/PG.01/2016
Bandara Sam Ratulangi Manado / Sam Ratulangi Airport	20 November sampai dengan 02 Desember 2016 / 20 November to 02 December 2016	PRIN.DU.464/PG.01/2016
Bandara Frans Kaisiepo Biak / Frans Kaisiepo Airport Biak	20 November sampai dengan 02 Desember 2016 / 20 November to 02 December 2016	PRIN.DU.465/PG.01/2016

2. Pelaksanaan *Risk Maturity Assessment* oleh Internal Audit dan *Management* Risiko: *Assessment Risk Maturity* bersama konsultan, sesuai jadwal pengukuran pada 13 (tiga) belas bandara, dimulai sejak tanggal 26 September di Bandara BDJ , BPN, SOC dan JOG.

2. Risk Maturity Assesment Implementation by Internal Audit and Risk Management: *Assessment Risk Maturity* with consultants, according to the measurements schedule at 13 (thirteen) airports, commencing September 26th at BDJ, BPN, SOC and JOG Airports.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Pendampingan Audit Eksternal
Telah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan KAP dalam rangka <i>Year End Audit</i> ke Kantor Cabang : DPS, SUB, BDJ, BPN, UPG dan SRG. - <i>Konsinyering</i> Dalam Rangka Audit Laporan Keuangan Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 13 Februari 2016 di Yogyakarta. - Koordinasi pelaksanaan review untuk paket 1 dan paket 2 dengan Tim BPKP pada proyek Bandara Ahmad Yani Semarang, pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2016 - <i>Counterpart Assessment Good Corporate Governance</i> (GCG) sesuai <i>kick-off meeting assessment</i> tanggal 16 November 2016, - <i>Counterpart</i> Penilaian Kinerja Unggul BUMN, tanggal 4 November 2016. - <i>Counterpart</i> Penilaian <i>Annual Report</i> Perusahaan BUMN, sesuai <i>kick-off meeting</i> Penyusunan <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 20 Desember 2016. - <i>Assessment Risk Maturity</i> bersama konsultan, sesuai jadwal pengukuran pada 13 (tiga) belas bandara, dimulai sejak tanggal 26 September di Bandara BDJ, BPN, SOC dan JOG <p>4. Memberikan Jasa Konsultansi kepada Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang terhadap Kegiatan Usaha, Operasional maupun Administrasi Perusahaan yang Mempunyai risiko tinggi dan membantu memberikan masukan terhadap bisnis proses dan <i>Standard Operating Procedure</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan secara simultan dengan pelaksanaan pemeriksaan operasional pada 13 (tiga belas) kantor cabang bandara. - Memberikan Pelatihan dan <i>Sharing</i> Pengetahuan kepada MBD <i>Group Head</i> dan <i>Staff</i> tentang pelaksanaan pembinaan akan Perusahaan (April 2016). - Memberikan materi pelatihan kepada Diklat Teknis Lanjut kepada peserta (pegawai) PT Angkasa Pura I (Persero) dari 13 (tiga belas) bandara dan Kantor Pusat hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 oleh Bp. Tavip Wibowo. <p>5. Melakukan penilaian terhadap pengendalian internal kepada seluruh Kantor Cabang dan Anak Perusahaan. Melalui Audit Operasional sesuai jadwal Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) pada 13 (tiga belas) bandara, penilaian tentang Pengendalian Internal dilakukan bersamaan, dengan <i>output</i> temuan yang mengandung unsur kelemahan <i>Internal Control</i> (IC). Pengukuran IC secara khusus tidak dilaksanakan.</p> | <p>3. External Audit Assistance
The following are actions which have been taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAP Assistance for Year End Audit to Branch Office: DPS, SUB, BDJ, BPN, UPG and SRG. - Consignment for Financial Statement Audit Year 2015 was held on 09 to 13 February 2016 in Yogyakarta. - Coordinate the implementation of reviews for package 1 and package 2 with the FDSA team on the Ahmad Yani Airport project in Semarang, from 27 to 29 June 2016 - Counterpart Assessment Good Corporate Governance (GCG) in accordance with kick-off meeting assessment on November 16, 2016, - Counterpart Superior Performance Rating of SOE, on 4 November, 2016. - Counterpart Annual Report of SOE Enterprises Assesment, in accordance with kick-off meeting Preparation of Annual Report and Sustainability Report of PT Angkasa Pura I (Persero) on 20 December, 2016. - Assessment Risk Maturity with consultants, according to the measurements schedule at 13 (thirteen) airports, commencing September 26th at BDJ, BPN, SOC and JOG Airports <p>4. Providing Consultancy Services to Head Office Unit and Branch Offices to Business, Operational and Administration Activities of Companies with high risk and assist in providing input to business process and Standard Operating Procedure.</p> <ul style="list-style-type: none"> - It has been implemented simultaneously with the implementation of operational inspection at 13 (thirteen) airport branches. - Provide Training and Knowledge Sharing to the MBD Group Head and Staff on the implementation of the Company's counsel (April 2016). - Providing training materials to Advanced Technical Training to participants (employees) of PT Angkasa Pura I (Persero) from 13 (thirteen) airports and Head Office on Saturday 17 December 2016 by Mr. Tavip Wibowo. <p>5. Assess internal controls on all Branch Offices and Subsidiaries.
Through Operational Audit according to schedule of the Annual Examination Work Program (PKPT) at 13 (thirteen) airports, the assessment of Internal Control is conducted simultaneously, with output findings containing the weakness of Internal Control (IC). IC measurements are specifically not implemented.</p> |
|--|---|

EFEKTIVITAS DAN CAKUPAN PELAKSANAAN UNIT INTERNAL AUDIT

Cakupan audit tahun 2016 meliputi Audit Umum terhadap 13 (tiga belas) Kantor Cabang dan Kantor Pusat serta Strategi Bisnis Usaha (SBU) dan audit khusus yang ruang lingkup pemeriksaan hanya terhadap pemenuhan kewajiban audit tertentu.

EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION COVERAGE OF INTERNAL AUDIT UNITS

The scope of audit work by the Internal audit includes. The audit coverage of 2016 includes the General Audit of 13 (thirteen) Branch Offices and the Head Office and Business Strategy (SBU) and special audit whose scope of inspection is only on the fulfillment of certain audit obligations.

Efektifitas pelaksanaan Internal Audit ditunjukkan dengan terlaksananya program-program kerja Unit Internal Audit. Adapun pelaksanaan audit pada tahun 2016 dapat dilihat pada bagian pelaksanaan kegiatan audit.

The audit coverage of 2016 includes the General Audit of 13 (thirteen) Branch Offices and the Head Office and Business Strategy (SBU) and special audit whose scope of inspection is only on the fulfillment of certain audit obligations.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT INTERNAL AUDIT

Dalam rangka memberikan tambahan wawasan bagi para auditor dan untuk mempertahankan sertifikasi *Qualifield Internal Audit* yang dimiliki serta sertifikasi bagi 2 (dua) orang *Departement Head Auditor* yang baru bergabung, maka telah dilaksanakan pelatihan kompetensi dalam *workshop*, pendidikan dan pelatihan serta Rapat Kordinasi sebagai berikut.

COMPETENCY IMPROVEMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT

In order to present additional insights for the auditors, maintain the internal audit qualified certification, and provide certification for two recently-joining Department Head Auditors, the following competency trainings by workshop, education, and training and Coordination Meeting have been carried out.

Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit / Competency Improvement of Internal Audit Unit Table

NO	KEGIATAN ACTIVITIES	TANGGAL PELAKSANAAN IMPLEMENTATION DATE	DASAR PELAKSANAAN IMPLEMENTATION BASIS	TEMPAT LOCATION	PESERTA PARTICIPANTS
1	Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Internal Audit I	5 - 16 SEPT 2016 / 5 - 16 SEPT 2016	PRINT.HD.332/DL.04/2016 tanggal 5 Sept 2016 / PRINT.HD.332/DL.04/2016 5 Sept 2016	YPIA JKT	Jarot Handoko I Made Adi Susilayasa
2	Audit Intern Tingkat Dasar II / Basic Internal Audit II	19 - 30 SEPT 2016 / 19 - 30 SEPT 2016	PRINT.HD.331/DL.04/2016 tanggal 5 Sept 2016 / PRINT.HD.331/DL.04/2016 5 Sept 2016	YPIA JKT	Jarot Handoko I Made Adi Susilayasa
3	Audit Intern Tingkat Lanjutan I / Advanced Internal Audit I	28 NOV - 09 DES 2016 / 28 NOV - 09 DES 2016	PRINT.DP.513/DL.04/2016 tanggal 2 DES 2016 / PRINT.DP.513/DL.04/2016 2 DEC 2016	YPIA JKT	Jarot Handoko
4	Audit Intern Tingkat Lanjutan II / Advanced Internal Audit II	15 - 26 FEB 2016 / 15 - 26 FEB 2016	PRINT.DP.513/DL.04/2016 tanggal 2 DES 2016 / PRINT.HD.36/DL.07/2016 1 January 2016	YPIA JKT	Toni Alam
5	Audit Intern Tingkat Dasar I Dan Dasar Basic Internal Audit I and II	03 - 14 Okt 2016, 17-28 Okt 2016 / 03 - 14 Okt 2016, 17-28 Okt 2016	PRINT.HD.378/DL.04/2016 tanggal 22 Sept 2016 / PRINT.HD.378/DL.04/2016 22 Sept 2016	YPIA JKT	Tuti Wianti
6	Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Internal Audit I	03 - 14 Okt 2016 / 03 - 14 Okt 2016	PRINT.DP.392/DL.04/2016 tanggal 4 Okt 2016 / PRINT.DP.392/DL.04/2016 4 Oct 2016	YPIA JKT	Junius F. Walenta
7	Audit Intern Tingkat Dasar II / Basic Internal Audit II	17-28 Okt 2016 / 17-28 Okt 2016	PRINT.DP.393/DL.04/2016 tanggal 4 Okt 2016 / PRINT.DP.393/DL.04/2016 4 Oct 2016	YPIA JKT	Junius F. Walenta
8	Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Internal Audit I	31 OKT - 11 NOV 2016 / 31 OKT - 11 NOV 2016	PRINT.DP.441/DL.04/2016 tanggal 25 Okt 2016 / PRINT.DP.441/DL.04/2016 25 Oct 2016	YPIA JKT	Yan C. Daulima
9	Audit Intern Tingkat Dasar II / Basic Internal Audit II	14 - 25 nov 2016 / 14 - 25 nov 2016	PRINT.DP.442/DL.04/2016 tanggal 25 Okt 2016 / PRINT.DP.442/DL.04/2016 25 Oct 2016	YPIA JKT	Yan C. Daulima
10	Audit Intern Tingkat Dasar I / Basic Internal Audit I	31 OKT - 11 NOV 2016 / 31 OKT - 11 NOV 2016	PRINT.HD.458/DL.07/2016 tanggal 31 Okt 2016 / PRINT.HD.458/DL.07/2016 31 Oct 2016	YPIA JKT	Yaka Sulistya W. Taufik Ismail
11	<i>Certified Risk Professional</i> (CRP)			CIKOPO	Tavip Wibowo

NO	KEGIATAN ACTIVITIES	TANGGAL PELAKSANAAN IMPLEMENTATION DATE	DASAR PELAKSANAAN IMPLEMENTATION BASIS	TEMPAT LOCATION	PESERTA PARTICIPANTS
12	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) / National Seminar of Internal Audit (NSIA)	27 - 27 April 2016 / 27 - 27 APRIL 2016	1. PRINT.HD.126/DL.07/2016 tanggal 29 MARET 2016 2. PRINT.HD.158/DL.07/2016 tanggal 12 APRIL 2016 3. PRINT.HD.173/DL.07/2016 tanggal 20 APR 2016 1. PRINT.HD.126/DL.07/2016 29 MARCH 2016 2. PRINT.HD.158/DL.07/2016 12 APRIL 2016 3. PRINT.HD.173/DL.07/2016 20 APR 2016	BALI	Eko Permadi Tavip Wibowo Siti Chadijah O. Toni Alam Tris Gunarso Rini Asriningsih Suriganata Azmiati K. Sinta Restu Suryaningsih Erni Suharlina I Nyoman Sudarta Adi Hartojo Sulistyaningsih Hendry Don Charles S. Dyah Dwisupi O. Jon Hendri Wiewit Juwariah Haryono Hendro Kumoro
13	Forum Kepala Satuan Pengawas Intern (FKSPI) / Head of Internal Supervisory Unit Forum(HISUF)	10-13 Mei 2016 / 10-13 MEI 2016	PRINT.HD.138/DL.07/2016 tanggal 31 Maret 2016 / PRINT.HD.138/DL.07/2016 31 March 2016	BANDUNG	Tavip Wibowo Tris Gunarso Rini Asriningsih
14	Focus Group Discussion (FGD) / Focus Group Discussion (FGD)	7-8 Juni 2016 / 7-8 JUNI 2016	PD.06/LB.03.13/2016-B tanggal 6 Juni 2016 / PD.06/LB.03.13/2016-B 6 June 2016		Tavip Wibowo Siti Chadijah O. Toni Alam Tris Gunarso
15	Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) / Criteria for Superior Performance Assessment (CSPA)	9 Juni 2016 (Opening) November 2016 (closing) / 9 June 2016 (Opening) November 2016 (closing)	1. PCP.390/TU.03.05/2016-B tanggal 7 Juni 2016 2. PCP.793/TU.03.05/2016-B tanggal 4 November 2016 1. PCP.390/TU.03.05/2016-B 7 June 2016 2. PCP.793/TU.03.05/2016-B 4 November 2016	JAKARTA	Tavip Wibowo
16	Refreshing Risk Based Budgeting Dan Rencana Pelaksanaan Risk Assesment Profil Risiko Kantor Pusat Tahun 2017 / Refreshing Risk Based Budgeting And Risk Assessment Implementation Plan Risk Profile Head Office 2017	10 Mei 2016 / 10 May 2016	PRM.144/PG.01/2016-B tanggal 28 April 2016 / PRM.144/PG.01/2016-B 28 April 2016	GSG, AP.I	Tavip Wibowo
17	Penguji Diklat Manajerial Tingkat Muda Angkatan XIV Tahun 2016 / Young Managerial Training Examiner Batch Xiv 2016	07 Juni 2016 / 07 June 2016	HTD.1010/DL.04.01/2016-B tanggal 2 Juni 2016 / HTD.1010/DL.04.01/2016-B 2 June 2016	CFE, AP.I	Eko Permadi
18	Aerodrome Compliance And Auditing	18 - 22 Januari 2016 / 18 to 22 January 2016	PRIN.HD.05/DL.07/2016 tanggal Januari 2016 / PRIN.HD.05/DL.07/2016 January 2016	SURABAYA	Suriganata

NO	KEGIATAN ACTIVITIES	TANGGAL PELAKSANAAN IMPLEMENTATION DATE	DASAR PELAKSANAAN IMPLEMENTATION BASIS	TEMPAT LOCATION	PESERTA PARTICIPANTS
19	<i>Project Risk Management Course</i>	15 Sampai dengan 17 Februari 2016 / 15 TO 17 FEBRUARY 2016	PRIN.HD.40/DL.04/2016 tanggal Februari 2016 / PRIN.HD.40/DL.04/2016 February 2016	BANDUNG	Adi Hartojo

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Seluruh jajaran Auditor bertanggung jawab dan berkewajiban menindaklanjuti setiap temuan hasil *assurance* dan *consulting* melalui jalur koordinasi dan kerjasama antar fungsi terkait. Rekapitulasi tindak lanjut temuan *Internal Audit* tahun 2016, nampak sebagaimana tabel berikut.

FINDINGS AND AUDIT RESULT FOLLOW UP

All Audit staffs is responsible and obliged to follow up every assurance and consulting findings through coordination and cooperation among related functions. The recapitulation of the findings follow up of Internal Audit 2016, appears as the following table.

Tabel Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit / Findings and Audit Result Follow Up Table

Jumlah Temuan Total Findings	Rekomendasi Recommendation	Saldo / Balance	
		Temuan / Findings	Rekomendasi / Recommendation
329	839	181	550

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama pemeriksaan tahun 2016, jumlah temuan sebanyak 329 dengan rekomendasi sebanyak 839. Temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 148 temuan (44,98%) dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 289 (34,45%). Temuan dan rekomendasi lainnya sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti.

From the table above can be explained that during the inspection of 2016 the number of findings is 329 with a recommendation of 839. The followed-up findings were 148 findings (44.98%) and the followed-up recommendations were 289 (34.45%). Other findings and recommendations are in the process of being followed-up.

Akuntan Publik

Public Accountant

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun buku 2015 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

The independent control function of the Company's financial aspects is conducted by implementing an External Audit conducted by the Public Accounting Firm (PAF). The External Auditor who reviews the financial statements of PT Angkasa Pura I (Persero) for the fiscal year 2015 is determined through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. The voting process is conducted in accordance with the existing procurement mechanism. To ensure the independence and quality of audit results, the designated External Auditor may not have a conflict of interest with the Company.

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, PT Angkasa Pura I (Persero) mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku

In the use of the External Auditor, PT Angkasa Pura I (Persero) refers to the terms of Regulation of the Minister of Finance No. 17 / PMK.01/2008 5 February 2008 article 3, paragraph 1 stating that the provision of general audit services on the financial statements of an entity shall be conducted by the PAF for a maximum of 6 (six) consecutive years and by a

berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

PT Angkasa Pura I (Persero) selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Adapun Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Publik, Fee dan Izin KAP yang mengaudit Laporan Keuangan selama 6 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm Table

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Responsible Partner)	Periode Period	Fee	Izin KAP PAF Permits
2016	KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan / Hadori Sugiarto Adi and Partner PAF	Wijadi, Ak, CPA	3 Tahun / Year	Rp1.749.632.500	KEP-444/KM.1/2009
2015	KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan / Hadori Sugiarto Adi and Partner PAF	Wijadi, Ak, CPA		Rp 1.455.281.100	KEP-444/KM.1/2009
2014	KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan / Hadori Sugiarto Adi and Partner PAF	Wijadi, Ak, CPA		Rp1.427.000.000	KEP-444/KM.1/2009
2013	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali / Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali, PAF	Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA	3 Tahun / Years	Rp1.034.990.000	KEP-295/KM.5/2005
2012	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali / Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali, PAF	Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA		Rp907.764.000	KEP-794/KM.1/2013
2011	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali / Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali, PAF	Doli Diapary Siregar, CPA		Rp740.000.000	KEP-794/KM.1/2013

Public Accountant the longest of 3 (three) consecutive fiscal years.

PT Angkasa Pura I (Persero) always seeks to improve communication between Public Accountant Firm, Audit and Management Committee to minimize the constraints that occur during the audit process. In order for the audit process fit with the Standards Professional Accountant and the work agreement and the scope of the audit which has been established and completed within the target time set, meetings are conducted routinely to address several significant important issues.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The Public Accountant Firm, Public Accountant Name, Fee and PAF Permits who audit the Financial Statements for the last 6 years can be seen in the table below.

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Selain memberikan jasa audit atas laporan keuangan, Kantor Akuntan Publik juga memberikan jasa audit atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

OTHER SERVICES WHICH PROVIDED WITH ACCOUNTANTS

In addition to providing audit services to the financial statements, the Public Accounting Firm also provides audit services to the Partnership and Community Development Report .

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Setiap tahunnya, Perseroan memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku auditor ekstern yang independen, dalam melaksanakan audit kinerja laporan keuangan (termasuk di dalamnya audit *Key Performance Indicators* (KPI)). Di samping itu, sebagai perusahaan milik negara PT Angkasa Pura I (Persero) diaudit berkala tahunan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), termasuk kinerja internal Audit juga dilakukan audit/asersi.

KOORDINASI AKUNTAN PUBLIK DAN KOMITE AUDIT

Tidak ada koordinasi secara langsung antara Komite Audit dengan Auditor Eksternal. Tugas-tugas Komite Audit dalam hubungannya dengan auditor eksternal adalah melakukan penelaahan terhadap ruang lingkup tindak lanjut dari hasil pemeriksaan auditor eksternal, yang menyangkut:

1. Meyakini bahwa semua temuan atau rekomendasi dari auditor telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh manajemen dengan persetujuan/pemberitahuan kepada auditor.
2. Melakukan penelaahan dan pengujian bersama-sama dengan auditor terhadap hasil pemeriksaan.
3. Melakukan penelaahan terhadap audit program auditor eksternal.
4. Membahas ruang lingkup pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan auditor.
5. Melakukan penelaahan atas efektivitas dari auditor eksternal.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Audit kepada Unit *Internal Audit* adalah sebagai referensi kepada auditor eksternal dalam hal melakukan penelaahan dan pengujian terhadap perencanaan dan mengadakan koordinasi antara auditor eksternal dan auditor internal untuk memberikan pelayanan yang efektif. Kaitan secara tidak langsung antara Komite Audit dengan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah adanya tanggung jawab Komite Audit terhadap Laporan Keuangan, yang mana Laporan Keuangan tersebut diaudit dan dibuat final oleh KAP. Tanggung jawab Komite Audit dimaksud adalah:

1. Melihat dan mengamati pembuatan laporan tahunan gabungan dan akun-akun terkait serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
2. Melakukan penelaahan tengah tahunan terhadap ikhtisar keuangan termasuk juga perspektus Perseroan sebelum diserahkan kepada Dewan Komisaris dan sebagai dasar untuk persetujuan.
3. Mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen tentang dasar atau kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan, kebijakan dan aplikasi dalam penyiapan akun serta menyajikan angka yang sebenarnya ikhtisar keuangan disertai dengan semua rincian yang diperlukan secara lengkap.
4. Mengadakan penelaahan terhadap kemungkinan adanya perubahan perlakuan akuntansi di masa yang akan datang dan yang sedang terjadi serta pengaruhnya terhadap hukum perusahaan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

APPLICATION OF EXTERNAL AUDIT FUNCTION

Each year, the Company has a cooperation contract with the Public Accounting Firm (PAF) as an independent external auditor, in conducting the financial statement audit performance (including audit key performance indicators (KPI)). In addition, as a state-owned enterprise, PT Angkasa Pura I (Persero) is periodically audited by FSA (Audit Board) and FDSA (Finance and Development Supervision Agency), including internal audit performance is also audited/ asserted.

PUBLIC ACCOUNTANT AND AUDIT COMMITTEE COORDINATION

There is no direct coordination between Audit Committee and External Auditor. The duties of the Audit Committee in relation with the external auditor is to review the scope of the follow-up of the results of the inspection of the external auditor, which concerns:

1. Believing that all findings or recommendations from the auditor have been responded and followed up by the management with approval/notice to the auditor.
2. Reviewing and testing together with the auditor on the results of the inspection.
3. Reviewing the audit of external auditor program.
4. Discussing the scope of the inspection after consulted with the auditor.
5. Reviewing the effectiveness of external auditor.

The authority and responsibility of the Audit Committee to the Internal Audit Unit is a reference to the external auditor in reviewing and testing the planning and coordinating between the external auditor and the internal auditor to provide effective services. The indirect connection between the Audit Committee with the Auditor of Public Accounting Firm (PAF) is the responsibility of the Audit Committee to the Financial Report, the Financial Statements which is audited and made final by PAF. The responsibilities of the Audit Committee are:

1. Viewing and observing the preparation of combined annual reports and related accounts and provide necessary recommendations.
2. Conducting a semiannual review of the financial outlook including the Company's perspective before being submitted to the Board of Commissioners and as a basis for approval.
3. Conducting discussions with auditors and management on the basis or applicable accounting policies, policies and applications in the accounts preparation and presenting the actual figures of the financial summary accompanied by all the necessary details in full.
4. Conduct a review on the possibility of changes in accounting treatment in the future and in the on going as well as its effect on corporate law and report it to the Board of Commissioners.



Fungsi Manajemen Risiko

Risk Management Functions

Perkembangan industri penerbangan yang semakin pesat menyebabkan risiko yang dihadapi PT Angkasa Pura I (Persero) pada setiap proses bisnisnya menjadi semakin kompleks. Risiko-risiko pada PT Angkasa Pura I (Persero), baik dalam kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam pengembangan bisnis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, PT Angkasa Pura I (Persero) mengembangkan suatu kerangka pengelolaan risiko Perseroan yang menyeluruh, *Enterprise Risk Management* (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, menciptakan nilai Perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong standar praktik terbaik Tata Kelola Perseroan, serta menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari budaya Perseroan.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan.

KOMITE RISIKO USAHA DAN GCG

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan terkait aspek manajemen risiko di lingkungan Perseroan, Dewan Komisaris membentuk Komite Risiko Usaha dan GCG yang memiliki tugas secara umum yaitu memastikan pelaksanaan manajemen risiko telah berlaku sesuai standar yang berlaku,

The rapid development of aviation industry causes the risks faced by PT Angkasa Pura I (Persero) in every business process becomes more complex. Risks in PT Angkasa Pura I (Persero), both in daily operational activities or in business development, are influenced by various internal and external factors. To that end, PT Angkasa Pura I (Persero) developed a comprehensive risk management framework, Enterprise Risk Management (ERM), in order to minimize potential losses and optimize profitability, create value of the Company and enhance stakeholder confidence, promote best practice standards of Corporate Governance, and also make the risk culture a part of the culture of the Company.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Risk management of the Company which based on GCG principles is manifested from the involvement of all the organs of the Company in the management of risk management. This can be seen from the structure of the Company's risk management organization.

BUSINESS RISK COMMITTEE AND GCG

In order to support the supervisory function related to risk management aspects within the Company scope, the Board of Commissioners established a Business Risk Committee and GCG which general duty is to ensure that risk management implementation is in accordance with applicable standards,

memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya sehingga sesuai dengan ketentuan mengenai kebijakan risiko dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), serta membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan kebijakan risiko dan penerapan prinsip GCG di lingkungan Perseroan.

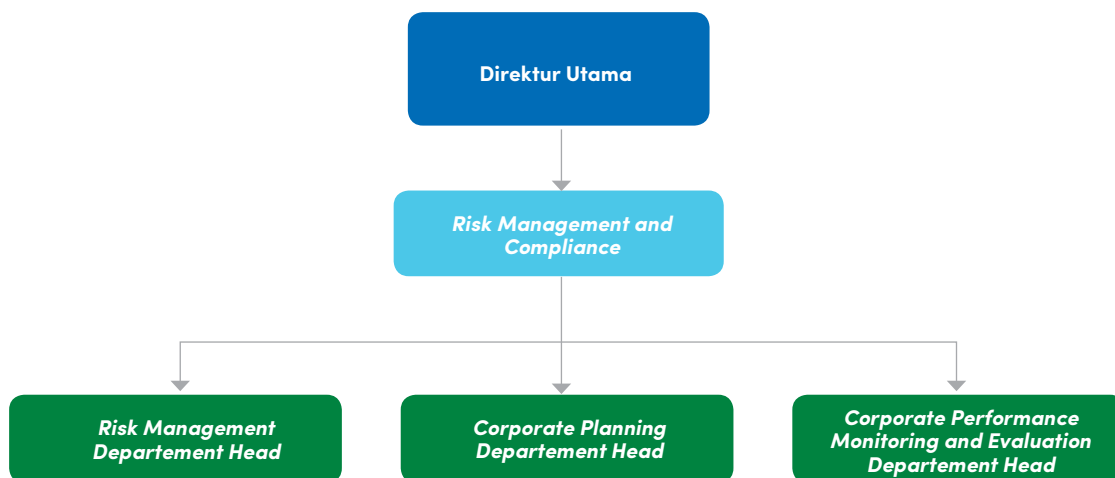
KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor SKEP.151/PG.01/2014 tanggal 19 November 2014, dalam rangka membantu manajemen dalam pengendalian risiko, pengawasan atas kebijakan Perseroan dan optimalisasi fungsi manajemen risiko, maka dibentuk Komite Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero) yang diketuai oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan beranggotakan seluruh Direksi serta seluruh Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi di lingkungan Kantor Pusat.

Secara umum wewenang dan tanggung jawab *Risk Management Committee* adalah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur yang diambil oleh perusahaan, mengevaluasi efektifitas penerapan manajemen risiko perusahaan secara berkala, memantau kegiatan fungsi manajemen risiko di lingkungan Kantor Pusat, dan mengembangkan budaya sadar risiko di lingkungan perusahaan serta kompetensi Sumber Daya Manusia terkait Manajemen Risiko.

UNIT RISK MANAGEMENT AND CORPORATE PLANNING

Struktur organisasi Unit *Risk Management and Corporate Planning* dapat dilihat pada bagan berikut.



provide recommendations on improving the company's risk management and implementation in accordance with the terms on risk policy and the implementation of Good Corporate Governance (GCG), and assist the Board of Commissioners in identifying matters that require attention in the implementation of risk policies and the application of GCG principles within the Company.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) number SKEP.151/PG.01/2014 19 November 2014, in order to assist management in risk control, supervision on Company policy and optimization of risk management function, Angkasa Pura I (Persero), chaired by the Director of Commercial and Business Development and comprises all Directors and all Officials 1 level below the Board of Directors within the Head Office scope.

In general, the authority and responsibility of the Risk Management Committee is to establish risk management policies and strategies, monitor the implementation of risk management policies and exposures taken by the company, evaluate the effectiveness of the implementation of company's risk management on a regular basis, monitor the activities of risk management functions within the Head Office scope, and develop Risk awareness culture in the corporate environment as well as the competence of Human Resources related to Risk Management.

RISK MANAGEMENT AND CORPORATE PLANNING UNIT

The organizational structure of Risk Management and Corporate Planning Unit can be seen in the following chart.

PROFIL KEPALA / HEAD PROFILE



Tommy Meilitza

Warga Negara Indonesia. Usia 52 tahun, lahir di Jakarta pada 17 Mei 1964. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi Pendidikan Jurusan Psikologi dari Universitas Pasundan pada Tahun 1985 dan Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum dari Universitas I Gusti Ngurah Rai-Bali pada Tahun 1995. Gelar Magister Management diperoleh di Universitas Hasanuddin- Makassar pada Tahun 2007. Menjabat sebagai *Head of Risk Management and Corporate Planning* sejak 23 April 2015 berdasarkan SK Direksi No. SKEP.702/KP.07.03/2015.

Indonesian 52 years old, born in Jakarta on 17 May 1964. He earned his Bachelor degree in Psychology from Psychology Department of Pasundan University in 1985 and Law Degree from Law School from I Gusti Ngurah Rai University-Bali in 1995. Master's Degree in Management was earned at Hasanuddin-Makassar University in 2007. Served as Head of Risk Management and Corporate Planning since 23 April 2015 based on Board of Directors Decree No. SKEP.702/KP.07.03/2015.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi Manajemen Risiko di Kantor Pusat berada di unit *Risk Management and Corporate Planning* sedangkan di Kantor Cabang berada pada *Section* yang membidangi Fungsi *Risk Management*. Tugas dan tanggung jawab fungsi Manajemen risiko di Kantor Pusat adalah sebagai berikut.

1. Menjadi fasilitator bagi Pemilik Risiko (*Risk Owner*) di Kantor Pusat dalam penyusunan Profil Risiko (*Risk Profile*).
2. Menindaklanjuti Laporan Profil Risiko Kantor Cabang untuk diteruskan kepada *Risk Management Committee*.
3. Menindaklanjuti Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kantor Cabang untuk diteruskan kepada *Risk Management Committee*.
4. Menyusun Laporan Profil Risiko Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikannya kepada *Risk Management Committee* untuk diteruskan kepada Direktur Utama.
5. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan menyampaikannya kepada *Risk Management Committee* untuk diteruskan kepada Direktur Utama.
6. Mengevaluasi Aktivitas atau Transaksi Usaha yang memerlukan persetujuan Direktur Utama, antara lain Aktifitas atau Transaksi Usaha yang telah melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat di bawah Direktur Utama, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
7. Memantau posisi Risiko (*Risk*) Perusahaan secara keseluruhan, per jenis Risiko (*Risk*), dan Risiko (*Risk*) per Aktivitas fungsional yang antara lain dapat dinyatakan dalam bentuk matriks Pemetaan Risiko (*Risk Mapping/ Risk Matrix*) dan memberikan rekomendasi kepada *Risk Management Committee*.
8. Memberikan masukan kepada *Risk Management Committee* mengenai besaran atau Eksposur (*Exposure*) maksimum Risiko (*Risk*) untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
9. Melakukan pengkajian terhadap usulan Aktivitas atau Transaksi Usaha tertentu apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama dan *Risk Management Committee*.
10. Melakukan dokumentasi yang memadai untuk keperluan Pengendalian Internal (*Internal Control*).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Risk Management function at the Head Office is located in the Risk Management and Corporate Planning unit while at the Branch Office is in the Section which in charge of the Risk Management Function. The duties and responsibilities of the risk Management function at Head Office are as follows.

1. Becoming facilitator for Risk Owner at Head Office in Risk Profile preparation.
2. Following up the Branch Offices' Risk Profile Report to be forwarded to the Risk Management Committee.
3. Following up on Report of Branch Offices' Risk Management Implementation to be forwarded to Risk Management Committee.
4. Preparing a Corporate Risk Profile Report at least 1 (one) time per year and submit it to the Risk Management Committee to be forwarded to the President Director.
5. Preparing Company Risk Management Implementation Report at least 2 (two) times a year and submit it to Risk Management Committee to be forwarded to the President Director.
6. Evaluating Activities or Business Transactions that require the approval of the President Director, among others, Activities or Business Transactions that have exceeded the authority of Company officials one level below the President Director, in accordance with applicable policies and procedures.
7. Monitoring the Company's risk position as a whole, per type of Risk, and Risk per functional Activity which among others can be expressed in the form of Risk Mapping (Risk Matrix) and providing recommendations to Risk Management Committee.
8. Providing input to the Risk Management Committee on the number or Exposure of the maximum Risk to be incorporated into the Company's Work Plan and Budget (CWPB).
9. Conducting review of any proposed Business Activity or Transaction if deemed necessary by the President Director and Risk Management Committee.
10. Performing adequate documentation for the purposes of Internal Control.

11. Mengkaji sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kecukupan dan kelayakan dari kebijakan pedoman, dan strategi penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management*), serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada *Risk Management Committee*.
12. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama.

Tugas dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko yang berada di Kantor Cabang antara lain:

1. Menjadi fasilitator bagi *Section* di Kantor Cabang dalam penyusunan Profil Risiko (*Risk Profile*).
2. Menyusun Laporan Profil Risiko Kantor Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikannya kepada *Department Head* dan *General Manager* untuk diteruskan kepada *Risk Management and Compliance*.
3. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko Kantor Cabang secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan menyampaikannya kepada *Department Head* dan *General Manager* untuk diteruskan kepada *Risk Management and Corporate Planning*.
4. Mengevaluasi Aktivitas atau Transaksi Usaha yang memerlukan persetujuan *General Manager*, antara lain Aktivitas atau Transaksi Usaha yang telah melampaui kewenangan pejabat Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
5. Memantau posisi Risiko Kantor Cabang secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan Risiko per Aktivitas fungsional yang antara lain dapat dituangkan dalam bentuk matriks Pemetaan Risiko (*Risk Mapping/Risk Matrix*) dan memberikan rekomendasi kepada *General Manager* untuk diserahkan kepada *Risk Management and Compliance*.
6. Memberikan masukan kepada *General Manager* untuk diteruskan kepada *Risk Management and Compliance* mengenai besaran atau Eksposur maksimum Risiko di Kantor Cabang.
7. Melakukan dokumentasi yang memadai untuk keperluan Pengendalian Internal (*Internal Control*).
8. Mengkaji sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kecukupan dan kelayakan dari kebijakan, pedoman dan strategi penerapan Manajemen Risiko di Kantor Cabang, serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada *General Manager* untuk diteruskan kepada *Risk Management and Compliance*.
9. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko di Kantor Cabang yang telah ditetapkan oleh *Risk Management Committee*.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan usaha Milik Negara.

11. Reviewing at least 1 (one) time in a year the adequacy and appropriateness of the guidelines policy and Risk Management implementation strategy, and also submitting the recommendation of change to the Risk Management Committee.
12. Monitoring the implementation of the Risk Management policy established by the President Director.

The duties and responsibilities of the Risk Management functions in the Branch Office including:

1. Becoming facilitator for Branch Office's Section in preparing Risk Profile.
2. Preparing a Branch Office Risk Profile Report at least 1 (one) time per year and submitting it to the Department Head and General Manager to be forwarded to Risk Management and Compliance.
3. Preparing a Report on the Application of Branch Office Risk Management periodically at least 2 (two) times a year and submitting it to Department Head and General Manager to be forwarded to Risk Management and Corporate Planning.
4. Evaluating any Business Activities or Transactions that require General Manager's approval, among others Activities or Business Transactions that have exceeded the authority of Company officials in accordance with applicable policies and procedures.
5. Monitoring Branch Offices' Risk Position as a whole, per type of Risk, and the Risk per Functional Activity which among others can be poured in the form of Risk Mapping (Risk Matrix) and providing recommendation to General Manager to be submitted to Risk Management and Compliance.
6. Providing input to the General Manager to be forwarded to Risk Management and Compliance regarding the number or Maximum Exposure of Risk in Branch Offices.
7. Performing adequate documentation for the purposes of Internal Control.
8. Reviewing at least 1 (one) time in a year the adequacy and appropriateness of Risk Management's policy, guidelines and implementation strategy at Branch Office, and submitting recommendation of change to the General Manager to be forwarded to Risk Management and Compliance.
9. Monitoring the implementation of Risk Management policy in Branch Offices established by the Risk Management Committee.

IMPLEMENTATION BASIS OF RISK MANAGEMENT

Risk management within the Company scope refers to the Minister Regulation of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and Minister Decree of State-Owned Enterprises Number: KEP-117 / MBU / 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices (GCG) in State-Owned Enterprises.

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN RISIKO

Dalam rangka memastikan proses bisnis Perseroan berlangsung sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima melalui serangkaian proses manajemen risiko serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan risikonya melalui Ketetapan Direksi nomor KEP.77/PG.01/2014 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero) yang diterjemahkan kedalam sebuah prosedur dan Instruksi Kerja manajemen risiko Perseroan. Penetapan ini dilakukan untuk membakukan dan mengatur pengelolaan risiko baik di lingkungan Korporat secara umum maupun lingkungan Kantor Cabang secara khusus sehingga terciptanya pengelolaan risiko secara efektif dan efisien di lingkungan Perseroan.

TARGET DAN INISIATIF STRATEGIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2016

Pelaksanaan manajemen risiko di tahun 2016 berfokus pada penguatan pondasi, peningkatan dan penerapan kapabilitas manajemen risiko yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi *monitoring* risiko, pelatihan manajemen risiko dalam rangka peningkatan kompetensi personal yang membidangi fungsi manajemen risiko, penyusunan *risk appetite* dan *risk tolerance* perusahaan untuk tahun 2017, pengukuran maturitas manajemen risiko, dan pelaksanaan program peningkatan *awareness* di lingkungan Perseroan melalui *risk campaign*.

SISTEM DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Perkembangan industri penerbangan yang pesat menyebabkan risiko yang dihadapi Perseroan pada setiap proses bisnisnya menjadi semakin kompleks. Risiko-risiko pada Perseroan, baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam pengembangan bisnis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, Perseroan mengembangkan suatu kerangka pengelolaan risiko perusahaan yang menyeluruh, *Enterprise Risk Management* (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, menciptakan Nilai Perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong standar praktik terbaik tata kelola Perusahaan, serta menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari Budaya Perseroan.

Secara umum Fungsi Manajemen Risiko Kantor Pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan manajemen risiko, melakukan pemantauan profil risiko Perseroan termasuk rencana penanganannya, memberikan rekomendasi kepada *Risk Management Committee*, mengevaluasi kebijakan strategis,

DETERMINATION OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES

In order to ensure that the Company's business processes are in accordance with acceptable levels of risk through a series of risk management processes and the implementation of good corporate governance, the Company sets out its risk management policy through the Board of Directors Decree No. KEP.77/PG.01/2014 On Risk Management Guidance of PT Angkasa Pura I (Persero) which is translated into a procedure and Instruction of Risk Management of the Company. This determination is made to standardize and manage risk management both within the Corporate environment in general and the Branch Office in particular so as to create effective and efficient risk management within the Company.

TARGET AND STRATEGIC INITIATIVES IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN 2016

The implementation of risk management in 2016 focuses on foundation strengthening, enhancement and implementation of risk management capabilities through a series of activities including risk monitoring, risk management training in order to improve the competence of personnel in charge of risk management, the preparation of risk appetite and risk tolerance of the company for 2017, measurement of risk management maturity, and implementation of awareness enhancement program within the Company through risk campaign.

RISK MANAGEMENT SYSTEM AND IMPLEMENTATION

The rapid development of aviation industry causes the risks faced by the Company in every business process becomes more complex. Risks in the Company, both in daily operational activities or in business development, are influenced by various internal and external factors. To that end, the Company developed a comprehensive risk management framework, *Enterprise Risk Management* (ERM), in order to minimize potential losses and optimize profitability, create value of the Company and enhance stakeholder confidence, promote best practice standards of Company Governance, and also make the risk culture a part of the Culture of the Company.

The policies and strategies for the implementation of Corporate Risk Management at the corporate level are conducted by the Risk Management Committee comprises of the Board of Directors and supported by the ranks of officers one level below the Board of Directors as members. In general, the Risk Management Function of the Head

memantau pelaksanaan manajemen risiko, serta bersama-sama dengan pengelola risiko di lingkungan Kantor Pusat untuk melaksanakan proses Manajemen Risiko.

Pada tingkat Kantor Cabang juga terdapat fungsi Manajemen Risiko yang bersama-sama dengan Pemilik Risiko (*Risk Owner*) Kantor Cabang melaksanakan proses Manajemen Risiko dengan tahapan melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, menentukan penanganan risiko serta melakukan *monitoring* terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi.

Berdasarkan serangkaian evaluasi secara berkala di lingkungan perusahaan terkait dengan pengimplementasian Manajemen Risiko, dilakukan beberapa perbaikan serta pengembangan selama Tahun 2016 diantaranya:

1. Aspek pengelolaan risiko menjadi poin dalam *Key Performance Indicator* bagi 13 Kantor Cabang.
2. Dilakukannya penyusunan Profil Risiko pada proyek pengembangan bandar udara maupun pembangunan Bandar Udara baru.
3. Dilakukannya pendampingan oleh Tim Kantor Pusat kepada Kantor Cabang dalam rangka penyusunan Profil Risiko Tahun 2017 dan penerapan RKAP berbasis risiko di Perusahaan.
4. Terhadap seluruh usulan investasi yang akan diajukan, kajian risiko menjadi salah satu dokumen pendukung utama sebagai syarat dalam pengambilan keputusan.
5. Dilakukannya Rapat penyusunan *Risk Appetite and Risk Tolerance* bersama dengan Anggota *Risk Management Committee* dan ditentukannya nilai *Risk Tolerance* yang akan digunakan pada RKAP 2017.
6. Terbitnya pedoman pengukuran maturitas manajemen risiko PT Angkasa Pura I (Persero) melalui Keputusan Direksi nomor KEP.137/PG.01/2016 tanggal 8 September 2016.
7. Penyempurnaan *risk management system* untuk mempermudah pengelola risiko dalam melakukan pemantauan secara *real time*.

STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO

Dalam penerapan Manajemen Risiko, PT Angkasa Pura I (Persero) menggunakan acuan *International Organization for Standardization (ISO) 31000 Risk Management Standard* yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2011. Proses pengelolaan risiko Perseroan dijabarkan pada diagram berikut.

Office is responsible for developing and following up on the risk management report, monitoring the Company's risk profile including the plan for handling it, providing recommendations to the Risk Management Committee, evaluating strategic policies, monitoring the implementation of risk management, together with risk manager in the Head Office scope to implement the Risk Management process.

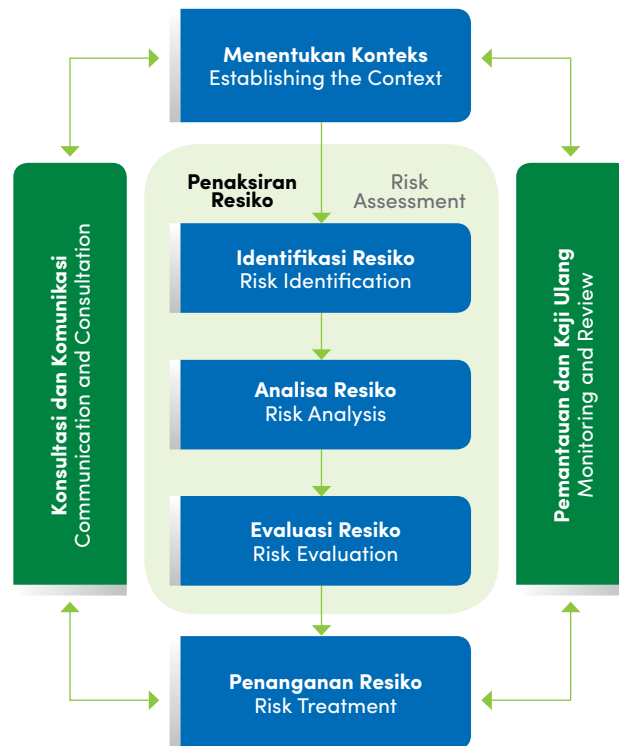
At the Branch Office level, there is also a Risk Management function together with the Risk Owner, the Branch Office conducting the Risk Management process by stages of identifying, analyzing, evaluating, determining risk handling and monitoring of identified risks.

Based on a series of periodic evaluations in the company's scope related to the implementation of Risk Management, several improvements and developments during the Year 2016 are made, among others:

1. The risk management aspect becomes a point in the Key Performance Indicator for 13 Branch Offices.
2. The preparation of the Risk Profile on the airport development project or the construction of the new Airport.
3. Conducting mentoring by the Head Office Team to Branch Offices for the purpose of preparing Risk Profiles in 2017 and the implementation of CWPB based on risks in the Company.
4. To all proposed investments that will be submitted, risk review becomes one of the main supporting documents as a requirement in decision making.
5. Risk Appetite and Risk Tolerance Preparation Meeting together with the Risk Management Committee Members and the determination of Risk Tolerance value will be used in the CWPB 2017.
6. The issuance of risk management maturity assesment guidelines for PT Angkasa Pura I (Persero) through Board of Directors' Decree number KEP.137/PG.01/2016 8 September 2016.
7. Improvement on risk management system to facilitate risk managers in real time monitoring.

RISK MANAGEMENT STRATEGY

In implementing the Risk Management, PT Angkasa Pura I (the Company) refers to the *International Organization for Standardization (ISO) 31000 of Risk Management Standard* that has been certified from the National Standardization Agency (BSN) in 2011. The process of risk management of the Company is described in the following diagram.



Berdasarkan diagram tersebut, proses manajemen risiko meliputi 5 (lima) tahapan kegiatan sebagai berikut.

- A. **Komunikasi dan Konsultasi**
Merupakan proses interaktif berupa tukar menukar informasi dan pendapat mengenai risiko (*risk*) dan pengelolaannya, serta komunikasi antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai isu tertentu yang terkait dengan pengambilan keputusan atau penentuan langkah tertentu dalam menangani risiko (*risk*).
- B. **Menentukan Konteks**
Dilakukan dengan menetapkan parameter-parameter yang relevan dengan Perseroan, baik internal maupun eksternal yang digunakan dalam pengelolaan risiko (*risk*), terutama dalam rangka menetapkan ruang lingkup dan kriteria risiko (*risk criteria*).
- C. **Penilaian Risiko (Risk Assessment)**
 1. **Identifikasi Risiko (Risk Identification)**
Identifikasi dilakukan secara teliti sehingga semua risiko (*risk*) yang relevan termasuk risiko-risiko (*risks*) yang berada di luar kendali Perusahaan, dapat dipastikan telah teridentifikasi.
 2. **Analisis Risiko (Risk Analysis)**
Analisis risiko (*risk analysis*) meliputi penentuan besaran kemungkinan terjadinya risiko (*risk*), besaran dampak kerugian, dengan memperhatikan sumber dan penyebab risiko (*risk agent/ risk source*) serta pengendalian risiko (*risk*) yang sudah ada saat ini dan efektivitasnya.
 3. **Evaluasi Risiko (Risk Evaluation)**
Evaluasi risiko (*risk evaluation*) dilakukan untuk menetapkan risiko (*risk*) yang memerlukan penanganan risiko (*risk treatment*) berdasarkan skala prioritas.

Based on the diagram above, the risk management process includes 5 (five) steps of these following activities.

- A. **Communication and Consultation**
This is an interactive process of information and opinion sharing about risks and their management, and a communication between the Company and the stakeholders about the decision making process or the step determination in order to managing the risks.
- B. **Determining the Context**
The determination of the context is conducted by defining both internal and external parameters that are relevant with the Company that will be utilized to manage the risks, especially in order to determine the scope and criteria of the risk.
- C. **Risk Assessment**
 1. **Risk Identification**
The identification is conducted thoroughly to ensure the identification of all relevant risks, including the risks which are out of Company's control.
 2. **Risk Analysis**
Risk analysis includes analyzing the probability of risk and the scale of the impact by considering the risk agents and sources and by inspecting the effectiveness of the existing risks control.
 3. **Risk Evaluation**
Risk evaluation is conducted to determine which risks requires certain risk treatment based on the priority scale.

D. Penanganan Risiko (*Risk Treatment*)

Penanganan risiko (*risk treatment*) dilakukan untuk menyeleksi satu atau lebih alternatif metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi eksposur (*exposure*). Pemilihan alternatif penanganan risiko (*risk treatment*) harus didasarkan atas analisis biaya penanganan risiko (*risk treatment cost/cost of risk*) dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pada berbagai aspek terkait.

Alternatif atau pilihan penanganan risiko (*risk treatment*) adalah:

1. Menghindari risiko (*risk avoiding*) dengan tidak melakukan aktivitas atau transaksi usaha tertentu;
2. Mitigasi risiko (*risk mitigation*), misalnya dengan peningkatan keselamatan kerja, pemeliharaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemutakhiran sistem, dan prosedur;
3. Pembagian risiko (*risk transfer/risk sharing*) dengan pihak lain, misalnya asuransi, *hedging*, kerja sama dengan bentuk *joint venture/ partnership*. Pembagian risiko (*risk transfer/risk sharing*) ini dapat dilakukan untuk eksposur (*exposure*) yang melampaui toleransi risiko (*risk tolerance*) Perusahaan;
4. Menerima risiko (*risk acceptance*) dengan melaksanakan aktivitas atau transaksi usaha tertentu dengan tanpa usaha untuk mengurangi, membagi ataupun memindahkan risiko (*risk transfer*);
5. Kombinasi antara beberapa alternatif sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas.

E. Pemantauan (*Monitoring*) dan Kaji Ulang (*Review*)

Pelaksanaan pemantauan meliputi pemantauan (*monitoring*) secara berkelanjutan oleh para pemilik risiko (*risk owner*). Pengawasan pemantauan dilakukan oleh pimpinan pemilik risiko yang dilaksanakan secara berkala dan pihak ketiga melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan, kaji ulang merupakan peninjauan secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diberlakukan dan efektivitas pelaksanaan penanganan risiko untuk disempurnakan secara berkesinambungan.

PROFIL RISIKO DAN UPAYA PENGELOLAANNYA

Risiko-risiko pada PT Angkasa Pura I (Persero) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, dengan rincian sebagai berikut.

1. *Strategy and Planning Risk* yang meliputi *corporate responsibility and sustainability, external factors, planning, project, dan strategy*.
2. *Financial Risk* yang meliputi *accounting, credit, liquidity and finance intelligence, financial market, planning and budgeting*.
3. *Operation/Infrastructure Risk* yang meliputi *corporate assets, human resources, information technology, external*

D. Risk Treatment

Risk treatment is conducted to choose one or more alternative of methods or approaches that will reduce the risk's exposure. Choosing the right alternatives of risk treatment shall be based on the comparison between the cost of risk treatment and the benefits acquired from various related aspects.

The alternatives or choices of risk treatment are:

1. Risk avoiding, by not conducting particular activity or business;
2. Risk mitigation, for instance by improving work safety, conducting maintenance, improving human resource capacities, upgrading Company's systems and procedures;
3. Risk transfer/risk sharing with the other parties, for instance with insurance, hedging, joint venture/partnership. Risk transfer can be applied for the exposure of the risk that has exceed the risk tolerance of the Company;
4. Risk acceptance, by conducting certain activities or business without any effort to reduce, divide, or transfer the risks;
5. Combination of the above mentioned alternatives as stated in number 1 to 4.

E. Monitoring and Review

The performance evaluation includes continuous monitoring by the conducted by the risk owners. The supervision of the monitoring is conducted periodically by the risk owners and the third party through periodic internal or external audits. Meanwhile, review is periodical assessment to examine the effectiveness of the applied risk management and the success of its implementation, so that it can be enhanced continuously.

RISK PROFILE AND ITS MANAGEMENT EFFORT

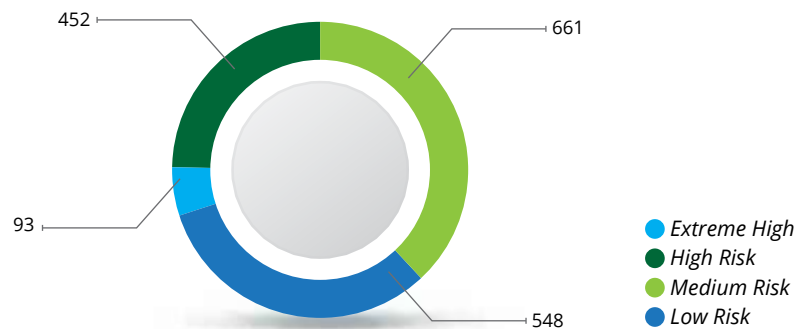
Risks in PT Angkasa Pura I (Persero) are grouped into 4 (four) categories, with details as follows.

1. *Strategy and Planning Risk* which includes corporate responsibility and sustainability, external factors, planning, project, and strategy.
2. *Financial Risk* which includes accounting, credit, liquidity and finance intelligence, financial market, planning and budgeting.
3. *Operation/Infrastructure Risk* which includes corporate assets, human resources, information technology,

events, legal, process management, product development and sales marketing and communications.

4. Hazard Risk yang meliputi *health, safety and environment, force majeure dan natural disaster*.

Berdasarkan serangkaian pemantauan risiko yang dilakukan baik di lingkungan kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Anak Perusahaan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016, jumlah risiko teridentifikasi di PT Angkasa Pura I (Persero) sejumlah 1.754 (seribu tujuh ratus lima puluh empat) risiko dengan persebaran sebagai berikut:



Adapun secara umum, risiko-risiko yang dihadapi di lingkungan Perseroan dalam rangka pencapaian visi misi Perseroan jangka panjang, dijabarkan sebagai berikut.

- external events, legal, process management, product development and sales marketing and communications.
4. Hazard Risk which includes health, safety and environment, force majeure and natural disaster.

Based on a series of risk monitoring conducted within the Central Office, Branch Office and Subsidiaries, up to the fourth Quarter of 2016, the number of risks identified in PT Angkasa Pura I (Persero) amounts to 1,754 (one thousand seven hundred and fifty four) as follow:

In general, the risks faced by the Company within the in order to achieve the long-term vision of the Company's mission are described as follows.

NO.	RISIKO / RISK	PENYEBAB / CAUSE	DAMPAK / IMPACT	PENGELOLAAN RISIKO / RISK MANAGEMENT
1	Turunnya Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Bandara / Decline of the Airport Users' Satisfaction Rate	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Bandara belum optimal Kurangnya kapasitas bandara Struktur Organisasi belum berorientasi pada konsumen Kualitas infrastruktur dan fasilitas bandara belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Komplain pengguna jasa bandara Buruknya reputasi Perusahaan Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>Service Level</i> Pengembangan program <i>Customer Loyalty</i> Peningkatan supervisi bandara Optimisasi Manajemen <i>Slot Time</i> Ekspansi kapasitas bandara Implementasi <i>Lean & Customer-Centric Organization</i> Penggantian dan perbaikan fasilitas infrastruktur bandara
		<ol style="list-style-type: none"> The airport services are not optimal The airports are lack of capacities The organizational structure is not costumer-oriented The quality of the airport infrastructures and facilities are not optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Complaints from the airport users Poor reputation of the Company Unachievable strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> Improving the Service Level Developing Customer Loyalty Program Improving airport supervision Optimizing Slot Time Management Expanding the airport capacities Implementing Lean & Customer-Centric Organization Replacing and repairing the airport infrastructure facilities

NO.	RISIKO / RISK	PENYEBAB / CAUSE	DAMPAK / IMPACT	PENGELOLAAN RISIKO / RISK MANAGEMENT
2	Kegagalan Mencapai Target Pendapatan Aeronautika / Failure to Achieve the Aero Revenue Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak optimalnya program dan strategi pemasaran 2. Kondisi Perekonomian Dunia dan Nasional yang tidak mendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. The marketing program and strategies are not optimal 2. The Global and National Economy conditions are not conducive 	Target Pendapatan Operasional Rp8,8 Triliun pada tahun 2018 tidak tercapai / The Operational Revenue Target of Rp8,8 trillion in 2018 is not achievable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan program dan strategi pemasaran untuk pendapatan Aeronautika 2. Mempersiapkan Rencana Kontijensi untuk mengantisipasi perubahan Perekonomian <ol style="list-style-type: none"> 1. Close monitoring on the implementation of the marketing programs and strategies of the Aero Revenue 2. Preparing Contingency Plan to anticipate the Economics changes.
3	Kegagalan Mencapai Target Pendapatan Non Aeronautika / Failure of Achieving Non-Aero Revenue Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya target kinerja anak perusahaan 2. Terhambatnya pengembangan bisnis baru <ol style="list-style-type: none"> 1. The subsidiaries' performance targets are not achieved. 2. The new business development is inhibited. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya target pendapatan operasional 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Failure of achieving the operational revenue 2. Unachievable strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan laba anak perusahaan 2. Program Penerapan <i>Parenting model</i> yang efektif 3. Pengembangan <i>Parenting Policy</i> 4. Pengembangan sistem <i>holding company</i> 5. Optimalisasi Pengembangan bisnis baru dan pendirian anak perusahaan baru 6. Melakukan Kaji ulang <i>positioning</i> bandara <ol style="list-style-type: none"> 1. Designing a program to improve the subsidiaries' profit 2. Designing an effective parenting model implementation 3. Developing Parenting Policy 4. Developing holding company system 5. Optimizing the development of new business and the startup of new subsidiaries 6. Reviewing the airport positioning
4	Rendahnya Sinergi dengan Instansi Terkait / Poor Synergy with Relevant Institutions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama strategis sinergis dengan instansi terkait terhambat 2. Belum efektifnya strategi komunikasi eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. A synergistic and strategic cooperation with relevant institutions is inhibited 2. The external communication strategy is ineffective 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya target pendapatan non-aero 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Failure of achieving the non-aero revenue 2. Failure of achieving strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kerjasama strategis saat ini (<i>eksisting</i>) 2. Peningkatan nilai kerjasama strategis baru 3. Peningkatan komunikasi dengan pihak eksternal 4. Peningkatan efektivitas <i>international affairs</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimizing the existing strategic cooperation 2. Improving the cooperation value of the new strategic cooperation 3. Improving communication with the external parties 4. Improving the effectiveness of the international affairs sector

NO.	RISIKO / RISK	PENYEBAB / CAUSE	DAMPAK / IMPACT	PENGELOLAAN RISIKO / RISK MANAGEMENT
5	Ketidakkucupan dana untuk Pengembangan Kapasitas, Infrastruktur dan Usaha / Fund Insufficiency for Capacities, Infrastructures, and Business Development	<ol style="list-style-type: none"> Likuiditas perusahaan belum optimal Biaya operasi belum efektif dan efisien <ol style="list-style-type: none"> The liquidity of the Company is not optimal The operational cost is ineffective and inefficiently allocated 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak tercapainya target pendapatan non-aeronautika Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Failure of achieving the non-aero revenue Failure of achieving strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi likuiditas keuangan perusahaan Penerapan strategi pendanaan yang tepat Optimalisasi struktur modal Peningkatan efisiensi dan efektivitas biaya Peningkatan efektivitas manajemen budget Penerbitan Sukuk dan Obligasi Perseroan <ol style="list-style-type: none"> Optimizing the liquidity of the Company's finance Implementing the best funding strategy Optimizing the capital structure Improving the cost efficiency and effectiveness Improving the budget management effectiveness Issuing the Company's Sukuk and Bonds
6	Terhambatnya Pencapaian <i>Operation Excellence</i> Failure to Achieve the Operation Excellence	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen perawatan fasilitas infrastruktur bandara belum dilakukan secara efektif dan efisien Implementasi CMMS (<i>Computer Maintenance Management System</i>) belum efektif Implementasi program <i>Airport Safety</i> belum optimal Sistem dan prosedur bandara belum optimal <ol style="list-style-type: none"> The maintenance of the airports' infrastructure facilities has not been managed effectively and efficiently The CMMS implementation is not yet effective The SHE program implementation is not yet optimal The airport system and procedure are not yet optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Komplain pengguna jasa bandara Buruknya reputasi Perusahaan Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Complaints from the airport users Poor reputation of the Company Failure of achieving strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas dan efisiensi Manajemen Perawatan Peningkatan Efektivitas implementasi CMMS (<i>Computer Maintenance Management System</i>) Peningkatan implementasi Program <i>Airport Safety</i> Peningkatan Sistem dan Prosedur bandara (Berdasarkan ISO) <ol style="list-style-type: none"> Enhancing the effectiveness and efficiency of the Maintenance Management Enhancing the effectiveness of CMMS implementation (Computer Maintenance Management System) Enhancing the implementation of SHE Program Improving the airport System and Procedure (ISO-based)
7	Terhambatnya Implementasi <i>Best Practice</i> Sistem dan Prosedur Keuangan / Failure to Implement the Best Practice of Financial System and Procedure	<ol style="list-style-type: none"> Sistem keuangan belum terstandarisasi dan terintegrasi Sistem pelaporan keuangan belum diimplementasikan dengan efektif <ol style="list-style-type: none"> The financial system has not been standardized and integrated The financial reporting system has not been implemented effectively 	<ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyusunan laporan keuangan Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> The financial reporting is late Failure of achieving strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> Standarisasi dan integrasi laporan keuangan Implementasi Sistem laporan keuangan online secara efektif <ol style="list-style-type: none"> Applying standardized and integrated financial system Implementing online financial report system effectively

NO.	RISIKO / RISK	PENYEBAB / CAUSE	DAMPAK / IMPACT	PENGELOLAAN RISIKO / RISK MANAGEMENT
8	Terhambatnya Pengembangan dan Implementasi Sistem Manajemen Kelas Dunia / Inhibition of the Implementation and Development of the World Class Management System	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan strategis dan tahunan perusahaan belum optimal 2. Belum efektifnya implementasi <i>good corporate governance</i> 3. Belum efektifnya Manajemen risiko 4. Hambatan dalam budaya organisasi <ol style="list-style-type: none"> 1. The strategic and annual planning of the company is not optimal 2. The implementation of good corporate governance is not yet effective 3. The risk management is not yet effective 4. There is developed barriers in the organizational culture 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan pengambilan keputusan strategis 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Mistake in taking a strategic decision 2. Failure of achieving strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi konsep "<i>Airport city</i>" 2. Peningkatan proses perencanaan strategis 3. Peningkatan efektivitas Riset Industri 4. Peningkatan efektivitas sistem audit internal 5. Pengawasan kepatuhan terhadap regulasi bandara 6. Peningkatan maturitas penerapan manajemen risiko <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementing the concept of "<i>Airport city</i>" 2. Improving the process of strategic planning 3. Improving the effectiveness of Industrial Research 4. Improving the effectiveness of internal audit system 5. Supervising the compliance to the airport regulation 6. Improving the maturity of the risk management implementation
9	Kendala Budaya dalam Pencapaian Organisasi Berkinerja Tinggi / Cultural Constraint on Achieving High Performance Organization	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>High Performing Culture</i> belum optimal 2. Sistem <i>performance management</i> belum efektif 3. Sistem insentif berbasis kinerja belum efektif 4. Belum optimalnya pelaksanaan <i>change management</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. The implementation of High Performing Culture is not optimal 2. The performance management system is not yet effective 3. The performance-based incentive system is not yet effective 4. The change management implementation is not optimal 	<p>Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan</p> <p>Failure of achieving strategic target of the Company</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi <i>Implementasi High Performing Culture</i> 2. Peningkatan efektivitas sistem <i>performance management</i> 3. Peningkatan efektivitas sistem insentif berbasis kinerja 4. Peningkatan efektivitas <i>change management</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Optimizing the Implementation of High Performing Culture</i> 2. <i>Improving the effectiveness of performance management system</i> 3. <i>Improving the effectiveness of performance-based incentive system</i> 4. <i>Improving the effectiveness of change management</i>
10	Terhambatnya Komunikasi Internal / Inhibition of Internal Communication	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya strategi komunikasi internal 2. Belum efektifnya Sistem ICT <ol style="list-style-type: none"> 1. The internal communication strategy is ineffective 2. The ICT system is ineffective 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya operasional perusahaan 2. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Disrupted operations of the company 2. Failure of achieving strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi internal 2. Optimalisasi sinergi antar divisi atau unit 3. Peningkatan <i>Service Level Agreement Internal</i> 4. Peningkatan efektivitas sistem ICT <ol style="list-style-type: none"> 1. Improving the internal communication and coordination 2. Optimizing the inter-divisions or inter-units synergy 3. Improving the Internal Service Level Agreement 4. Improving the effectiveness of ICT system

NO.	RISIKO / RISK	PENYEBAB / CAUSE	DAMPAK / IMPACT	PENGELOLAAN RISIKO / RISK MANAGEMENT
11	Terhambatnya Kegiatan Pengadaan Disrupted Procurement Activities	Efektivitas manajemen <i>supplier</i> belum optimal The effectiveness of supplier management is not optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya operasional Perusahaan 2. Pengunduran proyek investasi Perusahaan 3. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. The company operations are disrupted 2. The company investment projects are delayed 3. Failure of achieving strategic target of the Company 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas implementasi ERP 2. Peningkatan efektifitas sistem pengadaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Improving the effectiveness of ERP 2. Improving the effectiveness of the procurement system
12	Rendahnya Kapabilitas dan Kapasitas SDM Low Human Resources Capability and Capacity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya kualitas pekerja 2. Minimnya kuantitas pekerja 3. Komitmen dari pekerja kurang 4. <i>Best practice HR Management</i> belum diterapkan dengan baik <ol style="list-style-type: none"> 1. The quality of the employees is low 2. The quantity of the employees is low 3. The working commitment of the employee is low 4. The best practice of HR Management has not properly implemented 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan 2. Terganggunya operasional Perusahaan 3. Tidak terpenuhinya target pencapaian KPI <ol style="list-style-type: none"> 1. Failure of achieving strategic target of the Company 2. Disrupted company operations 3. Failure of achieving KPI target achievement 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>People Development Program</i> 2. Peningkatkan Efektivitas Kepemimpinan 3. Peningkatan efektivitas Perencanaan <i>Man Power</i> dan Sistem Rekrutmen 4. Peningkatan "<i>Sense of Ownership</i>" Pekerja 5. Peningkatan efektivitas <i>career management system</i> 6. Implementasi <i>Talent Management System</i> Kelas Dunia 7. Peningkatan efektivitas <i>Knowledge Management System</i> 8. Penerapan <i>Industrial Relationship management</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting People Development Program 2. Improving the Leadership Effectiveness 3. Improving the effectiveness of Man Power Planning and Recruitment System 4. Improving the employees' "Sense of Ownership" 5. Improving the effectiveness of career management system 6. Implementing the World Class Talent Management System 7. Improving the effectiveness of Knowledge Management System 8. Implementing Industrial Relationship Management
13	Terhambatnya pencatatan aset perusahaan Disrupted the record keeping of the company asset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas manajemen aset belum optimal 2. Proses Pembebasan tanah lamban <ol style="list-style-type: none"> 1. The effectiveness of asset management is not optimal 2. The land liberation process goes slowly 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan 2. Terkendalanya proyek investasi 3. Temuan audit atas aset Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Failure of achieving strategic target of the Company 2. The inhibition of investment projects 3. Finding the audit process towards Company asset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas manajemen aset 2. Percepatan proses pembebasan tanah <ol style="list-style-type: none"> 1. Improving the asset management effectiveness 2. Speeding the land liberation process

NO.	RISIKO / RISK	PENYEBAB / CAUSE	DAMPAK / IMPACT	PENGELOLAAN RISIKO / RISK MANAGEMENT
14	Rendahnya Respon terhadap Deregulasi dan <i>Socioeconomically Responsible Green Corporation</i> Poor Response to the Deregulation and Socioeconomically Responsible Green Corporation commitment	Terhambatnya pelaksanaan strategi dan program kerja respon terhadap deregulasi dan <i>socioeconomically responsible green corporation</i> The implementation of the strategies and working programs as the response to the deregulation and socioeconomically responsible green corporation commitment	1. Tidak tercapainya sasaran strategis Perusahaan 2. Mendapat teguran dari regulator 1. Failure of achieving strategic target of the Company 2. Getting a warning from the regulator party	1. Peningkatan efektivitas kerjasama dan program PKBL 2. Implementasi konsep " <i>Green Corporation</i> " 3. Implementasi sistem <i>Eco-Airport</i> 1. Increasing the effectiveness of cooperation and program of PKBL 2. Implementing the concept of " <i>Green Corporation</i> " 3. Implementing the system of Eco-Airport

Setelah teridentifikasi risiko dalam aktivitas usaha Perseroan, maka langkah selanjutnya adalah penentuan alternatif pengelolaan risiko yang tepat untuk meminimalisir dampak maupun kemungkinan atas risiko tersebut sehingga sasaran Perseroan dapat tercapai. Pemilihan alternatif penanganan risiko (*risk treatment*) harus didasarkan atas analisis biaya penanganan risiko (*risk treatment cost/cost of risk*) dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pada berbagai aspek terkait.

Adapun alternatif pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menghindari risiko (*risk avoiding*) dengan tidak melakukan aktivitas atau transaksi usaha tertentu;
2. Mitigasi risiko (*risk mitigation*), misalnya dengan peningkatan keselamatan kerja, pemeliharaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemutakhiran sistem, dan prosedur;
3. Pembagian risiko (*risk transfer/risk sharing*) dengan pihak lain, misalnya asuransi, *hedging*, kerja sama dengan bentuk *joint venture/partnership*. Pembagian risiko (*risk transfer/risk sharing*) ini dapat dilakukan untuk eksposur (*exposure*) yang melampaui toleransi risiko (*risk tolerance*) Perseroan;
4. Menerima risiko (*risk acceptance*) dengan melaksanakan aktivitas atau transaksi usaha tertentu dengan tanpa usaha untuk mengurangi, membagi ataupun memindahkan risiko (*risk transfer*);
5. Kombinasi antara beberapa alternatif sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas.

REVIU ATAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Perseroan selalu direviu efektivitas penerapannya. Mekanisme reviu dilakukan melalui pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan sistem informasi, dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

After identifying the risks of the Company's activities, the next step is determining the appropriate alternatives of risk management to minimize the impacts or other probabilities in order to reach the Company's objective. Choosing the right alternatives of risk management shall be based on the comparison between the cost of risk treatment and the benefits acquired from various related aspects.

Some alternatives of risk management in the Company are as follows:

1. Risk avoiding, by not conducting particular activity or business;
2. Risk mitigation, for instance by improving work safety, conducting maintenance, improving human resource capacities, upgrading Company's systems and procedures;
3. Risk transfer/risk sharing with the other parties, for instance with insurance, hedging, joint venture/partnership
4. Risk acceptance, by conducting certain activities or business without any effort to reduce, divide, or transfer the risks;
5. Combination of the above mentioned alternatives as stated in number 1 to 4.

RISK MANAGEMENT SYSTEM REVIEW

Risk Management System implemented by the Company is always reviewed for its implementation effectiveness. The review mechanism is conducted through the supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the adequacy of the information system, and the adequacy of the identification process, measurement, monitoring and risk control.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam upaya memastikan pelaksanaan manajemen risiko telah menjadi bagian dalam aktivitas usaha, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Risiko Usaha dan GCG, secara berkala melakukan Rapat dengan *Risk Management and Corporate Planning* dalam rangka melakukan pemantauan terhadap risiko di lingkungan Perseroan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) untuk meminimalisir atas risiko tersebut. Selain itu, minimum 2 kali dalam setahun, *Risk Management and Corporate Planning* melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terhadap hasil pemantauan risiko di lingkungan Perseroan.

KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan dan perubahan iklim bisnis yang semakin dinamis, serta didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih, diperlukan pengembangan terhadap sistem penyediaan data informasi risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan menjawab akan kebutuhan perusahaan akan penyediaan data risiko secara *real time* dan dapat diakses melalui berbagai media (komputer, tablet, *handphone*), maka di lingkungan Perseroan saat ini sedang dilakukan pengembangan terhadap sistem manajemen risiko berbasis *website*.

Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelola risiko di Lingkungan Perseroan dalam melakukan pemantauan dan pembaharuan data informasi terkait dengan risiko yang dimiliki oleh unit kerjanya secara *real time* dan terdokumentasi, kapanpun dan dimanapun. Lebih lanjut, dengan adanya pengembangan sistem informasi manajemen risiko berbasis *online* ini, Direksi dapat ikut serta berperan aktif dalam proses pemantauan risiko di Perseroan dan memperoleh informasi terkini terkait dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan selama tahun berjalan serta penentuan tindakan prioritas untuk menanggulangi risiko tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MONITORING

In effort to ensure the implementation, risk management has been a part of business activities, the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Business Risk Committee and GCG periodically conduct a Meeting with Risk Management and Corporate Planning in order to monitor the risks within the Company's scope and the follow up actions taken by risk owner to minimize the risks. In addition, at least 2 times a year, Risk Management and Corporate Planning reports to the Board of Directors and Board of Commissioners the results of risk monitoring within the Company's scope.

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Along with the development of company business and business climate changes which becomes more dynamic, and supported by technological progress which becomes more sophisticated, it is necessary to develop a system of providing risk information data owned by the company. Based on this background and answering to the company's need for real-time risk data availability and accessible through various media (computer, tablet, mobile), thus, the Company is currently developing a web-based risk management system.

This system aims to facilitate risk managers in the Company's environment in monitoring and updating information data related to risks held by its work unit in real time and documented, whenever and wherever. Furthermore, with the development of this online-base risk management information system, the Board of Directors can participate actively in the process of risk monitoring in the Company and obtain the latest information related to risks faced by the company during the year as well as the determination of priority actions to deal with the risks.



KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO

Untuk memastikan kecukupan proses manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku di Perseroan, Direksi melalui fungsi internal audit melakukan pemeriksaan, evaluasi, pelaporan, dan/atau rekomendasi perbaikan atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko yang kemudian ditindaklanjuti melalui evaluasi oleh *Risk Management Committee*.

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan secara efektif secara berkala dilakukan *review* terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi di lingkungan Perseroan meliputi penanganan risiko (mitigasi, transfer) maupun kontrol internal yang dilakukan dalam upaya menurunkan intensitas maupun status risiko. Selain itu, *review* dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul dalam aktivitas usaha Perseroan seiring dengan adanya pengembangan usaha sehingga dapat ditentukan langkah mitigasi yang tepat terhadap risiko tersebut. Peningkatan pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan dilakukan dengan cara melalui sosialisasi dan *campaign* kepada insan Perseroan sehingga diharapkan tercipta budaya sadar risiko dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kompetensi personil yang membidangi manajemen risiko terkait keilmuan manajemen risiko, dilakukan pelatihan secara berkala dalam bentuk *in-house training* maupun keikutsertaan pelatihan dengan lembaga eksternal. Adapun terhadap pegawai Perseroan secara umum, diberikan sosialisasi dan pelatihan berkala terkait dengan dasar-dasar manajemen risiko dan pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan.

IDENTIFICATION PROCESS, MEASUREMENT, MONITORING, AND RISK CONTROL ADEQUACY

To ensure that the adequacy of the risk management process has been conducted in accordance with the guidelines and rules applicable to the Company, the Board of Directors through the internal audit function conducted inspection, evaluation, reporting and/or recommending improvement on the adequacy and effectiveness of risk management process which is then followed up by evaluation by Risk Management Committee.

THE RISK MANAGEMENT ENHANCEMENT AND IMPROVEMENT

To ensure the effectiveness of the implementation of the risk management, reviews to the identified risks of the Company are conducted periodically. These includes the risk mitigation and transfer and internal control that are done in order to minimize the intensity or the status of the risk. Besides, review is conducted to identify new risks that appear in the Company's business, along with its business expansion. By doing this, the Company can determine the appropriate mitigation action to overcome the risks. The improvement of the risk management of the Company is conducted by doing dissemination and campaign to all Company communities so that they build a risk-aware culture in their decision making.

RISK MANAGEMENT COMPETENCE DEVELOPMENT

To improve and develop the skills and competencies of the personnel in the risk management section related to the risk management expertise, trainings in form of in-house training or out-house training with external agencies are organized periodically. General employees of the Company are also getting regular dissemination event and training related to the basic of risk management and mitigation inside the Company.

Peserta Participant	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training
Tommy Meilitza	Head of Risk Management & Corporate Planning (Kantor Pusat-Jakarta) / Head of Risk Management & Corporate Planning (Head Office-Jakarta)	"Investment and Risk Management Across AEC & Special Investor Forum"
Masjuki	Airport Safety & Quality Management Department Head (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan-Balikpapan) / Airport Safety & Quality Management Department Head (Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport-Balikpapan)	<ul style="list-style-type: none"> • Training Key Risk Indicator (22-23 Februari 2016) • Training Business Continuity Management (24-26 Februari 2016) • Pelatihan Project Risk Management (2-4 Maret 2016) • Training Key Risk Indicator (22-23 Februari 2016) • Training Business Continuity Management (24-26 Februari 2016) • Pelatihan Project Risk Management (2-4 Maret 2016)

Peserta Participant	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training
Rinawan Wijaya	<i>Risk Management Section Head (Bandara Juanda-Surabaya) / Risk Management Section Head (Juanda Airport-Surabaya)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Level 2 (22-26 Februari 2016)</i> • <i>Training Risk Management PT Angkasa Pura I (Persero) (26-29 April 2016)</i> • <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Level 2 (22-26 Februari 2016)</i> • <i>Training Risk Management PT Angkasa Pura I (Persero) (26-29 April 2016)</i>
Novia Febriani	<i>Risk Management Officer (Kantor Pusat-Jakarta) / Risk Management Officer (Head Office-Jakarta)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Level 2 (22-26 Februari 2016)</i> • <i>Pelatihan Project Management (11-13 Mei 2016)</i> • <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Level 2 (22-26 Februari 2016)</i> • <i>Pelatihan Project Management (11-13 Mei 2016)</i>
Christy Joytivan S.	<i>Risk Management Officer (Kantor Pusat-Jakarta) / Risk Management Officer (Head Office-Jakarta)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Level 2 (22-26 Februari 2016)</i> • <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Level 2 (22-26 Februari 2016)</i>
<i>Group Head/Head of dan General Manager</i>	<i>Pejabat Satu Tingkat Di bawah Direksi / Official at One Level below the Company's Board of Directors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pelatihan Enterprise Risk Management (ERP) Batch I di Bogor (5-7 September 2016)</i> • <i>Training of Enterprise Risk Management (ERP) Batch I in Bogor (September 5-7, 2016)</i>
<i>Group Head/Head of dan General Manager</i>	<i>Pejabat Satu Tingkat Di bawah Direksi / Official at One Level below the Company's Board of Directors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pelatihan Enterprise Risk Management (ERP) Batch II di Semarang (19-21 September 2016)</i> • <i>Training of Enterprise Risk Management (ERP) Batch II in Semarang (September 19-21, 2016)</i>
<i>Group Head/Head of dan General Manager</i>	<i>Pejabat Satu Tingkat Di bawah Direksi / Official at One Level below the Company's Board of Directors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pelatihan Enterprise Risk Management (ERP) Batch II di Solo (18-20 September 2016)</i> • <i>Training of Enterprise Risk Management (ERP) Batch II in Solo (September 18-20, 2016)</i>
Edwin Wibowo	<i>Risk Management Analyst (Kantor Pusat-Jakarta) / Risk Management Analyst (Kantor Pusat-Jakarta)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pelatihan Intensif Bersertifikat ISO 31000 "Standar Internasional Manajemen Risiko" (5-9 Desember 2016)</i> • <i>ISO 31000 Certified Intensive Training "International Standard of Risk Management" (December 5-9, 2016)</i>

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2016, sertifikasi yang telah diikuti oleh personil di lingkungan Perseroan, baik yang membidangi manajemen risiko maupun pejabat dirincikan sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

In 2016, the certifications that are attended by the personnel of the Company either those who are in the risk management section or the officials, are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tipe Sertifikat Type of Certificates
Tommy Meilitza	<i>Corporate Expert Level II</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
I Wayan Sutawijaya	<i>Head of Legal and Compliance</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Mariyanto	<i>Head of Corporate Social Responsibility</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Dwi Tedjowati	<i>Airport Facilities Readiness Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Subakir	<i>Airport Safety Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Sulistiyowati Dewi	<i>Accounting Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Eppy Dhanianto Wibowo	<i>Head of Risk Management & Corporate Planning</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Nur Sapto Winoto	<i>Training & Development Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Yanus Suprayogi	<i>General Manager Bandar Udara Gusti Ngurah Rai - Bali / General Manager of I Gusti Ngurah Rai Airport - Bali</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
M. Dimiyati	<i>Shared Services Department Head Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang / Shared Services Department Head Ahmad Yani Airport - Semarang</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
I Gst Ngr Agung Wirama	<i>Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang / Ahmad Yani Airport Development Project - Semarang</i>	<i>Certified Risk Professional</i>

Nama Name	Jabatan Position	Tipe Sertifikat Type of Certificates
Agus Pandu Purnama	<i>General Manager</i> Bandar Udara Adi Sutjipto – Yogyakarta / <i>General Manager</i> of Adi Sutjipto Airport - Yogyakarta	<i>Certified Risk Professional</i>
Priyo Jatmiko	<i>General Manager</i> Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang / <i>General Manager</i> of Ahmad Yani Airport - Semarang	<i>Certified Risk Professional</i>
I Ketut Aryana	<i>Airport Facilities Department Head</i> Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani - Semarang / <i>Airport Facilities Department Head</i> , Ahmad Yani Airport Development Project - Semarang	<i>Certified Risk Professional</i>
Indah Preastutty	<i>Co. General Manager</i> Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar / <i>Co. General Manager</i> of Sultan Hasanuddin Airport – Makassar	<i>Certified Risk Professional</i>
Tavip Wibowo	<i>Operation Audit Department Head</i> Kantor Pusat-Jakarta / <i>Operation Audit Department Head</i> , Head Office - Jakarta	<i>Certified Risk Professional</i>
Taochid Purnomo Hadi	<i>Project Manager</i> P.P Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin / <i>Project Manager</i> of Syamsudin Noor Airport Development Project - Banjarmasin	<i>Certified Risk Professional</i>
Nugroho Jati	<i>General Manager</i> Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado / <i>General Manager</i> of Sam Ratulangi Airport – Manado	<i>Certified Risk Professional</i>
Handy Heryudhitiawan	<i>General Manager</i> Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin / <i>General Manager</i> of Syamsudin Noor Airport - Banjarmasin	<i>Certified Risk Professional</i>
I Gst Ngurah Ardita	<i>General Manager</i> Bandar Udara Internasional Lombok – Praya / <i>General Manager</i> of Lombok International Airport - Praya	<i>Certified Risk Professional</i>
Minggus E.T.Gandeguai	<i>General Manager</i> Bandar Udara Frans Kaisiepo - Biak / <i>General Manager</i> of Frans Kaisiepo Airport - Biak	<i>Certified Risk Professional</i>
Masjuki	<i>Airport Safety and Quality Management Department Head</i> Bandar Udara Sepinggan - Balikpapan / <i>Airport Safety and Quality Management Department Head</i> of Sepinggan Airport - Balikpapan	<i>Certified Risk Professional</i>
Barata Singgih Riwahono	<i>Training Management Department Head</i> Kantor Pusat-Jakarta / <i>Training Management Department Head</i> , Head Office - Jakarta	<i>Certified Risk Professional</i>
Ahmad Syaugi Shahab	<i>Aviation Marketing Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Abdullah Usman	<i>General Manager</i> Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta / <i>General Manager</i> of Adi Soemarmo Airport - Semarang	<i>Certified Risk Professional</i>
Israwadi	<i>Corporate Secretary</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Rini Asriningsih	<i>Head of Procurement</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Sigit Herdiyanto	<i>General Affair Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Ristiyanto Eko Wibowo	<i>Business Development Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Imron Qodari	<i>Human Capital Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Hendra Setiawan	<i>Information Technology Group Head</i>	<i>Certified Risk Professional</i>
Cecep Marga Sonjaya	<i>General Manager</i> Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar / <i>General Manager</i> of Sultan Hasanuddin Airport – Makassar	<i>Certified Risk Professional</i>
Wahyudi	<i>General Manager</i> El Tari-Kupang	<i>Certified Risk Professional</i>
Pujiono	<i>General Manager</i> Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan / <i>General Manager</i> of Sepinggan Airport -Balikpapan	<i>Certified Risk Professional</i>
Amiruddin Florensus	<i>General Manager</i> Bandar Udara Pattimura - Ambon / <i>General Manager</i> Bandar Udara Pattimura - Ambon	<i>Certified Risk Professional</i>
Yudi Maisa	<i>Co. General Manager</i> Bandar Udara Juanda-Surabaya / <i>Co. General Manager</i> of Juanda Airport -Surabaya	<i>Certified Risk Professional</i>
Toni Alam	<i>Project Manager</i> Proyek Pengembangan Bandara Ahmad Yani - Semarang / <i>Project Manager</i> , Ahmad Yani Airport Development Project - Semarang	<i>Certified Risk Professional</i>
Indah Kartikasari	<i>Sales and Shared Services Department Head</i> Adi Soemarmo - Surakarta	<i>Certified Risk Professional</i>

Nama Name	Jabatan Position	Tipe Sertifikat Type of Certificates
Muhammad Nazir	<i>Airport Security and Safety Department Head</i> Adi Sutjipto – Yogyakarta	<i>Certified Risk Professional</i>
Purwanto	<i>Airport Operation and Services Department Head</i>	
Rinawan Wijaya	<i>Risk Management Section Head</i> Bandara Juanda-Surabaya	<i>Managing IT Risk</i>
Novia Febriani	<i>Risk Management Officer</i>	<i>Certified Risk Management Officer</i>
Christy Joytivan Sajendra	<i>Risk Management Officer</i>	<i>Certified Risk Management Officer</i>

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sebagai upaya memastikan penerapan manajemen risiko telah mampu berperan penting dalam membantu pencapaian tujuan Perseroan, mulai tahun 2014 dilakukan evaluasi tahunan terhadap kematangan dan implementasi manajemen risiko di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) melalui pengukuran maturitas manajemen risiko yang kemudian dibakukan secara tertulis dalam sebuah Keputusan Direksi nomor KEP.137/PG.01/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Pengukuran Maturitas Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero).

Adapun Pengukuran maturitas ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penerapan Manajemen Risiko yang telah memenuhi ketentuan dalam Pedoman, Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja Manajemen Risiko serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) dan mengidentifikasi penerapan manajemen risiko yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat disusun rekomendasi guna penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko di masa yang akan datang.

Sesuai pedoman pengukuran maturitas KEP.137/PG.01/2016, Hasil Tingkat kematangan risiko dalam Perseroan dinyatakan melalui skor 1-5 dengan tingkatan belum matang, awal pengembangan, progresif, semi matang, dan matang dengan tingkatan skor yang paling tinggi. Skor tersebut merepresentasikan kesesuaian antara struktur dan proses manajemen risiko yang berjalan saat ini, terhadap kriteria berupa ketentuan dalam Pedoman, Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja Manajemen Risiko dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dengan komponen pengukuran meliputi 5 (lima) aspek yang terdiri dari Tata Kelola Manajemen Risiko, Perencanaan Manajemen Risiko, Penerapan Tahapan Manajemen Risiko, *Monitoring* dan Evaluasi Manajemen Risiko, dan Budaya Risiko.

Secara umum, berdasarkan serangkaian proses pengukuran Maturitas Manajemen Risiko yang telah dilakukan di Tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) berada pada posisi skor **4.08** yang masuk dalam kategori **Semi matang**. Melalui skor tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan risiko telah diterapkan dan mulai dibangun infrastruktur manajemen risiko (organisasi, kebijakan, dan sumber daya manusia) di lingkungan Perseroan. Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa dasar manajemen risiko telah terbangun dengan baik dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan komitmen dari para personel

THE EVALUATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

In order to ensure that the implementation of risk management has taken a significant role to reach the Company's objective, since 2014, an annual evaluation of the maturity and the implementation of risk management in PT Angkasa Pura I (Persero) has been conducted. It is conducted by measuring the maturity of risk management that then standardized authentically with the Resolution of the Company's Board of Directions No. KEP.137/PG.01/2016 of September 8, 2016 on the Guideline of Measuring for Risk Management Maturity of PT Angkasa Pura I (Persero).

The Measuring for maturity is conducted to acquire the overview of Risk Management implementation that has fulfilled the procedures in the Guideline, Working Procedure, and Working Instruction of Risk Management along with its best practices and to identify the implementation of risk management that still need improvement in order to generate recommendation for getting improved implementation of Risk Management in the future.

Based on the maturity measuring guideline of KEP.137/PG.01/2016, the Level Result of the risk maturity of the company is presented with a score from 1 to 5. The maturity levels from the lowest to highest scores are immature, initial development, progressive, semi-mature, and mature. The scores represent the concordance between the structure and process of the existing risk management and the criteria within the Guideline, Working Procedure, and Working Instructions of Risk Management and its best practices. The criteria cover 5 (five) aspects as the components of the measurement: Risk Management Governance, Risk Management Monitoring and Evaluation, and Risk Culture.

Generally, based on the series of Measuring for Maturity of Risk Management in 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) stays in the score of **4.8**, which makes the Company stands in the **semi-mature** category. From the score, it can be concluded that the strategy of risk management has been implemented and the infrastructure of risk management (organization, policy, and human resources) in the Company has been built. Further, the measurement result shows that the basic of risk management has been well built and it is influenced greatly by the capacity and commitments of the personnel who involve directly in determining the risk management,

yang terlibat langsung dalam penerapan manajemen risiko, bukan karena berjalannya sistem. Secara terperinci hasil pengukuran maturitas tahun 2016 untuk masing-masing Kantor Cabang dijabarkan sebagai berikut:

not because of the system progress. The detailed result of Measuring of Maturity in 2016 for each Branch Office is described as follows:

UNIT KERJA WORKING UNIT	2016	Keterangan Information	
Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (DPS) / I Gusti Ngurah Rai Airport (DPS)	3.70	progresif	Level 3
Bandar Udara Juanda (SUB) / Juanda Airport (SUB)	3.61	progresif	Level 3
Bandar Udara Sultan Hasanuddin (UPG) / Sultan Hasanuddin Airport (UPG)	3.56	progresif	Level 3
Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (BPN) / Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Airport (BPN)	3.61	progresif	Level 3
Bandar Udara Sam Ratulangi (MDC) / Sam Ratulangi Airport (MDC)	3.78	progresif	Level 3
Bandar Udara Syamsudin Noor (BDJ) / Syamsudin Noor Airport (BDJ)	3.61	progresif	Level 3
Bandar Udara Internasional Lombok Praya (LOP) / Lombok Praya International Airport (LOP)	3.61	progresif	Level 3
Bandar Udara Adisutjipto (JOG) / Adisutjipto Airport (JOG)	3.70	progresif	Level 3
Bandar Udara Ahmad Yani (SRG) / Ahmad Yani Airport (SRG)	3.61	progresif	Level 3
Bandar Udara El-Tari (KOE) / El-Tari Airport (KOE)	3.60	progresif	Level 3
Bandar Udara Adi Soemarmo (SOC) / Adi Soemarmo Airport (SOC)	3.61	progresif	Level 3
Bandar Udara Pattimura (AMQ) / Pattimura Airport (AMQ)	3.61	progresif	Level 3
Bandar Udara Frans Kaisepo (BIK) / Frans Kaisepo Airport (BIK)	3.61	progresif	Level 3
KANTOR PUSAT / Head Office	4.10	Semi matang / Semi-mature	Level 4
ANGKASA PURA I	4.08	Semi matang / Semi-mature	Level 4



Information Technology Governance

Information Technology Governance

Information Technology Governance merupakan kebijakan teratas yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan seluruh proses-proses Teknologi Informasi (TI). Oleh karena itu, *IT Governance* harus selalu di-review kecukupannya, sehingga efektif untuk menjaga kualitas pelaksanaan proses-proses TI. Hasil revidu yang termuat di dalam dokumen Ringkasan Eksekutif Audit Tata kelola Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02-MBU/2013 memperlihatkan bahwa *IT Governance* PT Angkasa Pura I (Persero) telah mencapai nilai maturitas sebesar 3.25 dari skala 5. Diperlukan inisiatif perbaikan Tata Kelola TI untuk meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero), dengan melakukan program-program pokok sebagai berikut:

1. Melakukan *Review* dan Evaluasi *Master Plan* TI 2014-2018.
2. Melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Layanan ICT.
3. Melaksanakan Pengembangan dan Implementasi terhadap SDM ICT, Manajemen Layanan dan *Support* ICT, serta Manajemen Keamanan Informasi (termasuk di dalamnya BCP/DRP).
4. Menerapkan standarisasi terhadap pengelolaan proyek ICT, pengembangan sistem (SDLC), serta pada *Data Center/Server Room* dan DRC.
5. Melakukan pengelolaan kinerja dan audit tata kelola ICT secara berkala.

PENGENDALIAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengendalian kebijakan strategis dilakukan dalam beberapa strategi kunci sebagai berikut.
 - a. Peran TI di PT Angkasa Pura I (Persero) tercantum dalam Keputusan Direksi No. 82 – 95 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi ICT.
 - b. Terkait perencanaan TI tercantum di dalam *Master Plan* TI 5 tahunan, dimana setiap tahun dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis Perseroan.
 - c. Investasi TI disusun sesuai periode penyusunan anggaran Perseroan setiap tahun.
 - d. Rencana pengembangan, baik jumlah maupun kompetensi SDM TI, disusun dan diusulkan setiap tahun.
 - e. TI mengikuti aturan/kebijakan manajemen risiko Perseroan.
 - f. Metodologi *project management* dan *System Development Life Cycle* (SDLC) diadaptasi untuk pengelolaan proyek serta penanganan kebutuhan dan identifikasi solusi, dengan tetap berpatokan pada *IT Master Plan*.

Information Technology Governance is the highest policy that regulates the principles of all IT processes. Therefore, the sufficiency of the IT Governance has to be reviewed to ensure its effectiveness in maintaining the quality of IT processes. The result of the review stated in the Executive Summary of Information Technology Governance Audit based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02-MBU/2013 shows that the IT Governance of PT Angkasa Pura I (Persero) reaches the score of maturity of 3.25 out of 5. This score shows the need of improvement initiatives for better IT Governance in order to enhance the management of IT in PT Angkasa Pura I (Persero). The initiatives consist of the following key programs:

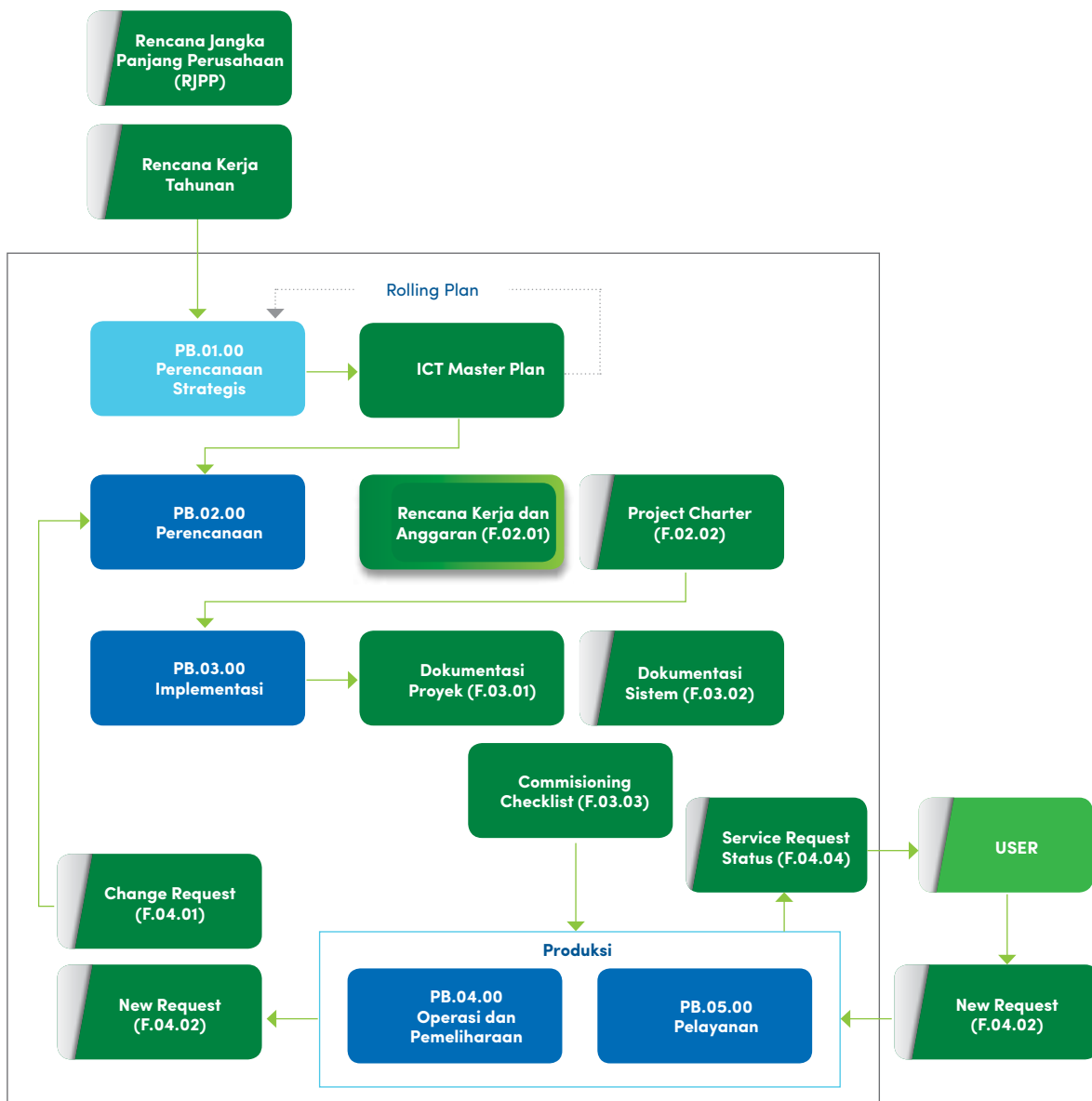
1. Reviewing and Evaluating the 2014-2018 IT Master Plan
2. Disseminating the ICT Policies and Services
3. Developing and implementing programs for ICT Human Resources, Service Management, and ICT Support and Information Security Management (including BCP/DRP).
4. Standardizing the management of ICT projects, system development (SDLC), and *Data Center/Server Room* and DRC.
5. Managing periodic performance and governance audit of ICT.

INFORMATION TECHNOLOGY CONTROL

1. Strategic policy control is carried out in the following key strategies.
 - a. The role of IT in PT Angkasa Pura I (Persero) is stated within the Resolution of the Company's Board of Directors No. 82 – 95 of 2016 about the ICT Structure of Organizations.
 - b. The IT implementation plan is stated in the 5-year IT Master Plan with annual evaluation that is conducted in concordance with the Company's business situation.
 - c. The IT investment is arranged based on the Company's Budget Arrangement every year.
 - d. The development plan, both for the number and the competence of IT Human Resources, is written and proposed every year.
 - e. IT policy complies with the Company's risk management rules/policy.
 - f. The methodology of the project management and System Development Life Cycle (SDLC) is adapted to govern Company's projects and to handle the need and identification solution, which is still referring to the IT Master Plan.

2. Pengendalian Kebijakan Operasional telah dicantumkan dalam prosedur mutu (SOP) ICT *life cycle* sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.

2. Operational Policy Control has been included in the standard operational procedure (SOP) of ICT *life cycle* as outlined in the following diagram.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal merupakan aspek penting dalam manajemen Perseroan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain menjamin semua kegiatan usaha Perseroan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu Perseroan menjaga aset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pada pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh unit Internal Audit, dilakukan penilaian dan pemantauan atas pengendalian Intern yang melekat pada lingkungan pengendalian. Pemeriksaan (audit) itu sendiri merupakan salah satu mata rantai dari pengendalian internal sebagai *layer* ketiga (*third layer of defence*) untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah berjalan dengan baik, sehingga hasil audit (materi temuan) dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok, salah satunya adalah Kelompok Pengendalian Internal yang masih lemah.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana Perseroan. Pengendalian keuangan adalah tahap rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi.

Sedangkan pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional Perseroan menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Perseroan mengidentifikasi operasi-operasi dan aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan teridentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasaran.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal pada PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebagai berikut.

Internal control system is an important aspect of the Company's management that is clean and safe. The internal control system is composed to achieve some objectives, for example to ensure that all activities in the Company comply with the prevailing regulation and law. Besides, an effective internal control system will help the Company to keep its assets, to ensure accurate finance report, to improve the Company's compliance to the prevailing regulation, and to reduce the probability of loss, deviance, and violation of prudence aspects.

The audit inspection by the Internal Audit assesses and monitors the internal control that is attached to the control area. The audit is one element of the internal control chain that acts as the third layer of defense to ensure that the internal control has been conducted properly. The result of the audit (materials of findings) is classified into some categories, one of which is the Internal Control Group that is still weak.

FINANCE AND OPERATIONAL CONTROL

The control of finance is an effort to ensure that the investment, cost allocation, and profits are properly operating in accordance with the Company's Plan. The finance control is an implemented finance plan stage. It is related to the feedback and the adjustment process that are required to make sure that the plan is well executed or to make a change to the existing plan as a reaction toward various changes of the operation area.

On the other hand, the Operational control is a placement process to guarantee that the operational activities are effective and efficient. The control of the Company's operational processes uses procedures and regulations that have been priorly formulated for relatively short period. The Company identifies operations and activities related to the important aspects to the identified area, in line with its policy, objective, and target.

The activities conducted to improve the internal control system in PT Angkasa Pura I (Persero) are as follows.

PENGAWASAN OLEH MANAJEMEN DAN KULTUR PENGENDALIAN

Hasil pemeriksaan (audit) dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai pucuk pimpinan (Manajemen). Melalui pelaksanaan audit internal, Manajemen dapat melakukan pengawasan dan penilaian atas seberapa baik pengendalian internal telah berlangsung, seberapa baik mitigasi risiko dilaksanakan dan seberapa baik prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan, yang mana hasil itu kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan dalam perencanaan arah kebijakan di tahun mendatang. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa RCG (*Risk, Control, and Good Corporate Governance*) telah diimplementasikan dan risiko telah dimitigasi dengan baik secara konsisten, maka kultur pengendalian yang terbangun dalam proses tersebut akan semakin baik.

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO

Hasil identifikasi dan penilaian risiko digunakan sebagai bahan Internal Audit dalam memulai tahapan perencanaan pada suatu penugasan untuk melaksanakan audit berbasis risiko (*risk based audit*). Semakin tinggi kematangan tingkat risiko (*risk maturity*) maka semakin baik bahan yang dimiliki pada based audit. Telah dilaksanakan pengukuran tingkat kematangan risiko (*risk maturity*) pada 13 (tiga belas) bandara di Tahun 2016, dimulai pada tanggal 26 September di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggung Balikpapan, Bandara Adi Soemarmo Surakarta dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta sampai dengan selesai.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMISAHAN FUNGSI OPERASIONAL

Kegiatan pengendalian dan pemisahan Fungsi Operasional telah tertampung oleh Struktur Organisasi PT Angkasa Pura I (Persero), sebagai contoh: antara fungsi pencatatan (*accounting*) dengan fungsi pembayaran (kasir), fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi penagih (*account receivable*) dilakukan oleh *dedicated person* dan/atau unit yang terpisah. Demikian pula dengan fungsi operasional kebandarudaraan dengan fungsi pengawasan kepatuhan aturan (*compliance*) serta fungsi pengawasan implementasi aturan keselamatan (*safety*) dilakukan oleh *dedicated person* dan/atau unit yang terpisah. pengendalian internal dilakukan oleh lingkungan pengendalian masing-masing dan diaudit oleh internal audit serta auditor eksternal.

SISTEM AKUNTANSI/KEUANGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sistem akuntansi berbasis komputerisasi telah menggunakan SAP, yang direncanakan terintegrasi sejak hilir hingga ke hulu, dimana untuk bidang *Marketing and BD* telah menggunakan REM yang nantinya terintegrasi dengan bidang operasi melalui sistem AMS (*Airport Management System*) dan/atau serta AOCC (*Airport Operation Control Centre/Operation Coordination Centre*). Sistem komunikasi

SUPERVISION BY THE CONTROL MANAGEMENT AND CULTURE

The audit result shall be reported to the Chairperson as the highest person in command (Management). Through the internal Audit, the management party can conduct supervision and assessment for the wellness of the existing internal control, the risk mitigation, and Good Corporate Governance implementation. The result of which shall be used as the revision and enhancement materials during the direction of the policy planning in the Following Year. When the evaluation result shows that the RCG (*Risk, Control, and Good Corporate Governance*) has been implemented well and the risk has been mitigated consistently, the built culture of the control in the process will also be better.

RISK IDENTIFICATION AND ASSESSMENT

The result of risk identification and assessment is used as the internal Audit material to start the planning stages of certain tasking of risk-based audit. The higher the risk maturity is, the materials of the risk-based audit will be better. In 2016, the risk maturity of 13 (thirteen) airports had been measured, started from September 26 at airports BDJ, BPN, SOC, and JOG, until finished.

CONTROL ACTIVITIES AND OPERATIONAL FUNCTION SEGREGATION

The control activities and Operational Function Segregation have been included in the Organizational Structure of PT Angkasa Pura I (Persero), for instance the accounting and cashier functions, and budgeting and account receivable functions that have been managed by dedicated person or separated units. The division also works for the aviation operational functions; the function of compliance supervision and the function of safety implementation supervision are conducted by dedicated person or separated units. The internal control is organized by each control area and audited by both internal and external auditors.

FINANCE, INFORMATION, AND COMMUNICATION SYSTEMS

The computer-based finance system has applied SAP that is planned on integrated basis from the bottom to up side of the management. The Marketing and BD section apply REM that is later integrated to the operational section through AMS (*Airport Management System*) and/or AOCC (*Airport Operation Control Centre/Operational Coordination Centre*). The customer communication system is opened through

dengan pelanggan telah dibuka melalui *Contact Center Bandara 172*. Untuk komunikasi internal dapat dilakukan secara *live* melalui *video conference*, rapat pimpinan (*rapim*), *week-end Improvement* program, media email *corporate*, web dan termasuk telepon. Pemeriksaan terhadap sistem yang berjalan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Internal Audit melalui audit operasional sesuai dengan jadwal Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN TINDAKAN KOREKSI PENYIMPANGAN

Adapun bentuk kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan pada Perseroan, yaitu:

1. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Unit Internal Audit melalui audit operasional sesuai dengan jadwal Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Melalui audit operasional rutin, Unit Internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap seluruh lini/seluruh proses bisnis yang ada di PT Angkasa Pura I (Persero), dan memberikan rekomendasi berupa tindakan koreksi apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisasi bahkan meniadakan dampak penyimpangan dan besaran kerugian.
2. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan juga dilaksanakan secara khusus terhadap suatu objek audit atau suatu permasalahan, atau untuk memenuhi tujuan tertentu sesuai perintah tugas. Hal ini dilakukan melalui penugasan pelaksanaan Audit Khusus.

KEGIATAN PENGENDALIAN INTERNAL

Kegiatan pengendalian dimulai dari lingkungan pengendalian sebagai *layer* pertama, melalui budaya SATU (*Sinergi, Adaptif, Terpercaya, dan Unggul*), pemberlakuan GCG (*Good Corporate Governance*) yang diatur dalam buku saku *code of conduct* yang telah disosialisasikan dan dibagikan kepada seluruh karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) yang disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas, maka lingkungan pengendalian yang sudah ada dan sesuai dengan kerangka the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). *Layer* Kedua adalah *management* risiko, dimana risiko dipetakan dan dimitigasi. Pada *layer* ketiga adalah pemantauan/pemeriksaan melalui audit Internal yang dilakukan oleh internal audit, yang berbasis risiko (*risk based audit*).

PEMISAHAN FUNGSI (SEGREGATION OF DUTIES)

Pemisahan fungsi operasional telah tertampung oleh struktur organisasi PT Angkasa Pura I (Persero), sebagai contoh: antara fungsi pencatatan (*accounting*) dengan fungsi pembayaran (*kasir*), fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi penagihan (*account receivable*) dilakukan oleh *dedicated person* dimana pada kantor cabang menjadi *section* baru yang terpisah. Demikian pula dengan fungsi operasional kebandarudaraan

call center 172. Internal communication is carried out live through video conference, leaders meeting, weekend improvement program, media email corporate, website, and telephone. The checking of the existing systems are maintained routinely every year by Internal Audit through operational audit according to the schedule of Annual Inspection Working Program (PKPT).

REVIEWING AND RECTIFYING DEVIATION

The activities to review and rectify the deviation in the Company are managed as follows:

1. The review and rectification of deviation are carried out routinely every year by Internal Audit through operational audit according to the schedule of Annual Inspection Working Program (PKPT). Through the routine operational audit scheme, the Internal Audit carries out an inspection to all business processes of PT Angkasa Pura I (Persero) and provides recommendation on what correction shall be done to the processes to minimize or even eliminate the impact of the deviation and loss quantity.
2. The review and rectification of deviation are also carried out in special case to an audit object or problem, or to achieve particular objective based on the task of the command. This is conducted with a command to carry out a Special Audit.

INTERNAL CONTROL ACTIVITIES

The control activities are started from the area of control as the first layer through the culture of SATU (*Sinergy (Synergy), Adaptif (Adaptive), Terpercaya (Reliable)* , and *Unggul (Prominent)*) and GCG (*Good Corporate Governance*) that is regulated within the pocket book of code of conduct that has been disseminated and given to all employees of PT Angkasa Pura I (Persero), along with the signatory of the Integrity Pact. Therefore, the existing control environment has been in accordance to the COSO framework. The second layer of control is risk management that is mapped and mitigated. The third layer of control is review/assessment through Internal Audit that is conducted using risk-based internal audit.

SEGREGATION OF DUTIES

The control activities and Operational Function Segregation have been included in the Organizational Structure of PT Angkasa Pura I (Persero), for instance the accounting and cashier functions, and budgeting and account receivable functions that have been managed by dedicated person. In the branch office, these functions were organized in new separated sections. The segregation also works for the aviation operational functions. The function of compliance

dengan fungsi pengawasan kepatuhan aturan (*compliance*) serta fungsi pengawasan implementasi aturan keselamatan (*safety*) dilakukan oleh *dedicated person/section* yang terpisah. Pada unit internal audit fungsi pengawasan teknologi informasi (TI) telah berpisah dari *Technical Audit Departement Head* menjadi *IT Audit Departement Head*.

PERBAIKAN KUALITAS AUDIT

Perbaikan kualitas audit melalui kepesertaan dalam berbagai seminar, rapat kerja, *forum round table discussion group* yang diadakan oleh ikatan profesi internal audit indonesia dan pengembangan kompetensi SDM. Seluruh auditor telah memiliki Sertifikasi Internal Auditor dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dengan gelar QIA (*Qualified Internal Auditor*), namun saat terjadi perubahan pemangku jabatan (mutasi/promosi) maka terdapat 8 (delapan) personil baru yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dalam rangka meraih sertifikasi QIA, yaitu atas nama. Tris Gunarso (*HCGA Audit Department Head*), Yan C. Daulima (*IT Audit Department Head*), Yaka Sulista W. (*Technical Audit Department Head*), Jarot Handoko (*Marketing and BD Audit Department Head*), Junius F. Walenta (*Finance Audit Department Head*), Taufik Ismail (*Technical Auditor*), I Made Susilayasa (*Marketing and BD Auditor*) dan Tuti Wianti (*HCGA Auditor*).

KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO)

Pengendalian Internal yang dilaksanakan pada PT Angkasa Pura I (Persero) telah sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO, yang terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu:

1. Lingkungan pengendalian: melalui budaya SATU (Sinergi, Adaptif, Terpercaya dan Unggul), pemberlakuan GCG (*Good Corporate Governance*) yang diatur dalam buku saku *code of conduct* yang telah disosialisasikan dan dibagikan kepada seluruh karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) yang disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas, maka lingkungan pengendalian yang sudah ada telah sesuai dengan kerangka COSO.
2. Penilaian Risiko: pada PT Angkasa Pura I (Persero) telah tersedia unit khusus yang menangani penilaian risiko, *profiling* risiko dan *management* risiko. Semua risiko diregister oleh *risk owner* dan direncanakan mitigasi risikonya, sebagaimana tercantum dalam *risk profile*. *Risk profil* dijadikan bahan oleh Internal Audit untuk melakukan *risk based audit*. Rencana mitigasi yang memerlukan biaya dan diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) didasari oleh risiko apa yang mendasari. Hal ini telah sesuai dengan prinsip COSO.

supervision and the function of safety rule implementation are carried out by dedicated person or separated sections. In the Internal Audit unit, the function of IT surveillance has been separated from the Technical Audit Dept. Head and becoming the IT Audit Dept. Head.

IMPROVEMENT OF AUDIT QUALITY

The efforts to improve Audit quality is exerted with various seminars, working meetings, and round table discussion groups that are organized by the association of internal audit of Indonesia, and all other human resources competence development programs. All auditors have acquired internal auditor certificates from the Foundation of Internal Audit Education (YPIA) with QIA (Qualified Internal Auditor) degree. However, with the current official reshuffling (mutation/promotion), there are 8 (eight) new personnel who are currently pursuing the QIA certification: Tris Gunarso (*HCGA Audit DePTHead*), Yan C. Daulima (*IT Audit Department Head*), Yaka Sulista W. (*Technical Audit Department Head*), Jarot Handoko (*Marketing and BD Audit Department Head*), Junius F. Walenta (*Finance Audit Department Head*), Taufik Ismail (*Technical Auditor*), I Made Susilayasa (*Marketing and BD Auditor*) and Tuti Wianti (*HCGA Auditor*).

CONCORDANCE OF INTERNAL CONTROL WITH COSO FRAMEWORK

The internal control carried out in PT Angkasa Pura I (Persero) has complied with the COSO internal control framework, which consist of 5 (five) components:

1. The area of control: through the culture of SATU (*Sinergy* (Synergy), *Adaptif* (Adaptive), *Terpercaya* (Reliable) , and *Unggul* (Prominent)) and GCG (*Good Corporate Governance*) that is regulated within the pocket book of code of conduct that has been disseminated and given to all employees of PT Angkasa Pura I (Persero), along with the signatory of the Integrity Pact. Therefore, the existing control environment has been in accordance to the COSO framework.
2. Risk Assessment: PT Angkasa Pura I (Persero) has created a special unit that takes care of the risk assessment, risk profiling, and risk management. All identified risks are registered by the risk owner and their risk mitigations are planned ahead based on what stated in the risk profile. Risk profile is the material ofr the Internal Audit to conduct risk-based audit. The mitigation plans that require certain cost and are proposed in the Budget Working Plan (RKA) shall be based on its related risk. This procedure is based on COSO principle.

3. **Aktivitas Pengendalian:** pada PT Angkasa Pura I (Persero) telah dilakukan sesuai dengan prinsip COSO, yaitu telah dilakukan pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahunan, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta dilakukan pemeriksaan kinerja secara independen, oleh Unit Internal Audit maupun eksternal Audit (Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP).
 4. **Informasi dan Komunikasi:** pada PT Angkasa Pura I (Persero) telah sesuai dengan prinsip COSO ini melalui raker, rakor, sosialisasi, *email corporate*, *web corporate*, intranet, HCIS (*Human Capital Information System*), *electronic library*, dan media lain yang telah disediakan. Pada saat audit oleh Internal Audit pun, dilakukan tahapan informasi dan komunikasi antara auditor dan *auditee*.
 5. **Pemantauan:** prinsip COSO ini dilakukan melalui *performance check* oleh pembina teknis, audit internal oleh audit oleh eksternal (BPK, BPKP, KAP).
3. **Control Activities:** of PT Angkasa Pura I (Persero) has complied to COSO principles; there has been sufficient function segregation, there has been appropriate authorization for its transactions and activities, documents and notes are created appropriately based on the Annual Audited Financial Report, there has been physical control of the assets and its record, and there has been independent performance assessment either by Internal Audit or External Audit unit (Public Accounting Firm/KAP, Finance Auditor Body/BPK, Finance and Development Supervisory Agency/BPKP).
 4. **Information and Communication:** of PT Angkasa Pura I (Persero) has complied to COSO principles as shown in its working meeting, coordination meeting, dissemination events, corporate e-mail, corporate website, intranet, HCIS (*Human Capital Information System*), electronic library, and other available media. Even during the audit by Internal Audit, the process involves sharing of information and communication between the auditor and auditee.
 5. **Monitoring:** of the COSO principles is conducted by doing performance check by the technical supervisor, the internal audit, or external audit (BPK, BPKP, KAP).

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi efektivitas sistem pengendalian dilaksanakan melalui audit, baik secara internal oleh Internal Audit, maupun secara eksternal oleh eksternal Auditor yaitu BPK, BPKP, KAP. Semua evaluasi secara rutin dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada Manajemen sebagai bahan perbaikan. Sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh Perseroan sudah efektif. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk selalu melakukan evaluasi secara berkelanjutan dalam menjamin penerapan sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif.

EVALUATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

The evaluation of the internal control system effectiveness is carried out through an audit process, either internally by the Internal Audit or externally by the external Auditors; BPK, BPKP, or KAP. All of the routine evaluation are conducted annually and reported to the Management as materials for improvement. The internal control system of the Company is effective. The Company commits to conduct continuous evaluation to guarantee the effectiveness of the internal control system implementation.



Perkara Penting

Legal Issues

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Beberapa perkara hukum yang dihadapi PT Angkasa Pura I (Persero) selama tahun 2016, sebagai berikut.

LEGAL ISSUES RELATED TO PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Some legal issues that PT Angkasa Pura I (Persero) have to deal with in 2016 are as follows.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi PT Angkasa Pura I (Persero) / Table of Legal Issues Related to PT Angkasa Pura I (Persero)

No.	Pokok Perkara Merits of Case	Status Penyelesaian Status of Resolution	Pengaruh terhadap Perseroan Impact to the Company	Sanksi Administrasi Administration Sanctions
1.	Gugatan dari PT BNI Syariah (BNI Syariah) kepada PT Angkasa Pura I (Persero) atas tidak dilaksanakannya Pembayaran sesuai dengan <i>Standing Instruction</i> . / The lawsuit from PT BNI Syariah (BNI Syariah) to PT Angkasa Pura I Persero for non-performance in accordance with the Payment Standing Instruction.	<ol style="list-style-type: none"> Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri dan saat ini sedang berproses di Mahkamah Agung. Melakukan upaya perdamaian dengan BNI Syariah. <ol style="list-style-type: none"> The Memorandum of Appeal and the Contra-Memorandum of Appeal have been delivered through District Court and are being processed in the Supreme Court. Exerting peaceful settlements with BNI Syariah. 	Belum berdampak karena masih dalam proses hukum. / There is no impact yet because it is still being processed in the court.	Belum terdapat sanksi. / There is no sanction yet.
2.	Hasil Pemeriksaan Pajak oleh KPP BUMN Ditjen Pajak ditetapkan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) terdapat kekurangan bayar pajak PPN Internasional melalui SKPKB Nomor 00044/207/03/051/07 tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp 98.687.947,-. / Based on the Tax Auditing by KPP BUMN of Directorate General of Taxes, through the letter of SKPKB Number 00044/207/03/051/07 on March 22, 2007, it is concluded that PT Angkasa Pura I (Persero) commits underpayment of the International VAT in amount of Rp98.687.947,-.	Dalam proses pengajuan banding pajak. / In the process of tax appealing.	Tidak ada. / There is no impact.	Tidak ada sanksi, hanya berupa Peringatan. / There is no sanction, only a Warning.
3.	Hasil Pemeriksaan Pajak oleh KPP BUMN Ditjen Pajak ditetapkan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) terdapat kekurangan bayar pajak PPN Internasional melalui SKPKB No.00115/207/06/051/08 tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 100.667.387,-. / Based on the Tax Auditing by KPP BUMN of Directorate General of Taxes, through the letter of SKPKB No.00115/207/06/051/08 on December 1, 2008, it is concluded that PT Angkasa Pura I (Persero) commits underpayment of the International VAT in amount of Rp100,667,387,-.	Dalam proses pengajuan banding pajak. / In the process of tax appealing.	Tidak ada. / There is no impact.	Tidak ada sanksi, hanya berupa Peringatan. / There is no sanction, only a Warning.

No.	Pokok Perkara Merits of Case	Status Penyelesaian Status of Resolution	Pengaruh terhadap Perseroan Impact to the Company	Sanksi Administrasi Administration Sanctions
4.	PT Angkasa Pura I (Persero) menerima gugatan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atas dugaan praktek monopoli PT Angkasa Pura I (Persero) pada jasa <i>Ground handling</i> pesawat charter di Bandar Udara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali. / PT Angkasa Pura I (Persero) faces a lawsuit from the Commission for the Supervision of Business Competition over the suspicion of monopoly on the ground handling of chartered plane services at I Gusti Ngurah Rai International Airport, Bali.	Telah dikeluarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 728K/PDT.SUS-KPPU/2015 yang menyatakan Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Execujet Indonesia. / The Decision on Appeal of the Supreme Court of Indonesia Number: 728K/PDT.SUS-KPPU/2015 that Rejects the petition for Appeal from the Appellant, PT Execujet Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> Addendum kontrak dengan menghilangkan eksklusivitas yang semula ada pada EJI. Setelah tanggal 28 Januari 2017 pengelolaan Terminal GAT akan dilaksanakan secara swakelola oleh PT AngkasaPura I (Persero). <ol style="list-style-type: none"> An addendum of contract by removing the exclusive privileges that priorly belong to EJI. After January 28, 2017, the management of GAT Terminal shall be self-managed by PT Angkasa Pura I (Persero). 	Apabila tidak menghentikan hak eksklusivitas untuk EJI dan membuka peluang usaha bagi pelaku usaha lain, maka dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Putusan Kasasi <i>quo</i> , maka PT AngkasaPura I (Persero) tidak mendapat sanksi. In the case when the exclusive privilege of EJI is not removed and new opportunity for other businesses is not provided, the Company is subjected to a fine in amount of Rp5,000,000,000,-. The Decision on Appeal has been taken, there is no sanction subjected to PT Angkasa Pura I (Persero).
5.	Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik PT Angkasa Pura I (Persero). / Problem Resolution on the Land Property of PT Angkasa Pura I (Persero).			
	<ol style="list-style-type: none"> Gugatan Ketua Persekutuan Adat Negeri Hattu (sdr Markus Hehalatu) di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.AB. A Lawsuit filed by the Head of Negeri Hattu Adat Union (Mr. Markus Hehalatu) in Ambon District Court, Number 11/Pdt.G/2010/PN.AB. 	Sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37 PK/PDT/2016 yang berisi pada pokoknya Menolak Permohonan PK dari Pemohon PK Markus Hehalatu. / The Decision on Petition for Reconsideration of the Supreme Court Number 37 PK/PDT/2016 has resulted a legal decree that Rejects the Petition on Reconsideration from the Petitioner of Reconsideration, Markus Hehalatu.	PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Tergugat 2 (T2) tidak berdampak mengingat Putusan PK Mahkamah Agung RI menolak permohonan PK Markus Hehalatu sebagai Pemohon PK. / PT Angkasa Pura I (Persero), acting as the Defendant 2 (T2), does not get any impact considering the Decision on Petition for Reconsideration of the Supreme Court that rejects the Petition on Reconsideration by Markus Hehalatu who acts as the Petitioner of Reconsideration.	Tidak ada. / There is no impact.

No.	Pokok Perkara Merits of Case	Status Penyelesaian Status of Resolution	Pengaruh terhadap Perseroan Impact to the Company	Sanksi Administrasi Administration Sanctions
	<p>b. Gugatan Kepala Pemerintah Negeri Laha (sdr Hi. Said Laturua) di Pengadilan Negeri Ambon Nomor142/Pdt.G/2012/PN.AB.</p> <p>b. A Lawsuit filed by Negeri Laha Head of Government (Mr. Hi Said Laturua) in Ambon District Court, Number 142/Pdt.G/2012/PN.AB.</p>	<p>Terhadap perkara <i>aquo</i> telah dikeluarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor1212 K/PDT/2014 yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor35/PDT/2013/PTMAL. / The related case has been provided with the Decision on Appeal of Supreme Court of Indonesia Number 1212 K/PDT/2014 that in essence Annulling the High Court Decision Number 35/PDT/2013/PTMAL.</p>	<p>Akibat dikeluarkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI kedudukan PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Tergugat 3 (T3) tidak dikenakan sanksi. / In the effect of the issuance of the Decision on Appeal of Supreme Court of Indonesia, PT Angkasa Pura I (Persero) as the Defendant 3 (T3) is not subjected to any sanction.</p>	<p>Tidak ada. / There is no impact.</p>
	<p>c. Permohonan Realisasi Ganti Rugi berdasarkan Putusan Kasasi MA.RI Nomor 2201 k/Pdt/2007 yang diajukan oleh Julius Tipawael (warga negeri Hattu).</p> <p>c. Petition on Claim of Indemnification based on the Decision on Appeal of Supreme Court of Indonesia Number 2201 k/Pdt/2007 that is claimed by Julius Tipawael (a resident of Negeri Hattu).</p>	<p>PT AngkasaPura I (Persero) telah memenuhi Berita AcaraTegoran (<i>aanmaning</i>) pada tanggal 11 Agustus 2016 dan dinyatakan PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan tidak keberatan mengikuti putusan PK. / PT Angkasa Pura I (Persero) had fulfilled the Minutes of Reprimand (<i>Aanmaning</i>) on August 11, 2016 and PT Angkasa Pura I (Persero) declared its preparedness to follow the Decision of the Reconsideration.</p>	<p>PT AngkasaPura I (Persero) akan merealisasikan pembayaran ganti rugi setelah mendapat kepastian hukum bahwa obyek perkara <i>aquo</i> tidak terkait perkara yang lain. / PT Angkasa Pura I (Persero) will perform the indemnification after getting the legal certainty that the a quo lawsuit does not have any correlation with any other substance.</p>	<p>Pembayaran ganti rugi senilai Rp. 1.260.000.000,- / Indemnification payment in amount of Rp 1,260,000,000,-.</p>
	<p>d. Gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nicolaus Tipawael.</p> <p>d. A Lawsuit on unlawful act filed by Nicolaus Tipawael.</p>	<p>Gugatan ditolak. / The lawsuit is rejected.</p>	<p>Tidak berdampak. / There is no impact.</p>	<p>Tidak ada sanksi. / There is no sanction.</p>
	<p>e. Somasi Yanuar Faisal Mewar Ref. SuratSomasi I Nomor 01/L&P/Srt.K/IX/15 tanggal 26 September 2015, Somasi II Nomor 08/L&P/Srt.K/II/16 tanggal 22 Februari 2016.</p> <p>e. A Legal Warning by Yanuar Faisal Mewar, Ref. Warning Letter I Number 01/L&P/Srt.K/IX/15 on September 26, 2015. Warning Letter II Number 08/L&P/Srt.K/IX/16 on February 22, 2016.</p>	<p>Dalam proses koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. / In the coordination process with the Directorate General of Civil Aviation.</p>	<p>PT Angkasa Pura I (Persero) masih mencari latar belakang atas permasalahan yang disomasi. / PT Angkasa Pura I (Persero) is still investigating the background of the merits of case.</p>	<p>Belum terdapat sanksi. / There is no sanction yet.</p>
	<p>f. Permasalahan tanah Barbara Hunila. Somasi oleh Kuasa Hukum Barbara Hunila yang menyatakan belum mendapat ganti rugi atas dipakainya tanah dati seluas 1.052 m² untuk Bandara Pattimura Ambon.</p> <p>f. The case of property with Barbara Hunila Letter of Demand by the legal representative of Barbara Hunila who claimed the non-performance of indemnification over the 1.052 m²-wide land, that was used for Pattimura Airport, Ambon.</p>	<p>Telah dijawab somasinya yang pada pokoknya berdasarkan BASTO Nomor AU/4973/UM.1188/95 semua utang piutang Bandara Pattimura Ambon sampai tanggal 20 September 1995 menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. / The letter of demand had been answered in the essence that based on BASTO Number AU/4973/UM.1188/95, all of the accounts payable of Pattimura Airport dated until September 20, 1995 became the liability of Directorate General of Civil Aviation.</p>	<p>Tidak berdampak secara langsung. / There is no direct impact.</p>	<p>Tidak ada sanksi. / There is no sanction.</p>

No.	Pokok Perkara Merits of Case	Status Penyelesaian Status of Resolution	Pengaruh terhadap Perseroan Impact to the Company	Sanksi Administrasi Administration Sanctions
	<p>g. Gugatan Yosias Tipawael & Gustaf Tipawael (TIPAWAEL CS) Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Amb. Sengketa kepemilikan tanah atas sebagian dari Dusun Dati Hatuhuru Besar.</p> <p>g. A Lawsuit filed Yosias Tipawael and Gustaf Tipawael (TIPAWAEL CS) Number 148/Pdt.G/2015/PN.Amb. Land ownership dispute over a part of the land in Dati Hatuhuru Besar Sub-village.</p>	<p>Masih dalam Proses hukum yaitu Permohonan Kasasi oleh Pihak Yosias & Gustaf Tipawael atas Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 46/PDT/2016/PTAMB. / The case is still undergoing legal process for the Petition of Appeal by Yosias and Gustaf Tipawael against the Decision of High Court of Maluku Number 46/PDT/2016/PTAMB.</p>	<p>Tidak berdampak hukum sampai dengan adanya Putusan Hukum yang berkekuatan tetap (inkrach). / There is no legal impact before the Permanent Legal Force (inkrach) is taken.</p>	<p>Tidak ada sanksi. / There is no sanction.</p>
	<p>h. Penggunaan Lahan Milik PT Angkasa Pura I (Persero) seluas 502 m² di Bandar Udara Selaparang – Mataram oleh Pemerintah Kota Mataram untuk Pembangunan Jalan Dakota.</p> <p>h. The Land Use on the 502 m² wide property of PT Angkasa Pura I (Persero) in Selaparang Airport, Mataram by the City Government of Mataram for the Construction of Dakota Street.</p>	<p>Pemerintah Kota Mataram merasa keberatan atas usulan sewa dari PT Angkasa Pura I (Persero). Ganti kerugian yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram sesuai besaran saat pembebasan lahan Rp. 492.000,-/m². / The City Government of Mataram submits an objection for the land lease proposal from PT Angkasa Pura I (Persero). The indemnification proposed by the City Government of Mataram is in accordance with the land liberation cost of Rp 492,000,-/m².</p>	<p>Beralihnya kepemilikan aset. / Transfer of asset ownership.</p>	<p>Tidak ada sanksi. / There is no sanction.</p>
6.	<p>Penyelesaian permasalahan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, DIY. Resolution of land procurement for the construction of the New Airport of Yogyakarta in Kulon Progo, DIY.</p>			
	<p>a. Proses Persidangan atas Keberatan Warga</p> <p>a. In the court process for the submission of objection by the citizens</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terdapat putusan Pengadilan Negeri Wates dengan total nilai Rp14.191.666.000,- - Saat ini sedang dilakukan upaya kasasi sebanyak 100 permohonan. - Sebanyak 40 perkara telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari PT AngkasaPura I (Persero) - There is a decision of district court of Wates in amount of Rp14,191,666,000,- - Currently, there are 100 petitions of appeal. - 40 cases have attained Decisions of Supreme Court; granting the appeals from PT Angkasa Pura I (Persero) 	<p>Tidak berdampak terhadap perusahaan. / There is no impact to the Company.</p>	<p>Tidak ada sanksi. / There is no sanction.</p>

No.	Pokok Perkara Merits of Case	Status Penyelesaian Status of Resolution	Pengaruh terhadap Perseroan Impact to the Company	Sanksi Administrasi Administration Sanctions
	b. Proses Persidangan Gugatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh para penggarap tambak di atas tanah Paku Alam Ground (PAG) b. The court process over Unlawful Act Lawsuit (PMH) filed by the brackishwater pond farmers on the Paku Alam Ground (PAG).	<ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 41 gugatan PMH oleh para penggarap tambak dengan total nilai Rp43.123.118.000,- - Sebanyak 2 gugatan telah dicabut - Sebanyak 39 gugatan telah mendapat putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Wates tidak berwenang mengadili perkara. - 41 PMH lawsuits by the brackishwater pond farmers in amount of Rp43,123,118,000,- - 2 lawsuits are withdrawn - 39 lawsuits have attained preliminary order that state that the District Court of Wates does not have any authority to adjudicate the case. 	Tidak berdampak terhadap perusahaan. / There is no impact to the Company.	Tidak ada sanksi. / There is no sanction.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Selama 2016, Perkara hukum yang dihadapi entitas anak sebagai berikut.

LEGAL ISSUES RELATED TO SUBSIDIARIES

The legal issues related to the subsidiaries in the 2016 are as follows.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Entitas Anak / Table of Legal Issues Related to Subsidiaries

Pokok Perkara Merits of Case	Status Penyelesaian Status of Resolution	Pengaruh terhadap Perusahaan Impact to the Company	Sanksi Administrasi Administration Sanctions
Penyelidikan Nomor 24/Lid-L/VIII/2015 terkait Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik Makassar dalam Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. / Investigation Number 24/Lid-L/VIII/2015 related to the Suspicion of Violation of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopoly and Unhealthy Business Competition committed by PT Angkasa Pura Logistics Makassar in Civil Aviation Services in the Cargo Terminal of Sultan Hasanuddin Airport Makassar.	Dalam proses klarifikasi dan konfirmasi dengan KPPU. / In the clarification and confirmation process with KPPU.	Berdampak pada bisnis jasa terkait Perseroan. / There is an impact to the service of the business related to the Company.	Belum terdapat sanksi. / There is no sanction yet.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama 2016, tidak ada perkara hukum yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi.

LEGAL ISSUES RELATED TO THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

There is no legal issues related to the Company's Board of Commissioners and Directors in 2016.

Informasi Pemegang Saham Pengendali

Shareholders

Pemegang Saham utama Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki 100% saham Perseroan. Dengan demikian Perseroan tidak mempunyai jenis pemegang saham pengendali utama.

The Principal Shareholder of the Company is the Government of the Republic of Indonesia that holds 100% of the Company's stocks. Therefore, the Company does not have controlling shareholders.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access of Information and Company's Data

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Perseroan antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut.

MEDIA ELEKTRONIK

Media elektronik, seperti *website* Perseroan (www.ap1.co.id) untuk menyampaikan informasi yang relevan, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Dalam situs tersebut juga telah disediakan berbagai laporan dan publikasi lainnya yang dengan mudah dapat diunduh oleh *stakeholders*. Informasi-informasi yang disajikan dalam *website* senantiasa diperbaharui secara berkala. Perseroan juga memberikan informasi kepada *stakeholders* melalui twitter @AP_airports, instagram @AP_airports, facebook PT Angkasa Pura I (Persero), dan melalui youtube PT Angkasa Pura I (Persero)

Selain itu, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui *email* Perseroan (humas@ap1.co.id). *Stakeholders* yang ingin mendapatkan informasi Perseroan secara berkala melalui *email* tersebut dapat mendaftarkan identitas dan alamat *email* pada *mailing list* melalui situs Perseroan tersebut.

PT Angkasa Pura I (Persero) has provided information to the stakeholders for them to exercise their rights. The dissemination of the Company's information is carried out, for instance, by using the media as mentioned below.

ELECTRONIC MEDIA

The electronic media such as the Company's website (www.ap1.co.id) is used to inform relevant information, including Finance Report and Annual Report. In the website various reports and other publications can be easily downloaded by the stakeholders. The information presented in the website is updated regularly. The company also provides information to the stakeholders through twitter @AP_airports, instagram @AP_airports, facebook PT Angkasa Pura I (Persero), and YouTube PT Angkasa Pura I (Persero)

Besides, the Company's information is also disseminated through the Company's e-mail (humas@ap1.co.id). The stakeholders who want to get the Company's information regularly through e-mail can register their identity and e-mail addresses in the mailing list available in the Company's website.

BULETIN

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menerbitkan Majalah Internal Angkasa Pura Magazine Tahun 2016 sebanyak 6 Edisi. Pembuatan majalah internal perusahaan Angkasa Pura Magazine telah terbit untuk edisi I Tahun 2016. Di Bulan Februari 2016, Majalah Angkasa Pura meraih *Silver Winner Tahune Best State-Owned Enterprise Inhouse Magazine - Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2016* oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS).

PRESS RELEASE

Press release kepada media massa. Berikut daftar press release PT Angkasa Pura I (Persero) selama tahun 2016.

BULLETIN

There are 6 publications of Internal Magazine of Angkasa Pura Magazine in 2016. The internal company Magazine, Angkasa Pura Magazine I Edition of 2016 has been published. In February 2016, Angkasa Pura Magazine became the Silver Winner Tahune for the Best State-Owned Enterprise In-house Magazine in Indonesia In-house Magazine Award (InMA) 2016, organized by Press Company Union (SPS).

PRESS RELEASE

Press release in the mass media below is the list of PT Angkasa Pura I (Persero) Press Release in 2016.

Tabel Date Press Release / Table of Press Release List

No	Tanggal Date	Judul Press Release Title of Press Release	
1	February 13, 2016	Adakan Lomba Lari di Bandara El Tari, PT Angkasa Pura I (Persero) Promosikan Potensi Wisata Nusa Tenggara Timur	Adakan Lomba Lari di Bandara El Tari, Angkasa Pura I Promosikan Potensi Wisata Nusa Tenggara Timur
2	March 2, 2016	Bandara Sam Ratulangi Manado Siap Tunjang Pariwisata Sulut	Bandara Sam Ratulangi Manado Siap Tunjang Pariwisata Sulut
3	March 23, 2016	Pesawat Angkasa Air Kecelakaan di Bandara Adi Soemarmo, Lima Orang Tewas	Pesawat Angkasa Air Kecelakaan di Bandara Adi Soemarmo, Lima Orang Tewas
4	May 2016	PT Angkasa Pura I (Persero) Laksanakan Pemilihan Duta Bandara 2016	Angkasa Pura I Laksanakan Pemilihan Duta Bandara 2016
5	June 3, 2016	Duta Bandara 2016 Resmi Dikukuhkan Hari Ini	Duta Bandara 2016 Resmi Dikukuhkan Hari Ini
6	June 13, 2016	Tingkatkan Pelayanan, PT Angkasa Pura I (Persero) Luncurkan <i>Contact Center</i> Bandara 172 / Released Airport Contact Center 172)	Tingkatkan Pelayanan, Angkasa Pura I Luncurkan Contact Center Bandara 172
7	June 13, 2016	PT Angkasa Pura I (Persero) Gelar Kick-off Meeting untuk Gagas Pembangunan Museum Bandara Kemayoran /	Angkasa Pura I Gelar Kick-off Meeting untuk Gagas Pembangunan Museum Bandara Kemayoran
8	June 13, 2016	PT Angkasa Pura I (Persero) Antisipasi Mudik Lebaran 2016 /	Angkasa Pura I Antisipasi Mudik Lebaran 2016
9	June 23, 2016	Kembangkan Lima Bandara, PT Angkasa Pura I (Persero) Akan	Kembangkan Lima Bandara, Angkasa Pura I Akan Terbitkan Obligasi dan Cari Pinjaman Bank/Non Bank
10	August 17, 2016	Angkasa Pura I Meriahkan Peringatan HUT ke-71 RI di Sulawesi Tenggara	Angkasa Pura I Meriahkan Peringatan HUT ke-71 RI di Sulawesi Tenggara
11	August 18, 2016	PT Angkasa Pura I (Persero) Peroleh Pendanaan Sindikasi Rp4 Triliun	Angkasa Pura I Peroleh Pendanaan Sindikasi Rp4 Triliun
12	September 6, 2016	Angkasa Pura I Dimandatkan Jadi Pengelola Terminal Kargo dan Pos Internasional di Bandara Juanda	Angkasa Pura I Dimandatkan Jadi Pengelola Terminal Kargo dan Pos Internasional di Bandara Juanda
13	September 19, 2016	10 Bandara PT Angkasa Pura I (Persero) Raih Penghargaan Pelayanan Prima 2016	10 Bandara Angkasa Pura I Raih Penghargaan Pelayanan Prima 2016
14	September 27, 2016	PT Angkasa Pura I (Persero) Raih Juara III <i>Annual Report Award</i> 2016	Angkasa Pura I Raih Juara III Annual Report Award 2016
15	October 2, 2016	PT Angkasa Pura I (Persero), KAI, dan Adhi Karya Akan Kembangkan Kereta Bandara di Solo	Angkasa Pura I, KAI, dan Adhi Karya Akan Kembangkan Kereta Bandara di Solo
16	October 9, 2016	PT Angkasa Pura I (Persero) Resmikan 6 Rute Penerbangan Baru Lion Air di Solo	PT Angkasa Pura I (Persero) Resmikan 6 Rute Penerbangan Baru Lion Air di Solo
17	October 18, 2016	Uji Kemampuan Personel, Bandara I Gusti Ngurah Rai Gelar Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD)	Uji Kemampuan Personel, Bandara I Gusti Ngurah Rai Gelar Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD)

No	Tanggal Date	Judul Press Release Title of Press Release	
18	October 19, 2016	Angkasa Pura I Gelar Jambore Nasional <i>Airport Fire Fighting and Rescue</i>	<i>Angkasa Pura I Gelar Jambore Nasional Airport Fire Fighting and Rescue (Angkasa Pura I Holds National Gathering of Airport Fire Fighting and Rescue)</i>
19	November 14, 2016	Bandara Adi Soemarmo Raih Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016	Bandara Adi Soemarmo Raih Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 (Adi Soemarmo Airport Receives National Awards for Healthy Harbour and Airport 2016)
20	November 30, 2016	Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara Terbaik Indonesia 2016	Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara Terbaik Indonesia 2016 (Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport, Balikpapan: Indonesia's Best Airport 2016)
21	December 7, 2016	Dukung Perkembangan Pariwisata Jawa Tengah, Angkasa Pura I Gelar <i>Focus Group Discussion</i> Pariwisata Di Semarang	Dukung Perkembangan Pariwisata Jawa Tengah, Angkasa Pura I Gelar Focus Group Discussion Pariwisata Di Semarang (Supporting Central Java Tourism, Angkasa Pura I Holds a Focus Group Discussion on Tourism in Semarang)
22	December 14, 2016	Angkasa Pura I Dukung Fokus Pengembangan Wisata Keagamaan di Kalimantan Selatan Melalui <i>Collaborative Destination Development</i>	<i>Angkasa Pura I Dukung Fokus Pengembangan Wisata Keagamaan di Kalimantan Selatan Melalui Collaborative Destination Development (Angkasa Pura I Supports the Development of Religious Tourism in South Kalimantan through Collaborative Destination Development)</i>

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PT Angkasa Pura I (Persero), dapat menghubungi:

For further information about PT Angkasa Pura I (Persero), please contact:

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Israwadi

Kota Baru Bandar Kemayoran
 Blok B12 Kavling Nomor 2
 Jakarta, 10610
 Telp (62-21) 654 1961
 Fax (62-21) 654 1513/14
 Email humas@ap1.co.id
 Website www.ap1.co.id
 Twitter @ap_airports
 Instagram @ ap_airports
 Facebook PT Angkasa Pura I (Persero)
 Youtube PT Angkasa Pura I (Persero)

Code of Conduct

Code of Conduct

Perseroan memiliki Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.43/OM.04/2014 tentang Pedoman Prilaku Perseroan (*Code of Conduct*) PT Angkasa Pura I. Pedoman perilaku Perseroan merupakan kumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja yang disusutan untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku sehingga tercapai hasil yang konsisten yang sesuai dengan Budaya Perseroan dalam mencapai Visi dan Misi. Pedoman tersebut menjadi panduan yang berlaku bagi setiap insan Perseroan pada setiap level organisasi yang diharapkan akan memberikan kejelasan tindakan yang harus dilakukan dan ditaati sesuai dengan nilai-nilai korporasi yang telah dibangun.

ISI CODE OF CONDUCT

Adapun muatan dari *Code of Conduct* PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat dasar pemikiran; sasaran Pedoman Etika Perusahaan; tujuan Pedoman Etika Perusahaan, tanggung jawab pegawai Perusahaan terhadap implementasi Pedoman Etika Perusahaan; dan tanggung jawab para pimpinan Perusahaan terhadap implementasi Pedoman Etika Perusahaan.

Bab II Visi, Misi, Komitmen dan Budaya Kerja Perusahaan

Memuat Visi; Misi; komitmen Perusahaan; dan budaya kerja Perusahaan.

Bab III Pedoman Etika Kerja

Memuat etika dan perilaku Komisaris, Direksi, dan pegawai; keselamatan, kesehatan serta lingkungan kerja; hak kekayaan intelektual; sistem teknologi informasi dan komunikasi; penyimpanan dokumen; pencatatan dan pelaporan keuangan; pengamanan aktiva Perusahaan; kerahasiaan informasi; reputasi dan citra Perusahaan; benturan kepentingan; suap dan KKN; donasi, jamuan dan hadiah; biaya perjalanan dinas; dan kontribusi aktivitas politik.

Bab IV Pedoman Etika Usaha

Memuat kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan; hubungan Perusahaan dengan pelanggan, pemerintah, mitra kerja, pemasok, kreditur/investor, dan Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan afiliasi; dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

The Company has a Corporate Code of Conduct stipulated in the Decree of Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.43/OM.04/2014 on Code of Conduct of PT Angkasa Pura I. The Company's Code of Conduct is a collection of commitments consist of business ethics and work ethics arranged to influence, establish, organize and keep the conformity of behavior in order to achieve consistent result corresponds with the Culture of the Company to achieve vision and mission. The Code serves as guidelines that apply to every person at every organizational level of the Company that is expected to provide clarity of actions taken and obeyed in accordance with corporate values that have been built.

CODE OF CONDUCT CONTENT

The Code of Conduct of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows.

Chapter I Introduction

Contains rationale; target of the Company's Code of Ethics; objectives of the Company's Code of Ethics, employee responsibility on the implementation of Code of Ethics; and leader responsibility on the implementation of Code of Ethics.

Chapter II Vision, Mission, Company Commitment and Work Culture

Contains Vision; Mission; Company Commitment and Work Culture.

Chapter III Code of Ethics

Contains ethics and conduct of Board of Commissioners, Board of Directors and employees; safety, health and work environment; intellectual property rights; communication and information technology systems; document storage; financial recording and reporting; Assets of the Company safeguarding; confidential information; reputation and image of the Company; conflicts of interest; bribery and collusion, corruption and nepotism; donation, banquet and gifts; official travel expenses; and contribution to political activity.

Chapter IV Code of Conduct

Contains compliance with laws, regulations and policies; the Company's relationship with customers, governments, partners, suppliers, creditors/investors and subsidiaries/joint ventures/affiliated companies; and social responsibility to community.

Bab V Penerapan Pedoman Perilaku

Memuat sosialisasi pedoman perilaku, arahan ringkas pelaksanaan pernyataan kepatuhan insan Perusahaan, saluran pengaduan masalah; dan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku.

Bab VI Penutup**KEPATUHAN TERHADAP CODE OF CONDUCT**

Code of conduct adalah komitmen PT Angkasa Pura I (Persero) untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Code of conduct berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh insan Perseroan mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

PENYEBARLUASAN CODE OF CONDUCT

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh insan Perseroan pada setiap tingkatan/jenjang organisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui program orientasi insan baru Perseroan, pembagian buku saku, *website* internal, serta melalui kegiatan dan media lainnya yang dimiliki Perseroan.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

Setiap insan Perseroan berkewajiban untuk melaporkan kecurigaan maupun pelanggaran terhadap *Code of Conduct* kepada Direksi/Dewan Komisaris/pimpinan unit kerja yang membidangi masalah personalia. Perseroan juga memiliki Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) dan Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP) yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin *human capital* Perseroan. Perseroan melindungi dan menjamin kerahasiaan pelapor.

Setiap pelanggaran atas *Code of Conduct* akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penerapan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif. Proses penerapan sanksi dilakukan melalui proses yang obyektif, independen dan berjenjang. Jenis sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Chapter V Code of Conduct Implementation

Contains code of conduct socialization, brief direction on the implementation of the declaration of the Company's compliance, complaint channels; and sanctions for violations of the code of conduct.

Chapter VI Conclusion**COMPLIANCE TO THE CODE OF CONDUCT**

The Code of Conduct is PT Angkasa Pura I (Persero) commitment to comply with the provisions of the law and the highest ethical standards on any business/operations of PT Angkasa Pura I (Persero). In addition to comply with the applicable legislation, the Company management shall uphold the norms and ethical values.

The code of conduct applies to all individual on the Company, that is Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees. All individual possess awareness to implement good ethics which in turn will improve and strengthen the reputation of the Company.

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

The Company conducts Code of Conduct socialization constantly to all Company personnel at every level/hierarchy. Socialization is carried out through a new personnel orientation program of the Company, booklet distribution, internal website, as well as on events and other media owned by the Company.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT

Every personnel of the Company is obliged to report suspicion as well as violation of Code of Conduct to the Board of Directors/Board of Commissioners/head of work unit in charge of human capital. The company also has Employment Advisory Board (BPK) and Employee Disciplinary and Violation Examination Committee (P4DP) to conduct examination for human capital disciplinary violations of the Company. The Company protects and ensures the confidentiality of the informant.

Any violation of the Code of Conduct will be subject to sanction according to applicable regulations and indiscriminate imposition of sanctions. The sanction imposition is conducted through a process that is objective, independent and tiered. Type of sanctions imposed is adjusted to the level of violation made.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik pada PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebagai berikut.

TYPE OF SANCTIONS OF THE CODE OF CONDUCT VIOLATION

Type of sanction of the Code of Conduct violation on PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows.

Tabel Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik / Table of Type of Sanctions of the Code of Conduct Violations

Tingkat Sanksi Level of Sanction	Jenis Sanksi Type of Sanction	
Disiplin Ringan / Mild Discipline	<ul style="list-style-type: none"> - Peringatan/teguran lisan - Peringatan/teguran tertulis - Pernyataan tidak puas tertulis - Penundaan kenaikan gaji berkala 	<ul style="list-style-type: none"> - Oral warning/notice - Written warning/notice - Written dissatisfied statement - Suspension of periodic salary adjustment
Disiplin Sedang / Moderate Discipline	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. - Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. - Penurunan kelas jabatan pada kelas jabatan setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Salary reduction for one time periodic salary adjustment for 1 (one) year at most. - Demotion to one rank lower for 1 (one) year at most. - Position class demotion to one position class lower for 1 (one) year at most.
Disiplin Berat / Severe Discipline	<ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan dari jabatan struktural dan tidak ditempatkan di jabatan struktural lainnya. - Penurunan pangkat pada pangkat 2 (dua) tingkat lebih rendah atau lebih. - Penurunan kelas jabatan pada kelas jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih. - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai. - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exemption from structural position and not placed in another structural position. - Demotion to 2 (two) ranks lower or more. - Position class demotion to 2 (two) position class lower or more. - Honorable termination not at his/her request as an employee. - Dishonorable termination as an employee.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Selama tahun 2016, Perseroan telah memberikan sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* dengan rincian sebagai berikut.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

In 2016, the Company imposed on sanctions on Code of Conduct violations described as follows.

Tabel Jumlah Pelanggaran Kode Etik / Table of Number of Code of Conduct Violations

No.	Tahun / Year	Kategori / Category		
		Ringan / Mild	Sedang / Moderate	Berat / Severe
1	2012	5	14	9
2	2013	0	4	11
3	2014	11	6	7
4	2015	2	7	6
5	2016	-	3	9

Gratifikasi

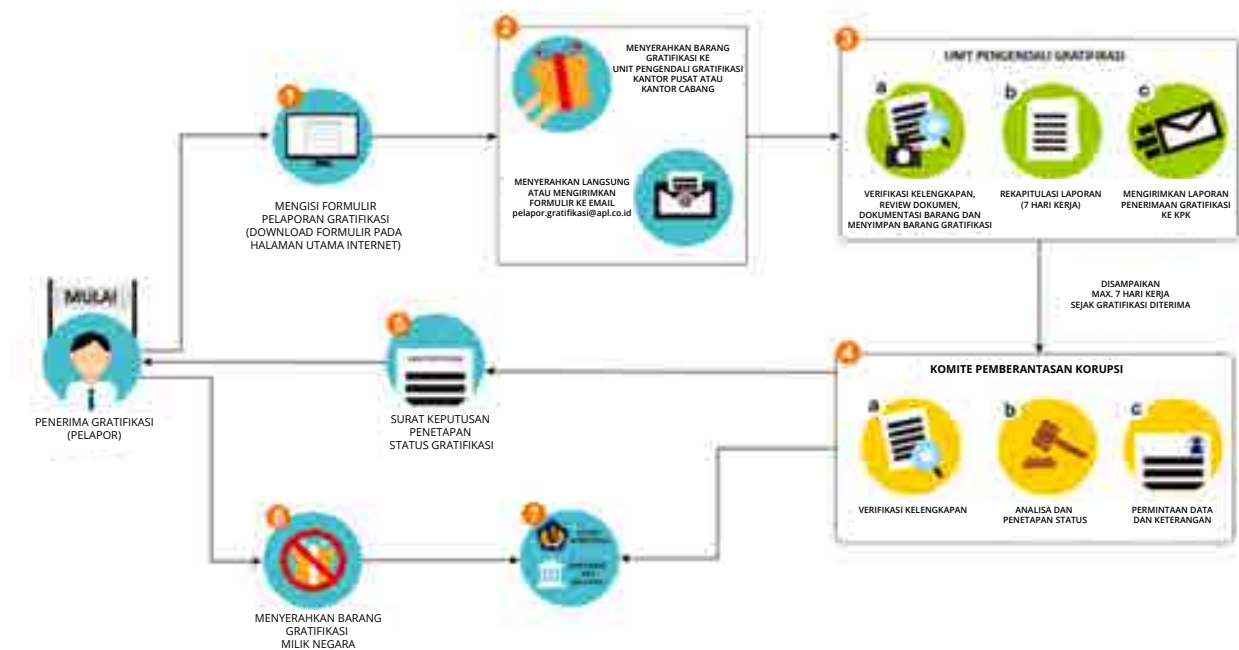
GRATIFICATION

Demi mewujudkan komitmen PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dimulai sejak penandatanganan komitmen antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 11 April 2014, PT Angkasa Pura I (Persero) telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Pada tahun 2016 Unit Pengendali Gratifikasi telah menjalankan beberapa program pengendalian gratifikasi antara lain sebagai berikut.

PELAPORAN GRATIFIKASI

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, *Compliance and Regulation Department* sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Angkasa Pura I, menerima dan meneruskan pelaporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK. Adapun mekanisme penanganan pelaporan dan pengendalian gratifikasi PT Angkasa Pura I adalah sebagai berikut:



Sampai dengan bulan Desember 2016 terdapat 8 (delapan) laporan penerimaan Gratifikasi, dengan nilai setara uang sebesar Rp. 70.677.750,- (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

In order to actualize PT Angkasa Pura I (Persero) commitment on Gratification Control Program (PPG) started since the signing of commitment between PT Angkasa Pura I (Persero) and Corruption Eradication Commission (KPK) on April 11, 2014, PT Angkasa Pura I (Persero) form Gratification Control Unit at Head Office and Branch Office.

In 2016, Gratification Control Unit performed various gratification control program as follows.

GRATIFICATION REPORTING

According to Gratification Control Guidelines, Compliance and Regulation Department as Gratification Control Unit (UPG) of PT Angkasa Pura I, receive and pass along report on Gratification reception and granting to KPK. Mechanism on report handling and gratification control of PT Angkasa Pura I is as follows:

As of December 2016, there are 8 (eight) reports on Gratification reception equivalent to Rp 70,677,750.00 (seventy-seven million six hundred seventy-seven thousand seven hundred fifty rupiah).

PENUNJUKKAN PERWAKILAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KANTOR CABANG

Dalam upaya meningkatkan *awareness* dan mengoptimalkan penerapan pengendalian gratifikasi di seluruh Kantor Cabang, PT Angkasa Pura I (Persero) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP.116/PG.02/2016 tanggal 21 Juli 2016 telah menetapkan perwakilan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Cabang. Perwakilan Unit Pengendali Gratifikasi di Kantor Cabang bertugas sebagai perpanjangan tangan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat dalam memastikan penerapan Program Pengendalian Gratifikasi.

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka memberikan pemahaman Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh Pegawai, PT Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan sosialisasi pengendalian gratifikasi baik kepada calon pegawai sampai kepada pejabat. Sosialisasi dilakukan dengan cara memasukkan Program Pengendalian Gratifikasi kedalam kurikulum pembelajaran pegawai maupun pejabat.

PARTISIPASI AKTIF PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

Sejak ditandatangani komitmen Program Pengendalian Gratifikasi, PT Angkasa Pura I (Persero) selalu aktif berpartisipasi dalam program Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pembangunan Sistem Integritas Nasional. PT Angkasa Pura I (Persero) di tahun 2016 berkesempatan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II yang diikuti dari berbagai Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah. Kolaborasi Tunas Integritas Nasional merupakan salah satu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempermudah koordinasi pilar-pilar penting bangsa dalam membangun budaya integritas.

APPOINTMENT OF GRATIFICATION CONTROL UNIT REPRESENTATIVE AT BRANCH OFFICE

In order to raise awareness and optimizing gratification control implementation on all of Branch Offices, according to Decree of the Board of Directors Number: KEP.116/PG.02/2016 dated July 21, 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) determines representative of the Gratification Control Unit of Branch Office. Representative of the Gratification Control Unit on Branch Office acts as Gratification Control Unit of Head Office in ensuring Gratification Control Program implementation.

GRATIFICATION CONTROL SOCIALIZATION

In order to raise awareness on Gratification Control to all employees, PT Angkasa Pura I (Persero) conduct gratification control socialization to employee candidate up to executive officials. Socialization is conducted by attaching Gratification Control Program to development curriculum of employee and executive official.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) ACTIVE PARTICIPATION IN DEVELOPING NATIONAL INTEGRITY SYSTEM

Since the signing of Gratification Control Program commitment, PT Angkasa Pura I (Persero) constantly participate in Corruption Eradication Commission program on National Integrity System Establishment Development. In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) becomes the host of *Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II* attended by various Ministries, Institutions, Organizations and Local Governments. *Kolaborasi Tunas Integritas Nasional* is one of Corruption Eradication Commission (KPK) program to facilitate coordination among important pillars of the nation in developing integrity culture.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System

Dalam rangka implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), PT Angkasa Pura I (Persero) telah berkomitmen untuk membangun Sistem pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perseroan dan telah dituangkan pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura

In order to implement Good Corporate Governance principles, PT Angkasa Pura I (Persero) committed to establish Whistleblowing System. Whistleblowing System acts as a medium in prevention, disclosure of violation or fraudulence on the Company and it is stipulated on the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) Decree Number: KEP.192/PG.01/2016 on Whistleblowing System. Whistleblowing System is accessible on website so that

I (Persero) Nomor: KEP.192/PG.01/2016 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dapat diakses melalui *website* sehingga mempermudah pegawai maupun *stakeholder* PT Angkasa Pura I (Persero) dalam pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi.

KEBERADAAN DAN TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dengan implementasi *Whistleblowing System* di Perseroan, diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan salah satu sarana pelaporan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pendeteksian dini (*Early Warning System*) atas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Tujuan adanya Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholders* serta insan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha PT Angkasa Pura I (Persero);
2. Sebagai upaya dalam pengungkapan pelanggaran di PT Angkasa Pura I (Persero) yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum;
3. Mendorong insan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk menghindari diri dari tindak kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum dan pelanggaran etika serta pelanggaran lainnya karena semakin besar potensi tindakan-tindakan pelanggaran tersebut untuk terdeteksi dan dilaporkan;
4. Tersedianya mekanisme untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut meluas atau menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
5. Mengurangi risiko yang dihadapi PT Angkasa Pura I (Perseroan), akibat dari terjadinya segala bentuk pelanggaran;
6. Mewujudkan *Good Corporate Governance*.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Jenis pengaduan yang dapat ditindaklanjuti melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) antara lain:

1. Penyalahgunaan fasilitas Perusahaan;
2. Pengancaman;
3. Penyelewengan uang Perusahaan;
4. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
5. Penggelapan aset Perusahaan;
6. Penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi;
7. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;
8. Pembocoran rahasia Perusahaan;
9. Pemerasan;
10. Pencurian;
11. Penipuan;
12. Kecurangan;

employees or stakeholder of PT Angkasa Pura I (Persero) could report alleged violation easier.

WHISTLEBLOWING SYSTEM PRESENCE AND PURPOSE

With the *Whistleblowing System* implementation on the Company, it is expected to bridge communication and acts as a means of reporting in order to optimizing *Early Warning System* detection function as the implementation of risk management as whole. The purpose of *Whistleblowing System* Guidelines of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows.

1. Create conducive work climate and as a means for PT Angkasa Pura I (Persero) stakeholder and personnel to report actions that may cause financial or nonfinancial loss that may harm image and business continuity of PT Angkasa Pura I (Persero);
2. As a means to disclose violation on PT Angkasa Pura I (Persero) that is noncompliant to ethics standard and regulations;
3. Encourage PT Angkasa Pura I (Persero) personnel to avoid fraudulence, violation of law and ethics violations as well as other violations since the greater the potential of such actions to be detected and reported currently;
4. Mechanism availability to handle violations internally at first, before the issues widespread and become public violation;
5. Reduce the risk faced by PT Angkasa Pura I (Persero) because of all kinds of violation;
6. Implement Good Corporate Governance.

REPORTED TYPE OF VIOLATIONS

Type of complaints that could be followed up by *Whistleblowing System* is as follows:

1. Misuse of Company facilities;
2. Threatening;
3. Misappropriation of company money;
4. Abuse of office for personal or group interests or other interests outside the Company;
5. Embezzlement of Company assets;
6. Reception, grant and request of gratification;
7. Ethics violations and sexual misconduct;
8. Leaking Company's confidential information;
9. Extortion;
10. Thievery;
11. Scam;
12. Fraudulence;
13. Disciplinary violation;

13. Pelanggaran disiplin;
14. Benturan kepentingan;
15. Korupsi;
16. Kolusi;
17. Nepotisme

PENYAMPAIAN DAN MEDIA LAPORAN PELANGGARAN

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor harus memberikan informasi, bukti atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur 4W 1H, yaitu sebagai berikut:

- a. *What* : apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor?
- b. *Where* : dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
- c. *When* : kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
- d. *Who* : siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
- e. *How* : bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan melalui:

1. Pelapor menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran melalui Aplikasi *Whistleblowing System*.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, maka Pelapor:
 - a. Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat alamat, nomor telepon, *faksimile* atau alamat *e-mail* (dengan pilihan anonim).
 - b. Harus memberikan informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - 1) Masalah yang diadukan, yaitu pokok pengaduan atau permasalahan yang ingin diungkapkan serta jumlah kerugian (jika bisa ditentukan), dan sebaiknya satu pengaduan hanya untuk satu masalah saja agar informasi yang disampaikan lebih fokus;
 - 2) Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang diduga bertanggungjawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapa atau pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan;
 - 3) Lokasi kejadian, yaitu lokasi, lapangan atau unit operasi tempat terjadinya masalah tersebut dengan spesifik menyebut nama, tempat atau fungsi yang dimaksud;
 - 4) Waktu kejadian, yaitu periode kejadian dari masalah tersebut, baik berupa bulan, tahun atau tanggal tertentu saat terjadinya masalah;
 - 5) Bagaimana terjadinya masalah tersebut dan bukti yang dapat dilampirkan;
 - 6) Informasi apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang atau pihak lain;
 - 7) Informasi apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

14. Conflict of interest;
15. Corruption;
16. Collusion;
17. Nepotism.

SUBMISSION AND MEDIA OF VIOLATION REPORT

Submission of alleged violation report conducted by Informant should inform proof or clear allegation of reported violation and meets 4W1H element, that is:

- a. *What* : What is alleged violation known to the Informant?
- b. *Where* : Where is the alleged violation happened?
- c. *When* : When is the alleged violation happened?
- d. *Who* : Who is involved in the alleged violation?
- e. *How* : How did the alleged violation conducted?

Submission of violation report may be performed through:

1. Informant submits alleged violation report through Whistleblowing System Application.
2. To facilitate and speed up the follow-up process, the Informant should:
 - a. Provide personal information, at least consists of address, phone, fax or e-mail address (with anonymous option).
 - b. Provide accountable preliminary information, consist of:
 - 1) Complaint issued, which is the subject of complaints or problems to be disclosed as well as the amount of loss (if could be determined), and preferably one complaint to single issue so that the information submitted is focused;
 - 2) Parties involved (who is allegedly responsible for the violation, including witnesses and who or which party is benefited or harmed);
 - 3) Scene of violation, that is location, field or operation unit where the violation conducted specifying the name, place or function in question;
 - 4) Time of violation, that is period of violation, whether month, year or specific date of the occurrence;
 - 5) How the violation occurred and evidence may be attached;
 - 6) information on whether the case have been reported to other person or party;
 - 7) Information on whether the case is precedent.

- c. Jika dibutuhkan penyerahan *hard copy* dokumen yang terkait dengan dugaan pelanggaran (misalnya barang bukti), dapat ditujukan ke:

Compliance and Regulation Department

PT Angkasa Pura I (Persero)
Kantor Pusat – Jakarta
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav 2
Jakarta 10610

- c. If necessary, hard copy of document related to the alleged violation is submitted (for example an evidence), to:

Compliance and Regulation Department

PT Angkasa Pura I (Persero)
Head Office - Jakarta
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kav 2
Jakarta 10610

Penyerahan *hard copy* dokumen terkait dugaan pelanggaran tersebut dengan mencantumkan nomor referensi yang didapatkan dari Aplikasi *Whistleblowing System* pada dokumen yang akan dikirim.

Submission of the document hard copy related to the alleged violation encloses a reference number obtained from the Whistleblowing System Application.

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

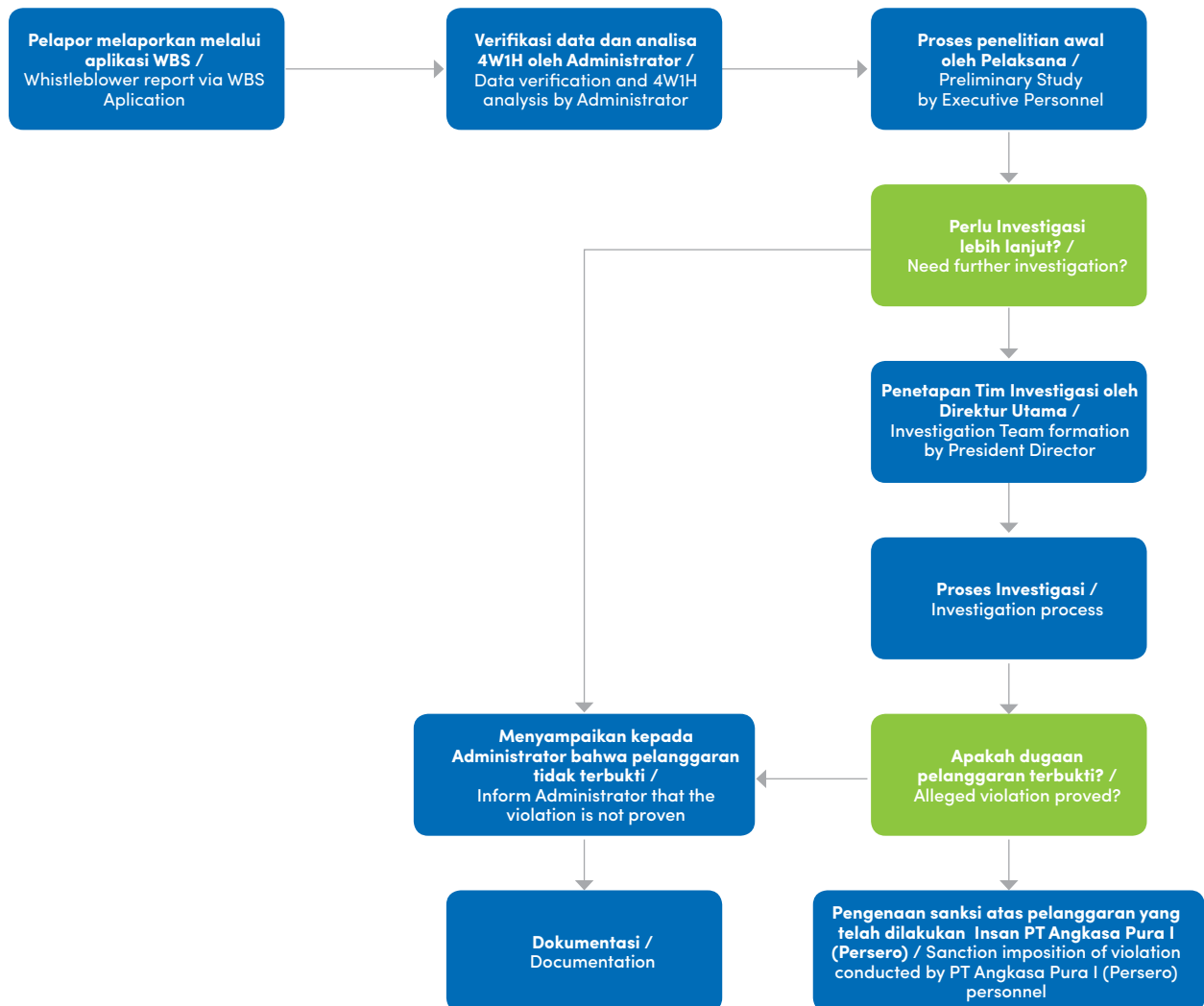
WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT

BAGAN ALUR PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM CHART

Berikut merupakan mekanisme penanganan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Angkasa Pura I (Persero):

The following chart is the Whistleblowing System handling mechanism of PT Angkasa Pura I (Persero):



PENANGANAN PENGADUAN

Proses pengelolaan laporan, sebagai berikut:

1. Administrator menerima laporan dugaan pelanggaran melalui Aplikasi *Whistleblowing System*.
2. Administrator melakukan verifikasi data Pelapor dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi *What, Where, When, Who* dan *How* (4W1H) untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pelaksana. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Administrator dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Administrator menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.
4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, Administrator mengklasifikasikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan tingkat pelanggaran dan tempat kedudukan Terlapor (Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit kerja lainnya).
5. Terhadap dugaan pelanggaran yang telah diklasifikasikan, Administrator meneruskan kepada Pelaksana untuk ditindaklanjuti dengan proses penelitian awal.
6. Terhadap pelaporan pelanggaran yang telah memenuhi syarat *What, Where, When, Who* dan *How* (4W1H) namun tanpa identitas pelapor, maka tetap diteruskan kepada Pelaksana. Jika diperlukan konfirmasi lebih lanjut, Pelaksana dapat berkomunikasi langsung dengan Pelapor.
7. Pelaksana melakukan proses penelitian awal adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya dalam rapat kelompok Pelaksana.
8. Jika hasil penelitian awal disimpulkan tidak perlu dilaksanakan investigasi, maka Pelaksana menyampaikan hasil penelitian awal kepada Administrator, untuk kemudian Administrator menyampaikan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai, dan Administrator menyimpan dokumen terkait.
9. Jika hasil penelitian awal memerlukan investigasi, maka Pelaksana membuat dan menyampaikan laporan hasil penelitian awal kepada Direktur Utama.
10. Laporan hasil penelitian awal yang disampaikan Pelaksana memuat pula usulan tindakan penanganan serta usulan unsur Tim Investigasi yang harus dibentuk.
11. Dalam kasus yang serius dan sensitif, berdasarkan analisis Pelaksana dapat dipertimbangkan untuk menggunakan pihak eksternal yang independen untuk melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut, guna menjaga independensi dalam proses investigasi.
12. Dalam hal Terlapor adalah pegawai/pegawai *outsourcing*/Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bekerja di Perusahaan, dilakukan proses sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama bersama Pelaksana melakukan pembahasan terkait pelaksanaan investigasi. Investigasi dapat dilaksanakan oleh Internal Audit, Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP) atau Tim Investigasi.

COMPLAINT HANDLING

Complaint handling process is conducted as follows:

1. Administrator receives alleged violation report through Whistleblowing System Application.
2. Administrator verifies Informant data and analyzes alleged violation report submitted if it meets What, Where, When, Who and How (4W1H element) so that it may be followed up by Executive Personnel. If the report has not met the elements, Administrator may clarify the report to the Informant.
3. If the alleged violation report fails to meet the requirements, Administrator keeps the alleged violation report.
4. If the alleged violation report meets the requirements, Administrator clarify the report based on the level of violation and office of the alleged Offender (Head Office, Branch Office or other work unit).
5. For the clarified alleged violation report, Administrator forwards the report to Executive Personnel in order to follow up the report with preliminary study.
6. For the alleged violation report that meets the What, Where, When, Who and How (4W1H) requirement under anonymous Informant, the report should be forwarded to Executive Personnel. If further confirmation is required, Executive Personnel may communicate the matter with the Informant directly.
7. Operative Personnel conducts preliminary study on alleged violation and discuss the result on Executive group meeting.
8. If the preliminary study concludes that there is no need to carry out investigation, Executive should pass on the preliminary study result to Administrator, then Administrator will inform the Informant that the alleged violation is proven invalid and considered resolved and Administrator keep the related documents.
9. If the preliminary study concludes that there is a need to carry out investigation, Executive Personnel prepares and passes on the preliminary study result to President Director.
10. Report on the preliminary study result passed on by Executive Personnel includes proposed handling measures as well as proposed Investigation Team that shall be formed.
11. In case of serious and sensitive violation, independent external party is considered to conduct the violation report's investigation based on the Executive analysis, in order to maintain independency during the investigation process.
12. In case the alleged Offender is an employee/outsourcing employee/ temporary employee (PKWT) who works on the Company, the following process is carried out:
 - a. President Director with Executive Personnel discuss the investigation execution. Investigation may be carried out by Internal Audit, Employee Disciplinary and Violation Examination Committee (P4DP) or Investigation Team.

- b. Dalam hal Investigasi dilaksanakan oleh Internal Audit atau Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai (P4DP), maka investigasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Laporan hasil investigasi kemudian ditembuskan kepada Pelaksana.
- c. Dalam hal Investigasi dilaksanakan oleh Tim Investigasi, maka:
- 1) Direktur Utama memberikan persetujuan atas pembentukan Tim Investigasi yang direkomendasikan oleh Pelaksana.
 - 2) Tim Investigasi melakukan investigasi sesuai Surat Keputusan Direksi tentang Audit Khusus dan melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama. Laporan investigasi kemudian ditembuskan kepada Pelaksana.
- d. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa laporan terbukti, maka:
- 1) Direktur Utama melakukan pembahasan laporan hasil audit investigasi bersama Tim Investigasi. Pembahasan laporan hasil audit investigasi dapat mengikutsertakan unsur lain Perusahaan jika diperlukan.
 - 2) Direktur Utama menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada *Human Capital Group Head* dan Pelaksana.
 - 3) *Human Capital Group Head* menyampaikan laporan pengenaan sanksi kepada Direktur Utama dan Pelaksana.
 - 4) Pelaksana menyampaikan laporan pengenaan sanksi kepada Administrator untuk didokumentasikan.
- e. Jika hasil investigasi menyatakan laporan pelanggaran tidak terbukti, maka:
- 1) Tim Investigasi menyampaikan status pelanggaran kepada Direktur Utama dan Pelaksana.
 - 2) Pelaksana meneruskan hasil investigasi kepada Administrator.
 - 3) Administrator menyampaikan informasi kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan laporan dianggap selesai.
 - 4) Administrator mendokumentasikan dokumen terkait.
13. Dalam hal Terlapor adalah Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dilakukan proses sebagai berikut:
- a. Dalam hal hasil penelitian awal oleh Pelaksana disimpulkan dokumen belum layak untuk ditindaklanjuti, maka Pelaksana menyampaikan laporan hasil penelitian awal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Laporan hasil penelitian awal ditembuskan kepada Administrator untuk didokumentasikan.
- b. Dalam hal hasil penelitian awal oleh Pelaksana disimpulkan dokumen sudah layak dan dapat ditindaklanjuti, maka Pelaksana menyampaikan hasil penelitian awal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Pelaksana mengirimkan hasil penelitian awal tersebut kepada Pemegang Saham/
- b. In case the investigation carried out by Internal Audit or Employee Disciplinary and Violation Examination Committee (P4DP), investigation is carried out according to applicable regulations on the Company. Investigation report then copied to Executive Personnel.
- c. In case the investigation is carried out by Investigation Team, then:
- 1) President Director approves the Investigation Team formation according to Executive recommendation.
 - 2) Investigation Team carries out investigation according to Board of Directors Decree on Special Audit and reports the investigation result to President Director. Investigation report then copied to Executive Personnel.
- d. If the investigation report concludes that the report is proven valid, then:
- 1) President Director discusses the report on investigation audit result with Investigation Team. Discussion of the report on investigation audit result may engage other Company's element, if deemed necessary.
 - 2) President Director delivers the sanction imposition recommendation to Human Capital Group Head and Executive Personnel.
 - 3) Human Capital Group Head presents the sanction imposition report to President Director and Executive Personnel.
 - 4) Executive Personnel provides the sanction imposition report to Administrator to have it documented.
- e. If the investigation report concludes that the report is proven invalid, then:
- 1) Investigation Team presents the violation status to President Director and Executive Personnel.
 - 2) Executive Personnel provides the investigation result to Administrator.
 - 3) Administrator shall inform the Informant that the alleged violation is proven invalid and considered resolved.
 - 4) Administrator documented the related documents.
13. In case the alleged Offender is Board of Director and/ or Board of Commissioner, the following process is carried out:
- a. In case the preliminary study by Executive Personnel concluded that the document is not yet qualified to be followed up, Executive Personnel presents the preliminary study's result to President Director and Board of Commissioners. Report on the preliminary study's result copied to Administrator to have it documented.
- b. In case the preliminary study by Executive Personnel concluded that the document is qualified to be followed up, Executive Personnel presents the preliminary study's result to President Director and Board of Commissioners. Executive Personnel presents the preliminary

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laporan hasil penelitian awal ditembuskan kepada Administrator untuk didokumentasikan.

14. Dalam hal Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka disesuaikan dengan ketentuan terkait.
15. Apabila ada permintaan dari Pelapor terhadap proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran yang diajukan, maka Perusahaan melalui Tim Pengelola *Whistleblowing System* dapat memberikan penjelasan atau tanggapan.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perseroan juga memberikan perlindungan baik kepada Pelapor maupun Terlapor untuk mendorong keberanian dalam melakukan pelaporan pelanggaran. Perlindungan kepada Pelapor meliputi jaminan terhadap kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan, serta jaminan keamanan bagi Pelapor dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi. Perusahaan juga memberikan perlindungan terhadap Terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti dan memberikan kesempatan pada Terlapor dalam menjelaskan atas bukti-bukti pelanggaran yang ditemui dan memberikan kesempatan pembelaan jika diperlukan.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Direksi membentuk organisasi yang terdiri dari:

1. Tim Pengelola *Whistleblowing System*
Tim Pengelola *Whistleblowing System* dibentuk untuk mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) perseroan. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola *Whistleblowing System* wajib merahasiakan identitas Pelapor sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor.
 - a. Susunan keanggotaan Tim Pengelola *Whistleblowing System*, terdiri dari:

study's result to Shareholders/Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). Report on the preliminary study's result copied to Administrator to have it documented.

14. In case the alleged Offender is supporting organ of Board of Commissioners, it is adjusted to relevant policy.
15. If there is a request from Informant on alleged violation report settlement, the Company through Whistleblowing System Management may provide explanation or response.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

The company also provides protection to the Informant as well as the Offender to encourage violation report submission. Protection of Informant includes guarantee of confidentiality of the Informant identity and reported issues as well as guarantee of security of the Informant from the Company against any act that may be harmful, such as unfair termination, demotion of rank or position, intimidation, harassment or all form of discrimination and disadvantageous records in the form of personal data file. The company also guarantees confidentiality of the alleged Offender identity as long as the violation has not been proven and allows the Offender for a chance to explain the prove of violation found and give the Offender a self-defense opportunity if necessary.

PARTY WHO MANAGES WHISTLEBLOWING SYSTEM COMPLAINT

In handling whistleblowing report, Board of Director forms an organization consist of:

1. Whistleblowing System Management
Whistleblowing System Management established to manage the Company's Whistleblowing System Management. In performing their duties, Whistleblowing System Management Team must conceal Informant identity according to the stipulated policies, especially confidentiality aspect and Informant protection guaranty.
 - a. Structure of Whistleblowing System Management Team consists of:

No.	Susunan Anggota Member Composition	Kedudukan dalam Tim Position on the Team
A.	Pengarah / Steering	
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Pengawas / Supervisor
	Direksi / Board of Directors	Penanggung Jawab / Person-in-Charge
B.	Pelaksana / Executive Personnel	
	<i>Head of Legal and Compliance</i>	Ketua / Chairman
	<i>Head of Internal Audit</i>	Wakil Ketua / Vice Chairman
	<i>Compliance and Regulation Department Head</i>	Sekretaris / Secretary
	<i>Compensation and Industrial Relation Department Head</i>	Anggota / Member
	<i>Business Legal Department Head</i>	Anggota / Member
	<i>Human Capital and General Affair Audit Department Head</i>	Anggota / Member
	<i>Finance Audit Department Head</i>	Anggota / Member

No.	Susunan Anggota Member Composition	Kedudukan dalam Tim Position on the Team
	<i>Technical Audit Department Head</i>	Anggota / Member
	Administrator / XXX	
C.	<i>Compliance and Regulation Department Head</i>	Ketua / Chairman
	<i>Compliance and Regulation Officer</i>	Anggota / Member

- b. Tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawas
Pengawas bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
 - 2) Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertugas untuk memutuskan tindak lanjut penanganan pelaporan yang disampaikan oleh Pelaksana.
 - 3) Pelaksana
Pelaksana bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor.
 - 4) *Administrator*
Administrator bertugas untuk:
 - a) Menerima setiap pelaporan dugaan pelanggaran.
 - b) Melakukan validasi dan verifikasi terhadap laporan (data Pelapor dan unsur 4W1H).
 - c) Mengadministrasikan dokumen pelaporan dugaan pelanggaran.
2. Tim Investigasi
- a. Tim Investigasi merupakan tim khusus yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai/pegawai *outsourcing*/pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bekerja di Perusahaan.
 - b. Tim Investigasi, terdiri dari:
 - 1) Auditor Internal serta Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk melakukan investigasi.
 - 2) Auditor Eksternal
Apabila diperlukan, Direktur Utama dapat menunjuk anggota Tim Investigasi dari Eksternal Perusahaan.
 - c. Tugas Tim Investigasi, adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan investigasi atau pemeriksaan mendalam terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan;
 - 2) Menyusun Berita Acara Hasil Investigasi dan melaporkan kepada Direksi, Direktur Utama atau Dewan Komisaris;
 - 3) Merahasiakan identitas Pelapor sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor.
- b. Duties of Whistleblowing System Management Team are as follows:
- 1) Supervisor
Supervisor is in charge of monitoring and advising the implementation of Whistleblowing System.
 - 2) Person-in-Charge
Person-in-Charge is in charge of determining report follow up delivered by Executive Personnel.
 - 3) Executive Personnel
Executive Personnel is in charge of following up violation report submitted by Informant.
 - 4) *Administrator*
Administrator is in charge of:
 - a) Receiving every alleged violation report.
 - b) Validating and verifying report (Informant data and 4W1H element).
 - c) Administering alleged violation report.
2. Investigation Team
- a. Investigation Team is a special team formed by President Director to investigate alleged violation by employee/outsourcing employee/ temporary employee (PKWT) who works on the Company.
 - b. Investigation Team consists of:
 - 1) Internal Auditor and other Officials appointed by President Director to conduct investigation.
 - 2) External Auditor;
If necessary, President Director may appoint member of the Investigation Team from external party.
 - c. Duties of Investigation Team are as follows:
 - 1) Conduct investigation or in-depth inspection on the essence of reported violation;
 - 2) Compile Minutes of Investigation Result and report it to Board of Directors, President Director or Board of Commissioners;
 - 3) Keep the confidentiality of Informant identity according to the stipulated policy, especially confidentiality aspect and Informant protection guaranty.

Untuk keperluan tugasnya, Tim Investigasi memiliki kewenangan berupa akses operasional dan informasi terhadap seluruh unit yang diinvestigasi.

Tim Investigasi harus berintegritas, independen, kompeten dan bersifat *confidential*, mengingat objektivitas dan kewajaran serta keadilan dalam memberikan kesimpulan hasil pelaksanaan investigasi akan menentukan kredibilitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perseroan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) kepada seluruh Insan Perseroan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan dan mekanisme Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sosialisasi dilakukan juga kepada *stakeholders* lainnya.

LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM 2016

Pada tahun 2016 terdapat laporan pelanggaran yang terdiri dari 8 (delapan) laporan penerimaan gratifikasi dan laporan pelanggaran bidang kepegawaian sebanyak 12 (dua belas) laporan. Atas laporan tersebut telah ditindaklanjuti sepenuhnya. Laporan mengenai pelanggaran juga telah disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

In conducting their duties, Investigation Team has the authority to operational and information access on all investigated units.

Investigation Team must have integrity, independent, competence and confidential, considering objectivity and fairness as well as just in delivering investigation result will determine the credibility of Whistleblowing System implementation.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

The Company conducts Whistleblowing System socialization to all of Company personnel to give an understanding of Whistleblowing System policy and mechanism. Socialization is also conducted to other stakeholders.

WHISTLEBLOWING SYSTEM REPORT 2016

Violation reports in 2016 consists of 8 (eight) gratification reception reports and 12 (twelve) employment violation reports. All of the reports are fully resolved. In addition, whistleblowing report has been delivered to related parties.

AIRPORT

WEST OF CHINA





6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

Bagi PT Angkasa Pura I (Persero), tujuan Perseroan tidak hanya semata-mata memenuhi kepentingan pemegang saham, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya.

Other than pursuing the objective of serving the interest of shareholders, PT Angkasa Pura I (Persero) also wishes to provide value contribution for the other stakeholders that include employees, customers, suppliers, and other parties.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

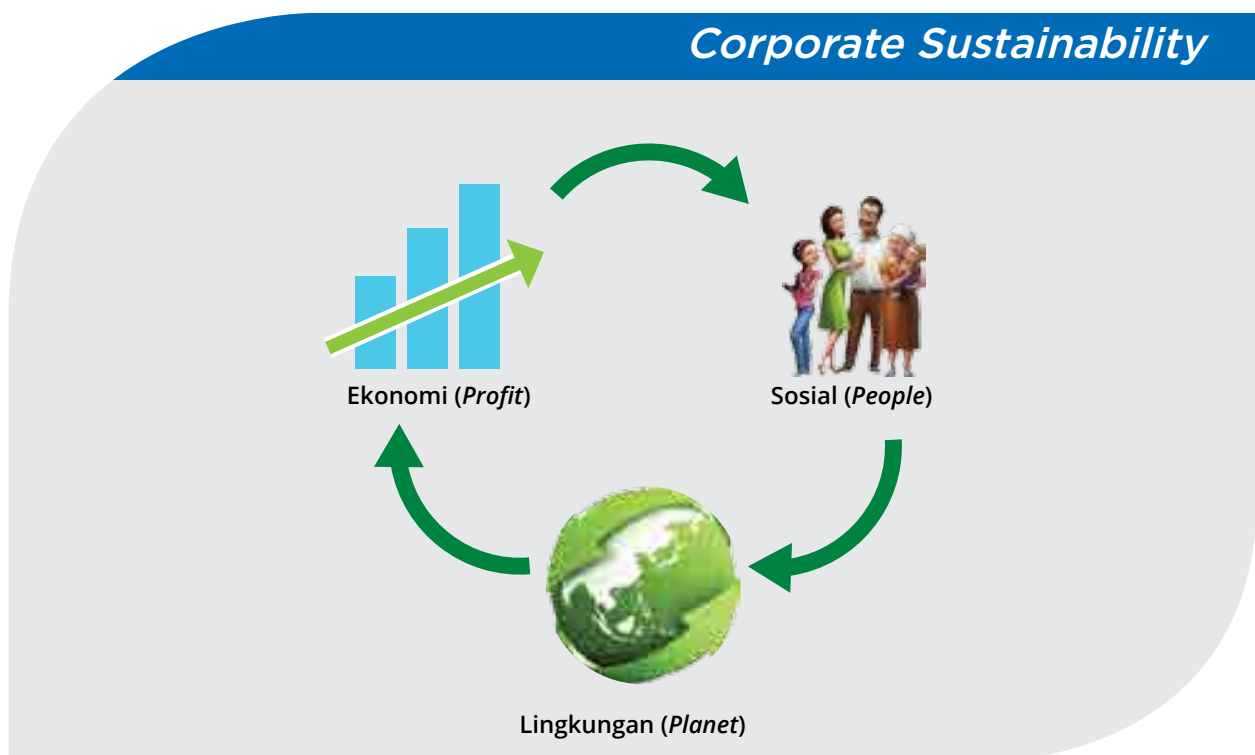


PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen bahwa tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional Perseroan. Perseroan yang baik tidak hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi belaka, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawannya dan masyarakat sekitar serta memberikan nilai tambah bagi *shareholders* maupun *stakeholder* lainnya. Demikian pula dengan PT Angkasa Pura I (Persero), menyadari bahwa kelangsungan usaha Perseroan tidak lepas dari peran serta masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah kerja yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Untuk itu sangat penting bagi Perseroan membina dan membangun hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial.

PT Angkasa Pura I (Persero) is committed that the Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral part of the Company operational activity. A good company is not only oriented in economic profit, but also having an awareness to the environmental sustainability, the welfare of the employees and local community, and giving an add value for other shareholders or stakeholders. Likewise, PT Angkasa Pura I (Persero) is well aware that the business continuity of the Company is an integral part of community involvement residing within the area managed by PT Angkasa Pura I (Persero). Thus, it is highly important for the Company to build and foster good relationship with community and environment as a form of corporate social responsibility covering economic, environmental, and social aspects.

PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, oleh karena itu Perseroan sangat memahami betapa pentingnya menjaga, meningkatkan dan menjamin kepuasan konsumennya dengan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara terus-menerus.

PT Angkasa Pura I (Persero) is a State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in the field of airport service, therefore the Company is well aware of the importance of maintaining, improving, and ensuring customer satisfaction by continuously making efforts of service quality improvement.



Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi setiap perusahaan. Program CSR yang dilaksanakan PT Angkasa Pura I (Persero) dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

The company has a commitment to contribute to the local community as a manifestation of social responsibility to the environment in line with the Government Program to promote *Corporate Social Responsibility (CSR)* for every company. CSR program carried out by PT Angkasa Pura I (Persero) is implemented in the form of Partnerships and Community Development Program (PKBL).

Pendekatan Holistik Terintegrasi dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Integrated Holistic Approach in the Implementation of Corporate Social Responsibility

PT Angkasa Pura I (Persero) menyadari bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)* merupakan sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perseroan berkomitmen bahwa dengan atau tanpa aturan hukum, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi moralitas. Sehingga, parameter keberhasilan adalah dengan mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Perseroan menganut prinsip bahwa yang mengajarkan agar suatu pihak memperlakukan pihak lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

Berkean dengan hal tersebut, Dalam melaksanakan CSR PT Angkasa Pura I (Persero) berpedoman pada ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Dalam ISO 26000, CSR meliputi 7 (tujuh) isu pokok yaitu: 1) *Organizational Governance*, 2) Hak Asasi Manusia, 3) Ketenagakerjaan, 4) Lingkungan Hidup, 5) Praktik Kegiatan Institusi yang Adil, 6) Isu Konsumen, dan 7) Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat.

PT Angkasa Pura I (Persero) awares that the implementation of corporate social responsibility (CSR) is a moral responsibility to the stakeholders. The Company is committed that with or without rules and laws, the Company continuously uphold morality. Therefore, the parameter of success is by upholding the principle of moral and ethics, which means reaching the best result without harming other community groups. The Company follows the principle of treating others as one would wish to be treated. Therefore, The Company believes that a company that upholds the principle of moral and ethics will give the best benefit for community.

In regards to that, in implementing CSR, PT Angkasa Pura I (Persero) is guided by ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. In ISO 26000, CSR includes 7 (seven) main issues, namely: 1) Organizational Governance, 2) Human Rights, 3) Labor Practices, 4) The Environment, 5) Fair Operating Practices, 6) Consumer Issues, and 7) Community Involvement and Development.

Gambar Pelaksanaan CSR Secara Holistik / Holistic CSR Implementation Image



Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance of Social Responsibility / Source: ISO 26000: 2010 Guidance of Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Terkait dengan Lingkungan Hidup

CSR Related to The Environment



Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik merupakan komitmen Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjadikan Lingkungan Hidup sebagai salah satu pilar utama dalam kegiatan CSR Perseroan. Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan bahwa Lingkungan Hidup merupakan sumber kehidupan yang utama.

KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) senantiasa mempertimbangkan faktor lingkungan alam sekitar dalam pengelolaan usaha kebandarudaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.22/KU.13/2015 tanggal 17 Februari 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KEP.23/KU.13/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Pedoman Program Pelayanan Kesehatan Keliling PT Angkasa Pura I (Persero). Perseroan melalui kebijakan manajemen berkomitmen terhadap pemenuhan semua peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan. Perseroan berperan aktif dalam upaya melakukan penghijauan dan pembuatan bandar udara yang ramah lingkungan (*green airport*).

A good protection and management of environment is the commitment of the Company. This commitment is realized by making Environment as one of the main pillars of the Company CSR activities. For the Company, implementing CSR in the field of the environment is an unbargained responsibility. This is based on the Company awareness that the environment is the main source of life.

POLICY

PT Angkasa Pura I (Persero) continuously considers environmental factor in the management of airport business as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) Number: KEP.22/ KU.13/2015 dated 17 February 2015 On the Implementation Guidelines Partnership Program and Community Development PT Angkasa Pura I (Persero) and Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.23/ KU.13/2015 dated 17 February 2015 regarding Guidelines for Mobile Health Care Program PT Angkasa Pura I (Persero). The Company through the management policy is committed to the fulfilment of all the laws and regulations related to the environment. The company plays an active role in efforts to reforest and manufacture airports environmentally friendly (*green airport*).

RENCANA KEGIATAN

PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen menjadikan lingkungan sekitar Bandara menjadi lebih hijau sejalan dengan Misi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam mengembangkan bandara yang ramah lingkungan. Selain penghijauan di area sekitar Bandara dan di lingkungan masyarakat sekitar wilayah usaha, PT Angkasa Pura I (Persero) juga berperan aktif dalam pelestarian alam di daerah-daerah penyangga lainnya.

KEGIATAN

PT Angkasa Pura I (Persero) menetapkan Kebijakan terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan PT Angkasa Pura I (Persero) yang berwawasan lingkungan yaitu sebagai berikut.

1. PT Angkasa Pura I (Persero) tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan cara menghasilkan layanan yang ramah lingkungan serta mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait dengan lingkungan.
2. Menciptakan keteladanan, kedisiplinan melalui perilaku peduli lingkungan dan mengembangkan ide-ide yang kreatif terkait perlindungan terhadap lingkungan.
3. Melakukan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan dan upaya-upaya peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan melalui program *Green Building, Green Procurement, Green Processes* dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk menuju Bandar Udara yang Ramah Lingkungan (*Eco Airport*).
4. Pembinaan terhadap masyarakat sekitar dan perlindungan terhadap ekosistem di sekitar Bandar Udara.
5. Kebijakan Lingkungan ini wajib dipahami, dijalankan dan dipelihara oleh personil yang bekerja untuk dan atas nama PT Angkasa Pura I (Persero), serta tersedia bagi pihak-pihak terkait.
6. Mendorong peningkatan kompetensi dan kepedulian setiap personil PT Angkasa Pura I (Persero) dalam bidang Lingkungan Hidup dan pengelolaannya.

PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

Program pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun oleh Perseroan sebagai upaya mewujudkan PT Angkasa Pura I (Persero) yang berwawasan lingkungan yaitu sebagai berikut.

1. Penerapan dan Sertifikasi ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan di Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali. Sertifikat berlaku mulai tanggal 18 November 2015 dan merupakan Bandara pertama di Indonesia yang bersertifikat ISO 14001.
2. Pembentukan *Eco Airport Council* di kantor cabang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: SKEP/124/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bandar Udara Ramah Lingkungan (*Eco Airport*).

ACTIVITY PLAN

PT Angkasa Pura I (Persero) is dedicated in making the environment around the airport greener in line with the Company's mission to develop environmentally friendly airport. In addition to reforestation in the area around the airport and the surrounding community environment business areas, PT Angkasa Pura I (Persero) is also active involved in nature conservation in other buffer areas.

ACTIVITY

PT Angkasa Pura I (Persero) sets a policy on the conservation and environmental management based on the vision and mission that has been set to achieve environmentally sound company is as follows.

1. PT Angkasa Pura I (Persero) is responsive to the needs and expectations of stakeholders in a way to produce environmentally friendly services as well as comply with all laws and regulations and other requirements related to the environment.
2. Creating an exemplary, self-discipline through environmentally conscious behavior and develop creative ideas related to environmental protection.
3. Prevention of pollution of the environment and efforts to improve environmental performance through the Green Building, Green Procurement, Green Processes and 3R (Reduce, Reuse, Recycle) to get to the airport Environment Friendly (Eco Airport).
4. Guidance on local communities and the protection of ecosystem around the airport.
5. This Environmental Policy shall be understood, implemented and maintained by personnel working for and on behalf of the Company, as well as provided for the party - related parties.
6. Encouraging the increase of every company personnel in the competence and concern in the field of Environment and management.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM 2016

Environmental management program arranged by the Company as an effort to establish PT Angkasa Pura I (Persero) to achieve environmentally sound company is as follows.

1. Application and Certification ISO 14001 Environmental Management System at Airport I Gusti Ngurah Rai - Bali. Certificate is valid from 18 November 2015 and it is the first Airport in Indonesia, with ISO 14001 Certificate.
2. Establishment of Eco Airport Council at the branch offices in accordance with Rule DGCA Number: SKEP/124/VI/2009 on Guidelines for Sustainable Airport (Eco Airport).

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan <i>Safety, Health and Environment Assessment</i> di seluruh kantor cabang. 4. Kegiatan Uji Emisi Kendaraan di kantor pusat maupun kantor cabang. 5. Kegiatan Penanaman Pohon dan Pembuatan Lubang Resapan Biopori di kantor cabang. 6. Pembuatan Lubang Resapan Biopori sebanyak 100 (seratus) titik di kawasan kantor pusat. 7. Laporan rutin Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setiap semester. 8. Pelatihan <i>Eco Airport and Waste Management System</i>. 9. Penyediaan Tempat Sampah Terpilah di kantor pusat dan kantor cabang. 10. Penyediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) terpilah dan Rumah Limbah B3 (untuk limbah bahan berbahaya dan beracun). | <ol style="list-style-type: none"> 3. Implementation of the <i>Safety, Health and Environment Assessment</i> in all branches. 4. Vehicle Emissions Testing Activity at the headquarters and branch offices. 5. Tree Planting Activity and Making Holes Infiltration Biopori in the branch office. 6. Hole Making Biopori Infiltration of 100 (one hundred) points at district headquarters. 7. Routine reports Environmental Management Plan (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/RKL) and Environmental Monitoring Plan (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup/RPL) each semester. 8. <i>Eco Airport and Waste Management System</i> Training. 9. Provision for Disaggregated Trash at headquarters and branch offices. 10. Provision for Temporary Disaggregated Shelter (Tempat Penampungan Sampah/TPS) and B3 Home Waste (for hazardous and toxic waste). |
|---|--|

SERTIFIKASI

Sertifikasi yang telah diperoleh Perseroan terkait dengan lingkungan hidup adalah Sertifikasi ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan di Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali. Sertifikat berlaku mulai tanggal 18 November 2015 dan merupakan Bandara pertama di Indonesia yang bersertifikat ISO 14001.

DAMPAK KUANTITATIF

Pelaksanaan kegiatan CSR terkait lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2016, telah memberikan dampak antara lain pada sisi ekonomi berupa penghematan/efisiensi biaya listrik dan air, transportasi serta perlengkapan terhadap pendapatan maupun terhadap aset, angka penurunan tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel Penghematan Biaya / Cost Eficiency Table

(dalam Rupiah / in Rupiah)

Keterangan / Note	2016	2015	Perubahan (%) / Change (%)
Biaya Listrik dan Air terhadap Total Pendapatan / Electricity and Water cost to Total Income	Rp48,793 / 48,793 IDR	Rp55,558 / 55,558 IDR	(12,18)
Biaya Transportasi terhadap Total Pendapatan / Transportation cost to Total Income	Rp226 / 226 IDR	Rp558 / 558 IDR	(59,50)
Biaya Listrik dan Air terhadap Total Aset / Electricity and Water cost to Total Asset	Rp12,655 / 12,655 IDR	Rp17,441 / 17,441 IDR	(27,44)
Biaya Perlengkapan terhadap Total Aset / Equipment cost to Total Asset	Rp559 / 559 IDR	Rp621 / 621 IDR	(12,18)

Sedangkan dampak kegiatan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan dan upaya-upaya peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan melalui program *Green Building, Green Procurement, Green Processes* dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), diharapkan dapat mengurangi pemanasan global dan menunjukkan kepedulian Perseroan dalam menjaga dan memulihkan habitat yang dilindungi serta mewujudkan keinginan Perseroan untuk menjadikan seluruh Bandar Udara yang dikelola menjadi bandar udara yang Ramah Lingkungan (*Eco Airport*).

CERTIFICATION

The certification obtained by the Company related to the environment is Certification ISO 14001 Environmental Management System at Airport I Gusti Ngurah Rai - Bali. Certificate is valid from November 18, 2015 and it is the first Airport in Indonesia, with ISO 14001 Certificate.

QUANTITATIVE IMPACT

The implementation of CSR Activity to the environment conducted by the Company throughout 2016 had given an impact from the economic side in the form of efficiency / savings in electricity and water cost, transportation, and equipment to the income or asset, in which the decline can be seen on the table below.

The impact of prevention of environmental pollution activity and continuous efforts to improve environment performance through *Green Building, Green Procurement, Green Processes* and 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) program is expected to reduce global warming and show The Company concern in keeping and restoring the protected habitat and manifest the desire of the Company to make all airports in management to be environmentally friendly airports (*Eco Airport*).

Corporate Social Responsibility Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

CSR Related to Labor and Occupational Health and Safety



PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki komitmen yang tinggi terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaan CSR terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja diuraikan sebagai berikut.

KETENAGAKERJAAN

KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) berupaya untuk menjadi perusahaan yang taat asas dan taat aturan. Termasuk di bidang ketenagakerjaan, Perseroan berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang ketenagakerjaan. Perseroan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender*, kesempatan kerja, dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme karyawan serta sistem imbal jasa yang sepadan.

RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan pelaksanaan CSR yang tetrkaitan dengan ketenagakerjaan telah tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan yang telah diturunkan dalam Program Kerja *Human Capital Group*

PT Angkasa Pura I (Persero) has a high commitment related to labor and occupational health and safety. The implementation of CSR related to labor and occupational health and safety is explained as follows.

LABOR

POLICY

PT Angkasa Pura I (Persero) makes a serious effort to become a company that abides to the laws and regulations. Including in the filed of labor, the Company makes a serious effort to follow all of the applicable laws and regulations related to labor. The Company gives high attention and commitment in regards of gender equality, employment opportunity, and training to enhance employees' professionalism and equal reward system.

ACTIVITY PLAN

CSR implementation activity plan related to labor has been stated in the Company Work Plan and Budget (RKAP) which has been written in Human Capital Group and Training and Development Group Activity Program related to the

dan *Training and Development Group* yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan *Human capital* yang dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penetapan remunerasi sampai dengan *retirement* pegawai.

KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan Perseroan terkait bidang ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja**
 Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, *gender*, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.
- Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan**
 Dalam rangka meningkatkan *skill* dan kapasitas karyawan untuk menunjang operasional Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan. Setiap karyawan Perseroan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, hanya saja dalam pelaksanaan program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perseroan. Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh 5.969 peserta mulai dari level Direksi hingga *staff*, dengan total biaya penyelenggaraan training selama tahun 2016 mencapai Rp33.185.341.323
- Hubungan Industrial**
 Perseroan berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Karena itu, dalam operasionalnya Perseroan berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja. Sebagai wujud kebebasan berserikat, PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki 2 organisasi serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP) dan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA). Baik dari SP maupun AKA mewakili kepentingan karyawan dalam ketenagakerjaan, termasuk perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pihak manajemen.

implementation of Human capital management starting from recruitment process, competence development, determination of remuneration, to the employee retirement.

ACTIVITY

The implementation of the Company policy related to Labor can be described as follows.

- Gender Equality dan Employment Opportunity**
 The Company gives equal opportunity to every person, man or woman, without regarding the difference in ethnic, religion, race, class, gender, nor physical condition to join in the employment recruitment program. Appointment for candidates of employments is based on the result of selection and evaluation during probation and employment orientation.
- Education and Training Program Equality**
 To improve employment skill and capacity to support the operation, the Company organizes education and training program. Each and every employee has the same opportunity to join the education and training program, however in the implementation, this program has to be adjusted with the needs and the development plan of the Company. Throughout 2016, the Company had organized education and training program which was followed by 5.969 participants, from the Directors level to the staff, with total expense for organizing the training throughout 2016 reached Rp33.185.341.323.
- Industrial Relation**
 The Company makes a serious effort in creating a harmonious and fair working relationship. Therefore, The Company in operation makes a serious effort to optimize the human resource management by still paying attention to the behalf of the worker. As a form of freedom of association, Angkasa Pura I (Persero) have two trade union organizations, ie Unions Angkasa Pura I (SP) and the Space Pural Employees Association (AKA). Both of SP and AKA represents the interests of employees in employment, including negotiating the Collective Labor Agreement (CLA) with management.

Saat ini, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku adalah PKB Periode 2014-2016 dengan Nomor: SP.137/HK.06/2014-DU, SP.AP.I.01/PKB/VI/2014, dan 012/DPP-AKA/VI/2014. PT Angkasa Pura I (Persero) secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja. Rapat-rapat tersebut membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban karyawan ataupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai.

- **Remunerasi**

Kebijakan remunerasi yang diterapkan Perseroan adalah dengan mengedepankan *skill*, kompetensi dan integritas karyawan. Perseroan juga telah mentaati semua aturan yang berlaku terkait remunerasi, dimana besaran remunerasi seluruh karyawan Perseroan telah sesuai atau berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perseroan.

Selama masa aktif kerja, karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) menerima remunerasi sebagai berikut.

1. Penghasilan Bulanan, mencakup gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, insentif prestasi, tunjangan kemahalan, tunjangan transport, tunjangan jabatan, dan tunjangan mobilitas.
2. Penghasilan Tahunan, mencakup bantuan sewa rumah, tunjangan cuti tahunan, tunjangan pendidikan anak sekolah, tunjangan hari raya, bonus, dan seragam dinas.
3. Pemeliharaan Kesehatan, mencakup rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan khusus.
4. Penghasilan Sesuai Kondisi dan Waktu Tertentu, dijelaskan lebih lanjut dalam bab SDM.

Terkait dengan remunerasi, Perseroan senantiasa berupaya agar tidak terjadi *gap* yang terlalu tinggi. Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Gaji Tertinggi dan Terendah / Highest and Lowest Salary Comparison Table

Pihak Terkait Related Parties	Nilai Tertinggi (Rp) Highest Value (IDR)	Nilai Terendah (Rp) Lowest Value (IDR)	Perbandingan Comparison
Dewan Komisaris / Board of Commisioners	44,775,000	40,297,500	1,11 : 1
Direksi / Directors	99,500,000	89,550,000	1,11 : 1
Karyawan / Employee	49,058,342	4,809,404	10,20 : 1
Level I / Level I	49,058,342	31,793,010	1,54 : 1
Level II / Level II	26,960,904	24,224,281	1,11 : 1
Level III / Level III	18,855,888	15,108,628	1,25 : 1
Level IV / Level IV	10,246,141	4,809,404	2,13 : 1

- **Program Pensiun**

Sebelum memasuki masa pensiun, karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) diberikan pembekalan keterampilan dengan Program Pelatihan Pra Purna

Currently, the prevailing CLA is CLA period 2014-2016 with Number: SP.137/HK.06/2014-DU, SP.AP.I.01/PKB/VI/2014 and 012/DPP-AKA/VI/2014. PT Angkasa Pura I (Persero) has routinely organized meetings with union organizations. The meetings discussed about the fulfilment of employment rights and reponsibility or formulating disciplinary act if there is a disciplinary violation by employees.

- **Remuneration**

Remuneration policy applied by the Company is the one prioritizing skill, competence, and integrity of the employee. The Company also has obeyed all applied regulations related to remuneration, in which the amount of remuneration to all employees of the Company has been according to or above the Minimum Wage Standard in the operational field of the Company.

During their tenure, the employees of Angkasa Pura I (Persero) receive the following remuneration.

1. Monthly Income, including basic salary, spouse allowance, annual leave, child support, food allowance, performance incentive, transportation allowance, functional allowance, and mobility allowance.
2. Annual Income, including housing allowance, annual leave allowance, child education allowance, holiday allowance, and uniforms.
3. Healthcare includes out-patient, in-patient, and special services.
4. Other income subject to certain Condition and Period, which is further explained in HR Section.

Related to remuneration, the Company continuously makes a great effort to avoid overly far wage gap. The highest and lowest wage gap ratio for 2016 is stated below.

- **Retirement Program**

Before retirement, employees of Angkasa Pura I (Persero) given debriefing skills with Pre Purna Bhakti Training Program which aims to prepare for retirement

Bhakti yang bertujuan untuk mempersiapkan masa pensiun karyawan PT Angkasa Pura I (Persero), dalam mengembangkan potensi diri dan mampu mengelola permasalahannya sehingga siap secara mental dan spiritual dalam menghadapi serta menjalani masa pensiun dengan tetap nyaman, sehat, bugar dan produktif.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pengetahuan dan wawasan yang diberikan meliputi hal-hal berikut ini:

1. *Spiritual Emotion Power*;
2. Kiat Menghadapi Status Purnabakti;
3. *Healty Secret*;
4. *Enterpreneurship*;
5. Menciptakan Keluarga Harmonis Pasca Purnabakti;
6. Kunjungan Usaha;
7. Resolusi/Personal Action Plan (rencana aksi) bersama YAKKAP.

Setelah memasuki masa pensiun, karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) menerima kesejahteraan sebagai berikut:

1. Manfaat Pensiun, melalui Dana Pensiun Angkasa Pural (DAPENRA) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta Jaminan Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Manfaat Tunjangan Hari Tua, yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) (YAKKAP I).
3. Pemeliharaan Kesehatan Pensiun, yang dilakukan oleh YAKKAP I.
4. Manfaat Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan.

• **Tingkat Turnover Karyawan**

Tingkat *turnover* karyawan di PT Angkasa Pura I (Persero) dapat disebabkan oleh beberapa alasan antara lain: pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lain-lain. Pada tahun 2016, tingkat *turnover* karyawan di PT Angkasa Pura I (Persero) mencapai 4,85%, menurun dibandingkan tingkat *turnover* karyawan tahun 2015 sebesar 5,74%. Besarnya tingkat *turnover* karyawan khususnya disebabkan oleh banyaknya jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun.

employees of PT Angkasa Pura I (Persero), to develop self-potential and capable manage the problem so prepared mentally and spiritual in the face of pension period with stay comfortable, healthy, fit and productive.

In meeting those needs, knowledge and insight that are given includes the following:

1. *Spiritual Emotion Power*;
2. Strategy To Face Retirement;
3. *Healthy Secret*;
4. *Enterpreneurship*;
5. Creating a Happy Family After Retirement;
6. Business Visit;
7. Resolution/Personal Action Plan with YAKKAP.

Upon retirement, the employees of Angkasa Pura I (Persero) receive the following benefits:

1. Retirement benefits, through the Angkasa Pura I (Persero) Pension Fund (DAPENRA) and Pension Fund Financial Institution.
2. Old Age Allowance Benefit, managed by the Angkasa Pura I Employee Welfare Foundation (YAKKAP I).
3. Retiree's Health Care, provided by YAKKAP I.
4. Old Age Security Benefit, provided by the BPJS for Employment Services.

• **Employee Turnover Rate**

Employee turnover rates in Angkasa Pura I (Persero) can be caused by several reasons, including: retirement, death, resignation, and others. In 2016, the turnover rate of employees in Angkasa Pura I (Persero) reached 4.85%, lower than the level of turnover in 2015 amounted 5.74%. The amount of employee turnover, especially due to the large number of employees who retire.

Tabel Tingkat Turnover Karyawan / Employee Turnover Rate Table

Keterangan Description	2016	2015
Pensiun / Retired	160	136
Resign / Resigned	11	6
Meninggal / Died	2	3
Lain-lain / Others	3	7
Jumlah Karyawan Keluar / Total Employee Quit	176	152
Jumlah Karyawan / Total Employee	3,025	3,135
Tingkat Turnover / Turnover Rate	4.85%	5.74%

DAMPAK KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan CSR terkait dengan ketenagakerjaan di tahun 2016 sudah cukup efektif sesuai dengan tujuannya dalam rangka memenuhi kepentingan para karyawan, sehingga tercipta keselarasan tujuan karyawan dengan tujuan Perseroan. Dengan adanya keselarasan tujuan, maka *engagement* karyawan akan meningkat dan akan menurunkan tingkat *turnover* karyawan. Angka *turnover* karyawan tercatat menurun menjadi 4,85% dibandingkan tahun 2015. Selain itu survei kepuasan pegawai yang rutin dilaksanakan oleh Perseroan menunjukkan hasil adanya kenaikan *index* tingkat kepuasan pegawai pada tahun 2016 yang berada pada level 4,19 (kategori "puas") dimana pada tahun 2015 berada pada level 4,05. Berdasarkan hasil survei kepuasan pegawai dapat dikatakan bahwa pegawai Perseroan loyal terhadap perusahaan. Hal ini sejalan dengan tingkat kesejahteraan, peluang, dan lingkungan kerja yang mendukung.

KESEHATAN

KEBIJAKAN

Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan Perseroan secara keseluruhan. Oleh karenanya, upaya menjaga kesehatan karyawan menjadi tanggung jawab bersama. Perseroan memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing.

PT Angkasa Pura I (Persero) memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan secara mandiri untuk Pegawai meliputi rawat jalan, rawat inap, serta pelayanan khusus. Jaminan fasilitas kesehatan kepada karyawan diyakini dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan kinerja karyawan. Pemberian fasilitas kesehatan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.121/KP.30/2004 tanggal 9 Desember 2004, tentang Fasilitas Para Pejabat, Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero).

RENCANA KEGIATAN 2016

Rencana kegiatan CSR yang terkait dengan pengelolaan kesehatan karyawan adalah berupa jaminan pemeliharaan kesehatan secara mandiri dari PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk rawat jalan, rawat inap, serta pelayanan khusus yang meliputi alat bantu baca, pengobatan dan perawatan gigi, alat bantu dengar, *prothesa* anggota gerak, *prothesa* mata, serta dimulainya keikutsertaan karyawan pada program BPJS Kesehatan. Dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai, diharapkan produktivitas karyawan akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Rencana kerja kesehatan karyawan telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016.

ACTIVITY IMPACT

The implementation of CSR policy related to labor in 2016 has been very effective according to the objective to fulfil the need of employees, so the harmony between employees' purpose and the Company's purpose is established. By the existence of this harmony, employee engagement will increase and the employee turnover will decrease. The rate of employee turnover is stated to decrease into 4,85% compared to year 2015. Besides, employee satisfaction survey conducted routinely by the Company showed an increase of satisfactory level index in 2016 to the level 4,19 ("satisfied" category) where in 2015 the score was 4,05. Based on the employee satisfaction survey result, we can conclude that the Company employees are loyal to the company. This goes well with the level of welfare, opportunity, and supporting working environment.

HEALTH

POLICY

Employees' Health is one of the main key of achieving general individual and Company performance. Therefore, efforts to maintain the health of employees is a shared responsibility. The Company facilitates employees with several activities that are expected to raise awareness and motivation to maintain personal health.

PT Angkasa Pura I (Persero) provides health care insurance for the employee independently, include outpatient, inpatient, and special services. Guarantee of health facilities to the employees are believed to provide peace and improve employee performance. The provision of health facilities stipulated in the Decree of Directors Number: KEP.121/KP.30/2004 dated 9 December 2004, about amenities Officials, Official Travel and Health Care Employees PT (Persero) Angkasa Pura I.

ACTIVITY PLAN 2016

CSR implementation activity plan related to community health management is in the form of Health care benefits independently from PT Angkasa Pura I (Persero) for outpatient, inpatient, and special services which include reading tools, medical and dental care, hearing aids, prostheses of limbs, eye prostheses, as well as the commencement of the employee participation in the BPJS program. By giving adequate health facilities, employee productivity is expected to be maintained and improved continuously. Work Plan for Employee Health has been stated in Work Plan and Budget (RKAP) 2016.

PELAKSANAAN

Perseroan sangat memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan karyawannya. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan dan anggota keluarganya cukup komprehensif yang mencakup fasilitas kesehatan berupa:

- Rawat jalan, bagi pegawai yang berobat ke dokter di luar dokter Perseroan seluruh biayanya mendapatkan penggantian dari Perseroan.
- Rawat inap, bagi pegawai dan keluarganya diberikan fasilitas rawat inap sesuai dengan kelas kamar yang telah ditentukan untuk masing-masing golongan jabatan.
- Pelayanan khusus, yang meliputi alat bantu baca, pengobatan dan perawatan gigi, alat bantu dengar, *prothesa* anggota gerak, dan *prothesa* mata.

Pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) juga disediakan fasilitas klinik yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai. Selain itu, bagi pegawai dalam masa pensiun mendapatkan fasilitas kesehatan bagi dirinya beserta keluarga sesuai yang tercantum pada Surat Keputusan. Fasilitas kesehatan bagi pegawai pensiun dikelola oleh YAKKAP I, yaitu berupa biaya rawat inap per orang per tahun sesuai dengan ketentuan Perseroan.

DAMPAK KUANTITATIF

Pengelolaan fasilitas kesehatan yang baik pada karyawan telah memberikan dampak peningkatan kesehatan dan kinerja pegawai yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka produktivitas karyawan yaitu menjadi sebesar Rp2.029.181 per karyawan di 2016 dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.674.523 per karyawan.

KESELAMATAN KERJA

KEBIJAKAN

Aspek Keselamatan Kerja merupakan salah satu hal yang jadi perhatian manajemen Perseroan. Perseroan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat, aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja Perseroan yang optimal. Kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja PT Angkasa Pura I (Persero) tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.143/KP.10.43/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Angkasa Pura I (Persero).

RENCANA KEGIATAN 2016

Perseroan memiliki komitmen terhadap Keselamatan Kerja dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan Perseroan dikendalikan dengan tujuan untuk melindungi setiap orang, aset Perseroan dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perseroan merencanakan untuk melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perseroan secara berkesinambungan.

IMPLEMENTATION

The company is very attentive for the health and welfare of its employees. Health facilities provided for the employees and their family members are fairly comprehensive and includes health facilities as follows:

- Outpatient, for employees who went to the doctor outside the Company, all costs to get reimbursement from the Company.
- Hospitalization, for employees and their families are given in-patient facilities in accordance with the class of rooms that have been determined for each class of positions.
- Special Services, which includes reading tools, medical and dental care, hearing aids, prostheses of limbs and eye prostheses.

The Head Office and Branch Office Angkasa Pura I (Persero) also provided clinical facilities that can be used by employees. In addition, for employees in retirement getting health facilities for themselves and their families as stated in the Decree. Healthcare facilities for employee pensions are managed by YAKKAP I, in the form of hospitalization cost per person per year in accordance with the provisions of the company.

QUANTITATIVE EFFECT

A good health facility management for employees has given a significant increase to the health and performance. This is shown by an increase of employee productivity rate at IDR2,029,181 per employee in 2016 from the previous result at IDR1,674,523 per employee.

WORK SAFETY

POLICY

Work Safety Aspect is one of the main attentions for the Company. The Company makes a serious effort in creating a safe, secured, and comfortable working environment to support the establishment of optimized Company performance. The policy related to occupational health and safety PT Angkasa Pura I (Persero) contained in the Decree of Directors Number: KEP.143/KP.10.43/2012 dated 13 December 2012 on the Safety Management System and Occupational Health PT Angkasa Pura I (Persero).

ACTIVITY PLAN 2016

The Company has a commitment to Work Safety to ensure that the potential hazards and risks and K3 risks in the Company's activities are managed in order to protect everyone, the Company assets and the environment from possible occupational accidents and diseases.

KEGIATAN

Keselamatan kerja Karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dalam upaya menciptakan keselamatan kerja di lingkungan gedung dan kantor, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Perseroan memiliki komitmen terhadap K3 dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan Perseroan dikendalikan dengan tujuan untuk melindungi setiap orang, aset Perseroan dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Untuk mewujudkan Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud, maka seluruh jajaran Manajemen Perseroan dan Pegawai berupaya untuk:
 - a. Menciptakan lingkungan tempat kerja yang sehat, selamat, aman dan nyaman bagi pegawai, pelanggan, mitra kerja, maupun pihak lain yang berada di lingkungan Perseroan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Perseroan.
 - b. Secara berkesinambungan melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perseroan.
 - c. Memenuhi sumber daya guna mendukung terlaksananya program-program K3.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 guna terciptanya peningkatan K3 secara berkelanjutan dan kondisi K3 yang kondusif.
3. Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai, pelanggan dan mitra kerja Perseroan agar dipatuhi serta ditinjau secara berkala oleh Direksi.

ACTIVITY

Employee Work Safety is very important for the Company in conducting daily operational activities. In the effort to create work safety in buildings and offices, some actions has conducted as follows:

1. The Company has a commitment in K3 by ensuring potential hazards and K3 risks in the Company activities are managed in purpose to protect everyone, The Company has a commitment to Work Safety to ensure that the potential hazards and risks and K3 risks in the Company's activities are managed in order to protect everyone, the Company assets and the environment from possible occupational accidents and diseases.
2. To realize the K3 Policy as mentioned, all Board of Management and Employees of the Company seeks to:
 - a. Creating a workplace environment that is healthy, safe, secured, and comfortable for employees, customers, partners, and other parties that are in the Company in Supporting the achievement of the Vision and Mission of the Company.
 - b. Continuously conducting development, implementation, and maintenance of K3 in the Company.
 - c. Fulfilling the useful resources to support the implementation of the program - K3 program.
 - d. Evaluating the implementation of K3 improvement in creating a continuous improvement and stable condition of K3.
3. K3 Policies referred communicated to all Employees, customers and business partners of the Company to be adhered to and reviewed periodically by the Board of Directors.

**Tabel Jumlah Kecelakaan Kerja Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) /
Number of Employee work Accident of PT Angkasa Pura I (Persero) Table**

Tahun/ Year	Jan Jan	Feb	Mar	Apr	Mei May	Jun	Jul	Agu Aug	Sep	Okt Oct	Nov	Des Dec	Total/ Total
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

PENGELOLA K3

Unit pengelola K3 di Kantor Pusat yaitu *Airport Safety Group* yang dibentuk tahun 2016. *Airport Safety Group* memiliki 3 (tiga) Departemen. Salah satu dari Departemen adalah *Occupational Safety Health Department* yang fokus pada pengelolaan K3.

K3 MANAGEMENT

K3 Management Unit at the Central Office is named Airport Safety Group, formed in 2016. Airport Safety Group has 3 (three) Departments. One of the departments is Occupational Safety Health Department which focuses on K3 Management.

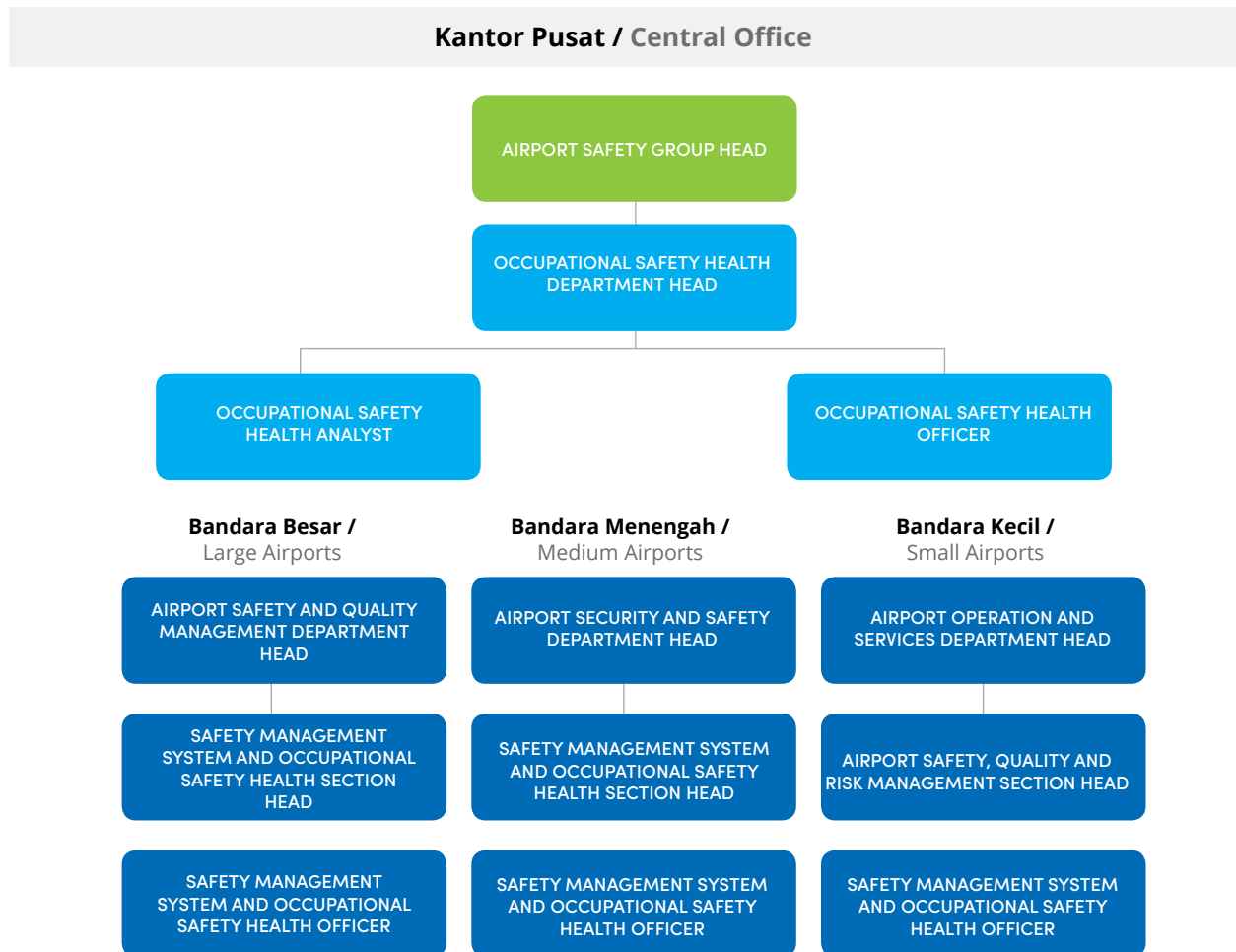
Sedangkan, struktur organisasi pengelola K3 di Kantor Cabang dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan ukuran Kantor Cabang, yaitu:

- a. Bandara kelas besar dan menengah;
- b. Bandara kecil (bagan nomor 3).

K3 Management organization structure in Branch Office is divided into 2 (two) based on the size of the Branch Offices, which are:

- a. Large and medium class airports;
- b. Small airport (chart number 3).

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA K3 /
K3 MANAGEMENT ORGANIZATION STRUCTURE**



PROGRAM K3 TAHUN 2016

No.	Program Kerja / Work Program	Sasaran / Target	Hasil / Result
1.	Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Work Health and Safety Management System Certification (SMK3) in Ahmad Yani International Airport Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> - Standardisasi Sistem Manajemen K3 yang diterapkan di PT Angkasa Pura I (Persero) sesuai dengan peraturan yang berlaku - Menentukan tingkat pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3. - Menilai efektivitas Penerapan SMK3 di tempat kerja. - Mengidentifikasi potensi peningkatan penerapan SMK3. - Standardized K3 Management System implemented in PT Angkasa Pura I (Persero) has been according to the regulations - Determining the level of Fulfilment to the Government Regulations Number 50 year 2012 about SMK3. - Rate the effectivity of SMK3 implementation in workplace. - Identify potential increase in SMK3 implementation 	<p>Tingkat pencapaian 87,3% (memuaskan atau sertifikat bendera emas). Merupakan bandara pertama di Indonesia yang telah bersertifikat SMK3 dengan 166 kriteria (PP No.50 Tahun 2012).</p> <p>Achievement level 87,3% (satisfying or gold flag certificate). The first airport in Indonesia to have the SMK3 Certificate with 166 criteria (PP No.50 Year 2012).</p>
2.	Penyusunan dokumen SMK3 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. SMK3 document preparation in I Gusti Ngurah Rai Bali International Airport.	Standardisasi Sistem Manajemen K3 yang diterapkan di PT Angkasa Pura I (Persero) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standardized K3 Management System implemented in PT Angkasa Pura I (Persero) has been according to the regulations.	<p>Hasil <i>Gap Analysis</i> Awal: memenuhi 45.78% dari 166 kriteria Rencana sertifikasi Tahun 2017.</p> <p>Early Gap Analysis Result: fulfilling 45.78% from 166 Certification plan 2017 criteria.</p>
3.	Penyusunan dokumen SMK3 di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Penyusunan dokumen SMK3 di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.	Standardisasi Sistem Manajemen K3 yang diterapkan di Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standardized K3 Management System implemented in PT Angkasa Pura I (Persero) has been according to the regulations.	<p>Hasil <i>Gap Analysis</i> Awal: memenuhi 43.37% dari 166 kriteria.</p> <p>Hasil <i>Gap Analysis</i> Akhir: memenuhi 66.87% dari 166 kriteria Rencana sertifikasi Tahun 2017.</p> <p>Early Gap Analysis Result: fulfilling 43.37% from 166 criteria.</p> <p>Final Gap Analysis Result: fulfilling 66.87% from 166 Certification plan 2017 criteria.</p>
4.	Sertifikasi personal : <ul style="list-style-type: none"> - Ahli K3 Umum (sertifikasi Kementerian Tenaga Kerja). - Auditor Internal SMK3 (sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP). - Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) (sertifikasi Kementerian Tenaga Kerja). Personnel Certification : <ul style="list-style-type: none"> - General K3 Expert (Ministry of Manpower Certification). - SMK3 Internal Auditor (National Agency of Professional Certification (BNSP) Certification). - First Aid (P3K) Officers Training (Ministry of Manpower Certification).. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku. - Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih wajib membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3). Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 04/MEN/1987 Tentang P2K3, sekretaris P2K3 bersertifikasi Ahli K3 Umum. - Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 dan Sertifikasi SMK3 Perusahaan, Perusahaan wajib melaksanakan Audit Internal SMK3. Sesuai PP No. 50 Tahun 2012, Auditor SMK3 wajib bersertifikasi Auditor Internal SMK3. - Sesuai Permenaker Nomor 15 Tahun 2008 setiap tempat kerja dengan jumlah pegawai lebih dari 150 orang, harus ada Petugas P3K bersertifikasi Kemenakertrans. - Human Resource Competence improvement in regards of fulfilling the applicable K3 laws and regulations. - Every company that employs 100 or more employees must form K3 Committee (P2K3). Based on The Act No 1 Year 1970 and Permenaker Number 04/MEN/1987 About P2K3, P2K3 secretary must possess General K3 Expert Certification. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ahli K3 Umum diikuti oleh peserta dari kantor pusat dan kantor cabang sejumlah 7 orang. - Auditor Internal SMK3 diikuti oleh peserta dari kantor pusat dan kantor cabang sejumlah 18 orang. - Pelaksanaan Pelatihan Petugas P3K dilaksanakan di bulan Januari 2017 dengan jumlah peserta 20 orang dari <i>Airport Safety Group, Airport Operation</i> dan <i>Airport Security</i>. - General K3 Expert is followed by 7 participants from Central Office and Branch Offices - SMK3 Internal Auditor is followed by 18 participants from Central Office and Branch Offices - Implementation of First Aid (P3K) Officers Training is held in January 2017 with 20 participants from Airport Safety Group, Airport Operation and Airport Security.

No.	Program Kerja / Work Program	Sasaran / Target	Hasil / Result
		<ul style="list-style-type: none"> - In K3 Management System implementation and Company SMK3 Certification, the Company must conduct SMK3 Internal Audit. Based on PP No, 50 Year 2012, SMK3 Auditor Must possess SMK3 Internal Auditor Certification. - In accordance to the Permenaker Number 15 Year 2008, every work place with more than 150 employees must have First Aid Officers with Ministry of Manpower Certification. 	
5	<p>Ikut serta dalam kegiatan <i>Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization Forum (APOSHO)</i> di New Delhi India. Involved in Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization Forum (APOSHO) in New Delhi India.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah wawasan dan informasi perkembangan standard dan teknologi K3 - Berbagi pengalaman dalam pengelolaan K3 di Perseroan - Kerjasama antar komunitas K3 di kawasan Asia Pasifik - Memperkuat peran Indonesia sebagai anggota APOSHO dalam mendorong terciptanya budaya K3 - Gaining knowledge and information related to technology and standard development of K3 - Sharing experience in K3 management in the Company - Cooperating together among the K3 communities in Asia Pacific - Strengthening the role of Indonesia as the member of APOSHO in encouraging the establishment of K3 culture 	<p>Pelaksanaan tanggal 3 – 8 April 2016, dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konferensi memberikan ruang untuk para delegasi memberikan ide-ide baru pengelolaan K3 di masing- masing kegiatan usahanya - Pengelolaan K3 pada kegiatan bidang usaha lebih kepada Prosedur, SDM dan Lingkungan Kerja yang baik. - Hasil perbaikan dokumen APOSHO ke 30 di Korea akan diusulkan menjadi kebijakan organisasi untuk mendorong kebijakan badan dunia melalui ILO. - Rencana pemberlakuan Sistem Manajemen K3 berdasarkan ISO 45001 <i>Occupational Safety Health Management System</i>. <p>The event is held on 3 – 8 April 2016, with results as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The conference gives opportunity to delegations to give new ideas in K3 management in each of their business activity - K3 management in business activities focuses more on Good Procedures, Human Resource, and Working Environment - The result for the 30th APOSHO document improvement in Korea will be proposed as the organization policy to encourage world institution policy through ILO. - K3 Management Implementation Plan based on ISO 45001 Occupational Safety Health Management System. .
6.	<p>Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menyelenggarakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donor darah karyawan/ karyawan. - Lomba Poster K3 yang diikuti karya- wan/karyawan. - Pemasangan spanduk tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. - Lomba Senam yang diikuti karyawan/karyawan Kantor Pusat. <p>Commemoration of Work Health and Safety (K3) Month by organizing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Employee Blood Drive - K3 Poster Competition by employees - Work Health and Safety (K3) banner installment - Gymnastic competition followed by Central Office employees. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan kesadaran dan budaya K3 di tempat kerja. - Terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas. - Terwujudnya kemandirian dalam berbudaya K3. - Growing the K3 awareness and culture at work - Creating a safe, secure, comfortable, and efficient work place to promote productivity - Realizing the independency of K3 culture 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan tanggal 12 Januari-12 Februari 2016 dengan Tema “Tingkatkan Budaya K3 untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing di Pasar Internasional”. - Seluruh kegiatan diikuti oleh peserta dengan penuh antusias. - Jumlah peserta donor darah mencapai 95 peserta. - The event is held on 12 January - 12 February 2016 with the Theme “Improve K3 culture to promote Productivity and Competitiveness in International Market.” - All activities are followed enthusiastically by the participants - Blood Drive participants reache 95 people.

No.	Program Kerja / Work Program	Sasaran / Target	Hasil / Result
7.	Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Simulasi Penggunaan Hydrant bagi Tim Tanggap Darurat Kantor Pusat. Utilizing Light Fire Extinguisher (APAR) Training and Hydrant Utilization Simulation for Central Office Emergency Response Team.	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bentuk pelatihan dalam meningkatkan kemampuan pegawai PT Angkasa Pura I (terutama Tim Tanggap Darurat) dalam upaya mencegah bahaya kebakaran dan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan. - Mengetahui kondisi dan tindakan berbahaya untuk pencegahan kebakaran di area kerja. - As a form of training in improving the ability of PT Angkasa Pura I employees (especially Emergency Response Team) to prevent the danger of fire and the use of Light Fire Extinguisher. - Understanding the dangerous condition and action to prevent fire in workplace. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh peserta mengikuti kegiatan teori dan praktek dengan antusias. - Peserta diberi kesempatan untuk menggunakan Alata Pemadam Api Ringan Jenis Dry Chemical Powder dan CO₂ dan simulasi penggunaan Hydrant. - All participants enthusiastically followed the theoretical and practical activities. - Participants are given an opportunity to utilize Light Fire Extinguisher type Dry Chemical Powder and CO₂ and Hydrant Utilization simulation.

DAMPAK KUANTITATIF

Dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang didukung dengan kegiatan sosialisasi dan berbagai pelatihan, telah memberikan dampak yang cukup efektif. Selama tahun 2016, tidak terjadi kecelakaan kerja pada pegawai (*zero accident*).

QUANTITATIVE IMPACT

The implementation of Work Health and Safety Management supported by Socializing and many training activities have given effective impacts. Throughout 2016, there has been no employee working accident (*zero accident*).



Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

CSR Related to Social and Community Development



Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting demi keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan, karena secara langsung atau tidak langsung melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan memandang sangat penting untuk melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Public Welfare has been very important for the sake of the continuation of the Company operational activity, because community is involved, directly or indirectly. Therefore, the Company sees that it is very important to perform its responsibility to the community.

DASAR PENERAPAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Landasan hukum pelaksanaan program CSR PT Angkasa Pura I (Persero) mengacu kepada aturan dan perundangundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) AngkasaPura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68);

THE BASIS OF CSR PROGRAM

The legal bases of the implementation of CSR Program for PT Angkasa Pura I (Persero) refers to the regulations and legislation below:

1. Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives (State Gazette of 1992 No. 116);
2. Law Number 9 of 1992 concerning Small Enterprises (State Gazette 1995 No. 74);
3. Government Regulation No. 5 of 1992 on Transfer form Public Corporation (Perusahaan Umum/Perum) Angkasa Pura I became a Limited Liability Company (Perusahaan Perseroan/Persero) (State Gazette 1992 No. 1);
4. Government Regulation No. 2 of 1998 on Limited Liability Company (Persero) (State Gazette 1998 No. 15) as amended by Government Regulation No. 45 Year 2001 (State Gazette 2001 No. 68);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117);
6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
7. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.42/KU.13/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013;
10. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.22/KU.13/2015 tanggal 17 Februari 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero);
12. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor : KEP.23/KU.13/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Pedoman Program Pelayanan Kesehatan Keliling PT Angkasa Pura I (Persero);
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER.07/MBU/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL);
14. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN;
5. Government Regulation No. 64 of 2001 on the Status Transfer of Duties and Authority of the Ministry of Finance in Company (Persero) to the State Minister for State Owned Enterprises (State Gazette 2001 No. 117);
6. Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 regarding SOE Partnership Program with Small Business and Community Development Program;
7. Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.42/KU.13/2010 dated June 11, 2010 on Implementation Guidelines Partnership Program and Community Development;
8. Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises number: PER-05/MBU/2013 dated 1 May 2013 on the Second Amendment to the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 regarding the Agency Partnership Program with State-Owned Small Business and Community Development Program, as amended by Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-20/MBU/2012 dated 27 December 2012;
9. Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-07/MBU/2013 dated 27 June 2013 on the Third Amendment to the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 on Partnership Program With State-Owned Enterprises Small Business and Community Development Program, as amended by Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-20/MBU/2012 dated December 27, 2012 and the Regulation of the Minister for State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2013 dated 1 May 2013;
10. Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-08/MBU/2013 dated 10 September 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Community Development Program;
11. Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.22/KU.13/2015 dated 17 February 2015 On Implementation Guidelines for Partnership and Community Development Program of PT Angkasa Pura I (Persero);
12. Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.23/KU.13/2015 dated 17 February 2015 regarding Guidelines for Mobile Health Care Program PT Angkasa Pura I (Persero);
13. Regulation of the Minister of SOE No. PER.07/MBU/2015 dated 22 May 2015 about the Partnership Program for State Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL);
14. Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 on the Partnership

15. Surat Edaran Nomor : ED. 55/KU.12/2015/PD-B Tanggal 8 September 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
16. Surat Kementerian BUMN nomor: S-04/D4.MBU/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun Buku 2015;
17. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
15. Circular Letter Number : ED. 55 /KU.12/2015/PD-B Dated 8 September 2015 On Partnerships and Community Development Program (PKBL);
16. Ministry of SOE Letter number : S-04/D4.MBU/07/2015 dated 24 July 2015 on Alteration of Decree RUPS Annual Report PT Angkasa Pura I (Persero) Financial Year 2015;
17. Regulation of the Minister of SOE Number: PER-03/MBU/12/2016 dated 16 Desember 2016 On The Alteration of Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 on the Partnership and Community Development Program (PKBL);

VISI

Menjadi penyelenggara PKBL yang mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil menjadi usaha tangguh dan mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MISI

1. Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
2. Menciptakan sinergi pengembangan usaha melalui pembentukan *cluster*.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja Perseroan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PKBL

Organisasi pengelolaan dana Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.146/OM.01.01/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.59/OM.01.01/2013 tanggal 19 Juni 2013.

Berdasarkan Keputusan Direksi tersebut, organisasi pengelola dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berubah dari unit PKBL menjadi *unit Corporate Social Responsibility (CSR)* dan berada dibawah *President Director* dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada *President Director*. Dan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.82/OM.02.01/2014 Tanggal 11 Juli 2016. Berdasarkan keputusan Direksi tersebut, unit *Corporate Social Responsibility (CSR)* berada di bawah Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya unit CSR bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha sebagai supervisinya.

Untuk pelaksanaan dan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Kantor Pusat berada di bawah tanggung jawab *Head Of Corporate Social Responsibility* dan dalam pelaksanaannya dibantu langsung oleh *Corporate Social Responsibility Cooperation Department Head* dan *Corporate Social Environment Department Head*.

VISION

Hosted a Partnership that encourages the growth of small business into strong and independent businesses, and improve the welfare of society.

MISSION

1. Improving the ability of small businesses to be strong and independent.
2. Create synergy of business development through the formation of clusters.
3. Improving the quality of the social environment around the working area of the Company.

ORGANIZATION STRUCTURE OF PKBL MANAGEMENT

Fund management of PKBL organization implemented stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.146/OM.01.01/2012 dated 18 December 2012, which was amended by Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) Number: KEP.59/ OM.01.01/2013 dated 19 June 2013.

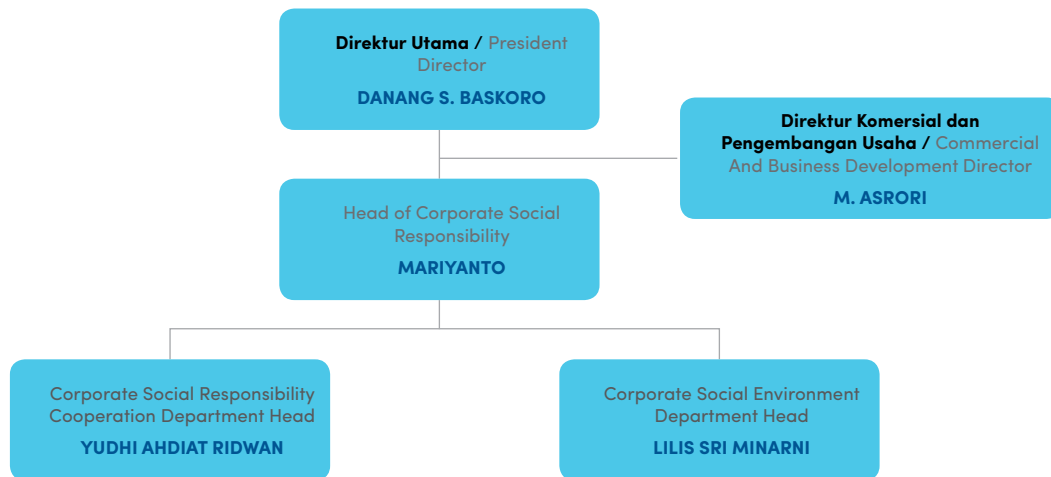
Based on the Directors' resolution, fund management organization Partnership Program and Community Development (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL) change of unit PKBL into the unit Corporate Social Responsibility (CSR) and is under the President Director, wherein in performing their duties is responsible to the President Director, and the corresponding Decree of the Board of PT, Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.82/OM.02.01/2014 Tanggal 11 Juli 2016. Based on the Decree of The Board Directors, Corporate Social Responsibility (CSR) unit is under the President Director. In performing the duties, CSR unit is is responsible to the President Director and Commercial And Business Development Director as the supervisor.

The implementation and management of funds of the Partnership and Community Development (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL) at the Head Office is under the responsibility of Head Of Corporate Social Responsibility and the implementation is directly assisted by the Corporate Social Responsibility Cooperation Department Head and Corporate Social Environment Department Head.

Untuk Kantor Cabang yang masuk kategori Bandara besar, pengelolaan dana PKBL dilaksanakan oleh CSR Section Head dibawah tanggung jawab Sales Department Head, sedangkan untuk Kantor Cabang lainnya dilaksanakan oleh Sales and CSR Section Head dibawah tanggung jawab Sales and Shared Services Department Head.

For Branch Office in the category of major airports, PKBL fund management is conducted by CSR Section Head under the responsibility of the Sales Department Head, while the other branch offices is held by Sales and CSR Section Head under the responsibility of Sales and Shared Services Department Head.

Susunan Pengurus PKBL Angkasa Pura I / Angkasa Pura I PKBL Management



KEBIJAKAN

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk kinerja dan investasi sosial PT Angkasa Pura I (Persero) kepada masyarakat. Melalui implementasi program CSR yang terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan, Perseroan ingin menciptakan manfaat atas kehadiran Perseroan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kebijakan Program pengembangan sosial kemasyarakatan di PT Angkasa Pura I (Persero) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.42/KU.13/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

RENCANA KEGIATAN 2016

Rencana Kegiatan untuk CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:RIS-72/D7.MBU.4/12/2015 tanggal 8 Desember 2015.

POLICY

CSR implementation is one of the form of social performance and investment from PT Angkasa Pura I (Persero) to community. Through a well-planned, right on target, transparent, and continuous CSR Program implementation, the Company would like to create benefit of the existence of the Company through efforts of improving the standard of living and welfare of the Indonesian community in general.

Program development of civil society in PT Angkasa Pura I (Persero) is implemented based on the Minister of State Owned Enterprise No. PER-08/MBU/2013 dated 10 September 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 on Partnership Program SOE with Small Business and Community Development Program as well as the Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.42/KU.13/2010 dated 11 June 2010 on Implementation Guidelines Partnership Program and Community Development.

ACTIVITY PLAN 2016

Plan of CSR Activities related to social and community stated is mentioned in Partnership and Community Development Program's Work Plan and Budget of PT Angkasa Pura I (Persero) Number:RIS-72/D7.MBU.4/12/2015 on 8 December 2015.

KEGIATAN

PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat, sehingga menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Setiap usaha kecil yang mengikuti Program Kemitraan ini diharapkan dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal sehingga masyarakat disekitarnya mendapatkan penghasilan yang cukup. Dengan demikian dapat menggerakkan roda perekonomian di masyarakat sehingga masyarakat yang tidak dapat bekerja di lingkungan bandar udara, tetap merasakan manfaat kehadiran bandar udara - bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan yang diberikan PT Angkasa Pura I (Persero) bersifat *non* komersial. Mekanisme penyalurannya dilakukan berdasarkan evaluasi atas persyaratan dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha, serta kebutuhan pembinaan yang diperlukan oleh para usaha kecil. Secara umum, Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan periode 2016 dinilai cukup efektif dan sampai pada sasaran. Besaran dana Program Kemitraan yang disalurkan adalah sebagai berikut:

Tabel Besaran Dana Program Kemitraan /
Amount of Partnership Program Fund Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousands Rupiah)

Tahun Year	Dana Tersedia Available Fund	Dana Disalurkan Distributed Fund	Efektifitas Penyaluran Distribution Effectivity
2016	28,455,719	26,322,000	92.50%
2015	32,319,057	31,516,087	97.52%

PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyalurkan pinjaman kemitraan sejak tahun 1992 yang pada waktu itu dikenal dengan Dana Pegel (Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah), sampai dengan 31 Desember 2016 total pinjaman kemitraan yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp336.516.749.655 kepada 12.704 mitra binaan dan total penyaluran hibah sebesar Rp45.077.156.809. Selama periode 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) merealisasikan pinjaman kemitraan kepada 623 mitra binaan dengan nilai pinjaman sebesar Rp26.322.000.000 untuk 8 sektor usaha yang telah ditentukan oleh Kementerian BUMN.

ACTIVITY

PARTNERSHIP PROGRAM

The Partnership Program is a program of economic empowerment and improvement of the people, through lending partnerships for working capital and investment. The program aims to improve the ability of small businesses run by the community, so that the entrepreneurs can become strong and independent. Every small business that follows Partnership Program is expected to evolve and absorb labor from the local community so that the people around him get adequate income. Thus, it will drive the economy in the community so that people who cannot work in the airport environment, still feeling the benefits of the presence of airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero).

FUND DISTRIBUTION OF PARTNERSHIP PROGRAM

The Partnership Program provided by Angkasa Pura I (Persero) is non commercial. The delivery mechanism is based on an evaluation of the terms and installments, which are adjusted to the ability of businesses, as well as training needs required by small businesses. In general, realization of fund distribution of Partnership Program in year 2016 is deemed effective and right on the target. The amount of Partnership Program fund distributed is as follows:

PT Angkasa Pura I (Persero) has distributed partnership loan since 1992, then known as Weak Economy Entrepreneur Fund (Dana Pegel /Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah), up to 31 Desember 2016 the total partnership loan realized is IDR336,516,749,655 to 12.704 partners and the total grant distribution is IDR45,077,156,809. Throughout the period of 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) realized partnership loan to 623 partners with the value of loan as much as IDR26,322,000,000 for 8 business sectors regulated by Ministry of SOE.

Tabel Jumlah Penyaluran Pinjaman Kemitraan /
Amount of Partnership Loan

(dalam ribuan Rupiah / in thousands Rupiah)

Tahun Year	Penyaluran		Akumulasi Penyaluran	
	Jumlah Mitra Partners	Nilai (Rp) Value (IDR)	Jumlah Mitra Partners	Nilai (Rp) Value (IDR)
2016	623	26,322,000	12,704	336,516,750
1992-2015	12,081	310,194,750	12,081	310,194,750

MITRA BINAAN

Usaha Kecil yang menerima dana Program Kemitraan selanjutnya disebut Mitra Binaan yang dikelompokkan dalam 8 (delapan) sektor usaha, yaitu Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Jasa dan sektor Lainnya.

Jumlah mitra binaan yang mendapat dana pinjaman dari program kemitraan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 12.704 mitra binaan yang tersebar di wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero). Penyaluran dana pinjaman tersebut mencakup sektor usaha antara lain: 3.061 mitra binaan sektor industri, 6.115 mitra binaan sektor perdagangan, 139 mitra binaan sektor pertanian, 310 mitra binaan sektor peternakan, 57 mitra binaan sektor perkebunan, 128 mitra binaan sektor perikanan, 2.721 mitra binaan sektor Jasa dan 173 mitra binaan sektor lainnya.

PARTNERS

Small business receiving Partnership Program fund will then be referred to as Partners that are put in 8 (eight) business sector, namely Industry, Trade, Agriculture, Livestocks, Plantation, Fisheries, Services, and other sectors.

The number of partners receiving loan fund from partnership program up to 31 Desember 2016 is 12.704 partners spread across PT Angkasa Pura I (Persero) working area. The distribution of the loan fund includes business sector as follows: 3.061 industry partners sector, 6.115 trade partners sector, 139 agriculture partners sector, 310 livestock partners sector, 57 plantation partners sector, 128 fisheries partners sector, 2.721 services partners sector, and 173 other partners sector.

Tabel Penyaluran Pinjaman Kemitraan berdasarkan Sektor Usaha / Distribution Partnership Loan based on the Business Sector

(dalam ribuan Rupiah / in thousands Rupiah)

No	Sektor Usaha Mitra Binaan Partner Business Sector	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2015 Accumulated Realization up to Year 2015		Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2016 Accumulated Realization up to Year 2016	
		Jumlah Mitra Partners	Nilai Pinjaman Loan Value	Jumlah Mitra Partners	Nilai Pinjaman Loan Value
1	Industri / Industry	2,896	76,602	3,061	83,885
2	Perdagangan / Trade	5,807	138,215	6,115	151,145
3	Pertanian / Agriculture	132	12,891	139	13,141
4	Peternakan / Livestocks	294	5,841	310	6,453
5	Perkebunan / Plantation	43	1,083	57	1,488
6	Perikanan / Fisheries	126	3,029	128	3,129
7	Jasa / Services	2,612	68,707	2,721	73,389
8	Lainnya / Others	171	3,828	173	3,888
Jumlah / Total		12,081	310,195	12,704	336,517

Berdasarkan penyebaran mitra binaan per wilayah, dana pinjaman yang disalurkan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel Penyaluran Pinjaman Kemitraan berdasarkan Wilayah / Distribution Partnership based on Region Table

(dalam ribuan rupiah / in thousand Rupiah)

No	Propinsi/Wilayah Propinsi/Wilayah	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2015 Accumulated Realization up to Year 2015		Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2016 Accumulated Realization up to Year 2016	
		Jumlah Mitra Partners	Nilai Pinjaman Loan Value	Jumlah Mitra Partners	Nilai Pinjaman Loan Value
1	DKI Jakarta	417	23,443	417	23,443
2	Bali	1,480	37,406	1,563	40,811
3	Jawa Timur / East Java	1,244	37,286	1,321	41,095
4	Sulawesi Selatan / South Sulawesi	1,256	30,776	1,335	33,546
5	Kalimantan Timur / East Kalimantan	889	27,586	938	30,351
6	Papua	550	8,156	558	8,522
7	Sulawesi Utara / North Sulawesi	763	17,230	793	19,071

No	Propinsi/Wilayah Propinsi/Wilayah	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2015 Accumulated Realization up to Year 2015		Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2016 Accumulated Realization up to Year 2016	
		Jumlah Mitra Partners	Nilai Pinjaman Loan Value	Jumlah Mitra Partners	Nilai Pinjaman Loan Value
8	Yogyakarta	936	31,300	1,001	34,315
9	Jawa Tengah (Solo) / Central Jawa (Solo)	650	16,737	678	18,097
10	Kalimantan Selatan / South Kalimantan	1,086	21,846	1,164	23,822
11	Jawa Tengah (Semarang) / Central Jawa (Semarang)	732	18,594	766	20,144
12	Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara	1,054	23,068	1,111	25,283
13	Maluku	166	2,476	179	2,816
14	Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara	858	14,290	880	15,200
Jumlah / Total		12,081	310,195	12,704	336,517

REALISASI DANA BINA LINGKUNGAN PERIODE 2015 -2016

COMMUNITY DEVELOPMENT FUND REALIZATION 2015 -2016

**Tabel Realisasi Dana Bina Lingkungan Tahun 2016 /
Community Development Fund Realization Table Year 2016**

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

Uraian Description		Realisasi 2016 2016 Realization	Realisasi 2016 2016 Realization	RKA 2016 2016 RKA
A	DANA TERSEDIA / Available Fund			
a	Saldo Dana Awal / Fund Balance	1,396,834	966,279	1,792,453
b	Alokasi Penyisihan Laba / Profit Allowance Allocation	9,286,015	-	-
c	Pengembalian Pokok Pinjaman / Principal Loan Return	20,014,377	23,675,349	23,061,899
d	Pendapatan (Jasa administrasi pinjaman, dan lainnya) / Income (Loan Administrative Service, etc)	3,214,118	3,814,092	3,619,166
e	Pembelian Aset Tetap / Fixed Asset Purchasing	-	-	-
f	Biaya Operasional / Operational Cost	1,301,764	-	-
	Jumlah A / Total A	35,213,109	28,455,719	28,473,517
B	PENGUNAAN DANA / Fund Expenses			
a	Pinjaman Kemitraan / Partnership Loan	30,778,500	26,322,000	27,370,000
b	Hibah Pembinaan / Guidance Grant	737,587	-	-
	Jumlah B / Total B	31,516,087	26,322,000	27,370,000
C	BEBAN/HUTANG LAIN-LAIN / Debit/Other Credit	2,730,743	(4,754)	(24,453)

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial masyarakat terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah dengan pelaksanaan Program Bina Lingkungan, yakni program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN pemberian hibah pembinaan merupakan kegiatan Program Bina Lingkungan, sehingga terhitung mulai bulan Juli kegiatan hibah merupakan kegiatan Program Bina Lingkungan.

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

The commitment of improving the quality of the community's social environment related with the implementation of social responsibility is within the implementation of Environmental Development Program, which is a citizens' social condition empowerment and increasing their quality of life. According to BUMN Minister Regulation number: PER-09/MBU/07/2015 on 3 July 2015 about Partnership Program and Environmental Development Program BUMN giving a grant for development is an activity of Environmental Development Program, therefore ever since July granting activities are part of Environmental Development Program.

Pelaksanaan program ini meliputi pemberian bantuan yang terdiri atas beberapa sektor yaitu:

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Pelestarian alam;
- g. Bantuan Sosial;
- h. Hibah Pembinaan.

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan telah dilaksanakan oleh Perseroan sejak Tahun 2000. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan dalam program strategis dan program *responsive*.

BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM

Bencana alam terjadi diluar kekuasaan manusia dengan demikian untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana alam tersebut dan bencana alam merupakan faktor yang tidak dapat diprediksi, namun demikian Perusahaan tetap tanggap dan siaga untuk membantu meringankan penderitaan para korban bencana alam. PT Angkasa Pura I (Persero) tidak tinggal diam namun memberikan bantuan tanggap darurat untuk korban bencana alam seperti bantuan untuk korban bencana kebakaran, banjir, dan erupsi gunung, tanah longsor, dan lainnya.

Total bantuan kepada korban bencana alam yang telah disalurkan sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp6.142.989.496. Sedangkan untuk periode 2016 bantuan untuk sektor bencana alam yang telah disalurkan adalah sebesar Rp161.500.000.

Selama periode 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan bantuan kepada para korban bencana alam yang melanda sebagian wilayah di Indonesia antara lain kepada:

- a. Bantuan untuk Banjir Garut tahun 2016;
- b. Bantuan untuk para korban gempa di Aceh tahun 2016;
- c. Bantuan untuk Banjir di Bima tahun 2016.

BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci penting dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, tangguh dan berdedikasi. PT Angkasa Pura I (Persero) juga memberikan perhatian lebih dalam pembinaan generasi bangsa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Di samping hal tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) juga memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasannya sehingga dapat langsung diimplementasikan untuk menjadi wirausaha baru.

The implementation of this program includes giving aid and assistance in several sectors, which are:

- a. Aid for natural disaster victims;
- b. Assistance for Education and/or training ;
- c. Assistance for Improvement of Public health;
- d. Assistance for developing public infrastructure and facilities;
- e. Assistance for building Worship facilities ;
- f. Nature conservation;
- g. Social Aid;
- h. Coaching grants.

The Company has implemented the Community Development Program since 2000. The activities carried out in this period include activities that can be categorized under the strategic program and responsive program.

AID FOR NATURAL DISASTER VICTIMS

Natural disasters occur beyond the power of man thus to ease the burden of those suffering from natural disasters and natural disasters are factors that can not be predicted, however the Company remains responsive and alert to help alleviate the suffering of the victims of natural disasters. PT Angkasa Pura I (Persero) do not remain silent but provides emergency assistance to victims of natural disasters such as aid for victims of catastrophic fires, floods and eruptions, landslides, etc.

Total aid to victims of natural disasters that have been distributed up to 2016 is IDR6,142,989,496 in value. As for the 2016 natural disaster relief to the sector that has been distributed is IDR161,500,000.

During the period of 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) has been providing assistance to victims of natural disasters that hit some regions in Indonesia, among others to:

- a. Garut Flood Disaster Aid in 2016;
- b. Aceh Earthquake victims Aid in 2016;
- c. Bima Flood Disaster Aid in 2016.

EDUCATIONAL ASSISTANCE

Education is one of the important keys to generate quality, resilient and ethical young generation in the future. Therefore, PT Angkasa Pura I (Persero) also pays high attention in promoting the nation's young generation by providing opportunities for better education. PT Angkasa Pura I (Persero) also provides education and training facilities for the community to enhance their knowledge, skills and their understanding so that they can emerge as new entrepreneurs.

PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2016 telah menyalurkan dana untuk bantuan bidang pendidikan dan pelatihan sebesar Rp31.054.768.608. Sedangkan untuk periode 2016 bantuan pada sektor pendidikan yang telah diberikan sebesar Rp5.742.744.342.

Beberapa bantuan program bina lingkungan bidang pendidikan pada periode 2016 antara lain:

- a. Bantuan beasiswa untuk siswa siswi yang bersekolah di sekitar wilayah kerja bandara yang telah dilaksanakan di berbagai Kantor Cabang.
- b. Bantuan Alat Musik untuk SMAN I Blitar.
- c. Pembangunan sarana untuk sekolah dan atau sarana pendidikan di sekitar wilayah kerja.
- d. Pelatihan wirausaha bagi warga di sekitar wilayah kerja.
- e. Sebagai tindak lanjut kegiatan "BUMN Hadir Untuk Negeri" dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-72 PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas 2 Kota Kendari, Pembinaan mantan atlet di Kota Kendari, Pembinaan Desa Terpencil, Perbatasan dan Rawan Konflik di Desa Sama Bahari Wakatobi, Siswa Mengenal Nusantara dengan mengirimkan beberapa siswa di Kota Kendari ke Jawa Timur, dan BUMN Mengajar yang dilaksanakan di seluruh Kantor Cabang.

BANTUAN BIDANG KESEHATAN

PT Angkasa Pura I (Persero) peduli terhadap bidang kesehatan secara penuh. Dimana sejak tahun 2012, Perseroan mencanangkan Program Pelayanan Kesehatan Keliling dengan motto "Ibu dan Anak Sehat, Bangsa Kuat". Program Pelayanan Kesehatan ini memberikan bantuan kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang fokus terhadap kesehatan ibu dan balita.

Program ini dilaksanakan untuk membantu meningkatkan Kesehatan Ibu hamil dan menyusui juga bagi anak-anak (bayi dan balita). Selain program Pelayanan Kesehatan Keliling perseroan juga memberikan bantuan dalam bentuk lain yang masih dalam lingkup sektor kesehatan.

PT Angkasa Pura I (Persero) sampai dengan tahun 2016 telah menyalurkan dana untuk sektor kesehatan adalah sebesar Rp18.099.715.840. Sedangkan untuk periode tahun 2016 dana bantuan yang telah disalurkan untuk sektor ini adalah sebesar Rp3.966.090.242. Beberapa bantuan yang telah disalurkan dalam bidang kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan keliling selama periode 2016 telah dilaksanakan di 11 Kantor Cabang. Pelayanan yang diberikan dalam program ini antara lain penyuluhan untuk balita dan ibu hamil, pengobatan gratis bagi warga disekitar Bandara, dan pemberian makanan tambahan dan juga vitamin bagi para pasien yang datang dalam program ini.
- b. Fogging demam berdarah yang dilaksanakan di wilayah sekitar Kantor Cabang Bandara Sam Ratulangi Manado untuk menghindari perkembanganbiakan nyamuk demam berdarah dan malaria.

PT Angkasa Pura I (Persero) since 1992 up to 2016 has distributed educational and training assistance fund as much as IDR31,054,768,608. While in 2016 the assistance in education sector given is as much as IDR5,742,744,342.

Some of the community development educational division 2016 programs are as follows:

- a. Scholarship aid for students who go to school around the airport working area which has been implemented in many branch offices.
- b. Musical Instrument Aid for SMAN I Blitar.
- c. Building facilities for schools and/or educational tools around the working area.
- d. Enterpreneurhip training for people around the working area.
- e. As a follow up for "BUMN Hadir Untuk Negeri" activity, to commemorate the 72nd Indonesia's Independence Day, PT Angkasa Pura I (Persero) organized activities such as Convicted Criminals Development at Kendari Correction Facility Level 2, Former Athletes Development in Kendari, Remote Village Development, Borders and Potential Conflict in Desa Sama Bahari Wakatobi, Students To Know The Archipelago by sending some students from Kendari to East Java, and SEO (BUMN) Teach which is held in all the branch offices.

HEALTHCARE AID

PT Angkasa Pura I (Persero) fully supports health issues. In 2012, the Company initiated *Program Pelayanan Kesehatan Keliling* (Mobile Health Service Program) with the motto "*Ibu dan Anak Sehat, Bangsa Kuat*" (Healthy Mother and Child, Strong Nation). The purpose of the program is providing mothers and children the access to mobile vehicle fully equipped with healthcare equipment.

The program is the Company mean to increase the health level of pregnant women, breastfeeding mothers and children (infants and toddlers). But this program is not the only health-related programs initiated by the Company.

By 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) has made donation with the total sum of IDR18,099,715,840 for healthcare service. Whereas in 2016 only, the sum of the donation reached the number of IDR3,966,090,242. The following is the Company contribution related to healthcare services:

- a. In 2016, Mobile Health Service Program has successfully been held in 11 branch offices of the Company. The program includes socialization of information concerning pregnant women, motherhood and children, free healthcare service for communities around the airports, and distribution of free food and vitamin for the participants of the program.
- b. Fogging to control the spread of mosquitos transmitting malaria and dengue fever and which was held in the area around Sam Ratulangi Airport Branch Office in Manado.

- c. Bantuan berupa sunatan massal bagi warga kurang mampu di sekitar wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero).
- d. Bantuan untuk pembangunan dan renovasi sarana kesehatan di sekitar wilayah kerja.
- e. Operasi Katarak bekerjasama dengan Rumah Sakit setempat.

BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

Perhatian Perseroan terhadap peningkatan sarana dan prasarana umum juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan dalam Program Bina Lingkungan. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kementerian BUMN dalam membangun desa. Sampai dengan tahun 2016 bantuan untuk sektor ini adalah sebesar Rp30.652.890.411, sedangkan untuk periode 2016 bantuan yang telah disalurkan adalah senilai Rp5.451.485.475. Bantuan program bina lingkungan bidang pengembangan sarana dan prasarana umum selama periode 2016 antara lain berupa:

- a. Pembangunan Sarana Air Bersih di Semin Gunung Kidul.
- b. Pembangunan Toilet umum di Pura Uluwatu.
- c. Pembuatan saluran irigasi dusun Slanget Penujak.
- d. Sebagai tindak lanjut kegiatan "BUMN Hadir Untuk Negeri" dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-72 PT Angkasa Pura melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Penyediaan sarana air bersih dan MCK di Desa Sama Bahari Wakatobi, Penyediaan tempat penitipan anak di Pasar Pedis kota Kendari, Elektrifikasi rumah tangga yang belum teraliri listrik di Desa Sama Bahari untuk 200 KK dan Bedah Rumah untuk 39 rumah veteran di Kota Kendari dan Makassar.

BANTUAN SARANA IBADAH

Dalam rangka meningkatkan spiritual masyarakat, salah satu upaya yang telah dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) adalah dengan membantu pembangunan sarana ibadah dan memperbaiki sarana ibadah yang telah ada. Mengingat pentingnya hal ini, sejak tahun 1992 sampai dengan 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan bantuan sarana peribadatan sebesar Rp26.701.712.463 sedangkan untuk periode 2016 dana yang telah disalurkan untuk sektor ini adalah sebesar Rp3.989.557.896.

Bantuan yang diberikan untuk berbagai bentuk perbaikan dan pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero). Beberapa bantuan program bidang sarana ibadah selama periode 2016 antara lain berupa:

- a. Bantuan pembangunan masjid Ash Shobirin dalam rangkaian acara *Sail Tomini*.
- b. Bantuan renovasi masjid Nurul Isra di Makassar.
- c. Bantuan renovasi dan peningkatan pembangunan sarana ibadah di sekitar wilayah kerja antara lain di

- c. Free circumcision service for the underprivileged living nearby the working area of PT Angkasa Pura I (Persero).
- d. Donation for building and renovating of healthcare facilities.
- e. Free Cataract Operation in cooperation with local Hospitals.

ASSISTANCE FOR DEVELOPING PUBLIC INFRASTRUCTURE AND FACILITIES

The Company's focus on the development of public facilities is a part of Community Development Program. The program itself is our contribution in supporting village development program initiated by Ministry of State Owned Enterprise. By 2016, the donation made to this sector reached IDR30,652,890,411 and IDR5,451,485,475 in 2016 alone. The following is our contribution under Environment Sustainability Program that focuses on the development of public facilities in 2016:

- a. The construction of clean water facilities in Semin, Gunung Kidul.
- b. The construction of public toilets in Pura Uluwatu.
- c. The construction of irrigation system in Slanget, Penujak.
- d. As the follow up of "BUMN Hadir Untuk Negeri" (State Owned Enterprise for People) activity as a part of the Celebration of the 72nd Republic of Indonesia Independence Day, PT Angkasa Pura organized programs such as clean water facilities and public toilet construction in Desa Sama Bahari, Wakatobi, day care service initiation in Pasar Pedis, Kendari, rural electrification for 200 families in Sama Bahari Village and home renovation for 39 military veterans families in Kendari and Makassar.

AID FOR DEVELOPING WORSHIP FACILITIES

In order to strengthen the spiritual aspect of the local community, one of the programs of PT Angkasa Pura I (Persero) is focused to provide aid for building and renovating worship facilities. Considering the importance of this matter, from 1992 until 2016 the Company has provided aid for this program which reached the total amount of Rp26,601,712,463, while the amount for 2016 only was Rp3,989,557,896.

There are many forms of donation provided by the Company related to building and renovating worship facilities in every working area of the Company. For the period of 2016, some of them include:

- a. Providing aid for building *Ash Shobirin* Mosque for *Sail Tomini* event.
- b. Providing aid in renovating *Nurul Isra* Mosque in Makassar.
- c. Providing aid in renovating and improving worship facilities in the area of the Head Office and Branch

- Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
- d. Bantuan untuk Rumah Ibadah di seluruh kepulauan Maluku, Biak dan Kupang dalam rangka kegiatan "BUMN Hadir Untuk Negeri".

BANTUAN SOSIAL

Untuk membantu meringankan beban masyarakat di sekitar wilayah usaha, PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2016 telah memberikan bantuan sosial ini senilai Rp6.829.900.071 sedangkan selama periode kemiskinan adalah sebesar Rp2.677.224.593. Beberapa bantuan program Bina Lingkungan bidang sosial selama 2016 antara lain:

- a. Program Pasar Murah Safari Ramadhan sebagai tindak lanjut "BUMN Hadir Untuk Negeri" yang dilaksanakan di seluruh kepulauan Maluku, Kepulauan Biak dan Kupang dalam rangka untuk menyambut Idul Fitri tahun 1437 Hijriah, jumlah paket yang diberikan adalah sejumlah 3400 paket.
- b. Kegiatan Pasar Murah sebagai tindak lanjut "BUMN Hadir Untuk Negeri" dengan jumlah paket sebanyak 1000 paket.

PROGRAM HIBAH PEMBINAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN pemberian hibah pembinaan merupakan kegiatan Program Bina Lingkungan, sehingga terhitung mulai bulan Juli kegiatan hibah merupakan kegiatan Program Bina Lingkungan.

1. PROGRAM PELATIHAN DAN PEMAGANGAN MITRA BINAAN

Untuk menjadikan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri maka dilakukan pembinaan kepada mitra binaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembinaan diberikan dalam bentuk hibah pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lainnya yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan. Program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dilaksanakan bekerjasama baik dengan perguruan tinggi maupun lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam hal mengembangkan ilmu kewirausahaan dan motivasi berwirausaha.

Beberapa program pendidikan dan pelatihan serta pemagangan bagi mitra binaan antara lain:

- a. Pelatihan untuk para mitra binaan di Kantor Cabang Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, Bandara Internasional Lombok Praya dan Bandara Sam Ratulangi Manado.
- b. Pemagangan yang dilaksanakan oleh Mitra binaan Kantor Cabang Bandara Sultan Aji Muhammad

Office.

- d. Providing aid for Worship Facilities in the area of Maluku Islands, Biak and Kupang which is a part of "BUMN Hadir Untuk Negeri" (State Owned Enterprise for People) program.

SOCIAL AID

To ease the economic burden of the underprivileged around the working area of PT Angkasa Pura I (Persero), the Company has distributed social aid. From 1992 until 2016, the total amount of the aid has reached IDR6,829,900,071. In 2016, the amount of the aid for poverty reduction sector reached IDR2,677,224,593. Some of the aid distribution for Community Development program in 2016 are:

- a. Bazaar for celebrating Eid Al-Fitr (1437 AH) during the month of Ramadan. This activity is a follow up of "BUMN Hadir Untuk Negeri" (State Owned Enterprise for People) program that was held in Maluku Islands, Biak Islands and Kupang. In the activity, 3400 packages were distributed.
- b. Cheap goods market (bazar) also as a follow up of "BUMN Hadir Untuk Negeri" (State Owned Enterprise for People) program. This time the amount of the distributed package is 1000.

DEVELOPMENT GRANT PROGRAM

In accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprise number PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 on the Partnership Program and Community Development Program of State Owned Enterprise (BUMN), the development grant is a part of Community Development program.

1. TRAINING AND INTERNSHIP PROGRAM FOR DEVELOPMENT PARTNERS

To produce strong and independent small businesses, the Company assisted in providing guidance for the partners in a sustainable and continuous manner. Education, training, internship, marketing, promotion and other activities concerning productivity improvement of the Development Partners are the forms of the guidance. The activities aforementioned were conducted in collaboration with universities and other institution qualified in the field of entrepreneurship and business motivation.

The education, training and internship programs for Development Partners include:

- a. Training for partners at the Company Branch Offices in Adisucipto International Airport in Yogyakarta, Lombok International Airport in Praya and Sam Ratulangi Airport in Manado.
- b. The internship program is carried out by trained partners at the Company Branch Offices in Sultan Aji

- Sulaiman Sepinggang Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi Manado dan Bandara Ahmad Yani Semarang.
- Pemagangan mitra binaan Bandara Syamsudin Noor ke Bali.
 - Pemagangan mitra binaan Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Manado dan Makassar.
 - Pelatihan mitra binaan untuk mitra binaan Bandara Adi Sutjipto, Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Ahmad Yani dan Sam Ratulangi.

Melalui kegiatan ini mitra binaan dapat saling menukar pengalaman dalam menjalankan usahanya, menumbuhkan ide-ide baru untuk dikembangkan serta menambah pengetahuan yang pada akhirnya meningkatkan usaha mereka.

2. PROGRAM PROMOSI

Bantuan pembinaan berupa promosi dan pemasaran dilakukan dengan mengikutsertakan mitra binaan dalam berbagai kegiatan pameran berskala regional dan nasional. Kegiatan pameran yang diikuti mitra binaan antara lain Pameran yang diikuti selama periode 2016 antara lain Gebyar UKM, Pameran Crafina, Pameran Kalsel Expo, Pameran Makassar Expo, Pameran *Manunggal Fair* dan Pameran Internasional seperti Pameran *Vietnam International Trade Fair* dan Pameran *Bazaar Import Shop Berlin* 2016.

Selain mengikuti kegiatan pameran-pameran, PT Angkasa Pura I (Persero) juga membantu promosi produk mitra binaan dengan membuka ruang pameran (*display* produk) di terminal bandara-bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero). Ruang pameran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi maupun eksebis mitra binaan.

Muhammad Sulaiman Airport, Sepinggang, Balikpapan, Sam Ratulangi Airport in Manado and Ahmad Yani Airport in Semarang.

- Internship program for partners of Syamsudin Noor Airport in Bali.
- Internship program for partners of I Gusti Ngurah Rai Airport in Manado and Makassar.
- Training for Development Partners of Adisucipto Airport, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport, Ahmad Yani Airport and Sam Ratulangi Airport.

The purpose of the guidance program is to create a supportive atmosphere in which partners can share their business experience, find new ideas and deepen their knowledge.

2. PROMOTION PROGRAM

Guidance in promotion and marketing activities are carried out by involving partners in various regional and national exhibition events. During 2016, partners joined in regional and national events such as Gebyar UKM, Pameran Crafina, Kalsel Expo, Makassar Expo, Manunggal Fair Exhibition. They also joined in international event such as Vietnam International Trade Fair and Bazaar Import Shop Berlin 2016.

Not involving partners in exhibitions, PT Angkasa Pura I (Persero) also help partners promoting their products by opening display outlets for them in the airports managed by the Company. The partners are allowed to exhibit and promote their products in the outlets.

Tabel Penyaluran Hibah Pembinaan Mitra Binaan tahun 2016 / Development Partners Grant Distribution Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No	Jenis Pembinaan Activities	Nilai (Rp) Amount (Rp)
1	Pendidikan/Pelatihan / Education/Training	590,193
2	Pemagangan / Internship	224,392
3	Promosi, Pameran dan Pemasaran Lainnya / Promotion, Exhibition and Other Marketing Solution	1,523,484
4	Penelitian dan Pengembangan / Research and Development	-
Jumlah / Total		2,338,069

PROGRAM BIDANG PELESTARIAN ALAM

Disamping mendukung Program Pemerintah di Bidang Pelestarian Alam PT Angkasa Pura I (Persero) juga berkomitmen menjadikan lingkungan sekitar Bandara menjadi lebih hijau sejalan dengan misi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam mengembangkan bandara yang ramah lingkungan. Selain penghijauan di area sekitar Bandara dan di lingkungan masyarakat sekitar wilayah usaha, PT Angkasa

NATURAL CONSERVATION PROGRAM

In supporting the Government Program in Natural Conservation Sector, PT Angkasa Pura I (Persero) is committed to make airport area greener which is in accordance with the Company mission to develop eco-friendly airports. In addition to its afforestation effort in the airport area and the local community area surrounding airports, the Company is also active in many natural conservation efforts.

Pura I (Persero) juga berperan aktif dalam pelestarian alam di daerah-daerah penyangga lainnya.

Sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) telah berpartisipasi dalam bidang pelestarian alam dengan nilai total mencapai Rp4.916.875.209. Sedangkan selama tahun 2015 dana yang telah disalurkan untuk bidang ini adalah sebesar Rp480.464.000. Hal-hal yang telah dilaksanakan selama periode 2016 adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan tanaman Cendana, Jambu Mete dan Kemiri di Kotamadya Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur sebagai kelanjutan dari Program penghijauan BUMN Peduli tahun 2012;
- Penangkaran kupu-kupu di SMPN 3 Biak yang bertujuan untuk program Pelestarian satwa juga pembelajaran bagi siswa siswi di sekolah tersebut;
- Penanaman bibit pohon Sengon dan Pule sebanyak 11.000 bibit untuk desa Bobung Yogyakarta;
- Penanaman 2000 Mangrove di Desa Laha dan Tawiri Ambon.

PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

Secara garis besar, penyaluran dana bina lingkungan untuk 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Penyaluran Dana Bina Lingkungan / Community Development Fund Distribution Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No	Jenis Bantuan Aid Type	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bencana Alam / Natural Disaster	161,500	83,774
2	Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training	5,742,744	2,262,991
3	Peningkatan Kesehatan / Health Improvement	3,966,090	3,365,370
4	Sarana Umum / Public Facilities	5,451,485	1,467,476
5	Sarana Ibadah / Worship Facilities	3,989,558	1,366,711
6	Pelestarian Alam / Natural Conservation	480,464	177,560
7	Bantuan sosial / Social Aid	2,677,225	1,225,233
8	Hibah Pembinaan / Development Grant	2,338,070	239,885
9	BUMN Peduli / BUMN Peduli	-	-
Jumlah / Total		24,807,135	10,189,000

Between 1992 and 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) has participated (donated) in many natural conservation efforts with the total amount of donation IDR4,916,875,209. Whereas in 2015, the amount of donation to the sector is IDR480,464,000. Some of the activities in the sector during 2016 period are:

- Conservation of Sandalwood, Cashew and Candlenut trees in the Municipality of Kupang and the District of Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur as the continuation of afforestation in *BUMN Peduli* program 2012;
- Butterfly Conservation in SMPN 3 Biak (State Secondary School 3 of Biak) that serves not only conservation purpose but also education purpose for the students;
- Planting 11,000 seeds of *Sengon* and *Pule* trees in the village of Bobung, Yogyakarta;
- Planting 2,000 mangrove in the village of Lahan and Tawiri, Ambon.

THE DISTRIBUTION OF COMMUNITY DEVELOPMENT FUND

The following is the distribution of community development fund for 2 (two) years.

**Tabel Realisasi Dana Bina Lingkungan Tahun 2016 /
2016 Community Development Fund Realization Table**

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

Uraian Description		Realisasi 2016 Realization 2016	RKA 2016 / 2016 RKA (Working Plan Budget)
A	DANA TERSEDIA / Available Fund		
a	Saldo Dana Awal / Account Balance	2,895	3,861
b	Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina / Profit Allocation from BUMN Pembina	25,246	21,789
c	Alokasi Dana BL dari BUMN Pembina / BL Fund Allocation from BUMN Pembina	-	-
d	Jasa Giro dan Bunga Deposito / Current Account and Deposit Profit	145	47
e	Pendapatan Lain-lain / Other Income	30	-
	Jumlah A / Total A	28,316	25,697
B	PENGGUNAAN DANA / Use of Fund		
a	Penyaluran Bina lingkungan / Distribution of Community Development Fund		
	- BUMN Peduli / BUMN Peduli	-	-
	BUMN Pembina / BUMN Pembina	24,807	21,147
	Subtotal	24,807	21,147
b	Beban Operasional / Operational Expenses	-	-
c	Biaya Dibayar di Muka, Biaya YMH Dibayar / Prepaid Expense, Paid YMH Fee	(3,596)	-
	Jumlah B / Total B	21,211	21,147
C	SALDO AKHIR (A-B) / Ending Balance (A-B)	7,105	4,549

DESA BINAAN

PT Angkasa Pura I (Persero) sampai dengan tahun 2016 telah mengembangkan beberapa desa binaan diantaranya Desa Bobung di Jogjakarta, Desa Winetin, Wusa, Kima Bajo dan Patokaan di Manado, Desa Penujak, Tanak Awu, dan Ketara di Lombok serta Desa Baumata utara di Kupang, dan yang telah diresmikan oleh Kementerian BUMN adalah Desa Bobung di DI Yogyakarta.

1. DUSUN BOBUNG KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dusun Bobung termasuk ke dalam wilayah Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, saat ini dikembangkan oleh pemerintah setempat menjadi desa wisata karena memiliki potensi wisata yang bisa dijual kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Ke-khas-an yang dimiliki Dusun Bobung yaitu hampir semua warganya bermata pencaharian pokok sebagai perajin topeng dan batik kayu, selain bertani dan beternak hewan. Sehingga sejak tahun 2001 Pemda Kab. Gunungkidul mencanangkan dusun ini sebagai desa wisata kerajinan topeng dan batik kayu.

Dusun Bobung dipilih oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebagai Dusun Binaan, dikarenakan sebagai tindak lanjut pengembangan

DEVELOPMENT VILLAGE

Until 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) has developed some of its development villages. Some of the them are Bobung (Yogyakarta), Winetin (Manado), Wusa (Manado), Kima Bajo (Manado), Patokaan (Manado), Penujak (Lombok), Tanak Awu (Lombok), Ketara (Lombok) and Baumata Utara (Kupang). The only village that has been made official for the program is Bobung Village in Yogyakarta.

1. BOBUNG HAMLET, PATUK SUB-DISTRICT, GUNUNGKIDUL DISTRICT

Bobung Hamlet is located in Putat Village, Patuk Sub-district, Gunungkidul District, Yogyakarta. This hamlet is now being developed into tourism village because of its tourism potentials which offer something special not only to domestic tourists but also to international tourists.

The uniqueness of the hamlet lays in its residents' wooden traditional mask and batik making skills which are rare. Besides working as farmers and animal breeders, many residents of the hamlet works as wooden mask and batik makers. In 2001, the Gunungkidul district administration responded to the uniqueness by establishing the village as tourism village with wooden traditional mask and batik craft as its main attraction.

Bobung Hamlet was chosen as development village by PT Angkasa Pura I (Persero) of Adisucipto Airport in Yogyakarta as a response to Ministry of State Owned Enterprise Cluster Program that has been put into practice for two years. This decision is also associated

Program *Cluster* yang telah digaungkan oleh Kementerian BUMN dua tahun terakhir ini, dan dikaitkan dengan Program Membangun Desa yang dicanangkan Kementerian BUMN pada tahun 2012.

Sehingga kiprah PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 2005 melalui Program Kemitraan dan tahun 2011 melalui Program Bina Lingkungan dapat sekaligus mewujudkan berbagai tujuan yang diharapkan oleh Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham.

Saat ini pengrajin batik kayu tidak hanya terpusat di Dusun Bobung saja, tetapi juga berkembang di dusun sekitarnya meliputi dusun Batur dan Gumawang. Sehingga wilayah pembinaan desa binaan saat ini menjadi Desa Putat dan sekitarnya.

Pada awalnya Bandara Adisutjipto masuk ke Dusun Bobung melalui Program Kemitraan untuk mengembangkan usaha pengrajin batik kayu. Seiring dengan perkembangan, bantuan yang diberikan tidak hanya di wilayah dusun Bobung tapi juga dusun-dusun sekitarnya dalam bentuk Pinjaman Kemitraan, baik untuk pengrajin batik kayu maupun pengusaha lain, dan Bantuan Bina Lingkungan.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, terdapat 54 Mitra Binaan (MB) dari Dusun Bobung dan sekitarnya yang telah mendapat pinjaman dan bantuan pembinaan, dimana 17 diantaranya merupakan mitra binaan lanjutan. Sebagian besar dari mereka yaitu sebanyak 43 Pengrajin bergerak di bidang industri, yaitu batik kayu, namun terdapat beberapa mitra binaan yang berusaha di bidang jasa, peternakan, perikanan dan perdagangan. Total pinjaman kemitraan yang telah disalurkan mencapai Rp2,97 miliar. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Penyaluran Program Kemitraan Desa Binaan Putat Patuk Gunung Kidul / Partnership Program Fund Distribution for Development Villages of Putat, Patuk, Gunungkidul Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No	Sektor Sector	Jumlah Amount	MB Development Partners	MB Lanjutan Advanced Development Partners
1	Sektor Industri / Industry Sector	2,135	63	18
2	Sektor Jasa / Service Sector	130	4	1
3	Sektor Perdagangan / Trading Sector	515	14	4
4	Sektor Perikanan / Fishery Sector	25	1	0
5	Sektor Peternakan / Farming Sector	110	5	1
	Jumlah / Total	2,965	70	17

Bantuan Bina Lingkungan yang diberikan selama periode 2016 yaitu pemberian seperangkat Gamelan untuk warga Desa Bobung dan perbaikan Mushola Miftahul Jannah. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bantuan Bina Lingkungan yang telah diberikan mencapai Rp1,44 miliar. Sebagaimana tabel di bawah ini.

with Building Village Program of the Ministry of State Owned Enterprise that is officiated in 2012.

Through 2005 Partnership Program and 2011 Community Development Program, PT Angkasa Pura I (Persero) serve many purposes initiated by Ministry of State Owned Enterprise as Shareholder.

Today in Gunungkidul District, Bobung Hamlet is not the only hamlet that produce wooden batik crafts. The craftsmanship has spread to surrounding hamlets such as Batur and Gumawang. So the working area of the program is now geographically wider (expanded to village level).

In the beginning, the Company (Adisucipto Airport Office Branch) utilized Partnership Program to develop wooden batik craft business only in Bobung Hamlet. Following the development of the program, the Company expands its working area to the hamlets surrounding Bobung. The Company utilized Partnership Loan and Community Development Fund to provide support not only to wooden batik businesses but also to other businesses.

In the 2010-2016 period, the Company has 54 Development Partners from Bobung and surrounding hamlets which already benefited from loan and assistance. From 54 partners, 17 of them are classified as advanced partners. Most of the partners – 43 of them to be exact – engaged in wooden batik industry. The rest engaged in service, farming, fishery and trading. The total amount of the loan provided is IDR2.97 billion. The following table shows the distribution.

For 2016, the donation provided for the residents of Bobung is in the form of a set *gamelan* (Javanese traditional music instruments) and renovation of Miftahul Jannah Mosque. In the period 2010-2016, the amount of Community Development Fund provided reached IDR1.44 billion as shown in the table below.

**Tabel Program Bina Lingkungan /
Community Development Program Table**

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No	Tahun / Year	Sektor / Sector					Total	
			Pendidikan / Education	Sarana Umum / Public facilities	Sarana Ibadah / Worship Facilities	Kesehatan / Healthcare		Pelestarian Alam / Natural Conservation
1	2010	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)		260,000				260,000
		Keterangan / Details		Pembangunan balai pertemuan, pembangunan kamar mandi dan toilet / Meeting hall and public toilet construction				
2	2011	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)		75,000				75,000
		Keterangan / Details		Perbaikan jalan dan gapura / Road and Village Gate Renovation				
3	2012	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)			25,000	230,978		255,978
		Keterangan / Details			Perbaikan sarana ibadah / Worship facility renovation	Balai Pengobatan / Healthcare service center		
4	2013	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	20,000	33,946			106,920	160,866
		Keterangan / Details	Pengadaan sarana belajar mengajar PAUD / Early Childhood Education Institution (PAUD) learning facilities provision	Pengadaan instalasi air bersih / Clean water system construction			Pemberian 16.200 bibit kayu pule dan sengon / Distribution of 16,200 pule and sengon tree seeds	
5	2014	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)		336,000				336,000
		Keterangan / Details		Pembangunan Talud Jalan / Road side construction				
6	2015	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)					50,598	50,598
		Keterangan / Details					Pemberian bibit pule dan sengon / Distribution of pule and sengon tree seeds	
7	2016	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	280,000		20,000			300,000

No	Tahun / Year	Sektor / Sector						Total
			Pendidikan / Education	Sarana Umum / Public facilities	Sarana Ibadah / Worship Facilities	Kesehatan / Healthcare	Pelestarian Alam / Natural Conservation	
1	2010	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)		260,000				260,000
		Keterangan / Details	Seperangkat Gamelan Bobung / A set of Gamelan for Bobung		Perbaikan Mushola Miftahul Jannah / Renovation of Miftahul Jannah Mosque			
	Total		Rp300,000	Rp704,946	Rp45,000	Rp230,978	Rp157,518	Rp1,438,442

2. DESA BINAAN PENUJAK, TANAK AWU, DAN KETARA

Desa Penujak, Tanak Awu, dan Ketara masuk dalam wilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan 3 (tiga) desa yang terletak berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok Praya. Mata pencaharian warga 3 (tiga) desa tersebut yaitu sebagai petani karena sebagian besar wilayahnya masih merupakan lahan pertanian. Selain petani, banyak juga warga bermata pencaharian sebagai tenaga kerja luar negeri, pedagang kelontong, peternak, pengrajin gerabah, dan lain sebagainya.

Desa Penujak, Tanak Awu, dan Ketara dipilih PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Lombok Praya sebagai Desa Binaan sebagai tindak lanjut Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Membangun Desa yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN pada tahun 2012. Selain hal tersebut, pemilihan juga berdasarkan kepada letak 3 (tiga) desa tersebut yang berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok Praya.

Sejak tahun 2012 PT Angkasa Pura I (Persero) kantor cabang Bandar Udara Internasional Lombok Praya telah memberikan pembinaan dan bantuan kepada penduduk di Desa Penujak, Tanak Awu, dan Ketara melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) meliputi pemberian pinjaman dengan jasa administrasi rendah sebesar 6% pertahun bagi masyarakat dengan usaha kecil.

Sampai dengan tahun 2016 penyaluran pinjaman yang telah diberikan di 3 (tiga) desa tersebut adalah sebesar Rp1,57 miliar untuk 65 mitra binaan, sebagian mitra binaan dari ke 3 (tiga) desa tersebut bergerak dalam sektor jasa, peternakan, perikanan dan perdagangan. Pembinaan dalam bentuk pelatihan manajemen dasar diberikan setiap tahunnya kepada seluruh mitra binaan, khususnya mitra binaan tahap pertama. Sebagaimana tabel di bawah ini.

2. PENUJAK, TANAK AWU AND KETARA

Penujak, Tanak Awu and Ketara are located in the Sub-district of Pujut, Lombok Tengah District, Nusa Tenggara Barat Province. These three villages are the nearest villages to Lombok International Airport. Most of the residents of these villages are farmers and most of the area of the villages consist of farming land. A small portion of the residents works as migrant workers, small retailer, animal breeder, earthenware makers etc.

Penujak, Tanak Awu and Ketara were chosen as development villages by PT Angkasa Pura I (Persero) of Lombok International Airport in Praya as a response to Ministry of State Owned Enterprise Building Village Program that was initiated in 2012. This decision is also based on the geographical location the villages which surround the airport.

Since 2012, PT Angkasa Pura I (Persero) of Lombok International Airport has been providing guidance and assistance for the people of Penujak, Tanak Awu and Ketara through Partnership and Community Development Program (PKBL). The program provides loan with affordable annual administration fee (6%) for small business.

Until 2016, the total amount of loan that has been distributed to the three villages (65 Development Partners) is Rp1.57 billion. Most of the partners from the villages engage in the sectors of service, farming, fishery and trading. In the program, the partners – especially the new ones - are provided with basic management training annually. The following is the distribution table.

Tabel Penyaluran Program Kemitraan Desa Ketara, Tanak Awu, Penunjak / Ketara, Tanak Awu and Penunjak Partnership Program Fund Distribution Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No	Tahun / Year	Tahun / Ketara		Tanak Awu / Tanak Awu		Penunjak / Penunjak	
		Jumlah / Amount	MB / Development Partners	Jumlah / Amount	MB / Development Partners	Jumlah / Amount	MB / Development Partners
1	2016	100,000	5	150,000	4	75,000	1
2	s.d 2015 / Until 2015	590,000	22	467,500	24	190,000	9
	Total	690,000	27	617,500	28	265,000	10

Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan antara lain memberikan bantuan melalui program pembangunan sarana ibadah, sarana dan prasarana umum, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, pelestarian alam dan bantuan sosial bagi masyarakat 3 (tiga) desa lingkaran Bandar Udara Internasional Lombok Praya.

Sampai dengan tahun 2016 dana program bina lingkungan yang telah disalurkan adalah sebesar Rp2,34 miliar. Pemberian bantuan bagi masyarakat lingkaran bandara antara lain bantuan untuk pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum di 3 desa tersebut, selain itu Kantor Cabang Bandara Internasional Lombok. Sebagaimana tabel di bawah ini.

The realization of Community Development Program in the villages include worship facilities and public facilities and infrastructure construction, healthcare service improvement, education level improvement, natural conservation and social aid distribution in these three surrounding villages of Lombok International Airport in Praya.

Until 2016, the amount of community development fund that has been distributed reached Rp2.34 billion. The fund is distributed to assist the people in building worship, education and public facilities and infrastructure in these surrounding villages. The details is shown in the table below.

Tabel Penyaluran Program Bina Lingkungan Desa Ketara, Tanak Awu, Penunjak / Ketara, Tanak Awu and Penunjak Community Development Program Fund Distribution Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No.	Tahun / Year	Ketara	Tanak Awu	Penunjak
		Jumlah / Amount	Jumlah / Amount	Jumlah / Amount
1	2016	72,000	100,000	104,925
2	sampai dengan 2015 / Until 2015	751,705	833,744	497,455
	Total	823,705	933,744	584,380

3. DESA WUSA, WINETIN, PATOKAAN, KIMA BAJO

Sejak tahun 2011 PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi Manado telah memberikan pembinaan dan bantuan kepada penduduk di Desa Wusa, Winetin, Patokaan dan Kima Bajo melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) meliputi pemberian pinjaman bagi para pengusaha kecil.

Sampai dengan tahun 2016 penyaluran pinjaman yang telah diberikan di 4 (empat) desa tersebut adalah sebesar Rp170 juta untuk 4 mitra binaan, sebagian mitra binaan dari ke 3 (tiga) desa tersebut bergerak dalam sektor industri, perdagangan dan peternakan. Sebagaimana tabel di bawah ini.

3. WUSA, WINETIN, PATOKAAN AND KIMA BAJO

Since 2011, PT Angkasa Pura I (Persero) of Sam Ratulangi International Airport in Manado has been providing guidance and assistance for the people of Wusa, Winetin, Patokaan and Kima Bajo through Partnership and Community Development Program (PKBL). The program provides loan for small business.

Until 2016, the total amount of loan that has been distributed to the four villages is IDR170 million. The total amount is shared among four Development Partners which engage in industry, trading and farming sector. The following is the distribution table.

**Tabel Penyaluran Program Kemitraan Desa Wusa dan Winetin /
Wusa and Winetin Partnership Program Fund Distribution Table**

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No.	Tahun / Year	Wusa		Winetin	
		Jumlah Amount	MB / Development Partners	Jumlah Amount	MB / Development Partners
1	2016	75,000	1	-	0
2	sampai dengan 2015 / Until 2015	120,000	3	50,000	1
	Total	195,000	4	50,000	1

Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan antara lain memberikan bantuan melalui program pembangunan sarana ibadah, sarana dan prasarana umum, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, pelestarian alam dan bantuan sosial bagi masyarakat 4 (empat) desa lingkaran Bandar Udara Sam Ratulangi Manado.

Sampai dengan tahun 2016 dana program bina lingkungan yang telah disalurkan adalah sebesar Rp1,54 miliar. Pemberian bantuan bagi masyarakat lingkaran bandara antara lain sarana pendidikan untuk sekolah dasar, Pelayanan Kesehatan Keliling, dan Pemberian Sembako Gratis bagi warga kurang mampu di Desa Wusa, Desa Winetin dan Desa Patokaan. Sebagaimana tabel di bawah ini.

The realization of Community Development Program in the villages include worship facilities and public facilities and infrastructure construction, healthcare service improvement, education level improvement, natural conservation and social aid distribution in these four surrounding villages of Sam Ratulangi International Airport in Manado.

Until 2016, the amount of community development fund that has been distributed reached Rp1.54 billion. The fund is distributed to assist the people in building elementary education facilities, providing Mobile Healthcare Service and distributing the nine basic commodities for the underprivileged from Wusa, Winetin and Patokaan. The details is shown in the table below.

**Tabel Penyaluran Program Bina Lingkungan Desa Wusa, Winetin, Kima Bajo dan Patokaan /
Wusa, Winetin, Kima Bajo and Patokaan Community Development Program Fund Distribution Table**

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No	Tahun / Year	Wusa	Winetin	Kima Bajo	Patokaan
1	2016	78,710	20,079	-	22,429
2	sampai dengan 2015	364,800	723,573	29,240	287,714
	Total	443,510	752,652	29,240	310,143

4. DESA BAUMATA UTARA KUPANG

Desa Baumata Utara merupakan salah satu desa binaan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari Kupang yang sampai saat ini masih terus dikembangkan. Sebagai salah satu desa binaan yang sudah digarap oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 2013 beragam program binaan sudah dilaksanakan di desa ini diantaranya, di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sarana prasarana umum.

Manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk masyarakat terus diberikan apalagi, Desa Baumata Utara masuk dalam wilayah operasi perusahaan dan lokasinya berbatasan langsung dengan daerah

4. BAUMATA UTARA VILLAGE IN KUPANG

Baumata Utara is one of the development villages of PT Angkasa Pura I (Persero) of El Tari Airport in Kupang that is continuously being developed. The village was chosen to be one of the development villages in the community development program in 2013. Starting from 2013, the village has undergone a lot of development mainly in the sectors of education, social welfare, and public facilities and infrastructure. The people of the village has received social, economic and environmental benefits from the program.

Baumata Utara village borders with the working area of El Tari Airport working area. It is the reason why the village is targeted by the Corporate Social Responsibility Program of PT Angkasa Pura I (Persero).

lingkungan kerja bandara, sehingga menjadi salah satu daerah sasaran program CSR PT Angkasa Pura I (Persero).

Sampai dengan tahun 2016 dana program bina lingkungan yang telah disalurkan sebesar Rp637,89 juta bantuan yang disalurkan antara lain bantuan pembangunan Gereja Jemaat Baithania Tulun dan Pelayanan Kesehatan Keliling. Sampai dengan tahun 2016 realisasi penyaluran program kemitraan belum dapat terealisasi. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Until 2016, the total amount of distributed community development fund reached IDR637,89 million. The people used the fund to renovate *Gereja Jemaat Baithania Tulun* (Baithania Congregation Church of Tulun) and to support Mobile Healthcare Service. Unfortunately, the partnership program is not effective yet in the area. The details will be shown in the table below.

Tabel Penyaluran Program Bina Lingkungan Desa Baumata Utara / Baumata Utara Community Development Program Fund Distribution Tabel

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

No.	Tahun / Year	Baumata Utara
1	2016	91,635
2	sampai dengan 2015 / Until 2015	546,255
	Total	673,890

BANTUAN CSR

Pada tahun 2016 dana CSR yang telah disalurkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp1,19 miliar yang disalurkan untuk:

1. Program Penghijauan Area *Landside* Bandar Udara Sultan Hasanudin Makassar sebesar Rp53,75 juta.
2. Bantuan dana pembangunan Gudang Tata Usaha Urusan Dalam Makodim 0501/JP BS sebesar Rp81,40 juta.
3. Pembelian 500 unit Al-Qur'an beserta Tajwid dan Terjemahannya sebesar Rp105,82 juta.
4. Pengadaan Kereta Kencana untuk Kantor Cabang Bandar Udara Adi Sutjipto Yogyakarta sebesar Rp385,21 juta.
5. Sosialisasi Perencanaan Keuangan Keluarga Bagi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandar Udara di Kulonprogo sebesar Rp120,90 juta.
6. Pelatihan Kewirausahaan Kulon Progo dengan Tema "Program Pembekalan Dua Hari Bisa Jadi Pengusaha" yang bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp70 juta.
7. Keikutsertaan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam Program CSR Award dari Majalah SINDO *Weekly* dengan nilai Rp50 juta.
8. Keikutsertaan PT Angkasa Pura I (Persero) kantor cabang Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dalam Program CSR Award dari Koran SINDO dengan nilai Rp50 juta.
9. Pengadaan 2 Buah Kereta Kencana untuk Kantor Cabang Bandar Udara Adi Soemarmo Surakarta dengan nilai Rp268,47 juta.

CSR FUND

In 2016, the total amount of CSR fund that has been distributed by PT Angkasa Pura I (Persero) reached Rp1.19 billion. The following is the detailed distribution:

1. Afforestation of Landslide Area of Sultan Hasanudin Airport in Makassar. The fund distributed amounting to IDR53.75 million.
2. Financial support for the construction of District Military Command 0501/JP BS Administration Office Warehouse. The fund distributed amounting to IDR81.40 million.
3. 500 Holy Koran (with translation and transliteration) amounting to IDR105.82 million.
4. The purchase of *Kereta Kencana* (antique horse cart) for Adisucipto International Airport Branch Office in Yogyakarta with total amount of fund IDR385.21 million.
5. The Socialization of Family Financial Planning for Communities Affected by the Construction of the Airport in Kulonprogo. The fund distributed amounting to IDR120.90 million.
6. Entrepreneurship Training in Kulon Progo in collaboration with PT Permodalan Nasional Madani (Persero) with the theme "*Program Pembekalan Dua Hari Bisa Jadi Pengusaha*" ("How to be Successful Entrepreneur in Two Days"). The fund distributed amounting to IDR70 million.
7. Participation in CSR Program Ward of Majalah SINDO *Weekly*. The fund distributed amounting to IDR50 million.
8. The purchase of two *Kereta kencana* (antique horse cart) for Adi Soemarmo Airport with total amount of fund IDR268.47 million.
9. Procurement of 2 *Kereta Kencana* for Adi Soemarmo Airport Branch of Surakarta with value IDR268,47 million.

DAMPAK KUANTITATIF

Pada tahun 2016 penyaluran dana Kemitraan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) mencapai sebesar Rp26.322.000.000 atau sebesar 92% dari total anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp28.455.719.000,- Sedangkan untuk penyaluran Dana Bina Lingkungan pada tahun 2016 mencapai Rp24.807.135.000,- meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp10.189.000.000,-

PENGHARGAAN

Selama tahun 2016 penghargaan yang telah diterima oleh unit CSR PT Angkasa Pura I (Persero):

- SINDO CSR Award untuk PT Angkasa Pura I (Persero) kategori Pemberdayaan Ekonomi;
- SINDO CSR Award untuk PT Angkasa Pura I (Persero) kategori Pengembangan Bisnis UKM, *Environment*, Kesehatan dan Pendidikan.

QUALITATIVE RESULT

In 2016, the total amount of distributed Partnership Program fund of PT Angkasa Pura I (Persero) reached IDR26,322,000,000 which was 92% of the allocated fund IDR28,455,719,000. Whereas the total amount of distributed Community Development Program fund in 2016 reached IDR24,807,135,000. There is a significant increase since the total amount of the year before is only IDR10,189,000,000.

AWARDS

In 2016, the CSR Program of PT Angkasa Pura I (Persero) was honored with many awards:

- SINDO CSR Award for PT Angkasa Pura I (Persero) under the category of Economic Empowerment;
- SINDO CSR Award for PT Angkasa Pura I (Persero) under the category of Small Business, Environmental, Health and Education Development;

Corporate Sosial Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen

CSR Related to The Responsibility to Customers

KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk memberikan kinerja dan pelayanan terbaik dengan mengurangi risiko yang berdampak terhadap *safety* (keselamatan), kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja yang terkait pada penurunan kinerja. Di samping itu, PT Angkasa Pura I (Persero) juga selalu berkomitmen untuk meminimalkan risiko cedera bagi para penumpang di area bandar udara. Terkait dengan keselamatan penerbangan, Perseroan berusaha menempatkan keselamatan operasi penerbangan pada prioritas tertinggi dengan memastikan bahwa risiko terhadap keselamatan penerbangan ditekan pada level yang dapat ditoleransi.

RENCANA KEGIATAN 2016

Perseroan telah menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan melakukan kegiatan penyelesaian pengaduan konsumen dan pelaksanaan survei kepuasan konsumen. Perseroan menargetkan bahwa penyelesaian pengaduan di bawah *Service Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan. Di samping itu, Perseroan juga menargetkan tingkat kepuasan konsumen/pengguna jasa bandar udara yang tinggi, yaitu di atas 4,0 dari skala 1 sampai dengan 4.

POLICY

PT Angkasa Pura I (Persero) is committed to provide the best performance and service to increase the level of safety and decrease the risk of work accidents and work related illness affecting work performance. In addition, the Company is also committed to reduce the risk of serious injury of the passenger and people in the airport area. In the flight safety sector, the Company put flight operation safety in the highest priority by ensuring the existing risk stayed below the tolerable limit.

2016 ACTIVITY PLANNING

The Company has set a working plan to improve customer satisfaction by completing the response to customer complaints and conducting survey on customer satisfaction. The Company targets to complete the complaint-responding process of under Service Level Agreement (SLA) that has been officiated. Furthermore, the Company also focuses to reach the highest point (4.0) in airport user/customer satisfaction scale (1.0 – 4.0).

KEGIATAN

OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH UNTUK KEBANDARUDARAAN

Untuk dapat memastikan bahwa risiko terhadap keselamatan penerbangan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dapat diturunkan dan dipertahankan pada tingkatan yang dapat diterima (*acceptable level*), maka telah dibentuk *Airport Safety Group*.

VISI

Visi *Airport Safety Group* adalah “Menjadi Unit yang memberikan Pelayanan SHE secara efektif dalam seluruh aktifitas dan proses bisnis Bandara”.

MISI

Misi yang dilakukan untuk mencapai visi di atas antara lain:

1. Memastikan Bahwa Aspek K3 merupakan tanggung jawab seluruh entitas Bandara Udara sebagai individu maupun kelompok/unit.
2. Memastikan Perseroan memenuhi seluruh standar dan peraturan yang berlaku dengan menerapkan metode dan prosedur yang sistematis untuk meningkatkan kualitas manajemen K3 secara berkesinambungan.
3. Mengikutsertakan *Airport Safety Group* dalam seluruh proses pengambilan keputusan perusahaan sejajar dengan aspek strategis lainnya.
4. Memastikan seluruh entitas bisnis di Bandara memenuhi kriteria manajemen K3 yang ditetapkan.
5. Menerapkan penggunaan material dan konstruksi secara efisien sesuai kaidah kaidah K3.
6. Menetapkan target-target pencapaian manajemen K3 dan secara terus menerus melakukan *review* untuk meningkatkan kinerja manajemen K3.
7. Mengikutsertakan Perseroan dalam berbagai sertifikasi K3 berskala nasional maupun internasional.

Seluruh aktivitas dan proses bisnis bandar udara baik yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) maupun pihak lainnya perlu mendapatkan pembinaan dalam hal kebijakan K3 Perseroan sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai standar yang berlaku, untuk itu dilaksanakan program-program pelatihan untuk meningkatkan kualitas personil terkait kebijakan K3 Perseroan, program *training* yang dijalankan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. *Training SMK3;*
2. *Training AMDAL;*
3. *Training Safety Management System;*
4. *Training Accident/Incident Reporting;*
5. *Training Human Factor;*
6. *Training Accident/Incident Investigation;*
7. *Training Integrated Safety Management System;*
8. *Training Safety Audit;*
9. *Training Aerodrome Inspector;*
10. *Training Aerodrome Work Safety;*
11. *Training Safety Officer;*
12. *Training Risk Management;*
13. *Training Safety Assessment;*

ACTIVITIES

OCCUPATIONAL SAFETY FOR AIRPORT AFFAIRS

To ensure that the risk threatening flight safety and environmental and working safety is controlled below acceptable level, the Company initiated *Airport Safety Group*.

VISION

Airport Safety Group vision is “Transforming into the unit that can provide SHE services effectively in all activities and processes of Airport affairs.”

MISSION

The missions to support the vision above are:

1. Ensuring that all entities, whether as individual or group/unit, are responsible of every OHS aspects in the Airport.
2. Ensuring the Company meet all applicable standards and regulations by applying systematic methods and procedures to improve OHS management quality continuously.
3. Involving *Airport Safety Group* in every Company decision-making process with all other strategic aspects.
4. Ensuring every business entities in the airports meet the approved OHS management.
5. Following the rules of OHS in the use of material and in construction.
6. Applying OHS management achievement targets and conducting reviews continuously to improve OHS management performance.
7. Involving the Company in all national and international OHS certification.

All airport business activities and processes whether manager by PT Angkasa Pura I (Persero) or by other organization has to be trained in the OHS policy for Companies so their work will be based on the applicable standards. In order to do that, there are many training program focusing on improving personnel's quality related to OHS policy for Companies. The following is some of the programs:

1. OHS Management System Training;
2. Environmental Effect Analysis Training;
3. Safety Management System Training;
4. Accident/Incident Reporting Training;
5. Human Factor Training;
6. Accident/Incident Investigation Training;
7. Integrated Safety Management System Training;
8. Safety Audit Training;
9. Aerodrome Inspector Training;
10. Aerodrome Work Safety Training;
11. Safety Officer Training;
12. Risk Management Training;
13. Safety Assessment Training;

14. Training P3K;
15. Sertifikasi SMK3;
16. Sertifikasi AMDAL.

IMPLEMENTASI SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai salah satu pengelola bandar udara di Indonesia telah membentuk Kebijakan Keselamatan Bandar Udara untuk diterapkan di seluruh bandar udara di bawah pengawasan PT Angkasa Pura I (Persero).

Pembentukan dan persiapan kebijakan keselamatan bandar udara telah memenuhi peraturan-peraturan nasional dan standar-standar internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepada pengguna jasa bandar udara tentang penyediaan pelayanan keselamatan dengan kualitas tertinggi di setiap bandar udara.

PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan secara resmi Kebijakan Keselamatan Operasi Bandara Udara sebagai berikut:

1. Mengembangkan standar Keselamatan Bandar Udara dan Manajemen yang sejalan dengan perkembangan industri perhubungan udara sesuai dengan standar dan rekomendasi ICAO.
2. Mendorong semua staf di bandar udara untuk menyadari akan tanggung jawab dan akuntabilitas mereka sehubungan dengan segala kegiatan Keselamatan Bandar Udara dan bekerjasama penuh untuk hal terkait dengan keselamatan.
3. Memastikan seluruh Pejabat memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Keselamatan Bandar Udara agar sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan yang berlaku.
4. Memastikan ketersediaan sumber daya yang terdidik dan terlatih untuk melaksanakan kebijakan dan strategi keselamatan.
5. Mempromosikan budaya keselamatan guna mendorong semua pihak yang terkait agar selalu memenuhi peraturan dan standar Keselamatan Bandar Udara dan juga menerapkannya ke dalam budaya perusahaan.
6. Mengawasi dan mengevaluasi secara konsisten seluruh kebijakan agar dapat diterapkan dan berkembang secara berkelanjutan.

SASARAN KESELAMATAN

Adapun yang menjadi sasaran keselamatan PT Angkasa Pura I (Persero) adalah:

1. Meminimalkan risiko keselamatan serendah mungkin sesuai tingkat risiko yang secara wajar dapat diterima.
2. Mencapai tingkat standar dan kinerja keselamatan yang telah ditetapkan.
3. Menerapkan secara jelas komitmen keselamatan kepada semua tingkat manajemen.
4. Menciptakan budaya keselamatan bagi seluruh personil bandar udara dan pihak-pihak yang beraktivitas di bandar udara.
5. Menjaga dan meningkatkan tingkat standar dan kinerja keselamatan di bandar udara secara sistematis, proaktif, terbuka dan berkesinambungan.

14. First Aid Training;
15. OHS Management System Certification;
16. Environmental Impact Analysis Certification.

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) IMPLEMENTATION

PT Angkasa Pura I (Persero) as one of the airport management organization in Indonesia has formulated Airport Safety Policy to be applied in all airports under the Company supervision.

The formulation and preparation of the airport safety policy has met every national regulations and international standards. This will be utilized to ensure airport service users experience the best quality in every airports they are in.

The official statement of Airport Operation Safety Policy of PT Angkasa Pura I (Persero) is as follows:

1. Developing Airport Safety Standards and developing Management that is in parallel with the development aviation industry and the ICAO recommendation and standards.
2. Encouraging all airport staffs to be aware of the responsibility and accountability in relation with the Airport Safety activities and to fully cooperate in achieving safety.
3. Ensuring all Supervisors practice their supervision task on the application of Airport Safety to make sure the work meet all applicable safety regulation and standards.
4. Ensuring the availability of trained and experienced resource to perform safety strategy and policy.
5. Promoting safety culture to make all parties aware about the importance of following Airport Safety standards and regulations and adapting the culture into the company culture.
6. Consistently supervising and evaluating every policy and ensuring the policies sustainable application and development.

SAFETY GOALS

The following is the safety goals of PT Angkasa Pura I (Persero):

1. Minimal safety risk in accordance with the risk acceptable level.
2. Achieving the approved safety performance and standards level.
3. Full commitment from all management levels to the safety commitment.
4. Safety culture for all airports personnel and parties conducting activities in airports.
5. Maintaining and improving safety performance and standards level of the airport in a systematic, proactive, open and sustainable manner.



6. Meletakkan keselamatan di bandar udara sebagai garda terdepan operasional bandar udara dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan.
7. Menjamin keselamatan personil bandar udara, pengguna jasa bandar udara, dan pihak-pihak lain yang beraktivitas di bandar udara.

Untuk mencapai sasaran keselamatan tersebut, Perseroan telah melaksanakan:

1. Sistem pelaporan yang bersifat *Non Punitive*.
2. Identifikasi *hazard* dan manajemen risiko.
3. Pendidikan dan pelatihan personil.
4. Komunikasi informasi keselamatan dengan cara dan alat yang sesuai.

Unit SMS menyediakan cara sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko dengan tetap menjaga jaminan bahwa pengendalian *management* risiko ini efektif. Sehingga bahaya yang sudah teridentifikasi dapat dikurangi dan risiko kecelakaan menjadi lebih kecil. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan *safety Performance* yang terdiri dari *safety review* dan latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD); dan
2. Pengawasan dan *Monitoring* Keselamatan yang dilaksanakan dengan Investigasi Internal dan *Safety Audit* oleh Ditjen Perhubungan Udara.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Dalam upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen, PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengikuti dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan sebagai berikut.

6. Making safety as the main consideration in airport operation and airport service business development.
7. Guaranteed safety for airport personnel, service users and other parties conducting activities in airport area.

In order to achieve the abovementioned goals, the Company has performed:

1. Non punitive reporting system.
2. Hazard identification and risk management.
3. Training and education for airport personnel.
4. Safety information communication system with appropriate devices.

SMS unit provides a systematic mean to identify hazard and manage risk while ensuring the effectiveness of the risk management control. This way identified hazard can be controlled and the risk of accidents can be minimized. The activities of SMS unit include:

1. Applying safety performance that consists of safety review and Emergency Situation Management (PKD); and
2. Supervising and monitoring safety practices in Internal Investigation and Safety Audit conducted by Directorate General of Civil Aviation.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

In order to maintain and improve the service, PT Angkasa Pura I (Persero) has conducted surveys as follow.

1. Survei Needs and Wants Customer

Telah dilakukan survei *Needs and Wants Customer* di 5 (lima bandara) PT Angkasa Pura I (Persero) dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut.

LOKASI BANDARA / AIRPORT LOCATION	TANGGAL PELAKSANAAN / TIME
Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang (SRG) Ahmad Yani Airport – Semarang (SRG)	29 November - 1 Desember 2016 / 29 November - 1 December 2016
Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta (JOG) Adisutjipto Airport – Yogyakarta (JOG)	5-7 Desember 2016 / 5-7 December 2016
Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta (SOC) Adi Soemarmo Airport – Surakarta (SOC)	8-10 Desember 2016 / 8-10 December 2016
Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan (BPN) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport – Balikpapan (BPN)	8-10 Desember 2016 / 8-10 December 2016
Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin (BDJ) Syamsudin Noor Airport – Banjarmasin (BDJ)	15-17 Desember 2016 / 15-17 December 2016

2. Survei Customer Satisfaction Index

Tingkat kualitas pelayanan PT Angkasa Pura I (Persero) kepada pengguna jasa bandar udara selalu diukur secara berkala. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan dan sebagai upaya melakukan perbaikan atas aspek-aspek pelayanan yang menurut pelanggan masih memerlukan peningkatan. Salah satu metode pengukuran kepuasan pelanggan yaitu dengan *Survey Customer Satisfaction Index (CSI)*. Survei CSI maksudkan untuk mengukur kepuasan pelanggan yang meliputi penumpang, kru pesawat, *station manager airline*, mitra usaha konsesional dan mitra usaha kargo. Survei ini dilakukan oleh lembaga independen nasional yaitu INACA (*Indonesia National Air carrier Association*). Nilai/skor dalam survei ini menggunakan ukuran skala Likert, dengan nilai terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 5. Pelaksanaan survei dilakukan di 13 bandar udara di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dengan pelaksanaan di tahun 2016 sebagai berikut:

1. Customer Wants and Needs Survey

This survey has been conducted in five airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero). The following is the details.

2. Customer Satisfaction Index Survey

The quality level of service provided by PT Angkasa Pura I (Persero) is evaluated continuously. The purpose of this is to maintain the quality level and to improve the aspects that customers mostly complain about. One of the methods utilized to evaluate the satisfaction of the customer is *Survey Customer Satisfaction Index (CSI)*. The purpose of CSI survey is to measure the level of customer satisfaction. The survey include not only passengers but also cabin crew, airline station manager, concessionary business partner and cargo business partner. The survey is conducted by national independent institution – INACA (Indonesia National Air carrier Association). The score obtained from the survey is in Likert scale with 1 (one) as the lowest score and 5 (five) as the highest. The survey itself is conducted in 13 airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero) in 2016 with the result as follows:

No.	Lokasi / Location	Pelaksanaan / Time	SKOR / Score
1.	Bandar Udara Pattimura - Ambon (AMQ) / Pattimura Airport - Ambon (AMQ)	11 – 19 Februari 2016 / 11 – 19 February 2016	3,93
2.	Bandar Udara Juanda - Surabaya (SUB) / Juanda Airport - Surabaya (SUB)	11 – 19 Februari 2016 / 11 – 19 February 2016	4,01
3.	Bandar Udara Adisoemarmo - Surakarta (SOC) / Adisoemarmo Airport - Surakarta (SOC)	19 – 26 Februari 2016 / 19 – 26 February 2016	3,86
4.	Bandar Udara Internasional Lombok - Lombok Tengah (LOP) / Lombok International Airport - Lombok Tengah (LOP)	19 – 26 Februari 2016 / 19 – 26 February 2016	3,73
5.	Bandar Udara Sam Ratulangi - Manado (MDC) / Sam Ratulangi Airport - Manado (MDC)	26 Februari – 4 Maret 2016 / 26 February – 4 March 2016	4,19
6.	Bandar Udara Adisutjipto - Jogjakarta (JOG) / Adisutjipto Airport - Jogjakarta (JOG)	11 – 18 Maret 2016 / 11 – 18 March 2016	3,64
7.	Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak (BIK) / Frans Kaisiepo Airport – Biak (BIK)	25 Maret – 1 April 2016 / 25 March – 1 April 2016	3,79
8.	Bandar Udara Syamsudin Noor - (BDJ) / Syamsudin Noor Airport - (BDJ)	1 – 8 April 2016 / 1 – 8 April 2016	4,15
9.	Bandar Udara El Tari - Kupang (KOE) / El Tari Airport - Kupang (KOE)	11 – 15 April 2016 / 11 – 15 April 2016	3,97
10.	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan – Balikpapan (BPN) / Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport – Balikpapan (BPN)	15 -22 April 2016 / 15 -22 April 2016	4,07

No.	Lokasi / Location	Pelaksanaan / Time	SKOR / Score
11.	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar (DPS) / Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar (DPS)	22 - 29 April 2016 / 22 - 29 April 2016	4,26
12.	Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang (SRG) / Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang (SRG)	6 - 13 Mei 2016 / 6 - 13 Mei 2016	4,08
13.	Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar (UPG) / Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar (UPG)	13 - 20 Mei 2016 / 13 - 20 Mei 2016	4,12

3. Survei Airport Service Quality (ASQ)

Pengukuran tingkat kualitas pelayanan bandar udara di PT Angkasa Pura I (Persero) juga dilakukan oleh lembaga independen internasional yang bergerak di bidang kebandarudaraan yaitu *Airport Council International (ACI)*. Pengukuran *Airport Service Quality* oleh lembaga ACI dilakukan di 4 Bandara PT Angkasa Pura I yaitu Juanda - Surabaya, I Gusti Ngurah Rai - Denpasar, Sultan Hasanuddin - Makassar dan Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Balikpapan. Aspek - aspek yang dinilai dalam *survey* ini terdiri dari 34 aspek meliputi akses dari dan ke bandar udara, fasilitas bandar udara, suasana, dan layanan petugas serta aspek-aspek lain terkait layanan kepada pengguna jasa. Standar pertanyaan dan metode survei yang digunakan di seluruh bandar udara di dunia (283 Bandara) adalah sama. Nilai/skor dalam survei ini menggunakan ukuran skala Likert terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 5. Pelaksanaan survei dilakukan setiap bulan di 4 bandar udara di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dengan hasil penilaian *Survey Airport Service Quality* tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi / Location	SKOR / Score
1.	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar (DPS) / I Gusti Ngurah Rai Airport - Denpasar (DPS)	4.93
2.	Bandar Udara Juanda - Surabaya (SUB) / Juanda Airport - Surabaya (SUB)	4.46
3.	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan (BPN) / Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport - Balikpapan (BPN)	4.54
4.	Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar (UPG) / Sultan Hasanuddin Airport - Makassar (UPG)	4.16

PEMBENTUKAN CONTACT CENTER 172

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) telah dibentuk pusat layanan pelanggan *single access* yang berfungsi menyediakan semua informasi dan menangani keluhan pengguna jasa atas pelayanan di 13 bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu *Contact Center Bandara 172*. *Contact Center Bandara 172* dapat diakses melalui berbagai *channel* yaitu telepon dan media sosial antara lain:

Telepon : 172
Email : cc172@ap1.co.id
Twitter : @angkasapura172
Facebook : AngkasaPura 172

Contact Center Bandara 172 beroperasi selama 24 jam, menggunakan sistem dengan teknologi yang dapat memuat data cukup besar dan merekam semua aktifitas dan percakapan antara pelanggan dengan *agent*. *Contact Center*

3. Airport Service Quality (ASQ) Survey

Other institution that also measure the service quality of the airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero) is Airport Council International (ACI). ACI is an international independent institution engaged in aviation affairs. Quality Service Airport measurement by ACI is conducted in four airports under PT Angkasa Pura I (Persero) management Juanda Airport - Surabaya, I Gusti Ngurah Rai Airport - Denpasar, Sultan Hasanuddin Airport - Makassar and Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport - Balikpapan. There are 34 aspects measured in the survey. Some of the aspects are access to airport, airport facilities, airport atmosphere, personnel service and other aspects related with customer. The method and questions used are the international standard applied to all international airports around the world. The score obtained from the survey is in Likert scale with 1 (one) as the lowest score and 5 (five) as the highest. The survey itself is conducted in four airports on monthly basis. The result of the 2016 Airport Service Quality survey is as follows:

THE INITIATION OF CONTACT CENTER 172

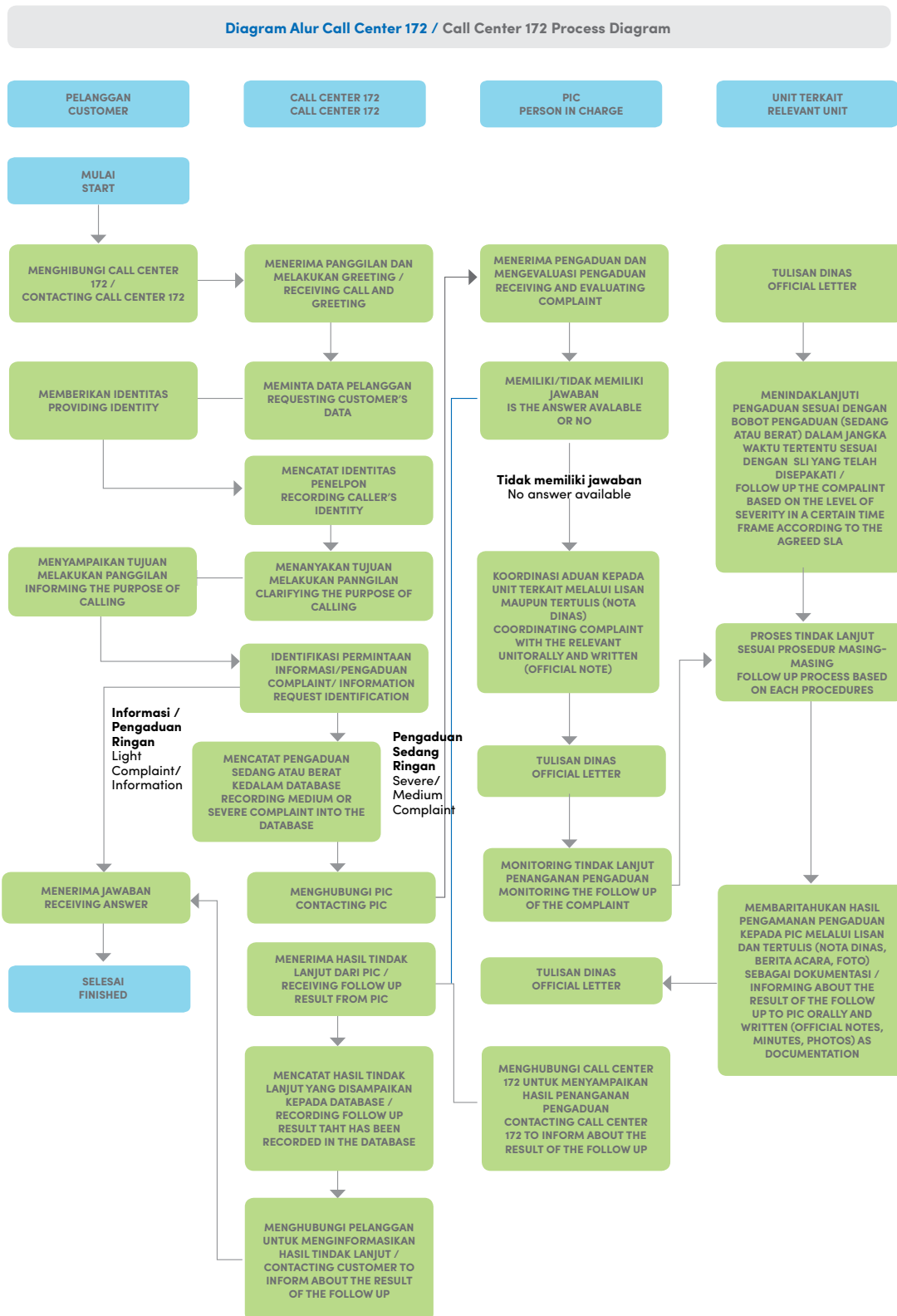
As a part of our service improvement efforts in the area of PT Angkasa Pura I (Persero), the Company initiated a single access customer service center. The center is initiated to provide information and respond complaints from service users concerning our service in 13 airports managed by the Company. The center is named Airport Contact Center 172. Airport Contact Center 172 can be accessed through many channels such as telephone and social media. The following is the details:

Telephone : 172
 Email : cc172@ap1.co.id
 Twitter : @angkasapura172
 Facebook : AngkasaPura 172

Airport Contact Center 172 operates 24 hours a day and uses a system that is able to handle big data and record activities and conversation between customer and agents. Airport Contact Center 172 has 25 resources that is trained

172 memiliki jumlah SDM sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang telah dibekali dengan pengetahuan kebandarudaraan, bisnis proses di PT Angkasa Pura I (Persero), kemampuan dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan dilengkapi dengan *Standar Operation Procedure (SOP)* serta *Service level Agreement (SLA)*. Keseluruhan proses kerja di *Contact Center* bandara 172 ada di dalam diagram alur di bawah ini:

with knowledge on airport business, PT Angkasa Pura I (Persero) business process, communication skill. They are also equipped with a Standard Operation Procedures and Service Level Agreement. Below is the complete working process of the Airport Contact Center 172:



TINGKAT PENYELESAIAN PENGADUAN YANG DITERIMA

Sepanjang tahun 2016, Perseroan mencatat 2.371 kasus pengaduan yang masuk melalui *Email*, Twitter, Facebook dan Kotak Saran dan sebanyak 8.774 pengaduan melalui telepon. Jumlah pengaduan yang masuk telah terselesaikan seluruhnya.

No.	Deskripsi / Description	Jumlah Pengaduan Masuk / Total Complaints	Jumlah Pengaduan Selesai / Total Settled Complaints	Persentase Penyelesaian / Settlement percentage
1.	Telepon / Telephone	8,774 call / 8,774 calls	8,774 call / 8,774 calls	100%
2.	Email / Email	1,348 kasus / 1,348 cases	1,348 kasus / 1,348 cases	100%
3.	Twitter / Twitter	802 kasus / 802 cases	802 kasus / 802 cases	100%
4.	Facebook / Facebook	198 kasus / 198 cases	198 kasus / 198 cases	100%
5.	Kotak Saran / Suggestion Box	23 kasus / 23 cases	23 kasus / 23 cases	100%

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN BAGI KONSUMEN

Dalam rangka meningkatkan nilai pelayanan, sebagai *extra life facilities* yang dapat memberikan layanan lebih humanis kepada pengguna jasa bandara, meningkatkan *welcoming value* melalui tegur sapa dan memberikan kontribusi terhadap atmosfer dan *ambience of hospitality* di bandar udara serta memiliki peran dalam mempromosikan lokasi-lokasi pariwisata daerah, PT Angkasa Pura I (Persero) merekrut tenaga – tenaga profesional yang memiliki *brain, beauty dan behavior* untuk dijadikan duta bandara. Keberadaan duta bandara memiliki peran dalam memberikan layanan terkait informasi pariwisata dan meningkatkan layanan kepada pengguna jasa. Keberadaannya menjadi atraksi dan hiburan tersendiri bagi para penumpang pada saat mengenakan busana adat daerah.

DAMPAK KUANTITATIF

Pelaksanaan kegiatan CSR terkait dengan konsumen telah memberikan dampak pada tingginya kepuasan pengguna jasa atas kualitas pelayanan Bandara. Berdasarkan Survei CSI, 7 (tujuh) dari 13 (tiga belas) bandara yang dikelola Perseroan memperoleh skor di atas 4,00, sedangkan berdasarkan Survei ASQ pada 4 Bandara yang dikelola Perseroan yaitu bandara DPS, SUB, BPN dan UPG skor kepuasan pengguna jasa meningkat dari tahun 2015 menjadi masing-masing sebesar 4,93; 4,46; 4,54 dan 4,16.

Selain itu dampak lainnya yang dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan konsumen terkait dengan kualitas pelayanan, PT Angkasa Pura I mendapatkan penghargaan berupa:

- *The best 3 Airport in the world category passenger 15 – 25 million/year* diperoleh Bandara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar.
- *The most improved airport in Asia Pacific* diperoleh Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar.

PERCENTAGE OF SETTLED COMPLAINT

In 2016, the Company received 2.371 complaints through email, Twitter, Facebook and Suggestion Box and there are 8.774 complaints through phone calls. All of the complaints are completely settled.

CUSTOMER SERVICE IMPROVEMENT PROGRAM

In order to improve the value of the service (*extra life facilities*) that can deliver a more humanist service to airport service user and to improve welcoming value through greetings and ambience of hospitality-building and also to promote local tourism objects, PT Angkasa Pura I (Persero) recruit professional personnel who possess brain, beauty and behavior quality. These personnel are appointed as Mr. And Mrs. Airport. The duty of these personnel is to provide tourism information and improve service delivered to service users. Additionally, they are also a unique attraction in the airports since they wear traditional costumes.

QUANTITATIVE RESULT

CSR activities related to customers has contributed to the increase of the service users satisfaction level. According to CSI Survey, seven of thirteenth airports managed by the Company scored above 4.00. Furthermore, according to ASQ Survey, four airports managed by the Company (DBS, SUB, BPN and UPG) scored higher than last year. The score consecutively is 4.93; 4.46; 4.54 and 4.16.

Other effects are the increase of the customer trust in the quality of the service. For that PT Angkasa Pura I (Persero) received:

- *The best 3 Airport in the world category passenger 15 – 25 million/year* for I Gusti Ngurah Rai Airport – Denpasar.
- *The most improved airport in Asia Pacific* for Sultan Hasanuddin Airport – Makassar.

SERTIFIKASI

Seluruh Bandar Udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan ruang lingkup *Airport Passenger Service* - Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang diberikan oleh United Registrar of Systems (URS) dan Tuv Rheinland.

CERTIFICATION

All airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero) is ISO 9001:2008 certified for Airport Passenger Service - PJP2U that is awarded by United Registrar of System and Tuv Rheinland.

Corporate Sosial Responsibility Terkait dengan Tanggung Jawab Terhadap Pemasok

CSR Related to The Responsibility to Supplier

KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan perubahan tata kerja sekaligus meningkatkan kinerja pengadaan. Perseroan memanfaatkan teknologi Informasi (*IT*) dalam pelaksanaan proses pengadaan yang telah terbukti berhasil meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan pengadaan. Alat bantu *IT* terbukti dapat mempercepat proses menghilangkan proses berulang (*redundancy*), mengurangi dokumen *hardcopy*, menata serta menyimpan dokumen yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi *IT* ini juga berdampak pada pengurangan biaya administrasi, meningkatkan transparansi proses (*Good Corporate Governance*), dan Perseroan bisa mendapatkan harga barang dan atau jasa yang lebih kompetitif atau lebih rendah dari harga pasar.

Salah satu prinsip pengadaan barang/jasa di PT Angkasa Pura I (Persero) adalah menjunjung transparansi, sehingga semua ketentuan dan informasi, termasuk syarat administrasi, teknis, dan harga, tata cara evaluasi, serta tata cara penetapan pemenang pengadaan barang/jasa bersifat terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang berminat. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam *website* PT Angkasa Pura I (Persero), yaitu www.eproc.angkasapura1.co.id.

RENCANA KEGIATAN

Selain memperbaiki proses pengadaan, PT Angkasa Pura I (Persero) juga berupaya untuk menyempurnakan peraturan melalui pembuatan pedoman baru untuk mengatur proses pengadaan barang dan atau Jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero). Perubahan peraturan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemasok barang/jasa serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa seperti contohnya dengan lelang tidak mengikat, lelang terbatas, atau penunjukan langsung ke entitas anak dan sinergi BUMN.

POLICY

PT Angkasa Pura I (Persero) is committed to conduct working system reformation and to improve procurement performance. The Company utilized Information Technology in processing procurement and it's proven that this process becomes more effective. Information Technology devices helps the Company in removing redundancy, decreasing the use of hardcopy document and filing documents effectively. The use of Information Technology cuts administration expenses, improves Good Corporate Governance and opens the chances to obtain goods with cheaper or more competitive prices.

One of the principle of service/goods procurement in PT Angkasa Pura I (Persero) is transparence. Every provision and information, including administrative, technical and price requirements, and evaluation system, has to be publicly open. One of the example can be found in the website of PT Angkasa Pura I (Persero): www.eproc.angkasapura1.co.id.

ACTIVITY PLANNING

Not only intend to improve procurement process, the Company also focuses to improve existing regulations by formulating new regulations to regulate Goods or Services Procurement in the area of PT Angkasa Pura I (Persero). The purpose of the change on the level of regulation is to improve the service delivered to goods/services supplier and to create an effective goods/services procurement such as non-binding auction, limited auction or direct appointment of subsidiary company and state owned enterprises synergy.

KEGIATAN

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA MENGGUNAKAN SISTEM E-PROCUREMENT

Penggunaan sistem *e-Procurement* melalui situs www.eproc.angkasapura1.co.id telah meningkatkan transparansi seluruh proses pengadaan dengan terekamnya seluruh aktivitas pengadaan dalam sistem dan juga mempermudah para pihak (*User*, Pejabat Yang Berwenang, Unit ST, Panitia dan Pemasok) dalam melakukan proses pengadaan, mulai dari perencanaan, permintaan pengadaan barang dan/ atau jasa, pengumuman, proses lelang, dan pengumuman pemenang. Setiap pemasok wajib mendaftarkan perusahaannya ke dalam *Vendor Management System* (VMS). Dalam sistem *e-Procurement* ini, pemasok yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan telah secara aktif terdaftar dalam VMS akan terundang secara otomatis untuk mendapatkan penawaran keikutsertaan dalam proses seleksi pemasok. Hal tersebut agar PT Angkasa Pura I (Persero) dapat memperoleh barang/jasa yang diperlukan dengan harga kompetitif dan kualitas yang baik.

Vendor Management System (VMS) di PT Angkasa Pura I (Persero) dibuka sepanjang tahun, sehingga pemasok barang/jasa dapat melakukan pendaftaran setiap hari di hari kerja. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah pemasok yang terdaftar dalam *Vendor Management System* (VMS) secara signifikan yaitu dari 10.121 *Vendor* yang telah diverifikasi pada tahun 2015 lalu meningkat menjadi 14.564 pemasok barang/jasa pada tahun 2016.

DAMPAK KUANTITATIF

Pelaksanaan kegiatan CSR terkait tanggungjawab terhadap pemasok yang telah dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2016, telah memberikan dampak dari sisi *non* keuangan antara lain adalah meningkatnya *relationship* antara Perseroan dengan *vendor* dan tercapainya kepuasan *vendor* dalam bermitra dengan Perseroan.

ACTIVITIES

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT PROCESS WITH E-PROCUREMENT SYSTEM

The use of *e-Procurement* system in www.eproc.angkasapura1.co.id has increased the level of transparency in procurement process by recording all activities in the system and also simplified the procurement process for users, government officials, ST Unit, Committee and Supplier. The process of planning, requesting good and/ service, auction process and winner publication has become easier. Every supplier has to register in the *Vendor Management System* (VMS). In the *e-procurement* system, suppliers with need qualification and classification and has been registered in VMS will automatically receive an invitation to participate in the supplier selection process. The purpose of this process to find supplier that can provide goods with competitive price and good quality.

PT Angkasa Pura I (Persero) *Vendor Management System* opens around the clock. Suppliers can register their companies during business hours every day. Since the introduction of VMS, PT Angkasa Pura I (Persero) has seen the increase in the number of suppliers. In 2015, there were only 10,121 verified vendors. The number increased significantly to 14,564 in 2016.

QUANTITATIVE RESULT

The implementation of CSR activities related to the responsibility to suppliers in 2016 has provided great contribution on the non-financial side. The relationship between PT Angkasa Pura I (Persero) with the suppliers is strengthened since the supplier is more satisfied with the result of the partnership.



Corporate Sosial Responsibility Terkait dengan Tanggung Jawab Terhadap Kreditur

CSR Related to The Responsibility to Creditor

KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) bersama dengan para Kreditur senantiasa menciptakan hubungan bisnis yang profesional dan saling menguntungkan. Kreditur mendukung perkembangan bisnis Perseroan dengan memberikan bantuan investasi atau pinjaman sedangkan PT Angkasa Pura I (Persero) memanfaatkannya sebagai dukungan perkembangan bisnis Perseroan.

RENCANA KEGIATAN

Perseroan menargetkan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga tingkat solvabilitasnya dapat terjaga dengan baik. Dengan terjaganya solvabilitas Perseroan dengan baik, maka tingkat kepercayaan Kreditur terhadap PT Angkasa Pura I (Persero) akan tinggi.

KEGIATAN

PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEPADA KREDITUR SESUAI JADWAL

Sebagai wujud tanggung jawab PT Angkasa Pura I (Persero) kepada Kreditur, sampai dengan saat ini Perseroan

POLICY

PT Angkasa Pura I (Persero) develops a mutual professional relationship with the Creditors. The Creditors have supported the Company with investment or loan which is utilized to support the growth of the Company business.

ACTIVITIES PLANNING

The Company's target is to manage its finance effectively to raise the solvability level. When the solvability level is increased, the trust of the Creditors will follow.

ACTIVITIES

ON TIME OBLIGATION PAYMENTS TO THE CREDITORS

Until today, PT Angkasa Pura I (Persero) has never failed in doing its responsibility to the Creditors. The Company

senantiasa memenuhi pembayaran kewajiban kepada para Kreditor. Kewajiban yang dibayarkan berupa angsuran pokok dan angsuran bunga dibayarkan secara tepat waktu, hal ini terlihat bahwa seluruh pinjaman Bank berada pada kolektibilitas lancar.

RASIO KEUANGAN TERKAIT TINGKAT SOLVABILITAS YANG TERJAGA

Rasio solvabilitas Perseroan di tahun 2016 terhitung meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh penerbitan Obligasi I PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000 dan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500.000.000 yang mulai dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 2016. Pada Tahun 2016 Rasio Hutang Terhadap Aset sebesar 49,31%, Rasio Hutang Terhadap Modal sebesar 97,27% dan Rasio Hutang Terhadap Aset Tetap sebesar 66,37%.

DAMPAK KUANTITATIF

Dengan melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, serta memiliki tingkat solvabilitas yang tetap terjaga dengan baik, maka pada tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) dipercaya untuk menerbitkan Obligasi I PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2016 dengan mendapat peringkat ^{id}AAA dan Sukuk Ijarah I dengan peringkat ^{id}AAAsy.

always pays the principal payment and the interest on time. That is why the collectability level is good.

FINANCIAL RATIO RELATED TO MAINTAINED SOLVABILITY LEVEL

The solvability ratio of the Company has increased significantly in 2016. The issuance of the Obligation of the Company with total amount IDR2,500,000,000 and *Sukuk Ijarah* amounting to IDR500,000,000 that is recorded in Indonesia Stock Exchange on 23 November 2016 contributed to the increase. In 2016, the Debt to Asset Ratio is 49.31%, the Debt to Capital Ratio is 97.27% and the Debt to Fixed Assets Ratio is 66.73%.

QUANTITATIVE RESULT

By conducting good financial management with maintained good solvability level, PT Angkasa Pura I (Persero) gained trust to issues Angkasa Pura 1 Obligation I in 2016 and ranked ^{id}AAA. The Company is also able to issue Sukuk Ijarah I with the rank ^{id}AAAsy.

Corporate Sosial Responsibility Terkait dengan Tanggung Jawab Terhadap Negara

CSR Related to The Responsibility to The State

KEBIJAKAN

PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk mendukung pembangunan negeri dengan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak pada negara yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RENCANA KEGIATAN 2016

PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku.

KEGIATAN

Sepanjang tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sebesar Rp1.048.737 juta dengan perincian jenis pajak sebagai berikut:

POLICY

PT Angkasa Pura I (Persero) is committed to make contribution to nation building by paying taxes within the time frame and under applicable provision.

2016 ACTIVITIES PLANNING

PT Angkasa Pura I (Persero) is committed to fulfill all of its taxation obligation.

ACTIVITIES

In 2016, PT Angkasa Pura I (Persero) has fulfilled its taxation obligation amounting to IDR1,048,737 with the detail as follows:

Tabel Pembayaran Pajak / Tax Payment Table

(dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah)

Uraian Pajak Description	2016
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	116,760
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	15,677
PPh Pasal 4 Ayat 2 / Income Tax Article 4 Par. 2	85,726
PPh Badan / Institution Income Tax	318,134
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added Tax	386,974
SWPD3D/BNN dan Lain-lain / SWPD3D/BNN and Others	52,495
Pajak Bumi dan Bangunan / Land Value Tax	72,971
Jumlah / Total	1,048,737

DAMPAK KUANTITATIF

Dengan telah mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku, pada tahun 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) tidak menerima sanksi terkait dengan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak.

QUALITATIVE RESULT

Having followed the applicable taxation requirements, in 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) is free of any sanction related to taxation noncompliance.





7

REFERENSI KRITERIA ARA/POJK

ARA References



Referensi Kriteria ARA/POJK

ARA References

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
I. Umum		
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris / The annual report is presented in proper and correct Bahasa Indonesia and is recommended to be presented in English as well		√
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca / The annual report is printed in fine quality, with easy-to-read font types and sizes.		√
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas / The annual report presents clear identity of the company	<p>Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. <p>Company name and the year of the Annual Report are shown in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Front cover; 2. Side margin; 3. Back cover; and 4. Each page. 	√
4. Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan / The annual report is available at company website	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. / Including current annual report and the annual reports from at least the last four (4) years.	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Key Financial Highlights		
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun / Information on Company's operating results with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the starting of the company if the business activities have run for less than three (3) years	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): <ol style="list-style-type: none"> a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: <ol style="list-style-type: none"> a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. <p>Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.</p>	18

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
	<p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sales/revenues; 2. Profit (loss): <ol style="list-style-type: none"> a. Attributable to the owner of the holding entity; and b. Attributable to non-controlling interest 3. Total comprehensive profit (loss) and other comprehensive income: <ol style="list-style-type: none"> a. Attributable to the owner of the holding entity; and b. Attributable to non-controlling interest; and 4. Profit (Loss) per Share <p>Note: For a company with no subsidiaries, the company presents the profit (loss) and other profit (loss) and other comprehensive income in total.</p>	
<p>2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun / Information on Company's financial position with comparisons of three (3) fiscal years or since the starting of the company if the business activities have run for less than three (3) years</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity. 	16-17
<p>3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun / Financial ratios with comparisons of three (3) fiscal years or since the starting of the company if the business activities have run for less than three (3) years</p>	<p>Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. / The information encloses five (5) financial ratios that are common and relevant to company's industry.</p>	19
<p>4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik / Information on stock price in tables and charts</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <p>Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</p>	21

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
	1. Number of outstanding shares; 2. The information in tables and charts covers <ol style="list-style-type: none"> Market capitalization by prices in Stock Exchange where the shares are listed; The highest, lowest, and closing price of shares; and Trading volume where the shares are listed. 3. Information in charts contains at least: <ol style="list-style-type: none"> Closing price and share trading volume Trading volume where the shares are listed For each quarter of the last two (2) fiscal years. Note: if the company shall disclose information on share prices and trading volume if such company does not have market capitalization.	
5 Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir / Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds of the last two (2) fiscal years	Informasi memuat: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); Tingkat bunga/imbalan; Tanggal jatuh tempo; dan Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. The information covers: <ol style="list-style-type: none"> Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; Interest rate/yield; Maturity date; and Bonds/sukuk rating in 2015 and 2016. Note: if the company shall disclose information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds if such company does not have market capitalization.	21
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Reports		
1. Laporan Dewan Komisaris / Board of Commissioners Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) diperusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Containing the following: <ol style="list-style-type: none"> Assessment on Board of Directors' performance on company management and the basis for the assessment; Perspective on company business outlook set by Board of Directors and its consideration basis; Prospective on the implementation/management of whistleblowing system (WBS) in the company and the role of Board of Commissioners in such WBS; and Changes in Board of Commissioners' composition and the reason behind the change (if any). 	30-38

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>2. Laporan Direksi / Board of Directors Report</p>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. <p>Containing the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis on company performance, which among others covers: <ol style="list-style-type: none"> a. Strategic policies; b. Comparisons between realizations and targets; and c. Challenges faced by the company and its settlement measures. 2. Analysis on business outlook; 3. Development of the implementation of corporate governance in the fiscal year; and 4. Changes in Board of Director's composition and the reason behind the change (if any) 	<p>40-51</p>
<p>3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi / Board of Directors and Board of Commissioners' signatures</p>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <p>Containing the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Signatures are given on separate sheets; 2. Statement of full accountability on the accuracy of the annual report contents by Board of Directors and Board of Commissioners; 3. Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors by stating names and positions; and 4. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that a member of Board of Commissioners or Board of Directors fails to sign the annual report, or written explanation in separate letter from the other member(s) in the event that the person(s) concerned fails to provide a written explanation. 	<p>53-54</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
IV Profil Perusahaan / Company Profile		
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan / Name and complete address of the company	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, <i>email</i> , dan <i>website</i> . / The information contains among others: name and address, postal code, phone number(s), facsimile, e-mail, and website address.	58
2. Riwayat singkat perusahaan / Brief history of the company	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan Consisting among others: date/year of establishment, name, changes in company name (if any), and effective date for such changes in company name. Note: explanation shall be given in the event that the entity has never made any change to the name	59-62
3. Bidang usaha / Line of business	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description of, among others: 1. Company's business activities in accordance with the latest articles of association; 2. Business activities engaged; and 3. Generated products and/or services	64-67
4. Struktur Organisasi / Organizational structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi. / In a chart, consisting of names and positions, at least up to one level under the Board of Directors.	74-75
5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan / Company Vision, Mission, and Culture	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan. Containing: 1. Company vision; 2. Company mission; 3. Explanation that the vision and mission have been reviewed and agreed upon by Board of Directors/Board of Commissioners. 4. Statement on corporate culture adhered by the company.	76-78

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris / Identity and brief CV of Board of Commissioners members</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name; 2. Position and term of office (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Term of Office); 7. History of the appointment (period and position) as Board of Commissioners' member since initial appointment. 	<p>80-85</p>
<p>7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi / Identity and brief CV of Board of Commissioners members</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name; 2. Position and term of office (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Term of Office); 7. History of the appointment (period and position) as Board of Commissioners' member since initial appointment. 	<p>86-91</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi / Total number of employees (2 years' comparison) and data of competency development that reflects the opportunity for every organizational level</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of employees for each organizational level; 2. Number of employees for each educational level; 3. Number of employees by employment status; 4. Data of undertaken employee competency developments in fiscal year containing parties (Position level) attending the training, type of trainings, and purpose of trainings; and 5. Incurred costs for employee competency development in the fiscal year. 	<p>100-104; 104-127</p>
<p>9. Komposisi Pemegang saham / Shareholder Competition</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. <p>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</p>	<p>128-130</p>
	<p>Containing, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Detailed name of shareholders covering 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Details of shareholders and their shareholding percentage, which include: <ol style="list-style-type: none"> a. Name of shareholders with 5% or more percent of shares; b. Public shareholding groups with their respective shareholding of less than 5%. 3. Name of Directors and Commissioners holding direct or indirect shares and their percentages; <p>Note: Explanation shall be given in the event of Directors and Commissioners do not hold direct or indirect shares.</p>	

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
10. Daftar entitas anak dan/ atau entitas asosiasi / List of subsidiaries and/or associates	<p>Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <p>In the form of table containing the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Names of subsidiaries and/or associates; 2. Shareholding percentage; 3. Explanation on the subsidiaries and/or associates' lines of business; and 4. Explanation on the operational status of the subsidiaries and/or associates (in operation or has not yet operating). 	131-138
11. Struktur grup perusahaan / Company group structure	<p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV). / Company group structure in a chart describing subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).</p>	139
12. Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku / Share listing chronology (including <i>private placement</i>) and/or share listing from the initial listing to the end of fiscal year	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.</p> <p>Containing, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The year of shares issuance, number of shares, shares par value, and share offering price for each of corporate action; 2. Number of shares listed following the corporate actions; 3. Name of stock exchange where the shares are listed. <p>Note: Explanation shall be given in the event of the company does not have share listing chronology.</p>	140-141
13. Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku / Issuance and/or other securities listing chronology from the initial listing to the end of fiscal year	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.</p>	140
	<p>Containing, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of other securities, year of other securities issuance, interest/yield rate, and the maturity date of other securities; 2. Other securities offering price; 3. Name of stock exchange where the other securities are listed; and 4. Rating of securities. <p>Note: Explanation shall be given in the event of the company does not have other securities issuance and listing chronology.</p>	

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang / Names and addresses of capital market supporting institutions and/or professions	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address of Securities Administration Bureau (BAE)/parties administrating company's shares; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of rating agency. 	141
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional / List of awards received in the last fiscal year and/or certifications valid for the last fiscal year, both national and international-scale	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of awards and/or certificates; 2. Year of receipt; 3. Awarding and/or certifying agencies; and 4. Validity period (for certifications). 	142-149
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) / Names and addresses of subsidiaries and/or branch or representative offices (if any)	<p>Memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.</p> <p>Containing the information about, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Names and addresses of subsidiaries; and 2. Names and addresses of branch/representative offices. <p>Note: explanation shall be given in the event that the entity does not have any subsidiaries/branches/representatives.</p>	150-151
17. Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan / Information on Company Website	<p>Meliputi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPSdiumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/<i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. 	152

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
	Covering at least: <ol style="list-style-type: none"> 1. Information on shareholders to last individual owners; 2. Contain of the Code of Ethics; 3. Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covering the agenda discussed in GMS, minutes of GMS, and important dates i.e. GMS announcement date, GMS summon date, GMS date, GMS minutes announcement date; 4. Separate Annual financial statements (last 5 years); 5. Board of Commissioners and Board of Directors Profiles; and 6. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit. 	
18 Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal / Educations and/ or trainings for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. Yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covering at least the following information (type and parties eligible to attend): <ol style="list-style-type: none"> 1. Educations and/or trainings for the Board of Commissioners; 2. Educations and/or trainings for the Board of Directors; 3. Educations and/or trainings for Audit Committee; 4. Educations and/or trainings for Nomination and Remuneration Committee; 5. Educations and/or trainings for Other Committees; 6. Educations and/or trainings for Corporate Secretary; and 7. Educations and/or trainings for Internal Audit Unit; Attended in the fiscal year Note: Explanation shall be given in the event of there are no educations and/or trainings in the fiscal year.	153-159
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / Management Discussion and Analysis on Company Performance		

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
1. Tinjauan operasi per segmen usaha / Operational review per business segment	Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Containing descriptions of: <ol style="list-style-type: none"> 1. Explanation of each business segment. 2. Performance of each business segment, among others: <ol style="list-style-type: none"> a. Productions; b. Increase/decrease in business capacity; c. Sales/operating revenues; and d. Profitability. 	168-171 189-200
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan / Description of company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas. Analysis on financial performance containing comparison between current financial performance and previous year's financial performance and causes for the increase/decrease (in narration and tables), among others concerning: <ol style="list-style-type: none"> 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive incomes and total comprehensive profit (loss); and 5. Cash flow. 	210-221
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan / Discussion and analysis on company solvency and liquidity by presenting ratios that are relevant to company's industry	Penjelasan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation on: <ol style="list-style-type: none"> 1. Solvency for short- and long-term debts; and 2. Receivables collectability. 	224-226

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
4. Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) / Discussion on capital structure and capital structure policy	<p>Penjelasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. <p>Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capital structure, consisting of interest-based debts and equity; 2. Management policies on the capital structure (<i>capital structure policies</i>); and 3. The basis for Capital structure policies. 	227
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir / Discussion on material commitments for capital goods investments (other than funding commitment) in the last fiscal year	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p> <p>Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The name of parties engaging in the commitment 2. Purpose of the commitments; 3. Sources of funds expected to meet these commitments; 4. Currency used; and 5. Planned measures to protect the company from risks arising from relevant currency position. <p>Note: explanation shall be given in the event that the company does not have any commitments relating to capital investments in the last fiscal year.</p>	228-230 231-237
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan padatahun buku terakhir / Discussion on capital investments realized in the last fiscal year	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p> <p>Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of capital investments; 2. Purposes of the capital investments; and 3. Value of capital investment spent in the last fiscal year. <p>Note: explanation shall be given in the event that any capital investment realizations are nonexistent</p>	237-240

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan / Information on comparisons between beginning of fiscal year's targets and realizations, and expected targets or projection for the coming year relating to revenue, profit, and other matters considered important to the company	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comparisons between beginning of year's targets and realizations; and 2. Expected targets or projection for the coming year. 	240-243; 243-245
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan / Information and material facts occurring after accountant's reporting date	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.</p> <p>Description of significant events after accountant's reporting date including their effects on business performance and risks in the future.</p> <p>Note: explanation shall be given in the event that any significant events after accountant's reporting date are nonexistent.</p>	245
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan / Description on company's business outlook	<p>Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p> <p>Description on company's business outlook is related to industry and economy in general accompanied by quantitative supporting data from trustworthy source of data.</p>	201-204
10. Uraian tentang aspek pemasaran / Description on marketing aspect	<p>Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p> <p>Description on marketing aspect on company products and/or services, among others marketing strategies and market share.</p>	

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir / Description on dividend policy and amount of cash dividends per share and amount of dividends per year announced or paid for the last two (2) fiscal years.</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i>; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. <p>Untuk masing-masing tahun.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p> <p>Containing descriptions of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policy on dividend sharing; 2. Total dividends shared; 3. Amount of cash dividends per share; 4. Payout ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividends. <p>For each year.</p> <p>Note: explanation shall be given in the event that any dividend sharing is nonexistent.</p>	247-248
<p>12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku / Employee and/or Management Stock Ownership Plan (ESOP/MSOP) carried out by the company existing until the end of fiscal year</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga <i>exercise</i>. <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Containing descriptions of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. Requirements for entitled employees and/or management; and 4. Exercise price. <p>Note: explanation shall be given in the event that the program concerned is nonexistent.</p>	248
<p>13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) / Realization of the use of proceeds from public offering (in the event that the company still has the obligation to report the proceed use realization)*</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p> <p>Containing descriptions of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total proceeds; 2. Planned use of the proceeds; 3. Detailed use of the proceeds; 4. Balance of proceeds; and 5. Date of GMS/GMB approval on changes in the use of proceeds (if any). <p>Note: explanation shall be given in the event that there is no information regarding realization of the use of proceeds from public offering.</p>	248-250

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi / Information on material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliates</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>Containing descriptions of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of affiliates and the nature of affiliation; 2. Explanation on the fairness of transaction; 3. Reason behind the transaction; 4. Realization of transactions in the last fiscal year; 5. Company policy relating to review mechanism on transactions; and 6. Compliance with relevant regulations and provisions. <p>Note: explanation shall be given in the event that any transaction concerned is nonexistent.</p>	<p>253-256</p>
<p>15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir / Description on regulatory changes having significant impact on the company</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>The description contains among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulatory changes; and 2. Their impacts (qualitative and quantitative) on the company (if significant) or statements stating that the impacts are insignificant. <p>Note: explanation shall be given in the event that any regulatory changes having significant impacts on the company are nonexistent in the last fiscal year.</p>	<p>259-264</p>
<p>16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir / Description on changes in accounting policies applied by the company in the last fiscal year</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun bukuterakhir, agar diungkapkan.</p> <p>The description includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Changes in accounting policies; 2. Their reasons; and 3. Impacts toward financial statements. <p>Note: explanation shall be given in the event that any changes in accounting policies are nonexistent in the last fiscal year.</p>	<p>265-266</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
17. Informasi kelangsungan usaha / Information on business continuity	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p> <p>Disclosure of information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Matters which potentially inflict significant impact on company's business continuity for the last fiscal year; Management assessment on matters in point 1; and Assumptions used by the management in performing the assessment. <p>Note: in the event that any matters which potentially inflict significant impact on company's business continuity for the last fiscal year are nonexistent, the assumptions used as the basis for the management in assuring that such matters are nonexistent shall be disclosed.</p>	266-267
VI. Good Corporate Governance / Good Corporate Governance		
1. Uraian Dewan Komisaris / Board of Commissioners description	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). <p>The description includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> Description of Board of Commissioners' responsibilities; Assessment on the performances of committees under the Board of Commissioners and the basis for such assessment; and Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct for Board of Commissioners). 	362-400 363-364; 395; 364
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) / Information on Independent Commissioners	<p>Meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <p>Covering, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> The criteria for Independent Commissioners appointment; and Statement of independency of each Independent Commissioner. 	377-378

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>3. Uraian Direksi / Board of Directors description</p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). <p>The description includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scopes of duties and responsibilities of each Board of Directors member; 2. Assessment on the performances of committees under the Board of Directors (if any); and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct for Board of Directors). 	<p>400-443 413-414; 401</p>
<p>4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi / Assessment of the implementation of GCG for fiscal year 2015 covering at least Board of Commissioners and Board of Directors aspects.</p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. <p>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015 agar diungkapkan.</p> <p>Containing explanations on, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criteria used for the assessment; 2. Assessing party; 3. Assessment score for each criteria; 4. Recommendation of the assessment results; and 5. Reasons on why the recommendations are/has not been implemented. <p>Note: explanation shall be given in the event of the GCG implementation assessment for fiscal year 2015 is nonexistent.</p>	<p>332-337</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi / Description of remuneration policy for Boards of Commissioners and Board of Directors</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/ atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</p> <p>Containing, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disclosure of remuneration procedures to the determination for the Board of Commissioners; 2. Disclosure of remuneration procedures to the determination for the Board of Directors; 3. Remuneration structure which shows the remuneration components and amount of value per component for each Board of Commissioners' member; 4. Remuneration structure which shows the remuneration components and amount of value per component for each Board of Directors' member; 5. Disclosure of indicators for the determination of Board of Directors' remuneration; and 6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or shares option received by each Board of Commissioners' and Board of Directors' member (if any). <p>Note: explanation shall be given in the event of performance bonus, non-performance bonus, and/or shares option received by each Board of Commissioners' and Board of Directors' member are nonexistent.</p>	<p>396-397; 439-442</p>
<p>6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan) Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) / Frequency and attendance rate in BOC Meetings, BOD meetings, and BOC-BOD joint meetings</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. <p>Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.</p> <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meeting date; 2. Meeting participants; and 3. Meeting agenda <p>For each BOC meeting, BOD meeting, and joint meeting.</p>	<p>381-390; 416-417; 418-432</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>7 Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu / Information on majority and controlling shareholders, both direct and indirectly, to individual holders</p>	<p>Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. In schematic chart or diagram, that differs the main shareholders and controlling shareholders. Note: the main shareholder is the party which, either directly or indirectly, holds at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by a company, but not a controlling shareholder.</p>	513
<p>8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali / Disclosure of affiliations among the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders</p>	<p>Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Containing, among others: 1. Affiliations among Board of Directors' fellow members; 2. Affiliations among Board of Directors members and Board of Commissioners members; 3. Affiliations among Board of Directors members and Majority and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliations among Board of Commissioners' fellow members; and 5. Affiliations among Board of Commissioners' members and Majority and/or Controlling Shareholders. Note: explanation shall be given in the event that any concerned affiliations are nonexistent.</p>	373-374 411-412

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>9. Komite Audit / Audit Committee</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <p>Containing, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and position of Audit Committee members; 2. Educational history qualifications (field of study and educational institution) and work experience of Audit Committee members (Position, Institution, and Term of Office); 3. Audit Committee members' independency; 4. Description of Audit Committee's duties and responsibilities; 5. Brief report on Audit Committee members' activities in the fiscal year; and 6. Frequency of meetings and attendance rate of Audit Committee members. 	<p>446-455</p>
<p>10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi / Nomination and/or Remuneration Committee</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ataremunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/ataremunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. <p>Containing, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, position, and brief CV of Nomination and/or Remuneration Committee members; 2. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee members; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of implementation of activities of Nomination and/or Remuneration Committee members in the fiscal year; 5. Frequency of meetings and attendance rate of Nomination and/or Remuneration Committee members; 6. Statement about the existence of guidelines for Nomination and/or Remuneration Committee; and 7. Policy relating to Board of Directors' succession. 	<p>462-463</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan / Other committees under the Board of Commissioners owned by the company	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Containing, among others: 1. Name, position, and brief CV of other committee members; 2. Independency of other committee members; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of the implementation of activities of other committees in the fiscal year; and 5. Frequency of meetings and attendance rate of other committees.	455-457; 458-463
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan / Description of duties and function of Corporate Secretary	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Containing among others: 1. Name and brief CV of the corporate secretary; 2. Domicile; 3. Description of the duties and responsibilities; and 4. Descriptions on the implementation of Corporate Secretary's duties in fiscal year.	92; 464-466
13. Uraian mengenai unit audit internal / Description on internal audit unit	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. Containing, among others: 1. Name of internal audit unit head; 2. Number of employees (internal auditors) in internal audit unit; 3. Certification for internal audit professions; 4. Internal audit unit position in corporate structure; 5. Brief report on internal audit unit's implementation of activities; and 6. Parties appointing and dismissing head of internal audit unit.	467-478 468; 468-469; 472-478; 468.

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
14. Akuntan Publik / Public Accountant	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p>The information encloses, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of periods in which a public accountant has conducted annual audit on financial statements for the last five (5) years; 2. Name and the year in which a Public Accounting Firm has conducted annual audit on financial statements for the last five (5) years; 3. Amount of fee for each service provided by public accountant in the last fiscal year; and 4. Other services provided by the accountant apart from annual audit on financial statements in the last fiscal year. <p>Note: explanation shall be given in the event that any services are nonexistent.</p>	478-480
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan / Description on company risk management	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. <p>Containing, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explanation on risk management system applied by the company; 2. Explanation on review on risk management system in the fiscal year; 3. Explanation on risks faced by the company; and 4. Risk management efforts. 	484-500 503-507
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern / Description on internal control system	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. <p>Covering, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brief explanation on internal control system, among others concerning financial and operational control; 2. Explanation on compliance with internal control system with internationally-recognized framework (COSO – internal control framework); and 3. Explanation on review conducted on internal control system implementation in the fiscal year. 	016 Annual Report

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>17. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup / Description on corporate social responsibility in relation to environment</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan <p>Terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. <p>Covering among others the information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activity target/plan in 2016 specified by the management; 2. Implemented activities and its quantitative impact due to such activities; and <p>In relation to environmental programs associated with company's operations, such as the use of environmentally-friendly and recyclable materials and energy, company's waste treatment system, environmental aspect consideration in the provision of loans to the customers, etc.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Environmental certifications owned. 	<p>535-537</p>
<p>18. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja / Description on corporate social responsibility in relation to employment, occupational health and safety</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut <p>Terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.</p> <p>Covering among others the information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activity target/plan in 2016 specified by the management; 2. Implemented activities and its quantitative impact; and <p>In relation to employment, occupational health and safety practices, such as gender equality and equal work opportunity, occupational facilities and safety, employee turnover rate, workplace accidents, remuneration, and mechanism of complaint regarding employment, etc.</p>	<p>538-548</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>19. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan / Description on corporate social responsibility in relation to social and community development</p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan <p>Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.</p> <p>Covering among others the information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activity target/plan in 2016 specified by the management; 2. Implemented activities and its impacts; and 3. Costs incurred. <p>In relation to social and community development, such as the use of local workforce, empowerment of surrounding communities, repair of social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication on anti-corruption policy and procedure, anti-corruption trainings, etc.</p>	549-569
<p>20. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen / Description on corporate social responsibility in relation to responsibility to customers</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut <p>Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.</p> <p>Covering, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activity target/plan in 2016 specified by the management; and 2. Implemented activities and its impacts; and. <p>In relation to product responsibility, such as consumer's health and safety, product information, facilities, number and response on customers complaints, etc.</p>	

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>21. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan / Significant cases currently faced by the company, subsidiaries, and Board of Directors and/or Board of Commissioners member(s) serving during the annual report period</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dalainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p> <p>Covering, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principal case/lawsuit; 2. Dispute/lawsuit settlement status; 3. Risk faced by the company and amount of dispute/lawsuit settlement; and 4. Administrative sanctions imposed to the company, Board of Commissioners and Board of Directors members, by relevant authorities (capital market, banking, and others) for the latest fiscal year (or if any statement confirming no imposition of administrative sanction exists). <p>Note: explanation shall be given in the event that any significant cases faced by the company, subsidiaries, Board of Commissioners and Board of Directors members are nonexistent.</p>	569-576
<p>22. Akses informasi dan data perusahaan / Access to company information and data</p>	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepadapublik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i>, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p> <p>Description on the availability of company information and data to public, such as through website (in Bahasa Indonesia and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.</p>	513-515
<p>23. Bahasan mengenai kode etik / Discussion on code of conduct</p>	<p>Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>Consisting description, among others on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Code of conduct contents; 2. Disclosure that the code of conduct applies to all levels of organization; 3. Dissemination of the code of conduct; 4. Types of sanction for each code of conduct violation; and 5. Number of code of conduct violation and the sanctions imposed in the last fiscal year. <p>Note: explanation shall be given in the event that any codes of conduct violations are nonexistent in the last fiscal year.</p>	516-518

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
24 Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> / Disclosure of whistleblowing system	<p>Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i>; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p>Consisting of description on whistleblowing system mechanism, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Whistleblowing delivery; 2. Whistleblower protection; 3. Handling of complaints; 4. Parties handling the complaints; and 5. Number of complaints received and processed in the last fiscal year; and 6. Sanction/follow-ups for the complaints which are settled in the fiscal year. <p>Note: explanation shall be given in the event that any incoming complaints are nonexistent in the last fiscal year.</p>	520-528
24 Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi / Policy on the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition	<p>Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.</p> <p>Description of Company policy on the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition by education (field of study), work experience, age, and gender.</p> <p>Note: explanation and basis of consideration shall be given in the event that concerned policy is nonexistent</p>	369-372; 406-410
VII. Informasi Keuangan / Financial Statements		
1. Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggungjawab atas Laporan Keuangan / Statements from Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Accountability on Financial Statements	<p>Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.</p> <p>Compliance with relevant regulation on Accountability on Financial Statements</p>	LK: Halaman Surat Pernyataan Direksi
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan / Independent auditor's opinion on the financial statements		LK: Halaman Laporan Auditor Independen
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini / Independent auditor's description on the opinion	<p>Deskripsi memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. <p>The description includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Names and signatures; 2. Date of Audit Report; and 3. Public Accounting Firm's and Public Accountant's License Numbers. 	LK: Halaman Laporan Auditor Independen

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
<p>4. Laporan keuangan yang lengkap / Comprehensive financial statements</p>	<p>Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitmenerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membubunpenyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitmereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). <p>Comprehensively consisting elements of the financial statements, such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statement of financial position; 2. Statement of income and comprehensive income; 3. Statement of changes in equity; 4. Statement of cash flows; 5. Notes to the financial statements; 6. Comparative information on the previous period; and 7. Statements of financial position at the beginning of the previous period presented when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statements posts, or when an entity reclassifies posts in the financial statements (if relevant). 	<p>LK: 1-148</p>
<p>5. Perbandingan tingkat profitabilitas / Comparison of profitability level</p>	<p>Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>Comparison between profit (loss) in current year and the previous year.</p>	<p>LK: 3</p>
<p>6. Laporan Arus Kas / Statement of Cash Flow</p>	<p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kasselama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan ataslaporan keuangan. <p>Fulfilling the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Classification in three categories of activity: operating, investing, and funding; 2. The use of direct method in reporting the cash flow from operating activities; 3. Separation of presentation between cash receipts and/ or cash expenses for the current year in operating, investing, and funding activities; and 4. Disclosure of non-cash transaction must be included in the notes to the financial statements. 	<p>LK: 5</p>

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi / Accounting Policy Highlights	<p>Meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. <p>Consisting at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK); 2. Basis for the measurement and preparation of financial statements; 3. Income tax; 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments. 	LK: 39-69
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi / Disclosure of transactions with related parties	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. <p>Items disclosed among others are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Names of related parties and the nature of relationship with these parties; 2. Transactional value and its percentage against total revenue and relevant expenses; and 3. Total balance and its percentage against total assets or liabilities. 	LK: 128-129
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan / Disclosure of matters relating to taxation	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: LK: 128-129</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <p>Matters need to be disclosed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expense (income) and accounting profit; 3. Statement acknowledging that Taxable Profits (LKP) from the reconciliation serves as the basis for Corporate Income Tax's Annual Tax Returns (SPT) of 2016; 4. Details of assets and deferred tax liabilities recognized in the financial position statement for each presenting period, and the amount of deferred tax (income) expenses recognized in the income statements if the amount is not visible in the total assets or liabilities of deferred tax recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax disputes. 	LK: 80-83

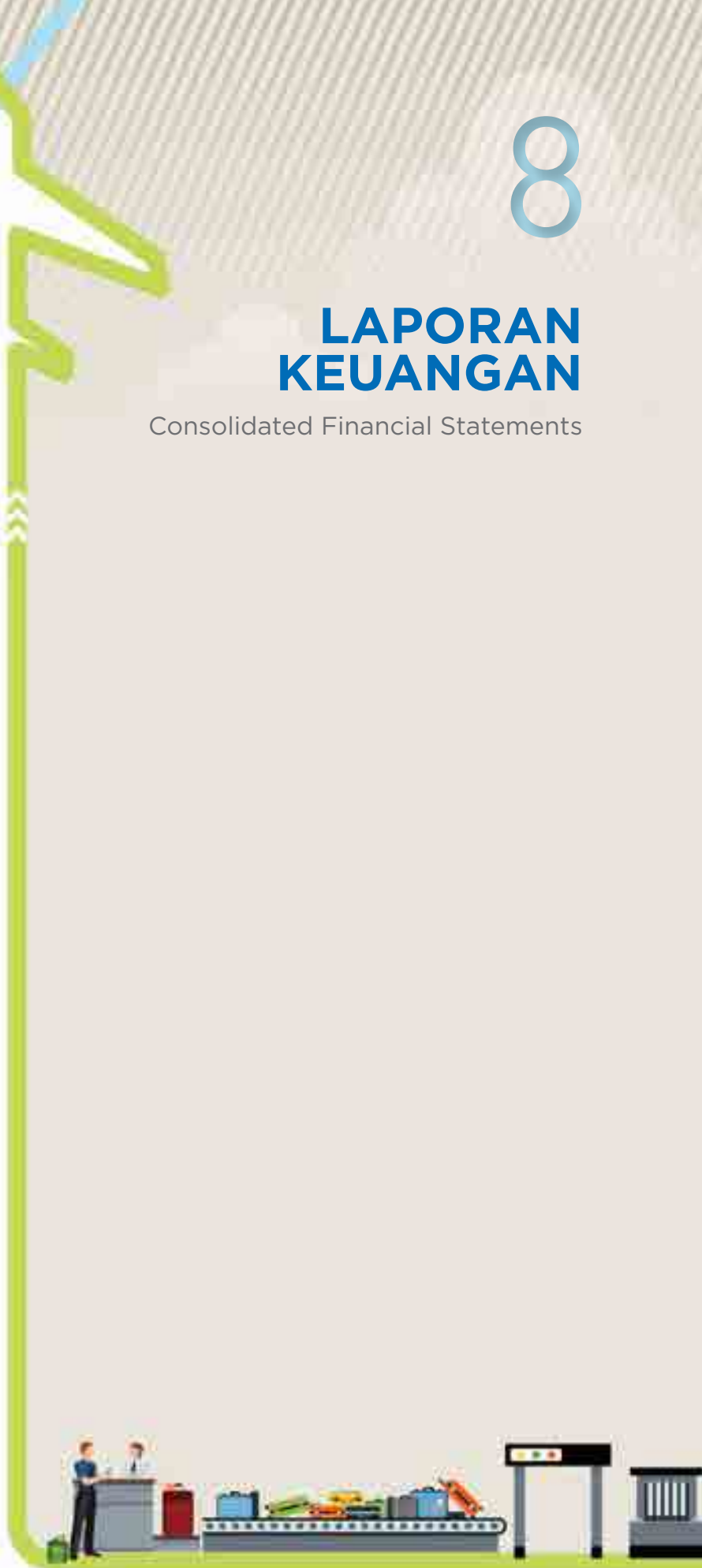
KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap / Disclosure of matters relating to fixed assets	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. <p>Matters need to be disclosed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depreciation method used; 2. Description of accounting policy selected, either revaluation or cost model; 3. Methods and significant assumptions used to estimate fixed assets' fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets' fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and the end of period by presenting: addition, reduction, and reclassification. 	LK: 89-94
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi / Disclosure of operational segment	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. <p>Matters need to be disclosed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General information covering the factors used to identify reported segment; 2. Information regarding profit and loss, assets, and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total revenue, profit and loss, assets, liabilities of the reported segment, and other material elements of the segment against relevant amount in the entity; and 4. Disclosure at the level of entity, covering information on products and/or services, geographical area, and main customers. 	LK: 130-131

KRITERIA CRITERIA	PENJELASAN DESCRIPTIONS	HALAMAN PAGE
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan / Disclosure relating to Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Matters need to be disclosed: 1. Detailed of financial instruments by classification; 2. Fair value and hierarchy of each group of financial instruments; 3. Explanation of risks relating to financial instruments: market risks, credit risks, and liquidity risks; 4. Risk management policies; and 5. Quantitative risk analysis relating to financial instruments.	LK:131
13. Penerbitan laporan keuangan / Publication of financial statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Items disclosed among others are: 1. Authorized publication date of the financial statements; and 2. The party responsible for the financial statements authorization.	LK: 148



LAPORAN KEUANGAN

Consolidated Financial Statements



PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK /

AND SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 /

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /

WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT




Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Certified Public Accountants

KANTOR CABANG SURABAYA 1

Jl. Manyar Rejo IV / 4 Surabaya 60118, Indonesia
Telephone : (031) 5939787 Fax : (031) 5945616 ; E-mail kaphadori@yahoo.co.id

Nomor Izin Usaha KAP : KEP-444/KM.1/2009

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan is a member of  International A world - wide organization of accounting firms and business advisers.

Daftar Isi / Table of Contents

	Halaman / Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	i	<i>BOARD OF DIRECTORS STATEMENT</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii	<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015		<i>CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2016 and 2015</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Income Statements and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	6	<i>NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS</i>
INFORMASI TAMBAHAN		<i>SUPPLEMENTARY INFORMATION</i>
Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	Lampiran 1 / <i>Attachment 1</i>	<i>Statements of Financial Position - Holding</i>
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk	Lampiran 2 / <i>Attachment 2</i>	<i>Income Statements and Other Comprehensive Income- Holding</i>
Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk	Lampiran 3 / <i>Attachment 3</i>	<i>Statements of Changes in Equity - Holding</i>
Laporan Arus Kas - Entitas Induk	Lampiran 4 / <i>Attachment 4</i>	<i>Statements of Cash Flows - Holding</i>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS STATEMENT

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN 31 DESEMBER 2015 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
PT ANGKASA PURA 1 DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016,
AND DECEMBER 31, 2015 AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
PT ANGKASA PURA 1 AND ITS SUBSIDIARIES**

We, the undersigned :

1 Nama	Danang Sotyo Baskoro	Name
Alamat kantor	Kota Baru Bandar Kemayoran B.12 KAV. Jakarta 10610	Office address
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	Jl. Krida Nirmala Blok C 2 No.1 Komplek DepKes RT 08 RW 04 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara 14350	Address of domicile based on ID card or other identity document
Telepon Jabatan	(021) 650-7115 Direktur Utama/President Director	Telephone Position
2 Nama	Novrihandri SE, Ak	Name
Alamat kantor	Kota Baru Bandar Kemayoran B.12 KAV. No.2 Jakarta 10610	Office address
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	Jl. Pulo Asem Timur No.9A RT 004 RW 002 Kec. Jati, Pulo Gadung Jakarta Utara 14350	Address of domicile based on ID card or other identity document
Telepon Jabatan	(021) 489-2320 Direktur Keuangan & TI / Finance & IT Director	Telephone Position

Menyatakan bahwa :

Declare that :

- | | |
|--|--|
| 1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura 1 (Persero) dan entitas anak; | 1 <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Angkasa Pura 1 (Persero) and its subsidiaries;</i> |
| 2 Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia | 2 <i>The consolidated financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3 a Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3 a <i>All information in the consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| b Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material: | b <i>The consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;</i> |
| 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak. | 4 <i>We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control systems.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This is our declaration, which has been made truthfully

Jakarta, 20 Februari 2017/ February 20, 2017
Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

 Danang Sotyo Baskoro Direktur Utama / President Director	 Novrihandri SE, Ak Direktur Keuangan & TI / Finance & IT Director
--	---

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No.: 17/LAI-API/SBY I/II/2017

No.: 17/LAI-API/SBY I/II/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Angkasa Pura I (Persero)

*The Shareholders, Board of Commissioners and
Directors
PT Angkasa Pura I (Persero)*

Laporan Auditor Independen***Independent Auditors' Report***

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Angkasa Pura I (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggungjawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian***Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error

Tanggung Jawab Auditor***Auditor's Responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

KANTOR CABANG SURABAYA 1**Nomor Izin Usaha KAP : KEP-444/KM.1/2009**

Jl. Manyar Rejo IV / 4 Surabaya 60118, Indonesia
Telephone : (031) 5939787 Fax : (031) 5945616 ; E-mail kaphadori@yahoo.co.id

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan is a member of  International A world - wide organization of accounting firms and business advisers.

No.: 17/LAI-API/SBY 1/II/2017

Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika, serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian intern entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No.: 17/LAI-API/SBY 1/II/2017

Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessments of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

HLB

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

No.: 17/LAI-API/SBY 1/II/2017

No. : 17/LAI-API/SBY1/II/2017

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial positions of PT Angkasa Pura I (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2016 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Wijadi, Ak, CPA

No. Register Akuntan Publik : AP 0063 / Registered Number of Public Accountant: AP. 0063

20 Pebruari 2017 / February 20, 2017

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	31 Desember / December 31, 2016	Catatan / Notes	31 Desember / December 31, 2015	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4.896.214.996	5f,6	1.746.272.845	Cash and cash equivalents
Investasi Jangka Pendek	295.240.648	5g,5h,7	216.446.783	Short-term Investment
Piutang usaha (setelah dikurangi penurunan nilai sebesar 131.438.275 dan 162.940.786 tahun 2016 dan 2015)		5i,8		Trade receivables Net allowance for impairment losses of 131.438.275 and 162.940.786 in 2016 and 2015)
Pihak berelasi	92.438.942		115.373.935	Related parties
Pihak ketiga	390.331.307		455.796.851	Third parties
Piutang lain-lain (setelah dikurangi penurunan nilai sebesar 2.980.254 and 3.006.197 tahun 2016 dan 2015)		9		Other receivables Net allowance for impairment losses of 2.980.253 and 3.006.197 in 2016 and 2015)
Pihak berelasi	2.399.784		118.518.984	Related parties
Pihak ketiga	10.044.868		10.043.466	Third parties
Persediaan	40.616.584	5j,10	36.359.021	Inventories
Uang muka dan beban dibayar di muka	63.696.013	11	23.977.802	Advances and Prepaid expense
Pendapatan yang masih harus diterima	201.226.696	12	208.419.621	Accrued income
Pajak dibayar dimuka	82.242.218	5u,13a	150.835.561	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	10.249.251	14	8.076.219	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	6.084.701.307		3.090.121.088	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	302.019	5u,13e	1.412.424	Deferred Tax Assets
Piutang jangka panjang	699.887	15	-	Long term receivables
Bagian jangka panjang dari uang muka dan beban dibayar di muka	78.216.838	11	-	Non Current Advances and Prepaid expense
Investasi Jangka Panjang	96.129.584	5h,16	129.659.365	Long Term Investments
Properti Investasi (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 50.040.833 dan 35.695.966 tahun 2016 dan 2015)	200.785.384	5l,17	149.844.910	Investment properties (Net of accumulated depreciation of 50.040.833 dan 35.695.966 in 2016 and 2015)
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 4.885.057.914 dan 4.121.015.376 tahun 2016 dan 2015)	17.155.508.872	5m,18a, 18	13.304.090.222	Fixed Assets (Net of accumulated depreciation of 4.885.057.914 and 4.121.015.376 in 2016 and 2015)
Aset tidak berwujud	44.244.282	19	45.373.282	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	6.357.781	20	1.835.371	Other Assets
Jumlah aset Tidak Lancar	17.582.244.647		13.632.215.574	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	23.666.945.954		16.722.336.662	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to the Financial Statements as an integral part of these financial statements.

1.1.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31, 2016	Catatan / Notes	31 Desember / December 31, 2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Beban yang masih harus dibayar	879.355.299	21	599.102.599	<i>Accrued expenses</i>
Utang Usaha		22		<i>Trade Payable</i>
Pihak ketiga	1.466.479.973		665.594.918	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	25.130.387		17.077.411	<i>Related parties</i>
Utang Non Usaha		23		<i>Non Trade Payable</i>
Pihak ketiga	16.626.370		13.808.469	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	-		39.962.615	<i>Related parties</i>
Pendapatan diterima dimuka	87.481.015	24	88.640.117	<i>Unearned revenue</i>
Utang pajak	138.440.567	5u,13b,d	169.635.162	<i>Tax payables</i>
Bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo				<i>Current maturities of long term loan</i>
Utang Bank	749.480.143	5g,25	590.158.510	<i>Bank loan</i>
Utang sewa guna usaha	3.671.688	5w,25	2.610.927	<i>Leasing</i>
Utang lancar lainnya	505.126.209	26	518.323.300	<i>Other current liabilities</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.871.791.651		2.704.914.028	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES
Utang Bank	4.304.115.030	5g,27	2.474.584.667	<i>Bank Loan</i>
(setelah dikurangi utang jatuh tempo)				<i>(less current portions)</i>
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	2.991.309.839	28	-	<i>Bonds Loan and Sukuk Ijarah</i>
Utang jangka panjang lainnya				<i>Other non - current liabilities</i>
(setelah dikurangi utang jatuh tempo)				<i>(less current portions)</i>
Utang sewa guna usaha	4.616.805	25,29	8.651.102	<i>Leasing</i>
Utang jangka panjang lainnya	167.636.205	24,29	158.296.608	<i>Other long term liabilities</i>
Liabilitas imbalan paska kerja	329.979.564	5q,30	346.841.031	<i>Post -employment benefits liabilities</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.797.657.443		2.988.373.408	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	11.669.449.094		5.693.287.436	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				<i>Equity attributable to equity holders of the parent entity</i>
Modal Saham				<i>Share capital</i>
Modal dasar 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1000.000 per saham.				<i>Authorized capital 12.000.000 shares with par value of Rp 1,000,000 per share</i>
Modal ditempatkan dan disetor 6.414.412 lembar tahun 2016 dan 2015	6.414.412.000	31	6.414.412.000	<i>The issued and paid-up capital 6.414.412 in 2016 and 2015</i>
Setoran Modal Lainnya :				<i>Other Share Capital</i>
Penyertaan Modal Negara	255.096.706	5s,32	-	<i>Government capital investement</i>
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya (BPYBDS)	-	33	255.096.706	<i>Government contribution pending determination in status (BPYBDS)</i>
Pengalihan aset tetap kenavigasian				<i>The transfer of navigation fixed asset</i>
Nilai buku aset tetap kenavigasian	(269.138.292)	34	(269.138.292)	<i>Book value of fixed assets</i>
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari BPYBDS	408.393.524	34	408.393.524	<i>Accumulated depreciation of navigation fixed asset of BPYBDS</i>
Penghasilan komprehensif lain :				<i>Oher Comprehensive Income</i>
Laba yang belum direalisasi atas efek	40.144.097		24.015.711	<i>Unrealized gain on securities</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja	(93.018.794)		(54.229.193)	<i>Gains (losses) on employee benefits actuarial</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	4.080.412.385	35	3.407.178.379	<i>Appropriated -</i>
- Laba tahun berjalan	1.158.800.143		841.542.506	<i>Un Appropriated -</i>
Jumlah ekuitas yang diatribusikan ke entitas induk	11.995.101.769		11.027.271.341	<i>Total equity attributable to holders of the parent</i>
Keuntungan non pengendali	2.395.091	5v, 36	1.777.885	<i>Non controlling interest</i>
Jumlah ekuitas	11.997.496.860		11.029.049.226	Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	23.666.945.954		16.722.336.662	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to the Financial Statements as an integral part of these financial statements.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN LABA RUGI DAN
 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
 OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31, 2016	Catatan / Notes	31 Desember / December 31, 2015	
PENDAPATAN OPERASIONAL		5t,37		OPERATING INCOME
Aeronautika				Aeronautika
Jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U)	525.538.196		472.049.655	Aircraft landing, placing and storing services (PJP4U)
Jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)	2.772.510.513		2.378.795.901	Aircraft passenger handling services (PJP2U)
Pemakaian aviobridge	133.823.660		128.150.565	Aviobridge services
Pemakaian counter	105.762.864		104.664.080	Counter services
Pemakaian BHS/HBS	74.652.793		71.576.700	BHS/HBS services
Pendapatan aeronautika	<u>3.612.288.026</u>		<u>3.155.236.901</u>	Income of aeronautika
Non aeronautika		5t, 38		Non aeronautika
Pemakaian telepon, listrik, air, parkir, anjungan dan kartu pas	250.018.395		240.179.078	Telephone, electricity, water, parking, galleries and entrance pass
Sewa - sewa	581.302.274		426.539.152	Rentals
Pemakaian ruang tunggu	96.726.698		71.930.334	CIP Lounge
Konsesi	1.134.882.845		977.646.173	Concessions
Event & Promosi	27.670.233		37.618.240	Event & Promotion
Pergudangan Warehousing	302.899.398		279.287.184	Warehousing
Jasa pemeliharaan dan Perbaikan	84.476.395		40.633.479	Maintenance & Service Fee
Jasa lain	48.007.635		20.559.216	Other services
Pendapatan non aeronautika	<u>2.525.983.873</u>		<u>2.094.392.856</u>	Income of aeronautika
Jumlah pendapatan	<u>6.138.271.899</u>		<u>5.249.629.757</u>	Total Income
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Beban pegawai	1.078.993.793	5t, 39	975.800.888	Employee expenses
Pemeliharaan	258.006.427	5t, 40	212.197.551	Maintenance
Beban pemakaian persediaan	40.408.579	5t, 41	38.980.094	Inventory usage
Utilitas	316.507.854	5t, 42	308.568.469	Utilities
Sewa	44.935.860	5t, 43	38.041.705	Leases
Umum dan administrasi	688.573.717	5t, 44	613.106.138	General and administration expenses
Pajak	206.259.651	5t, 45	208.864.164	Taxes expenses
Asuransi	15.986.366	5t, 46	15.700.895	Insurance
Low value aset	15.378.917	5t, 47	8.748.491	Low value assets
Penyusutan dan amortisasi	759.217.418	5t, 48	707.014.950	Depreciation and amortizations
Imbalan paska kerja	78.894.173	5t, 49	200.087.789	Employee benefit
Beban pelayanan penumpang	284.170.517	5t, 50	114.263.813	Passenger services expenses
Beban langsung lainnya	701.528.811	5t, 51	514.294.945	Other direct expenses
Jumlah beban operasional	<u>4.488.862.083</u>		<u>3.955.669.892</u>	Total operating expenses
Labanya operasional	<u>1.649.409.816</u>		<u>1.293.959.865</u>	Operating income
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non operasional		52		Non operating income
Pendapatan keuangan	107.274.051		78.518.906	Finance income
Bagian laba asosiasi	2.826.087		15.695.636	Share in profit of associated entities
Penghasilan lain-lain	84.055.531		220.493.494	Other income
Beban non operasional		53		
Beban keuangan	(231.712.795)		(227.551.297)	Finance expense
Bagian rugi asosiasi	(6.470.973)		(9.665.730)	Share in loss of associated entities
Beban lainnya	(96.528.961)		(288.708.396)	Other expenses
Jumlah pendapatan (beban) operasional	<u>(140.557.060)</u>		<u>(211.217.387)</u>	Total non operating income (expenses)
Labanya sebelum taksiran pajak penghasilan badan	<u>1.508.852.756</u>		<u>1.082.742.478</u>	Income before corporate income tax
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX
Pajak kini	348.165.197	5u, 13d	283.496.037	Current tax
Pajak tangguhan	1.110.405	5u, 13e	(42.726.189)	Deffered tax
Total pajak penghasilan	<u>349.275.602</u>		<u>240.769.848</u>	Total income taxes
Labanya bersih tahun berjalan	<u>1.159.577.154</u>		<u>841.972.630</u>	Net income
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Labanya (rugi) belum terealisasi investasi efek	16.128.386		(20.815.886)	Unrealized gain (loss) on securities investment
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan paska kerja	(38.789.601)		(98.961.650)	Remeasurement gains (losses) on post employment benefits liability
Jumlah laba komprehensif lain	<u>(22.661.215)</u>		<u>(119.777.536)</u>	Total other comprehensive income
Labanya Komprehensif tahun berjalan	<u>1.136.915.939</u>		<u>722.195.094</u>	Comprehensive income for the year
LABA DIATRIBUSIKAN KEPADA :				INCOME ATTRIBUTABLE TO :
Pemilik Entitas Induk	1.158.800.143		841.542.506	The Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	777.011	5v	430.124	Non Controlling Interest
	<u>1.159.577.154</u>		<u>841.972.630</u>	
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA :				COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO :
Pemilik Entitas Induk	1.136.138.928		721.764.970	The Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	777.011		430.124	Non Controlling Interest
	<u>1.136.915.939</u>		<u>722.195.094</u>	
Labanya bersih per saham dasar	<u>181</u>	5 aa	<u>131</u>	Basic earnings per share

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to the Financial Statements as an integral part of these financial statements.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan	Modal saham / Capital Stocks	Penyertaan modal Pemerintah/ Government capital investment	BPYBDS / Government contribution pending determination in status	Pengaruh pengalihan aset kenavigasian / Effect of the transfer of navigation fixed assets	Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek/ Unrealized gain (loss) on marketable securities	Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja Gain (loss) actuarial post retirement benefits	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah / Total	Kepentingan non pengendali / Non controlling interest	Jumlah ekuitas / Total equity	Description
							Telah ditentukan penggunaannya / Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Un Appropriated				
Saldo per 31 Desember 2014	3.488.245.000	2.926.166.059	255.096.706	139.255.232	44.831.597	44.732.457	2.617.335.809	994.135.846	10.509.798.706	1.455.379	10.511.254.085	Balance as of December 31, 2014
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(185.720.305)	(185.720.305)	-	(185.720.305)	Dividend
PKBL / PUKK	-	-	-	-	-	-	-	(18.572.030)	(18.572.030)	-	(18.572.030)	Corporate Social Responsibility
Cadangan	-	-	-	-	-	-	742.881.216	(742.881.216)	-	-	-	Appropriated
Penyertaan modal Pemerintah	2.926.167.000	(2.926.166.059)	-	-	-	-	(941)	-	-	-	-	Government capital investment
Pengaruh pengalihan aset tetap kenavigasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Effect of navigation fixed assets transfer
BPYBDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transfer of fixed assets - BPYBDS
Penyesuaian Laba tahun lalu	-	-	-	-	-	-	46.962.295	(46.962.295)	-	-	-	Retained earnings adjustment
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	841.542.506	841.542.506	430.124	841.972.630	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	(20.815.886)	(98.961.650)	-	-	(119.777.536)	-	(119.777.536)	Other comprehensive income
Kepentingan Non Pengendali - Dividen anak perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(107.618)	(107.618)	Non controlling interest - subsidiaries divident
Saldo per 31 Desember 2015	6.414.412.000	-	255.096.706	139.255.232	24.015.711	(54.229.193)	3.407.178.379	841.542.506	11.027.271.341	1.777.885	11.029.049.226	Balance as of December 31, 2015
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(168.308.500)	(168.308.500)	-	(168.308.500)	Dividend
PKBL / PUKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cadangan	-	-	-	-	-	-	673.234.006	(673.234.006)	-	-	-	Appropriated
Penyertaan modal Pemerintah	-	255.096.706	-	-	-	-	-	-	255.096.706	-	255.096.706	Government capital investment
Pengaruh pengalihan aset tetap kenavigasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Effect of navigation fixed assets transfer
BPYBDS	-	-	(255.096.706)	-	-	-	-	-	(255.096.706)	-	(255.096.706)	Transfer of fixed assets - BPYBDS
Penyesuaian Laba tahun lalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Retained earnings adjustment
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	1.158.800.143	1.158.800.143	777.011	1.159.577.154	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	16.128.386	(38.789.601)	-	-	(22.661.215)	-	(22.661.215)	Other comprehensive income
Penyesuaian Laba tahun lalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(159.805)	(159.805)	Retained earnings adjustment
Saldo per 31 Desember 2016	6.414.412.000	255.096.706	-	139.255.232	40.144.097	(93.018.794)	4.080.412.385	1.158.800.143	11.995.101.769	2.395.091	11.997.496.860	Balance as of December 31, 2016

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to the Financial Statements as an integral part of these financial statements.

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31, 2016	31 Desember / December 31, 2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan tunai	3.203.341.496	2.562.210.546	<i>Cash received from cash sales</i>
Penerimaan dari penjualan kredit	2.827.882.113	2.085.693.844	<i>Cash received from non cash sales customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(3.328.483.043)	(3.356.661.093)	<i>Cash payment to suppliers and employees</i>
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	2.702.740.566	1.291.243.297	<i>Net cash from receipt and payment</i>
Pembayaran pajak	(641.504.619)	(488.580.794)	<i>Tax payment</i>
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2.061.235.947	802.662.503	<i>Net cash provided (by) from operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) investasi jangka pendek	(166.259.955)	134.531.592	<i>Received from (payment for) short term investments</i>
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) investasi jangka panjang	-	12.264.089	<i>Received from (payment for) long term investments</i>
Penambahan aset tetap	(3.669.513.457)	(1.571.157.935)	<i>Addition in fixed assets</i>
Penambahan aset lain lain	44.578.808	108.788.928	<i>Addition in other assets</i>
Penerimaan bunga deposito dan jasa giro	80.651.484	55.346.704	<i>Interest from deposits and checking accounts</i>
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(3.710.543.120)	(1.260.226.622)	<i>Net cash provided (by) from investing activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) pinjaman jangka panjang	1.980.120.127	910.281.847	<i>Proceed (pay) on long term loan</i>
Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah	3.000.000.000	-	<i>Bonds and Sukuk Ijarah</i>
Pembayaran dividen	(168.308.500)	(185.720.304)	<i>Dividend payment</i>
Pembayaran PKBL	-	(18.572.030)	<i>PKBL payment</i>
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	4.811.811.627	705.989.513	<i>Net cash provided (by) from financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	3.162.504.454	248.425.394	<i>Increase (decrease) of cash and cash equivalent</i>
Pengaruh selisih kurs	(12.562.303)	145.587.328	<i>Effect of foreign exchange rate</i>
Kas dan Setara Kas pada awal periode	1.746.272.845	1.352.260.123	<i>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	4.896.214.996	1.746.272.845	CASH AND CASH EQUIVALENT END YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to the Financial Statements as an integral part of these financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. UMUM	1. GENERAL
<p>a. Pendirian</p> <p>Perseroan pertama kali didirikan dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura. PN Angkasa Pura dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) "Angkasa Pura".</p> <p>Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1985 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1986. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ("PP No. 5/1992"), bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.</p>	<p>a. Establishment</p> <p><i>The Company was first established as a state company by the name of the State Enterprise (PN) Angkasa Pura Kemayoran by the Indonesian Government Regulation No. 33 Year 1962 on the Establishment of the State Enterprise (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Based on the Indonesian Government Regulation No. 21 of 1965 on the Amendment and Supplement to Regulation No. 33 of 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran changed its name to PN Angkasa Pura. Furthermore, based on the Indonesian Government Regulation No. 37 of 1974 on Public Company Angkasa Pura, PN Angkasa Pura continued establishment and set forms its business into Public Corporation (Perum) as defined in Article 2 paragraph (2) of Law No. 9 of 1969, under the name Public Corporation (Perum) "Angkasa Pura".</i></p> <p><i>In the framework of the division of management of airports, public corporations (Perum) Angkasa Pura as stipulated in Government Regulation No. 3 Year 1985 was renamed the Perusahaan Umum Angkasa Pura I is based on the Indonesian Government Regulation No. 25 Year 1986. Furthermore, based on Government Regulation No. 5 of 1992 on the Transformation of the General Company (Perum) Angkasa Pura I became a Limited Company (Persero) ("PP No. 5/1992"), the legal entity of general company (Perum) Angkasa Pura I is converted into a limited company (PT). The move of the forms of general company (Perum) Angkasa Pura I became a Limited Company (Persero), General Company (Perum) Angkasa Pura I is liquidated at the time of incorporation of the Company (Persero) with the proviso that all rights and obligations, property and employees of General Company (Perum) Angkasa Pura I, which existed at the time of its dissolution transferred to the Company (Persero) is concerned.</i></p>

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

Dalam rangka pelaksanaan PP No. 5/1992 telah di tandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas Angkasa Pura I (Persero) No. 1 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 95 tanggal 19 Maret 1993 keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-2470.HT.01.01. th.93 tanggal 24 April 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1370/1993 tanggal 19 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2914, dengan modal perusahaan sebagai berikut:

- a. Modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp5.250.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 5.250.000 lembar saham terdiri atas 1.050.000 lembar saham prioritas dan 4.200.000 lembar saham biasa, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh);
- b. Modal ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp1.050.000.000.000 (Rupiah penuh).

Berdasarkan Akta tertanggal 16-04-1998, Nomor 15 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor C2-25830 HT.01.04.TH.98 tanggal 19 November 1998 terdapat penurunan modal dasar dan modal disetor yaitu sebagai berikut:

- a. Modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp3.700.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi atas 3.700.000 saham, masing- masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh);
- b. Modal ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh sebesar Rp925.000.000.000 (Rupiah penuh).

In the implementation of PP No. 5/1992 has been signed Deed of Establishment of a Limited Liability Company Angkasa Pura I (Persero) No. 1 dated January 2, 1993, as corrected by Deed of Rectification No. 95 dated March 19, 1993, both made by Muhani Salim SH, Notary in Jakarta, which has been approved by the Ministry of Justice by Decree No. C2-2470.HT.01.01. th.93 April 24, 1993 and was registered at the Central Jakarta District Court No. 1370/1993 dated May 19, 1993 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 52 dated June 29, 1993, the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 2914, with the capital of the company as follows:

- a The authorized capital is set at Rp5,250,000,000,000 (full Rupiah) divided into 5,250,000 shares consisting of 1,050,000 shares and 4,200,000 priority common shares, respectively shares with a nominal value Rp1,000,000 (full Rupiah);*
- b The issued / taken part and have been fully paid by cash amounting Rp1,050,000,000,000 (full Rupiah).*

Based on the Deed dated 16 April 1998, No. 15 made by Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with decision number C2-25830 HT.01.04.TH.98 dated 19 November 1998 there is a decrease in the authorized capital and paid up capital is as follows:

- a The authorized capital is set at Rp3,700,000,000,000 (full Rupiah) divided into 3,700,000 shares, each share with a nominal value Rp1,000,000 (full Rupiah);*
- b The issued / taken part and have been fully paid for Rp925,000,000,000 (full Rupiah).*

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)
<p>Berdasarkan persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Nomor KEP-30/MBU/2007 tanggal 26 Maret 2007 terdapat:</p> <p>a. Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp3.700.000.000.000 (Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp7.000.000.000.000 (Rupiah penuh);</p> <p>b. Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp875.000.000.000 (Rupiah penuh) yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2002, dari modal donasi, laba yang belum dibagi dan cadangan sampai dengan tahun buku 2005, sehingga modal ditempatkan/disetor Perseroan menjadi Rp1.800.000.000.000 (Rupiah penuh).</p> <p>Perubahan diatas telah dimuat dalam Akta tertanggal 9 Agustus 2007, Nomor 02, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor W7-08937 HT.01.04-TH.2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor 2290/RUB 09.05/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7 September 2007, Nomor 72, dengan Tambahan Nomor 9120.</p> <p>Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah dimuat dalam Akta tertanggal 15 Agustus 2008, Nomor 35 yang dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-64347.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 16 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04 November 2008, Nomor 89, dengan Tambahan Nomor 22475.</p>	<p><i>Based on the approval of the Minister for State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of the Company as stated in Ministerial Decree No. KEP-30/MBU/2007 dated March 26, 2007 are:</i></p> <p><i>a The increase in authorized capital originally amounting Rp3,700,000,000,000 (full Rupiah) to Rp7,000,000,000,000 (full Rupiah);</i></p> <p><i>b Additional investment of the Republic of Indonesia to the share capital of the Company amounted to Rp875,000,000,000 (full Rupiah) from the Government Regulation No. 40 of 1999, Government Regulation No. 35 of 2000, Government Regulation No. 19 of 2002, from the donation of capital, undistributed profits and reserves up to the year 2005, so that the issued / paid-up capital of the Company to Rp1,800,000,000,000 (full Rupiah).</i></p> <p><i>The above changes has been stated in Deed dated August 9, 2007, No. 02, which was made by Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. W7-08937 HT .01.04 TH.2007 dated August 14, 2007, and registered in the Company Register No. 2290/RUB 09:05/VIII/ 2007 dated August 28, 2007 and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia dated 7 September 2007, No. 72, by Supplement No. 9120.</i></p> <p><i>Articles of Association have been changed completely and adapted by Act No. 40 of 2007 on Limited Company and has been published in Deed dated August 15, 2008, No. 35 made by Peter Suandi Halim, SH, Notary in Jakarta, and has obtained approval from the Minister law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-64347.AH.01.02 Year 2008 September 16, 2008, and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia dated November 4, 2008, No. 89, by Supplement No. 22475.</i></p>

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

Adanya penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011 dan sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Nomor RIS 272/MBU/S/2012 telah disetujui peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp7.000.000.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp12.000.000.000.000 (Rupiah penuh), dan penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp1.388.245.000.000 (Rupiah penuh) yang berasal dari penambahan penyertaan modal negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2011 dan Kapitalisasi Cadangan Perseroan, sehingga modal ditempatkan/disetor Perseroan menjadi Rp3.188.245.000.000 (Rupiah penuh) perubahan ini telah dimuat dalam Akta tertanggal 15 Agustus 2012, Nomor 05, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.Li., M.K.n., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-46777.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0078751.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2012, Nomor 84, dengan Tambahan Nomor 62059.

Berdasarkan persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor S-766/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 terdapat penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp300.000.000.000 (Rupiah penuh) yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan, sehingga modal ditempatkan/disetor Perseroan menjadi Rp3.488.245.000.000 (Rupiah penuh).

Their investment of the Republic of Indonesia in the share capital of the Company by the Indonesian Government Regulation No. 76 of 2011 and the corresponding Minutes of the General Meeting of Shareholders of Extraordinary Limited Number: RIS 272/MBU/S/2012 has approved an increase in the authorized capital of the Company from Rp7,000,000,000,000 (full Rupiah) to Rp12,000,000,000,000 (full Rupiah), and the equity of the Republic of Indonesia in the capital of the Company amounted to Rp1,388,245,000,000 (full Rupiah) derived from the increase in capital of the country as the Government Regulation No. 76 of 2011 and the capitalization of reserves of the Company, so that the issued / paid-up capital of the Company to Rp3,188,245,000,000 (full Rupiah), and this change has been published in Deed dated August 15, 2012, No. 05, which was made in the presence of Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, M.Li., MKn, Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-46777.AH.01.02.Tahun 2012 dated September 3, 2012, and registered in the Company Register No.AHU-0078751.AH.01.09.Tahun 2012 dated 3 September 2012 and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia, dated October 19, 2012, No. 84, by Supplement No. 62059.

Based on the approval of the Minister for State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of the Company as stated in the Letter No. S-766 / MBU / 2012 dated December 27, 2012 there is the additional capital of the Republic of Indonesia to the share capital of the Company amounting to Rp300,000,000,000 (full Rupiah) coming from the partial capitalization of reserves of the Company, so that the issued / paid-up capital of the Company to Rp3,488,245,000,000 (full Rupiah).

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

Perubahan diatas telah dimuat dalam Akta tertanggal 16 Januari 2013, Nomor 02, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0006473.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25 Maret 2014, Nomor 24, dengan Tambahan Nomor 255/L.

The change above has loaded Deed dated January 16, 2013, No. 02, which was made by Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-AH.01.10-02672 date January 31, 2013, and registered in the Company Register No. AHU-0006473.AH.01.09.Tahun 2013 dated January 31, 2013 and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia dated March 25, 2014, No. 24, by Supplement No. 255 / L.

Adanya penyertaan modal Negara Republik Indonesia kembali ke dalam modal saham Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 dan sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor S-504/MBU/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 telah disetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesar Rp2.926.167.000.000 (Rupiah penuh) yang berasal dari penambahan penyertaan modal negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 dan Kapitalisasi sebagian Cadangan Perseroan, sehingga modal ditempatkan/disetor Perseroan menjadi Rp6.414.412.000.000 (Rupiah penuh), dan perubahan ini telah dimuat dalam Akta tertanggal 22 September 2015, Nomor 11, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0972301 tanggal 15 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27 November 2015, Nomor 95, dengan Tambahan Nomor 584/L.

Their investment of the Republic of Indonesia into the share capital of the Company based on Government Regulation No. 8 of 2014 and according to the Decree of the Minister for State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders No. S-504 / MBU / 08/2015 dated August 31, 2015 has approved the addition of capital of the Republic of Indonesia in the capital of the Company amounted to Rp2,926,167,000,000 (full Rupiah) derived from the increase in capital of the country as the Government Regulation No. 8 of 2014 and partly Capitalization reserves of the Company, so that the issued / paid-up capital of the Company to Rp6,414,412,000,000 (full Rupiah), and this change has been published in Deed dated 22 September 2015, No. 11, which made before Julius Purnawan, SH, Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-AH.01.03-0972301 dated October 15, 2015 and registered in the Company Register No.AHU-3566456.AH.01.11.Tahun 2015 dated October 15, 2015 and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia, dated 27 November 2015, No. 95, with additional No. 584/L.

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)
<p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Modal Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000.000 (Rupiah penuh) yang terbagi atas 12.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh).</p> <p>b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak sebanyak 6.414.412 saham atau seluruhnya sebesar Rp6.414.412.000.000 (Rupiah penuh) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:</p> <p>1. Sebesar Rp3.488.245.000.000 (Rupiah penuh) merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 16-01-2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10.02672 tanggal 31-01-2013;</p> <p>2. Sebesar Rp2.926.166.059.117,86 (Rupiah penuh) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari APBN TA 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/199, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014;</p> <p>3. Sebesar Rp940.882,14 (Rupiah penuh) yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiharto Adi & Rekan sebagaimana laporannya Nomor : 11/LAI-AP1/II/2015 tanggal 20-02-2015.</p> <p>Tujuan dan lapangan usaha dari Perusahaan adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas-luasnya dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut.</p>	<p><i>Based on the above, then the capital of the Company is as follows:</i></p> <p><i>a Authorized Capital of the Company is set at Rp12,000,000,000,000 (Rupiah penuh) divided into 12,000,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full Rupiah).</i></p> <p><i>b The authorized capital has been placed and subscribed by the Republic of Indonesia as much as 6,414,412 share or a total of Rp6,414,412,000,000 (full Rupiah) has been paid in full by the Republic of Indonesia (Shareholders) in the following manner:</i></p> <p><i>1 Amounting to Rp3,488,245,000,000 (full Rupiah) is the old capital paid in accordance with the Deed No. 02 dated 16-01-2013 notarized under Deed Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Which has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.10.02672 date 31-01-2013;</i></p> <p><i>2 Amounting to Rp2,926,166,059,117.86 (full Rupiah) derived from the transfer of State at the Ministry of Transportation is procured from the State Budget FY 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998, 1998/199, 2000 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, and 2011 as set out in the Indonesian Government Regulation No. 8 of 2014;</i></p> <p><i>3 Amounting to Rp 940,882.14 (full rupiah) from capitalization of reserves most of the company as recorded in the financial statements for the year 2014 have been audited by Public Accountant (KAP) Hadori Sugiharto Adi & Rekan as its No. 11 / LAI-AP1 / II / 2015 dated 20-02-2015.</i></p> <p><i>The objective and line of business of the Company is to implement the Government's economic and development programs and to earn profit for the benefit of the Company by carrying out business in airport services and other airport related business activities.</i></p>

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)
<p>Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perusahaan menjalankan usaha-usaha: Jasa Pelayanan kebandarudaraan</p> <p>1) Aeronautika Non ATS</p> <p>a. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara;</p> <p>b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos.</p> <p>2) Non Aeronautika</p> <p>a. Penyediaan lahan untuk pembangunan, lapangan dan kawasan industri serta gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;</p> <p>b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan;</p> <p>c. Penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan;</p> <p>d. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.</p> <p>Perusahaan dapat pula mendirikan/ menjalankan perusahaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut di atas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Jasa Pelayanan Penerbangan tidak dikelola oleh Angkasa Pura I (Persero) sejak tanggal 16 Januari 2013 pukul 22.00 WIB (berdasarkan Nota Kesepahaman nomor HK.201/1/10/DRJU-2013; KEP.15/OM.02.03/2013; MOU.04.07.01/00/02/2013/001; 032/DU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013).</p>	<p><i>Toward those aims the Company undertakes the following business activities:</i></p> <p><i>Airport services</i></p> <p><i>1 Non ATS Aeronautic</i></p> <p><i>a. Providing, maintaining, and developing facilities for aircraft landing, takeoff, parking, and stationing;</i></p> <p><i>b. Providing, maintaining, and developing terminal facilities for passengers, cargo, and postal services.</i></p> <p><i>2 Non Aeronautical</i></p> <p><i>a. Providing land for development, field and industrial areas as well as buildings related to the smooth of air freight;</i></p> <p><i>b. Providing, utilization and development of electronic facilities, navigation, electricity, water and waste disposal installations;</i></p> <p><i>c. Providing consultancy services, education and training related to the airport services;</i></p> <p><i>d. Other efforts to support the achievement of Company's goals.</i></p> <p><i>The Company may also establish other entities or undertake other ventures related to those business activities either individually or in partnership with other parties provided that those are permissible under the prevailing laws and regulations and the Company's articles of association.</i></p> <p><i>Based on Government Regulation No. 77 Year 2012 on Indonesian Public Company of Organizer Air Navigation Services Organization (LPPNPI), Services Aviation Services is not managed by Angkasa Pura I (Persero) since January 16, 2013 at 22:00 pm (based on a Memorandum of Understanding numbers HK.201 / 1 / 10 / DRJU-2013; KEP.15 / OM.02.03 / 2013; MOU.04.07.01 / 00/02/2013/001; 032 / DU / II / 2013 date February 12, 2013).</i></p>

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

Perseroan berkantor pusat di Jakarta dan sampai dengan 31 Desember 2016, Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebanyak 13 sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 907 tahun 2014 tentang PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai Badan Usaha Bandar Udara. Perseroan telah mendirikan 1 Strategic Business Unit serta 5 Perusahaan Anak dengan kegiatan di kota-kota besar wilayah tengah dan timur Indonesia, yaitu :

The Company is headquartered in Jakarta and up to December 31, 2016, Airports managed by PT Angkasa Pura I (Persero) as many as 13 according to Decree of the Minister of Communication Number: KP 907 in 2014 about PT. Angkasa Pura I (Persero) as Business Entity airport. The Company has established Strategic Business Unit 1 and 5 subsidiaries with activities in the major cities of central and eastern region of Indonesia, namely:

- 1) Bandara / Airport I Gusti Ngurah Rai (DPS) - Bali
- 2) Bandara / Airport Juanda Surabaya (SUB) - Surabaya
- 3) Bandara / Airport Sultan Hasanuddin (UPG) - Makassar
- 4) Bandara / Airport Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN) - Balikpapan
- 5) Bandara / Airport Frans Kaisiepo (BIK) - Biak
- 6) Bandara / Airport Sam Ratulangi - Manado
- 7) Bandara / Airport Adisucipto (JOG) - Yogyakarta
- 8) Bandara / Airport Adisoemarno (SOC) - Surakarta
- 9) Bandara / Airport Syamuddin Noor (BDJ) - Banjarmasin
- 10) Bandara / Airport Pattimura (AMQ) - Ambon
- 11) Bandara / Airport Ahmad Yani (SRG) - Semarang
- 12) Bandara / Airport Lombok (LOP) - Praya
- 13) Bandara / Airport El Tari (KOE) - Kupang
- 14) Strategic Unit Business Unit Komersial - Bali
- 15) PT Angkasa Pura Logistic
- 16) PT Angkasa Pura Property
- 17) PT Angkasa Pura Suport
- 18) PT Angkasa Pura Hotel
- 19) PT Angkasa Pura Retail

Dalam rangka pengembangan bandar udara Direksi menerbitkan keputusan untuk membentuk organisasi dan tata kerja proyek sebagai berikut :

In the development of airports, Directors issued a decree to establish the organization and project working procedures as follows:

- a. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.145/OM.01.01/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
- b. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.24/OM.01.01/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang perubahan atas keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.107/OM.01.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar

- a. *In accordance with the Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.145 / OM.01.01 / 2016 dated September 23, 2016 on the Organization and Work Procedure International Airport Development Project Yogyakarta.*
- b. *In accordance with the Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.24 / OM.01.01 / 2016 dated February 11, 2016 on amendments to the decision of the Board of Directors of PT. Angkasa Pura I (Persero) number KEP.107 / OM.01.01 / 2014 concerning Organization and Development Project Work*

1. UMUM (lanjutan) **1. GENERAL (continued)**

c. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.176/OM.01.01/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor-Banjarmasin.

Perseroan mulai beroperasi sejak dialihkannya status hukum dari Perusahaan Umum menjadi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) tahun 1993.

c. In accordance with the Decision of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) Number: KEP.176 / OM.01.01 / 2014 dated December 15, 2014 on the Organization and Operating Procedure Development Project Syamsudin Noor Airport-Banjarmasin.

The Company started its operation since the transfer of the legal status of the Public Company became Limited Company (PT) in 1993.

b. Penerbitan umum Obligasi

Pada tanggal 10 November 2016 perusahaan telah memperoleh Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran nomor S. 677/D.04/2016 tanggal 10 November 2016 dari Otoritas Jasa Keuangan untuk penawaran perdana Obligasi I Angkasa Pura 1 Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000 dan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500.000.000. Obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 23 November 2016. Sesuai Pengumuman Pencatatan Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 dan Sukuk Ijarah I Tahun 2016 PT. Angkasa Pura I (Persero) No. Peng-P-00950/BEI.PP2/11-2016 tanggal 22 November 2016.

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan perseroan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

b. Issued of Bonds

On November 10, 2016 the company has obtained the Registration Statement Effective numbers S. 677 / D.04 / 2016 dated 10 November 2016 from the Financial Services Authority (OJK) for the initial public offering of Bonds I Angkasa Pura 1 Year 2016 with a principal amount of Rp2.500.000 .000 and Sukuk Ijarah I of Rp500,000,000. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on 23 November 2016. As per the announcement of listing Bonds I Angkasa Pura I Year 2016 and Sukuk Ijarah I 2016 PT. Angkasa Pura I (Persero) No. Peng-P-00950 / BEI.PP2 / 11-2016 dated 22 November 2016.

Bonds and Sukuk Ijarah issued by the company in 2016 are as follows:

Obligasi I Angkasa Pura 1 Tahun 2016 :		Bonds I Angkasa Pura 1 Year 2016 :	
	Nominal / Nominal	Bunga per tahun / Interest per annum	Jangka waktu / Periods
Seri A	622.000.000	8,10%	5 tahun/years
Seri B	389.000.000	8,40%	7 tahun/years
Seri C	1.489.000.000	8,55%	10 tahun/years
Jumlah / Total	2.500.000.000		
Sukuk Ijarah I :		Sukuk Ijarah I :	
	Nominal / Nominal	Imbalan per tahun / Benefit per annum	Jangka waktu / periods
Seri A	268.000.000	21.708.000	5 tahun/years
Seri B	55.000.000	4.620.000	7 tahun/years
Seri C	177.000.000	15.133.500	10 tahun/years
	500.000.000	41.461.500	

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)		
<p>c. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan</p> <p>Visi Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola Bandar Udara terbaik di Asia.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan; 2. Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi; 3. Mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima yang memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan; 4. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreatifitas dan inovasi; 5. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup. <p>Tata Nilai Perusahaan Untuk merealisasikan visi dan misi, PT. Angkasa Pura I (Persero) telah menyusun dan menerapkan Nilai Perusahaan yaitu "SATU" :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sinergi / Sinergy 2) Adaptif / Adaptive 3) Terpercaya / Reliable 4) Unggul / Excellent 	<p>c. Vision, Mission, and Company Values.</p> <p>Vision <i>To become one of the top ten best airport management company in Asia.</i></p> <p>Mission</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>To increase stakeholder value;</i> 2 <i>To become government partners and driving economic growth;</i> 3 <i>To working out of airport services through excellent service that meets the standards of security, safety and convenience;</i> 4 <i>To improve competitiveness through creativity and innovation;</i> 5 <i>To make a positive contribution to the environment.</i> <p>Company Values <i>To realize the vision and mission, PT. Angkasa Pura I (Persero) has developed and is implementing Corporate Value "SATU":</i></p>		
<p>d. Manajemen Perusahaan</p> <p>Dewan Komisaris</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan sekarang <i>Dated October 29, 2015 up to now</i></p>	<p>d. The Company's Management</p> <p>Board of Commissioners</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 <i>Dated October 17, 2015 up to October 29, 2015.</i></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Tanggal 7 April 2014 sampai dengan 17 Oktober 2015 <i>Dated April 7, 2014 up to October 17, 2015</i></td> </tr> </table>	Tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 <i>Dated October 17, 2015 up to October 29, 2015.</i>	Tanggal 7 April 2014 sampai dengan 17 Oktober 2015 <i>Dated April 7, 2014 up to October 17, 2015</i>
Tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 <i>Dated October 17, 2015 up to October 29, 2015.</i>	Tanggal 7 April 2014 sampai dengan 17 Oktober 2015 <i>Dated April 7, 2014 up to October 17, 2015</i>		
<p>Komisaris Utama / Boards of Commisioners : Andrinov Chaniago Komisaris / Commisioner : Selby Nugraha Rachman Agus Santoso Boy Syahrir Qamar Anandiwati Dwi Ary Purnomo</p>	<p>Andrinov Chaniago Selby Nugraha Rachman Agus Santoso Boy Syahrir Qamar Anandiwati Dwi Ary Purnomo</p>		
	<p>Drs Suratto Siswodihardjo Boy Syahrir Qamar Dwi Ary Purnomo Drs. Hakamuddin Djamal, M.Si. Anandiwati Ir. Tunjung Inderawan M.si</p>		

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Manajemen Perusahaan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris ditetapkan :

SK-75/MBU/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I (Persero).

Sesuai SK-216/MBU/10/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I (Persero).

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tentang Pengalihan tugas Boy Syahril Qomar dari semula anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris Independen adalah Sesuai SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris.

KEP.09/DKAP.AP.I/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Pembagian Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.

KEP-304/MBU/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I (Persero).

d. The Company's Management (continued)

Composition of the Board of Commissioners determined:

SK-75/MBU/4/2015 dated April 7, 2015 on of Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners.

According to SK-216/MBU/10/2015 dated October 17, 2015 on of Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners.

SK-210 / MBU / 10/2015 dated October 29, 2015 on the Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero).

Changes in the Board of Commissioners on Transfer of duty Boy Syahril Qomar of the original members of the Board of Commissioners as Independent Commissioner is In line SK-210 / MBU / 10/2015 dated October 29, 2015 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners.

KEP.09 / DKP.AP.II / 2015 dated 2 November 2015 concerning the Distribution Functions, Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT. Angkasa Pura I.

The composition of the Board of Commissioner dated July 2, 2014 According to SK-304/MBU/10/2014 on of Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners.

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)			
d. Manajemen Perusahaan (lanjutan)	d. The Company's Management (continued)			
Dewan Direksi	Board of Directors			
Susunan Direksi Perseroan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia adalah :	<i>Composition of the Board of Directors established by the Decree of the Minister of State Enterprises of the Republic of Indonesia are as follows :</i>			
Dewan Direksi / Boards of Directors	Tanggal 17 Oktober 2016 sampai sekarang / <i>Dated October 17, 2016 up to now</i>	Tanggal 10 November 2015 sampai dengan 16 Oktober 2016 / <i>Dated November 10, 2015 up to October 16, 2016</i>	Tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 9 November 2015 / <i>Dated June 22 up to November 9, 2015</i>	Tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Juni 2015 / <i>Dated January 15, 2015 up to June 21, 2015</i>
Direktur Utama / <i>President Director</i>	Danang Sotyo Baskoro	Sulistyo Wimbo Hardjito	Sulistyo Wimbo Hardjito	Sulistyo Wimbo Hardjito
Direktur Keuangan dan TI / <i>Finance and IT Director</i>	Novrihandri	Novrihandri	Gunawan Agus Subrata	Gunawan Agus Subrata
Direktur Operasi / <i>Operation Director</i>	Wendo Asrul Rose	Wendo Asrul Rose	Yushan Sayuti	Yushan Sayuti
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis / <i>Marketing and Business Development Director</i>	M Asrori	M Asrori	Robert Daniel Waloni	Robert Daniel Waloni
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / <i>Human Capital And General Affair Director</i>	Adi Nugroho	Adi Nugroho	Saptandri Widiyanto	--
Direktur Teknik / <i>Technical Director</i>	Polana Banguningsih Pramesti	Polana Banguningsih Pramesti	Polana Banguningsih Pramesti	Polana Banguningsih Pramesti
Susunan anggota Direksi tahun 2015 adalah Sesuai SK-09/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pemberhentian Anggota Direksi. Perubahan direksi selama tahun 2015 adalah Sesuai SK-98/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan SK-121/MBU/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Perubahan direksi sesuai SK-222/MBU/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi.	<i>The composition of the Board of Directors year 2015 In accordance SK-09 / MBU / 01/2015 dated January 15, 2015 Dismissal of Directors. Changes in the board of directors for 2015 was in accordance SK-98 / MBU / 06/2015 dated June 22, 2015 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and SK-121 / MBU / 07/2015 dated July 22, 2015 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Changes in the board of directors SK-222 / MBU / 11/2015 dated 9 November 2015 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors.</i>			
Perubahan direksi terakhir adalah sesuai SK-240/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi. Perubahan terakhir dinyatakan dalam akta notaris Fauz Iwan.S.H, M.Kn. dan telah dimasukkan dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03.0091565 dan Daftar Perseroan nomor AHU-0124684.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016.	<i>Changes Last directors is appropriate SK-240 / MBU / 10/2016 dated October 19, 2016 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors. The last change notarial deed Fauz Iwan.S.H, M.Kn. and has been included in the General Law Administration System database Ministry of Justice and Human Rights and a number AHU-AH.01.03.0091565 Company Register AHU-0124684.AH.01.11 number 2016 dated October 21, 2016.</i>			

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)				
<p>d. Manajemen Perusahaan (lanjutan)</p> <p>Komite Audit</p> <p>Susunan Komite Audit per 31 Desember 2016 dan 2015 diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-4/DK.API/2015 tahun 2015, KEP-05/DK.API/2015 September 2015, KEP-08/DK.API/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Pengangkatan anggota komite audit PT Angkasa Pura I (Persero) dengan susunan sebagai berikut :</p>	<p>d. The Company's Management (continued)</p> <p>Audit Comittee</p> <p><i>The composition of the Audit Committee as of Desember 31, 2016 and December 31, 2015 was appointed by the Board of Commissioners Decision No: KEP-4/DK.AP1/2015 2015, KEP-05/DK.API/2015 dated September, 2015, KEP-08/DK.AP.I/2015 dated October 28, 2015 on the appointment of members of the audit committee of PT Angkasa Pura I (Persero) with the following composition:</i></p>				
	2016	2015			
<p>Komite Audit</p> <p>Ketua Anggota Anggota</p>	<p>Boy Syahril Qamar Agus Waluyo Syaiful</p>	<p>Dwi Ary Purnomo Agus Waluyo Syaiful</p>	<p>Audit Committee</p> <p>Chairman Member Member</p>		
<p>Susunan Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance Tahun 2016 dan 2015 diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-01/DK.API/2015 tanggal 25 Februari 2015, KEP-02/DK.API/2015 tanggal 1 April 2015, KEP-04/DK.API/2014 tanggal 8 April 2014 dan KEP13/DK.API/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengangkatan anggota komite risiko usaha dan good corporate governance PT Angkasa Pura I (Persero) dengan susunan sebagai berikut :</p>	<p><i>The composition of the Committee on Business Risks and good corporate governance for the 2016 and 2015 was appointed by the Board of Commissioners Decision No: KEP- 01/DK.API/2015 dated February 25, 2015, KEP-02/DK.API/2015 dated April 1, 2015, KEP - 04/DK.API/2014 dated April 8, 2014, KEP13/DK.API/2013 dated November 11, 2013 on the appointment of committee members and the business risk and good corporate governance PT Angkasa Pura I (Persero) with the following composition:</i></p>				
	30 Agustus sampai dengan 31 Desember 2016 <i>August 30 up to December 31, 2016</i>	1 Mei sampai dengan 29 Agustus 2016 <i>May 1 up to August 29, 2016</i>	1 Maret sampai dengan 30 April 2016 <i>March 1 up to April 30, 2016</i>	1 Januari sampai dengan 29 Februari 2016 <i>January 1 up to February 29, 2016</i>	Tahun 2015 <i>Year 2015</i>
<p>Ketua / <i>Chairman</i> Anggota / <i>Member</i> Anggota / <i>Member</i></p>	<p>Andrinof Chaniago Ganesha Dian Farisi Wawan Zulmawan</p>	<p>Anandiwati - -</p>	<p>Anandiwati - Ambu Fuady</p>	<p>Anandiwati Joko Subagyo Ambu Fuady</p>	<p>Anandiwati Joko Subagyo Ishak Subekti</p>
<p>Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi berada pada Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance (GCG).</p>	<p><i>The function of the Nomination and Remuneration Committee are in the Business Risk Committee and Good Corporate Governance .</i></p>				

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Manajemen Perusahaan (lanjutan)

Susunan Komisaris Independen diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-210/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I dengan susunan sebagai berikut :

d. The Company's Management (continued)

The composition of the Independent Commissioner appointed by the Deed of the Minister for State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders No. SK-210 / MBU / 10/2015 on the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT. Angkasa Pura I with the following composition:

Tahun 2016 / Year 2016

1. Andrinof Chaniago
2. Boy Syaril Qomar

e. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia PT Angkasa Pura I (Persero) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sejumlah 3.025 dan 3.135 orang (tidak diaudit), di luar Direksi dan Komisaris dengan perincian sebagai berikut:

e. Human resource

The number of the Company's employees as of December 31, 2016 and 2015 are 3.042 and 3.135, person respectively (unaudited), not included the directors and commissioners, in the following positions:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pegawai Perusahaan	2.654	2.751	Permanent Employees
PNS Diperbantukan	66	74	Second civil servants
PNS Ditugaskan	-	-	Assigned Civil Personnel
ABRI Ditugaskan	9	10	Assigned Military Personnel
Honorer	12	8	Part timers
Calon pegawai	284	292	Candidate
	<u>3.025</u>	<u>3.135</u>	

f. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015. Perusahaan mengkonsolidasi entitas anak dengan kepemilikan langsung dan dikendalikan dengan kepemilikan mayoritas berikut ini :

f. Subsidiaries

As of December 31, 2016 and December 31, 2015 the Company consolidates subsidiaries under direct ownership and controlled by the majority ownership as follows:

Nama entitas anak / Names of subsidiaries	Kegiatan usaha / Principal activity	Domisili / Domicile	Pendirian dan beroperasi komersial/ Year of establishment and commercial operation	Kepemilikan / Percentages of Ownership	Jumlah Aset / Total Assets	
					2016	2015
PT Angkasa Pura Logistik	Transportasi	Jakarta	2012	98,00%	132.454.195	97.673.856
PT Angkasa Pura Hotel	Hotel	Jakarta	2012	99,97%	577.871.304	394.438.117
PT Angkasa Pura Properti	Properti	Jakarta	2012	99,96%	197.072.145	209.426.002
PT Angkasa Pura Suport	Jasa	Jakarta	2012	99,61%	586.597.128	379.113.324
PT Angkasa Pura Retail	Trading	Jakarta	2014	97,50%	57.137.747	57.962.947

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Angkasa Pura Logistik

Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Logistik adalah jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) dengan modal dasar sebesar Rp80.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 80.000 lembar saham dengan nilai nominal per sahamnya sebesar Rp 1 juta dan pada awalnya modal di tempatkan dan disetor sebesar Rp21.000.000.000 (Rupiah penuh) kemudian sesuai RUPS tanggal 5 Oktober 2016 dilakukan penambahan modal disetor menjadi Rp 25 miyar (rupiah penuh). Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini menjadi sebanyak 24.000 lembar saham, senilai Rp24.000.000.000 (Rupiah penuh) atau 98%.

Pendirian Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor 194/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan didasarkan pada akte Perdirian perusahaan nomor 01 oleh Notaris Nanda Fauz wan SH, M.Kn tanggal 6 Januari 2012. Akta tersebut telah disahkan melalui keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-03158.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10269 ("Akta Pendirian PT APL").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 21 Mei 2014, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-03009.40.20.2014 tanggal 21 Mei 2014("Akta No. 18/2014").

f. Subsidiaries (continued)

PT Angkasa Pura Logistik

Field of business carried on by PT Angkasa Pura Logistics is a transportation services (freight forwarding) with an initial capital of Rp80,000,000,000 (full Rupiah), consists of 80,000 shares with a nominal value per of Rp 1 million and initially placed and paid-up capital of Rp21,000,000,000 (full Rupiah) then according Annual General Meeting on October 5, 2016, the addition of paid up capital to Rp25,000,000,000 (full Rupiah). Ownership of the shares of PT Angkasa Pura I (Persero) in the company to be as much as 24,000 shares, worth Rp24,000,000,000 (full Rupiah) or 98%.

Establishment of the Company has obtained the approval from the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) No. 194/DK.API/2011 dated December 15, 2011 and also based on notarial deed No. 01 by Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn dated January 6, 2012. The deed was approved by Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No. AHU-03158.AH.01.01. Year 2012 dated January 18, 2012 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 32 April 19, 2013, the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 10 269 ("Deed of Establishment of PT APL").

The latest amendment was changed by Deed of Shareholders No. 18 dated May 21, 2014, made before Fauz Nanda Iwan, SH, M.Kn., Notary in South Jakarta, which was approved by the Ministry of Justice and Human Rights by Decree No. AHU-03009.40.20.2014 dated May 21, 2014, and was registered in the Company Register No. AHU-03009.40.20.2014 dated May 21, 2014 ("Act No. 18/2014").

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Angkasa Pura Properti

PT Angkasa Pura Properti bergerak di bidang usaha pembangunan, perdagangan dan jasa khususnya real estate, pengembang, jasa keagenan, distribusi dan bidang konstruksi serta bidang lainnya. PT. Angkasa Pura Properti didirikan berdasarkan akte nomor 02 tanggal 6 Januari 2012 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn. Entitas anak ini didirikan atas persetujuan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor 193/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011. Pendirian perusahaan ini telah disahkan melalui keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-03704.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012. Sesuai akta tersebut diatas modal dasar perusahaan Rp42.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 42.000 lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) dan telah disetor penuh dengan pemilikan saham PT AP1 pada perusahaan ini sebanyak 41.940 saham atau 99,86%

Sesuai dengan Akta No.16 tanggal 29 Januari 2014 dari Notaris Nita Nathalia, SH,M.Kn di Jakarta-Selatan dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum Peersereoran dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK. NO. AHU-09339.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014, Modal dasar perusahaan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp168.000.000.

PT Angkasa Pura Properti

Berdasarkan persetujuan Menteri BUMN No. S-642/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan berita acara serah terima pembayaran pemenuhan modal disetor PT Angkasa Pura Properti No.BA.011/APP-MDL/2015 tanggal 26 Agustus 2015 Modal Dasar Perseroan telah disetor penuh sebesar Rp 168.000.000 dan kemudian telah dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham nomor RUPS APP.04/KU.11/2016 dan No. 026/PUSKOP-UM/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini menjadi 167.940 lembar saham atau 99,96%. Aspek legal atas perubahan ini masih dalam proses.

f. Subsidiaries (continued)

PT Angkasa Pura Properti

PT Angkasa Pura Properties is engaged in the construction, trade and services, especially real estate, developers, agency services, distribution and construction field and other fields. PT. Angkasa Pura property is established by deed number 02 dated January 6, 2012 by Notary Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn. These subsidiaries are established upon approval of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) number 193 / DK.API / 2011 dated December 15, 2011. Establishment of the company was approved by decision of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number 03704.AH.01.01.Tahun AHU-2012 dated January 20, 2012.The authorized capital of Rp42,000,000,000 (full Rupiah) divided into 42,000 shares with a nominal share value of Rp1,000,000 (full Rupiahs) and has been fully paid . Shares of PT Angkasa Pura I (Persero) in this company as much as 41,940 shares or 99,86%.

In accordance with the Deed of 16 dated January 29, 2014 of Notary Nita Nathalia, SH, M.Kn in South Jakarta and was approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia with SK. NO. AHU-09339.AH.01.02 2014 dated March 4, 2014, authorized capital of the company increased to Rp168,000,000.

PT Angkasa Pura Properti

Based on the approval of Minister of State S-642 / MBU / 10/2014 dated October 16, 2014 and on the acceptance of the payment of the fulfillment of the paid up capital of PT Angkasa Pura Property No.BA.011 / APP-MDL / 2015 dated August 26, 2015 that the capital of the Company has been fully paid amounting to Rp168,000,000 and then was declared in the General Shareholders Meeting number: RUPS APP.04 / KU.11 / 2016 and No. 026 / Puskop-UM / VIII / 2016 dated August 10, 2016. Shares of PT Angkasa Pura I (Persero) in the company to be 167,940 shares or 99.96%. Legal aspects of this change is still in process.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Angkasa Pura Hotel

PT Angkasa Pura Hotel bergerak di bidang usaha penyediaan akomodasi pariwisata. PT. Angkasa Pura Hotel didirikan berdasarkan akte nomor 03 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn tanggal 6 Januari 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10796) dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal September 2015.

Entitas anak ini didirikan atas persetujuan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor 192/DK.API/2011 tanggal 15 Desember 2011. Modal dasar Rp120.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 120.000 lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh) dan telah disetor penuh Rp119.900.000.000 (rupiah penuh). Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini sebanyak 119.865 saham, senilai Rp119.800.000.000 (Rupiah penuh) atau 99,97%. Pendirian perusahaan ini telah disahkan melalui keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-03688.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012.

PT Angkasa Pura Suport

Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura Suport adalah bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, dan perdagangan dengan modal dasar sebesar Rp125.000.000.000 (Rupiah penuh) terbagi dalam 125.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembarnya sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh) dan modal di tempatkan dan disetor sebesar Rp125.000.000.000 (Rupiah penuh). Kepemilikan saham PT Angkasa Pura I (Persero) pada perusahaan ini sebanyak 123.125 saham, senilai Rp123.100.000.000 (Rupiah penuh) atau 99,61%. Pendirian Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor 17/DK.API/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan didasarkan pada akte Perdirian perusahaan nomor 03 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn tanggal 9 Pebruari 2012 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor: 11 tanggal April 2014. Akta tersebut telah disahkan melalui keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-08735.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012.

f. Subsidiaries (continued)

PT Angkasa Pura Hotel

PT Angkasa Pura Hotel is engaged in the provision of tourism accommodation. PT. Angkasa Pura Hotel was established by deed of Notary Public number 03 by Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn dated January 6, 2012 (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2013 Number 32, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 10796) and amended several times, most recently by Deed No. 04 dated September 2015.

The Subsidiary was established upon approval of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) number 192 / DK.API / 2011 dated December 15, 2011. the authorized capital of Rp120,000,000,000 (full Rupiah) divided into 120,000 shares with a nominal value of shares Rp1,000,000 (full Rupiah) and has been fully paid Rp119,900,000,000 (full Rupiah). Ownership of the shares of PT Angkasa Pura I (Persero) in this company as much as 119,865 shares, worth Rp119,800,000,000 (full Rupiah) or 99.97%. Establishment of the company was approved by decision of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number 03688.AH.01.01.Tahun AHU-2012 dated January 20, 2012.

PT Angkasa Pura Suport

The business sectors that are run by PT Angkasa Pura Suport is in services, construction, land transportation, workshop, printing, and trade with an initial capital of Rp125,000,000,000 (full Rupiahs) divided into 125,000 shares with a nominal value per lembarnya Rp1,000,000 (full Rupiahs) and capital in place and paid Rp125,000,000,000 (full Rupiahs). Ownership of the shares of PT Angkasa Pura I (Persero) in this company as much as 123,125 shares, worth Rp123,100,000,000 (full Rupiahs) or 99.61%. Establishment of the Company has received approval from the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura I (Persero) number 17 / DK.API / 2012 dated January 31, 2012 and based on the company's certificate number 03 Perdirian Notary Fauz Nanda Iwan SH, M.Kn dated February 9, 2012 amended several times, most recently by Deed No. 11 dated April 2014. these amendments have been approved by decision of the minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number 08735.AH.01.01.Tahun AHU-2012 dated January 20, 2012.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Angkasa Pura Retail

PT. Angkasa Pura Retail didirikan berdasarkan akta notaris No. 11 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn di Jakarta Selatan, tertanggal 23 September 2014 dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26401.40.10.2014 Tahun 2014 tertanggal 24 September 2014. Perusahaan beralamat dan berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 16 Kaveling No.2 Kemayoran Jakarta Pusat. Modal Dasar Perusahaan berdasarkan akta pendirian adalah sebesar Rp200.000.000.000 (Rupiah penuh) yang terbagi atas 200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,-(Rupiah penuh). Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor yaitu sebesar Rp50.000.000.000 (Rupiah penuh) yang terbagi atas 50.000 saham masing-masing oleh pendiri yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp48.750.000.000 (Rupiah penuh) sebanyak 48.750 lembar saham atau 97,50%.

PT Gapura Angkasa .

Penyertaan pada PT Gapura Angkasa yang bergerak dalam bidang jasa Ground Handling dilakukan sesuai dengan persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor S-546/MK.016/1997 tanggal 5 November 1997 dengan nilai perolehan Rp67.200.000.000 (Rupiah penuh). Modal dasar PT Gapura Angkasa adalah Rp860.160.000.000 (Rupiah penuh) terbagi atas 8.601.600 saham nominal Rp100.000 (Rupiah penuh) per saham. Dan modal dasar tersebut, sebanyak 2.150.400 saham atau senilai Rp 215.040.000.000 (Rupiah penuh) merupakan modal ditempatkan dan disetor. Dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor oleh 3 (tiga) Pemegang saham yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) masing-masing sebanyak 672.000 saham (31,25%) dan PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) sebanyak 806.400 saham (37,50%).

f. Subsidiaries (continued)

PT Angkasa Pura Retail

PT. Angkasa Pura Retail was established based on notarial deed No. 11 Notary Fauz Nanda Iwan, S.H, M.Kn in South Jakarta, dated September 23, 2014 and was approved by the legal entity of the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-26401.40.10.2014 dated September 24, 2014. The company is located and based in Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 16, Plot 2 Kemayoran. Capital of the Company is based on the deed is Rp200,000,000.000 (full Rupiah) divided into 200,000 shares, each share with a nominal value of Rp 1,000,000 (full Rupiah) , Of the authorized capital has been subscribed and paid in the amount Rp50,000,000,000 (full Rupiah) shares each by the founder, PT Angkasa Pura I (Persero) amounting to Rp48,750,000,000 (full Rupiah) with as many as 48,750 shares or 97,50%.

PT Gapura Angkasa

The investment in PT Gapura Angkasa which engage business in ground handling was made based on the approval from Minister of Finance in his letter No. S-546 MK.016/1997 dated November 5, 1997 in the amount of Rp67,200,000,000 (full Rupiah). The authorized capital of PT Gapura Angkasa is Rp860,160,000,000 (full Rupiah) consists of 8.601.600 shares par value of Rp 100.000 (full Rupiah) per share. Of the authorized capital, in the number of 2.150.400 shares equal to Rp215,040,000,000 (full Rupiah) were subscribed and paid in. The other shareholders are PT Angkasa Pura II (Persero) which subscribed 672.000 shares (31,25%) and PT Garuda Indonesia which subscribed 806.400 shares (37,50%).

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

Entitas Asosiasi

Pada tahun 2014 perseroan telah menjual sebagian saham miliknya kepada pemegang saham lainnya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 456.960 lembar saham atau 22,25% dengan harga jual sebesar Rp105.000.000 yang dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Pembelian dan Penjualan Saham PT Gapura Angkasa nomor SP.140.KU.20/2014/PD Nomor DS/PERJ/MOU/DQ-3285/2014 tanggal 30 Juni 2014. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GA No. 51 tanggal 29 Desember 2014, dibuat di hadapan Hendra Wismal, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU - 49455.40.22.2014.Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dengan demikian sisa penyertaan perseroan di PT Gapura Angkasa adalah sebanyak 215.040 lembar saham atau sebesar 10%. Investasi dicatat pada pembukuan perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas karena adanya pengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan adanya keterwakilan dalam Dewan Komisaris di investee sesuai PSAK 15 paragraph 6 dan 16.

PT Jasa Marga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Tol ("PT JMBT") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., Notaris di Depok, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011. Investasi dalam saham pada PT Jasa Marga Bali Tol (PT JMBT) merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena di daerah Bali oleh beberapa perusahaan BUMN. Investasi ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN dalam surat S - 549/MBU/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Sesuai akta pernyataan keputusan rapat PT JMBT nomor : 01. tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011.

Associate entity

In 2014 the company has sold some of his shares to the other shareholders are PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as many as 456 960 shares or 22.25% with a selling price of Rp105,000,000 which is expressed in the Memorandum of Purchase and Sale of Shares of PT Gapura Angkasa number SP.140.KU.20 / 2014 / PD; Number DS / onsen / MOU / DQ-3285/2014 dated June 30, 2014. Based on the Deed PT GA No. 51 dated December 29, 2014, made in the presence of Hendra Wismal, SH, Notary in Jakarta, the data changes that the company has received and recorded in the System Administration Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in its letter No. AHU - 49455.40.22.2014.Tahun 2014 dated December 29, 2014,

Thus the balance of the investment in PT Angkasa Gapura amounted to 215,040 shares or 10%. Investments are recorded using equity method due to significant influence with their representation in the Board of Commissioners in the investee accordance with PSAK 15 paragraphs 6 and 16.

PT Jasa Marga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Tol ("PT JMBT") established under the Deed of Establishment No. 1 dated December 11, 2013 were made in the presence of Siti Suprimulyanti Endah daughter Paulina, SH, notary in Depok, the deed has obtained approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 dated 25 November 2011 Investments in shares in PT Jasa Marga Bali Toll is an investment consortium highway construction Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena in Bali by several state-owned companies. This investment has been approved by the Minister of State Enterprises in the letter S - 549 / MBU / 2011 dated October 25, 2011. In accordance the deed of statementthe decision meeting PT. Jasa Marga Bali Toll number: 01. date December 11, 2013 before a Notary Paulina Putri Siti Suprimulyanti Endah, The deed has obtained approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 dated 25 November 2011.

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)
<p>Entitas Asosiasi (lanjutan)</p> <p>PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki 59.635 lembar saham atau sebesar Rp59.635.000 dan tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp14.908.400 dengan jumlah kepemilikan sebesar 8%.</p> <p>Investasi saham pada PT JMBT tersebut dicatat pada pembukuan perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas karena pengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan adanya keterwakilan dalam Dewan Komisaris di investee sesuai PSAK 15 paragraph 6 dan 16.</p>	<p>Associate entity (continued)</p> <p><i>PT. Angkasa Pura I (Persero) has 59,635 shares or Rp59,635,000 and additional paid-in capital amounting to Rp14,908,400 with ownership of 8%.</i></p> <p><i>Investments in shares in PT JMBT the company recorded by the equity method due to significant influence is indicated by their representation in the Board of Commissioners in the investee accordance with PSAK 15 paragraphs 6 and 16.</i></p>
<p>2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN</p> <p>Pengusahaan bandara di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perusahaan pada khususnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan Perusahaan adalah ketentuan mengenai tarif jasa kebandarudaraan khususnya jasa aeronautika dan non-aeronautika tertentu adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah No 193 Tahun 2015 Tentang Jenis Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.</p> <p>c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) dalam pemberian layanan kepada pengguna jasa bandar udara.</p> <p>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2014 Tentang tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan.</p> <p>e. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara.</p> <p>f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.</p>	<p>2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS</p> <p><i>The airports throughout the country in general and the airports managed by the Company in particular are subject to regulations promulgated by the Minister of Transportation. The following are significant regulations specifying airport service tariffs, particularly those related to certain aeronautical and non-aeronautical services:</i></p> <p><i>a Government Regulation No 193 2015 About Type Concessions and other Forms of Cooperation between the Government and Business Entities Airport Services.</i></p> <p><i>b Government Regulation No. 11 Year 2015 About the Type and Tariff for Non-Tax Revenues Applicable within the Ministry of Transportation</i></p> <p><i>c Minister of Transportation Decree No. KM.129 2015 Guideline of the Service Level Agreement in the provision of services to users of airport services</i></p> <p><i>d Regulation of the Minister of Transportation Number: PM 36 2014 On governance Ways and Procedures Tariff Imposition of Airport Affairs.</i></p> <p><i>e Decision of the Director General of Civil Aviation Directive No. SKEP/47/III/2007 about Enterprise Implementation Support Activities Airport.</i></p> <p><i>f. The Minister of Transportation's Decree No. KM.48 of 2002 on Administration of Public Airports.</i></p> <p><i>g Government Regulation No. 70 of 2001 on Airports.</i></p>

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN 2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS (Continued)
(lanjutan)

- h. SK Dirjen Hubud Nomor SKEP.284/X/1999, tentang Standart Kinerja Operasional Bandara terkait dengan Tingkat Pelayanan (Level of Service).
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.12 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Passengger Service Charge (PSC) disatukan dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara.
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 178 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Surat Keputusan Menteri Perhubungan di atas, Direksi Perusahaan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kebandarudaraan yang berlaku untuk bandara yang diusahakan.

Surat Keputusan Direksi tentang tarif dan perubahan tarif yang berlaku tahun 2016 dan 2015 tertuang dalam Keputusan Direksi dengan nomor :

- 1) Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)
- a. KEP.80/KU.06.02/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Lampiran sebagaimana dalam pasal1 Keputusan Direksi PT Angkasa Pura 1 (Persero) Nomor KEP.33/KU.07/2010 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor Cabang Bandara Sam Ratulangi - Manado.
- b. KEP.14/KB.07/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Ngurah Rai - Denpasar.
- c. KEP.20/KB.06.02/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sepinggan - Balikpapan.

- h Decrees No. Hubud SKEP.284/X/1999, on Airport Operational Performance Standards related to Service Level (Level of Service).
- i. The Law No.15 year 1992 on Aviation; as was amended by the Law No.1 of 2009 on Aviation.
- j. The Regulation of Director General of Civil Aviation No. KP.12 2015 On Passengger Payment Service Charge (PSC) together with tickets Passengers.
- k. Regulation of the Minister of Transportation Number: PM. 178 2015 About the Service Standard User Services airport.

Based on Law and Government Regulation and Decree of the Minister of Communications of the above, the Board of Directors defines and establishes the applicable rates of airport services to the airport cultivated.

Board of Directors Decree on tariffs and tariff changes in 2016 and 2015 contained in the Decision of the Board with the numbers:

- 1) Cargo Services and Aircraft Postal Services (PJKP2U)
- a KEP.80 / KU.06.02 / 2012 dated June 7, 2012 on the Amendment to Article 1 Attachment as the Decision of the Board of PT Angkasa Pura 1 (Persero) No. KEP.33 / KU.07 / 2010 About Rates OF cARGO Services Aircraft Postal Service (PJKP2U) Branch Office Sam Ratulangi Airport - Manado
- b KEP.14/KB.07/2011 dated February 16, 2011 on Rates Postal Services and Cargo Services Aircraft (PJKP2U) Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) Airport Ngurah Rai - Denpasar
- c KEP.20 / KB.06.02 / 2011 dated February 16, 2011 on Tariffs and Postal Services Cargo Aircraft (PJKP2U) at branch offices PT.Angkasa Pura I (Persero) Sepinggan Airport - Balikpapan.

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN 2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS (Continued)
(lanjutan)

- d. KEP.06/KB.03.03/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Domestik di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adi Sutjipto- Yogyakarta.
- e. KEP.12/KU.07/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Domestik di Bandar Udara Patimura - Ambon.
- f. KEP.181/KB.03/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Domestik Bandar Udara International Praya - Lombok.
- g. KEP.83/KU.06.02/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) domestik di kantor PT.Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adi Soemarmo- Surakarta.
- h. KEP.84/KU.06/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) domestik di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara EL Tari - Kupang.
- i. KEP.179/KB.09/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Tarif pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) SBU Terminal Kargo Sultan Hasanudin Makassar.
- j. KEP.157/KB.09/2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Domestik di Bandar Udara Frans Kasiepo Biak.
- k. KEP.121/KB.09/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Domestik di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.
- l. KEP.140/KB.09/2015 (PJKP2U) tanggal 26 Oktober 2015 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Domestik di Bandar Udara Juanda Surabaya.
- m. KEP.24/KB.09/2015 (PJKP2U) tanggal 24 Februari 2015 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Domestik di Bandar Udara Syamsuddin Noor - Banjarmasin.
- d. KEP.06/KB.03.03/2013 dated January 21, 2013 on Rates Postal Services and Cargo Services Aircraft (PJKP2U) Domestic Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) Airport Adi Sutjipto Yogyakarta.*
- e. KEP.12/KU.07/2012 dated January 27, 2012 on Rates Postal Services and Cargo Services Aircraft (PJKP2U) Airport Pattimura - Ambon.*
- f. KEP.181/KB.03/2012 dated December 27, 2012 on Rates Postal Services and Cargo Services Aircraft (PJKP2U) Domestic International Airport Praya - Lombok.*
- g. KEP.83/KU.06.02/2013 dated August 21, 2013 on Rates Postal Services and Cargo Services Aircraft (PJKP2U) in domestic offices PT.Angkasa Pura I (Persero) Airport Adi Soemarmo Surakarta.*
- h. KEP.84/KU.06/2013 dated August 21, 2013 on About Rates Services and Postal Services Cargo Aircraft (PJKP2U) Branch Office PT.Angkasa domestic Pura I (Persero) EL Tari Airport - Kupang.*
- i. KEP.179/KB.09/2014 dated December 23, 2014. regarding tariffs of cargo services and aircraft postal services (PJKP2U) at SBU Cargo Terminal Sultan Hasanuddin - Makassar.*
- j. KEP.157/KB.09/2014 dated Nopember 20, 2014. regarding domestic tariffs of cargo services and aircraft postal services (PJKP2U) at Frans Kasiepo Airport - Biak.*
- k. KEP.121/KB.09/2015 dated September 7, 2015 regarding domestic tariffs of cargo services and aircraft postal services (PJKP2U) at Ahmad Yani Airport Semarang.*
- l. KEP.140/KB.09/2015 dated October 26, 2015 regarding domestic tariffs of cargo services and aircraft postal services (PJKP2U) at Juanda Airport Surabaya.*
- m. KEP.24/KB.09/2015 dated February 24, 2015 regarding domestic tariffs of cargo services and aircraft postal services (PJKP2U) at Syamsuddin Noor Airport - Banjarmasin.*

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN 2. (lanjutan)	AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS (Continued)
<p>2) Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)</p> <p>a. KEP.165/KB.09/2015 tanggal 16 Desember 2015; tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor KEP.110/KB.09/2015 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) khusus di General Aviation Terminal Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali ;</p> <p>b. KEP.166/KB.09/2015 tanggal 16 Desember 2015; tentang Perubahan Atas Kep. Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) nomor : KEP.111/KB.09/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri pada Bandar Udara (Bandara) yang diusahakan PT. Angkasa Pura I (Persero).</p> <p>c. KEP.144/KB.09/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Luar Negeri pada Bandara Udara yang Diusahakan PT. Angkasa Pura I (Persero).</p>	<p>2. Landing, Placement and Storage Aircraft Services (PJP4U)</p> <p>a. KEP.165 / KB.09 / 2015 dated December 16, 2015; on Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT. Angkasa Pura I (Persero) number KEP.110 / KB.09 / 2015 About Tariff Landing Services, Placement and Storage Aircraft (PJP4U) specialized in General Aviation Terminal Branch Office PT. Angkasa Pura I (Persero) International Airport I Gusti Ngurah Rai - Bali;</p> <p>b. KEP.166 / KB.09 / 2015 dated December 16, 2015; on Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT. Angkasa Pura I (Persero) number: KEP.111 / KB.09 / 2015 dated August 14, 2015 on Rates Services Landing, Placement and Storage Aircraft (PJP4U) for Domestic Flight at the airport (Airport) endeavored PT. Angkasa Pura I (Persero).</p> <p>c. KEP.144 / KB.09 / 2015 dated 3 November 2015 regarding Tariff Landing Services, Placement and Storage Aircraft (PJP4U) to Overseas Flights at the Airport which endeavored PT. Angkasa Pura I (Persero).</p>
<p>3) Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)</p> <p>a. KEP.124/KB.06.02/2015 tanggal 15 September 2015; Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang disatukan dengan tiket pesawat udara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero).</p>	<p>3) Flight Passengers Services (PJP2U)</p> <p>a. KEP.124 / KB.06.02 / 2015 dated 15 September 2015; On the Guidelines for Acceptance of Payment Services Passengers (PJP2U) which together with aircraft ticket which is managed by PT. Angkasa Pur I (Persero).</p>

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN 2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS (Continued)
 (lanjutan)

b. Domestik

Pada tahun 2016 beberapa bandara dilakukan perubahan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang dinyatakan dalam beberapa keputusan Direksi sebagai berikut :

Nama bandara / Airport	Nomor / Number	Tanggal /date
Bandara Frans Kaseipo-Biak	KEP.195/KB.02.04/2016	29 Desember / December 29 , 2016
Sultan Hasanuddin Makassar	KEP.171/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Pattimura - Ambon	KEP.172/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Sam Ratulangi - Manado	KEP.173/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Praya - Lombok	KEP.174/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Juanda - Surabaya	KEP.175/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Adi Soemarno - Solo	KEP.176/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Adi Sutjipto - Yogyakarta	KEP.178/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
El Tari - Kupang	KEP.179/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Ahmad Yani - Semarang	KEP.180/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Syamsudin Noor - Banjarmasin	KEP.181/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Sultan Aji Muhammad Sepinggan - Balikpapan	KEP.147/KB.02.04/2016	30 September / September 30 , 2016

Tarif sebelumnya yang berlaku adalah keputusan Direksi nomor KEP.90/KU.06.02/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan Dalam Negeri pada Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Adi Sutjipto Jogjakarta, Adi Sumarmo Solo, Ahmad Yani Semarang, Pattimura Ambon, Syamsudin Noor, Frans Kaisiepo Biak, dan El Tari Kupang

KEP.29/KB.02.04/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan Dalam Negeri pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali - Juanda Surabaya; Sepinggan Balikpapan; Sultan Hasanudin Makasar dan Lombok Praya.

b. Domestic

In 2016 some airports do change in tariff Passenger Aircraft Services (PJP2U) stated in several decisions the Board of Directors as follows:

Previous rate applicable is the decision of the Board of Directors numbers KEP.90/KU.06.02/2010 dated November 9, 2010 regarding tariff of flight passengers services (PJP2U) for domestic flight at International Airport Sam Ratulangi Manado, Adi Sutjipto Jogjakarta, Adi Sumarmo Solo, Ahmad Yani Semarang, Pattimura Ambon, Syamsudin Noor, Frans Kaisiepo Biak, dan El Tari Kupang

KEP.29/KB.02.04/2014 dated March 26, 2014 regarding tariff of flight passengers services (PJP2U) for domestic flight at International Airport I Gusti Ngurah Rai Bali; Juanda Surabaya; Sepinggan Balikpapan; Sultan Hasanudin Makasar and Lombok Praya.

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN 2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS (Continued)
 (lanjutan)

c. Internasional

Perubahan tarif Pelayanan Jasa Penumpang
 Pesawat Udara (PJP2U) internasional :

Nama bandara / Airport	Nomor / Number	Tanggal /date
Bandara Frans Kaseipo-Biak	KEP.195/KB.02.04/2016	29 Desember / December 29, 2016
Sultan Hasanuddin Makassar	KEP.171/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Pattimura - Ambon	KEP.172/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Sam Ratulangi - Manado	KEP.173/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Praya - Lombok	KEP.174/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Juanda - Surabaya	KEP.175/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Adi Soemarno - Solo	KEP.176/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Adi Sutjipto - Yogyakarta	KEP.178/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
El Tari - Kupang	KEP.179/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Ahmad Yani - Semarang	KEP.180/KB.02.04/2016	29 Nopember / November 29, 2016
Sultan Aji Muhammad Sepinggan - Balikpapan	KEP.147/KB.02.04/2016	30 September / September 30, 2016

c. International

Changes tariffs International Passengers Services
 (PJP2U) :

KEP.83/KU.10.2.2/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan Luar Negeri pada Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Adi Sutjipto Jogjakarta, Adi Sumarmo Solo, Ahmad Yani Semarang, Pattimura Ambon, Syamsudin Noor, Frans Kaisiepo Biak, dan El Tari Kupang.

KEP.28/KB.02.04/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan Luar Negeri pada Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali - Juanda Surabaya; Sepinggan Balikpapan; Sultan Hasanudin Makasar dan Lombok Praya.

KEP.144/KB.09/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan Luar Negeri Haji pada Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Surakarta, Syamsudin Noor Banjarmasin, Sultan Hasanuddin Makassar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Lombok Praya.

KEP.83/KU.10.2.2/2007 dated October 26, 2007 regarding tariff of flight passengers services (PJP2U) for international flight at International Airport Sam Ratulangi Manado, Adi Sutjipto Jogjakarta, Adi Sumarmo Solo, Ahmad Yani Semarang, Pattimura Ambon, Syamsudin Noor, Frans Kaisiepo Biak, dan El Tari Kupang

KEP.28/KB.02.04/2014 dated March 26, 2014 regarding tariff of flight passengers services (PJP2U) for international flight at International Airport I Gusti Ngurah Rai Bali; Juanda Surabaya; Sepinggan Balikpapan; Sultan Hasanudin Makasar and Lombok Praya.

KEP.144 / KB.09 / 2008 dated December 30, 2008 on Tariff Passenger Aircraft Services (PJP2U) for the transport of Foreign Affairs Haji at Juanda International Airport in Surabaya, Adi Soemarmo Surakarta, Syamsudin Noor Banjarmasin, Sultan Hasanuddin Makassar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, and Lombok Praya.

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
(lanjutan)

2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS
(Continued)

- 4) Aviobridge
- a. KEP.913/KU.20.1.8/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge) untuk penerbangan luar negeri pada Bandar Udara yang diusahakan PT. Angkasa Pura I (Persero) sampai dengan 2015 peraturan ini masih diberlakukan.
- b. KEP.180/KB.03/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge) untuk penerbangan dalam negeri pada Bandar Udara yang diusahakan PT. Angkasa Pura I (Persero) sampai dengan 2015 peraturan ini masih diberlakukan.
- 5) Counter
- a. KEP.912/KU.20.2.11/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check in Counter) luar negeri untuk Penerbangan Dalam Negeri pada Bandara yang Diusahakan PT. Angkasa Pura I (Persero).
- b. KEP.179/KB.03/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check in Counter) dalam negeri untuk Penerbangan Dalam Negeri pada Bandara yang Diusahakan PT. Angkasa Pura I (Persero).
- 6) Baggage Handling System (BHS) dan Holding Baggage Screening (HBS)
- KEP.137/KB.09/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Tarif Pemakaian Jasa Baggage Handling System (BHS) dan Holding Baggage Screening (HBS) di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali dan Bandar Udara Sepinggan -Balikpapan
- 7) Lainnya
- a. KEP.155.I/KB.03.05/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Tarif Masuk Pelataran Terminal Atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta.
- b. KEP.126/KU.07.06/2013 tanggal 15 Nopember 2013 Tentang Perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.63/KU.20.06/2008 tanggal 12 Juni 2008 Tentang Tarif / Biaya Masuk Pelataran Terminal atau Parkir untuk Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara EL Tari - Kupang.
- 4 Aviobridge
- a. *KEP.913/KU.20.8/1998 dated August 14, 1998 on Tariffs Service Usage Garbarata Services (Aviobridge) for domestic flights at the airport were cultivated PT. Angkasa Pura I (Persero). In 2015 those regulatian was enforced.*
- b. *KEP.180/KB.03/2012 dated December 27, 2012 on Tariffs Service Usage Garbarata Services (Aviobridge) for domestic flights at the airport were cultivated PT. Angkasa Pura I (Persero). In 2015 those regulatian was enforced.*
- 5) Counter
- a. *KEP.912 / KU.20.2.11 / 1998 dated August 14, 1998 on Rates Services Counter Usage Reporting (Check-in counters) abroad for Domestic Flight at the airport were Cultivated PT. Angkasa Pura I (Persero).*
- b. *KEP.179 / KB.03 / 2012 dated December 27, 2012 on Rates Services Counter Usage Reporting (Check-in counters) in Domestic Flight at the airport were Cultivated PT. Angkasa Pura I (Persero).*
- 6) *Baggage Handling System (BHS) and Holding Baggage Screening (HBS)*
- KEP.137/KB.09/2013 dated December 27, 2013 On Usage Rates Services Baggage Handling System (BHS) and Holding Baggage Screening (HBS) in the Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) I Gusti Ngurah Rai - Bali Airport and Sepinggan-Balikpapan Airport.*
- 7) Others
- a. *KEP.155.I / KB.03.05 / 2016 dated October 17, 2016 About Rates Login Court of Terminal Or Parking For Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) at Adisutjipto Airport - Yogyakarta.*
- b. *KEP.126 / KU.07.06 / 2013 dated 15 November 2013 on the amendment of Article 2 and Article 3 of the Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.63 / KU.20.06 / 2008 dated June 12, 2008 About Rates / Fees Sign Court of Terminal or parking for the Motor Vehicle in Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) EL Tari Airport - Kupang.*

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
(lanjutan)

2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS
(Continued)

- c. KEP.135/KB.03.05/2016 tanggal 01 September 2016 Tarif Masuk Pelataran Terminal Atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Sepinggan – Balikpapan.
- d. KEP.50/KU.07.06/2009 tanggal 27 Mei 2009 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Ngurah Rai – Bali.
- e. KEP.119/KU.07.06/2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado.
- f. KEP.23/KU.07.06/2011 tanggal 7 Maret 2011 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak.
- g. KEP.127/KU.07.06/2013 tanggal 15 Nopember 2013 Tentang Tarif / Biaya Masuk Pelataran Terminal Atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Internasional Lombok – Praya.
- h. KEP.48/KU.07.06/2011 tanggal 24 Mei 2011 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Juanda - Surabaya.
- i. KEP.70/KU.07.06/2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar.
- j. KEP.125/KU.07.06/2013 tanggal 15 Nopember 2013 Tentang Perubahan Pasal 2 DAN Pasal 3 Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.108/KU.07.06/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Sultan Pattimura – Ambon.
- k. KEP.186/KB.03.05/2011 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Sultan Syamsudin Noor – Banjarmasin.

- c. *KEP.135 / KB.03.05 / 2016 dated September 1, 2016 Rates Log Court of Terminal Or Parking For Motor Vehicles in Sepinggan Airport - Balikpapan.*
- d. *KEP.50 / KP.07.06 / 2009 dated May 27, 2009 About Rates / Fees Parking Motor Vehicle at Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) of Ngurah Rai Airport - Bali.*
- e. *KEP.119 / KEU.07.06 / 2009 dated December 31, 2009 About Rates / Fees Parking Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) at the Sam Ratulangi Airport - Manado.*
- f. *KEP.23 / KU.07.06 / 2011 dated March 7, 2011 About Rates / Fees Parking Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) on airport Frans Kaisiepo - Biak.*
- g. *KEP.127 / KU.07.06 / 2013 dated 15 November 2013 About Rates / Fees Sign Court of Terminal Or Parking For Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) in Lombok International Airport - Praya.*
- h. *KEP.48 / KU.07.06 / 2011 dated May 24, 2011 About Rates / Fees Parking Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) in Juanda - Surabaya.*
- i. *KEP.70 / KN.07.06 / 2011 dated July 11, 2011 About Rates / Fees Parking Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) at Sultan Hasanuddin Airport - Makassar.*
- j. *KEP.125 / KU.07.06 / 2013 dated 15 November 2013 on the amendment of Article 2 and Article 3 of the Decision of the Board of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.108 / KU.07.06 / 2011 dated October 25, 2011 About Rates / Fees Vehicle Parking Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) in Sultan Pattimura Airport - Ambon.*
- k. *KEP.186 / KB.03.05 / 2011 dated December 31, 2014 About Rates / Fees Parking Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) in Sultan Syamsudin Noor Airport - Banjarmasin.*

2 KETENTUAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN (lanjutan)	2. AIRPORT REGULATION AND SERVICE TARIFFS (Continued)
<p>l. KEP.16/KU.07.06/2015 tanggal 5 Februari 2015 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang.</p> <p>m. KEP.82/KB.03/2015 tanggal 15 Juni 2015 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Adi Soemarmo – Surakarta.</p> <p>n. KEP.71/KB.03/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT.Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.88/KB.03/2011 Tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) Khusus di Bandar Udara Juanda-Surabaya, Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar dan Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan.</p> <p>o. KEP.155.I/KB.03.05/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Tarif Masuk Pelataran Terminal atau Parkir untuk Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT Angkaa Pura 1 (Persero) Adisutjipto - Yogyakarta.</p>	<p>l. KEP.16/KU.07.06/2015 tanggal 5 Februari 2015 Tentang Tarif / Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT.Angkasa Pura I (Persero) di Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang.</p> <p>m. KEP.82 / KN.03 / 2015 dated June 15, 2015 About Rates / Fees Parking Motor Vehicle Branch Office PT.Angkasa Pura I (Persero) at the airport Adi Soemarmo - Surakarta.</p> <p>n. KEP.71/KB.03/2013 dated July 9, 2013 on Amendments to the Decision of the Board of Directors PT.Angkasa Pura I (Persero) Number KEP.88/KB.03/2011 About Commercial and Business Development Activities in the Environment PT.Angkasa Pura I (Persero) Lodging Surabaya-Juanda Airport, Sultan Hasanuddin Airport Makassar and Sepinggan Balikpapan Airport.</p> <p>o. KEP.155.I / KB.03.05 / 2016 dated October 17, 2016 on Rates Entrance Court of terminal or parking for the Motor Vehicle at the Branch Office PT Angkaa Pura 1 (Persero) Adisutjipto - Yogyakarta.</p>

3. KEGIATAN PERUSAHAAN	3. COMPANY ACTIVITIES																																																												
<p>Pencapaian kegiatan utama perusahaan dalam pengelolaan jasa kebandarudaraan selama tahun 2016 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Pergerakan pesawat</p>	<p><i>The achievement of the company's main activities in management of airport service during year ended 2016 and 2015 can be described as follows:</i></p> <p><i>a Aircraft movement</i></p>																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bandara / Airport</th> <th>Satuan / Unit</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I Gusti Ngurah Rai</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>139.106</td> <td>126.337</td> </tr> <tr> <td>Juanda</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>148.596</td> <td>137.051</td> </tr> <tr> <td>Sultan Hasanuddin</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>100.630</td> <td>88.592</td> </tr> <tr> <td>S.A.M.S Sepinggan</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>72.540</td> <td>70.835</td> </tr> <tr> <td>Frans Kasiepo</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>7.285</td> <td>8.597</td> </tr> <tr> <td>Sam Ratulangi</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>26.784</td> <td>21.288</td> </tr> <tr> <td>Adisutjipto</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>69.266</td> <td>68.729</td> </tr> <tr> <td>Adisoemarmo</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>28.934</td> <td>25.413</td> </tr> <tr> <td>Syamsudin Noor</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>29.900</td> <td>29.133</td> </tr> <tr> <td>Ahmad Yani</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>62.084</td> <td>57.089</td> </tr> <tr> <td>Lombok-Praya</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>36.943</td> <td>27.759</td> </tr> <tr> <td>Pattimura</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>17.594</td> <td>16.847</td> </tr> <tr> <td>El Tari</td> <td>Pesawat/Aircraft</td> <td>24.869</td> <td>20.448</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">764.531</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">698.118</td> </tr> </tbody> </table>	Bandara / Airport	Satuan / Unit	2016	2015	I Gusti Ngurah Rai	Pesawat/Aircraft	139.106	126.337	Juanda	Pesawat/Aircraft	148.596	137.051	Sultan Hasanuddin	Pesawat/Aircraft	100.630	88.592	S.A.M.S Sepinggan	Pesawat/Aircraft	72.540	70.835	Frans Kasiepo	Pesawat/Aircraft	7.285	8.597	Sam Ratulangi	Pesawat/Aircraft	26.784	21.288	Adisutjipto	Pesawat/Aircraft	69.266	68.729	Adisoemarmo	Pesawat/Aircraft	28.934	25.413	Syamsudin Noor	Pesawat/Aircraft	29.900	29.133	Ahmad Yani	Pesawat/Aircraft	62.084	57.089	Lombok-Praya	Pesawat/Aircraft	36.943	27.759	Pattimura	Pesawat/Aircraft	17.594	16.847	El Tari	Pesawat/Aircraft	24.869	20.448	Jumlah		764.531	698.118	
Bandara / Airport	Satuan / Unit	2016	2015																																																										
I Gusti Ngurah Rai	Pesawat/Aircraft	139.106	126.337																																																										
Juanda	Pesawat/Aircraft	148.596	137.051																																																										
Sultan Hasanuddin	Pesawat/Aircraft	100.630	88.592																																																										
S.A.M.S Sepinggan	Pesawat/Aircraft	72.540	70.835																																																										
Frans Kasiepo	Pesawat/Aircraft	7.285	8.597																																																										
Sam Ratulangi	Pesawat/Aircraft	26.784	21.288																																																										
Adisutjipto	Pesawat/Aircraft	69.266	68.729																																																										
Adisoemarmo	Pesawat/Aircraft	28.934	25.413																																																										
Syamsudin Noor	Pesawat/Aircraft	29.900	29.133																																																										
Ahmad Yani	Pesawat/Aircraft	62.084	57.089																																																										
Lombok-Praya	Pesawat/Aircraft	36.943	27.759																																																										
Pattimura	Pesawat/Aircraft	17.594	16.847																																																										
El Tari	Pesawat/Aircraft	24.869	20.448																																																										
Jumlah		764.531	698.118																																																										

3. KEGIATAN PERUSAHAAN (lanjutan)		3. COMPANY ACTIVITIES (continued)	
b. Pergerakan penumpang		b Passengers movement	
Bandara / Airport	Satuan / Unit	2016	2015
I Gusti Ngurah Rai	Orang / Person	20.001.275	17.108.387
Juanda	Orang / Person	19.486.330	17.143.912
Sultan Hasanuddin	Orang / Person	10.756.737	9.306.184
S.A.M.S Sepinggan	Orang / Person	7.518.437	7.374.517
Frans Kasiepo	Orang / Person	406.425	361.410
Sam Ratulangi	Orang / Person	2.618.105	2.113.737
Adisutjipto	Orang / Person	7.214.365	6.380.336
Adisoemarmo	Orang / Person	2.189.957	1.525.013
Syamsudin Noor	Orang / Person	3.602.954	3.546.554
Ahmad Yani	Orang / Person	4.219.815	3.682.108
Lombok-Praya	Orang / Person	3.421.584	2.552.399
Pattimura	Orang / Person	1.377.911	1.318.041
El Tari	Orang / Person	1.942.065	1.523.342
Jumlah		84.755.960	73.935.940
c. Pergerakan Angkutan Kargo		c Movement of cargo Transport	
Bandara / Airport	Satuan / Unit	2016	2015
I Gusti Ngurah Rai	Ton	51.560.079	30.860.389
Juanda	Ton	96.280.587	90.645.441
Sultan Hasanuddin	Ton	57.897.859	53.934.781
S.A.M.S Sepinggan	Ton	53.644.322	54.404.102
Frans Kasiepo	Ton	1.083.139	910.112
Sam Ratulangi	Ton	12.122.272	12.396.717
Adisutjipto	Ton	21.593.040	19.724.154
Adisoemarmo	Ton	6.498.068	5.930.199
Syamsudin Noor	Ton	23.234.505	22.051.628
Ahmad Yani	Ton	15.436.726	14.353.182
Lombok-Praya	Ton	11.996.778	8.719.452
Pattimura	Ton	5.830.604	6.024.097
El Tari	Ton	5.279.257	4.885.249
Jumlah		362.457.236	324.839.503

4 KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

4. RISK MANAGEMENT POLICY

a. Fungsi manajemen Risiko

Perkembangan industri penerbangan yang pesat menyebabkan risiko yang dihadapi Perusahaan pada setiap proses bisnisnya menjadi semakin kompleks. Risiko-risiko pada Perusahaan, baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam pengembangan bisnis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, Perusahaan mengembangkan suatu kerangka pengelolaan risiko perusahaan yang menyeluruh, Enterprise Risk Management (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, menciptakan Nilai Perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong standar praktik terbaik tata kelola Perusahaan, serta menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari Budaya Perusahaan.

b. Dasar penerapan manajemen risiko.

Pengelolaan risiko Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan usaha Milik Negara.

c. Penerapan manajemen risiko

Penerapan manajemen risiko di Angkasa Pura Airports dilakukan pada tingkat korporat serta Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Pada tingkat korporat, penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh Risk Management Committee yang diketuai oleh Marketing and Business Development Director, dan beranggotakan Finance and IT Director, Operation Director, Technical Director, Human Capital and General Affairs Director, Corporate Secretary, Head of Internal Audit, Head of Procurement, Head of Corporate Planning and Performance, Head of Risk Management and Compliance, Head of Corporate Social Responsibility, serta seluruh Group Head.

a. The risk management function

The rapid development of the aviation industry led to the risks faced by the Company on every business process is becoming increasingly complex. The risks to the Company, both in daily operations as well as in business development, influenced by various internal and external factors. To that end, the Company developed a risk management framework the company overall, Enterprise Risk Management (ERM), in order to minimize potential losses and optimize profitability, creating value of the Company and increase the confidence of stakeholders, encourage best practice corporate governance, as well as to make the risk culture as part of the corporate culture.

b. Basic application of risk management.

Risk management refers to the Minister for State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises and the Minister for State Owned Enterprises No. KEP-117 / MBU / 2002 on the Implementation Practice of Good Corporate Governance (GCG) at the Agency for State-owned enterprises.

c. Implementation of risk management

Implementation of risk management at Angkasa Pura Airports done at the corporate level as well as the Head Office and Branch Office. At the corporate level, risk management practices implemented by the Risk Management Committee, chaired by Marketing and Business Development Director, and composed of Finance and IT Director, Operations Director, Technical Director, Human Capital and General Affairs Director, Corporate Secretary, Head of Internal Audit, Head of Procurement, Head of Corporate Planning and Performance, Head of Risk Management and Compliance, Head of Corporate Social Responsibility, as well as the entire Group Head.

4 KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

4. RISK MANAGEMENT POLICY (continued)

Pada tingkat Kantor Pusat, fungsi manajemen risiko dari Unit Risk Management and Compliance bertanggung jawab untuk mengembangkan laporan manajemen risiko, memantau profil risiko Perusahaan, memberi rekomendasi kepada Risk Management Committee, mengevaluasi kebijakan strategis, memantau pelaksanaan manajemen risiko, serta bersama-sama dengan pemilik risiko (risk owner) Kantor Pusat melaksanakan proses manajemen risiko. Sedangkan pada tingkat Kantor Cabang, fungsi manajemen risiko yang bersama-sama dengan pemilik risiko (risk owner) Kantor Cabang melaksanakan proses manajemen risiko dengan tahapan melaksanakan identifikasi, evaluasi, analisa, penanganan risiko serta melakukan monitoring terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi.

At the level of the Central Office, the risk management function of the Unit for Risk Management and Compliance is responsible for developing reports risk management, monitoring the Company's risk profile, make recommendations to the Risk Management Committee, to evaluate strategic policy, monitor the implementation of risk management, as well as together with the Headquarters risk owner implement risk management processes. While at the Branch Offices, the risk management function together with the Branch's risk owner implementing risk management processes to the stages of implementing the identification, evaluation, analysis, risk management and monitoring of the risks that have been identified.

Angkasa Pura Airport telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan, antara lain sebagai berikut :

Angkasa Pura Airport has made some efforts in risk management in the Company, are as follows:

- 1) Perubahan Pedoman Umum Manajemen Risiko yang sebelumnya tertuang pada Keputusan Direksi Nomor : KEP.114/PG.01/2011 menjadi Keputusan Direksi Nomor: KEP.77/PG.01/2014. Hal ini sejalan dengan perubahan standar manajemen risiko Perusahaan dari COSO menjadi ISO 31000
- 2) Risiko bersifat dinamis sehingga pemilik risiko (risk owner) didorong untuk secara berkesinambungan memperbaharui profil risiko. Berdasarkan Pedoman Umum Manajemen Risiko, pelaporan updating profil risiko secara resmi dilakukan minimal setiap semester (6 bulan sekali).
- 3) Mulai tahun 2014, aspek pengelolaan risiko telah diturunkan (cascade) sampai kepada Key Performance Indicator seluruh Kantor Cabang.
- 4) Diwajibkan kajian risiko pada setiap usulan investasi sehingga menjadi salah satu materi pertimbangan dalam pengambilan keputusan
- 5) Pelaksanaan assessment risiko pada Proyek Pengembangan Bandara di lingkungan Angkasa Pura Airports.
- 6) Pembangunan aplikasi Manajemen Risiko Berbasis Web.
- 7) Pembangunan kerangka kerja penyusunan RKAP berbasis risiko.

- 1) *Changes in Risk Management General Guidelines that were previously contained in the Decision of the Board Number: KEP.114 / PG.01 / 2011 to the Board of Directors Decision No. KEP.77 / PG.01 / 2014. This is in accordance with the changing standards of COSO enterprise risk management to ISO 31000*
- 2) *Risk is dynamic so the risk owner are encouraged to continuously update the risk profile. Based on the General Guidelines for Risk Management, reporting formally updating the risk profile conducted at least every semester (six months).*
- 3) *Starting in 2014, aspects of risk management has been cascade through the Key Performance Indicator all Branch Offices.*
- 4) *Mandatory risk assessment on each proposed investment to become one of the materials considered in the decision*
- 5) *Implementation of a risk assessment on Airport Development Project in the Angkasa Pura Airports.*
- 6) *Development of Web-Based Risk Management application.*
- 7) *Development framework of Work Plan and Budget preparation of the Company based on risk.*

4 KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

4. RISK MANAGEMENT POLICY (continued)

d. Proses pengelolaan risiko

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Angkasa Pura Airports menerapkan International Organization for Standardization (ISO) 31000 Risk Management Standard yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia pada tahun 2011. Proses pengelolaan risiko Angkasa Pura Airports meliputi 5 (lima) tahapan kegiatan sebagai berikut :

1) Komunikasi dan Konsultasi

Merupakan proses interaktif berupa tukar menukar informasi dan pendapat mengenai risiko dan pengelolaannya, serta komunikasi antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan mengenai isu tertentu yang terkait dengan pengambilan keputusan atau penentuan langkah tertentu dalam menangani risiko.

2) Menentukan Konteks

Dilakukan dengan menetapkan parameter-parameter yang relevan dengan Perusahaan, baik internal maupun eksternal yang digunakan dalam pengelolaan risiko, terutama dalam rangka menetapkan ruang lingkup dan kriteria risiko.

3) Penilaian Risiko

- a) Identifikasi Risiko
- b) Analisis Risiko
- c) Evaluasi Risiko

4) Penanganan Risiko

Penanganan risiko dilakukan untuk menyeleksi satu atau lebih alternatif metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi eksposur. Pemilihan alternatif penanganan risiko harus didasarkan atas analisis biaya penanganan risiko dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pada berbagai aspek terkait.

d. The process of risk management

In the application of Risk Management, Angkasa Pura Airports implementing the International Organization for Standardization (ISO) 31000 Risk Management Standard which has been certified by the National Standardization Agency (BSN) Indonesia in 2011. The risk management process Angkasa Pura Airports includes five (5) stages of activity as following :

1) *Comunication and consultation*

An interactive process in the form of exchange of information and opinions concerning risk and its management, as well as communication between the Company and the stakeholders regarding certain issues related to the decision or determination of a specific step in dealing with risk.

2) *Determining Context*

Accomplished by specifying the parameters relevant to the Company, both internal and external use in risk management, especially in order to define the scope and risk criteria.

3) *Risk Assesment*

- a. Risk identification*
- b. Risk anaysis*
- c. Risk evaluation*

4) *Risk Treatment*

Risk treatment is performed to select one or more alternative methods or approaches used to reduce exposure. Selection of alternative risk treatment should be based on a analysis of risk treatment cost (cost of risk) compared to the benefits obtained on various aspects related.

4 KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

4. RISK MANAGEMENT POLICY (continued)

Alternatif atau pilihan penanganan risiko adalah

- a) Menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas atau transaksi usaha tertentu;
- b) Mitigasi risiko, misalnya dengan peningkatan keselamatan kerja, pemeliharaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemutakhiran sistem, dan prosedur;
- c) Pembagian risiko (*risk transfer/risk sharing*) dengan pihak lain, misalnya asuransi, hedging, kerjasama dengan bentuk joint venture/partnership. Pembagian risiko ini dapat dilakukan untuk eksposur yang melampaui toleransi risiko Perusahaan;
- d) Menerima risiko dengan melaksanakan aktivitas atau transaksi usaha tertentu dengan tanpa usaha untuk mengurangi, membagi ataupun memindahkan risiko ;
- e) Kombinasi antara beberapa alternatif sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas.

5) Pemantauan dan Kaji Ulang

Pelaksanaan pemantauan meliputi pemantauan secara berkelanjutan oleh para pemilik risiko. Pengawasan pemantauan dilakukan oleh pimpinan pemilik risiko yang dilaksanakan secara berkala dan pihak ketiga melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan, kaji ulang merupakan peninjauan secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diberlakukan dan efektivitas pelaksanaan penanganan risiko untuk disempurnakan secara berkesinambungan.

e. Kategori risiko

Risiko-risiko pada Angkasa Pura Airports dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan rincian sebagai berikut

- 1) *Strategy and Planning Risk* yang meliputi *corporate responsibility and sustainability, external factors, planning, project, dan strategy*.
- 2) *Financial Risk* yang meliputi *accounting, credit, liquidity and finance intelligence, financial market, planning and budgeting*.

Alternative or selection of risk treatment is :

- a) *Avoiding risk with no activity or certain business transactions;*
- b) *Risk mitigation, for example with improved safety, maintenance, improvement of human resources competencies, updating systems and procedures;*
- c) *The risk transfer / risk sharing with other parties, such as insurance, hedging, in cooperation with the form of joint venture / partnership. The risk transfer / risk sharing can be done for exposure that exceed the risk tolerance of the Company;*
- d) *Accept the risk (risk acceptance) by conducting certain business activities or transactions with no effort to reduce, divide or risk transfer;*
- e) *The combination of several alternatives as mentioned in item 1 through 4 above*

5) *Monitoring and the Review*

Implementation of monitoring includes continuous monitoring by the owner's risk. Supervision of monitoring conducted by the leadership of the owner of the risk executed regularly and a third party through internal and external audits are conducted periodically. Whereas, the periodic reviews of the effectiveness of risk management systems put in place and the effectiveness of risk management for enhanced implementation continuously

e. *Category risk*

The risks at Angkasa Pura Airports are grouped into four (4) categories as follows

- 1) *Strategy and Planning Risk covering corporate responsibility and sustainability, external factors, planning, project and strategy*
- 2) *Financial Risk which includes accounting, credit, liquidity and financial intelligence, financial market, planning and budgeting.*

4 KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

4. RISK MANAGEMENT POLICY (continued)

e. Kategori risiko (lanjutan)

- 3) *Operation/Infrastructure Risk* yang meliputi *corporate assets, human resources, information technology, external events, legal, process management, product development dan sales marketing and communication*.
- 4) *Hazard Risk* yang meliputi *health, safety and environment, force majeure dan natural disaster*.

e. *Category risk (continued)*

- 3) *Operational/Infrastructure Risk* which includes *corporate assets, human resources, information technology, external events, legal, process management, product development and sales marketing and communication*
- 4) *Hazard Risk* which includes *health, safety and environment, force majeure and natural disaster*.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

5. SUMMARY OF SIGNIFICANT - ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan ketaatan terhadap standar - standar akuntansi keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

a *Statement of compliance with - financial accounting standards.*

The consolidated financial statement of PT Angkasa Pura I (Persero) for the year ended December 31, 2016 and 2015 has present accordance with Indonesian Accounting Financial Standard in Indonesia and the regulations imposed by the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) (currently Otoritas Jasa Keuangan or OJK) specifically Rule No. VIII.G.7, Attachment of the Chairman of Bapepam-LK. No. Kep 347/BL/2012 dated June 25, 2012 on "Financial Statement Presentation and Disclosure of Public Listed Companies".

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian terlampir, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual dan diukur berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain selain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing- masing akun tersebut.

b *Basis for financial statements preparation*

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared using the accrual basis and based on historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

Laporan arus kas konsolidasian, disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method by classifying the receipts and disbursements of cash and cash equivalents into operating, investing and financing activities.

Periode akuntansi meliputi 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang bersangkutan.

The accounting period is from January 1 through December 31 of the related year.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perseroan dan anak perusahaan.

The currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Company and its subsidiaries.

Angka pada laporan keuangan dibulatkan dan dinyatakan dalam ribuan Rupiah.

The financial statements are stated in rupiah and rounded to thousand of Rupiah.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>Prinsip-prinsip konsolidasian</p> <p>Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh perusahaan (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.</p> <p>Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal dimana pengendalian beralih dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian</p> <p>Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.</p> <p>Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan.</p> <p>Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.</p> <p>Ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak, Perseroan menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba.</p> <p>Kepentingan non pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.</p> <p>Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.</p>	<p>Principles of consolidation</p> <p>The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the company and entities controlled by the company (its subsidiaries). Control is achieved where the company has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.</p> <p>Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred, and de-consolidated on which that control ceases.</p> <p>The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated income statements and other comprehensive income from the effective date of acquisition and up to the effective date of disposal.</p> <p>Adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the company.</p> <p>Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiaries is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.</p> <p>When the Company loses control of a subsidiary, the Company derecognises the assets and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts when control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings.</p> <p>Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The choice of measurement are recorded at acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition of subsequent changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.</p> <p>All intra group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.</p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan</p> <p>i. Standar dan penyesuaian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:</p> <p><u>Standar :</u> PSAK 110 (revisi 2015) : Akuntansi Sukuk</p> <p><u>Penyesuaian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 5 : Segmen Operasi - PSAK 7 : Pengungkapan Pihak Pihak Berelasi - PSAK 13 : Property Investasi - PSAK 22 : Kombinasi Bisnis - PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - PSAK 53 : Pembayaran Berbasis Saham - PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar <p>Amandemen standar dan interpretasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 4 : Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri. - PSAK 15 : Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi - Penerapan Pengecualian Konsolidasi. - PSAK 16 : Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. - PSAK 19 : Aset Tak Berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. - PSAK 24 : Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. - PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. - PSAK 66 : Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama. - PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. - ISAK 30: "Pungutan" yang merupakan Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 57: Provisi, Liabilitas, Kontinjensi dan Aset Kontinjensi - ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. 	<p>c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations.</p> <p>i Standard and improvements to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with early application permitted are as follows:</p> <p><u>Standard :</u> PSAK 110 (revised 2015) : Accounting for Sukuk</p> <p><u>Improvement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 5 : Operating Segments - PSAK 7 : Related Party Disclosures - PSAK 13 : Investments Property - PSAK 22 : Business Combination - PSAK 25 : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - PSAK 53 : Share-based Payments. - PSAK 68 : Fair Value Measurement. <p>Amendments to standards and interpretation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 4: Separate Financial Statements about Equity Method in Separate Financial Statements. - PSAK 15: Investment Entities: Applying the Consolidation Exception. - PSAK 16: Property, Plant and Equipment about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization. - PSAK 19: Intangible Asset about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization. - PSAK 24: Defined Benefit Plans: Employee Contributions. - PSAK 65: Consolidation Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception. - PSAK 66: Joint Arrangements about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation. - PSAK 67: Disclosures of Interest in Other Entities about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception. - ISAK 30 : "Levies" Scope Interpretation of PSAK 57: Provision, Contingency and Contingent assets. - ISAK 31 : Scope Interpretation of PSAK 13: Investment property.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)</p> <p>ii. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan. Amandemen standar dan interpretasi sudah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. <p>d. Transaksi dengan pihak berelasi Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Definisi pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau - Personil manajemen kunci entitas pelapor <p>Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; 	<p>c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations (continues)</p> <p>ii Standards and interpretations issued not yet adopted. Amendments to standard and interpretation effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with early application permitted are :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSAK 1 : Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative. <p>d. Transactions with related parties The Company and its subsidiaries have transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures". Related parties are defined as follows: The person or member's family is related to a reporting entity if that person.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Has control or int control over the reporting entity ; - Has significant influence over the reporting entity; or - Key management personnel of the reporting entity <p>An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member); - Both entities are joint ventures of the same third party; - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity; - The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)									
<p>d. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a ; atau - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas) - Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. <p>Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>e. Transaksi dan saldo dalam mata Uang Asing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam satuan Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tetap yang ditetapkan pada setiap awal bulan. 2) Pada tanggal laporan posisi keuangan, instrumen keuangan moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, yang didasarkan pada kurs tengah mata uang kertas asing yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian yang timbul, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba (rugi) periode berjalan. 3) Kurs mata uang asing utama yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut : <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Dalam Rupiah penuh / in full Rupiah)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">2016</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">2015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">USD 1.-</td> <td style="text-align: center;">13.436</td> <td style="text-align: center;">13.795</td> </tr> </table>		(Dalam Rupiah penuh / in full Rupiah)			2016	2015	USD 1.-	13.436	13.795	<p>d. Transactions with related parties (continued)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The entity is controlled or intly controlled by a person identified in (a) ; or</i> - <i>A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).</i> - <i>The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.</i> <p><i>All significant transactions with related parties that have a special relationship, whether performed the normal terms and conditions as performed with a third party, or not, are disclosed in the notes to financial statements.</i></p> <p>e. Foreign currency transactions and balances</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>The accounting of the Company is maintained in rupiah denomination. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the beginning of the month.</i> 2) <i>At the balance sheet date, assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into rupiah at the rates prevailing at that date, on the basis of middle rate of exchange issued by Bank Indonesia. Gains or losses resulting from the translation is charged to income of the related period.</i> 3) <i>The following exchange rate are used on December 31, 2016 and 2015 :</i>
	(Dalam Rupiah penuh / in full Rupiah)									
	2016	2015								
USD 1.-	13.436	13.795								
<p>f. Kas dan Setara Kas</p> <p>Kas adalah kas dan atau rekening bank yang dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek bukan untuk investasi atau tujuan lain. Setara kas yang dimaksud adalah deposito dan investasi jangka pendek yang dapat segera diubah dan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan yang signifikan.</p>	<p>f. Cash and cash equivalent</p> <p><i>Cash on hand or in banks are those funds kept for fulfillment of short term commitments and not intended for investments. Cash equivalent includes cash on hand, in banks and deposits which due within three months or less effective of their inceptions and which may be converted into cash at defined amount without any significant risk of fluctuation.</i></p>									

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)

g. Instrumen Keuangan

Perusahaan telah menerapkan sepenuhnya PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". PSAK No. 50 (Revisi 2014) dan PSAK No. 55 (Revisi 2014) tersebut berlaku secara prospektif.

PSAK No. 50 (Revisi 2014) berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan harus saling hapus.

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

g. Financial Instruments

The Company has fully adopted the accounting standard PSAK No.50 (Revised 2014) on Financial Instruments: Presentation and Disclosure, and PSAK No.55 (Revised 2014) on Financial Instruments: Recognition and Measurement, in replacement of PSAK No.50 on Accounting for Investment in Specific Securities and PSAK No.55 (Revised 2014) Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities. The PSAK 50 (Revised 2014) and PSAK 55 (Revised 2014) are effective prospectively.

The PSAK 50 (Revised 2014) include requirements for presentation of financial instruments and identifies information to be disclosed. It applies to the classification of financial instrument-, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset.

The PSAK requires disclosure of information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments.

The PSAK 55 (Revised 2014) specifies basic principles for recognition and measurement of financial instruments, financial liabilities, and some buy or sell contract of non-financial instrument. The PSAK provides some definition and characteristic of derivatives, financial instrument categories, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 262 604 294">g. Instrumen Keuangan (lanjutan)</p> <p data-bbox="269 319 435 350">Aset Keuangan</p> <p data-bbox="269 352 451 384">Pengakuan Awal</p> <p data-bbox="269 386 836 743">Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi , pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.</p> <p data-bbox="269 745 836 840">Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi jangka panjang.</p> <p data-bbox="269 850 662 882">Pengukuran setelah pengakuan awal</p> <p data-bbox="269 884 836 947">Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :</p> <ul data-bbox="277 972 836 1203" style="list-style-type: none">- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. <p data-bbox="298 1213 836 1602">Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.</p> <p data-bbox="298 1633 836 1795">Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dicatat pada nilai wajar.</p>	<p data-bbox="911 262 1442 294">g. Financial Instruments (continued)</p> <p data-bbox="941 319 1117 350">Financial Assets</p> <p data-bbox="941 352 1140 384">Initial Recognition</p> <p data-bbox="941 386 1529 648">Within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) financial assets are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss, loans and receivables, investments held for maturity, or financial assets available for sale, whichever is appropriate. An entity determines the classification of the financial assets at initial recognition, and when permitted and necessary, re-evaluate the classification at end of periods.</p> <p data-bbox="941 745 1529 840"><i>Financial assets of the Company include cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables, and long term investments.</i></p> <p data-bbox="941 850 1318 882">Measurement subsequent to initial</p> <p data-bbox="941 884 1529 947"><i>Measurement of financial assets subsequent to initial recognition depending on their classification :</i></p> <ul data-bbox="966 972 1529 1171" style="list-style-type: none">- <i>Financial assets measured at fair value through income statements and other comprehensive income include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss and other comprehensive income.</i> <p data-bbox="1003 1213 1529 1539"><i>Financial assets are classified as held for trading when they are acquired for sale and buy back in near future. Derivative assets are also classified as held for trading except for derivatives which are designated as effective hedging instruments. Financial assets measured at fair value through profit and loss are presented in the balance sheet at fair value and gain or loss arising from changes in fair value are recognized through income statements and other comprehensive income.</i></p> <p data-bbox="1003 1633 1529 1795"><i>Derivatives embedded in a main contract are recognized as stand-alone derivatives when their economic risks and characteristics of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 262 836 304">g. Instrumen Keuangan (lanjutan)</p> <p data-bbox="298 315 836 556">Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak.</p> <p data-bbox="298 567 836 966">Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun pada saat proses amortisasi.</p> <p data-bbox="298 976 836 1039">Piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang jangka panjang termasuk dalam kategori ini.</p> <p data-bbox="298 1050 836 1375">Aset keuangan non - derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.</p> <p data-bbox="298 1396 836 1438">Investasi dimiliki hingga jatuh tempo</p> <p data-bbox="298 1438 836 1724">Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.</p>	<p data-bbox="909 262 1531 304">g. Financial Instruments (continued)</p> <p data-bbox="998 315 1531 556"><i>The embedded derivatives are measured at fair value with the profit or loss resulting from changes in the fair value are recognized in the income statement. Revaluation can only happen when there is a change in the contract which significantly change the cash flow as required in the contract.</i></p> <p data-bbox="998 567 1531 871"><i>Loans and receivables are non-derivative financial assets, their settlements are at fixed amounts or designated at fixed amounts, and not quoted in active market. The ifnancial assets are recognized at cost and amortized using effective interest rates. Profit or loss is recognized in statements of comprehensive income at the loan or receivabic derecognized or at the time of their impairment or through amortization.</i></p> <p data-bbox="998 966 1531 1039"><i>Trade receivable, other receivable and long term receivable include in this categories.</i></p> <p data-bbox="998 1050 1531 1270"><i>The financial assets non - derivatives with fixed or determinable payments and fixed maturity are classified as held-to-maturity when the Company has the intent and ability to hold financial assets to maturity. After initial measurement, held to maturity investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method.</i></p> <p data-bbox="998 1396 1531 1438">Investment held to maturity</p> <p data-bbox="998 1438 1531 1669"><i>The method uses effective interest rates to discount the future estimated cash receivable over the lives of the financial assets to their net carrying amount. Profit or loss in statements of comprehensive income is recognized in the income statement at the time they are derecognized or at their impairment or through amortization.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 262 609 294">g. Instrumen Keuangan (lanjutan)</p> <p data-bbox="300 315 690 346">Aset keuangan tersedia untuk dijual</p> <p data-bbox="300 346 836 808">Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian reklasifikasi.</p> <p data-bbox="300 808 836 871">Investasi yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:</p> <ul data-bbox="300 913 836 1249" style="list-style-type: none">- Investasi pada instrumen ekuitas yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.- Investasi dalam instrumen ekuitas yang tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, dicatat pada nilai wajar. <p data-bbox="300 1249 836 1312">Perusahaan mempunyai reksadana tersedia untuk dijual yang termasuk dalam kategori ini.</p> <p data-bbox="267 1333 487 1396">Liabilitas Keuangan Pengakuan Awal</p> <p data-bbox="267 1396 836 1669">Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.</p> <p data-bbox="267 1690 836 1816">Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.</p>	<p data-bbox="909 262 1445 294">g. Financial Instruments (continued)</p> <p data-bbox="998 315 1364 346">Financial assets available for sale</p> <p data-bbox="998 346 1531 745"><i>Available-for-sale financial assets are any non-derivative financial assets designated on initial recognition as available for sale or any other instruments that are not classified in the three previous categories. Subsequent to initial recognition, they are recognized at fair value and the resulting unrealized profit or loss recognized through equity until they are derecognized. The cumulative gain or loss that was recognised in equity have to reclassified to statement of comprehensive income as reclassification adjustment.</i></p> <p data-bbox="998 808 1531 871"><i>The investments that are classified as available for sale of financial assets are as follows:</i></p> <ul data-bbox="998 913 1531 1207" style="list-style-type: none">- <i>Investments in equity instrument for which no fair values and reliable with ownership of less than 20% and other !Ong term investments recognized at cost.</i>- <i>Investments in equity instrument for which fair values are available with ownership of less than 20% and classified as available for sale are recognized at fair value.</i> <p data-bbox="998 1249 1531 1312"><i>The Company does not have any investment in mutual</i></p> <p data-bbox="958 1333 1161 1396">Financial Assets Initial Recognition</p> <p data-bbox="958 1396 1531 1669"><i>Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) items which may fall into financial measured at fair value through statements of comprehensive income, loans and payables or derivatives designated as effective hedging instruments, whoever is more appropriate. The Company determines the classification of financial liabilities at initial recognition.</i></p> <p data-bbox="958 1690 1531 1795"><i>At initial recognition, financial liabilities are recognized at fair value; with respect of loans and payables, cost of transactions directly attributable are included.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>g. Instrumen Keuangan (lanjutan) Liabilitas Keuangan (lanjutan)</p> <p>Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi beban yang masih harus dibayar, utang pembelian aset tetap, persediaan, utang lancar lain-lain, utang jaminan dan utang jangka panjang lainnya.</p> <p>Pengukuran setelah pengakuan awal Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. <p>Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.</p> <p>Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.</p> <p>Keuntungan atau kerugian atas Liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.</p> <p>Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pinjaman dan Hutang Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi. Beban yang masih harus dibayar, utang pembelian aset tetap dan persediaan, utang lancar lain-lain, dan utang jangka panjang lainnya termasuk dalam kategori ini. 	<p>g. Financial Instruments (continued) Financial Assets (continued)</p> <p><i>The Company's financial liabilities include accrued expenses, assets procurement payables, other current liabilities, warranties payable, and other long term loans.</i></p> <p>Measurement subsequent to initial recognition <i>Depending on their classifications financial liabilities are measured at:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial liabilities measured at fair value through statements of comprehensive income <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss and other comprehensive income.</i> <p><i>A financial instruments are classified as held for trading when they are acquired for sale or buy back in near future.</i></p> <p><i>Profit or loss of these financial instruments is recognized in income statement and other comprehensive income.</i></p> <p><i>As at December 31, 2016 and 2015, the Company does not have any of these type of financial liability.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Loans and Payable <i>Subsequent to initial recognition, interest bearing loans and payables are measured at amortized cost using effective interest rates.</i> <p><i>Profit or loss is recognized in income statement and other comprehensive income at derecognition as well as through the amortization process.</i></p> <p><i>Accrued expenses, fixed assets and inventory procurement payables, and other long term liabilities are within this category.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 262 609 294">g. Instrumen Keuangan (lanjutan)</p> <ul data-bbox="276 315 836 1375" style="list-style-type: none"><li data-bbox="276 315 836 619">- Saling Hapus dari Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih (netto), atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.<li data-bbox="276 630 836 1123">- Nilai wajar instrumen keuangan Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan; referensi atas nilai wajar terkini dan instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.<li data-bbox="276 1134 836 1375">- Aset keuangan yang tersedia untuk dijual Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, termasuk penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya. <p data-bbox="300 1407 836 1770">Jika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif - direklasifikasikan dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.</p>	<p data-bbox="909 262 1299 294">g. Financial Instruments (continued)</p> <ul data-bbox="958 315 1531 1344" style="list-style-type: none"><li data-bbox="958 315 1531 546">- Offsetting financial instruments <i>Financial assets and financial liabilities shall be offset and the net amount is reported in the statements of financial position only to the extent that they legally qualify for offset and that there is an intention for net settlement or or realise the asset and settle the liability simultaneously.</i><li data-bbox="958 630 1531 1060">- Fair value of financial instruments <i>Fair value of financial instruments traded in organized active market are measured at price quotation at closing of business at end of reporting period. If a market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique that makes maximum use of market inputs and includes recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, and option pricing models.</i><li data-bbox="958 1144 1531 1344">- Financial Asset Available for Sale <i>In terms of equity instruments classified as financial assets available for sale, objective evidence of impairment, including significant reduction or long-term decline in the fair value of the investment below its cost.</i> <p data-bbox="998 1407 1531 1711"><i>If there is evidence in impairment, the accumulated loss, measured at the difference between cost and current fair value, less previously recognised loss of impairment in the income statement, is reclassified from equity to income statement. Loss of impairment of equity investment may not be recovered through income statement, increase in fair value is recognised in equity.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

g. Financial Instruments (continued)

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang diturunkan nilainya dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai.

Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan Bunga" dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

- Penghentian pengakuan instrumen keuangan
Aset Keuangan

Aset keuangan (atau lebih tepatnya dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat:

(1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berliabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian pass-through ; dan baik (a) Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

When liability instruments are classified as financial assets available for sale, their decrease in value are assessed by the same criteria applicable to financial assets recognised at amortised cost. The future interest income is based on the decreased value and recognised at interest rate used to discount future cash flows for measuring loss of impairment.

The accrual is recognised in interest income account in the income statement and other comprehensive income. When in subsequent period the fair value of the instrument increase and the increase is objectively attributable to an event occurring subsequent to recognition of impairment loss in the income statement and other comprehensive income, the impairment loss is to be recovered through income statement and other comprehensive income.

- **Derecognition of Financial Assets and Liabilities**
Financial Assets

Financial assets (or rather can be classified as a part of a financial asset or a part of group of similar financial assets) are derecognised when:

(1) the contractual rights of cash flow arising from the contract has expired; or (2) the Company has transferred its contractual rights to receive cash flow arising from the financial asset or is liable to wholly pay, without any significant postponement, the cash flow received to a third party in a pass through agreement; and either (a) the Company has substantially transferred all risks and benefits of the assets, or (b) the Company substantially does not transfer or does not own all risks and benefits of an asset, but has transferred control over the asset.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 262 609 294">g. Instrumen Keuangan (lanjutan)</p> <p data-bbox="300 325 511 357">Liabilitas Keuangan</p> <p data-bbox="300 357 836 451">Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau telah kadaluwarsa.</p> <p data-bbox="300 451 836 850">Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau ketika telah dilakukannya modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.</p>	<p data-bbox="909 262 1445 294">g. Financial Instruments (continued)</p> <p data-bbox="998 325 1209 357">Financial Liabilities</p> <p data-bbox="998 357 1531 420"><i>Financial liabilities are derecognized when the liability is terminated or cancelled or expired.</i></p> <p data-bbox="998 451 1531 745"><i>When an existing financial liability is replaced by another ifnancial liability of the same lender but with substantially different provision, or when a substantially modification has been made to the existing agreement, the change or modification is recognised as termination to the initial liability and recognition of new liability, and the difference in carrying amount between the two is recognised in the income statement.</i></p>
<p data-bbox="240 861 617 892">h Efek-efek untuk tujuan investasi</p> <p data-bbox="267 903 836 997">Efek-efek terdiri dari Obligasi Pemerintah dan Reksadana BUMN maupun perusahaan swasta lainnya.</p> <p data-bbox="267 997 836 1197">Efek-efek untuk tujuan investasi pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, efek-efek untuk tujuan investasi dicatat sesuai dengan klasifikasinya masing-masing sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual.</p> <p data-bbox="267 1207 592 1239">1 Dimiliki hingga jatuh tempo</p> <p data-bbox="300 1239 836 1501">Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bila terjadi penjualan atau reklasifikasi kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang belum mendekati tanggal jatuh tempo akan menyebabkan reklasifikasi atas semua investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo ke dalam kelompok tersedia untuk dijual.</p> <p data-bbox="267 1533 527 1564">2 Tersedia untuk dijual</p> <p data-bbox="300 1564 836 1638">Investasi pada efek-efek yang tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajarnya.</p> <p data-bbox="300 1638 836 1806">Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek hutang yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.</p>	<p data-bbox="909 861 1193 892">h. Investment securities</p> <p data-bbox="950 903 1531 966"><i>Investment securities consist of Goverment bonds and BUMN/corporate Mutual funds.</i></p> <p data-bbox="950 997 1531 1165"><i>The effects for the purpose of the investment is initially measured at fair value plus transaction costs. After initial recognition, securities for investment purposes recorded in accordance with their respective classification as held to maturity or available for sale.</i></p> <p data-bbox="950 1207 1177 1239">1. <i>Held to maturity</i></p> <p data-bbox="998 1239 1531 1438"><i>Investments held to maturity are recorded at cost and amortized using the effective interest method. In the event of sale or reclassification of held-to-maturity are not yet approaching the due date will result in the reclassification of investments held to maturity to available-for-sale.</i></p> <p data-bbox="950 1533 1193 1564">2. <i>Available for sale</i></p> <p data-bbox="998 1564 1531 1638"><i>Available-for-sale investment securities is carried at their fair value.</i></p> <p data-bbox="998 1638 1531 1837"><i>Interest income is recognized in the comprehensive statements of income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available for sale debt securities investments are recognized in the comprehensive statements of income.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>h Efek-efek untuk tujuan investasi (lanjutan)</p> <p>Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain sampai investasi tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui klaim pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif berdasarkan metode rata-rata tertimbang.</p> <p>i. Piutang Usaha</p> <p>1) Piutang Usaha</p> <p>a. Penyajian piutang usaha sebesar Jumlah Bruto Tagihan dikurangi dengan Penurunan Nilai Wajar Piutang. Jumlah Bruto Piutang tetap disajikan pada laporan posisi keuangan diikuti dengan Penurunan Nilai Wajar Piutang.</p> <p>b. Pengakuan Piutang Usaha pada saat faktur tagihan diterbitkan.</p> <p>c. Pengelompokan Piutang Usaha berdasarkan jenis debitur :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pihak-pihak Berelasi <p>Pihak-pihak yang dianggap berelasi bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Antara lain: PT Gapura Angkasa, Koperasi Angkasa Pura I, Periskapura I, PT Garuda Indonesia Airlines (Persero), BUMN lain dan pihak lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Piutang Pihak Ketiga <p>Debitur yang tidak dapat dikelompokkan sebagai pihak berelasi, dikategorikan pada piutang pihak ketiga. Antara lain: Airline Dalam Negeri, Airline Luar Negeri, Perusahaan Swasta dan lain-lain.</p> <p>2) Pencatatan Penurunan Nilai Wajar Piutang</p> <p>Kerugian penurunan nilai piutang dihitung dengan metode Individual dengan memperhitungkan diskonto dari arus kas masa depan. Tingkat diskonto Penurunan Nilai Piutang akhir tahun 2016 sebesar 10,19% dan 2015 sebesar 10,56%.</p>	<p>h. Investment securities (continued)</p> <p><i>Other fair value changes are recognized directly in other comprehensive income until the investment is sold or impaired, where upon the cumulative gains and losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to the consolidated statements of income based on a weighted average method.</i></p> <p>i. Trade Receivables</p> <p>1) Trade Receivables</p> <p>a. <i>Trade receivables are presented at gross less impairment in fair value. The trade receivables are presented at gross in the balance sheet followed by their impairment in fair value.</i></p> <p>b. <i>Trade receivable is recognised when invoice is issued.</i></p> <p>c. <i>Trade receivables are classified on the basis of their debtors:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Related Parties</i> <p><i>Parties are related when one of the parties has the ability to control or has significant influence over the other in making financial or operational decision. The related parties are PT. Gapura Angkasa, Koperasi Angkasa Pura I, Periskapura PT. Garuda Indonesia (Persero), other SOEs, and others.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Third Parties</i> <p><i>Debtors which do not qualify as related parties are classified as third parties. They are domestic airlines, international airlines, private entities and such others.</i></p> <p>2) Impairment losses on receivables</p> <p><i>Impairment losses on receivables is calculated by taking into account the Individual method of discounted future cash flows. Impairment of Receivables discount rate end of 2016 amounted 10,19% and 2015 amounted to 10.56%.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)

j. Persediaan

- 1) Persediaan merupakan barang-barang yang mempunyai masa manfaat paling lama 1 (satu) tahun yang antara lain berupa suku cadang (peralatan, telekomunikasi, navigasi dan listrik), alat-alat kantor dan lain-lain.
- 2) Persediaan dicatat sebesar harga perolehannya. Pada tanggal laporan posisi keuangan persediaan disajikan sebesar harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah. Pembebanan biaya pemakaiannya dilakukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

k. Penyertaan

- 1) Penyertaan kurang dari 20% dengan metode biaya (cost method).
- 2) Penyertaan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan metode ekuitas (equity method).
- 3) Penyertaan lebih dari 50% dilakukan konsolidasi laporan keuangan.

l. Properti Investasi

Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan prasarana dan instalasi, yang dikuasai Perusahaan untuk disewakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal. Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan properti investasi.

Selanjutnya, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi. Nilai wajar properti investasi ditentukan berdasarkan acuan harga pasar untuk properti sejenis.

j. Inventories

- 1) *Inventories comprised of goods having useful lives of more than one year, which include: spare parts of telecommunication, navigational equipment, and electrical apparatus, and office supplies.*
- 2) *Inventories are recognized at cost. At the balance sheet date, inventories are presented at cost or realizable value, whichever is lower. The inventory costing method is weighted average.*

k. Investments

- 1) *Investment of less than 20% is presented in cost method.*
- 2) *Investment of 20% or more but less than 50% is presented on equity method.*
- 3) *Investment of more than 50% is consolidated in the financial statements.*

l. Investment Properties

Investment property consists of land, buildings, improvements and installations, which are held by the Group to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business. Investment property is stated at cost including expenditure that is directly attributable to acquisition of the investment property.

Subsequently, it is measured at cost less accumulated depreciation (except for land which is not depreciated) and impairment losses. The carrying amount includes the cost of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met; and excludes the costs of day to day servicing of an investment property. Fair value of the investment property is determined with reference to market value for the same type of property.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="235 262 836 304">I. Properti Investasi (lanjutan)</p> <p data-bbox="235 304 836 682">Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.</p> <p data-bbox="235 682 836 829">Penyusutan bangunan, prasarana dan instalasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset antara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.</p> <p data-bbox="235 829 836 1186">Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.</p> <p data-bbox="235 1186 836 1522">Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.</p> <p data-bbox="235 1522 836 1787">Untuk transfer dari properti investasi ke aset yang digunakan dalam operasi, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika aset yang digunakan Perusahaan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat aset tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya,</p>	<p data-bbox="885 262 1531 304">I. Investment Properties (continued)</p> <p data-bbox="885 304 1531 619"><i>The investment property shall be eliminated from the consolidated statements of financial position on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected when withdrawn. Gains or losses from investment property withdrawals or disposals are recorded in the consolidated statements of comprehensive income when incurred.</i></p> <p data-bbox="885 682 1531 829"><i>Depreciation of buildings, improvements and installations are computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets between four to 20 years.</i></p> <p data-bbox="885 829 1531 1144"><i>Investment property is derecognised (excluded) of financial statement when either it has been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the derecognition or disposal of an investment property are recognised in the Income Statement and Other Comprehensive Income in the year of derecognition or disposal.</i></p> <p data-bbox="885 1186 1531 1501"><i>Transfers to investment property are made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner occupation, commencement of an operating lease to another party or completion of construction or development. Transfers from investment property are made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sale.</i></p> <p data-bbox="885 1522 1531 1787"><i>For a transfer from investment property to an asset used in operations, the Group uses the cost method at the date of change in use. If the asset used by the Group becomes an investment property, the Group account for such asset in accordance with the policy stated under property and equipment up to the date of change in use.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)

m. Aset Tetap

- 1) Aset tetap Perusahaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan.
- 2) Aset tetap yang berasal dari bantuan Pemerintah, kompensasi dari penyewa atau pihak lain dinyatakan sebesar nilai bantuan atau kompensasi ditambah semua pengeluaran yang dapat diidentifikasi langsung dengan Aset tetap tersebut sehingga siap untuk digunakan.
- 3) Pada tanggal laporan posisi keuangan aset tetap disajikan sebesar nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- 4) Kecuali tanah, aset tetap disusutkan berdasarkan metode garis lurus dengan tarif penyusutan yang sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis sejak tanggal aset tersebut siap digunakan sebagai berikut

m. Fixed Assets

- 1) Fixed assets are recognized at costs.
- 2) Fixed assets originating from the Government aid or compensation from tenant are recognized at their value added with all identifiable expenses required to get those assets ready for their intended use.
- 3) At the balance sheet date the fixed assets are presented at their net book value, that is cost less accumulated depreciation.
- 4) Excepting for lands, which are not depreciated, fixed assets are depreciated on straight-line method on their respective useful lives with no residual value, effective of their readiness for intended use :

Golongan	Umur Ekonomi / Useful Life (Tahun / Years)	Group of Assets
- Bangunan lapangan :		<i>Field structures :</i> -
- Bangunan landasan, dam landasan, tetrapode landasan, taxiway, entrance-way dan apron	40	<i>Runways, runway dams, runway tetrapode, taxiways, entrance ways and aprons,</i> -
- Overlay	5 s/d 7	<i>Overlay</i> -
- Khusus untuk selokan air, taman, pagar, dan lain-lain bangunan lapangan	20	<i>Specifically for ditches, gardens, fences and other field structures</i> -
- Bangunan Gedung	40	<i>Buildings</i> -
- Khusus gedung-gedung lain	20	<i>Others building</i> -
- Alat perhubungan udara	10	<i>Navigation equipment</i> -
- Khusus rambu-rambu udara	15	<i>Specifically for flight navigational signs</i> -
- Alat pengangkutan	5 & 10	<i>Vehicles</i> -
- Peralatan kantor	5	<i>Equipments</i> -
- Instalasi listrik	10,15 & 20	<i>Electrical system</i> -
- Instalasi air	5 & 10	<i>Water system</i> -
- Instalasi AC	5 & 10	<i>Air-conditioning system</i> -
- Instalasi telepon	5 & 10	<i>Telephone system</i> -
- Sistem informasi publik	10, 15 & 20	<i>Public information system</i> -
- Peralatan perbengkelan	5	<i>Repair shop system</i> -
- Peralatan mekanik	10 & 15	<i>Mechanical equipment</i> -
- Detektor	5 & 10	<i>Detectors</i> -
- Lain-lain aset tetap	5	<i>Other fixed assets</i> -

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>m. Aset Tetap (lanjutan)</p> <p>5) Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas atau mutu produksi, serta menghemat biaya operasi, suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aset yang bersangkutan.</p> <p>6) Perseroan menetapkan batas minimum pengeluaran untuk pengadaan aset tetap yang dapat dikapitalisasi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (rupiah penuh).</p> <p>7) Penyusutan aset tetap dibebankan setiap bulan sampai berakhirnya umur ekonomis dengan pengakuan awal perolehan aset tetap sebelum atau sama dengan tanggal 15 bulan bersangkutan maka beban penyusutannya dihitung dan diakui sebulan penuh, apabila tanggal perolehannya setelah tanggal 15 bulan bersangkutan maka beban penyusutannya mulai dihitung dan diakui pada bulan berikutnya.</p> <p>8) Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam periode laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengaduannya.</p> <p>9) Pada saat akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan periode penyusutan aset tetap di review dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan penyesuaian sesuai keadaan.</p> <p>10) Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk Biaya pinjaman yang terjadi selama masa Pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.</p>	<p>m. Fixed Assets (continues)</p> <p>5) <i>Routine maintenance and repair are charge to income as incurred. Repair which adds to useful life, increases capacity or production quality, and increase operating economy of the related asset is capitalized and depreciated on the rate of depreciation of the related asset.</i></p> <p>6) <i>Company sets minimum spending on acquisitions that can be capitalized amounting to Rp. 10.000.000 (full rupiah)</i></p> <p>7) <i>The depreciation of fixed assets is calculated each month over their useful lives effective of the date of their recognition; when the asset is recognized before or on the fifteenth of a month the depreciation is calculated and recognized a full month. when the asset is recognized before or on the fifteenth of a month the depreciation is calculated effective of the next month.</i></p> <p>8) <i>An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economics benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the assets (calculated as the defference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is included in the tatement of comprehensive income in the period the asset is derecognized.</i></p> <p>9) <i>The residual value, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted propectively, if appropriate, at each financial period end.</i></p> <p>10) <i>Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property and equipment account when complete and ready to use.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>m. Aset Tetap (lanjutan)</p> <p>Pinjaman yang tidak spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tertentu terhadap jumlah pengeluaran untuk perolehan aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap saldo pinjaman terkait selama periode tersebut, tidak termasuk jumlah pinjaman yang spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu lainnya.</p>	<p>m. Fixed Assets (continues)</p> <p><i>The borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount capitalized is determined by applying a capitalization rate to the expenditures on qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, excluding borrowings directly attributable to financing other qualifying assets.</i></p>
<p>n. Aset Tidak Produktif</p> <p>1) Aset tidak produktif merupakan nilai buku aset tetap dan persediaan peralatan (suku cadang) yang tidak dimanfaatkan dalam menunjang operasional perusahaan.</p> <p>2) Untuk aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan sedang diusulkan kepada Dewan Komisaris atau pemegang saham untuk dihapuskan dibentuk cadangan penurunan nilai dan dibebankan sebagai beban non operasional tahun berjalan.</p>	<p>n. Non productive fixed assets</p> <p>1) <i>Non-productive fixed assets are those assets and inventories of tools and spare parts not used in the Company's operations; they are presented at their net book value.</i></p> <p>2) <i>For un-useable assets, pending the shareholders' or Commissioners' approval for write off, allowance for impairment is made and is charged to current non-operating income.</i></p>
<p>o. Aset tetap dalam proses penyelesaian pengembalian kepada Pemerintah</p> <p>Aset tetap dalam proses penyelesaian pengembalian kepada pemerintah adalah aset tetap yang telah diserahkan sementara oleh PT Angkasa Pura I (Persero) ke instansi pemerintah sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah atas status aset tetap tersebut.</p>	<p>o. Fixed assets in settlement process to be transferred back to the Government</p> <p><i>Fixed asset in settlement process to be transferred back to the Government are fixed assets which had been temporarily handed-over by PT Angkasa Pura I (Persero) to the government institutions until a government regulation is issued for their final status.</i></p>
<p>p. Beban ditangguhkan</p> <p>Beban yang ditangguhkan adalah beban yang telah dikeluarkan pada periode berjalan, akan tetapi tidak dilaporkan seluruhnya sebagai beban pada tahun berjalan karena memberi manfaat bagi periode selanjutnya. Beban ditangguhkan dicatat dengan harga perolehan dan dikurangi dengan amortisasi yang dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat. Nilai akun adalah netto, setelah dikurangi amortisasi.</p>	<p>p. Deferred charges</p> <p><i>Deferred charges are charges incurred during the current year which are made to increase an asset's capacity or to bring them back to initial capacity. Deferred charges is recognized at cost less amortization on straight line method during the useful life. The value in the account is net of amortization.</i></p>
<p>q. Imbalan kerja</p> <p>Imbalan kerja jangka pendek</p> <p>Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.</p>	<p>q. Employee benefits</p> <p>Short-term employee benefits</p> <p><i>The Company recognizes short-term employee benefits liability when services are rendered and the compensation for such services is to be paid within twelve months after rendering such services</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)

Imbalan pascakerja

Sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, Perusahaan diwajibkan memberikan manfaat pasca kerja kepada seluruh karyawan tetapnya. Manfaat yang meliputi uang pemutusan hubungan kerja, penghargaan masa kerja, serta kompensasi tersebut diberikan apabila karyawan mengakhiri masa kerjanya baik karena pensiun maupun meninggal dunia.

Perusahaan mempunyai dua program untuk memenuhi liabilitas di atas, yaitu: (1) Program Dana Pensiun Manfaat Pasti, dan (2) Program Tunjangan Hari Tua (THT). Selain itu perusahaan memberikan Tunjangan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan ketentuan yaitu Tunjangan Perumahan, Penghargaan Pengabdian dan Jaminan Kesehatan kepada pensiunan.

Perusahaan wajib menanggung dan membukukan kekurangan biaya apabila manfaat yang diberikan kedua program tersebut tidak mencukupi melalui pembentukan penyisihan. Penyisihan tersebut telah dibebankan pada periode berjalan.

Beban imbalan kerja dihitung menggunakan metode projected-unit-credit dengan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan dan tingkat kenaikan kompensasi.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial diakui seluruhnya dalam penghasilan komprehensif lain. Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan tersebut untuk bekerja selama periode waktu tertentu.

Biaya bunga dan imbal hasil yang diharapkan atas program pada PSAK No. 24 versi sebelumnya digantikan dengan komponen bunga neto, yang dihitung dengan menghitung tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto pada setiap awal periode pelaporan.

Post-employment benefits

In accordance with the Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003, the Company is required to provide post retirement benefits for the entire permanent employees. The benefits include compensation for job termination and past service pay benefits; those benefits are given on an employee job termination, either because of retirement or death.

The Company has two programs to meet the above liabilities, namely: (1) Pension Defined Benefit Funds Program, and (2) Annuities Program (THT). Moreover the company provides benefits to employees who have fulfilled the requirements of the provisions of that allowance Housing, Service and Choice Health Insurance to pensioners.

The Company is responsible for any shortage in the event the benefits provided by the two programs are not met. In such case the Company is to make an allowance and to be charged to current income.

Pension costs are determined using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensation

All actuarial gains and losses arising from djustment and changes in actuarial assumption are recognized as other comprehensive income. All past service costs are recognized immediately in the profit or loss, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time

The interest cost and expected return on plan assets used in the previous version of PSAK No. 24 are replaced with a net-interest amount, which is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset at the start of each annual reporting period

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 268 527 298">q. Imbalan kerja (lanjutan)</p> <p data-bbox="272 331 836 493">Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.</p> <p data-bbox="272 535 673 564">Program Dana Pensiun Manfaat Pasti</p> <p data-bbox="272 569 836 1123">Program pensiun ini menyediakan manfaat pensiun untuk karyawan dan keluarganya pada saat mencapai usia pensiun dan diberikan bagi Pegawai Perusahaan TMT sebelum 1 Januari 2011. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.13/KP.15.01/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I yang telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan Nomor : KEP-551/NB.1/2015 tanggal 29 September 2015 dan sesuai dengan hasil Valuasi Aktuaria per 1 Januari 2015 dalam rangka Perubahan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I, jumlah iuran adalah sebesar 5% (beban Pegawai) dan 27.64% (beban Perusahaan) dari nilai Penghasilan Dana Pensiun (PhDP).</p> <p data-bbox="272 1165 836 1627">Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Angkasa Pura (DAPENRA), Lembaga keuangan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.39/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999. Iuran untuk program pensiun dibebankan dan dibayar selama masa kerja. Jumlah iuran Perusahaan kepada program pensiun diakui sebagai beban pada saat iuran tersebut dibayar atau terutang. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuaria, dan dampak perubahan asumsi aktuaria bagi karyawan yang masih aktif diakui sebagai beban atau pendapatan selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan tersebut sesuai dengan saran dari aktuaris independen.</p>	<p data-bbox="912 268 1534 525"><i>When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.</i></p> <p data-bbox="958 535 1274 564">Defined Benefits Pension Plan</p> <p data-bbox="958 569 1534 1123"><i>Pension programs provide retirement benefits for employees and their families upon reaching retirement age and are provided for Employees TMT Company prior to January 1, 2011. Based on the Board of Directors of PT. Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.13 / KP.15.01 / 2015 dated February 5, 2015 on the Rules of the Pension Fund of the Pension Fund of Angkasa Pura I, which was approved by the Financial Services Authority through a decision of the Commissioner Financial Services Authority Number: KEP 551 / NB.1 / 2015 dated September 29, 2015 and in accordance with the results of Actuarial Valuation per January 1, 2015 in order to change the pension Fund of the pension Fund of Angkasa Pura I, the amount of contribution is 5% (expenses Employees) and 27.64% (by the Company) of the value of Retirement Income Fund (PhDP).</i></p> <p data-bbox="958 1165 1534 1654"><i>The pension program is managed by the Pension Fund Angkasa Pura (DAPENRA), financial institutions that have been approved by the Ministry of Finance Decree No. KEP.39 / KM.17 / 1999 November 15, 1999. The contribution to the pension plan are charged and paid during the work period. The amount of the Company's contribution to the pension plan are recognized as an expense at the time the contribution is paid or payable. Current service cost is recognized as an expense in the current period. Past service cost, actuarial correction, and the effect of changes in actuarial assumptions for active employees is recognized as an expense or income over the average remaining average these employees in accordance with the advice of an independent actuary.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 268 527 298">q. Imbalan kerja (lanjutan)</p> <p data-bbox="272 323 649 352">Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)</p> <p data-bbox="272 359 836 716">Berdasarkan keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor 96/KP.15.01/2012 tanggal 23 Juli 2012 berkaitan dengan keputusan Direksi Nomor Kep.130.KP.15.01.2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Peraturan Program Pensiun Iuran Pasti Bagi Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) Yang Masuk Terhitung Mulai 1 Januari 2011. Peraturan tersebut mengatur tentang pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) yang telah diangkat sebagai calon pegawai mulai tanggal 1 Januari 2011 diikutkan kepesertaan dana pensiun pada Program Pensiun Iuran Pasti.</p> <p data-bbox="272 751 836 877">Besarnya iuran pemberi kerja adalah maksimal 25% dari Paket Gaji Peserta, sedang porsi karyawan yang dipotong dari peserta adalah sebesar 5% dari Paket Gaji Peserta.</p> <p data-bbox="272 890 836 1047">Program pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Angkasa Pura (DAPENRA), Lembaga keuangan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.39/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999.</p> <p data-bbox="272 1064 412 1094">Program THT</p> <p data-bbox="272 1100 836 1623">Program THT menyediakan manfaat pembayaran sekaligus dengan ketentuan nilai iuran adalah sebesar 5% (beban Pegawai Perusahaan), 3% (beban Pegawai Diperbantukan), 1% (beban Pegawai Ditugaskan) dari nilai Penghasilan Dasar Tunjangan Hari Tua (PhDTHT) dan iuran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibayarkan secara sekaligus pada awal tahun berjalan. Iuran untuk program THT dibebankan dan dibayar selama masa kerja berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep.115/KP.10.22/2015 Tentang Pedoman Pemberian Program Tunjangan Hari Tua Pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero). Jumlah iuran Perusahaan kepada program THT diakui sebagai beban pada saat iuran tersebut dibayar atau terutang.</p> <p data-bbox="272 1656 836 1782">Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuarial, dan dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan yang masih aktif diakui sekaligus.</p>	<p data-bbox="911 268 1442 298">q. Employee benefits (continues)</p> <p data-bbox="956 323 1396 352">Defined Contribution Pension Plan (PPIP)</p> <p data-bbox="956 359 1529 716">Based on the decision of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. 96 / KP.15.01 / 2012 dated July 23, 2012 relating to the Board's decision Kep.130.KP.15.01.2012 Number 22 October 2012 on the Regulation of Defined Contribution Pension Plan For Employees PT Angkasa Pura I (Persero) which Entrance Starting From January 1, 2011. The regulation of employees of PT Angkasa Pura I (Persero) that have been raised as a potential employee starting on January 1, 2011 included the participation of pension funds in defined contribution pension plan.</p> <p data-bbox="956 751 1529 848">The amount of employer contribution is a maximum of 25% of salary, is being withheld from the employee portion of participants is 5% of the participants.</p> <p data-bbox="956 890 1529 1047">The pension program is managed by the Dana Pensiun Angkasa Pura (DAPENRA), financial institution that has been approved by the Decree of the Minister of Finance No. KEP.39 / KM.17 / 1999 dated 15 November 1999.</p> <p data-bbox="956 1064 1344 1094">Old Age Lumpsum Benefits Program</p> <p data-bbox="956 1100 1529 1623">THT program provides benefit payments once the determination of value contribution is 5% (expenses Employee Company), 3% (expense Employees seconded), 1% (load Employees Assigned) of the basic income Annuities (PhDTHT) and the Company's contribution which has been approved by the General Meeting of Shareholders (AGM) has been paid in a lump sum at the beginning of the current year. The contribution to the program THT charged and paid during the period of employment by the Board of Directors Decision No. Kep.115 / KP.10.22 / 2015 on Guidelines for Granting Annuities Program Officer PT. Angkasa Pura I (Persero). The amount of the Company's contribution to the program THT recognized as an expense at the time the contribution is paid or payable.</p> <p data-bbox="956 1656 1529 1782">Current service cost is recognized as an expense in the current period. Past service cost, actuarial correction, and the effect of changes in actuarial assumptions for active employees are recognized at once.</p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 262 527 294">q. Imbalan kerja (lanjutan)</p> <p data-bbox="272 315 836 745">Penyelenggaraan program tunjangan hari tua diatur dalam Keputusan Bersama Direksi Perum Angkasa Pura I dan Perum Angkasa Pura II Nomor KEP.305/KP.30.7.1/1988 dan KEP.165A/PAP.I/X/1988 tanggal 1 Oktober 1988 jo Perjanjian Kerja Bersama Periode 2003-2005 antara PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan Serikat Pekerja P. (Persero) Angkasa Pura I No. SP.06/HK.10/2003-DU, No. SP.AP.I.01/PKB/2003 yang selanjutnya terhitung tanggal 6 Mei 2003 dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian nomor 2 tahun 2003 dan perubahan-perubahannya.</p> <p data-bbox="272 798 836 1029">Jumlah iuran yang ditanggung karyawan adalah 5,00% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan perusahaan, dan yang ditanggung Perusahaan 37,74%. Iuran untuk program THT dibebankan dan dibayar selama masa kerja. Jumlah iuran Perusahaan kepada program THT diakui sebagai beban pada saat iuran tersebut dibayar atau terutang.</p> <p data-bbox="272 1060 836 1428">Program THT menyediakan manfaat pembayaran sekaligus yang diatur dalam Keputusan Bersama Direksi Perum Angkasa Pura I dan Perum Angkasa Pura II Nomor KEP.305/KP.30.7.1/1988 dan KEP.165A/PAP.I/X/1998 tanggal 1 Oktober 1998 jo Perjanjian Kerja Bersama antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I dan Serikat Pekerja Angkasa Pura I priode 2010 - 2012 dengan pemjajian No.SP.91/ HK.06/2010-DU, No. 099/DPP-AKA/X/2010, No SP. AP.I.01/ PKB/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.</p> <p data-bbox="272 1470 836 1801">Program THT tersebut terhitung tanggal 6 Mei 2003 dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian nomor 2 tahun 2003 dan diubah terakhir dengan akta Notaris H. Yunardi, S.H., Nomor 17 tanggal 14 Februari 2006 sebagaimana telah diperbaiki dengan akta notaris yang sama nomor 7 tanggal 9 Maret 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2006.</p>	<p data-bbox="917 262 1274 294">q. Employee benefits (continues)</p> <p data-bbox="958 315 1529 745"><i>Implementation of the old age lumpsum benefit program stipulated in the Joint Decree of Directors Perum Angkasa Pura I and Angkasa Pura II Perum No. KEP.305 / KP.30.7.1 / 1988 and KEP.165A / PAP.I / X / 1988 dated October 1, 1988 in conjunction with the Employment Agreement joint period 2003-2005 between PT. (Persero) Angkasa Pura I with Unions P. (Persero) Angkasa Pura I # SP.06 / HK.10 / 2003-DU, No. SP.AP.I.01 / PKB / 2003, hereinafter commencing on May 6, 2003 Employee Welfare Foundation is managed by Angkasa Pura I (YAKKAP I) established pursuant to the Deed of Establishment No. 2 in 2003 and amendments.</i></p> <p data-bbox="958 798 1529 997"><i>The contribution to the program payable by the employees is 5,00% of their basic salary plus family allowance; whereas that payable by the Company is 37,74%. The Company's contribution to the program is recognized as expense when it is paid, or becomes payable.</i></p> <p data-bbox="958 1060 1529 1428"><i>The old age lumpsum benefits program provides a one-time-whole payment as specified in the common decisions of the Managements of the Perum Angkasa Pura I and Perum Angkasa Pura II in their respective letters No. KEP.305/KP.30.7.1/1988 and KEP.165A/PAP.I/X/1998 dated October 1, 1998 and in reference to the Mutual Agreement for the period 2010 - 2012 between the Company and the Labor Union No. SP.91/HK.062010-DU; No.099/DPP/AKA/X/2010 and SP.AP.I.01/PKB/2010 dated October 15, 2010.</i></p> <p data-bbox="958 1470 1529 1774"><i>Effective Mei 6, 2003 the old age lumpsum benefit program managed by Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) in accordance with the article of association No.2 of 2003 and last amended by the notarial deed No. 17 dated February 14, 2006 of the notary H. Yunardi, SH. Subsequent amendment was made by the same notary with his deed No. 7 dated March 9, 2006, published in the state gazette No 68 dated August 25, 2006.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="240 268 527 298">q. Imbalan kerja (lanjutan)</p> <p data-bbox="272 331 665 361">Program Jaminan Kesehatan Pensiun</p> <p data-bbox="272 369 836 823">Program jaminan kesehatan pensiun merupakan program pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai yang telah memasuki usia pensiun normal sesuai ketentuan yang berlaku di PT Angkasa Pura I (Persero), dan/atau pegawai yang diberhentikan karena meninggal dunia/cacat/sakit sebelum mencapai usia pensiun dan Mantan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero), kecuali Pegawai yang menerima manfaat pensiun ditunda. Penyelenggaraan program jaminan kesehatan pensiun diatur dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.177/KP.10.41/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Program Jaminan Kesehatan Pensiun dan Mantan Direksi, berupa fasilitas pemeliharaan kesehatan sebagai berikut:</p> <ol data-bbox="272 877 836 1331" style="list-style-type: none"><li data-bbox="272 877 836 995">1. Fasilitas rawat jalan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.<li data-bbox="272 1008 836 1125">2. Rawat inap dengan akomodasi ruang perawatan kelas I dari Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.<li data-bbox="272 1171 836 1331">3. Tambahan bantuan biaya rawat inap yang dilaksanakan pada rumah sakit yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk pensiunan dan anggota keluarga yang ditanggung sesuai ketentuan yang berlaku. <p data-bbox="272 1365 836 1686">Pendanaan program jaminan kesehatan pensiun berasal dari iuran Perusahaan berdasarkan perhitungan aktuarial, yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sumber lain yang telah dikelola oleh YAKKAP I, iuran tambahan Pegawai aktif sebesar Rp 100.000 (rupiah penuh) yang dipotong setiap bulan dari penghasilan bulanan Pegawai dan iuran tambahan Direksi sebesar Rp 500.000 (rupiah penuh) yang dipotong dari penghasilan bulanan Direksi.</p>	<p data-bbox="912 268 1279 298">q. Employee benefits (continues)</p> <p data-bbox="961 331 1328 361">Pension Health Insurance Program</p> <p data-bbox="961 369 1541 823">Health insurance scheme pension is a health care program for the employee who has entered the normal retirement age according to applicable regulations in PT Angkasa Pura I (Persero), and / or employees dismissed for death / disability / illness before reaching retirement age and former Directors of PT Angkasa Pura I (Persero), unless the employee who received the deferred retirement benefits. Implementation retirement health insurance program stipulated in the Decree of Directors of PT Angkasa Pura I (Persero) No. KEP.177 / KP.10.41 / 2015 dated December 31, 2015 on Pension Health Insurance Program and former Board of Directors, in the form of health care facilities as follows:</p> <ol data-bbox="961 877 1541 1331" style="list-style-type: none"><li data-bbox="961 877 1541 970">1 Outpatient facilities of the National Health Insurance Program organized by the Social Security Agency (BPJS) Health.<li data-bbox="961 1008 1541 1100">2 Inpatient treatment room accommodation class I of the National Health Insurance Program organized by the Social Security Agency (BPJS) Health.<li data-bbox="961 1171 1541 1331">3 Additional assistance hospitalization costs were carried out at the hospital is provided by the Social Security Agency (BPJS) Health for retirees and family members are covered according to applicable regulations. <p data-bbox="961 1365 1541 1686">Funding health insurance program retirement comes from dues Company based on actuarial calculations, which have been approved by the General Meeting of Shareholders (AGM), another source that has been managed by YAKKAP I, Dues additional clerks active Rp 100,000 (full Rupiah) deducted each month from Employee monthly income and additional contributions of Directors amounting to Rp 500,000 (full rupiah) are deducted from the monthly income of Directors.</p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>r. Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya (BPYBDS) BPYBDS dicatat berdasarkan harga perolehan. BPYBDS merupakan eks proyek bantuan pemerintah yang telah diserahterimakan kepada Perusahaan tetapi belum ditentukan statusnya oleh pemerintah. Apabila bantuan tersebut telah ditetapkan serta ditentukan statusnya melalui Peraturan Pemerintah, maka bantuan pemerintah tersebut dipindahkan pengelompokannya sesuai dengan keputusan tersebut.</p> <p>s. Penyertaan modal pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah merupakan tambahan modal dari pemerintah yang berasal dari proyek-proyek pemerintah yang statusnya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>t. Pendapatan dan beban</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendapatan dari penjualan jasa kebandarudaraan diakui sesuai dengan penyelesaian penyerahan jasa dan dibuatkan nota tagihannya.2) Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan akrual.3) Beban diakui dengan menggunakan akrual.4) Perusahaan menerapkan PSAK 23 (revisi 2010) tentang Pendapatan. PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima.	<p>r. Government aid pending determination in status <i>BPYBDS are recorded at cost. The BPYBDS originated from Government assisted projects which were handed over to the Company but the status of which were not yet defined by the Government, Once the status the projects are clarified through a government regulation, the BPYBDS will be reclassified accordingly.</i></p> <p>s. The government capital investment <i>The PMP constitutes an additional capital investment from the Government originating from the Government's projects, the status of which has been determined through a government regulation.</i></p> <p>t. Income and expenses</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Income from sales of airport services is recognized upon completion of the services and their billings.</i>2) <i>Income from rents, interest and other sources is recognized on accrual method.</i>3) <i>Expenses are recognized on accrual method.</i>4) <i>The company adopted SFAS 23 (revised 2010) Revenue. This revised SFAS identifies the circumstances in which the criteria on revenue recognition will be met and, therefore, revenue may be recognized, and prescribes the accounting treatment of revenue arising from certain types of transactions and events, and also provides practical guidance on the application of the criteria on revenue recognition. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow the company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received.</i>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>u. Perpajakan</p> <p>1) Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat instrumen keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya telah diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (liability) Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.</p> <p>2) Pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba kena pajak yaitu laba komersial yang disesuaikan dengan perbedaan temporer dan permanen.</p> <p>3) Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.</p> <p>4) Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.</p> <p>5. Pajak Final Mengacu pada PSAK 46 (revisi 2013), Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah, penghasilan sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi dan lainnya sebagai bagian dari pos Beban Operasional.</p>	<p>u. Taxation</p> <p>1) <i>All temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities and their basis for tax are recognized as deferred tax on liability method. The deferred tax is calculated on the basis of current tax rates.</i></p> <p>2) <i>Income tax is calculated based on the taxable income that is commercial profit adjusted by temporary and permanent differences.</i></p> <p>3) <i>Fiscal loss allowable for compensation is recognized as deferred tax asset provided future fiscal profit is sufficient for compensation.</i></p> <p>4) <i>Tax adjustments are recognized when the amount of tax payable has been determined by the tax authority; or in the event of submission of a tax appeal, at the time the appeal is resolved.</i></p> <p>5) <i>Final taxes</i> <i>Referring to PSAK 46 (revised 2013), final tax as no longer governed by PSAK 46. Therefore the company decide to present all of final tax arising from sales land, land and building rent revenue, construction and others as separate on Operational Expenses.</i></p>
<p>v. Kepentingan Non-Pengendali</p> <p>Bagian kepemilikan dari pemegang saham non-pengendali atas ekuitas dan Entitas Anak disajikan sebagai "Kepentingan Non- Pengendali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Apabila akumulasi kerugian yang dibebankan kepada kepentingan Non-Pengendali melebihi bagian pemegang saham non-pengendali dalam ekuitas Entitas Anak, kelebihan dari beban tersebut akan dibebankan kepada pemegang saham mayoritas dan tidak dicatat sebagai aset, kecuali apabila pemegang saham non-pengendali mempunyai liabilitas yang mengikat untuk menanggung beban tersebut dan pemegang saham non-pengendali mempunyai kemampuan untuk menanggung beban tersebut.</p>	<p>v. Non Controlling Interests</p> <p><i>The interest of minority shareholders in the equity of Subsidiaries is presented as "Non Controlling Interest" in the consolidated statement of financial position. "Then cumulative loss attributable to Non Controlling interest exceeds the Non Controlling interest in the equity of Subsidiaries, the excess of expenses will be borne by the majority shareholders and is not recorded as an asset, unless the minority shareholders have a binding obligation to bear the expenses and the minority shareholders have the ability to bear the expenses.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p>u. Perpajakan (lanjutan)</p> <p>Keuntungan yang diperoleh Entitas Anak setelahnya harus dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham mayoritas sampai dengan sama dengan beban kepentingan non-pengendali yang ditanggung oleh pemegang saham mayoritas.</p> <p>w. Sewa</p> <p>Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa, atau perjanjian yang mengandung sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.</p> <p>Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan Kelompok Usaha (Lessee) mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan, atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.</p> <p>Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.</p> <p>Aset sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri</p> <p>Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan dasar garis lurus (straight-line method) selama masa sewa.</p> <p>Laba atau rugi yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa kembali (sale-and-leaseback) yang merupakan sewa pembiayaan, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa</p>	<p>u. Taxation (continued)</p> <p><i>Income generated by the Subsidiaries in subsequent period shall be first allocated to the majority shareholders until being equal to the expenses of the non controlling interests borne by the majority shareholders.</i></p> <p>w. Lease</p> <p><i>The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset.</i></p> <p><i>A lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset is classified as a finance lease. Under a finance lease, the Group (lessee) recognizes an asset and liability in the consolidated statement of financial position at the commencement of the lease term at an amount equal to the fair value of the finance lease property or, if lower, the present value of the minimum lease payments.</i></p> <p><i>The finance charges are allocated to each period during the lease term, so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability and recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.</i></p> <p><i>A finance lease asset is depreciated consistently using the same method used with that for depreciable assets that are directly owned</i></p> <p><i>Leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the lease term.</i></p> <p><i>Gain or loss on sale-and-leaseback transactions resulting from a finance lease, is deferred and amortized over the lease term.</i></p>

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)

x. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pinjaman dikapitalisasi apabila dapat secara langsung dikaitkan dengan perolehan, pembangunan atau produksi dari aset tertentu (qualifying assets). Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai ketika aktivitas untuk mempersiapkan pembangunan aset untuk dipergunakan atau dijual sesuai tujuannya sedang berlangsung dan pengeluaran serta biaya pinjaman sedang terjadi. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan aset tersebut siap digunakan sesuai tujuannya. apabila nilai tercatat dari aset tersebut melebihi jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan, maka rugi penurunan nilai diakui.

y Biaya emisi penerbitan obligasi dan sukuk ijarah

Utang obligasi (tidak termasuk sukuk ijarah) pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi sukuk ijarah diamortisasi menggunakan metode garis lurus sepanjang umur kontrak dan liabilitasnya.

z. Informasi Segmen Operasi

Informasi segmen usaha yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional difokuskan pada aktivitas bisnis perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan kategori jenis usaha perusahaan yang dibedakan dalam kelompok usaha utama dan diluar kelompok usaha utama.

aa. Laba per Saham

Laba per saham dasar, dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

x. Borrowing Cost

Borrowing costs are generally expensed as incurred. Borrowing costs are capitalized if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the asset for its intended use or sale are in progress and expenditures and borrowing costs are being incurred. Borrowing cost are capitalized until the asset are ready for their intended use. If the resulting carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognized.

y Bonds payable and sukuk ijarah issuance costs

Bonds payable (excluding sukuk ijarah) are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective yield basis

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognised over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Transaction costs for sukuk ijarah are amortised using the straight line method over the contractual life of the liability.

z. Segment Information

Segment Information reported to the chief operating decision maker is specifically on the company's business activities that are classified based on category by category type of business that is distinguished in the main business groups and outside.

aa. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the year.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)

bb. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Estimasi dan asumsi ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian :

- Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 telah dipenuhi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

bb. Critical accounting judgments, estimates and assumptions.

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

In the process of applying the Company and its subsidiaries' accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements :

- Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for grouped in accordance with the Company and its Subsidiaries' accounting policies.

5 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	5. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continues)
<p data-bbox="211 262 836 325">bb. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting. (lanjutan)</p> <ul data-bbox="259 357 836 1738" style="list-style-type: none"><li data-bbox="259 357 836 651">- Pajak Penghasilan Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi.<li data-bbox="259 661 836 1270">- Imbalan Kerja Nilai kini dari kewajiban imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya untuk imbalan pensiun termasuk diantaranya tingkat kenaikan gaji di masa datang dan tingkat bunga. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun. Perusahaan menentukan tingkat kenaikan gaji di masa datang yang sesuai pada setiap akhir periode pelaporan. Dalam menentukan tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.<li data-bbox="259 1281 836 1738">- Taksiran umur ekonomis aset tetap Masa manfaat setiap aset tetap ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.	<p data-bbox="893 262 1536 325">bb. Critical accounting judgments, estimates and assumptions.(continued)</p> <ul data-bbox="941 357 1536 1738" style="list-style-type: none"><li data-bbox="941 357 1536 619">- <i>Income tax</i> <i>Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognize liabilities for expected tax issues based on estimates.</i><li data-bbox="941 651 1536 1207">- <i>Employee Benefits</i> <i>The present value of the defined benefit obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the cost for retirement benefits include future salary increment rate and interest rate. Any changes in these assumptions will affect the carrying amount of retirement benefits obligations.</i> <i>The Company determines the future salary increment rate at the end of each reporting period. In determining the future salary increment rate, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans</i><li data-bbox="941 1281 1536 1738">- <i>Estimated Useful Lives of Fixed Assets</i> <i>The useful life of fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. A change in the estimated useful life of fixed asset would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.</i>

6. KAS DAN SETARA KAS	6. CASH AND CASH EQUIVALENTS		
	31-12-2016	31-12-2015	
Terdiri dari :			<i>Detail cash and cash equivalent :</i>
Kas	1.142.466	2.091.703	<i>Cash</i>
Bank	2.360.121.114	710.121.420	<i>Banks</i>
Deposito	<u>2.534.951.416</u>	<u>1.034.059.723</u>	<i>Time deposit</i>
Jumlah	<u>4.896.214.996</u>	<u>1.746.272.845</u>	<i>Total</i>
Kas			<i>Cash</i>
Rupiah	1.140.567	2.087.930	<i>Rupiah</i>
US Dollar	<u>1.899</u>	<u>3.773</u>	<i>US Dollar</i>
Sub Jumlah	<u>1.142.466</u>	<u>2.091.703</u>	<i>Sub total</i>
Bank			<i>Banks :</i>
Dalam Rupiah			<i>In Rupiahs</i>
Pihak Berelasi :			<i>Related party :</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero),	1.616.668.111	100.054.688	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.</i>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	305.860.527	69.046.487	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero),	93.385.628	104.410.233	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),	21.982.143	9.675.572	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.</i>
PT Bank Pembangunan Daerah			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa</i>
Jawa Timur	3.277.182	4.157.272	<i>Timur</i>
PT Bank Pembangunan Daerah			<i>PT Bank Pembangunan Daerah</i>
Sumatera Utara	428.878	249.305	<i>Sumatera Utara</i>
PT Bank Pembangunan Daerah			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa</i>
Jawa Tengah	172.190	169.570	<i>Tengah</i>
PT Bank Pembangunan Daerah			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jabar</i>
Jabar dan Banten	696	816	<i>dan Banten</i>
Sub Jumlah Pihak Berelasi	<u>2.041.775.355</u>	<u>287.763.943</u>	<i>Sub total related parties</i>
Pihak Ketiga :			<i>Third Parties :</i>
PT Bank Permata, Tbk.	107.324.484	102.704.265	<i>PT Bank Permata, Tbk.</i>
PT Bank BRI Syariah, Tbk.	75.325.904	-	<i>PT Bank BRI Syariah, Tbk.</i>
PT Bank Sinar Mas, Tbk.	20.048.691	-	<i>PT Bank Sinar Mas, Tbk.</i>
PT Bank Bukopin, Tbk.	15.804.668	19.383.827	<i>PT Bank Bukopin, Tbk.</i>
PT Bank Central Asia, Tbk.	13.597.956	4.117.291	<i>PT Bank Central Asia, Tbk.</i>
PT Bank Syariah Mandiri, Tbk.	5.403.352	7.927.632	<i>PT Bank Syariah Mandiri, Tbk.</i>
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	679.893	708.202	<i>PT Bank CIMB Niaga, Tbk.</i>
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	374.012	694.348	<i>PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.</i>
PT Bank Mega, Tbk.	377.480	46.316	<i>PT Bank Mega, Tbk.</i>
Bank Syariah Victoria	15.071	81	<i>Bank Syariah Victoria</i>
PT Bank Panin, Tbk.	3.974	-	<i>PT Bank Panin, Tbk.</i>
PT Bank International Indonesia, Tbk.	2.886	4.370	<i>PT Bank International Indonesia, Tbk.</i>
Bank Danamon	<u>1.286</u>	<u>2.281</u>	<i>Bank Danamon</i>
Sub Jumlah Pihak Ketiga	<u>238.959.657</u>	<u>135.588.613</u>	<i>Sub total third parties</i>
Jumlah Dalam Rupiah	<u>2.280.735.012</u>	<u>423.352.556</u>	<i>Total in rupiah</i>
Dalam mata uang asing			<i>In Foreign Currencies :</i>
Pihak Berelasi			<i>Related parties :</i>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.			<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.</i>
(USD 3,545,963.92; USD 15,205,518.29)	47.643.571	209.760.125	<i>(USD 3,545,963.92; USD 15,205,518.29)</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
(USD 1,128,120.52; USD 3,475,726.67)	15.157.427	47.947.649	<i>(USD 1,128,120.52; USD 3,475,726.67)</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.			<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.</i>
(USD 231,386.06; USD 1,229,158.72)	<u>3.108.903</u>	<u>16.956.245</u>	<i>(USD 231,386.06; USD 1,229,158.72)</i>
Sub Jumlah Pihak Berelasi	<u>65.909.901</u>	<u>274.664.019</u>	<i>Sub total related parties</i>

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)			6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
Dalam mata uang asing :			<i>In Foreign Currencies :</i>
Pihak Ketiga :			<i>Third parties :</i>
PT Bank Permata, Tbk. (USD 359,983.35 dan USD 307,940.71)	4.836.736	4.248.042	<i>PT Bank Permata, Tbk. (USD 359,983.35 and USD 307,940.71)</i>
PT Bank Muamalat (USD 219.975.60 dan 108,627.65; 0)	2.955.592	1.498.518	<i>PT Bank Muamalat (USD 219.975,60; 108,627.65; 0)</i>
Citibank N.A. (USD 213,909.84; USD 213,911.73;	2.874.082	2.950.913	<i>Citibank N.A. (USD 213,910.84; USD 213,911.73)</i>
PT Bank Central Asia, Tbk. (USD 105,751.80 dan USD 143,730.50	1.420.881	1.982.762	<i>PT Bank Central Asia, Tbk. (USD 105,751.80 dan USD 143,730.50</i>
PT Bank Cimb Niaga Tbk. (USD 103,372.31; USD 103,270.00;)	1.388.910	1.424.610	<i>PT Bank Cimb Niaga Tbk. (USD 103,372.31; USD 103,270.00;)</i>
Sub Jumlah Pihak Ketiga	<u>13.476.201</u>	<u>12.104.845</u>	<i>Sub total third parties</i>
Jumlah Dalam Mata Uang asing	<u>79.386.102</u>	<u>286.768.864</u>	<i>Total in foreign currencies</i>
Jumlah Bank	<u>2.360.121.114</u>	<u>710.121.420</u>	<i>Total banks</i>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Deposito			<i>Time deposit</i>
Dalam Rupiah			<i>In rupiah</i>
Pihak Berelasi :			<i>Related parties :</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	92.831.145	189.000.000	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	294.000.000	154.885.844	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	290.000.000	184.000.000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	350.600.000	50.600.000	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.600.000	2.800.000	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	195.000.000	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
Sub Jumlah Pihak Berelasi	<u>1.224.031.145</u>	<u>581.285.844</u>	<i>Sub total related parties</i>
Pihak Ketiga :			<i>Third parties :</i>
PT Bank Sinar Mas	30.000.000	-	<i>PT Bank Sinar Mas</i>
PT Bank Mega, Tbk.	110.400.000	5.400.000	<i>PT Bank Mega, Tbk.</i>
PT Bank Bukopin, Tbk.	277.009.271	75.607.728	<i>PT Bank Bukopin, Tbk.</i>
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	190.900.000	87.400.000	<i>PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.</i>
PT Bank Permata, Tbk.	-	100.000.000	<i>PT Bank Permata, Tbk.</i>
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	25.000.000	-	<i>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional</i>
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	-	5.031.151	<i>PT Bank CIMB Niaga, Tbk.</i>
Pihak ketiga lainnya	66.000.000	-	<i>Others</i>
Sub total pihak ketiga	<u>699.309.271</u>	<u>273.438.879</u>	<i>Sub total third parties</i>
Jumlah Dalam rupiah	<u>1.923.340.416</u>	<u>854.724.723</u>	<i>Total in rupiah</i>
Dalam mata uang asing			<i>In foreign currencies</i>
Pihak Berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (USD 2,972,089.91)	39.933.000	-	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (USD 2,972,089.91)</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (USD 990,696.64)	13.311.000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (USD 990,696.64)</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat / Banten (USD 8,916,269.72)	119.799.000	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat / Banten (USD 8,916,269.72)</i>
Sub Jumlah Pihak Berelasi	<u>173.043.000</u>	<u>-</u>	<i>Sub total related parties</i>

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Pihak Ketiga / <i>Third parties</i>			Pihak Ketiga / <i>Third parties</i>
PT Bank Permata, Tbk.			PT Bank Permata, Tbk.
(USD 5,310,509.08 : USD 5,696,906.42)	71.352.000	78.588.824	(USD 5,310,509.08 : USD 5,696,906.42)
Bank KEB Hana (USD 2,906,445.37)	39.051.000	-	Bank KEB Hana (USD 2,906,445.37)
PT Bank Bukopin (USD 5,944,179.82)	79.866.000	-	PT Bank Bukopin (USD 5,944,179.82)
PT Bank Mega (USD 8,700,282.82)	116.897.000	-	PT Bank Mega (USD 8,700,282.82)
PT Bank Muamalat Tbk.			PT Bank Muamalat Tbk.
(USD 9,779,845.19 dan			(USD 9,779,845.19 dan
USD7,303,093.58)	131.402.000	100.746.176	USD7,303,093.58)
Sub Jumlah Pihak Ketiga	438.568.000	179.335.000	Sub total third parties
Jumlah deposito dalam mata uang asing	611.611.000	179.335.000	Total deposit in foreign currencies
Jumlah deposito	2.534.951.416	1.034.059.723	Total deposit
Jumlah kas dan setara kas	4.896.214.996	1.746.272.845	Total cash and cash equivalent
	31-12-2016	31-12-2015	
Deposito Berjangka - Rupiah	5,20% - 9,3%	5,20% - 10,0%	Time deposit - rupiahs
Deposito Berjangka - Dollar AS	1,5% - 2%	1,00% - 2,5%	Time deposit - US Dollar

7. INVESTASI JANGKA PENDEK

7. SHORT-TERM INVESTMENTS

	31-12-2016	31-12-2015	
a. Rincian investasi			<i>Detail of investments</i>
Deposito berjangka > 3bulan /	1.407.358	257.358	<i>Time Deposit > 3 months</i>
Obligasi - tersedia untuk dijual	45.346.417	15.730.937	<i>Bonds - Available for sale</i>
Unit Penyertaan reksadana	248.486.873	200.458.488	<i>Unit of Investment in mutual fund</i>
Jumlah	295.240.648	216.446.783	<i>Total</i>
b. Deposito berjangka	31 Desember 2016	31 Desember 2015	<i>Time deposit</i> b.
	<i>December 31, 2016</i>	<i>December 31, 2015</i>	
	Nilai Nominal /	Nilai Tercatat /	Nilai Nominal /
	<i>Nominal Value</i>	<i>Carrying Value</i>	<i>Nominal Value</i>
			<i>Carrying Value</i>
Rupiah :			Rupiahs :
Pihak berelasi			Related party
- PT BNI (Persero) Tbk.	157.358	157.358	157.358
Pihak ketiga :			Third party
- PT Bank Syariah Mandiri	1.250.000	1.250.000	100.000
	1.407.358	1.407.358	257.358
Dimiliki hingga jatuh tempo			<i>Held to maturity -</i>
(setelah dikurangi dengan			<i>(net of unamortized -</i>
premi/diskonto yang belum			<i>premium / discount)</i>
diamortisasi)			
Obligasi :			Bonds :
Pihak Berelasi:			<i>Related Parties</i>
FR0028 (2005), 10%	30.000.000	29.961.649	-
PLN (USD) 5,5%, 2021, AFS	12.440.000	15.384.768	12.440.000
Jumlah	42.440.000	45.346.417	12.440.000
			15.730.937
			<i>Total</i>

7. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

7. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Reksadana (Rupiah)					Reksadana (Rupiah)
Tersedia Untuk Dijual					Available for sale
Pihak Berelasi:					Related parties :
RDPT Danareksa -					RDPT Danareksa -
Dana Strategis	50.000.000	50.173.204	50.000.000	50.173.204	Dana Strategis
Pihak Ketiga					Third Parties:
Trim Kapital Plus	20.000.000	24.606.868	20.000.000	22.064.430	Trim Kapital Plus
Panin Dana Prima	10.000.000	15.335.504	10.000.000	13.652.040	Panin Dana Prima
Panin Dana Maksima	19.975.062	26.974.509	19.975.062	24.005.622	Panin Dana Maksima
Panin Dana Unggulan	10.000.000	12.748.921	10.000.000	10.837.860	Panin Dana Unggulan
Panin Dana Bersama Plus	20.000.000	24.527.609	20.000.000	22.833.878	Panin Dana Bersama Plus
Syailendra Equity	10.000.000	11.810.017	10.000.000	10.398.641	Syailendra Equity
Danamas Stabil	26.000.000	37.425.889	26.000.000	34.907.713	Danamas Stabil
Simas Satu	10.005.130	12.984.352	10.005.130	11.585.100	Simas Satu
Terproteksi Simas 4	11.900.000	11.900.000	-	-	Terproteksi Simas 4
Trimegah Kas Syariah	10.000.000	10.000.000	-	-	Trimegah Kas Syariah
Simas Gemilang	10.000.000	10.000.000	-	-	Simas Gemilang
	<u>207.880.192</u>	<u>248.486.873</u>	<u>175.980.192</u>	<u>200.458.488</u>	
Jumlah	<u>251.727.550</u>	<u>295.240.648</u>	<u>188.677.550</u>	<u>216.446.783</u>	Total

c. Berdasarkan jatuh tempo	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	c. Based on maturity
Kurang dari 1 tahun	279.855.880	200.715.846	Less than 1 year
1 - 5 tahun	15.384.768	15.730.937	1 - 5 years
	<u>295.240.648</u>	<u>216.446.783</u>	

d. Tingkat suku bunga	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	d. Interest rate
Rupiah			Rupiahs :
Deposito	7,00% - 8,50%	7,00% - 8,50%	Deposit
Obligasi	9,50%	9,50%	Obligation
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Obligasi	5,50%	5,50%	Obligation

e. Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan yang tersedia untuk dijual	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	e. Unrealized gains from financial assets available for sale
Nilai wajar pada awal periode	200.458.488	292.430.892	Fair value at beginning
Penambahan nilai investasi	33.900.000		Additional investments
Pengurangan nilai investasi	-	(70.956.000)	Disposal investments
Tersedia untuk dijual	234.358.488	221.474.892	Available for sale
Nilai wajar pada akhir periode	248.486.873	200.458.488	Fair value end year
Diakui sebagai laba rugi tahun berjalan	(14.128.385)	(21.016.404)	Recognized as income for the year
Keuntungan belum direalisasi yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	<u>16.128.386</u>	<u>(20.815.886)</u>	Unrealized gain are recognized as other comprehensive income

Manajemen berkeyakinan bahwa investasi dalam efek-efek tidak terdapat adanya indikasi penurunan nilai, tidak ada hal hal yang mempengaruhi kualitas pencairan sehingga tidak dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Based on the review of the status of the short term investment in marketable securities, management believed no indication for impairment, thus there is no allowance for decline in value.

8. PIUTANG USAHA	8. TRADE RECEIVABLES	
Piutang usaha merupakan piutang dari jasa pelayanan yang telah diberikan perusahaan yang pelunasannya diterima oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan rincian sebagai berikut :	<i>Accounts receivable is a receivable from services rendered by the Company, which will be received in a specified period as follows :</i>	
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
a. Penyajian Menurut Debitur		<i>a. As per debtors:</i>
Pihak Berelasi		Related parties :
PT Gapura Angkasa	5.230.202	12.577.001
PT Garuda Indonesia Airlines (Persero), Tbk.	54.139.986	50.764.128
PT Merpati Nusantara Airlines	45.854.617	45.209.509
Yakkap I	2.750	17.467
Airlines lain	-	8.902
Kokapura	2.729.517	3.529.287
Pariskapura	-	31.268
BUMN Lain	20.103.977	52.017.203
Instansi Pemerintah	727.355	471.543
Koperasi Angkatan Bersenjata	663.171	1.357.135
Jumlah Pihak Berelasi	<u>129.451.575</u>	<u>165.983.443</u>
Penyisihan Penurunan Nilai	<u>(37.012.633)</u>	<u>(50.609.508)</u>
	<u>92.438.942</u>	<u>115.373.935</u>
Pihak Ketiga :		Third parties :
Airlines Dalam Negeri	44.775.468	94.049.360
Airlines Luar negeri	70.664.800	110.595.836
Perusahaan Swasta	361.134.396	347.459.893
Penyesuaian Valas	8.182.284	16.023.040
Jumlah Pihak Ketiga	<u>484.756.948</u>	<u>568.128.129</u>
Penyisihan Penurunan Nilai	<u>(94.425.641)</u>	<u>(112.331.278)</u>
	<u>390.331.307</u>	<u>455.796.851</u>
Jumlah Piutang	<u>614.208.523</u>	<u>734.111.572</u>
Penyisihan Penurunan Nilai	<u>(131.438.274)</u>	<u>(162.940.786)</u>
Jumlah Piutang Bersih	<u>482.770.249</u>	<u>571.170.786</u>
		<i>Total trade receivable</i>
		<i>Allowance for impairment</i>
		<i>Trade receivables - net</i>
b. Piutang berdasarkan mata uang :		<i>b. by currency</i>
Rupiah	481.440.267	532.292.378
US Dollar	1.329.982	38.878.408
Sub Jumlah	<u>482.770.249</u>	<u>571.170.786</u>
		<i>Rupiah</i>
		<i>US Dollar</i>
		<i>Sub total</i>
c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang		<i>Changes in the allowance for impairment of receivables</i>
Saldo awal	162.940.786	179.363.363
Penyisihan tahun berjalan	8.561.320	49.204.565
Pelunasan	(40.063.831)	(65.341.254)
Pemulihan	-	(285.889)
Saldo akhir	<u>131.438.275</u>	<u>162.940.785</u>
		<i>Beginning balance</i>
		<i>Allowance for current year</i>
		<i>Repayments</i>
		<i>Recovery</i>
		<i>End balance</i>

8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

8. TRADE RECEIVABLES (continued)

d. Berdasarkan umur piutang			Based on aging schedule
0 - 90 hari	366.334.768	467.215.164	0 - 90 days
91 - 180 hari	20.232.531	42.097.599	91 - 180 days
181 - 360 hari	66.194.844	52.511.190	181 - 360 days
> 360 hari	161.446.381	172.287.618	> 360 days
Penyisihan penurunan	<u>(131.438.275)</u>	<u>(162.940.785)</u>	Impairment
Jumlah	<u>482.770.249</u>	<u>571.170.786</u>	Total

Piutang kepada PT Merpati Airline sebesar Rp45.046.343 sudah dinyatakan macet dan atas semua saldo piutang tersebut telah dilakukan cadangan penurunan nilai. Namun meskipun demikian Perseroan masih mengupayakan agar piutang tersebut dapat dibayar sebagian atau seluruhnya.

Receivables PT Merpati Airline of Rp45.046.343 already stated jammed and above all outstanding amounts have been made provision for impairment. But despite this the Company is still to strive for these receivables could be paid in part or in whole.

Cadangan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha masing masing pelanggan pada akhir periode/tahun dan historikal pembayaran dari pelanggan. Cadangan penurunan dicatat sebagai beban diluar operasional.

Allowance for impairment of receivable based on the review of the status of the individual receivable accounts at the end of the period/ year and collectively by age of receivables and historical payment of customers.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment is sufficient to cover possible losses on uncollectible trade receivables

9. PIUTANG LAIN-LAIN

9. OTHER RECEIVABLES

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Pihak Berelasi:			Related parties
Piutang Pegawai	2.366.630	2.117.253	Employee receivables
Piutang lain lain			Other related parties
- Pengadilan Negeri Banjarmasin	-	74.257.993	Pengadilan Negeri Banjarmasin -
- PT Garuda Indonesia Airways (Persero)	-	42.218.248	PT Garuda Indonesia Airways (Persero) -
- Lainnya	33.240	-	Others -
	<u>2.399.870</u>	<u>118.593.494</u>	
Cadangan penurunan nilai	<u>(86)</u>	<u>(74.510)</u>	Allowance for impairment
Jumlah piutang lain berelasi	<u>2.399.784</u>	<u>118.518.984</u>	Total other receivables related parties
Pihak Ketiga:			Third parties :
Lain-lain	13.025.035	12.975.153	Others
Cadangan penurunan nilai	<u>(2.980.167)</u>	<u>(2.931.687)</u>	Allowance for impairment
Jumlah piutang lain pihak ketiga	<u>10.044.868</u>	<u>10.043.466</u>	Total other receivables third parties
Jumlah	<u><u>12.444.652</u></u>	<u><u>128.562.450</u></u>	Total

9. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

9. OTHER RECEIVABLES (continued)

	31-12-2016	31-12-2015	
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang			<i>Changes in the allowance for impairment of receivables</i>
Saldo awal	3.006.197	2.931.685	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan tahun berjalan	356	1.533.885	<i>Allowance for current year</i>
Pemulihan	<u>(26.300)</u>	<u>(1.459.374)</u>	<i>Recovery</i>
Saldo akhir	<u>2.980.253</u>	<u>3.006.196</u>	<i>End balance</i>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Umur piutang lain lain			<i>Aging other receivable</i>
Belum jatuh tempo	2.366.630	118.593.494	<i>Not yet due</i>
0 - 1 tahun	10.041.299	9.994.986	<i>0 - 1 year</i>
diatas 1 tahun	<u>3.016.976</u>	<u>2.980.167</u>	<i>> 1 years</i>
	15.424.905	131.568.647	
Cadangan penurunan nilai	<u>(2.980.253)</u>	<u>(3.006.197)</u>	<i>Allowance for impairment</i>
	<u>12.444.652</u>	<u>128.562.450</u>	

Piutang pegawai merupakan pinjaman karyawan kepada perusahaan yang akan dilunasi oleh pegawai melalui pemotongan penghasilan.

Receivables from employees consist of the employees' loan to the Company and will be settled by employees through payroll deduction.

Piutang lain lain kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru tahun 2015 adalah titipan dana konsignasi untuk pembayaran pembebasan lahan kepada masyarakat pemilik lahan yang akan digunakan untuk perluasan bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Pada tahun 2016 dana titipan tersebut telah direalisasi pembayarannya kepada pemilik lahan. Lahan yang telah direalisasi pembayarannya tersebut diklasifikasikan kedalam aset dalam konstruksi.

Other receivables to the District Court Banjarbaru 2015 is entrusted consignment funds for land acquisition payments to the land owners that will be used for expansion of the airport Syamsudin Noor Banjarmasin. In 2016, the deposit funds have been realized payment to the land owner. Realized payment of land are classified into assets under construction.

Piutang kepada PT Garuda Indonesia (Persero) tahun 2015 sebesar Rp 42.218.248 merupakan bagian dari piutang jangka panjang yang telah jatuh tempo dan dijadwalkan sudah dilunasi tahun 2015, sudah terrealisasi pada tanggal 4 Januari 2016. (Lihat catatan no 15).

Receivables PT Garuda Indonesia (Persero) in 2015 amounted to Rp 42,218,248 is part of a long-term receivables that are due and scheduled to be repaid in 2015, but the realization on January 4, 2016. (See note 15).

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga .

Transactions with related parties carried out with reasonable terms and conditions as those done with third parties.

Piutang pihak ketiga tahun 2016 dan 2015 Rp9.395.578 dan Rp6.102.242 diantaranya adalah piutang anak perusahaan kepada KSO "Kuliner". Lihat catatan 59.5.

Third party receivables in 2016 and 2015 amounting to Rp 9.395.578 and Rp6.102.242 of which are owed subsidiary of the KSO "Culinary". See note 59.5.

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang lain lain pada akhir periode/tahun, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Based on the review of the status of the other receivable accounts at the end of the period/ year, management believes that the allowance for impairment is sufficient to cover possible losses on uncollectible other receivables.

10. PERSEDIAAN	10. INVENTORIES		
	31-12-2016	31-12-2015	
Suku Cadang pemeliharaan	16.507.772	13.059.394	<i>Parts For maintenance</i>
Supplies dan perlengkapan	15.053.459	11.698.094	<i>Supplies and equipment</i>
Persediaan dagang	9.061.994	11.601.533	<i>Supplies and equipment</i>
Jumlah	40.623.225	36.359.021	<i>Total</i>
Cadangan penurunan nilai	(6.641)	-	<i>Provision for impairment</i>
	<u>40.616.584</u>	<u>36.359.021</u>	

Pada 2016 terdapat penyesuaian atas nilai persediaan sebesar Rp 81.729 dan 2015 sebesar Rp 1.259. Penghapusan persediaan karena barang rusak sebesar Rp nol dan Rp75.300, pada tahun 2016 dan 2015. Cadangan penurunan nilai di anak perusahaan sebesar Rp 6.641

Persediaan tidak diasuransikan dari kemungkinan adanya kebakaran atau kerugian lainnya.

In 2016 there were adjustments for value of inventories amounted to Rp81.729 and 2015 amounting to Rp1.259. Elimination of inventory because the goods are damaged by Rp0,- and Rp75.300 in 2015. And provision for impairment of inventories Rp 6.641 in subsidiaries.

Inventories are not insured against possible fire or other damages.

11. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA	11. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES		
	31-12-2016	31-12-2015	
Asuransi	11.809.510	5.595.318	<i>Insurance</i>
Lain-lain	51.886.503	18.382.484	<i>Miscellaneous</i>
Biaya karyawan dibayar dimuka	78.216.838	-	<i>Employee residential allowance</i>
Jumlah	141.912.851	23.977.802	<i>Total</i>
Bagian jangka pendek	63.696.013	23.977.802	<i>Short term portion</i>
Bagian jangka panjang	78.216.838	-	<i>Long term portion</i>

Asuransi dibayar di muka merupakan penutupan pertanggungan asuransi kerugian aset perusahaan dalam bentuk Property All Risk dan Gempa Bumi serta asuransi kendarann untuk masa satu tahun kedepan yang berakhir pada tanggal 27 Juni 2017.

Beban dibayar dimuka/Uang muka lain-lain terdiri dari pemakaian persediaan, sewa, beban umum, dan lainnya.

Biaya karyawan jangka panjang dibayar dimuka adalah pembayaran biaya bantuan uang sewa rumah kepada karyawan untuk masa 4 tahun yang dimulai tahun 2017 sesuai dengan SK Direksi nomor : KEP.35/KP.10.32/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Prepaid insurance is insurance coverage vehicle insurance and damages (buildings, earthquake-tsunami and terrorist) for a period of one year ahead.

Others advances consist of the use of supplies, rent, general expenses, and others.

Long term prepaid employee expenses are residential assistance to employees for a period four years starting in 2017 according to the Decree of the Board of Directors number: KEP.35 / KP.10.32 / 2016 dated March 21, 2016.

12. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

12. ACCRUED REVENUES

	31-12-2016	31-12-2015	
Aeronautika	144.626.777	119.611.736	<i>Aeronautical</i>
Non aeronautika	48.642.002	86.339.630	<i>Non aeronautical</i>
Lainnya	7.957.917	2.468.255	<i>Others</i>
Jumlah	<u>201.226.696</u>	<u>208.419.621</u>	<i>Total</i>

Pendapatan yang masih harus diterima untuk Aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas Jasa Layanan Penumpang, PJP4U, Jasa Aviobridge dan Jasa Extended Fee.

Accrued income consists of Aeronautical revenues on Air Services, Passenger Services, PJP4U, Aviobridge Services and Extended fee services.

Pendapatan yang masih harus diterima untuk Non Aeronautika mencakup pendapatan-pendapatan atas Jasa Sewa ruang, Pemakaian Jasa Gudang, Sewa Tanah, Konsesi, Parkir, Pemakaian Listrik/Telepon/Air, Pemakaian Counter, Pemakaian Premium Lounge dan jasa lainnya.

Accrued income for Non-Aeronautical revenues include revenues for space rental services, use of warehouse, land rental, concessions, parking, electricity/ telephone/ water, the use of counters, the use of premium lounges and other services.

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Tax

	31-12-2016	31-12-2015	
Entitas Induk			<i>Holding</i>
PPN Masukan	26.896.927	117.146.635	<i>Credible VAT</i>
PPh Pasal 21	20.140	86.823	<i>Income Tax article 21</i>
PPh Pasal 22	103	-	<i>Income Tax article 22</i>
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
PPh Pasal 21	-	-	<i>Income Tax article 21</i>
PPh Pasal 25	1.451.997	3.423.893	<i>Income Tax article 25</i>
PPh Pasal 4(2)	1.580	-	<i>Income Tax article 22</i>
PPh Pasal 22	146.877	-	<i>Income Tax article 22</i>
PPh Pasal 23	4.955.063	882.877	<i>Income Tax article 23</i>
PPh Pasal 28A	-	2.542.550	<i>Income Tax article 28A</i>
PPN Masukan	48.584.883	26.752.783	<i>Credible VAT</i>
Pajak lainnya	184.648	-	<i>Income Tax article 22</i>
Jumlah	<u>82.242.218</u>	<u>150.835.561</u>	<i>Total</i>

Uang muka pajak PPh pasal 28A sebesar Rp 2.542.551 tahun 2015 merupakan kelebihan bayar pajak badan PT Angkasa Pura Logistik (entitas anak).

Prepaid Income tax article 28A amounted to Rp 2.542.551 in 2015 are over payment of income corporate tax of PT Angkasa Pura Logistics (subsidiary).

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAX PAYABLES (continued)

b. Utang Pajak	31-12-2016	31-12-2015	
Entitas Induk			<i>Holding</i>
PPh Pasal 23	1.428.343	2.298.671	<i>Income Tax Article 23</i>
PPh Pasal 22	238.156	-	<i>Income Tax Article 22</i>
PPh Pasal 4 ayat 2	2.336.936	2.051.385	<i>Income Tax Article 4 (2)</i>
PPh Pasal 21	5.665.875	3.056.872	<i>Income Tax Article 21</i>
PPN Masukan	14.181.483	18.487.010	<i>VAT - in</i>
PPN Keluaran	66.936.509	127.263.094	<i>VAT - out</i>
PPh Pasal 29	372.543	257.044	<i>Income Tax Article 29</i>
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
PPh Pasal 25	433.516	269.694	<i>Income Tax Article 25</i>
PPh Pasal 26	59.315	-	<i>Income Tax Article 22</i>
PPh Pasal 23	1.711.931	1.065.922	<i>Income Tax Article 23</i>
PPh Pasal 4 ayat 2	1.208.180	320.747	<i>Income Tax Article 4 (2)</i>
PPh Pasal 21	1.195.557	848.563	<i>Income Tax Article 21</i>
PPN Keluaran	21.259.931	11.251.801	<i>VAT - out</i>
PPh Pasal 29	3.479.594	1.664.275	<i>Income Tax Article 29</i>
Pajak lainnya	17.932.694	800.084	<i>Other Tax</i>
Jumlah	<u>138.440.567</u>	<u>169.635.162</u>	<i>Total</i>
c. Beban (manfaat) pajak penghasilan			
	31-12-2016	31-12-2015	
Pajak Kini			<i>Current Tax</i>
Perusahaan	318.041.954	270.421.864	<i>Company</i>
Entitas Anak	30.123.243	13.074.173	<i>Subsidiaries</i>
	<u>348.165.197</u>	<u>283.496.037</u>	
Pajak Tangguhan			<i>Deferred Tax</i>
Perusahaan	7.472.002	(24.468.405)	<i>Company</i>
Entitas Anak	(6.361.597)	(18.257.784)	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah	<u>1.110.405</u>	<u>(42.726.189)</u>	<i>Total</i>
Jumlah Konsolidasian	<u>349.275.602</u>	<u>240.769.848</u>	<i>Consolidated Total</i>

13. PERPAJAKAN (lanjutan)	13. TAX PAYABLES (continued)		
d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak entitas induk :			d. A reconciliation between income before income taxes in the statement of comprehensive income and estimated taxable income for parents entity:
Pajak Kini		Current tax	
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak	1.508.852.757	1.082.742.477	<i>Consolidated income before tax</i>
Dikurangi :			<i>Deduction :</i>
Laba sebelum pajak - entitas anak	(115.262.597)	(47.156.087)	<i>Income before income tax-subsidiaries</i>
Faktor eliminasi	<u>29.871.126</u>	<u>9.396.834</u>	<i>Elimination</i>
Laba sebelum pajak induk	<u>1.423.461.286</u>	<u>1.044.983.224</u>	<i>Profit before income tax - the company</i>
Penyesuaian :			Adjustments :
Beda Tetap :			<i>Permanent difference :</i>
Beban tidak dapat dikurangkan	514.186.451	274.882.548	<i>Non deductible expenses :</i>
Pendapatan dikenakan pajak final	(772.228.867)	(336.051.936)	<i>Income subject to final tax</i>
Beda Waktu :			<i>Temporary difference :</i>
Penurunan Nilai	8.561.676	49.705.477	<i>Impairment losses</i>
Penyusutan	22.855.570	13.792.311	<i>Depreciation</i>
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	75.331.701	34.375.831	<i>Employee benefit obligation</i>
Jumlah penyesuaian	<u>(151.293.469)</u>	<u>36.704.231</u>	<i>Total adjustments :</i>
Laba Kena Pajak	<u>1.272.167.817</u>	<u>1.081.687.455</u>	<i>Taxable Income</i>
25% x laba kena pajak	<u>318.041.954</u>	<u>270.421.864</u>	<i>25% x taxable income</i>
Beban pajak kini	<u>318.041.954</u>	<u>270.421.864</u>	<i>Current tax</i>
Dikurangi			<i>Deducted :</i>
Pajak Dibayar dimuka			<i>Prepaid tax :</i>
PPh Pasal 23	197.485.185	150.949.960	<i>Income tax article 23</i>
PPh Pasal 25	<u>120.184.226</u>	<u>119.214.860</u>	<i>Income tax article 25</i>
Jumlah	<u>317.669.411</u>	<u>270.164.820</u>	<i>Total</i>
Utang Pajak	<u>372.543</u>	<u>257.044</u>	<i>Tax payable</i>
Jumlah penghasilan tersebut menjadi dasar penyusunan Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.			<i>Total income is the basis for the preparation of Consolidated Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Office.</i>
e. Pajak Tangguhan :		e. Deferred tax :	
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Aset Pajak Tangguhan :			<i>Deferred tax assets :</i>
Entitas Induk	-	24.468.405	<i>Company</i>
Entitas anak	<u>28.132.587</u>	<u>21.200.697</u>	<i>Subsidiaries</i>
Sub jumlah	<u>28.132.587</u>	<u>45.669.102</u>	<i>Sub total</i>
Kewajiban Pajak Tangguhan :			<i>Deferred tax Liabilities :</i>
Entitas Induk	26.261.262	43.257.665	<i>Company</i>
Entitas anak	<u>1.569.306</u>	<u>999.013</u>	<i>Subsidiaries</i>
Sub jumlah	<u>27.830.568</u>	<u>44.256.678</u>	<i>Sub total</i>
Aset (Liabilitas) Pajak tangguhan (netto)	<u>302.019</u>	<u>1.412.424</u>	<i>Deferred tax assets (liabilities)</i>

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAX PAYABLES (continued)

Perbedaan temporer dan kewajiban diestimasi yang menyebabkan terjadinya perbedaan laba (rugi) fiskal dengan komersil sebagaimana diisyaratkan PSAK 46 menimbulkan adanya pajak tangguhan.

Temporary differences and estimated liabilities which led to differences in income (loss) tax and commercial profit as hinted PSAK 46 gave rise to deferred tax :

	31-12-2016	31-12-2015	
Laba sebelum pajak :	1.423.461.286	1.044.983.224	Profit before tax :
Tarif Pajak	355.865.322	261.245.806	Tax rate
Beban tidak dapat dikurangkan	128.546.613	68.720.637	Non deductible expenses
Penghasilan dikenakan pajak final	(193.057.218)	(84.012.984)	Income subjected final tax
Pajak penghasilan - perusahaan	291.354.717	245.953.459	Corporate tax - Company
Pajak penghasilan - entitas anak	57.920.885	(5.183.611)	Corporate tax - subsidiaries
Pajak penghasilan konsolidasian	349.275.602	240.769.848	Consolidated Corporate tax
Beban pajak fiskal	348.165.197	283.496.037	Fiscal income tax
Beban pajak tangguhan	1.110.405	(42.726.189)	Deferred tax

Perbedaan temporer dan kewajiban diestimasi yang membentuk bagian signifikan dari Aset dan kewajiban pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

Temporary differences and estimated liabilities that make up a significant portion of the deferred tax assets and liabilities are as follows:

31 Desember 2016 / December 31, 2016					
	Saldo awal 1 Januari 2016 <i>Beginning balance Januari 1, 2016</i>	Beban(manfaat) pajak tangguhan <i>Gain and loss Diferred taxes</i>	Koreksi / Reklasifikasi <i>Adjustment / Reclasification</i>	Saldo akhir 31 Desember 2016 <i>Ending balance Dec 31, 2016</i>	
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan diperoleh dari :					Deferred tax assets (liabilities) :
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	40.477.008	(7.798.362)	-	32.678.646	Impairment of receivable
Cadangan penurunan nilai piutang bukan usaha	751.549	(6.486)	-	745.063	Impairment of Other receivable
Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud	(146.728.075)	4.548.213	-	(142.179.862)	Accumulated depreciation and amortization of fixed assets, property investment and intangible assets
Imbalan paska kerja	86.710.258	(4.215.367)	-	82.494.891	Employee benefits
Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan induk	(18.789.260)	(7.472.002)	-	(26.261.262)	Asset (liability) of parent's deffered tax
Aset (liabilitas) pajak tangguhan (anak)	20.201.684	6.361.597	-	26.563.281	Asset (liability) of deffered tax (subsidiaries)
Saldo akhir	1.412.424			302.019	Ending balance

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAX PAYABLES (continued)

	31 Desember 2015 / December 31, 2015				
	Saldo awal 1 Januari 2015 <i>Beginning balance</i> <i>Januari 1, 2015</i>	Beban(manfaat) pajak tangguhan <i>Gain and loss</i> <i>Diferret taxes</i>	Koreksi / Reklasifikasi <i>Adjustment /</i> <i>Reclasification</i>	Saldo akhir 31 Desember 2015 <i>End Year</i> <i>Dec 31, 2015</i>	
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan diperoleh dari :					<i>Deferred tax assets (liabilities) :</i>
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	34.921.982	5.555.026	-	40.477.008	<i>Impairment of receivable</i>
Cadangan penurunan nilai piutang bukan usaha	732.922	18.627	-	751.549	<i>Impairment of Other receivable</i>
Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud	(138.807.991)	(7.920.084)	-	(146.728.075)	<i>Accumulated depreciation and amortization of fixed assets, property investment and intangible assets</i>
Imbalan paska kerja	59.895.422	26.814.836	-	86.710.258	<i>Employee benefits</i>
Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan induk	(43.257.665)	24.468.405	-	(18.789.260)	<i>Asset (liability) of parent's deferred tax</i>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan (anak)	1.943.901	18.257.783	-	20.201.684	<i>Asset (liability) of deferred tax (subsidiaries)</i>
Saldo akhir	<u>(41.313.764)</u>			<u>1.412.424</u>	<i>Ending balance</i>

14. ASET LANCAR LAINNYA

14. OTHER CURRENT ASSETS

	31-12-2016	31-12-2015	
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
Uang muka kontrak	294.312	436.154	<i>Advance for contract</i>
Uang muka proyek	7.891.284	3.932.066	<i>Advance for project</i>
Uang muka jaminan	193.283	3.099.046	<i>Security Deposits</i>
Uang unit kerja hotel	820.900	-	<i>Advance for hotels</i>
Uang muka lainnya	1.049.472	608.953	<i>Other advances</i>
Jumlah	<u>10.249.251</u>	<u>8.076.219</u>	<i>Total</i>

15. PIUTANG JANGKA PANJANG

15. LONG TERM RECEIVABLES

	31-12-2016	31-12-2015	
Pihak Berelasi :			<i>Related party :</i>
Karyawan	699.887	-	<i>Employee</i>
	<u>699.887</u>	<u>-</u>	

Piutang jangka panjang karyawan tersebut adalah pinjaman untuk sewa rumah yang belum jatuh tempo.

The employee long-term receivables are loans for rent not yet due.

16. INVESTASI JANGKA PANJANG

16. LONG TERM INVESTMENT

	31 Desember 2016		31 Desember 2015		
	31-Dec-16		31-Dec-15		
	Nominal	Tercatat	Nominal	Tercatat	
	<i>Nominal</i>	<i>Carrying Value</i>	<i>Nominal</i>	<i>Carrying Value</i>	
	2016		2015		
Pihak Berelasi :					Related Party :
Obligasi :					Bonds :
RDPT BUMN FUND III	7.454.629	7.454.629	7.454.629	7.454.629	RDPT BUMN FUND III
FR0028 (2005), 10%	-	-	30.000.000	29.884.895	FR0028 (2005), 10%
	<u>7.454.629</u>	<u>7.454.629</u>	<u>37.454.629</u>	<u>37.339.524</u>	
Saham :					Shares :
PT Gapura Angkasa Pura	21.504.000	42.861.060	21.504.000	39.997.101	PT Gapura Angkasa Pura
PT Jasa Marga Bali Tol	38.000.000	45.471.957	38.000.000	51.980.802	PT Jasa Marga Bali Tol
	<u>59.504.000</u>	<u>88.333.017</u>	<u>59.504.000</u>	<u>91.977.903</u>	
Kerjasama operasi					Joint Operation
Red & White (APR)	341.938	341.938	341.938	341.938	Red & White (APR)
	<u>341.938</u>	<u>341.938</u>	<u>341.938</u>	<u>341.938</u>	
Jumlah	<u><u>67.300.567</u></u>	<u><u>96.129.584</u></u>	<u><u>97.300.567</u></u>	<u><u>129.659.365</u></u>	Total
Pemilikan saham :					Share ownership :
PT Gapura Angkasa Pura	10,00 %		10,00 %		PT Gapura Angkasa Pura
PT Jasa Marga Bali Tol	8,00 %		8,00 %		PT Jasa Marga Bali Tol

Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Pembelian Obligasi setelah tahun 2004, Nilai Perolehan Obligasi dikelompokan "Dimiliki Hingga Jatuh Tempo " sedangkan pembelian obligasi dalam tahun 2003 dan tahun 2004 pencatatan obligasi disesuaikan dari kelompok tersedia untuk dijual menjadi kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Obligasi yang diperoleh setelah tahun 2004 dicatat berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan amortisasi diskonto atau premium sedangkan obligasi yang diperoleh pada tahun 2003 dan 2004 dicatat berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2004 dikurangi dengan amortisasi diskonto atau premium.

RDPT BUMN FUND III

RDPT BUMN FUND III diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2014 dan merupakan underlying MTN Perum Damri yang digunakan sebagai modal kerja dalam bentuk pembelian kendaraan dan tanah. Jangka waktu reksadana adalah 48 bulan dengan imbal hasil 10% p.a. nett. Pengembalian pokok berdasarkan Partial Payment sesuai dengan jadwal amortisasi MTN, yaitu pada tanggal yang ditentukan pada perjanjian MTN berturut-turut dengan proporsi 30% pada bulan ke 15, pada bulan ke 24 proporsi sebesar 30%, pada bulan ke 36 proporsi 20% dan pada bulan ke 48 proporsi 20%. Metode valuasi aset adalah Hold to Maturity (HTM).

Bonds Held to Maturity

Purchase of bonds after 2004, Value Acquisition of Bonds classified "Held to Maturity " while the purchase of bonds in 2003 and 2004 recording of bonds adjusted from available for sale be classified as held to maturity. Bonds acquired after 2004 are accounted for under the acquisition cost less the amortization of discount or premium while the bonds were acquired in 2003 and 2004 were determined based on market prices on December 31, 2004 less the amortization of discount or premium.

RDPT BUMN FUND III

State Enterprises RDPT FUND III issued on February 25, 2014 and is the underlying MTN Perum Damri used as working capital in the form of the purchase of the vehicle and the Lands. The term of mutual funds is 48 months with a yield of 10% P.A. nett. Payback based Partial Payment in accordance with the amortization schedule MTN, which is on the date specified in the MTN agreement which is the proportion of 30% in the month to 15, the proportion of 30% in the month to 24, the proportion of 30% at month 36 and the proportion of 20% in 48. The asset valuation method is Hold to Maturity (HTM).

16. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

16. LONG TERM INVESTMENT (continued)

**Penyertaan pada PT Gapura Angkasa
 (Perusahaan Asosiasi)**

Penyertaan pada PT Gapura Angkasa yang bergerak dalam bidang jasa Ground Handling dilakukan sesuai dengan persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor S-546/MK.016/1997 tanggal 5 November 1997 dengan nilai perolehan Rp67.200.000.000 (Rupiah penuh). Modal dasar PT Gapura Angkasa adalah Rp860.160.000.000 (Rupiah penuh) terbagi atas 8.601.600 saham nominal Rp100.000 (Rupiah penuh) per saham. Dan modal dasar tersebut, sebanyak 2.150.400 saham atau senilai Rp215.040.000.000 (Rupiah penuh) merupakan modal ditempatkan dan disetor. Dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor oleh 3 (tiga) Pemegang saham yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) masing-masing sebanyak 672.000 saham (31,25%) dan PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) sebanyak 806.400 saham (37,50%).

Pada tahun 2014 perseroan telah menjual sebagian saham miliknya kepada pemegang saham lainnya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 456.960 lembar saham atau 22,25% dengan harga jual sebesar Rp105.000.000 yang dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Pembelian dan Penjualan Saham PT Gapura Angkasa nomor SP.140.KU.20/2014/PD; Nomor DS/PERJ/MOU/DQ-3285/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Dengan demikian sisa penyertaan perseroan di PT Gapura Angkasa adalah sebanyak 215.040 lembar saham atau sebesar 10%

Perubahan penyertaan dalam saham pada PT Gapura Angkasa adalah sebagai berikut :

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Saldo awal tahun	39.997.101	26.603.765
Dividen		
Perubahan ekuitas entitas asosiasi	(98.535)	8.013.746
Bagian Laba (Rugi) Bersih	<u>2.962.494</u>	<u>5.379.590</u>
	<u><u>42.861.060</u></u>	<u><u>39.997.101</u></u>

Perusahaan menempatkan Dewan Komisaris di asosiasi, dan oleh karenanya investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Perubahan ekuitas pada entitas asosiasi sebesar Rp13.787.257 adalah penyesuaian ekuitas yang disebabkan penerapan PSAK 24 (Revisi 2010 dan 2013) atas perhitungan kewajiban imbalan paska kerja.

**Investment in PT. Gapura Angkasa
 (Associated Company)**

The investment in PT Gapura Angkasa which engage business in ground handling was made based on the approval from Minister of Finance in his letter No. S-546 MK.016/1997 dated November 5, 1997 in the amount of Rp67,200,000,000 (full Rupiah). The authorized capital of PT Gapura Angkasa is Rp860,160,000,000 (full Rupiah) consists of 8,601,600 shares par value of Rp100,000 (full Rupiah) per share. Of the authorized capital, in the number of 2,150,400 shares equal to Rp215,040,000,000 (full Rupiah) were subscribed and paid in. The other shareholders are PT Angkasa Pura II (Persero) which subscribed 672,000 shares (31,25%) and PT Garuda Indonesia which subscribed 806,400 shares (37,50%).

In 2014 the company has sold some of his shares to the other shareholders are PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as many as 456,960 shares or 22.25% with a selling price of Rp105,000,000 which is expressed in the Memorandum of Purchase and Sale of Shares of PT Gapura Angkasa number SP.140.KU.20 / 2014 / PD; Number DS / onsen / MOU / DQ-3285/2014 dated June 30, 2014.

Balance of ownership in PT Gapura Angkasa is as 215,040 shares or 10%

The movement of investment in share of stock to PT Gapura Angkasa is as follows:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Saldo awal tahun	39.997.101	26.603.765
Dividen		
Perubahan ekuitas entitas asosiasi	(98.535)	8.013.746
Bagian Laba (Rugi) Bersih	<u>2.962.494</u>	<u>5.379.590</u>
	<u><u>42.861.060</u></u>	<u><u>39.997.101</u></u>

The Company placed Board of Commissioners in the association, and therefore the investment is are recorded using the equity method.

Equity changes to associated companies amounted to Rp13,787,257 is an equity adjustment of application PSAK 24 (Revised 2010 and 2013) on the calculation of post-employment benefit obligations

16. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

16. LONG TERM INVESTMENT (continued)

Ikhtisar laporan keuangan entitas PT Gapura Angkasa adalah sebagai berikut :

Summary of financial statement of PT Gapura Angkasa as follows :

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Total aset	1.775.713.577	1.004.767.371	Total assets
Total Liabilitas	1.390.394.818	604.796.060	Total Liabilities
Total Ekuitas	385.318.759	399.971.311	Total Equity
Laba bersih	28.260.874	58.795.896	Net Income

Penyertaan saham pada PT Jasa Marga Bali Tol

Investment in PT Jasa Marga Bali Tol

Investasi dalam saham pada PT Jasa Marga Bali Tol merupakan konsorsium investasi pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa di daerah Bali oleh beberapa perusahaan BUMN. Investasi ini telah mendapat persetujuan dan Menteri Negara BUMN dalam surat nomor S - 549/MBU/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Investasi pada PT Jasa Marga Bali Tol pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Investment in shares in PT Jasa Marga Bali Tol is a consortium of investment for the toll highway construction Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa in Bali area by several state-owned enterprises. This investment has been approved by the Minister of SOE in its letter No. S - 549/MBU/2011 dated October 25, 2011. Investment in PT Jasa Marga Bali Tol as December 31, 2016 and 2015 as follows :

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Nilai perolehan awal	38.000.000	38.000.000	Initial recognition
Bagian Laba Bersih awal	13.980.803	21.344.231	Equity in net income
Bagian Rugi tahun berjalan	<u>(6.508.846)</u>	<u>(7.363.429)</u>	Part of the current loss
Jumlah	<u>45.471.957</u>	<u>51.980.802</u>	Total

Ikhtisar laporan keuangan entitas PT Jasamarga Bali Tol adalah sebagai berikut

Summary of financial statement of PT Jasamarga Bali Tol as follows :

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Total aset	1.938.330.437	1.984.827.710	Total assets
Total Liabilitas	1.364.713.443	1.335.067.679	Total Liabilities
Total Ekuitas	649.682.351	741.775.670	Total Equity
Laba bersih	(76.065.357)	(92.015.639)	Net Income

Perusahaan menempatkan Dewan Komisaris di asosiasi, dan oleh karenanya investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The Company placed Board of Commissioners in the association, and therefore the investment is recorded using the equity method.

Kerjasama operasi pada Red & White

Joint operations in Red & White

Penyertaan atas kerjasama operasi antara Anak Perusahaan PT Angkasa Pura Retail dengan PT Wonderful Mulia Jaya untuk menjalankan kerjasama berupa Toko Red & White yang terletak di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali sebesar Rp341.938 dengan pembagian keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang berlaku sampai dengan tanggal 3 November 2017 dan dapat diperpanjang.

Investments on joint operation between PT Angkasa Pura Retail the subsidiaries and PT Wonderful Mulia Jaya to pursue cooperation in the form of Red & White Store at I Gusti Ngurah Rai Airport in Denpasar Bali amount Rp341,938 with profit sharing of 50% and valid until the date of November 3, 2017 and can be extended.

17. PROPERTI INVESTASI

17. INVESTMENT PROPERTIES

31 Desember 2016 / December 31, 2016						
	Saldo awal / <i>Beginning</i>	Penambahan / <i>Addition</i>	Pengurangan <i>Deduction</i>	Reklasifikasi <i>Reclassification</i>	Saldo akhir / <i>Ending balance</i>	
Harga Perolehan						<i>Acquisitions Cost</i>
Tanah	10.293.286	732.466	-	-	11.025.752	<i>Lands</i>
Bangunan / Lapangan	175.247.590	84.144.068	-	(19.591.192)	239.800.466	<i>Buildings / Fields</i>
	<u>185.540.876</u>	<u>84.876.533</u>	-	<u>(19.591.192)</u>	<u>250.826.217</u>	
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated depreciations</i>
Bangunan / lapangan	35.695.966	19.480.413	-	(5.135.546)	50.040.833	<i>Buildings / Fields</i>
	<u>35.695.966</u>	<u>19.480.413</u>	-	<u>(5.135.546)</u>	<u>50.040.833</u>	
Nilai buku	<u>149.844.910</u>				<u>200.785.384</u>	<i>Book value</i>
31 Desember 2015 / December 31, 2015						
	Saldo awal / <i>Beginning</i>	Penambahan / <i>Addition</i>	Pengurangan <i>Deduction</i>	Reklasifikasi <i>Reclassification</i>	Saldo akhir / <i>Ending balance</i>	
Harga Perolehan						<i>Acquisitions Cost</i>
Tanah	10.293.286	-	-	-	10.293.286	<i>Lands</i>
Bangunan / Lapangan	179.918.828	-	-	(4.671.238)	175.247.590	<i>Buildings / Fields</i>
	<u>190.212.114</u>	-	-	<u>(4.671.238)</u>	<u>185.540.876</u>	
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated depreciations</i>
Bangunan / lapangan	29.617.111	6.137.245	-	(58.390)	35.695.966	<i>Structure / Fields</i>
	<u>29.617.111</u>	<u>6.137.245</u>	-	<u>(58.390)</u>	<u>35.695.966</u>	
Nilai buku	<u>160.595.003</u>				<u>149.844.910</u>	<i>Book value</i>

Rincian properti investasi pada 31 Desember 2016
 adalah :

Detail of Investments properties as of December 31, 2016 :

	Tanah / Lands			Bangunan / Buildings		
	M2	Nilai perolehan/ <i>Cost</i>	Nilai wajar / <i>Fair Value *)</i>	M2	Nilai buku <i>Book value</i>	Nilai wajar <i>Fair Value *)</i>
Kantor pusat/ <i>Head office</i>	62.564.000	6.651.455	9.932.291.600	-	-	-
Surabaya	18.223	218.436	42.860.496	17.936,53	58.568.099	58.568.099
Banjarmasin	1.142	16.098	529.888	10.000	128.151	6.629.490
Kupang	104.230	480.177	10.735.690	1.263	866.289	1.039.449
Denpasar	9.228	2.719.100	34.558.860	2.383,28	52.660.294	52.660.294
Yogyakarta	5.305	940.485	7.272.264	-	-	-
Lombok	-	-	-	20.6061	5.748.249	21.438.229
Biak	-	-	-	108	215.573	72.405
Makasar	-	-	-	912	4.941.160	4.941.160
Semarang	-	-	-	774	119.854	1.173.384
		<u>11.025.752</u>	<u>10.028.248.798</u>		<u>123.247.670</u>	<u>146.522.510</u>

*) Nilai wajar berdasarkan NJOP kecuali untuk bangunan di Surabaya, Denpasar dan Makassar yang dinilai sebesar nilai buku.

*) *The fair value is based on SVTO except for buildings in Surabaya, Denpasar and Makassar were recorded at book value.*

17. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

17. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Properti investasi dicatat berdasarkan harga perolehan. Properti investasi tanah tidak disusut, beban penyusutan atas properti investasi bangunan tahun 2016 dan 2015 seluruhnya dibebankan ke beban operasional tahun berjalan.

Property investments are stated at cost. Property investment land is not depreciable, the depreciation expense on property construction investment in 2016 and 2015 entirely charged to operating expenses for the year.

Pengurangan properti investasi tahun 2016 sebesar Rp19.591.192 di bandara Makassar dan tahun 2015 sebesar Rp4.671.238 di bandara Lombok direklasifikasi ke aset tetap karena pengalihan fungsi lahan parkir yang sebelumnya disewakan selanjutnya dikelola sendiri oleh perusahaan.

Reduction of investment property in 2016 amounted to Rp19.591.192 at the Makassar Airport and 2015 amounted to Rp4.671.238 in Lombok Airport reclassified as fixed assets for the transfer of functions previously leased parking area furthermore managed by the company.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tahun 2016 dan 2015.

Management believes that there is no event that indicates a decrease in the value of investment property in the year 2016 and 2015.

18. ASET TETAP

18. FIXED ASSETS

a. Aset tetap siap pakai

a. Ready for use of fixed assets

	31 Desember 2016 / December 31, 2016				
	Saldo awal / Beginning	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Harga Perolehan / Acquisitions					
Pemilikan langsung / Direct acquisitions :					
Tanah / Lands	664.071.302	130.654.135	-	-	794.725.437
Bangunan (Lapangan) / Structure (Fields)	4.786.123.441	264.598.820	-	19.591.192	5.070.313.453
Gedung - gedung / Buildings	5.040.580.594	62.397.239	-	-	5.102.977.833
Alat perhubungan Udara / Aviation Equipment	28.952.605	-	(426.800)	-	28.525.805
Kendaraan / Vehicle	363.670.841	23.022.752	-	-	386.693.593
Instalasi / Installations	1.003.700.710	37.442.569	-	-	1.041.143.279
Peralatan / Equipments	4.075.104.174	279.489.094	(19.216)	-	4.354.574.052
Aset dalam penyelesaian / Assets under construction	1.443.376.931	4.130.645.834	(2.435.684)	(329.498.747)	5.242.088.334
Jumlah / Total	17.405.580.598	4.928.250.442	(2.881.700)	(309.907.555)	22.021.041.786
Aset sewa guna usaha / Leasing					
Kendaraan / Vehicle	19.525.000	-	-	-	19.525.000
Jumlah / Total	17.425.105.598	4.928.250.442	(2.881.700)	(309.907.555)	22.040.566.786
Akumulasi penyusutan / Accumulated depreciation					
Pemilikan langsung / Direct acquisitions :					
Bangunan (Lapangan) / Structure (Fields)	1.142.689.808	197.909.064	-	4.909.154	1.345.508.027
Gedung - gedung / Buildings	627.091.217	125.379.974	-	-	752.471.191
Alat perhubungan Udara / Aviation Equipment	26.436.580	417.792	-	-	26.854.373
Kendaraan / Vehicle	203.673.808	27.020.197	-	-	230.694.006
Instalasi / Installations	391.800.498	90.769.005	-	-	482.569.503
Peralatan / Equipments	1.724.992.677	316.572.611	(15.548)	-	2.041.549.740
	4.116.684.588	758.068.644	(15.548)	4.909.154	4.879.646.840
Aset sewa guna usaha / Leasing					-
Kendaraan / Vehicle	4.330.788	1.080.286	-	-	5.411.074
	4.121.015.376	759.148.931	(15.548)		4.885.057.914
Nilai buku / Book value	13.304.090.222				17.155.508.872

18. ASET TETAP (lanjutan)

18. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember / December 31, 2015				
	Saldo awal / Beginning	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Harga Perolehan					
Pemilikan langsung / Direct acquisitions :					
Tanah / Lands	564.466.064	99.605.238	-	-	664.071.302
Bangunan (Lapangan) /Structure (Fields)	4.425.020.501	366.059.324	(9.627.622)	4.671.238	4.786.123.441
Gedung - gedung / Buildings	4.605.828.783	468.307.747	(33.555.936)	-	5.040.580.594
Alat perhubungan Udara / Aviation Equipment	28.952.605	-	-	-	28.952.605
Kendaraan / Vehicle	316.168.229	47.520.146	(17.534)	-	363.670.841
Instalasi /Installations	940.402.494	100.002.828	(36.704.612)	-	1.003.700.710
Peralatan /Equipments	3.847.090.627	343.307.393	(115.293.846)	-	4.075.104.174
Aset dalam penyelesaian / Assets under construction	1.622.207.733	1.461.024.847	(667.113.205)	(972.742.444)	1.443.376.931
Jumlah / Total	16.350.137.036	2.885.827.523	(862.312.755)	(968.071.206)	17.405.580.598
Aset sewa guna usaha /Leasing					-
Kendaraan / Vehicle	19.525.000	-	-	-	19.525.000
Jumlah / Total	16.369.662.036	2.885.827.523	(862.312.755)	(968.071.206)	17.425.105.598
Akumulasi penyusutan / Accumulated depreciation					
Pemilikan langsung / Direct acquisitions :					
Bangunan (Lapangan) /Structure (Fields)	963.915.210	181.225.967	(2.509.759)	58.390	1.142.689.808
Gedung - gedung / Buildings	488.115.382	142.742.264	(3.766.429)	-	627.091.217
Alat perhubungan Udara / Aviation Equipment	25.718.910	717.670	-	-	26.436.580
Kendaraan / Vehicle	179.025.897	24.665.445	(17.534)	-	203.673.808
Instalasi /Installations	339.093.061	86.308.974	(33.601.537)	-	391.800.498
Peralatan /Equipments	1.541.235.624	292.889.138	(109.132.085)	-	1.724.992.677
	3.537.104.084	728.549.458	(149.027.344)	58.390	4.116.684.588
Aset sewa guna usaha /Leasing					-
Kendaraan / Vehicle	2.165.394	2.165.394	-	-	4.330.788
Jumlah / Total	3.539.269.478	730.714.852	(149.027.344)	58.390	4.121.015.376
Nilai buku / Book value	12.830.392.558				13.304.090.222

Tanah seluas 10.000 m2 yang berlokasi di daerah Ungasan Nusa Dua Bali yang diperoleh berdasarkan Penyertaan Modal Pemerintah atas pembangunan bandara Internasional Ngurah Rai Fase II, saat ini di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal yang dimiliki dan di tempati oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali.

Land of 10,000 m2 located in the area of Nusa Dua Bali Ungasan acquired by the Government for the construction Equity Ngurah Rai International Airport Phase II, currently on the land standing residential buildings owned and occupied by the Airport Authority Office Region IV Bali .

18. ASET TETAP (lanjutan)

18. FIXED ASSETS (continued)

Aset Tanah pada areal Bandara Juanda yang telah dicatat oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor: KEP-23/X/1981; 661/KMK.011/1981; KM.217/AU.106/ Pbb.81 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pengalihan Pengelolaan Penerbangan Sipil di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Perhubungan dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tanggal 19 September 1984 dimana kekayaan negara pada Bandara Internasional Juanda telah dipisahkan dan menjadi tambahan modal pemerintah pada Perusahaan Umum Angkasa Pura I (Persero).

Tanah seluas 339 Ha diantaranya masih dalam proses penyelesaian dengan TNI AL, dari jumlah tersebut seluas 3.706.685 m² telah disertifikatkan oleh TNI AL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 September 1991.

Pada tahun 2013 terdapat pengurangan aset tetap kenavigasian sebesar nilai bukunya yaitu Rp270.831.524 dan aset tetap dengan nilai perolehan Rp731.281.272 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp408.393.524 yang diserahkan kepada PNPI sesuai BA. 656/KU.21/2013/PD-B tanggal 30 Desember 2013.

Pemilikan tanah yang terdiri 58 bidang SHGB, 73 bidang SHPL (pengelolaan) dan 36 bidang SHP (hak pakai) atau seluas 18.327.344 m² sudah atas nama Perseroan dan 5 bidang SHP seluas 632.656 m² atas nama Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Aset tetap perusahaan dijadikan jaminan atas pinjaman bank (lihat catatan 27).

Pada tanggal 10 April 2015 aset terminal dan aset penunjangnya yang terdiri gedung terminal penumpang, gedung operasi bandara dan navigasi penerbangan berikut fasilitas penunjangnya dan fasilitas penunjang yang terdiri peralatan mekanik, instalasi listrik, instalasi air, genset, peralatan navigasi, peralatan elektronik dan lainnya yang berada di 13 wilayah bandara yang dikelola PT Angkasa Pura 1 (persero) diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk Property all risk insurance, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, machinery breakdown dan electronic equipment insurance.

Land assets in the area of Juanda Airport which has been noted by PT Angkasa Pura I (Persero) Branch Juanda by the Joint Decree (SKB) The Minister of Defense and Security / Commander of the Armed Forces, Minister of Transportation and Minister of Finance No. KEP-23 / X / 1981; 661 / KMK.011 / 1981; KM.217 / AU.106 / Pbb.81 date October 28, 1981 on the Transfer of Management of Civil Aviation in the Navy Air Base Juanda from the Department of Public Safety to the Department of Transportation and as the Government Regulation No. 30 of 1984 date 19 September 1984 in which the country's wealth at Juanda International Airport has been separated and become additional government capital in the Public Company Angkasa Pura I (Persero).

Covering an area of 339 ha of which are still in the process of settlement of the Navy, of the total area of 3,706,685 m² that has been certified by the Navy in Sidoarjo District Land Office on 16 September 1991.

In 2013 there is a reduction in navigation fixed assets at book value amounted Rp270,831,524 and also fixed assets with acquisition value Rp731,281,272 accumulated depreciation of Rp408,393,524 submitted to LPPNPI according BA.656 / KU.21 / 2013 / PD-B dated December 30, 2013.

Ownership of the land is comprised of 58 fields with certificates SHGB, 73 field SHPL and 36 field SHP (rights of use) or 18,327,344 m² has been on behalf of the Company and 5 SHP field or 632.656 m² on behalf of the Department of Transportation cq. DGCA.

Fixed assets of the company used as collateral for bank loans (see note 27).

On 10 April 2015 the terminal assets and supporting assets consisting passenger terminal building, operations airport building and flight navigation following supporting facilities and support facilities which consist of mechanical equipment, electrical installations, water installations, generators, navigation equipment, electronic equipment and other located in 13 territories airport managed by PT Angkasa Pura 1 (Persero) insured with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) for Property all risk insurance, earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, machinery breakdown and electronic equipment insurance.

18. ASET TETAP (lanjutan)

18. FIXED ASSETS (continued)

Aset tersebut tahun 2016 diasuransikan kepada Asuransi Jasindo dengan nilai pertanggungan all risk sebesar Rp6.045.113.732 dan gempa bumi Rp4.325.614.127 dengan premi yang dibayarkan sebesar Rp10.632.227 untuk masa 12 bulan sampai dengan 27 Juni 2017.

The assets in 2016 are insured with Asuransi Jasindo with coverage all risk insurance of Rp6,045,113,732 and earthquake Rp4,325,614,127 by premiums paid Rp10,632,227 for the period of 12 months until June 27, 2017.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the fixed assets insured

Beban penyusutan selama tahun 2016 dan 2015 masing masing adalah Rp759.148.931 dan Rp730.714.851. Dibebankan ke beban langsung lainnya (anak perusahaan) sebesar Rp 15.964.356 dan Rp36.341.679. Selebihnya masuk sebagai beban operasional tahun berjalan.

Depreciation expenses during the period 2016 and 2015 respectively is Rp759,148,931 and Rp730,714,851. Charged to other direct expenses (subsidiaries) amounting to Rp15,964,356 and Rp36,341,679. The rest entered as an operating expense for the current year.

Sebagian dari aset tetap perusahaan akan dilakukan revaluasi. Perusahaan telah melakukan pembayaran pajak revaluasi pada tanggal 31 Desember 2015. Perhitungan sementara selisih penilaian wajar aset tetap sebesar Rp224.960.286. Namun demikian perusahaan belum menentukan jenis aset tetap yang akan dilakukan penilaian kembali.

Most of of fixed assets will be revalued. The Company has paid the tax revaluation as at December 31, 2015. The provisional calculations difference of the fair value of fixed assets amounted Rp224,960,286. But the company has not determined the type fixed assets that will do the revaluation.

b. Aset dalam penyelesaian

b. Assets under construction

	31-12-2016	31-12-2015
Mutasi aset dalam penyelesaian		
Saldo awal	1.443.376.931	1.622.207.733
Penambahan tahun berjalan :		
Nilai bahan	4.116.586.397	1.300.086.822
Kapitalisasi bunga	69.529.745	27.388.767
Beban lainnya	8.058.999	451.402
Hotel Novotel (anak)	351.054.362	133.097.856
Pengurangan :		
Diklasifikasi ke aset tetap	(744.082.416)	(972.742.444)
Koreksi ke beban	(2.435.684)	(667.113.205)
Saldo akhir	<u>5.242.088.334</u>	<u>1.443.376.931</u>

Mutations of construction in progress
Beginning balance :
Additions :
Raw/Project
Interest
Other expenses
Hotel Novotel - Subsidiaries
Less :
Classified as fixed assets
Adjustment
Ending balance

Rincian aset dalam penyelesaian :

Detail of assets under construction :

	31-12-2016	31-12-2015
Landasan, Apron	348.099.110	216.155.688
Lapangan, jalan dan pagar	186.576.560	23.062.428
Gedung-gedung	366.507.431	494.802.938
Alat perhubungan udara	-	1.448.587
Public Information System	-	18.118
Instalasi Listrik dan telpon	675.909	5.245.433
Peralatan mekanik	18.632.569	103.941
Tanah	4.267.917.254	635.817.236
Komputer dan proses data	1.526.379	336.458
Peralatan kantor	51.891.791	3.039.344
Aset tetap lain lain	<u>261.331</u>	<u>63.346.760</u>
Jumlah	<u>5.242.088.334</u>	<u>1.443.376.931</u>

Runways, apron
Field, roads, fences
Buildings
Aviation equipment
Public information System
Electrical and Telephone system
Mechanical equipment
Land
Computer flight data processing system
Office equipment
Other fixed assets
Total

18. ASET TETAP (lanjutan)

18. FIXED ASSETS (continued)

Aset dalam pelaksanaan tahun 2016 dan 2015 diantaranya adalah pembangunan pengembangan bandara di Bandara Hasanudin - Makassar, Syamsudin Noor - Banjarmasin, Bandara Kulon Progo - Yogyakarta, Ahmad Yani - Semarang dan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, pembangunan warehouse di Bali oleh AP Properti serta pembangunan hotel Novotel di Denpasar Bali oleh anak perusahaan (PT Angkasa Pura Hotel). Persentase penyelesaian dari aset dalam konstruksi berdasarkan wilayah kerja :

Assets under construction in 2016 and 2015 include the construction of airport development at Hasanuddin Airports - Makassar, Syamsudin Noor Airports - Banjarmasin, Kulon Progo - Yogyakarta, Ahmad Yani - Semarang and Airports SAMS Sepinggan Balikpapan, construction warehouse in Bali by AP property and the development of the Novotel hotel in Denpasar Bali by a subsidiary (PT Angkasa Pura Hotel). Completion percentage of assets under construction consists of several projects at several airports as follows :

	31-12-2016	31-12-2015
Kantor Pusat / Head office - Jakarta	-	80,00%
Bali - I Gusti Ngurah Rai	-	37,26%
Surabaya - Juanda	1,59%	14,56%
Makassar - Sultan Hasanuddin	13,33%	34,82%
Balikpapan - SAMS	3,76%	12,32%
Biak - Frans Kaisiepo	-	-
Manado - Sam Ratulangi	11,98%	66,39%
Yogyakarta - Adi Sutjipto	12,68%	48,08%
Solo - Adi Sumarmo	26,64%	90,98%
Banjarmasin - Syamsuddin Noor	57,02%	76,29%
Lombok Praya	-	34,33%
Ambon - Pattimura	-	-
El - Tari - Kupang	-	57,96%
Commercial SBU - Bali	0,35%	56,82%
Terminal B Adi Sutjipto - Yogyakarta	0,00%	-
Proyek I Gusti Ngurah Rai - Bali	-	-
Proyek T2 Juanda - Surabaya	95,00%	-
Proyek Sepinggan - Balikpapan	-	-
Proyek Syamsuddin Noor - Banjarmasin	-	21,36%
Proyek Achmad Yani - Semarang	-	31,97%

Beberapa pengembangan bandara pelaksanaannya mengalami penundaan dari jadwal yang ditentukan. Hambatan utama dari tertundanya proyek tersebut adalah terletak pada pembebasan tanah/lahan sebagaimana terjadi di bandara Banjarmasin dan Yogyakarta serta ketersediaan sumber dana.

Some of the airport development delayed execution of the schedule. The main obstacle of delay in the project is the acquisition of land, as happened in airport in Banjarmasin airport and Yogyakarta and funds.

19. ASET TIDAK BERWUJUD	19. INTANGIBLE ASSETS		
	31-12-2016	31-12-2015	
Nilai Perolehan			<i>Acquisitions cost</i>
Perangkat lunak			<i>Software</i>
Perusahaan	64.189.964	55.396.122	<i>Corporate</i>
Entitas anak	2.005.401	2.071.503	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah	<u>66.195.365</u>	<u>57.467.625</u>	<i>Total</i>
Akumulasi Amortisasi			<i>Accumulated amortization</i>
Perangkat lunak			<i>Software</i>
Perusahaan	21.567.443	11.798.230	<i>Corporate</i>
Entitas anak	383.640	296.113	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah	<u>21.951.083</u>	<u>12.094.343</u>	<i>Total</i>
Nilai Buku	<u>44.244.282</u>	<u>45.373.282</u>	<i>Book Value</i>

Aset tak berwujud perseroan adalah pengeluaran dalam rangka pembuatan aplikasi sistem ERP yang dilakukan bekerjasama dengan :

- a. PT Abeam Consulting Indonesia sesuai dengan kontrak nomor 41/SPP/PL.02/2012/DU tanggal 3 Juli 2012 untuk modul keuangan dan integrasi pendapatan yang meliputi jasa penyediaan produk atau software, implementasi ERP dan pengadaan infrastruktur dan hardware ERP (server).
- b. PT Sansaine Exindo sesuai kontrak nomor 62/SPP/PL.02/2014/PD tanggal 14 Juli 2014 - modul Real Estate Management (REM) - Pengadaan Lisensi yang meliputi jasa pengadaan lisensi SAP ERP.
- c. PT. Konsulindo Informatika Perdana sesuai dengan kontrak nomor SPK/74/SPP/2014/PD tanggal 25 Agustus 2014 untuk modul material management (MM), plant maintenance (PM), dan real estate (RE).

Intangible assets of the company is spending in order to manufacture the ERP system applications conducted in cooperation with:

- a PT Abeam Consulting Indonesia in accordance with the contract number 41 / SPP / PL.02 / 2012 / DU dated July 3, 2012 for the financial module and integration services revenue includes the provision of a product or software, implementation and procurement of hardware and infrastructure of ERP (servers).*
- b PT Sansaine Exindo under the contract number 62 / SPP / PL.02 / 2014 / PD dated July 14, 2014 - Real Estate Management module (REM) - Procurement License which includes SAP ERP procurement services license.*
- c. PT. Konsulindo Informatika Perdana accordance with contract number SPK / 74 / SPP / 2014 / PD dated August 25, 2014 for material management module (MM), plant maintenance (PM), and real estate (RE).*

20. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	20. OTHER NON CURRENT ASSETS		
	31-12-2016	31-12-2015	
Aset hotel	144.610	-	<i>Hotel assets</i>
Aset lounge	4.210.144	1.467.421	<i>Lounge's assets</i>
Asuransi Direksi	2.003.027	367.950	<i>Insurance of Director</i>
	<u>6.357.781</u>	<u>1.835.371</u>	

Aset hotel dan aset lounge tersebut adalah pembelian aset tetap oleh anak perusahaan dan masih belum digunakan untuk operasional.

Hotel assets and the assets of the lounge is the acquisition of fixed assets by a subsidiary and are still not used for operations.

21. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	31-12-2016	31-12-2015	
Beban umum	293.213.220	224.886.695	<i>General</i>
Pelayanan penumpang	187.478.823	16.821.400	<i>Passenger service</i>
Pegawai	267.321.580	234.960.673	<i>Employee</i>
Utilitas	28.977.523	17.598.355	<i>Utilities</i>
Beban pajak	7.885.049	27.930.686	<i>Tax</i>
Persediaan	6.996.326	6.888.411	<i>Inventory</i>
Sewa	3.486.016	4.733.308	<i>Rental</i>
Beban hotel	3.931.575	3.057.600	<i>Hotels</i>
Pemeliharaan	1.529.272	4.894.982	<i>Maintenance</i>
Asuransi	357.140	-	<i>Insurance</i>
Manfaat kerja	354.556	-	<i>Employee benefit</i>
Umum lain	77.824.219	57.330.489	<i>Other general</i>
Jumlah	<u>879.355.299</u>	<u>599.102.599</u>	<i>Sub total</i>

Beban pemeliharaan yang masih harus dibayar mencakup biaya pegawai, biaya pemeliharaan landasan, entrance way, apron, saluran air, aman, parkir kendaraan, gedung terminal, kantor dan gedung lainnya, alat-alat telekomunikasi, rambu-rambu udara, kendaraan operasional, alat-alat angkut, alat pembangkit dan instalasi listrik dan air, Alat pendingin udara dan lain sebagainya

Beban utilitas yang masih harus dibayar mencakup beban sewa listrik, air, telepon, saluran telekomunikasi, sewa peralatan operasional dan trolleyman

Kenaikan signifikan beban pelayanan penumpang tahun 2016 dibandingkan 2015 karena berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan no. 193 Tahun 2015 terkait kewajiban pengelola bandara membayar konsesi 2,5%. Pembayaran dilakukan setelah audit laporan keuangan perusahaan.

Utang beban umum lainnya adalah beban terkait kesejahteraan karyawan, biaya pengobatan dan lainnya.

The maintenance accrued expenses include maintenance of the taxiway, entrance way, apron, drainage, parks, car parking terminal buildings, offices and other buildings, telecommunications equipment, air signs, vehicle operation, transportation equipment, tools power and electricity and water installations, air conditioning equipment and others

Utility accrued expenses include rent expense electric utility, water, telephone, telecommunications lines, equipment rental operations and trolleyman.

A significant Increase in the cost of passenger service by 2016 compared to 2015 due to the enactment of Regulation of the Minister of Transportation no. 193, 2015 related liability to pay airport management concession of 2.5%. Payments made after the audit of the financial statements of the company.

Receivable of other expenses is a expense of employee benefits, and other medical expenses.

22. UTANG USAHA	22. TRADE PAYABLES		
	31-12-2016	31-12-2015	
Utang usaha			<i>Trade payable</i>
Pihak ketiga			
Rupiah	1.348.370.213	638.180.551	<i>Third parties</i>
US Dollar			<i>Third parties</i>
(USD 8,790,544.78 dan 1,987,268.32)	<u>118.109.760</u>	<u>27.414.367</u>	(USD 8,790,544.78 dan 1,987,268.32)
Sub Jumlah	<u>1.466.479.973</u>	<u>665.594.918</u>	<i>Sub Total</i>
Pihak berelasi	<u>25.130.387</u>	<u>17.077.411</u>	<i>Related parties</i>
Jumlah	<u>1.491.610.360</u>	<u>682.672.329</u>	<i>Total</i>
Umur utang :			<i>Age of payable :</i>
0 - 1 tahun	1.394.195.893	612.582.558	<i>0 - 1 years</i>
1 - 2 tahun	90.519.074	23.019.118	<i>1 - 2 years</i>
2 - 3 tahun	<u>6.895.393</u>	<u>47.070.653</u>	<i>2 - 3 years</i>
	<u>1.491.610.360</u>	<u>682.672.329</u>	

23. UTANG NON USAHA	23. NON TRADE PAYABLES		
	31-12-2016	31-12-2015	
Utang non usaha			<i>Non trade payable</i>
Pihak ketiga	16.626.370	13.808.469	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	-	39.962.615	<i>Related parties</i>
Jumlah	<u>16.626.370</u>	<u>53.771.084</u>	<i>Total</i>

Utang non usaha adalah rekening yang menampung transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan seperti pembayaran pajak, pembayaran jamsostek dan lainnya yang dalam proses sudah siap untuk dibayar.

Non trade payable is an account that accommodates transactions not related with operations such as payment of taxes, social security and other payments in the process is ready to be paid.

24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	24. UNEARNED REVENUE		
	31-12-2016	31-12-2015	
Pendapatan domestik	87.277.617	83.723.040	<i>Domestic revenue</i>
Pendapatan International	203.398	4.917.077	<i>International revenue</i>
Jumlah	<u>87.481.015</u>	<u>88.640.117</u>	<i>Total</i>

Pendapatan diterima dimuka meliputi pendapatan sewa tanah, sewa ruang, papan reklame dan lainnya yang diterima dimuka untuk masa satu tahun mendatang.

Unearned income includes rental income of land, lease space, billboards and others received in advance for the period of one year.

25. UTANG JANGKA PANJANG JATUH TEMPO

25. LONG TERM DEBT - MATURITY

	31-12-2016	31-12-2015	
Terdiri dari :			<i>Consist of :</i>
Utang bank jatuh tempo			<i>Bank loan - maturity</i>
Pihak berelasi :			<i>Related Parties :</i>
Bank Mandiri Tbk.	365.262.461	273.946.846	<i>Bank Mandiri Tbk.</i>
Bank Negara Indonesia 1946, Tbk.	189.225.547	170.489.957	<i>Bank Negara Indonesia 1946, Tbk.</i>
Bank Rakyat Indonesia Tbk.	139.478.978	102.085.085	<i>Bank Rakyat Indonesia Tbk.</i>
Pihak ketiga :			<i>Third parties :</i>
Bank Syariah Mandiri	55.513.157	43.500.000	<i>Bank Syariah Mandiri</i>
Bank Victoria Syariah	-	136.622	<i>Bank Victoria Syariah</i>
Jumlah	<u>749.480.143</u>	<u>590.158.510</u>	<i>Total</i>
Utang jangka panjang lainnya jatuh tempo :			<i>Long term others - maturity</i>
Danareksa Finance	3.671.688	2.610.927	<i>Danareksa Finance</i>
Jumlah	<u>3.671.688</u>	<u>2.610.927</u>	<i>Total</i>
Jumlah	<u><u>753.151.831</u></u>	<u><u>592.769.437</u></u>	<i>Total</i>

Perusahaan dan anak perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman yaitu :

The Company and its subsidiaries obtained loan facilities as follows:

<u>Bank / banks</u>		2016	2015
Anak Perusahaan :			
Modal kerja/ <i>Working capital</i>	<i>Plafond/plafonds</i>	46.900.000	42.000.000
PT Bank BNI (Persero)	<i>Penarikan/drawdown</i>	46.900.000	42.000.000
Tahun/Year 2015, 2016	<i>Belum ditarik /remaining</i>	-	-
	<i>Saldo Utang / Balance</i>	46.900.000	33.768.862
Modal kerja/ <i>Working capital</i>	<i>Plafond/plafonds</i>	49.973.000	42.000.000
PT Bank BNI (Persero)	<i>Penarikan/drawdown</i>	49.973.000	42.000.000
	<i>Belum ditarik /remaining</i>	-	-
	<i>Saldo Utang / Balance</i>	46.581.798	33.768.862
Modal kerja/ <i>Working capital</i>	<i>Plafond/plafonds</i>	61.150.000	42.000.000
PT Bank Syariah Mandiri - Musyarakah waad	<i>Penarikan/drawdown</i>	61.150.000	-
	<i>Belum ditarik /remaining</i>	-	-
	<i>Saldo Utang / Balance</i>	61.150.000	27.469.642
PT Bank Syariah Mandiri - tanggal 23 Mei 2016/ <i>dated May 23, 2016</i>	<i>Plafond/plafonds</i>	1.800.000	-
	<i>Penarikan/drawdown</i>	1.800.000	-
	<i>Belum ditarik /remaining</i>	-	-
	<i>Saldo Utang / Balance</i>	1.800.000	-

25. UTANG JANGKA PANJANG JATUH TEMPO (lanjutan)

25. LONG TERM DEBT - MATURITY (continued)

- a. Anak perusahaan PT Angkasa Pura Suport menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Syariah Mandiri, Tbk berdasarkan perjanjian "Musyarakah" No.94 dan No 95, tanggal 19 September 2013 dengan plafond Rp 2.500.000 dan Rp 9.000.000. Jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 19 September 2014 dengan nisbah bagi hasil / suku bunga 12% efektif per tahun. Kedua perjanjian fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang terakhir perjanjian "Musyarakah" No. 82, tanggal 30 Juli 2015 dengan plafond menjadi Rp 42.000.000 dan tambahan Rp1.500.000 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016. Tidak ada syarat lain yang membatasi pemenuhan kredit tersebut selain yang telah disebut diatas.
- b. PT Angkasa Pura Suport juga memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri, Tbk melalui akad Murabahah No.93 tanggal 19 September 2013 dan No.103 tanggal 15 Juli 2014 dengan masing - masing plafond pokok sebesar Rp 15.000.000 dan sebesar Rp 15.500.000 dengan suku bunga 12% efektif per tahun jangka waktu masing - masing 4 tahun. Pinjaman ini diangsur dengan pokok dan margin masing - masing per bulannya adalah sebesar Rp 432.826 dan Rp 386.896. Pada 13 Nopember 2014, Perusahaan mendapat fasilitas KPR bedasarkan perjanjian No. 12 tanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp 3.575.200 untuk pembelian Kantor Cabang Denpasar dengan jangka waktu 10 tahun, bunga 13% flat per tahun, dengan angsuran sebesar Rp 53.381 per bulan. Tidak ada syarat lain yang membatasi pemenuhan kredit tersebut selain yang telah disebut diatas.

- a. PT Angkasa Pura Suport a subsidiary receive Working Capital Loan facility from PT Bank Syariah Mandiri, Tbk based agreements "Musyarakah" 94 and No 95, dated September,19 2013 with a limit of Rp 2.500.000 and Rp 9.000.000. The loan period up to September 19, 2014, with revenue sharing / effective interest rate of 12% per year. Both of agreement of this facility has been extended several times, the last agreement "Musyarakah" No. 82, dated July 30, 2015 with a limit of Rp 42.000.000 and an additional Rp1.500.000 until the date July 15, 2016. There are no other requirements that confine the fulfillment of such credits other than as mentioned above.
- b. PT Angkasa Pura Suport also obtained loan facilities from PT Bank Syariah Mandiri, Tbk through Murabahah 93 dated September 19, 2013 and 103 dated July 15, 2014 with each - each principal limit of Rp15.000.000 and amounted Rp15.500.000 with tribe effective interest rate of 12% per year periods each - each 4 years. This loan was repaid with the principal and margin each - each per month amounted to Rp432.826 and Rp386.896. On 13 November 2014, the Company obtained a mortgage facility agreement No. bedasarkan 12 dated November 11, 2015 amounting to Rp3.575.200 to purchase London Branch Office for a period of 10 years, of the 13% flat per annum, with installments amounting to Rp53.381 per month. There are no other requirements that confine the fulfillment of such credits other than as mentioned above.

26. UTANG LANCAR LAIN LAIN

26. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31-12-2016	31-12-2015	
Pihak ketiga :			Third Parties :
Jaminan customer	381.215.781	375.170.297	Customer guaranteed
Jaminan vendor	10.872.114	12.156.103	Vendor guaranteed
Titipan/utang lain lain	73.659.681	88.641.084	Others
Pihak Berelasi:			Related parties :
Utang iuran-iuran	188.947	1.948.218	Contribution
Imbalan kerja tantiem	25.000.000	25.000.000	Bonus
BMKG	14.189.686	15.407.598	BMKG
Jumlah	<u>505.126.209</u>	<u>518.323.300</u>	Total

26. UTANG LANCAR LAIN LAIN (lanjutan)

26. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Titipan/utang lainnya adalah titipan potongan gaji karyawan atas pinjaman karyawan yang belum disetor ke bank atau pihak lain, titipan atas hak pengelola dari kerjasama pengelolaan usaha (parkir dan lainnya) yang belum ditagihkan.

A deposit / other debt is deposited payroll deductions on employee loans that have not been paid to the bank, the deposit for the right administrator of the cooperative business management (parking and others) which have not been charged.

Utang iuran adalah iuran THT, Askes/BPJS, dana pensiun, jamsostek yang berasal dari potongan gaji karyawan atau yang menjadi kewajiban perusahaan yang belum dibayarkan ke instansi yang bersangkutan.

Debt dues are contributory Old Age Saving (THT), Askes / BPJS, pension funds, social security from the employee payroll deductions or the duty of company which have been not paid to the agency concerned.

27. UTANG BANK

27. BANK LOAN

	31-12-2016	31-12-2015
Jumlah utang	5.053.595.173	3.064.743.177
Dikurangi utang jatuh tempo	(749.480.143)	(590.158.510)
Bagian jangka panjang	4.304.115.030	2.474.584.667
Bagian jangka panjang utang bank terdiri dari		
Pihak berelasi :		
Bank Mandiri Tbk.	1.622.491.058	1.369.734.228
Bank Negara Indonesia 1946, Tbk.	435.174.988	519.540.163
Bank Rakyat Indonesia Tbk.	599.873.942	554.176.174
Sarana Multi Infrastruktur Indonesia Infrastructure Finance	834.326.042	-
Indonesia Infrastructure Finance	309.009.645	-
Pihak ketiga :		
Bank Syariah Mandiri	8.823.923	31.134.103
Bank BCA	494.415.432	-
	4.304.115.030	2.474.584.667
Rincian utang bank :		
Entitas induk :		
Bagian utang jatuh tempo	644.220.418	512.753.026
Bagian jangka panjang	4.243.683.309	2.443.450.564
Sub jumlah	4.887.903.727	2.956.203.590
Entitas anak :		
Bagian jatuh tempo	105.259.725	77.405.484
Bagian jangka panjang	60.431.721	31.134.103
Sub jumlah	165.691.446	108.539.587
Jumlah	5.053.595.173	3.064.743.177

*Total loan
Less current maturities
Non current portion*

Bank loan non current portion :

*Related parties :
Bank Mandiri Tbk.
Bank Negara Indonesia 1946, Tbk.
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Sarana Multi Infrastruktur
Indonesia Infrastructure Finance*

*Third parties :
Bank Syariah Mandiri
Bank BCA*

Detail of bank loan :

*Parent company
Current maturities
Non current portion
Sub total*

*Subsidiary :
Current maturities
Non current portion
Sub total*

Total

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOAN (continued)

Bank / banks	2016	2015	
Entitas Induk			
Sindikasi/Syndication of:	Plafond/plafonds	4.000.000.000	-
Sarana Multi Infrastruktur, Bank Mandiri,	Penarikan/drawdown	2.472.077.161	-
Bank BRI, Bank Central Asia dan	Belum ditarik /remaining	1.927.922.839	-
Indonesia Infrastructure Finance tanggal	Saldo Utang / Balance	2.472.077.162	-
18 Agustus 2016 /dated August 18, 2016			
Sindikasi/Syndication of:	Plafond/plafonds	4.400.000.000	4.000.000.000
Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI	Penarikan/drawdown	2.913.515.301	1.106.736.011
tanggal 23 Juli 2013 /dated July 23, 2013	Belum ditarik /remaining	-	2.893.263.989
	Lewat jatuh tempo penarikan/overdue	1.486.484.699	-
	Saldo Utang / Balance	2.415.826.565	2.956.203.590

Entitas induk

a. Perjanjian Kredit Sindikasi

Pada tanggal 18 Agustus 2016 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang terdiri dari :

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 PT Bank Central Asia Tbk.
 PT Indonesia Infrastructure Finance
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian kredit tersebut dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi nomor 12 tanggal 18 Agustus 2016 dihadapan Notaris Julius Purnawan, SH., MSI, Notaris di Jakarta.

Pinjaman ini ditujukan untuk :

- a. Untuk pengembangan bandar udara yang dikelola dan dalam wilayah kerja :
 - bandar udara New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo.
 - bandar udara Ahmad Yani, Semarang.
 - bandar udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin
 - bandar udara Sultan Hasanuddin, Makassar
 - bandar udara Juanda, Surabaya
- b. Investasi rutin
- c. Membiayai setiap biaya yang timbul untuk persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi dan dokumen lainnya yang wajib dibuat.

Holding

a. Syndicated Credit Agreement

On August 18, 2016 the Company signed a Syndicated Loan Agreement with the Bank and Non-Bank Financial Institutions which consists of:

The Credit Agreement is declared in the Deed of Loan Syndication Agreement No. 12 dated August 18, 2016 before Notary Julius Purnawan, SH., MSI, Notary in Jakarta.

This loan is intended for:

- a To the development of airports that are managed and in the domain:
 - New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo.
 - Ahmad Yani Airport, Semarang
 - Syamsuddin Noor Airport, Banjarmasin
 - Sultan Hasanuddin Airport, Makassar
 - Juanda Airport, Surabaya
- b Regular investments
- c Defray any costs incurred for the preparation, signing and execution of the Transaction Documents and other documents required to be made.

27. UTANG BANK (lanjutan)

a. Perjanjian Kredit Sindikasi (lanjutan)

Pihak pembiayaan tidak terikat untuk memantau atau memeriksa penggunaan jumlah yang dipinjam.

Jumlah komitmen	Rp 4.000.000.000
Yang terinci / details :	
- PT Sarana Multi Infrastruktur (persero)	
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	
- PT Bank Central Asia Tbk.	
- PT Indonesia Infrastructure Finance	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	
Total komitmen	

Jumlah pencairan fasilitas ini minimal adalah Rp50.000.000 atau apabila lebih kecil merupakan sisa komitmen.

Jangka waktu pinjaman :

- 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Juni 2031 (15 tahun)
- Masa tenggang 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- Pelunasan dilakukan setelah masa tenggang dengan cara angsuran, debitur tidak boleh melakukan pinjaman kembali setiap bagian pinjaman yang telah dilunasi.

Tingkat bunga :

- Marjin dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Marjin sebesar 2,25 % per tahun dan LPS adalah besaran tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS yang berlaku pada tanggal penetapan suku bunga.

b. Sindikasi Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI

Perseroan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri sesuai Perjanjian Transaksi Khusus Nomor CRO.KP/233/PTK/13, Akta Nomor 1341 tanggal 26 Juli 2013 Notaris Julius Pumawan, SH., Msi, sebesar Rp. 4.400.000.000,-. Pihak Angkasa Pura I sesuai dengan Surat AP Nomor AP.I.4757/KU.24/2013/PD-B tanggal 23 Juli 2013 meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pengalihan sebagian porsi pembiayaan (*sell down*) atas Fasilitas Kredit kepada BNI dan BRI.

Berdasarkan Akta Nomor 370 dan 371 Notaris Julius Pumawan,SH., Msi tanggal 18 September 2013 Bank Mandiri, BNI, BRI dan AP I telah menandatangani Akta Pengalihan Porsi Pembiayaan, dimana berdasarkan akta tersebut Bank Mandiri mengalihkan sebagian porsi pembiayaannya kepada BNI senilai Rp1.000.000.000 dan BRI senilai Rp1.000.000.000.

27. BANK LOAN (continued)

a. Syndicated Credit Agreement (continued)

Party financing is not bound to monitor or check the use of the loan.

	<i>Total commitments</i>
	<i>Plafond/Plafonds</i>
	<i>Saldo / Balance</i>
	1.350.000.000
	834.326.042
	1.000.000.000
	618.019.290
	800.000.000
	494.415.432
	500.000.000
	309.009.645
	350.000.000
	216.306.751
	<u>4.000.000.000</u>
	<u>2.472.077.160</u>

Total disbursement of these facilities is at least Rp50,000,000 or smaller if a residual commitment.

The loan periods :

- *August 23, 2016 until June 23, 2031 (15 years old)*
- *A grace period of five (5) years from the signing date.*
- *Repayment is done after the grace period by installments, the debtor should not be doing the loan back every loan has been repaid.*

Interest :

- *Margin dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Margin of 2.25% per year and the amount of LPS is the interest rate set by LPS in effect on the date of the determination of interest rates.*

b. Syndicate of Bank Mandiri, Bank BNI and Bank BRI

The company has obtained a credit facility from Bank Mandiri appropriate number CRO.KP/233/F'TK/13 Special Transaction Agreement, Deed No. 1341 July 26, 2013 Notary Pumawan Julius, SH., Msi, amounting Rp. 4.400.000.000, Angkasa Pura I Parties in accordance with the AP No. AP.I.4757/KU.24/2013/PD-B dated July 23, 2013 requested the Bank to finance a portion of the transfer (sell down) over the BNI Credit Facility and BRI

Based on Deed No. 370 and 371 Notary Pumawan Julius, SH., Msi dated 18 September 2013, Bank Mandiri, BNI, BRI and AP I have signed the Deed of Transfer of Portions Financing, which is based on the deed transferring a portion of the bank financing to BNI amounting Rp1,000,000,000 and BRI amounting Rp1,000,000,000.

27. UTANG BANK (lanjutan)

b. Sindikasi Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI (lanjutan)

Sehubungan dengan apa yang sudah diuraikan diatas Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan API sepakat dan setuju membuat Perjanjian Pembiayaan Bersama berdasarkan Akta No.372 Notaris Julius Purnawan, SH., Msi., dan adendum I (pertama) dari perjanjian no. 372, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Limit kredit

Rp 4.400.000.000

Plafonds

Sifat dan tujuan

Fasilitas kredit bersifat Non Revolving dan digunakan sebagai corporate financing untuk pembiayaan dan/ atau pembiayaan kembali proyek pengembangan bandara dan/ atau investasi

Disposition and purpose

Non-revolving credit facility is used as a corporate and financing for financing and / or refinancing of airport development projects and / or investments

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas terhitung 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Bank Mandiri yaitu tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 termasuk masa grace period dan masa Penarikan Kredit selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan kredit tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 25 Januari 2016.

Periods

Accounting facility period of 7 (seven) years from the date of signing of the Bank Credit Agreement which is dated July 26, 2013 until the date of July 25, 2020 including the period of grace period and Credit Withdrawal period for 2 (two) years 6 (six) month from the date of signing of the loan until the date of July 26, 2013 by January 25, 2016.

Tingkat bunga

Bunga dihitung hari demi hari secara efektif 1 (satu) tahun sama dengan 360 hari berdasarkan Deposit Insurance Rate dalam Rupiah untuk commercial bank yang ditetapkan 2 (dua) Hari Kerja sebelum periode suku bunga bulan berikutnya dan Lembaga Penjamin Simpanan ditambah margin sebesar 2,45%.

Interest

Interest is calculated day by day effectively by Deposit Insurance Rate in Rupiah for commercial banks set 2 (two) Business Days prior period interest rates next month from the Deposit Insurance Agency plus a margin of 2.45%.

Provisi dan Withdrawal Fee

Bank membebani provisi kredit sebesar 0,25% yang diperhitungkan dari limit kredit yang dibayar pada saat pengefektifan perjanjian. Selain itu Perusahaan juga diwajibkan membayar *Withdrawal fee* sebesar 0,25% dari penarikan kredit yang dibayar pada setiap penarikan kredit.

Provision and Withdrawal Fee

Bank add the credit provision of 0.25% pa respectively of the credit limit as well as credit agreement and withdrawal fee of 0,25% of the amount of funding realized.

Agunan kredit

Fasilitas kredit dijamin dengan seluruh aset / harta kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada.

Collateral

The credit facility is secured by all assets / assets of the Company, either in the form of movable property or immovable property, both existing and that there will be in the future.

27. UTANG BANK (lanjutan)	27. BANK LOAN (continued)
<p>b. Sindikasi Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI (lanjutan)</p> <p>Hal hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura 1 (Persero) :</p> <p>Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan perjanjian tersebut belum dinyatakan lunas maka Perseroan tidak boleh melakukan hal hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga, kecuali dalam transaksi usaha Perseroan sehari hari. b. Memperoleh kredit / pinjaman baru dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya kecuali pinjaman dari pemegang saham yang menjadi pinjaman subordinasi, hutang usaha dalam kaitannya dengan operasional proyek atau kegiatan usaha sehari-hari, pinjaman dalam bentuk obligasi atau bentuk surat hutang lainnya dimana pinjaman tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian atau seluruh fasilitas kredit, dan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya dalam rangka pembayaran fasilitas kredit apabila terdapat penyesuaian suku bunga c. Menjaminkan harta kekayaan/aset yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga. d. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit. e. Memberikan kredit kepada pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan / atau untuk kegiatan usaha yang normal termasuk kepada anak perusahaan. <p>Hal yang wajib dilakukan oleh PT Angkasa Pura 1 (Persero) :</p> <p>Menjaga rasio keuangan debitur, current rasio minimal 100%, debt service coverage minimal 100%, debt to equity ratio (DER) maksimal 300%.</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Pembayaran pokok utang bank jangka panjang masing-masing sebesar Rp540.377.024 dan Rp57.211.711.</p> <p>Manajemen menyatakan bahwa dalam periode laporan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anaknya tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas utang bank yang telah jatuh tempo yang dimilikinya.</p>	<p>b. Syndicate of Bank Mandiri, Bank BNI and Bank BRI (continued)</p> <p><i>Activities which can not be implemented by PT Angkasa Pura 1 (Persero) :</i></p> <p><i>During the entire debt incurred and must be paid by the Company under the agreement have not been revealed in full, the Company shall not do the following things:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Being a guarantee to third parties, except in the Company's day to day business transactions</i> b. <i>Getting a credit / new loan from a financial institution or other third parties unless the loans from shareholders who become subordinated loan, accounts payable in connection with the operation of projects or activities of daily business, a loan in the form of bonds or other forms of debt instruments other than the borrowings are applied for the payment of part or all of the credit facility, and a loan from a financial institution or other third party in payment of credit facilities if there is interest rate adjustment</i> c. <i>Ensure a wealth / asset that has been existing and will exist in the future to a third party</i> d. <i>Transfer or deliver to another party, in part or in full of the rights and obligations associated with the Credit Facility.</i> e. <i>Give credit to any party including but not limited to the shareholders unless the provision of loans to employees and / or for the normal course of business, including to subsidiaries</i> <p><i>Things must be done by PT Angkasa Pura 1 (Persero) :</i></p> <p><i>Maintain debtor's financial ratio, current ratio of at least 100%, debt service coverage ratio of at least 100%, debt to equity ratio (DER) maximum of 300%</i></p> <p><i>On December 31, 2016 and 2015, principal payments of long term bank debt, each for Rp540.377.024 and Rp57.211.711.</i></p> <p><i>Management ascertained that during the reporting period and as of the date of the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries have never defaulted in paying their maturing bank loans</i></p>

27. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas anak

PT Angkasa Pura Suport telah mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Mandiri Syariah yang digunakan untuk modal kerja usaha tenaga kerja Outsourcing dengan limit pembiayaan sebesar Rp9.000.000, pinjaman dijamin dengan 18 units X ray baggage, 50 units Walkthrough merk Heimann Smith tahun 2012 - 2013 dan 4 unit mobil sedan merk Toyota dan Camry tahun 2012 - 2013. Jangka waktu kredit 12 bulan dengan tingkat bunga 12% per tahun, biaya administrasi per bulan Rp90.000.

Pada September 2013 PT Angkasa Pura Suport juga mendapatkan Kredit Investasi dari Bank Syariah Mandiri untuk Investasi kendaraan yang akan disewakan kepada PT.Angkasa Pura I dengan limit pembiayaan sebesar Rp15.000.000. Selain dijamin dengan aset diatas fasilitas pinjaman ini juga dijamin dengan 24 unit kendaraan sedan toyota Altis,mobil SUV merk Fortune, Alphard, Innova, 4 unit Traktor Mover, dan satu (1) unit truk merk Toyota Hino. Jangka waktu pembiayaan 48 bulan, total margin untuk 48 bulan sebesar Rp5.662.177.

Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang diberikan kepada PT Angkasa Pura Suport (entitas anak) dari PT Bank Central Asia Tbk., berdasarkan perjanjian no. 1182516401-PK-001-013 tanggal 28 Desember 2012 dengan plafon sebesar Rp 3.600.000. Fasilitas tersebut berjangka waktu 36 bulan dengan tingkat 4,15% flat per tahun dan dijamin dengan aset entitas anak yang berupa kendaraan bermotor.

PT Angkasa Pura Suport juga mendapat fasilitas pinjaman dari Bank BNI berupa Kredit Modal Kerja Transaksional maksimum sebesar Rp40.000.000, Term Loan maksimum sebesar Rp100.000, Garansi Bank maksimum sebesar Rp15.000.000 dan Forex Line maksimum sebesar USD4,000,000 yang diikat Akta No.27 tanggal 11 Desember 2014 dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH, dan telah diperpanjang dengan posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Syarat lain adalah menjaga Current Ratio 100%, Debt Equity Ratio 2,5 X dan Debt Service Covered Ratio 100%.

27. BANK LOAN (continued)

Subsidiaries

PT Angkasa Pura Suport have obtained working capital loan from Bank Mandiri Syariah used for working capital labour supply with limit financing of Rp9,000,000, loans secured by X-ray baggage 18 units, 50 units Walkthrough - Heimann Smith year 2012 - 2013 and 4 units of Toyota Camry 2012 - 2013 , The credit period of 12 months with an interest rate of 12% per year, administrative costs Rp 90,000 per month.

In September 2013 PT Angkasa Pura Suport also get investment credit from Bank Syariah Mandiri to investment vehicles that will be leased to PT.Angkasa Pura I with a limit financing of Rp15,000,000. Besides the above facilities secured by assets of the loan is also secured with 24 units of vehicles Toyota Altis, SUV brands Fortune, Alphard, Innova, 4 units Tractor Mover, and one (1) unit of Toyota Hino Truck. The credit period of 48 month, total margin for the 48 months amounted to Rp5,662,177.

This account is a credit facility of Motor Vehicles (CLA) provided to PT Angkasa Pura Suport (subsidiaries) from PT Bank Central Asia Tbk., based on the agreement No. 1182516401-PK-001-013 dated December 28, 2012 with a ceiling of Rp 3.600.000. Facilities have a term of 36 months with a flat rate of 4,15% per annum and is secured by assets of subsidiaries in the form of motor vehicles.

PT Angkasa Pura Suport also received a credit facility from Bank BNI in the form of working capital loan amounting to a maximum Transactional Rp40,000,000, a maximum of 100,000,000 Term Loan, Bank Guarantee maximum of Rp15,000,000 and a maximum of Forex Line USD4,000,000 tied Deed No. .27 dated December 11, 2014 before Notary Muchlis Patahna, SH, and has been extended to the position until the date of December 31, 2016. Another requirement to maintain Current Ratio 100%, Debt Equity Ratio 2,5 X and Debt Service Covered Ratio 100%.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	31-12-2016	31-12-2015	
Obligasi dan Sukuk Ijarah			<i>Bonds and Sukuk Ijarah :</i>
Penerbitan obligasi	2.500.000.000	-	<i>Bond Liabilities</i>
Penerbitan Sukuk Ijarah	500.000.000	-	<i>Sukuk Ijarah</i>
Diskonto			<i>Discount</i>
Biaya penerbitan yang diamortisasi	(8.690.161)	-	<i>Amortisation of issuance cost</i>
Jumlah	<u>2.991.309.839</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>
	31-12-2016	31-12-2015	
Diskonto	8.690.161	-	<i>Discount</i>
Yang sudah diamortisasi			<i>Amortized</i>
Obligasi	(80.297)	-	<i>Bond Liabilities</i>
Sukuk Ijarah	(19.327)	-	<i>Sukuk Ijarah</i>
Diskonto yang belum diamortisasi	<u>8.590.537</u>	<u>-</u>	<i>Unamortized Discount</i>

Pada tahun 2016, Perusahaan menerbitkan obligasi ("Obligasi I Angkasa Pura 1 Tahun 2016") melalui pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia. Obligasi terbagi atas seri A, B dan C yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 22 November 2021, 22 November 2023 dan 22 November 2026 dengan harga penawaran 100% pada nilai nominal. Tingkat bunga yang ditetapkan masing-masing sebesar 8,10%, 8,40 dan 8,55% per tahun dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal emisi dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017.

In 2016, the Company issued bond ("Bonds I Angkasa Pura 1 Tahun 2016") through listing in PT Bursa Efek Indonesia. The bonds were divided into series A, B and C which are due on November 22, 2021, November 22, 2023 and November 22, 2016, respectively with bid price at 100% of its par value. The interest rate was set at 8,10%, 8,40% and 8,55% per annum, respectively and will be paid quarterly since the emission date and the first interest was made on February 22, 2017.

Selain obligasi perusahaan juga menerbitkan sukuk ijarah. Sebagaimana obligasi sukuk ijarah juga diterbitkan dalam Seri A, B dan C yang akan jatuh tempo pada 22 November 2021, 2023 dan 2026. Cicilan imbalan ijarah setiap 3 bulan sejak tanggal emisi dengan pembayaran cicilan imbalan pertama tanggal 22 Februari 2017.

Addition to the company also issued bonds Sukuk Ijarah. As bonds, Sukuk Ijarah also published in Series A, B and C, which will mature on November 22, 2021, 2023 and 2026. Ijarah Installment every 3 months after the issuance date with repayments in exchange for a first date February 22, 2017.

Dana yang diperoleh sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk pengembangan 5 (lima) bandara yaitu bandara baru Yogyakarta, Ahmad Yani-Semarang, Syamsudin Noor Banjarmasin, Juanda Surabaya dan Sultan Hasanudin Makassar.

Funds received approximately 75% (seventy five percent) will be used for the development of five (5) airport there are the new airport in Yogyakarta, Ahmad Yani Semarang, Banjarmasin Syamsudin Noor, Juanda Surabaya and Makassar Sultan Hasanuddin.

Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, antara lain batasan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah memenuhi batasan rasio keuangan tersebut.

The Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. As at 31 December 2016, the Company is in compliance with the respective covenants

Obligasi I Angkasa Pura 1 saat ini mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan Obligasi dan "AAAasy" untuk penerbitan Sukuk Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga / cicilan imbalan.

Bonds I Angkasa Pura 1 is currently rated "AAA" for the issuance of bonds and "AAAasy" for the issuance of Sukuk Ijarah of PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest / installment reward.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (lanjutan)

28. BONDS LIABILITIES AND SUKUK IJARAH (continued)

Obligasi / Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi baik langsung maupun tidak langsung dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bonds / Sukuk Ijarah are not secured by specific collateral, but either directly or indirectly secured by all assets of the Company wealth, goods moveable or immovable, either existing or that will exist in the future.

29 UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

29. OTHER LONG TERM LIABILITIES

	31-12-2016	31-12-2015	
Utang sewa guna usaha			
PT Danareksa Finance	4.616.805	8.651.102	PT Danareksa Finance
Utang jangka panjang lainnya			
Jaminan usaha pelanggan	45.186.002	34.418.012	Guarantee of Customer
Pendapatan dimuka sewa	116.157.654	121.215.216	Accrued rent revenue
Jaminan usaha pemasok	4.262.202	2.663.380	Guarantee of Vendor
Lainnya	2.030.347	-	Others
Jumlah	<u>167.636.205</u>	<u>158.296.608</u>	Total
Jumlah	<u>172.253.010</u>	<u>166.947.710</u>	Total

PT Angkasa Pura Suport berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 19 tanggal 20 Maret 2014 Notaris Wiwiek Widhi Astuti, SH, mendapatkan pembiayaan pembelian 5 unit Apron Bus dari PT Danareksa Finance sebesar Rp15.620.000 dengan tenor jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga 7,35 % dan angsuran perbulan sebesar Rp356.006 dengan opsi beli *mandatory* oleh *leese* pada akhir masa sewa guna usaha.

Based on the Deed of Lease Agreement No. 19 dated March 20, 2014 Notary Wiwiek Widhi Astuti, SH, the Company obtained financing the purchase of 5 units Apron Bus from Danareksa Finance Rp15,620,000 with a tenor of 60 months period, 7.35% interest rate and monthly installments of Rp356,006 with a buy option mandatory by Leese at the end of the lease period.

Utang jaminan merupakan jaminan yang diterima Perusahaan dari para penyewa/ tenan atas fasilitas pendukung bandara. Utang jaminan tersebut akan dibayar kembali kepada penyewa/ tenan apabila hubungan sewa menyewa dan pemakaian fasilitas berakhir.

Debt guarantee is an assurance that the Company received from the tenant on the airport support facilities. The collateral debt will be paid back to the tenant when the lease relationship and the use of the facility expires

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang berasal dari penyerahan penggunaan tanah dengan hak pengelolaan yang dikuasai oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) seluas lebih kurang 129.216 M2 yang terletak di Jalan Pramukasari, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih - Jakarta Pusat kepada PT. Duta Paramindo Sejahtera yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) berdasarkan perjanjian nomor 29 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan notaris Petrus Suandi Halim untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 20 (dua puluh) tahun. PT. Duta Paramindo Sejahtera telah memberikan uang penggantian atas penyerahan penggunaan tanah sebesar Rp. 173.407.872 (+PPN 10%).

Long-term unearned income is derived from the delivery of land use rights management controlled by PT. Angkasa Pura I (Persero) with an area of approximately 129 216 m2, located in Jalan Pramukasari Kelurahan Rawasari, District Cempaka Putih - Central Jakarta. The land lease with PT. Ambassador Paramindo Sejahtera which will be used for the construction of simple flats belonging (rusunami) under agreement number 29 dated October 21, 2009 made before a notary Peter Suandi Halim for a period of 30 (thirty) years and may be extended for an additional 20 (two twenty) years. PT. Paramindo Duta Sejahtera has provided reimbursement for the submission of land use Rp173.407.872 (+ VAT 10%).

29. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)

29. OTHER LONG TERM LIABILITIES (continued)

Rincian pendapatan diterima dimuka sewa tanah tersebut adalah :			<i>Details of unearned income such land lease are:</i>
Nilai sewa sebelum PPN		173.407.872	<i>Rental value before VAT</i>
Pajak Pertambahan Nilai 10 %		15.764.352	<i>VAT 10%</i>
Masa sewa 30 tahun sampai tahun 2039.		157.643.520	<i>Lease period of 30 years up to 2039.</i>
Pencatatan sewa dimuka :			<i>recording advance lease:</i>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Nilai sewa	157.643.520	157.643.520	<i>Net rental value</i>
Akumulasi pengakuan	36.428.304	31.356.885	<i>Accumulation of recognition</i>
Reklasifikasi ke jangka pendek/pendapatan tahun berjalan	5.057.562	5.071.419	<i>Reclassification to short term / income for the year</i>
Sewa jangka panjang	<u>116.157.654</u>	<u>121.215.216</u>	<i>Long term of rents</i>

30. LIABILITAS MANFAAT PASCA KERJA KARYAWAN

30. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Tunjangan hari tua	88.068.821	102.670.368	<i>Old age allowance</i>
Tunjangan Perumahan	26.461.184	16.562.829	<i>Housing Allowance</i>
Penghargaan Pengabdian	21.271.606	9.393.527	<i>Employee Appreciation</i>
Kesehatan Pensiun	28.711.259	23.110.276	<i>Retiree Health</i>
Dana pensiun	163.239.791	193.015.913	<i>Pension Fund</i>
Entitas anak	2.226.903	2.088.118	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah	<u>329.979.564</u>	<u>346.841.031</u>	<i>Total</i>

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris untuk menghitung dana pensiun dan program manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut :

The assumptions used by actuaries to calculate the pension fund and other long term benefits are as follows :

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Tingkat diskonto	8,40%	9,10%	<i>Discount rate</i>
Kenaikan PhDP	6%	6%	<i>PhDP increase</i>
Kenaikan PhDTHT	3%	3%	<i>PhDTHT increase</i>
Beban pajak	0%, 4%, 5%	0%, 4%, 5%	<i>Tax expenses</i>
Usia pensiun normal	56	56	<i>Normal retirement benefit</i>
Tingkat mortalita	1 % TMI III 2011	1 % TMI III 2011	<i>Mortalita rate</i>
Tingkat pengunduran diri	0,7 % pada usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun dan 0,1% pada usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun / 0,7 % for employee with age 20 to 45 years old and 0,1% with age 46 to 55 years old .		<i>Resignation rate</i>

30 LIABILITAS MANFAAT PASCA KERJA (lanjutan)	31-12-2016	31-12-2015	
a. Tunjangan hari tua (YAKKAP I)			a. <i>Old age allowance</i>
Liabilitas manfaat pasca kerja tahun 2016 dan 2015 dengan proyeksi perhitungan sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS) no. 045/KIS/LA/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 .			<i>Post employment obligation year 2016 and 2015 calculating projections up to the date of December 31, 2016 calculated by independent actuaries PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS) No. 045/KIS/LA/02/2017 dated February 10, 2017 .</i>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Liabilitas (aset) awal periode	102.670.368	143.363.798	<i>Liability (assets) at beginning</i>
Beban periode berjalan	33.855.166	32.117.564	<i>Current cost</i>
Iuran dibayar ke aset program	(71.243.633)	(71.243.631)	<i>Dues paid to the plan assets</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui sebagai Pendapatan komprehensif lain	(42.494.981)	(1.567.363)	<i>Re-measurement gains (losses) in other comprehensive income</i>
Nilai liabilitas entitas anak	2.226.904	-	
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	63.054.997	-	<i>Adjustment to unrealized obligations</i>
Nilai liabilitas bersih	<u>88.068.821</u>	<u>102.670.368</u>	<i>Net Liability (assets)</i>
Jumlah yang diakui di laporan keuangan ditentukan sebagai berikut :			<i>The amounts recognized in statement of financial position were determined as follows :</i>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Nilai kini liabilitas yang didanai	365.223.864	405.477.255	<i>Present value of funded obligation</i>
Nilai wajar aset program	342.436.944	302.806.887	<i>Fair value of plant assets</i>
Nilai liabilitas entitas anak	2.226.904	-	
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	63.054.997	-	<i>Adjustment to unrealized obligations</i>
Nilai liabilitas bersih	<u>88.068.821</u>	<u>102.670.368</u>	<i>Funding status</i>
Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditentukan sebagai berikut :			<i>The amounts recognized in statement of comprehensive income were determined as follows :</i>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Biaya jasa kini	18.936.429	19.200.487	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	36.898.430	38.959.743	<i>Interest cost</i>
Ekspektasi hasil program	(21.979.693)	(26.042.666)	<i>Expectations plan assets</i>
Beban tahun berjalan	<u>33.855.166</u>	<u>32.117.564</u>	<i>Current year cost</i>
Pendapatan Komprehensif Lain :			<i>Other comprehensive income :</i>
Awal periode	120.609.265	119.041.902	<i>Beginning period</i>
Tahun berjalan :			<i>Current year :</i>
Laba (rugi) pada kewajiban	(31.276.826)	32.236.813	<i>Gain (loss) on liabilities</i>
Laba (rugi) pada aset program	<u>73.771.808</u>	<u>(30.669.450)</u>	<i>Gain (loss) on asset program</i>
Pendapatan komprehensif lain akhir periode	<u>163.104.247</u>	<u>120.609.265</u>	<i>Other comprehensive income ending periods</i>

30. LIABILITAS MANFAAT PASCA KERJA (lanjutan)

30. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Tunjangan perumahan

Sesuai ketentuan perusahaan dalam PKB (perjanjian kerja bersama) pasal 48, bagi pegawai yang telah bekerja secara terus menerus di perusahaan selama 20 tahun diberikan tunjangan perumahan.

Liabilitas manfaat pasca kerja untuk tunjangan perumahan dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan laporan No.048/KIS/LA/02/2017 tanggal 10 February 2017 dengan proyeksi perhitungan sampai dengan posisi 31 Desember 2017.

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut :

	31-12-2016	31-12-2015
Liabilitas (aset) awal periode	16.562.829	21.946.203
Beban periode berjalan	2.915.927	3.056.553
luran dibayar ke aset program	(3.213.500)	(4.349.000)
Pendapatan komprehensif lain	864.423	(4.090.927)
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	9.331.505	-
Liabilitas (aset) akhir periode	26.461.184	16.562.829

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditentukan sebagai berikut

	31-12-2016	31-12-2015
Biaya jasa kini	1.408.709	1.300.856
Beban bunga	1.507.218	1.755.697
Beban tahun berjalan	2.915.927	3.056.553

Pendapatan Komprehensif Lain :

	31-12-2016	31-12-2015
Awal periode	8.866.433	4.775.506
Tahun berjalan :		
Laba (rugi) pada kewajiban	(864.423)	4.090.927
Laba (rugi) pada aset program	-	-
Pendapatan komprehensif lain akhir periode	8.002.010	8.866.433

b. Housing allowance

Company pursuant to section 48 in PKB (collective bargaining) for employees who have worked continuously for 20 years the company are given a housing allowance.

Post employment obligation calculated by independent actuaries PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS) for the year ended December 31, 2016 and 2015 based on No. reports No. 048/KIS/LA/02/2017 dated February 10, 2017 by calculating projections up to the date of December 31, 2017.

The amounts recognized in statement of financial position were determined as follows :

	31-12-2016	31-12-2015
Liabilitas (assets) at beginning	16.562.829	21.946.203
Current cost	2.915.927	3.056.553
Dues paid to te plan assets	(3.213.500)	(4.349.000)
Other comprehensive income	864.423	(4.090.927)
Adjustment to unrealized obligations	9.331.505	-
Liability (assets) end periods	26.461.184	16.562.829

The amounts recognized in statement of comprehensive income were determined as follows

	31-12-2016	31-12-2015
Current service cost	1.408.709	1.300.856
Interest expense	1.507.218	1.755.697
Current year cost	2.915.927	3.056.553

Other comprehensive income :

	31-12-2016	31-12-2015
Beginning period	8.866.433	4.775.506
Current year :		
Gain (loss) on liabilities	(864.423)	4.090.927
Gain (loss) on asset program	-	-
Other comprehensive income ending periods	8.002.010	8.866.433

30. LIABILITAS MANFAAT PASCA KERJA (lanjutan)

30. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Penghargaan pengabdian

Liabilitas manfaat pasca kerja untuk penghargaan pengabdian dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan laporan no. 047/KIS/LA/02/2017 tanggal 10 Februari 2016 dengan proyeksi perhitungan sampai dengan posisi 31 Desember 2017. Program ini dikelola sendiri oleh perusahaan berdasarkan keputusan direksi dan perjanjian kerja bersama dengan asosiasi dan serikat pekerja perusahaan. Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut :

c. Employee appreciation

Service pay benefits obligation are calculated by independent actuaries PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaris (KIS) for the year ended December 31, 2016 and 2015 based on reports No. 047/KIS/LA/02/2017 dated February 10, 2017 by calculating projections up to the date of December 31, 2017. The program are managed by the Company based on the Directors' decision and collective labour agreement with associated and labour union.

The amounts recognized in statement of financial position were determined as follows :

	31-12-2016	31-12-2015	
Liabilitas (aset) awal periode	9.393.527	7.896.516	Liability (assets) at beginning
Beban periode berjalan	1.628.394	1.296.982	Current cost
luran dibayar ke aset program	(501.341)	(1.766.258)	Dues paid to the plan assets
Pendapatan komprehensif lain	(207.979)	1.966.287	Other comprehensive income
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	10.959.005	-	Adjustment to unrealized obligations
Nilai liabilitas bersih	<u>21.271.606</u>	<u>9.393.527</u>	Net Liability (assets)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditentukan sebagai berikut

The amounts recognized in statement of comprehensive income were determined as follows

	31-12-2016	31-12-2015	
Biaya jasa kini	773.583	665.261	Current service cost
Beban bunga	854.811	631.721	Interest expenses
Beban tahun berjalan	<u>1.628.394</u>	<u>1.296.982</u>	Current year cost
Pendapatan Komprehensif Lain :			Other comprehensive income :
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Awal periode	650.983	2.617.270	Beginning period
Tahun berjalan :			Current year :
Laba (rugi) pada kewajiban	207.979	(1.966.287)	Gain (loss) on liabilities
Laba (rugi) pada aset program	-	-	Gain (loss) on asset program
Pendapatan komprehensif lain akhir periode	<u>858.962</u>	<u>650.983</u>	Other comprehensive income ending periods

30. LIABILITAS MANFAAT PASCA KERJA (lanjutan)

30. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Kesehatan pensiun

Liabilitas manfaat pasca kerja untuk kesehatan pensiun dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan laporan no. 046/KIS/LA/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan perhitungan proyeksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah yang diakui di laporan keuangan ditentukan sebagai berikut :

	31-12-2016	31-12-2015
Nilai kini liabilitas yang didanai	303.502.474	257.563.381
Nilai wajar aset program	270.888.457	234.453.105
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	(3.902.758)	-
Status pendanaan	28.711.259	23.110.276
Kewajiban (aset) diakui pada awal periode	23.110.276	66.375.171
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	(3.902.758)	-
Beban periode berjalan	7.152.162	88.534.688
luran dibayar ke aset program	(38.040.032)	(70.144.571)
Pendapatan Komprehensif Lain	40.391.611	(61.655.012)
Kewajiban (aset) akhir periode	28.711.259	23.110.276

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditentukan sebagai berikut :

	31-12-2016	31-12-2015
Biaya jasa kini	3.991.744	4.673.838
Biaya bunga	23.438.268	17.488.751
Dampak perubahan manfaat	-	81.387.908
Ekspektasi hasil aset program	(20.277.850)	(15.015.809)
Beban tahun berjalan	7.152.162	88.534.688
Pendapatan Komprehensif Lain :		
	31-12-2016	31-12-2015
Awal periode	32.434.544	(29.220.468)
Tahun berjalan :		
Laba (rugi) pada kewajiban	(18.509.080)	65.378.715
Laba (rugi) pada aset program	(21.882.530)	(3.723.703)
Pendapatan komprehensif lain akhir periode	(7.957.066)	32.434.544

d. Pension health

Post employment obligation for pension health are calculated by independent actuaries PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria (KIS) for the year ended December 31, 2016 and 2015 based on reports No. 046/KIS/LA/02/2017 dated February 10, 2017 by calculating projections up to the date of December 31, 2017.

The amounts recognized in statement of financial position were determined as follows :

	31-12-2016	31-12-2015
Present value of funded obligation	303.502.474	257.563.381
Fair value of plant assets	270.888.457	234.453.105
Adjustment to unrealized obligations	(3.902.758)	-
Funding status	28.711.259	23.110.276
Liabilities (assets) at beginning balance	23.110.276	66.375.171
Adjustment to unrealized obligations	(3.902.758)	-
Expenses in current period	7.152.162	88.534.688
Dues paid to the plan assets	(38.040.032)	(70.144.571)
Other comprehensive income	40.391.611	(61.655.012)
Liabilities (assets) ending periods	28.711.259	23.110.276

The amounts recognized in statement of comprehensive income were determined as follows :

	31-12-2016	31-12-2015
Current service cost	3.991.744	4.673.838
Interest cost	23.438.268	17.488.751
The impact of changes in benefits	-	81.387.908
Expectations asset program results	(20.277.850)	(15.015.809)
Current year cost	7.152.162	88.534.688
Other comprehensive income :		
Beginning period	32.434.544	(29.220.468)
Current year :		
Gain (loss) on liabilities	(18.509.080)	65.378.715
Gain (loss) on asset program	(21.882.530)	(3.723.703)
Other comprehensive income ending periods	(7.957.066)	32.434.544

30. LIABILITAS MANFAAT PASCA KERJA (lanjutan)

30. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

e. Program dana pensiun

Manfaat pasca kerja untuk program pensiun dihitung oleh aktuaris independen PT. Katsir Imam Sapto (KIS) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Aktuaria (KIS) berdasarkan laporan no. 045/KIS/LA/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan proyeksi perhitungan sampai dengan posisi 31 Desember 2017.

(Aset) liabilitas di laporan posisi keuangan :

e. Pension fund Program

Post-employment benefits to the pension plan is calculated by Post-employment benefits to the pension plan is calculated by independen actuaries PT Katsir Imam Sapto for the year ended December 31, 2016 and 2015 banded on report No.045/KIS/LA/02/2017 dated February 10, 2017 by calculating projections up to the date of December 31, 2017.

(Assets) liabilities in balance sheet :

	31-12-2016	31-12-2015	
Nilai kini liabilitas			
imbalan pasti	1.021.390.082	941.743.221	Present value of the defined benefit
Nilai wajar aset program	1.065.740.143	748.727.307	Fair value of plant assets
Status pendanaan	(44.350.061)	193.015.914	Funding status
Kewajiban program entitas anak	1.962.711	-	Obligation program subsidiaries
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	205.627.141	-	Adjustment to unrealized obligations
Status pendanaan	163.239.791	193.015.914	Funding status

	31-12-2016	31-12-2015	
Kewajiban (aset) yang diakui awal periode	193.015.913	(28.243.486)	Liabilities (assets) at beginning balance
Penyesuaian atas kewajiban yang belum terealisasi	205.627.141	-	Adjustment to unrealized obligations
Beban periode berjalan	29.780.052	73.752.097	Expenses in current period
luran dibayar ke aset program	(20.998.340)	(16.878.592)	Dues paid to the plan assets
Pendapatan Komprehensif Lain	(246.147.686)	164.385.894	Other comprehensive income
Kewajiban (aset) akhir periode	161.277.080	193.015.913	Liabilities (assets) ending periods

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ditentukan sebagai berikut :

The amounts recognized in statement of comprehensive income were determined as follows :

	31-12-2016	31-12-2015	
Biaya jasa kini	9.298.955	10.648.453	Current service cost
Biaya bunga	85.698.633	73.961.352	Interest expense
Dampak perubahan manfaat	-	72.766.540	The impact of changes in benefits
Ekspektasi hasil aset program	(65.217.536)	(83.624.247)	Expected results of plan assets
Beban tahun berjalan	29.780.052	73.752.097	Current year cost
Pendapatan Komprehensif Lain :			Other comprehensive income :
Awal periode	(216.867.647)	(52.481.753)	Beginning period
Tahun berjalan :			Current year :
Laba (rugi) pada kewajiban	(53.823.631)	76.067.262	Gain (loss) on liabilities
Laba (rugi) pada aset program	299.971.317	(240.453.156)	Gain (loss) on asset program
Pendapatan komprehensif lain akhir periode	29.280.039	(216.867.647)	Other comprehensive income ending periods

30. LIABILITAS MANFAAT PASCA KERJA (lanjutan)

30. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

The Sensitivity analysis on December 31, 2016 are as follows:

Liabilitas	Tingkat diskonto / Discount rate		Proyeksi / Projection		Liability
	(+)	(-)	Kenaikan / Increase	Penurunan / Decrease	
Imbalan pensiun	1%	1%	(90.222.822)	107.343.838	Pension fund
Tunjangan Kesehatan Hari Tua	1%	1%	(27.605.283)	32.857.131	Retiree Health
Tunjangan Hari Tua	1%	1%	(25.283.198)	28.884.117	Old age allowance
Perumahan	1%	1%	(706.378)	778.789	Housing allowance
Penghargaan pengabdian	1%	1%	(653.645)	737.919	Employee appreciation

Liabilitas	Kenaikan gaji / salary increases		Proyeksi / Projection		Liability
	(+)	(-)	Kenaikan / Increase	Penurunan / Decrease	
Imbalan pensiun	1%	1%	17.062.089	(15.158.686)	Pension fund
Tunjangan Kesehatan Hari Tua	1%	1%	-	-	Retiree Health
Tunjangan Hari Tua	1%	1%	30.080.003	(26.677.861)	Old age allowance
Perumahan	1%	1%	-	-	Housing allowance
Penghargaan pengabdian	1%	1%	733.601	(661.696)	Employee appreciation

Menurut pendapat manajemen proyeksi aktuarial yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016 tersebut cukup memadai digunakan sebagai dasar penentuan kewajiban aktuarial pada tanggal 31 Desember 2016 setelah dilakukan penyesuaian.

According to management, actuarial projections made until December 31, 2016 is adequate to use as the basis for determining the actuarial liabilities on December 31, 2016, with adjustments.

31. MODAL SAHAM

31. SHARE CAPITAL

Pemegang saham / Shareholder	2016 / 2015		
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh /Number of share issued and fully paid	% Pemilikan / ownership	Total/total
Pemerintah Indonesia / Government of The Republic of Indonesia	6.414.412	100%	6.414.412.000

Perubahan Anggaran dasar berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil Di luar Rapat PT Angkasa Pura I (Persero) no. 5 dengan Notaris Utiek R. Abdulrachman, SH., MLI., MKn mengenai diantaranya peningkatan modal dasar dan penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan no. AHU-46777.AH.01.02 Tahun 2012 pada tanggal 3 September 2012, dengan rincian sebagai berikut :

The last amendment to the Articles of Association were based on the deed of Meeting Resolution and Shareholders Meeting taken outside the meeting of PT Angkasa Pura I (Persero) No. 5 on the date mentioned above by the notary of Utiek R. Abdulrachman, SH., MLI.MKn. regarding the capital increases and additional capital of the Republic of Indonesia to the capital of the Company. The deed of amendment had been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. AHU-46777.AH.01.02 Tahun 2012 dated September 3, 2012, which details are as follows:

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

31. SHARE CAPITAL (continued)

- a. Modal Dasar Perusahaan adalah sebesar Rp12.000.000.000 yang terbagi atas 12.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham
- b. Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.188.245.000 atau sebanyak 3.188.245 saham, dengan cara penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar Rp1.388.244.029 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2011 dan dari cadangan modal sebesar Rp. 971.

Berdasarkan akta notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn no. 02 tanggal 16 Januari 2013 yang telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-AH.01.10-02672 tanggal 31 Januari 2013, Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor yang diambil dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2011 sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) sehingga seluruhnya seharga Rp300.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.488.245.000.

Pada tanggal 22 September 2015 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Julius Purnawan, SH, MSi nomor 11 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Angkasa Pura I (Persero) tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero). Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan no. AHU-AH.01.03-0972301 pada tanggal 15 Oktober 2015. Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp12.000.000.000 yang terbagi atas 12.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham, Modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp6.414.412.000 atau sebanyak 6.414.412 saham, dengan cara penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar Rp2.926.166.059 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2014 dan dari cadangan modal sebesar Rp940.

- a. *The authorized capital amounting to Rp12,000,000,000 consists of 12,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share.*

- b. *Issued and fully paid amounted to Rp3,188,245,000 or 3,188,245 shares, by additional paid in capital of the government of the Republic of Indonesia amounted to Rp1,388,244,029 based on the Government Regulation No. 76 Year 2011 and from reserved capital of Rp. 971.*

Based on notarial deed Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn no. 02 dated January 16, 2013 which has been stored in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia no. AHU-AH.01. 10-02672 dated January 31, 2013, the Company approved the increase in paid-up capital of capitalization partially taken up by the Company reserves the fiscal year 2011 amounted to 300,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full rupiah) so entirely for the whole Rp300,000,000 taken from the Republic of Indonesia. The issued and paid-up so to Rp3,488,245,000

On September 22, 2015 the amendments to the Articles of Association of the Company stated in Notarial Deed Julius Purnawan, SH, MSi number 11 Statement of General Meeting of Shareholders of PT. Angkasa Pura I (Persero) on Paid up Capital Additions and amendments of PT Angkasa Pura I (Persero). This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia with no. AHU-AH.01.03-0972301 on October 15, 2015. The authorized capital of Rp12,000,000,000 divided into 12,000,000 shares, with a nominal value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share, issued and paid up capital to Rp6,414,412,000 or as much as 6.414.412 shares, by way of increase in capital of the Republic of Indonesia Rp2,926,166,059 as the Government Regulation (PP) No. 8 Year 2014 and from capital reserves amounting to Rp940.

32. PENYERTAAN MODAL NEGARA **32. GOVERNMENT CAPITAL INVESTMENT**

	31-12-2016	31-12-2015	
Saldo awal tahun	-	2.926.166.059	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	255.096.706	-	<i>Addition during the year</i>
Pengurangan	-	(2.926.166.059)	<i>Deduction during the year</i>
Jumlah	<u>255.096.706</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>

Penambahan penyertaan pada tahun 2014 sebesar Rp2.926.166.059 adalah Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari BPYBDS sesuai Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 sebagaimana telah diungkapkan pada catatan 32.

Additional investment in 2014 amounted to Rp2,926,166,059 is the addition of the Government Capital Investment derived from BPYBDS as the Government Regulation no. 8 Tahun 2014 dated February 12, 2014 as disclosed in note 32.

Tahun 2015 atas Penyertaan Modal Negara tersebut telah dinyatakan sebagai Tambahan Setoran Modal Pemerintah. Lihat catatan 30.

In 2015, the Government Capital Investment has been declared as the Additional Government Capital. See note 30.

Penambahan penyertaan pada tahun 2016 sebesar Rp255.096.706 adalah Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari BPYBDS sesuai Peraturan Pemerintah no. 25 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana telah diungkapkan pada catatan 32.

Additional investment in 2016 amounted to Rp255,096,706 is the addition of the Government Capital Participation derived from BPYBDS as the Government Regulation no. 25 Tahun 2016 dated June 27, 2016 as disclosed in note 32.

33. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA (BPYBDS) **33. GOVERNMENT CONTRIBUTION PENDING DETERMINATION IN STATUS**

	31-12-2016	31-12-2015	
Saldo awal tahun	255.096.706	255.096.706	<i>Beginning balance</i>
Tambahan tahun berjalan	-	-	<i>Addition during the year</i>
Pengurangan tahun berjalan	(255.096.706)	-	<i>Deduction during the year</i>
Jumlah	<u>-</u>	<u>255.096.706</u>	<i>Total</i>

Saldo akhir tahun 2015 terdiri :

	2015
Bandara Ngurah Rai Bali	2.157.151
Bandara Juanda Surabaya	8.386.491
Bandara Sultan Hasanudin Makasar	1.535.867
Sam Ratulangi Manado	52.447.888
Bandara Achmad Yani Semarang	190.569.309
Jumlah	<u>255.096.706</u>

End balance 2015 comprises :

<i>Ngurah Rai Airport</i>
<i>Juanda Airport</i>
<i>Sultan Hasanudin Airport</i>
<i>Sam Ratulangi - Manado</i>
<i>Achmad Yani Airport</i>
<i>Total</i>

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) adalah suatu barang modal yang diperoleh dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), untuk dioperasikan oleh BUMN sebagai penyertaan modal.

Undetermined Status for Government Contribution (BPYBDS) is a capital goods obtained from spending State Budget (APBN) which distributed through the Ministry / Institution (K / L), to be operated by the BUMN as a capital investment.

33. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA (BPYBDS) (lanjutan)	33. GOVERNMENT CONTRIBUTION PENDING DETERMINATION IN STATUS (continued)
--	---

Apabila status proyek tersebut sudah ditentukan statusnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) maka BPYBDS tersebut akan dialihkan sesuai dengan keputusan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada pasal 3 butir 2: Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN berdasarkan dari pengelola barang dan prinsip *substance over form* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan BUMN sebagai ekuitas pemerintah pada BUMN.

Transaksi yang mempengaruhi BPYBDS selama tahun 2016 dan 2015 adalah :

- Pengurangan BPYBDS tahun 2016 adalah pengalihan pencatatan menjadi penambahan penyertaan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura 1. Besarnya jumlah pengalihan tersebut adalah sebesar Rp. 255.096.706 atas proyek Airport Security System di beberapa bandara, Proyek Fasilitas Bandara Udara Sam Ratulangi Manado dan satuan kerja di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

Once the status the projects are clarified through Government Regulations (PP), BPYBDS will be reclassified accordingly.

According to the Director General of Treasury Regulations, No. PER-10/PE3/2007 regarding the reporting procedures the Government Contribution Pending Determination In Status (BPYBDS) in the Preparation of Central Government Financial Statements in article 3 paragraph 2: State Property that is used by the state owned enterprise ased on of management of goods and the substance over form principle as described in paragraph (1) shall be reported in the Statement of Financial Position of state owned-enterprise as equity in state-owned enterprise.

Transactions that affect BPYBDS during 2016, 2015, 2014 and 2013 were:

- Reductions of BPYBDS in 2016 are due to reclassifications to become Government Equity Participation through the Indonesian Government Regulation No. 25 year 2014 dated June 27, 2016 regarding Investment Addition of the Republic of Indonesia in the Share Capital of PT Angkasa Pura 1 (Persero). The amount of diversion are Rp. 255.096.706 on Airport Security System project at several airports, the Project Airport Facility at the Sam Ratulangi Manado and Work Units Project in Ahmad Yani Airport Semarang.

34. PENGALIHAN ASET TETAP KENAVIGASIAN

34. THE TRANSFER OF NAVIGATION FIXED ASSETS

	31-12-2016	31-12-2015	
Nilai buku aset tetap kenavigasian	(270.831.524)	(270.831.524)	Book value of navigation fixed assets
Koreksi penyerahan aset	1.693.232	1.693.232	Corrections
	(269.138.292)	(269.138.292)	
Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian	408.393.524	408.393.524	Accumulated depreciations of navoigation fixed assets
Nilai bersih pengalihan aset kenavigasian	139.255.232	139.255.232	Net navigation transferred

Pengurangan modal Pemerintah melalui pengalihan aset kenavigasian ke LPPNPI berdasarkan surat dari Menteri BUMN Nomor : S-46/MBU/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang persetujuan pengalihan aset tetap kenavigasian kepada LPPNPI dengan nilai buku sebesar Rp270.831.524.

Deduction of Government capital by transfer of navigation fixed assets to LPPNPI based on a letter from the Minister of BUMN No. S-46 / MBU / 2014 dated January 30, 2014 regarding the approval of the transfer of navigation fixed assets to LPPNPI with the book value of Rp270,831,524.

34. PENGALIHAN ASET TETAP KENAVIGASIAN (lanjutan)

34. THE TRANSFER OF NAVIGATION FIXED ASSETS (continued)

Pengaruh atas pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI, adalah sebagai berikut :

Effect of navigations fixed assets transferred to Perum Airnav are :

- a. Aset tetap kenavigasian yang telah dijadikan PMN pada perusahaan diserahkan kembali sebesar nilai bukunya yaitu Rp270.831.524, sesuai dengan surat Perusahaan No.AP.1.6724/PL.07/2013/PD-B tanggal 28 November 2013 perihal revisi usulan pengalihan aset tetap kenavigasian kepada Perum LPPNPI, serta berdasarkan Berita Acara Perubahan Nilai Aset yang Diserahterimakan No. BA. 656/KU.21/2013/PD-B tanggal 30 Desember 2013.
- b. BPYBDS berupa aset tetap kenavigasian yang diserahkan kembali kepada pemerintah adalah sebesar nilai perolehan Rp731.281.272 yang terdiri dari Bandara Juanda Surabaya sebesar Rp69.306.329, Bandara Hasanuddin Makassar Rp26.009.312, Bandara Adi Sutjipto Yogya Rp17.826 dan MATSC Makassar Rp635.947.805 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp408.393.524.
- c. Penyesuaian atas aset kenavigasian yang diserahkan adalah hasil rapat klarifikasi terkait daftar aset hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adapun aset yang dikoreksi dari daftar penyerahan adalah Tanah di Surabaya sebesar Rp93.955, tanah di Kupang Rp377.625 dan MATSC Makasar sebesar Rp1.221.652.

- a. *Navigation fixed assets that have been used as PMN in the company submitted back at book value of Rp270,831,524, in accordance with the Company's letter No. AP.1.6724/PL.07/2013/PD-B dated 28 November 2013 regarding the proposed revisions to the transfer of navigation fixed assets to Perum LPPNPI, and based on the Minutes of the Asset Value Change No. handed. BA. 656/KU.21/2013/PD-B dated December 30,2013.*
- b. *BPYBDS in the form of navigation fixed assets that are handed back to the government is at cost of Rp731,281,272 consisting of Juanda Airport in Surabaya for Rp69,306,329, Hasanuddin Airport Makassar Rp26,009,312, Adi Sutjipto Airport Yogya Rp17.826 and MATSC Makassar Rp635,947,805 with accumulated depreciation of Rp408,393,524.*

Adjustments for assets transferred kenavigasian is the result of a clarification meeting related assets assessment results list Directorate General of State Assets held on October 17, 2014. The assets of the list submission is corrected in Surabaya Land of Rp93,955, land in Kupang Rp377,625 and MATSC of Rp1,221,652.

35. PENGGUNAAN SALDO LABA

35. USAGE OF RETAINED EARNINGS

	2016	2015	
- Cadangan :			<i>Reserve :</i>
Saldo awal	3.407.178.379	2.617.335.809	<i>Beginning balance</i>
Penambahan Cadangan	673.234.006	742.881.216	<i>Addition</i>
Pengurangan	-	(941)	<i>Deduction</i>
Penyesuaian	-	46.962.295	<i>Adjustment</i>
Saldo akhir	<u>4.080.412.385</u>	<u>3.407.178.379</u>	<i>End balance</i>
- Laba tahun berjalan			<i>Current Income :</i>
Laba bersih tahun lalu	841.542.506	994.135.846	<i>Balance at prior year</i>
- Pembagian dividen	(168.308.500)	(185.720.304)	<i>Divident</i>
- Penyaluran ke PKBL	-	(18.572.030)	<i>PKBL</i>
- Cadangan	(673.234.006)	(742.881.216)	<i>Reserve</i>
- Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 (revisi 2013)	-	(46.962.296)	<i>Adjustment of PSAK 24 (Revised 2013)</i>
Laba bersih tahun berjalan	<u>1.158.800.143</u>	<u>841.542.506</u>	<i>Net income current</i>
Jumlah	<u>1.158.800.143</u>	<u>841.542.506</u>	<i>Total</i>

35. PENGGUNAAN SALDO LABA (lanjutan)	35. USAGE OF RETAINED EARNINGS (continued)
Pengurangan laba yang dialokasikan untuk dividen dan cadangan perusahaan tahun 2016 berasal dari kinerja perusahaan tahun 2015 ditentukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. MK no 5 tanggal 17 Mei 2016.	<i>Reduction of profit allocated for dividends and reserves in 2016 derived from the company's performance in 2015 is determined based on the results of the Annual General Meeting of Shareholders is stated in Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, SH. MK No. 5 dated May 17, 2016.</i>
Perubahan (pengurangan) cadangan tahun 2015 adalah alokasi saldo laba menjadi tambahan modal disetor.	<i>Cahnge (reduction) of reserves in 2015 was the allocation of retained earnings into additional paid-in capital.</i>

36. KEPENTINGAN NON PENGENDALI	36. NON CONTROLLING INTEREST
Rincian kepentingan non-pengendali (kepemilikan Puskokapura) atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut	<i>Details of non-controlling interests (Puskokapura portion) in the equity and net results of consolidated subsidiaries are as follows</i>

	Kepemilikan Ownership %	Nilai tercatat / Carrying amount		
		2016 Rp	2015 Rp	
PT Angkasa Pura Logistik	2,00	1.297.459	931.630	<i>PT Angkasa Pura Logistik</i>
PT Angkasa Pura Properti	0,04	53.715	53.287	<i>PT Angkasa Pura Properti</i>
PT Angkasa Pura Hotel	0,03	32.272	31.935	<i>PT Angkasa Pura Hotel</i>
PT Angkasa Pura Suport	0,39	1.011.645	761.033	<i>PT Angkasa Pura Suport</i>
PT Angkasa Pura Retail	0,001	-	-	<i>PT Angkasa Pura Retail</i>
		<u>2.395.091</u>	<u>1.777.886</u>	

Perusahaan mempunyai 5 (lima) anak perusahaan yang dikonsolidasi. Seluruh entitas anak berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta kantor pusatnya.

The company has 5 (five) the consolidated subsidiaries. All subsidiaries head office and domiciled in Jakarta.

37. PENDAPATAN AERONAUTIKA	2016	2015	37. AERONAUTICAL REVENUES
PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara)			<i>PJP4U(Aircraft landing, placing and storing services)</i>
- Domestik	166.223.058	161.260.493	<i>Domestic -</i>
- Internasional	359.315.138	310.789.162	<i>International -</i>
Sub jumlah	<u>525.538.196</u>	<u>472.049.655</u>	<i>Sub total</i>
PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara)			<i>PJP2U(Aircraft passenger services)</i>
- Domestik	1.604.768.800	1.377.271.019	<i>Domestic -</i>
- Internasional	1.167.741.713	1.001.524.882	<i>International -</i>
Sub jumlah	<u>2.772.510.513</u>	<u>2.378.795.901</u>	<i>Sub total</i>
Aviobridge :			<i>Aviobridge :</i>
- Domestik	67.668.916	64.441.467	<i>Domestic -</i>
- Internasional	66.154.744	63.709.098	<i>International -</i>
Sub jumlah	<u>133.823.660</u>	<u>128.150.565</u>	<i>Sub total</i>
Pemakaian counter dan conveyor :			<i>Usage of counters and conveyor</i>
- Domestik	58.557.702	64.183.737	<i>Domestic</i>
- Internasional	47.205.162	40.480.343	<i>International</i>
Sub jumlah	<u>105.762.864</u>	<u>104.664.080</u>	<i>Sub total</i>

37. PENDAPATAN AERONAUTIKA (lanjutan)

37. AERONAUTICAL REVENUES (continued)

Pendapatan BHS (Sistem Pengangkutan Bagasi) :			<i>Baggage Handling System:</i>
- Domestik	22.565.630	27.584.120	<i>Domestic -</i>
- Internasional	52.087.163	43.992.580	<i>International -</i>
Sub jumlah	<u>74.652.793</u>	<u>71.576.700</u>	<i>Sub total</i>
Jumlah	<u><u>3.612.288.026</u></u>	<u><u>3.155.236.901</u></u>	<i>Total</i>

38. PENDAPATAN NON AERONAUTIKA

38. NON AERONAUTICAL REVENUES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pemakaian sarana non aeronautika			<i>Usage non-aeronautical facilities</i>
- Listrik	75.909.844	58.149.772	<i>Electricity -</i>
- Telepon	8.917.679	6.702.885	<i>Telephone -</i>
- Air	6.643.687	4.195.222	<i>Water -</i>
- Reklame	29.875.672	35.435.890	<i>Advertising -</i>
- Parkir kendaraan	119.539.769	125.812.948	<i>Parkir Lots -</i>
- Anjungan	-	685.189	<i>Galleries -</i>
- Layanan data	4.854.948	5.118.108	<i>Data services -</i>
- Pas bandara	4.276.796	4.079.064	<i>Airport pass -</i>
Sub jumlah	<u>250.018.395</u>	<u>240.179.078</u>	<i>Sub total</i>
Pendapatan sewa			<i>Rentals :</i>
- Sewa ruang	403.714.948	317.616.412	<i>Room rent -</i>
- Sewa tanah	75.482.104	47.614.902	<i>Lands rent -</i>
- Sewa tempat	1.688.936	3.018.257	<i>Spaces rent -</i>
- Sewa gedung	3.473.403	1.823.762	<i>Building rent -</i>
- Sewa kendaraan	4.547.296	4.711.481	<i>Vehicles rent -</i>
- Sewa Antena	3.662.423	2.656.241	<i>Antena rent -</i>
- Sewa Peralatan	88.733.164	49.098.097	<i>Equipments rent -</i>
Sub jumlah	<u>581.302.274</u>	<u>426.539.152</u>	<i>Sub total</i>
Pemakaian ruang tunggu	<u>96.726.698</u>	<u>71.930.334</u>	<i>Lounge</i>
Pendapatan konsesi			<i>Concessions</i>
- Domestik	739.140.446	641.961.725	<i>Domestic -</i>
- Internasional	395.742.399	335.684.448	<i>International -</i>
Sub jumlah	<u>1.134.882.845</u>	<u>977.646.173</u>	<i>Sub total</i>
Event dan promosi	<u>27.670.233</u>	<u>37.618.240</u>	<i>Event and promotion</i>
Sub jumlah	<u>27.670.233</u>	<u>37.618.240</u>	<i>Sub total</i>
Pergudangan & Logistik			<i>Warehousing & Logistics</i>
- Domestik	196.755.891	188.207.089	<i>Domestic -</i>
- Internasional	69.580.507	66.740.432	<i>International -</i>
Jasa agen regulasi	36.563.000	24.339.663	<i>Regulated agency</i>
Sub jumlah	<u>302.899.398</u>	<u>279.287.184</u>	<i>Sub total</i>
Jasa pemeliharaan dan perbaikan	<u>84.476.395</u>	<u>40.633.479</u>	<i>Maintenance and Services</i>
Jasa lain :			<i>Other services :</i>
- Perdagangan	3.966.475	3.401.031	<i>Tradings -</i>
- Ritel	44.041.160	17.158.185	<i>Retails -</i>
Sub jumlah	<u>48.007.635</u>	<u>20.559.216</u>	
Jumlah Pendapatan Non Aeronautika	<u><u>2.525.983.873</u></u>	<u><u>2.094.392.856</u></u>	<i>Total Non Aeronautical Revenues</i>

38. PENDAPATAN NON AERONAUTIKA (lanjutan)

38. NON AERONAUTICAL REVENUES (continued)

Jumlah pendapatan Aeronautika dan Non Aeronautika yang berasal dari pihak berelasi dan pihak ketiga adalah:

The company's total revenue of Aeronautical and Non Aeronautical derived from related parties and third parties are:

	2016	2015
- Pihak berelasi	375.739.154	284.339.990
- Pihak ketiga	5.762.532.745	4.965.289.767
Jumlah	<u>6.138.271.899</u>	<u>5.249.629.757</u>

Related parties -
 Third parties -

39. BEBAN PEGAWAI

39. EMPLOYEE EXPENSES

	2016	2015
Gaji upah	122.598.723	105.542.181
Tunjangan operasional	281.458.610	270.628.173
Tunjangan pangan dan beras	6.324.738	5.197.271
Tunjangan PPh	110.923.372	95.214.074
Pakaian dinas	15.883.049	13.035.795
Tunjangan pendidikan anak	38.062.740	32.838.340
Bonus	254.235.978	219.422.590
Mutasi pegawai	10.559.685	5.204.522
Obat-obatan dan dokter	49.351.199	39.328.512
Tunjangan transport	115.250.600	111.619.913
Tunjangan hari raya	32.084.887	36.366.231
Tunjangan cuti	35.402.629	33.792.276
Lain lain	6.857.583	7.611.010
Jumlah	<u>1.078.993.793</u>	<u>975.800.888</u>

Wages & Salary
 Operasional allowance
 Food allowance
 Income tax allowance
 Uniform clothing
 Education allowance
 Bonus
 Employees movement
 Medical and doctor
 Transport allowance
 Holiday allowance
 Leave allowance
 Others

40. BEBAN PEMELIHARAAN

40. MAINTENANCE EXPENSES

	2016	2015
Apron, Taxiway, dan Runway	38.385.301	39.189.290
Lapangan, jalan, pagar	34.658.888	27.118.154
Gedung gedung	48.089.347	34.158.372
Alat mekanik	123.786.989	100.105.045
Peralatan	9.775.618	8.052.249
Aset tetap lain-lain	3.310.284	3.574.441
Jumlah	<u>258.006.427</u>	<u>212.197.551</u>

Apron, Taxiway, and Runway
 Fields, roads, fences
 Buildings
 Mechanical
 Equipment
 Other fixed assets
 Total

41. BEBAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN

41. INVENTORY USAGE

	2016	2015
Operasional	13.474.758	13.046.863
Kantor	13.569.807	12.216.312
Obat-obatan	200.380	193.715
Kebersihan	238.258	154.541
BBM/pelumas	12.925.376	13.281.459
Lain lain	-	87.204
Jumlah / Total	<u>40.408.579</u>	<u>38.980.094</u>

Operational
 Office
 Medical
 Cleaning
 Fuel/ Oil
 Others

42. BEBAN UTILITAS

42. UTILITIES EXPENSES

	2016	2015	
Rekening listrik	275.136.039	278.864.874	Electricity
Rekening air	24.367.948	12.792.133	Water
Rekening telepon	17.003.867	16.406.003	Telephone
Utilitas anak	-	505.459	Subsidiaries utility
Jumlah	<u>316.507.854</u>	<u>308.568.469</u>	Total

43. BEBAN SEWA

43. RENT EXPENSES

	2016	2015	
Sewa Saluran telekomunikasi	16.052.492	12.935.516	Telecommunication channel rent
Sewa Peralatan	13.230.788	10.400.970	Equipment rent
sewa tanah	1.131.553	1.548.439	Land rent
sewa gedung	5.757.516	9.280.934	Building rent
sewa kendaraan	1.390.597	2.930.520	Vehicles rent
sewa lain	7.372.914	945.326	Others rent
Jumlah	<u>44.935.860</u>	<u>38.041.705</u>	Total

44. BEBAN UMUM & ADMINISTRASI

44. GENERAL & ADMINISTRATION EXPENSES

	2016	2015	
Audit	1.241.434	1.749.740	Audit
Pemasaran	94.628.273	88.866.809	Marketing
Perjalanan dinas	58.714.028	55.139.773	Business travel
Pendidikan dan pelatihan	34.557.438	39.420.374	Education & training
Konsultan	209.134.942	178.878.763	Consultants
CSR	28.665.516	3.020.529	CSR
Olahraga	5.352.565	5.186.462	Sports
Outsourcing administrasi	40.606.864	39.900.377	Outsourcing Administration
Makanan dan minuman	21.739.636	18.803.725	Food & beverage
Pejabat non pegawai	93.434.492	84.307.027	Non employee officers
Rapat, kegiatan organisasi	42.638.837	39.772.134	Meeting expense
Operasional lainnya	38.040.957	32.779.799	Operational others
Lain lain	19.818.735	25.280.626	Others
Jumlah	<u>688.573.717</u>	<u>613.106.138</u>	Total

45. BEBAN PAJAK

45. TAX EXPENSES

	2016	2015	
Pajak Daerah	49.670.360	40.773.430	Local Tax
Pajak Bumi dan Bangunan	73.069.351	67.610.914	Property Tax
PPh pasal 4(2)	69.485.228	43.859.496	Income tax 4(2)
Pajak lainnya	14.034.712	56.620.324	Other tax
Jumlah	<u>206.259.651</u>	<u>208.864.164</u>	Total

46. BEBAN ASURANSI	46. INSURANCE EXPENSES		
	2016	2015	
Asuransi aset	13.319.603	11.104.763	<i>Assets insurance</i>
Asuransi Liabilitas	1.758.756	3.230.000	<i>Liabilities insurance</i>
Asuransi Penumpang	732.180	704.684	<i>Passenger insurance</i>
Asuransi lain lain	175.827	661.448	<i>Other insurance</i>
Jumlah	15.986.366	15.700.895	<i>Total</i>

47. BEBAN LOW VALUE ASET	47. LOW VALUE ASSET EXPENSES		
	2016	2015	
Peralatan IT	2.848.677	2.290.085	<i>IT Equipment</i>
Peralatan Kantor	6.191.077	2.573.440	<i>Office Equipment</i>
Peralatan Olahraga	45.406	116.508	<i>Sport Equipment</i>
Peralatan Operasional	6.293.757	2.110.738	<i>Operational Equipment</i>
Inventaris Kantor	-	1.657.720	<i>Office inventory</i>
Jumlah	15.378.917	8.748.491	<i>Total</i>

Beban ini mencatat pembelian aset yang nilainya dibawah Rp10.000 dan mempunyai umur lebih dari satu tahun.

This expense recorded asset purchases whose value below Rp10,000 and have a lifespan of more than one year.

48. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	48. DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES		
	2016	2015	
Properti investasi	5.998.609	6.137.245	<i>Investment properties</i>
Lapangan, Jalan, Pagar	199.859.512	178.774.598	<i>Field, Roads, Fences</i>
Gedung-gedung	144.677.187	135.248.432	<i>Buildings</i>
Alat Perhubungan Udara	659.647	717.670	<i>Aviation equipment</i>
Peralatan	284.612.984	272.499.148	<i>Equipment</i>
Kendaraan	22.759.552	21.787.461	<i>Vehicles</i>
Instalasi	90.615.692	85.345.864	<i>Instalation</i>
Amortisasi	10.034.235	6.504.532	<i>Amortization</i>
Jumlah	759.217.418	707.014.950	<i>Total</i>

49. BEBAN IMBALAN PASCA KERJA	49. POST-EMPLOYMENT BENEFITS EXPENSES		
	2016	2015	
Dana pensiun	36.100.384	77.427.235	<i>Pension fund</i>
Tunjangan hari tua	34.013.233	32.119.779	<i>Annuity</i>
Kesehatan pasca kerja	7.152.162	88.534.688	<i>Post-Retirement Health</i>
Penghargaan pengabdian	1.628.394	2.006.087	<i>Employee apreciation</i>
Jumlah	78.894.173	200.087.789	<i>Total</i>

50. BEBAN PELAYANAN BANDARA

50. AIRPORT SERVICE EXPENSES

	2016	2015	
Operasional	31.885.516	38.133.092	<i>Operational</i>
Kebersihan Terminal	4.832.540	13.241.339	<i>Cleaning expense</i>
Trolleyman	3.536.261	2.973.567	<i>Trolleyman</i>
Pengelolaan CIP Lounge	31.417.141	23.142.187	<i>Lounge</i>
Konsesi	180.024.222	-	<i>Concessions</i>
Lain lain	32.474.837	36.773.628	<i>Others</i>
Jumlah	<u>284.170.517</u>	<u>114.263.813</u>	<i>Total</i>

51. BEBAN LANGSUNG LAINNYA

51. OTHER DIRECT EXPENSES

	2016	2015	
Perdagangan	3.797.382	15.023.374	<i>Trading</i>
Sewa	151.434.863	95.949.473	<i>Rentals</i>
Jasa	503.108.108	384.405.286	<i>Services</i>
Konstruksi	19.156.916	887.776	<i>Constructions</i>
Ritel	24.031.542	18.029.036	<i>Retails</i>
Jumlah	<u>701.528.811</u>	<u>514.294.945</u>	<i>Total</i>

52. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

52. NON OPERATING REVENUES

	2016	2015	
Pendapatan keuangan :			<i>Finance income :</i>
Jasa giro	31.459.030	16.184.717	<i>Banking fee</i>
Bunga deposito	66.678.430	46.239.880	<i>Deposit interest</i>
Bunga Obligasi dan Reksa Dana	9.136.591	16.094.309	<i>Bond & Mutual Fund interest</i>
	<u>107.274.051</u>	<u>78.518.906</u>	
Bagian laba Asosiasi	<u>2.826.087</u>	<u>15.695.636</u>	<i>Share in profit of associated entities</i>
Penghasilan lain-lain			<i>Other Income :</i>
Denda	1.925.117	8.666.250	<i>Penalty</i>
Selisih kurs operasional	16.100.145	69.024.064	<i>Exchange rate - operational</i>
Selisih penyesuaian kurs	22.242.926	63.943.986	<i>Exchange rate - adjustment</i>
Penjualan reksadana	-	2.143.999	<i>Sales of mutual funds</i>
Insidental	3.318	1.868.587	<i>Incidental</i>
Lelang	2.406.879	3.525.774	<i>Auction</i>
Rumah peristirahatan	198.251	110.467	<i>Resort house</i>
Pendapatan lain lain	41.178.895	71.210.367	<i>Others</i>
	<u>84.055.531</u>	<u>220.493.494</u>	
Jumlah	<u>194.155.669</u>	<u>314.708.036</u>	<i>Total</i>

53. BEBAN NON OPERASIONAL	53. NON OPERATING EXPENSES		
	2016	2015	
Beban keuangan	231.712.795	227.551.297	<i>Interest</i>
Asosiasi	6.470.973	9.665.730	<i>Associated</i>
Beban lainnya :			
Sumbangan	1.631.078	1.550.019	<i>Donation</i>
Ongkos angkut/bongkar	1.039.739	783.154	<i>Loading - unloading</i>
Beban administrasi	2.777.977	1.878.318	<i>Administration</i>
Jasa kustodian	20.708	32.739	<i>Custodian</i>
Beban wisma	931.755	833.332	<i>Resort house</i>
Keamanan dan dokter jaga	3.557.185	2.429.584	<i>Security and doctors</i>
Majalah dan koran	966.021	842.771	<i>Newspaper & magazine</i>
Selisih kurs	38.778.578	102.844.466	<i>Exchange rate</i>
Lelang	1.890.069	1.377.707	<i>Auction</i>
PPh 23	8.051.066	13.069.897	<i>Tax article 23</i>
Bunga obligasi	17.530.625	-	<i>Bond expense</i>
Imbalan ijarah	3.455.125	-	<i>Ijarah reward</i>
Amortisasi biaya penerbitan	99.625	-	<i>Amortization of issuance cost</i>
Kerugian penurunan piutang	9.187.756	50.738.449	<i>Impairment of receivable</i>
Lain lain	6.611.654	112.327.960	<i>Others</i>
	<u>96.528.961</u>	<u>288.708.396</u>	
Jumlah	<u>334.712.729</u>	<u>525.925.423</u>	<i>Total</i>

54. ASET KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING	54. FINANCIAL ASSETS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY				
	2016		2015		
	Mata uang asing/ <i>foreign currency</i>	Setara dalam rupiah / <i>In rupiah</i>	Mata uang asing/ <i>foreign currency</i>	Setara dalam rupiah / <i>In rupiah</i>	
	USD	Rp	USD	Rp	

ASET					ASSETS
Kas dan setara kas	51.428.922	690.999.000	20.787.884	286.768.863	<i>Cash & cash equivalent</i>
Piutang usaha	98.987	1.329.982	2.818.297	38.878.408	<i>Trade Receivables</i>
Jumlah	<u>51.527.909</u>	<u>692.328.982</u>	<u>23.606.181</u>	<u>325.647.271</u>	<i>Total</i>
LIABILITAS					LIABILITIES
Utang usaha	8.790.545	118.109.761	2.027.613	27.970.915	<i>Trade Payables</i>
Aset moneter bersih	<u>42.737.364</u>	<u>574.219.221</u>	<u>21.578.569</u>	<u>297.676.357</u>	<i>Net monetary assets</i>

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia middle rate as at 31 December 2016 and 2015

55. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

55. TRANSACTION WITH RELATED PARTY

Sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

a. Sifat hubungan berelasi

a. *Nature of relationship*

- | | |
|--|---|
| <p>1. Pemegang saham / <i>Shareholder</i></p> <p>2. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah
<i>Government related entities</i></p> <p>3. Entitas Anak /
<i>Subsidiaries</i></p> <p>4. Entitas Asosiasi /
<i>Associated entities</i></p> <p>5. Entitas Imbalan Paska Kerja /
<i>Post-employment benefits plan</i></p> <p>6. Personil, manajemen kunci /
<i>Personnels, key management</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Republik Indonesia
<i>The government of The Republic of Indonesia</i> - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk. - PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk - Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) - Indonesia Infrastructure Finance - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya /
<i>Other Stated Owners Enterprise (BUMN)</i> - Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya /
<i>Other Regional Owners Enterprise (BUMD)</i> - PT Angkasa Pura Support - PT Angkasa Pura Hotel - PT Angkasa Pura Logistik - PT Angkasa Pura Property - PT Angkasa Pura Retail - PT Jasa Marga Bali - penyertaan saham / <i>shares of stock</i> - PT Gapura Angkasa - penyertaan saham / <i>shares of stock</i> - Dana Pensiun Angkasa Pura (Dapenra) - Dewan Direksi / <i>Board of Directors</i> - Komisaris / <i>Board of Commissioners</i> |
|--|---|

b. Transaksi dengan pihak berelasi

b. *Transaction with related parties*

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi.

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered transactions with related parties.

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut :

Details of significant accounts with related parties government-owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

	2016	2015	
Aset			<i>Assets</i>
Kas dan setara kas	3.331.716.401	1.143.713.805	<i>Cash and cashequivalents</i>
Investasi dalam efek jangka pendek	-	-	<i>Short term Investments</i>
Piutang usaha	92.438.942	115.373.935	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain lain	2.399.784	118.518.984	<i>Other receivables</i>
Piutang jangka panjang	699.888	-	<i>Long term Investments</i>
Investasi jangka panjang	96.129.584	129.659.365	<i>Long term Investments</i>
Jumlah	3.523.384.599	1.507.266.089	<i>Total</i>
Persentase dari total aset	14,89%	9,01%	<i>Percentage of total assets</i>
Liabilitas			<i>Liability</i>
Utang Bank dan Pinjaman Sindikasi	5.175.809.647	3.536.494.340	<i>Long Term of Bonds & Syndication Loans</i>
Utang lancar lain lain	163.570.953	186.712.573	<i>Other current liabilities</i>
Ekuitas			<i>Equity</i>
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	255.096.706	<i>Government and pending- determination in status</i>
	5.339.380.600	3.978.303.619	
Persentase dari total liabilitas dan ekuitas	22,56%	23,79%	<i>Percentage of total liabilities & equities</i>

55. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

55. TRANSACTION WITH RELATED PARTY (continued)

d. Imbalan Kerja Manajemen Kunci			<i>Employee Benefits of Key Management Personnel</i>
Manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ringkasan jumlah imbalan kerja manajemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:			<i>The key management of the Company consists of Directors and Commissioners. The summary of employee benefits of key management is as follow:</i>
	2016	2015	
Imbalan kerja jangka pendek	32.520.000	30.679.129	<i>Short-term employee benefits</i>
Imbalan kerja jangka panjang	2.727.450	2.459.619	<i>Long-term post employee benefits</i>
	<u>35.247.450</u>	<u>33.138.748</u>	

56. INFORMASI SEGMENT OPERASI

56. OPERATION SEGMENT INFORMATION

Informasi segmen operasi adalah sebagai berikut :

Operation segment Information is as follows :

			2016			
	Kebandaraan	Non bandara	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian	
	<i>Airport</i>	<i>Non airport</i>	<i>Total</i>	<i>Elimination</i>	<i>Consolidated</i>	
PENDAPATAN USAHA						OPERATING REVENUES
Pihak Ketiga	5.587.746.192	550.525.707	6.138.271.899	-	6.138.271.899	<i>Third Parties</i>
Pihak Berelasi	88.232.699	729.217.632	817.450.331	(817.450.331)	-	<i>Related Parties</i>
Jumlah pendapatan	<u>5.675.978.891</u>	<u>1.279.743.339</u>	<u>6.955.722.230</u>	<u>(817.450.331)</u>	<u>6.138.271.899</u>	<i>Total Operating Revenue</i>
BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSES
Pihak Ketiga	3.800.288.366	688.573.717	4.488.862.083	-	4.488.862.083	<i>Third Parties</i>
Pihak Berelasi	715.667.710	91.561.561	807.229.270	(807.229.270)	-	<i>Related Parties</i>
Jumlah Beban Usaha	<u>4.515.956.076</u>	<u>780.135.278</u>	<u>5.296.091.353</u>	<u>(807.229.270)</u>	<u>4.488.862.083</u>	<i>Total Operating Expenses</i>
LABA USAHA	<u>1.160.022.815</u>	<u>499.608.061</u>	<u>1.659.630.877</u>	<u>(10.221.061)</u>	<u>1.649.409.816</u>	OPERATING INCOME
Pendapatan (Beban) Non Usaha						Non Operating Revenues (Expens
Pendapatan keuangan	-	127.876.694	127.876.694	(20.602.643)	107.274.051	<i>Financial income</i>
Penghasilan Lain-Lain	-	84.307.602	84.307.602	(252.070)	84.055.532	<i>Others revenue</i>
Beban keuangan	-	231.712.795	231.712.795	-	231.712.795	<i>Financial expense</i>
Beban Lain-Lain	-	97.733.611	97.733.611	(1.204.650)	96.528.961	<i>Others Expenses</i>
Laba (Rugi) asosiasi	-	(3.644.886)	(3.644.886)	-	(3.644.886)	<i>Income associates</i>
Laba sebelum pajak	<u>1.160.022.815</u>	<u>378.701.065</u>	<u>1.538.723.880</u>	<u>(29.871.124)</u>	<u>1.508.852.756</u>	Income before tax
Pajak penghasilan	(323.112.096)	(26.163.506)	(349.275.602)	-	(349.275.602)	<i>Income tax</i>
Laba setelah pajak	<u>836.910.719</u>	<u>352.537.559</u>	<u>1.189.448.278</u>	<u>(29.871.124)</u>	<u>1.159.577.154</u>	Net Profit
Laba diatribusikan						<i>Profit attributable to</i>
Pemilik entitas induk	836.910.719	351.760.547	1.188.671.266	(29.871.124)	1.158.800.142	<i>Equity of parent entity</i>
Kepentingan non pengendali	-	777.012	777.012	-	777.012	<i>Non-controlling interest</i>
	<u>836.910.719</u>	<u>352.537.559</u>	<u>1.189.448.278</u>	<u>(29.871.124)</u>	<u>1.159.577.154</u>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN						BALANCE SHEET
Aset segmen	22.738.340.079	1.549.882.518	24.288.222.597	(709.951.600)	23.578.270.997	<i>Segment assets</i>
Investasi asosiasi	572.512.807	1.250.000	573.762.807	(485.087.850)	88.674.957	<i>Associate investment</i>
	<u>23.310.852.886</u>	<u>1.551.132.518</u>	<u>24.861.985.404</u>	<u>(1.195.039.450)</u>	<u>23.666.945.954</u>	
Liabilitas segmen	11.432.817.858	936.745.243	12.369.563.101	(700.114.007)	11.669.449.094	<i>Segment liabilities</i>

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016 dan 2015
 (Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 For The Year Ended December 31, 2016 and 2015
 (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

56. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)	2015					56. OPERATION SEGMENT INFORMATION (continued)
	Kebandaraan <i>Airport</i>	Non bandara <i>Non airport</i>	Jumlah <i>Total</i>	Eliminasi <i>Elimination</i>	Konsolidasian <i>Consolidated</i>	
PENDAPATAN USAHA						OPERATING REVENUES
Pihak Ketiga	4.856.436.061	393.193.695	5.249.629.756	-	5.249.629.756	<i>Third Parties</i>
Pihak Berelasi	107.526.781	610.417.301	717.944.082	(717.944.082)	-	<i>Related Parties</i>
Jumlah pendapatan	4.963.962.842	1.003.610.996	5.967.573.838	(717.944.082)	5.249.629.756	<i>Total Operating Revenues</i>
BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSES
Pihak Ketiga	3.342.563.754	613.106.138	3.955.669.892	-	3.955.669.892	<i>Third Parties</i>
Pihak Berelasi	647.896.144	75.612.963	723.509.107	(723.509.107)	-	<i>Related Parties</i>
Jumlah Beban	3.990.459.898	688.719.101	4.679.178.999	(723.509.107)	3.955.669.892	<i>Total Operating Expenses</i>
LABA USAHA	973.502.944	314.891.895	1.288.394.839	5.565.025	1.293.959.864	OPERATING INCOME
Pendapatan (Beban) Non Usaha						Non Operating Revenues (Expenses)
Pendapatan keuangan	-	90.059.739	90.059.739	(9.396.834)	80.662.905	<i>Financial Income</i>
Pendapatan Lain-Lain	-	235.095.457	235.095.457	(16.745.962)	218.349.495	<i>Other Revenues</i>
Beban keuangan	-	236.108.522	236.108.522	(8.557.225)	227.551.297	<i>Financial Expenses</i>
Beban Lain-Lain	-	291.331.350	291.331.350	(2.622.955)	288.708.396	<i>Other Expenses</i>
Laba (Rugi) asosiasi	6.029.905	-	6.029.905	-	6.029.905	<i>Income associates</i>
Laba sebelum pajak	979.532.849	112.607.219	1.092.140.068	(9.397.590)	1.082.742.478	<i>Income before tax</i>
Pajak penghasilan	(245.953.459)	5.183.611	(240.769.848)	-	(240.769.848)	<i>Income tax</i>
Laba setelah pajak	733.579.390	117.790.830	851.370.220	(9.397.590)	841.972.630	Net Profit
Laba diatribusikan :						<i>Profit attributable to</i>
Pemilik entitas induk	733.579.390	117.790.830	851.370.221	(9.397.590)	841.542.507	<i>Equity of parent entity</i>
Kepentingan non pengendali	-	430.123	430.123	-	430.123	<i>Non-controlling interest</i>
	733.579.390	118.220.953	851.800.344	(9.397.590)	841.972.630	
LAPORAN POSISI KEUANGAN						STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	15.886.424.236	1.098.624.861	16.985.049.097	(355.032.277)	16.630.016.820	<i>Segment assets</i>
Investasi asosiasi	572.237.692	1.250.000	573.487.692	(481.167.850)	92.319.842	<i>Associate investment</i>
	16.458.661.928	1.099.874.861	17.558.536.789	(836.200.127)	16.722.336.662	
Liabilitas segmen	5.487.900.960	556.288.534	6.044.189.494	(350.902.058)	5.693.287.436	<i>Segment liabilities</i>

57. INSTRUMEN KEUANGAN

Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo jangka singkat atas instrumen keuangan tersebut dan utang bank menggunakan bunga mengambang (floating rate). Perusahaan dan entitas anaknya tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

57. FINANCIAL INSTRUMENT

The management considers that the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities recognized in the consolidated statement of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments and bank debt using floating interest. The Company and its subsidiaries have no financial assets and financial liabilities which are measured at fair value as at June, December 31, 2016 dan 2015.

58. TRANSAKSI NONKAS

58. NON CASH TRANSACTION

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas nonkas adalah sebagai berikut:

Supplementary information to the consolidated statements of cash flow relating to non-cash activities is as follows:

	2016	2015	
Perolehan aset dalam konstruksi melalui utang lain-lain	74.257.993	-	<i>Acquisition of assets under construction through other payable</i>
Perolehan aset tetap melalui aset dalam konstruksi	329.498.747	972.742.444	<i>Acquisition of fixed assets through asset under construction</i>
Setoran modal melalui konversi PNPM	-	2.926.167.000	<i>Payment of capital through the conversion of PNPM</i>

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT

1. Perjanjian Konsesi No. HK.201/2/8/DRJU.kum.2015 dan No/ SP.333/HK.06.03/2015/DU tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ("DJPU") dan Perseroan.

1. *Concession Agreement No. HK.201 / 2/8 / DRJU.kum.2015 and No / SP.333 / HK.06.03 / 2015 / DU dated December 15, 2015 on Services Airport Affairs, between the Directorate General of Civil Aviation and the Company.*

Perjanjian ini mengatur Pemberian Konsesi untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan atas pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

The agreement sets Providing Concessions to conduct services activities of airport services on aircraft, passengers, goods, and post that consists of supplying and / or development.

- Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara.
- Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos
- Fasilitas elektronik, listrik, air, dan instalasi limbah buangan
- Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

- *Facilities for the service activities of landing, take off, maneuvering, parking and storage of aircraft.*
- *Terminal facilities for passenger transport services, cargo, and mail*
- *Electronic facilities, electricity, water, and waste disposal installations*
- *Land for building, grounds, and industry as well as building or a building linked with the smooth air freight.*

Besaran Konsesi adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun sebagai Penerimaan Bukan Pajak dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. Nilai konsesi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada DJPU setiap 1 tahun sekali setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik paling lambat pada bulan April tahun berikutnya. Apabila ada kelebihan atau kekurangan pembayaran besaran nilai konsesi, maka akan diperhitungkan pada pembayaran besaran nilai Konsesi di tahun berikutnya.

The concession value was 2.5% (two point five percent) of the revenue of airport services per year as Non-Tax Revenue and will be evaluated every five (5) years. The concession value will be paid by the Company to DJPU once every 1 year after an audit by the Certified Public Accounting at the latest in April next year. If there is an excess or shortage of the concession value payments, it will be taken into account in the payment in the next year.

Jangka Waktu Konsesi 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) tahun.

Concession Period 2 (two) years from the date December 15, 2015 and may be extended for 30 (thirty) years.

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT (continued)

Perseroan diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra atau menugaskan Badan Usaha atau anak perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan suatu bagian atau bagian-bagian kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian ini.

The Company is granted the right to co-operation with other parties and / or partnering or assigning business entities or subsidiaries that have the ability and competence to carry out a part or parts of airport services activities, without prejudice to the responsibility and liability of the Company for the implementation of this Agreement.

2. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Bandara Ahmad Yani

Pada tanggal 17 Juni 2014 Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor PKS/21/VI/2014 dan Nomor SP.I.111/HK.09.01/2014/PD tentang Kerja Sama Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik TNI AD di Bandara International Ahmad Yani Semarang. Perjanjian kerja sama ini mempunyai maksud dan tujuan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara International Ahmad Yani Semarang untuk penerbangan sipil dan penerbangan militer dengan prinsip prinsip korporasi.

2. *Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Army in Ahmad Yani Airport*

On June 17, 2014 the Company signed a Cooperation Agreement Utilization of PKS / 21 / VI / 2014 and No. SP.I.111 / HK.09.01 / 2014 / PD on Cooperation Utilization of Most Owned Land Army in Ahmad Yani International Airport. This cooperation agreement has the sole purpose to enable the development of facilities and infrastructure Ahmad Yani International Airport in Semarang for civil aviation and military aviation with the principles of the corporation.

Ruang lingkup kerjasama adalah a) pemanfaatan tanah milik TNI AD seluas 885.500 meter persegi yang akan digunakan pengembangan bandar udara seluas 676.089 m² dan 208.411 m² untuk resapan; b) Pembayaran kontribusi kepada negara oleh AP1 adalah berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan c) Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh AP1 ke TNI AD setelah perjanjian berakhir.

The scope of cooperation is a) the utilization of the Army's land area of 885,500 square meters will be used airport development area 676,089 m² and 208,411 m² to absorption; b) Payment of contributions to the state by AP1 is in the form of regular contributions and profit sharing c) Assets acquired from the use of this cooperation will be submitted by the AP1 to the Army after the agreement expires.

Besaran kontribusi tetap per tahun sebesar 0,6% dari nilai wajar tanah yang menjadi obyek kerjasama atau $0,6\% \times \text{Rp}219.471.288 = \text{Rp}1.316.828$, kenaikan nilai tanah setiap tahun sebesar 4,14%. Pembagian keuntungan sebesar 12,29 % dari net cash flow operating dan investing (dari laporan yang diaudit) per tahun dengan asumsi nilai investasi sebesar Rp1.566.431.500.

The annual fixed contribution of 0.6% of the fair value of the land or $0.6\% \times \text{Rp}219,471,288 = \text{Rp}1,316,828$, the increase in the value of land per year of 4,14%. Distribution of profit of 12,29% of the net cash flow from operating and investing (audited statements) per year, assuming an investment of Rp1,566,431,500.

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan ini adalah selama 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak ditandatangani akad.

Period of cooperation is for 30 (thirty) years from the date the contract is signed.

Pada akhir masa kontrak tanah beserta bangunan dan fasilitas yang ada di atasnya menjadi milik Tentara Nasional Indonesian Angkatan Darat yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

At the end of the contract period, the land and existing buildings and facilities belong to the Indonesian Army that will be included in the handover of goods.

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT (continued)

3. Perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (AL) di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya.
- Pada tanggal 13 Februari 2014 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Nomor : PKS/8/II/2014 dan Nomor : SP.51/HK.09.01/2014/PD tentang Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Fasilitas Milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya untuk kepentingan penerbangan sipil maupun penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- a. Objek Permasalahan adanya perbedaan persepsi antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atas Luas Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama di area jalan dekat hanggar merpati dan lahan apron A.10 sampai dengan A.14, pemanfaatan secara bersama-sama landasan pacu Lanudal Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya beserta fasilitas yang tersedia untuk operasional penerbangan sipil dan militer.
- b. Objek perjanjian kerja sama ini adalah tanah milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 3.143.352 m² yang digunakan sebagai berikut :
- Landasan pacu dan tanah di sebelah utara Landasan pacu.
 - Landasan Pacu Lanudal Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya seluas 135.000
 - Bidang tanah sebagai taxi way, wind shock, drainase dan fasilitas lain seluas 1.021.129 m².
 - Tanah di sebelah selatan landasan pacu seluas 1.987.223 m².
 - Tanah rumput kali Turen disebelah selatan landasan pacu seluas 1.585.129 m²
 - Luas tanah untuk bangunan terminal seluas 27.272 m².
 - Bangunan Apron seluas 101.213 m² dari apron barat sampai dengan sisi utara tower.

3. *Cooperation agreements utilization of land owned by Indonesian Navy (AL) Juanda International Airport in Surabaya.*
- In February 13, 2014 the signing of a Cooperation Agreement Utilization Number: PKS / 8 / II / 2014 and No. SP.51 / HK.09.01 / 2014 / PD on Cooperation Utilization of Land and Facilities Owned Indonesian Navy International Airport Juanda Surabaya. This cooperation agreement intended to carry out the development of facilities and infrastructure Juanda International Airport for the benefit of civil aviation and aviation Indonesian Navy.*
- a. *The problem are differences in perception between PT. Angkasa Pura I (Persero) and the Indonesian Navy on Land Size Objects Cooperation Agreement in the area of the road near the hangar apron Merpati and land A.10 through A.14, the use of jointly runway Lanudal Juanda International Airport and facilities available for civil and military aviation operations.*
- b. *The object of the agreement is the land owned by Indonesian Navy covering an area of 3,143,352 m² which are used as follows:*
- *Runway and land on the north runway .*
 - *Runway Lanudal Juanda International Airport area of 135,000 m².*
 - *Land as a taxiway, wind shock, drainage and other facilities an area of 1,021,129 m²*
 - *Land on the south runway airfield covering an area of 1,987,223 m².*
 - *Turen river grass ground in the south of the runway area of 1,585,129 m²*
 - *Total land area of the terminal building covering an area of 27,272 m².*
 - *Apron buildings covering an area of 101,213 m² on the western apron up to the north side of the tower.*

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT (continued)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Taxi way, alarm area dan fillet seluas 189.701 m². - Lahan parkir mobil, taman dan pelataran seluas 43.618 m². - Rumah pompa di Banjar Kemuning seluas 130 m² - Bidang tanah dan bangunan Inner Marker seluas 40.000 m² di Sedati, Sidoarjo. <p>c. Pembayaran kontribusi kepada Kas Umum Negara oleh Perseroan adalah berupa kontribusi tetap dan keuntungan atas pemanfaatan tanah yang besarnya akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil perhitungan tim penilai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak dioperasionalkan Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Atas pembagian keuntungan hasil pengelolaan Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya.</p> <p>d. Aset yang diperoleh dari kerja sama pemanfaatan ini akan diserahkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) ke Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut setelah perjanjian berakhir dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.</p> <p>e. Telah dilakukan Pengukuran Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama oleh Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Timur dengan didampingi Perseroan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tanggal 4-5 November 2015. Dengan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para pihak sepakat bahwa batas-batas aset milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dimanfaatkan Perseroan yang akan dilakukan pengukuran oleh Tim BPN Kantor Wilayah Jawa Timur adalah mengikuti batas-batas patok yang ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. - Apabila hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN tersebut berbeda dengan hasil kesepakatan luas tanah dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Perseroan kepada BPN, maka akan dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama | <ul style="list-style-type: none"> - Taxiway, alarm area and fillet area of 189.701 m² - Car parking area, garden and courtyard area of 43 618 m². - Pump house in Banjar Kemuning area of 130 m² - Land and a building area of 40,000 m² Inner Marker in Sedati, Sidoarjo. <p>c. <i>Payment of contributions to the State Treasury by the Company is in the form of regular contributions and advantages over the use of land which amount will be determined later based on the calculation of the assessment team of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia since operationalized Terminal 2 Juanda International Airport in Surabaya. Profit sharing on the management of Terminal 2 Juanda International Airport no later than the 15th of each month.</i></p> <p>d. <i>Assets obtained from the use of co-operation will be handed over by PT. Angkasa Pura I (Persero) to Indonesian Navy after the agreement expires. The utilization period of cooperation is for 30 (thirty) years since the signing of this Agreement.</i></p> <p>e. <i>Measurements have been conducted by the Cooperative Agreement of Land Objects Team National Land Agency (BPN) Regional Office of East Java, accompanied by the Company and the Indonesian Navy on Nov. 4-5, 2015. With the following results:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The parties agreed that the limits of assets belonging to the Indonesian Navy utilized the Company which will be measured by Tim BPN Regional Office of East Java is following stakes limit indicated by the Indonesian Navy.</i> - <i>If the results of the measurements made by the BPN different with the agreement of land area in Appendix of the Cooperation Agreement which has been filed by the Company to the BPN, it will be Addendum to the Agreement of Cooperation</i> |
|--|---|

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT (continued)

- Terhadap aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang telah digunakan oleh Perseroan dan tidak termasuk dalam objek Perjanjian Kerja Sama berdasarkan hasil pengukuran tersebut, akan dimohonkan oleh Perseroan sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan
 - f. Berdasarkan Pokok-Pokok Hasil Pembahasan Ekspose Pengukuran Lahan Objek. Perjanjian Kerja Sama oleh Tim BPN Kantor Wilayah Jawa Timur dengan dihadiri oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tanggal 17 November 2015. Dengan hasil sebagai berikut :
 - Luas lahan berdasarkan data-data permohonan pengukuran yang diserahkan kepada BPN adalah 3.143.352 m² sedangkan luas lahan berdasarkan hasil pengukuran pada tanggal 4-5 November 2015 adalah 3.188.252 m², sehingga terdapat selisih kelebihan luas lahan sebesar 44.900 m². Terhadap kelebihan tersebut akan dikeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) untuk tambahan biaya pengukuran.
 - Bahwa lahan apron A.10 sampai dengan A.14 berdasarkan patok yang ditunjuk oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tidak termasuk dalam Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama
 - Bahwa terhadap hasil pengukuran di Jalan Akses Merpati perlu dilakukan revisi karena adanya kesalahan dalam penunjukkan batas ukur yang seharusnya berdasarkan patok tetapi digunakan batas pagar.
 - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut meminta agar dilakukan pengukuran per bidang pada Lahan Objek Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Nomor : SP.51/HK.09.01/2014/PD dan Nomor : PKS/8/II/2014. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut akan membuat patok-patok batas per bidang dengan melibatkan Perseroan.
- *Land assets Indonesian Navy that has been used by the Company and are not included in the object of the Cooperation Agreement is based on the measurement results, will be filed by the Company as a Additional Cooperation Agreement*
 - f. *Based on the Principles of Exposure Measurement Results Discussion Land Objects. Cooperation Agreement by Tim BPN Regional Office of East Java, attended by PT. Angkasa Pura I (Persero) and the Indonesian Navy on 17 November 2015. With the following results:*
 - *The land area based on data measurement petition submitted to BPN is 3,143,352 m² while the area of land based on the results of measurements on 4-5 November 2015 was 3,188,252 m², so there is a difference of excess land area of 44,900 m². Against these advantages will be issued Warrant of Transfer for an additional cost of measurement.*
 - *Land that apron around A.10 through A.14 based stakes appointed by Indonesian Navy are not included in the land object Cooperation Agreement*
 - *That the results of measurements around Merpati should be revised because of an error in the appointment of the limit measure that is supposed to be based peg but used fence*
 - *Indonesian Navy request that measurements per field on Land Objects Cooperation Agreement as stated in Article 3 of the Cooperation Agreement No. SP.51 / HK.09.01 / 2014 / PD and Number: PKS / 8 / II / 2014. Indonesian Navy will make the stakes limit per field by involving the Company.*

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT (lanjutan)

- Terhadap hasil pengukuran BPN tanggal 4-5 November 2015 dan permintaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut agar dilakukan pengukuran per bidang akan dibuat Addendum Perjanjian Kerja Sama yang pada prinsipnya mengatur dan mengubah Lampiran Perjanjian Kerja Sama untuk disesuaikan dengan hasil pengukuran dan luas objek per bidang pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama untuk disesuaikan setelah adanya pengukuran selanjutnya oleh BPN.
 - Pada tanggal 17 Desember 2015, dilakukan pengukuran ulang di Jalan Akses Merpati karena adanya kesalahan dalam penunjukkan batas ukur yang seharusnya berdasarkan patok, tetapi digunakan batas pagar pada pengukuran tanggal 4-5 November 2015
 - Saat ini masih menunggu ekspose dari BPN terhadap pengukuran ulang tersebut.
- g Berdasarkan hasil pengukuran ulang pada tanggal 17 Desember 2015 dan permohonan pengukuran Apron A10 s.d. A14, maka dilaksanakan ekspose pada tanggal 26 Januari 2016 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
- Hasil pengukuran objek Perjanjian Kerjasama menjadi seluas 3.159.334 m²
 - Luas tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebelah utara Hanggar Merpati yang tidak dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) seluas 32.228 m².
 - Luas Apron A10-A14 yang tidak dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) seluas 35.882 m².
 - PT. Angkasa Pura I (Persero) akan mengajukan permohonan Perjanjian Kerjasama (secara terpisah) kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atas tanah sebelah utara Hanggar Merpati dan Apron A10 s.d. A14
 - Terhadap Objek Perjanjian Kerjasama tahun 2014 akan dilakukan perubahan (Addendum) dengan mengacu pada hasil rapat pengukuran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan hasil pengukuran per bidang terhadap Objek Perjanjian Kerjasama tersebut
- *BPN measurement results on 4-5 November 2015 and requests Indonesian Navy in order to do the measurement of each field will be made Addendum Cooperation Agreement in principle regulate and modify Appendix Cooperation Agreement to be adapted to the measurement results and extensive object each field in Article 3 of the Agreement cooperation to be adjusted after the next measurement by BPN.*
 - *On December 17, 2015, performed repeat measurements at road Merpati access due to an error in the appointment of the limit measure that should be based stakes, but used the boundary fence on measurements on 4-5 November 2015*
 - *At the present moment still waiting exposure of BPN to the repeat measurements*
- g *Based on the results of repeat measurements on December 17, 2015 and request for Apron measurement A10 to A14, then the exposure held on 26 January 2016, with the main topics as follows:*
- *The results of the measurement object into a Cooperation Agreement covering 3,159,334 m² Total land area Indonesian Navy north hanggar Merpati are not in cooperation with PT. Angkasa Pura I (Persero) covering an area of 32 228 m².*
 - *Total area Apron A10-A14 are not in cooperation with PT. Angkasa Pura I (Persero) covering an area of 35 882 m²*
 - *PT. Angkasa Pura I (Persero) will apply for a Cooperation Agreement (separately) to the Indonesian Navy on land north hanggar Merpati and Apron A10 s.d. A14*
 - *The object Cooperation Agreement in 2014 will be a change (Addendum) with reference to the results of the meeting measurement BPN Regional Office of East Java province and the results of measurements each field to the the object of the Cooperation Agreement*

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT (lanjutan)

4. Perjanjian dengan Pihak Berelasi

- a. Perjanjian Kerjasama No.SP/96.HK.06.03/2012/DU : No. APP.001/PKS/2012/DU tanggal 19 September 2012 tentang Bangun Guna Serah ("BOT") atas Tanah Seluas 12.000 m2 di Sunset Road, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Angkasa Pura Properti ("PT APP")
Perjanjian ini meliputi pemanfaatan dan pengembangan tanah melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan untuk memperoleh keuntungan Komersial (profit) dan manfaat (benefit) bersama. Ruang lingkup perjanjian mencakup kegiatan dan/atau tindakan meliputi penyerahan tanah oleh Perseroan kepada PT APP, sementara APP meliputi kegiatan perijinan, perencanaan pembangunan dan pendanaan.

Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 827/Desa Kuta seluas 12.000 m2 sebagaimana Gambar Situasi No. 538/1998 tanggal 12 Agustus 1998, terletak di Jalan Sunset Road, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini secara keseluruhannya adalah selama-lamanya 32 (tiga puluh dua) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan.

Kompensasi yang akan diterima Perseroan adalah sebesar Rp39.168.000.

- b. Perjanjian Kerjasama No.SP.187/KB.03.02/2014/PD - No. APP.001/PKS/2014/DU tanggal 4 Agustus 2014 tentang Bangun Guna Serah ("BOT") atas Tanah Seluas 16.386 m2 sertifikat Hak Guna Bangunan No. 856/ Kelurahan Kuta seluas 17.200 m2 sebagaimana Gambar Situasi No. 537/1998 tanggal 12 Agustus 1998 di Sunset Road untuk Pembangunan Villatel dan Area Komersial, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT APP

4. Agreements with Related Parties

Cooperation Agreement No.SP / 96.HK.06.03 / 2012 / DU: No. APP.001 / MCC / 2012 / DU on 19 September 2012 on Build Operation Transfer ("BOT") on Land Covering an area of 12,000 m2 in Sunset Road, made by and between the Company and PT Angkasa Pura Property ("PT APP")

This agreement covers the use and development of land through the development and management activities for commercial gain (profit) and benefits (benefits) together. The scope of the agreement covers the activities and / or action involves surrendering land by the Company to PT APP, APP meliputi while permitting activities, development planning and financing.

Land based HGB Nos 827 / Desa Kuta area of 12,000 m2, as Figure Situation No. 538/1998 dated August 12, 1998, located at Jalan Sunset Road, Kuta Village, Kuta District, Badung, Bali Province.

The term of this agreement is forever 32 (thirty-two) years with six (6) months of preparation.

Compensation for the Company amounted Rp39.168.000.

Cooperation Agreement No.SP.187 / KB.03.02 / 2014 / PD - No. APP.001 / MCC / 2014 / DU dated August 4, 2014 on Build Operation Transfer ("BOT") on Land Covering an area of 16 386 m2 Broking certificate No. 856 / m2 as seluas 17.200 Kuta Village Pictures Situation No. 537/1998 dated August 12, 1998 at Sunset Road for Villatel Development and Commercial Area, created under the hand by and between the Company and PT APP

59. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

59. COMMITMENTS AND AGREEMENT (lanjutan)

Perjanjian ini meliputi pemanfaatan dan pengembangan tanah melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan untuk memperoleh keuntungan Komersial (profit) dan manfaat (benefit) bersama. Ruang lingkup perjanjian mencakup kegiatan dan/atau tindakan penyerahan tanah oleh Perseroan kepada PT APP, sementara PT APP meliputi kegiatan perijinan perencanaan pembangunan, pendanaan, pembangunan, pemasaran dan pengelolaan.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini secara keseluruhannya adalah selama-lamanya 32 (tiga puluh) tahun dengan 6 (enam) bulan persiapan sejak tanggal 4 Agustus 2014. Kompensasi yang akan diterima Perseroan adalah sebesar Rp54.000.000

5. Perjanjian Kerjasama Operasi Kulinaire.
Kerjasama Operasi Kuliner tersebut dilakukan oleh PT Angkasa Pura Hotel (anak perusahaan) pada tanggal 25 Oktober 2013 atas antara anak perusahaan dengan PT Cardig Aero Services Tbk (CAS) untuk memberikan pelayanan jasa boga penerbangan kepada Perusahaan penerbangan dan entitas lainnya di Bandar Udara Ngurah Rai Bali dengan nama usaha "Kulinair". Perjanjian dilakukan untuk jangka waktu selama 2 tahun sejak dipenuhinya kondisi prasyarat oleh masing-masing pihak. Perusahaan menyediakan hak pengusaha dan lokasi sedangkan PT Cardig Aero Services menyediakan modal kerja hingga sebesar Rp 3.600.000. Entitas kerjasama operasi Kulinaire telah beroperasi secara komersil sejak bulan November 2013 dengan komposisi kepemilikan dalam KSO adalah sebesar 40% untuk Perusahaan dan 60% untuk CAS.

This agreement covers the use and development of land through the development and management activities for commercial gain (profit) and benefits (benefits) together. The scope of the agreement covers the activities and / or actions relinquishing of land by the Company to PT APP, while PT APP includes the licensing activities of planning, financing, construction, marketing and management.

The term of this agreement is forever 32 (thirty) years with six (6) months from the date of preparation of August 4, 2014. Compensation for the Company amounted Rp54.000.000.

5. *The Joint Operation Agreement Kulinaire.*
Joint Operations Culinary was conducted by PT Angkasa Pura Hotel (subsidiary) on October 25, 2013 on the subsidiary with PT Cardig Aero Services Tbk (CAS) to provide services catering service flights on the airline company and other entities in Ngurah Rai Airport Bali the business name "Kulinair". The agreement for a period of 2 years from the fulfillment of conditions precedent by each party. The company provides the right of employers and locations while PT Cardig Aero Services to provide working capital of up to Rp 3,600,000. Entities Kulinaire joint operation has been operating commercially since November 2013 with the composition of ownership in KSO is 40% for the Company and 60% for CAS.

60. LIABILITAS KONTINJENSI

1. Gugatan dari PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) atas tidak dilaksanakannya Pembayaran sesuai dengan Standing Instruction.
Pada tanggal 5 Desember 2013, PT Bank BNI Syariah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tidak dilaksanakannya Standing Instruction oleh PT Angkasa Pura 1 (Persero) ("Perusahaan") mengenai pembayaran termin V sampai termin X ke rekening PT Bank BNI Syariah untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Internasional Lombok berdasarkan Perjanjian Pendorongan No. 03/SPP/PL.10/2008/DU tanggal 5 Maret 2008 antar PT Angkasa Pura 1 dengan PT Slipi Raya Utama. Standing Instruction yang ditandatangani oleh PT. Slipi Raya Utama, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan BNI Syariah berisi bahwa seluruh pembayaran termin ditransfer oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada PT. Slipi Raya Utama melalui rekening BNI Syariah atas nama PT. Slipi Raya Utama, pembayaran tidak dapat dialihkan dan Standing Instruction tidak dapat dibatalkan kecuali persetujuan tertulis dari BNI Syariah.

Berdasarkan permohonan pembayaran setiap Termin dari PT. Slipi Raya Utama dan Surat Pernyataan tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan pembayaran Termin V sampai Termin X dengan total sebesar Rp85.334.938 melalui rekening yang ditunjuk oleh PT. Slipi Raya Utama (rekening tidak sesuai dengan Standing Instruction).

Dalam pelaksanaannya, PT. Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan Termin Pembayaran I sampai Termin IV dengan total sebesar Rp. 44.743.693 melalui rekening BNI Syariah sesuai dengan permohonan pembayaran dari PT. Slipi Raya Utama. Pada tanggal 23 September 2009 PT. Slipi Raya Utama membuat Surat Pernyataan sehubungan perubahan pembayaran dari BNI Syariah dialihkan ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan syarat apabila ada pihak yang berkeberatan maka PT. Slipi Raya Utama akan bertanggung jawab sepenuhnya. Pemenuhan pembayaran termin V sampai X telah dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai surat permohonan pembayaran tanggal 23 September 2009 PT Slipi Raya Utama untuk dibayarkan ke rekening Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri.

60. CONTINGENCIES

1. *The lawsuit from PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) to PT. Angkasa Pura I (Persero) for non-performance in accordance payment with Standing Instruction.*
On December 5, 2013, PT Bank BNI Syariah filed a lawsuit in the District Court of Central Jakarta related to non-performance of Standing Instruction by PT Angkasa Pura 1 (Persero) ("Company") concerning the payment terms V to billings terms X to the account of PT Bank BNI Syariah for Passenger Terminal Building Project and supporting facilities in Lombok International Airport under the Agreement Chartering No. 03 / SPP / PL.10 / 2008 / DU dated March 5, 2008 between PT Angkasa Pura 1 with PT Slipi Raya Utama. Standing Instruction signed by PT. Slipi Raya Utama, PT. Angkasa Pura I (Persero) and BNI Syariah contain terms that payments transferred by PT. Angkasa Pura I (Persero) PT. Slipi Raya Utama through an account in the name of PT BNI Syariah. Slipi Raya Utama, payments can not be transferred and Standing Instruction can not be canceled unless the written consent of BNI Syariah.

Based on a request for payment of each payment terms of PT. Slipi Raya Utama and the Statement of the PT. Angkasa Pura I (Persero) has paid the payment terms V up to terms X total of Rp85,334,938 through an account appointed by PT. Slipi Raya Utama (accounts not in accordance with the Standing Instruction).

In the implementation, PT. Angkasa Pura I (Persero) has conducted Payments Terms I up to IV with a total of Rp. 44,743,693 through the accounts BNI Syariah in accordance with a request for payment of PT. Slipi Raya Utama. On September 23, 2009 PT. Slipi Raya Utama make a Statement in respect of the change of BNI Syariah payment transferred to the account of Bank Syariah Mandiri on condition if there are parties who objected to the PT. Slipi Raya Utama will take full responsibility. Fulfillment of payment terms V to X have been implemented by the Company in accordance with the payment of the request letter dated September 23, 2009 PT Slipi Raya Utama to be paid to the account of Bank Mandiri and Bank Syariah Mandiri.

60. LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

60. CONTINGENCIES (continued)

Pembayaran oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) yang tidak melalui rekening BNI Syariah inilah yang dijadikan dasar oleh BNI Syariah dalam menggugat PT. Angkasa Pura I (Persero). PT. Angkasa Pura I (Persero) dianggap wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Termin V sampai Termin X sesuai dengan Standing Instruction. Bahwa perkara BNI Syariah (sebagai Penggugat) dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) (sebagai Tergugat) dan PT. Slipi Raya Utama (sebagai Turut Tergugat) ini telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Putusan: 315/PDT/2015/PT.DKI.jo.No.556/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Adapun amar putusan adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Standing Instruction merupakan kesepakatan yang mengikat antara BNI Syariah, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Slipi Raya Utama dan sah menurut hukum
- Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran Termin V sampai Termin X sesuai dengan Standing Instruction
- Menghukum PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk melaksanakan prestasi sebesar Rp2.491.889.841 (Rupiah penuh).

Pada tanggal 13 Januari 2016, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.315/PDT/2015/PT.DKI tanggal 21 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat di atas.

Pada tanggal 6 Februari 2016, Perusahaan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sampai saat sekarang kasasi ini masih dalam proses dan Perusahaan sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung.

PT Angkasa Pura I (Persero) telah melakukan pencadangan pada tahun 2015 terhadap potensi biaya sebesar Rp85.334.938.562 (Rupiah penuh) dan Rp2.491.889.841 (Rupiah penuh).

Payment by PT. Angkasa Pura I (Persero) is not through accounts BNI Syariah is used as a base by suing PT BNI Syariah. Angkasa Pura I (Persero). PT. Angkasa Pura I (Persero) is considered in default because it does not perform the obligation of payment terms V up to X in accordance with the Standing Instruction. That case BNI Syariah (as Plaintiff) with PT. Angkasa Pura I (Persero) (as Defendant) and PT. Slipi Raya Utama (as Co-Defendant) has obtained the Decision of the District Court and the High Court with Decision Number: 315 / PDT / 2015 / PT.DKI.jo.No.556 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.PST. The verdict is as follows:

- *Stating Standing Instruction is a binding agreement between BNI Syariah, PT. Angkasa Pura I (Persero) and PT. Slipi Raya Utama and lawful*
- *Stating PT. Angkasa Pura I (Persero) in default for not making a payment installment billings V to X in accordance with the Standing Instruction*
- *Punish PT. Angkasa Pura I (Persero) to implement the achievement of Rp. 2,491,889,841 (full Rupiah).*

On January 13, 2016, the Company received a Notice of Jakarta High Court Decision 315 / PDT / 2015 / PT.DKI dated 21 September 2015 which strengthen the Central Jakarta District Court Decision.

On February 6, 2016, the Company has filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia and to the present appeal is still in process and the Company is awaiting the Supreme Court decision

PT Angkasa Pura I (Persero) has made a provision in 2015 to the potential cost of Rp85,334,938,562 (fullRupiah) and Rp2,491,889,841 (full Rupiah).

60. LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

60. CONTINGENCIES (continued)

2. Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 13/PDT.G/2016/PN/BJB tanggal 22 Februari 2016 antara Jurit Kartono,SH., Wahyu Sabruddin, S.IP, SG, MH., Bastiar, SH., Sumanto,SH,MH., Gusti Karyani Sari,SH., Zalmianto Agung Saputra, SH, MH., Danny Widodo, SH., melawan Walikota Kota Banjarbaru (Tergugat I), Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru (Tergugat II), PT Angkasa Pura I (Persero) cq. PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Tergugat III), PT Sucofindo Appraisal Utama cq. KJPP Immanuel Johnny Dan Rekan (Tergugat IV) atas pemilikan tanah dan bangunan di atasnya. Perkara ini masih dalam proses peradilan tingkat I di Pengadilan Negeri Banjarbaru

Civil Case in the District Court Banjarbaru No. 13 / PDT.G / 2016 / PN / BJB dated February 22, 2016 between Jurit Kartono, SH., Wahyu Sabruddin, S.IP, SG, MH., Bastiar, SH., Sumanto, SH, MH., Gusti Karyani Sari, SH., Zalmianto Agung Saputra, SH, MH., Danny Widodo, SH., against Mayor Banjarbaru (Defendant I), the Land Acquisition Committee Banjarbaru (Defendant II), PT Angkasa Pura I (Persero) cq. PT Angkasa Pura I (Persero) Syamsudin Noor Airport Banjarmasin (Defendant III), PT Sucofindo Appraisal Utama cq. Immanuel KJPP Johnny And Partners (Defendant IV) over the ownership of land and building thereon. The case was still in judicial proceedings level 1 at the District Court Banjarbaru.

3. Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat.

Case of Industrial Relations Disputes between Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M as Plaintiff and the Company as a Defendant.

Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No. 231/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2016 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh dan antara Hanifa Sutrisna, S.E., M.S.M sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan.

Case of Industrial Relations Disputes No. 231 / Pdt.Sus-PHI / 2016 / PN.JKT.PST dated August 26, 2016 in the Industrial Relations Court of Central Jakarta District Court by and between Hanifa Sutrisna, SE, MSM as Plaintiff and Defendant in connection with the Company as an industrial dispute which due to termination of employment by the company.

Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

The lawsuit is currently in the process of examination in the Industrial Relations Court of Central Jakarta District Court

Kecuali perkara dengan Bank BNI Syariah, Perusahaan tidak membentuk cadangan dari kemungkinan kerugian akibat putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan pemohon karena masih dalam proses pengadilan dan adanya keyakinan manajemen akan memenangkan perkara tersebut. Jumlah gugatan tersebut menurut pendapat manajemen tidak mengganggu operasional dan oleh karenanya apabila terdapat kerugian akan dibebankan langsung pada saat putusan pengadilan.

Unless the case with Bank BNI Syariah, the Company did not set up a reserve of possible losses as a result of the court verdict in favor of the applicant because it is still in litigation and the management beliefs will win the case. The number of lawsuits the case in the opinion of management does not disrupt operations and therefore if will be charged directly at the time of the verdict.

61. INFORMASI PENTING LAINNYA

61. OTHER IMPORTANT INFORMATION

1. Penilaian Kembali sebagian aset tetap

Pada tanggal 30 Desember 2015 perusahaan mengajukan permohonan penilaian kembali aset tetap kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Jakarta Pusat nomor AP.1. 6444/KU.10/2015/FD.

Perhitungan sementara selisih nilai wajar dengan nilai buku aset yang rencana akan dilakukan penilaian kembali pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 224.960.286. Dan pajak final yang telah dibayar perusahaan adalah Rp 6.748.808.589,- (rupiah penuh).

Pelaksanaan dan penyesuaian nilai aset sesuai penilaian kembali masih belum dilakukan. Perusahaan belum menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik untuk menghitung besaran nilai wajar aset.

2. Asuransi kecelakaan

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kebandarudaraan terutama dari risiko kecelakaan, perusahaan telah mempertanggungkan risiko kecelakaan tersebut dalam dua jenis asuransi

a. Jasa pertanggunggan atau asuransi kecelakaan diri penumpang pesawat udara dalam negeri & luar negeri di area bandara untuk bandara udara di lingkungan PT Angkasa Pura 1 (Persero) dan

b. Jasa pertanggunggan atas penutupan asuransi tanggung jawab ganti rugi kerugian terhadap pengguna jasa bandar udara/pihak ketiga akibat pengoperasian bandar udara (*Airport Liability Insurance*) PT Angkasa Pura 1 (Persero).

Kedua risiko tersebut dipertanggungkan :

Tahun 2015 dipertanggungkan dalam premi asuransi pertanggunggan kepada PT Asuransi Jasa Raharja Putra dengan premi sebesar Rp 4.190.000 yang terbagi dari Rp 960.000 untuk kecelakaan diri penumpang dan Rp 3.230.000 untuk ganti rugi kerugian pengguna jasa bandar udara/pihak ketiga. Jangka waktu premi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Tahun 2016 dipertanggungkan dalam premi asuransi pertanggunggan kepada PT Asuransi Jasa Raharja Putra dengan premi sebesar Rp 12.779.935 yang terbagi dari Rp 2.786.875 untuk kecelakaan diri penumpang dan Rp 9.993.060 untuk ganti rugi kerugian pengguna jasa bandar udara/pihak ketiga. Jangka waktu premi adalah 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018. Cara pembayaran dilakukan secara bertahap sekali setiap tahun.

1. Revaluation Fixed Assets

On December 30, 2015 the company applied for revaluation to the Directorate General of Taxes through the Head of Regional Office DJP Jakarta AP.1 numbers. 6444 / KU.10 / 2015 / FD.

The difference in the calculation of fair value and book value of assets to be revalued at the date of December 31, 2015 amounted to Rp 224 960 286. And the final tax that has been paid by the company is Rp 6.748.808.589, - (full rupiah).

Implementation and adjustment of asset value in accordance revaluation has not been made. The Company has not appointed the Office of Public Appraisal Service to calculate the fair value of the asset.

2. Accident Insurance

To improve service to users of airport services, especially from the risk of accidents, the company has underwrite the risk of such accidents in the two types of insurance

a. Insured or personal accident insurance in domestic and international passenger aircraft at the airport area for airports of PT Angkasa Pura 1 (Persero) and

b. Airport liability insurance coverage for compensation of loss to airport service users / third parties as a result of airport operations PT Angkasa Pura 1 (Persero).

Both of these risks are insured:

In 2015 these risks are insured in the insurance premiums to PT Asuransi Jasa Raharja Putra with premium of Rp 4.190.000 divided Rp 960.000 for personal accident passengers and Rp 3.230.000 for compensation damages airport service users / third parties. The term of the premium is from January 1 to December 31, 2015.

In 2016 these risks are insured in the insurance premiums to PT Asuransi Jasa Raharja Putra with premium of Rp 12.779.935 divided Rp 2.786.875 for personal accident passengers and Rp 9.993.060 for compensation damages airport service users / third parties. The term of the premium is from February 1, 2016 to December 31, 2018. Payment is made in stages once every year.

61. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

61. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

3. Terdapat kepemilikan tanah antara PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda Surabaya dan TNI Angkatan Laut yang masing-masing saling mengklaim bahwa seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti yang memadai.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda – Surabaya mencatat aset tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor: KEP-23/X/1981;661/KMK.011/1981;KM.217/AU.106/Pbb.81 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pengalihan Pengelolaan Penerbangan Sipil di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dari Departemen Pertahanan dan Keamanan kepada Departemen Perhubungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tanggal 19 September 1984 dimana kekayaan negara pada Bandara Internasional Juanda telah dipisahkan dan menjadi tambahan modal pemerintah pada Perusahaan Umum Angkasa Pura I.

Tanah pada areal Bandara Juanda yang dikuasai oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Juanda Surabaya telah disertifikatkan Oleh TNI AL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, masing masing tertanggal 16 September 1991, tercatat atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI Cq. Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL), dengan rincian sertifikat tanah sebagai berikut :

Nomor Hak <i>Use rights</i>	Desa / Village	Luas / Area <i>M2</i>
1	Pabean	3.622
1	Semampir	775.819
1	Peranti	1.078.273
3	Banjar Kemining	962.656
1	Cemandi	199.695
4	Sedati Agung	192.486
1	Pulungan	255.485
1	Sedati Gede	238.649

Upaya proses penyelesaian pencatatan ganda aset tanah antara PT Angkasa Pura 1 dan TNI angkatan Laut telah beberapa kali dilakukan namun hal tersebut masih gagal utk menyelesaikan sengkata tanah tersebut.

3. A land ownership dispute between PT Angkasa Pura I (Persero) Branch Juanda Surabaya and Indonesian National Army-Navy which are each claiming that all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Airport Juanda - Surabaya noted land assets in accordance with the Joint Decree (SKB) The Minister of Defence Security / Commander of the Armed Forces, Minister of Transportation and Minister of Finance No. KEP-23 / X / 1981; 661 / KMK.011 / 1981; KM.217 / AU.106 / Pbb.81 dated October 28, 1981 regarding the Transfer of Management of Civil Aviation in the Navy Air Base Juanda from the Department of Defense and Security to the Department of Transportation and Government Regulation No. 30 of 1984 dated 19 September 1984 in which the wealth of the country in Juanda International Airport has been separated and become additional government capital in the Public Company Angkasa Pura I .

A land in the area of Juanda Airport were controlled by PT Angkasa Pura I (Persero) Branch Juanda was certified by the Indonesian National Army - Navy in Land Office Sidoarjo.

Based on the Land Registration Certificate issued by the Head of the District Land Sidoarjo, respectively dated 16 September 1991, registered on behalf of the Department of Defense and Security RI cq. Indonesian National Army-Navy (TNI-AL), land certificates as follows

The effort of settlement process of double recording between PT Angkasa Pura 1 and the Indonesian National Army - Navy was arranged several times, however these still failed to settle the land dispute.

62. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

Perseroan dan anak perusahaan yang mempunyai aktivitas usaha utama dalam bidang pengelolaan kebandarudaraan, terpengaruh terhadap risiko bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen mengidentifikasi, menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana instrumen keuangan dari arus kas masa mendatang akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang jangka panjang atas pinjaman bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI untuk keperluan modal kerja dan pengembangan bandara dalam mata uang rupiah dengan suku bunga mengambang yaitu suku bunga LPS ditambah dengan 2,45%. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas kepada perusahaan dan anak perusahaan. Tidak terdapat pinjaman Perseroan dan anak perusahaan yang dikenakan suku bunga tetap.

Perseroan dan anak perusahaan tidak mempunyai kebijakan khusus untuk memperkecil risiko perubahan suku bunga dalam bentuk lindung nilai (hedging). Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Analisa sensitivitas risiko pasar dari tingkat suku bunga adalah kenaikan/penurunan bunga sebesar 1% pada 31 Desember 2016 maka akan berdampak sebagai berikut :

1. Kenaikan/penurunan imbal balik dari investasi aset keuangan kurang lebih sebesar Rp 21.673.869.
2. Kenaikan /penurunan beban bunga pinjaman kurang lebih sebesar Rp 28.979.766.

62. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES

The Company and its subsidiaries that have major business activities in the field of airport management, is susceptible to interest risk, credit risk, and liquidity risk. Management identify, examine and approve the management policy risks, as summarized below.

a. *Cash flows interest rate risk*

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Current exposure related to this risk mainly arises from the rupiah denominated long term Mandiri Bank, BRI Bank and BNI Bank loans for or working capital purposes and the development of airports in the rupiah currency with floating interest rates that LPS interest rate plus 2.45%. Loans with floating interest rates pose a risk of cash flow to the company and its subsidiaries. There is no loans of the Company and its subsidiaries are subject to a fixed rate.

The Company and its subsidiaries do not have specific policies to minimize the risk of interest rate changes in the form of hedging. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducted a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rate.

Sensitivity analysis of market risk is the increasing / decreasing of the interest rate of 1% on December 31, 2016, it will have the following effects:

- 1 The Increasing / decreasing in the reciprocal of the financial asset investments of approximately Rp 21.673.869.*
- 2 The increasing / decreasing of loan interest expense of approximately Rp 28.979.766.*

62. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

62. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

b. Risiko nilai tukar mata uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar terutama terkait dengan kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha, dan utang bank.

Perusahaan dan entitas anak mempunyai saldo kas dan piutang dalam mata uang asing. Risiko adanya kenaikan atau penurunan yang disebabkan perubahan nilai mata uang asing setidaknya juga mempunyai pengaruh terhadap kegiatan perusahaan. Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki utang atau kontrak dengan pihak ketiga dalam mata uang asing dalam jumlah yang signifikan dan oleh karenanya manajemen perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan lindung nilai atas transaksi dalam mata uang asing tersebut, setidaknya untuk saat ini.

Analisa sensitivitas risiko pasar dari nilai tukar mata uang asing adalah kenaikan/penurunan bunga sebesar 1 % pada 31 Desember 2016 maka akan berdampak sebagai berikut :

1. Kenaikan/penurunan imbal balik dari aset keuangan dalam mata uang asing kurang lebih sebesar Rp 2.460.910.
2. Kenaikan /penurunan beban dari kewajiban dalam mata uang asing kurang lebih sebesar Rp 1.189.508.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Perseroan dan anak perusahaan sebagai akibat dari pihak ketiga yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Pihak ketiga yang utama adalah perusahaan airline dalam dan luar negeri.

Perseroan mengelola risiko kredit sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan atas jumlah dan umur piutang untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih
- Meningkatkan kinerja bagian penagihan.

Perseroan dan anak perusahaan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. *Currency exchange rate risk*

Currency exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in exchange rates primarily related to cash and cash equivalents, accounts receivable, accounts payable, and bank debt.

The Company and its subsidiaries had cash balances and receivables in foreign currency. The risk of an increase or decrease due to changes in foreign currency exchange rate at least also have an influence on the company's activities. Companies and subsidiaries not have debt or contract with third parties in foreign currency in a significant amount and therefore the company's management decided not to hedge the transaction in foreign currency, at least for now.

Sensitivity analysis of market risk is the increasing / decreasing of the exchange rate of 1% on December 31, 2016, it will have the following effects:

- 1 The Increasing / decreasing in the reciprocal of the financial asset in foreign currency of approximately Rp 2.460.910.*
- 2 The increasing / decreasing of foreign currency liabilities expense of approximately Rp 1.1.189.508.*

c. *Credit Risk*

Credit risk is the risk of losses faced by the Company and its subsidiaries as a result of a third party that failed to discharge contractual obligations. The third party is the Airline's company.

The Company manages credit risk as follow:

- Monitor the amount and age of accounts receivable to reduce the risk of doubtful account*
- Improve the performance of the collection.*

The Company and its subsidiaries minimized the credit risk of financial assets such as cash equivalents to maintain a minimum cash balance and choosing a quality bank for the placement of funds.

62. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

62. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Berikut ini adalah ikhtisar umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetap tidak mengalami penurunan nilai

The following is the summary of financial assets not due or no impairment in value and over due and at the end of the reporting period remain no impairment in value:

31 Desember 2016 / December 31, 2016

	Jatuh tempo tidak mengalami penurunan Nilai <i>Maturity does not decline Value</i>	Lewat jatuh tempo tidak mengalami penurunan nilai <i>Past due not impaired</i>	Jumlah <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	4.896.214.996	-	4.896.214.996	<i>Cash and equivalent</i>
Investasi jangka pendek	295.240.649	-	295.240.649	<i>Short term investments</i>
Piutang usaha	373.942.945	108.827.304	482.770.249	<i>Trade Receivables</i>
Piutang lain-lain	12.444.652	-	12.444.652	<i>Other Receivables</i>

31 Desember 2015 / December 31, 2015

	Jatuh tempo tidak mengalami penurunan Nilai <i>Maturity does not decline Value</i>	Lewat jatuh tempo tidak mengalami penurunan nilai <i>Past due not impaired</i>	Jumlah <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	1.746.272.845	-	1.746.272.845	<i>Cash and equivalent</i>
Investasi jangka pendek	216.446.783	-	216.446.783	<i>Short term investments</i>
Piutang usaha	462.001.452	109.169.334	571.170.786	<i>Trade Receivables</i>
Piutang lain-lain	128.562.450	-	128.562.450	<i>Other Receivables</i>

d Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmen jangka pendek terkait dengan instrumen keuangan.

Mengingat bahwa Perseroan pada saat ini sedang melakukan pengembangan bandara, peningkatan kapasitas dan pelayanan serta fasilitas kebandarudaraan kearah bandara bertaraf International. Kegiatan Perseroan tersebut membutuhkan sumber dana arus kas masa depan yang cukup signifikan, maka dalam mengelola likuiditas Perseroan selalu memantau arus kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai operasional rutin.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perseroan memenuhi komitmen jangka pendek dan operasi normal. Selain itu Perseroan juga melakukan pengawasan terhadap proyeksi arus kas secara aktual dengan melakukan evaluasi terhadap aset dan liabilitas keuangan jatuh tempo.

d Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the entity will have difficulty in obtaining funds to meet short-term commitments associated with financial instruments.

Currently the Company conducting business development by establishing airport, increase the capacity of airport facilities and services as well as to the international standard airport . The Company's activities require funding of future cash flows are quite significant, then to manage the liquidity of the Company constantly monitors the flow of cash and cash equivalents to be sufficient to finance routine operations.

The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to allow the Company fulfill short term commitments and normal operation. The Company is also supervise the cash flow projections actually to evaluate the assets and financial liabilities maturing.

63. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	63. SUBSEQUENT EVENT FINANCIAL STATEMENTS DATE
Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal laporan keuangan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.	<i>There are no events after the date of the financial statements that have a significant effect on the financial statements.</i>
64. PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	64. ISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 20 February 2017.	<i>These consolidated financial statements have been authorized to be published by the Board of Directors, as the party responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on February 20, 2017.</i>

**INFORMASI TAMBAHAN /
*SUPPLEMENTARY INFORMATION***

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015

	31 Desember / December 31, 2016	31 Desember / December 31, 2015	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4.678.757.791	1.537.900.677	Cash and cash equivalents
Investasi Jangka Pendek	293.833.290	216.189.425	Short-term Investment
Piutang usaha setelah dikurangi penurunan nilai sebesar 130.714.583 & 161.908.034 2016 dan 2015			Trade receivables Net allowance for impairment losses of 130.714.583 & 161.908.034 in 2016 and 2015
Pihak berelasi	124.259.409	117.654.591	Related parties
Pihak ketiga	234.636.567	397.603.396	Third parties
Piutang lain-lain	398.205.969	396.819.062	Other receivables
P e r s e d i a a n	6.399.594	6.810.677	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	36.940.674	5.864.374	Advances and Prepaid expense
Pendapatan yang masih harus diterima	152.527.787	122.012.942	Accrued income
Pajak dibayar dimuka	26.917.170	117.233.457	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar	5.952.478.251	2.918.088.601	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Piutang jangka panjang	699.888	-	Long term receivables
Uang muka dan biaya dibayar di muka	78.216.838		Advances and Prepaid expense
Investasi Jangka Panjang	589.967.435	609.577.216	Long Term Investments
Properti Investasi (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 50.040.833 dan 35.695.966 untuk 2016 dan 2015)			Investment properties (Net of accumulated depreciation of 50.040.833 and 35.695.966 in 2016 and 2015)
	200.785.384	149.844.910	
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 4.743.212.115 & 4.031.826.668 untuk 2016 dan 2015)	11.547.216.623	11.594.359.657	Fixed Assets (Net of accumulated depreciation of 4.743.212.115 & 4.031.826.668 in 2016 and 2015)
Aset dalam penyelesaian	4.898.865.947	1.143.193.652	Assets under construction
Aset tidak berwujud	42.622.520	43.597.892	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	-	-	Other Assets
Jumlah Sset Tidak Lancar	17.358.374.635	13.540.573.327	Total of Non Current Assets
JUMLAH ASET	23.310.852.886	16.458.661.928	TOTAL ASSETS

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015

	31 Desember / December 31, 2016	31 Desember / December 31, 2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Biaya yang masih harus dibayar	836.521.831	523.789.214	<i>Accrued expenses</i>
Utang usaha			<i>Trade payables</i>
Pihak ketiga	1.493.293.603	689.754.125	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	29.707.127	33.243.903	<i>Related parties</i>
Utang non usaha			<i>Trade payables</i>
Pihak ketiga	14.033.523	13.725.162	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	-	-	<i>Related parties</i>
Pendapatan diterima dimuka	83.582.876	86.508.506	<i>Unearned revenue</i>
Utang pajak	91.159.848	155.360.069	<i>Tax payables</i>
Bagian lancar dari utang jangka panjang jatuh tempo	644.220.417	512.753.026	<i>Current maturities of long term loan</i>
Liabilitas jangka pendek lainnya	486.288.059	506.876.614	<i>Other current liabilities</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.678.807.284	2.522.010.619	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang (setelah dikurangi utang jatuh tempo)	4.243.683.309	2.443.450.564	<i>Long term loan - net (less current portions)</i>
Utang Obligasi	2.991.309.839	-	<i>Obligation</i>
Utang jangka panjang lainnya	166.966.216	158.897.604	<i>Other non - current liabilities</i>
Liabilitas imbalan paska kerja	325.789.949	344.752.913	<i>Post -employment benefits liabilities</i>
Kewajiban pajak tangguhan	26.261.262	18.789.260	<i>Deffered tax liability</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.754.010.575	2.965.890.341	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	11.432.817.859	5.487.900.960	Total Liabilities
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			<i>Equity attributable to equity holders of the parent entity</i>
Modal Saham			<i>Share capital</i>
Modal dasar 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.			<i>Authorized capital 12,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share</i>
Modal ditempatkan dan disetor 6.414.412 lembar saham	6.414.412.000	6.414.412.000	<i>The issued and paid-up capital 6,414,412 shares</i>
Penyertaan Modal Negara	255.096.706	-	<i>Government capital investement</i>
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya (BPYBDS)	-	255.096.706	<i>Government contribution pending determination in status (BPYBDS)</i>
Penghasilan komprehensif lain			<i>Oher Comprehensive Income</i>
- Laba yang belum direalisasi atas efek	40.144.097	24.015.711	<i>Unrealized gain on securities -</i>
- Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan paska kerja	(92.799.577)	(54.306.422)	<i>Gains (losses) on employee benefits actuarial -</i>
Pengaruh pengalihan aset tetap kenavigasian			<i>Effect of navigation fixed assets transfer</i>
- Nilai buku aset tetap kenavigasian	(269.138.292)	(269.138.292)	<i>Book value of navigation fixed assets</i>
- Akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian dari BPYBDS	408.393.524	408.393.524	<i>Accumulated depreciation of navigation assets of BPYBDS</i>
Saldo laba			<i>Retained earnings</i>
- Dicadangkan	4.023.979.240	3.393.257.976	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	1.097.947.329	799.029.765	<i>Un Appropriated -</i>
Jumlah ekuitas	11.878.035.027	10.970.760.968	Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	23.310.852.886	16.458.661.928	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015

	2016	2015	
PENDAPATAN OPERASIONAL			OPERATING INCOME
Aeronautika			Aeronautika
- Jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U)	525.538.196	472.049.655	<i>Aircraft landing, placing and storing services (PJP4U)</i>
- Jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)	2.772.510.513	2.378.795.901	<i>Aircraft passenger handling services (PJP2U)</i>
- Jasa penerbangan	-	-	<i>Air navigation services</i>
- Pemakaian aviobridge	133.823.660	128.150.565	<i>Aviobridge services</i>
- Pemakaian counter	105.762.864	104.664.080	<i>Counter services</i>
- Pemakaian BHS/HBS	74.652.793	71.576.700	<i>BHS/HBS services</i>
Pendapatan aeronautika	<u>3.612.288.026</u>	<u>3.155.236.901</u>	<i>Income of aeronautika</i>
Non aeronautika			Non aeronautika
- Pemakaian telepon, listrik, air, parkir, anjungan dan kartu pas	262.621.967	251.185.690	<i>Telephone, electricity, water, parking, galleries and entrance pass</i>
- Sewa - sewa	484.507.028	410.561.020	<i>Rentals</i>
- Konsesi	1.177.232.420	1.028.797.637	<i>Concessions</i>
- Event & Promotion	28.897.489	39.391.546	<i>Event & Promotion</i>
- Pemakaian ruang tunggu	58.456.866	28.255.060	<i>CIP Lounge</i>
- Pergudangan	47.938.261	47.468.687	<i>Warehousing</i>
- Jasa perbaikan	4.036.834	3.066.301	<i>Maintenance & Services Fee</i>
Pendapatan non aeronautika	<u>2.063.690.865</u>	<u>1.808.725.941</u>	<i>Income of aeronautika</i>
Jumlah pendapatan	<u>5.675.978.891</u>	<u>4.963.962.842</u>	Operating income
BEBAN OPERASIONAL			OPERATING EXPENSES
Beban pegawai	978.528.429	893.376.535	<i>Employee expenses</i>
Pemeliharaan	294.662.087	234.170.747	<i>Maintenance</i>
Beban pemakaian persediaan	38.734.222	34.851.929	<i>Inventory usage</i>
Utilitas	315.076.139	307.903.710	<i>Utilities</i>
Sewa	130.713.753	119.009.651	<i>Leases</i>
Umum dan administrasi	668.740.087	587.491.049	<i>General and administration expenses</i>
Pajak	200.822.213	207.669.690	<i>Taxes expenses</i>
Asuransi	15.639.961	14.775.206	<i>Insurance</i>
Low value aset	16.199.601	7.290.337	<i>Low value asset</i>
Penyusutan dan amortisasi	739.376.998	692.416.977	<i>Depreciation and amortizations</i>
Imbalan paska kerja	76.311.121	198.691.817	<i>Employee benefit</i>
Beban pelayanan penumpang	660.451.328	427.324.874	<i>Passenger services expenses</i>
Jumlah beban operasional	<u>4.135.255.939</u>	<u>3.724.972.522</u>	Total operating expenses
Laba operasional	<u>1.540.722.952</u>	<u>1.238.990.320</u>	Operating income
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			NON OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non operasional	192.328.847	322.551.620	<i>Non operating income</i>
Beban non operasional	309.590.513	516.558.716	<i>Non operating expenses</i>
Jumlah pendapatan (beban) operasional	<u>(117.261.666)</u>	<u>(194.007.096)</u>	Total non operating income (expenses)
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan	<u>1.423.461.286</u>	<u>1.044.983.224</u>	Income before tax
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	318.041.954	270.421.864	<i>Current tax</i>
Manfaat/beban pajak tangguhan	7.472.003	(24.468.405)	<i>Deferred tax</i>
Total pajak penghasilan	<u>325.513.957</u>	<u>245.953.459</u>	Total income taxes
Laba bersih tahun berjalan	<u>1.097.947.329</u>	<u>799.029.765</u>	Net income
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Laba (rugi) belum terealisasi investasi efek	16.128.386	(20.815.886)	<i>Unrealized gain (loss) on securities investment</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan paska kerja	(38.493.155)	(99.038.879)	<i>Remeasurement gains (losses) on post employment benefits liability</i>
Jumlah pendapatan komprehensif lain	<u>(22.364.769)</u>	<u>(119.854.765)</u>	<i>Total other comprehensive income</i>
Laba komprehensif tahun berjalan	<u>1.075.582.560</u>	<u>679.175.000</u>	Comprehensive income for the year

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 And for the year ended December 31, 2016 and 2015
 (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan	Modal saham / Capital Stocks	Penyertaan modal Pemerintah / Government capital investment	BPYBDS / Government contribution pending determination in status	Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek/Unrealized gain (loss) on marketable securities	Laba (rugi) aktuarial imbaan kerja / Gain (loss) actuarial post retirement benefits	Pengaruh pengalihan aset kenavigasian / Effect of the transfer of navigation fixed assets	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah / Total	Description
							Telah ditentukan penggunaannya / Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/Un Appropriated		
Saldo per 31 Desember 2014	3.488.245.000	2.926.166.059	255.096.706	44.831.597	44.732.457	139.255.232	2.619.051.835	978.499.416	10.495.878.302	Balance as of December 31, 2014
Deviden	-	-	-	-	-	-	-	(185.720.304)	(185.720.304)	Dividend
PKBL / PUKK	-	-	-	-	-	-	(18.572.030)	-	(18.572.030)	PKBL / PUKK
Cadangan	-	-	-	-	-	-	742.881.216	(742.881.216)	-	Appropriated
Penyertaan modal Pemerintah	2.926.167.000	(2.926.166.059)	-	-	-	-	(941)	-	-	Government capital investment
BPYBDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transfer of fixed assets - BPYBDS
Penyesuaian Laba tahun lalu	-	-	-	-	-	-	49.897.896	(49.897.896)	-	Retained earnings adjustment
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	799.029.765	799.029.765	Other comprehensive income
Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek	-	-	-	(20.815.886)	(99.038.879)	-	-	-	(119.854.765)	Unrealized gain (loss) securities investment
Saldo per 31 Desember 2015	6.414.412.000	-	255.096.706	24.015.711	(54.306.422)	139.255.232	3.393.257.976	799.029.765	10.970.760.968	Balance as of December 31, 2015
Deviden	-	-	-	-	-	-	-	(168.308.500)	(168.308.500)	Dividend
PKBL / PUKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Corporate social responsibility program
Cadangan	-	-	-	-	-	-	630.721.264	(630.721.264)	-	Appropriated
Penyertaan modal Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Government capital investment
Penyesuaian Laba tahun lalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Retained earnings adjustment
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	1.097.947.329	1.097.947.329	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek	-	-	-	16.128.386	(38.493.155)	-	-	-	(22.364.769)	Unrealized gain (loss) securities investment
Saldo per 31 Desember 2016	6.414.412.000	-	255.096.706	40.144.097	(92.799.577)	139.255.232	4.023.979.240	1.097.947.329	11.878.035.027	Balance as of Desember 31, 2016

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - ENTITAS INDUK
STATEMENT OF CASH FLOW

For the year ended december 31, 2016 and 2015
 (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember / December 31, 2016	31 Desember / December 31, 2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan tunai	2.821.472.857	2.287.231.399	Cash received from cash sales
Penerimaan dari penjualan kredit	2.916.865.950	2.170.018.995	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	<u>(3.327.917.117)</u>	<u>(3.253.884.140)</u>	Cash payment to suppliers and employees
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	2.410.421.690	1.203.366.254	Net cash from receipt and payment
Pembayaran pajak	<u>(615.352.874)</u>	<u>(452.559.996)</u>	Tax payment
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>1.795.068.816</u>	<u>750.806.258</u>	Net cash provided (by) from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari (Pengeluaran untuk) investasi jangka pendek	(165.016.731)	135.301.886	Received from (payment for) short term investemnts
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) investasi jangka panjang	-	(113.454.661)	Received from (payment for) long term investemnts
Penambahan aset tetap	(3.466.639.386)	(1.392.953.039)	Addition in fixed assets
Penambahan aset lain lain	44.777.732	110.095.077	Addition in other assets
Penerimaan bunga deposito dan jasa giro	69.516.872	46.348.422	Interest from deposits and checking accounts
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>(3.517.361.513)</u>	<u>(1.214.662.315)</u>	Net cash provided (by) from investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman jangka panjang	2.043.968.269	849.191.216	Proceed on long term loan
Penerimaan dana obligasi	3.000.000.000	-	Bonds and Sukuk Ijarah
Pembayaran deviden	(168.308.501)	(185.720.304)	Dividend payment
Pembayaran PKBL	-	(16.961.380)	CSR Program
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>4.875.659.768</u>	<u>646.509.532</u>	Net cash provided (by) from financing activities
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	3.153.367.071	182.653.475	Increase (decrease) of cash and cash equivalent
Pengaruh selisih kurs	(12.509.957)	145.587.328	Effect of foreign exchange rate
Kas dan Setara Kas pada awal periode	1.537.900.677	1.209.659.874	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>4.678.757.791</u>	<u>1.537.900.677</u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR